GUBERNUR JAMBI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

PROVINSI JAMBI TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renca Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jambi tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tatacara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 16);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 6);

30. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 10);
31. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2022.

Pasal 1

(1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2022 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

(2) RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN;

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;

BAB III : RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN;

BAB IV : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2022;

BAB V : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA;

BAB VI : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH;

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH; dan

BAB VIII : PENUTUP.

Pasal 2

RKPD Tahun 2022 menjadi pedoman bagi Pemerintah Provinsi Jambi dalam menyusun :

a. Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2022; dan
b. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah Tahun 2022.

Pasal 3

Uraian lebih lanjut mengenai RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 8 Juli 2021

GUBERNUR JAMBI,

dto

H. AL HARIS

Diundangkan di Jambi

pada tanggal 8 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI

dto

H. SUDIRMAN

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2021 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinta
KEPALA BIRO HUKUM,

M. ALI ZAINI, SH, MH

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2022

NARASI
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAMBI
TAHUN 2022

DAFTAR ISI

Daftar Isi ..... **i**
Daftar Tabel ..... **iii**
Daftar Gambar ..... **vii**
BAB I PENDAHULUAN **1-1**
1.1 Latar Belakang 1-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan 1-2
1.3 Hubungan Antar Dokumen 1-5
1.4 Maksud dan Tujuan 1-6
1.5 Sistematika Dokumen RKPD 1-7
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH **2-1**
2.1 Kondisi Umum Daerah 2-1
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi 2-1
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2-15
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum 2-40
2.1.4 Aspek Daya Saing 2-97
2.1.5 Fokus Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur 2-101
2.1.6 Kondisi Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2-111
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Dengan Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD 2-122
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah 2-322
2.3.1 Permasalahan daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran pembangunan Daerah 2-322
2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah 2-323
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH **3-1**
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 3-1
3.1.1 Kondisi Perekonomian Global 3-1
3.1.2 Kondisi Perekonomian Nasional dan Daerah 3-3
3.1.3 Sasaran dan Arah Kebijakan Perekonomian Nasional dan Daerah. 3-11
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah 3-19
3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan 3-20

3.2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah 3-25
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2022 4-1
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah 4-1
4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2022 4-19
4.3 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Bidang Urusan 4-51
BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA 5-1
5.1 Gambaran Umum Kondisi Kabupaten/Kota 5-2
5.2 Sasaran dan Arah Pengembangan Wilayah 5-9
BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH 6-1
6.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 6-1
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 7-1
7.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama 7-2
7.2 Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 7-2
BAB VIII PENUTUP 8-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2-1 Luas Wilayah Provinsi Jambi 2-2
Tabel 2-2 Klasifikasi Ketinggian di Provinsi Jambi 2-3
Tabel 2-3 Luas Daerah Pengaliran dan Debit dari Beberapa Sungai Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi 2-6
Tabel 2-4 Rata-rata Suhu Udara, Kelembaban, Tekanan Udara, Kecepatan Angin, Curah Hujan dan Penyinaran Matahari Menurut Stasiun, 2020 2-8
Tabel 2-5 Penggunaan Lahan di Provinsi Jambi..... 2-9
Tabel 2-6 Luas Kawasan Hutan di Provinsi Jambi berdasarkan Fungsi Tahun 2010 2-10
Tabel 2-7 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2016 - 2020..... 2-11
Tabel 2-8 Jumlah Kematian Ibu di Provinsi Jambi Tahun 2016-2019 2-29
Tabel 2-9 Perkembangan Jumlah Grup Kesenian Dan Gedung Kesenian 2-37
Tabel 2-10 Pemilikan Jumlah Fasilitas Olahraga Menurut Cabang Olahraga di Provinsi Jambi Tahun 2018- 2020 2-39
Tabel 2-11 Perkembangan Olahraga Provinsi Jambi Tahun 2016-2019 2-39
Tabel 2-12 Perkembangan Rasio Tenaga Kesehatan di Provinsi Jambi Tahun 2016-2020 2-43
Tabel 2-13 Jumlah Guru, Murid, dan Rasio Guru terhadap Murid SLTA/MA Provinsi Jambi Tahun 2016-2020 2-44
Tabel 2-14 Jumlah Guru, Murid dan Rasio Guru terhadap Murid SMK di Provinsi Jambi Tahun 2016-2020 2-45
Tabel 2-15 Potensi Konflik di Provinsi Jambi Tahu 2019 2-48
Tabel 2-16 Jumlah Desa Tangguh Bencana di Provinsi Jambi Tahun 2016-2019 2-52
Tabel 2-17 Data Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Jambi Tahun 2019 (Kasus) 2-63
Tabel 2-18 Perkembangan Kondisi Ketersediaan Energi Berdasarkan NBM Provinsi Jambi Tahun 2016-2019..... 2-63
Tabel 2-19 Kondisi Ketersediaan Energi Provinsi Jambi Tahun 2019..... 2-64
Tabel 2-20 Data lokasi Sampling Air Sungai Lintas Kabupaten/ Kota Provinsi Jambi 2-68
Tabel 2-21 Jumlah Anggota Perpustakaan Provinsi Jambi Tahun 2016-2019 2-82
Tabel 2-22 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Provinsi Jambi Tahun 2015-2019 2-83
Tabel 2-23 Jumlah Koleksi Buku Perpustakaan di Provinsi Jambi Tahun 2016-2020 2-83
Tabel 2-24 Capaian urusan kearsipan di Provinsi Jambi 2-84

Tabel 2-25 Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Provinsi Jambi Tahun 2015- 2019 2-87
Tabel 2-26 Kunjungan Wisatawan Nusantara ke Provinsi Jambi Tahun 2015- 2019 2-87
Tabel 2-27 Jumlah Daya Tarik Wisata di Provinsi Jambi Tahun 2015 - 2019 2-88
Tabel 2-28 Potensi Geothermal Provinsi Jambi 2-92
Tabel 2-29 Lokasi Potensi Air terjun di Provinsi Jambi 2-92
Tabel 2-30 Data Potensi Energi Potensial Air di Kabupaten Kerinci 2-93
Tabel 2-31 Sertifikasi hak Atas Tanah UKM 2-97
Tabel 2-32 persentase Pengeluaran per Kapita Provinsi Jambi per Kelompok Pengeluaran 2-98
Tabel 2-33 Jenis dan Jumlah Bank di Provinsi Jambi Tahun 2016-2019 2-106
Tabel 2-34 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan sampai dengan tahun berjalan 2-123
Tabel 3-1 Pertumbuhan PDB Sisi Lapangan Usaha Tahun 2016-2020 (%). 3-4
Tabel 3-2 Pertumbuhan PDB Sisi pengeluaran Tahun 2016-2020 (%) 3-5
Tabel 3-3 Pertumbuhan PDRB Provinsi Jambi Sisi Produksi Tahun 2016-2020 (%)..... 3-6
Tabel 3-4 Struktur PDRB Provinsi Jambi Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (%) Tahun 2016-2020..... 3-7
Tabel 3-5 Pertumbuhan PDRB Sisi Permintaan Tahun 2016-2020 (%) 3-8
Tabel 3-6 Nilai PDRB dan Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku di Provinsi Jambi Tahun 2016 – 2020 3-9
Tabel 3-7 Nilai PDRB dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 di Provinsi Jambi Tahun 2016 – 2020 3-10
Tabel 3-8 Sasaran Ekonomi RKP 2022 3-12
Tabel 3-9 Sasaran Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi Tahun 2022 .. 3-16
Tabel 3-10 Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016-2020 3-22
Tabel 3-11 Realisasi Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016-2020..... 3-24
Tabel 3-12 Proyeksi Pendapatan Tahun 2022 3-25
Tabel 3-13 Proyeksi Belanja Tahun 2022..... 3-28
Tabel 3-14 Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2017-2020 dan Proyeksi Tahun 2021-2022 3-30
Tabel 4-1 Persandingan Sasaran Pokok RPJPD dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022..... 4-4
Tabel 4-2 Sasaran Ekonomi Makro Indonesia Tahun 2022 yang Menjadi Acuan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembangunan . 4-19
Tabel 4-3 Sasaran Pembangunan Provinsi Jambi yang akan dicapai pada tahun 2022 4-19

Tabel 4-4 Sinkronisasi antara Prioritas Pembangunan Nasional dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2022 4-20
Tabel 4-5 Keterkaitan Prioritas Nasional dengan Prioritas I Provinsi Jambi Tahun 2022 4-28
Tabel 4-6 Keterkaitan Prioritas Nasional dengan Prioritas II Provinsi Jambi Tahun 2022 4-35
Tabel 4-7 Keterkaitan Prioritas Nasional dengan Prioritas III Provinsi Jambi Tahun 2022 4-41
Tabel 4-8 Keterkaitan Prioritas Nasional dengan Prioritas IV Provinsi Jambi Tahun 2022 4-43
Tabel 4-9 Keterkaitan Prioritas Nasional dengan Prioritas V Provinsi Jambi Tahun 2022 4-46
Tabel 4-10 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Bidang Urusan Tahun 2022 4-51
Tabel 5-1 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Tahun 2016-2020 5-2
Tabel 5-2 Perkembangan Kontribusi Kabupaten/Kota terhadap PDRB Provinsi Jambi Tahun 2016-2020 5-4
Tabel 5-3 Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2016-2020 5-4
Tabel 5-4 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2016-2020 5-6
Tabel 5-5 Perkembangan Gini Rasio Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2015-2019 5-7
Tabel 5-6 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2016-2020 5-8
Tabel 5-7 Arahan Target Pembangunan untuk Kabupaten Kerinci Tahun 2022 5-13
Tabel 5-8 Arahan Target Pembangunan untuk Kabupaten Merangin Tahun 2022 5-13
Tabel 5-9 Arahan Target Pembangunan untuk Kabupaten Sarolangun Tahun 2022 5-14
Tabel 5-10 Arahan Target Pembangunan untuk Kabupaten Batang Hari Tahun 2022 5-14
Tabel 5-11 Arahan Target Pembangunan untuk Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2022 5-15
Tabel 5-12 Arahan Target Pembangunan untuk Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022 5-16
Tabel 5-13 Arahan Target Pembangunan untuk Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 5-16
Tabel 5-14 Arahan Target Pembangunan untuk Kabupaten Tebo Tahun 2022 5-17

Tabel 5-15 Arahan Target Pembangunan untuk Kabupaten Bungo Tahun 2022 5-17
Tabel 5-16 Arahan Target Pembangunan untuk Kota Jambi Tahun 2022 .. 5-18
Tabel 5-17 Arahan Target Pembangunan untuk Kota Sungai Penuh Tahun 2022 5-18
Tabel 6-1 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022 6-2
Tabel 7-1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Provinsi Jambi Tahun 2022 7-2
Tabel 7-2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Provinsi Jambi terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2022 7-3

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1-1 Bagan Alir Tahapan dan Tata Cara Penyusunan RKPD Provinsi Jambi 1-2
Gambar 1-2 Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan 1-5
Gambar 2-1 Peta Wilayah Provinsi Jambi 2-1
Gambar 2-2 Diagram Persentase Luas Wilayah Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Jambi 2-2
Gambar 2-3 Persentase Kepadatan Penduduk Provinsi Jambi Per Kabupaten/Kota 2-11
Gambar 2-4 Piramida Penduduk Provinsi Jambi Tahun 2020 2-12
Gambar 2-5 Peta Rawan Bencana Provinsi Jambi 2-15
Gambar 2-6 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi Tahun 2016-2020 ... 2-16
Gambar 2-7 Perkembangan PDRB ADHB dan PDRB ADHK Provinsi Jambi Tahun 2016 – 2020 (dalam milyar rupiah) 2-17
Gambar 2-8 Laju Perkembangan Sektor Primer PDRB Kabupaten/Kota se- Provinsi Jambi Tahun 2016-2019 2-18
Gambar 2-9 Laju Perkembangan Sektor Sekunder PDRB Kabupaten/ Kota se- Provinsi Jambi Tahun 2016-2019 2-18
Gambar 2-10 Laju Perkembangan Sektor Tersier PDRB Kabupaten/ Kota se- Provinsi Jambi Tahun 2016-2019 2-19
Gambar 2-11 Tingkat Inflasi Provinsi Jambi Tahun 2016 – 2020 2-20
Gambar 2-12 PDRB Perkapita ADHB dan ADHK 2010 Provinsi Jambi Tahun 2016 -2020 (dalam juta rupiah) 2-20
Gambar 2-13 Indeks Gini Nasional dan Provinsi Jambi 2016-2020 2-21
Gambar 2-14 Koefisien Gini Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi Tahun 2016-2019 2-22
Gambar 2-15 Indeks Williamson Provinsi Jambi Tahun 2016-2020 2-23
Gambar 2-16 Jumlah Penduduk Miskin,dan Persentase Penduduk Miskin, Provinsi Jambi Tahun 2016 – 2020 2-25
Gambar 2-17 Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Provinsi Jambi Tahun 2016-2020 ... 2-26
Gambar 2-18 Usia Harapan Hidup di Provinsi Jambi dibanding Nasional Tahun 2016-2020 2-27
Gambar 2-19 Penyebab kematian Ibu di Provinsi Jambi Tahun 2019 2-30
Gambar 2-20 Harapan Lama Sekolah Provinsi Jambi dibanding nasional tahun 2016-2020 2-32
Gambar 2-21 Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Jambi dibanding nasional tahun 2016-2020 2-33
Gambar 2-22 Angka Partisipasi Kasar SD, SMP dan SMA Provinsi Jambi Tahun 2016-2020 2-34
Gambar 2-23 Angka Partisipasi Murni untuk jenjang SD, SMP dan SMA Provinsi Jambi Tahun 2016-2020 2-35

Gambar 2-24 Jumlah Siswa Putus Sekolah Tahun 2016-2020 2-37
Gambar 2-25 Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu di Provinsi Jambi Tahun 2016-2020 2-40
Gambar 2-26 Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk di Provinsi Jambi Tahun 2016-2020 2-41
Gambar 2-27 Perkembangan Rasio Dokter di Provinsi Jambi tahun 2016-2020..... 2-41
Gambar 2-28 Rasio Guru terhadap Murid SLTA/MA Provinsi Jambi Tahun 2016-2020 2-44
Gambar 2-29 Rasio Guru terhadap Murid SMK Provinsi Jambi Tahun 2016-2020..... 2-45
Gambar 2-30 Perkembangan Aspek IDI Provinsi Jambi 2-49
Gambar 2-31 Unjuk rasa yang terjadi tahun 2015-2019..... 2-51
Gambar 2-32 Jalan dalam kondisi mantap Provinsi Jambi Tahun 2016-2020..... 2-53
Gambar 2-33 Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik di Provinsi Jambi Tahun 2015-2019 2-54
Gambar 2-34 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Hunian Layak di Provinsi Jambi 2016-2019 2-55
Gambar 2-35 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak di Provinsi Jambi Tahun 2016-2019..... 2-57
Gambar 2-36 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Jambi Tahun 2016-2020..... 2-58
Gambar 2-37 Jumlah Angkatan Kerja Provinsi Jambi Tahun 2016-2020... 2-58
Gambar 2-38 Persentase Partisipasi Perempuan Dalam Legislatif di Provinsi Jambi 2016-2019..... 2-62
Gambar 2-39 Perkembangan Skor PPH Provinsi Jambi Tahun 2016 - 2019..... 2-64
Gambar 2-40 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dibanding Nasional Tahun 2016-2019 2-65
Gambar 2-41 Sebaran Hotspot di Provinsi Jambi Tahun 2019..... 2-67
Gambar 2-42 Perkembangan Jumlah Hot spot di Provinsi Jambi..... 2-67
Gambar 2-43 Rehabilitasi lahan dan hutan yang dilakukan tahun 2016-2019..... 2-67
Gambar 2-44 Perkembangan capaian urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil Provinsi Jambi Tahun 2015-2019 2-69
Gambar 2-45 Perkembangan Posyandu Aktif di Provinsi Jambi Tahun 2015-2019..... 2-70
Gambar 2-46 Angka Total Fertility Rate (TFR) Provinsi Jambi 2-72
Gambar 2-47 Jumlah arus penumpang pada Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) di Provinsi Jambi..... 2-72

Gambar 2-48 Perkembangan jumlah Arus Penumpang melalui Bandara Sultan Thaha 2-73
Gambar 2-49 Jumlah Desa/Kelurahan yang Menerima Sinyal Internet Telepon Seluler di Provinsi Jambi Tahun 2019-2020..... 2-75
Gambar 2-50 Perkembangan Koperasi di Provinsi Jambi 2-76
Gambar 2-51 Perkembangan UMKM dan serapan tenaga kerja pada UMKM di Provinsi Jambi Tahun 2015-2019 2-77
Gambar 2-52 Target dan realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (Rp. Triliun) tahun 2016-2019..... 2-78
Gambar 2-53 target dan realisasi Penanaman Modal Luar Negeri (US$. juta) tahun 2016-2019..... 2-78
Gambar 2-54 Jumlah Pengunjung Museum Siginjai Provinsi Jambi Tahun 2015-2019..... 2-82
Gambar 2-55 Perkembangan produksi perikanan budidaya (ton) di Provinsi Jambi..... 2-85
Gambar 2-56 Perkembangan produksi perikanan tangkap di Provinsi Jambi (ton)..... 2-85
Gambar 2-57 Perkembangan angka konsumsi ikan perkapita masyarakat Provinsi Jambi (kg/perkapita/tahun) 2-86
Gambar 2-58 Produktifitas Tanaman Padi, Jagung dan Kedelai (Kw/Ha)di Provinsi Jambi Tahun 2015-2019 2-89
Gambar 2-59 Perkembangan produktivitas komoditi perkebunan Provinsi Jambi (kg/ha/tahun) Tahun 2015 -2019 2-90
Gambar 2-60 Perkembangan Nilai Ekspor Provinsi Jambi Tahun 2015-2019 (US$) 2-94
Gambar 2-61 Perkembangan Nilai Impor Provinsi Jambi Tahun 2015-2019 (US$) 2-95
Gambar 2-62 Kontribusi Sektor industri pengolahan terhadap PDRB Provinsi Jambi..... 2-96
Gambar 2-63 Pengeluaran Perkapita per tahun Provinsi Jambi dan Kabupaten/ Kota se-Provinsi Jambi (ribu rupiah) Tahun 2015-2019..... 2-97
Gambar 2-64 Nilai Tukar Petani Provinsi Jambi Tahun 2015-2019 2-100
Gambar 2-65 Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio) Provinsi Jambi Tahun 2015-2019 2-100
Gambar 2-66 Persentase jalan Provinsi Jambi dalam kondisi baik Tahun 2015 – 2019 2-101
Gambar 2-67 Jumlah arus penumpang pada Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) di Provinsi Jambi..... 2-102
Gambar 2-68 Lalu lintas orang melalui angkutan kapal laut pada Dermaga di Provinsi Jambi Tahun 2015-2018..... 2-103

Gambar 2-69 Perkembangan jumlah Arus Penumpang melalui Bandara Sultan Thaha 2-103
Gambar 2-70 Penggunaan lahan Provinsi Jambi..... 2-104
Gambar 2-71 Luas kawasan budidaya berdasarkan arahan pola ruang Provinsi Jambi..... 2-105
Gambar 2-72 Jumlah Rumah Makan di Provinsi Jambi Tahun 2015-2019..... 2-107
Gambar 2-73 Perkembangan Hotel di Provinsi Jambi Tahun 2015-2019 . 2-107
Gambar 2-74 Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan 2-108
Gambar 2-75 Rasio Elektrifikasi Provinsi Jambi dibandingkan dengan nasional 2-109
Gambar 2-76 Jumlah kejahatan dan tingkat resiko terkena kejahatan di Provinsi Jambi Tahun 2015-2018 2-110
Gambar 3-1 Pertumbuhan ekonomi kuartalan global (persen yoy) 3-2
Gambar 3-2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi (%) Tahun 2015-2020..... 3-5
Gambar 5-1 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/ Kota se-Provinsi Jambi dibanding Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi dan Nasional Tahun 2020 5-3
Gambar 5-2 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/ Kota se-Provinsi Jambi dibanding Provinsi Jambi dan Nasional Tahun 2020 ... 5-5
Gambar 5-3 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/ Kota se-Provinsi Jambi dibanding Provinsi Jambi dan Nasional Tahun 2020 ... 5-6
Gambar 5-4 Rasio Gini Kabupaten/ Kota se-Provinsi Jambi dibanding Provinsi Jambi dan Nasional Tahun 2020 5-8
Gambar 5-5 IPM Kabupaten/ Kota se-Provinsi Jambi dibanding Provinsi Jambi dan Nasional Tahun 2020..... 5-9

BAB I
PENDAHULUAN

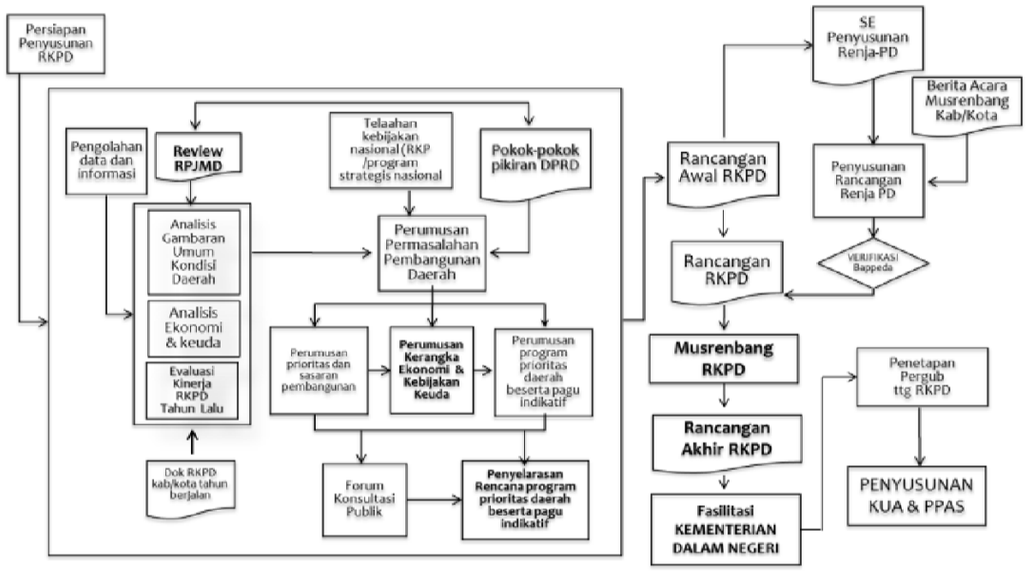
1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan secara terpadu sesuai dengan kewenangannya. Salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang wajib disusun tersebut adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Dengan adanya dokumen RKPD tersebut, arah kebijakan pembangunan dapat dicapai lebih terarah untuk mencapai visi dan misi pembangunan Kepala Daerah melalui perwujudan sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2022. Selain itu, dokumen RKPD juga dijadikan landasan operasional bagi seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022, pedoman bagi kabupaten/kota di Provinsi Jambi dalam menyusun RKPD Tahun 2022, pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022, sebagai alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan serta sebagai petunjuk operasional bagi penyelenggaraan pembangunan Provinsi Jambi pada tahun anggaran 2022.

Penyusunan RKPD Provinsi Jambi Tahun 2022 dari sisi proses dilakukan dengan menerapkan pendekatan politik, teknokratik, *top-down* dan *bottom up* serta partisipatif melalui tahapan yaitu : 1) Persiapan RKPD;

2) Penyusunan Rancangan Awal RKPD; 3) Penyusunan Rancangan RKPD; 4) Pelaksanaan Musrenbang; 5) Perumusan Rancangan Akhir RKPD; dan 6) Penetapan RKPD. Proses penyusunan RKPD tersebut dapat dilihat pada bagan alir berikut ini.



Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017, diolah

Gambar 1-1 Bagan Alir Tahapan dan Tata Cara Penyusunan RKPD Provinsi Jambi

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RKPD Provinsi Jambi Tahun 2022 didasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yaitu:

1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swantantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 menjadi Undang-undang;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025;

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tatacara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

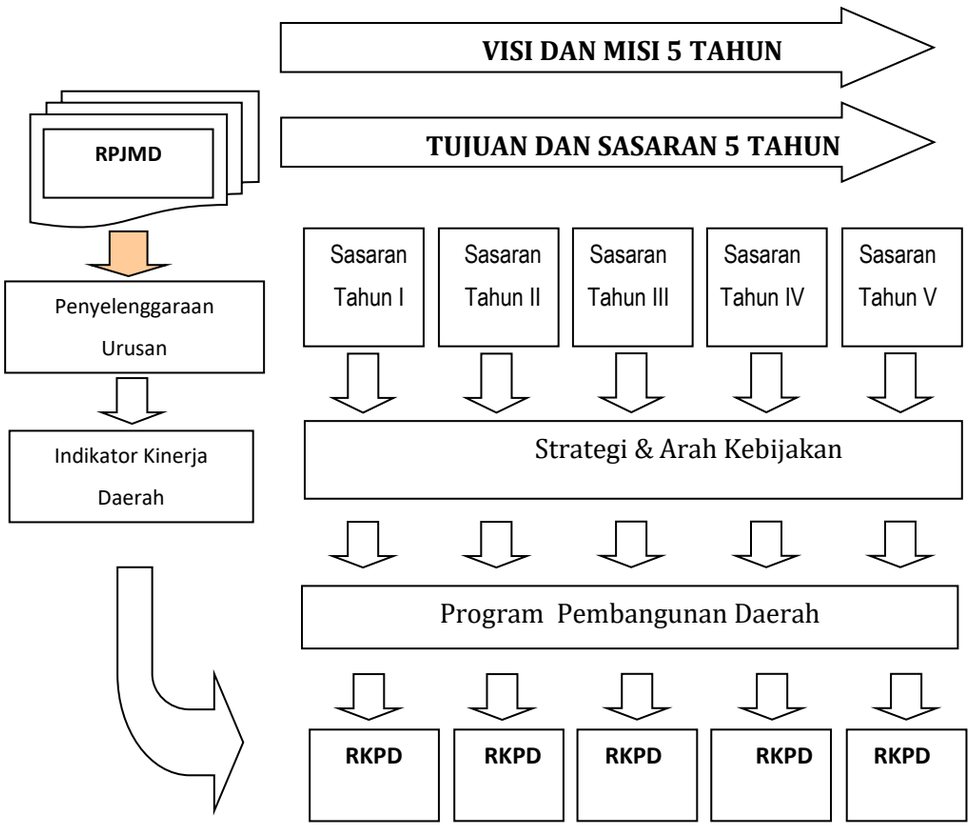
22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
32. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah;
33. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2013-2033;
34. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2005-2025;

35. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi;

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dan merupakan satu kesatuan proses pembangunan dalam skema pembangunan dalam jangka yang lebih panjang. Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang telah tertuang dalam berbagai dokumen perencanaan yaitu RPJPD, RPJMD, Renstra, RKPD dan Renja Perangkat Daerah.



Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017, diolah

Gambar 1-2 Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan

Terkait RKPD Provinsi Jambi Tahun 2022 ini, karena merupakan RKPD transisi dimana RPJMD periode sebelumnya yaitu 2016-2021 telah berakhir namun RPJMD Tahun 2021-2026 belum disusun dan ditetapkan karena proses pemilihan kepala daerah yang belum selesai, maka sesuai dengan Pasal 147 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka penyusunannya berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD serta arah kebijakan dan isu strategis RKP, serta mengacu pada RPJMN untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah provinsi dengan pembangunan nasional.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RKPD Provinsi Jambi Tahun 2022 sebagai pedoman untuk menentukan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2022 dan mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2022. Sedangkan penyusunan RKPD Provinsi Jambi Tahun 2022 bertujuan untuk :

1. Menjadi acuan bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022;
2. Menjadi pedoman dalam menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022 serta sebagai dasar penyusunan rancangan APBD Tahun Anggaran 2022;
3. Menjadi pedoman penyusunan RKPD Tahun 2022 bagi Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi;
4. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

RKPD Provinsi Jambi Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan

   Berisi gambaran umum penyusunan RKPD yang meliputi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen RKPD dengan dokumen rencana pembangunan daerah lainnya, maksud dan tujuan penyusunan RKPD serta sistematika dokumen RKPD agar tercapai koherensi substansi pada bab-bab berikutnya.

2. Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah

   Bab ini menguraikan tentang gambaran umum kondisi daerah, aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing daerah, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD serta permasalahan pembangunan daerah.

3. Bab III Kerangka Ekonomi Daerah Dan Keuangan Daerah

   Bab ini menerangkan tentang kondisi ekonomi Tahun 2020 dan perkiraan tahun berjalan (Tahun 2021) yang tertuang dalam arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah.

4. Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

   Bab ini mengemukakan secara eksplisit tentang tujuan dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2022 dan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2020 dan target yang direncanakan dalam RPJMD untuk tahun 2022, sehingga dapat digambarkan permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis dengan mempertimbangkan kerangka ekonomi daerah dan kemampuan pendanaan dalam Tahun 2022, yang terdiri atas tujuan dan sasaran pembangunan dan prioritas pembangunan daerah.

5. Bab V Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota

   Bab ini mengemukakan tentang arahan kebijakan pembangunan kabupaten/kota yang ditetapkan oleh provinsi, yang nantinya akan menjadi pedoman bagi daerah kabupaten/kota dalam menyusun RKPD.

6. Bab VI Rencana Kerja Dan Pendanaan Daerah

Dalam bab ini mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

7. Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

   Bab ini menguraikan penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

8. Bab VIII Penutup

   Dalam bab ini menguraikan prinsip dan kaidah pelaksanaan RKPD Tahun 2022.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

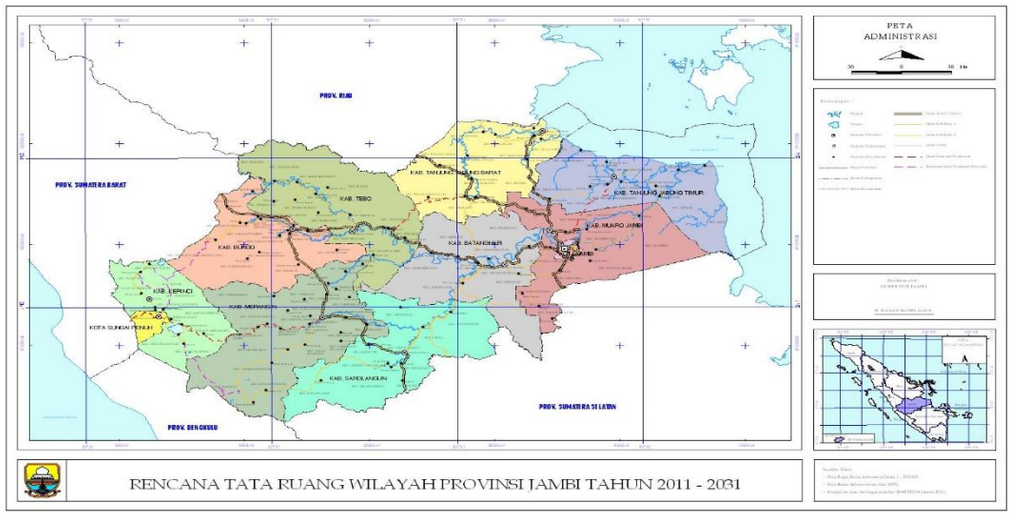
2.1 Kondisi Umum Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1 Kondisi Geografi Daerah

Secara astronomis, Provinsi Jambi terletak diantara 0º 74'– 2⁰ 46,16' Lintang Selatan dan 101⁰ 12' – 104⁰ 44' Bujur Timur sedangkan secara geografis Provinsi Jambi terletak pada Bagian Tengah Pulau Sumatera dan berbatasan Sebelah Selatan dengan Provinsi Sumatera Selatan, Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Berhala, Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Bengkulu dan Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Riau.

Provinsi Jambi berhadapan dengan Selat Karimata dan Selat Berhala serta berada pada Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I dan lalu lintas internasional. Posisi ini menjadikan Provinsi Jambi masuk dalam rencana pembangunan tol laut di Indonesia serta menjadi provinsi yang cukup strategis karena langsung berhadapan dengan kawasan pertumbuhan ekonomi yaitu IMS-GT (*Indonesia, Malaysia, Singapura Growth Triangle*).



Sumber : Dinas PUPR Provinsi Jambi, PK-RTRW Provinsi Jambi, 2018.

Gambar 2-1 Peta Wilayah Provinsi Jambi

Luas wilayah Provinsi Jambi tercatat 53.435,92 Km^2 yang terbagi atas luas daratan 48.989,98 Km^2 dan luas lautan 4.445,94 Km^2 serta dengan panjang garis pantai 223,025 km. Luas wilayah daratan terbesar

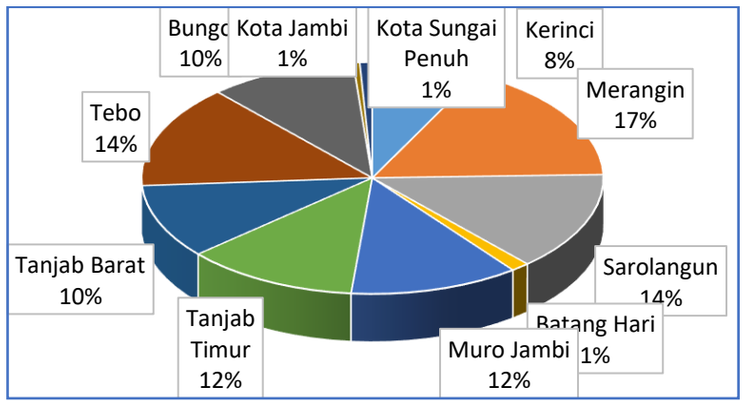
di Provinsi Jambi berada di Kabupaten Merangin sebesar 7.508 km^2 atau sebesar 15,31% dari total luas wilayah Provinsi Jambi, diikuti oleh Kabupaten Tebo dan Kabupaten Sarolangun masing-masing sebesar 6.205 km^2 dan 5.948 km^2.

Tabel 2-1 Luas Wilayah Provinsi Jambi

No	Kabupaten/Kota	Luas (Km^2)	
1	Kerinci		3.334,99
2	Merangin		7.508,23
3	Sarolangun		5.948,73
4	Bungo		4.673,16
5	Tebo		6.205,81
6	Batanghari		5.536,86
7	Muaro Jambi		5.321,67
8	Tanjung Jabung Barat	Darat	4.990,95
		Laut	384,21
9	Tanjung Jabung Timur	Darat	0,82194444
		Laut	4.061,73
10	Kota Sungai Penuh		353,76
11	Kota Jambi		172,26
Jumlah daratan			**48.989,98**
Jumlah lautan			**4.445,94**
Total			**53.435,92**

Sumber: RTRWP Jambi 2013-2033, 2013

Secara administratif, jumlah kecamatan dan desa/kelurahan di Provinsi Jambi tahun 2019 sebanyak 141 kecamatan, 1.399 desa dan 163 kelurahan, dimana jumlah kecamatan terbanyak berada di Kabupaten Merangin yang mencapai 24 kecamatan dan jumlah desa/kelurahan terbanyak berada di Kabupaten Kerinci mencapai 285 desa dan 2 kelurahan.



Sumber: RTRWP Jambi 2013-2033, 2013

Gambar 2-2 Diagram Persentase Luas Wilayah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi

Provinsi Jambi memiliki topografi wilayah yang bervariasi mulai dari ketinggian 0 m dpl di bagian timur sampai pada ketingian di atas 1.000 m dpl, ke arah barat morfologi lahannya semakin tinggi dimana di bagian barat merupakan kawasan pegunungan Bukit Barisan yang berbatasan dengan Provinsi Bengkulu dan Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian dari kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat.

Tabel 2-2 Klasifikasi Ketinggian di Provinsi Jambi

No	Topografi (meter dpl)	Luas		Wilayah/Kabupaten
		Ha	%	
1	Dataran rendah (0 – 100)	3.282.315	67	Kota Jambi, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Muaro Jambi, Merangin, Batang Hari
2	Dataran sedang (100 – 500)	832.826,26	17	Sebagian Sarolangun, Tebo, sebagian Batang Hari, Kota Sungai Penuh, Merangin, sebagian Tanjung Jabung Barat
3	Dataran tinggi (>500)	783.836,48	16	Kerinci, Kota Sungai Penuh, sebagian Merangin, sebagian Sarolangun dan sebagian Bungo
Jumlah Luas Daratan		4.898.978	100	

Sumber : Dinas PUPR Provinsi Jambi, PK-RTRW Provinsi Jambi, 2018

Pada dataran rendah didominasi oleh tanah-tanah yang penuh air dan rentan terhadap banjir pasang surut serta banyaknya sungai besar dan kecil yang melewati wilayah ini. Wilayah ini didominasi jenis tanah gley humus rendah dan orgosol yang bergambut. Daya dukung lahan terhadap pengembangan wilayah sangat rendah sehingga membutuhkan input teknologi dalam pengembangannya. Dibagian tengah didominasi jenis tanah podsolik merang kuning yang kesuburannya relatif rendah. Daya dukung lahan cukup baik terutama pada lahan kering dan sangat potensial untuk pengembangan tanaman keras dan perkebunan. Pada bagian barat didominasi dataran tinggi lahan kering yang berbukit-bukit.

Secara geomorfologi wilayah Jambi dikelompokkan menjadi 3 (tiga) satuan morfologi yaitu:

- Perbukitan terjal dengan ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut (dpl), mempunyai kelerengan antara (20^0-40^0), kawasan ini terletak di bagian barat Jambi yang membujur barat laut-tenggara, dengan puncak tertinggi Gunung Kerinci (3.805 meter).

Sebagian besar termasuk wilayah Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh dan sebagian kecil Kabupaten Merangin, Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Bungo.

- Perbukitan bergelombang, ketinggian antara (100-500) meter dengan kemiringan lereng (10^0 - 20^0). Wilayah ini terletak di bagian tengah Jambi yang merupakan wilayah sebagian Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, sebagian Kabupaten Batang Hari, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Merangin dan sebagian Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- Dataran Ketinggian antara (0-100) meter dengan kelerengan antara (0^0-10^0) wilayah ini terletak di bagian timur Jambi yang sebagian besar merupakan wilayah Kota Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Merangin dan Kabupaten Batang Hari. Di wilayah ini masih banyak terdapat rawa-rawa, di ujung timur yang menuju barat laut – tenggara merupakan dataran pantai.

Susunan batuan di wilayah Provinsi Jambi terdiri dari endapan permukaan, batuan sedimen, batuan malihan, batuan gunung api dan batuan terobosan.

a. Endapan permukaan, dikelompokkan dalam satuan endapan Alluvium, Endapan Rawa dan Endapan Undak. Endapan ini terdiri dari komponen batuan lepas berupa bongkah, kerakal, kerikil, pasir, lanau, lumpur dan lempung yang mengandung sisa tumbuhan, berumur kuarter, Resen.
b. Batuan Sedimen, berumur Permo-Karbon hingga Pliosen dengan formasi batuan dari umur tua ke muda mulai dari Mentulu (Permo-Karbon), Mengkarang (Perem), Peneta, Asai, Tabir, Rawan (Jura), Telangakar (Oligo Miosen), Seblat, Papanbetupang, Hulu Tumpang (Oligo Miosen), Kumun, Lanau, Airbenakat, Gumai, Kasiro (Oligo Miosen), Muaraenim, Lakitan (Mio-Pliosen) dan Bintunan, Pengasih (Pliosen). Formasi ini terdiri dari batupasir, batulempung, dengan sisipan batubara, batulanau, serpih, tuf, tuf pasiran, batupasir tufan, batupasir gampingan, batugamping, konglomerat polemik dan breksi.
c. Batuan malihan, terbagi atas Formasi Pengabuhan, Mentulu, Anggota Condong. Formasi Mentulu, dan Formasi Gangsal, berumur

Permo-Karbon; terdiri tuf meta, sabak, sabak berbintik, batutanduk, filit, sekis dan batupasir meta.

d. Batuan Gunung Api, berumur Perem hingga Kuarter. Satuan batuan ini terdiri dari tuf litik, lava bersusunan andesitik-basaltik, breksi gunungapi, tuf, lava bersusunan riolit, dasit dan andesit, tuf andesit, dan tuf kristal.
e. Batuan Terobosan, yang berlangsung dalam empat periode, pada Jura, Paleo Miosen dan Pliosen. Batuan ini terdiri dari batuan granodiorit, andesit, basal, diorit, dasri, riolit, granit biotit, granit horenblenda dan sienit.

Sejarah struktur daerah Provinsi Jambi meliputi kegiatan tektonik sejak Paleozoikum Akhir sampai resen. Unsur struktur utama dari batuan di daerah ini terdiri dari pelipatan dan pensesaran. Struktur regional yang terdapat di Jambi merupakan bagian dari Sesar Besar Sumatera berarah barat laut-tenggara. Disamping itu juga terdapat sesar sekunder yang memotong sesar utama tersebut. Struktur lipatan dan kekar pun banyak dijumpai dimana struktur lipatan terutama terdapat di Kabupaten Kerinci, Sarolangun, Merangin, Bungo, Tebo serta Batanghari sedangkan struktur kekar terdapat pada semua jenis batuan yang ada.

Sesar di daerah Kerinci dapat dipisahkan menjadi tiga jalur sesar yaitu Jalur Sesar Bukit Barisan, Jalur Sesar Sebelah Barat Bukit Barisan dan Jalur Sesar Sebelah Timur Bukit Barisan. Sesar daerah Sarolangun dan Merangin yang utama adalah Sesar Turun Tembesi dan Sesar Naik Tangkui. Sesar di daerah Bungo dan Tebo terlihat di hulu Sungai Pelepat yang merupakan sesar tua bagian dari Sesar Besar Sumatera.

Dilihat dari pola aliran sungai, daerah hulu pola aliran sungainya berbentuk radial terutama di Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Merangin dan Kabupaten Kerinci. Sedangkan di daerah pesisir pola alirannya berbentuk paralel. Sungai-sungai di Provinsi Jambi terutama Sungai Batanghari sangat berpengaruh pada musim hujan dan kemarau. Pada musim hujan kecenderungan air sungai menjadi banjir, sebaliknya pada musim kemarau kecenderungan air sungai menjadi dangkal dan fluktuasinya dapat mencapai 7 (tujuh) meter. Dari kondisi ini sangat berpengaruh pula pada permukiman penduduk yang tinggal di sepanjang

Wilayah Sungai Batang Hari baik sebagai tempat tinggal maupun sebagai tempat usaha tani.

Berdasarkan aliran sungai hampir semua wilayah Provinsi Jambi dilalui oleh Sungai Batanghari dengan orde-ordenya sehingga sebagian besar wilayah di Provinsi Jambi berada dalam DAS Batanghari yang mencakup 6 sub DAS didalamnya yaitu Sub DAS Batanghari Hulu, Sub DAS Batang Merangin Tembesi, Sub DAS Batang Tabir, Sub DAS Batang Bungo, Sub DAS Batang Tebo, dan Sub DAS Batanghari Hilir.

Selain DAS Batanghari, ada 6 (enam) DAS lainnya di wilayah Provinsi Jambi yang persentasenya tidak terlalu besar yaitu DAS Betara Pengabuan mencakup 7 Sub DAS, DAS Mendahara mencakup 9 Sub DAS dan DAS Air Hitam Laut mencakup 4 Sub DAS.

Tabel 2-3 Luas Daerah Pengaliran dan Debit dari Beberapa Sungai Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi

Kabupaten/ Kota	Nama Sungai	Luas Daerah Pengaliran	Debit Max (m3/dtk)	Debit Min (m3/dtk)
Kerinci	Batang Merao	187,5	245	5,11
Merangin	Batang Merangin	3.645,00	2.300,00	26,07
Sarolangun	Batang Sarolangun	1.258,00	-	-
Batang Hari	Batang Hari	35.984,38	8.484,00	202
Muaro Jambi	Batang Hari	38.704,00	8.363,00	515
Tanjab Barat	Batang Pengabuhan Merlung	4.300,00	57,11	2,5
Tebo	Batang Tebo	1.831,60	742	20,6
Bungo	Batang Bungo	410,6	177,2	6,54
Kota Jambi	Batang hari	42.142,00	12.059,00	-

Sumber : RTRWP Jambi 2013-2033, 2013

Di Provinsi Jambi terdapat 15 danau yang yaitu Danau Kerinci, Danau Gunung Tujuh, Danau Belibis, Danau Lingkat, Danau Duo, Danau Sipin, Danau Kenali, Danau Teluk, Danau Biaro, Danau Baru, Danau Sarang Burung, Danau Sepati Empat, Danau Kecil dan Danau Pauh. Selain itu, terdapat juga beberapa Rawa Pasang Surut yang berada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Batanghari dan Rawa Non Pasang Surut yang berada di beberapa kabupaten seperti Kabupaten Kerinci, Kabupaten Merangin,

Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Muaro Jambi.

Berdasarkan Stasiun Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Depati Parbo Kerinci; suhu maksimum dari bulan Januari sampai bulan Desember 2020 mencapai 32,00^{0}C, sedangkan suhu minimum dari bulan Januari sampai bulan Desember 2021 mencapai 15,30^{0}C, dengan rata-rata suhu udara di tahun 2020 adalah 23,07^{0}C. Kelembaban udara maksimum dari bulan Januari sampai bulan Desember 2020 mencapai 100%, kelembaban udara minimum mencapai 33,0%, dengan rata-rata kelembaban udara dari bulan Januari sampai bulan Desember 2020 yaitu 81,69%. Dari bulan Januari sampai Desember 2020, tekanan udara rata-rata mencapai 923,39mb, kecepatan angin rata-rata 1,44 m/det, jumlah curah hujan 362,40 mm dan persentase rata-rata harian penyinaran matahari sebanyak 60,63%.

Data Stasiun Badan Meteorologi Sultan Thaha Jambi dari bulan Januari sampai bulan Desember 2020; suhu maksimum mencapai 35,20^{0}C, suhu minimum mencapai 21,20^{0}C dengan rata-rata suhu mencapai 27,53^{0}C. Kelembaban udara maksimum mencapai 100,0%, kelembaban udara minimum mencapai 47,00% dengan rata-rata kelembaban udara 82,47%. Tekanan udara rata-rata mencapai 1.006,56mb, kecepatan angin rata-rata mencapai 1,95 m/det, jumlah curah hujan rata-rata 2.402,60mm danrata-rata penyinaran matahari 59,31%.

Menurut Stasiun Klimatologi Jambi, dari bulan Januari sampai Desember tahun 2020; suhu udara maksimum mencapai 34,90^{0}C sedangkan suhu udara minimum mencapai 22,00^{0}C dengan suhu udara rata-rata 27,26^{0}C. Kelembaban udara maksimum mencapai 100,00% sedangkan kelembaban udara minimum mencapai 47,00% dengan rata-rata kelembaban udara 86,00%. Tekanan udara rata-rata mencapai 1.007,66mb, kecepatan angin rata-rata mencapai 0,71 m/det, jumlah curah hujan mencapai 2.951,70mm dan penyinaran matahari rata-rata sebanyak 55,59%.

Tabel 2-4 Rata-rata Suhu Udara, Kelembaban, Tekanan Udara, Kecepatan Angin, Curah Hujan dan Penyinaran Matahari Menurut Stasiun, 2020

No	Uraian	Stasiun		
		Depati Parbo Kerinci	Sultan Thaha Jambi	Klimatologi Jambi
1	Suhu (°C)			
	Maksimum	32	35,2	34,9
	Minimum	15,3	21,2	22
	Rata-rata	23,07	27,53	27,26
2	Kelembaban Udara (%)			
	Maksimum	100	100	100
	Minimum	33	47	47
	Rata-rata	81,69	82,47	86
3	Takanan Udara (mb) rata-rata	923,39	1.006,56	1.007,66
4	Kecepatan Angin (m/det) rata-rata	1,44	1,95	0,71
5	Curah Hujan (mm)	362,4	2.402,60	2.951,70
6	Penyinaran Matahari (%)	60,63	59,31	55,59

Sumber: Provinsi Jambi Dalam Angka 2021
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Provinsi Jambi

Berdasarkan Profil Tata Ruang Provinsi Jambi Tahun 2015, selain kawasan hutan yang mencapai porsi 16,17 persen, penggunaan lahan Provinsi Jambi masih didominasi oleh pertanian lahan kering atau tegalan dengan kontribusi sebesar 70,26 persen.

Luas lahan sawah di Provinsi Jambi pada tahun 2015 seluruhnya berjumlah 137.132 hektar, yang terdiri dari lahan sawah yang ditanami satu kali setahun seluas 62.197 hektar, yang ditanami dua kali setahun seluas 31.857hektar, yang ditanami lebih dari tiga kali setahun seluas 681 hektar, ditanami tanaman lainnya seluas 6.160 hektar dan tidak ditanami apapun seluas 36.237 hektar. Jika dibandingkan dengan tahun 2014, dimana luas lahan sawah adalah 151.544 hektar, maka luas lahan sawah pada tahun 2015 secara keseluruhan berkurang sebesar 9,51 persen. Penurunan luas lahan sawah terjadi pada lahan sawah yang ditanami satu kali dalam setahun sebesar 3,9 persen, lahan sawah yang ditanami dua kali sebesar 9 persen, lahan sawah yang ditanami tanaman lain sebesar 28 persen, dan lahan sawah yang tidak ditanami tanaman apapun sebesar 13,3 persen.

Bila dilihat per kabupaten, lahan sawah yang dapat ditanami padi lebih dari tiga kali setahun ternyata yang terluas ada di Kabupaten Bungo yaitu 500 hektar. Sedangkan lahan sawah yang dapat ditanami padi dua kali setahun terluas berada di Kabupaten Kerinci yaitu 14.055 hektar, sedangkan yang terkecil di Kota Jambi yaitu sebesar 21 hektar. Untuk luas lahan sawah yang ditanami padi sekali setahun terluas di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu 13.930 hektar, sedangkan yang terkecil Kota Sungai Penuh seluas 25 hektar.

Tabel 2-5 Penggunaan Lahan di Provinsi Jambi

No	Penggunaan Lahan	Eksisting (Ha)	Persentase (%)
A	**Kawasan Lindung**		
1	Hutan Lindung	191.130	3,56
2	Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam		
	1) Cagar Alam	30.400	0,57
	2) Taman Nasional	608.630	11,35
	3) Taman Hutan Raya	36.660	0,68
	4) Taman Wisata Alam	430	0,01
B	**Kawasan Budidaya**		
1	Kawasan Pertanian		
	1) Pertanian Lahan Basah	684.060	12,76
	2) Pertanian Lahan Kering/Tegalan/Kebun Campuran	3.767.801	70,26
2	Kawasan Permukiman	43.631	0,81
Total		**5.362.742**	**100**

Sumber: Profil Tata Ruang Provinsi Jambi 2015
RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2016 – 2021

Luas lahan pertanian bukan sawah pada tahun 2015 adalah 3.871.833 hektar. Dari luas ini yang digunakan untuk tegal/kebun sebesar 359.474 hektar, atau turun sebesar 10 persen dibandingkan tahun 2014 yang sebesar 399.817 hektar. Tegal/kebun terluas berada di Kabupaten Kerinci yaitu sebesar 72.847 hektar atau sekitar 20 persen dari total luas tegal/kebun di Provinsi Jambi.

Luas ladang/huma dari 197.548 hektar tahun 2014 naik menjadi 256.761 hektar pada tahun 2015. Sama halnya dengan yang terjadi pada lahan perkebunan yang naik sebesar 2 persen luasnya dari tahun 2014 sebesar 1.716.817 hektar menjadi 1.748.716 hektar pada tahun 2015.

Lahan yang ditanami pohon/hutan rakyat sebesar 335.609 hektar pada tahun 2015, turun sebesar 14,7 persen dibandingkan luas tahun

2014 sebesar 393.273 hektar. Luas lahan pertanian bukan sawah yang sementara tidak diusahakan cukup besar yaitu 305.799 hektar, dengan lahan terluas terdapat di Kabupaten Bungo sebesar 72.236 hektar dan terkecil di Kota Jambi sebesar 1.437 hektar. Lahan yang merupakan padang penggembalaan/padang rumput dan lahan lainnya (termasuk kolam/tebat/empang dll) masing-masing sebesar 18.889 hektar dan 511.275 hektar.

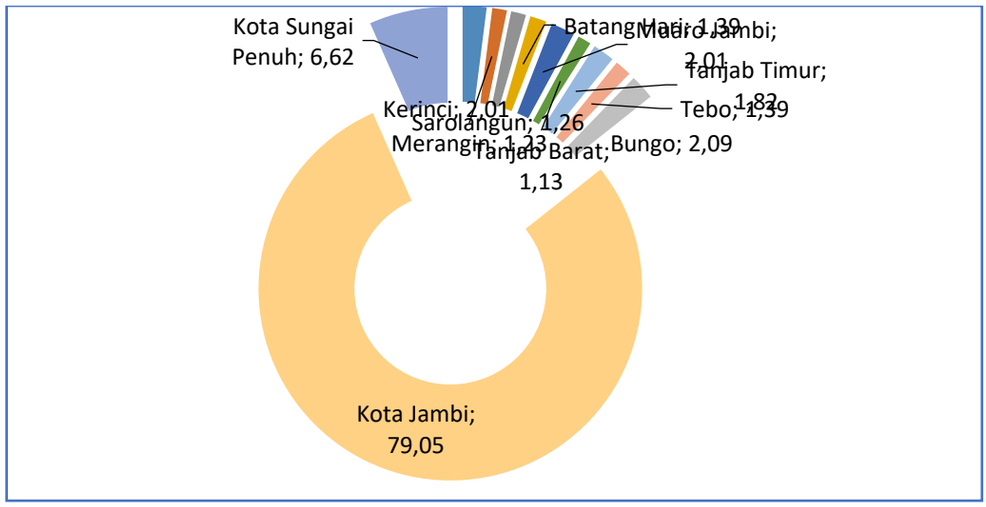
Berdasarkan penunjukan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan yang dituangkan dalam SK Menteri Kehutanan Nomor 421/Kpts-II/1999, kawasan hutan Provinsi Jambi meliputi 2.179.440 hektar atau 42,73 persen dari luas keseluruhan Provinsi Jambi. Luasan tersebut merupakan hasil dari pemaduserasian Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi.

Tabel 2-6 Luas Kawasan Hutan di Provinsi Jambi berdasarkan Fungsi Tahun 2010

No	Jenis Hutan	Luas Lahan (Hektar)
1	Cagar Alam	4.990
2	Hutan Lindung	112.722
3	Hutan Lindung Gambut	60.810
4	Hutan Produksi Tetap	1.006.266
5	Hutan Produksi Terbatas	264.034
6	Taman Hutan Rakyat	33.943
7	Taman Nasional	657.120
8	Taman Wisata Alam	417

Sumber : RTRWP Jambi 2013-2033

Jumlah penduduk Provinsi Jambi berdasarkan Jambi Dalam Angka Tahun 2021 yang dirilis oleh BPS adalah sebanyak 3.548.200 jiwa dengan tingkat kepadatan rata-rata sebesar 66 jiwa/km^2 dengan kepadatan tertinggi berada di Kota Jambi sebesar 2.951 jiwa/km^2 dan Kota Sungai Penuh sebesar 247 jiwa/km^2. Laju pertumbuhan penduduk Provinsi Jambi tahun 2010-2020 adalah sebesar 1,38 persen dengan pertumbuhan tertinggi di Kabupaten Muaro Jambi sebesar 2,26 persen dan terendah di Kabupaten Merangin sebesar 0,61 persen.



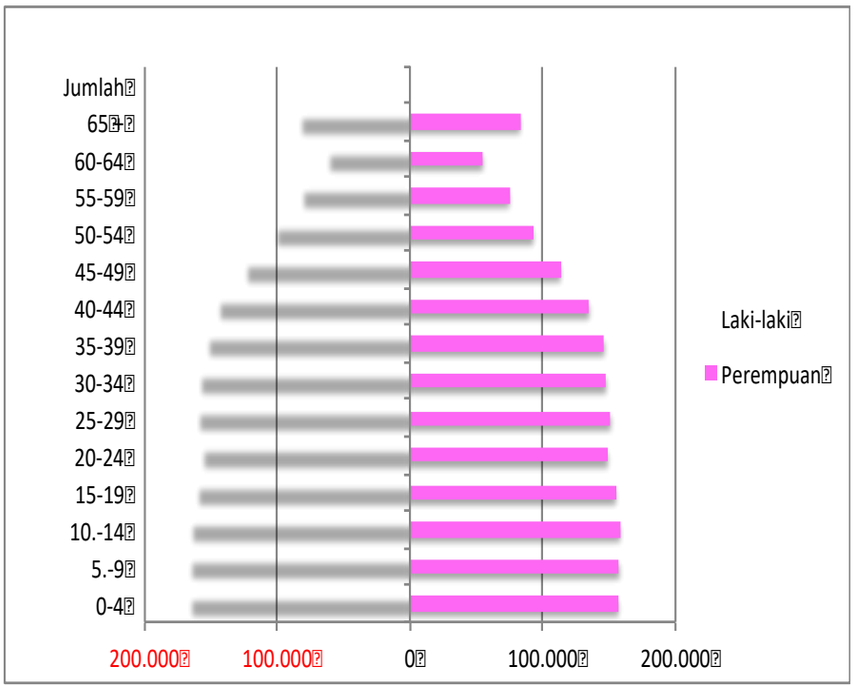
Sumber : Jambi Dalam Angka 2021,2021

Gambar 2-3 Persentase Kepadatan Penduduk Provinsi Jambi Per Kabupaten/Kota

Tabel 2-7 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2016 - 2020

No	Kabupaten / Kota	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kerinci	235.800	236.782	237.791	238.700	250.300
2	Merangin	372.200	377.905	383.480	388.900	354.100
3	Sarolangun	284.200	290.231	295.985	301.900	290.100
4	Batang Hari	263.900	266.971	269.966	272.900	301.700
5	Muaro Jambi	410.340	421.179	432.305	443.400	402.000
6	Tanjab Timur	215.320	216.777	218.413	220.000	229.800
7	Tanjab Barat	316.810	322.527	328.343	333.900	317.500
8	Tebo	337.020	343.003	348.760	354.500	337.700
9	Bungo	351.880	359.590	367.182	374.800	362.400
10	Kota Jambi	583.490	591.134	598.103	604.700	606.200
11	Sungai Penuh	87,97	88.918	89.944	90.900	96.600
Provinsi Jambi		**3,402,052**	**3.515.017**	**3.570.272**	**3.624.600**	**3.548.200**

Sumber: Jambi Dalam Angka 2021, 2021



Sumber: BPS , 2021 (data diolah)

Gambar 2-4 Piramida Penduduk Provinsi Jambi Tahun 2020

2.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia. Kawasan strategis nasional yang berada di Provinsi Jambi ditetapkan dengan pertimbangan dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Adapun Kawasan Strategis Nasional yang termasuk dalam kawasan wilayah Provinsi Jambi meliputi Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (Provinsi Jambi, Sumatera Barat, Bengkulu dan Sumatera Selatan), Kawasan Taman Nasional Berbak (Provinsi Jambi), Kawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh (Provinsi Jambi dan Riau) dan Kawasan Taman Nasional Bukit Duabelas (Provinsi Jambi).

Untuk Kawasan Strategis Provinsi yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan sudut

kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi. Penetapan kawasan strategis Provinsi Jambi lebih didasari oleh aspek pertumbuhan ekonomi adalah Kawasan Muara Bulian - Jambi dan Sekitarnya, Kawasan Strategis Perkotaan Muaro Bungo dan Perkotaan Sungai Penuh, Kawasan Strategis Pantai Timur Provinsi Jambi - Kawasan Tanjab Barat dan Tanjab Timur dan Kawasan strategis Bangko – Sarolangun.

Kawasan strategis Provinsi Jambi dari sudut kepentingan sosial dan budaya adalah Kawasan wisata sejarah Candi Muaro Jambi di Kabupaten Muaro Jambi dan Kota Jambi dan Kawasan Permukiman Suku Anak Dalam di Kabupaten Batanghari, Kabupaten Tebo dan Kabupaten Sarolangun.

Sedangkan Kawasan Strategis Provinsi Jambi dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi adalah Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) di Kabupaten Kerinci.

2.1.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Di Provinsi Jambi terdapat beberapa daerah yang dikategorikan sebagai daerah rawan bencana yaitu :

A. Bencana geologi

Bencana Geologi di Kabupaten Kerinci, Kota Sungai penuh dan Kabupaten Merangin yang berupa amblasan, longsoran, gempa dan ancaman letusan gunung berapi. Berdasarkan data yang sangat terbatas dari penelitian-penelitian, batas-batas daerah bahaya sementara pada Gunung Kerinci, yaitu:

1. Daerah Bahaya

Daerah bahaya Gunung Kerinci adalah suatu daerah disekitar lereng gunung ini, bilamana kegiatannya meningkat (terjadi letusan) akan tertimpa awan panas letusan, bom volkanik yang membara (mematikan). Jika kegiatan gunung ini meningkat, seluruh wilayah daerah bahaya harus dikosongkan. Daerah bahaya ini di peta berwarna merah, berbentuk lingkaran dengan jari-jari 6 kilometer berpusatkan tengah-tengah kawah, sedangkan pada lembah-lernbah kalinya diperluas mengikuti lembah tersebut.

2. Daerah Waspada

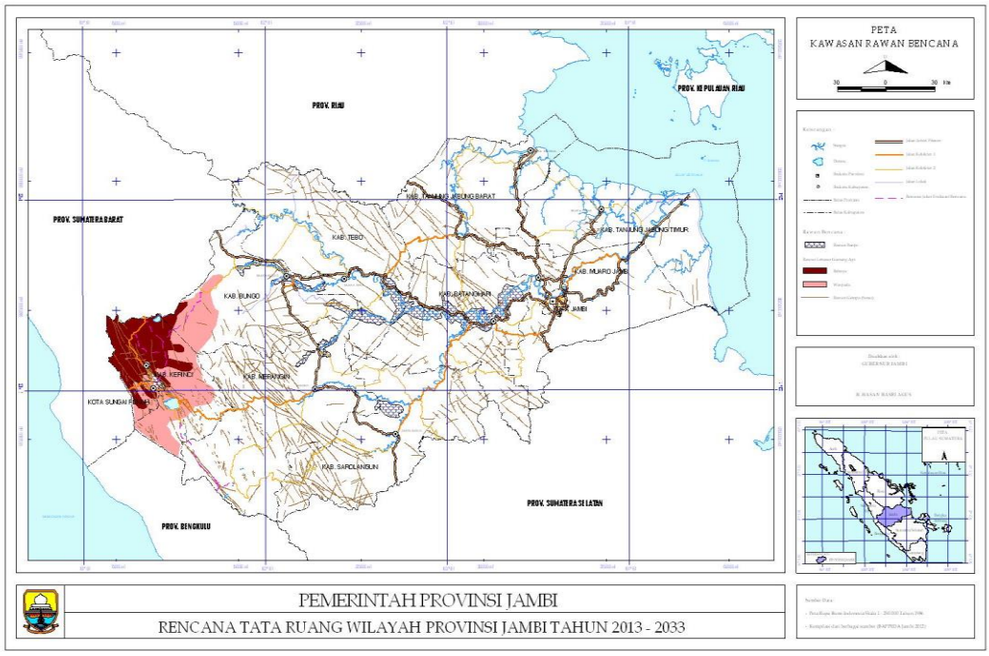
Daerah waspada Gunung Kerinci adalah suatu daerah disekitar lereng gunung ini bilamana kegiatan gunung meningkat (terjadi letusan) akan tertimpa lapili (kerikil volkanik) dan abu, ataupun jika di puncak gunung terjadi hujan setelah adanya kegiatan (letusan) daerah ini akan terserang lahar hujan. Daerah waspada di peta berwarna hijau, berbentuk lingkaran dengan jari-jari 9 kilometer berpusatkan tengah-tengah kawah, sedangkan pada lembah-lembah kalinya daerah ini diperluas mengikuti lembah-lembah tersebut.

B. Bencana banjir

Bencana banjir yaitu di Kabupaten Batang Hari dan beberapa kabupaten lainnya yang merupakan kejadian rutin di setiap musim hujan.

C. Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan

Selain itu, Provinsi Jambi juga termasuk daerah yang memiliki titik api akibat dari kebakaran lahan. Kebakaran ini disebabkan oleh adanya pembukaan lahan baru yang sangat berkaitan dengan lahan-lahan perkebunan baik milik masyarakat maupun perkebunan swasta. Kebakaran hutan dan lahan yang menimbulkan asap di seluruh Kabupaten dan Kota dalam Provinsi Jambi terutama terdapat pada lahan-lahan gambut (dangkal dan dalam) masyarakat dan perusahaan. Lahan gambut yang terbakar atau sengaja dibakar tersebut terdapat di Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.



Sumber RTRWP Jambi Tahun 2013-2033

Gambar 2-5 Peta Rawan Bencana Provinsi Jambi

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

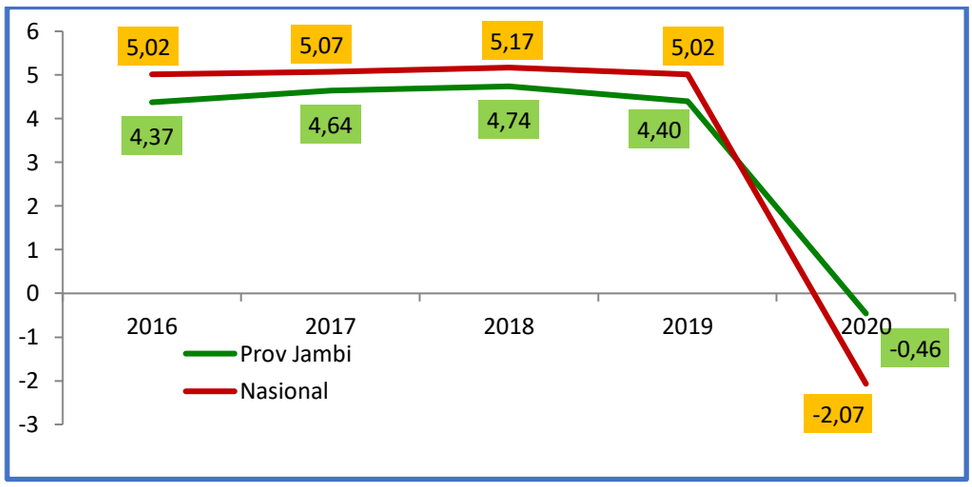
2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.1.2.1.1 Pertumbuhan PDRB

Pembangunan Provinsi Jambi tidak bisa dipisahkan dari pertumbuhan ekonomi, keduanya bersinergi dan saling terkait. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi pada periode waktu tahun 2016-2018 mengalami peningkatan namun pada Tahun 2019 mengalami perlambatan. Kondisi ini disebabkan oleh faktor eksternal seperti kondisi ekonomi dunia yang lesu, kondisi ekonomi Indonesia yang mengalami perlambatan, menurunnya harga minyak dunia) dan juga disebabkan oleh peristiwa kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap yang berlangsung.

Selanjutnya, akibat pandemi covid-19 yang melanda seluruh dunia, sehingga berpengaruh terhadap Ekonomi Provinsi Jambi pada tahun 2020 mengalami kontraksi sedalam 0,46 persen. Kontraksi dialami oleh sebagian besar lapangan usaha. Kontraksi terdalam dialami oleh Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 14,43 persen; diikuti Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 6,83 persen. Sedangkan pertumbuhan tertinggi disumbang oleh Lapangan Usaha

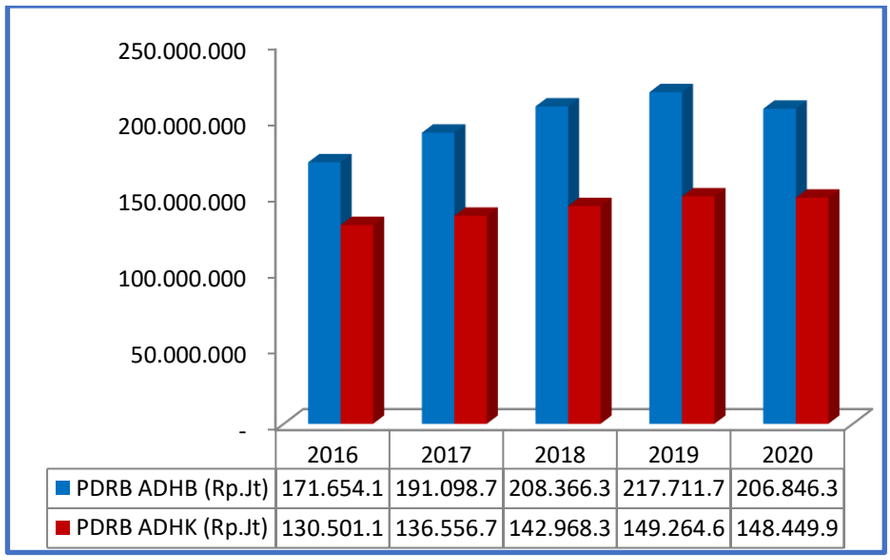
Informasi dan Komunikasi sebesar 8,48 persen. Pandemi covid-19 yang terjadi hampir di sepanjang tahun 2020 menyebabkan pembatasan kegiatan seperti sekolah dan bekerja. Kegiatan yang dilakukan dari rumah saja dan dilakukan secara daring, meningkatkan aktivitas Informasi dan Komunikasi. Demikian juga sebaliknya, pembatasan kegiatan dan mobilitas mengakibatkan turunnya aktivitas transportasi terutama angkutan udara. Bahkan bandara Depati Parbo di Kerinci dan bandara Muaro Bungo beberapa bulan di tahun 2020 sempat tidak ada aktivitas penerbangan komersil sama sekali.



Sumber: Data diolah. BPS, 2021

Gambar 2-6 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi Tahun 2016-2020

Laju pertumbuhan PDRB ADHB Provinsi Jambi pada periode 2016–2020 adalah rata-rata sebesar 4,66 persen per tahun, sementara laju pertumbuhan PDRB ADHK rata-rata sebesar 3,22 persen per tahun.



	2016	2017	2018	2019	2020
PDRB ADHB (Rp.Jt)	171.654.1	191.098.7	208.366.3	217.711.7	206.846.3
PDRB ADHK (Rp.Jt)	130.501.1	136.556.7	142.968.3	149.264.6	148.449.9

Sumber: Data diolah. BPS, 2021

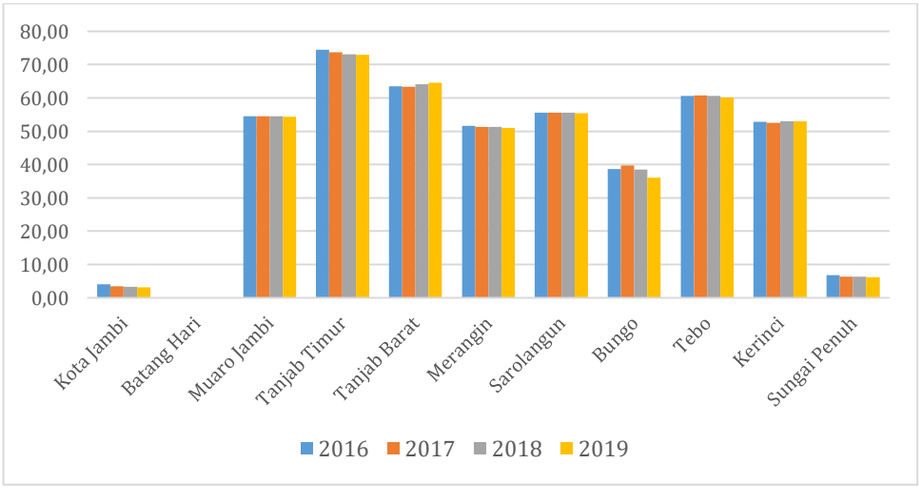
Gambar 2-7 Perkembangan PDRB ADHB dan PDRB ADHK Provinsi Jambi Tahun 2016 – 2020 (dalam milyar rupiah)

Kontraksi ekonomi akibat Pandemi Covid-19 yang dialami oleh Provinsi Jambi pada tahun 2020, juga dialami oleh Provinsi lainnya di Sumatera. Kontraksi terdalam dialami oleh Provinsi Riau, yang mengalami pertumbuhan minus 3,80 persen, sedangkan kontraksi terkecil dialami oleh Provinsi Bengkulu dengan pertumbuhan ekonomi sebesar minus 0,02 persen. Adapun laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi berada pada urutan ke-empat, dibawah Provinsi Bengkulu, Provinsi Sumatera Selatan, dan Provinsi Aceh, sedangkan dibanding pertumbuhan ekonomi Provinsi lainnya di Sumatera, pertumbuhan Provinsi Jambi masih lebih baik.

Jika dilihat sektor-sektor yang memberi kontribusi PDRB Provinsi Jambi selama 5 tahun terakhir maka sektor pertanian masih memberi kontribusi terbesar dan terus mengalami peningkatan bahkan pada tahun 2020 ketika sektor lainnya mengalami kontraksi. Sektor pertambangan dan penggalian merupakan kontributor terbesar kedua hingga Tahun 2019 dan terus mengalami penurunan, sehingga pada tahun 2020 tidak lagi menjadi pemberi kontribusi terbesar kedua namun menjadi urutan ketiga setelah lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Sektor ketiga hingga tahun 2019 adalah sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dan trend yang terus mengalami peningkatan telah

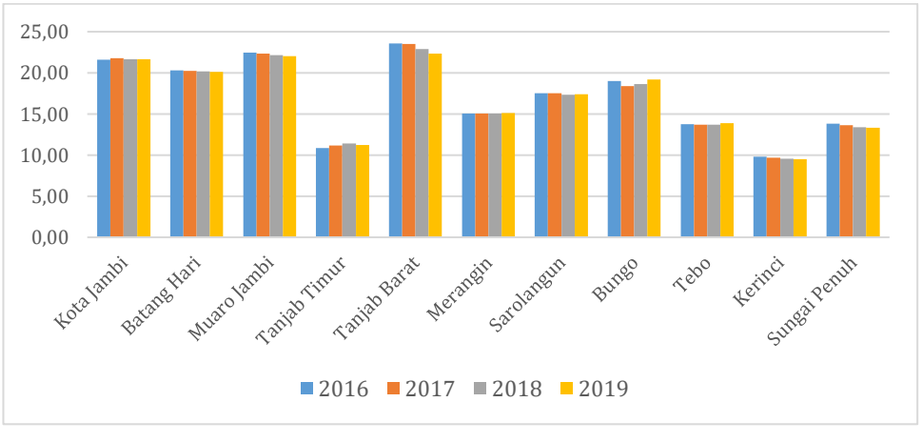
menempatkan sektor ini pada urutan kedua pemberi kontribusi terbesar pada tahun 2020.

Perkembangan sektor primer, sekunder dan teriser yang memberikan kontributor pertumbuhan ekonomi pada masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Jambi bervariasi. Sektor primer yang sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi berada pada Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tebo. Ketiga kabupaten tersebut masih bergerak pada sektor pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan dan penggalian.



Sumber: Data diolah. BPS, 2020

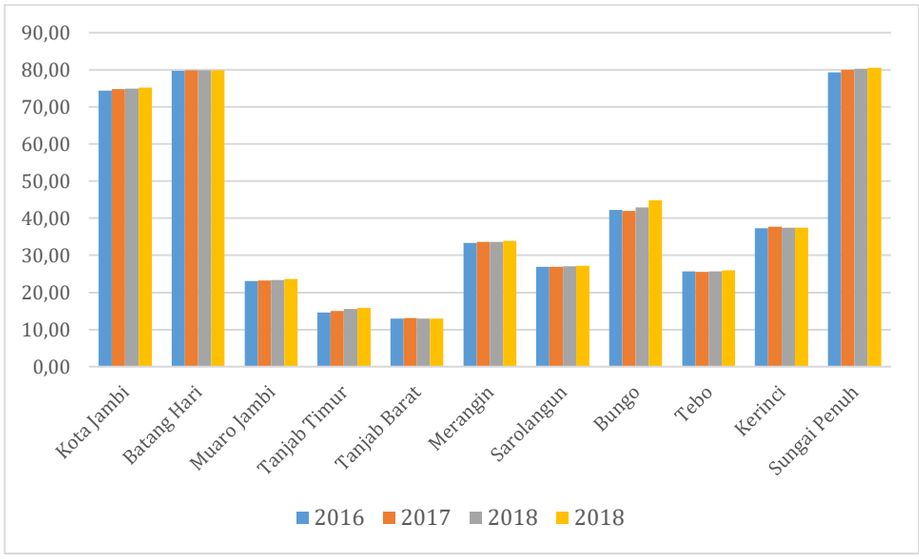
Gambar 2-8 Laju Perkembangan Sektor Primer PDRB Kabupaten/Kota se- Provinsi Jambi Tahun 2016-2019



Sumber: Data diolah. BPS, 2020

Gambar 2-9 Laju Perkembangan Sektor Sekunder PDRB Kabupaten/Kota se- Provinsi Jambi Tahun 2016-2019

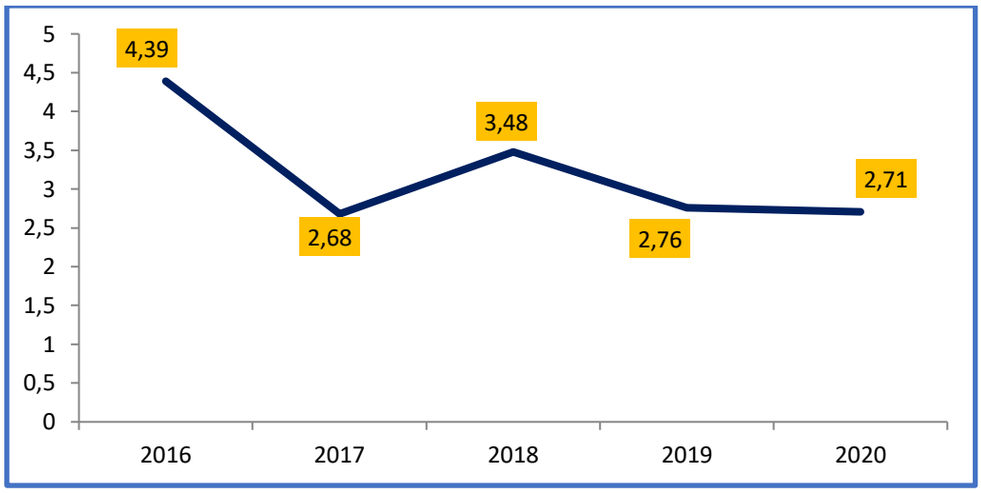
Untuk sektor sekunder, kabupaten sebagai kontributor tertinggi berada pada Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Muaro Jambi dan Kota Jambi. Sektor sekunder yang bergerak pada sektor industri pengolahan, sektor pengadaan listrik dan gas serta sektor konstruksi. Sedangkan sektor tersier, kabupaten sebagai kontributor tertinggi berada pada Kota Sungai Penuh, Kabupaten Batang Hari dan Kota Jambi. Sektor tersier bergerak pada sektor perdagangan, hotel dan restoran (PHR), sektor angkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan, sektor jasa perusahaan dan sektor jasa-jasa lainnya.



Sumber: Data diolah. BPS, 2020

Gambar 2-10 Laju Perkembangan Sektor Tersier PDRB Kabupaten/Kota se- Provinsi Jambi Tahun 2016-2019

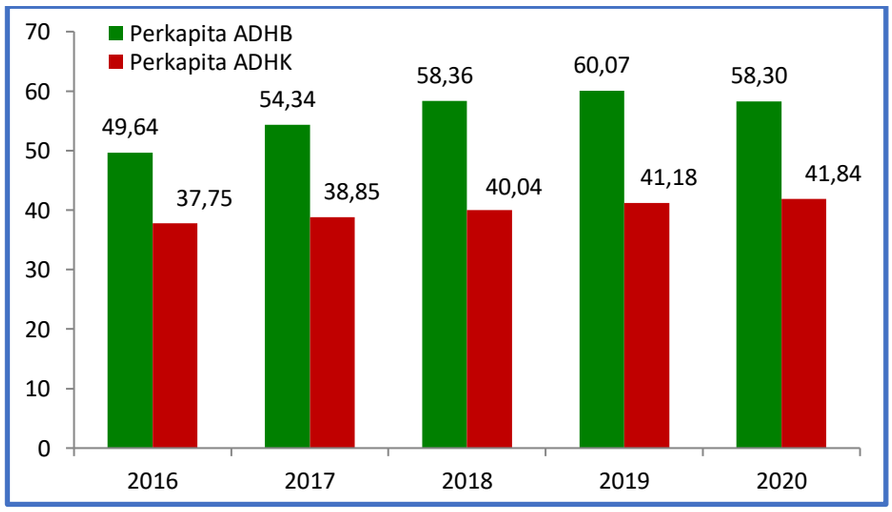
Inflasi menjadi indikator ekonomi yang penting terutama untuk fokus kesejahteraan masyarakat. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai indikator baik yang bersifat eksternal maupun internal, terutama disebabkan oleh kenaikan harga kebutuhan pokok. Terkait hal ini, inflasi perlu dipertahankan untuk tetap rendah dan stabil untuk menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah yang rentan terhadap goncangan kenaikan harga. Laju inflasi yang terlalu rendah juga juga mengindikasikan adanya kelesuan ekonomi. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa harga-harga yang tidak bergerak keatas menandakan adanya kelemahan pada sisi permintaan. Tidak jarang terlalu rendahnya tingkat inflasi merupakan indikator lemahnya daya beli masyarakat yang pada gilirannya akan menekan laju pertumbuhan ekonomi.



Sumber: BPS, 2019

Gambar 2-11 Tingkat Inflasi Provinsi Jambi Tahun 2016 – 2020

2.1.2.1.2 PDRB Perkapita



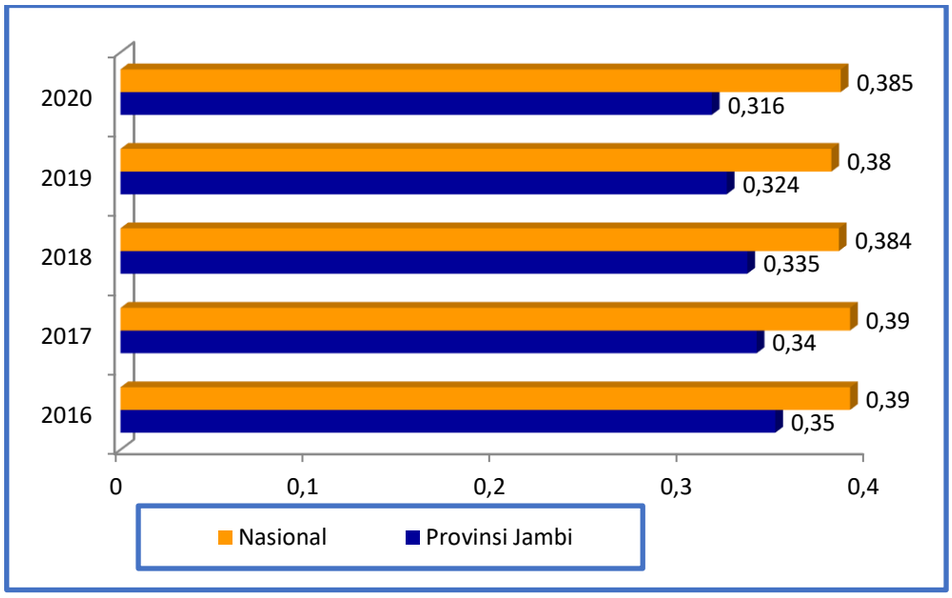
Sumber: BPS, 2021

Gambar 2-12 PDRB Perkapita ADHB dan ADHK 2010 Provinsi Jambi Tahun 2016 -2020 (dalam juta rupiah)

PDRB perkapita Provinsi Jambi ADHK selama periode 2016-2019 menunjukkan kenaikkan setiap tahunnya dengan rata-rata laju pertumbuhan sebesar 2,88 persen per tahun, namun pada tahun 2020 sedikit mengalami kontraksi akibat pandemi yang berdampak kepada hampir semua sektor. Sedangkan PDRB perkapita ADHB juga meningkat dengan rata-rata laju pertumbuhan per tahun sebesar 6,22 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kesejahteraan masyarakat Provinsi Jambi meningkat namun masih dikategorikan pendapatan rendah–menengah

(*lower–middle income*). Terkait dengan hal tersebut maka perlu dibuat kebijakan-kebijakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

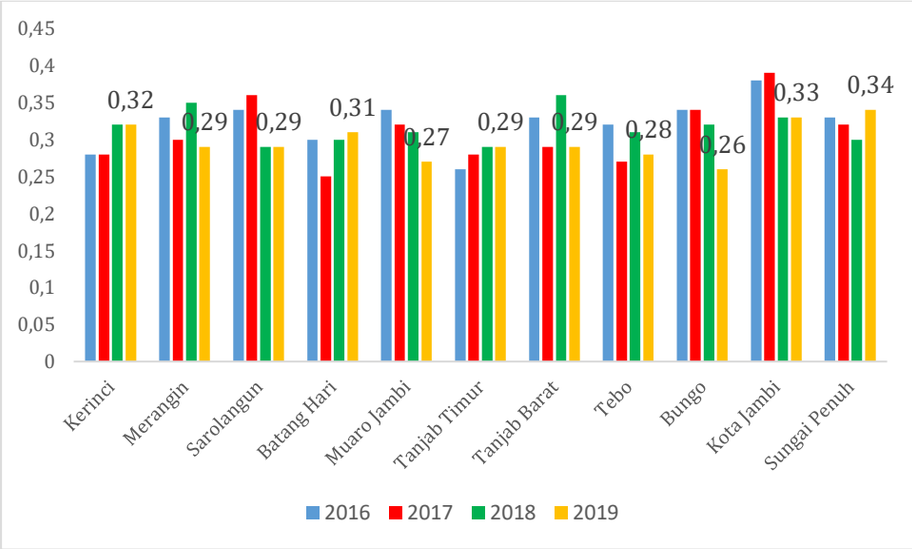
2.1.2.1.3 Indeks Gini



Sumber : BPS 2021

Gambar 2-13 Indeks Gini Nasional dan Provinsi Jambi 2016-2020

Fenomena ketimpangan pendapatan wilayah memang sudah menjadi hal yang biasa dalam perkembangan suatu wilayah dan berpotensi menimbulkan konflik finansial, sosial, atau hubungan yang saling memperlemah antar wilayah. Salah satu indikator yang digunakan melihat ketimpangan pendapatan adalah indeks gini dengan kisaran angka antara 0 sampai 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama sedangkan Koefisien Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna. Selama 4 tahun terakit, Koefisien Gini Provinsi Jambi relatif rendah di bawah nasional. Berdasarkan daerah tinggal, Koefisien Gini Tahun 2020 di daerah perkotaan lebih tinggi daripada perdesaan dengan indeks masing-masing sebesar 0,346 dan 0,289. Jika dilihat per kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi, secara umum indeks gini pada masing-masing kabupaten/kota memperlihatkan indeks yang berfluktuatif namun memperlihatkan ketimpangan yang cenderung menyempit. Hanya beberapa Kabupaten/ kota yang memperlihatkan kecenderungan peningkatan ketimpangan, namun masih dalam kategori ketimpangan sedang.



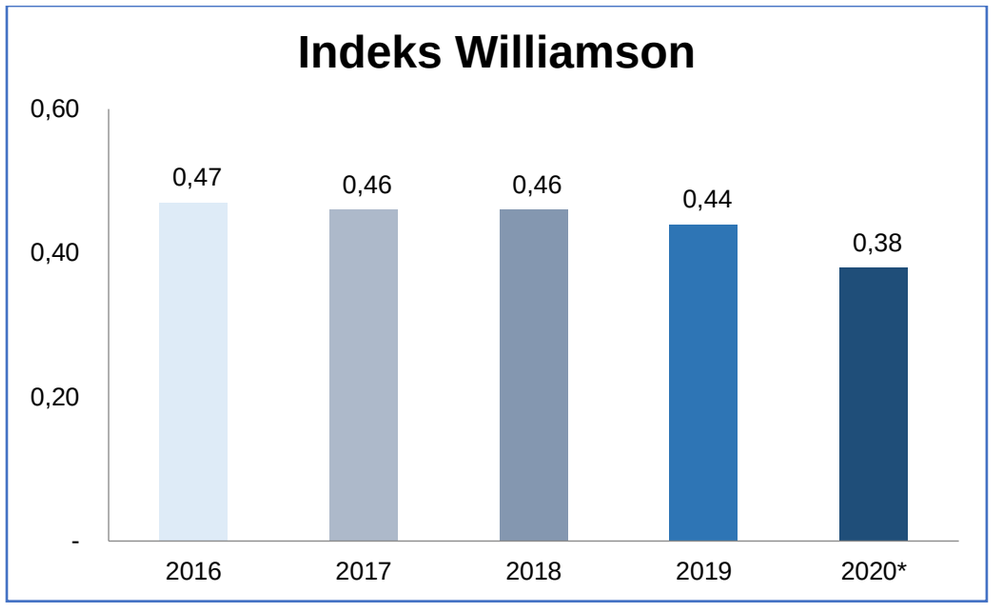
Sumber : BPS 2019. data diolah

Gambar 2-14 Koefisien Gini Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi Tahun 2016-2019

2.1.2.1.4 Indeks Williamson (indeks ketimpangan regional)

Ketimpangan pembangunan antar wilayah merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah yang disebabkan oleh adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Akibat perbedaan ini, kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan ekonomi juga menjadi berbeda. Terjadinya ketimpangan antar wilayah ini membawa implikasi terhadap kesejahteraan masyarakat antar wilayah dan berimplikasi juga terhadap formulasi kebijakan pembangunan wilayah yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Besaran Indeks Williamson antara nol sampai satu dengan kriteria jika indeks < 0,35 dikategorikan rendah, 0,35 – 0,5 dikategorikan sedang dan > 0,5 dikategorikan tinggi. Indeks Williamson Provinsi Jambi mulai dari tahun 2016-2020 memperlihatkan kecenderungan menurun, namun masih diketagorikan sedang. Pada tahun 2016, indeks Williamson Provinsi Jambi sebesar 0.47 mengalami penurunan pada Tahun 2020 menjadi 0,38.



Sumber : BPS 2021. data diolah

Gambar 2-15 Indeks Williamson Provinsi Jambi Tahun 2016-2020

Ketimpangan atau kesenjangan pembangunan antarwilayah masih merupakan tantangan yang harus diselesai dalam pembangunan ke depan. Kesenjangan pembangunan antar wilayah dalam jangka panjang bisa memberikan dampak pada kehidupan sosial masyarakat. Di samping itu juga terdapat kesenjangan antara wilayah desa dan kota. Kesenjangan pembangunan antara desa-kota maupun antara kota-kota perlu ditangani secara serius untuk mencegah terjadinya urbanisasi, yang pada gilirannya akan memberikan beban dan masalah sosial di wilayah perkotaan. Kesenjangan tersebut berkaitan dengan sebaran demografi yang tidak seimbang, ketersediaan infrastruktur yang tidak memadai. Upaya-upaya pembangunan yang lebih berpihak kepada kawasan tertinggal menjadi suatu keharusan untuk menangani tantangan ketimpangan dan kesenjangan pembangunan.

2.1.2.1.5 Kemiskinan

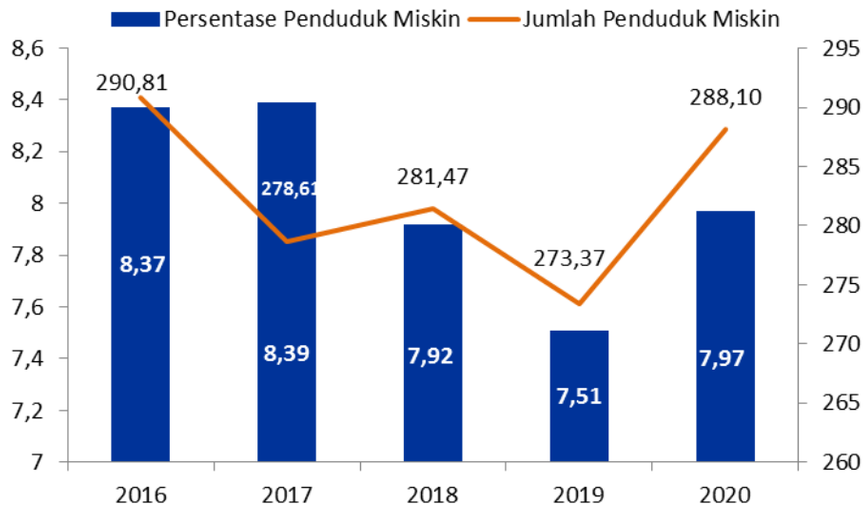
Masalah kemiskinan banyak dikaitkan dengan pembangunan ekonomi. Namun dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi terkadang kurang memperhatikan keadaan untuk jangka panjang. Mengatasi hal tersebut, pembangunan berkelanjutan dapat menjadi suatu bentuk rancangan yang dapat digunakan. Pembangunan berkelanjutan merupakan suatu pembangunan yang memperhatikan keberlanjutan

untuk jangka panjang. Pembangunan berkelanjutan menjadi model pembangunan yang memperhatikan segi sumberdaya dan juga lingkungan.

Kemiskinan merupakan masalah multidimensional yang telah lama menjadi isu sentral. Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi tetapi juga kegagalan pemenuhan hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Faktor utama penyebab kemiskinan meliputi antara lain kelebihan penduduk, tidak meratanya distribusi sumberdaya ekonomi, ketidakmampuan untuk memenuhi biaya hidup dan standar hidup yang tinggi, pendidikan dan kesempatan kerja yang tidak memadai, dan degradasi lingkungan. Pada banyak kasus, penyebab dan dampak kemiskinan saling berinteraksi, jadi apa yang membuat penduduk miskin juga menciptakan kondisi yang membuat mereka tetap miskin. Kemiskinan bisa menjadi penghambat pembangunan di masa mendatang yang akan berpengaruh terhadap pembangunan berkelanjutan. Pemberantasan kemiskinan merupakan tantangan global terbesar yang dihadapi dunia saat ini.

Persentase penduduk miskin di Provinsi Jambi dari tahun 2016 sampai tahun 2020 mengalami fluktuasi, tereutama di tahun 2020 akibat pandemi covid-19 sehingga banyak aktivitas perekonomian yang mengalami stagnansi, sehingga juga berdampak terhadap peningkatan persentase penduduk miskin.

Persentase penduduk miskin Provinsi Jambi mengalami penurunan walaupun terjadi peningkatan garis kemiskinan sebesar 5,56 persen, yaitu dari Rp371.875 per kapita perbulan pada 2016 menjadi Rp464.558 perkapita perbulan pada 2020. Pada September 2016, jumlah penduduk miskin Provinsi Jambi adalah sebanyak 290,81 ribu orang, menurun menjadi 288,10 ribu orang pada tahun 2020.



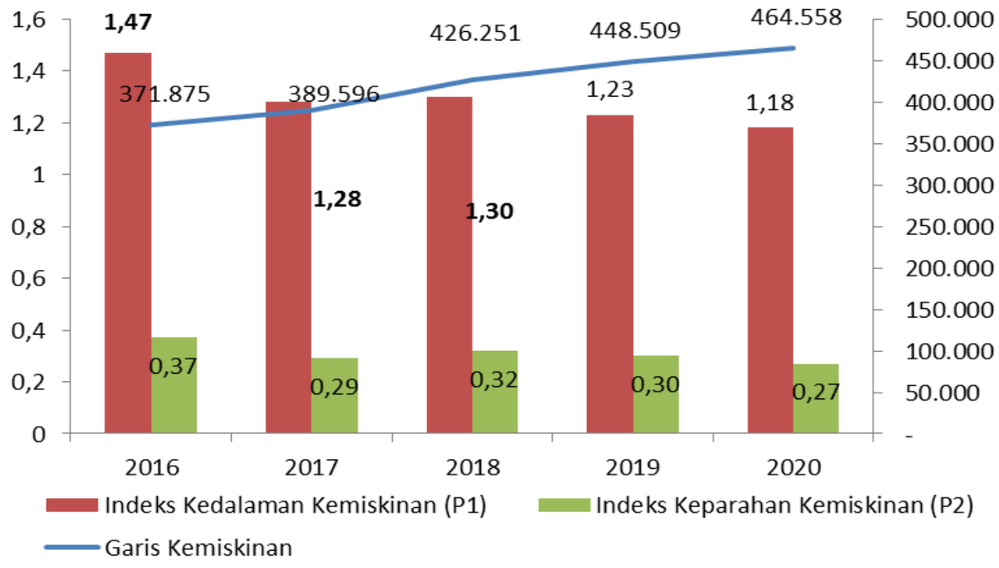
Sumber: BRS, BPS 2019

Gambar 2-16 Jumlah Penduduk Miskin,dan Persentase Penduduk Miskin, Provinsi Jambi Tahun 2016 – 2020

Permasalahan kemiskinan bukan hanya sekadar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari tingkat kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan penanggulangan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kedalaman kemiskinan adalah Indeks Kedalaman Kemiskinan atau *Poverty Gap Index* (P1) yang dirumuskan oleh *Foster-Greer-Thorbec* (FGT). P1 merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, angka P1 yang semakin mendekati 0 menunjukkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan. Pada periode September 2016 - September 2020, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Provinsi Jambi cenderung mengalami penurunan, yaitu pada September 2016 nilai P1 sebesar 1,47 mennurun menjadi 1,18 pada September tahun 2020. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan. Apabila dibandingkan antara daerah perkotaan dan perdesaan, untuk P1 Provinsi Jambi selama periode yang sama, maka daerah perkotaan memiliki nilai P1 selalu lebih besar dibandingkan daerah perdesaan. Hal ini mengindikasikan bahwa

penduduk miskin di perdesaan rata-rata pengeluaran memiliki kecenderungan semakin mendekati Garis Kemiskinan dibandingkan di daerah perkotaan.

Sedangkan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keparahan kemiskinan adalah Indeks Keparahan Kemiskinan atau *Distributionally Sensitive Index* (P2) yang dirumuskan oleh *Foster-Greer-Thorbec* (FGT). P2 memberikan gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin, angka P2 yang semakin mendekati 0 menunjukkan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin secara umum semakin kecil. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2), menurun dari 0,37 pada September 2016 menjadi 0,27 pada September 2020. Kenyataan ini mengindikasikan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin semakin mengecil. Apabila dibandingkan antara daerah perkotaan dan perdesaan, untuk P2 Provinsi Jambi, maka daerah perkotaan memiliki kecenderungan nilai P2 yang lebih besar dari perdesaan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa ketimpangan pengeluaran penduduk miskin di perkotaan semakin melebar dan lebih besar dibandingkan dengan perdesaan.



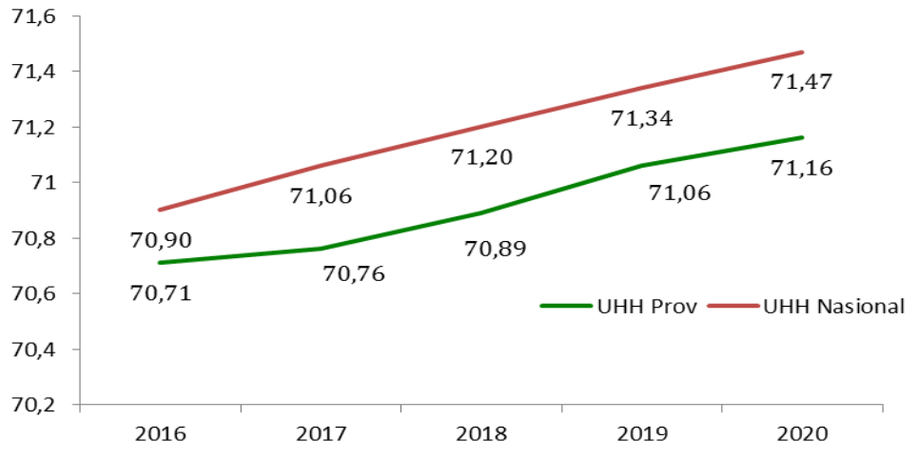
Sumber: BPS, data diolah, 2021

Gambar 2-17 Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Provinsi Jambi Tahun 2016-2020

2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

2.1.2.2.1 Usia Harapan Hidup

Usia harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh masyarakat sejak lahir yang mencerminkan derajat kesehatan masyarakat pada khususnya. Bila melihat capaian usia harapan hidup Provinsi Jambi 5 tahun terakhir, terlihat peningkatan yang cukup menggembirakan, walaupun masih dibawah nasional. Usia harapan hidup penduduk Provinsi Jambi dari tahun 2016-2020 terus menunjukkan peningkatan dimana usia harapan hidup dari 70,71 tahun pada 2016 meningkat menjadi 71,16 tahun pada 2020. Hal tersebut mengindikasikan bahwa secara rata-rata anak yang dilahirkan dapat bertahan hidup hingga usia 71 – 72 tahun. Data tahun 2020 menunjukkan peningkatan usia harapan hidup sebesar 0,10 tahun dari tahun sebelumnya, yaitu dari 71,06 tahun menjadi 71,16 tahun atau meningkat 0,21%. Perkembangan Usia Harapan Hidup Provinsi Jambi dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.



Sumber : BPS, Tahun 2020

Gambar 2-18 Usia Harapan Hidup di Provinsi Jambi dibanding Nasional Tahun 2016-2020

Usia Harapan Hidup di Provinsi Jambi yang mengalami kenaikan, meskipun nominalnya tidak terlalu besar menunjukan adanya peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan terhadap masyarakat. Peningkatan pendapatan masyarakat juga mendorong masyarakat untuk

memperoleh pelayanan kesehatan berbayar yang meningkatkan kualitas kesehatan.

2.1.2.2.2 Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Ibu *(Maternal Mortality Rate)* adalah Jumlah kematian ibu akibat dari proses kehamilan, persalinan dan paska persalinan per 100.000 kelahiran hidup pada masa tertentu. Angka pengukuran risiko kematian wanita yang berkaitan dengan peristiwa kehamilan. Kematian ibu adalah kematian wanita dalam masa kehamilan, persalinan dan dalam masa 42 hari (6 minggu) setelah berakhirnya kehamilan tanpa memandang usia kehamilan maupun tempat melekatnya janin, oleh sebab apa pun yang berkaitan dengan atau diperberat oleh kehamilan atau pengelolaannya, bukan akibat kecelakaan. Angka Kematian Ibu (AKI) atau *Maternal Mortality Rate* (MMR) berguna untuk menggambarkan tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi dan kesehatan ibu, kondisi lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil, pelayanan kesehatan waktu melahirkan dan masa nifas.

AKI didapatkan dari Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) yang dilakukan 5 tahun sekali dan digunakan untuk pemantauan kematian terkait dengan kehamilan. Indikator ini dipengaruhi status kesehatan umum, pendidikan, dan pelayanan selama kehamilan dan melahirkan. Sensitifitas AKI terhadap perbaikan pelayanan kesehatan menjadikannya indikator keberhasilan pembangunan sektor kesehatan. AKI mengacu pada jumlah kematian ibu yang terkait dengan masa kehamilan, persalinan, dan nifas. Karena survey tersebut dilakukan 5 tahun sekali, maka data terkait AKI untuk data tahunan didapat dari data jumlah kematian ibu yang dirilis oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jambi.

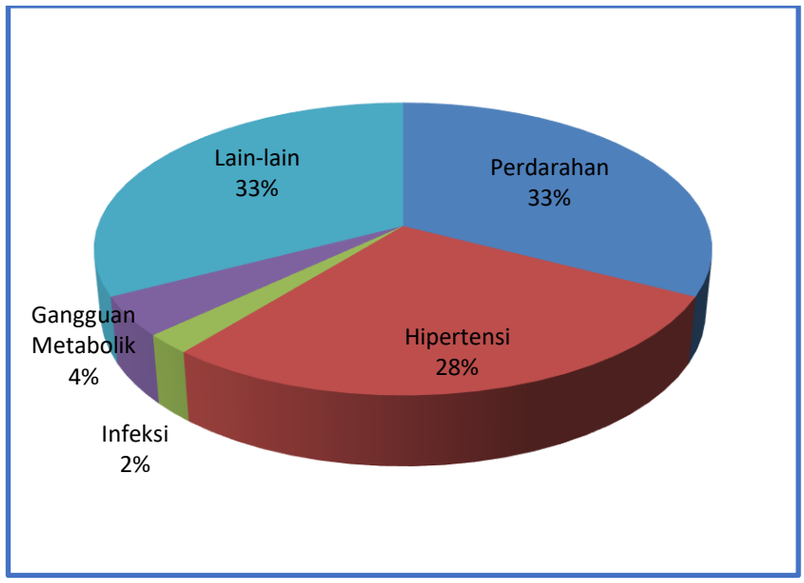
Tabel 2-8 Jumlah Kematian Ibu di Provinsi Jambi Tahun 2016-2019

NO	KABUPATEN/ KOTA	TAHUN			
		2016	2017	2018	2019
1	Kerinci	6	4	5	4
2	Merangin	6	5	5	9
3	Sarolangun	5	4	4	4
4	Batang Hari	2	8	3	7
5	Bungo	10	5	12	9
6	Tebo	9	4	3	10
7	Muaro Jambi	3	5	2	4
8	Tanjab Barat	5	7	4	5
9	Tanjab Timur	8	6	4	2
10	Kota Jambi	3	4	2	5
11	Kota Sei Penuh	2	2	2	0
	Provinsi	59	54	46	59

Sumber: Dinas Kesehatan, 2020

Data jumlah kematian ibu di Provinsi Jambi cenderung berfluktuatif, dan memperlihatkan peningkatan pada tahun 2019. Berdasarkan kasus kematian yang dirilis oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jambi pada tahun 2020, jumlah kematian ibu di Provinsi Jambi Tahun 2019 adalah sebanyak 59 kasus, dengan jumlah kematian ibu terbanyak terdapat pada Kabupaten Tebo dengan 10 kasus, sedangkan yang paling baik adalah pada Kota Sungai Penuh dengan 0 kasus.

Jumlah Kematian Ibu ini berkaitan dengan berbagai sebab, baik langsung maupun tidak langsung. Penyebab langsung (*Direct Obstetric Death*) kematian ibu antara lain adalah komplikasi obstetri pada masa hamil, bersalin dan nifas, atau kematian yang disebabkan oleh suatu tindakan, atau berbagai hal yang terjadi akibat tindakan yang dilakukan selama hamil, bersalin atau nifas terkait erat dengan faktor penolong persalinan (tenaga) dan tempat/fasilitas persalinan.



Sumber: Dinas Kesehatan, 2020

Gambar 2-19 Penyebab kematian Ibu di Provinsi Jambi Tahun 2019

Berdasarkan data riwayat jenis penyebab kematian ibu di Provinsi Jambi Tahun 2019, jenis terbanyak adalah perdarahan dan lain-lain. Pemerintah Daerah terus berupaya melakukan pelayanan terhadap ibu hamil ataupun ibu bersalin dan nifas guna menekan jumlah kematian ibu, antara lain mendorong ibu hamil untuk melakukan pemeriksaan rutin kehamilannya serta meningkatkan kualitas pelayanan yang dberikan melalui pemenuhan tenaga kesehatan yang berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak serta peningkatan kemampuan tenaga kesehatan yang membantu proses melahirkan. Bila dilihat dari data cakupan penolong persalinan, masyarakat di Provinsi Jambi lebih banyak memilih bidan sebagai penolong persalinan, serta penggunaan tenaga dukun pada posisi kedua dan dokter kandungan pada posisi ketiga. Jika melihat preferensi ini, maka perlu peningkatan pengetahuan kepada tenaga kesehatan seperti bidan di Provinsi Jambi serta pelatihan bagi dukun-dukun beranak yang ada agar dapat menolong proses persalinan dengan aman dan selamat.

Selain AKI, situasi derajat kesehatan digambarkan pula oleh Angka Kematian Bayi (AKB). Angka Kematian Bayi (AKB) atau *Infant Mortality Rate* (IMR) dapat didefenisikan sebagai banyaknya bayi meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun yang dinyatakan dalam 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Angka kematian bayi (*Infant*

Mortality Rate) merupakan salah satu indikator penting dalam menentukan tingkat kesehatan masyarakat karena dapat menggambarkan kesehatan penduduk secara umum. Angka ini sangat sensitif terhadap perubahan tingkat kesejahteraan dan kesehatan, dimana dapat didefinisikan sebagai kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu bulan.

Angka Kematian Bayi (AKB) Provinsi Jambi dari tahun 2016-2019 berfluktuasi dan cenderung meningkat, pada tahun 2016 jumlah kematian bayi sebesar 272, kemudian menurun menjadi 239 di tahun 2017 dan terus meningkat menjadi 290 ditahun 2019.

Tabel 2-9 Angka Kematian Bayi (AKB) di Provinsi Jambi Tahun 2016-2019

NO	Kabupaten/Kota	Tahun			
		2016	2017	2018	2019
1	Kerinci	37	43	42	49
2	Merangin	41	25	35	32
3	Sarolangun	23	22	21	23
4	Batang Hari	29	19	25	29
5	Ma. Jambi	27	14	12	21
6	Tanjab Timur	12	9	11	13
7	Tanjab Barat	33	34	35	33
8	Tebo	31	26	38	52
9	Bungo	16	15	32	26
10	Kota Jambi	16	12	4	8
11	Kota Sei Penuh	7	20	6	4
	PROVINSI	272	239	261	290

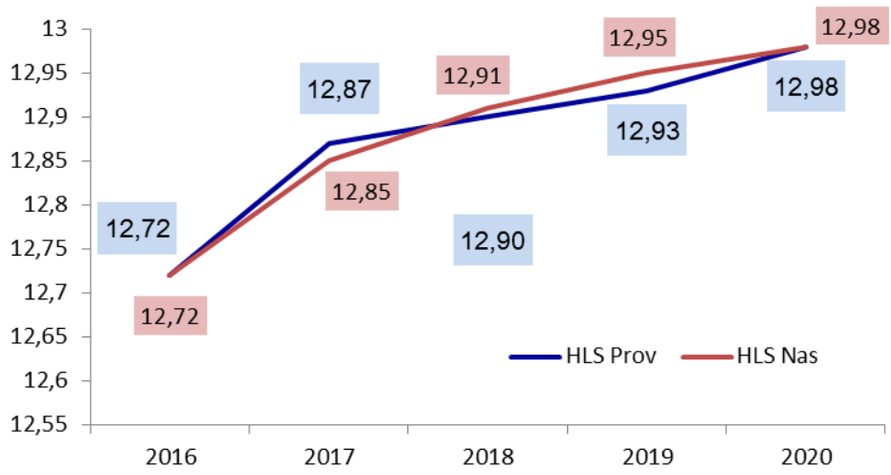
Sumber: Dinas Kesehatan, 2020

Penyebab meningkatnya AKI dan AKB dikarenakan belum semua nakes melaksanakan pelayanan ibu dan anak terstandar, persalinan di fasilitas pelayaan kesehatan masih rendah,sebaran tenaga bidan yang tidak merata, dokter spesialis kebidanan dan spesialis anak di beberapa Kabupaten tidak tinggal di kabupaten/kota di Provinsi Jambi dan, pemanfaatan rumah tunggu kelahiran (RTK) belum maksimal.

2.1.2.2.3 Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Pada tahun 2016 dan 2020 capaian HLS Provinsi Jambi sama dengan HLS nasional, namun pada tahun 2017, HLS Provinsi Jambi lebih tinggi dari nasional. Pada tahun 2020, anak-anak berusia 7 tahun di Provinsi Jambi memiliki harapan

dapat menikmati pendidikan selama 12,98 tahun atau hingga Diploma I, lebih lama 0,05 tahun dibandingkan tahun 2019.



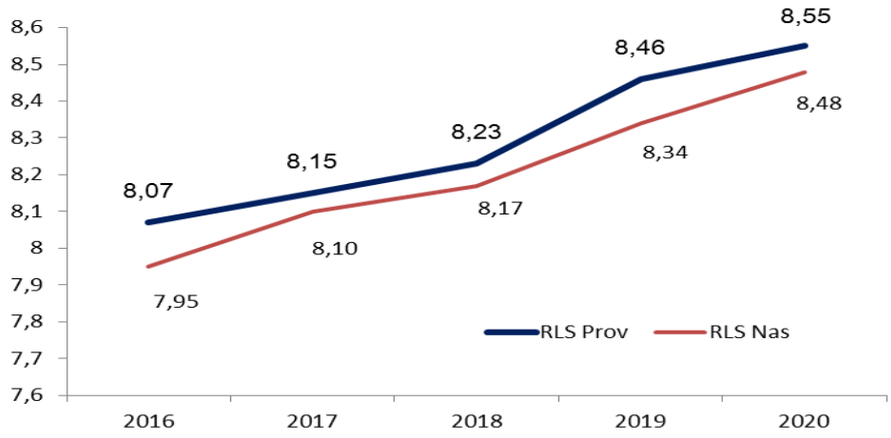
Sumber : BPS, 2021

Gambar 2-20 Harapan Lama Sekolah Provinsi Jambi dibanding nasional tahun 2016-2020

2.1.2.2.4 Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah (RLS) mengindikasikan makin tinggi pendidikan yang dicapai oleh masyarakat di suatu daerah, semakin tinggi rata-rata lama sekolah berarti semakin tinggi jenjang pendidikan yang di jalani. Secara umum, rata-rata lama sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas.

Selama rentang waktu tahun 2016-2020 capaian RLS Provinsi Jambi lebih baik dari capaian nasional. Pada tahun 2020 RLS Provinsi Jambi adalah sebesar 8,55 tahun atau meningkat 0,09 tahun dibanding tahun 2019. Salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan RLS ini adalah memperkecil angka putus sekolah dan meningkatkan jumlah angka yang melanjutkan antar jenjang pendidikan.



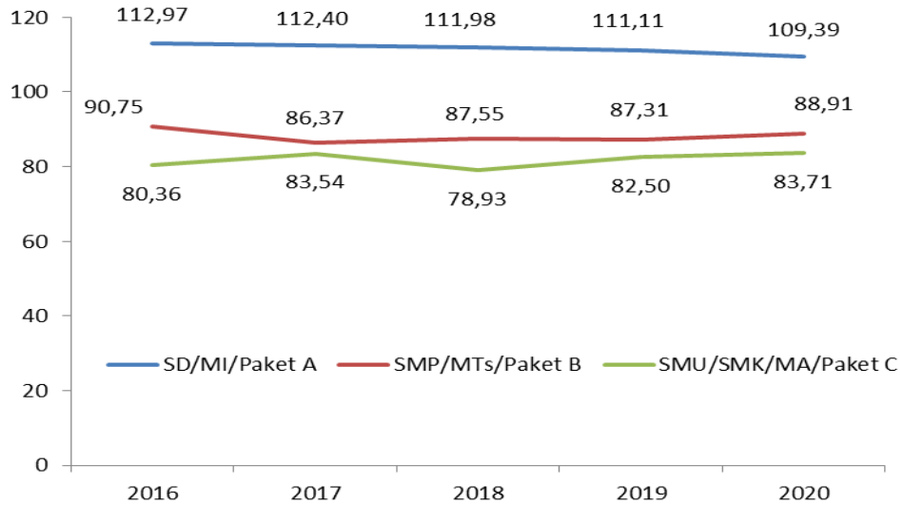
Sumber : BPS, 2021

Gambar 2-21 Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Jambi dibanding nasional tahun 2016-2020

2.1.2.2.5 Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat keberhasilan program pembangunan pendidikan, khususnya menjamin kepastian mendapatkan layanan pendidikan atau pemerataan dalam layanan pendidikan pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota, adalah melalui **APK** (Angka Partisipasi Kasar) dan **APM** (Angka Partisipasi Murni) pada jenjang pendidikan PAUD, SD, SMP, SMA, dan PT/sederajat di tingkat nasional, provinsi, serta kabupaten/kota.

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan proporsi jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Sesuai dengan konsep tersebut, APK untuk SD merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah di SD terhadap jumlah penduduk usia 7–12 tahun. Nilai APK bisa lebih dari 100 persen karena populasi siswa yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan mencakup anak di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan (misal anak bersekolah di SD berumur kurang dari 7 tahun atau lebih dari 12 tahun). Secara umum, APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mendapatkan pendidikan.



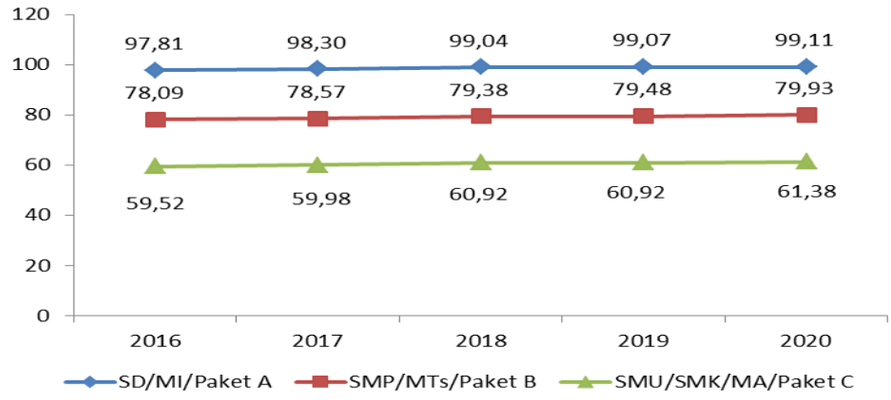
Sumber : BPS, Tahun 2021

Gambar 2-22 Angka Partisipasi Kasar SD, SMP dan SMA Provinsi Jambi Tahun 2016-2020

Pada tahun 2020, APK pada tingkat SD mencapai 109,39, atau mengalamai penurunan dari tahun 2019 yang mencapai 111,11. Hal ini berarti terdapat 109,39 persen anak yang bersekolah di SD berusia kurang dari 7 tahun atau lebih dari 12 tahun. APK kelompok usia ini menempati urutan tertinggi dibandingkan dengan APK pada kelompok usia lain. Untuk APK SMP Provinsi Jambi sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun. Pada tahun 2016, APK SMP sederajat sebesar 90,75 persen menjadi 88,91 persen pada tahun 2020. Sementara, APK SMA Provinsi Jambi justru mengalami peningkatan pada periode tahun 2016-2020, dimana pada tahun 2016, APK SMA sebesar 80,36 persen, meningkat menjadi 83,71 persen pada tahun 2020.

Selanjutnya, Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan proporsi jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Sebagai gambaran dalam hal ini adalah APM untuk tingkat SD yang merupakan proporsi jumlah murid SD yang berusia 7 – 12 tahun terhadap jumlah seluruh anak yang berusia 7 – 12 tahun. Angka Partisipasi Murni (APM) pada umumnya digunakan untuk melihat penduduk khususnya penduduk usia sekolah yang dapat bersekolah tepat waktu. Dalam hal seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat

waktu, maka nilai APM akan mencapai 100 persen. Sebaliknya, jika hanya sebagian anak usia sekolah yang dapat bersekolah tepat waktu, maka nilai APM akan lebih kecil dari 100 persen. Sejalan dengan itu, nilai APM akan selalu lebih kecil dari 100 atau sama dengan 100. Secara umum, nilai APM akan selalu lebih rendah dari nilai APK dan APS, karena APK dan APS menyangkut anak diluar usia sekolah dan beberapa jenjang pendidikan.



Sumber: Jambi Dalam Angka 2020, 2020

Gambar 2-23 Angka Partisipasi Murni untuk jenjang SD, SMP dan SMA Provinsi Jambi Tahun 2016-2020

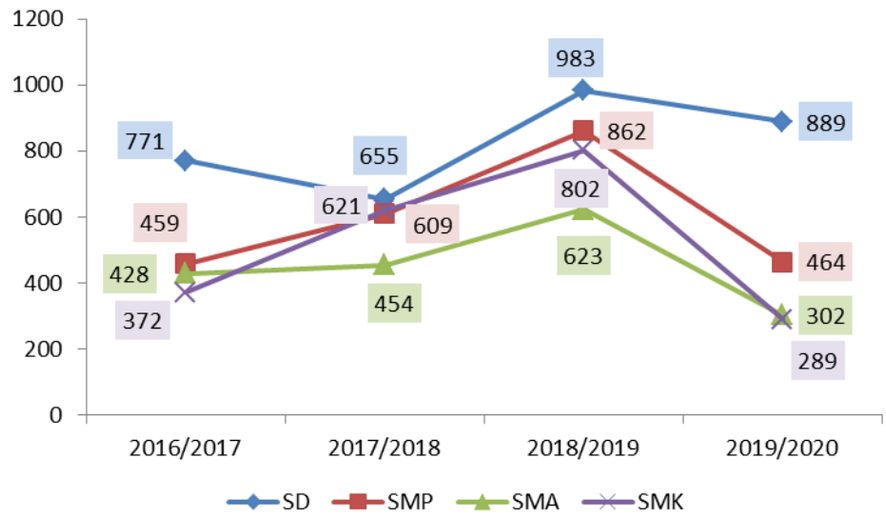
Untuk Angka Partisipasi Murni SD terjadi peningkatan dari 97,81 persen pada tahun 2016 menjadi 99,11 persen pada tahun 2020. Demikian juga APM SMP yang meningkat dari 78,09 persen di tahun 2016 menjadi 79,93 persen di tahun 2020. Untuk APM SMA, pada tahun 2016-2020 juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2015, APM SMA sebesar 59,52 persen, meningkat menjadi 61,38 persen pada tahun 2020. Persentase ini tentunya masih jauh dari yang diharapkan sehingga perlu usaha khusus untuk mendekati angka 100 persen.

Meskipun angka partisipasi baik Angka Partisipasi Kasar maupun Angka Partisipasi Murni sudah mengalami peningkatan namun peningkatan ini juga belum cukup untuk meningkatkan kualitas **Sumber Daya Manusia Jambi**, karena masih terdapat beberapa catatan penting yang perlu diperhatikan dalam upaya peningkatan pendidikan ke depan, yakni :

1. Program wajib belajar 12 tahun untuk Provinsi Jambi sampai tahun 2020 belum sepenuhnya berhasil mengingat angka partisipasi sekolah penduduk usia SD dan SMP belum mencapai angka 100 persen.
2. Tingkat partisipasi pendidikan yang masih relatif rendah pada jenjang pendidikan SLTA menjadi tantangan kedepan dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia di Provinsi Jambi, terutama sejak terbitnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana kewenangan pengelolaan pendidikan menengah merupakan kewenangan provinsi
3. Masih terdapat disparitas tingkat pendidikan antar daerah perkotaan dan perdesaan; antar penduduk kaya dan miskin, dan disparitas gender.
4. Rendahnya kualitas lulusan dan rendahnya daya saing lulusan, dan pendidikan yang dilakukan selama ini belum berorientasi pada keunggulan komparatif daerah.

2.1.2.2.6 Angka Putus Sekolah

Angka Putus Sekolah merupakan perbandingan jumlah putus sekolah pada tingkat dan jenjang tertentu dengan jumlah siswa pada tingkat dan jenjang yang sesuai pada tahun ajaran sebelumnya dan dinyatakan dalam persentase. Perkembangan Angka Putus Sekolah Provinsi Jambi dari tahun 2016-2020 untuk masing-masing jenjang pendidikan menunjukkan angka yang fluktuatif, namun menunjukkan kecenderungan menurun. Pada tahun anjaran 2019/2020, terjadi penurunan jumlah siswa yang putus sekolah di seluruh tingkatan pendidikan. Adapun tingkat pendidikan dengan jumlah siswa putus sekolah terkecil adalah tingkat pendidikan SMK.



Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Tahun 2020

Gambar 2-24 Jumlah Siswa Putus Sekolah Tahun 2016-2020

2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

2.1.2.3.1 Seni Budaya

Dalam rangka menumbuhkembangkan seni budaya khususnya budaya khas Melayu Jambi, maka Pemerintah Provinsi Jambi telah menggali keragaman budaya yang ada serta memfasilitasi tumbuh kembangnya kelompok-kelompok kesenian dan seniman.

Tabel 2-9 Perkembangan Jumlah Grup Kesenian Dan Gedung Kesenian

No	Capaian Pembangunan	2016	2017	2018	2019	2020*
1	Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk.	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57
2	Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Sumber: Dinas Budpar Provinsi Jambi, 2021
**Data sementara*

Tabel di atas memperlihatkan bahwa pembangunan seni budaya belum menunjukkan peningkatan yang berarti. Hal ini terlihat dari perkembangan jumlah grup kesenian yang tidak bertambah dalam kurun 5 tahun. Demikian pula dengan jumlah gedung kesenian yang tidak bertambah sama sekali. Guna memajukan seni budaya di Provinsi Jambi, maka kedepan program-program penumbuhan minat

generasi muda dalam seni budaya harus segera dilaksanakan agar budaya khususnya melayu Jambi dapat lestari di Provinsi Jambi.

2.1.2.3.2 Pemuda dan Olah Raga

Cabang olahraga yang ditumbuhkembangkan di Provinsi Jambi berjumlah 43 cabang yang mayoritas bernaung dibawah Komite Nasional Olahraga Indonesia (KONI) Provinsi Jambi dan tersebar pada 11 Kabupaten/Kota. Namun dari segi fasilitas tidak semua cabang memiliki fasilitas yang lengkap, hanya 23 cabang olahraga yang memiliki fasilitas lengkap.

Demikian pula dengan perkembangan organisasi olahraga dan gedung olahraga, selama kurun waktu tahun 2018 – 2020 mengalami peningkatan jumlah fasilitas olahraga dimana cabang olahraga Bola voli memliki jumlah peningkatan fasilitas olahraga kepemilikan pemda terbanyak dari 19 menjadi 122 pada tahun 2020 dan kepemilikan swasta dari 92 tahun 2018 menjadi 326 pada tahun 2020. Untuk peningkatan prestasi atlet pelajar cenderung mengalami stagnasi yaitu hanya 46 orang dari tahun 2016 ke 2019. Sementara itu, jumlah unit cabang olahraga yang dibina di PPLD dari 6 cabang pada tahun 2016 hanya terjadi peningkatan 1 cabor menjadi 7 cabang olahraga pada tahun 2019. Kedepan harus dilakukan penambahan cabang olahraga yang dibina ataupun penambahan jumlah atlet yang dibina agar peluang perbaikan prestasi daerah di bidang olahraga dapat tercapai.

Tabel 2-10 Pemilikan Jumlah Fasilitas Olahraga Menurut Cabang Olahraga di Provinsi Jambi Tahun 2018- 2020

No	Cabang Olahraga	2018		2019		2020	
		Pemda	Swasta	Pemda	Swasta	Pemda	Swasta
1	Sepak Bola	16	68	15	225	19	230
2	Tenis	24	31	24	31	17	21
3	Bulu Tangkis	16	92	16	92	20	250
4	Bola Voli	19	110	19	110	122	326
5	Basket	2	47	27	47	11	44
6	Tenis Meja	22	91	22	91	15	57
7	Pencak Silat	11	18	11	18	10	16
8	Lap. Menembak	0	0	0	0	-	1
9	Angkat Besi	5	1	5	1	3	6
10	Senam	1	0	1	0	1	-
11	Kolam Renang	0	12	0	12	3	15
12	Taekwondo	3	3	3	3	1	3
13	Judo	3	2	3	2	1	2
14	Kempo	1	4	1	4	1	3
15	Gulat	2	4	2	4	2	2
16	Panjat Tebing	7	2	7	2	13	1
17	Golf	0	2	0	2	1	1
18	GOR	1	4	1	4	15	16
19	Dayung	3	6	3	6	8	3
20	Tinju	0	3	0	3	1	5
21	Sepak Takraw	2	29	2	29	3	31
22	Karate	5	11	5	11	3	5
23	Catur	5	4	5	4	2	3

Sumber: Jambi Dalam Angka, 2020

Tabel 2-11 Perkembangan Olahraga Provinsi Jambi Tahun 2016-2019

Nama Program	Tahun			
	2016	2017	2018	2019
Jumlah Organisasi Olahraga	44	44	44	44
Jumlah Gedung Olahraga	14	14	14	14
Jumlah cabor yang dibina di PPLPD	6	7	6	7
Jumlah atlet pelajar yang dibina di PPLPD	46	47	46	46
Prestasi atlet pelajar: - Emas - Perak - Perunggu	 35 235 57	 1 5 16	 11 19 31	 10 15 23

Sumber : Dispora Provinsi Jambi, 2020

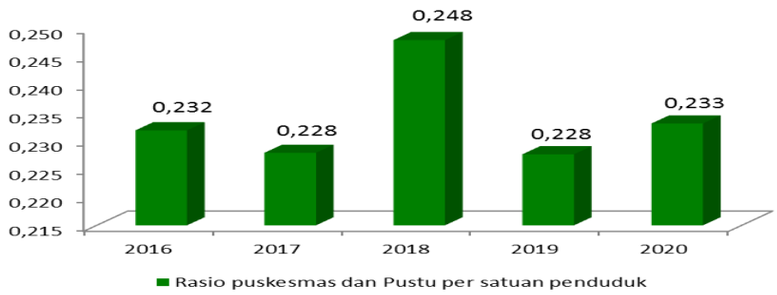
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib

2.1.3.1.1 Urusan Kesehatan

2.1.3.1.1.1 Rasio Puskesmas dan Pustu per Satuan Penduduk

Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu di Provinsi Jambi tahun 2016-2020 sedikit mengalami fluktuasi namun cenderung menurun. Hal ini berarti pertumbuhan jumlah puskesmas tidak seimbang dengan pertumbuhan jumlah penduduk atau pertumbuhan penduduk lebih tinggi dari pertumbuhan jumlah puskesmas.Di masa yang akan datang diharapkan terjadi keseimbangan antara penyediaan puskesmas dan puskesmas pembantu dengan jumlah penduduk. Hal tersebut dapat dilihat pada data berikut ini.



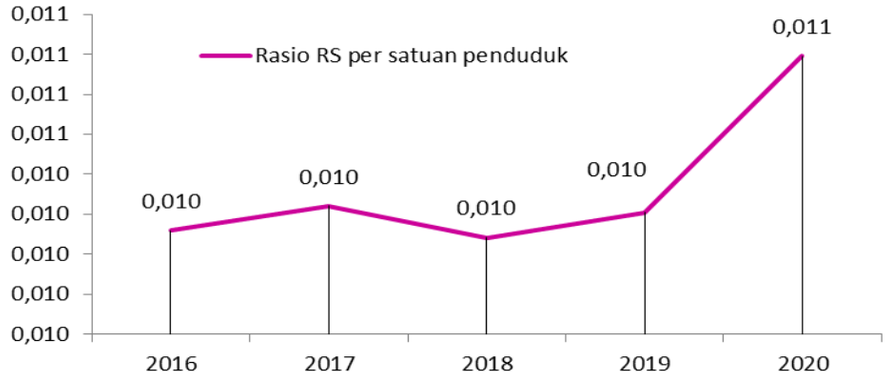
Sumber : BPS, 2021 (data diolah)

Gambar 2-25 Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu di Provinsi Jambi Tahun 2016-2020

2.1.3.1.1.2 Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, rumah sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. Rumah sakit berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan terdiri atas rumah sakit umum dan rumah sakit khusus. Rumah sakit umum adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit, sedangkan rumah sakit khusus adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit atau kekhususan lainnya. Perkembangan jumlah rumah sakit dan rasio

Rumah Sakit per satuan penduduk dari tahun 2016-2020 cenderung stabil, namun di tahun 2020 terjadi peningkatan yang cukup signifikan sebagaimana gambar berikut ini.

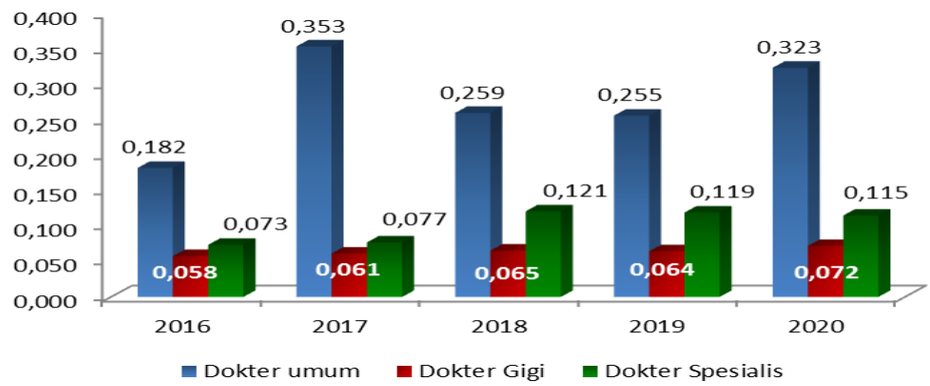


Sumber : BPS, 2021 (data diolah)

Gambar 2-26 Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk di Provinsi Jambi Tahun 2016-2020

2.1.3.1.1.3 Rasio Dokter per Satuan Penduduk

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktek dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, dokter adalah lulusan pendidikan kedokteran baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Rasio dokter umum terhadap jumlah penduduk digunakan sebagai indikator untuk mengukur ketersediaan dokter umum untuk mencapai target pembangunan kesehatan pada tahun tertentu. Jumlah dan rasio doter di Provinsi Jambi dapat dilihat pada data berikut ini.



Sumber : BPS, 2021 (data diolah)

Gambar 2-27 Perkembangan Rasio Dokter di Provinsi Jambi tahun 2016-2020

Berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 54 Tahun 2013 tentang Rencana Pengembangan Tenaga Kesehatan Tahun 2011 – 2025, telah ditetapkan sejumlah target rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk. Pada tahun 2014, rasio dokter spesialis ditetapkan sebesar 10 dokter spesialis per 100.000 penduduk, rasio dokter umum sebesar 40 dokter umum per 100.000 penduduk, sementara pada tahun 2019 ketersediaan dokter spesialis mencapai 12 per 100.000 penduduk, dokter umum 11 per 100.000 penduduk dan dokter gigi sebanyak 1,7 per 100.000 penduduk.

Jika dikonversikan, rasio dokter umum per 100.000 penduduk Provinsi Jambi pada tahun 2020 sebesar 32,30 orang dokter umum, sementara untuk rasio dokter gigi per 100.000 penduduk adalah sebesar 7,19 orang dokter gigi. Untuk rasio dokter spesialis sebesar 11,47 orang per 100.000 penduduk Provinsi Jambi. Dengan memperhatikan standar ketersediaan tenaga medis terutama dokter, maka untuk dokter umum dari sisi jumlah sudah memenuhi target, demikian juga dengan dokter gigi. Namun untuk dokter spesialis masih terdapat kekurangan terutama untuk daerah-daerah terpencil. Untuk itu, ke depan perlu diprioritaskan kebijakan untuk meningkatkan ketersediaan baik kuantitas maupun kualitas dokter untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Provinsi Jambi.

2.1.3.1.1.4 Rasio Tenaga Kesehatan

Keberadaan tenaga kesehatan sangat diperlukan guna meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan kesehatan masyarakat. Tenaga Kesehatan meliputi tenaga medis, perawat dan bidan, tenaga farmasi, ahli gizi, teknisi medis, sanitasi dan kesehatan masyarakat. Jumlah tenaga kesehatan tersebut berfluktuasi setiap tahunnya karena tidak meratanya distribusi tenaga kesehatan. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2-12 Perkembangan Rasio Tenaga Kesehatan di Provinsi Jambi Tahun 2016-2020

Tenaga Kesehatan	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Tenaga Medis	1.085	1.331	1.665	1.136	1.958
Rasio Tenaga Medis	0,314	0,379	0,466	0,031	0,055
Perawat dan Bidan	10.778	10.685	11.601	11.087	14.394
Rasio Perawat dan Bidan	3,116	3,040	3,249	3,059	4,057
Tenaga Farmasi	583	700	930	555	1.207
Rasio Tenaga Farmasi	0,169	0,199	0,260	0,153	0,340
Ahli Gizi	224	240	285	220	433
Rasio Ahli Gizi	0,065	0,068	0,080	0,061	0,122
Teknisi Medis	354	418	433	N/A	1.119
Rasio Teknisi Medis	0,102	0,119	0,121	N/A	0,315
Sanitasi	308	293	300	N/A	434
Rasio Tenaga Sanitasi	0,089	0,083	0,084	N/A	0,122
Kesmas	410	394	502	N/A	N/A
Rasio Tenaga Kesmas	0,119	0,112	0,141	N/A	N/A

Sumber : BPS, 2021 (data diolah)

2.1.3.1.2 Pendidikan

Pendidikan merupakan hak asasi manusia dan hak setiap warga negara untuk dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran, minimal pada tingkat pendidikan dasar. Setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, agama, maupun gender. Pemenuhan atas hak untuk mendapatkan pendidikan dasar yang bermutu merupakan ukuran keadilan dan pemerataan atas hasil pembangunan dan sekaligus menjadi investasi sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung keberlangsungan pembangunan bangsa.

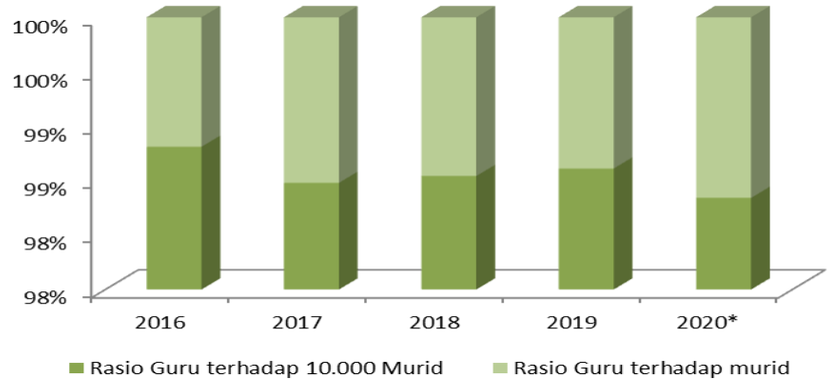
2.1.3.1.2.1 Rasio Guru terhadap Murid SMA dan SMK

Rasio Guru terhadap murid adalah indikator yang digunakan untuk mengukur jumlah guru per 10.000 jumlah murid berdasarkan jenjang pendidikan tertentu. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan jumlah pendidik dan jumlah ideal murid untuk satu tahun agar tercapai proses pembelajaran yang berkualitas.

Tabel 2-13 Jumlah Guru, Murid, dan Rasio Guru terhadap Murid SLTA/MA Provinsi Jambi Tahun 2016-2020

Jenjang Pendidikan	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020*
SLTA/MA					
Jumlah Guru	8.720	7.714	8.445	8.890	6.047
Jumlah Murid	95.657	95.853	102.714	105.507	78.535
Rasio Guru terhadap 10.000 Murid	911,59	804,77	822,19	842,60	769,98
Rasio Guru terhadap murid	10,97	12,43	12,16	11,87	12,99

Sumber : BPS, 2021(data diolah).
**)Belum termasuk Madrasah Aliyah*



Sumber : BPS, 2020 (data diolah)
Gambar 2-28 Rasio Guru terhadap Murid SLTA/MA Provinsi Jambi Tahun 2016-2020

Pada tabel di atas terlihat bahwa rasio guru terhadap 10.000 murid SLTA/MA tahun 2016-2020 berfluktuatif dengan kecenderungan menurun. Pada tahun 2016, ketersediaan guru per 10.000 murid sebanyak 911,59 orang, atau satu orang guru tersedia untuk 10,97 orang murid SLTA/MA. Sementara di tahun 2019 ketersediaan guru per 10.000 murid adalah sebanyak 842,60 orang, atau satu orang guru tersedia untuk 11,87 murid.

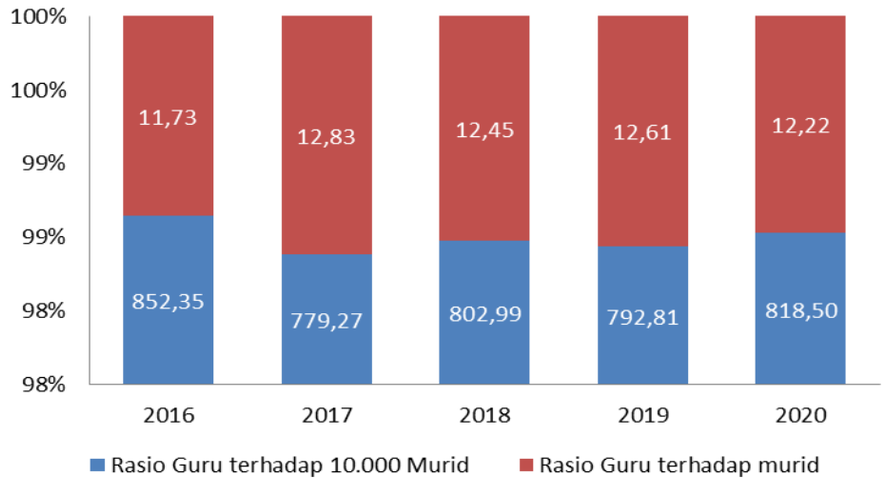
Pengembangan pendidikan kejuruan/vokasi menjadi salah satu isu penting dalam pengembangan pendidikan di Indonesia dan Provinsi Jambi. Pendidkan kejuruan ini akan memenuhi kebutuhan akan tenaga kerja terampil pada jenjang tenaga kerja menengah untuk mendorong percepatan pembanguan daerah diberbagai sektor terutama agribisnis dan agroindustri. Hal ini juga sejalan dengan upaya pengembangan desa inovati produktif yang menjadi salah satu progam unggulan provinsi

Jambi. Untuk itu pembangunan pendidikan kejuruan akan menjadi prioritas baik dari segi pemenuhan kebutuhan infrastruktur, sarana dan prasarana, guru maupun pemenuhan kebutuhan pendidikan kejuruan yang berkualitas.

Tabel 2-14 Jumlah Guru, Murid dan Rasio Guru terhadap Murid SMK di Provinsi Jambi Tahun 2016-2020

Jenjang Pendidikan	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
SMK					
Jumlah Guru	3.906	3.750	4.102	4.319	4.446
Jumlah Murid	45.826	48.122	51.084	54.477	54.319
Rasio Guru terhadap 10.000 Murid	852,35	779,27	802,99	792,81	818,50
Rasio Guru terhadap murid	11,73	12,83	12,45	12,61	12,22

Sumber : BPS, 2021 (data diolah)



Sumber : BPS, 2021 (data diolah)

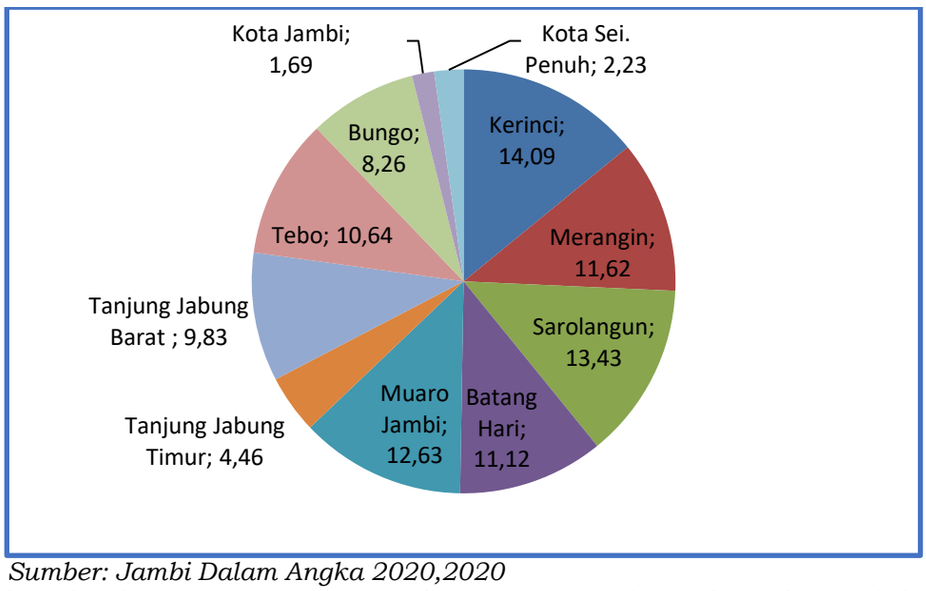
Gambar 2-29 Rasio Guru terhadap Murid SMK Provinsi Jambi Tahun 2016-2020

Rasio Guru terhadap 10.000 murid SMK pada tahun 2016-2020 berfluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2016 ketersediaan guru sebanyak 852,35 orang untuk 10.000 orang murid SMK atau 1 orang guru tersedia untuk 11,73 orang murid. Sementara di tahun 2020, ketersediaan guru sebanyak 818,50 untuk 10.000 orang murid SMK, atau 1 orang guru tersedia untuk 12,22 orang murid.

2.1.3.1.3 Sosial

Keberhasilan pembangunan daerah selama ini tidak sepenuhnya dapat menuntaskan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Konsep PMKS menunjukkan adanya kenyataan, bahwa keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani dan sosial secara memadai dan wajar. Pasal 5 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menentukan kriteria masalah sosial, meliputi : kemiskinan; ketelantaran; kecacatan; keterpencilan; ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku; korban bencana; dan/atau korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Dari seluruh PMKS yang terdata di Provinsi Jambi, persentase terbesar adalah pada kelompok fakir miskin diikuti oleh kelompok lansia terlantar dan penyandang disabilitas. Fakir miskin masih mendominasi dengan persentase terbesar dan memiliki kecenderungan meningkat, sementara persentase kelompok PMKS lainnya cenderung menurun.



Sumber: Jambi Dalam Angka 2020,2020

Gambar 2-40 Persentase Penerima Bantuan (Kepala Keluarga) Sosial per Kabupaten/ Kota se-Provinsi Jambi

Bila dikaitkan dengan Program Penanganan PMKS secara umum ataupun program-program lain yang berhubungan dengan pengentasan kemiskinan yang selama ini dilaksanakan, program –program tersebut

belum efektif atau belum dapat memenuhi hak atas kebutuhan dasar masyarakat secara layak, sehingga dibutuhkan metode penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang lebih efektif**,** meliputi: rehabilitasi sosial; jaminan sosial; pemberdayaan sosial; dan perlindungan sosial yang tepat guna dan tepat sasaran.

2.1.3.1.4 Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Penyelenggaraan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merupakan kewajiban pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan manifestasi dari hak asasi manusia dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagaimana dijamin dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 (amandemen).

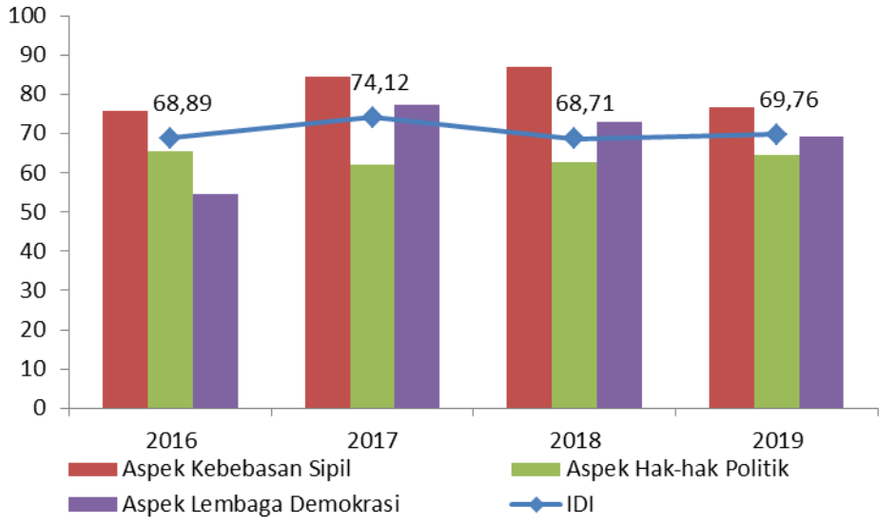
Dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dilakukan beberapa langkah preventif melalui pembinaan dan pemantauan orang asing, menjaga kerukunan umat beragama serta pemetaan potensi konflik dan pencegahan terjadinya konflik Beberapa potensi konflik dan konflik yang terjadi di Provinsi Jambi pada kurun waktu tersebut terkait dengan unjuk rasa, konflik lahan, konflik sumberdaya alam dan konflik politik, sosial dan budaya serta konflik SARA.

Berdasarkan data potensi konflik, pada tahun 2019 terdapat 62 potensi konflik, menurun jika dibandingkan potensi konflik pada tahun 2016 yang berjumlah 188 konflik. Potensi konflik ini tersebar di seluruh kabupaten/ kota se-Provinsi Jambi dengan rincian dapat dilihat pada tabel.

Tabel 2-15 Potensi Konflik di Provinsi Jambi Tahu 2019

No	Lokasi Potensi Konflik Kab/Kota	Jenis Potensi Konflik	Jumlah potensi Konflik
1	2	3	4
1	Kerinci	Sumber daya Alam	0
		Politik & Batas Adm	0
		Sara	0
		Ekonomi	0
2	Kota Sungai Penuh	Sumber daya Alam	0
		Politik & Batas Adm	2
		Sara	0
		Ekonomi	0
3	Merangin	Sumber daya Alam	3
		Politik & Batas Adm	0
		Sara	1
		Ekonomi	0
4	Sarolangun	Sumber daya Alam	10
		Politik & Batas Adm	1
		Sara	0
		Ekonomi	0
5	Bungo	Sumber daya Alam	9
		Politik & Batas Adm	2
		Sara	3
		Ekonomi	0
6	Tebo	Sumber daya Alam	3
		Politik & Batas Adm	2
		Sara	2
		Ekonomi	2
7	Tanjab Barat	Sumber daya Alam	4
		Politik & Batas Adm	1
		Sara	0
		Ekonomi	0
8	Tanjab Timur	Sumber daya Alam	2
		Politik & Batas Adm	0
		Sara	0
		Ekonomi	0
9	Batanghari	Sumber daya Alam	4
		Politik & Batas Adm	0
		Sara	0
		Ekonomi	0
10	Muaro Jambi	Sumber daya Alam	9
		Politik & Batas Adm	0
		Sara	0
		Ekonomi	0
11	Kota Jambi	Sumber Daya Alam	0
		Politik & Batas Adm	0
		Sara	1
		Ekonomi/Industrial	1
Jumlah Potensi Konflik			**62**

Sumber: Badan Kesbangpol Prov. Jambi, 2020



Sumber: BPS, 2020

Gambar 2-30 Perkembangan Aspek IDI Provinsi Jambi

Data Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang dikeluarkan pada tahun tertentu (n) merupakan data kondisi tahun sebelumnya (n-1). Oleh sebab itu, data terakhir yang dikeluarkan oleh BPS pada Bulan Agustus 2020 merupakan kondisi tahun 2019. Berdasarkan data IDI di atas, terlihat bahwa capaian indeks ini berfluktuatif. Fluktuasi angka IDI adalah cerminan situasi dinamika demokrasi di Provinsi Jambi. Pada tahun 2020 (kondisi tahun 2019) realisasi IDI Provinsi Jambi terealisasi sebesar 69,76 dalam skala indeks 0 sampai 100 atau meningkat 1,05 poin dibandingkan capaian tahun sebelumnya. Tingkat demokrasi di Provinsi Jambi termasuk dalam kategori "sedang".

Gambar di atas menunjukkan bahwa dari ketiga aspek IDI, dua aspek mengalami penurunan dan hanya satu aspek yang mengalami peningkatan. Aspek yang mengalami peningkatan adalah aspek hak-hak politik dengan peningkatan sebesar 1,87 poin dari tahun sebelumnya. Sedangkan aspek lembaga demokrasi menurun sebesar 3,67 poin dan aspek kebebasan sipil mengalami penurunan sebesar 10,14 poin.

Dari 28 indikator IDI, terdapa lima belas indikator yang memiliki skor dengan kategori baik atau skor di atas 80, meliputi :

a. Indikator 1, ancaman/penggunaaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat
b. Indikator 5, Aturan tertulis yang membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama

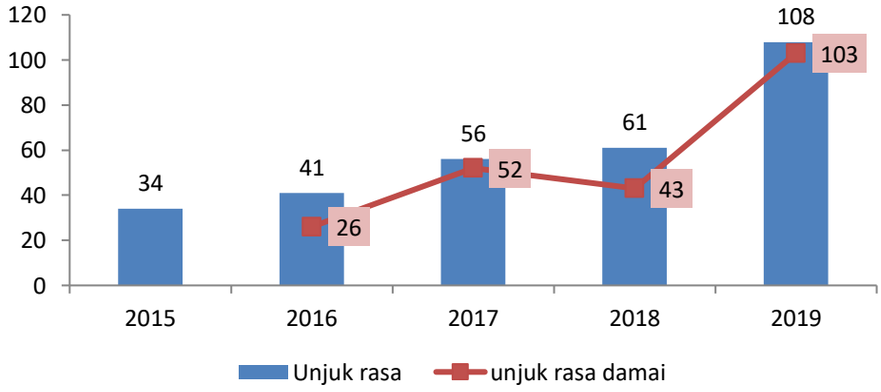
c. Indikator 8, Aturan tertulis yang diskriminatif dalan hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya
d. Indikator 9, tindakan/pernyataan pejabat pemerintah yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, atau terhadap kelompok rentan lainnya, dan
e. Indikator 10, ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya
f. Indikator 11, hak memilih atau dipilih terhambat
g. Indikator 12, Ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih
h. Indikator 14, Partisipasi penduduk dalam pemilu (*voters turnout*)
i. Indikator 17, Jumlah pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan
j. Indikator 18, Netralitas penyelenggara Pemilu
k. Indikator 19, kecurangan dalam penghitungan suara
l. Indikator 20, alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan dalam APBD
m. Indikator 24, persentase perempuan pengurus partai politik
n. Indikator 27, Keputusan hakim yang kontroversial
a. Indikator 28, penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi

Terdapat 4 kinerja indikator demokrasi yang berkategori “sedang” (skor 60-80) di tahun 2019. Indikator-indikator yang termasuk dalam kategori tersebut adalah:

a. Indikator 3, umlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat
b. Indikator 13, Kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT)
c. Indikator 21, Persentase jumlah perda yang berasal dari hak inisiatif dprd terhadap jumlah total perda yang dihasilkan
d. Indikator 25, Jumlah kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN

Meskipun demikian, masih terdapat 9 kinerja indikator demokrasi yang berkategori “buruk” (skor di bawah 60) di tahun 2019, yang perlu perhatian khusus. Indikator-indikator yang termasuk dalam kategori tersebut adalah :

a. Indikator 2, Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat
b. Indikator 4, Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat
c. Indikator 6, Tindakan/pernyataan pejabat yang membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama
d. Indikator 7, Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain terkait dengan ajaran agama
e. Indikator 15, Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD provins,
f. Indikator 16, Demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan
g. Indikator 22, Rekomendasi DPRD kepada eksekutif
h. Indikator 23, Kegiatan kaderisasi yang dilakukan peserta pemilu
i. Indikator 26, Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah.



Sumber: Satpol PP dan Damkar Prov. Jambi, 2020

Gambar 2-31 Unjuk rasa yang terjadi tahun 2015-2019

Berdasarkan data Satpol PP dan Damkar Provinsi Jambi, bila melihat tren jumlah aksi unjuk rasa pada Pemerintah Provinsi Jambi, terlihat bahwa jumlah unjuk rasa terus meningkat setiap tahunnya dan pada tahun 2019 terjadi 108 kali unjuk rasa dengan 5 kali unjuk rasa berujung anarkis atau 4,67 persen. Berbagai upaya telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jambi untuk meningkatkan indeks kebebasan

sipil, diantaranya dengan melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat serta optimalisasi forum Pembauran Kebangsaan

Beberapa wilayah di Provinsi Jambi termasuk wilayah rawan terhadap bencana, terutama bencana banjir dan kebakaran hutan dan lahan. Upaya pendekatan kearifan lokal, melalui pembentukan Desa Tangguh Bencana diharapkan masyarakat di desa/kelurahan tersebut memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak bencana yang merugikan serta memperkecil jumlah masyarakat yang terdampak bencana, mampu mengenali ancaman di wilayahnya dan mampu mengorganisasikan sumber daya masyarakatnya untuk mengurangi kerentanan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi resiko bencana.

Dari tahun 2016 hingga tahun 2019 telah terbentuk 89 Desa Tangguh Bencana, dengan rincian dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 2-16 Jumlah Desa Tangguh Bencana di Provinsi Jambi Tahun 2016-2019

Tahun	Jumlah Desa Tangguh Bencana
2016	-
2017	-
2018	83
2019	6

Sumber : BPBD Provinsi Jambi, 2020

2.1.3.1.5 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

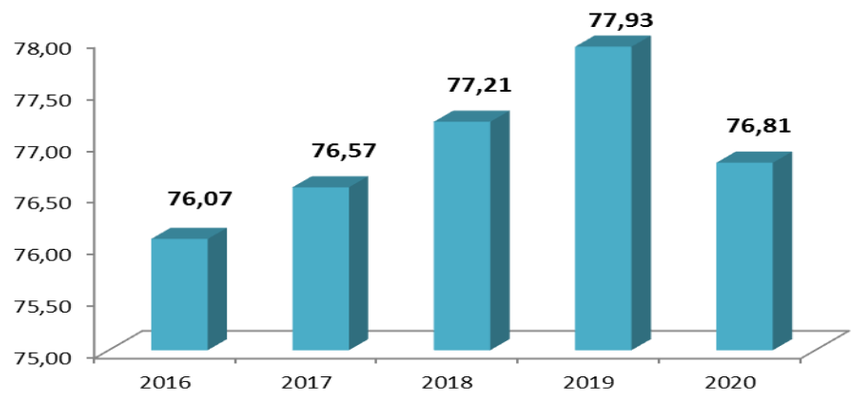
2.1.3.1.5.1 Jalan dan Jembatan

Peran infrastruktur sangat penting dalam mewujudkan pemenuhan hak dasar rakyat seperti pangan, sandang, papan, rasa aman, pendidikan, dan kesehatan. Infrastruktur juga memegang peranan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan daya saing.

Penanganan jalan dan jembatan menjadi sangat sentral. Apabila tidak mampu dilaksanakan berakibat pada aktifitas barang dan orang akan terhambat. Total panjang jalan yang yang menjadi kewenangan Provinsi Jambi berdasarkan SK.Gub.No.567/Kep.Gub/DPU/2012 tanggal 04 Oktober 2012 adalah 1.504,93 Km. Kemudian, dengan adanya

peningkatan status jalan dari jalan provinsi menjadi jalan nasional berdasarkan Ketetapan Menteri PUPR pada tanggal 23 April 2015, maka total panjang jalan provinsi adalah 1.129,906 km, selisih diantaranya sepanjang 375,025 km ruas jalan provinsi tersebut dinaikkan statusnya menjadi jalan nasional.

Panjang jalan Provinsi Jambi tahun 2020 adalah 1.032,88 km dan belum termasuk panjang jalan nasional dan kabupaten/kota. Panjang jalan ini tidak berubah dibandingkan dengan panjang jalan tahun 2019. Jalan Provinsi Jambi didominasi dengan kondisi jalan yang beraspal sepanjang 962,6 km, sedangkan jalan yang tidak beraspal hanya sepanjang 70,28 km. Kondisi jalan tidak beraspal 61,58 persen tanah dan sisanya berkerikil.



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan PR, 2021

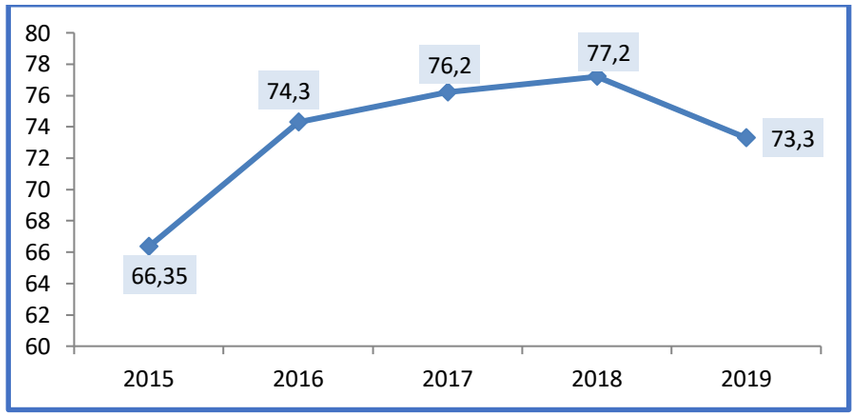
Gambar 2-32 Jalan dalam kondisi mantap Provinsi Jambi Tahun 2016-2020

Tingkat kemantapan jalan ditentukan oleh dua kriteria yakni mantap secara konstruksi dan mantap dalam layanan lalu lintas, Berdasarkan Keputusan Menkimpraswil No.534/KPTS/M/2001 maka Jalan dengan kondisi mantap adalah akumulasi jalan kondisi baik dan sedang. Hasil yang dicapai terhadap upaya peningkatan kondisi jalan di Provinsi Jambi dengan kondisi Mantap sampai tahun 2019 adalah 76,81 persen, mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya.

2.1.3.1.5.2 Sumber Daya Air

Luas areal layanan Irigasi di Provinsi Jambi adalah sebesar 33.248 Ha mencakup 92 Daerah Irigasi (DI) yang terdiri atas 2 DI Kewenangan Pusat, 4 DI Kewenangan Provinsi dan 86 DI Kewenangan Kab/Kota. Adapun DI Kewenangan Provinsi hingga tahun 2016 adalah

DI Suban, DI Batang Ule. DI Tanduk, dan DI Limun Singkut dengan luas keseluruhan yang 6.029 Ha. Pada tahun 2019, capaian indikator persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik terealisasi sebesar 73,3 persen. Capaian tahun 2019 tersebut mengalami penurunan dibanding capaian tahun 2018, dimana pada tahun 2018 persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik mencapai 77,2 persen. Hal ini disebabkan oleh kejadian longsor pada saluran primer Daerah Irigasi Limun Singkut pada tahun 2019 lalu, sehingga menurunkan kondisi irigasi tersebut.



Sumber: Dinas PUPR Prov. Jambi, 2020

Gambar 2-33 Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik di Provinsi Jambi Tahun 2015-2019

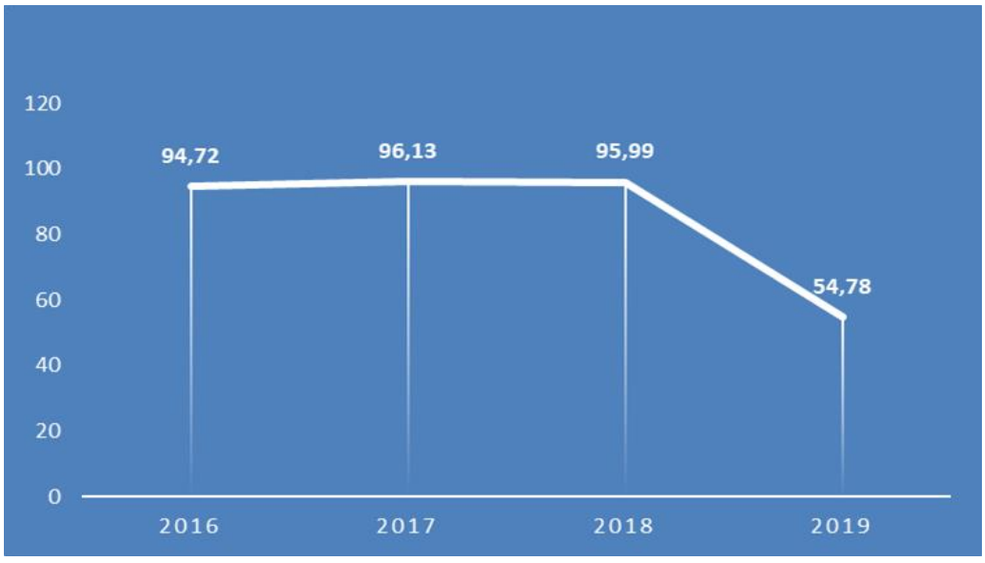
Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik atau fungsional memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, terutama pada Provinsi Jambi yang mayoritas penduduk bekerja di sektor pertanian. Persentase fungsionalisasi daerah irigasi sama artinya dengan meningkatkan fungsional lahan pertanian. Peningkatan luas daerah irigasi yang fungsional ditandai dengan Pertumbuhan Ekonomi dan meningkatnya lahan pertanian. Adapun faktor yang mempengaruhi Peningkatan luas daerah irigasi yang fungsional yaitu terdiri atas 2 faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor internal yang mempengaruhinya yaitu kemampuan teknis, pengawasan yang baik, matangnya perencanaan. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi peningkatan luas daerah irigasi yang fungsional yaitu dukungan berupa bantuan teknis dan keuangan dari pihak pemerintah dan kerjasama antar instansi yang terkait, yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Tanaman Pangan,

Hortikultura dan Peternakan. Langkah yang perlu diperhatikan dalam Peningkatan luas daerah irigasi yang fungsional yaitu aksesibilitas dan kondisi lahan pertanian.

2.1.3.1.6 Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman

Penanganan urusan perumahan rakyat, merupakan salah satu upaya dalam menciptakan lingkungan permukiman yang sehat, bersih, estetis dan nyaman. Penanganan urusan ini mencakup peningkatan kualitas permukiman dan perumahan beserta utilitasnya, terutama di daerah perkotaan. Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah berfokus pada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) terutama dalam meningkatkan standar hidup 40% terbawah, tantangan yang di hadapi iyalah akses terhadap hunian layak.

Definisi hunian layak adalah hunian yang memiliki ketahanan bangunan, kecukupan luas tempat tinggal,akses air minum yang baik, keterjangkauan dilihat dari proporsi pengeluaran rumah tangga, keamanan bermukim dan sanitasi yang layak dan aman, gambar di bawah ini menunjukan persen rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak di Provinsi Jambi.

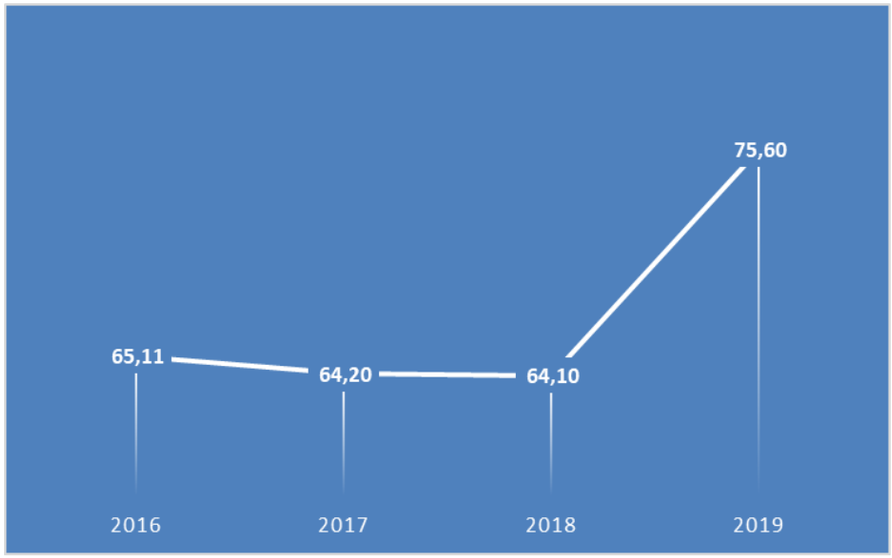


Sumber: BPS, 2020

Gambar 2-34 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Hunian Layak di Provinsi Jambi 2016-2019

Pada tahun 2016 rumah tangga di provinsi jambi yang meiliki akses hunian layak sebesar 94,72 persen, ini merupakan hal yang baik, karna hamper keseluruhan rumah tangga memiliki akses hunian layak, tetapi pada tahun 2019 akses hunian layak bagi rumah tangga turun menjadi 54,78 persen, banyak hal yang menyebabkan turunnya akses hunian layak ini antara lain kepadatan penduduk yang terus meningkat,penyediaan sumber air yang aman, dan keterjangkawan masyarakat untuk memiliki rumah sendiri, untuk itu kedepan diharapkan Pemerintah daerah dapat melakukan kebijakan yang dapat mengatasi masalah tersebut yaitu menekan laju pertumbuhan penduduk, memperbanyak ketersediaan sumber air aman, dan meningkatkan prekonomian masyarakat.

Sanitasi layak merupakan satu hal penting yang mempengaruhi kesehatan lingkungan. Suatu rumah tangga dikatakan memiliki akses ke sanitasi layak jika fasilitas sanitasi yang digunakan memenuhi syarat kesehatan, antara lain klosetnya menggunakan leher angsa atau plengsengan dengan tutup, tempat pembuangan akhir tinjanya menggunakan tangki septik (*septic tank*) atau Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL), dan fasilitas sanitasi tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu. Gambar 2.26 menunjukkan bahwa sekitar 75,60 persen rumah tangga di Provinsi Jambi pada tahun 2019 memiliki akses ke sanitasi layak. Persentase rumah tangga di perkotaan dengan akses ke sanitas layak lebih tinggi yaitu 83,49 persen dibandingkan dengan di perdesaan (57,28 persen) Rendahnya persentase tersebut menunjukkan perlunya upaya yang lebih besar untuk meningkatkan akses terhadap sanitasi layak khususnya di perdesaan.



Sumber : Jambi Dalam Angka, 2020

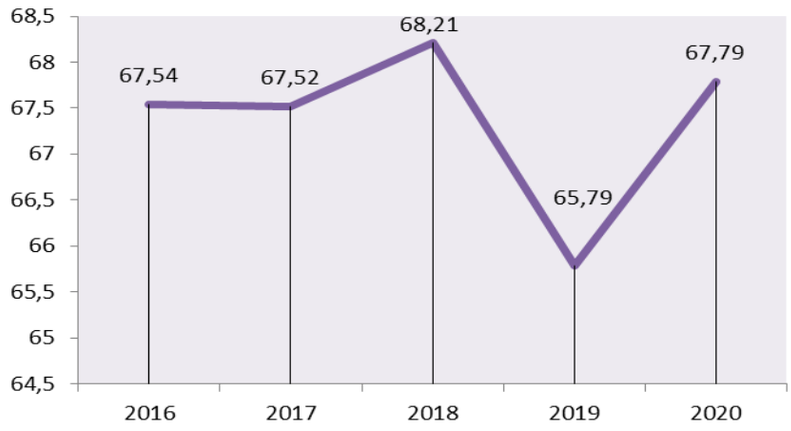
Gambar 2-35 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak di Provinsi Jambi Tahun 2016-2019

2.1.3.1.7 Urusan Tenaga Kerja

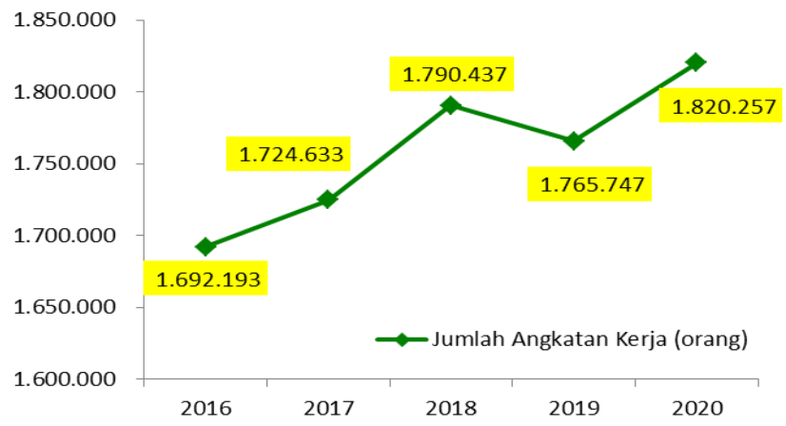
Keadaan ketenagakerjaan di Provinsi Jambi pada Agustus 2020 menunjukkan adanya peningkatan jumlah angkatan kerja sebanyak 78.000 orang dibanding Agustus 2019. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Jambi Agustus 2020 adalah sebesar 67,79% atau memperlihatkan peningkatan sebesar 2,0 % dibanding Agustus 2019 yang menunjukkan data sebesar 65,79%. Peningkatan TPAK memberikan indikasi adanya peningkatan potensi ekonomi dari sisi pasokan (supply) tenaga kerja. Selain itu, hal ini juga mengindikasikan bahwa upaya – upaya perluasan lapangan pekerjaan belum seimbang dengan peningkatan jumlah angkatan kerja, sehingga harus dilakukan peningkatan upaya perluasan lapangan pekerjaan dan penumbuhan wirausaha baru untuk menampung angkatan kerja yang ada di masa yang akan datang.

Bila dilihat tren sektoral selama Agustus 2019 – Agustus 2020, sektor-sektor yang mengalami peningkatan persentase penduduk yang bekerja terutama pada sektor pertambangan dan penggalian (1,22 persen poin), sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan (0,52 persen poin), dan sektor transportasi dan pergudangan (0,27 persen poin), Perdagangan besar dan eceran (0,12 persen poin), Jasa keuangan dan asuransi (0,11 persen poin), Pengadaan listrik dan gas (0,06 persen poin),

serta Jasa lainnya (0,01 persen poin). Sementara sektor-sektor yang mengalami penurunan terutama adalah sektor industri pengolahan (0,53 persen poin), sektor Administrasi pemerintahan (0,54 persen poin), sektor Konstruksi (0,39 persen poin) sektor Ja,sa Pendidikan (0,36 persen poin); Penyediaan Akomodasi makan dan minum (0.24 persen poin); Jasa Perusahaan (0.16 persen poin); serta Jasa Kesehatan (0,07 persen poin).



Gambar 2-36 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Jambi Tahun 2016-2020



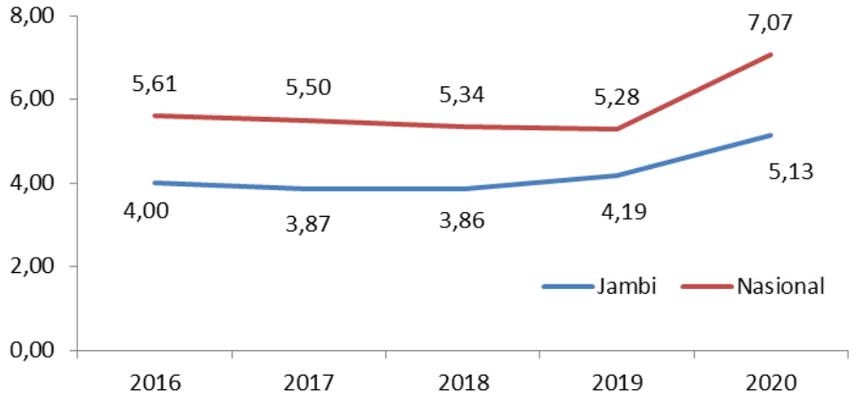
Sumber: Jambi Dalam Angka, BPS, 2021

Gambar 2-37 Jumlah Angkatan Kerja Provinsi Jambi Tahun 2016-2020

Tingkat pendidikan angkatan kerja terbanyak di Provinsi Jambi adalah tamat SD kebawah, namun kondisi ini terus membaik sehingga terjadi penurunan secara signifikan jumlah angkatan kerja dengan

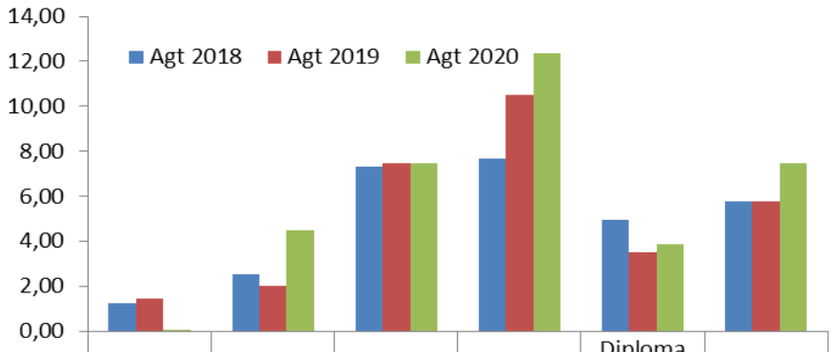
tingkat pendidikan SD kebawah diiringi peningkatan jumlah angkatan kerja lulusan SMP, SMA/SMK dan perguruan tinggi. Perbaikan kondisi ini harus terus ditingkatkan untuk meningkatkan produktifitas angkatan kerja.

Untuk mendorong tingkat produktifitas, maka angkatan kerja akan diarahkan kepada pendidikan kejuruan, sehingga angkatan kerja yang tamat SLTA sederajat akan memiliki keahlian yang mumpuni sesuai dengan bidangnya. Dengan demikian diharapkan tenaga kerja tersebut akan mampu bersaing tidak hanya di Provinsi Jambi, akan tetapi dalam wilayah yang lebih besar termasuk dalam memenuhi permintaan pasar tenaga kerja



Sumber: BPS, 2021

Gambar 2-43 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jambi dibanding nasional Tahun 2016 – 2020



	≤ SD	SMP	SMA	SMK	Diploma I/II/III	Univ
Agt 2018	1,22	2,52	7,30	7,66	4,97	5,77
Agt 2019	1,47	2,00	7,49	10,49	3,51	5,79
Agt 2020	0,02	4,51	7,45	12,35	3,86	7,47

Gambar 2-44 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jambi menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan Tahun 2016 – 2020

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Jambi dari tahun 2016-2018 cenderung menurun, namun pada tahun 2019 meningkat menjadi 4,19 persen,. Tingkat pengangguran tersebut didominasi oleh penganggur dengan pendidikan SMA/SMK, sementara yang paling sedikit adalah penganggur dengan pendidikan SD kebawah.

Selanjutnya, pada tahun 2020, TPT Provinsi Jambi kembali meningkat menjadi 5,13 pada Agustus 2020 terutama akibat pandemi Covid-19 di tahun 2020. Dengan adanya pandemi Covid-19, tidak hanya masalah kesehatan yang timbul, namun semua aspek dalam kehidupan ikut terdampak termasuk perekonomian. Perekonomian mulai menurun sejak diberlakukannya pembatasan aktivitas. Hal ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang masih menurun sampai pada triwulan IV tahun 2020. Penurunan tersebut juga berdampak pada dinamika ketenagakerjaan di Indonesia. Tidak hanya pengangguran, penduduk usia kerja lainnya juga turut terdampak dengan adanya pandemi Covid-19.

Tabel 2-16 Dampak Covid-19 terhadap Penduduk Usia Kerja Menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal, Agustus 2020

Komponen	Jenis Kelamin		Daerah Tempat Tinggal		Total
	Laki-laki (Ribu orang)	Perempuan (Ribu orang)	Perkotaan (Ribu Orang)	Perdesaan (Ribu Orang)	Ribu orang
[1]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
Pengangguran Karena Covid-19	10.55	8,24	11,88	6,91	18,79
Bukan Angkatan Kerja (BAK) Karena Covid-19	0,65	1,96	0.95	1,67	2,62
Sementara Tidak Bekerja Karena Covid-19	7,87	5,87	9,34	4,4	13,74
Penduduk Bekerja yang Mengalami Pengurangan Jam Kerja Karena Covid-19	133,42	84,32	121,64	96,09	217,74
Total	152,49	100,38	109,07	152,49	252,88
Penduduk Usia Kerja (PUK)	1.374,39	1.329,46	894,87	1.808,98	2.703,85
Persentase Terhadap PUK	11,10	7,55	16,07	6,03	9,35

Sumber : BPS, 2020

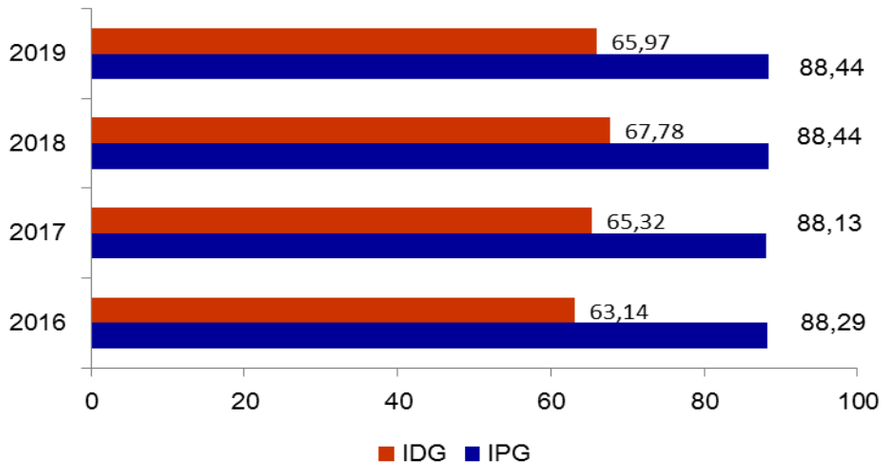
Pada Tabel diatas dapat dilihat bahwa dari penduduk usia kerja yang mencapai 2,703 ribu, terdapat 252,8 ribu orang yang terdampak Covid-19 atau 9,35 persen. Secara total, jumlah laki-laki yang terdampak Covid-19 lebih besar dibandingkan perempuan. Penduduk usia kerja

yang terdampak di perkotaan sebesar 16,07 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan di perdesaan, yakni 6,03 persen.

Berkurangnya jam kerja merupakan dampak Covid-19 yang paling banyak dirasakan penduduk usia kerja, sebanyak 217,74 ribu orang terdampak. Sedangkan jumlah penganggur karena dampak Covid-19 sebanyak 18,79 ribu orang atau sekitar 20 persen terhadap total penganggur (94 ribu orang) di Provinsi Jambi. Secara umum, pada semua kategori tersebut, jumlah laki-laki yang terdampak lebih banyak dibandingkan perempuan. Begitu juga jika dilihat menurut daerah tempat tinggal, penduduk usia kerja di daerah perkotaan lebih banyak terdampak Covid-19 dibandingkan dengan di perdesaan..

2.1.3.1.8 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

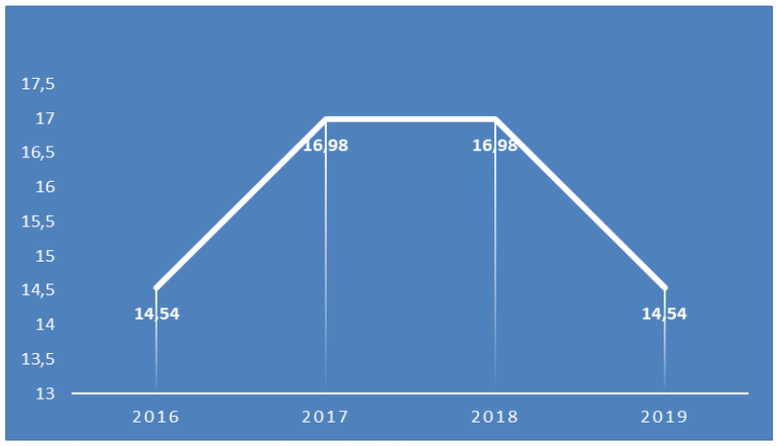
Perempuan merupakan faktor penting dalam pembangunan. Hal ini mengingat dari sisi jumlah penduduk, perempuan menempati jumlah yang lebih besar dibanding laki-laki. Meski demikian, pembangunan yang dilaksanakan selama ini seringkali masih menunjukkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan, yang cenderung menguntungkan laki-laki. Hal tersebut dapat dilihat pada beberapa indikator seperti Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Jambi yang masih tergolong rendah.



Sumber : BPS, 2020 (data diolah)

Gambar 2-45 IDG dan IPG Provinsi Jambi Tahun 2016 – 2019

Disamping itu, partisipasi perempuan dalam legislatif pada tahun 2016-2019 juga masih rendah, kuota 30 persen keterwakilan perempuan tidak tercapai. Hal tersebut dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Sumber : BPS, 2020 (data diolah)

Gambar 2-38 Persentase Partisipasi Perempuan Dalam Legislatif di Provinsi Jambi 2016-2019

Sehubungan dengan hal tersebut, pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi mengintegrasikan perspektif gender dalam pembangunan. Pengintegrasian perspektif gender tersebut dimulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi seluruh kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. PUG ditujukan untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan, yaitu pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia baik laki-laki maupun perempuan. Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumberdaya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan, serta mendapatkan manfaat dari kebijakan dan program pembangunan.

Terkait dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak, pada tahun 2019, terdapat 155 kasus yang ditangani oleh Pusat pelayanan terpadu Pemberdayaan perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Jambi, yang terdiri dari 72 kasus kekerasan terhadap perempuan, dan 83 kasus kekerasan terhadap anak. Diantara 72 kasus kekerasan terhadap perempuan yang terbanyak adalah kekerasan psikis yaitu sebanyak 44 kasus. Demikian juga kekerasan terhadap anak, yang terbanyak adalah kekerasan psikis sebanyak 68 kasus.

Tabel 2-17 Data Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Jambi Tahun 2019 (Kasus)

No	Jenis Kekerasan	Perempuan	Anak
1	Fisik	18	11
2	Psikis	44	68
3	Penelantaran	10	4

Sumber : Dinas P3AP2 Provinsi Jambi, 2020

2.1.3.1.9 Urusan Pangan

Berdasarkan hasil analisis Neraca Bahan Makanan Provinsi Jambi tahun 2016-2019, ketersediaan energi untuk konsumsi perkapita telah melebihi angka kecukupan gizi untuk energi di tingkat ketersediaan ideal sebesar 2.400 Kkal/kap/Hari.

Tabel 2-18 Perkembangan Kondisi Ketersediaan Energi Berdasarkan NBM Provinsi Jambi Tahun 2016-2019

No	Tahun	Ketersediaan Energi (Kkal/kap/hari)
1	2016	2.854
2	2017	3.425
3	2018	3.134
4	2019	3.047

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, 2020

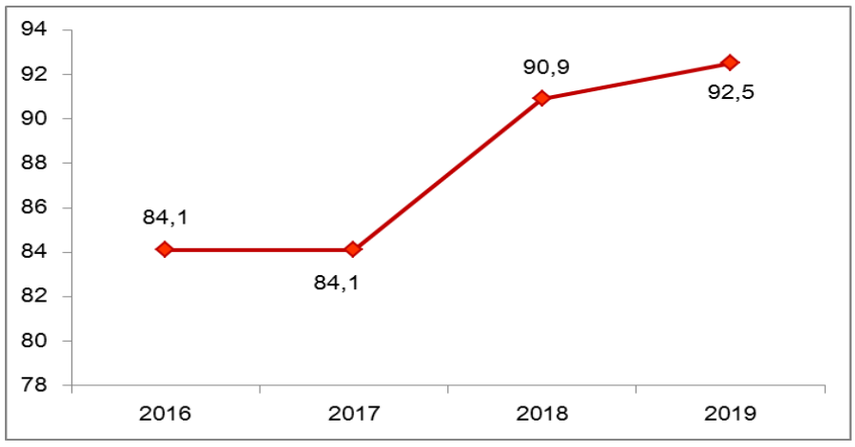
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Ketersediaan Energi telah melebihi ketersediaan energi ideal, namun dari komposisi ketersediaan kelompok bahan pangan belum berimbang. Di tahun 2019, komposisi ketersediaan bahan pangan masih didominasi oleh kelompok sumber bahan pangan penghasil karbohidrat, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, gula, serta sayur dan buah, sementara ketersediaan bahan pangan hewani dan kacang-kacangan masih lebih rendah dari ketersediaan ideal berdasarkan pola pangan harapan (PPH).

Tabel 2-19 Kondisi Ketersediaan Energi Provinsi Jambi Tahun 2019

No	Kelompok Bahan Pangan	Ketersediaan Energi (Kkal/kap/hari)	Ketersediaan Ideal (Kkal/kap/hari)
1	Padi-padian	1.520	1.200
2	Umbi-umbian	98	144
3	Pangan Hewani	183	288
4	Minyak dan Lemak	712	240
5	Buah Biji/Berminyak	208	72
6	Kacang-kacangan	56	120
7	Gula	141	120
8	Sayuran dan Buah	128	144
9	Lain-lain	-	72
	JUMLAH	**3.047**	**2.400**

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, 2020

Untuk mengetahui kualitas konsumsi pangan penduduk Provinsi Jambi dapat terlihat pada Skor Pola Pangan Harapan (PPH). Kondisi konsumsi pangan penduduk Provinsi Jambi selama periode 2016-2019 mengalami perubahan setiap tahunnya. Namun demikian masih terlihat bahwa sumber energi masih didominasi oleh bahan pangan asal beras (padi-padian) yaitu lebih dari 50 persen.



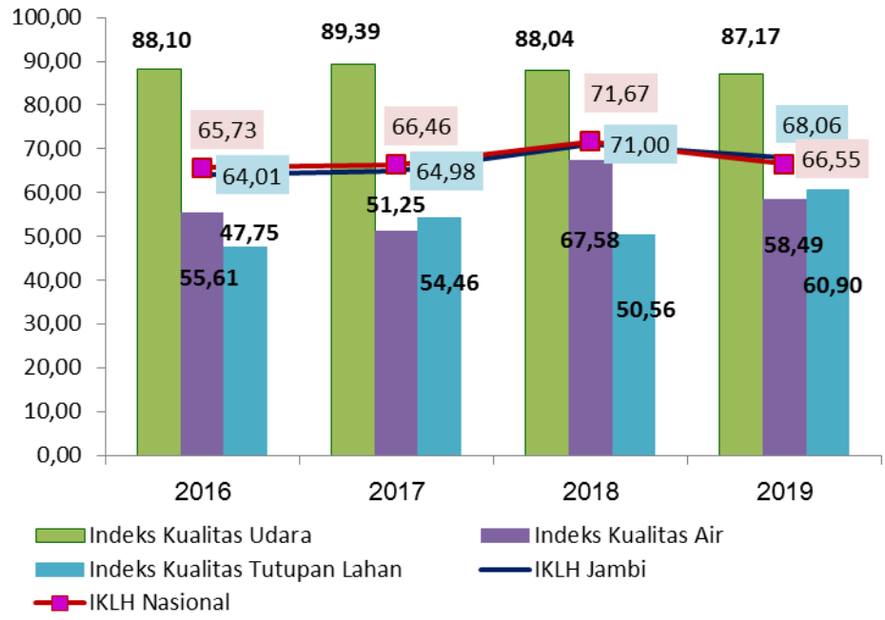
Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, 2020

Gambar 2-39 Perkembangan Skor PPH Provinsi Jambi Tahun 2016 - 2019

2.1.3.1.10 Urusan Lingkungan Hidup

Penyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup di Provinsi Jambi mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diarahkan pada upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Kinerja urusan lingkungan hidup Provinsi Jambi dapat ditunjukkan oleh Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), yang merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkunga hidup secara nasional, dan merupakan generalisasi dari indeks kualitas lingkungan hidup seluruh provinsi di Indonesia. Penghitungan nilai IKLH didasarkan pada 3 indikator utama, yaitu kualitas air sungai, kualitas udara, dan kualitas tutupan lahan.



Sumber : Kemen.LHK, 2020

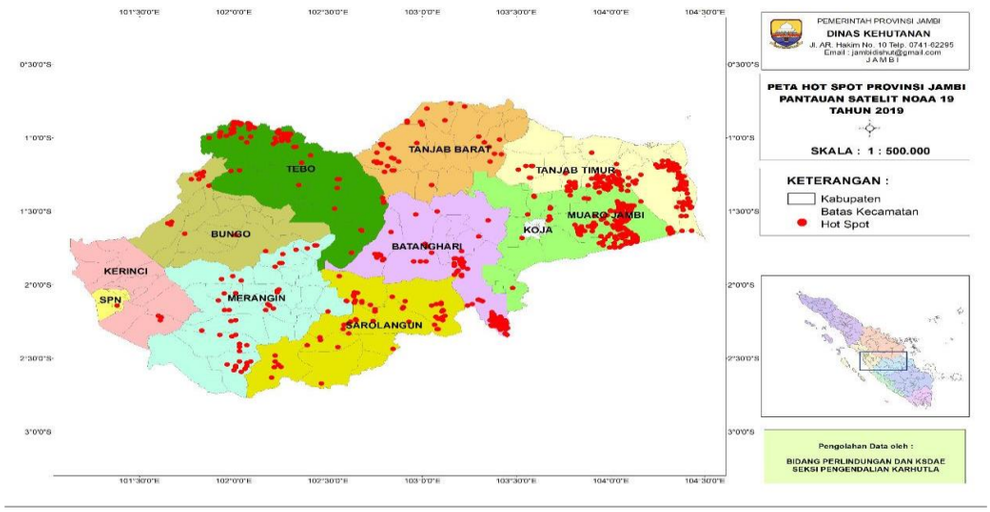
Gambar 2-40 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dibanding Nasional Tahun 2016-2019

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dalam rentang waktu 2016 – 2019 selalu menunjukkan angka di bawah nasional, namun pada tahun 2019 IKLH Provinsi Jambi lebih besar dibanding IKLH

Nasional. Indeks tersebut juga memperlihatkan fluktuasi, dimana pada tahun 2016 sebesar 64,01 menjadi 68,06 pada tahun 2019.

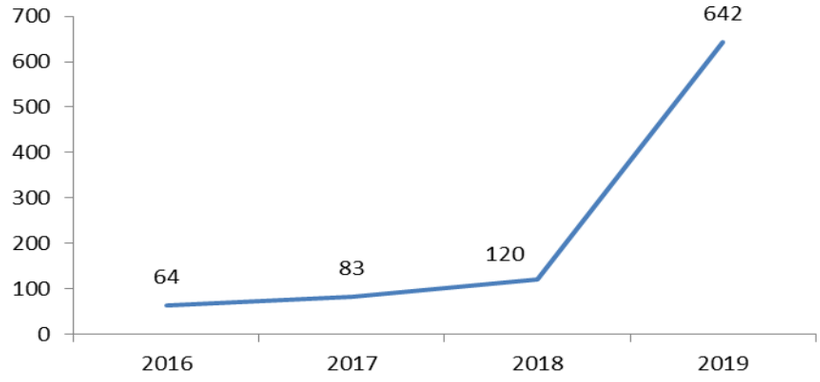
Penghitungan IKLH sejak tahun 2015 telah menggunakan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) yang merupakan penyempurnaan dari Indeks Tutupan Hutan (ITH) yang digunakan pada penghitungan IKLH tahun-tahun sebelumnya. Penyempurnaan ini telah mempertimbangkan dinamika vegetasi setiap tahun, kondisi habitat, kondisi tutupan lahan di luar kawasan hutan, dan kondisi tutupan lahan di sempadan sungai. Ketiga indeks yang diukur sedikit mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2016 Indeks Kualitas Udara mengalami penurunan yang cukup signifikan, yang disebabkan karena kebakaran lahan dan hutan cukup besar sehingga mempengaruhi kualitas udara dan aktivitas ekonomi penduduk Provinsi Jambi. Pada saat terjadi kabut asap tersebut, pemantauan terhadap parameter PM10 dilakukan dengan menggunakan alat AQMS (*air quality monitoring system*) mobile dari P3E Sumatera. Data PM10 tersebut kemudian dikonversikan ke ISPU sebagai bentuk informasi kualitas udara sesuai dengan KepMenLH Nomor 45 Tahun 1997 tentang Indeks Standar Pencemar Udara.

Pemerintah Provinsi Jambi terus melakukan upaya-upaya perbaikan perbaikan kualitas udara yang sangat dipengaruhi oleh kasus kebakaran lahan dan hutan yang terjadi pada musim kemarau. Tim terpadu kebakaran Hutan dan Lahan terus melakukan upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan dengan terus melakukan pemantauan hot spot, pemantauan langsung ke lapangan dan melakukan pemadaman secara cepat pada lahan yang terbakar. Tugas tim terpadu kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2019 cukup berat karena musim kemarau yang panjang. Berdasarkan data pemantauan hot spot, terdapat 642 hot spot di Provinsi Jambi yang tersebar di wilayah Kabupaten/kota dan terbanyak berada di Kabupaten Muaro Jambi. Peningkatan jumlah hot spot ini juga meningkatkan luas lahan dan hutan yang terbakar pada tahun 2019.



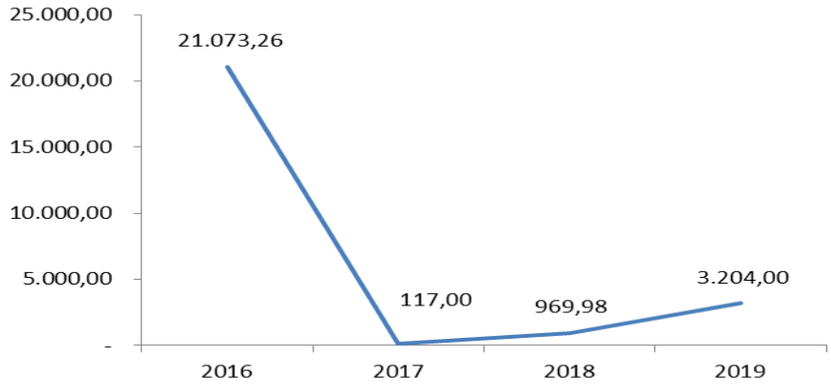
Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, 2020

Gambar 2-41 Sebaran Hotspot di Provinsi Jambi Tahun 2019



Sumber: Dinas Kehutanan Prov.Jambi, 2020

Gambar 2-42 Perkembangan Jumlah Hot spot di Provinsi Jambi



Sumber: Dinas Kehutanan Prov. Jambi, 2020

Gambar 2-43 Rehabilitasi lahan dan hutan yang dilakukan tahun 2016-2019

Perbaikan indeks tutupan lahan akan membutuhkan waktu beberapa tahun walaupun rehabilitasi hutan dan lahan terus dilakukan baik oleh Pemerintah Provinsi Jambi maupun pihak-pihak lainnya. Dalam rangka meningkatkan kualitas tutupan lahan tersebut, pada tahun 2019 Pemerintah Provinsi Jambi telah melakukan rehabilitasi terhadap lahan-lahan kritis seluas 3.204 hektar yang bersumber dari dana DBH-DR, NGO dan kompensasi pinjam pakai kawasan hutan, sehingga terjadi penurunan luas lahan kritis sebesar 0,37 persen.

Sementara itu untuk pemnatauan kualitas air, secara berkala dilakukan sampling air sungai lintas kabupaten/kota Provinsi Jambi dengan lokasi sebagaimana terlihat dalam tabel.

Tabel 2-20 Data lokasi Sampling Air Sungai Lintas Kabupaten/ Kota Provinsi Jambi

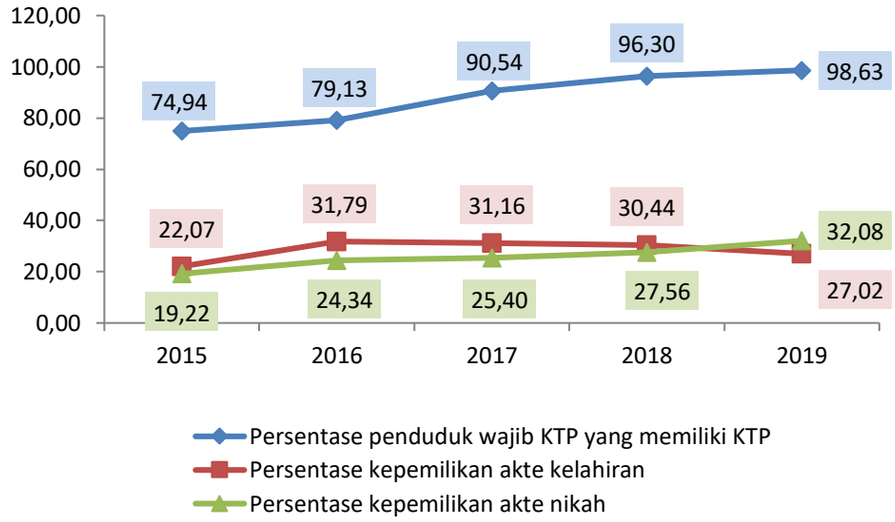
No	Nama Sungai	Nama Titik Sampling (Dari Hulu ke Hilir)
1	Batang Merangin	Desa Sanggaran Agung, Kab. Kerinci
2	Batang Merangin	Desa Muara Emat, Kab. Merangin
3	Batang Merangin	Kelurahan Pasar Bangko, Kab. Merangin
4	Batang Limun	Desa Pulau Pandan, Kab. Sarolangun
5	Batang Tembesi	Desa batu Kucing, Kab. Sarolangun
6	Batang Tembesi	Desa Sarolangun Kembang, Kab. Sarolangun
7	Batang Tebo	Desa Tanjung Gedang, Kabupaten Bungo
8	Sungai Pelepat	Desa Muaro Kuamang, Kab. Bungo
9	Batang Tebo	Desa Mangun Jayo, Kab. Tebo
10	Batang Sumay	Desa Teluk Singkawang, Kab. Tebo
11	Batang Tabir	Dusun Tuo Peninjauan, Kab. Batang Hari
12	Batang Tembesi	Desa Pasar Muara Tembesi, Kab. Batang Hari

Sumber: Dinas LH Prov. Jambi, 2020

2.1.3.1.11 Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil

Persentase penduduk berumur 17 tahun keatas yang mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Provinsi Jambi pada tahun 2019 meningkat signifikan dibanding tahun 2015, dari 51,18 persen menjadi 98,63 persen di tahun 2019. Sedangkan kepemilikan akte kelahiran dibandingkan jumlah penduduk belum memperlihatkan cakupan yang

baik, dimana sampai dengan tahun 2019 baru mencapai 27,02 persen. Sementara untuk kepemilikan akta nikah baru mencapai 32,08 persen pada tahun 2019, mengalami peningkatan dibanding tahun 2015 yang baru mencapai 19,22 persen. Masih rendahnya capaian pada urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil ini harus menjadi perhatian kedepan mengingat data kependudukan sangat penting dalam berbagai urusan yang lain.



Sumber: Dinas Sosdukcapil Prov. Jambi, 2020

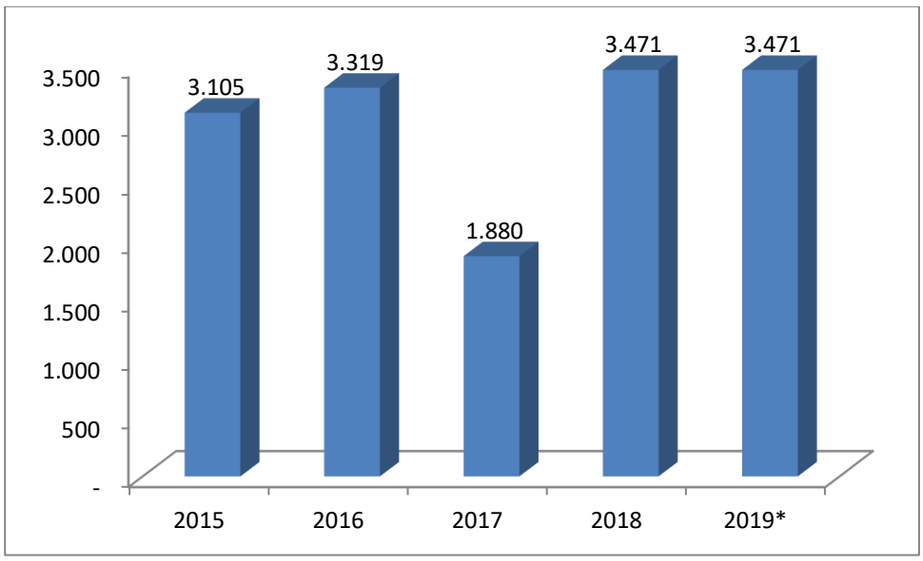
Gambar 2-44 Perkembangan capaian urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil Provinsi Jambi Tahun 2015-2019

2.1.3.1.12 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan artinya memiliki atau mempunyai daya. Dengan demikian pemberdayaan berarti membuat sesuatu menjadi berdaya. Sedangkan pemberdayaan masyarakat sendiri adalah upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat yang meliputi aspek ekonomi, sosial budaya, politik dan lingkungan hidup melalui penguatan pemerintahan desa/kelurahan, Lembaga Kemasyarakatan dan upaya penguatan kapasitas masyarakat.

Pembangunan pemberdayaan masyarakat dan desa merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Melalui proses pemberdayaan diharapkan masyarakat terlibat aktif dalam setiap tahapan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dan pemanfaatan hasil pembangunan. Selain itu masyarakat diharapkan mampu memetakan dan mengoptimalkan potensi diri dan

lingkungannya, serta mampu memecahkan permasalahan yang mereka hadapi secara mandiri.



Sumber: Dinas Kesehatan, 2020
**2019 Data Sementara*

Gambar 2-45 Perkembangan Posyandu Aktif di Provinsi Jambi Tahun 2015-2019

Salah satu hasil pemberdayaan masyarakat adalah keberadaan posyandu, karena kegiatan posyandu dilaksanakan oleh masyarakat khususnya kaum perempuan. Bila dilihat gambar di atas dapat diketahui bahwa jumlah posyandu aktif menunjukkan fluktuasi namun cenderung meningkat. Penurunan signifikan terjadi pada tahun 2017, untuk itu tingkat partisipasi dan keaktifan kegiatan posyandu dalam hal ini bukan hanya tanggung jawab dari sektor kesehatan, tetapi juga melibatkan pemberdayaan masyarakat, terutama PKK dan Rukun Tetangga.

Dalam hal pemanfaatan dana desa, realisasi di Provinsi Jambi cukup baik dimana pada tahun 2019 telah terealisasi sebesar 99,51 persen, meningkat dibandingkan tahun 2018 yang terealisasi sebesar 99,33 persen.

2.1.3.1.13 Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

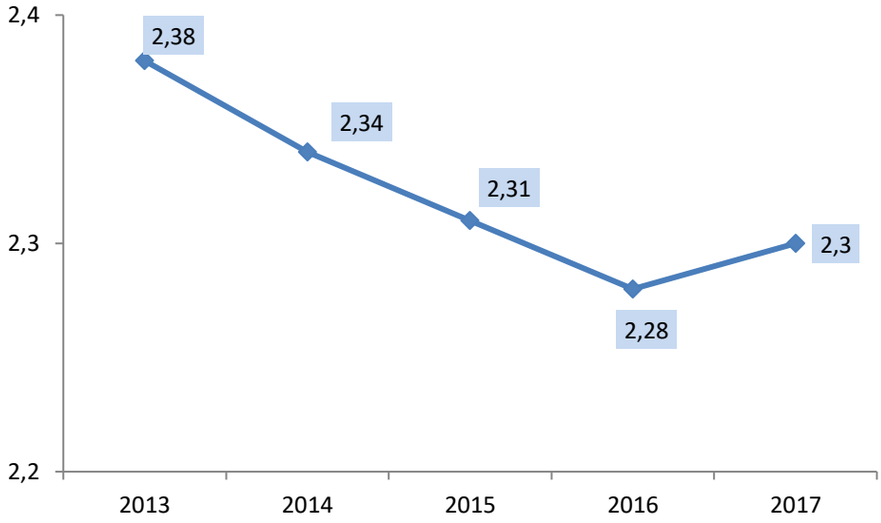
Salah satu prasyarat untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia adalah dengan mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dengan pengendalian kuantitas penduduk melalui

Keluarga Berencana. Sebagaimana ketahui bahwa kependudukan merupakan isu sentral dalam pembangunan. Penduduk merupakan subjek sekaligus objek pembangunan, dan berbagai upaya pembangunan tentu saja dilakukan dalam upaya pencapaian kesejahteraan penduduk.

Pada tahun 2019, jumlah penduduk Provinsi Jambi sebanyak 3.624.579 jiwa, meningkat dari 3.402.052 jiwa pada tahun 2015. Jumlah penduduk yang terus meningkat tentunya akan berimplikasi antara lain pada pemenuhan sandang, pangan, papan, energi, kemacetan bahkan kriminalitas. Untuk itu, perkembangan penduduk baik secara kuantitas maupun kualitas harus terus dikendalikan.

Dalam rangka upaya pengendalian jumlah penduduk, maka pemerintah menerapkan program Keluarga Berencana (KB). Program KB dan Kesehatan Reproduksi saat ini tidak hanya di tujukan untuk penurunan angka kelahiran, namun dikaitkan pula dengan tujuan untuk pemenuhan hak-hak reproduksi, promosi, pencegahan, dan penanganan masalah-masalah kesehatan reproduksi dan seksual, serta kesehatan dan kesejahteraan ibu, bayi, dan anak.

Adapun capaian yang berhasil diraih terkait Pengendalian Jumlah Penduduk di Provinsi Jambi antara lain yaitu *Total Fertility Rate/*Angka Kelahiran Total (TFR) Provinsi Jambi yang menunjukkan trend penurunan dari tahun 2013 hingga 2016. Angka TFR didapat melalui Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) yang diselenggarakan oleh BPS bekerjasama dengan BKKBN serta Kementerian Kesehatan. Survei tersebut tidak dilaksanakan setiap tahun, sehingga tidak setiap tahun juga angka TFR bisa didapat. Data terakhir adalah angka TFR tahun 2017, dan pada tahun 2022 baru akan dilakukan survei kembali. Pada kurun waktu 2007, 2012 dan 2017 didapat angka TFR Provinsi Jambi yang terus menurun, dimana pada tahun 2007 tercatat sebesar 2,8; tahun 2012 menjadi 2,3 dan stagnan pada angka tersebut pada tahun 2017. TFR sebesar 2,3 memberi arti bahwa seorang perempuan umur 15-49 tahun secara rata-rata akan memiliki 2-3 anak selama masa reproduksinya. Angka TFR dijadikan sebagai indikator untuk membandingkan keberhasilan antar wilayah dalam melaksanakan pembangunan sosial ekonomi serta menunjukkan tingkat keberhasilan program KB.

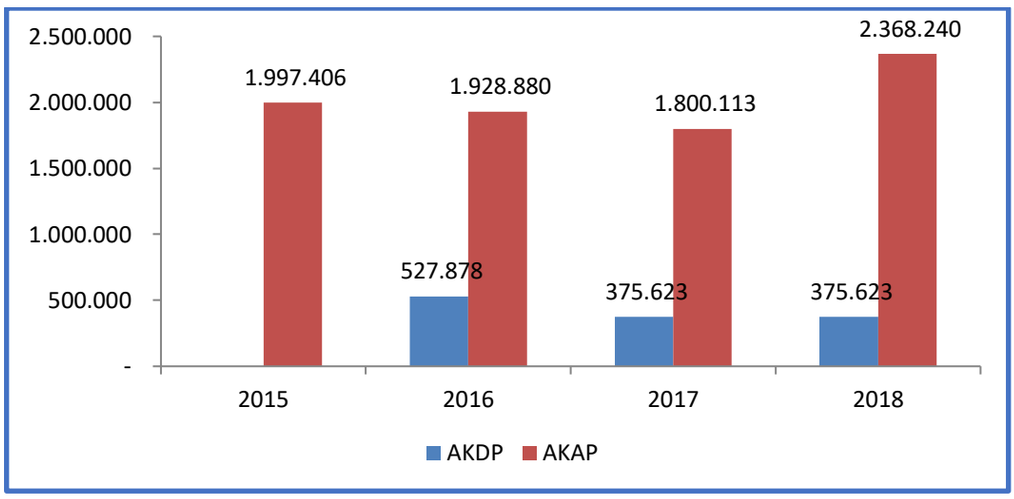


Sumber: BPS, 2019

Gambar 2-46 Angka Total Fertility Rate (TFR) Provinsi Jambi

2.1.3.1.14 Urusan Perhubungan

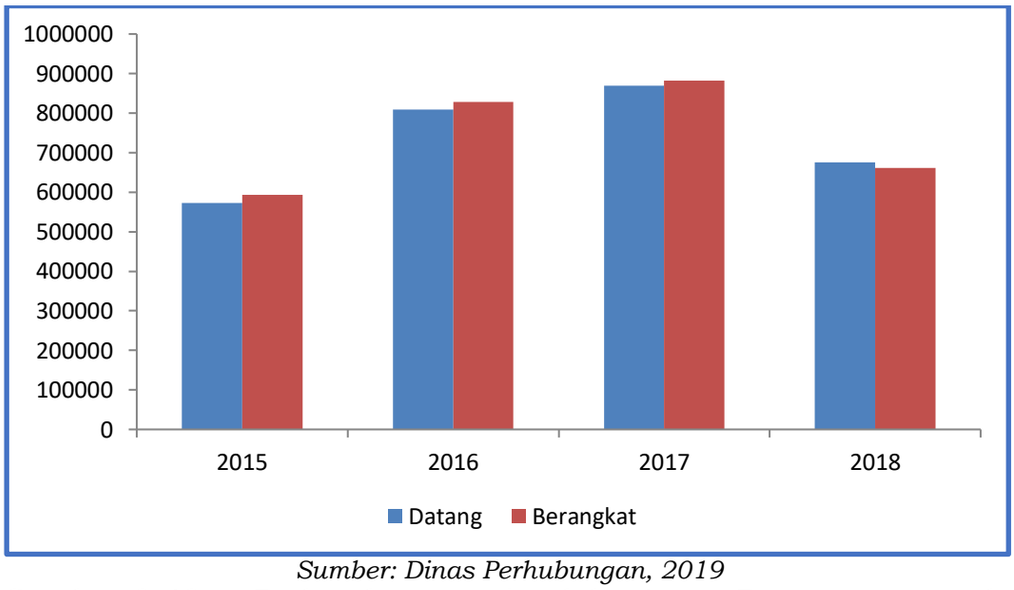
Penyelenggaraan urusan perhubungan di Provinsi Jambi terdiri dari transportasi darat, laut dan udara. Jumlah penumpang yang menggunakan angkutan umum darat antar kota dalam provinsi menunjukkan tren penurunan dibanding tahun sebelumnya, namun untuk angkutan kota antar provinsi menunjukkan peningkatan kendaraan yang masuk. Hal ini merupakan implikasi dari peningkatan pelayanan pada transportasi udara baik dari perbandingan biaya maupun waktu tempuh.



Sumber: Dinas Perhubungan, 2019

Gambar 2-47 Jumlah arus penumpang pada Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) di Provinsi Jambi

Moda transportasi udara memperlihatkan perkembangan yang cukup menggembirakan seiring perubahan preferensi masyarakat khususnya masyarakat Provinsi Jambi dalam pemilihan moda transportasi antar provinsi. Saat ini Provinsi telah memiliki 3 buah Bandara yaitu Bandara Sultan Thaha yang berada di Kota Jambi, Bandara Depati Parbo di Kabupaten Kerinci dan Bandara Bungo di Kabupaten Bungo. Pada Gambar dibawah ini dapat dilihat perkembangan jumlah penumpang yang datang dan berangkat melalui Bandar Udara Sultan Thaha, dimana terjadi peningkatan dari tahun 2015 hingga 2018. Untuk mengoptimalkan pelayanan ketiga bandara ini maka ke depan dibutuhkan pemenuhan perlengkapan dan peralatan khususnya untuk membantu operasional bandara pada cuaca yang kurang baik, seperti pada saat terjadi bencana asap.



Sumber: Dinas Perhubungan, 2019

Gambar 2-48 Perkembangan jumlah Arus Penumpang melalui Bandara Sultan Thaha

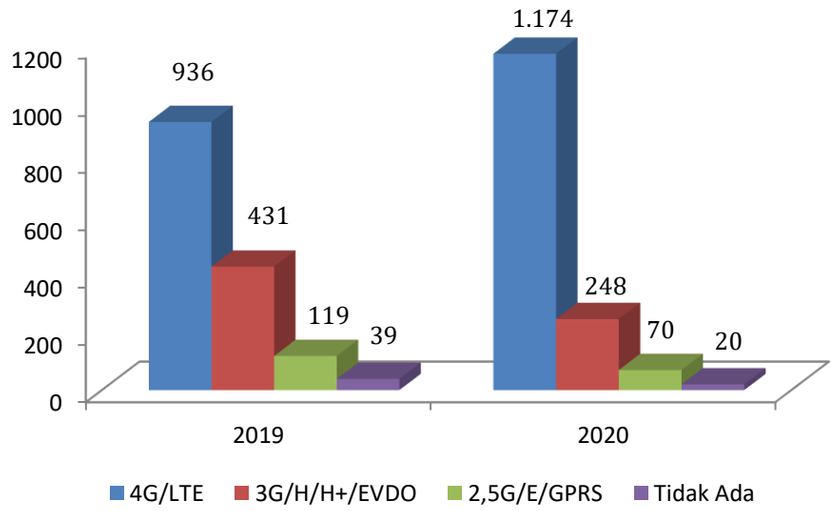
Pada transportasi laut, saat ini Provinsi Jambi memiliki 12 buah pelabuhan laut dan kedepan akan mendorong program prioritas yang berdasarkan Rencana Induk Pelabuhan Nasional yaitu pelabuhan Ujung Jabung sebagai pelabuhan utama. Jika dilihat dari alur lintasan barang dan orang yang melalui laut sesungguhnya memberikan pengaruh pada sektor perhubungan dan distribusi barang yang menghubungkan ke Pulau-pulau perbatasan dengan Provinsi Jambi. Untuk kebutuhan dasar

adalah dominan dari produksi sumberdaya alam di Provinsi Jambi yang melalui Pelabuhan Kuala Tungkal, pelabuhan Muara Sabak, dan pelabuhan-pelabuhan sungai lainnya. Oleh karena itu, sejak tahun 2012, Provinsi Jambi fokus untuk mendorong pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung sebagai outlet distribusi sumberdaya alam yang nantinya diharapkan tidak hanya dari Provinsi Jambi, akan tetapi dari Provinsi lainnya yang berbatasan sehingga peran pelabuhan tidak hanya komoditas lokal saja.

2.1.3.1.15 Urusan Komunikasi dan Informasi

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi, telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan menyentuh berbagai aspek kehidupan manusia. Karena manfaat Teknologi Informasi dan Komunikasi dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah serta membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat.

Terkait dengan pemanfaatan internet/intranet di seluruh perangkat daerah di Provinsi Jambi, saat ini seluruh perangkat daerah telah tersambung dan dapat terintegrasi dengan Portal Intranet/Internet dengan bandwidth sebesar 200 Mbps. Selanjutnya juga dilakukan kerjasama dengan PT. Telkom Indonesia untuk mengadakan transponder dengan bandwidth 4 Mhz untuk mempromosikan program/kegiatan Provinsi sampai ke pelosok pedesaan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri secara trkoneksi dan terintegrasi melalui penayangan siaran TVRI Jambi dan dapat dipergunakan untuk siaran langsung setiap saat dari mana saja dengan hasil gambar dan suara yang baik.



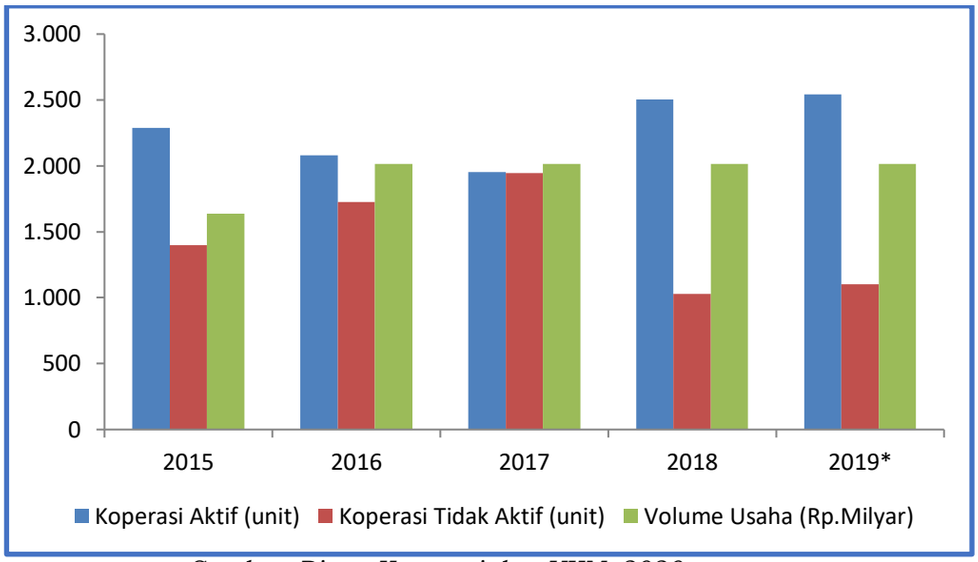
Sumber: BPS, 2021

Gambar 2-49 Jumlah Desa/Kelurahan yang Menerima Sinyal Internet Telepon Seluler di Provinsi Jambi Tahun 2019-2020

Pada grafik diatas dapat dilihat perkembangan desa/kelurahan di Provinsi Jambi yang telah menerima sinyal internet telepon seluler, dimana pada tahun 2020 hampir seluruhnya yang menerima sinyal 4G/LTE yaitu sebanyak 1.174 desa/kelurahan, meningkat sebanyak 25 persen dibanding tahun 2019. Hal tersebut menunjukkan bahwa teknologi informasi telah dapat diakses hingga ke desa-desa dan kelurahan.

2.1.3.1.16 Urusan Koperasi dan UKM

Ekonomi rakyat perlu mendapat perhatian layak. Dalam rangka mendukung kemandirian ekonomi, pemerintah juga perlu memperkuat ekonomi rakyat yang menjadi sumber kehidupan dan penghidupan mayoritas penduduk. Ekonomi rakyat menjelma dalam berbagai wujud aktivitas ekonomi dan usaha kecil-menengah: pedagang retail, pasar tradisional, industri rumahan (perajin). Ekonomi sektor informal (pedagang kaki lima, warung), selain sebagai wujud aktivitas ekonomi subsisten, juga berfungsi sebagai katup pengaman paling efektif di tingkat masyarakat bawah. Ekonomi rakyat dan ekonomi sektor informal merupakan contoh nyata kemandirian ekonomi, yang tidak goyah di tengah persaingan ekonomi pasar dan gempuran kapitalisme global.



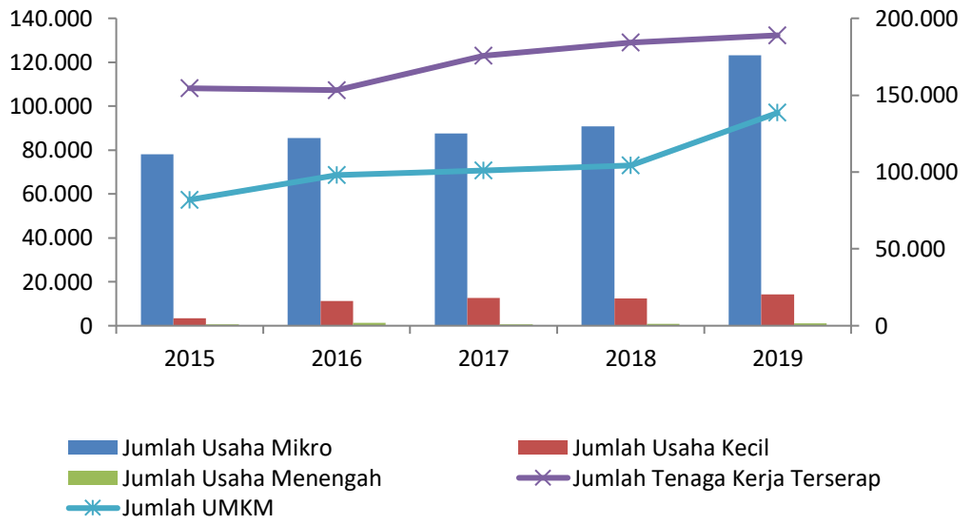
Sumber: Dinas Koperasi dan UKM, 2020

Gambar 2-50 Perkembangan Koperasi di Provinsi Jambi

Pada periode tahun 2015-2019, jumlah lembaga koperasi menurun dari 3.685 unit pada tahun 2015 menjadi 3.645 unit pada tahun 2019 atau rata-rata menurun sebesar -0,27 persen per tahun. Walaupun terjadi penurunan jumlah koperasi, jumlah lembaga koperasi yang aktif mengalami peningkatan yaitu dari 2.288 unit pada tahun 2015 menjadi 2.544 unit pada tahun 2019 atau mengalami rata-rata peningkatan sebesar 2,8 persen per tahun. Sejalan dengan peningkatan koperasi aktif, volume usaha koperasi pun turut mengalami peningkatan yang cukup menggembirakan, yaitu dari Rp1,64 trilyun pada tahun 2015, meningkat menjadi Rp2,02 trilyun pada tahun 2019, atau meningkat 5,8 persen pertahun. Hal ini sejalan dengan fokus urusan koperasi di Provinsi Jambi untuk meningkatkan kualitas koperasi di Provinsi Jambi. Untuk itu kedepan upaya-upaya pembinaan tersebut harus terus dilakukan dan ditingkatkan dengan cara-cara baru atau inovasi baru agar lebih baik.

Sementara itu, perkembangan jumlah UMKM di Provinsi Jambi menunjukkan peningkatan sebesar 68,95 persen dari tahun 2015 sampai tahun 2019, atau meningkat rata-rata 17,24 persen per tahun yaitu dari 81.959 unit pada tahun 2015 menjadi 138.470 unit di tahun 2019. Dibandingkan dengan jumlah usaha kecil dan menengah, usaha mikro memiliki jumlah yang terbanyak setiap tahunnya. Namun bila dilihat dari perkembangannya, maka terlihat bahwa perkembangan terbesar adalah pada usaha kecil, dimana usaha mikro meningkat rata-rata 14,48 persen pertahun, dibawah perkembangan usaha menengah

yang meningkat rata-rata 30,88 persen per tahun, sedangkan usaha kecil meningkat rata-rata sebesar 77,50 persen per tahun.



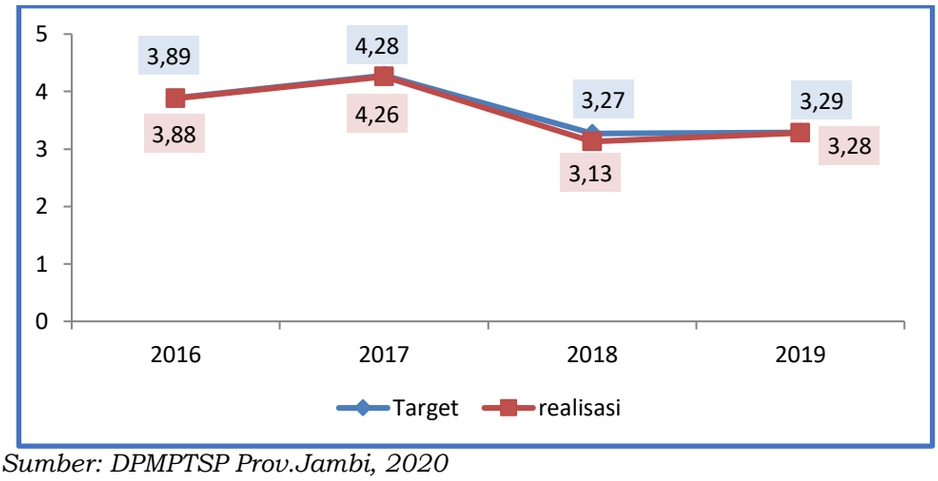
Sumber: Dinas Koperasi dan UKM, 2020

Gambar 2-51 Perkembangan UMKM dan serapan tenaga kerja pada UMKM di Provinsi Jambi Tahun 2015-2019

Selain peningkatan jumlah UMKM, pada periode yang sama terjadi peningkatan penyerapan tenaga kerja yaitu sebanyak 153.283 orang pada tahun 2015, bertambah menjadi 188.947 orang pada tahun 2019. Berarti penyerapan tenaga kerja dari UMKM meningkat setiap tahun rata-rata sebesar 17,24 persen. Hal ini seiring dengan kebutuhan tenaga kerja akibat peningkatan jumlah UMKM tersebut.

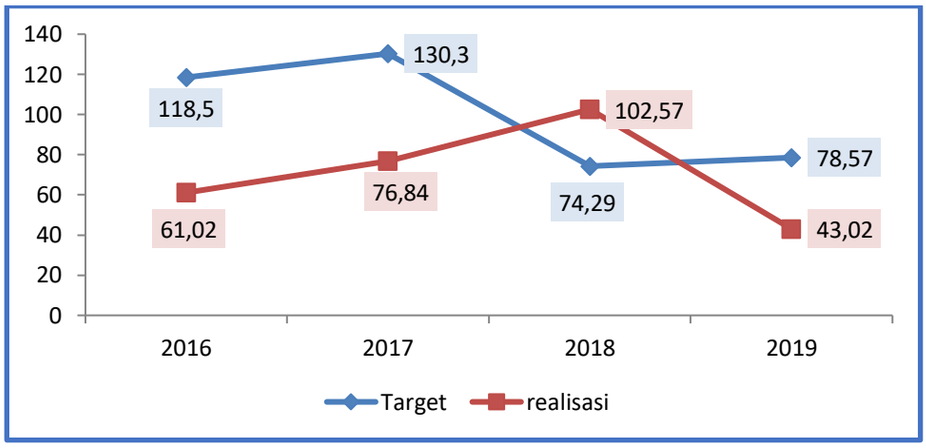
2.1.3.1.17 Urusan Penanaman Modal

Pada tahun 2019, perkembangan realisasi penamanan modal dalam negeri (PMDN) mengalami peningkatan, setelah terjadi penurunan pada tahun 2018. Namun hal sebaliknya terjadi pada realisasi penanaman modal asing, bila dilihat pada periode tahun 2016-2019 maka realisasi tahun 2019 adalah realisasi terendah, yaitu US$43,02 juta dari US$102,57 juta pada tahun 2018. Namun secara keseluruhan, target nilai investasi tahun 2019 telah terpenuhi.



Sumber: DPMPTSP Prov.Jambi, 2020

Gambar 2-52 Target dan realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (Rp. Triliun) tahun 2016-2019



Sumber: DPMPTSP Prov.Jambi, 2020

Gambar 2-53 target dan realisasi Penanaman Modal Luar Negeri (US$. juta) tahun 2016-2019

Untuk mempertahankan investasi yang sudah berjalan, mempercepat realisasi investasi yang sudah mendapat persetujuan, maka pengendalian, pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan Perusahaan PMA/PMDN serta menarik investor baru untuk menanamkan modalnya di Provinsi Jambi ada beberapa permasalahan/hambatan antara lain masih banyak pelaksanaan penyelesaian pelayanan perizinan yang melewati limit waktu yang telah ditetapkan, hal ini dikarenakan : a) Permohonan yang disampaikan belum memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan; b) Tim Teknis dari Instansi teknis kadang belum siap dan masih diinstansinya; c) Pemohon kurang mengetahui persyaratan yang telah ditetapkan; d) Sistem yang dilaksanakan untuk melayani perizinan sebahagian besar masih manual.

2.1.3.1.18 Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, maka oleh raga merupakan faktor penunjang yang sangat penting. Meskipun demikian budaya masyarakat Provinsi Jambi dalam berolah raga masih rendah. Demikian pula prestasi berbagai cabang olah raga yang diikuti oleh atlit Provinsi jambi juga belum menggembirakan.

Selama ini cabang olah raga yang ditumbuh kembangkan di Provinsi Jambi berjumlah 43 cabang yang mayoritas bernaung dibawah Komite Nasional Olahraga Indonesia (KONI) Provinsi Jambi. Jumlah cabang olahraga tersebut tersebar pad 11 Kabupaten/Kota. Namun dari segi fasilitas tidak semua cabang memiliki fasilitas yang lengkap. Hanya 23 cabang olahraga yang memiliki fasilitas lengkap. Adapun alokasi fasilitas olahraga menurut cabang dimuat pada tabel berikut ini.

Tabel 2-35 Fasilitas Olahraga Menurut Cabang Olahraga di Provinsi Jambi Tahun 2020

No	Cabang Olahraga	2020*	
		Pemda	Swasta
1	Sepak Bola	15	225
2	Tenis	24	31
3	Bulu Tangkis	16	92
4	Bola Voli	19	110
5	Basket	27	47
6	Tenis Meja	22	91
7	Pencak Silat	11	18
8	Lap. Menembak	0	0
9	Angkat Besi	5	1
10	Senam	1	0
11	Kolam Renang	0	12
12	Taekwondo	3	3
13	Judo	3	2
14	Kempo	1	4
15	Gulat	2	4
16	Panjat Tebing	7	2
17	Golf	0	2
18	GOR	1	4
19	Dayung	3	6
20	Tinju	0	3
21	Sepak Takraw	2	29
22	Karate	5	11
23	Catur	5	4

Sumber: Dispora Provinsi Jambi, 2021
**: Data Sementara*

Pemuda merupakan komponen masyarakan yang memiliki peran strategis di dalam pembangunan daerah. Prosentase jumlah yang besar dalam komposisi penduduk provinsi Jambi di satu sisi merupakan kekuatan, namun di sisi lain juga dapat menjadi penghambat dalam pembangunan daerah. Oleh karena itu pembinaan kepemudaan agar lebih produktif merupakan kebijakan yang perlu ditempuh. Organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP) termasuk juga pramuka, sebagai wadah dalam berhimpun dan menempa kemampuan dan keterampilan pemuda untuk itu perlu ditumbuhkembangkan.

Tabel 2-36 OKP tingkat Provinsi Jambi tahun 2020

No	Bidang	Organisasi Kemasyarkatan Pemuda
1	Keagamaan	PW. Pemuda Muhammadiyah (PM)
		GP. Ansor
		DPD Angkatan Muda Indoneia (AMII)
		PW. Ikatan Putra Nahdatul Ulama (IPNU)
2	Kebangsaan	DPD Pemuda Panca Marga (PPM)
		KNPI
3	Kemahasiswaan	Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)
		Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)
		Satuan Mahasiswa Pemuda Pancasila(Satma-PP)
4	Kepartaian	Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI)
		Pemuda Ka'bah
		BM PAN
5	Kekeluargaan	Forum Komunikasi Putra/putri Purnawirawan Indonesia (FKPPI)
6	kepanduan	Pramuka
		Hisbul Wathan

Sumber: Diskepora, 2021

2.1.3.1.19 Urusan Kebudayaan

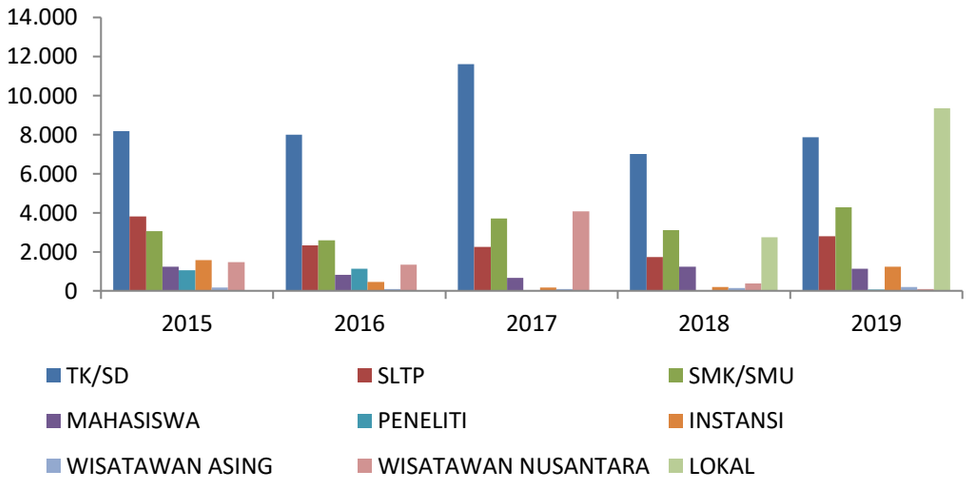
Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor : 42 Tahun 2009 dan_Nomor : 40 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan, Pemerintah daerah wajib melaksanakan pelestarian kebudayaan sebagaimana melalui perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan, yang meliputi aspek-

aspek: kesenian; kepurbakalaan; kesejarahan; permuseuman; kebahasaan; kesusastraan; tradisi; kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; kepustakaan; kenaskahan;dan perfilman.

Dalam rangka menumbuhkembangkan seni budaya khas Melayu Jambi, Pemerintah Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota selama ini telah dilaksanakan dan menetapkan agenda berkala kegiatan festival lomba dan pawai berbagai seni budaya Melayu Jambi.

Terkait dengan warisan budaya, penetapan Candi Muaro Jambi sebagai Cagar Budaya Nasional oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI saat ini telah terdaftar di UNESCO untuk di ajukan sebagai sebagai salah satu Warisan Dunia. Selain itu ditetapkannya Geopark Merangin Jambi sebagai salah satu Jaringan Geopark Nasional oleh Badan Geologi Kementerian ESDM yang saat ini dalam proses pengajuan untuk menjadi Global Geopark Network (GGN) UNESCO. Sementara itu di Provinsi Jambi masih terdapat sejumlah cagar budaya yang belum dilakukan proses penetapan.

Aspek budaya daerah lain yang juga perlu mendapat perhatian adalah tradisi yang masyarakat, lembaga adat yang penganutnya lintas kabupaten/kota dan dokumentasi sejarah daerah Provinsi Jambi, serta ragam bahasa daerah. Selain itu museum sebagai bagian dari pelestarian budaya keberadaannya di Provinsi Jambi cukup mendapat apresiasi. Hal ini terlihat dari kunjungan masyarakat ke museum Siginjai Provinsi Jambi Tahun 2015-2019 sebagaimana digambarkan di bawah. Dari gambaran tersebut terlihat bahwa jumlah pengunjung fluktuatif. Sedang dari sisi pengunjungnya pada umumnya didominasi pelajar SD/TK. Hal ini menunjukkan bahwa minat masyarakat terhadap museum belum terlalu baik. Oleh karena itu perlu dibuat program – program yang dapat menarik minat masyarakat untuk mengunjungi museum.



Sumber: Dinas Budpar Prov. Jambi, 2020

Gambar 2-54 Jumlah Pengunjung Museum Siginjai Provinsi Jambi Tahun 2015-2019

2.1.3.1.20 Urusan Perpustakaan

Pada tahun 2016-2019, jumlah anggota perpustakaan Provinsi Jambi mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun. Penurunan ini disebabkan akibat pesatnya kemajuan internet sehingga mengurangi minat baca masyarakat ke perpustakaan. Di sisi lain perlu juga dievaluasi terkait dengan fasilitas, sarana prasarana dan sistem layanan perpustakaan, termasuk koleksi buku yang dibutuhkan pembaca. Kecenderungan penurunan jumlah anggota perpustakaan dipengaruhi oleh semakin mudah dan murahnya akses internet. Melihat tren minat baca yang mulai beralih ke digital, perpustakaan Provinsi Jambi sebaiknya mulai beralih secara perlahan menjadi perpustakaan digital menyesuaikan perkembangan kemajuan zaman.

Tabel 2-21 Jumlah Anggota Perpustakaan Provinsi Jambi Tahun 2016-2019

No	Tahun	Jumlah (orang)	Perkembangan (%)
1	2016	8.971	255,57
2	2017	3.271	-63,54
3	2018	3.405	4,1
4	2019	2.975	-12,63

Sumber: DPAD Provinsi Jambi, 2020

Di sisi lain, pada periode yang sama penurunan tidak terjadi pada jumlah pengunjung perpustakaan, meskipun berfluktuasi namun cenderung meningkat, yaitu dari 249.945 orang pengunjung di tahun 2016 menjadi 271.312 orang di tahun 2019.

Tabel 2-22 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Provinsi Jambi Tahun 2015-2019

No	Tahun	Jumlah (orang)	Perkembangan (%)
1	2016	249.945	-3,55
2	2017	260.100	4,06
3	2018	270.887	4,15
4	2019	271.312	0,16

Sumber: DPAD Provinsi Jambi, 2021

Tabel 2-23 Jumlah Koleksi Buku Perpustakaan di Provinsi Jambi Tahun 2016-2020

No	Tahun	Jumlah (buku)	Perkembangan (%)
1	2016	177.854 eks	534,94
2	2017	186.833 eks	5,05
3	2018	13.896 eks	-92,56
4	2019	157.366 eks	1032,46

Sumber: DPAD Provinsi Jambi, 2021

Jumlah koleksi buku perpustakaan Provinsi Jambi berfluktuasi dengan kecenderungan menurun pada kurun tahun 2016-2019, yaitu dari 177.854 eksemplar pada tahun 2016 menjadi 157.366 eksemplar pada tahun 2019 yang disebabkan karena kondisi buku – buku yang mulai rusak..

2.1.3.1.21 Urusan Kearsipan

Dibidang Kearsipan, ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di Provinsi Jambi, yaitu antara lain: terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kearsipan dengan standar minimal operasional, tercapainya peningkatan ketatalaksanaan metode pengelolaan, penataan dan layanan kearsipan, terwujudnya pemberdayaan unit kearsipan yang mampu mengelola arsip menjadi sumber informasi lengkap, cepat dan tepat, terciptanya arsiparis, tenaga pengelola arsip yang terampil dan profesional melalui pembinaan dan pelatihan kearsipan.

Tabel 2-24 Capaian urusan kearsipan di Provinsi Jambi

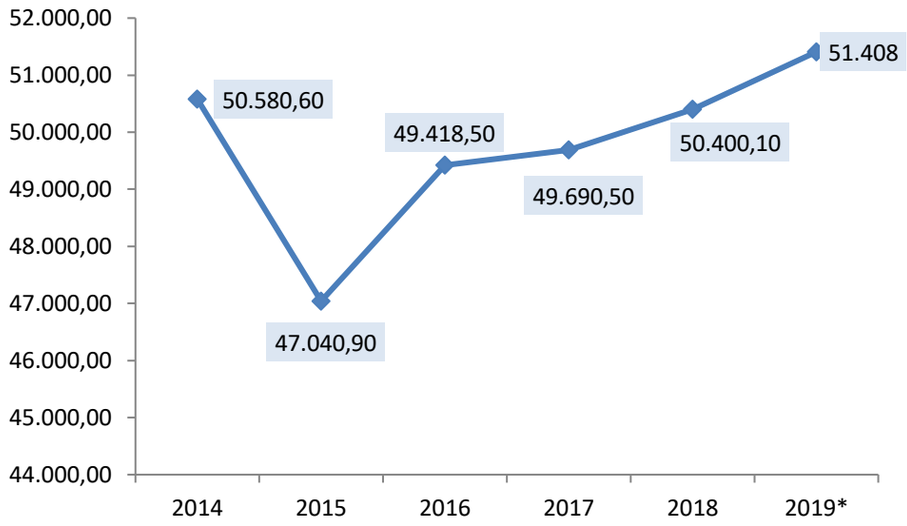
No	Uraian	2016	2017	2018	2019
1	Pemberkasan arsip in-aktif	5.000 berkas pendataan/tata	1.500 berkas arsip in aktif		7.891 berkasmusnah
		700 berkas akuisisi	1.000 berkas usul musnah 3.501	nihil	15.765 arsip In-aktif
2	Penyusutan Arsip			6.901 berkas	7.891 berkasmusnah
				(7 OPD)	
3	Akuisisi			34 album	34 Album
				285 CD	285 CD
				5 profil dewan	5 Profil dewan
4	Bertambahnya koleksi arsip statis dan mempermudah penemuan kembali arsip	550 photo	200 photo		157 Photo
		4.267 lembar peta	250 peta		10.898 peta
		1.262 arsip buku	60 arsip buku		325 arsipbuku
		150 naskah dinas	154 naskah dinas	nihil	2.970 naskah kuno
5	Telaksananya pameran kearsipan	3 kali	2 kali	1 kali	1 kali

Sumber: DPAD Provinsi Jambi, 2020

2.1.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan

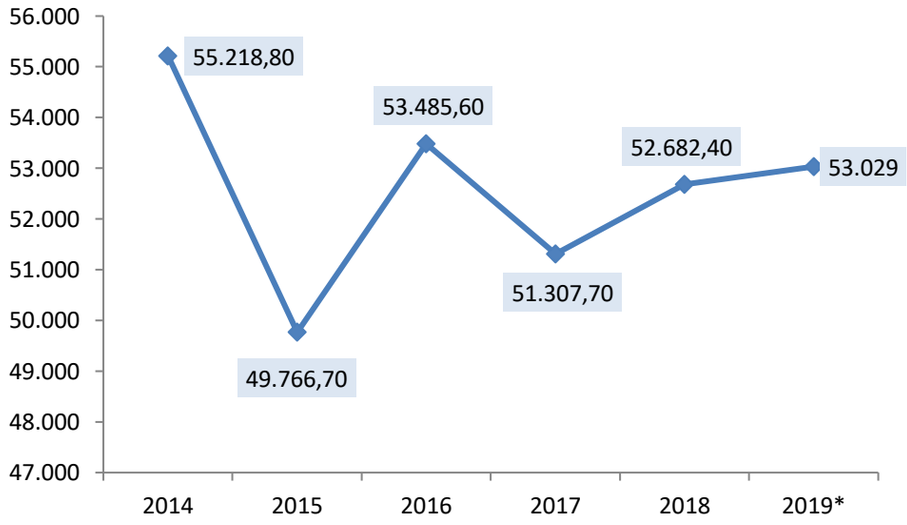
2.1.3.2.1 Urusan Kelautan dan Perikanan

Perkembangan produksi perikanan tahun 2014–2019 menunjukkan kecenderungan berfluktuasi. Dari tabel dan grafik terlihat produksi perikanan budidaya pada tahun 2014 sebesar 50.580,6 ton dan mengalami penurunan pada tahun 2015 menjadi 47.040,9 ton. Di tahun 2016 produksi perikanan budidaya berada pada angka 49.418,5 ton dan terus meningkat hingga tahun 2018 menjadi 50.400,1 ton dan di tahun 2019 menjadi 51.408 ton. Penurunan angka produksi di tahun 2015 tersebut dikarenakan kemarau panjang dan bencana kabut asap yang terjadi di Provinsi Jambi dan sekitarnya yang menyebabkan kekeringan dan penurunan kualitas air sehingga menghambat proses produksi.



Sumber: DKP Provinsi Jambi, 2020
**Realisasi sementara*

Gambar 2-55 Perkembangan produksi perikanan budidaya (ton) di Provinsi Jambi



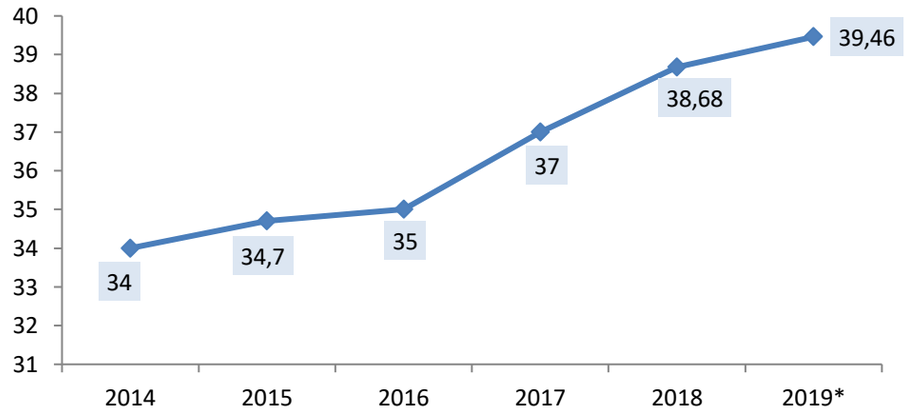
Sumber: DKP Provinsi Jambi, 2020
**Realisasi sementara*

Gambar 2-56 Perkembangan produksi perikanan tangkap di Provinsi Jambi (ton)

Gambar diatas memperlihatkan bahwa produksi perikanan tangkap pada tahun 2014 sebesar 55.218,8 ton dan mengalami penurunan pada tahun 2015 menjadi 49.766,7 ton. Di tahun 2017 produksi perikanan budidaya berada pada angka 51.307,7 ton dan terus meningkat hingga tahun 2018 menjadi 52.682,4 ton dan di tahun 2019 menjadi 53.029 ton. Penurunan angka produksi di tahun 2015 tersebut

dikarenakan kemarau panjang dan bencana kabut asap yang terjadi di Provinsi Jambi dan sekitarnya yang menyebabkan jarak pandang nelayan menjadi terbatas dan menghambat aktifitas penangkapan ikan baik di wilayah perairan laut maupun perairan umum.

Tingkat konsumsi ikan per kapita masyarakat Provinsi Jambi pada periode tahun 2014-2019 meningkat setiap tahunnya. Upaya meningkatkan angka konsumsi ikan ini dilakukan melalui Program Pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dengan bermacam kegiatan diantaranya pameran produk perikanan, Kampanye GEMARIKAN, Lomba masak serba ikan, Demonstrasi pengolahan (diversifikasi) produk yang berbahan dasar ikan, peningkatan mutu produk, pengembangan produk dan lain sebagainya.



Sumber: DKP Provinsi Jambi, 2020
**Realisasi sementara*

Gambar 2-57 Perkembangan angka konsumsi ikan perkapita masyarakat Provinsi Jambi (kg/perkapita/tahun)

2.1.3.2.2 Urusan Pariwisata

Pembangunan pariwisata diarahkan untuk mendorong peningkatan penerimaan daerah dan peningkatan nilai tambah produk-produk ekonomi kreatif, dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan tata kelola pemerintahan yang baik. Pembangunan pariwisata dapat terlihat dari jumlah kunjungan wisatawan baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara. Terkait dengan hal tersebut, jumlah kunjungan wisatawan di Provinsi Jambi baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara terlihat fluktuatif selama tahun 2015-2019.

Tabel 2-25 Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Provinsi Jambi Tahun 2015- 2019

No.	Wisatawan	2015 (Orang)	2016 (Orang)	2017 (Orang)	2018 (Orang)	2019 (Orang)
a	b	c	d	e	f	g
1	Kerinci	4.310	6.477	1.386	5.325	3.859
2	Merangin	-	-	-	-	238
3	Sarolangun	108	157	108	135	64
4	Batang Hari	38	54	54	65	49
5	Muaro Jambi	230	378	545	713	424
6	Tanjabtim	54	42	16	19	5
7	Tanjabbar	22	36	54	53	25
8	Bungo	54	36	16	22	8
9	Tebo	40	24	27	13	1
10	Kota Jambi	5.888	4.834	3.160	4.523	5.328
11	Sungai Penuh	32	30	13	19	525
Total Provinsi Jambi		10.776	12.069	5.378	10.887	10.526
Pertumbuhan		6,49%	12,00%	-55,44%	102,44%	-3,32%

Sumber: Disbudpar Provinsi Jambi,2020

Tabel 2-26 Kunjungan Wisatawan Nusantara ke Provinsi Jambi Tahun 2015- 2019

No.	**Tujuan**	**2015 (Orang)**	**2016 (Orang)**	**2017 (Orang)**	**2018 (Orang)**	**2019 (Orang)**
A	B	f	g	h	i	
1	Kerinci	329.175	328.965	266.554	359.667	387.584
2	Merangin	520.309	520.862	431.355	465.000	448.933
3	Sarolangun	33.077	32.897	21.568	34.389	43.130
4	Batang Hari	19.821	35.638	17.254	37.106	40.799
5	Muaro	297.319	274.138	258.813	265.300	104.827
6	Tanjabtim	9.911	16.448	8.627	9.012	9.525
7	Tanjabbar	37.165	54.828	45.782	58.571	14.760
8	Bungo	103.548	109.655	97.055	91.045	91.045
9	Tebo	247.766	219.310	258.813	125.750	106.049
10	Kota Jambi	693.745	1.011.569	653.900	867.500	886.971
11	Sungai	185.825	137.069	97.055	75.333	40.799
Total		**2.477.660**	**2.741.379**	**2.156.777**	**2.388.673**	**2.094.549**
Pertumbuhan		**8,00%**	**10,64%**	**-21,33%**	**10,75%**	**-12,31%**

Sumber: Disbudpar Provinsi Jambi,2020

Bila dilihat jumlah daya tarik wisata dari tahun 2015 hingga tahun 2019, terlihat kecenderungan meningkat secara total. Namun bila dilihat lebih rinci terlihat bahwa peningkatan terbesar adalah pada wisata buatan yang diikuti oleh wisata alam. Sedangkan wisata sejarah/budaya malah cenderung memperlihatkan penurunan jumlah dari tahun 2015 – 2019. Untuk itu kedepan perlu perhatian lebih pada daya tarik wisata ini.

Tabel 2-27 Jumlah Daya Tarik Wisata di Provinsi Jambi Tahun 2015 - 2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Wisata Alam	184	193	193	191	215
Wisata Buatan	112	119	130	142	205
Wisata Sejarah/Budaya	129	133	133	133	113
Total	**425**	**445**	**456**	**466**	**533**

Sumber: Disbudpar Provinsi Jambi,2020

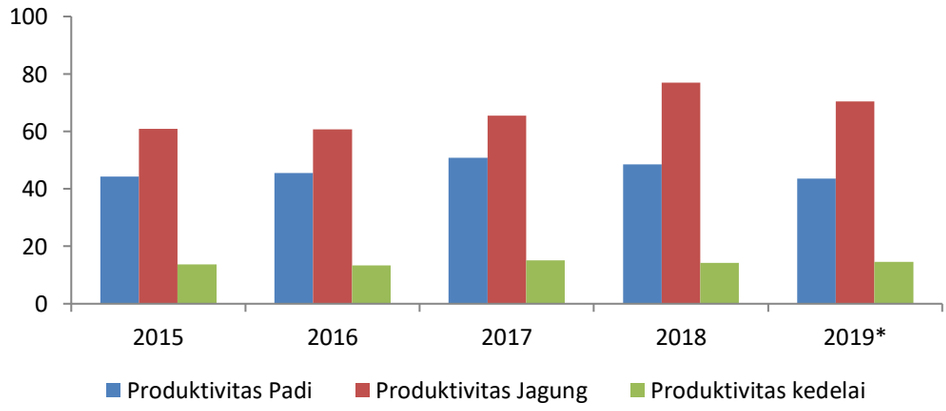
Hal ini mengindikasikan bahwa sektor pariwisata belum berkembang di Provinsi Jambi, padahal potensi yang dapat dikembangkan cukup banyak. Beberapa hal yang menghambat adalah kurangnya promosi dan pembinaan terhadap pemangku kepentingan yang bergerak di bidang pariwisata. Ke depan, kegiatan promosi melalui berbagai media serta peningkatan kuantitas dan kualitas ekonomi kreatif harus lebih baik agar pariwisata menjadi salah satu sektor penyumbang pendapatan daerah yang besar di Provinsi Jambi, sehingga pada akhirnya dapat menjadi salah satu solusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.1.3.2.3 Urusan Pertanian

Pertanian merupakan sektor yang sangat penting bagi perekonomian suatu Negara tidak perlu dipertanyakan lagi. Bukan hanya karena pada masa krisis hanya sektor pertanian yang mengalami pertumbuhan yang positif, tapi tidak ada satu Negara majupun di dunia dimana pertaniannya tidak maju. Pertanian menjadi landasan perekonomian suatu Negara, menjadi sumber pangan, sandang dan papan yang bermutu, murah, dan berkesinambungan bagi masyarakat suatu bangsa, sebagai sumber bahan baku bagi industri lainnya, dan sebagai pemasok tenaga kerja bagi sektor manufaktur dan sektor jasa di perkotaan.

Pertanian merupakan sektor ekonomi potensial dalam empat bentuk kontribusinya terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, yaitu kontribusi produk, kontribusi pasar, kontribusi faktor-faktor produksi, dan kontribusi devisa (Kuznet, 1964). *Pertama*, kontribusi produk, diartikan bahwa produk-produk pertanian sangat menentukan pengembangan sektor ekonomi lainnya melalui penyediaan makanan (konsumsi) dan penyediaan bahan baku (keterkaitan produksi)

bagi kegiatan industri. Dalam konteks ekonomi makro, sektor pertanian memiliki kontribusi penting terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). *Kedua*, kontribusi pasar, yaitu besarnya penduduk yang bekerja di sektor pertanian dan intensitas pembangunan pertanian merupakan sumber pertumbuhan yang penting bagi pasar domestik untuk produk-produk dari industri, termasuk pasar untuk barang produsen (input produksi pertanian) maupun barang konsumsi. Besar kecilnya kontribusi pasar tergantung dari sistem ekonomi dan jenis teknologi yang dipakai dalam pertanian. *Ketiga*, kontribusi faktor-faktor produksi, sektor pertanian dianggap sebagai sumber modal investasi melalui proses transfer surplus modal dari pertanian ke sektor non pertanian, proses transfer tenaga kerja dari pertanian ke sektor non pertanian, dalam proses pertumbuhan ekonomi terjadi transfer surplus tenaga kerja pertanian (pedesaan) ke sektor industri dan jasa (perkotaan) karena terjadi perbedaan tingkat produktivitas diantara dua sektor tersebut. *Keempat*, kontribusi devisa yaitu sektor pertanian mampu berperan sebagai sumber penting bagi surplus neraca perdagangan atau neraca pembayaran (devisa), baik lewat ekspor hasil-hasil pertanian atau ekspansi produksi komoditas-komoditas pertanian yang menggantikan impor (substitusi impor).



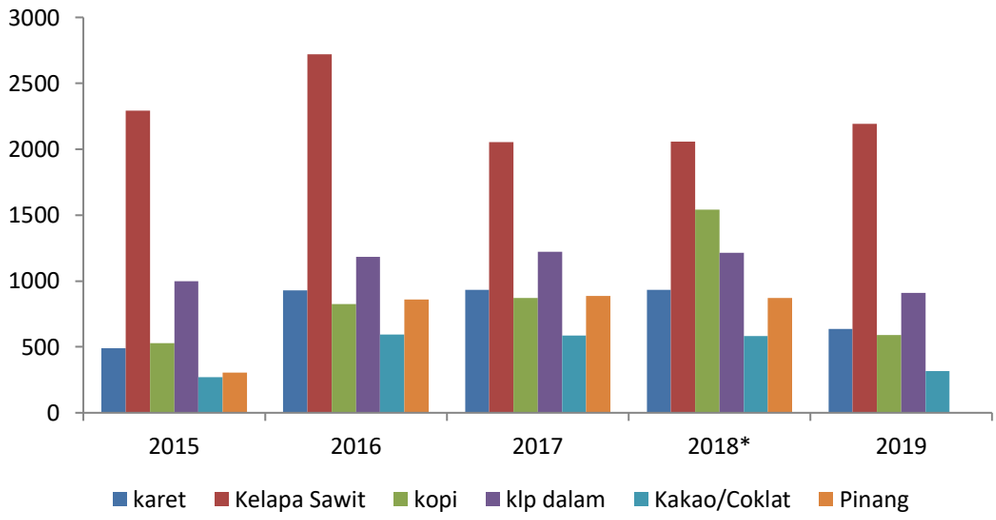
Sumber: Dinas TPHP, 2020
**Angka Sementara*

Gambar 2-58 Produktifitas Tanaman Padi, Jagung dan Kedelai (Kw/Ha)di Provinsi Jambi Tahun 2015-2019

Produktivitas tanaman padi di Provinsi Jambi terus mengalami peningkatan selama tahun 2015 – 2018, namun penurunan terjadi pada tahun 2019 akibat musim kemarau panjang yang mengakibatkan banyak terjadi gagal panen. Peningkatan produktivitas tidak hanya pada tanaman padi, namun juga terjadi pada tanaman jagung dan

kedelai. Peningkatan ini harus terus ditingkatkan untuk mendukung terwujudnya kedaulatan pangan melalui perbaikan sistem pengairan, penyuluhan dan bantuan teknis kepada petani.

Sektor perkebunan juga belum memperlihatkan kinerja yang baik pada tahun 2015 – 2019. Hal ini terlihat pada produktivitas komoditi unggulan perkebunan yang berfluktuatif setiap tahun dan cenderung stagnan. Hal ini disebabkan oleh umur tanaman yang mulai tua sehingga produksi menurun. Upaya perluasan lahan telah dilakukan untuk komoditi-komoditi tersebut, sehingga diharapkan beberapa tahun lagi produksi komoditas unggulan ini kembali membaik.



Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, 2020

Gambar 2-59 Perkembangan produktivitas komoditi perkebunan Provinsi Jambi (kg/ha/tahun) Tahun 2015 -2019

2.1.3.2.4 Urusan Kehutanan

Perkembangan luas kawasan hutan Provinsi Jambi yang dikelola dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2013 luas kawasan hutan di Provinsi Jambi adalah sebesar 2.179.440 Ha, sedangkan di tahun 2017 menunjukkan bahwa luas kawasan hutan Provinsi Jambi adalah 1.167.638 Ha. Penurunan yang terjadi tersebut terjadi karena konversi lahan dari kawasan hutan menjadi areal pengunaan lain. Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan perairan serta Tata Guna Hutan kesepakatan

(TGHK) tahun 2018, luas hutan di Provinsi Jambi kembali mengalami penurunan, yaitu menjadi 2.113.775,33 Ha.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK. 77/Menhut-II/2010 tanggal 10 Februari 2010 tetang penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Provinsi Jambi meliputi area dengan luas ± 1.458.934 ha terdiri dari HL dengan luas ± 175.483 HP dengan luas ± 981.530 ha, HPT dengan luas ±301.922. Berdasarkan SK tersebut maka kawasan hutan provinsi Jambi dibagi dalam wilayah kelola Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sebanyak 17 unit kelola KPH yang terdiri dari 16 (enam belas) unit KPHP dan 1 (satu) unit KPHL. Dari 17 KPH tersebut sampai dengan tahun 2015 baru terdapat 5 KPHP yang memiliki organisasi pengelola dan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPHJP) yaitu KPHP Limau Unit VII Hulu Kabupaten Sarolangun, KPH Unit I Kerinci, KPHP Lubuk Pekak Hulu Landai Kabupaten Merangin, KPHP Tebo Barat dan Tebo Timur di Kabupaten Tebo. Sedangkan satu KPHL yaitu KPHL Bram Hitam di Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah memiliki pengelola hanya RPHJPnya perlu direvisi menyesuaikan dengan format baru Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

2.1.3.2.5 Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral

Provinsi Jambi memiliki cukup banyak potensi energi baru dan terbarukan yang dapat dikembangkan untuk menutupi kekurangan energi di Provinsi Jambi. Untuk Sumber energi, salah satu sumber energi terbarukan (*renewable resources*) yang terdapat di Provinsi Jambi adalah panas bumi (geothermal). Potensi sumber enenrgi lainnya adalah air terjun, yang berlokasi di beberapa kabupaten yang berada di bagian Barat Provinsi Jambi. Data-data lokasi tersebut dapat dilihat pada tabel-tabel di bawah.

Tabel 2-28 Potensi Geothermal Provinsi Jambi

No	Lokasi	Resources (Mwe)			Reserves (Mwe)	
		Speculative	Hypotetic	Predicted	Possible	Proven
1	Gunung Kapur, Kerinci	25	-	-	-	-
2	Gunung Kaca, Kerinci	25	-	-	-	-
3	Sungai Betung, Kerinci	100	-	-	-	-
4	Semurup, Kerinci	-	-	208	-	-
5	Lempur, Kerinci	-	-	150	15	40
6	Air Dikit, Merangin	25	-	-	-	-
7	Graha Nyabu, Merangin	-	185	-	-	-
8	Sungai Tenang, Merangin	-	74	-	-	-

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jambi, 2020

Tabel 2-29 Lokasi Potensi Air terjun di Provinsi Jambi

NO	KABUPATEN	LOKASI	KET
1	MERANGIN	1. Air Terjun Sungai Sigerincing Desa Muara Siau Kec. Muara Siau	
		2. Air Terjun Tuah Rajo Sungai Tembesi Desa Rantau Suli Kec. Sungai Tenang	
		3. Air Terjun Telentam Desa Telentam Kec. Tabir Barat	
		4. Air Terjun Telun Tujuh Desa Rantau Suli Kec. Sungai Tenang	3,8 MW
		5. PLTA Langkup Danau Pauh, Sungai Lungkup, Kec. Jangkat	
		6. Desa Renah Pelaan Kec. Jangkat	200 KW
		7. Desa Tiaro Kec. Muara Siau	50 KW
		8. Desa Sepantai Renah	
		9. Desa Terapung Air Liki	
		10. Desa Terapung Air Liki Baru	
		11. Desa Terapung Ngaol Ilir	

NO	KABUPATEN	LOKASI	KET
		12. Desa Tanjung Beringin	
2	TEBO	13. Desa Semambu Kec. Sumay	
3	KERINCI	14. Desa Air Bahan I Kec. Gunung Kerinci	13 KW
		15. Desa Air Bahan II Kec. Gunung Kerinci	180 KW
		16. Desa Kuning Kec. Siulak Deras	70 KW
4	SAROLANGUN	17. Desa Simpang Narso Kec. Batang Asai	7,8 KW
		18. Desa Simpang Narso Kecil	
		19. Desa Padang Jering	
		20. Desa Pulau Langsat	
5	BUNGO	21. Dusun Tanjung Bungo Kec. Limbur Lubuk Mengkuang	10 KW
		22. Dusun Laman Panjang Dusun Aur Cino Kec. Bathin III	19 KW
		23. Desa Sungai Talang Kec. Bathin III Ulu	12 KW
		24. Air Terjun Telun Tirau Dusun Baru Pelepat Dusun Batu Kerbau Kec. Pelepat	32,6 KW

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jambi, 2020

Tabel 2-30 Data Potensi Energi Potensial Air di Kabupaten Kerinci

NO	NAMA AIR TERJUN	KETINGGIAN AIR TERJUN	ENERGI YANG DIHASILKAN	LEBAR AIR TERJUN	LEBAR SUNGAI	KETINGGIAN DPL	JARAK DARI KOTA
1	BATU NAMORA	50 M	5 – 6,2 MW	6 – 7 M	6 – 7 M	1200 – 2000	50 KM
2	BEDENG IV	25 M	1,6 – 2 MW	4 – 5 M	5 – 6 M	700 – 1000	45 KM
3	SELUANG BERSISIK	50 M	2 – 3,2 MW	7 – 8 M	7 – 7,6 M	1000 – 1200	40 KM
4	TALANG KEMULUN	23 M	1,5 – 2 MW	5 – 6 M	5 – 7 M	600 – 1000	18 KM
5	PANCURAN ARO	75 M	6 – 8,3 MW	8 – 9,5 M	6 – 9 M	800 – 2000	15 KM
6	SUNGAI MEDANG	25 M	2 – 3 MW	5 – 6,5 M	6 – 9 M	500 – 870	10 KM
7	PANCURAN TUJUH	30 M	4,5 – 6,3 MW	7 M	6 – 7 M	800 – 1700	30 KM
8	TELUN BERASAP	75-90 M	7 – 8,3 MW	5 – 7 M	6 – 7 M	1200 – 2000	60 KM
9	BUKIT TAPAN	60 M	3,5 MW	5 – 7 M	5 – 7 M	1200 – 2000	18 KM
10	GUNUNG TUJUH	80 M	15 MW	6 – 7 M	6 – 7 M	1200 – 2000	65 KM

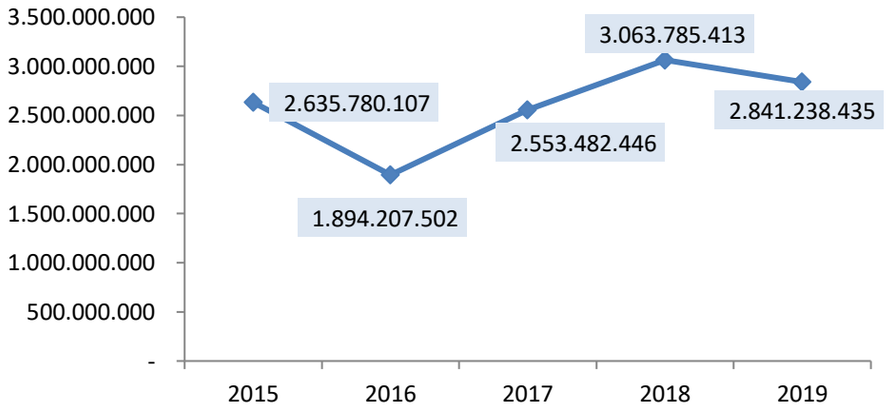
Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jambi, 2020

Selain panas bumi dan air terjun, Provinsi Jambi juga memiliki potensi air yang bisa dikembangkan menjadi Pembangkit Listrik Tenaga

Air (PLTA) dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH). Adapun lokasi potensi tersebut dapat dilihat pada tabel di atas.Sedangkan pemenuhan kebutuhan listrik pada wilayah yang terisolir dan tidak terjangkau dengan jaringan listrik PLN serta tidak memiliki potensi air terjun, Pemerintah Provinsi Jambi telah mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dengan *system Solar Home System* (SHS) dan biogas yang tersebar dibeberapa kabupaten di Provinsi.

2.1.3.2.6 Urusan Perdagangan

Perkembangan ekspor asal Provinsi Jambi selama tahun 2015-2019 berfluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Sejak mengalami penurunan pada tahun 2016, nilai ekspor terus mengalami peningkatan hingga tahun 2018, namun kembali mengalami penurunan pada tahun 2019 seiring dnegan penurunan harga komoditas.

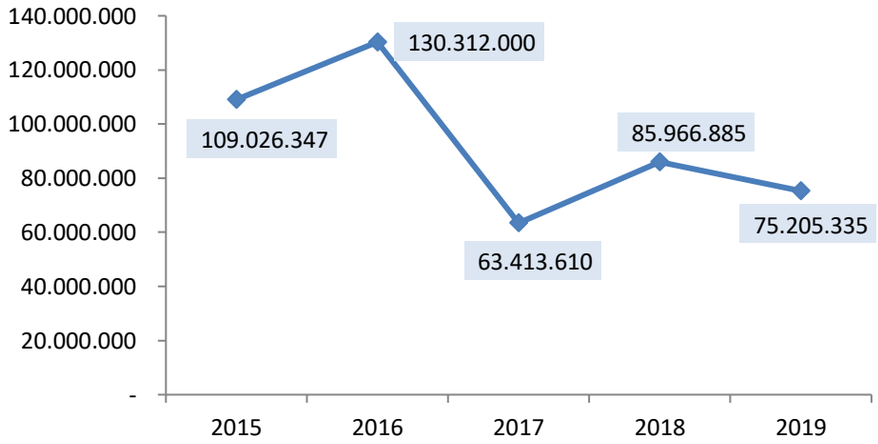


Sumber: BPS, 2020

Gambar 2-60 Perkembangan Nilai Ekspor Provinsi Jambi Tahun 2015-2019 (US$)

Ekspor asal Provinsi Jambi terbagi atas komoditi Migas dan Non Migas. Pada 2015-2019 struktur nilai ekspor Provinsi Jambi masih didominasi oleh ekspor komoditi migas. Komoditas ekspor non migas Provinsi Jambi masih didominasi oleh komoditas Karet Olahan, Minyak Nabati (CPO dll) dan Kertas/Pulp serta pinang, sementara dari pertambangan didominasi komoditi migas. Adapun negara tujuan ekspor komoditas dari Provinsi Jambi selama kurun waktu tersebut mencapai 80 Negara, dengan negara tujuan utama ekspor Thailand, Jepang, China, Singapura, Malaysia, India dan Amerika Serikat. Kinerja yang ada tidak terlepas dari perkembangan permasalahan ekonomi yang terjadi di AS

dan Kawasan Eropa serta menurunnya prospek pertumbuhan ekonomi Negara mitra dagang utama Indonesia sehingga berimplikasi terhadap kinerja ekspor dan impor Provinsi Jambi. Permasalahan yang dihadapi diantaranya masih banyaknya prasarana dasar yang belum terpenuhi, sehingga para investor masih belum banyak yang tertarik. Untuk itu, perlu adanya kebijakan pemberian insentif kepada investor dan pelayanan perizinan yang berkualitas serta mengoptimalkan penggunaan sarana jalan dan pelabuhan yang ada.



Sumber: BPS, 2020

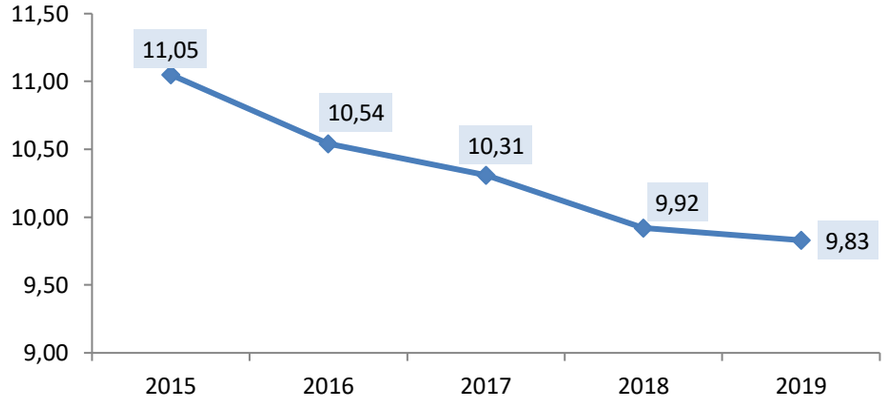
Gambar 2-61 Perkembangan Nilai Impor Provinsi Jambi Tahun 2015-2019 (US$)

Sementara itu, perkembangan impor Provinsi Jambi selama tahun 2015-2019 juga berfluktuasi dengan kecenderungan menurun, baik nilai maupun volumenya. Nilai impor pada tahun 2015 mencapai US$109,026 juta, angka tersebut turun hingga akhir tahun 2019 menjadi US$75,205 juta.

2.1.3.2.7 Urusan Perindustrian

Pemerintah Provinsi Jambi dalam RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 berupaya untuk menggeser share sektor primer ke sektor sekunder, salah satunya melalui upaya-upaya meningkatkan kontribusi industri pengolahan dalam PDRB Provinsi Jambi. Namun upaya ini belum menunjukkan hasil sesuai yang diharapkan. Dalam kurun tahun 2015-2019 kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB Provinsi Jambi terus memperlihatkan tren penurunan setiap tahunnya. Hal ini berarti bahwa sektor industri pengolahan belum memperlihatkan

kinerja yang baik dalam lima tahun ini. Oleh sebab itu, percepatan perwujudan kawasan Ujung Jabung harus terus dilakukan untuk mendorong sektor ini lebih berkontribusi dalam pembangunan di Provinsi Jambi.



Sumber: BPS, 2020

Gambar 2-62 Kontribusi Sektor industri pengolahan terhadap PDRB Provinsi Jambi

2.1.3.2.8 Urusan Transmigrasi

2.1.3.2.8.1 Pertanahan

Urusan pertanahan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan penataan pertanahan dan pelaksanaan reforma agraria di wilayah Provinsi Jambi. untuk memperbaiki akses masyarakat kepada sumber-sumber ekonomi dalam hal ini tanah serta mengurangi sengketa dan konflik pertanahan dan keagrariaan. Selain itu, pelaksanaan urusan ini juga dilakukan dalam rangka pengakuan dan penghormatan hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumberdaya agraria dan sumberdaya alam.

Sampai dengan tahun 2019, tanah yang telah memiliki sertifikat di Provinsi Jambi baru mencapai 1.251.983 bidang atau baru mencapai 49,51 persen dan masih terdapat 1.276.613 bidang tanah atau 51,49 persen yang belum memiliki sertifikat. Pada tahun 2019, Kanwil BPN Provinsi Jambi menerbitkan 122.500 bidang tanah, daintaranya adalah 3.000 sertifikat tanah bagi masyarakat kurang mampu yang merupakan program nawacita pemerintah. Selain itu, dilakukan pula sertifikasi hak atas tanah UKM untuk memberikan modal kepada UKM untuk mengembangkan usaha ekonomi produktif yang dijalankannya. Sertfikasi hak atas tanah UKM sampai dengan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2-31 Sertifikasi hak Atas Tanah UKM

U R A I A N	SATUAN	CAPAIAN TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019*
Sertifikasi Hak Atas Tanah UKM	Unit	600	1.000	600	1.340	2.706

Sumber: Dinas KUKM Provinsi Jambi, 2020

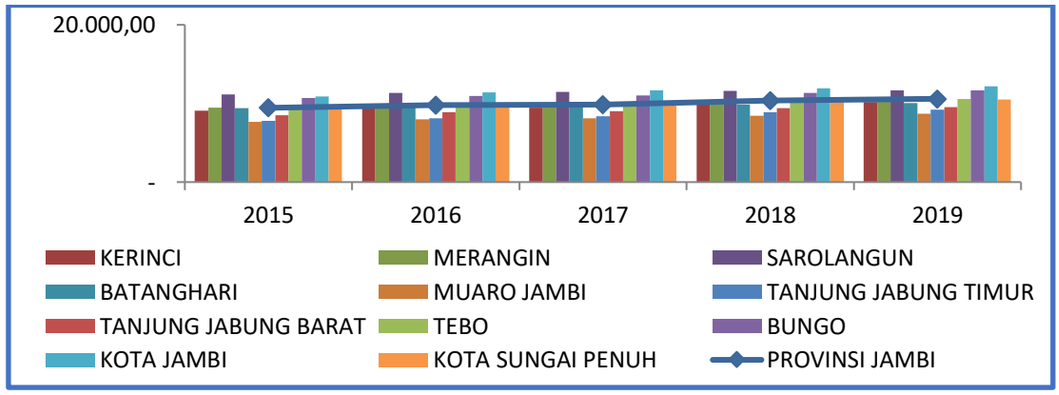
2.1.4 Aspek Daya Saing

2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

2.1.4.1.1 Pengeluaran Per Kapita

Perkembangan kesejahteraan penduduk salah satunya dapat diukur melalui perkembangan tingkat pendapatan. Secara umum, selama periode 2015-2019 tingkat kesejahteraan penduduk Provinsi Jambi mengalami peningkatan seperti yang ditunjukkan dengan semakin tingginya tingkat pengeluaran rumah tangga sebagai *proxy* pendapatan, baik secara nominal maupun riil, sejalan dengan kenaikan jumlah penduduk maupun jumlah rumah tangga. Kenaikan jumlah penduduk mendorong terjadinya kenaikan nilai konsumsi rumah tangga, yang pada gilirannya akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Pengeluaran nominal perkapita untuk makanan Provinsi Jambi meningkat dari Rp.9.446,18 ribu/tahun pada tahun 2015 menjadi Rp.10.592 ribu/tahun pada tahun 2019. Adapun Kabupaten/ Kota dengan pengeluaran perkapita lebih besar dari Provinsi Jambi adalah Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Bungo dan Kota Jambi.



Sumber : BPS, 2020

Gambar 2-63 Pengeluaran Perkapita per tahun Provinsi Jambi dan Kabupaten/ Kota se-Provinsi Jambi (ribu rupiah) Tahun 2015-2019

Bila dilihat komposisi pengeluaran maka terlihat pergeseran komposisi, dimana sampai dengan tahun 2017, pengeluaran terbesar adalah pada kelompok makanan, yaitu sebesar 51,13 persen. Pada tahun 2018 terjadi pergeseran komposisi pengeluaran, dimana pengeluaran pada kelompok makanan turun menjadi 48,87 persen dan 50,49 persennya dikeluarkan untuk kelompok bukan makanan. Bila dilihat per kabupaten/ kota dalam Provinsi Jambi, terlihat bahwa pengeluaran terbesar masih pada kelompok makanan, kecuali Kota Jambi yang telah bergeser komposisi konsumsi masyarakatnya dari dominan kelompok makanan menjadi dominan kelompok bukan makanan.

Tabel 2-32 persentase Pengeluaran per Kapita Provinsi Jambi per Kelompok Pengeluaran

Wilayah	Persentase Pengeluaran per Kapita Makanan dan Bukan Makanan di Daerah Perkotaan dan Perdesaan (Rupiah)			
	Makanan		Bukan Makanan	
	2017	2018	2017	2018
PROVINSI JAMBI	51,13	49,51	48,87	50,49
KERINCI	58,59	53,32	41,41	46,68
MERANGIN	58,69	52,54	41,31	47,46
SAROLANGUN	53,5	54,79	46,5	45,21
BATANGHARI	60,57	55,27	39,43	44,73
MUARO JAMBI	59,4	56,75	40,6	43,25
TANJUNG JABUNG TIMUR	60,59	55,7	39,41	44,3
TANJUNG JABUNG BARAT	58,36	54,59	41,64	45,41
TEBO	60,37	53,74	39,63	46,26
BUNGO	55,56	52,67	44,44	47,33
KOTA JAMBI	46,95	47,95	53,05	52,05
KOTA SUNGAI PENUH	54,75	52,14	45,25	47,86

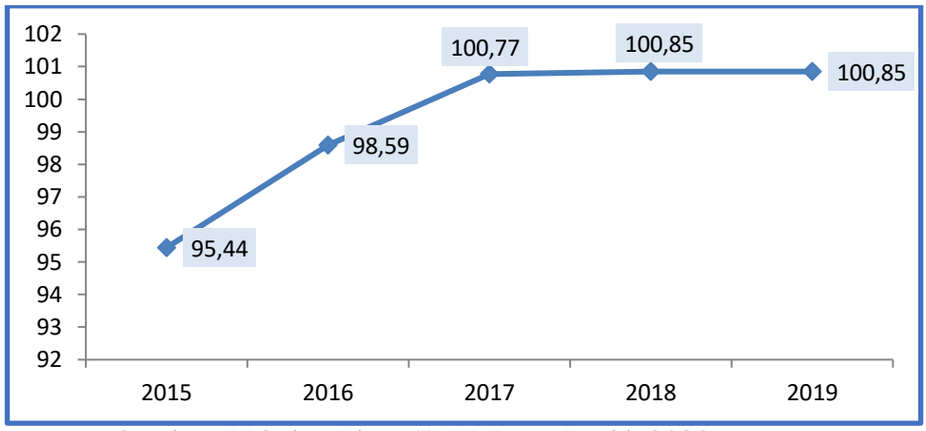
Sumber : BPS, 2020

2.1.4.1.2 Nilai Tukar Petani.

Untuk melihat keberhasilan pembangunan pertanian, selain melihat kontribusi dan pertumbuhan sektor tersebut juga diperlukan tingkat kesejahteraan petani. Salah satu indikator pendekatan yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani adalah Nilai Tukar Petani (NTP). Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan perbandingan/rasio antara Indeks Harga Yang Diterima Petani (It) dengan Indeks Harga Yang Dibayar Petani (Ib). Hubungan Nilai Tukar

Petani (NTP) dengan tingkat kesejahteraan petani sebagai produsen secara nyata terlihat dari posisi It yang berada pada pembilang (*enumerator*) dari angka NTP. Apabila harga barang/produk pertanian naik, dengan asumsi volume produksi tidak berkurang, maka penerimaan/pendapatan petani dari hasil panennya juga akan bertambah. Perkembangan harga yang ditunjukkan I_t, merupakan sebuah indikator tingkat kesejahteraan petani produsen dari sisi pendapatan.

Selanjutnya, dari sisi perkembangan jumlah pengeluaran atau pembelanjaan petani baik untuk kebutuhan konsumsi maupun untuk produksi, dalam hal ini petani sebagai produsen dan juga konsumen dihadapkan kepada pilihan dalam mengalokasikan pendapatannya yaitu: *Pertama*, untuk memenuhi kebutuhan pokok (konsumsi) demi kelangsungan hidup petani beserta keluarganya. *Kedua*, pengeluaran untuk produksi/budidaya pertanian yang merupakan ladang penghidupannya yang mencakup biaya operasional produksi dan investasi atau pembentukan barang modal. Unsur kedua ini hanya mungkin dilakukan apabila kebutuhan pokok petani telah terpenuhi; dengan demikian investasi dan pembentukan barang modal merupakan faktor penentu bagi tingkat kesejahteraan petani. Dengan membandingkan kedua perkembangan harga tersebut dalam NTP, maka dapat diketahui apakah peningkatan pengeluaran untuk kebutuhan petani dapat dikompensasi dengan pertambahan pendapatan petani dari hasil produksinya. Atau sebaliknya apakah kenaikan harga panen dapat menambah pendapatan petani yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan petani. Disamping itu, NTP juga merupakan salah satu indikator yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam menentukan arah kebijakan pertanian.



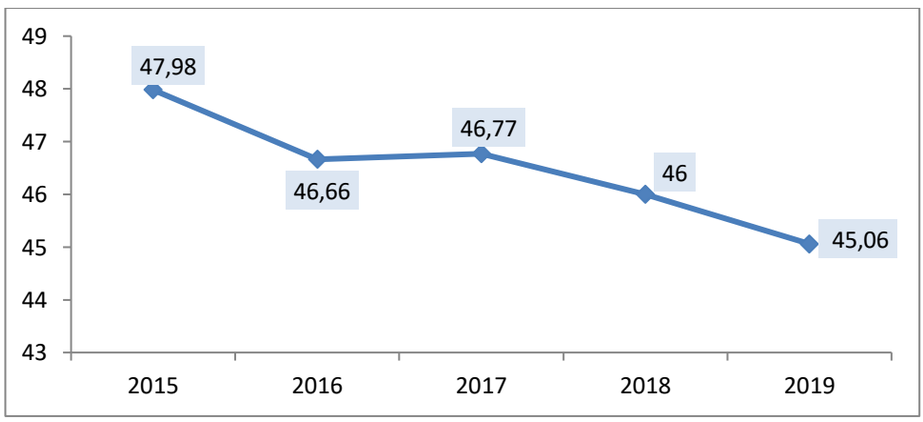
Sumber: BPS dan Dinas TPHP Prov. Jambi, 2020

Gambar 2-64 Nilai Tukar Petani Provinsi Jambi Tahun 2015-2019

Nilai tukar petani (NTP) Provinsi Jambi pada tahun 2015-2019 memperlihatkan kecenderungan meningkat. NTP Provinsi Jambi terdiri dari NTP untuk subsektor tanaman pangan, subsektor perkebunan, dan subsektor peternakan. Peningkatan NTP ini mengindikasikan bahwa kebijakan pertanian yang selama ini dilaksanakan cukup mampu meningkatkan kesejahteraan petani. Oleh karena itu ke depan kebijakan pembangunan pertanian tersebut hendaknya terus diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan kestabilan harga dan diiringi dengan pemberdayaan petani.

2.1.4.2 Rasio Ketergantungan

Untuk melihat seberapa besar penduduk usia produktif menanggung hidup (konsumsi) penduduk usia produktif di Provinsi Jambi dapat dilihat dari Angka Ketergantungan (Dependency Ratio) sebagaimana tersaji pada Gambar di bawah ini.



Sumber: BPS, 2020 dan Data diolah

Gambar 2-65 Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio) Provinsi Jambi Tahun 2015-2019

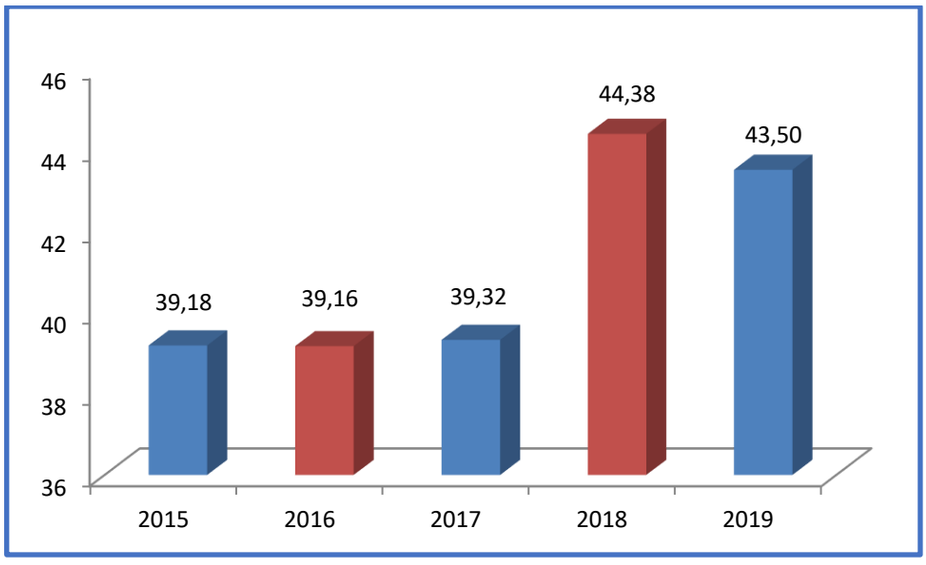
Rasio Ketergantungan merupakan perbandingan antara jumlah penduduk usia non produktif (0 – 14 tahun dan 65+ tahun) dibandingkan dengan penduduk usia produktif (15 – 64 tahun). Rasio Ketergantungan Provinsi Jambi pada kurun waktu tahun 2015-2019 berfluktuatif dengan kecenderungan menurun. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk usia non produktif yang ditanggung oleh kelompok usia produktif semakin berkurang.

2.1.5 Fokus Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur

2.1.4.3 Bidang Perhubungan

2.1.4.3.1 Proporsi Jalan Kondisi baik

Proporsi jalan dalam kondisi baik di Provinsi Jambi tahun 2015 – 2019 berfluktuatif, namun menunjukkan kecenderungan meningkat, sebagaimana terlihat pada gambar di bawah. Penurunan tersebut terjadi karena jalan dalam kondisi baik tersebut menurun kondisinya dan masuk dalam katergori jalan sedang. Namun demikian jalan tersebut masih dalam kondisi mantap.



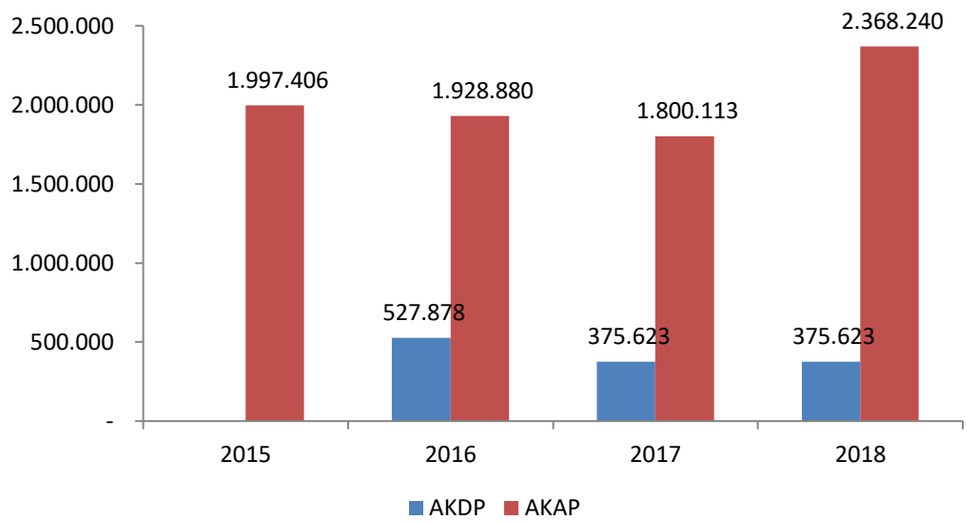
Sumber: Dinas PU Provinsi Jambi,2020

Gambar 2-66 Persentase jalan Provinsi Jambi dalam kondisi baik Tahun 2015 – 2019

2.1.4.3.2 Jumlah orang yang terangkut angkutan umum

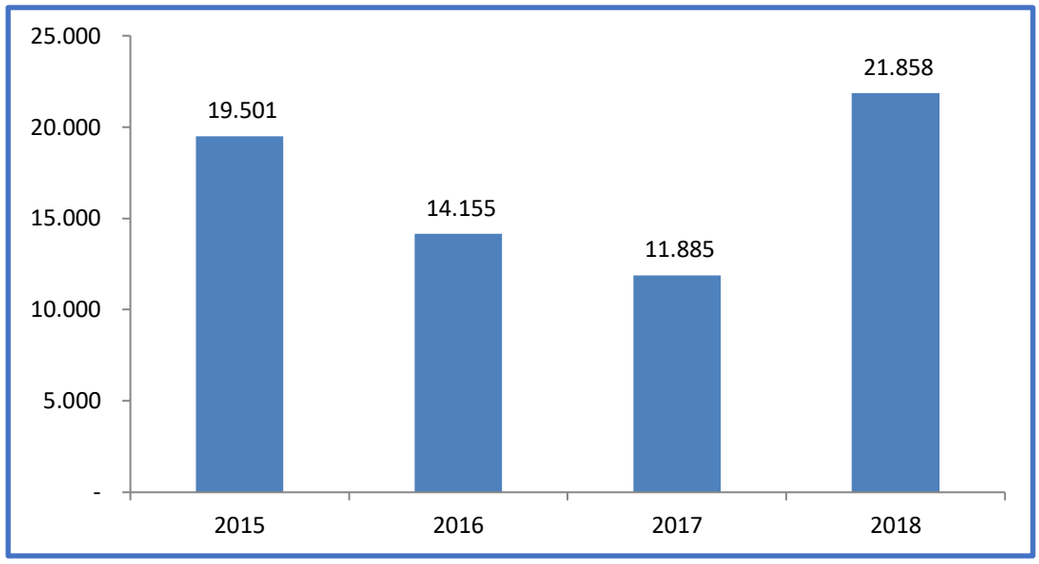
Jumlah penumpang menggunakan angkutan umum antar kota antar provinsi (AKAP) dari dan menuju Provinsi Jambi mengalami penurunan sampai tahun 2017, namun mengalami peningkatan

mengalami kenaikan kembali pada tahun 2018. Sementara Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi Jambi tetap terus mengalami penurunan sampai tahun 2018. Demikian pula dengan jumlah penumpang yang menggunakan angkutan kapal laut terus mengalami penurunan sampai tahun 2017 dan mulai meningkat kembali pada tahun 2018. Disisi lain jumlah penumpang yang menggunakan angkutan udara terus mengalami peningkatan sampai tahun 2017 seiring dengan pembenahan pada sarana prasarana dan manajemen bandara Sultan Thaha dan justru mengalami penurunan pada tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan preferensi penumpang dalam pemilihan moda angkutan umum, dari moda angkutan darat dan laut menjadi moda angkutan udara sampai dengan tahun 2017, dan preferensi tersebut berbalik pada tahun 2018.



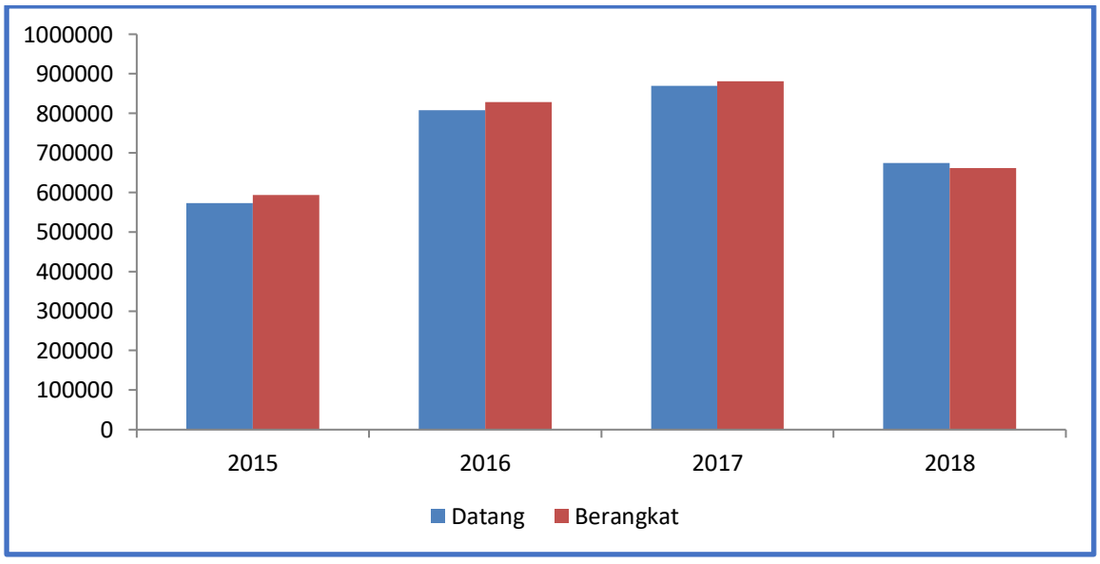
Sumber: Dinas Perhubungan, 2019

Gambar 2-67 Jumlah arus penumpang pada Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) di Provinsi Jambi



Sumber: Jambi Dalam Angka, 2020

Gambar 2-68 Lalu lintas orang melalui angkutan kapal laut pada Dermaga di Provinsi Jambi Tahun 2015-2018



Sumber: Dinas Perhubungan, 2019

Gambar 2-69 Perkembangan jumlah Arus Penumpang melalui Bandara Sultan Thaha

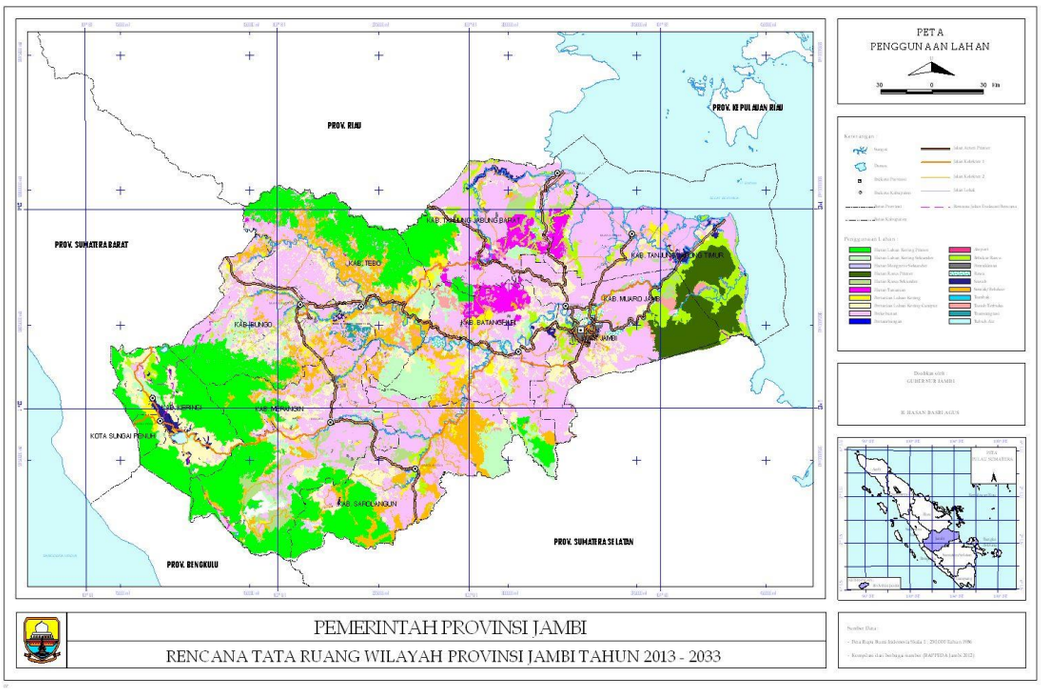
2.1.4.3.3 Bidang Penataan Ruang

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2013 – 2033 telah mengatur pola ruang Provinsi Jambi baik peruntukan kawasan lindung maupun kawasan budidaya. Kawasan budi daya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi atau potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan. Kawasan budidaya merupakan kawasan diluar

kawasan lindung yang kondisi fisik dan potensi sumberdaya alamnya dapat dan perlu dimanfaatkan baik kepentingan produksi (kegiatan usaha) maupun pemenuhan kebutuhan permukiman.

Berdasarkan fungsinya kawasan budidaya terdiri dari kawasan budidaya pertanian dan kawasan budidaya non pertanian. Kawasan budidaya pertanian terdiri dari kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan hutan rakyat, tanaman pangan, tanaman perkebunan, perikanan dan peternakan sedangkan kawasan budidaya non-pertanian terdiri dari kawasan permukiman, kawasan pertambangan, kawasan wisata dan kawasan industri.

Dalam kawasan budidaya terdapat pula kawasan andalan yang merupakan keterpaduan dan keterkaitan berbagai kegiatan produksi dan kawasan fungsional yang mempunyai dampak terhadap perkembangan perekonomian daerah. Arahan pola ruang untuk kegiatan budi daya mencakup arahan pemanfaatan kawasan pertanian, serta kawasan non-pertanian.



Sumber: RTRW Provinsi Jambi Tahun 2013-2033

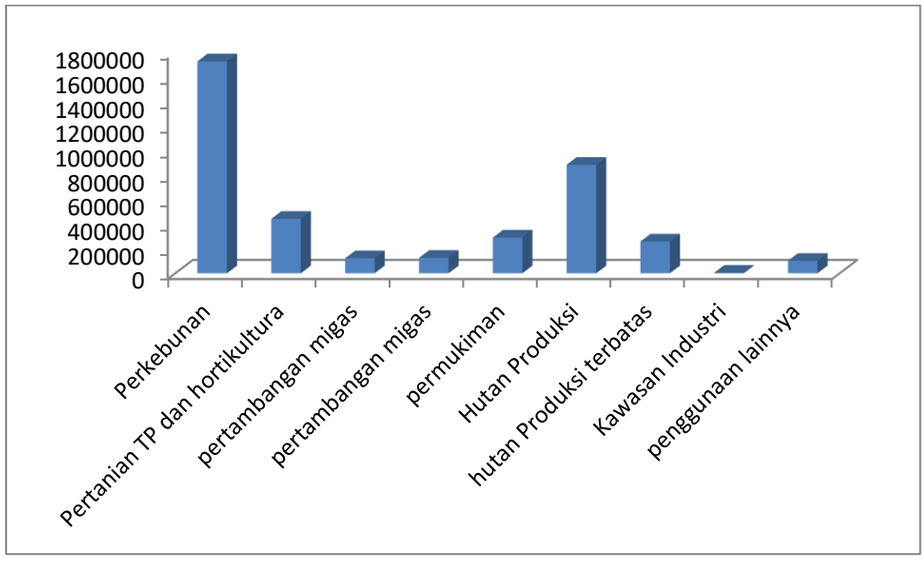
Gambar 2-70 Penggunaan lahan Provinsi Jambi

Pengembangan Kawasan industri di Provinsi Jambi meliputi kawasan peruntukan industri besar, kawasan peruntukan industri

menengah dan kawasan peruntukan industri kecil. Kawasan peruntukan industri besar diarahkan pengembangannya di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kawasan peruntukan industri menengah meliputi Kota Jambi, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Bungo, Kabupaten Merangin, Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Tebo. Kawasan peruntukan industri kecil diarahkan pengembangannya di seluruh wilayah kabupaten/kota. Untuk daerah perkotaan industri yang dikembangkan adalah industri yang ramah lingkungan.

Luas rencana kawasan industri yang diperuntukkan untuk kawasan industri besar yaitu seluas 4.565,26 Ha. Arahan pengembangan zona industri meliputi:

a. Penataan ruang untuk kawasan industri besar dan zonasinya diarahkan di sekitar Kuala Tungkal, Ujung Jabung serta Muara Sabak.
b. Penyediaan prasarana pendukung kawasan industri
c. Pengembangan kawasan perindustrian di wilayah perkotaan dalam bentuk peruntukan dan sentra-sentra kecil



Sumber RTRWP Jambi Tahun 2013 - 2033

Gambar 2-71 Luas kawasan budidaya berdasarkan arahan pola ruang Provinsi Jambi

Sedangkan wilayah banjir di Provinsi Jambi tersebar hampir di seluruh kabupaten/ kota di Provinsi Jambi terutama pada wilayah

barat dan tengah antara lain Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kabupaten Merangin, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Muaro Jambi dan Kota Jambi. Adapun luas wilayah banjir ± 146.709 Ha. Luas ini akan terus bertambah apabila tidak dilakukan upaya-upaya pelestarian lingkungan terutama pada kawasan hulu Provinsi Jambi.

2.1.4.3.4 Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum. Administrasi Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

2.1.4.3.4.1 Jenis dan jumlah bank dan cabang,

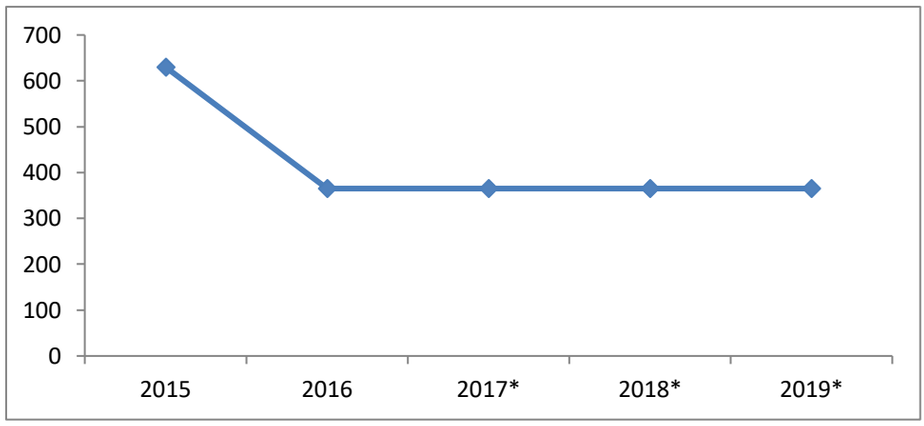
Perkembangan kantor Bank baik Bank Pemerintah, Bank Pembangunan Daerah maupun Bank Swasta di Provinsi Jambi pada periode tahun 2016-2019 mengalami kecenderungan meningkat. Untuk Bank Pemerintah pada tahun 2016 jumlah kantornya sebanyak 17 kantor bertambah menjadi 69 kantor pada tahun 2019. Sedangkan Bank Pemerintah Daerah, kantornya pada tahun 2016 berjumlah 13 kantor menjadi 4 kantor tahun 2019. Untuk Bank Swsata, kantornya pada tahun 2016 berjumlah 32 kantor menjadi 47 kantor tahun 2019. Namun pada tahun 2018 terjadi penurunan jumlah kantor Bank Pembangunan Daerah karena penurunan jumlah kantor cabang pembantu di masing-masing wilayah di Provinsi Jambi.

Tabel 2-33 Jenis dan Jumlah Bank di Provinsi Jambi Tahun 2016-2019

No	Indikator	Perkembangan Kantor Bank			
		2016	2017	2018	2019
1	Bank Pemerintah	17	17	69	69
2	Bank Pembangunan Daerah	13	13	4	4
3	Bank Swasta	32	32	47	47

Sumber: BPS, 2020

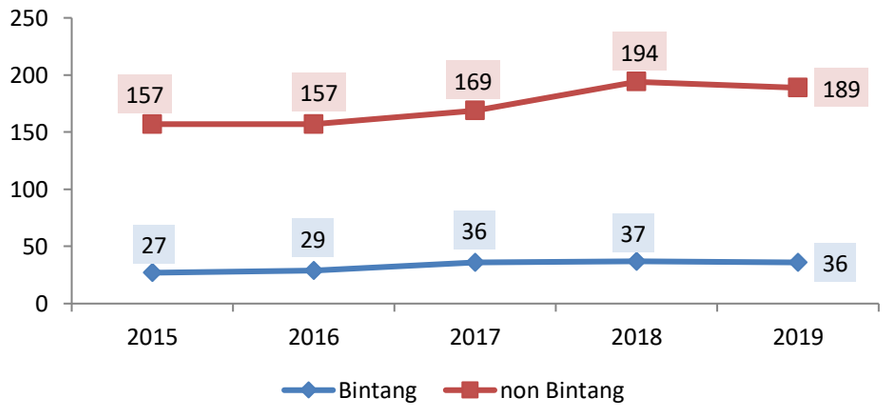
2.1.4.3.4.2 Jenis, kelas, dan jumlah restoran, penginapan/hotel,



Sumber: BPS, 2020
**data sama dengan tahun lalu (tidak tersedia update data)*

Gambar 2-72 Jumlah Rumah Makan di Provinsi Jambi Tahun 2015-2019

Perkembangan jumlah restoran atau rumah makan di Provinsi Jambi pada periode tahun 2015-2019 berdasarkan data yang tersedia cenderung menurun. Hal yang hampir sama terjadi pada sektor perhotelan. Meskipun jumlah hotel baik hotel kelas bintang maupun non bintang mengalami kecenderungan meningkat sampai dengan tahun 2018, namun jumlah tersebut kembali menurun pada tahun 2019. Penurunan restoran dan hotel ini disebabkan oleh belum pulihnya perekonomian Provinsi Jambi sejak tahun 2015 yang menyebabkan banyak sektor pembangunan di Provinsi Jambi mengalami penurunan aktivitas.



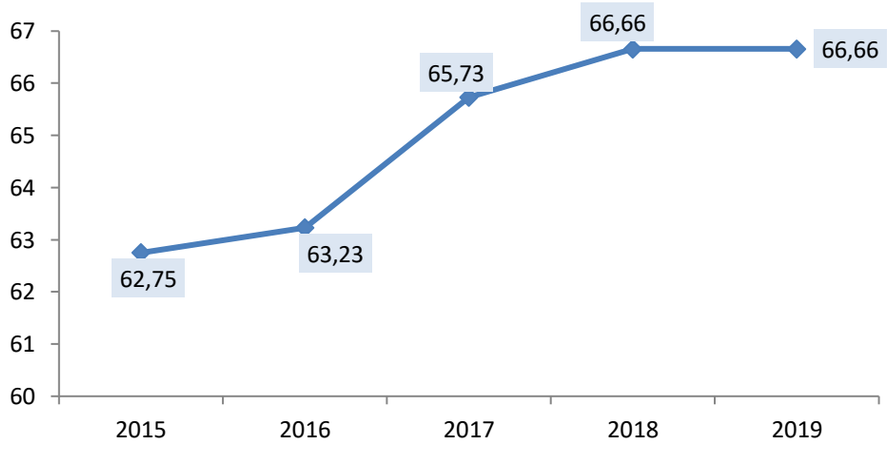
Sumber: Jambi Dalam Angka 2020, 2020

Gambar 2-73 Perkembangan Hotel di Provinsi Jambi Tahun 2015-2019

2.1.4.3.5 Bidang Lingkungan Hidup

2.1.4.3.5.1 Persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih

Air minum merupakan kebutuhan mendasar bagi kehidupan mahkluk hidup. Air minum berperan agar makhluk hidup khususnya manusia dapat bertahan hidup. Kualitas air minum merupakan faktor yang sangat menentukan bagi kesehatan. Pasokan air yang memadai sangat penting untuk mengurangi risiko penyakit dan untuk menjamin hak atas pangan, kesehatan dan perumahan. Keamanan dan aksesibilitas terhadap air bersih menjadi perhatian besar di seluruh dunia. Mudahnya akses terhadap air bersih dan sanitasi dapat meningkatkan kesehatan individu, sehingga dapat meningkatkan kehadiran di sekolah dan meningkatkan produktifitas. Oleh karena itu sumber daya air perlu dikelola dengan baik untuk pemenuhan hak asasi manusia mendapatkan air minum dan sanitasi yang aman dan bersih.



Sumber: Dinas PUPR Prov. Jambi, 2020
*Ket: *) kondisi 2018 yang dirilis tahun 2019*

Gambar 2-74 Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan

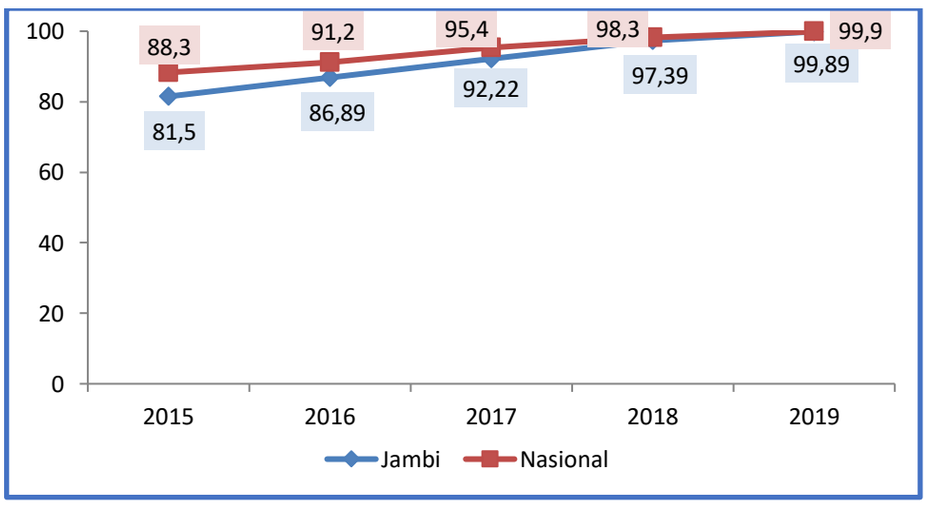
Berdasarkan data di atas, terlihat perkembangan proporsi air minum layak Provinsi Jambi yang terus menunjukkan peningkatan walaupun belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Realisasi indikator proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan Provinsi Jambi pada tahun 2019 adalah sebesar 66,66%.

Pada dasarnya Pemerintah Provinsi Jambi telah melakukan banyak hal dalam rangka pemenuhan target indikator ini, seperti perluasan/ pemasangan jaringan pipa distribusi pada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Namun bila dibandingkan dengan nasional, terlihat bahwa capaian Provinsi Jambi atas indikator ini selalu berada di bawah rata-rata nasional. Hal ini mengindikasikan bahwa percepatan yang dilakukan oleh Provinsi Jambi belum mampu mengimbangi laju pemenuhan kebutuhan air bersih secara nasional.

2.1.4.3.6 Bidang Komunikasi dan Informasi

2.1.4.3.6.1 Rasio ketersediaan daya listrik,

Listrik digunakan untuk kegiatan-kegiatan dasar manusia seperti penerangan, menjalankan peralatan rumah tangga dan mengoperasikan peralatan-peralatan industri. Pembangunan ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Rasio elektrifikasi adalah perbandingan antara jumlah rumah tangga yang berlistrik dengan jumlah keseluruhan rumah tangga. Rasio elektrifikasi di Provinsi Jambi terus meningkat setiap tahun. Adapun perkembangan capaian indikator rasio elektrifikasi dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber: Dinas ESDM, 2020

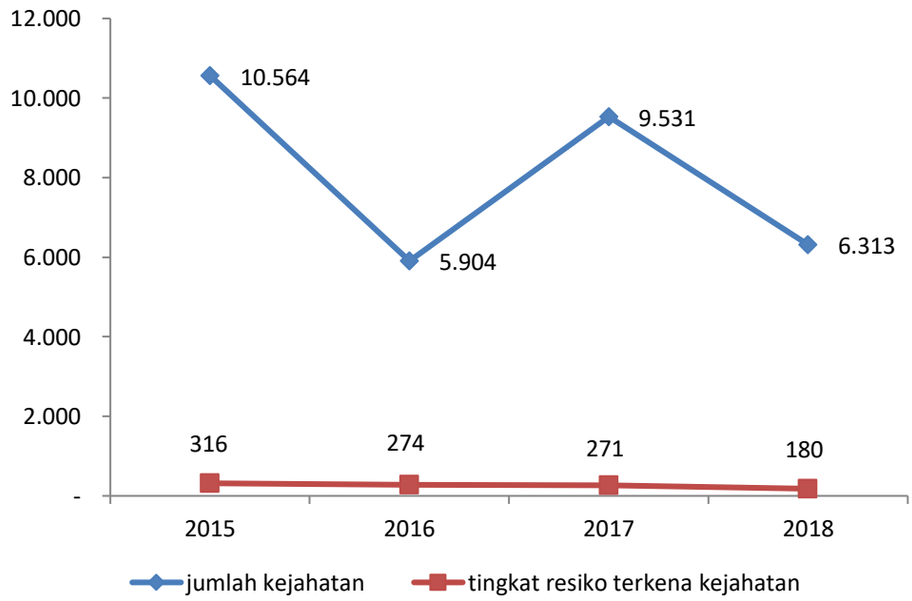
Gambar 2-75 Rasio Elektrifikasi Provinsi Jambi dibandingkan dengan nasional

Capaian rasio elektrifikasi Provinsi Jambi selalu berada di bawah nasional, namun dengan gap yang semakin mengecil, bahkan pada tahun 2019 capaiannya hanya selisih 0,01 dibanding nasional.

2.1.5.1 Fokus Iklim Berinvestasi

2.1.5.1.1 Kriminalitas

Indikator yang biasa digunakan untuk mengukur kejahatan adalah angka jumlah kejahatan (crime total), jumlah orang yang beresiko terkena tindak kejahatan (crime rate) dan selang waktu terjadinya suatu tindak kejahatan (crime clock). Selama selang waktu tahun 2015-2018, jumlah kejahatan di Provinsi Jambi terlihat berfluktuatif, namun memperlihatkan tren penurunan. Hal yang sama terlihat pada jumlah orang yang beresiko terkena tindak kejahatan, walaupun penurunannya tidak signifikan. Salah satu pemicu tindak kejahatan adalah faktor ekonomi, untuk itu program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat harus terus ditingkatkan untuk mengurangi angka kejahatan di Provinsi Jambi, seiring dengan upaya perwujudan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat.



Sumber: Statistik Kriminal 2016-2019, 2019

Gambar 2-76 Jumlah kejahatan dan tingkat resiko terkena kejahatan di Provinsi Jambi Tahun 2015-2018

2.1.6 Kondisi Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) merupakan kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan yang bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan dengan mengedepankan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. Pembangunan berkelanjutan terdiri dari aspek lingkungan hidup, sosial, ekonomi dan hukum dan tata kelola. Aspek tersebut tertuang dalam TPB dan dijelaskan dalam indikator-indikator capaian dalam TPB.



Tujuan 1. Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk Dimanapun

Ringkasan status pencapaian target-target SDGs untuk Tujuan ke-1 mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun, dapat dilihat pada Tabel berikut:

Target/ Indikator	Tahun Dasar	Dasar SDGs	Capaian SDGs 2020	Target SDGs 2020	Status	Target SDGs 2021	Sumber Data
1.Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.							
1.1 Menurunnya tingkat kemiskinan pada Tahun 2021 menjadi 7,4%	26,24% (1999)	2015-8,86%	7,58	7,5	▼	7,40%	BPS Susenas Maret
2.Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada Tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.							
2.1 Meningkatnya persentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan menjadi minimal 80 % pada Tahun 2021		46,68 %	73,72	80	▶	80	Dinkes
2.2 Meningkatnya Kepesertaan Program Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Ketenagakerjaan pada Tahun 2021 menjadi 24,6 % pekerja (2015: 13,4%).		13,45%	30,78	22,37	●	24,6%	DisNakertrans
3. Pada Tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk							
3.1 Meningkatnya cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada Tahun 2021 menjadi 90%	36,21 (2010)	55%	50,22*	87	▼	90%	Dinkes
3.2 Meningkatnya cakupan imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada Tahun 2021 menjadi 94.%.	44,%	50,1%	66,39*	94	▼	94%	Dinkes
3.3 Meningkatnya cakupan angka pemakaian kontrasepsi semua cara pada perempuan usia 15-49 tahun untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada Tahun 2021 menjadi 70,50%	49,7% (1991)	68,00%	68,22*	70	▶	70,50%	BKKBN, Dinas P3A dan PP, Biro Kesra



Tujuan 2. Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan Dan Gizi Yang Baik, Serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan

Ringkasan status pencapaian target-target SDGs untuk Tujuan ke-2 menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan, dapat dilihat pada Tabel berikut:

Target/ Indikator	Tahun Dasar	Dasar SDGs	Capaian SDGs 2020	Target SDGs 2020	Status	Target SDGs 2021	Sumber Data
1.Pada Tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun							
1.1. Menurunnya prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita pada Tahun 2021 menjadi 12% (2015: 14,3%)	23,8% (1989)	14,3 (2015)	15,74*	12	▽	12	Dinkes
2. Pada Tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada Tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.							
2.1 Menurunnya prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta pada tahun 2021 menjadi 28 % (2015: 37,9%)	37,9 (2013)	(2015) 25,9 %,	30,30*	24,5	▽	24	Dinkes (PSG)
2.2 Menurunnya prevalensi wasting (kurus) pada anak balita pada tahun 2021 menjadi 10 % (2013: 13,2%)	13,5 (2013)	(2015) 13,2	15,74*	10,64	▽	10%	Dinkes
2.3. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif menjadi 64% pada Tahun 2021 (2016: 59%) Sumber : PSG 2014.	59% PSG (2014)	(2015) 59%	68,29*	63	●	64%	Dinkes
2.4. Meningkatnya kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai 94,5 (2015: 84,2), dan tingkat konsumsi ikan menjadi 46 kg/kapita/tahun pada Tahun 2021 (2015:34 kg/kapita/tahun)	75,3 (2009	(2015) 90%,	92,3/26,3*	92,6/44,02	▽	94,5/46	Ketahanan Pangan
3. Pada Tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan							
3.1. Ditetapkannya kawasan pertanian pangan berkelanjutan.	9,09	18	45,45	90	▽	100%	Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan



TUJUAN 3. MENJAMIN KEHIDUPAN YANG SEHAT DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SELURUH PENDUDUK SEMUA USIA

Ringkasan status pencapaian target-target SDGs untuk Tujuan ke-3 menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Target/ Indikator	Tahun Dasar	Dasar SDGs 2015	Capaian SDGs 2020	Target SDGs 2020	Status	Target SDGs 2021	Sumber Data
1. Pada Tahun 2030,mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.							
1.1. Menurunnya angka kematian ibu per 100 ribu kelahiran hidup pada Tahun 2021 menjadi menurun (2015: 79)	228 (2009)	359 (2015)	59	74	●	72	MDGs/RPJMD
1.2. Meningkatnya persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan pada Tahun 2021 menjadi 90 % (2015: 55%)	36,21% (2010)	55% (2015)	77	87	▼	90%	Dinkes/ MDGs/RPJMD
1.3. Meningkatnya persentase persalinan oleh tenaga kesehatan terampil pada tahun 2021 menjadi 100 % (2015: 93,49%).	70,51% (2009)	93,49% (2015)	92,23	96	▼	100%	70,51 (2009)
2. Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000							
2.1. Menurunnya angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2021 menjadi 32 (2015: 34)	39% (2010)	34% (2015)	24	32,5	●	32%	Dinkes/ MDGs/RPJMD
2.2. Meningkatnya persentase kabupaten/ kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi pada tahun 2021 menjadi 94.% (2015: 50,1%)	44,5% (1991)	50,1%	100	99,5	●	94%	Dinkes/ MDGs/RPJMD
3.**Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya**							
3.1. Menurunnya prevalensi HIV pada populasi dewasa tahun 2021 menjadi <.60% Atau Persentase Angka Kasus HIV yang diobati	45,77 (2014)	47%	69,57*	60%	▼	60%	Dinkes/ MDGs/RPJMD
3.2. Menurunnya prevalensi Tuberculosis (TB) per 100.000 penduduk pada tahun 2021 menjadi 113	443 (1990)	160 (2015)	297*	122	▼	113	Dinkes, dan BPS/ MDGs
3.3. Meningkatnya jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi malaria pada tahun 2021 menjadi 63,64%. (Malaria) < 1 per 1.000	-	2015 (27,27%)	63,64	56,36	●	63,64	Dinkes, dan BPS/ MDGs



TUJUAN 4. MENJAMIN KUALITAS PENDIDIKAN YANG INKLUSIF DAN MERATA SERTA MENINGKATKAN KESEMPATAN BELAJAR SEPANJANG HAYAT UNTUK SEMUA

Ringkasan status pencapaian target-target SDGs untuk Tujuan ke-4 Menjamin Kualitas Pendidikan Yang Inklusif Dan Merata Serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat Untuk Semua, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan, dapat dilihat pada Tabel berikut :

Target/ Indikator	Tahun Dasar	Dasar SDGs 2015	Capaian SDGs 2020	Target SDGs 2020	Status	Target SDGs 2021	Sumber Data
1. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan lakil-aki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.							
1.6. Meningkatnya APK SMA/SMK/MA/sederajat pada tahun 2021 menjadi 101,50% (2015: 76,12)	74,24 (2011)	76,12	94,16	95,95	▼	101,57	BPS
1.7. Meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun pada tahun 2021 menjadi 12 tahun (2015: 8,7 tahun).	7,84 (2010)	2014	8,55	11,34	▼	12	BPS
5. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi							
5.1. Meningkatnya rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun pada tahun 2021 menjadi 100 % (2015: 97,84%).	96,00% (2006)	97,84	98,2	100	▼	100	BPS

TUJUAN 5. MENCAPAI KESETARAAN GENDER DAN MEMBERDAYAKAN KAUM PEREMPUAN.

Ringkasan status pencapaian target-target SDGs untuk Tujuan ke-5 Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan, dapat dilihat pada Tabel berikut:

Target/ Indikator	Tahun Dasar	Dasar SDGs 2015	Capaian SDGs 2020	Target SDGs 2020	Status	Target SDGs 2021	Sumber Data
1. Mengakhiri Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Kaum Perempuan Di Mana Pun.							
1.1. Meningkatnya jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan pada tahun 2021 (2015: 100%).	87,88% (2015)	87,88% (2015	100	100	●	95,01%	DP3AP2
2. Menghilangkan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan manusia dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya							
2.1. Menurunnya prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan pada tahun 2021 (2013: 35,5 %).	39,6 (2011)	35,5 (2015)	34,7*	34,7	▶	34,5	DP3AP2
5. Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai *dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform* serta dokumen-dokumen hasil reviu dari konferensi-konferensi tersebut.							
5.2. Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern minimal 4 jenis pada tahun 2021 menjadi 82% (2015:76%).	76,28 (2013)	77,47 % (2014)	78*	81	▼	82	DP3AP2, BKKBN, Biro Kesra

TUJUAN 6. MENJAMIN KETERSEDIAAN SERTA PENGELOLAAN AIR BERSIH DAN SANITASI YANG BERKELANJUTAN UNTUK SEMUA

Ringkasan status pencapaian target-target SDGs untuk Tujuan ke-6 Menjamin Ketersediaan Serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi Yang Berkelanjutan Untuk Semua, dapat dilihat pada tabel berikut :

Target/ Indikator	Tahun Dasar	Dasar SDGs 2015	Capaian SDGs 2020	Target SDGs 2020	Status	Target SDGs 2021	Sumber Data
1. Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap airminum yang aman dan terjangkau bagi semua.							
1.1. Meningkatnya akses terhadap layanan air minum layak pada tahun 2021 menjadi 95% (2015: 62,75%)	48,28 (2010)	62,75 (2015)	70,71	85	▼	95	Bappeda, Dinas PU
2. Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan							
2.1. Meningkatnya akses terhadap sanitasi yang layak pada tahun 2021 menjadi 84% (2015: 58,21%).	55,53	(58,21%) (2015)\	75,6	87	▼	87	Bappeda, Dinas PU



TUJUAN 7 MENJAMIN AKSES ENERGI YANG TERJANGKAU, HANDAL, BERKELANJUTAN, DAN MODERN UNTUK SEMUA

Ringkasan status pencapaian target-target SDGs untuk Tujuan ke-7 Menjamin Akses Energi Yang Terjangkau, Handal, Berkelanjutan, Dan Modern Untuk Semua, Serta Meningkatkan Pertanian berkelanjutan, dapat dilihat pada Tabel berikut:

Target/ Indikator	Tahun Dasar	Dasar SDGs 2015	Capaian SDGs 2020	Target SDGs 2020	Status	Target SDGs 2021	Sumber Data
1. Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan energi yang terjangkau, handal, dan modern							
1.1. Meningkatnya rasio elektrifikasi menjadi 96% pada tahun 2021 (2015: 81,5%).	79,07 (2014)	81,5	99,9	94	●	96	ESDM
1.2. Pada tahun 2030, meningkatkan secara substansial proporsi energi terbarukan dalam bauran energi global.	-	-	12,06	9	●	6%/10%	ESDM



TUJUAN 8. MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, KESEMPATAN KERJA YANG PRODUKTIF DAN MENYELURUH, SERTA PEKERJAAN YANG LAYAK UNTUK SEMUA.

Ringkasan status pencapaian target-target SDGs untuk Tujuan ke-8 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif dan

Berkelanjutan, Kesempatan Kerja Yang Produktif Dan Menyeluruh, Serta Pekerjaan Yang Layak Untuk Semua, dapat dilihat pada Tabel berikut:

Target/ Indikator	Tahun Dasar	Dasar SDGs 2015	Capaian SDGs 2020	Target SDGs 2020	Status	Target SDGs 2021	Sumber Data
1. Mempertahankan Pertumbuhan Ekonomi Per Kapita Sesuai Dengan Kondisi Nasional Dan, Khususnya, Setidaknya 7% Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Per Tahun Di Negara Kurang Berkembang.							
1.1. Meningkatnya Produk Domestik regional Bruto (PDRB) per kapita per tahun menjadi lebih dari Rp 46,86 juta pada tahun 2021	**15.107 Jt (2009)**	**Rp 36,75Jt (2015)**	56,24	43,55	●	**46,86 Jt**	**BPS, Bappeda**
2. Mencapai Tingkat Produktivitas Ekonomi Yang Lebih Tinggi, Melalui Diversifikasi, Peningkatan Dan Inovasi Teknologi, Termasuk Melalui Fokus Pada Sektor Yang Memberi Nilai Tambah Tinggi Dan Padat Karya							
2.1. Pertumbuhan PDRB riil per orang yang bekerja meningkat hingga tahun 2021	**6,39 (2009)**	**4,21**	0,85*	7,3	▼	**7,80**	**BPS, Bappeda**
3. Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatanproduktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan,kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuanga							
3.1. Persentase tenaga kerja formal mencapai 73,5% pada tahun 2021	**65,96 (2015)**	**65,96 (2015)**	37,26	71,74	▼	**73,50**	**Naker**
4. Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya							
4.1.Terciptanya kesempatan kerja selama 5 tahun	**1.550.403 (2015)**	-	1.739.000	1.920.998	▼	**1.995.117**	**Naker**
5. Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi pemuda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan							
5.1. Meningkatnya keterampilan pekerjan rentan agar dapat memasuki pasar tenaga kerja	**7,268 (2015)**	-	7988*	8.468	▼	**8,708**	**Naker**
8. Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budayadan produk lokal							
8.1. Meningkatnya kontribusi pariwisata menjadi 1,15 % terhadap PDRB pada tahun 2021 (2014: 1,04%).	**1,04 (2014)**	-	1,18	1,12	●	**1,15**	**Dinas Budpar**
8.2. Meningkatnya jumlah wisatawan menjadi 942 Ribu pada tahun 2021 (2015: 930.000).	**930 (2015)**	-	789.508	937,5	▼	**942**	**Dinas Budpar**



TUJUAN 9. MEMBANGUN INFRASTRUKTUR YANG TANGGUH, MENINGKATKAN INDUSTRI INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, SERTA MENDORONG INOVASI.

Ringkasan status pencapaian target-target SDGs untuk Tujuan ke-9 Membangun Infrastruktur Yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, Serta Mendorong Inovasi, dapat dilihat pada Tabel berikut:

Target/ Indikator	Tahun Dasar	Dasar SDGs 2015	Capaian SDGs 2020	Target SDGs 2020	Status	Target SDGs 2021	Sumber Data
1, Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.							
1.1. Meningkatnya persentase jalan Provinsi kondisi mantap sepanjang 82,52 % pada tahun 2021 (2015: 75,56%).	75,56 (2015)	75,56 (2015)	76,51	80,95	▼	82,52	PU
2. Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang							
2.1. Meningkatnya laju pertumbuhan PDRB industri manufaktur sehingga lebih tinggi dari pertumbuhan PDRB (2015: 2,33%)	2,33 (2015)	-	0,23	3,3	▼	6	BPS
2.2. Meningkatnya kontribusi industri manufaktur menjadi 21,6% terhadap PDRB pada tahun 2021 (2015: 20,8%).	11,05 (2015)	-	10,83	11,9	▼	12	BPS
3. Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing							
3.1. Berkurangnya emisi CO2 ((tCO2-eq/tahun) atau mendekati 26% pada tahun 2021 (2015: 5.903.855)	5.903.855 (2015)	-		7.591.587		7.591.587	RAD GRK

TUJUAN 10. MENGURANGI KESENJANGAN INTRA DAN ANTAR NEGARA

Ringkasan status pencapaian target-target SDGs Untuk Tujuan Ke-10 Mengurangi Kesenjangan Intra Dan Antar Negara, dapat dilihat pada Tabel berikut:

Target/ Indikator	Tahun Dasar	Dasar SDGs 2015	Capaian SDGs 2020	Target SDGs 2020	Status	Target SDGs 2021	Sumber Data
1. Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.							
1.1. Koefisien Gini pada tahun 2021 menjadi 0,3 (2014: 0,35).	0,35 (2015)	0,35 (2015)	0,32	0,31	▼	0,3	BPS
1.2. Tingkat kemiskinan pada Tahun 2021 menjadi 3,8% dari jumlah penduduk (2015:9,12%).	9,12 (2015)	9,12 (2015)	7,58	7,5	▶	7,4	BPS Susenas Maret
1.3. Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan sebanyak 60 Desa pada tahun 2021.	191	191	69*	141	●	131	Bappeda (IDM)
1.5. Meningkatnya Desa Mandiri paling sedikit sebanyak 70 desa.	2,21% (2014)	2,21% (2015)	7,29*	4,43	●	5%	DP3AP2



TUJUAN 11 : MENJADIKAN KOTA DAN PERMUKIMAN INKLUSIF, AMAN, TANGGUH, DAN BERKELANJUTAN.

Ringkasan status pencapaian target-target SDGs untuk Tujuan ke-11 Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan, dapat dilihat pada Tabel berikut:

Target/ Indikator	Tahun Dasar	Dasar SDGs 2015	Capaian SDGs 2020	Target SDGs 2020	Status	Target SDGs 2021	Sumber Data
1.Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, termasuk penataan kawasan kumuh, serta akses terhadap pelayanan dasar perkotaan.							
1.1. Persentase ketersediaan lingkungan layak huni (PSU) bagi masyarakat 100 persen pada tahun 2021	-	90	67,34	84	▼	100	PU PR
6. Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota							
6.1. Meningkatnya cakupan jumlah sarana dan penanganan (IPAL/air limbah dan TPA regional di PKN,PKNp,dan PKW) sampai tahun 2021	0% (2013)	0% (2015)		8%		10%	Dinas LH



TUJUAN 12: POLA KONSUMSI DAN PRODUKSI BERKELANJUTAN

Ringkasan status pencapaian target-target SDGs untuk Tujuan ke-12 Pola Konsumsi Dan Produksi Berkelanjutan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Target/ Indikator	Tahun Dasar	Dasar SDGs 2015	Capaian SDGs 2020	Target SDGs 2020	Status	Target SDGs 2021	Sumber Data
2. Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerjainternasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan							
2.1 Meningkatnya Persentase dan Jumlah perusahaan yang taat dan memenuhi syarat administrasi dan pengelolaan limbah yang berpotensi terhadap pencemaran limbah B-3 pada tahun 2021 (2015: 50 Perusahaan).	30%/50 Perusahaan (2015)	30%/50 Perusahaan (2015)		40%/50 Perusahaan		40%/50 Perusahaan	DLHD

TUJUAN 13. MENGAMBIL TINDAKAN CEPAT UNTUK MENGATASI PERUBAHAN IKLIM DAN DAMPAKNYA

Ringkasan status pencapaian target-target SDGs untuk Tujuan ke-13 Mengambil Tindakan Cepat Untuk Mengatasi Perubahan Iklim Dan Dampaknya, dapat dilihat pada Tabel berikut :

Target/ Indikator	Tahun Dasar	Dasar SDGs 2015	Capaian SDGs 2020	Target SDGs 2020	Status	Target SDGs 2021	Sumber Data
2. Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional.							
2.1. Terwujudnya penyelenggaraan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK), serta monitoring, pelaporan dan verifikasi Emisi GRK yang dilaporkan dalam dokumen Biennial Update Report (BUR) ke-3 hingga tahun 2021 (2015: dokumen BUR ke-1)	1 Lap (2015)	1 Lap (2015)	1 Lap	1 Lap		1 Lap	Bappeda

TUJUAN 14. MELESTARIKAN DAN MEMANFAATKAN SECARA BERKELANJUTAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN SAMUDERA UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Ringkasan status pencapaian target-target SDGs untuk Tujuan ke-14 Melestarikan Dan memanfaatkan Secara berkelanjutan Sumberdaya Kelautan Dan samudera Untuk pembangunan berkelanjutan, Dapat dilihat pada Tabel berikut:

Target/ Indikator	Tahun Dasar	Dasar SDGs (2015)	Capaian SDGs 2020	Target SDGs 2020	Status	Target SDGs 2021	Sumber Data
2. Pada tahun 2020, secara efektif mengatur pemanenan dan menghentikan penangkapan ikan yang berlebihan, penangkapan ikan ilegal dan praktek penangkapan ikan yang merusak, serta melaksanakan rencana pengelolaan berbasis ilmu pengetahuan, untuk memulihkan persediaan ikan secara layak dalam waktu yang paling singkat yang memungkinkan, setidaknya ke tingkat yang dapat memproduksi hasil maksimum yang berkelanjutan sesuai karakteristik biologisnya							
2.1. Meningkatnya produktivitas perikanan tangkap menjadi 15,7 ton/alat tangkap pada tahun 2021 (2015: 13 ton)	13 Ton/alt atngkap (2015)	13 Ton (2015)	12,42	15,2	▼	15,7 Ton/alt atngkap	DKP
3. Pada tahun 2020, melestarikan setidaknya 10% dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia							
3.1. Bertambahnya luasan kawasan konservasi perairan 27 Lokasi sampai dengan tahun 2021 (2015: 22)	(22 lok)	(22 lok)	4% /(25 lok)	4%/(26 lok)	▶	3,8/(27 lok)	DKP



TUJUAN 15 : MELINDUNGI, MERESTORASI, DAN MENINGKATKAN PEMANFAATAN BERKELANJUTAN EKOSISTEM DARATAN, MENGELOLA HUTAN SECARA LESTARI, MENGHENTIKAN PENGGURUNAN, MEMULIHKAN DEGRADASI LAHAN, SERTA MENGHENTIKAN KEHILANGAN KEANEKARAGAMAN HAYATI

Ringkasan status pencapaian Target-Target SDGs Untuk Tujuan Ke-15 Melindungi, Merestorasi, Dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan Secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, Serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati, dapat dilihat pada tabel berikut:

Target/ Indikator	Tahun Dasar	Dasar SDGs 2015	Capaian SDGs 2020	Target SDGs 2020	Status	Target SDGs 2021	Sumber Data
3. Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan, dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.							
3.1. Berkurangnya luasan lahan kritis melalui rehabilitasi seluas 86,471 Ribu hektar di dalam Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) dan Daerah Aliran Sungai (DAS) Prioritas hingga tahun 2021 menjadi 839.583 (2015: 844,647 hektar)	900 Rb	900 Rb	839181,7*	840.427	●	839.583	Dishut



TUJUAN 16 : MENGUATKAN MASYARAKAT YANG INKLUSIF DAN DAMAI UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN, MENYEDIAKAN AKSES KEADILAN UNTUK SEMUA, DAN MEMBANGUN KELEMBAGAAN YANG EFEKTIF, AKUNTABEL, DAN INKLUSIF DI SEMUA TINGKATAN

Ringkasan Status Pencapaian Target-Target SDGs Untuk Tujuan Ke-16 Menguatkan masyarakat Yang inklusif Dan Damai untuk Pembangunan berkelanjutan, Menyediakan Akses keadilan Untuk semua, Dan membangun kelembagaan Yang efektif, Akuntabel, Dan inklusif Di Semua tingkatan, Dapat Dilihat Pada Tabel Berikut:

Target/ Indikator	Tahun Dasar	Dasar SDGs 2015	Capaian SDGs 2020	Target SDGs 2020	Status	Target SDGs 2021	Sumber Data
5. Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat							
5.1. Meningkatnya persentase opini Wajar Tanpa Pengeculian (WTP) atas laporan keuangan pada tahun 2019 untuk Provinsi: 85%, (Provinsi: 52%)	WTP (2015)	WTP (2015)	WTP	WTP	●	WTP	Biro Aset, ispektorat
5.2. Meningkatnya persentase Skor B atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk Provinsi:75%, pada tahun 2021 (2015: Provinsi:30,30%,)	CC (2015)	CC (2015)	B	BB	▼	BB	Biro Organisasi
5.3. Meningkatnya penggunaan Eprocurement terhadap belanja pengadaan menjadi 80% pada tahun 2021 (2015: 10%).	73% (2015)	73% (2015)	45,14	50	▼	100%	Biro PKSi
5.4. Meningkatnya persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik untuk Provinsi: 60%, pada tahun 2021 (2015: Provinsi: 35,33,).	35,33 (2015)	35,33 (2015)	55,87*	60	▼	60	Biro Organisasi
6. Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan							
6.1. Meningkatnya keterwakilan perempuan di DPR dan DPRD (Hasil Pemilu 2014 untuk DPR: 16,6%).	16% (2014)	16% (2015)	12,32	16,6	▼	20%	DP3A

TUJUAN 17 : MENGUATKAN SARANA PELAKSANAAN DAN MEREVITALISASI KEMITRAAN GLOBAL UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Ringkasan Status Pencapaian Target-Target SDGs Untuk Tujuan Ke-17 Menguatkan Sarana Pelaksanaan Dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan, dapat dilihat pada berikut:

Target/ Indikator	Tahun Dasar	Dasar SDGs 2015	Capaian SDGs 2020	Target SDGs 2020	Status	Target SDGs 2021	Sumber Data
10. Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.							
10.1. Meningkatnya ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas	1 Lap (2015)	1 Lap (2015)	1 Lap	1 Lap		1 Lap	Bappeda/kominfo

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Dengan Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Tabel 2-34 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan sampai dengan tahun berjalan

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
DINAS PENDIDIKAN																
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				32.463.011.647		20.145.946.128		5.216.699.994	-	4.078.876.241		24.224.822.369		860	
	Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Perangko dan Materai	60	bln	703.376.500	36	420.607.770	12	37.799.994	12	30.000.000	48	450.607.770	80	64,06	
	Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Sarpras Dinas Pendidikan	60	bln	8.520.602.400	36	4.556.349.592	12	1.200.000.000	12	697.434.224	48	5.253.783.816	80	61,66	
	Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas	60	bln	3.925.428.400	36	1.858.594.532	12	690.800.000	9	411.597.476	45	2.270.192.008	75	57,83	
	Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Laporan Pengelolaan Keuangan Disdik	60	bln	2.687.492.500	36	1.352.956.800	12	559.600.000	9	395.154.000	45	1.748.110.800	75	65,05	
	Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya sarpras dinas pendidikan	60	bln	1.185.312.500	36	873.247.007	12	404.600.000	12	402.794.000	48	1.276.041.007	80	107,65	
	Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya ATK Disdik	60	bln	2.430.976.806	36	2.255.078.200	12	554.600.000	12	554.600.000	48	2.809.678.200	80	115,58	
	Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan	60	bln	5.599.972.540	36	3.278.010.910	12	456.700.000	12	398.494.000	48	3.676.504.910	80	65,65	
	Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Sarpras Dinas Pendidikan	60	bln	881.828.700	36	598.682.000	12	209.600.000	12	209.550.000	48	808.232.000	80	91,65	
	Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan	60	bln	511.052.500	36	279.050.600	12	20.000.000	9	6.600.000	45	285.650.600	75	55,89	
	Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makan dan Minum	60	bln	2.054.606.300	36	1.043.451.975	12	333.000.000	12	359.437.000	48	1.402.888.975	80	68,28	
	Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Rakor	60	bln	3.962.362.501	36	3.629.916.742	12	750.000.000	12	613.215.541	48	4.243.132.283	80	107,09	
									Rata-rata capaian kinerja (%)	11,18		47,18	2.202.256.57			
									Predikat kinerja	SR						
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				10.489.124.900		7.367.618.693		520.500.000	-	746.511.000		8.114.129.693	84,54	81,28	
	Kegiatan Pengadaan Mobil Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas	2	unit	800.000.000	1	700.000.000			-	-	1	700.000.000	50	87,5	
	Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Perlengkapan Kantor	35	pkt	1.624.878.800	24	1.346.793.700	2		-	-	24	1.346.793.700	68,57	82,89	
	Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor	Peralatan Kantor	100	unit	1.852.739.200	87	1.522.803.700	24		-	-	87	1.522.803.700	87	82,19	
	Kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	Gedung Kantor	30	pkt	1.024.357.500	25	761.651.825	6	165.000.000	12	164.900.000	37	926.551.825	123,33	90,45	
	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Peralatan Kantor	20	pkt	2.168.361.900	16	1.611.151.500	2	300.000.000	5	299.880.000	21	1.911.031.500	105	88,13	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Kegiatan Rehabilitas sedang/ berat gedung kantor	Gedung Kantor	15	pkt	3.018.787.500	10	1.425.217.968	3	55.500.000	1	281.731.000	11	1.706.948.968	73,33	56,54	
										Rata-rata capaian kinerja (%)		3		30,17	1.352.354.949			
										Predikat kinerja		SR						
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				1.312.500.000		655.273.000		-		-		655.273.000	38,6	49,93	
	Kegiatan Pengadaan pakaian dinas	Jumlah ASN Dinas Pendidikan	1.500	Org	1.312.500.000	579	655.273.000	-	-	-	-	579	655.273.000	38,6	49,93	
										Rata-rata capaian kinerja (%)		-		579	655.273.000			
										Predikat kinerja		SR						
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				2.002.187.500		879.914.125		90.000.000		-			40	43,95	
	Kegiatan Kursus singkat, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	Jumlah ASN Dinas Pendidikan	5	keg	2.002.187.500	2	879.914.125		90.000.000,00	-	-	2	879.914.125	40	43,95	
										Rata-rata capaian kinerja (%)		-		2	879.914.125			
										Predikat kinerja		SR						
5	Program Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Aparatur				4.765.909.900		1.435.830.000		480.600.000		335.325.633		1.771.155.633	124,17	35,98	-
	Kegiatan Pengelolaan Data dan Aset Pendidikan	Jumlah laporan data dan aset Dinas Pendidikan Provinsi	3	lap	2.257.125.000	2	150.814.000		189.700.000,00	2	156.199.633	4	307.013.633	133,33	13,6	
	Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan	Jumlah Laporan Kinerja dan Keuangan Pendidikan	20	lap	2.508.784.900	16	1.285.016.000		290.900.000,00	7	179.126.000	23	1.464.142.000	115	58,36	
										Rata-rata capaian kinerja (%)		-		13,5	885.577.817			
										Predikat kinerja		SR						
6	Program Pendidikan Khursus dan Layanan Khursus				43.805.492.995		18.334.862.301		13.607.683.800		13.752.759.080		32.185.701.677	136,59	56,27	
	Pengembangan/ Penyusunan Kurikulum Pendidikan PKLK	Jumlah Keg. Pengembangan/ Penyusunan Kurikulum Pendidikan PKLK	15	Keg	9.723.000.000	5	2.083.773.747		1.267.442.500,00	5,12	713.898.000	10,12	2.797.671.747	67,47	28,77	
	Penguatan Kelembagaan dan Manajemen Pendidikan PKLK	Jumlah Keg. Penguatan Kelembagaan dan Manajemen Pendidikan PKLK	3	Keg	6.076.875.000	1	1.374.728.200		253.270.000,00	12,66	235.662.508	13,66	1.610.390.708	455,33	26,5	
	Kegiatan Penyelenggaraan PLA	Persentase Penyelenggaraan PLA	100	%	7.170.617.995	60	3.922.673.084,00		785.837.000,00	157,9	752.977.482	217,9	4.675.650.566	217,9	65,21	
	Pembangunan dan Penyediaan Sarpras pendidikan PKLK	Jumlah Sarana dan PrasaranaPKLK	228	Pkt	12.153.750.000	76	7.773.213.670		11.201.134.300,00	192	12.050.221.090	268	19.823.434.760	117,54	163,11	
	Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendidikan PKLK	Jumlah Pemeliharaan Sarana dan PrasaranaPKLK	48	Pkt	2.343.937.500	15	1.614.209.000			-	-	15	1.614.209.000	31,25	68,87	
	Peningkatan Kualitas Peserta Didik PKLK	Jumlah Even Pendidikan	15	Even	5.903.250.000	5	1.504.349.600		100.000.000,00	-	98.080.296	5	1.602.429.896	33,33	27,14	
	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan PKLK	Persentase Monev Program Kegiatan	100	%	434.062.500	33,33	61.915.000			-	-	33,33	61.915.000	33,33	14,26	
										Rata-rata capaian kinerja (%)		52,53		80,43	4.597.957.382			
										Predikat kinerja		R						

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7	Program Pendidikan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan				251.149.125.000		175.263.501.246		52.548.933.000		48.130.072.583		223.393.573.829	80,2	45,91	
	Peningkatan Kualitas PTK SMA	Jumlah Pelatihan PTK SMA	15	Plt	17.362.500.000	5	4.715.476.282		1.360.878.000	5	1.787.447.646	9,96	6.502.923.928	66,4	37,45	
	Peningkatan Kualitas PTK SMK	Jumlah Pelatihan PTK SMK	21	Plt	17.362.500.000	7	5.367.128.169		1.325.435.000	4	1.394.655.700	10,99	6.761.783.869	52,33	38,94	
	Peningkatan Kualitas PTK PKLK	Jumlah Pelatihan PTK PKLK	18	Plt	5.208.750.000	6	1.064.069.495		299.920.000	1	577.785.737	7	1.641.855.232	38,89	31,52	
	Monitoring dan Evaluasi	Jumlah monitoring kegiatan	100	%	1.215.375.000	33,33	273.406.000			0	-	33,33	273.406.000	33,33	22,5	
	Kegiatan Pembayaran PTT PTK Non PNS	Persentase Pembayaran PTT PTK Non PNS	100	%	210.000.000.000	60	163.843.421.300		49.562.700.000	150	44.370.183.500	210,06	208.213.604.800	210,06	99,15	
									Rata-rata capaian kinerja (%)	32		54,27	44.678.714.766			
									Predikat kinerja	SR						
8	Program Pendidikan SMA				271.110.110.000		87.888.447.422		69.220.200.000		64.029.185.077		151.917.632.499	207,93	42,13	
	Pengembangan/Penyusunan Kurikulum Pendidikan SMA	Jumlah Keg. Pengembangan/Penyusunan Kurikulum Pendidikan SMA	12	Keg	28.300.875.000	4	4.530.077.463		100.000.000,00	51	485.315.000	54,97	5.015.392.463	458,08	17,72	
	Penguatan Kelembagaan dan Manajemen Pendidikan SMA	Jumlah Keg. Penguatan Kelembagaan dan Manajemen Pendidikan SMA	3	Keg	15.626.250.000	1	1.085.144.000		456.400.000,00	16,01	454.510.000	17,01	1.539.654.000	567	9,85	
	Kegiatan Penyelenggaraan Sekolah Berasrama	Persentase PenyelenggaraanSekolah Berasrama	100	%	69.705.110.000	60	35.179.782.678		13.500.000.000,00	147,56	5.840.459.000	207,56	41.020.241.678	207,56	58,85	
	Pembangunan dan Penyediaan Sarpras Pendidikan SMA	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendidikan SMA	522	Pkt	112.856.250.000	172	30.361.660.366		55.063.800.000,00	326	56.679.110.677	498	87.040.771.043	95,4	77,13	
	Pemeliharaan dan Rehabilitasi Saraana dan Prasarana Pendidikan SMA	Jumlah Pemeliharaan Sarana dan PrasaranaSMA	135	Pkt	12.153.750.000	45	9.689.787.626		-	-	-	45	9.689.787.626	33,33	79,73	
	Peningkatan Kualitas Peserta Didik SMA	Jumlah Even Pendidikan	18	Even	31.252.500.000	6	6.696.999.189		100.000.000,00	5	569.790.400	11	7.266.789.589	61,11	23,25	
	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan SMA	Persentase Monev Program Kegiatan	100	%	1.215.375.000	33	344.996.100		-	-	-	33	344.996.100	33	28,39	
									Rata-rata capaian kinerja (%)	77,93		123,79	21.702.518.928			
									Predikat kinerja	S						
9	Program Pendidikan SMK				195.950.188.100		135.109.568.920		118.896.575.000		112.240.325.046		247.349.893.966	85,25	64,87	
	Pengembangan/Penyusunan Pendidikan SMK	Jumlah Keg. Pengembangan/Penyusunan Pendidikan SMK	3	Keg	20.835.000.000	1	1.639.589.000		100.000.000	3	147.975.998	4	1.787.564.998	133,33	8,58	
	Penguatan Kelembagaan dan Manajemen Pendidikan SMK	Jumlah Keg. Penguatan Kelembagaan dan Manajemen Pendidikan SMK Satuan Pendidikan	15	Keg	7.815.139.100	5	2.125.905.200		343.000.000	15	390.400.880	19,81	2.516.306.080	132,07	32,2	
	Kegiatan Penyelenggaraan Sekolah Berasrama	Persentase PenyelenggaraanSekolah Berasrama	100	%	34.199.124.000	60	60.290.990.480		6.213.667.000	110	1.974.615.663	170,18	62.265.606.143	170,18	182,07	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pembangunan dan Penyediaan Sarpras Pendidikan SMK	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendidikan SMK	474	Pkt	97.160.550.000	156	65.651.901.890		112.139.908.000	163	109.510.558.806	319	175.162.460.696	67,3	180,28	
	Pemeliharaan dan Rehabilitasi Saraana dan Prasarana Pendidikan SMK	Jumlah Pemeliharaan Sarana dan PrasaranaSMK	12	Pkt	6.945.000.000	3	328.634.000			0	-	3	328.634.000	25	4,73	
	Peningkatan Kualitas Peserta Didik SMK	Jumlah Even Pendidikan	39	Even	27.780.000.000	13	4.727.188.350		100.000.000	1	216.773.699	14	4.943.962.049	35,9	17,8	
	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan SMK	Persentase Monev Program Kegiatan	100	%	1.215.375.000	33	345.360.000		-	0	-	33	345.360.000	33	28,42	
									Rata-rata capaian kinerja (%)	41,71		80,43	35.335.699.138			
									Predikat kinerja	SR						
10	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan				47.414.677.180		22.629.206.751		3.721.016.320		1.678.506.998		23.444.049.453	58,87	50,88	
	Kegiatan Pelaksanaan Kerjasama secara Kelembagaan di Bidang Pendidikan	Jumlah Kerjasama Bidang Pendidikan	7	Kerjasama	868.125.000	5	399.250.000			-	-	5	399.250.000	71,43	45,99	
	Kegiatan Sosialisasi dan advokasi berbagai Peraturan Pemerintah di bidang pendidikan	Jumlah Peraturan Bidang Pendidikan	15	Peraturan	1.595.135.000	6	841.902.246,00			-	-	6	841.902.246	40	52,78	
	Kegiatan Monitoring, evaluasi	Persentase Monev Program Kegiatan	100	%	2.695.968.280	100	982.828.720,00		88.320.000,00	190	137.260.000	290	1.120.088.720	290	41,55	
	Kegiatan Koordinasi dan Perencanaan kab/kota	JumlahKeg. Koordinasi dan Perencanaan kab/kota	10	Keg	4.619.475.000	4	3.865.764.665,00			-	-	4	3.865.764.665	40	83,68	
	Kegiatan Pembinaan Pramuka	Jumlah Keg. Pembinaan Pramuka	5	Keg	1.599.175.000	2	814.626.910,00			-	-	2	814.626.910	40	50,94	
	Kegiatan pembinaan UKS	Jumlah Keg. Pembinaan UKS	15	Keg	5.118.800.000	6	3.367.034.834,00		50.000.000,00	3	172.587.400	9	3.539.622.234	60	69,15	
	Kegiatan Pengarus utamaan Gender	Jumlah Keg. Pengarus utamaan Gender	5	Keg	954.752.000	2	564.543.400,00			-	-	2	564.543.400	40	59,13	
	Peningkatan Mutu Pendidikan Pondok Pesantre	Jumlah Jenjang Pendidiikan	1	Jenjang Pend.	6.131.559.400	1	5.256.221.040,00			-	-	1	5.256.221.040	100	85,72	
	Peningkatan Karya Tulis Ilmiah Siswa Jenjang Pendidikan	Jumlah Keg. Peningkatan Karya Tulis Ilmiah Siswa Jenjang Pendidikan	3	Keg	2.083.500.000		403.685.000,00			-	-	0	403.685.000	0	19,38	
	Pengelolaan Jejaring WEB BTIKP	Jumlah Keg. Pengelolaan Jaringan dan Website	6	Keg	5.208.750.000		1.727.780.760,00		2.703.233.320,00	3	443.120.594	3	2.170.901.354	50	41,68	
	Pelatihan Kompetensi TIK Pendidikan	Jumlah Keg. Kompetensi TIK Pendidikan	6	Keg	4.340.625.000		1.259.892.000,00		197.373.000,00	2	197.366.000	2	1.457.258.000	33,33	33,57	
	Pengelolaan Teknologi Pembelajaran	Jumlah Keg. Pengelolaan Teknologi Pembelajaran	6	Keg	3.212.062.500		664.470.000,00			-	-	0	664.470.000	0	20,69	
	Kegiatan PPDB Online	Jumlah Keg. PPDB online	5	Keg	2.736.250.000	2	836.485.760,00		320.330.000,00	1	281.124.600	3	1.117.610.360	60	40,84	
	Kegiatan Penatausahaan Administrasi BTIKP	Persentase Penatausahaan Administrasi BTIKP	100	%	694.500.000		556.234.120,00		311.760.000,00	83,88	399.823.000	83,88	956.057.120	83,88	137,66	
	Olimpiade Siswa dan PTK Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Masyrakat	Jumlah Olimpiade	4	Olimp	3.993.375.000		863.664.296,00			-	-			0	0	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pendidikan Keluarga	Jumlah Keg. Pendidikan Keluarga	3	Keg	868.125.000		224.823.000,00		50.000.000,00	1	47.225.404	1	272.048.404	33,33	31,34	
	Peningkatan Peran Pengawas Satuan Pendidikan	Jumlah Pengawas Satuan Pendidikan	0		694.500.000		-			-	-	0	-			
									Rata-rata capaian kinerja (%)	16,7		25,74	1.465.253.091			
									Predikat kinerja	SR						
11	Program BOSDA dan Beasiswa				1.112.858.719.600		515.274.730.700		300.042.365.000		225.418.232.916	24.157	740.692.963.616	51,8	65,72	
	Kegiatan BOS APBN	Persentase distribusi dana BOS APBN	100	%	780.000.000.000	60	477.191.348.000	100	294.608.450.000	0	-	60	477.191.348.000	60	61,18	
	Kegiatan BOS APBD	Jumlah Peserta Didik SMA/SMK/ PKLK	394728	org	250.335.619.600	0	637.105.200,00		5.156.300.000	64,49	225.052.439.071	64,49	225.689.544.271	0,02	90,15	
	Kegiatan Pemberian Beasiswa	Jumlah Siswa Penerima Bantuan Beasiswa	25.195	org	82.523.100.000,00	24.032	37.446.277.500	17.885	277.615.000	1	365.793.845	24033	37.812.071.345	95,39	45,82	
									Rata-rata capaian kinerja (%)	21,83		8.052,00	246.897.654.539			
									Predikat kinerja	SR						

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Dinas Kesehatan Prov. Jambi																
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi kesehatan					1.387.107.331		1.155.392.596		980.881.892		2.367.989.223	366		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat keluar pertahun	4000	surat		6867	5.499.000	4000	6.000.000	9264	5.996.000	16131	11.495.000	403,28		Diskes Provinsi Jambi
	Penyediaan jasa komunikasi, Sumberdaya Air dan listrik	Periode pembayaran rekening (bulan)	12	bulan		12	386.874.957	12	391.580.000	21	392.898.583	33	779.773.540	275		Diskes Provinsi Jambi
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah tenaga administrasi keuangan	21	orang		21	239.974.800	21	249.306.800	84	226.239.800	105	466.214.600	500		Diskes Provinsi Jambi
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan	6	orang		6	121.271.250	6	121.967.500	24	115.967.000	30	237.238.250	500		Diskes Provinsi Jambi
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK (set)	141	item		112	49.858.700	141	33.356.650	464	25.049.875	576	74.908.575	408,51		Diskes Provinsi Jambi
	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	15	cetakan		15	14.000.000	15	14.000.000	28	13.999.500	43	27.999.500	286,67		Diskes Provinsi Jambi
	Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor (buah)	5	buah		8	208.204.740	5	5.000.050	5	4.976.000	13	213.180.740	260		Diskes Provinsi Jambi
	Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (eks)	10	eks		10	18.250.000	10	22.714.120	23	12.713.500	33	30.963.500	330		Diskes Provinsi Jambi
	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah peserta rapat/tamu/dll (orang)	500	orang		350	23.070.000	500	25.000.000	950	24.858.375	1300	47.928.375	260		Diskes Provinsi Jambi
	Rapat-rapat Koordinasi dalam daerah dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan (OH)	31	OH		35	320.103.884	31	286.467.476	101	158.183.259	136	478.287.143	438,71		Diskes Provinsi Jambi
									Rata-rata capaian kinerja (%)	1.096,0		1.840,0	236.798.922			
									Predikat kinerja	FALSE						
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur`					917.955.004	100%	604.566.000		2.031.471.042		2.949.426.046			
	Pengadaan kendaraan dinas/ operasional	Jumlah pengadaan kendaran dinas		unit		1	319.381.600	0	-	5	23.200.000	6	342.581.600			Diskes Provinsi Jambi
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah jenis pengadaan perlengkapan gedung kantor		jenis		2	64.464.400	5	139.366.000	16	23.200.000	18	87.664.400			Diskes Provinsi Jambi
	Pengadaan peralatan gedung/kantor	Jumlah jenis pengadaan peralatan gedung kantor		jenis		6	136.597.000	11	90.000.000	11	204.300.000	17	340.897.000			Diskes Provinsi Jambi
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung /kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor secara berkala		gedung		1	69.689.075	1	46.200.000	2	927.739.000	3	997.428.075			

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara		keendaraan		9	261.522.929	10	299.000.000	30	813.432.042	39	1.074.954.971			Diskes Provinsi Jambi
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara		jenis		7	66.300.000	7	30.000.000	13	39.600.000	20	105.900.000			Diskes Provinsi Jambi
									Rata-rata capaian kinerja (%)	12,83		17,17	491.571.008			
									Predikat kinerja	SR						
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase PNS yang displin					197.450.000	100%	197.600.062		197.450.000		394.900.000	-	-	
	Pengadaaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya		stel		388	197.450.000	388	197.600.062	386	197.450.000	774	394.900.000			Diskes Provinsi Jambi
									Rata-rata capaian kinerja (%)	386		386	394.900.000			
									Predikat kinerja	FALSE						
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang paham terhadap aturan					474.069.009	100%	128.170.600		26.966.600		501.035.609			
	Kegiatan Sosialisasi peraturan Perundang-undangan	Jumlah peraturan perundang-undangan yang tersosialisasi		orang		30	91.616.682	30	69.956.000	-	-	30	91.616.682			Diskes Provinsi Jambi
	Kegiatan Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah tenaga kesehatan yang melaksanakan kursus/pelatihan		persen		81	170.928.387	70	8.829.000	98	8.666.600	179	179.594.987			Diskes Provinsi Jambi
	Kegiatan Peningkatan ASN	Jumlah peraturan perundang-undangan yang tersosialisasi		peraturan		2	25.744.900	2	49.385.600	11	18.300.000	13	44.044.900			Diskes Provinsi Jambi
	Kegiatan Pelayanan Publik	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat		persen		80	185.779.040	-	-	-	-	80	185.779.040			Diskes Provinsi Jambi
									Rata-rata capaian kinerja (%)	27,25		75,5	125.258.902			
									Predikat kinerja	SR						
5	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah Laporan keuangan yang handal			-		126.500.031		107.050.586		56.838.800		183.338.831			
	Kegiatan penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah Laporan Keuangan yang handal				-	-	-	-	0	-	0	-			Diskes Provinsi Jambi
	Kegiatan Pemutakhiran data laporan keuangan penataan aset dilingkungan diskes Prov. Jambi	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran		laporan			43.045.300	2	47.800.486	2	42.934.800	2	85.980.100			Diskes Provinsi Jambi
		Opini laporan keuangan WTP								0	-	0	-			
	Pembinaan pengelola administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara	Jumlah Dokumen Nilai Asset tetap yang telah mendapatkan Penetapan Status Pengguna (PSP) sesuai ketentuan				80	83.454.731	3 Dokumen	59.250.100	3	13.904.000	83	97.358.731			Diskes Provinsi Jambi
		Persentase penurunan temuan hasil pemeriksaan														
									Rata-rata capaian kinerja (%)	1,25		21,25	45.834.708			
									Predikat kinerja	SR						

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
6	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase Dokumen perencanaan, evaluasi daninformasi Kesehatan					6.737.538.372		9.368.158.459		20.905.783.815	0,00%	27.643.322.187			
	Kegiatan Penyusunan Perencanaan Program dan Anggaran	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran		dok		4	393.559.432	4	314.315.786	6	359.040.128	10	752.599.560			Diskes Provinsi Jambi
	Kegiatan Rapat Kerja kesehatan Daerah (Rakerkesda)	Jumlah dokumen Hasil Rakerkesda		dok		1	394.317.000	1	479.097.323	1	48.300.000	2	442.617.000			Diskes Provinsi Jambi
	Kegiatan Penerpan Komponen-komponen SAKIP/Renstra	Jumlah Dokumen SAKIP		dok		3	65.524.400	2	35.653.712	6	9.987.200	9	75.511.600			Diskes Provinsi Jambi
	Kegiatan Asistensi Pengumpulan dan Update Data Program Kesehatan	Jumlah Kabupaten/ Kota yang melakukan Pengumpulan dan update data Program Kesehatan		Kab/Kota		11	73.689.900	11	63.718.844	11	59.167.800	22	132.857.700			Diskes Provinsi Jambi
	Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah puskesmas kab/kota yang tersedia jaringan komunikasi data		Kab/Kota		11	88.390.650	11	77.091.880	22	46.590.000	33	134.980.650			Diskes Provinsi Jambi
	Kegiatan Desiminasi Hasil penelitian dan Capaian Program Kesehatan	Jumlah penelitian kesehatan dan capaian program kesehatan terpublikasi		keg		2	61.539.500	2	60.254.000	-	-	2	61.539.500			Diskes Provinsi Jambi
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		laporan		9	42.531.772	9	76.143.314	5	31.866.628	14	74.398.400			Diskes Provinsi Jambi
	Kegiatan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Kesehatan	Jumlah kab/kota yang dimonitoring pelaksanaan kegiatan bidang kesehatan		Kab/Kota		11	87.730.429	11	62.652.600	22	45.350.000	33	133.080.429			Diskes Provinsi Jambi
	Kegiatan Dukungan Manajemen (Dak bok) PROVINSI JAMBI					-	332.202.000	-	-	1	8.967.702.829	1	9.299.904.829			Diskes Provinsi Jambi
	Kegiatan BOK UKM Tersier (DAK BOK) Provinsi Jambi					-	2.597.298.000	-	-	-	-	-	2.597.298.000			Diskes Provinsi Jambi
	Kegiatan BOK Provinsi (DAK Non Fisik)	Persentase dokumen Bantuan Operasional Kesehatan Provinsi		persen		1	2.600.755.289	1	8.199.231.000	1	11.337.779.230	2	13.938.534.519			Diskes Provinsi Jambi
									Rata-rata capaian kinerja (%)	6,79		11,61	2.513.029.29			
									Predikat kinerja	SR						
7	Program Peningkatan Kemitraan Pelayanan Kesehatan	Persentase penempatan tenaga strategis (PTT, Nusantara Sehat dan Penugasan Khusus dan Wajib Kerja Spesialis) dari Provinsi Jambi ke Ke Kab/Kota					42.884.216	100%	35.971.030	-	21.206.000	-	64.090.216			
	Kegiatan kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis	Jumlah Kab/Kota yang dibina tenaga kesehatan strategis		Kab/Kota		-	-	11	35.971.030	11	21.206.000	11	21.206.000			

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Persentase penempatan tenaga strategis (PTT, Nusantara Sehat dan Penugasan Khusus dan Wajib Kerja Spesialis) dari Provinsi Jambi ke Ke Kab/Kota		persen		100	42.884.216	-	-	-	-	100	42.884.216			Diskes Provinsi Jambi
									Rata-rata capaian kinerja (%)	5,5		55,5	32.045.108			
									Predikat kinerja	SR						
8	Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang minimal memiliki 9 jenis tenaga kesehatan			-		1.046.060.627		810.192.450		325.385.700		1.371.446.327			
	Kegiatan percepatan peningkatan kemampuan dan kualifikasi tenaga Kesehatanmenjadi D.III	Jumlah Tenaga Kesehatan yang ditinggkatkan Jenjamg Pendidikan Menengah/DI Menjadi D.III		orang		293	342.939.900	350	129.920.500	1.304	284.083.300	1597	627.023.200			Diskes Provinsi Jambi
	Kegiatan pendayagunaan tenaga kesehatan	Persentase RS Kabupaten/Kota kelas C yang memiliki 4 Dokter spesialis Dasar dan 3 Dokter Spesialis Penunjang		persn		80	703.120.727	60	680.271.950	-	41.302.400	80	744.423.127			
		Persentase puskesmas yang minimal 9 jenis tenaga kesehatan				27,18	-	21,14	-		-	27,18	-			Diskes Provinsi Jambi
									Rata-rata capaian kinerja (%)	652		652	457.148.776			
									Predikat kinerja	FALSE						
9	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase ketersediaan obat, vaksin dan perbekalan kesehatan di Provinsi Jambi					2.124.228.158	75%	1.659.597.888		781.917.278		2.906.145.436			
	Kegiatan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase ketersediaan obat vaksin dan perbekkes di Provinsi Jambi		persen		99	1.531.594.756	90	1.303.695.543	30	558.067.068	129	2.089.661.824			Diskes Provinsi Jambi
	Kegiatan Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase penggunaan obat sesuai Fornas (Formularium Nasional) di Instalasi Farmasi Kab/Kota		kab/kota		87	215.692.831	4	147.682.345	4	19.855.000	91	235.547.831			Diskes Provinsi Jambi
	Binwasdal kegiatan program obat dan perbekalan kesehatan	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan program kefaramasian				11	23.916.000	-	-	1	32.811.750	12	56.727.750			Diskes Provinsi Jambi
	Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi Komunitas dan Rumah Sakit	Persentase Pelayanaan kefarmasian di Puskesmas sesuai dengan standar				55	31.938.000	-	-	0,2	22.957.800	55,2	54.895.800			Diskes Provinsi Jambi
	Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK)	Persentase ketersediaan obat buffer stock di Provinsi Jambi		persen		100	254.393.695	100	131.247.000	-	95.392.205	100	349.785.900			Diskes Provinsi Jambi

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Kegiatan BOK Disribusi Obat dan e-logistik (DAK Non Fisik)			persen		0	-	100	76.973.000	-	52.833.455	0	52.833.455			
	Kegiatan Pemberdayaan masyarakat dalam rangka peningkatan program kesehatan keluarga utk menjamin keamanan mutu dan manfaat alkes dan PKRT	Jumlah Kab/Kota yang terpantau melaksanakan pengawasan penggunaan Alkes dan PKRT di peredaran yg memenuhi syarat		kab/kota		100	22.567.600	-	-	-	-	100	22.567.600			
	Kegiatan Sampling Alkes dan PKRT	Jumlah Kab/Kota yang terpantau melaksanakan pengawasan penggunaan Alkes dan PKRT		kab/kota		200	34.635.276	-	-	-	-	200	34.635.276			
	Kegiatan Binwasdal program alkes dan PKRT	Jumlah sarana produksi, distribusi Alkes dan PKRT yang memenuhi persyaratan		sarana		2500	9.490.000	-	-	-	-	2500	9.490.000			Diskes Provinsi Jambi
									Rata-rata capaian kinerja (%)	3,91		354,13	322.905.048			
									Predikat kinerja	SR						
10	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase makanan jajanan anak sekolah yang memenuhi syarat			-		391.272.853	0	115.666.948		5.550.000	-	396.822.853			
	Kegiatan Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan	Jumlah kab/kota yang terpantau melaksanakan pembinaan ke sarana Usaha kecil Obat Tradisional (UKOT) Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Usaha Jamu Gendong (UJG) dan Usaha Jamu Rajikan (UJR)		kab/kota		5	176.797.400	-	-	-	-	5	176.797.400			Diskes Provinsi Jambi
	Kegiatan Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat terhadap obat,obat tradisonal, keamanan pangan dan bahan berbahaya	Jumlah kab/kota yang terpantau melaksanakan pembinaan ke sarana Usaha kecil Obat Tradisional (UKOT) Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Usaha Jamu Gendong (UJG) dan Usaha Jamu Rajikan (UJR), dan makanan (sarana makanan jajanan anak sekolah dan industri rumah tangga pangan)								-	-	0	-			Diskes Provinsi Jambi
	Kegiatan peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya	Jumlah Kab/Kota yang terpantau melaksanakan Pembinaan ke Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)				4	28.495.000		-	-	-	4	28.495.000			

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Kegiatan Pembinaan lomba sekolah sehat (LSS) tingkat Nasional (pembinaan sarana makanan jajanan)yang mengikuti (LSS)tigkat Nasional	Jumlah sarana sekolah yang mengikuti LSS Tingkat Nasional				4	22.074.200			-	-	4	22.074.200			
	Kegiatan Lomba sekolah sehat (LSS) tingkat provisi (penilaian sarana makanan jajanan sekolah yang mengikuti LSS Nasional)	Jumlah sarana Sekolah yangLSS tingkat Nasional di 11 Kab/Kota				11	10.815.000		-	-	-	11	10.815.000			Diskes Provinsi Jambi
	Peningkatan pengawasan dan pemberdayaan Konsumen/Masyarakat terhadap Obat, keamanan pangan dan bahan berbahaya	Jumlah kab/kota yang terpantau melaksanakan pembinaan ke sarana Usaha kecil Obat Tradisional (UKOT) Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Usaha Jamu Gendong (UJG) dan Usaha Jamu Rajikan (UJR), dan makanan (sarana makanan jajanan anak sekolah dan industri rumah tangga pangan)		Kab/Kota		2	153.091.253	5	115.666.948	-	5.550.000	2	158.641.253			Diskes Provinsi Jambi
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-		4,33	66.137.142			
										Predikat kinerja	SR						
11	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Kecamatan yang mempunyai Puskesmas terakreditasi					557.081.453	32,56	608.781.000		179.997.700	0%	737.079.153			
	Kegiatan Penerapan Program Indonesia sehat dengan pendekatan keluarga (PIS-PK)	Jumlah puskesmas yang menerapkan Program Indonesia sehat dengan pendekatan Keluarga (PIS-PK)		PKM		206	57.357.700	194	46.139.000	0	-	206	57.357.700			Diskes Provinsi Jambi
	Kegiatan Pelayanan Kesehatan yang bergerak (PKB) di Daerah terpencil dan sangat terpencil (DTPK)	Jumlah Kab yang melakukan pelayanan kesehatan yang bergerak (PKB) di daerah terpencil dan sangat terpencil (DTPK)		Kab/Kota		4	171.676.046	4	194.094.000	3	88.627.700	7	260.303.746			Diskes Provinsi Jambi
	Kegiatan Peningkatan pelayanan kesehatan primer	Jumlah kecamatan yang mempunyai Puskesmas akreditasi		PKM		-	-	189	332.839.000	189	91.370.000	189	91370000			Diskes Provinsi Jambi
		Jumlah Kecamatan yang mempunyai puskesmas terakreditasi		kec.		138	294.136.833	-	-	0	0	138	294136833			
	Kegiatan pelayanan kesehatan tradisional	Persentase Puskesmas yang melaksanakan yankestrad		persen		0,898	33.910.874	90	35.709.000	0	0	0,9	33910874			Diskes Provinsi Jambi
										Rata-rata capaian kinerja (%)	38,4		108,18	147.415.831			
										Predikat kinerja	SR						

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
12	Program Upaya Kesehatan Perorangan	Persentase Kabupaten/Kota yang mempunyai minimal 1 Rumah Sakit terakreditasi					499.066.600	30%	262.393.286		88.886.550	0%	587.953.150			Diskes Provinsi Jambi
	Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan perorangan	Jumlah RS Kab/Kota dengan akses layanan rujukan		RS		6	238.880.100	0	-	0	-	6	238.880.100			Diskes Provinsi Jambi
	Peningkatan mutu pelayanan kesehatan rujukan	Jumlah RS Kab/Kota dengan akses layanan rujukan		RS		6	113.125.500	8	107.744.286	0	-	6	113.125.500			Diskes Provinsi Jambi
	Peningkatan RS untuk mendukung Program PONEK	Jumlah RS yang mendukung prog. PONEK		RS		6	61.154.000	7	65.553.712	0	-	6	61.154.000			Diskes Provinsi Jambi
	Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah kasus yang diselesaikan oleh BPRS di Rumah Sakit		RS		2	85.907.000	4	89.095.288	4	88.886.550	6	174.793.550			Diskes Provinsi Jambi
									Rata-rata capaian kinerja (%)	1		6	146.988.288			
									Predikat kinerja	SR						
13	Program Pembiayaan Jaminan Kesehatan				-		18.413.359.200	100	23.011.608.318	-	27.579.809.984		45.993.169.184			
	Kegiatan Pengelolaan Program Jamkesda Provinsi	Jumlah masyarakat yang tidak mampu yang di integrasikan ke JKN		kab/kota		11	94.789.525	11	60.623.600	-	-	11	94.789.525			Diskes Provinsi Jambi
	Kegiatan pengelolaan PHA dan DHA	Jumlah Kab/Kota yang menyenggarakan Districk Health Account (DHA)		jiwa		73.735	18.318.569.675	76.086	22.950.984.718	138.320	27.579.809.984	212055	45.898.379.659			Diskes Provinsi Jambi
									Rata-rata capaian kinerja (%)	69.160		106.03.0	22.996.584.592			
									Predikat kinerja	FALSE						
14	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Kabupaten/Kota yang memiliki kebijakan publik berwawasan kesehatan					3.974.680.670		632.341.274		561.048.879	-	4.535.729.549			Diskes Provinsi Jambi
	Mengembangkan strategi promosi Gerakan Masyarakat hidup sehat (Promosi Kesehatan pada fasilitas kesehatan dan Masyarakat)	Jumlah Tema Pesan dalam Komunikasi, Informasi dan Edukasi kesehatan kepada masyarakat		tema		10	614.284.970	10	516.607.274	9	459.357.879	19	1.073.642.849			Diskes Provinsi Jambi
	Menggalang Komitmen Sektoral dalam advokasi kebijakan publik berwawasan kesehatan (Pengembangan UKBM, Jejaring dengan Lintas sektor, kemitraan dengan dunia usaha dan organisasi)	Jumlahkebijakan Publikyang berwawasan kesehatan di Provinsi Jambi		kebijakan		4	379.495.150	5	115.734.000	1	101.691.000	5	481.186.150			Diskes Provinsi Jambi
	Kegiatan Penggalangan Advokasi kesehatan dengan lintas sektor dan pemangku pemberi kebijakan	Persentase Kab/Kota yang memiliki kebijakan publik berwawasan Kesehatan				1	131.113.000			-	-	0,64	131.113.000			Diskes Provinsi Jambi
	Kegiatan Gerakan masyarakat hidup sehat	Persentase Kab/Kota yang memiliki kebijakan ber PHBS				0	14.925.000		-	-	-	0,42	14.925.000			

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Kegiatan peningkatan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan	Persentase desa yang memanfaatkan dana Desa untuk UKBM				4	138.361.000		-	-	-	4	138.361.000			
	Kegiatan penggalangan advokasi ke organisasi potensial tentang peningkatan pembangunan kesehatan	Jumlah dunia usaha yang memanfaatkan CSR untuk Program Kesehatan				10	489.390.300		-	-	-	10	489.390.300			
	Kegiatan penggalangan advokasi ke organisasi potensial tentang peningkatan pembangunan kesehatan	Jumlah dunia usaha yang memanfaatkan CSR untuk Program Kesehatan				11	489.390.301		-	-	-	11	489.390.301			
	Kegiatan peningkatan promosi kesehatan di puskesmas	Persentase Puskesmas yang mampu melaksanakan promosi kesehatan				1	91.004.000		-	-	-	0,5	91.004.000			
	Kegiatan dukungan UKM Tersier (Dana BOK Provinsi)	Persentase dana dukungan UKM tersier BOK di Provinsi				1	1.362.410.880		-	-	-	1	1.362.410.880			
	Kegiatan dukungan Manajemen (Dana BOK Provinsi)	Persentase Dana Dukungan manajemen BOK di Provinsi				1	264.306.069		-	-	-	1	264.306.069			
									Rata-rata capaian kinerja (%)	1		5,26	453.572.955			
									Predikat kinerja	SR						
15	Program Perbaikan Gizi	Persentase ibu hamil kurang energi kronik (KEK)					1.939.256.046		5.456.325.830		4.883.122.112	-	6.822.378.158			
		% Ibu hamil KEK yang mendapat PMT														
	Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin	% Ibu Hamil KEK mendapatkan PMT				26	113.111.800	28	67.200.000	98	50.550.000	123,5	163.661.800			
	Penanggulangan Kurang Energi dan protein anemia gizi gangguan akibat kekurangan iodium kurang vitamin A	Persentase remaja putri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD)				30	40.048.500	35	59.410.806	-	52.690.806	30	92.739.306			
	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat untuk mencapai keluarga sadar gizi	Persentase Bayi usia 0-6 bulan mendapatkan ASI Ekskusif				62	62.727.200	63	120.263.718	-	36.052.306	62	98.779.506			
	Kegiatan Penguatan Surveilans Gizi	% Kabupaten melaksanakan Surveilans Gizi				22	104.063.921	25	83.609.306	-	5.348.000	22	109.411.921			Diskes Provinsi Jambi
	Kegiatan Penurunan Stunting (DAK Penugasan)	Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan PMT Stunting		kab/kota		2	1.539.380.086	100	5.125.842.000	-	4.738.481.000	2	6.277.861.086			Diskes Provinsi Jambi
		Persentase Dokumen Penguatan Intervensi Stunting (DAK)								-	-	0	-			
	Kegiatan Penyusunan Peta Informasi Kurang Gizi	% Ibu hamil KEK yang mendapat PMT				91,7	79.924.539	-	-	-	-	91,7	79.924.539			Diskes Provinsi Jambi
									Rata-rata capaian kinerja (%)	13,93		47,31	974.625.451			
									Predikat kinerja	SR						

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
16	Program Peningkatan Pelayan Kesehatan Anak Balita	Persentase Kunjungan Neonatal (KN1)					46.176.100		48.409.100		44.944.000		91.120.100			
	Kegiatan Pelatihan dan Pendidikan Perawatan Anak Balita	Persentase Kunjungan Balita				75	46.176.100	80	48.409.100	80	44.944.000	155	91.120.100			Diskes Provinsi Jambi
									Rata-rata capaian kinerja (%)	80		155	91.120.100			
									Predikat kinerja	T						
17	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Persentase kab/kota yang mempunyai puskesmas santun lansia					48.758.100		64.274.400		-		48.758.100			Diskes Provinsi Jambi
	Kegiatan Pelayanan Kesehatan	Persentase puskesmas yang melaksanakan santun usila		persen		55	48.758.100	60	64.274.400	0	-	55	48.758.100			Diskes Provinsi Jambi
									Rata-rata capaian kinerja (%)	-		55	48.758.100			
									Predikat kinerja	SR						
18	Program Kesehatan Ibu dan Anak	Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan					433.583.001	79%	403.000.900	-	96.750.000	-	530.333.001			Diskes Provinsi Jambi
	Kegiatan Perawatan berkala bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu	Jumlah puskesmas yang melaksanakan kelas ibu hamil		PKM		65	96.397.200	75	126.001.600	77	26.110.000	142	122.507.200			Diskes Provinsi Jambi
	Pertolongan persalinan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu	Persentase puskesmas yang melaksanakan orientasi program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K)		persen		45	146.190.000	50	104.461.100	55	44.240.000	100	190.430.000			Diskes Provinsi Jambi
	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja	Persentase Puskesmas yang melaksanakan Penjaringan kesehatan untuk peserta didik kelas I, VII dan X		persen		97,44	190.995.801	45	172.538.200	140	26.400.000	237,44	217.395.801			Diskes Provinsi Jambi
									Rata-rata capaian kinerja (%)	90,67		159,81	176.777.667			
									Predikat kinerja	ST						
19	Program Pengembagan Lingkungan Sehat	Persentase kab/kota yang memenuhi kualitas lingkungan sehat			-		571.635.829		359.776.100		102.587.800		674.223.629			
	Kegiatan Penyehatan air dan sanitasi dasar	Jumlah desa yang melaksanakan STBM		desa		1.104	152.115.429	1.000	107.807.200	1.253	34.466.200	2357	186.581.629			Diskes Provinsi Jambi
	Kegiatan Pengamanan limbah dan radiasi	Persentase Fasyankes yang melakukan pengelolaan limbah medis sesuai aturan		persen		85	78.125.000	100	44.616.000	93	17.356.000	178	95.481.000			
	Kegiatan Penyehatan udara tanah pangan dan kawasan	Persentase Kab/Kota/Kawasan yang telah melaksanakan Kab/Kota/Kawasan sehat		persen		81,8	119.253.400	100	75.000.000	91	18.175.000	172,7	137.428.400			Diskes Provinsi Jambi

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penyehatan Pangan	Persentase tempat pengolahan makanan yang memenuhi syarat kesehatan		persen		37,1	44.720.000	40	43.661.000	93	30.590.600	130,1	75.310.600			Diskes Provinsi Jambi
	Kesehatan Kerja	Persentase Kab/Kota yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar		persen		84,95	63.013.000	90	42.094.000	-	-	84,95	63.013.000			Diskes Provinsi Jambi
	Kesehatan Olah Raga	Persentase Kab/Kota melaksanakan kegiatan kesehatan Olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya		persen		87,86	52.670.000	70	46.597.900	158	2.000.000	245,72	54.670.000			Diskes Provinsi Jambi
	Kegiatan Kesehatan kerja dan olahraga	Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar		persen		78,3	61.739.000	-		-	-	78,3	61.739.000			Diskes Provinsi Jambi
									Rata-rata capaian kinerja (%)	241,11		463,82	96.317.661			
									Predikat kinerja	FALSE						
20	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Persentase Kab/kota dengan angka keberhasilan pengobatan TB Paru BTA Positif (Success Rate) minimal 85 %.		0,85	0	100	4.004.987.211		3.146.505.805		1.538.943.852		5.543.931.063			Diskes Provinsi Jambi
		Persentase Kab/Kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi		1		100										
	Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Kusta dan Frambusia	Persentase cakupan penemuan kasus baru Kusta tanpa cacat		persen		70,67	81.139.500	95	92.873.500	-	-	70,67	81.139.500			
	Pengendalian dan Pencegahan Penyakit TB	Persentase Kab/kota dengan angka keberhasilan pengobatan TB Paru BTA Positif (Success Rate) minimal 85 %.		persen		85	279.189.100	90	273.030.000	-	272.275.922	85	551.465.022			
	Pengendalian dan Pencegahan Penyakit HIV	Persentase kasus HIV yang diobati		persen		70,6	178.438.400	55	119.030.000	-	73.380.000	70,6	251.818.400			
	Pengendalian dan Pencegahan Penyakit ISPA dan Pneumonia	Persentase kab/kota yang 50% PKM-nya melakukan pemeriksaan dan tatalaksana Pneumonia melalui Program MTBS		persen		90,9	100.616.884	63,64	63.572.000	-	53.352.000	90,9	153.968.884			
	Pengendalian dan Pencegahan Penyakit DBD	Persentase kab/kota dengan IR DBD < 49/100.000penduduk		persen		100	120.909.200	100	113.325.435	-	64.790.000	100	185.699.200			
	Pengendalian dan Pencegahan Penyakit malaria	Jumlah kab/kota yang memperoleh sertifikat Elimasi malaria		Kab/kota		3	178.036.500	4	87.242.800	-	-	3	178.036.500			
	Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Filaria dan kecacngan	Jumlah Kab/Kota Endemis Filaria yg berhasil menurunkan angka Mikrofilaria menjadi <1%		Kab/kota		5	152.480.198	5	156.106.726	-	116.044.598	5	268.524.796			

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Zoonotik	Presentase kab/kota yg Eliminasi Rabies (kematian karena Rabies)		persen		100	99.547.000	100	102.937.000	-	-	100	99.547.000			
	Kegiatan Peningkatan Penanggulangan Krisis Kesehatan	Persentase kiris kesehatan yang diverifikasi dan ditanggulangi		persen		100	193.771.300	100	151.824.317	-	64.460.000	100	258.231.300			
	Kegiatan Pemeriksaan dan Pembinaan Kesehatan Calon Jemaah Haji	Persentase hasil pemeriksaan kesehatan jemaah haji		persen		100	102.810.900	100	93.095.000	-	55.672.812	100	158.483.712			
	Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Hepatitis dan ISP (Infeksi Saluran Percernaan)	Persentase kab/kota yang melaksanakan kegiatan deteksi dini Hepatitis B pada kelompok berisiko		persen		81,82	120.658.000	100	86.258.023	-	-	81,82	120.658.000			
	Kegiatan Kewaspadaan Dini dan Respon	Persentase sinyal kewaspadaan dini direspon		persen		85	279.072.558	90	233.101.520	-	112.150.620	85	391.223.178			Diskes Provinsi Jambi
	Kegiatan Surveilans Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi (PD3I)	Insiden Rate (IR) kasus suspek campak per 100.000 populasi		IR		-	243.964.998	>=10	149.929.484	-	37.384.000	0	281.348.998			Diskes Provinsi Jambi
	Pelaksanaan Imunisasi rutin bayi dan baduta	Persentase Kab/Kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi		persen		95	384.673.800	95	341.980.000	-	203.630.000	95	588.303.800			
	Penyediaan Fasilitas Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Laur Baisa (KLB)	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi		persen		-	-	100	230.800.000	-	210.760.000	0	210.760.000			
	Penyediaan Fasilitas Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana		persen		-	-	100	851.400.000	-	275.043.900	0	275.043.900			
	Kegiatan pengendalian penyakit menular langsung	Persentase Kab/kota dengan angka keberhasilan pengobatan TB Paru BTA Positif (Success Rate) minimal 85 %.		persen		100	405.029.000			-	-	100	405.029.000			Diskes Provinsi Jambi
	Kegiatan Pencegahan dan pengendalian tular vektor dan zoonosis (P2PTPZ)	Persentase kab/kota yang melakukan pengendalian vektor terpadu		persen		100	607.039.409			-	-	100	607.039.409			Diskes Provinsi Jambi
	Kegiatan peningkatan cakupan imunisasi dasar lengkap	Persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap		persen		100	477.610.464			-	-	100	477.610.464			
									Rata-rata capaian kinerja (%)	-		67,74	291.785.845			
									Predikat kinerja	SR						
21	Program Pencegahan dan Penanggulangan PTM	Persentase kab/kota yang melaksanakan kebijakan kawasan Tanpa Rokok(KTR) minimal 50% sekolah					855.123.508		729.714.000	-	417.824.000	-	1.272.947.508			

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Kegiatan pengendalian penyakit tidak menular	Persentase puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu		persen		58	575.530.908	54,55	484.574.000	82	334.014.000	140	909.544.908			Diskes Provinsi Jambi
	Kegiatan pengendalian kesehatan jiwa dan NAPZA	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jiwasesuai standar		persen		100	279.592.600	100	245.140.000	0	83.810.000	100	363.402.600			
									Rata-rata capaian kinerja (%)	41		120	636.473.754			
									Predikat kinerja	SR						
22	Program Pelayanan Laboratorium Kesehatan	Persentase pelaksanaan standarisasi pelayanan pemeriksaan laboratorium klinis dan kesehatan masyarakat					7.422.275.351		6.943.641.078		5.782.968.186		13.205.243.537			
	Kegiatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan	Jumlah pemeriksaan laboratorium yang dilayani		persen		100	2.270.601.423	100	1.499.033.293	100	1.035.652.289	200	3.306.253.712			LABKES Provinsi Jambi
	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Laboratorium			persen		80	1.205.128.350	90	1.321.108.785	90	400.304.000	170	1.605.432.350			LABKES Provinsi Jambi
	Kegiatan Pengembangan Pelayanan Labkes BLUD			persen		100	1.476.640.533	10	1.150.000.000	120	1.648.991.897	220	3.125.632.430			LABKES Provinsi Jambi
	Kegiatan renovasi/Rehabilitasi Pembangunan Labkesda Jambi (DAK)	Jumlah parameter pelayanan laboratorium terakreditasi		paket		1	2.246.711.000	10	2.973.499.000	100	2.698.020.000	101	4.944.731.000			LABKES Provinsi Jambi
	Kegiatan Akreditasi Labkesda Provinsi Jambi (DAK Non Fisik)	Persentase ketersediaan kegiatan operasional Balai Laboratorium Kesehatan		paket		1	223.194.045		-	0	-	1	223.194.045			LABKES Provinsi Jambi
									Rata-rata capaian kinerja (%)	66,63		95,64	2.690.259.622			
									Predikat kinerja	R						
23	Program Peningkatan Balai Kesehatan	Persentase aparatur yangmendapat pelatihan				40	8.882.982.121	45	3.164.326.647		1.412.726.855	-	10.295.708.976			
		Persentase pelatihan SDM kesehatan yang terakreditasi														
	Kegiatan Pembangunan dan pemeliharaan gedung Bapelkes	Jumlah pembangunan dan Rehab gedung Bapelkes		paket		1	570.533.386	1	126.614.800	0	-	1	570.533.386			Diskes Provinsi Jambi
	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Bapelkes	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Bapelkes (AC Meubeler Listrik Air Jaringan Internet Minibus)		paket		1	410.002.750	1	954.958.715	100	505.368.500	101	915.371.250			Diskes Provinsi Jambi
	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan yang dilatih dalam bidang kesehatan		orang		390	1.089.040.737	420	1.151.192.218	80	116.920.600	470	1.205.961.337			Diskes Provinsi Jambi

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Kegiatan Peningkatan Kelembagaan Bapelkes	Persentase persiapan akreditasi		persen		80	900.155.248	80	931.560.914	41	790.437.755	121,08	1.690.593.003			Diskes Provinsi Jambi
	Kegiatan Peningkatan fasilitas Bapelkes (DAK Penugasan)	Persentase persiapan akreditasi		persen		100	5.913.250.000	-	-	-	-	100	5.913.250.000			Diskes Provinsi Jambi
									Rata-rata capaian kinerja (%)	44,22		158,62	2.059.141.795			
									Predikat kinerja	SR						
24	Program Pengembangan Akademi Farmasi	Persentase kelulusan peserta didik setiap tahun					1.484.227.133	-	-		-	-	1.484.227.133			
	Pengembangan Institusi Pendidikan DIII Farmasi Bidang Kesehatan (AKFAR)	Persentase kelulusan peserta didik setiap tahun				60	969.560.133	-	-	0	-	60	969.560.133			AKFAR Provinsi Jambi
	Kegiatan badan layanan umum Daerah (BLUD) AKFAR	Persentase tersedianya kegiatan operasional Akfar dalam mendukung pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat				50	514.667.000	-	-	0	-	50	514.667.000			AKFAR Provinsi Jambi
									Rata-rata capaian kinerja (%)	-		55	742.113.567			
									Predikat kinerja	SR						
25	Program Pengembangan Analis Kesehatan	Persentase kelulusan peserta didik setiap tahun					2.533.943.623		-		-	-	3.800.915.435			
	Pengembangan Institusi pendidikan DIII AAK Bidang Kesehatan (AAK)	Persentase kelulusan peserta didik setiap tahun				60	1.430.633.180	-	-	-	-	60	1.430.633.180			AAKProvinsi Jambi
	Kegiatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) AAK	Persentase tersedianya kegiatan operasional AAK dalam mendukung pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat				70	1.103.310.443	-	-	-	-	70	1.103.310.443			AAKProvinsi Jambi
									Rata-rata capaian kinerja (%)	-		65	1.266.971.812			
									Predikat kinerja	SR						
	Program Alkes dan PKRT	Persentase Kab/Kota yang melaksanakan pembinaan dan pengawasan alkes dan PKRT yang terjamin keamanana, mutu dan memenuhi syarat	55	persen	376.208.397	29	256.410.500	10	29.410.038		75.276.438		331.686.938			
	Peningkatan penilaian dan pengawasan Alkes dan PKRT	Jumlah sarana produksi, distribusi alkes dan PKRT yang memenuhi persyaratan (pengawasan, sarana, produksi dan penilaian)	27	sarana	376.208.397	29	256.410.500	10	29.410.038	25	75.276.438	54	331.686.938			
									Rata-rata capaian kinerja (%)	25		54	331.686.938			
									Predikat kinerja	SR						

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
RUMAH SAKIT UMUM RADEN MATTAHER																
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100		22.631.382.896		16.980.126.876		20.352.865.922		15.366.530.034		32.346.656.910	179	113	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air/Listrik		100	persen	6.198.400.000	100	6.204.113.486	100	8.315.549.400	72,21	5.854.547.003	172,21	12.058.660.489	172,21	194,54	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		100	persen	846.755.800	100	494.434.000	100	615.452.400	66,09	406.731.600	166,09	901.165.600	166,09	106,43	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		100	persen	4.989.600.000	100	3.390.702.000	100	4.885.790.570	99,66	4.869.342.489	199,66	8.260.044.489	199,66	165,55	
	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor		100	persen	672.707.750	100	287.219.350	100	199.744.680	69,91	139.631.555	169,91	426.850.905	169,91	63,45	
	Kegiatan Penyediaan Cetakan dan Penggandaan		100	persen	794.368.630	100	199.800.000	100	200.000.000	99,89	199.780.000	199,89	399.580.000	199,89	50,3	
	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor		100	persen	1.889.490.614	100	823.108.900	100	980.023.964	85,13	834.290.537	185,13	1.657.399.437	185,13	87,72	
	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman		100	persen	6.177.032.202	100	4.692.022.705	100	4.527.242.208	72,65	2.744.086.415	172,65	7.436.109.120	172,65	120,38	
	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah		100	persen	1.063.027.900	100	888.726.435	100	629.062.700	66,9	318.120.435	166,9	1.206.846.870	166,9	113,53	
									Rata-rata capaian kinerja (%)	79,05		179,05	4.043.332.114			
									Predikat kinerja	T						
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana			3.619.000.000	100	2.884.854.170	100	2.353.826.750	0	2.362.253.175	0	5.247.107.345	144	115	
	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional		100		900.000.000	100	-	100	-	0	-	100	-	100	0	
	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor		100		2.000.000.000	100	2.308.400.270	100	1.388.798.750	102,4	1.732.620.000	202,4	4.041.020.270	202,4	202,05	
	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional		100		599.000.000	100	490.327.900	100	845.028.000	74,51	629.633.175	174,51	1.119.961.075	174,51	186,97	
	Kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor		100		120.000.000	100	86.126.000	100	120.000.000	0	-	100	86.126.000	100	71,77	
									Rata-rata capaian kinerja (%)	58,05		134,59	2.294.316.566,4			
									Predikat kinerja	R						
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	persentase PNS yang disiplin				100	508.551.010	100	606.450.000	82	500.088.000	182	1.008.639.010	182	134	
	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas besertaPerlengkapannya		100		750.600.000	100	508.551.010	100	606.450.000	82,46	500.088.000	182,46	1.008.639.010	182,46	134,38	
									Rata-rata capaian kinerja (%)	82,46		182,46	1.008.639.010			
									Predikat kinerja	T						
	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas aparatur				100	597.866.342	100	598.500.000	67,77	266.582.413	168	864.448.755	168	56	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Kegiatan kursus,pelatihan, sosialisasi,dan bimbingan teknis		100		1.537.060.000	100	597.866.342	100	598.500.000	67,77	266.582.413	167,77	864.448.755	167,77	56,24	
									Rata-rata capaian kinerja (%)	67,77		167,77	864.448.755,00			
									Predikat kinerja	R						
	Program obat dan perbekalan kesehatan	Terselenggaranya pelayanan farmasi				100	11.941.721.801	100	13.022.472.575	105,21	17.488.982.880	205	29.430.704.681	205	115	
	Kegiatan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan,Obat anti tuberculosis (AOT), obat anti Retrovial (ART), obat perbaikan Gizi dan Buffer Stok	Tersedianya pelayanan farmasi secara efektif dan efisien	100		25.647.444.902	100	11.941.721.801	100	13.022.472.575	105,21	17.488.982.880	205,21	29.430.704.681	205,21	114,75	
									Rata-rata capaian kinerja (%)	105,21		205,21	29.430.704.681			
									Predikat kinerja	FALSE						
	Program standarisasi pelayanan kesehatan	Terlaksananya standar pelayanan dan standar biaya	100			95	165.820.387	100	136.841.840	0	92.800.410	0	258.620.797	92		
	Kegiatan penyusunan perencanaan dan Anggaran		100		336.476.168	100	165.820.387	100	136.841.840	84,34	92.800.410	184,34	258.620.797	184,34	76,86	
	Kegiatan pelaksanaan Akreditasi RS (DAK)		100		-	0	0	100	0	0	-	0	-	0		
									Rata-rata capaian kinerja (%)	42,17		92,17	129.310.399			
									Predikat kinerja	SR						
	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin (Jamkesmas Provinsi)	Meningkat nya Jumlah pasien Miskin yang terlayani	100			95	4.210.977.797	100	2.750.942.376	106,92	4.079.612.200	211,98	8.290.589.997	207	429	
	Kegiatan Pengelolaan Program Jamkesmasda	Terselenggaranya Pelayanan Jaminan Kesehatan Penduduk Miskin	100		1.933.000.000	100	4.210.977.797	100	2.750.942.376	106,92	4.079.612.200	206,92	8.290.589.997	206,92	428,9	
									Rata-rata capaian kinerja (%)	106,92	0	206,92	8.290.589.997			
									Predikat kinerja	FALSE						
	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan prasarana RS/RSJ/RS paru/RS Mata	Meningkatnya Sarana dan Prasarana RS	100			89,78	30.574.096.523	100	15.984.351.906	6,94	15.316.714.627	6,94	45.890.811.150	173	82	
	Kegiatan Pembangunan RS		100		48.964.300.000	92,03	11.546.599.515	100	4.075.001.840	83,58	5.135.867.344	175,61	16.682.466.859	175,61	34,07	
	Kegiatan pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit(DAK)	Meningkatnya jumlah peralatan kesehatan sesuai standar kesehatan	100		10.999.956.589	96,02	15.674.688.378	100	8.456.951.000	91,5	7.737.741.910	187,52	23.412.430.288	187,52	212,84	
	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan rumah tangga Rumah Sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dll)	Tersedianya Perlengkapan RT dan Peralatan dasar di RS	100		2.520.998.053	100	938.255.450	100	1.012.772.700	60,04	608.030.280	160,04	1.546.285.730	160,04	61,34	
	Kegiatan pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (non DAK)	Meningkatnya jumlah peralatan kesehatan sesuai standar kesehatan	100		23.359.545.358	93,39	2.414.553.180	100	2.439.626.366	75,22	1.835.075.093	168,61	4.249.628.273	168,61	18,19	
									Rata-rata capaian kinerja (%)	77,58		172,94	11.472.702.788			
									Predikat kinerja	S						

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/RS jiwa/RS Paru /RS Mata	Terpeliharanya sarana dan prasarana RS	100			100	1.476.342.900	100	3.171.824.080		2.808.878.374		4.285.221.274	189	55	
	Kegiatan pemeliharaan rutin / berkala Rumah Sakit	1.Terpeliharanya peralatan kesehatan 2.Terpeliharanya gedung kesehatan	100		7.824.900.000	100	1.476.342.900	100	3.171.824.080	88,56	2.808.878.374	188,56	4.285.221.274	188,56	54,76	
									Rata-rata capaian kinerja (%)	88,56		188,56	4.285.221.274			
									Predikat kinerja	T						
	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	100		125.000.000.000	100	132.970.016.734	100	125.200.000.00		104.375.180.839		237.345.197.573	201	190	
	Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Output:BOR.LOS,TOI, GDR, NDR, BTO, - Penderita Keluar hidup	100		125.000.000.000	100	132.970.016.734	100	125.200.000.000	100,63	104.375.180.839	200,63	237.345.197.573	200,63	189,88	
									Rata-rata capaian kinerja (%)	100,63		200,63	237.345.197.573			
									Predikat kinerja	FALSE						

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi																
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100%		8.898.585.883	197,67	17.590.205.007	100%	2.632.710.959	82,41	4.391.110.708	8.241,07	21.981.315.715	488	439	RSJ
	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah surat keluar per tahun (lembar)	100		8.580.000	396,28	24.585.180	100	4.050.000	64,65	3.291.000	460,93	27.876.180	460,93	324,9	RSJ
	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	Periode pembayaran rekening (bulan)	100		1.028.016.000	411,17	3.235.469.665	100	896.064.996	157,67	1.836.316.503	568,84	5.071.786.168	568,84	493,36	RSJ
	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Periode Jasa administrasi keuangan (bulan)	100		391.492.233	761,56	2.673.972.090	100	249.333.600	144,28	441.734.200	905,84	3.115.706.290	905,84	795,85	RSJ
	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Periode pemakaian Jasa Kebersihan Kantor (bulan) dan loundry	100		1.047.860.000	361,28	3.272.619.500	100	765.090.000	140,68	1.331.919.900	501,96	4.604.539.400	501,96	439,42	RSJ
	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis alat tulis kantor	100		169.400.000	511,1	963.697.440	100	196.391.163	131,95	259.139.024	643,05	1.222.836.464	643,05	721,86	RSJ
	Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan & Penggandaan	100		242.000.000	403,73	1.143.837.850	100	231.881.200	164,57	403.135.967	568,3	1.546.973.817	568,3	639,25	RSJ
	Kegiatan Penyediaan Komp. Inst Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (buah)	100		60.500.000	0	0	100	-	0	-	0	-	0	0	RSJ
	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Jenis Peralatan & bPerlengkapan Kantor	100		575.385.250	616,88	4.443.596.330	100	-	0	-	616,88	4.443.596.330	616,88	772,28	RSJ
	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah peserta rapat dan tamu	100		4.483.582.400	172,14	138.950.806	100	54.900.000	61,09	42.748.100	233,23	181.698.906	233,23	4,05	RSJ
	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan (OH)	100		891.770.000	284,33	1.693.476.146	100	235.000.000	97,1	72.826.014	381,43	1.766.302.160	381,43	198,07	RSJ
									Rata-rata capaian kinerja (%)	96,2		488,05	2.198.131.571			
									Predikat kinerja	ST						
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1		2.048.891.135	321,64	6.589.960.000	100	906.237.000	44,73	1.289.747.044	44,73	10.206.912.044	32745	257	RSJ
	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dibeli	100		400.000.000	431,45	1.481.908.000	-	-	0	-	431,45	1.481.908.000	431,45	370,48	RSJ
	Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang direhab sedang/berat	100		1.648.891.135	309,79	5.108.052.000	-	-	0	-	309,79	5.108.052.000	309,79	309,79	RSJ
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Peralatan Gedung	100		1.046.831.500	202,04	1.950.102.000	100	858.172.000	126,88	1.234.214.544	328,92	3.184.316.544	328,92	304,19	RSJ
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor & penunjang pelayanan yang terpelihara	100		983.523.816	133,5	377.103.000	100	48.065.000	106,18	55.532.500	239,68	432.635.500	239,68	43,99	RSJ
									Rata-rata capaian kinerja (%)	58,27		327,46	2.551.728.011			
									Predikat kinerja	R						
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase PNS yang disiplin			203.280.000	107,54	218.601.300	100	194.000.000	-	0	0	396.355.800	203	195	RSJ

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas dan atributnya	Jumlah Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	100		203.280.000	203,18	396.355.800	100	194.000.000	0	-	203,18	396.355.800	203,18	194,98	RSJ
									Rata-rata capaian kinerja (%)	-		203,18	396.355.800			
									Predikat kinerja	SR						
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur			203.280.000	355,47	722.598.820	100	270.000.000	0	178.713.600	0	1.786.167.234	596	879	RSJ
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat formal	100		203.280.000	539,25	1.607.453.634	100	270.000.000	57,12	178.713.600	596,37	1.786.167.234	596,37	878,67	RSJ
									Rata-rata capaian kinerja (%)	57,12		596,37	1.786.167.234			
									Predikat kinerja	R						
5	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase obat-obatan dan bhn kimia hbs pakai (reagen)			2.000.000.000	340,88	6.817.668.261	100	4.565.968.417	58,285693	8.181.676.255	58,29	23.273.599.209	697	1.164	RSJ
	Kegiatan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase obat-obatan, bahan kimia dan laboratorium (reagensia)	100		2.000.000.000	538,98	15.091.922.954	100	4.565.968.417	157,7	8.181.676.255	696,68	23.273.599.209	696,68	1163,68	RSJ
									Rata-rata capaian kinerja (%)	157,7		696,68	23.273.599.209			
									Predikat kinerja	FALSE						
6	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase upaya kesehatan masyarakat			950.727.250	299,04	923.154.199	100	160.000.000	22,4887681	172.856.568	22,49	1.722.038.347	407	181	RSJ
	Kegiatan Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan	Jumlah kegiatan integrasi,dropping,home visit	100		950.727.250	299,04	1.549.181.779	100	160.000.000	108,04	172.856.568	407,08	1.722.038.347	407,08	181,13	RSJ
									Rata-rata capaian kinerja (%)	108,04		407,08	1.722.038.347			
									Predikat kinerja	FALSE						
7	Program Promosi Kesehatan & Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Promosi Kesehatan & Pemberdayaan Masyarakat	100%		250.577.690	212,2	531.737.273	100	91.400.000	6,07221007	81.254.047	6,07	81.254.047	234		RSJ
	Kegiatan Promosi Kesehatan & Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Sosialisasi Program Kesehatan Jiwa	100		250.577.690,00	149,95	0	100	91.400.000	83,65	81.254.047	233,6	81.254.047	234	32	RSJ
	Pengembangan media Promosi & Informasi Sadar Hidup Sehat	Jumlah Jenis Media yang dibuat	100		-	0	0	-	-	0	-	0	-	0		RSJ
	Sosialisasi Konsep Kesehatan Jiwa Masyarakat	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	100		-	0	0	-	-	0	-	0	-	0		RSJ
									Rata-rata capaian kinerja (%)	27,88		77,87	27.084.682,33			
									Predikat kinerja	SR						
8	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase Perbaikan Gizi Masyarakat			5.000.000.000	114,9	5.745.160.759	100	2.651.810.000	47,22	3.649.515.450	47,22	137,62	413	296	RSJ
	Kegiatan Peningkatan Gizi Masyarakat	Jumlah makanan dan minuman pasien	100		5.000.000.000	298,3	11.171.309.199	100	2.651.810.000	114,67	3.649.515.450	412,97	14.820.824.649	412,97	296,42	RSJ
									Rata-rata capaian kinerja (%)	114,67		412,97	14.820.824.649			
									Predikat kinerja	FALSE						
9	Program Pelayanan Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase jenis pelayanan terakreditasi	100		200.000.000	163,78	327.563.350	100	15.500.000	15,7	10.428.700	16	337.992.050	285	169	RSJ
	Kegiatan Penyusunan Perencanaan & Program Anggaran	Jumlah Dokumen yang dibuat	100		200.000.000	220,58	327.563.350	100	15.500.000	64,09	10.428.700	284,67	337.992.050	285	169	RSJ
									Rata-rata capaian kinerja (%)	64,09		284,67	337.992.050			
									Predikat kinerja	R						

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
10	Program Pelayanan Penduduk Miskin (Jamkesda Prov)	Persentase pelayanan penduduk miskin (jamkesmas Provinsi)	100		1.500.000.000	214,52	3.217.795.358	100	2.620.000.000	-	5.246.947.714	-	11.463.975.584	554	764	RSJ
	Kegiatan Pengelolaan Program Jamkesmasda	Jumlah Pasien yang dibiayai	100		1.500.000.000	394,86	6.217.027.870	100	2.620.000.000	159,01	5.246.947.714	553,87	11.463.975.584	554	764	RSJ
									Rata-rata capaian kinerja (%)	159,01		553,87	11.463.975.584			
									Predikat kinerja	FALSE						
11	Program Pengadaan,Peningk Sarpras RSJ/RS Paru/ Mata	Persentase sarana dan prasarana rs baik kualitas maupun kuantitas	100		14.300.000.000	164,26	23.489.632.291	100	1.750.809.400	-	1.648.763.700	-	25.138.395.991	193	419	RSJ
	Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit	Jumlah pembangunan kantor dan sekretariat	100		8.250.000.000,00	95,41	10.941.221.044	0	-	0	-	95,41	10.941.221.044	95	133	RSJ
	Kegiatan Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit	Jumlah Bangunan yang di rehabilitasi	100		4.860.779.770,00		4.987.816.955	0	-	0	-	0	4.987.816.955	0	103	RSJ
	Kegiatan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit	Jumlah Alat kedokteran/kesehatan Rumah Sakit	100		770.000.000,00		5.775.289.592	100	1.438.620.000	82,4	1.185.387.000	82,4	6.960.676.592	82	904	RSJ
	Kegiatan Pengadaan Bahan-bahan Logistik Rumah Sakit	Jumlah Bahan Logistik yg di sediakan	100		419.220.230,00	446,33	1.785.304.700	100	312.189.400	148,42	463.376.700	594,75	2.248.681.400	595	536	RSJ
									Rata-rata capaian kinerja (%)	57,71		193,14	6.284.598.998			
									Predikat kinerja	R						
12	Program Pemeliharaan Sarpras RS/RSJ /RS Paru/ Mata	Persentase pemeliharaan Sarpas RS/RSJ/RS Paru/RS Mata	100		507.591.466	298,56	1.515.483.109	100	409.200.000	-	520.569.690	-	2.036.052.799	450	450	RSJ
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Inst. Pengolahan Limbah RS	Jumlah Pemeliharaan IPAL	100		65.941.466	369,03	272.642.016	100	92.200.000	67,45	67.160.640	436,48	339.802.656	436	515	RSJ
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas	100		441.650.000	335,64	1.242.841.093	100	317.000.000	128,82	453.409.050	464,46	1.696.250.143	464	384	RSJ
									Rata-rata capaian kinerja (%)	98,14		450,47	1.018.026.400			
									Predikat kinerja	ST						
13	Program peningkatan Mutu pelayanan kesehatan	Persentase pelay. kesh yang memenuhi standar pelayanan minimal	100		29.000.000.000	290,53	84.252.889.907	100	17.000.000.000	79,68	28.517.322.917	79,68	112.770.212.824	470	389	RSJ
	Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Jumlahpelayanan kesehatan yang sesuai standar	100		29.000.000.000	331,49	84.252.889.907	100	17.000.000.000	138,17	28.517.322.917	469,66	112.770.212.824	470	389	RSJ
									Rata-rata capaian kinerja (%)	138,17		469,66	112.770.212.824			
									Predikat kinerja	FALSE						

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH																
	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		100		1.593.000.000		1.007.230.100		1.032.826.200		812.826.042	-	1.823.956.142	722	127	
	Peny. Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Yang Terkirim	5		8.000.000	100	3.900.000	100	3.900.000	96,15	3.750.000	196,15	7.650.000	3923	96	Sekretariat BPBD Prov. Jambi
	Penyd.Jasa Komunikasi,SumberDaya Air dan Listrik	Jumlah Tagihan Yang Dibayar	18		295.000.000	100	186.000.000	100	186.000.000	74,65	138.857.610	174,65	324.857.610	970	110	Sekretariat BPBD Prov. Jambi
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan	120		160.000.000	100	101.915.500	100	105.663.000	89,72	94.797.000	189,72	196.712.500	158	123	Sekretariat BPBD Prov. Jambi
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan	24		105.000.000	100	11.314.600	100	11.314.600	100	11.314.600	200	22.629.200	833	22	Sekretariat BPBD Prov. Jambi
	Penyediaan Alat Tulis kantor	Jumlah Alat Tulis Yang Dibeli	318		93.000.000	100	105.727.500	100	97.147.500	98,32	95.519.850	198,32	201.247.350	62	216	Sekretariat BPBD Prov. Jambi
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang Yang di Cetak dan di Gandakan	78		42.000.000	100	64.068.000	100	64.775.850	99,97	64.755.850	199,97	128.823.850	256	307	Sekretariat BPBD Prov. Jambi
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik Yang Dipasang	140		70.000.000	100	21.236.500	100	21.236.500	100	21.236.500	200	42.473.000	143	61	Sekretariat BPBD Prov. Jambi
	Penyd.Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaaan yang tersedia	3.000		30.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	200	20.000.000	7	67	Sekretariat BPBD Prov. Jambi
	Penyedian Makanan dan Minuman	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Sesuai Kebutuhan	332		40.000.000	100	50.000.000	100	57.500.000	25,9	14.895.000	125,9	64.895.000	38	162	Sekretariat BPBD Prov. Jambi
	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas	24		750.000.000	100	456.968.000	100	475.288.750	99,99	357.699.632	199,99	814.667.632	833	109	Sekretariat BPBD Prov. Jambi
									Rata-rata capaian kinerja (%)	88,47		188,47	182.395.614			
									Predikat kinerja	T						
2	Program : PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		100		1.525.000.000		1.272.361.450		1.118.532.800		1.042.405.000	45	2.618.299.400		145	
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor di Adakan	45		350.000.000	100%	165.617.400	100%	135.705.800	98,5	90.620.000	99,5	256.237.400	221	73	Sekretariat BPBD Prov. Jambi
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Listrik dan Elektronik	Jumlah Peralatan Listrik dan Elektronik dipelihara	54		320.000.000	100%	-	100%	-	0	-	1	-	2	0	Sekretariat BPBD Prov. Jambi
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	8		275.000.000	100%	460.000.000	100%	278.250.000	99,71	277.440.000	100,71	737.440.000	1259	268	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Opeasional	Jumlah Peralatan Kendaraan Dinas/Operational yang dipelihara/diperbaiki	227		580.000.000	100%	721.080.000	100%	675.380.000	83,7	668.440.000	84,7	1.389.520.000	37	240	Sekretariat BPBD Prov. Jambi
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Mobil yang diadakan			-	100%	200.000.000	100%	-	0	-	1	200.000.000			Sekretariat BPBD Prov. Jambi

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara			-	100%	29.197.000	100%	29.197.000	20,22	5.905.000	21,22	35.102.000			Sekretariat BPBD Prov. Jambi
									Rata-rata capaian kinerja (%)	50,36		51,36	436.383.233			
									Predikat kinerja	R						
3	PROGRAM : PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR		100		45.000.000		45.000.000	100%	45.000.000		45.000.000	-	90.000.000	20	200	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinasterpenuhi	500		45.000.000	100%	45.000.000	100%	45.000.000	100	45.000.000	101	90.000.000	20	200	Sekretariat BPBD Prov. Jambi
									Rata-rata capaian kinerja (%)	100		101	90.000.000			
									Predikat kinerja	ST						
4	PROGRAM : PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR		100		80.000.000		62.000.000	100%	60.000.000		6.150.000	-	68.150.000	4,69	85,19	
	Kursus dan Pelatihan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	Jumlah SDM Aparatur BPBD Provinsi Jambi dalam Memanfaatkan Kursus, Pelatihan Bimtek	240		80.000.000	100%	62.000.000	100%	60.000.000	10,25	6.150.000	11,25	68.150.000	5	85	Sekretariat BPBD Prov. Jambi
									Rata-rata capaian kinerja (%)	10,25		11,25	68.150.000			
									Predikat kinerja	SR						
6	PROGRAM : PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		100		260.000.000		2.122.908.000	100%	105.326.000		59.248.200		2.182.156.200	763	63,74	
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi SKPD	Tersediaanya Laporan BPBD Provinsi Jambi	90		260.000.000	100%	103.018.000	100%	105.326.000	88,17	62.710.200	89,17	165.728.200	99	64	Perencanaan
									Rata-rata capaian kinerja (%)	88,17		89,17	165.728.200			
									Predikat kinerja	T						
6	PROGRAM : PENANGGULANGAN PRA BENCANA		100		3.096.000.000		1.120.680.000	100%	1.494.293.000		363.797.900		1.484.477.900	177	46	
	PemberdayaanDesa Tangguh Bencana	Jumlah Desa Tangguh yang ditingkatkan Kapasitas nya dalam penanggulangan bencana	30		1.650.000.000	100%	478.180.000	100%	889.380.000	22,45	199.628.900	23,45	677.808.900	78	41	Kesiapsiagaan
	Pemberdayaan Relawan Penanggulangan Bencana	Jumlah tenaga Relawan yang terlatih dalam PB	1.030		370.000.000	100%	126.060.000	100%	155.840.000	0	-	1	126.060.000	0	34	Kesiapsiagaan
	Pembentukan Sekolah Siaga Bencana	Jumlah sekolah tempat sosialisasi PRB	26		250.000.000	100%	142.210.000	100%	114.003.000	0	-	1	142.210.000	4	57	Kesiapsiagaan
	Pemberdayaan Dunia Usaha	Terkonsolidasi Hubungan Pemerintah dan Dunia Usaha PB	5		56.000.000	100%	-	100%	-	0	-	1	-	20	0	Kesiapsiagaan
	Rapat Teknis Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	Jumlah Peserta Rapat Teknis Kesiapsiagaan Rapat Teknis	12		120.000.000	100%	152.760.000	100%	113.600.000	37,95	43.115.000	38,95	195.875.000	325	163	Kesiapsiagaan

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penyusunan SOP Penanggulangan Bencana	Jumlah SOP PB yang disusun	2		50.000.000	100%	-	100%	-	0	-	1	-	50	0	Kesiapsiagaan
	Publikasi dan Penyebarluasan Informasi Penanggulangan Bencana	Tersosialisasinya Kegiatan Penanggulangan	10		125.000.000	100%	-	100%	-	0	-	1	-	10	0	Kesiapsiagaan
	Pengaktifan Posko Penanggulangan Bencana	Lancarnya Aktfitas pada Posko Penanggulangan Bencana	10		475.000.000	100%	221.470.000	100%	221.470.000	99,98	121.054.000	100,98	342.524.000	1010	72	Kesiapsiagaan
									Rata-rata capaian kinerja (%)	20,05		21,05	185.559.738			
									Predikat kinerja	SR						
7	PROGRAM :PENANGGULANGAN SAAT BENCANA				860.000.000		645.727.150	100%	793.010.000		1.171.488.050	-	1.817.215.200	101	222	
	Peningkatan dan Pengembangan SIM Data Kebencanaan	Jumlah Dokumen SIM Data Kebencanaan	72		510.000.000	100%	577.169.750	100%	295.940.000	99,49	257.920.050	100,49	835.089.800	140	164	
	Pengerahan Personil TRC Ke Lokasi Bencana	Jumlah Pelaksanaaan Mobilisasi Bantuan Penyelamatan dan Evakuasi PB	62		350.000.000	100%	68.557.400	100%	427.610.000	100	913.568.000	101	982.125.400	163	281	Sekretariat BPBD Prov. Jambi
	Pemantauan Evaluasi serta Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tanggap Darurat	Tersedianya laporan perkembangan kegiatan penanganan kedaruratan dan profil kejadian bencana di daerah	62		-	-	-		69.460.000	-	-	-	-	0		Sekretariat BPBD Prov. Jambi
									Rata-rata capaian kinerja (%)	66,5		67,16	605.738.400,00			
									Predikat kinerja	R						
7	PROGRAM : PENANGGULANGAN BENCANA DALAM RANGKAPEMENUHAN KEBUTUHAN LOGISTIK DAN PERALATAN		100		790.000.000		529.893.950	100%	496.970.000		389.516.249	-	919.410.199	823	115	
	Ketersediaan Pengadaan Logistik	Jumlah JenisLogistik Kebencanaan yang dipersiapkan	11		500.000.000	100%	411.400.000	100%	368.720.000	87,05	192.263.449	88,05	603.663.449	800	121	Logistik
	Kegiatan Ketersediaan Peralatan	Jumlah JenisPeralatanKebencanaan yang dipersiapkan	11		290.000.000	100%	118.493.950	100%	128.250.000	92,01	197.252.800	93,01	315.746.750	846	109	Logistik
									Rata-rata capaian kinerja (%)	89,53		90,53	459.705.099,50			
									Predikat kinerja	ST						
9	PROGRAM: PENANGGULANGAN PASCA BENCANA		100		495.000.000		1.465.411.400	100%	297.995.000		378.924.600	-	624.130.800	216	123	
	Fasilitasi dan Koordinasi Pemulihan dan Peningkatan Bidang Fisik di Wilayah Pasca Bencana	jumlah laporan pelaksanaan rehabilitas dan rekonstruksi pasca bencana	6		130.000.000	100%	115.620.000	100%	121.595.000	6,69	8.699.400	7,69	124.319.400	128	96	Sekretariat BPBD Prov. Jambi
	Fasilitasi dan Koordinasi Pemulihan dan Peningkatan Bidang Sosek di Wilayah Pasca Bencana	jumlah daerah terpulihkan sosial ekonominya	6		180.000.000	100%	129.586.200	100%	176.400.000	6,18	11.123.400	7,18	140.709.600	120	78	Bidang Kedaruratan dan Logistik

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Monitioring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rehab Rekon Wilayah Pasca Bencana di Provinsi Jambi	Jumlah Dokumen Perencanaan	11		185.000.000	100%	-	100%	92.152.000	43,03	359.101.800	44,03	359.101.800	400	194	Bidang Kedarurata n dan Logistik
									Rata-rata capaian kinerja (%)	18,63		19,63	208.043.600,00			
									Predikat kinerja	SR						
10	PROGRAM : RAKOR DAN PELATIHAN TEKNIS KEBENCANAAN		100		650.000.000		742.450.200	100%	1.024.110.000		308.174.620	-	1.050.624.820	730	120	
	Rakor Se-Provinsi Jambi	Tersusunnya Rencana Program Penanggulangan Bencana yang Akuntable	6		143.000.000	100	228.293.500	100	245.870.000	35,22	86.602.400	135,22	314.895.900	2254	220	
	Latihan Gabungan Penyelamatan Evakuasi dan Penanganan Pengungsi	Jumlah tenaga yang dididik sebagai tim SAR dan Penyelamatan Korban dalam Penanganan gungsi	450		115.000.000	100	113.491.000	100	226.170.000	97,97	221.572.220	197,97	335.063.220	44	291	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruk si
	Pemantapan TRC	Jumlah TRC yang terdidik dalam Pelatihan berkemampuan handal	240		330.000.000	100	135.970.500	100	176.950.000	0	-	100	135.970.500	42	41	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruk si
	Pelatihan Koordinasi dan Kaji Cepat Penanggulangan Bencana	Terselenggaranya Kegiatan Pelatihan Koordinasi dan Kaji Cepat Penanggulangan Bencana	-	-	-	0	-	0	120.570.000	0	-	0	-	0	0	
	Pengelolaan Peralatan dan Logistik Penanggulangan Bencana	Jumlah Personil yang memiliki pengetahuan dan kemampuan penggunaan peralatan PB	264		155.000.000	100	120.000.000	100	117.950.000	0	-	100	120.000.000	38	77	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruk si
	Bimtek Penilaian Kerusakan Pasca Bencana (JITUPASNA)	Jumlah Peserta Atau tenaga yang dididik dalam JITUPASNA	5		165.000.000	100	144.695.200	100	136.600.000	0	-	100	144.695.200	2000	88	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruk si
									Rata-rata capaian kinerja (%)	22,2		105,53	175.104.136,67			
									Predikat kinerja	SR						

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik																
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				928.899.870		971.243.000		928.899.870		752.571.888		1.723.814.888	1.444	184	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya Surat masuk , surat keluar dan benda pos lainnya	1072	Surat	18.900.000	1072	18.900.000	1072	18.900.000	100	18.900.000	1172	37.800.000	109	200	Badan Kesbangpol
	Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	terlaksananya pembayaran telepon, air, listrik dan jasa lainnya.	12	Bulan	175.000.350	12	143.500.000	12	175.000.350	64,35	111.672.588	76,35	255.172.588	636	146	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terwujudnya kesejahteraan bagi pengelola Administrasi Keuangan.	12	Bulan	104.604.000	12	104.604.000	12	104.604.000	88,53	92.604.000	100,53	197.208.000	838	189	
	Kegiatan Penyediaan jasa Kebersihan kantor	terwujudnya kebersihan di lingkungan kantor.	1	tahun	160.000.000	1	160.000.000	1	160.000.000	76	159.994.000	77	319.994.000	7700	200	
	Kegiatan penyediaan jasa pebaikan peralatan kerja	terpeliharanya peralatan kerja penunjang administrasi perkantoran.	12	Bulan	70.700.000	12	54.450.000	12	70.700.000	79,74	45.700.000	91,74	100.150.000	765	142	
	Penyediaan alat tulis kantor	terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor.	12	Bulan	53.639.000	12	53.639.000	12	53.639.000	100,27	36.576.000	112,27	90.215.000	936	168	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan.	12	Bulan	50.383.000	12	43.383.000	12	50.383.000	101,32	50.383.000	113,32	93.766.000	944	186	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	terwujudnya penerangan dan kebutuhan alat elektronik.	12	Bulan	25.035.000	12	18.905.000	12	25.035.000	105,74	25.035.000	117,74	43.940.000	981	176	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	tersedianya buku dan bahan referensi	12	Bulan	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	99,6	9.960.000	111,6	19.960.000	930	200	
	Penyediaan makanan dan minuman	tersedianya konsumsi peserta rapat, konsumsi tamu	12	Bulan	28.200.000	12	28.200.000	12	28.200.000	126,95	28.200.000	138,95	56.400.000	1158	200	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Bertambahnya pengetahuan PNS tehadap peraturan per-UU	12	Bulan	232.438.520	12	335.662.000	12	232.438.520	94,16	173.547.300	106,16	509.209.300	885	219	
									Rata-rata capaian kinerja (%)	94,24		201,6	156.710.444,36			
									Predikat kinerja	ST						
1	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				1.139.849.904		1.026.497.000		439.849.904		452.207.450		1.478.704.450	6.217	157	
	Kegiatan pengadaan peralatan kantor	tersedianya peralatan gedung kantor.	1	Paket	113.352.904	-	-	1	113.352.904	130,41	163.131.250	130,413 034	163.131.250	13041	144	Badan Kesbangpol
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	tersedianya Kendaraan dinas/operasional	1	Paket	700.000.000		700.000.000	-	-	0	-	0	700.000.000	0	100	
	Kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	tersedianya jasa pemeliharaan peralatan gedung kantor	1	tahun	82.097.000	12	82.097.000	1	82.097.000	97,67	80.186.000	109,67	162.283.000	10967	198	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pemerliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	tesedianya jasa pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional kantor.	12	Bulan	244.400.000	12	244.400.000	12	244.400.000	91,33	208.890.200	103,33	453.290.200	861	185	
									Rata-rata capaian kinerja (%)	79,85		85,85	369.676.113			
									Predikat kinerja	T						
1	Program Peningkatan Displin aparatur.				48.750.000		48.750.000		48.750.000		48.750.000		97.500.000	240	200	
	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	terselenggaranya pakaian dinas aparatur.	75	Steel	48.750.000	80	48.750.000	75	48.750.000	100	48.750.000	180	97.500.000	240	200	Badan Kesbangpol
									Rata-rata capaian kinerja (%)	100		180	97.500.000			
									Predikat kinerja	ST						
1	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.				21.860.000		12.500.000		21.860.000		-		12.500.000	1.000	57	
	Pendidikan dan pelatihan formal	bertambahnya pengetahuan/ wawasan serta meningkatnya kemampuan profesionalisme dan keterampilan teknis staf Badan Kesatuan bangsa dan politik prov. Jambi.	1	tahun	21.860.000	10	12.500.000	1	21.860.000	0	-	10	12.500.000	1000	57	Badan Kesbangpol
									Rata-rata capaian kinerja (%)	-		10	12.500.000			
									Predikat kinerja	SR						
1	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.				245.300.000		280.000.000		245.300.000		133.410.400		312.842.400	4.709	169	
	Pembinaan dan pengembangan perencanaan realisasi program kerbang dan politik Prov. Jambi	Terlaksananya rencana kerja dan terhimpun / tersusun dengan baik, lengkap, akurat untuk dapat menjadi laporan	1	tahun	59.800.000	50	75.000.000	1	59.800.000	80	25.568.000	130	100.568.000	13000	168	Badan Kesbangpol
	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Program/kegiatan Kesbangpol Provinsi Jambi.	Terlaksananya rencana kerja dan terhimpun / tersusun dengan baik, lengkap, akurat untuk dapat menjadi laporan	2	kali rapat	185.500.000	11	205.000.000	2	185.500.000	83,18	107.842.400	94,18	312.842.400	4709	169	Badan Kesbangpol
									Rata-rata capaian kinerja (%)	81,59		112,09	206.705.200			
									Predikat kinerja	T						
1	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan				912.367.050		982.368.000		912.367.050		674.542.031		1.656.910.031	296	148	
	Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan Sosial dikalangan masyarakat	Meningkatan rasa persatuan dan kesatuan bagi masyarakat .	70	Peserta	166.221.050	80	175.238.000	70	166.221.050	107,53	241.676.550	187,53	416.914.550	268	251	Badan Kesbangpol
	kegiatan penguatan pendidikan wawasan kebangsaan	Terlatihnya tenaga TOT/TOF pendidikan wawasan kebangsaan (3 Tahun)	70	Peserta	139.508.250	80	156.308.000	70	139.508.250	92,52	81.691.100	172,52	237.999.100	246	171	
	Kegiatan Peningkatan kesadaran bela negara	Terciptanya rasa patriotisme yang tinggi dikalangan ibu PKK dan Dharma wanita.	400	Peserta	263.680.000	150	294.573.000	400	263.680.000	82,31	110.669.000	232,31	405.242.000	58	154	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Kegiatan Dukungan Penyelenggaraan TMMD.	terlaksananya Kegiatan Sosialisasi TMMDdan Wesbang dan Bela Negara.		Peserta	-	400	-		-	0	-	400	-	0	0	
	Kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Daerah.	Terlaksananya rapat Pokja IDI	11	Kab/Kota	79.708.750	11	80.100.000		79.708.750	100	19.278.800	111	99.378.800	1009	125	
	Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama dalam Rangka Menciptakan Keharmonisan Antar Umat.	Terlatihnya tenaga TOT/TOF pendidikan wawasan kebangsaan.	100	Peserta	263.249.000	100	276.149.000	100	263.249.000	93,59	221.226.581	193,59	497.375.581	194	189	
									Rata-rata capaian kinerja (%)	79,33		216	276.151.672			
									Predikat kinerja	T						
1	Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga Ketertiban dan Keamanan				805.845.240		1.879.743.000		780.784.240							
	Kegiatan Pembinaan dan pemantapan Forum kewaspadaan dini masyarakat dalam memelihara ketertiban dan ketentraman masy dan penanggulangan bencana (Permendagri no. 12 Tahun 2006)	Terbentuknyadan terbinanya FKDM Kab/Kota, Kecamatan, Kelurahan,Desa sesuai dengan Permendagri No.12 tahun 2006	11	Kab/Kota	286.512.000	200	712.232.000	11	286.512.000	69,84	152.522.000	269,84	864.754.000	2453	302	Badan Kesbangpol
	Kegiatan Penerbitan / monitoring / Evaluasi pelaporan rekomendasi penelitian	Terwujudnya pelayanan rekomendasi penelitian (1 Tahun).	11	Kab/Kota	25.061.000	11	54.545.000	-	0	32,68	35.339.200	43,68	89.884.200	397	359	
	Kegiatan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial.	Terlaksananya penananan konflik oleh Tim Terpadu (TIMDU)	11	Kab/Kota	216.547.000	480	792.762.000	11	216.547.000	107,74	122.959.082	587,74	915.721.082	5343	423	
	Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan orang asing, LSM Asing (NGO) dan Lembaga Asing	Terselenggaranya kegiatan rapat koordinasi ke Kab/kota dan peraturan bersama selama 1 tahun.	11	Kab/Kota	125.277.800	120	124.869.000	11	125.277.800	61,8	34.880.900	181,8	159.749.900	1653	128	
	Kegiatan Pemantauan dan Pemetaan potensi konflik di Provinsi Jambi.	Persamaan persepsi aparatur dalam menengani berbagai konflik yang terjadi di masyarakat.	11	Kab/Kota	84.594.440	80	96.038.000	11	84.594.440	30,37	44.463.000	110,37	140.501.000	1003	166	
	Kegiatan Pencehagan penyalagunaan Narkotika Provinsi Jambi	terlaksananya sosialisasi pencegahan penyelagunaan narkotika di Prov. Jambi (1 Tahun)	11	Kab/Kota	67.853.000	160	99.297.000	11	67.853.000							
	Kegiatan Tim Pengawas Perdagangan Orang (TPPO) di Provinsi Jambi	Terlaksananya Pemantauan Perdagangan Orang (TPPO) di Provinsi Jambi		0		-		-	0	0	-	0	-			

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Konflik Suku Anak Dalam (SAD) di Provinsi Jambi	Terfasilitasi Penyelesaian Konflik Suku Anak Dalam (SAD) di Provinsi Jambi		0		-		-	0	0	-	0	-			
											Rata-rata capaian kinerja (%)					
											Predikat kinerja					
1	Program Pendidikan Politik Masyarkat				747.796.556		865.803.000		747.796.556		414.676.436		1.280.479.436	1.056	178	
	Kegiatan Koordinasi Forum diskusi Politik	Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang Undang-undang politik dan etika politik di provinsi jambi (5 Tahun).	210	Peserta	475.296.556	210	501.365.000	210	475.296.556	72	229.993.200	282	731.358.200	134	154	Badan Kesbangpol
	Kegiatan Monitoring evaluasi dan rakor perkembangan politik daerah.	Meningkatnya tentang pemahaman partisipasi politik masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan umum legislativ dan pemilihan presiden dan wakil presiden di provinsi jambi (5 Tahun).	11	Kab/Kota	272.500.000	144	364.438.000	11	272.500.000	73,54	184.683.236	217,54	549.121.236	1978	202	
											Rata-rata capaian kinerja (%)	72,77		249,77	640.239.718,00			
											Predikat kinerja	S						
1	Program Perwujudan Demokrasi Makin Kokoh				1.523.391.780		1.657.743.000		1.523.391.780		1.331.742.255		2.989.485.255	3.935	198	
	Kegiatan Peningkatan dan pengembangan kualitas proses politik bagi lembaga Parpol	Meningkatnya pemapanan partai politik di tingkat provinsi jambi dalam perwujudan demakrasi yang makin kokoh .	2	kali keg.	232.381.700	100	303.474.000	2	232.381.700	80,43	166.389.200	180,43	469.863.200	9022	202	Badan Kesbangpol
	Kegiatan Monitoring dan evaluasi eksistensi parpol, ormasy , OKP dan Lembaga Keagamaan/Perwakilan Daerah.	Termonitornya dan terevaluasinya eksistensi/keberadaan parpol di provinsi Jambi .	100	Peserta	114.812.250	100	126.506.000	ff	114.812.250	86,28	86.684.800	186,28	213.190.800	186	186	
	Pembinaan Ormas di Provinsi Jambi	Termonitornya eksistensi/keberadaan serta permasalahan ormas,LSM,OKP,BEM provinsi Jambi.	11	Kab/Kota	266.397.830	575	267.300.000	11	266.397.830	105,46	299.026.080	680,46	566.326.080	6186	213	
	Kegiatan Kerjasama Bidang Kesbangpol dalam Negeridengan Organisasi Kemasyarakatan di Provinsi Jambi	Terjalinnya kerjasama bidang kesbangpol dalam negeri dengan organisasi kemasyarakatan di Provinsi Jambi.	32	Ormasy	909.800.000	32	960.463.000	32	909.800.000	78,97	779.642.175	110,97	1.740.105.175	347	191	
											Rata-rata capaian kinerja (%)	87,79		289,54	747.371.314			
											Predikat kinerja	T						

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran																
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1.427.200.000		990.912.550		770.095.587		864.987.977		1.855.900.527	80	124	
	Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Layanan penggunaan komunikasi, air dan listrik	60	bln	154.000.000	36	140.000.000	12	147.573.636	12	93.111.815	48	233.111.815	80	151	
	Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan	memperlancar pelaksanaan tugas	60	bln	168.000.000	36	150.196.000	12	121.730.800	12	121.130.800	48	271.326.800	80	162	
	Kegiatan Penyedia Jasa Kebersihan Kantor	Terpeliharanya Kebersihan Kantor	60	bln	135.000.000	36	136.385.700	12	136.188.748	12	181.332.498	48	317.718.198	80	235	
	Kegiatan penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	60	bln	65.000.000	36	44.517.200	12	40.311.804	12	40.331.804	48	84.849.004	80	131	
	Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang cetakan dan Fotocopy untuk administrasi perkantoran	60	bln	62.000.000	36	43.342.000	12	32.907.900	12	28.992.660	48	72.334.660	80	117	
	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Sarana Penerangan	60	bln	108.900.000	36	6.400.000	12	6.473.700	12	6.473.700	48	12.873.700	80	12	
	Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	60	bln	70.000.000	36	30.000.000	12	17.000.000	12	14.768.100	48	44.768.100	80	64	
	Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Peningkatan Kinerja Organisasi	60	bln	664.300.000	36	440.071.650	12	267.908.999	12	378.846.600	48	818.918.250	80	123	
									Rata-rata capaian kinerja (%)	12		48	231.987.565,88			
									Predikat kinerja	SR						
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				430.720.000		724.227.000		369.690.500,00	-	1.143.372.200		1.867.599.200			
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kelengkapan untuk perlengkapan kerja					107.000.000	12	9.500.000,00	6	68.950.000	6	175.950.000			
	Pengadaan mebeleur	Tersedianya mebeleur kantor						12	-	6	274.370.000	6	274.370.000			
	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor				36	231.300.000	12	-	6	-	42	231.300.000			
	Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Perawatan gedung tempat kerja				36	30.000.000	12	5.000.000,00	6	154.500.000	42	184.500.000			
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas	60	bln	380.000.000	36	334.207.000	12	337.312.000,00	12	630.237.200	48	964.444.200	80	254	
	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	terawatnya perlengkapan kerja	60	bln	50.720.000	36	21.720.000	12	17.878.500,00	9	15.315.000	45	37.035.000	75	73	
									Rata-rata capaian kinerja (%)	7,5		31,5	311.266.533,33			
									Predikat kinerja	SR						
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				-		193.050.000		117.000.000					-	-	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapanya	Keseragaman pakaian dinas		stel		559	183.000.000	180	117.000.000		!	109810736	!			
											Rata-rata capaian kinerja (%)					
											Predikat kinerja	FALSE				
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				88.000.000	36	8.100.000	36	11.200.000	9	11.100.000	45	19.200.000	168	18	
	Pendidikan dan pelatihan formal	Peningkatan Sumber Daya Aparatur Satpol PP	25	org	88.000.000	36	8.100.000	12	7.500.000	6	7.500.000	42	15.600.000	168	18	
	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Tersosialisasinya Perda/Perkada dan peraturan lainnya						12	3.700.000	3	3.600.000	3	3.600.000			
	Sosialisasi Penerapan SPM Trantibumlinmas	Tercapainnya Program dan kegiatan sesuai dengan rencana						12	-	0	-	0	-			
										3	Rata-rata capaian kinerja (%)	15	6.400.000			
										SR	Predikat kinerja					
	Program Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan				327.000.000		245.399.950		49.584.464		92.240.350		337.640.300	335	177	
	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Kinerja	5	laporan	27.000.000	26	56.440.000	12	15.503.250	6	15.342.750	32	71.782.750	640	266	
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Tercapainya program dan kegiatan	100	%	300.000.000	24	188.959.950	12	34.081.214	6	76.897.600	30	265.857.550	30	89	
										6	Rata-rata capaian kinerja (%)	31	168.820.150,00			
										SR	Predikat kinerja					
	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan				3.140.176.400		3.253.784.200		3.177.419.132		3.522.631.700		6.776.415.900	232	160	
	Kegiatan Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	situasi aman dan tertib	129	org	2.991.958.400	129	3.119.668.400	12	3.159.448.000	410,7	3.511.408.000	539,7	6.631.076.400	418	222	
	Kegiatan kesamaptaan	Peningkatan kreativitas, mental dan disiplin pelaksanaan tugas operasional	80	kali latihan	148.218.000	12	134.115.800	12	17.971.132	24	11.223.700	36	145.339.500	45	98	
										217,35	Rata-rata capaian kinerja (%)	287,85	3.388.207.950			
										FALSE	Predikat kinerja					
	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal				1.075.113.000		1.069.493.400		271.020.750		#REF!		#REF!	212	#REF!	
	Kegiatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam teknik pencegahan Kejahatan	Persentase pencegahan tindak kejahatan	5	Kegiatan	138.743.000	2	85.061.250	-	-	0	68.025.200	2	153.086.450	40	110	
	Kegiatan Kejasama Pengembangan Kemampuan Aparat Satpol PP dengan TNI/Polri dan kejaksaan	Fasilitasi Legalitas dan Peningkatan Profesional Satpol PP dan PPNS	100	%	290.800.000	2	185.910.750	40	46.502.500	3	350.792.400	5	536.703.150	5	185	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengamanan aset dan patroli wilayah	aset terbebas dari gangguan	10	%	347.248.000	12	344.000.000	12	99.440.400	13	111.988.800	25	455.988.800	250	131	
	Kegiatan pengamanan unjuk rasa					12	227.987.500	12	49.347.050	15	#REF!	27	#REF!			
	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Perda dan kebijakan daerah lainnya	Masyarakat dan Badan Hukum memenuhi Produk Hukum Daerah	95	%	238.322.000	12	99.546.000	12	38.175.025	4	141.198.000	16	240.744.000	17	101	
	Kegiatan Peningkatan Kerjasama dalam Penegakan Produk Hukum Daerah	terwujudnya kerjasama lintas sektoral	2	Kegiatan	60.000.000	12	126.987.900	12	37.555.775	3	#REF!	15	#REF!	750	#REF!	
									Rata-rata capaian kinerja (%)	6,33		15	#REF!			
									Predikat kinerja	SR						
	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan				300.000.000		103.762.101,00		131.000.925		326.444.645		1.314.857.645	600	284	
	Kegiatan Pembentukan satuan Keamanan lingkungan di masyarakat	terselenggaranya Satuan Keamanan lingkungan di masyarakat	2	Kegiatan	150.000.000	12	315.023.000,00	12	38.539.875,00	4	94.317.400	16	409.340.400	800	273	
	Kegiatan deteksi dini bencana alam dan potensi terorisme	Peningkatan pemahaman masyarakat dalam mendeteksi bencana alam dan potensi terorisme	1	Kegiatan	150.000.000		360.396.400,00	12	38.067.500,00	4	81.895.145	4	442.291.545	400	295	
	Kegiatan peningkatan kapasitas anggota satuan perlindungan masyarakat	Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman anggota Satlinmas	60	org			312.993.600,00	12	37.715.050,00	4	95.484.900	4	408.478.500			
	Kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan Perlindungan HAM	Terciptanya perlindungan HAM di Masyarakat	40	org				-	16.678.500,00	4	54.747.200	4	54.747.200			
									Rata-rata capaian kinerja (%)	4		7	328.714.411,25			
									Predikat kinerja	SR						
	Program peningkatan pberantasan penyakit masyarakat				-		-		35.194.300		33.144.300		33.144.300	9	-	
	Kegiatan Penyuluhan pencegahan peredaran/pengunaan miras dan narkoba	Terlaksananya penyuluhan pencegahan peredaran / penggunaan miras dan narkoba	100	org				12	35.194.300	9	33.144.300	9	33.144.300	9		
									Rata-rata capaian kinerja (%)	9		9	33.144.300,00			
									Predikat kinerja	SR						
	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan kebakaran				2.140.000.000		262.332.500		140.911.600		223.589.550		485.922.050	13	23	
	Kegiatan Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran	Terciptanya suasana yang kondusif	100	%	850.000.000	12	89.782.400,00	12	59.908.100,00	1	99.806.950	13	189.589.350	13	22	
	Kegiatan Penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran	Meningkatnya kesadaran Masyarakat akan bahaya kebakaran	100	%	630.000.000	12	93.672.600,00	12	38.110.500,00	1	36.724.500	13	130.397.100	13	21	
	Kegiatan Pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	terciptanya rasa aman	100	%	660.000.000	12	78.877.500,00	12	42.893.000,00	1	87.058.100	13	165.935.600	13	25	
									Rata-rata capaian kinerja (%)	1		8,36	246.804.460			
									Predikat kinerja	SR						
	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan				222.528.000		113.347.400		76.631.400		76.631.400		189.978.800	-	85	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Kegiatan Rakor Satpol PP Provinsi Jambi	Terjalinya Koordinasi dan singkronisasi satpol pp kab/kota dengan satpol pp provinsi jambi	2	Kegiatan	222.528.000		113.347.400	1	76.631.400	0	76.631.400	0	189.978.800	0	85	
Rata-rata capaian kinerja (%)										-		-	189.978.800			
Predikat kinerja										SR						

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil																
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran			1.735.553.000		1.540.032.450		1.470.630.483		1.431.345.022		2.971.377.472	182	186	
	Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah penyediaan jasa surat menyurat	100	persen	20.000.000	90	18.000.000	100	18.000.000	98,47	17.725.000	188,47	35.725.000	188	179	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,sumber daya Air dan Listrik	Jumlah penyedian Jasa Komunikasi,Sumber daya Air dan Listrik	100	persen	350.000.000	121	424.400.000	100	398.100.000	92,09	366.600.439	213,34	791.000.439	213	226	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah personil yang dibutuhkan dalam pengelolaan Administrasi Keuangan	100	persen	170.000.000	104	176.170.000	100	175.692.800	99,95	175.606.800	203,58	351.776.800	204	207	
	Kegiatan Penyedian Perlengkapan dan Jasa Kebersihan kantor	Persentase penyediaan perlengkapan dan jasa Kebersihan Kantor	100	persen	210.365.000	95	200.000.000	100	200.000.000	99,79	199.585.000	194,87	399.585.000	195	190	
	Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor	Persentase penyediaan alat tulis kantor	100	persen	170.000.000	47	79.950.000	100	45.000.000	99,69	44.860.500	146,72	124.810.500	147	73	
	Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang Cetakan dan Penggandaan	100	persen	120.688.000	69	83.780.000	100	75.000.000	94,29	70.714.800	163,71	154.494.800	164	128	
	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Elektorinik/penerangan bangunan kantor	Jumlah PenyediaKomponen Instalasi Listrik ,elektronik / penerangan bangunan kantor	100	persen	75.000.000	52	38.932.500	100	25.000.000	99,63	24.907.000	151,54	63.839.500	152	85	
	Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan	Presentase penyediaan kebutuhan surat kabar/majalah dan buku pedoman peraturan perundang-undangan	100	persen	4.500.000	67	3.000.000	100	-	0	-	66,67	3.000.000	67	67	
	Kegiatan Penyedian Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan	100	persen	15.000.000	227	34.000.000	100	55.000.000	96,07	52.839.750	322,74	86.839.750	323	579	
	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan Luar Daerah	Presentase kegiatan rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	100	persen	350.000.000	109	381.799.950	100	278.837.683	99,95	278.705.733	209,04	660.505.683	209	189	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Persentase penyediaan jasa pengamanan kantor	100	persen	250.000.000	40	100.000.000	100	200.000.000	99,9	199.800.000	139,9	299.800.000	140	120	
									Rata-rata capaian kinerja (%)	89,08		181,87	270.125.224,73			
									Predikat kinerja	ST						
1	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur			9.835.000.000		7.364.937.900	100	1.719.380.000		1.646.516.488		9.011.454.388	258	159	
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	100	persen	1.500.000.000	24	353.500.000	100	283.750.000	105,86	270.932.575	129,43	624.432.575	129	42	
	Kegiatan Pengadaan mebeleur	Jumlah pengadaanmebeuler	100	persen	500.000.000	72	357.500.000	100	-	96,48	-	167,98	357.500.000	168	72	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Kegiatan Pengadaan komputer	Jumlahpengadaan komputer	100	persen	160.000.000	125	200.000.000	100	190.250.000	194,47	184.448.950	319,47	384.448.950	319	240	
	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	100	persen	400.000.000	65	261.750.000	100	194.420.000	147,53	193.288.000	212,97	455.038.000	213	114	
	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	100	persen	750.000.000	37	275.850.000	100	338.060.000	151,14	291.952.963	187,92	567.802.963	188	76	
	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatankantor	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala peralatankantor	100	persen	225.000.000	17	38.250.000	100	35.000.000	128,98	35.000.000	145,98	73.250.000	146	33	
	Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang direhab sedang/berat	100	persen	800.000.000	565	4.519.757.900	100	677.900.000	170,86	670.894.000	735,83	5.190.651.900	736	649	
	Penyediaan tanah untuk pembangunan Panti Sosial Milik pemerintah	Jumlah Lokasi pembangunan panti milik pemerintah	100	persen	4.000.000.000	-	-	100	-	102,48	-	102,48	-	102	0	
	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	jumlah Kendaraan dinas roda dua dan empat	100	persen	1.500.000.000	91	1.358.330.000	100	-	103,48	-	194,04	1.358.330.000	194	91	
									Rata-rata capaian kinerja (%)	133,48		244,01	1.001.272.709,78			
									Predikat kinerja	FALSE						
1	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase PNS yang disiplin	100		130.000.000	76	99.000.000	100	-	-	-	76	99.000.000	76,15	76,15	
	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas dan atributnya	Jumlah Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	100	persen	130.000.000	76,15	99.000.000	100	-	0	-	76,15	99.000.000	76	76	
									Rata-rata capaian kinerja (%)	-		76,15	99.000.000			
									Predikat kinerja	SR						
1	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur			86.635.000			1	35.000.000,00		34.600.000		79.600.000	151	92	
	Kegiatan Fasilitasi Jabatan Fungsional,Kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat formalFasilitasi Jabatan Fungsional,Kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	100	persen	86.635.000	51,94	45.000.000	100	35.000.000,00	98,86	34.600.000	150,8	79.600.000	151	92	
									Rata-rata capaian kinerja (%)	98,86		150,8	79.600.000			
									Predikat kinerja	ST						
1	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			1.381.405.000		390.000.000	100	344.408.000		270.485.050		660.485.050	56	52	
	Kegiatan Penyusunan Laporan Rutin Program, Laporan Perkembangan SKPD,Penerapan SPM dan Laporan Keuangan dan Aset	JumlahLaporan Rutin Program, Laporan Perkembangan SKPD,Penerapan SPM dan Laporan Keuangan dan Aset	100	persen	246.405.000	94,88	233.800.000	100	170.704.000	58,78	100.335.000	153,66	334.135.000	154	136	
	Kegiatan Rakor Sosial /Bimtek SIGSng dan SLRT	jumlah dokumentasi laporan SKPD	100	persen	185.000.000	84,43	156.200.000	100	173.704.000	97,95	170.150.050	182,39	326.350.050	182	176	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Kegiatan pengumpulan dan pengelolaan data PMKS seprovinsi jambi	Jumlah Data PMKS yang tersedia	100	persen	350.000.000	-	-	-	-	0	-	0	-	0	0	
	Kegiatan penyuluhan sosial pembangunan Kesejahteraan Sosial ske Kabupaten/Kota	Jumlah informasi yang disebarluaskan kepada masyarakat	100	persen	250.000.000	-	-	-	-	0	-	0	-	0	0	
	Kegiatan keikutsertaan pameran dalam dan luar daerah	Jumlah kegiatan ekspo pembangunan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan	100	persen	200.000.000	-	-	-	-	0	-	0	-	0	0	
	Kegiatan pelayanan informasi publik bidang sosial	Jumlah pengaduan publik yang dilayani	100	persen	150.000.000	-	-	-	-	0	-	0	-	0	0	
									Rata-rata capaian kinerja (%)	26,12		56,01	110.080.841,67			
									Predikat kinerja	SR						
1	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase kelembagaan kesejahteraan sosial yang diberdayakan			1.390.000.000		1.150.000.000	100%	274.637.000		266.814.287		1.416.814.287	152	119	
	KegiatanPeningkatan Kesetiakawanan Sosial	Persentase Kesetiakawanan sosial	100	ersen	130.000.000	153,85	200.000.000	100	69.646.000	94,18	65.596.000	248,03	265.596.000	248	204	
	Kegiatan Peningkatan Kapasitas BKKKS Provinsi Jambi	Jumlah BKKKS	100	persen	120.000.000	166,67	200.000.000	100	30.000.000	99,81	29.944.000	266,48	229.944.000	266	192	
	Kegiatan Pemberdayaan Karang Taruna	Jumlah Karang taruna	100	persen	120.000.000	166,67	200.000.000	100	30.016.000	0	29.976.000	166,67	229.976.000	167	192	
	Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Kessos Masyarakat	Jumlah SDMKessos Masyarakat	100	persen	120.000.000	79,17	95.000.000	100	25.500.000	99,81	25.452.000	178,98	120.452.000	179	100	
	Kegiatan Program Keluarga Harapan (PKH)	Jumlah PKH	100	persen	450.000.000	66,67	300.000.000	100	100.000.000	98,37	98.371.287	165,04	398.371.287	165	89	
	Kegiatan Kapasitas Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga	Jumlah LK3	100	persen	120.000.000	79,17	95.000.000	100	-	0	-	79,17	95.000.000	79	79	
	Koordinasi Pelaksanaan CSR Bidang Kesejahteraan Sosial	Jumlah CSR bidang Kesejahteraan Sosial	100	persen	80.000.000	75	60.000.000	100	19.475.000	34,95	17.475.000	109,95	77.475.000	110	97	
	Rapat Teknis Pembinaan TKSK Kab/kota seprovinsi Jambi	jumlah TKSK Kab/Kota	100	persen	250.000.000	-	-	-		0	-	0	-	0	0	
									Rata-rata capaian kinerja (%)	53,39		151,79	177.101.785,88			
									Predikat kinerja	R						
1	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya				5.000.000.000		1.050.000.000	100	250.407.500		247.831.765		1.297.831.765	60	20	
	Kegiatan FasilitasiManajemen Usaha Bagi Kelurga Miskin (Pendampingan)	Jumlah KK yang mendapatkan manajerial usaha	100	persen	500.000.000	-	-	100	-	0	-	0	-	0	0	
	Kegiatan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP-FM) Bagi Fakir Miskin di Daerah Pedesaaan dan Tertinggal	Jumlah KK KM yang mendapatkan pemberdayaan dan fasilitas usaha	100	persen	1.100.000.000	39	425.000.000	100	109.365.500	99,86	109.207.500	138,49	534.207.500	138	49	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Kegiatan Bantuan Pengembangan KUBE-FM Bagi Fakir Miskin di Daerah Perkotaan	Jumlah KK KM yang mendapatkan pemberdayaan dan fasilitas usaha	100	persen	1.100.000.000	27	300.000.000	100	45.526.000	96,01	43.711.165	123,29	343.711.165	123	31	
	Kegiatan Bantuan Pengembangan KUBE-FM Bagi Fakir Miskin di Daerah Pesisir dan Perbatasan	Jumlah KK KM yang mendapatkan pemberdayaan dan fasilitas usaha	100	persen	450.000.000	39	175.000.000	100	48.720.000	99,41	48.433.500	138,3	223.433.500	138	50	
	Kegiatan Verivali Data Fakir Miskin Lingkup Provinsi Jambi	Jumlah Layanan Pengelolaan Data FM Provinsi Jambi	100	persen	500.000.000	-	-	100	-	0	-	0	-	0	0	
	Kegiatan Pemberdayaan KAT dan Bantuan Jadup Bagi Komunitas Adat Terpencil di Lokasi KAT	Jumlah warga KAT yang memperoleh bantuan Jadup dan informasiuntuk memenuhi kebutuhan dasar	100	persen	400.000.000	38	150.000.000	100	46.796.000	99,32	46.479.600	136,82	196.479.600	137	49	
	Kegiatan Verivali Data KAT di daerah Provinsi jambi	Jumlah layanan pengelolaan data KAT	100	persen	350.000.000	-	-	100	-	0	-	0	-	0	0	
	Kegiatan Pendataan dokumen kependudukan bagi warga KAT di Provinsi jambi	Jumlah dokumen kependudukan yang dilayani	100	persen	350.000.000	-	-	100	-	0	-	0	-	0	0	
	Kegiatan Koordinasi, pembinaan dan Monev Pemberdayaan KAT	Jumlah Kab yang dilakukan pembinaan	100	persen	250.000.000	-	-	100	-	0	-	0	-	0	0	
									Rata-rata capaian kinerja (%)	43,84		59,66	144.203.529,44			
									Predikat kinerja	SR						
1	Program Pembinaan Anak Terlantar				1.650.000.000		1.550.000.000	100	485.748.700		432.546.835		1.982.546.835	106	60	
	Kegiatan Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja bagi Anak Terlantar	Jumlah anak terlantar yang memperoleh ketrampilan dan praktek belajar kerja	100	persen	1.300.000.000	115	1.500.000.000	100	445.748.700	88,55	394.693.275	203,93	1.894.693.275	204	146	
	Kegiatan Perlindungan Bantuan Sosial Bagi anak Penyandang PMKS (Anak terlantar,Anak Gelandangan,ABH,Anak Keluarga Kurang Mampu	Jumlah AT yang memerlukan perlindungan Khusus yang mendapatkan pelayanan	100	persen	250.000.000	20	50.000.000	100	40.000.000	94,63	37.853.560	114,63	87.853.560	115	35	
	Kegiatan Pelayanan ijin pengangkatan anak	Jumlah ijin pengangkatan anak antar WNI dan Orangtua Tunggal yang dilayani	100	persen	100.000.000	-	-	100		0	-	0	-	0	0	
									Rata-rata capaian kinerja (%)	61,06		106,19	660.848.945,00			
									Predikat kinerja	R						
1	Program Pembinaan Para Penyandang Disabilitas dan Trauma				1.200.000.000		100.000.000	100%	105.400.000		93.887.400		193.887.400	38	16	
	Kegiatan Pemberdayaan Pengiriman dan Pemulangan Penyandang Disabilitas	Jumlah Paca yang memperoleh pemberdayaan	100	persen	400.000.000	25	100.000.000	100	105.400.000,00	89,08	93.887.400	114,08	193.887.400	114	48	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Kegiatan Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Terlantar melalui LKS Penyandang Disabilitas	Jumlah PDKB yang mendapatkan asistensi melalui LKS	100	persen	400.000.000	-	-	100	-	0	-	0	-	0	0	
	Kegiatan pelayanan panti disabilitas	Jumlah Disabilitas terlantar yang mendapatkan layanan rehabilitasi dasar dalam panti	100	persen	400.000.000	-	-	-	-	0	-	0	-	0	0	
									Rata-rata capaian kinerja (%)	29,69		38,03	64.629.133,33			
									Predikat kinerja	SR						
1	Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo				2.000.000.000			100	1.565.165.000		1.535.713.435		3.371.513.435	127	110	
	Pelayanan Kebutuhan Panti Asuhan /Panti Jompo	Jumlah lansia terlantar yang mendapatkan pelayanan dasar dalam panti	100	persen	1.500.000.000	103	1.549.800.000	100	1.364.485.000	98,15	1.339.289.382	201,47	2.889.089.382	201	193	
	Kegiatan Pelayanan Sosial Lanjut Usia Luar Panti	Jumlah lansia terlantar luarpanti yang mendapatkan perlindungan	100	persen	150.000.000	-	-	100	-	0	-	0	-	0	0	
	Kegiatan Komda Lansia Provinsi Jambi	Jumlah Komite yang menyelenggarakan Kessos bagi Lansia	100	persen	350.000.000	82	286.000.000	100	200.680.000	97,88	196.424.053	179,59	482.424.053	180	138	
									Rata-rata capaian kinerja (%)	65,34		127,02	1.123.837.811,6			
									Predikat kinerja	R						
1	Program Pembinaan Eks. Penyandang Penyakit Sosial (Eks. Napi, Tuna Sosial,PSK, Narkoba)				3.200.000.000		1.316.225.000		2.673.402.443		3.816.228.643		5.132.453.643	63	164	
	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Wanita Penyandang PMKS	Jumlah Wanita eks TSberfungsi sosial di masyarakat	100	persen	650.000.000	54	350.000.000	81	173.678.500	204,26	720.819.000,00	258,1	1.070.819.000,00	258,1	164,74	
	Kegiatan Pelayanan Sosial di rumah singgah bagi Tuna Sosial	Jumlah PMKS yang mendapatkan perlindungan sementara	100	persen		-	45.000.000	-		-	29.314.400,00	-	74.314.400,00	-		
	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi penyandang penyakit Sosial (Eks Napi,Tuna Sosial,ODHA. dan kelompok Minoritas)	Jumlah PMKS yang mendapatkan pelatihan ketrampilan berusaha	100	persen	450.000.000	-	-	-	-	-	124.757.500,00	-	124.757.500,00	-	27,72	
	Penyuluhan sosial Bahaya Narkoba,HIV-AIDS dan Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan NAPZA dan Tuna Sosial	Jumlah Informasi yang disampaikan	100	persen			-	-	-	-	73.327.200,00	-	73.327.200,00	-		
	Pengiriman /fasilitasi klien narkoba ke panti rehabilitasi	Jumlah klien NAPZA yang dikirim ke panti Rehabilitasi di luar provinsi	100	persen	400.000.000	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Eks Psikotik	Jumlah penyandang ekspsikotik yang memperoleh ketrampilan kerja	100	persen	400.000.000	212	846.225.000	93	2.499.723.943	101,15	2.745.847.743,00	312,71	3.592.072.743,00	312,71	898,02	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi	Jumlah WRSE yang memperoleh ketrampilan kerja dan berusaha	100	persen	450.000.000	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
	Kegiatan pelayanan panti Gelandangan dan pengemis	Jumlah Gepeng yang mendapatkan rehabilitasi dasar dalam panti	100	persen	500.000.000	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
	Unit Pelayanan Sosial Keliling	Jumlah Penyandang Disabilitas yang terdata dan mendapatkan layanan rujukan	100	persen	350.000.000	-	75.000.000	-	-	-	122.162.800,00	-	197.162.800,00	-	56,33	
									Rata-rata capaian kinerja (%)	33,93		63,42	570.272.627,00			
									Predikat kinerja	SR						
1	Program Pembinaan,Pemberdayaan,Rehabilitasi Bantuan dan Jaminan Sosial PMKS				1.750.000.000		493.000.000	100%	430.000.000		428.338.850		921.338.850	106	54	
	Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Bantuan Sosial bagi Penerima Manfaat Program Kesejahteraan Sosial (PBI-Jamkes)	Jumlah KPM yang difasilitasi	100	persen	100.000.000	28	28.000.000	100	-	0	-	28	28.000.000	28	28	
	Kegiatan Meneruskan Perjalanan Orang Terlantar dan Pekerja Migran Bermasalah Sosial	Jumlah Korban Bencana Sosial (OT dan PMBS) yang dipulangkan kedaerah asal	100	persen	750.000.000	20	150.000.000	100	130.000.000	98,87	128.524.600	118,87	278.524.600	119	37	
	Kegiatan Penanggulangan Korban Bencana Alam Pada tanggap Darurat	Jumlah Korban Bencana Alam yang memperoleh bantuan logistik pada kondisi pasca bencana	100	persen	400.000.000	75	300.000.000	100	285.000.000	99,93	284.814.250	174,93	584.814.250	175	146	
	Kegiatan pembentukkan dan pembinaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Lojkasi tanggap bencana yang dipersiapkan	100	persen	500.000.000	3	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	103	30.000.000	103	6	
									Rata-rata capaian kinerja (%)	74,7		106,2	230.334.713			
									Predikat kinerja	S						
1	Program Penataan Administrasi Kependudukan		100		2.400.000.000		1.710.209.600	100	422.386.449		417.461.185		2.127.670.785	170	89	
	Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Pendaftaran Penduduk di Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi	Jumlah Kab/kota yang menyelenggarakan pendaftaran penduduk	100	persen	800.000.000	69,47	555.761.600	100	178.650.000	98,12	175.287.554	167,59	731.049.154	168	91	
	Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Pencatatan Sipil di Kabupaten dan Kota se Provinsi Jambi	Jumlah Kab/kota yang menyelenggarakan pencatatan sipil	100	persen	800.000.000	73,08	584.672.800	100	116.896.449	99,63	116.468.926	172,72	701.141.726	173	88	
	Kegiatan Koordinasi,Pembinaan dan Sosialisasi Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan dari Pencatatan Sipil	Jumlah kab/kota yang menyelenggarakan pemanfataan sistem administrasi kependudukandan pencatatan sipil	100	persen	800.000.000	71,22	569.775.200	100	126.840.000	99,1	125.704.705	170,33	695.479.905	170	87	
									Rata-rata capaian kinerja (%)	98,95		170,21	709.223.595			
									Predikat kinerja	ST						

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT																
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100		35.113.000.000	100	4.993.000.000	100	5.018.500.000	97,77	4.872.030.000		9.865.034.940	259	25	sekre
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat keluar per tahun	22.500	Lbr	488.000.000	3.300	70.000.000	2.200	15.000.000	100	14.500.000	3400	84.500.000	15	17	sekre
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air, Listrik dan Retribusi/ sewa	Periode pembayaran rekening	12	Bulan	9.861.000.000	12	1.406.000.000	12	888.100.000	96,84	928.180.000	108,84	2.334.180.000	907	24	sekre
	Penyediaan Jasa Adminstrasi Keuangan	Jumlah tenaga administrasi keuangan	786	Orang	5.447.000.000	131	777.000.000	131	756.290.000	89,11	616.210.000	220,11	1.393.210.000	28	26	sekre
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Periode pemakaian jasa kebersihan kantor	12	Bulan	8.125.000.000	12	1.158.000.000	12	2.349.590.000	94,92	2.219.460.000	106,92	3.377.460.000	891	42	sekre
	Penyediaan ATK	Jumlah jenis ATK	24	set/Jenis	1.628.000.000	4	232.000.000	4	146.400.000	99,18	143.140.000	103,18	375.140.000	430	23	sekre
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetakan dan Penggandaan	1.800.000	Lbr	1.196.000.000	300.000	171.000.000	653	104.320.000	99,99	65.800.000	300099	236.800.000	17	20	sekre
	Penyediaan Komponen Instalasi Air, Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi air, listrik/ penerangan bangunan kantor	4	Lokasi	1.381.000.000	4	197.000.000	4	63.600.000	99,81	112.940.000	103,81	309.940.000	2595	22	sekre
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	168.400	Eks	1.278.000.000	28.400	168.000.000	26.400	93.000.000	99,76	70.000.000	28499	238.000.000	17	19	sekre
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya jumlah peserta rapat/tamu dll	6.000	Orang	1.103.000.000	1.000	157.000.000	900	158.600.000	100	157.400.000	1100	314.400.000	18	29	sekre
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	1.800	OH	4.606.000.000	300	657.000.000	3.300	443.600.000	98,08	544.400.000	398,08	1.201.400.000	22	26	sekre
									Rata-rata capaian kinerja (%)	97,77		33.414	986.503.000			
									Predikat kinerja	ST						
2	Program Peningkaatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100		72.071.000.000	100	9.057.400.000	100	28.269.900.000	72,51	21.671.770.000		30.729.170.000	329	44	
	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah gedung yang terbangun	6	Unit	20.932.000.000	1	2.984.000.000	1	10.093.450.000	90,72	3.669.590.000	91,72	6.653.590.000	1529	32	CK
	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah Pengadaan kendaraan dinas/ operasional	-R4 =6unit - R2 =17unit	Unit	3.140.000.000		-	-	-	0	-	0	-	-	-	sekre
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah jenis pengadaan peralatan gedung kantor	300	Unit	6.705.000.000	50	956.000.000	103	675.600.000	98,63	528.210.000	148,63	1.484.210.000	50	22	sekre
	Pengadaan Komputer	Jumlah pengadaan komputer	300	Unit	4.591.000.000		-	-	-	0	-	0	-	0	0	sekre
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	24	Unit	21.025.000.000	4	2.998.000.000	33	876.000.000	99,51	1.541.020.000	103,51	4.539.020.000	431	22	sekre
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang terpelihara	888	Unit	6.111.000.000	148	871.000.000	60	1.128.560.000	96,45	1.381.610.000	244,45	2.252.610.000	28	37	sekre

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	300	Unit	2.461.000.000	50	351.000.000	147	250.600.000	99,9	210.370.000	149,9	561.370.000	50	23	sekre
	Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang direhab sedang/berat	18	Unit	7.106.000.000	3	897.400.000	100	15.245.690.000	94,87	14.340.970.000	97,87	15.238.370.000	544	214	CK
									Rata-rata capaian kinerja (%)	72,51		104,51	3.841.146.250			
									Predikat kinerja	S						
3	Program Peningkatan Dispilin Aparatur	Persentase PNS yang disiplin	100		1.389.000.000	100	198.000.000	100	384.000.000		376.160.000,00		574.160.000,00	17,4	41,34	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Pelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	3.150	Steel	1.389.000.000	450	198.000.000	670	384.000.000	98,09	376.160.000	548,09	574.160.000	17	41	sekre
									Rata-rata capaian kinerja (%)	98,09		548,09	574.160.000			
									Predikat kinerja	ST						
4	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	100		11.614.000.000	100	1.985.000.000	100	1.306.450.000		927.430.000		2.912.430.000	525	25	
	Diklat Pelatihan Formal dan Sosialisasi Bidang ke PU-an	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat formal	102	Orang	3.796.000.000	17	541.000.000	17	311.060.000	72,38	218.780.000	89,38	759.780.000	88	20	sekre
	Koordinasi dan Sinkronisasi Program Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum Provinsi Jambi	Jumlah laporan yang dikeluarkan	11	Dok	3.550.000.000	2	444.000.000	2	287.100.000,00	98,65	282.590.000	100,65	726.590.000	915	20	sekre
	Pembinaan Teknik Sumber Daya Aparatur bidang ke-PU-an	Jumlah Pegawai yang dibina	17	Dok/Lap	4.268.000.000	3	1.000.000.000	1	708.290.000	94,16	426.060.000	97,16	1.426.060.000	572	33	Bikon
									Rata-rata capaian kinerja (%)	88,4		95,73	970.810.000			
									Predikat kinerja	T						
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100		10.964.000.000	100	1.521.000.000	100	1.573.030.000	96,482	1.639.900.000		3.160.900.000	575	29	
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	30	Laporan	1.134.000.000	5	162.000.000	5	117.800.000	100	190.010.000	105	352.010.000	350	31	sekre
	Penyusunan Harga Dasar Satuan Upah, Bahan dan Alat	Jumlah dokumen yang dihasilkan	6	Dok	995.000.000	1	142.000.000	30	125.650.000	95,25	165.900.000	96,25	307.900.000	1604	31	sekre
	Pengelolaan Aset Dinas PU Provinsi Jambi	Jumlah laporan yang dikeluarkan	120	Laporan	2.455.000.000	20	307.000.000	20	246.800.000	95,77	409.710.000	115,77	716.710.000	96	29	sekre
	Pelayanan Informasi Komunikasi Kehumasan	Jumlah pelayanan informasi yang disediakan	342	Info	3.433.000.000	57	490.000.000	57	835.380.000	99,83	598.440.000	156,83	1.088.440.000	46	32	sekre
	Penyusunan Program Rencana Umum dan Strategis Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan yang dikeluarkan	12	Dok/Lap	2.947.000.000	2	420.000.000	2	183.800.000	91,56	275.840.000	93,56	695.840.000	780	24	sekre
	Kegiatan penyediaan komponan instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor								63.600.000	0	-	0	-			sekre
									Rata-rata capaian kinerja (%)	80,4		94,57	526.816.666,67			
									Predikat kinerja	T						

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
6	Program Pembangunan/ Peningkatan/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	82,52		3.978.846.000.000	77,64	485.568.000.000	78,82	475.732.730.000	-	314.133.590.000		799.701.590.000	200	21	
		Persentase jalan provinsi menuju sentra produksi yang dalam kondisi mantap	80													
		Persentase panjang jalan provinsi yang memiliki drainase	50,47													
		Persentase pembangunan jembatan di jalan provinsi dalam kondisi baik	92,63													
	Peningkatan Jalan Wilayah Perkotaan (Kota Jambi)	Panjang jalan yang ditingkatkan	37,96	km	281.967.000.000	4,47	19.410.000.000	4	20.355.170.000	99,93	9.857.220.000	104,4	29.267.220.000	275	10	BM
	Peningkatan Jalan di Wilayah I (Kab. Tanjab Barat)	Panjang jalan yang ditingkatkan	34,5	km	166.637.000.000	7	24.000.000.000	3	35.062.330.000	99,99	30.271.580.000	106,99	54.271.580.000	310	33	BM
	Peningkatan Jalan di Wilayah II (Kab. Tanjab Timur)	Panjang jalan yang ditingkatkan	84,25	km	373.240.000.000	18,35	50.260.000.000	9,5	68.432.430.000	99,97	32.601.860.000	118,32	82.861.860.000	140	22	BM
	Peningkatan Jalan di Wilayah IV (Kab. Bungo)	Panjang jalan yang ditingkatkan	91,5	Km	305.396.000.000	15	45.593.000.000	6	33.244.650.000	99,83	21.724.340.000	114,83	67.317.340.000	125	22	BM
	Peningkatan Jalan di Wilayah V (Kab. Batanghari dan Ma. Jambi)	Panjang jalan yang ditingkatkan	176,5	km	743.796.000.000	25	76.110.000.000	7,25	46.508.720.000	99,91	17.949.500.000	124,91	94.059.500.000	71	13	BM
	Peningkatan jalan diwilayah VI (Kab. Merangin)	Panjang jalan yang ditingkatkan	103,15	km	234.327.000.000	12	16.020.000.000	8,5	41.378.530.000	122,25	59.353.990.000	134,25	75.373.990.000	130	32	BM
	Peningkatan jalan diwilayah VII (Kab. Kerinci)	Panjang jalan yang ditingkatkan	38	km	210.202.000.000	5	19.175.000.000	7,5	39.787.040.000	78,65	21.455.640.000	83,65	40.630.640.000	220	19	BM
	Peningkatan jalan diwilayah VIII (Kab. Sarolangun)	Panjang jalan yang ditingkatkan	148	km	514.647.000.000	23	75.800.000.000	10 km	34.078.040.000	79,03	43.322.440.000	102,03	119.122.440.000	69	23	BM
	Peningkatan jalan diwilayah IX (Kab. Tebo)	Panjang jalan yang ditingkatkan	88,3	km	287.983.000.000	16,5	49.500.000.000	5,5	35.887.060.000	116,5	22.091.210.000	133	71.591.210.000	151	25	BM
	Perencanaan dan pengawasan teknis jalan dan jembatan provinsi jambi (P2TP)	Jumlah dokumen yang direncanakan dan diawasi	166	dok	154.053.000.000	23	19.150.000.000	23	20.183.010.000	90,35	30.378.670.000	113,35	49.528.670.000	68	32	BM
	Peningkatan jalan dengan sumber dana Alokasi Khusus (DAK)	Panjang jalan yang ditingkatkan	0		-	-	-	6	26.554.010.000	88,62	215.200.000	88,62	215.200.000			BM
	Peningkatan jalan diwilayah III (Kab. Ma. Jambi)	Panjang jalan yang ditingkatkan	91,25	km	445.868.000.000	19	63.050.000.000	5,5	32.515.860.000	99,85	15.137.420.000	118,85	78.187.420.000	130	18	BM
	Pengadaan Tanah untuk Bangunan Jalan dan Jembatan Provinsi Jambi	Jumlah dokumen yang dikeluarkan	11	Lokasi	135.000.000.000	2	20.000.000.000	2	32.862.980.000	95,75	6.474.310.000	97,75	26.474.310.000	889	20	Taru

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Rehab/ Pemeliharaan Jembatan di Jalan Provinsi Jambi	Persentase terpeliharanya pembangunan jembatan di jalan provinsi dalam kondisi baik	7134	M	125.730.000.000	1.500	7.500.000.000	18	8.882.900.000	91,93	3.300.210.000	1591,93	10.800.210.000	22	9	BM
									Rata-rata capaian kinerja (%)	97,33		216,63	57.121.542.142,			
									Predikat kinerja	ST						
7	Program Pengembangan Perumahan dan Permukiman	Persentase tersedianya hunian layak huni (MBR) bagi masyarakat	100		52.870.000.000	36	8.750.000.000	-	1.321.700.000		798.230.000		9.548.230.000	60	16	
	Pembangunan Rumah Susun	Jumlah rusun layak huni yang dibangun	2	Unit	7.820.000.000	1	450.000.000	-	0	0	-	1	450.000.000	50	6	PR
	Perencanaan dan pengawasan bidang perumahan	Jumlah design rusun yang direncanakan	92	Dok	9.750.000.000	15	1.500.000.000	6	1.321.700.000	86,27	798.230.000	101,27	2.298.230.000	110	24	PR
	Pengadaan dan Pengelolaan Rumah Khusus	Jumlah rumah khusus yang dikelola	50	Unit	35.300.000.000	10	6.800.000.000	-	0	0	-	10	6.800.000.000	20	19	PR
									Rata-rata capaian kinerja (%)	28,76		37,42	3.182.743.333,3			
									Predikat kinerja	SR						
8	Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong	Persentase luas kawasan banjir yang tertangani	100		235.263.000.000		44.000.000.000		1.168.670.000	89	3.674.920.000	639,2	47.674.920.000	21	20	
	Pembangunan Saluran Drainase Sekuler/ Gorong-gorong	Luas daerah yang terbebas dari banjir	3090	ha	235.263.000.000	550	44.000.000.000	550	1.168.670.000	89,17	3.674.920.000	639,17	47.674.920.000	21	20	CK
									Rata-rata capaian kinerja (%)	89,17		639,17	47.674.920.000			
									Predikat kinerja	ST						
9	Program Pengendalian Daya Rusak Air, Pengendalian Banjir, dan Pengamanan Pantai	Persentase pengurangan daya rusak air pada tahun berkenaan sarpras pencegah banjir	100		395.207.000.000		74.355.000.000	-	54.031.990.000		10.527.340.000		84.882.340.000	86	21	
	Perencanaan Pengendalian Daya Rusak Air, Pengendalian Banjir, dan Pengamanan Pantai	Jumlah dokumen yang dikeluarkan	29	dok	13.088.000.000	4	2.263.000.000	11	6.656.570.000	69,38	747.980.000	73,38	3.010.980.000	253	23	SDA
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengendalian Daya Rusak Air Wilayah I	Panjang sarpras yang dibangun	3.650	M	181.281.000.000	1.600	43.317.000.000	11	26.846.350.000	84,53	5.990.020.000	1684,53	49.307.020.000	46	27	SDA
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengendalian Daya Rusak Air Wilayah II	Panjang sarpras yang dibangun	2.900	M	139.880.000.000	370	19.415.000.000	3	13.186.270.000	93,09	1.903.090.000	463,09	21.318.090.000	16	15	SDA
	Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/ kali	Peningkatan panjang sungai yang dinormalisasi untuk mengurangi genangan banjir	60.900	M	60.958.000.000	16.500	9.360.000.000	6	7.342.800.000	88,76	1.886.250.000	16588,76	11.246.250.000	27	18	SDA
									Rata-rata capaian kinerja (%)	83,94		4.702	21.220.585.000			
									Predikat kinerja	T						
10	Program Pembangunan PSU Perumahan & Pemukiman di Pusat Kegiatan Nasional dan Kawasan Strategis Provinsi	Persentase tersedianya lingkungan layak huni (PSU) bagi masyarakat	100		65.974.000.000		10.100.000.000		11.788.300.000		11.319.820.000		21.419.820.000	694	38	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pembangunan PSU Perumahan Formal	Panjang jalan lingkungan yang dibangun sebagai sarana pendukung	37,3	km	50.863.000.000	65	8.806.000.000	6,7	5.647.380.000	96,97	5.361.990.000	161,97	14.167.990.000	434	28	PR
	Pembangunan PSU Perumahan Swadaya	Panjang jalan lingkungan yang dibangun sebagai sarana pendukung	9,9	Km	15.111.000.000	1	1.294.000.000	1,2	6.140.920.000	93,33	5.957.830.000	94,33	7.251.830.000	953	48	PR
									Rata-rata capaian kinerja (%)	95,15		128,15	10.709.910.000			
									Predikat kinerja	ST						
11	Program Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bidang Perumahan	Persentase tercapainya laporan yang dikeluarkan MONEV bidang perumahan pada tahun berkenaan	100		4.618.000.000	100	800.000.000	-	660.180.000	0	711.920.000	100	1.511.920.000	1.872	33	
	Monitoring Evaluasi Kegiatan Bidang Perumahan	Jumlah laporan yang dikeluarkan	6	Laporan	4.618.000.000	1	800.000.000	1	660.180.000	111,33	711.920.000	112,33	1.511.920.000	1872	33	PR
									Rata-rata capaian kinerja (%)	111,33		112,33	1.511.920.000			
									Predikat kinerja	FALSE						
12	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Persentase jaringan irigasi fungsional dalam kondisi baik	95		306.123.000.000	75	53.292.000.000	-	24.260.400.000		6.807.340.000	4501,5	60.099.340.000	146	25	
	Perencanaan pembangunan Jaringan Irigasi dan Jaringan Pengairan Lainnya	Jumlah dokumen yang dikeluarkan	20	dok	16.201.000.000	8	4.904.000.000	29	7.729.600.000	99,31	2.424.750.000	107,31	7.328.750.000	537	45	SDA
	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Panjang/ luas DI yang dipelihara	9.035	ha	129.285.000.000	1.509	23.610.000.000	3	6.716.900.000	92,3	2.433.270.000	1601,3	26.043.270.000	18	20	SDA
	Pembangunan/ Peningkatan Jaringan Irigasi Baru	Panjang/ luas jaringan DI yang dibangun	2.100	ha	82.879.000.000	200	5.593.000.000	-	-	-	-	200	5.593.000.000	10	7	SDA
	Rehabilitasi/ Reklamasi Jaringan Rawa	Panjang/ luas jaringan DR yang direhab/ reklamasi	14.000	ha	77.758.000.000	2.500	19.185.000.000	5	9.813.900.000	92,88	1.949.320.000	2592,88	21.134.320.000	19	27	SDA
	Rehabilitasi/ Reklamasi Jaringan Rawa (DAK)	Panjang/ luas jaringan DR yang direhab/ reklamasi	-	-	-	-	-		-	0	-	0	-			SDA
									Rata-rata capaian kinerja (%)	56,9		900,3	12.019.868.000			
									Predikat kinerja	R						
13	Program Fasilitas, Bantuan Teknis dan Sosialisasi Bid. Perumahan	Persentase tercapainya keg. fasilitas, bantuan teknis dan sosialisasi bid. perumahan pada tahun berkenaan	100		21.640	100	3.085	-	764.840.000		597980000		3682980000	425,625	17,0193161	
	Bantuan Teknis dan Sosialisasi Bidang Perumahan	Jumlah laporan yang dikeluarkan	24	Laporan	21.640.000.000	4	3.085.000.000	-	764.840.000	98,15	597.980.000	102,15	3.682.980.000	426	17	PR
									Rata-rata capaian kinerja (%)	98,15		102,15	3.682.980.000			
									Predikat kinerja	ST						
14	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan	95		278.249.000.000		48.934.000.000	-	42.693.120.000		4.383.120.000		53.317.120.000	161	18	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Penyediaan Sumber Air Baku	Jumlah sarpras tersedianya air baku yang akan dibangun	73	unit	57.438.000.000	12	8.934.000.000	14	9.879.770.000	90,44	792.560.000	102,44	9.726.560.000	140	17	SDA
	Penyediaan, Pengelolaan Air Minum dan Destribusi Jaringan Air Bersih	Persentase peningkatan rumah tangga dg akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan	95		220.811.000.000	74	40.000.000.000	-	32.813.350.000	98,02	3.590.560.000	172,02	43.590.560.000	181	20	CK
									Rata-rata capaian kinerja (%)	94,23		137,23	26.658.560.000			
									Predikat kinerja	ST						
15	Program Pengelolaan dan Konservasi Waduk, Embung, Situ serta Bangunan Penampung Air Lainnya	Persentase ketersidiaan air baku untuk mendukung universal akses pada tahun berkenaan	100		4.627.000.000		0	-	0		0	0	0	0	0	
	Perencanan Pengelolaan dan Konservasi Waduk, Embung, Situ serta Bangunan Penampungan Air Lainnya	Jumlah dokumen yang dikeluarkan	5	Dok	4.627.000.000					-	-	-	-	-	-	SDA
									Rata-rata capaian kinerja (%)	-		-	-			
									Predikat kinerja	SR						
16	Program Pengaturan Jasa Konstruksi	Persentase angkatan kerja bidang konstruksi yang disertifikasi profesi	75		12.786.000.000	39,04	1.974.000.000	-	150.530.000		0		1.974.000.000	16	16	
	Pembinaan aparatur dan SDM jasa konstruksi	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi	1810	Orang	9.146.000.000	200	1.374.000.000	0	150.530.000	0	-	200	1.374.000.000	11	15	Bikon
	Penataan Regulasi, NSPK, serta Kajian Pengembangan Kemitraan	Jumlah pelaku jasa konstruksi yang berkompetensi	10	Dok	3.640.000.000	2	600.000.000	0	0	0	-	2	600.000.000	20	16	Bikon
									Rata-rata capaian kinerja (%)	-		101	987.000.000			
									Predikat kinerja	SR						
17	Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Persentase angkatan kerja bidang konstruksi yang disertifikasi profesi	52,2		22.870.000.000	15	2.600.000.000	-	1.387.810.000		1.512.060.000		4.112.060.000	13	14	
	Pemberdayaan Kemitraan dan Peningkatan Peran TPJK dan FJKD	Jumlah orang mengikuti bimbingan teknis jasa konstruksi	8100	Orang	3.582.000.000			-	-	-	-	-	-	0	0	Bikon
	Pelatihan, Pembekalan, dan Fasilitasi Uji Kompentensi TKK	Jumlah orang yang mengikuti rakor daerah pembinaan jasa konstruksi	3760	Orang	13.714.000.000	500	1.800.000.000	120	1.214.900.000	97,64	1.200.010.000	597,64	3.000.010.000	16	22	Bikon
	Bintek Penyelenggara Jasa Kontruksi dan Pengembangan Sumber Daya Teknologi Kontruksi	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan jasa kosntruksi	1100	Orang	5.574.000.000	150	800.000.000	40	172.910.000	90,68	312.050.000	240,68	1.112.050.000	22	20	Bikon
									Rata-rata capaian kinerja (%)	62,77		279,44	1.370.686.667			
									Predikat kinerja	R						
18	Program Pengawasan Jasa Konstruksi	Persentanse pengendalian penyelenggaraan jasa kontruksi	93		10.387.000.000	88	1.550.000.000	-	546.270.000		898.640.000		2.448.640.000	609	23	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Monitoring, Evaluasi dan PengendalianPenyelenggaraan Jasa Konstruksi	Jumlah dok/ lap yang dikeluarkan	21	Dok/Lap	5.049.000.000	4	750.000.000	1	159.230.000	90	104.700.000	94	854.700.000	448	17	Bikon
	Penilaian Kinerja Jasa Kontruksi dan SIPJAKI	Jumlah kegiatan yang terselenggara	13	Keg	5.338.000.000	2	800.000.000	2	387.040.000	98,17	793.940.000	100,17	1.593.940.000	771	30	Bikon
									Rata-rata capaian kinerja (%)	94,09		97,09	1.224.320.000			
									Predikat kinerja	ST						
19	Program Lingkungan Sehat Perumahan dan Permukiman	- Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan sanitasi layak di perkotaan dan pedesaan	78		288.664.000.000	67	43.645.000.000	-	9.848.690.000		9.196.620.000		52.841.620.000	444	19	
		Persentase pengurangan luas kawasan kumuh 1357.64 ha menjadi kumuh 0%	70			25		-								
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun (IPAL/ air limbah dan TPA regional di PKN, PKNP, dan PKW)	12	Unit	41.355.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CK
	Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Berbasis Masyarakat	Persentase pencapaian pemeliharaan sarpras dasar pemukian berbasis masyarakat pada tahun berkenaan	100		83.019.000.000	100	12.802.000.000	1	5.590.950.000	95,24	5.250.290.000	195,24	18.052.290.000	195	22	CK
	Perencanaan dan Pengawasan Bid. Cipta Karya	Jumlah dokumen/ laporan yang dikeluarkan (Rispam, sanitasi, dan gorong')	91	Dok/Lap	152.596.000.000	18	29.400.000.000	14	1.254.980.000	95,49	1.460.890.000	113,49	30.860.890.000	125	20	CK
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bid. Cipta Karya	Jumlah laporan yang dikeluarkan	6	Laporan	11.694.000.000	1	1.443.000.000	1	3.002.760.000	86,41	2.485.440.000	87,41	3.928.440.000	1457	34	CK
									Rata-rata capaian kinerja (%)	69,29		99,04	13.210.405.000			
									Predikat kinerja	S						
20	Program Perencanaan dan Penyelenggaraan pengembangan infrastruktur wilayah dan kawasan	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan pengembangan infrastruktur wilayah dan kawasan tahun berkenaan	100		37.696.000.000	100	6.700.000.000	-	4.796.810.000		3.767.490.000		10.467.490.000	435	24	
	Penyusunan Dokumen Rencana Kebijakan dan Strategi Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan	Jumlah dokumen yang dikeluarkan	17	Dok	5.535.000.000	3	1.000.000.000	1	954.370.000	91,07	609.010.000	94,07	1.609.010.000	553	29	TaRu
	Penyusunan Norma Standar dan Kriteria Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan serta Penguatan NSPM dan Pengembangan Data Infrastruktur Bidang ke-PU-an\	Jumlah dokumen yang dikeluarkan	16	Dok	7.603.000.000	2	1.200.000.000	2	730.120.000	94,17	526.330.000	96,17	1.726.330.000	601	23	Bikon

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Kegiatan Koordinasi Perencanaan, Pemprograman, dan penyelenggaraan Pengembangan Infrastruktur wilayah dan Kawasan	Jumlah dokumen yang dikeluarkan	0	0	0		0	5	2.565.500.000	83,79	2.295.100.000	83,79	2.295.100.000			Bikon
	Penyelenggaraan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan	Jumlah dokumen yang dikeluarkan	52	Dok	24.558.000.000	9	4.500.000.000	1	546.820.000	68,6	337.050.000	77,6	4.837.050.000	149	20	TaRu
									Rata-rata capaian kinerja (%)	84,41		87,91	2.616.872.500			
									Predikat kinerja	T						
21	Program Evaluasi dan Pengendalian dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan	Persentase kegiatan bidang ke-PU-an yang dimonitoring dan evaluasi tahun berkenaan	100		14.247.000.000	100	3.500.000.000	-	1.033.960.000		697.620.000		4.197.620.000	318	30	
	Monitoring dan Evaluasi Keterpaduan Penyelenggaraan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan	Jumlah dokumen yang dikeluarkan	76	Dok	5.585.000.000	155	1.500.000.000	1	432.400.000	96,22	212.640.000	251,22	1.712.640.000	331	31	TaRu
	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Infrastruktur Bidang ke-PU-an	Jumlah dokumen yang dikeluarkan	34	Dok	8.662.000.000	6	2.000.000.000	2	601.560.000	97,77	484.980.000	103,77	2.484.980.000	305	29	Bikon
									Rata-rata capaian kinerja (%)	97		177,5	2.098.810.000			
									Predikat kinerja	ST						
22	Program Peningkatan sarana dan prasarana penunjang infrastruktur ke-PU-an	Persentase peningkatan pendapatan/ retrtibusi bidang infrastruktur ke-PU-an dibanding kondisi tahun awal	20		207.102.000.000	20	29.811.000.000	-	24.385.690.000		28.233.900.000		58.044.900.000	132	29	
	Pengadaan Peralatan dan Bahan Penunjang Laboraturium Ke-PU-an	Jumlah peralatan dan bahan penunjang laboratorium yang memadai dan handal dalam mencapai hasil berstandar nasional	24	Unit	28.971.000.000	10	4.130.000.000	3	1.476.110.000	96,58	1.510.830.000	106,58	5.640.830.000	444	19	Balai Uji
	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Alat-Alat Ukur dan Bahan Laboratorium Ke-PU-an	Jumlah alat-alat ukur dan bahan laboratorium yang dipelihara	150	Unit	5.600.000.000	20	800.000.000	25	698.290.000	94,16	511.340.000	114,16	1.311.340.000	76	23	Balai Uji
	Peningkatan Peran dan Fungsi Laboratorium Uji Bidang Ke-PU-an	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan kelaboratoriuman	205	Orang	2.600.000.000	25	400.000.000	35	725.590.000	86,04	1.130.530.000	111,04	1.530.530.000	54	59	Balai Uji
	Pengadaan Alat-Alat Berat	Jumlah alat-alat bert yang direncanakan	65	Unit	8.045.000.000		-		-	0	-	0	-	0	0	ALKAL
	Perencanaan, Pengawasan dan Pelaporan Penggunaan Alat-alat Berat	Jumlah dokumen yang dikeluarkan	24	Dok	4.031.000.000	4	600.000.000	24	426.130.000	75,97	365.630.000	79,97	965.630.000	333	24	ALKAL
	Ketatausahaan	Jumlah SDM ketatausahaan	72	Orang	4.424.000.000	72	629.000.000	64	1.663.520.000	79,33	1.519.450.000	151,33	2.148.450.000	210	49	ALKAL
	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Alat-Alat Berat	Jumlah alat berat yang dipelihara/ direhab	340	Unit	40.545.000.000	114	3.108.000.000	57	2.578.070.000	97,57	3.159.870.000	211,57	6.267.870.000	62	15	ALKAL

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Operasional Alat Berat untuk Pekerjaan Infrastruktur Ke-PU-an	Jumlah alat berat dan pendukung lainnya yang dioperasikan	340	Unit	62.164.000.000	114	9.418.000.000	57	5.621.390.000	89,83	7.066.380.000	203,83	16.484.380.000	60	27	ALKAL
	Pengelolaan Logistik dan Perbekalan	Jumlah logistik yang dikelola	340	Unit	8.985.000.000	114	1.329.000.000	57	699.370.000	93,86	651.420.000	207,86	1.980.420.000	61	22	ALKAL
	Pemeliharaan Rutin dan Penanganan Kritis Jalan Provinsi	Jumlah panjang jalan provinsi (fungsional) menuju sentra produksi yang dipelihara	2.036,845	km	41.737.000.000	407.369	9.397.000.000	342	10.497.220.000	99,92	12.318.450.000	407468,916	21.715.450.000	20	52	ALKAL
									Rata-rata capaian kinerja (%)	79,26		131,82	4.036.605.556			
									Predikat kinerja	T						
23	Program Operasi dan Pemeliharaan Infrastruktur SDA	Persentase terpeliharanya infrastruktur SDA yang beroperasi	100		60.510.000.000	100	9.555.000.000	-	7.024.930.000		9.531.270.000		19.086.270.000	909	31	
	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang telah Dibangun	Panjang/ luas jaringan DI yang telah dibangun terpelihara	6029	ha	22.012.000.000	6029	2.639.000.000	6,03	2.266.740.000	93,91	5.077.110.000	6122,91	7.716.110.000	102	35	SDA
	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Rawa yang telah Dibangun	Panjang/ luas jaringan DR yang telah dibangun terpelihara	13039	ha	30.104.000.000	13039	4.719.000.000	11,72	3.740.040.000	99,88	3.450.030.000	13138,88	8.169.030.000	101	27	SDA
	Operasi dan Pemeliharaan Waduk, Embung, Situ serta Bangunan Penampungan Air Lainnya	Jumlah waduk/ embung/ situ serta bangunan penampung lainnya yang optimal terpelihara	4	Unit	8.394.000.000	1	2.197.000.000	2	281.530.000	99,98	263.880.000	100,98	2.460.880.000	2525	29	SDA
	Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana Pengendalian Banjir	Jumlah tempat operasi dan pemeliharaan Prasarana pengendalian Banjir	0	0	0		0	2	736.620.000	98,84	740.250.000	98,84	740.250.000			SDA
									Rata-rata capaian kinerja (%)	98,15		4.865,00	4.771.567.500			
									Predikat kinerja	ST						
24	Program Kualitas Pengelolaan SDA Terpadu	Persentase tercapainya kualitas pengelolaan SDA terpadu pada tahun berkenaan	10		11.745.000.000	100	2.464.000.000	-	3.029.720.000		2.487.850.000		4.951.850.000	998	66	
	Pengelolaan Sumber Daya Air	Jumlah dokumen/ laporan yang dikeluarkan	6	Dok/Lap	9.668.000.000	1	1.787.000.000	1	1.768.530.000	51,88	1.030.290.000	52,88	2.817.290.000	881	29	SDA
	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kegiatan Bid. SDA	Jumlah dokumen/ laporan yang dikeluarkan	8	Dok/Lap	2.077.000.000	4	677.000.000	1	1.261.190.000	85,21	1.457.560.000	89,21	2.134.560.000	1115	103	SDA
									Rata-rata capaian kinerja (%)	68,55		71,05	2.475.925.000			
									Predikat kinerja	R						

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi																
	Program pelayanan Administrasi Perkantoran	Mewujudkan Fungsi Pelayanan yang efektif			2.001.000.000		1.009.554.000		890.722.000		905.234.000		1.914.788.000	802	84	Dinas Nakertrans Prov. Jambi
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikelola	1.050	Lbr	40.000.000	100	10.000.000	100	6.441.000	95,48	6.150.000	195,48	16.150.000	19	40	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayarkan	100	persen	420.000.000	61	293.886.000	100	330.000.000	89,98	296.925.000	151,13	590.811.000	151	141	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pengelolaan keuangan	130	Orang	200.000.000	97	181.406.000	100	196.500.000	97,55	191.683.000	194,93	373.089.000	150	187	
	kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah perlengkapan kebersihan	12	Orang	260.000.000	100	174.860.000	100	190.000.000	99,79	189.600.000	199,71	364.460.000	1664	140	
	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK	4	trw	210.000.000	100	50.945.000	100	65.000.000	100	65.000.000	199,99	115.945.000	5000	55	
	Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah dokumen yang diperbanyak	100.000	Lbr	160.000.000	81	47.342.000	100	30.000.000	99,99	29.998.000	181,26	77.340.000	0	48	
	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik, dll	85	persen	125.000.000	100	24.160.000	100	20.000.000	100	20.000.000	200	44.160.000	235	35	
	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah produk aturan	100	persen	7.000.000	100	2.000.000	100	2.500.000	100	2.500.000	200	4.500.000	200	64	
	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah konsumsi rapat	75	persen	29.000.000	100	9.985.000	100	10.420.000	99,52	10.370.000	199,38	20.355.000	266	70	
	Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah kegiatan luar kantor	100	persen	550.000.000	100	214.970.000	100	39.861.000	233,33	93.008.000	333,32	307.978.000	333	56	
									Rata-rata capaian kinerja (%)	111,56		205,52	191.478.800			
									Predikat kinerja	FALSE						
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Optimalnya pelaksanaan kegiatan Kantor			2.605.000.000		4.040.050.000		740.133.000		817.704.000		4.857.754.000	1.795	187	
	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas roda 2 dan roda 4	1	unit	290.000.000	1	352.280.000	-	-	-	-	1	352.280.000	100	121	
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan kantor	10	paket	175.000.000	94,07	210.852.000	1	32.400.000	114	32.400.000	208	243.252.000	2.076	139	
	Pengadaan mebeleur	Jumlah Mebeleur	30	paket	170.000.000	99,83	144.260.000	1	173.800.000	99	172.370.000	199	316.630.000	664	186	
	Pengadaan komputer	Jumlah komputer	5	paket	100.000.000	96,77	221.800.000	1	16.200.000	113	16.200.000	210	238.000.000	4.199	238	
	Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor yg direhab	1	paket	500.000.000	4	1.389.500.000	-	-	-	-	4	1.389.500.000	400	278	
	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yg dipelihara	3	paket	500.000.000	90,93	1.263.465.000	1	306.200.000	100	305.908.000	191	1.569.373.000	6.367	314	
	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yg dipelihara	52	Unit	250.000.000	99,8	281.130.000	1	146.533.000	102	145.413.000	202	426.543.000	388	171	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantoryang dirawat	120	Unit	620.000.000	85,54	176.763.000	1	65.000.000	110	145.413.000	195	322.176.000	163	52	
										Rata-rata capaian kinerja (%)		151	607.219.250			
										Predikat kinerja						
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur			250.000.000	96	86.400.000	100	86.400.000		-		86.400.000	22	35	
	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian dinas	430	steel	250.000.000	96	86.400.000	100	86.400.000	-	-	96	86.400.000	22	35	
										Rata-rata capaian kinerja (%)		96	86.400.000			
										Predikat kinerja						
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya wawasan dan pengetahuanPNS			185.000.000		100.431.000		41.211.000		39.760.000		140.191.000	353	16	
	Kegiatan fasilitasi jabatan fungsional,kursus,pelatihan,sosialisasi dan bimbingan teknis	Jumlah kegiatan bimtek	85		185.000.000	100	25.000.000,00	100	4.350.000	200	4.350.000	300	29.350.000	353	16	
	penyediaan data bidang nakertrans, dalam rangka pemenuhan data SIPD	jumlah bank data yang disiapkanselama 1 tahun			-	100	67.731.000	100	33.861.000	135,29	33.810.000	235,27	101.541.000			
	Kegitan pembinaan jasmani dan rohani Aparatur	Jumlah pelayanan pembinaan jasmani dan rohani				99	7.700.000	100	3.000.000	73,33	1.600.000	172,68	9.300.000			
										Rata-rata capaian kinerja (%)		235,98	46.730.333			
										Predikat kinerja						
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan yang disiapkan dalam tahun bersangkutan			175.000		155.698.000		129.607.000		129.607.000		285.305.000	3.640	75	
	kegiatan penyusunan laporan rutin program dan perkembangan SKPD penerapan SPM dan laporan asset dan keuangan	Jumlah dokumen laporan	3	Laporan	380.000.000	3	155.698.000	3	129.607.000	106,19	129.607.000	109,19	285.305.000	3640	75	
										Rata-rata capaian kinerja (%)		109,19	285.305.000			
										Predikat kinerja						
	Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas	Meningkatnya produktivitas tenaga kerja yang lebih baik			8.485.000.000		2.117.962.000		756.939.000		755.031.000		2.872.993.000	297	46	
	Pendidikan dan Pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja (MTU)	Jumlah pencari kerja yang memperoleh keterampilan kerja	400	Orang	1.350.000.000	92	449.320.000	5	137.763.000	120	137.769.000	212	587.089.000	53	43	
	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja Berbasis Kompetensi (PBK)	Jumlah tenaga kerja yag dilatih keterampilan berbasis kewirausahaan	400	Orang	2.300.000.000	100	341.241.000	2	236.383.000	106	236.161.000	206	577.402.000	51	25	
	Pelatihan Kewirausahaan Produktif	Jumlah LPKS	280	Orang	1.000.000.000	99	298.650.000	120	101.706.000	99	100.903.000	199	399.553.000	71	40	
	Pelatihan Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja	Jumlah peserta pelatihan produktivitas	235	Orang	450.000.000	100	-	100	52.658.000	100	52.655.000	200	52.655.000	85	12	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pemagangan Dalam dan Luar Negeri dan Seleksi	Jumlah masyarakat yang mengikuti pelatihan	200	Orang	385.000.000	93	683.110.000	50	70.954.000	124	70.954.000	217	754.064.000	109	196	
	Pendidikan dan Pelatihan Bahasa Asing Bagi Calon Tenaga Kerja dan Magang ke Luar Negeri	Jumlah Peserta yang memperoleh pendidikan dan pelatihan bahasa	450	Orang	1.000.000.000	99	140.009.000	96	125.680.000	107	125.680.000	205	265.689.000	46	27	
	Sertifikasi Kompetensi Bagi Lulusan Lembaga Pelatihan (BLK dan LPKS)	Jumlah Instruktur, peserta pelatihan dan perusahaan yang diberikan sertifikasi	500	Orang	1.000.000.000	9.664	125.632.000	39	8.162.000	99	8.112.000	9.763	133.744.000	1.953	13	
	Kerjasama Pelatihan Dengan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)	Jumlah LPKS	2.880	Orang	1.000.000.000	100	80.000.000	32	2.000.000	100	2.000.000	200	82.000.000	7	8	
	Rapat Koordinasi dan singkronosasi Program peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan produktivitas Kegiatan Bidang PPPTKP	Persamaan persepsi penyelenggraan pelatihan dan produktivitas sesuai No.23 tahun 2014	-		-		-	1	4.411.000	100	4.411.000	100	4.411.000			
	Akreditasi Lembaga PelatihanKerja Swasta (LPKS)	Peningkatan Kwalitas lembaga pelatihan kerja sesui standar	-		-		-	5	17.222.000	95	16.386.000	95	16.386.000			
									Rata-rata capaian kinerja (%)	105,05		1.139,00	287.299.300			
									Predikat kinerja	FALSE						
	Program Pemerdayaan Tenaga Kerja				1.625.000.000		1.452.344.000		816.672.000		812.255.000		2.264.599.000	119	141	
1	Perluasan kesempatan kerja sektor informal bagi masyarakat melalui pembentukan kelompok wirausaha baru (WUB) dan Padat Karya Infrastruktur	Jumlah WUB yang dibentu	90	orang	330.000.000	98	168.459.000	40	330.238.000	190,54	330.238.000	288,9	498.697.000,00	321	151,12	
2	pengembangan dan perluasan kesempatan kerja dalam dan luar negeri melalui penempatan tenaga kerja AKL, AKAD, TKI, TKA dan Informasi Pasar Kerja	Jumlah pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	3000	orang	500.000.000	90	656.190.000	3.000	304.146.000	129,17	302.180.000	219,66	958.370.000,00	7,32	191,67	
3	penyuluhan calon tenaga kerja indonesia (CTKI) keluar negeri bagi tenaga perawat dan perawat lansia	Jumlah CTKI yang diberi penyuluhan	400	orang	350.000.000	91	72.893.000	200	69.033.000	183,35	69.013.000	274,47	141.906.000,00	68,62	40,54	
4	monitoring dan pembinaan tenaga kerja sektor formal dan informal	Jumlah kajian dan analisi pertumbuhan sektor produktif	1	Dok	100.000.000	1	79.548.000	-	-	-	-	1	79.548.000,00	100	79,55	
5	sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang penempatan tenaga kerja	Jumlah Perusahaan yang dilakukan sosialisasi	660	Orang	100.000.000	93	46.547.000	30	-	78,78	89.224.000	171,88	135.771.000,00	26,04	135,77	
6	pengembangan masyarakat melalui terapan teknologi tepat guna (TTG)	Jumlah informasi yang disebar	200	data	85.000.000	90	174.215.000	40	113.255.000	28,61	21.600.000	118,37	195.815.000,00	59,18	230,37	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7	pendayagunaan tenaga kerja sarjana (TKS)	Jumlah TKS sebagai Tenag Pendamping dalam Bidang Perluasan Kesempatan Kerja	40	Orang	160.000.000	100	254.492.000	12	-	-	-	99,6	254.492.000,00	249	159,06	
									Rata-rata capaian kinerja (%)	87,21		167,7	323.514.143			
									Predikat kinerja	T						
	Program Perlindungan dan pengembangan lembaga Ketenagakerjaan				1.590.000.000		1.217.187.000		745.969.000		743.964.000		1.961.151.000	#VALUE!	123	
1	Sosialisasi K3 dan Penilaian Penghargaan K3	Meningkatkan Budaya Kerja sesuai prinsip K3	60	paket	140.000.000	95	115.140.000	60	104.900.000	187	104.847.000	282	219.987.000	470	157	
2	Penetapan UMP Tahunan	Jumlah Peserta yang melakukan Pembahasan UMP	1	paket	250.000.000	100	248.499.000	1	202.229.000	137	202.078.000	237	450.577.000	23.653	180	
3	Pengawasan Pekerja Anak	Jumlah anak yang diawasi di lingkungan Perusahaan	20	Orang	90.000.000	100	35.967.000	5	-	-	-	100	35.967.000	498	40	
4	Pengembangan Mekanisme Lembaga Kerjasama Tripartit	Jumlah Lembaga Tripartit	1	paket	170.000.000	100	198.496.000	1	126.167.000	118	124.798.000	218	323.294.000	21.804	190	
5	Pengawasan Norma Ketenagakerjaan dan Sosialisasi Per Undang-Undangan Ketenagakerjaan	Jumlah Perusahaan yang melaksanakan Norma Ketenagakerjaan	40 org unsur Perusahaan, 120 Perusahaan	Perusahaan	460.000.000	99	296.278.000	120	191.700.000	161	191.645.000	260	487.923.000	#VALUE!	106	
6	Penegakan Hukum/Penyidikan di Bidang Ketenagakerjaan	Jumlah Kasus yang dilakukan Penyelidikan	5	Kasus	120.000.000	94	150.977.000	1	102.880.000	143	102.503.000	238	253.480.000	4.750	211	
7	Pelaksanaan Pelatihan Ahli K3 Umum	Jumlah Peserta yang diberikan Pelatihan Ahli k3	50	Orang	200.000.000	99	138.835.000	20	-	-	-	99	138.835.000	198	69	
8	Pengujian Lingkungan Kerja	Jumlah Titik Pengujian	275	Titik	160.000.000	100	32.995.000	200	18.093.000	100	18.093.000	200	51.088.000	73	32	
									Rata-rata capaian kinerja (%)	105,71		204,11	245.143.875			
									Predikat kinerja	FALSE						
	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi				1.180.000.000		1.222.302.000		434.184.000		425.792.000		183.121.556	4.448	187	
1	Pembinaan Mental Spiritual, seni dan budaya di UPT Binaan	Jumlah UPT Bina yang mendapatkan pembinaan mental Spritual	2	UPT	180.000.000	2	135.623.000	-	-	-	-	2	135.623.000	100	75	
2	Pengembangan Hasil Produksi Petani Transmigran dan Peternakan	Jumlah UPT Bina yang memperoleh pengembangan hasil produksi pertanian dan peternakan	2	UPT	180.000.000	1	113.427.000	-	-	-	-	1	113.427.000	50	63	
3	Penanganan Permasalahan Lokasi Transmigrasi	Jumlah permasalahan yang diselesaikan	100	%	65000000	73,84	258.454.000	8	257.390.000	109,26	253.708.000	183,1	512.162.000	183	788	
4	Publikasi Melalui Informasi Potensi Lokasi dan Kerjasama Antar Daerah	Jumlah Publikasi	100	%	110000000	94,55	94.554.000	1	52.090.000	110,14	49.010.000	204,69	143.564.000	205	131	
5	Pengembangan Kelompok Swadaya Masyarakat dan Usaha Home Industri di UPT	Jumlah Kelompok Home Industri	2	UPT	140.000.000	3	120.000.000	0	0	-	-	3	120.000.000	150	86	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
6	Peningkatan Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan serta Gizi Keluarga Transmigrasi di UPT	Jumlah keluarga yang diberikan gizi di UPT	2	paket	165.000.000	3	347.659.000	0	28.530.000	-	-	3	347.659.000	150	211	
7	Penyiapan Areal Transmigrasi	Jumlah kabupaten yang disiapkan	2	paket	210.000.000	96,7	48.350.000	2	41.758.000	99,75	41.458.000	196,45	89.808.000	9823	43	
8	Monitoring Pembangunan Permukiman dan STP dan Pendaftaran dan Seleksi TPS	Jumlah kegiatan monev	2	Paket	60.000.000	76,45	54.276.000	1	54.416.000	111,33	27.230.000	187,78	81.506.000	9389	136	
9	Monitoring Pembangunan Kawasan Wilayah Transmigrasi	Jumlah kegiatan monev	1	Paket	70.000.000	99,92	49.959.000	3		99,94	54.386.000	199,86	104.345.000	19986	149	
									Rata-rata capaian kinerja (%)	58,93		108,99	183.121.556			
									Predikat kinerja	R						

4

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK PROVNSI JAMBI																
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100	persen	9.618.900.000		3.695.255.000		627.820.000	100	582.234.000	5.128	4.277.489.000	133	42	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pelayanan jasa surat menyurat	8.750	buah	42.300.000	3910	16.602.000	710	3.510.000	710	3.504.000	4620	20.106.000	53	48	DP3AP2
	Kegian Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air, dan listrik	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	12	Bulan	1.068.000.000	12	360.555.000	12	112.400.000	12	89.067.000	24	449.622.000	200	42	DP3AP2
	Kegian Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	40	Orang	1.404.700.000	39	551.515.000	13	96.651.800	13	90.481.000	52	641.996.000	130	46	DP3AP2
	Kegian Penyediaan Jasa kebersihan kantor	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	12	Bulan	810.000.000	12	324.959.000	12	80.000.000	12	79.114.000	24	404.073.000	200	50	DP3AP2
	Kegian Penyediaan Alat tulis kantor	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	135	Jenis	1.258.300.000	100	526.200.000	50	85.426.500	100	85.171.000	200	611.371.000	148	49	DP3AP2
	Kegian Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	90	Jenis	546.600.000	61	148.993.000	10	14.970.800	10	14.971.000	71	163.964.000	79	30	DP3AP2
	Kegian Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	60	Jenis	267.700.000	42	93.289.000	11	13.065.500	11	13.065.000	53	106.354.000	88	40	DP3AP2
	Kegian Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Persentase /jumlah peraturan dan bahan bacaan	10	Jenis	75.000.000	10	25.179.000	4	2.700.000	4	2.700.000	14	27.879.000	140	37	DP3AP2
	Kegian Penyediaan makanan dan minuman	Persentase/jumlah rapat makan dan minum	50	Kali	210.000.000	38	67.189.000	8	13.716.000	8	8.975.000	46	76.164.000	92	36	DP3AP2
	Kegian Rapat -rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah /persentase koordinasi dan konsultsi ke luar daerah	12	Bulan	3.936.300.000	12	1.580.774.000	12	205.379.400	12	195.186.000	24	1.775.960.000	200	45	DP3AP2
									Rata-rata capaian kinerja (%)	89,2		512,8	427.748.900			
									Predikat kinerja	ST						
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100	persen	8.587.600.000	50	1.845.592.000	100	349.011.600	46	314.431.000	188	2.160.023.000	61	19	
	Kegiatan Pengadaan Perlengkapankantor	Jumlah peralatan studio kantor	1	unit	517.900.000	-	-	-	-	0	-	0	-	0	0	DP3AP2
	Kegiatan Pengadaan mebeleur	Jumlahmebeleur	50	unit	450.000.000	-	35.727.000	-	-	0	-	0	35.727.000	0	8	DP3AP2
	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Persentase pemeliharaan rutin gedung kantor	6	paket	703.200.000	4	164.312.000	1	37.200.000	1	37.185.000	5	201.497.000	83	29	DP3AP2
	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Persentase pemeliharaan kendaraan dinas	26	unit	2.750.600.000	26	809.353.000	23	291.811.600	23	257.306.000	49	1.066.659.000	188	39	DP3AP2
	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Persentase pemeliharaan rutin gedung kantor	165	unit	765.900.000	110	86.200.000	22	20.000.000	22	19.940.000	132	106.140.000	80	14	DP3AP2
	Kegiatan Pengadaan kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas	12	unit	3.400.000.000	2	750.000.000	-	-	0	-	2	750.000.000	17	22	DP3AP2
									Rata-rata capaian kinerja (%)	7,67		31,33	360.003.833			
									Predikat kinerja	SR						

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3	Program Peningkatan disiplin aparatur	Cakupan layanan Peningkatan disiplin aparatur	100	persen	252.000.000	100	162.000.000	100	63.050.000	-	63.050.000	105	225.050.000	91	89	
	Kegiatan Pengadaan pakaian dinas berserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas	115	org	252.000.000	105	162.000.000	97	63.050.000	0	63.050.000	105	225.050.000	91	89	DP3AP2
									Rata-rata capaian kinerja (%)	-		105	225.050.000			
									Predikat kinerja	SR						
4	Program Peningkatan Kapasistas sumber Daya Aparatur	Cakupan layanan Kapasistas sumber Daya Aparatur	100	persen	440.000.000	100	172.500.000	100	2.100.000	20	2.100.000	225	174.600.000	75	40	
	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	Pelatihan formal	300	orng	440.000.000	205	172.500.000	20	2.100.000	20	2.100.000	225	174.600.000	75	40	DP3AP2
									Rata-rata capaian kinerja (%)	20		225	174.600.000			
									Predikat kinerja	SR						
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Cakupan layanan Pengembangan Sistem Pelaporan dan capaian kinerja keuangan	100	persen	1.595.000.000	100	916.590.000	100	210.972.500	19	206.004.000	34	1.122.594.000	227	70	
	Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah jenis laporan dan persentase capaian kinerja dan realisasi keuangan	15	jenis buku	1.595.000.000	15	916.590.000	15	210.972.500	19	206.004.000	34	1.122.594.000	227	70	DP3AP2
									Rata-rata capaian kinerja (%)	19		34	1.122.594.000			
									Predikat kinerja	SR						
6	Program Penguatan kelembagaan pengarustamaan Gender dan Anak	Cakupan layanan Kelembangaan pengarustamaan Gender dan Anak	100	persen	22.659.500.000		10.451.173.000	100	865.322.007	62	855.907.000	533	11.307.080.000	234	42	
	Kegiatan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Jumlah anak yang mengikuti forum anak	390	Orang	2.815.000.000	210	1.613.100.000	11	77.100.000	11	77.097.000	221	1.690.197.000	56,67	60,04	DP3AP2
	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kota Layak Anak (KLA)	Jumlah Kab/Kota yang mengembangkan KLA	11	Kab/Kota	2.300.000.000	11	767.589.000	5	53.975.000	46	52.674.000	57	820.263.000	518,18	35,66	DP3AP2
	Sosialisasi Pola Asuh Anak dalam Keluarga dan Lingkungan	Jumlah peserta yang memahami tentang pola asuh anak dalam keluarga	200	orang	800.000.000	250	241.837.000	0	-	5	-	255	241.837.000	127,5	30,23	DP3AP2
	Kegiatan peningkatan kapasitas jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan Anak	Jumlah kapasitas jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	2	Kegiatan	2.150.000.000	4	1.256.192.000	0	-	-	-	4	1.256.192.000	200	58,43	DP3AP2
	Kegiatan komunikasi, informasi, Edukasi (KIE) tentang perlindungan anak	Jumlah peserta yang mengikuti bintek	720	orang	2.070.000.000	500	1.279.042.000	70	58.150.000	70	58.061.000	570	1.337.103.000	79,17	64,59	DP3AP2
	Kegiatan Penyusunan Sistem Perlindungan bagi Perempuan	Jumlah peserta per-Kab/Kota yang mengikuti system advokasi tindak pidana perdagangan	480	Orang	1.300.000.000	204	619.044.000	0		-	-	204	619.044.000	42,5	47,62	DP3AP2
	Kegiatan bimtekbagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT	Jumlah pelatih pendampingan KDRT	170	orang	1.450.000.000	74	382.579.000	11	102.454.987	11	102.108.000	85	484.687.000	50	33,43	DP3AP2

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Kegiatan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	Persentase Operasional P2TP2A	100	%	3.000.000.000	100	1.291.683.000	0	-	-	-	100	1.291.683.000	100	43,06	DP3AP2
	Kegiatan perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	Jumlah operasional rumah aman bagi korban KDRT	1	unit	764.500.000	1	460.148.000	100	246.814.000	100	243.935.000	101	704.083.000	10100	92,1	DP3AP2
	Kegiatan Evaluasi pelaksanaan PUG	Jumlah proses evaluasi pelaksanaan PUG	9	kali	1.700.000.000	5	777.970.000	46	109.100.320	46	107.725.000	51	885.695.000	566,67	52,1	DP3AP2
	Kegiatan Bimtek Pendidikan politik Perempuan	Jumlah peserta peran wanita dalam bidang politik	200	orang	1.000.000.000	100	-	0		-	-	100	-	50	0	DP3AP2
	Kegiaan pembinaan organisasi perempuan	Jumlah organisasi perempuan (Dharma Wanita dan BKOW)	2	organisasi	2.500.000.000	2	1.761.989.000	2	217.727.700	2	214.307.000	4	1.976.296.000	200	79,05	DP3AP2
	penilaian perusahaan pembina terbaik tenaga kerja perempuan	jumlah kabupaten pembina tenaga kerja perempuan	11	kab/kota	810.000.000	11	-	11		-	-	11	-	100	0	DP3AP2
									Rata-rata capaian kinerja (%)	22,38		135,62	869.775.385			
									Predikat kinerja	SR						
7	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa		100	persen	29.150.000.000		12.723.905.633	100	798.807.000	11	766.551.000	909	4.161.090.633	61	64	
	Kegiatan Pelatihan aparatur pemdes dalam bidang manajemen pemerintahan desa	Jumlah pesertaaparatur desa yang terlatih dlm bidang manajemen	1.000	orang	2.000.000.000	800	3.600.000.000	-	-	0	-	800	3.600.000.000	80	180	DP3AP2
	Kegiatan bintek penyusunan profil desa	Persentase datadesa dalam database profil desa menuju tertib administrasi pemerintah desa	100	%	1.800.000.000	87	511.633			0	-	87	511.633	87	0	DP3AP2
	Kegiatan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan	Jumlah Desa/Kelurahan yang mengikuti lomba desa dan kelurahan di Provinsi Jambi	132	Desa/Kelurahan	4.500.000.000	11	500.000.000	11	68.637.000	11	60.579.000	22	560.579.000	17	12	DP3AP2
	Penguatan Kapasitas Organisasi Masyarakat dan Kelembagaan Desa	Jumlah pesertapemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat . Dalam penyusunan program /kegiatan	11	kab/kota	1.500.000.000	11	350.000.000	11	15.170.000	11	15.170.000	22	365.170.000	200	24	DP3AP2
	Kegiatan penguatan kapasitas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah peserta penguatan kapasitas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1.620	orang	4.500.000.000	330	500.000.000	-	-	0	-	330	500.000.000	20	11	DP3AP2
	Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	Jumlah Pemberdayaan dan kexejahteraan keluarga di kabupaten kota	11	kab/kota	10.800.000.000	100	6.192.149.000	100	715.000.000	100	690.802.000	200	6.882.951.000	1818	64	DP3AP2
	Kegiatan Pemberdayaan nilai nilai kegotongroyongan , adat daerah, dan masyarakat hukum adat	Jumlah Kab/Kota yang mengikuti	11	kab/kota	2.550.000.000	11	1.081.245.000	-	-	0	-	11	1.081.245.000	100	42	DP3AP2

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Kegiatan Rapat Koordinasi Pemerintahan Desa	Jumlah Kab/Kota yang mengikuti	11	kab/kota	1.500.000.000	11	500.000.000	-	-	0	-	11	500.000.000	100	33	DP3AP2
									Rata-rata capaian kinerja (%)	15,25		185,38	1.686.307.079			
									Predikat kinerja	SR						
8	Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan	Cakupan layanan Masyarakat Perdesaan	100	persen	20.750.000.000	100	6.153.382.000	100	200.112.300	61	200.112.000	1.022	2.990.910.000	95	50	
	Kegiatan Penguatan Kapasitas Pengelolaan BUMDesa	Jumlah Peserta Rakor dan Bimtek Pengautan Kapasitas Pengelolaan BUMDesa	1.265	orang	1.800.000.000	500	1.530.983.000	50	49.366.000	50	49.366.000	550	1.580.349.000	43	88	DP3AP2
	Kegiatan pelatihan Perempuan di Perdesaan dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif	Jumlah kelompok yang di latih	1.080	orang	2.700.000.000	450	558.527.000	-	-	0	-	450	558.527.000	42	21	DP3AP2
	Kegiatan Pembinaan Posyantek dan Gelar TTG	Kelompok Posyantek TTG di Kecamatan	11	Kab/Kota	2.000.000.000	11	785.688.000	11	66.346.500	11	66.346.000	22	852.034.000	200	43	DP3AP2
	Kegiatan Penguatan Pendampingan di perdesaan	Jumlah kabupaten dengan Tenaga Professional untukpendampingan desa	10	Kab/Kota	7.250.000.000	10	1.565.251.000	10	84.399.800	10	84.400.000	20	1.649.651.000	200	23	DP3AP2
	Kegiatan Pembinaan dan revitalisasi pokjanal posyandu	Jumlah peserta pembinaan untuk revitalisasi pokjanal posyandu	270	orang	800.000.000	11	582.933.000	11	-	0	-	11	582.933.000	4	73	DP3AP2
	Kegiatan Pameran hasil karya di bidang Pembangunan/Jambore	Jumlah BUMDesa yang megikuti Jambore	1.399	Desa	2.700.000.000	1.399	500.000.000	-	-	0	-	1399	500.000.000	100	19	DP3AP2
	Kegiatan Sumber Daya Alam (SDA) Desa	Jumlah Kab/Kota dengan pengelolaan SDA pedesaan meningkat	11	Kab/Kota	2.000.000.000	11	200.000.000	-	-	0	-	11	200.000.000	100	10	DP3AP2
	Kegiatan Pemberdayaan dan Penguatan Sarana dan Prasarana Pamsimas	Jumlah Kab yang mengikuti penilaian BPSPAM terbaik	10	Kab	700.000.000	10	250.000.000	-	-	0	-	10	250.000.000	100	36	DP3AP2
	Kegiatan Pembinaan dan Penilaan P2WKSS	Jumlah kab/Kota yang terbina dan mengikuti penilaian P2WKSS	11	Kab/Kota	800.000.000	11	180.000.000	11	-	0	-	11	180.000.000	100	23	DP3AP2
									Rata-rata capaian kinerja (%)	7,89		276	705.943.778			
									Predikat kinerja	SR						
7	Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		100%		7.300.000.000		1.366.561.000	100	120.688.000	-	38.688.000	300	1.005.249.000	2.727	16	
	Kegiatan Momentum Hari Keluarga Nasional (HARGANAS)	Jumlah peserta yang mengikuti Harganas	11	kab/kota	1.500.000.000	11	250.000.000	2	-	0	-	11	250.000.000	100	17	DP3AP2
	Kegiatan Pembinaan Kampung KB	Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi kampung KB	11	Kab/Kota	1.900.000.000	300	300.000.000	0	-	0	-	300	300.000.000	2727	16	DP3AP2
	Kegiatan sosialisasi Kesehatan Reproduksi pada Remaja (KRR)	Jumlah peserta yang mengikut sosialisasi BKR	2.750	org	1.900.000.000	400	416.561.000	5	10.000.000		10.000.000	400	426.561.000	15	22	DP3AP2

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Kegiatan Workshop Pendidikan Program Kependudukan Keluraga Berencana Pembangunan Keluarga (KKBPK)	JumlahKab/kota yang memilikiDuta Kependudukan	11	kab/kota	1.000.000.000	-	-	2	28.688.000		28.688.000	0	28.688.000	0	3	DP3AP2
	Penguatan Advokasi Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana	jumlah Advokasi Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana	11	kab/kota	1.000.000.000	11	400.000.000	11	82.000.000		80.776.000	11	480.776.000	100	48	DP3AP2
Rata-rata capaian kinerja (%)										-		144	297.205.000			
Predikat kinerja										SR						

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Dinas Ketahanan Pangan																
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya pelayanan prima	95		1.111.210.800	92,29	1.072.267.098	98	837.977.437	101,89	853.797.700	194	1.926.064.798	196	182	Dishanpan
1	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya oparasional surat menyurat	95	persen	35.200.000	99,99	35.198.000	98	35.200.000	100	35.199.000	199,99	70.397.000	211	200	Dishanpan
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, air, listrik	95	persen	165.200.000	79,94	132.060.788	98	153.000.000	72,15	110.388.700	152,09	242.449.488	160	147	Dishanpan
3	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terselenggaranya jasa administrasi keuangan	95	persen	226.284.000	98,66	223.254.491	98	210.885.000	116,9	270.869.000	215,56	494.123.491	227	218	Dishanpan
4	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	95	persen	60.000.000	100	59.998.500	98	60.000.000	99,99	59.996.000	199,99	119.994.500	211	200	Dishanpan
5	Penyediaan Alat tulis Kantor	Tersedianya ATK sesuai kebutuhan	95	persen	66.610.700	99,95	66.578.193	98	66.610.700	98,67	65.724.500	198,62	132.302.693	209	199	Dishanpan
6	Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya majalah dll sesuai kebutuhan	95	persen	43.806.100	99,89	43.756.919	98	39.806.100	99,84	39.743.100	199,73	83.500.019	210	191	Dishanpan
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya instalasi listrik bangunan	95	persen	3.000.000	84,9	2.547.000	98	3.000.000	99,83	2.995.000	184,73	5.542.000	194	185	Dishanpan
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya perlengkapan kantor	95	persen	56.400.000	99,4	56.059.364	98	-	0	-	99,4	56.059.364	105	99	Dishanpan
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan/ media cetak	95	persen	19.200.000	100	19.200.000	98	19.200.000	100	19.200.000	200	38.400.000	211	200	Dishanpan
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya bahan makan dan minum	95	persen	76.350.000	99,92	76.290.000	98	91.115.637	99,35	90.522.400	199,27	166.812.400	210	218	Dishanpan
11	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya partsipasi dalam rapat/ konsultasi	95	persen	359.160.000	99,49	357.323.843	98	159.160.000	100	159.160.000	199,49	516.483.843	210	144	Dishanpan
									Rata-rata capaian kinerja (%)	89,7		186,26	175.096.800			
									Predikat kinerja	ST						
	Program Peningkt. Sarana & Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana & prasarana aparaur	95		917.180.000	95,93	900.198.366	98	552.717.587	217,68	552.081.716	314	1.452.280.082	#REF!	#REF!	Dishanpan
1	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan Dinas	Tersedianya Peralatan Rumah Jabatan Dinas	95		118.110.000	92,6	109.366.340	-	-	0	-	92,6	109.366.340	97	93	Dishanpan
2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianyan Peralatan Gedung Kantor	95		146.500.000	94,88	139.004.136	98	56.647.587	174,84	77.456.779	269,72	216.460.915	284	148	Dishanpan
3	Pengadaan Mebeluar	Tersedianya Mebeluar Kantor	95		66.500.000	99,89	66.430.100	98	15.000.000	31,03	24.390.647	130,92	90.820.747	138	137	Dishanpan
4	Pemel.Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan berkala rutin gedung kantor	95		103.600.000	99,96	103.555.520	98	78.600.000	97,87	134.487.152	197,83	238.042.672	208	230	Dishanpan
5	Pemel.Rutin/Berkala Kend. Dinas /Operasional	Terpeliharanya kendara-an dinas/operasional	95		277.470.000	99,89	277.167.087	98	277.470.000	114,38	220.411.911	214,27	497.578.998	226	179	Dishanpan
6	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan kantor	95		75.000.000	99,79	74.841.183	98	65.000.000	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	Dishanpan

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7	Rehab Berat/Sedang Gedung Kantor	Terlaksananya rehab berat/sedang gedung kantor	0		130.000.000	99,87	129.834.000	98	60.000.000	100	60.000.000	199,87	189.834.000	196	146	Dishanpan
										Rata-rata capaian kinerja (%)	#REF!		#REF!	#REF!			
										Predikat kinerja	#REF!						
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	95		66.000.000	89,93	65.945.000	98	66.000.000	99,17	65.450.000	189	131.395.000	210	199	
1	Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas dan perlengkapan	95		66.000.000	99,92	65.945.000	98	66.000.000	99,17	65.450.000	199,09	131.395.000	210	199	Bakorluh
										Rata-rata capaian kinerja (%)	99,17		199,09	131.395.000			
										Predikat kinerja	ST						
	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Meningkatnyakapasitas sumberdaya aparatur	95		46.760.000	84,68	41.553.478	98	20.000.000	19,25	3.850.000	103,93	45.403.478	176	122	Dishanpan
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal	95		46.760.000	88,87	41.553.478	98	20.000.000	78,5	15.700.000	167,37	57.253.478	176	122	Dishanpan
										Rata-rata capaian kinerja (%)	78,5		167,37	57.253.478			
										Predikat kinerja	S						
	Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporn capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnyapengembangan Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	95		101.865.000	91,6	100.010.204	98	81.416.000	75,49	81.416.000	167	181.426.204	209	178	Dishanpan
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	95		101.865.000	98,18	100.010.204	98	81.416.000	100	81.416.000	198,18	181.426.204	209	178	Dishanpan
										Rata-rata capaian kinerja (%)	100		198,18	181.426.204			
										Predikat kinerja	ST						
	Program Peningkatan Ketahanan pangan	Meningkatnyaketahanan pangan	95		4.325.094.200	98,02	4.292.180.800	98	1.410.525.929	108,25	1.526.954.856	206	5.819.135.656	213	137	Dishanpan
1	Kegiatan penyusunan Database/laporan kondisi ketahanan pangan	Terlaksananya Pengisian Buku Database KP	95		112.360.000	97,9	109.999.908	98	77.643.221	100	77.643.221	197,9	187.643.129	208,32	167	Dishanpan
2	Kegiatan koordinasi Ketahanan Pangan	Telaksananya Penghimpunan Isu Ketahanan Pangan	95		249.985.000	99,93	249.820.000	98	33.851.500	100	33.851.500	199,93	283.671.500	210,45	113,48	Dishanpan
3	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Ketahanan Pangan	Termonitornya kegiatan Ketahanan Pangan	95		134.793.000	99,32	133.870.443	98	55.895.000	100	55.895.000	199,32	189.765.443	209,81	140,78	Dishanpan
4	Kegiatan Koordinasi perencanaan dan Perumusan Program	Telaksananya dokumen perrencanaan kegiatan dnas	95		173.880.000	96,13	167.150.915	98	144.147.000	99,97	144.097.000	196,1	311.247.915	206,42	179	Dishanpan
5	Pengembangan Sumber Daya Pangan	Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat	95		203.300.000	99,8	202.897.500	98	33.500.000	100	33.500.000	199,8	236.397.500	210,32	116,28	Dishanpan
6	Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Daerah	Penanganan daerah rawan pangan, pengembangan dan pemantapan desa mandiri pangan, Sistim Kewaspadaan pangan dan gizi	95		947.477.140	99,41	941.887.140	98	193.587.300	100	193.587.300	199,41	1.135.474.440	209,91	119,84	Dishanpan
7	Kegiatan peningkatan ketersediaan pangan	Hasil Analisis Ketersediaan pangan	95		335.205.060	99,15	332.344.006	98	103.175.000	100	103.175.000	199,15	435.519.006	209,63	129,93	Dishanpan
8	Kegiatan Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	Jumlah Kelembagaan lumbung pangan yang berkembang	95		300.144.000	99,93	299.938.550	98	125.810.000	100	125.804.764	199,93	425.743.314	210,45	141,85	Dishanpan

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
9	Kegiatan Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok	Penyampaian informasi dan hasil pemantauan Harga Pangan Pokok	95		417.408.000	99,96	417.257.999	98	181.262.000	100	181.262.000	199,96	598.519.999	210,48	143,39	Dishanpan
10	Kegiatan Pengembangan Distribusi Pangan	Pengembangan modal distribusi pangan yang efisien	95		290.442.000	99,76	289.748.839	98	138.426.000	100	138.425.554	199,76	428.174.393	210,27	147,42	Dishanpan
11	Kegiatan Peningkatan Pola kosumsi Pangan Masyarakat	Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan	95		430.550.000	99,99	430.493.000	98	117.628.225	99,83	117.428.225	199,82	547.921.225	210,34	127,26	Dishanpan
12	Kegiatan Peningkatanpengawasan keamanan Pangan Asal tumbuhan	Peningkatan Mutu dan keamanan pangan	95		333.230.000	96,18	320.502.500	98	49.625.000	100	49.625.000	196,18	370.127.500	206,51	111,07	Dishanpan
13	kegiatan percepatan deverfikasi konsumsi Pangan berbahan Baku Sumber Daya Lokal	Pemberdayaan masyarakat dalam diversifikasi	95		396.320.000	99,99	396.270.000	98	70.503.650	142,47	190.498.580	242,46	586.768.580	255,22	148,05	Dishanpan
14	Operasional kelembagaan UPTD Balai Pengawas mutu dan Keamanan Pangan	Pengawas Mutu dan Keamanan Pangan	0		0	-	-	98	85.472.033	96,13	82.161.712	96,13	82.161.712			Dishanpan
									Rata-rata capaian kinerja (%)	102,74		194,7	415.652.547			
									Predikat kinerja	FALSE						

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
DINAS LINGKUNGAN HIDUP																
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		z		1.931.081.773		1.495.805.159		923.472.388	-	1.047.105.948	-	2.542.911.107	180	135	DLH
	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah surat yang terkirim	350	Surat	7.000.000	350	3.300.000	200	2.850.000	200	2.850.000	550	6.150.000	157	88	DLH
	Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	ketersediaan sarana listrik, telepon dan air	12	bulan	384.081.773	12	243.488.686	12	269.995.130	12	194.824.560	24	438.313.246	200	114	DLH
	Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dibayarkan pajaknya	30		30.000.000	-	-	17	13.900.000	13	11.067.000	13	11.067.000	43	37	DLH
	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah aparatur yang melayani administrasi keuangan	27	Orang	270.000.000	27	193.958.000	23	236.662.000	92	228.830.000	119	422.788.000	441	157	DLH
	Kegiatan jasa kebersihan Kantor	ketersediaan peralatan kebersihan dan Bahan pembersih	12	bulan	65.000.000	12	48.560.700	12	39.074.510	12	153.296.372	24	201.857.072	200	311	DLH
	Kegiatan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	80	Unit	75.000.000	52	54.500.000	70	40.000.000	67	92.500.000	119	147.000.000	149	196	DLH
	Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang dibutuhkan	44	Item	150.000.000	42	88.670.100	39	40.113.678	57	50.376.420	99	139.046.520	225	93	DLH
	Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan penggandaan	12	bulan	50.000.000	12	27.039.500	12	17.017.500	12	32.892.500	24	59.932.000	200	120	DLH
	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah komponen listrik yang dibutuhkan untuk penerangan bangunan kantoor	10	Item	25.000.000	4	14.222.000	4	6.363.250	8	6.363.250	12	20.585.250	120	82	DLH
	Kegiatan Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaa dan Informasi	12	bulan	5.000.000	12	4.998.645	12	2.963.820	15	2.963.820	27	7.962.465	225	159	DLH
	Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman rapat dan tamu	1.000	Orang	70.000.000	2	67.559.750	2	16.700.000	6	26.700.000	8	94.259.750	1	135	DLH
	Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke Kab/Kota dan Provinsi Jambi	12	bulan	800.000.000	12	749.507.778	12	237.832.500	12	244.442.026	24	993.949.804	200	124	DLH
									Rata-rata capaian kinerja (%)	42,17		86,92	211.909.259			
									Predikat kinerja	SR						
2	Program Peningkatan Saranan dan Prasarana Aparatur				2.670.000.000		777.659.200		365.200.344	-	460.204.344		1.237.863.544	104	68	DLH
	Kegiatan Pengadaaan Kendaraan Dinas	Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional Kepala DLH	4	Unit	-	1	368.100.000	-	-	-	-	1	368.100.000	25		DLH
	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Pengisian Tabung Gas dan Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	6	Unit	1.700.000.000	1	6.000.000	4	23.380.344	4	141.880.344	5	147.880.344	83	9	DLH

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Kegiatan Pengadaan Komputer	jumlah pengadaan komputer,laptop dan printer/optimalnya sarana dan prasarana kegiatan	6	Unit	70.000.000	7	29.970.000	-	-	-	-	7	29.970.000	117	43	DLH
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan gedung kantor	12	bulan	100.000.000	12	107.290.000	12	47.400.000	12	47.400.000	24	154.690.000	200	155	DLH
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas /operasional	Jumlah kendaraan dinas yang di service	29	Unit	400.000.000	16	209.799.200	20	224.470.000	12	201.124.000	28	410.923.200	97	103	
	Kegiatan rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Bagunan yang dilakukan renovasi	2	Paket	400.000.000	2	56.500.000	1	69.950.000	-	69.800.000	2	126.300.000	100	32	DLH
									Rata-rata capaian kinerja (%)	4,67		11,17	206.310.591			
									Predikat kinerja	SR						
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				100.000.000		83.160.000		84.500.000		84.227.000		167.387.000	172	167	DLH
	Kegiatan Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pengadaan Pakaian dinas	150	Steel	100.000.000	128	83.160.000	130	84.500.000	130	84.227.000	258	167.387.000	172	167	DLH
									Rata-rata capaian kinerja (%)	130		258	167.387.000			
									Predikat kinerja	FALSE						
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				200.000.000		227.985.800		7.050.000		8.850.000		236.835.800	800	118	DLH
	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	jumlah kursus,diklat dan bintek yang diikuti aparatur/meningkatnya pengetahuan sumber daya aparatur	1	Tahun	200.000.000	1	227.985.800	1	7.050.000	7	8.850.000	8	236.835.800	800	118	DLH
									Rata-rata capaian kinerja (%)	7		8	236.835.800			
									Predikat kinerja	SR						
5	Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				670.000.000		313.357.251		180.109.536		112.727.723		426.084.974	83	63	DLH
	Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Buku Laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja DLH Prov.Jambi	8	buku/laporan	70.000.000	8	34.850.250	8	35.095.336	-	35.090.750	8	69.941.000	100	100	DLH
	Kegiatan Sinkronisasi dan Koordinasi Program Bidang LH	Jumlah rapat koordinasi bidang LH Tk Provinsi Jambi, Pengambilan data terkait program Informasi Perangkat Daerah dan LPPD, sinkronisasi dan koordinasi Program kegiatan, Penyusunan Rencana Kerja SKPD	2	kali pertemuan	400.000.000	3	278.507.001	1	86.556.500	-	71.762.373	3	350.269.374	150	88	DLH
	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bidang Lingkungan Hidup	Tersedianya data monev kegiatan bidang lingkungan hidup tingkat provinsi jambi	2	2 x pemantauan/pembinaan	200.000.000	-	-	-	58.457.700	-	5.874.600	-	5.874.600	-	3	DLH
									Rata-rata capaian kinerja (%)	-		3,67	142.028.324,67			
									Predikat kinerja	SR						

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
6	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Penurunan beban pencemaran lingkungan dan meningkatnya pengendalian dan perusakan lingkungan sebagai satu kesatuan dengan penaatan hukum lingkungan , peningkatan kapasitas sumberdaya alam dan pemberdayaan Masyarakat			5.025.000.000		9.061.915.372		1.221.436.516		#REF!		#REF!			
	Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan	Pemantauan kualitas air sungai lintas kab/kota dalam wilayah Provinsi Jambi	2	air sungai 2 kali/7 kab, udara ambien 2x/11 kab,air laut 1x, air danau 1x/2 kab.	575.000.000		503.389.390		246.503.000	1	245.453.600	1	748.842.990	50	130	DLH
	Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	Pembinaan danPengawasan terhadap izin lingkungan, Izin PPLH, Sosialisasi Pengawasan Kebijakan LH	50	perusahaan	400.000.000	50	499.774.235	40	216.729.000	-	216.698.150	50	716.472.385	100	179	DLH
	Kegiatan Pengelolaan B3 dan Limbah B3	Pembinaan Pengelolaan B3 dan LB3 oleh Keg. dunia usaha, Koordinasi/pembinaan terhadap Kab/Kota,	50	perusahaan	350.000.000		60.000.000		30.000.000	-	30.000.000	0	90.000.000	-	26	DLH
	Kegiatan Koordinasi Penyusunan Amdal	Pemantauan Kondisi Rencana usaha/Kegiatan, pembinaan dan pemantauan izin lingkungan/RKL-RPL, Binwas KPA dan Verifikasi Lisensi KPA,Ratek dan Rakor Penilaian Dokumen dan MHA, verifikasiMHA dan Hutan Adat, Rakornas dan konsultasi luar daerah	6	perusahaan	380.000.000		344.766.000		152.899.516	-	205.125.000	0	549.891.000	-	145	DLH
	Kegiatan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	Monitoring dan evaluasi Jakstrada kab/kota, pembinan penilaian Adipura, ratek/rakor/sosialisasi/bintek	4	kab/kota	500.000.000		198.729.250		115.061.000	-	70.236.075	0	268.965.325	-	54	DLH

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Kegiatan Pendayagunaan laboratorium Lingkungan Daerah	jumlah sampel yang diperiksa dan jumlah PAD dari laboratorium	4000	sampel/ bln	1.700.000.000	400	6.779.744.358	400	115.061.000	-	816.359.725	400	7.596.104.083	10	447	DLH
	Kegiatan Penaatan Hukum Lingkungan	pengawasan pemenuhan sanksi administratif, verifikasi tindaklanjut hasil pengawasan, rakor/FGD Penegakan hukum, rapat penyelesaian kasus	100	%	400.000.000		321.628.050		115.061.000	-	142.843.665	0	464.471.715	-	116	DLH
	Kegiatan Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	penanganan pengaduan LH, pembinaan dan pembentukan pos pengaduan kab/kota, rakor/FGDpenanganan pengaduan	100	%	300.000.000	100	219.899.989	100	115.061.000	-	84.194.750	100	304.094.739	100	101	DLH
	Kegiatan Koordinasi Program Adiwiyata	Pembinaan Adiwiyata Provinsi, penilaian Adiwiyata Tingkat Provinsi, pendampingan tim penilaian Adiwiyata Nasional dan Mandiri, rapat koordinasi/sosialisasi Adiwiyata	11	kab/kota	420.000.000	11	133.984.100	11	115.061.000	-	#REF!	11	#REF!	100		DLH
									Rata-rata capaian kinerja (%)	0,09		52,18	#REF!			
									Predikat kinerja	SR						
7	Program Perlindungan dan Konservasi sumber daya Alam				1.350.000.000		1.225.960.975		388.469.850		330.842.300		1.556.803.275	76	#DIV/0!	DLH
	Kegiatan Pengendalian dampak perubahan Iklim	Pelaksanaan PEP RAD GRK sektor limbah, pembinaan kegiatan proklim dan pembinaan penurunan emisi berbasis masyarakat, pembinaan penurunan Emisi GRK pada perusahaan penghasil limbah CPO	11	kab/kota pembinaan PEP RAD GRK	450.000.000	11	277.715.700	11	132.652.350	-	95.096.200	11	372.811.900	100	83	DLH
			11	kab/kota pembinaan proklim		11				-		11		100	#DIV/0!	
			7	prshn pembinaan Emisi GRK		7				-		7		100	#DIV/0!	
	Kegiatan Pengembangan Study Kebijakan Lingkungan	Validasi dan rapat koodinasi KLHS, pembinaan KLHS dan instrumen lingkungan lainnya, penyusunan Dokumen KLHS RZWP3K	3	Dokumen	500.000.000	1	754.613.350	1	151.946.000	-	131.880.800	1	886.494.150	33	177	DLH

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Kegiatan Sosialisasi Pengendalian Kebakaran Lahan dan Hutan	Sosialisasi pengendalian karlahut, monitoring&pembinaan pengendalian karlahut dilahan gambut/mineral	50	peserta	200.000.000	12	139.992.525	5	53.871.500	-	53.865.300	12	193.857.825	24	97	
	Kegiatan Koordinasi Peningkatan Pengelolaan Kawasan konservasi	Rapat koordinasi/FGD lahan akses terbuka, karst, mangrove, koordinasi/inventarisasi lahan akses terbuka,karst, mangrove	50	peserta	200.000.000	50	53.639.400	50	50.000.000	-	50.000.000	50	103.639.400	100	52	DLH
									Rata-rata capaian kinerja (%)	-		15,33	389.200.819			
									Predikat kinerja	SR						
8	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup				500.000.000		-		214.272.650		213.302.150		213.302.150	100	43	DLH
	Kegiatan Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan	Penyusunan DIKPLHD Provinsi Jambi, pembinaan dan pengambilan data penyusunan DIKPLHD	1	dokumen DIKPLHD	500.000.000	1	-	1	214.272.650	-	213.302.150	1	213.302.150	100	43	DLH
			11	kab/kota pembinaan dan pengambilan data		11						11				
									Rata-rata capaian kinerja (%)	-		6	213.302.150			
									Predikat kinerja	SR						

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
DINAS PERHUBUNGAN																
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Akuntabilitas kelembagaan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat			1.492.681.500		1.638.984.141		1.174.771.750		1.020.630.786		2.659.614.927	3.193.700	180	
	Penyediaan Surat Menyurat	Tersedianya perlengkapan jasa surat menyurat	1	paket	38.100.000	1	38.100.000	1	37.100.000	-	35.294.000	1	73.394.000	8.738.800	193	Dishub
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kelancaran penggunaan jasa komunikasi, air dan listrik	1	Paket	233.060.000	1	259.633.515	1	224.000.000	87.387	147.619.015	87.388	407.252.530	5.552.300	175	Dishub
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kelancaran tugas Pengelola Keuangan SKPD	1	Paket	282.181.500	1	275.865.626	1	263.661.500	55.522	256.476.600	55.523	532.342.226	9.807.200	189	Dishub
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kebersihan dan kerapihan kantor.	1	Paket	137.611.500	1	127.606.000	1	113.078.500	98.071	128.076.500	98.072	255.682.500	2.311.400	186	Dishub
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Kelancaran tugas-tugas operasional pelayanan	1	Paket	144.288.000	1	129.395.000	1	68.250.000	23.113	87.440.000	23.114	216.835.000	965.300	150	Dishub
	Penyedian Alat Tulis Kantor	Barang-barang habis pakai keperluan kantor	1	Paket	160.602.000	1	139.204.000	1	152.814.000	9.652	149.046.500	9.653	288.250.500	880.600	179	Dishub
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang-barang cetakan dan penggandaan keperluan kantor	1	Paket	93.467.500	1	64.326.000	1	50.341.250	8.805	69.087.200	8.806	133.413.200	2.859.100	143	Dishub
	Kegiatan Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1	Paket	27.000.000	1	58.320.000	1	15.626.500	28.590	25.122.000	28.591	83.442.000	822.100	309	Dishub
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Peralatan dan komponen listrik/ penerangan kantor	1	Paket	30.971.000	1	23.874.000	1	27.000.000	8.220	25.920.000	8.221	49.794.000	100	161	Dishub
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan minuman untuk keperluan rapat	1	Paket	67.400.000	1	22.739.000	1	49.900.000	-	42.089.000	1	64.828.000	100	96	Dishub
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan konsultasi dengan pusat maupun daerah	1	Paket	278.000.000	1	499.921.000	1	173.000.000	-	54.459.971	1	554.380.971	3.193.700	199	Dishub
									Rata-rata capaian kinerja (%)	29.032		31.937	241.783.175			
									Predikat kinerja	FALSE						
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Akuntabilitas kelembagaan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat			1.987.428.000		950.868.800		1.169.376.000		1.868.888.000		2.819.756.800	100	160	
	Pengadaan mobil jabatan	kenyamanan bagi pejabat dlam melaksanakan tugas	1	paket	555.000.000		555.000.000		-	-	552.310.000	-	1.107.310.000	-	200	Dishub
	Pemeliharaanrutin/ berkalakendaraandinas/ operasional	Kelancaran tugas operasional sehari-hari.	1	Paket	518.860.000	1	489.715.000	1	247.500.000	-	246.255.000	1	735.970.000	100	142	Dishub
	Pengadaan peralatan gedung kantor	Kelancaran dan kenyamanan tugas aparatur	1	Paket	277.560.000	1	222.153.800	1	317.600.000	-	316.937.000	1	539.090.800	100	194	Dishub
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Ketertiban dan kenyamanan tugas rutin	1	Paket	324.332.000	1	239.000.000	1	410.600.000	-	410.300.000	1	649.300.000	100	200	Dishub

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Kelancaran dan kenyamanan tugas aparatur	1	paket	866.676.000	1	-	1	193.676.000	-	895.396.000	1	895.396.000	100	103	Dishub
									Rata-rata capaian kinerja (%)	-		1	704.939.200			
									Predikat kinerja	SR						
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Akuntabilitas kelembagaan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat			122.100.000		120.842.000		122.100.000		152.719.600		273.561.600	100	224	
	PengadaanPakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Ketertiban dan disiplin aparatur dalam menjalankan tugas	1	Paket	122.100.000	1	120.842.000	1	122.100.000	-	152.719.600	1	273.561.600	100	224	Dishub
									Rata-rata capaian kinerja (%)	-		1	273.561.600			
									Predikat kinerja	SR						
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Akuntabilitas kelembagaan dan kualitas sumber daya manusia.			130.000.000		21.938.425		-		-		21.938.425	100	17	
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan/ diklat	1	Paket	130.000.000	1	21.938.425	1	0	-	-	1	21.938.425	100	17	Dishub
									Rata-rata capaian kinerja (%)	-		1	21.938.425			
									Predikat kinerja	SR						
5	PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana transportasi			2.449.936.000		4.243.820.069		1.723.169.750		2.402.884.273		6.646.704.342	100	219	
	Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Dokumen teknis perencanaan pembangunan infrastruktur transportasi.	1	Paket	1.852.388.000	1	3.796.916.569	1	1.383.985.750	-	1.816.594.780	1	5.613.511.349	100	303	Dishub
	Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan	Pelaksanaan sosialisasi terhadap masyarakat melalui media elektronik dan media cetak	1	Paket	388.260.000	1	210.387.600	1	219.896.000	-	417.351.400	1	627.739.000	100	162	Dishub
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan di lingkungan Dishub	1	Paket	209.288.000	1	236.515.900	1	119.288.000	-	168.938.093	1	405.453.993	100	194	Dishub
									Rata-rata capaian kinerja (%)	-		1	2.215.568.114,00			
									Predikat kinerja	SR						
6	PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ	Terpeliharanya prasarana dan fasilitas LLAJ sesuai persyaratan yang ditentukan			639.060.000		384.578.000		633.732.000		631.288.000		1.015.866.000	100	159	
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas Keselamatan Jalan	Standar pelayanan dan fungsi prasarana LLAJ terpenuhi.	1	Paket	639.060.000	1	384.578.000	1	633.732.000	-	631.288.000	1	1.015.866.000	100	159	Dishub
									Rata-rata capaian kinerja (%)	-		1	1.015.866.000			
									Predikat kinerja	SR						
7	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN	Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi yang			19.770.491.000		18.982.351.578		18.220.859.000		1.028.960.500		19.845.177.631	94	113	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		efektif, efisien dan taat aturan														
	Peningkatan Disiplin Masyarakat Menggunakan Angkutan	Masukan dalam pengambilan keputusan terhadap permasalahan transportasi	1	Paket	147.288.000	1	204.656.700	1	87.288.000	-	80.835.700	1	285.492.400	100	194	Dishub
	Penciptaan Pelayanan Cepat, Tepat, Murah dan Mudah	Ketertiban, kelancaran dan keselamatan penyelenggaran angkutan hari-hari besar dan hari khusus	1	Paket	288.064.000	1	146.723.350	1	147.328.000	-	197.328.000	1	344.051.350	100	119	Dishub
	Pengumpulan dan Analisis Data Base Pelayanan Angkutan	Kemudahan akses dalam memperoleh data dan informasi	1	Paket	704.049.000	1	295.171.500	1	267.156.000	-	305.730.800	1	600.902.300	100	85	Dishub
	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan	Keselamatan pelayaran angkutan perairan	1	Paket	422.661.000	1	384.536.303	1	66.060.000	-	64.609.000	1	449.145.303	100	106	Dishub
	Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudik/Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan	Disiplin awak kendaraan umum dalam berlalu lintas dan terpilihnya wakil Provinsi Jambi di tingkat nasional	1	Paket	371.585.000	1	375.487.100	1	117.935.000	-	83.754.275	1	459.241.375	100	124	Dishub
	Koordinasi Dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan	Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan angkutan udara dan embarkasi haji antara	1	Paket	105.952.000	1	68.815.047	1	66.700.000	-	97.319.400	1		100	-	
	Pelayanan Domestik Haji Embarkasi	Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan angkutan udara	2	Paket	17.504.332.000	1	17.242.675.840	1	148.560.000	-	70.323.825	1	17.312.999.665	50	99	Dishub
	Pengendalian Pengawasan Kegiatan Kelayakan Sertifikat Sungai	Pelaksanaan pembinaan dan penertiban penyelenggaraan kegiatan angkutan sungai dan laut	1	Paket	226.560.000	1	264.285.738	1	17.319.832.000	-	129.059.500	1	393.345.238	100	174	Dishub
									Rata-rata capaian kinerja (%)	-		1	2.835.025.375,80			
									Predikat kinerja	SR						
9	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana transportasi			4.494.178.000		5.451.917.397		3.364.223.000		5.585.740.937		11.037.658.334	100	164	
	Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas	Ketertiban, kelancaraan, keselamatan LLAJ	1	Paket	3.364.223.000	1	5.451.917.397	1	3.364.223.000	-	5.585.740.937	1	11.037.658.334	100	328	Dishub
	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan	Ketertiban, kelancaraan, keselamatan LLAJ	1	Paket	1.129.955.000	1	-	-	-	-	-	1	-	100	-	Dishub
									Rata-rata capaian kinerja (%)	-		1	5.518.829.167			
									Predikat kinerja	SR						
10	PROGRAM PENINGKATAN KELAYAKAN	Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi yang			225.628.000		310.939.800		171.528.000		171.528.000		482.467.800	100	214	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR	efektif, efisien dan taat aturan														
	Kegiatan Uji Petik Kendaraan Bermotor	Disiplin penyelenggaraan LLAJ	1	Paket	225.628.000	1	310.939.800	1	171.528.000	-	171.528.000	1	482.467.800	100	214	Dishub
									Rata-rata capaian kinerja (%)	-		1	482.467.800			
									Predikat kinerja	SR						
10	PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana transportasi							2.245.740.000		2.843.997.128		4.229.857.123	100	156	
	Pengembangan angkutan umum massal aglomerasi	Kenyamanan dan keselamatan pada gedung VIP Room Bandara	1	Paket	2.713.020.000	1	1.385.859.995	1	2.245.740.000	-	2.843.997.128	1	4.229.857.123	100	156	Dishub
									Rata-rata capaian kinerja (%)	-		1	4.229.857.123			
									Predikat kinerja	SR						

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																
1	Program pelayananadministrasi dan perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran			3.568.544.800		5.704.693.107		3.323.078.032		3.202.568.541		8.907.261.648	512	161	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya Surat masuk , surat keluar dan benda pos lainnya	2500	Eksemplar	1.698.000	99,92	1.190.000	2500	1.698.000	74	1.260.000	174	2.450.000	7	144	DISKOMINFO
	Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	terlaksananya pembayaran telepon, air, listrik dan jaringan internet.	750	Megabit	2.824.811.000	95,4	4.855.099.454	750	2.764.811.000	31	2.764.811.000	126	7.619.910.454	17	270	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terpenuhinya Honraraium Penglola Keuangan.	100	%	208.586.000	78,29	156.248.000	100	192.792.000	58	149.074.500	136	305.322.500	136	146	
	Penyediaan jasa Kebersihan Kantor	Terwujudnya kebersihan di lingkungan kantor (1 Tahun)	100	%	6.495.800	0	-	295	6.495.800	50	3.235.100	50	3.235.100	50	50	
	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya ATK untuk unit kerja Sekretariat dan 5 Bidang	100	%	140.000.000	99,53	147.577.000	100	59.563.900	92	54.873.895	192	202.450.895	192	145	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor(1 Tahun)	60	Jenis	25.000.000	99,75	25.214.000	60	18.497.000	63	11.656.500	163	36.870.500	272	147	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan (1 Tahun)	12	Bulan	45.000.000	98,62	42.900.000	60	45.000.000	65	36.650.000	164	79.550.000	1.364	177	
	Penyediaan makanan dan minuman	tersedianya buku dan bahan referensi (1 Tahun)	12	Bulan	27.000.000	99,81	25.950.000	120	27.000.000	49	17.340.400	149	43.290.400	1.243	160	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	tersedianya konsumsi peserta rapat, konsumsi tamu (1 Tahun)	12	Bulan	289.954.000	99,96	450.514.653	60	207.220.332	59	163.667.146	159	614.181.799	1.327	212	
									Rata-rata capaian kinerja (%)	60,2		145,9	989.695.739			
									Predikat kinerja	R						
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				1.414.200.200		2.166.125.852		372.142.500		442.995.030		2.609.120.882	137	218	
	Kegiatan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas	100	%	601.000.000	100	901.546.900	-	-	-	-	100	901.546.900	100	150	DISKOMINFO
	Kegiatan peralatan gedung kantor	Tersediannya Peralatan Kantor	100	%	157.024.200	100	628.603.200	-	-	-	-	100	628.603.200	100	400	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Pemeliharaan Kendaraan Dinas	100	%	224.400.000	83,8	186.471.152	94,2	180.400.000	68	155.760.030	152	342.231.182	152	153	
	Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpenuhnya Kebutuhan Peralatan Kantor	100	%	431.776.000	94,53	449.504.600	99,18	191.742.500	101	287.235.000	196	736.739.600	196	171	
									Rata-rata capaian kinerja (%)	42,36		136,94	652.280.221			
									Predikat kinerja	SR						
3	Program Peningkatan Displin aparatur.				65.000.000		49.500.000		44.100.000		0		49.500.000	100	76	
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersediannya Pakaian Dinas Harian Pegawai	100	%	65.000.000	100	49.500.000	99	44.100.000	0	0	100	49.500.000	100	76	DISKOMINFO
									Rata-rata capaian kinerja (%)	-		100	49.500.000			
									Predikat kinerja	SR						

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.				211.800.000		108.769.900		23.000.000		9.600.000		118.369.900	105	56	
	Pendidikan dan pelatihan formal	Meningkatnya Sumber Daya Aparatur	100	%	211.800.000	90,64	108.769.900	100	23.000.000	14	9.600.000	105	118.369.900	105	56	DISKOMINFO
									Rata-rata capaian kinerja (%)	14,35		104,99	118.369.900			
									Predikat kinerja	SR						
5	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.				190.991.700		441.964.230		149.630.500		105.565.100		547.529.330			
	Kegiatan rapat Koordinasi Teknik Bidang Kominfo					98,81	147.020.100	-	-	0	0	98,81	147.020.100			DISKOMINFO
	Kegiatan Penyusunan rencana kerja OPD					99,99	35.946.000	-	-	0	0	99,99	35.946.000			
	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan pelaporan	Terpenuhnya Rapat Koordinasi dan Pelaporan Kominfo	100	%	190.991.700	89,99	258.998.130	100	149.630.500	59,76	105.565.100	149,75	364.563.230	150	191	
									Rata-rata capaian kinerja (%)	19,92		116,18	182.509.777			
									Predikat kinerja	SR						
6	Program Pembangunan dan Pengembangan Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi				985.500.000		2.209.670.504		416.323.865		440.778.230		2.650.448.734			
	Kegiatan Pembangunan dan Pengembnagan Jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Terpenuhnya Jaringan Komunikasi dan Informasi Ke seluruh OPD dan Rumah Dinas Secara Berkesinambungan	46	OPD dan Rumah Dinas Jabatan	985.500.000	100	1.883.572.827	95,52	416.323.865	85	440.778.230	185	2.324.351.057	402	236	DISKOMINFO
	kegiatan Pelayanan Jasa Sandi dan Telekomunikasi		-			98,76	195.670.273	-	-	-	-	99	195.670.273			
	Kegiatan Penyusunan Kompilasi Produk Statistik Sektoral dan Analisis Data Pembangunan		-			78,81	130.427.404	-	-	-	-	79	130.427.404			
									Rata-rata capaian kinerja (%)	28,41		120,79	883.482.911,33			
									Predikat kinerja	SR						
8	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik				2.355.129.700		3.684.527.482		1.042.102.650		848.947.209		4.533.474.691	291	212	
	Kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi	Terlaksanannya Penyebaran Informasi Penyelenggaran Pemerintah Daerah	100	%	189.510.000	93,6	364.944.210	79,74	103.902.000	92	138.832.000	185	503.776.210	185	266	DISKOMINFO
	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Informasi Publik	Terwujudnya pelayanan rekomendasi penelitian (1 Tahun).	11	Kab/Kota	234.390.000	98,36	306.004.130	99,99	147.732.000	23,4587878	49.588.000	122	355.592.130	1.107	152	
	Kegiatan Layanan Media Informasi Publik	Terwujudnya Pengetahuan Masyarakat Mengenai Prilaku Penyiaran	100	%	250.000.000	96,47	580.142.959	-	0	0	98.780.836	96	678.923.795	96	272	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Kegiatan Kemitraan Penguatan Layanan Komunikasi Publik	OPD Dinas Terkait dan Masyarakat	100	%	249.618.700	100	518.577.996	-	0	0	10.084.000	100	528.661.996	100	212	
	Kegiatan Pelayanan Teknis Komisi Informasi Provinsi Jambi	Tercapainnya Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	100	%	778.417.500	94,77	803.559.588	92,93	627.814.250	64,409935	441.901.573	159	1.245.461.161	159	160	
	Kegiatan Diseminasi Informasi	Terselenggarannya Diseminasi Informasi melalui Pemberdayaan dan pembinaan Lembaga Komunikasi Sosial dan Media	100	%	281.070.000	99,67	586.124.617	-	0	0	0	100	586.124.617	100	209	
	Kegiatan Penyediaan dan Pelayanan Informasi Publik Provinsi Jambi	Terlaksananya Bintek Admin dan koordinasi PPID se provinsi jambi	100	%	195.958.500	90,23	262.586.991	80,53	99.940.900	#REF!						
	Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Kemasyarakatan, Media dan Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik Provinsi Jambi	Terbentuknya forum Bakohumas dan pemberdayaan KIM	100	%	176.165.000	98,78	262.586.991	96,57	62.713.500	#REF!						
									Rata-rata capaian kinerja (%)	#REF!		127,08	649.756.652			
									Predikat kinerja	#REF!						
	Program pembangunan, Pengembangan Aplikasi dan Telematika				615.392.000		1.054.510.425		333.545.250		299.117.500,00		1.353.627.925,00	215,84	195,09	
	Kegiatan Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Website	Terpenuhnya Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Ke Seluruh OPD	43	OPD	369.820.000	97	671.505.591	94,28	298.853.250	71,26050376	278.009.500	168	949.515.091	391	257	DISKOMINFO
	Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Aparatur di Bidang TIK	Terciptanya Pemahaman dan Pemanfaatan Domain dan subdomain di seluruh OPD Provinsi Jambi	100	%	112.806.000	89,9	179.302.479	94,28	5.496.000	33,3333333	1.832.000	123	181.134.479	123	161	
	Kegiatan Pemberdayaan TIK	Terpenuhnya Pemahaman Aparatur TIK Seluruh OPD tentang Aplikasi dan Website	100	%	132.766.000	94,77	203.702.355	96,26	29.196.000	38,1083587	19.276.000	133	222.978.355	133	168	
									Rata-rata capaian kinerja (%)	47,57		141,47	451.209.308			
									Predikat kinerja	SR						
	Program Persandian Untuk Pengamanan Informasi				142.368.384		289.313.774		297.606.384		146.439.260		435.753.034	160	268	
	Kegiatan Penyelenggaraan Operasional Persandian untuk Pengamanan Informasi Milik Pemerintah Daerah	Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan persandian untuk pengamanan informasi milik pemerintah daerah	100	%	142.368.384	98,63	289.313.774	100	142.368.384	61,8183587	92.052.410	160	381.366.184	160	268	
	Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Keamanan Informasi	Terwujudnya fungsi monitoring, evaluasi dan audit keamanan informasi	0	0	-	0	-	100	155.238.000	43,6083587	54.386.850	44	54.386.850			
									Rata-rata capaian kinerja (%)	52,71		102,03	217.876.517			
									Predikat kinerja	R						

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Program Pengembangan Data dan Informasi Statistik Daerah				337.132.500		468.923.677		337.132.500		77.660.300		546.583.977	121	161	
	Kegiatan Diseminasi Layanan dan Publikasi Data Statistik Sektoral	Terlaksananya diseminasi layanan dan publikasi data statistik sektoral	100	%	159.564.500	99	179.609.903	100	159.564.500	23,7290502	41.789.300	123	221.399.203	122,92	138,75	
	Kegiatan Pengumpulan,Pengolah dan Analisis Data Statistik Sektoral	Terlaksananya informasi data statistik sektoral	100	%	177.568.000	99,59	289.313.774	100	177.568.000	18,6668102	35.871.000	118	325.184.774	118,26	183,13	
Rata-rata capaian kinerja (%)										21,2		120,59	273.291.989			
Predikat kinerja										SR						

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah																
01.00	Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional SKPD			11.050.423.394		3.458.518.690		1.429.049.751		1.521.249.531		4.979.768.221	137	51	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Lancarnya Laporan Keuangan	100		518.117.431	26,61	137.862.000	100	2.355.120	100	2.355.000	126,61	140.217.000	127	27	DISKOP
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Lancarnya Komunikasi, Sumber Daya dan Listrik	100		1.531.394.273	34,73	531.865.175	100	360.855.150	100	299.274.218	134,73	831.139.393	135	54	DISKOP
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Keamanan dan Kelancaran Dalam Melaksanakan Tugas	100		17.745.903	31,5	5.590.000	100	2.861.000	100	1.800.000	131,5	7.390.000	132	42	DISKOP
	Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan	Lancarnya Pelaksanaan Tugas Administarsi Keuangan	100		1.419.409.910	56,31	799.206.100	100	479.793.000	100	479.793.000	156,31	1.278.999.100	156	90	DISKOP
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Lancarnya Kinerja Pelayanan & Administrasi Rutin Kantor	100		918.060.373	34,43	316.049.180	100	65.480.450	100	65.480.450	134,43	381.529.630	134	42	DISKOP
	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan Tugas Aparat Dinas Koperasi, UMKM	100		318.967.902	35,54	113.359.400	100	62.355.500	100	62.346.300	135,54	175.705.700	136	55	DISKOP
	Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Meningkatnya Kondisi Kenyamanan Kerja Dinas Koperasi, UMKM	100		617.339.000	54,34	335.444.700	100	33.063.850	100	33.063.790	154,34	368.508.490	154	60	DISKOP
	Penyediaan peralatan dan Kebersihan kantor	Terjaganya Kebersihan Kantor	100		711.463.343	43,86	312.061.710	100	107.843.921	100	107.790.629	143,86	419.852.339	144	59	DISKOP
	Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan	Meningkatnya wawasan dan Pengetahuan Aparatur Dinas Koperasi, UMKM	100		37.034.928	31,82	11.783.000	100	1.761.760	100	1.740.000	131,82	13.523.000	132	37	DISKOP
	Penyediaan Makanan dan minuman	Lancarnya Pelaksanaan Rapat-Rapat Dinas	100		192.890.250	42,06	81.124.500	100	35.850.000	100	50.850.000	142,06	131.974.500	142	68	DISKOP
	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasike dalam dan luar daerah	Meningkatnya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	100		4.768.000.081	17,08	814.172.925	100	276.830.000	100	416.756.144	117,08	1.230.929.069	117	26	DISKOP
									Rata-rata capaian kinerja (%)	100		137,11	452.706.202			
									Predikat kinerja	ST						
02.00	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Apratur	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kerja Sesuai Standar Daerah					6.026.714.943		902.034.364		1.061.031.000		7.087.745.943	60	28	
	Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor	Kenyamanan, Kelancaran Bekerja dan Pemeliharaan Kantor	100		2.911.868.000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pengadaan Kendaraan Dinas	kelancaran pelaksanaan tugas	100		1.500.000.000	0		-	-	-	-	-	-	-	-	
	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kenyamanan, Kelancaran Bekerja dan Pemeliharaan Kantor	100		3.852.241.561	31,21	1.202.394.600	-	-	-	-	31,21	1.202.394.600	31,21	31,21	
	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya peralatan kantor	100		703.618.440	35,41	249.139.000	-	-	-	-	35,41	249.139.000	35,41	35,41	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengadaan komputer	kelancaran pelaksanaan tugas	100		1.610.005.463	20,84	335.505.500	-	-	-	-	20,84	335.505.500	20,84	20,84	
	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Meningkatnya Kinerja Apratur	100		1.001.930.100	45,52	456.075.650	100	111.300.000	100	110.600.000	145,52	566.675.650	145,52	56,56	
	Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan Dinas/operasional	Meningkatnya Kenyamanan dan Kelancaran Kerja	100		2.314.143.415	36,39	842.003.893	100	184.488.564	100	302.500.000	136,39	1.144.503.893	136,39	49,46	
	Pengadaan Peralatan gedung kantor	Meningkatnya Kenyamanan dan Kelancaran Kerja	100		1.660.000.000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	Meningkatnya Kelancaran dan Kenyamanan Kerja	100		1.055.261.021	28,57	301.476.300	100	104.585.000	100	129.585.000	128,57	431.061.300	128,57	40,85	
	Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat rumah dinas	Meningkatnya Kelancaran dan Kenyamanan Kerja	100		600.000.000	24,95	149.680.000	-	-	-	-	24,95	149.680.000	24,95	24,95	
	Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Meningkatnya Kinerja	100		5.875.000.000	42,39	2.490.440.000	100	501.660.800	100	518.346.000	142,39	3.008.786.000	142,39	51,21	
									Rata-rata capaian kinerja (%)	36,36		60,48	644.340.540			
									Predikat kinerja	SR						
03.00	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Disiplin Aparatur			354.958.060		249.025.000		71.500.000		-		249.025.000	163	70	
	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Perlengkapannya	Terciptanya keseragaman dan kenyamanan dalam bekerja	100		354.958.060	70,16	249.025.000	100	71.500.000	93	-	163,07	249.025.000	163	70	
									Rata-rata capaian kinerja (%)	92,92		163,07	249.025.000			
									Predikat kinerja	ST						
04.00	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya SDM Aparatur			940.314.729		260.921.400		12.500.000		10.350.000		271.271.400	128	29	
	Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal	Meningkatnya Wawasan & Pengetahuan Aparatur	100		940.314.729,00	27,7	260.921.400	100	12.500.000	100	10.350.000	127,748305	271.271.400	128	29	
									Rata-rata capaian kinerja (%)	100		127,75	271.271.400			
									Predikat kinerja	ST						
	Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan				750.000.000,00		-		40.518.740		38.918.740		38.918.740	100	5	
	Nilai Sakip	Meningkatnya Wawasan & Pengetahuan Aparatur	100		750.000.000,00	-	-	100	40.518.740	100	38.918.740	100	38.918.740	100	5	
									Rata-rata capaian kinerja (%)	100		100	38.918.740			
									Predikat kinerja	ST						
05.00	Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan	1. Persentase Pertumbuhan UMKM 2. Persentase Pengembangan UMKM			14.762.400.000		3.607.829.893		2.646.590.600		-		3.037.993.322			
	Pengembangan UKM Melalui Pemberdayaan Mayarakat di KTM		100		605.275.400	-	-	-	-	0	-	0	-	-	-	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penguatan Ekonomi Lokal	Meningkatnya Keterampilan dan SDM UMKM	100		1.676.332.200	33	548.918.200	100	104.688.000	0	-	32,75	548.918.200	33	33	
		Meningkatnya Kesadaran UMKM untuk mengurus izin Usaha														
	Pemberdayaan dan Pengembangan KSP/USP Koperasi	Tumbuh dan berkembangnya KSP/USP Koperasi berwawasan Gender	100		1.830.697.000	48,19	882.166.800	100	53.095.750	0	-	48,19	882.166.800	48	48	
		Terakomodirnya Kebutuhan Permodalan bagi KSP/USP Koperasi dalam mengakses Sumber Pembiayaan														
		Meningkatnya Keterampilan Pengelola dan Pengawa Internal KSP/USP Koperasi								-	-	-	-			
	Sosialisasi Pembiayaan Bagi KUMKM dan LKM	Terfasilitasinya Penerbitan Sertikat PMK di Kabupaten/Kota	100		1.591.701.800	35,8	569.836.571	100	56.279.850	0	-					
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Koperasi dan UMKM	Termonitor dan terevaluasinya Kinerja KUMKM	100		1.521.693.600	39,85	606.338.600	100	32.527.000	0	-	39,85	606.338.600	40	40	
	Sosialisasi Pengembangan, penguatan dan perlindungan koperasi		100		1.481.087.200	0		0	-							
	Pelatihan Pengelolaan koperasi usaha mikro kecil	Meningkatnya kinerja pengawas/pengurus/ pengelola koperasi Berkembangnya wawasan dalam meningkatkan kinerja koperasiMeningkatnya SDM Pengurus/pengelola koperasi dalam menyusun laporan keuanganMeningkatnya tertib administrasi organisasi dan usaha koperasi	100		6.055.612.800	16,52	1.000.569.722	100	2.400.000.000	0	-	16,52	1.000.569.722	17	17	
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-		27,46	607.598.664,40			
										Predikat kinerja	SR						
06.00	Program Peningkatan Daya Saing Koperasi Dan UMKM	Persentase Produk yang Memenuhi Standard			24.189.357.650	32,88	6.127.264.245	100	283.655.310		1.083.870.100		7.211.134.345	66	26	
	Pengembangan Produk Unggulan	Berkembangnya Desain serta terciptanya Diversifikasi Produk	100		3.115.420.000	32,88	1.024.204.454	100	70.589.800	100	569.696.800	132,88	1.593.901.254	133	51	DISKOP
	Pengembangan UMKM melalui Peningkatan Teknologi	UMKM dapat memanfaatkan teknologi dalam mengembangkan usaha	100		3.148.724.150	17,85	562.093.424	-	-	-	-	17,85	562.093.424	18	18	DISKOP

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Bimbingan Teknis Pengelola Koperasi, Usaha mikro dan Kecil	Meningkatnya SDM dan Daya Saing KUMKM	100		3.439.776.000	72,16	2.482.295.000	-	-	-	-	72,16	2.482.295.000	72	72	DISKOP
	Sosialisasi HKI dan Lebel Halal Bagi KUKM	Pengurusan HKI dan label Halal	100		2.449.833.500	12,46	305.222.100	-	-	-	-	12,46	305.222.100	12	12	DISKOP
	Pengembangan Kemitraan	Meningkatnya Jumlah UMKM yang melaksanakan Program kemitraan	100		1.895.250.000	21,7	411.297.500	100	105.362.000	100	288.869.000	121,7	700.166.500	122	37	DISKOP
	Bimbingan Teknis KUKM	Meningkatnya SDM dan Daya Saing KUMKM	100		1.530.000.000	15,68	239.967.900	100	31.567.000	100	28.511.000	115,68	268.478.900	116	18	DISKOP
	Pendamping Penerapan Teknologi tepat guna	UMKM dapat memanfaatkan teknologi dalam mengembangkan usaha	100		1.530.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DISKOP
	Pemberdayaan KUKM melalui Pendekatan OVOP	Produk Unggulan dalam satu wilayah	100		1.316.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DISKOP
	Penyelenggaraan Promosi Produk UMKM Tingkat Nasional, Regonal dan Luar Negeri	Meningkatnya jaringan pemasaran produk UMKM dan Pendapatan UMKM	100		5.764.354.000	19,12	1.102.183.867	100	76.136.510	100	196.793.300	119,12	1.298.977.167	119	23	DISKOP
									Rata-rata capaian kinerja (%)	44,44		65,76	801.237.149,44			
									Predikat kinerja	SR						
07.00	Program Peningkatan Penguatan Kelembagaan Koperasi	Persentase Koperasi Berkualitas			11.986.820.000		6.493.446.860		726.320.400		680.640.050		7.174.086.910	117	41	
	Kegiatan Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan Koperasi	Meningkatnya peran dan Pemahaman Perkoperasian bagi Pembina dan Gerakan Koperasi, UMKM dan Pemerhati Koperasi	100		4.465.346.000	104	4.654.945.840	100	238.596.000	100	194.278.150	204	4.849.223.990	204	109	DISKOP
		Meningkatnya Peran Kelembagaan Koperasi bagi Pembina dan Gerakan Koperasi/Instansi Terkait														
		Terlaksananya Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi bagi Koperasi Berkualitas														
	Kegiatan Pemberdayaan dan Penguatan Usaha Koperasi	Meningkatnya Peran Pengurus / Pengelola Koperasi dalam meningkatkan kinerjanya	100		2.675.613.000	51,55	1.379.356.500	100	103.474.400	100	103.168.500	151,552 915	1.482.525.000	152	55	DISKOP
		Meningkatnya Partisipasi Anggota Koperasi														
		Meningkatnya dan berkembangnya Manajemen Usaha Koperasi														
		Meningkatnya Sumber Daya Manusia Pengurus / Pengelola Koperasi														

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Menguatnya Kualitas Usaha Koperasi														
		Meningkatnya Usaha Koperasi dalam rangka mendukung Usaha Ketahanan Pangan														
	Kegiatan Bimbingan Teknis KSP/USP koperasi		100		1.844.147.720	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DISKOP
	Pengawasan dan pemeriksaan koperasi	Meningkatkan kualitas kelembagaan dan usaha koperasi	100		997.300.000	22,81	227.478.800	100	110.000.000	100	109.995.600	122,81	337.474.400	123	34	DISKOP
	Penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi	Meningkatnya kesehatan usaha simpan pinjam koperasi	100		1.093.525.280	9,68	105.897.620	100	174.250.000	100	173.197.800	109,68	279.095.420	110	26	
	Penerapan Kepatuhan Perundang-undangan perkoperasian	Tumbuh dan berkembangnya Koperasi / Usp Koperasi di Kabupaten/Kota	100		910.888.000	13,81	125.768.100	100	100.000.000	100	100.000.000	113,81	225.768.100	114	25	DISKOP
									Rata-rata capaian kinerja (%)	83,33		117,02	1.195.681.152			
									Predikat kinerja	T						

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP																
1	Program peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran			1.821.478.900		1.115.916.000		1.655.582.000		1.019.432.000		2.135.348.000	150	1.274	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah surat keluar pertahun	100		339.900	1	35.000.000,00	0	-	-	-	1	35.000.000	1	10.297	
	Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening air, listrik, telepon, dan internet yang dibayar	100	Bulan	465.850.000	12	198.063.000	12	423.500.000	12	204.566.000,00	24	402.629.000	24	86	
	Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Pengelola keuangan	100	Bulan	266.200.000	12	154.644.000	12	242.000.000	12	222.062.000,00	24	376.706.000	24	142	
	Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor	Periode pemakaian jasa kebersihan kantor	100	Bulan	80.525.000	12	54.977.000	12	73.205.000	12	182.832.000,00	24	237.809.000	24	295	
	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis ATK yang tersedia	100	Jenis	107.145.000	45	70.000.000	45	97.405.000	69	92.515.000,00	114	162.515.000	114	152	
	Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	100	item	22.959.000	5	13.257.000	5	20.872.000	2	28.448.000,00	7	41.705.000	7	182	
	Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100	Jenis	66.550.000	15	25.282.000	15	60.500.000	18	20.756.000,00	33	46.038.000	33	69	
	Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman	Periode penyediaan makanan dan minuman	100	Orang/Kali	79.860.000	580	47.689.000	600	72.600.000	400	72.234.000,00	980	119.923.000	980	150	
	Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar daerah	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	100	Orang/Hari	732.050.000	75	517.004.000	80	665.500.000	70	196.019.000,00	145	713.023.000	145	97	
									Rata-rata capaian kinerja (%)	66,11		150,22	237.260.889			
									Predikat kinerja	R						
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasaranan aparatur	100%		6.942.816.000		1.628.464.000		1.813.033.000		882.000.000,00		2.510.464.000,00	1.379,60	58,7	
	Kegiatan Perlengkapan gedung kantor						33.199.000			0	33.150.000,00	0,00%	66.349.000,00	#DIV/0!		
	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	100%		-	100	250.000.000	-	-	-	-	100	250.000.000	10.000		
	Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Jenis pengadaan peralatan gedung kantor	100%	Jenis	1.018.377.000	8	174.150.000	3	885.546.000	-	386.236.000	8	560.386.000	800	55	
	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	100%	Unit	804.722.000	1	100.360.000	-	-	-	-	0,98	100.360.000	98	12	
	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	100%	Unit	399.685.000	6	254.475.000	3	347.553.000	20	297.029.000	26	551.504.000	2.600	138	
	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	100%	persen	178.848.000	24	53.777.000	24	201.502.000	5	56.450.000	29	110.227.000	2.900	62	
	Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Rehabilitasi sedang/Berat gedung Kantor	100%	persen	4.541.184.000	5	1.045.702.000	-	378.432.000	-	142.285.000	5	1.187.987.000	500	26	
									Rata-rata capaian kinerja (%)	4,17		28,16	460.077.333			
									Predikat kinerja	SR						

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase PNS yang disiplin			216.537.000		58.814.000		188.293.000		60.500.000		119.314.000	14.400	55	
	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	100%	steel	216.537.000	72	58.814.000	72	188.293.000	72	60.500.000	144	119.314.000	14.400	55	
									Rata-rata capaian kinerja (%)	72		144	119.314.000			
									Predikat kinerja	S						
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan Sumber Daya Aparatur	100%		80.000.000		79.725.000	100%	80.000.000		16.989.000,00		96.714.000,00	5.000	121	
	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Aparatur yang mengikuti diklat/kursus	100%		80.000.000	30	79.725.000	30	80.000.000	20	16.989.000,00	50	96.714.000	5.000	121	
									Rata-rata capaian kinerja (%)	20		50	96.714.000			
									Predikat kinerja	SR						
5	Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai SAKIP			4.886.212.000		324.489.800		246.201.000		0		108.861.000,00	-	3	
	Kegiatan Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan pengganggaran	1	dok	3.200.617.000	5	108.861.000	5	246.201.000	4	-		108.861.000	-	3	
	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi program,kegiatan SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan pengganggaran	1	persen	1.685.595.000	98	215.628.800	-	-	0	-					
									Rata-rata capaian kinerja (%)	2		#DIV/0!	108.861.000			
									Predikat kinerja	SR						
6	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Persentase pertumbuhan realisasi investasi	180%		37.806.680.000		3.043.545.700		2.827.332.230		600.855.000		3.054.552.701			
		IKM PTSP														
	Kegiatan Peningkatan Kerjasama Strategis (Kemitraan)	Jumlah peserta yang akan dimitrakan	100	kali	6.591.797.000	2	139.715.000	2	21.896.400	15	21.896.000	0	-	-	-	
	Kegiatan Temu usaha dan promosi investasi luar negeri	Jumlah Promosi Investasi dan temu usaha luar negeri yang diikuti	100	kali	1.140.480.000	3	216.360.000	3	23.746.700	0	25.739.000	3	242.099.000	3	21	
	Kegiatan Temu usaha dan promosi investasi dalam negeri	Jumlah promosi investasi dan temu usaha dalam negeri yang diikuti	100	kali	9.457.019.000	10	290.537.000	10	57.141.130	1	60.083.000	11	350.620.000	11	4	
	Kegiatan Penyusunan pemetaan investasi Provinsi Jambi	Jumlah Dokumen pemetaan investasi Provinsi Jambi	100		-	-	226.921.000	1	10.633.500	0	11.237.000	0	238.158.000	-		
	Kegiatan Harmonisasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal	Terselenggaranaya rapat harmonisasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal	100	kali	3.194.899.000	1	240.574.000	1	37.793.500	0	49.570.000	1	290.144.000	1	9	
	Kegiatan Koordinasi Pembinaan Perizinan PM dan PTSP di Provinsi Jambi	Jumlah rakor forum PTSP	100	Dokumen	2.536.059.000	2	194.895.000	2	220.527.000	1	14.867.000,00	3	209.762.000,00	3	8	
	Kegiatan Survey Indeks Kepuasan Konsumen	Nilai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan	100	kriteria A	242.000.000	100	190.390.000	100	220.000.000	100	76.309.000,00	200	266.699.000,00	200	110	
	Kegiatan Pemantauan Sinkronisasi dan Implementasi Perizinan	Jumlah Perizinan dan non perizinan yang diterbitkan	100	Dokumen	3.025.000.000	1	262.990.000	11	275.000.000	5	59.583.000,00	6	322.573.000,00	6	11	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Kegiatan Advokasi permasalahan Penanaman Modal	Jumlah Kasus/permasalahan / pengaduan	100	Kasus	3.630.000.000	100	104.635.000	10	330.000.000	6	47.034.000,00	106	-	106	-	
	Kegiatan Forum Komunikasi Penanaman Modal	Jumlah perusahaan penanaman Modal	100	Orang	302.500.000	100	205.488.000	100	275.000.000	150	71.080.000,00	250	1	250	0	
	Kegiatan Percepatan Penyelesaian Pelayanan Perizinan	Jumlah perizinan yang diterbitkan	100	Perizinan dan Non Perizinan	580.800.000	450	464.198.000	518	528.000.000	300	103.064.000,00	750	567.262.000,00	750	98	
	Kegiatan Pembinaan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yang dibina, BIMTEK dan BIMSOS	100	orang	702.473.000	0,9715	161.112.700	0	0	0	-	0,97	161.112.700,00	1	23	
	Kegiatan Peningkatan Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Jumlah proyek penanaman modal yang mendapatkan pengawasan	100	orang bintek	765.153.000	100	194.133.000	100	695.594.000	15	30.271.000,00	115	224.404.000,00	115	29	
	kegiatan forum mediasi konflik perusahaan PMA/PMDN	Jumlah rapat forum mediasi	100	6 kali	242.000.000	6	112.997.000	66	22.000.000	25	11.154.000,00	31	124.151.000,00	31	51	
	Kegiatan fasilitasi penyusunan kebijakan perizinan	Jumlah peraturan kebijakan yang terbentuk	100	Peraturan	5.396.500.000	1	38.600.000	1	110.000.000	1	18.968.000,00	2	57.568.000,00	2	1	
Rata-rata capaian kinerja (%)										60,3		146,4	193.353.170			
Predikat kinerja										R						

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Dinas Kepemudaan dan Olahraga																
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran dengan lancar			2.675.080.262		2.762.639.747		3.015.092.040		2.527.127.366		5.289.767.113	158	188	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Periode pembayaran rekening	100	persen	699.343.112	70,56	898.623.290	12	909.799.320	60,61	551.464.657	131,17	1.450.087.947	131	207	Diskepora
	Kegiatan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah tenaga administrasi keuangan	100	persen	263.496.000	70,56	259.464.000	45	182.278.800	96,52	175.930.800	167,08	435.394.800	167	165	Diskepora
	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Periode pemakaian jasa kebersihan kantor	100	persen	1.125.114.000	70,56	1.102.915.000	12	1.216.284.000	97,35	1.184.092.250	167,91	2.287.007.250	168	203	Diskepora
	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	100	persen	90.750.000	70,56	47.180.000	83	84.750.000	63,83	60.475.000	134,39	107.655.000	134	119	Diskepora
	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK	100	persen	102.886.000	70,56	102.208.000	5	102.573.950	99,96	93.297.100	170,52	195.505.100	171	190	Diskepora
	Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	100	persen	80.474.750	70,56	61.538.750	7	76.619.500	93,46	58.381.300	164,02	119.920.050	164	149	Diskepora
	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	100	persen	45.850.000	70,56	40.253.000	2	99.142.080	98,65	138.037.000	169,21	178.290.000	169	389	Diskepora
	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100	persen	3.816.000	70,56	2.200.000	1728	3.963.960	100	3.423.000	170,56	5.623.000	171	147	Diskepora
	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah peserta rapat/tamu/dll	100	persen	55.000.000	70,56	25.577.000	3300	54.400.000	67,03	26.744.100	137,59	52.321.100	138	95	Diskepora
	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	100	persen	208.350.400	70,56	222.680.707	504	285.280.430	94,88	235.282.159	165,44	457.962.866	165	220	Diskepora
									Rata-rata capaian kinerja (%)	87,23		157,79	528.976.711			
									Predikat kinerja	T						
II	Program peningkatan sarana dan prasarana dan disiplin aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur			1.239.000.000		1.113.476.150		712.496.626		1.436.178.847		2.549.654.997	125	224	
	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/ operasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-			Diskepora
	Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah jenis pengadaan peralatan gedung kantor	100	persen	429.500.000	95,59	374.450.000	100	108.802.626	97,7	333.608.000	193,29	708.058.000	193	165	Diskepora
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	100	persen	263.400.000	98,42	259.250.000	100	263.400.000	117,49	606.537.000	215,91	865.787.000	216	329	Diskepora
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang terpelihara	100	persen	546.100.000	87,85	479.776.150	100	340.294.000	126,58	496.033.847	214,43	975.809.997	214	179	Diskepora
									Rata-rata capaian kinerja (%)	85,44		155,91	637.413.749			
									Predikat kinerja	T						

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
lll	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase peningkatan disiplin aparatur			93.600.000		93.440.000		97.500.000		86.229.000		179.669.000	188	192	
	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	100	persen	93.600.000	100	93.440.000	100	97.500.000	88,44	86.229.000	188,27	179.669.000	188	192	Diskepora
									Rata-rata capaian kinerja (%)	88,44		188,27	179.669.000			
									Predikat kinerja	T						
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya wawasan dan pengetahuanPNS			45.000.000		44.680.100		51.995.000		-		44.680.100	100	99	
	Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek implementasi peraturan perundang-undangan	100	Orang	45.000.000	100	44.680.100	100	51.995.000	-	-	100	44.680.100	100	99,29	Diskepora
									Rata-rata capaian kinerja (%)	-		100	44.680.100			
									Predikat kinerja	SR						
V	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai SAKIP			68.000.000		54.900.000		34.820.000		34.820.000		89.720.000	181	132	
	Kegiatan Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100	persen	68.000.000	81	54.900.000	100	34.820.000	100	34.820.000	180,74	89.720.000	180,74	131,94	Diskepora
									Rata-rata capaian kinerja (%)	100		180,74	89.720.000			
									Predikat kinerja	ST						
VI	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Persentase peningkatan peran serta kepemudaan			3.345.354.500		3.286.067.215		3.691.277.899		766.951.755		4.053.018.970			
	Kegiatan Seleksi dan Pelatihan Paskibraka Tingkat Provinsi dan Nasional	Jumlah peserta paskibraka yang memenuhi kriteria, berkualitas dan memiliki kompetensi	100	persen	2.997.197.000	97	2.915.051.275	100	3.052.889.443	79,38	595.033.875	176,64	3.510.085.150	176,64	117,11	Diskepora
	Kegiatan Bulan Bakti Pemuda	Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam pengembangan kepemudaan	100	persen	103.000.000	84	163.747.922	100	638.388.456	86,92	171.917.880	170,91	335.665.802	170,91	325,89	Diskepora
	Kegiatan Pembinaan Mental, Semangat dan wawasan Kebangsaan	Jumlah pemuda kader yang difasilitasi dalam penyadaran dan pemberdayaan pemuda	-	Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-			Diskepora
	Kegiatan Seleksi Peserta Bakti Pemuda Antar Provinsi (BPAP), Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN), dan Kapal Pemuda Nusantara (KPN), dan Jenesys	Jumlah pemuda kader terbaik yang difasilitasi melalui program BPAP/JPI dalam rangka pengembangan pemuda	-		-		-	-		-	-	-	-			Diskepora
		Jumlah pemuda kader terbaik yang difasilitasi melalui program PPAN dalam rangka pengembangan pemuda	-			-		-		-	-	-	-			Diskepora

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Jumlah pemuda kader terbaik yang difasilitasi melalui program KPN dalam rangka pengembangan pemuda	-			-		-		-	-	-	-			Diskepora
		Jumlah pemuda kader terbaik yang difasilitasi melalui program Jenesys dalam rangka pengembangan pemuda	-			-		-		-	-	-	-			Diskepora
	Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan	Jumlah lembaga kepemudaan dan kepramukaan yang diberdayakan dan difasilitasi	13	Lembaga	245.157.500	1	207.268.018	-	-	-	-	1	207.268.018	6,5	84,54	Diskepora
									Rata-rata capaian kinerja (%)	33,26		69,68	810.603.794			
									Predikat kinerja	SR						
VIII	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Persentase peningkatan penumbuhan kewirausahaan pemuda			679.555.676		599.151.700		785.766.600		516.424.627		1.115.576.327			
	Kegiatan pelatihan kewirausahaan bagi pemuda	Jumlah peserta pelatihan kewirausahaan pemuda	45	Orang		-		45		-	-	-	-	-		Diskepora
	Kegiatan Pelatihan dan pengembangan karakter dan jiwa wirausaha muda	Jumlah kelompok pemuda terbaik yang difasilitasi melalui KWP dalam rangka pemberdayaan pemuda	100	persen	166.350.338	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	Diskepora
	Kegiatan Seleksi Peserta Bakti Pemuda Antar Provinsi (BPAP), Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN), dan Kapal Pemuda Nusantara (KPN), dan Jenesys	Jumlah pemuda kader terbaik yang difasilitasi melalui program BPAP/JPI dalam rangka pengembangan pemuda	100	persen	346.855.000	83,62	433.284.100	-	433.284.100	17,32	253.954.127	100,94	687.238.227	100,94	198,13	Diskepora
		Jumlah pemuda kader terbaik yang difasilitasi melalui program PPAN dalam rangka pengembangan pemuda	100	persen				-								
		Jumlah pemuda kader terbaik yang difasilitasi melalui program KPN dalam rangka pengembangan pemuda	100	persen				100			-					
		Jumlah pemuda kader terbaik yang difasilitasi melalui program Jenesys dalam rangka pengembangan pemuda	100	persen				100								

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan kelompok wirausaha pemuda (KWP)	Jumlah kelompok pemuda terbaik yang difasilitasi melalui KWP dalam rangka pemberdayaan pemuda	0	0	166.350.338	89,01	165.867.600	100	352.482.500	99	262.470.500	188	428.338.100		257,49	Diskepora
	Kegiatan Pengembangan Wirausaha dan Pembangunan Karakter Pemuda	Jumlah peserta kegiatan pengembangan wirausaha dan pembangunan karakter pemuda	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-			Diskepora
									Rata-rata capaian kinerja (%)	23,32		57,85	223.115.265			
									Predikat kinerja	SR						
VIII	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Peringkat pada event nasionalPON			10.487.987.120		7.541.428.754		41.781.551.363		7.269.787.492		14.811.216.246	86	546	
		Peringkat pada event nasionalPEPARNAS														
	Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan SDM Pelaku Olahraga	Jumlah pelaku olahraga yang telah dibina melalui pembudayaan olahraga	100	persen	154.495.000	87	134.444.192	-	-	-	-	87	134.444.192	87	87,02	Diskepora
	Kegiatan Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah	Peringkat pada event nasionalPEPARNAS	100	persen	175.000.000	94,06	164.603.346	100	33.769.403.938	20,84	4.740.042.342	115	4.904.645.688	114,9	2.802,65	Diskepora
			15	peringkat				13								
		Peringkat pada event nasionalPON	100	persen				100								
			15	peringkat				13								
	Kegiatan Pembinaan Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP) daerah	Jumlah atlet pelajar berprestasi PPLP dalam rangka pembinaan olahraga	100	persen	4.062.584.800	92	3.737.534.400	100	3.687.174.541	58,22	2.412.275.600	150	6.149.810.000	150,22	151,38	Diskepora
	Kegiatan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) dan Wilayah (POPWIL)	Jumlah atlet berprestasi untuk mengikuti event nasional (POPNAS)	100	persen	-	0	-	100	2.615.014.014	-	5.877.000	-	5.877.000	-		Diskepora
	Kegiatan Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS)	Peringkat POPNAS	15	peringkat	3.897.410.000	50,19	1.903.279.116	0	-	-	-	50	1.903.279.116	334,6	48,83	Diskepora
	Kegiatan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi (PEPARPEPROV)	Jumlah atlet berprestasi untuk mengikuti event nasional PEPARPENAS	100	persen	-	-	-	100	546.882.840	-	2.032.000	-	2.032.000	-		Diskepora
	Kegiatan Pekan Paralympic Pelajar Nasional (PEPARPENAS)	Peringkat PEPARPENAS	-	-	1.560.130.000	63,42	845.315.200	-	-	-	-	63	845.315.200		54,18	Diskepora
	Kegiatan Festival Olahraga Tradisional	Jumlah atlet festival olahraga tradisional yang difasilitasi dalam rangka pembudayaan olahraga	100	persen	-	-	-	100	348.587.440	-	25.190.250	-	25.190.250	-		Diskepora

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Kegiatan Olahraga Kesegaran Jasmani dan Rekreasi	Jumlah penduduk yang berpartisipasi pada kegiatan olahraga kesegaran jasmani dan rekreasi	100	persen	638.367.320	99,8	756.252.500	100	814.488.590	-	84.370.300	-	840.622.800	-	131,68	Diskepora
									Rata-rata capaian kinerja (%)	8,78		51,75	1.645.690.694			
									Predikat kinerja	SR						
X	Program peningkatan sarana dan Prasarana olahraga dan pemuda	Jumlah sarana prasarana dalam kondisi baik			4.416.865.624		3.171.248.413		3.425.223.912		4.673.555.301		7.844.803.714	105	561	
	Kegiatan pengadaan peralatan dan perlengkapan olahraga	Jumlah cabor yang diberikan bantuan peralatan dan perlengkapan olahraga	100	persen	119.456.600	71,89	85.878.200	100	1.519.519.000	24,94	1.548.470.633	96,83	1.634.348.833	96,83	1.368,15	Diskepora
	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah sarana dan prasarana baru yang dibangun	100	persen	2.822.491.024	70,47	1.989.130.213	100	570.876.956	21,45	1.299.863.868	91,92	3.288.994.081	91,92	116,53	Diskepora
	Kegiatan pemeliharaan dan rehab sarana dan prasarana olahraga	Jumlah venue yang direhab	100	persen	1.474.918.000	97,93	1.096.240.000	100	1.334.827.956	28,62	1.825.220.800	126,55	2.921.460.800	126,55	198,08	Diskepora
									Rata-rata capaian kinerja (%)	25		105,1	2.614.934.571			
									Predikat kinerja	SR						
XI	Program kebijakan dan pengembangan kepemudaan dan keolahragaan	Persentase hasil rekomendasi di bidang kepemudaan, keolahragaan, danyang terimplementasi			584.646.792		469.190.201		941.094.700		521.883.684		991.073.885	171	164	
	Kegiatan rakor program kepemudaan dan keolahragaan	Jumlah Peserta Rakor Programkepemudaan dan keolahragaan	60	orang	185.585.500	96,77	179597400	60	298.075.000	-	-	96,77	179.597.400	161,29	96,77	Diskepora
	Kegiatan koordinasi, monitoring, pengendalian, dan evaluasi kinerja kepemudaan dan keolahragaan.	Jumlah dokumen laporan monitoring dan evaluasi	100	persen	143.549.292	72,84	104566898	100	272.911.700	100	151.739.952	172,84	256.306.850	172,84	178,55	Diskepora
	Kegiatan perencanaan dan penyusunan program	Jumlah Dokumen perencanaan	100	persen	255.512.000	80,62	185025903	100	370.108.000	97,38	370.143.732	178	555.169.635	178	217,28	Diskepora
									Rata-rata capaian kinerja (%)	65,79		149,2	330.357.962			
									Predikat kinerja	R						
	Program peningkatan pengembangan tenaga organisasi kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan	Persentase organisasi kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku			499.722.270		439.675.149		806.355.140		566.232.214		1.340.089.817			Diskepora
	Kegiatan pemberdayaan dan peningkatan kapasitass organisasi kepemudaan	Jumlah organisasi kepemudaan dan kepramukaan yang diberdayakan	100	persen	362.950.270	59	214.021.400	100	428.447.020	90,78	562.108.214	149,75	776.129.614	149,75	213,84	Diskepora
		Jumlah data konkrit organisasi kepemudaan yang tersedia	1	dok				1								
		Jumlah pengurus organisasi kepemudaan yang diberdayakan	55	orang				55								

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Jumlah pemimpin organisasi kepemudaan yang telah memanfaatkan pelatihan dasar kepemimpinan	30	orang				30								
		Jumlah peserta pekan temu wicara organisasi pemuda	30	orang				30								
	Kegiatan pengembangan dan peningkatan organisasi dan SDM pelaku olahraga	Jumlah pelaku olahraga yang telah dibina melalui pembudayaan olahraga	100	persen	136.772.000	98,51	134.735.749	100	141.497.400	-	764.000	98,51	135.499.749	98,51	99,07	Diskepora
			50	orang				50								
		Jumlah peserta pembinaan manajemen organisasi olahraga	70	orang				70			764.000	-	764.000	-	#DIV/0!	
		Jumlah data konkrit organisasi keolahragaan yang tersedia	1	dok				1								
	Kegiatan pemberdayaan dan dan peningkatan kapasitas organisasi kepramukaan	Jumlah peserta rapat teknis kepramukaan	100	persen		74,13	90.918.000	100	129.803.000	-	-	74,13	90.918.000	74,13	#DIV/0!	Diskepora
			30	orang				30								
		Jumlah pemimpin kepramukaan yang telah memanfaatkan pelatihan pengembangan kepramukaan	35	orang				35								
	Kegiatan penyusunan juklak dan juknis Tenaga Organisasi Kepemudaan, Keolahragaan, dan Kepramukaan (TOK3)	Jumlah juklak dan juknis pengembangan TOK3 yang tersusun	-		-		-		106.607.720		2.596.000	-	2.596.000	#DIV/0!	#DIV/0!	
Rata-rata capaian kinerja (%)										30,26		107,46	334.182.454			
Predikat kinerja										SR						

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA																
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran					2.569.523.000	100	1.965.209.000		1.631.142.000	192	4.200.665.000	32,31		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jasa pos keperluan surat menyurat	60	Bulan		12	4.500.000	12	4.520.000	12	4.500.000	24	9.000.000	40		
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	126	Rek		12	618.000.000	12	571.730.000	12	470.387.000	24	1.088.387.000	19,05		
	Penyediaan Jasa Administrasai Keuangan	Penyediaan Jasa Administrasai Keuangan	60	Bulan		12	317.260.000	12	293.641.000	12	250.204.000	24	567.464.000	40		
	Penyedian jasa Kebersihan Kantor	Penyedian jasa Kebersihan Kantor	102	Gedung		4	313.655.000	4	369.497.000	8	367.020.000	12	680.675.000	11,76		
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	60	Bulan		12	161.796.000	12	157.237.000	10	117.348.000	22	279.144.000	36,67		
	penyedian barang cetak dan penggadaan	jumlah barang cetak dan penggadaan	60	Bulan		12	183.176.000	12	103.964.000	9	96.036.000	21	279.212.000	35		
	Penyedian Komponen Intalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Penyedian Komponen Intalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	60	Bulan		12	307.297.000	12	167.894.000	10	122.655.000	22	429.952.000	36,67		
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	60	Bulan		12	76.500.000	12	101.686.000	7	64.220.000	19	140.720.000	31,67		
	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah	60	Bulan		12	587.339.000	12	195.040.000	12	138.772.000	24	726.111.000	40		
									Rata-rata capaian kinerja (%)	10,22		21,33	466.740.556			
									Predikat kinerja	SR						
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur					1.529.361.000		1.147.753.000		1.079.284.000		2.608.645.000	#DIV/0!		
	pembangunan gedung kantor	pembangunan gedung kantor	-							-	-	-	-	#DIV/0!		
	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional	-							-	-	-	-	#DIV/0!		
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	-			50	294.590.000	50	34.979.000	30	22.060.000	80	316.650.000	#DIV/0!		
	PemeliharaanRutin/Berkala Gedung Kantor	PemeliharaanRutin/Berkala Gedung Kantor	-			4	670.941.000	4	497.700.000	4	494.590.000	8	1.165.531.000	#DIV/0!		
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-			52	438.440.000	52	502.574.000	50	455.054.000	102	893.494.000	#DIV/0!		
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	-			130	125.390.000	130	112.500.000	120	107.580.000	250	232.970.000	#DIV/0!		
									Rata-rata capaian kinerja (%)	34		73,33	434.774.167			
									Predikat kinerja	SR						
3	Program Peningkatan DisiplinAparatur	Program Peningkatan DisiplinAparatur					136.500.000		136.500.000		-		136.500.000	35		
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	jumlahPakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	1.260	Steel		220	136.500.000	220	136.500.000	220	-	440	136.500.000	34,92		
									Rata-rata capaian kinerja (%)	220		440	136.500.000			
									Predikat kinerja	FALSE						

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					72.700.000	12	26.000.000		-	16	72.700.000	9		
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	jumlahPendidikan dan Pelatihan Formal	180	Kali		12	72.700.000	12	26.000.000	4	-	16	72.700.000	9		
									Rata-rata capaian kinerja (%)	4		16	72.700.000,00			
									Predikat kinerja	SR						
5	Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					785.409.000	125	340.252.000		-	192	785.409.000	11,88		
	Rapat Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ihktisar realisasi kinerja SKPD	Rapat Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ihktisar realisasi kinerja SKPD	1.320	Peserta		110	554.925.000	110	266.460.000	55	-	165	554.925.000	12,5		
	Monitoring dan Evaluasi	Monitoring dan Evaluasi	240	Laporan		15	230.484.000	15	73.792.000	12	-	27	230.484.000	11,25		
									Rata-rata capaian kinerja (%)	33,5		96	392.704.500			
									Predikat kinerja	SR						
6	Program Pengelolaan kekayaan budaya	MeningkatnyaPengelolaan kekayaan budaya					8.103.249.000		7.822.649.000		5.462.593.000	-	13.565.842.000	-		
	Kegiatan Pengembangan Nilaidan Geografis Sejarah	Jumlah pendampingantim percepatan candi muaro jambi menuju Warisan Dunia (UNESCO)	69	kali		9		8	517.839.000	-	45.600.000	-	45.600.000	-		
		Jumlah pendampingantim percepatan GeoPark Merangin Jambimenuju Warisan Dunia (UNESCO)	66	kali		9		9			-	-	-	-		
		Jumlah cagar budaya yang teregestrasi	41	buah		6		6			-	-	-	-		
		Jumlah pendataan toponim kesejarahan	19	dok		3		3			-	-	-	-		
		Jumlah pesertaWisata sejarah	300	Peserta		50		50			-	-	-	-		
		Jumlah peserta workshop kesejarahan dan kepurbakalaan	350	Peserta		50		50			-	-	-	-		
		Jumlah bahan informasi sejarah	7	paket		1		1			-	-	-	-		
	Meningkatan Fungsi Museum Siginjei	jumlah koleksi Museum Siginjei	3.856	koleks		81	2.506.861.000	83	2.101.311.000	-	1.220.600.000	-	3.727.461.000	-		
		Jumlah pengunjung ke M.Siginjei	355.975	orang		33.546		35.223			-					
	Pelestarian Fisik dan Kandungan Bahan Pustaka Termasuk Naskah Kuno	jumlah koleksi gentala arasy	371	koleks		58	1.051.888.000	82	918.723.000	-	713.930.000	-	1.765.818.000	-		
		jumlah pengunjung gentala arasy	282.147	orang		38.559		42.415			-					

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatkan Fungsi Museum Perjuangan Rakyat Jambi	Peningkatan jumlah koleksi MPRJ	485	koleks		3	1.922.500.000	3	1.768.789.000	-	1.233.612.000	-	3.156.112.000	-		
		Jumlah pengunjung ke MPRJ	226.686	orang		21.500		22.000			-					
	Meningkatkan Fungsi Taman Budaya Jambii	Jumlah karya seni hasil Eksperimentasi	52	Karya		1	2.480.250.000	1	2.389.111.000	-	2.182.827.000	-	4.663.077.000	-		
		Jumlahkarya seni olahan	80	Karya		3		3			-					
	Fasilitasi Partisipasi Masyarakatdalam pengelolaan kekayaan budaya	Jumlah Temu Karya Taman Budaya se-Indonesia	22	kali		1	141.750.000	1	126.876.000	-	66.024.000	-	207.774.000	-		
		Jumlah Temu Karya Taman Budaya se - Sumatera	24	kali		1		1			-					
		Jumlah Buletin Seni	84	kali		10000		10000			-					
		Jumlah terdaftarnya karya budaya tak benda	45	karya		5		5			-					
									Rata-rata capaian kinerja (%)	-		-	2.260.973.666,			
									Predikat kinerja	SR						
7	Program Pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya	MeningkatnyaPengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya					1.340.650.000	148	1.594.051.000		379.887.000	75	1.720.537.000	7		
	Membangun Kemitraan Pengelolaan Kebudayaan Antar Daerah	Jumlah Organisasi Seni yang di Bina	105	organisasi		15	419.775.000	15	960.067.000	5	99.247.000	10	519.022.000	10		
		Jumlah Peserta	300	Peserta		50		50			-	50	-	17		
	Pemberian Dukungan penghargaan dan kerjasama di bidang budaya	Jumlah tokoh budaya/maestro tradisi yang diberi penghargaan	37	orang		5	70.875.000	5	-	-	-	-	70.875.000	-		
	diplomasi budaya dan misi kesenian	jumlah tampilan kesenian diluar dan dalam daerah	612	tampian		77	850.000.000	78	633.984.000	10	280.640.000	15	1.130.640.000	2		
									Rata-rata capaian kinerja (%)	5		8,33	573.512.333			
									Predikat kinerja	SR						
7	Program Pengolaan keragaman budaya	Meningkatnya Komuditas pariwisata yang berbasis keragaman budaya daerah					1.177.350.000		868.470.000		198.620.000	-	1.375.970.000	-		
	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Jumlah terkirimnya Peserta GBN	44	Peserta		4	563.100.000	4	390.605.000	-	119.236.000	-	682.336.000	-		
		jumlah Apresiasi Seni	152	Kali		23		27	-		-	-	-	-		
	kegiatan pelestarian kebudayaan Daerah	Jumlah Karya seni JambiTerdaftar Pada HAKI	70	Karya		10	472.500.000	10	363.374.000		79.384.000	-	551.884.000	-		
		Jumlah Data BaseBudaya	8	Dok		1		1	-	-	-	-	-	-		
	Fasilitasipenyelenggaraan festival budaya daerah	Jumlah Festival dan Apresiasi Karya Seni Budaya	48	Kali		8	141.750.000	8	114.491.000	-	-	-	141.750.000	-		
									Rata-rata capaian kinerja (%)	-		-	458.656.667			
									Predikat kinerja	SR						

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
8	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Meningkatkan Efektifitas Pemasaran Pariwisata					2.602.387.000		1.478.780.000		1.473.658.000	-	4.076.045.000	#DIV/0!		
	PeningkatanPemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pemasaran Pariwisata	Jumlah akses pada Website Disbudpar	231000	Akses		34.000	151.368.000	35.000	85.496.000	-	-	-	151.368.000,00	-		
		Jumlah Promosi,sosialisai dan publikasi kepariwisatan pada media informasi masyarakat	35	paket		5		5								
	Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata	Jumlah Stakeholder pariwisata yang berpartisifasi pada promosi pariwisata daerah				60	130.414.000	60	80.046.000	-	151.602.000	-	282.016.000,00	#DIV/0!		
	Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan Luar Negeri	Jumlah keikutsertaan dan pelaksanaan kegiatan promosi di luar daerah	110	Event		3	339.158.000	4	305.496.000	-	22.198.000	-	361.356.000	-		
	Promosi Pariwisata Dalam Daerah (Event Daerah)	Jumlah keikutsertaan dan pelaksanaan kegiatan promosi di dalam daerah				12	1.981.447.000	12	1.007.742.000	-	1.299.858.000	-	3.281.305.000	#DIV/0!		
		Jumlah publikasi/promosi	103.800	Eks		18.000		20.000		-	-	-	-	-		
									Rata-rata capaian kinerja (%)	-		-	1.019.011.250,0			
									Predikat kinerja	SR						
9	Program Pengembangan Kemitraan	Meningkatnya kapasitas SDM bidang kebudayaaan danpariwisata					847.469.000		534.215.000		305.968.000	-	1.153.437.000	-		
	Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata	Jumlah peserta gerakan sadar wisata dan aksi sapta pesona	850	orang		100	240.763.000	100	147.164.000	-	187.674.000	-	428.437.000	-		
	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraanpariwisata	Jumlah peserta (masyarakat/ aparatur/tokoh adat/tokoh agama/ pelaku pariwisata/ pokdarwis) pembinaan di desa wisata	480	orang		50	379.299.000	50	234.881.000	-	112.396.000	-	491.695.000	-		
		Jumlah pesertapeningkatan kompetensi pelaku pariwisata (kompepar/pokdarwis / aparatur bidang pariwisata)	185	orang		25		25			-					
		Jumlah peserta pelatihan dan pendidikan pemberdayaan masyarakat	150	orang		30		30			-					
		Jumlah desa wisata	14	desa		2		2			-					
		Jumlah pokdarwis	21	kelompok		2		2			-					

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Jumlah peserta Skema kerja sama antara pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat	250	orang		50		50			-					
		Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan jasa pariwisata tingkat dasar	400	orang		40		40			-					
		Jumlah peserta yang mengikuti sertifikasi pariwisata	2100	orang		20		30			-					
		Jumlah Usaha Jasa DTW	16	usaa jasa		3		3			-					
	pengembangan dan penguatan, informasi dan data base	Jumlah database usaha jasa pariwisata	8	dok		1	227.407.000	1	152.170.000	-	5.898.000	-	233.305.000	-		
									Rata-rata capaian kinerja (%)	-		-	384.479.000			
									Predikat kinerja	SR						
10	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Meningkatnya apresiasi nasional dan internasional terhadap kepariwisataan daerah					4.024.112.000		4.362.976.000		152.498.000	-	4.176.610.000	-		
	Pengembangan Objek pariwisata unggulan	Jumlah dokumen pengembangan paket wisata unggulan dengan jenis dan standar kepariwisataan provinsi Jambi	6	dok		1	311.850.000	1	510.320.000	-	142.998.000	-	454.848.000	-		
		Jumlah dokumen Profil DTW unggulan berbasis Audiovisual	8	dok		0		1			-					
		Jumlah pengelolaan ODTW (visitor managemen) di destinasi pariwisata	6	odtw		0		1			-					
		Jumlah ODTW unggulan baru teridentifikasi	13	odtw		0		1			-					
	Pengembangan sosialisai dan penerapan serta standarisasi	Jumlah peningkatan SDM pengelola ODTW	600	orang		80	-	80	-	-	-	-	-	-		
		Jumlah dokumen statistik kunjungan wisatawan	8	dok		1		1								
		Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	36.900	orang		5.900		7.000								
		Jumlah Kunjungan wisatawan nusantara	5.574.800	orang		929.100		930.050								
	Peningkatan Pembangunan sarana dan prasarana	jumlah sarana dan prasarana pariwisata di destinasi pariwisata	7	paket		1	3.712.262.000	1	3.852.656.000	-	9.500.000	-	3.721.762.000	-		
									Rata-rata capaian kinerja (%)	-		-	1.392.203.333			
									Predikat kinerja	SR						

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH																
01.00	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat pemenuhankebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD/OPD dalam mendukung tupoksi			1.126.364.000		5.238.393.031		904.131.948		921.858.464		6.160.251.495	343	798	BPAD
	Kegiatan: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Periode pembayaran rekening	12	bulan	29.160.000	24	595.256.391	12	211.560.000	12	171.234.414	36	766.490.805	300	2.629	BPAD
	Kegiatan: Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah tenaga administrasi keuangan	27	orang	178.066.000	60	974.018.000	24	192.370.200	24	192.370.200	84	1.166.388.200	311	655	BPAD
	Kegiatan: Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Periode pemakaian jasa kebersihan kantor	12	bulan	99.931.400	24	309.265.000	12	108.884.116	12	108.856.200	36	418.121.200	300	418	BPAD
	Kegiatan: Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK	86	jenis (ATK)	100.670.300	175	360.124.900	86	108.790.319	172	108.437.200	347	468.562.100	403	465	BPAD
	Kegiatan: Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	19	jenis cetakan dan penggada-an	60.651.000	37	286.161.000	19	33.902.536	19	33.897.800	56	320.058.800	295	528	BPAD
	Kegiatan: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	18	jenis	14.686.600	35	46.309.500	18	16.479.680	18	16.458.300	53	62.767.800	294	427	BPAD
	Kegiatan: Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	14	eks	15.480.000	28	47.999.500	14	11.806.296	14	14.610.000	42	62.609.500	300	404	BPAD
	Kegiatan: Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah peserta rapat/tamu /dll	800	orang	39.000.000	1.915	613.086.750	800	23.500.000	12	23.448.050	1.927	636.534.800	241	1.632	BPAD
	Kegiatan: Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	500	OH	498.898.700	1.457	1.637.969.990	500	158.878.801	126	214.596.300	1.583	1.852.566.290	317	371	BPAD
	Kegiatan: Penyediaan Jasa Publikasi / iklan / karangan bunga dan dokumentasi	Jumlah jasa publikasi iklan/karangan bunga dan dokumentasi	20	kali	89.820.000	73	368.202.000	20	37.960.000	61	37.950.000	134	406.152.000	670	452	BPAD
									Rata-rata capaian kinerja (%)	47		429,8	616.025.150			
									Predikat kinerja	SR						
02.00	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparat sesuai standar			856.990.000		4.117.389.706		635.893.201		1.122.171.050		5.239.560.756	498	622	
	Kegiatan: pengadaan peralatan Gedung Kantor	Jumlah jenis pengadaan peralatan gedung kantor	19	barang inventaris	208.200.000	56	1.747.570.320	7	9.641.201	66	290.700.000	122	2.038.270.320	642	979	BPAD
	Kegiatan: Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	2	Gedung	277.600.000	3	1.060.450.000	2	191.400.000	8	372.806.000	11	1.433.256.000	550	516	BPAD
	Kegiatan: Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	38	unit	294.440.000	155	1.013.188.236	38	321.852.000	38	345.704.950	193	1.358.893.186	508	462	BPAD

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Kegiatan: Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	324	unit & Peralatan/inventaris kantor	76.750.000	267	296.181.150	324	113.000.000	677	112.960.100	944	409.141.250	291	533	BPAD
									Rata-rata capaian kinerja (%)	197,25		317,5	1.309.890.189			
									Predikat kinerja	FALSE						
03.00	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur			77.000.000		241.655.000		80.625.000		80.625.000		322.280.000	290	419	
	Kegiatan: Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	145	stel	77.000.000	290	241.655.000	130	80.625.000	130	80.625.000	420	322.280.000	290	419	BPAD
									Rata-rata capaian kinerja (%)	130		420	322.280.000			
									Predikat kinerja	FALSE						
04.00	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas aparatur			30.000.000		119.621.500		-		-		119.621.500	185	399	
	Kegiatan: Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat formal	20	orang	30.000.000	37	119.621.500	0	-	-	-	37	119.621.500	185	399	BPAD
									Rata-rata capaian kinerja (%)	-		37	119.621.500			
									Predikat kinerja	SR						
05.00	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase peningkatan peaporan			386.990.000		1.124.053.700		51.440.000		51.440.000		387.438.000	52	260	
	Kegiatan: Monitoring Perpustakaan dan Kearsipan dalam Provinsi Jambi	Jumlah laporan monev	3	laporan	94.000.000	2	315.998.000	3	43.940.000	-	43.940.000	2	359.938.000	67	383	BPAD
	Kegiatan: Rapat Koordinasi Penyusunan Program/kegiatan Perpustakaan dan Arsip se-Provinsi Jambi	Jumlah laporan Rakor	1	laporan	272.990.000	3	788.055.700	1	-	-						
	Kegiatan: Penyusunan lora dan evaluasi kinerja DPAD Provinsi Jambi	Jumlah Jenis Laporan	8	jenis	20.000.000	-	20.000.000	8	7.500.000	3	7.500.000	3	27.500.000	38	138	
									Rata-rata capaian kinerja (%)	1		2,5	193.719.000			
									Predikat kinerja	SR						
	Program Pengembangan Koleksi, Layanan dan pelestarian Bahan Pustaka	Persentase peningkatan kepuasan masyarakat			794.400.000		1.597.328.210		476.453.681		621.024.281		2.218.352.491	400	282	
	Kegiatan Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar dan workshop/supervisi/penyuluhan	Jumlah Pengunjung	65.500	orang	409.082.800	153.992	941.057.950	65.500	251.528.909	45993	251.523.909	199.985	1.192.581.859	305	292	
	Kegiatan Pengembangan Koleksi Deposit, pengadaan dan pengolahan bahan perpustakaan	Jumlah judul buku	875	buku	267.800.000	1.865	320.659.760	875	201.935.000	4206	346510600	6.071	667.170.360	694	249	
	Kegiatan Pemeliharaan Pelestarian Bahan Pustaka	Jumlah pelaksanaan fumigasi	1	kali	117.517.200	2	335.610.500	1	22.989.772	0	22989772	2	358.600.272	200	305	
									Rata-rata capaian kinerja (%)	16.733,0		68.686,0	739.450.830			
									Predikat kinerja	FALSE						

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
06.00	Program Pembinaan, Pengembangan Perpustakaan dan kegemaran Membaca	Persentase pengembangan perpustakaan			502.000.000		1.596.840.490		79.275.000		79.026.000		1.675.866.490	228	328	
	Kegiatan standarisasi dan akreditasi kelembagaan perpustakaan	jumlah perpustakaan yang memenuhi standar dan terakreditasi	30	perpustakaan	59.265.000	85	188.684.800	20	24.685.000	12	24.520.000	97	213.204.800	323	360	BPAD
	Kegiatan rapat koordinasi pengembangn perpustakaan se-provinsi Jambi	jumlah laporan	1	buah	130.375.000	2	383.186.000	1	12.540.000	-	12.540.000	2	395.726.000	200	304	
	Kegiatan Pemasyarakatan Minat Baca	jumlah survey	2	kali	82.130.000	3	383.711.790	2	13.654.000	-	13.654.000	3	397.365.790	150	484	BPAD
	Kegiatan Pengembangan aparatur tenaga pengelola perpustakaan	jumlah peserta bintek	60	orang	220.832.500	160	622.646.400	30	28.396.000	-	28.312.000	160	650.958.400	267	295	BPAD
	Kegiatan: Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	Jumlah pelaksanaan penilaian	2	kali	9.397.500	2	18.611.500	2	-	2	-	4	18.611.500	200	198	BPAD
									Rata-rata capaian kinerja (%)	2,8		53,2	335.173.298			
									Predikat kinerja	SR						
07.00	Program Pembinaan dan Pengembangan dan pelestarian arsip	Persentase peningkatan Jumlah instansi yang memiliki SDM kearsipan yang baik			431.000.000		953.589.750		76.748.515		76.584.815		1.030.174.565	130	236	
	Kegiatan pengembangan aparatur tenaga pengelola kearsipan provinsi Jambi	Jumlah peserta bintek	40	orang	132.160.000	89	470.603.350	40	12.815.587	-	12.818.587	89	483.421.937	223	366	
	Kegiatan Peningkatan Mutu dan Pemeliharaan Arsip	jumlah pelaksanaan fumigasi	1	kali	94.030.000	2	278.176.400	1	22.957.928	-	22.897.328	2	301.073.728	200	320	
	Kegiatan Penyusunan SKKAD dan JRA substantif pemerintah provinsi Jambi	Jumlah orang yang mengikuti penyusunan	50	-	135.790.000	-	135.790.000	50	-	-	-	-	135.790.000	0	100	BPAD
	Kegiatan Pebinaan pengelolaan kearsipan	Jumlah OPD yang dibina	45	-	69.020.000	-	69.020.000	45	40.975.000	43	40.868.900	43	109.888.900	96	159	BPAD
									Rata-rata capaian kinerja (%)	10,75		33,5	257.543.641			
									Predikat kinerja	SR						
07.00	Program Pelayanan , Pengolahan dan Akuisisi Arsip	Persentase pengelolaan dan penataan arsip sesuai dengan peraturan dan perundanga-undangan yang berlaku			543.400.000		1.069.961.972		217.169.640		237.219.490		1.307.181.462	1.431	225	
	Kegiatan Pendataan, Penataandan penyusutan arsip	Jumlah arsip yang didata dan ditata	700	berkas	239.448.000	7.602	493.343.672	700	151.016.300	18.361	171.242.500	25.963	664.586.172	3709	278	BPAD
	Kegiatan Akuisisi dan Penelusuran Arsip	Jumlah arsip yang didapat	80	buah	176.004.500	385	448.670.800	3	40.949.600	59	40.938.600	444	489.609.400	555	278	BPAD
	Kegiatan Publikasi, mobilisasi informasi layanan earsipan	jumlah pengguna arsip yang dlayani	100	orang	127.947.500	-	127.947.500	100	25.203.740	28	25.038.390	28	152.985.890	28	120	BPAD
									Rata-rata capaian kinerja (%)	6.149,00		8.811,00	435.727.154			
									Predikat kinerja	FALSE						

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI																
	Pelayanan Administrasi Perkantoran				1.570.470.300		1.540.470.300		1.311.208.650		1.226.216.064		2.015.650.714	179,53	182,08	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat keluar masuk (bulan)	12	bulan	5.000.000	12	5.000.000	12	4.974.000	12	4.974.000	24	9.974.000	199	199	DKP
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Periode pembayaran rekening (bulan)	12	bulan	580.250.000	12	580.250.000	12	517.780.000	9	451.363.551	21	1.031.613.551	178	178	DKP
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah tenaga administrasi keuangan (orang)	35	orang	401.157.300	35	401.157.300	31	360.556.100	31	349.878.350					
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Periode pemakaian jasa kebersihan kantor (bulan)	12	bulan	40.000.000	12	40.000.000	12	33.683.210	10	33.683.210	22	73.683.210	184	184	DKP
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK (jenis)	375	jenis	60.000.000	375	60.000.000	363	47.439.040	296	47.413.296	671	107.413.296	179	179	DKP
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan (paket)	14	paket	40.000.000	14	40.000.000	12	33.493.500	12	33.486.000	26	73.486.000	184	184	DKP
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (paket)	10	paket	6.953.000	10	6.953.000	10	6.737.000	10	6.737.000	20	13.690.000	197	197	DKP
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (kali)	2	kali	7.110.000	2	7.110.000	2	6.889.000	1	6.888.000	3	13.998.000	174	197	DKP
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pelayanan makan minum (bulan)	12	bulan	50.000.000	12	50.000.000	12	36.450.000	7	29.850.000	19	79.850.000	160	160	DKP
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi (bulan)	12	bulan	380.000.000	11	350.000.000	10	263.206.800	8	261.942.657	19	611.942.657	161	161	DKP
									Rata-rata capaian kinerja (%)	39,66		91,79	223.961.190,44			
									Predikat kinerja	SR						
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				1.080.100.000		950.700.000		661.600.000		776.473.197		1.727.173.197	185	185	
	Pengadaan Mebeleur	Jumlah pengadaan mebeleur (paket)	6	paket	50.000.000	5	44.600.000	6	48.450.000	6	48.390.000	11	92.990.000	186	186	DKP
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara (bulan)	12	bulan	100.000.000	12	100.000.000	12	50.000.000	24	199.170.000	36	299.170.000	299	299	DKP
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara (bulan)	12	bulan	530.100.000	12	530.100.000	12	519.700.000	11	486.303.197	23	1.016.403.197	192	192	DKP
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara (bulan)	12	bulan	50.000.000	12	50.000.000	12	43.450.000	10	42.610.000	22	92.610.000	182	185	DKP
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang direhab sedang/berat (paket)	6	paket	350.000.000	4	226.000.000	6	-	-	-	4	226.000.000	65	65	DKP
									Rata-rata capaian kinerja (%)	10,12		19,16	345.434.639,40			
									Predikat kinerja	SR						
	Peningkatan Disiplin Aparatur				162.500.000		175.000.000		162.500.000		324.750.000		499.750.000	308	308	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya (stel)	325		162.500.000	350	175.000.000	325	162.500.000	650	324.750.000	1.000	499.750.000	308	308	DKP
									Rata-rata capaian kinerja (%)	649,5		999,5	499.750.000			
									Predikat kinerja	FALSE						
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				269.800.000		236.684.000		113.907.960		101.581.323		338.265.323	125	130	
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN ang mengikuti pendidikan dan pelatihan (orang)	50	orang	100.000.000	78	155.000.000	8	15.000.000	3	6.000.000	80	161.000.000	160	161	DKP
	Penatausahaan Kepegawaian	Jumlah pelaksanaan penatausahaan kepegawaian (kali)	1	kali	129.800.000	0	42.648.000	1	82.855.940	0	81.068.460	1	123.716.460	82	95	DKP
	Penetausahaan Kearsipan	Jumlah pelaksanaan penatausahaan kearsipan (kali)	2	kali	40.000.000	2	39.036.000	1	16.052.020	1	14.512.863	3	53.548.863	132	134	DKP
									Rata-rata capaian kinerja (%)	1,27		27,86	112.755.108			
									Predikat kinerja	SR						
	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				1.112.286.840		1.339.015.640		646.342.659		640.060.769		1.979.076.409	169	171	
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (Laporan)	9	Laporan	232.400.000	12,37	319.501.540	6,22	160.708.965,00	6	160.582.665	19	480.084.205	207	207	DKP
	Koordinasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisa Data Statistik	Jumlah laporan data statistik perikanan yang tersedia (Laporan)	12	Laporan	370.000.000	15,3	471.622.000	7,23	223.028.664,00	7	221.782.189	22	693.404.189	187	187	DKP
	Rancangan Penyusunan Program, Anggaran dan Sinkronisasi Program Kegiatan SKPD	Jumlah dokumen rancangan penyusunan program anggaran kegiatan (Dokumen)	5	Dokumen	213.699.840	5,89	251.705.100	3,39	144.965.710,00	3	144.916.793	9	396.621.893	186	186	DKP
	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Jumlah laporan monev pelaksanaan program kegiatan (Laporan)	12	Laporan	141.187.000	12	141.187.000	3,57	41.975.520,00	2	40.127.300	14	181.314.300	118	128	DKP
	Inventarisasi dan Penertiban Aset	Jumlah dokumen aset yang diinventarisir (Dokumen)	3	Dokumen	155.000.000	3	155.000.000	1,46	75.663.800,00	1	72.651.822	4	227.651.822	147	147	DKP
									Rata-rata capaian kinerja (%)	4,08		13,79	395.815.282			
									Predikat kinerja	SR						
I	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Konservasidan Pengelolaan Wilayah Pesisir				3.817.900.600		4.302.564.600		2.194.609.282		2.180.737.265		6.483.301.865	164,39	162,85	
	Pengawasan Terpadu Kelautan dan Perikanan	Jumlah pengawasan terpadu perikanan (kali)	34	kali	981.861.700	36	981.861.700	21	560.622.870	20,42	556.901.014	56,42	1.538.762.714	165,94	156,72	DKP
	Pengelolaan Ruang Laut	Jumlah dokumen Zonasi (dokumen)	1	dokumen	336.852.500	1	336.852.500	0	151.022.180	0,44	148.474.080	1,44	485.326.580	144,08	144,08	DKP
	Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Jumlah reservat meningkat (lokasi)	26	lokasi	936.847.900	39	1.421.511.900	14	518.088.440	14,32	515.863.857	53,77	1.937.375.757	206,8	206,8	DKP

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengembangan Kawasan Pesisir	Jumlah masyarakat pesisir yang terbina (orang)	100	orang	355.867.500	100	355.867.500	33	115.957.000	31,62	112.535.300	131,62	468.402.800	131,62	131,62	DKP
	Pengelolaan Instalasi Pendung Semurup Kerinci	Jumlah produksi benih ikan lokal (ekor)	375	ekor	660.659.800	375	660.659.800	309	543.942.640	307,66	542.014.242	682,66	1.202.674.042	182,04	182,04	DKP
	Pengelolaan Instalasi Thehok	Jumlah produksi benih ikan lokal (ekor)	650.000	ekor	545.811.200	650.000	545.811.200	363.192	304.976.152	363.159,83	304.948.772	1013159,83	850.759.972	155,87	155,87	DKP
									Rata-rata capaian kinerja (%)	60.589		169.014,	1.080.550.311			
									Predikat kinerja	FALSE						
II	Pengembangan Perikanan Budidaya				1.492.610.000		1.522.610.000		807.103.056	-	799.371.637		2.321.981.637	164,98	156	
	Kesehatan Ikan dan Lingkungan	Jumlah sampel hama penyakit ikan dikawasan sentra produksi (sampel)	50	sampel	412.625.000	54	442.625.000	27	223.888.928	26,94	222.294.750	80,57	664.919.750	161,14	161,14	DKP
	Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Budidaya	Jumlah usaha perikanan yang yang bersertifikasi (orang)	285	orang	552.050.000	335	552.050.000	180	295.949.240	179,2	295.302.087	514,2	847.352.087	180,42	153,49	DKP
	Pengembangan Teknologi dan Mutu Pakan Perikanan Budidaya	Jumlah jenis pakan yang beredar sesuai standar (jenis)	8	jenis	527.935.000	8	527.935.000	4	287.264.888	4,27	281.774.800	12,27	809.709.800	153,37	153,37	DKP
									Rata-rata capaian kinerja (%)	70,13		202,35	773.993.879			
									Predikat kinerja	S						
III	Pengembangan Perikanan Tangkap				2.907.785.300		3.737.735.300		1.383.722.292	-	2.393.509.494		6.131.244.794	196	187	
	Pengembangan Sarana Perikanan Tangkap	Jumlah alat tangkap (unit)	4.500	unit	1.482.564.000	4.500	1.482.564.000	2.373	781.849.208	2.285,78	753.068.842	6785,78	2.235.632.842	150,8	150,8	DKP
	Pengelolaan Usaha Penangkapan Ikan	Jumlah produksi (ton)	67.276	ton	274.714.000	67.276	274.714.000	35.889	146.548.800	34.124,18	139.342.270	101400,18	414.056.270	150,72	150,72	DKP
	Pengembangan dan Pemberdayaan Nelayan	Jumlah bimtek perikanan tangkap (kali)	4	kali	194.276.000	4	194.276.000	2	76.271.904	1,52	73.713.700	5,52	267.989.700	137,94	137,94	DKP
	Pengembangan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Pantai Kuala Tungkal	Persentase peningkatan kapal yang mendarat di PPP Kuala Tungkal (%)	35	%	775.179.800	83	1.605.129.800	15	291.166.340	69,35	1.343.883.182	152,17	2.949.012.982	434,78	380,43	DKP
	Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Pantai Kuala Tungkal	Persentase peningkatan kapal yang taat administrasi kesyahbandaran (%)	30	%	68.684.000	30	68.684.000	22	51.419.240	21,13	48.374.000	51,13	117.058.000	170,43	170,43	DKP
	Pengembangan dan Pengelolaan Instalasi PPI Nipah Panjang	Persentase peningkatan kapal yang mendarat di PPI Nipah Panjang (%)	20	%	112.367.500	20	112.367.500	6	36.466.800	6,25	35.127.500	26,25	147.495.000	131,26	131,26	DKP
									Rata-rata capaian kinerja (%)	6.084,00		18.070	1.021.874.132			
									Predikat kinerja	FALSE						
IV	Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan				3.500.477.300		4.236.877.300		1.921.283.531	-	2.280.754.329		6.517.631.629	178	182	
	Pengembangan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah dokumen informasi pemasaran (dokumen)	1	dokumen	311.250.000	1	311.250.000	0	69.891.860	0,22	69.180.100	1,22	380.430.100	122,23	122,23	DKP
	Pengembangan Unit Pengolahan Ikan (UPI)	Jumlah produksi UPI (ton)	4.800	ton	497.020.000	11.912	1.233.420.000	3.016	312.290.409	7.525,16	779.198.480	19436,98	2.012.618.480	404,94	404,94	DKP
	Promosi dan Publikasi Kelautan dan Perikanan	Jumlah promosi dan publikasi kegiatan perikanan (kali)	30	kali	1.243.058.500	30	1.243.058.500	15	608.878.800	13,95	578.073.421	43,95	1.821.131.921	146,5	146,5	DKP

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pelayanan dan Pengujian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan di UPTD PMHP	Jumlah pengujian sampel mutu hasil produk kelautan dan perikanan (sampel)	40	sampel	291.626.700	40	291.626.700	23	171.094.412	19,82	144.517.377	59,82	436.144.077	149,56	149,56	DKP
	Pengelolaan Instalsi Ikan Hias Telanaipura	Jumlah benih ikan hias (ekor)	130.000	ekor	621.122.100	130.000	621.122.100	94.250	450.315.080	45.912,82	409.327.913	175912,82	1.030.450.013	135,32	165,9	DKP
	Penerapan Mutu Hasil Perikanan di UPTD PMHP	Jumlah uji coba teknologi dan diversifikasi produk kelautan dan perikanan (kali)	10	kali	170.306.000	10	170.306.000	4	66.148.030	3,79	64.611.464	13,79	234.917.464	137,94	137,94	DKP
	Pembinaan Mutu	Jumlah dokumen SKP (dokumen)	25	dokume	278.876.000	25	278.876.000	16	184.018.940	16,09	179.534.700	41,09	458.410.700	164,38	164,38	DKP
	Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan	Jumlah ragam produk (ragam)	38	Ragam	87.218.000	38	87.218.000	26	58.646.000	24,53	56.310.874	62,53	143.528.874	164,56	164,56	DKP
									Rata-rata capaian kinerja (%)	6.689,00		24.446	814.703.953,63			
									Predikat kinerja	FALSE						

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PETERNAKAN																
	Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran	Meningkatnya Kelancaran Administrasi Surat Menyurat					3.897.327.687		4.064.840.055		2.824.062.373		6.721.390.060	194,73		
	Penyediaan jasa surat menyurat	Meningkatnya Kelancaran Administrasi Surat Menyurat	100			88	600.242.280	12	4.125.120	100	4.120.000	188	604.362.280	188		
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Lancarnya Administrasi dan kinerja kantor	100			82	981.893.807	12	1.246.605.184	99	866.537.673	181	1.848.431.480	181		
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Meningkatnya Pelayanan Jasa Kantor	100			99	21.675.000	12	26.800.000	100	26.737.300	199	48.412.300	199		
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Meningkatnya Kinerja Tenaga Administrasi Keuangan	100			99	556.670.000	12	709.721.000	94	570.352.400	193	1.127.022.400	193		
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Pemeliharaan Kantor	Terpeliharanya kenyamanan dan Kebersihan Kantor	100			93	103.356.600	12	102.329.550	100	102.222.600	193	205.579.200	193		
	Penyediaan alat tulis kantor	TerpenuhinyaPenyediaan ATK kantor	100			97	138.444.500	12	171.848.541	99	82.249.900	196	220.694.400	196		
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Lancar Administrasi perkantor	100			96	40.346.000	12	42.001.420	100	20.968.200	196	61.314.200	196		
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Lancarnya kinerja kantor	100			100	26.080.000	1	9.408.500	100	9.400.000	200	35.480.000	200		
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Meningkatnya kapasitas pejabat/petugas	100			94	20.450.000	12	21.581.560	99	10.639.000	193	31.089.000	193		
	Penyediaan makanan dan minuman	Meningkatnya kinerja petugas	100			100	86.840.000	12	86.900.000	100	43.420.000	200	130.260.000	200		
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi kegiatan	100			100	384.186.700	1	225.088.100	100	131.759.100	200	515.945.800	200		
	Rancangan Penyusunan Program, Anggaran dan Pelaporan	Frekuensi Rapat Koordinasi Musrenbangtan Tingkat Provinsi Jambi (Kali)	100			100	523.316.600	1	720.605.600	98	490.811.700	198	1.014.128.300	198		
		Jumlah Penyusunan dokumen laporan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan (Dokumen)						8								
		Jumlahdokumen perencanaan berbasis spasial yang tersusun (Dokumen)						5								
		Jumlah Dokumen manajemen perencanaan berbasis aplikasi (Dokumen)						3								
	Sinkronisasi dan Evaluasi Program Kegiatan	Frekuensi Rapat Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi (kali)	100			94	132.042.300	100	218.217.680	100	173.099.500	194	305.141.800	194		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Lamanya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan (Tahun)						2								
		Jumlah sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatanberbasis spasial(Jenis)						1								
		Jumlah sistem monitoring dan evaluasiberbasis aplikasi (Program)						1								
	Pengumpulan dan Pengolahan Data Statistik Pertanian	Frekuensi Pertemuan Petugas Data Statistik Pertanian (Kali)	100			96	281.783.900	100	298.011.800	100	154.057.000	196	435.840.900	196		
		Jumlah dokumen data statistik pertanian tanaman pangan dan hortikultura (Dokumen)														
	Apresiasi Penatausahaan Kepegawaian	pertemuan Implementasi Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa	100			98	-	100	181.596.000	97	137.688.000	195	137.688.000	195		
		Jumlah dokumen database kepegawaian (Dokumen)														
		Jumlahkelengkapan administrasi kepegawaian (Paket)														
									Rata-rata capaian kinerja (%)	98,58		195,68	286.764.450			
									Predikat kinerja	ST						
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Apratur	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kerja Sesuai Standar Daerah			-		13.514.063.738		6.004.079.255		1.830.102.500		15.344.166.238			
	Pembangunan Gedung kantor	Jumlah pengadaan krehabilitasi sedang/berat gedung kantor (%)				-	-	100	742.916.224	-	-	-	-			
	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Peningkatan Pelayanan Masyarakat	100			97	1.236.495.000	100	655.841.406	-	-	96,83	1.236.495.000,00	96,83		
	Pengadaan mebeleur	Lancarnya administrasi dan kinerja kantor	100			100	627.493.000	100	1.154.485.365	99,88	44.000.000	199,76	671.493.000,00	199,76		
	Pengadaan Peralatan DAK	Pengadaan Peralatan DAK (%)				-	-	100	130.102.500	-	-	-	-			
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin gedung kantor (%)	100			100	105.940.000	100	122.200.000	100	111.200.000	199,94	217.140.000,00	199,94		
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Meningkatnya Lancarnya administrasi dan kinerja kantor	100			94	1.356.582.905	100	1.312.402.000	98,51	970.625.500	192,9	2.327.208.405,00	192,9		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Meningkatnya FasilitasKantor Dinas	100			97	10.187.552.833	100	1.655.102.069	99,63	663.042.600	196,33	10.850.595.433,00	196,33		
	Pengadaan Komputer	Pengadaan Komputer						100	231.029.691	99,95	41.234.400	99,95	41.234.400,00			
									Rata-rata capaian kinerja (%)	62,25		123,21	1.918.020.780			
									Predikat kinerja	R						
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Disiplin Aparatur			-		218.949.500		297.593.780	-	-	-	218.949.500	97		
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas	100			97	218.949.500	100	297.593.780	-	-	97	218.949.500	97		
									Rata-rata capaian kinerja (%)	-		96,72	218.949.500			
									Predikat kinerja	SR						
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya SDM Aparatur			-		59.999.400		60.000.000	-	42.251.800	-	102.251.200	228		
	Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal	Meningkatnya Wawasan & Pengetahuan Aparatur	100			93	59.999.400	100	60.000.000	135	42.251.800	228	102.251.200	228		
									Rata-rata capaian kinerja (%)	135,21		228,27	102.251.200			
									Predikat kinerja	FALSE						
	Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan				-		93.599.300		91.411.800	-	24.590.000	-	118.189.300	163		
	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Peternakan	Tersedianya data peternakan dan kesehatan hewan dalam bentuk angka secara sistematis, dokumen perencanaan	100			93	93.599.300	100	91.411.800	70,33	24.590.000	163,39	118.189.300	163,39		
									Rata-rata capaian kinerja (%)	70,33		163,39	118.189.300			
									Predikat kinerja	S						
	Program Peningkatan Kualitas SDM Pertanian	Persentase peningkatan pengetahuan dan keterampilan SDM Pertanian (%)			-		1.828.749.852		1.356.396.840	-	502.211.981	-	2.330.961.833	#DIV/0!		
	Kegiatan Diklat Peningkatan Kompetensi SDM Pertanian	Meningkatnya Kompetensi Petani	60			90	491148438	100	342.159.960	99,89	168.883.881	189,89	660.032.319	316,49		
	Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Penyuluhan dan Kelembagaan Tani	Rapat kelembagaan (Rembuq Madya KTNA) (kali)	3			99,58	650591514	100	629.013.030	93,85	169.399.700	193,43	819.991.214	6.447,59		
		Pertemuan Kelembagaan Profesi (PERHIPTANI) (kali)														
		Penilaian kelembagaan penyuluh/petani/petugas teladan (kali)														
	Kegiatan Penyebaran Informasi dan Teknologi Penyuluhan	Persentase tersebarnya informasi dan teknologi penyuluhan (tahun)	2			96,44	330995000	100	92.574.190	100	25.368.000	196,44	356.363.000	9.821,90		
		Temu Aplikasi Teknologi bagi penyuluh THL-TB/Kontrak (kali)														

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Demplot Penyuluhan (Demplot)														
		Pengetahuan dan Keterampilan melalui demplot (demplot)														
		Meningkatkan Pengetahuan Penyuluh (Orang)														
	Kegiatan Pengembangan Programa dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh	Tersusun programa penyuluhan provinsi Jambi (buku)	100			97,83	263674900	100	210.959.140	100	85.331.700	197,83	349.006.600	197,83		
		Pertemuan Penyelenggaraan Penyuluhan Provinsi Jambi (kali)	80													
		Apresiasi kelembagaan penyuluhan petani/penyuluh dan petugas teladan (kali)														
		Pertemuan Komisi Penyuluhan Provinsi Jambi (kali)														
	Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Penyuluhan	Pembinaan dan Evaluasi Penyuluhan yang dihasilkan				99	92.340.000	100	81.690.520	99,55	53.228.700	198,55	145.568.700	#DIV/0!		
		pertemuan evaluasi penyelenggaraan penyuluhan Provinsi jambi														
		Integritas Penyuluhan dan wilayah Binaan (kab/Kota)														
		Peningkatan SDM dan tersebarnya Informasi Penyuluhan (OH)														
									Rata-rata capaian kinerja (%)	98,66		195,23	466.192.367			
									Predikat kinerja	ST						
	Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu dan Pemasaran Hasil dan Investasi Pertanian	Peningkatan Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) Tanaman Pangan dan Hortikultura (%)					387.394.000		732.393.302	-	226.066.152	0	613.460.152	599		
	Kegiatan PembinaanPengolahan dan Promosi Hasil Pertanian	Terlaksananya Fasilitasi Hak Paten Merk (paket)	20			100	345.776.000	100	676.790.302	100	208.638.152	200	554.414.152	1.000,00		
		Terlaksananya Pasar Tani (Kali)														
		Terlaksanya Promosi dalam dan luar daerah (kali)														
	Kegiatan Peningkatan, Daya Saing dan Mutu Produk Hortikultura	Meningkatnya mutu produk hortikultura	100			100	41.618.000	100	55.603.000	97,96	17.428.000	197,96	59.046.000	197,96		
									Rata-rata capaian kinerja (%)	98,98		198,98	306.730.076			
									Predikat kinerja	ST						

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan				68.800.056.000		2.188.360.904		2.117.323.280		381.062.768		2.569.423.672	1.387,00	`	
	Kegiatan Pengelolaan Sistem Pengendalian dan Pengawasan Pupuk dan Pestisida	Meningkatnya produksi pangan dengan penggunaan pupuk dan Meningkatnya produksi pangan dengan penggunaan pupuk dan pestisida dengan prinsip 6 tepat	11		6.008.288.000	99	54.433.900	100	196.283.420	94,17	71.821.168	193	126.255.068	1.755,00	2,1	
	Kegiatan Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian	Meningkatnya Koordinasi dalam Pemanfaatan Alsintan antara Petugas Provinsi dengan Petugas Kabupaten/ Kota, Tersedianya Alat dan Mesin Pertanian pada Kawasan Pangan Terpadu	11		24.449.498.000	97	1.341.561.595	100	533.980.840	88,2	118.466.600	186	1.460.028.195	1.687,00	5,97	
	Pembinaan P3A dan Tata Air Mikro (TAM)	Meningkatnya Kualitas Kelompok P3A/GP3A Berprestasi, Terpeliharanya Jaringan Irigasi tersier	11		20.431.449.500	99	210.145.913	100	202.892.740	99,72	128.450.000	198	338.595.913	1.803,84	1,66	
	Perluasan Areal dan Pengembangan Lahan Pertanian	Meningkatnya perluasan areal lahan sawah, Meningkatnya Jalan usaha tani	11		17.910.820.500	87	535.666.198	100	1.184.166.280	98,98	62.325.000	186	597.991.198	1.691,82	3,34	
	Kegiatan Fasilitasi Pembiayaan	Meningkatnya peserta asuransi pertanian/peternakan, Meningkatnya KUR	3.000				46.553.298	-	-	-	-	-	46.553.298	-	#DIV/0!	
									Rata-rata capaian kinerja (%)	76,21		152,64	513.884.734			
									Predikat kinerja	S						
	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan				39.683.000.000		6.720.998.907		6.055.756.442	-	4.723.900.343		11.444.899.250	812,9		
	Kegiatan Akselerasi Peningkatan Produksi Padi	Meningkatnya Sinkronisasi dan Koordinasi Peningkatan Produksi pangan antara Petugas Provinsi, Kabupaten dan Petani, Meningkatnya produksi padi	100		9.545.000.000	88	847.140.800	100	865.533.700	100	1.551.937.770	188	2.399.078.570	188	25	
	Kegiatan Pengembangan Sentra Jagung	Meningkatnya produksi jagung	11		2.177.000.000	90	705.406.500	100	610.496.340	100	53.514.000	190	758.920.500	1.729	35	
	Kegiatan Penguatan Kelembagaan Perbenihan Padi	Meningkatkan Jumlah Ketersediaan Benih Padi Unggul Bersertifikasi	20		2.850.000.000	97	289.232.340	100	369.636.170	88	197.949.340	185	487.181.680	925	17	
	Kegiatan Pengembangan Kawasan Sentra Sayuran Organik, Tanaman Obat dan Florikultura	Tersedianya Kawasan Sentra Sayuran di KPT	15		1.450.000.000	90	483.651.400	100	792.169.296	97	426.136.900	188	909.788.300	1.251	63	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penguatan Kelembagaan Perbenihan Hortikultura	Meningkatnya Ketersediaan Bibit Hortikultura	5.000		2.850.000.000	100	298.710.315	100	280.935.100	100	191.846.450	200	490.556.765	4	17	
	Penguatan Kelembagaan Perbenihan Palawija	Meningkatnya Ketersediaan Benih Sumber Kedelai, Meningkatnya Ketersediaan Benih Sumber Jagung, Meningkatnya Ketersediaan Benih Sumber Kacang Tanah	74		2.850.000.000	97	331.995.000	100	342.431.674	87	184.083.578	184	516.078.578	249	18	
	Kegiatan Penguatan Kelembagaan Perbenihan Kentang Kayu Aro	Meningkatnya Ketersediaan Benih Sumber G1, Meningkatnya Ketersediaan Benih Sumber G2	4.070		3.400.000.000	93	146.130.000	100	186.524.200	97	91.920.350	191	238.050.350	5	7	
	Kegiatan Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	Tersedianya Data Karakteristik Varietas Padi Hasil Uji Observasi untuk Pendaftaran/Pelepasan varietas, Tersedianya Benih Hasil Pemurnian dalam rangka Pendaftaran Varietas Mutu dan Sertifikasi Benih, Tersedianya Data Karakteristik Varietas Unggul Buah Lokal untuk Pendaftaran Varietas, Terpeliharanya Pohon Induk Tunggal	4		828.000.000	98	526.564.090	100	360.551.300	100	230.816.050	198	757.380.140	4.952	91	
	Penerapan PHT Berbasis Agens Hayati	Meningkatnya Penggunaan agens hayati, pestisida nabati untuk PHT Padi dan Cabe di Tingkat Petani, Meningkatnya Penggunaan agens hayati untuk PHT di Kawasan Pangan Terpadu di tingkat petani	21		748.000.000	100	299.246.000	100	301.185.650	100	747.612.475	200	1.046.858.475	952	140	
	Penguatan Kelembagaan POS IPAH	Menguatnya kelembagaan POS IPAH	31		613.000.000	100	210.213.800	100	192.299.278	100	157.689.000	200	367.902.800	644	60	
	Penumbuhan dan Penguatan Penakar Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	Meningkatnya produksi benih kedelai dan kentang	1.790		6.850.000.000	99	370.878.904	100	433.614.520	100	40.453.650	199	411.332.554	11	6	
	Kegiatan Pengembangan Tanaman Hias	Meningkatnya Produksi Taman Anggrek dan Kultur Jaringan	6.550		127.000.000	100	447.748.758	100	346.126.124	100	317.502.880	200	765.251.638	3	603	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Kegiatan Pembinaan Pengembangan Hortikultura	Meningkatnya Koordinasi dan Nilai TambahProduk Buah buahan, Meningkatnya Luas Tanam, Luas panen, Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Buah Buahan	100		830.000.000	94	622.798.700	100	486.876.000	100	20.312.000	194	643.110.700	194	77	
	Kegiatan Pasca Panen Hortikultura	Tersedianya Data dan Informasi alur distribusi dan biaya pemasaran, Tersedianya Data dan Informasi Farmer Share dan margin tataniaga	670		4.393.000.000	100	40.120.000	100	95.025.000	100	25.951.000	200	66.071.000	30	2	
	Kegiatan Pengembangan Kacang Kacangan dan Umbi umbian	Meningkatnya Produksi Kacang kacangan, Meningkatnya Luas Tanam Komoditi Kedelai	11		-	87	559.202.300	2.500	278.754.840	97	468.919.000	184	1.028.121.300	1.673	#DIV/0!	
	Kegiatan Pasca Panen Tanaman Pangan	Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan Petugas dan Petani, Bertambahnya Jumlah RMU	100		172.000.000	96	541.960.000	100	113.597.250	100	17.255.900	196	559.215.900	196	325	
									Rata-rata capaian kinerja (%)	97,85		193,48	715.306.203,13			
									Predikat kinerja	ST						
	Program Pengendalian Dan Pemberantasan Penyakit Hewan				-		659.441.010		786.908.410		771.519.300		1.430.960.310			
	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis	Persentase penurunan angka kematian Hewan dan Mempertahankan Status Bebas Brucelosis				99,46	659.441.010	10.800	786.908.410	95,3	771.519.300	194,76	1.430.960.310			
									Rata-rata capaian kinerja (%)	95,3		194,76	1.430.960.310			
									Predikat kinerja	ST						
	Program peningkatan produksi peternakan				-		4.608.900.702		6.209.753.708		3.575.198.183		8.184.098.885			
	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perbibitan Ternak	Tersedianya sarana di BBID Sungai Gelam (bulan)				99,46	99.584.300,00	100	205.656.500	91,48	142.343.360	190,94	241.927.660			
	Pengembangan Balai Perbibitan Ternak	Pemeliharaan ternak di UPTD Balai Perbibitan Ternak, Inseminasi Buatan (IB) (ekor)				97,67	1.189.083.900,00	100	1.756.063.508	98,41	1.311.940.763	196,08	2.501.024.663			
	Pengembangan Perbibitan dan Produksi Ternak	Peningkatan Populasi ternak Ayam, Peningkatan populasi ternak kambing				77,34	3.011.442.699,00	1000	3.987.531.500	95,22	1.976.264.000	172,56	4.987.706.699			

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengembangan Pakan Ternak	Tersedianya alat pengolah pakan ternak, Penyediaan Pakan Konsentrat, Bintek Pengolahan Pakan (kali).				99,17	308.789.803,00	100	260.502.200	100	144.650.060	199,17	453.439.863			
									Rata-rata capaian kinerja (%)	96,28		189,69	2.046.024.721			
									Predikat kinerja	ST						
	Program Pengembangan Usaha Peternakan	Meningkatnya indek Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) Sub sektor Peternakan			-		467.109.026		417.713.050		-		467.109.026			
	Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	Promosi Produk Peternakan, pembinaan usaha kelompok tani				94,49	263.496.026	100	300.042.930	-	-	94,49	263.496.026			
	Permodalan, Investasi dan Penguatan Kelembagaan Peternak	Terfasilitas akkses permodalan KUR/CSR (Kab/Kota)				94,83	203613000	100	117.670.120	-	-	94,83	203.613.000			
									Rata-rata capaian kinerja (%)	-		94,66	233.554.513			
									Predikat kinerja	SR						
	Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner				-		353.390.000		270.338.000		-		353.390.000			
	Kegiatan Peningkatan dan pengembangan Fungsi Kesmavet	Peningkatan jaminan keamanan pangan asal hewan yang beredar	500			100	353.390.000	100	270.338.000	-	-	100	353.390.000			
									Rata-rata capaian kinerja (%)	-		100	353.390.000			
									Predikat kinerja	SR						
	Program Peningkatan Fungsi Laboratorium Keswan dan Kesmavet				-		884.530.270		727.880.056		-		884.530.270			
	Kapasitas Laboratorium Keswan dan Kesmavet	Jumlah SDm Laboratorium yang ditingkatkan Kapasitasnya(orang), Pembinaan Lab. Tipe c (kab/Kota)	100			98,58	389.626.320	100	408.117.398	-	-	98,58	389.626.320			
	Monitoring, Surveilans dan Pemeriksaan	Penyediaan Bahan pemeriksaan sampel, Jumlah Pemeriksaan Keswan	100			99,82	494903950	100	319.762.658	-	-	99,82	494.903.950			
									Rata-rata capaian kinerja (%)	-		99,2	442.265.135			
									Predikat kinerja	SR						
	Program Peningkatan Pelestarian Satwa, Edukasi dan Rekreasi Masyarakat				-		2.338.556.378		2.502.686.724		-		2.338.556.378			
	Pemeliharaan dan Perawatan Satwa	Jumlah Pengunjung Kebun Binatang	100			99,35	1.075.933.000	100	1.011.354.000	-	-	99,35	1.075.933.000			
	Pengembangan Kebun Binatang	Jumlah Pengunjung Kebun Binatang	100			97,24	106.444.478	100	234.064.250	-	-	97,24	106.444.478			
	Pengembangan Pelayanan Pengunjung dan Ketatausahaan	Jumlah Pengunjung Kebun Binatang	100			98,84	1.156.178.900	12	1.257.268.474	-	-	98,84	1.156.178.900			
									Rata-rata capaian kinerja (%)	-		98,48	779.518.793			
									Predikat kinerja	SR						

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
DINAS PERKEBUNAN																
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100	Persen	8.585.236.000		5.241.975.000	100	1.058.801.000	100	1.150.953.000	542	6.392.928.000	72	91	
	Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	jasa pos keperluan surat menyurat	60	Bln	44.893.000	48	72.980.000,00	12	23.130.000	12	23.130.000	60	96.110.000	100	214,09	Dinas Perkebunan
	Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa langganan listrik, telpon dan PDAM	60	Bln	2.163.008.000	48	1.149.015.000,00	12	322.740.000	10,15	290.122.000	58,15	1.439.137.000	96,92	66,53	
	Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan	jasa pengelolaan administrasi keuangan SKPD	50	Org	1.779.574.000	48	1.188.875.000,00	12	237.270.000	12,89	283.668.000	60,89	1.472.543.000	121,78	82,75	
	Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jasa Kebersihan Kantor	60	Bln	721.003.000	48	302.503.000,00	12	63.825.000	12	63.825.000	60	366.328.000	100	50,81	
	Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor	Jasa Penyediaan alat tulis kantor	345	Set	1.190.335.000	48	608.435.000,00	12	168.426.000	11,94	167.519.000	59,94	775.954.000	17,37	65,19	
	Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jasa Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	60	Bln	135.822.000	48	108.670.000,00	12	17.450.000	12	17.450.000	60	126.120.000	100	92,86	
	Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jasa Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	19600	Eks	130.597.000	48	93.600.000,00	12	10.960.000	12	10.960.000	60	104.560.000	0,31	80,06	
	Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman	Jasa Penyediaan makanan dan minuman	925	Org	239.139.000	48	167.650.000,00	12	20.000.000	13,9	30.000.000	61,9	197.650.000	6,69	82,65	
	Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jasa Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	60	Bln	2.180.865.000	48	1.550.247.000,00	12	195.000.000	12,7	264.279.000	60,7	1.814.526.000	101,17	83,2	
									Rata-rata capaian kinerja (%)	12,18		60,18	710.325.333			
									Predikat kinerja	SR						
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100	persen	15.340.070.000		11.403.296.000	100	730.937.000	100	1.049.253.000		12.452.549.000	100	100	
	Kegiatan Pengadaan Kendaraan dinas/ Operasional	Tersedianya kendaraan Operasional Dinas	13	Unit	497.307.000	9	748.286.000	6	-	-	-	9	748.286.000	69,23	150,47	Dinas Perkebunan
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Peralatan gedung kantor	26	Unit	-	9	132.600.000	6	75.900.000	7	78.650.000	15,7	211.250.000	60,38		
	Kegiatan Pengadaan mebeleur	Pengadaan mebeleur	70	Unit	828.845.000	74	230.397.000	73	155.462.000	64	322.357.000	138,5	552.754.000	197,85	66,69	
	Kegiatan Pengadaan Komputer	Pengadaan Komputer	41	Unit	485.794.000	18	344.323.000	4	135.000.000	4	134.750.000	21,99	479.073.000	53,64	98,62	
	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas	46	Unit	2.533.087.000	39	1.422.955.000	39	248.679.000	42	302.296.000	81,24	1.725.251.000	176,6	68,11	
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan gedung kantor	27	Unit	367.303.000	31	471.407.000	4	85.896.000	3	181.500.000	33,71	652.907.000	124,83	177,76	
	Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	5	Pkt	10.627.734.000	3	4.221.150.000	1	30.000.000	1	29.700.000	3,99	4.250.850.000	79,8	40	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung yang di bangun	3	Pkt	-	1	3.792.178.000	1	-	-	-	1	3.792.178.000	33,33		
	Penambahan Daya dan Instalasi Listrik		1	Pkt	0	1	40.000.000	0	-	-	-	1	40.000.000	100		
									Rata-rata capaian kinerja (%)	13,46		34,01	1.383.616.556			
									Predikat kinerja	SR						
2	Program peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur	100	persen	448.926.000		326.810.000		107.250.000		106.903.000		433.713.000	97	97	
	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	825	Stel	448.926.000	647	326.810.000	152	107.250.000	152	106.903.000	798,51	433.713.000	96,79	96,61	Dinas Perkebunan
									Rata-rata capaian kinerja (%)	151,51		798,51	433.713.000			
									Predikat kinerja	FALSE						
2	Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparur	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100	persen	511.143.000		253.911.000		-		-		253.911.000	85	50	
	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	Pendidikan dan Pelatihan Formal	100	Org	511.143.000	85	253.911.000	-	-	-	-	85	253.911.000	85	49,68	Dinas Perkebunan
									Rata-rata capaian kinerja (%)	-		85	253.911.000			
									Predikat kinerja	SR						
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD	Peningkatan pengambangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD	100	persen	5.249.350.000		6.445.975.000		268.872.000		268.363.000		6.714.338.000	79	110	
	Penyusunan laporan keuangan dan aset	Laporan Keuangan dan Aset	250	Buku	1.105.126.000	80	331.299.000	20	80.000.000	20	80.000.000	100	411.299.000	40	37,22	
	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Terselengaranya perencanaan pembangunan perkebunan	30	Eksemp ar	2.210.253.000	24	4.935.027.000	6	123.872.000	5,06	123.363.000	29,06	5.058.390.000	96,86	228,86	
	Penyusunan Statistik Perkebunan dan Pelaporan	Tersedianya data statistik perkebunan	300	Buku	1.933.971.000	240	1.179.649.000	60	65.000.000	56,26	65.000.000	296,26	1.244.649.000	98,75	64,36	
									Rata-rata capaian kinerja (%)	27,11		141,77	2.238.112.667			
									Predikat kinerja	SR						
2	Program peningkatan Nilai Tambah Daya Saing dan Pemasaran Produk Perekebunan	Cakupan peningkatan nilai tambah daya saing dan pemasaran produk	100	persen	24.687.703.000		12.798.203.000		450.000.000		1.814.322.000		14.612.525.000	80	104	
	Kegiatan Pengawasan Tata Niaga TBS	Pengawasan Tata Niaga TBS	260	Kali	1.008.278.000	191	1.398.052.000	52	119.000.000	50	118.602.000	240,52	1.516.654.000	92,51	150,42	Dinas Perkebunan
	Kegiatan Promosi dan Pengembangan Peluang Pasar	Promosi dan Pengembangan Peluang Pasar	29	Kali	1.190.088.000	24	1.386.725.000	6	155.000.000	5	136.523.000	28,53	1.523.248.000	98,38	127,99	
	Kegiatan Sarana Peningkatan Pengolahan dan Mutu Hasil Perkebunan (Model UPPB)	Sarana Peningkatan Pengolahan dan Mutu Hasil Perkebunan (Model UPPB)	20	Poktan	1.221.329.000	16	1.037.237.000	4	62.250.000	4	59.984.000	19,85	1.097.221.000	99,27	89,84	
	Kegiatan peningkatan pengolahan hasil Perkebunan	Peningkatan Pengolahan Hasil Perkebunan	151	Paket	21.268.008.000	32	8.976.189.000	9	113.750.000	10	1.499.213.000	42,48	10.475.402.000	28,13	49,25	
									Rata-rata capaian kinerja (%)	17,1		82,85	3.653.131.250			
									Predikat kinerja	SR						
2	Program Peningkatan Produksi dan Teknologi Budidaya Perkebunan	Cakupan peningkatan produksi dan tekniligi budidaya perkebunan	100	persen	174.532.003.000		59.680.790.000		3.949.579.000		9.002.658.000		68.683.448.000	#DIV/0!	#DIV/0!	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Kegiatan Pengembangan Sarana Irigasi / TAM dan Optimasi Lahan Perkebunan	Pengembangan Sarana Irigasi / TAM dan Optimasi Lahan Perkebunan	1270	Ha	4.762.524.000	845	2.293.003.000	70	40.000.000	66	40.000.000	911,07	2.333.003.000	71,74	48,99	Dinas Perkebunan
	Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Gangguan Usaha Perkebunan (GUP)	Fasilitasi Penyelesaian Gangguan Usaha Perkebunan (GUP)	18	Konflik	632.780.000	15	627.163.000	3	91.000.000	3	83.400.000	17,75	710.563.000	98,61	112,29	
	Pembinaan, Pengamatan, Pengendalian OPT Perkebunan dan Operasional UPPT, UPTD dan LH	Pembinaan, Pengamatan, Pengendalian OPT Perkebunan dan Operasional UPPT, UPTD dan LH	54	Kab/5th	1.950.257.000	49	2.094.357.000	5	330.000.000	6	444.852.000	54,75	2.539.209.000	101,39	130,2	
	Bimbingan teknologi Perbanyakan dan Aplikasi Agens Hayati bagi petani Provinsi Jambi	Bimbingan teknologi Perbanyakan dan Aplikasi Agens Hayati bagi petani Provinsi Jambi	2100	org	919.855.000	1.950	1.136.496.000	150	100.000.000	141	100.000.000	2.090,97	1.236.496.000	99,57	134,42	
	Pembinaan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Bencana Alam, Dampak Lingkungan serta Demplot PLTB	Pembinaan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Bencana Alam, Dampak Lingkungan serta Demplot PLTB	54	Kab	2.220.848.000	45	1.219.852.000	9	150.000.000	9	144.077.000	53,64	1.363.929.000	99,34	61,41	
	Kegiatan Peningkatan pembinaan pengawasan peredaran,penyimpanan pupuk dan pestisida	Peningkatan pembinaan pengawasan peredaran,penyimpanan pupuk dan pestisida	66	Kab/5th	713.182.000	58	452.932.000	10	50.000.000	9	45.000.000	67	497.932.000	101,52	69,82	
	Kegiatan Pengembangan Kopi	Pengembangan Kopi	2.500	Ha	32.500.000.000	673	6.908.632.000	-	-	-	-	673	6.908.632.000	26,92	21,26	
	Kegiatan Pengembangan Mutu Benih Perkebunan	Meningkatnya varietas benihunggul lokal yang telah dilepas oleh Menteri	66	Kab/Kota	1.294.184.000	56	1.063.911.000	10	200.000.000	9	195.993.000	64,59	1.259.904.000	97,86	97,35	
	Kegiatan Pengembangan Kopi Rakyat	Pengembangan Kopi Rakyat	1.590	Ha	12.106.095.000	1.534	3.526.251.000	56	120.000.000	72	774.250.000	1.606,00	4.300.501.000	101,03	35,52	
	Pengembangan dan Diversifikasi Usaha Tani Tembakau	Pengembangan dan Diversifikasi Usaha Tani Tembakau	600	Ha	7.467.463.000	100	4.654.199.000	100	100.000.000	106	341.564.000	206,31	4.995.763.000	34,38	66,9	
	Road Map Pengembangan Komoditi Unggulan Perkebunan Provinsi Jambi	Updating Data Base Pemetaan Komoditi Unggulan Perkebunan	6	Buku	811.708.000	4	954.805.000	2	100.000.000	2	91.731.000	5,83	1.046.536.000	97,24	128,93	
	Kegiatan Pengembangan Kopi dan Coklat di Areal Kelapa Dalam	Kegiatan Pengembangan Kopi dan Coklat di Areal Kelapa Dalam	172	Ha	815.973.000	60	2.093.319.000	2	50.000.000	2	275.916.000	61,96	2.369.235.000	36,03	290,36	
	Kegiatan PembibitanTanaman Perkebunan	PembibitanTanaman Perkebunan	860.000	Kcb	19.582.842.000	588.648	10.835.239.000	40.000	1.468.579.000	48.777	2.199.404.000	637.424	13.034.643.000	74,12	66,56	Dinas Perkebunan
	Kegiatan Pemberdayaan Petani, Pengawalan Revitalisasi Perkebunan	Pemberdayaan Petani, Pengawalan Revitalisasi Perkebunan(Fasilitasi Kerjasama antar lembaga petani dan pelaku usaha komoditi perkebunan)	1.100	org	1.550.925.000	250	407.570.000	-	-	-	-	250	407.570.000	22,73	26,28	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Kegiatan Pembinaan Perusahaan Perkebunan Besar Dan ISPO	Pembinaan Perusahaan Perkebunan Besar Dan ISPO	198	Perus	1.259.809.000	184	1.568.855.000	14	100.000.000	12	100.000.000	196	1.668.855.000	98,99	132,47	
	Kegiatan Pengembangan Asosiasi Petani Perkebunan	Pengembangan Asosiasi Petani Perkebunan	18	Asosisi	538.872.000	7	237.861.000	-	-	1	5.395.000	7,54	243.256.000	41,89	45,14	
	Kegiatan Pengawasan Peredaran Benih dan Mutu Sumber Benih Perkebunan	Pengawasan Peredaran Benih dan Mutu Sumber Benih Perkebunan	66	Kab/kota	1.992.546.000	13	1.210.502.000	10	100.000.000	30	107.245.000	42,65	1.317.747.000	64,62	66,13	
	Kegiatan Pemberdayaan Pelaku perbenihan Tanaman Perkebunan	Pemberdayaan Penangkar Benih/Bibit Perkebunan (Peningkatan Pemberdayaan produsen benih/bibit tanaman perkebunan)	300	org	621.595.000	271	468.994.000	100	60.000.000	74	56.109.000	345,25	525.103.000	115,08	84,48	
	Kegiatan Pengembangan/ Peningkatan Jalan Usaha Tani	Terlaksananya peningkatan dan pengembangan JUT	37	Km	11.006.228.000	26	7.823.401.000	24	70.000.000	38	2.579.128.000	63,52	10.402.529.000	171,67	94,51	
	Kegiatan Pengembangan/peremajaan/Replanting Kelapa Sawit	Terlaksanana peremajaan kelapa sawit khususnya kebun plasma	195	Ha	6.027.621.000	193	3.096.749.000	-	-	-	-	193	3.096.749.000	98,97	51,38	
	Peremajaan tanaman kelapa dalam	Tersediannya pengawalan tanaman kelapa dalam	1.000	Ha	2.417.429.000	282	1.102.667.000	50	20.000.000	50	189.493.000	332	1.292.160.000	33,2	53,45	
	Rempah dan Penyegar Komoditi Perkebunan		-	0	-	17	318.559.000	20	60.000.000	22	290.989.000	38,64	609.548.000	#DIV/0!	#DIV/0!	
	Pengembangan Tanaman Lada untuk peningkatanpendapatan petani Karet	Terbangunnya Kebun Lada	13	Ha	1.416.038.000	8,5	509.356.000	-	-	-	-	8,5	509.356.000	68	35,97	
	Fasilitasi kerjasama antar lembaga petani dan pelaku usaha komoditi Perkebunan	Terrjalinya kerjasama antara lembaga petani dan pelaku usaha	1.000	Org	598.831.000	158	1.746.163.000	4	400.000.000	3	391.833.000	161,47	2.137.996.000	16,15	357,03	
	Peremajaan Tanaman Karet Rakyat		4.050	Ha	44.621.666.000	1.182	2.069.712.000	40	60.000.000	32	57.194.000	1.214,17	2.126.906.000	29,98	4,77	
	Intensifikasi Karet Rakyat	Terlaksananya Intensifikasi Karet Rakyat	2.800	Ha	8.716.849.000	-	-	40	60.000.000	36	279.246.000	36,29	279.246.000	1,3	3,2	
	Pemeliharaan Kebun Entres	Tersedianya kebun entres yang baik	75	Ha	4.695.490.000	16	503.250.000	9	160.000.000	9	156.601.000	24,8	659.851.000	33,06	14,05	
	Pembangunan Kebun Induk Pinang	terbangunnya kebun induk pinang	4	Ha	1.200.000.000	3	253.222.000	-	-	1	19.678.000	4	272.900.000	100	22,74	
	Sosialisasi Penerapan Teknologi Pembangunan Perkebunan	Terselengaranya sosialisasi Teknologi Perkebunan	800	org	485.300.000	30	165.074.000	4	60.000.000	2	33.560.000	32,09	198.634.000	4,01	40,93	
	Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Lahan dan Kebun	terselenggaranya pertemuan koordinasi kebakaran lahan dan kebun	44	Kab/Kota	1.605.093.000	22	338.696.000	-	-	-	-	22	338.696.000	50	21,1	
									Rata-rata capaian kinerja (%)	1.650,00		21.540	2.289.448.267			
									Predikat kinerja	FALSE						

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Dinas Kehutanan Provinsi Jambi																
I	Program pelayanan Administrasi Perkantoran				31.304.650.000		11.991.871.219		2.343.876.510	129,62	2.275.571.984	185,56	#VALUE!	185,56	#VALUE!	
1	Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksannya surat menyurat dengan lancar	100	%	184.652.000	100	115.354.000	100	26.500.000	99,97	26.492.000	199,97	141.846.000	199,97	76,82	Dinas Kehutanan Prov. Jambi
2	Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kelancaran pelaksanaan tugas kantor	100	%	5.851.800.000	100	1.475.333.084	100	429.000.000	95,76	382.914.751	195,76	1.858.247.835	195,76	31,76	Dinas Kehutanan Prov. Jambi
3	Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100	%	118.200.000	100	4.780.000	100	-	-	#VALUE!	100	#VALUE!	100	#VALUE!	Dinas Kehutanan Prov. Jambi
4	Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tercapainya administrasi keuangan yang baik	100	%	2.725.412.000	100	1.349.142.550	100	518.755.200	98,69	514.507.200	198,69	1.863.649.750	198,69	68,38	Dinas Kehutanan Prov. Jambi
5	Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terciptanya kenyamanan kerja	100	%	2.095.450.000	100	765.058.500	100	190.000.000	74,91	189.824.200	174,91	954.882.700	174,91	45,57	Dinas Kehutanan Prov. Jambi
6	Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor	Meningkatnya kinerja instansi	100	%	2.436.146.000	100	710.901.300	100	151.316.700	97,75	147.911.900	197,75	858.813.200	197,75	35,25	Dinas Kehutanan Prov. Jambi
7	Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Meningkatnya kinerja instansi	100	%	428.749.000	100	302.472.000	100	69.010.105	85,81	57.459.330	185,81	359.931.330	185,81	83,95	Dinas Kehutanan Prov. Jambi
8	Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	pelaksanaan aktifitas perkantoran yang baik	100	%	284.480.000	100	108.294.000	100	10.717.880	100	10.717.880	200	119.011.880	200	41,83	Dinas Kehutanan Prov. Jambi
9	Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksanannya peralatan dan perlengkapan kantor	100	%	371.580.000	100	83.940.700	100	-	-	-	100	83.940.700	100	22,59	Dinas Kehutanan Prov. Jambi
	Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Pengelolaan kegiatan peerintah semakin baik	100	%	152.000.000	100	46.104.000	100	12.000.000	66,29	10.955.100	166,29	57.059.100	166,29	37,54	
	Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman	Meningkatnya kinerja pegawai	100	%	355.000.000	100	157.949.500	100	34.000.000	79,41	24.475.000	179,41	182.424.500	179,41	51,39	
	Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan	100	%	5.951.181.000	100	2.213.134.289	100	215.000.000	93,66	231.692.500	193,66	2.444.826.789	193,66	41,08	
	Operasional rutin UPTD KPHP Unit I Kerinci	Prosentase pelaksanaan kegiatan rutin di KPHP	100	%	1.200.000.000	100	604.648.040	100	64.200.031	99,73	64.023.802	199,73	668.671.842	199,73	55,72	
	Operasional rutin UPTD KPHP Unit II dan III Bungo	Prosentase pelaksanaan kegiatan rutin di KPHP	100	%	1.300.000.000	100	635.951.417	100	69.521.438	94,61	69.520.638	194,61	705.472.055	194,61	54,27	
	Operasional rutin UPTD KPHP Unit IV, V dan VII Merangin	Prosentase pelaksanaan kegiatan rutin di KPHP	100	%	1.200.000.000	100	530.389.502	100	56.263.112	99,97	56.246.150	199,97	586.635.652	199,97	48,89	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Operasional rutin UPTD KPHP Unit VII Hulu Sarolangun	Prosentase pelaksanaan kegiatan rutin di KPHP	100	%	1.300.000.000	100	590.279.337	100	53.421.627	99,9	53.370.000	199,9	643.649.337	199,9	49,51	
	Operasional rutin UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	Prosentase pelaksanaan kegiatan rutin di KPHP	100	%	1.250.000.000	100	569.951.409	100	64.135.852	99,93	64.089.903	199,93	634.041.312	199,93	50,72	
	Operasional rutin UPTD KPHP Unit IX Tebo Barat	Prosentase pelaksanaan kegiatan rutin di KPHP	100	%	300.000.000	100	104.114.437	100	50.369.872	89,64	45.151.570	189,64	149.266.007	189,64	49,76	
	Operasional rutin UPTD KPHP Unit X Tebo Timur	Prosentase pelaksanaan kegiatan rutin di KPHP	100	%	300.000.000	100	107.711.500	100	38.937.768	99,3	38.666.050	199,3	146.377.550	199,3	48,79	
	Operasional rutin UPTD KPHP Unit XI dan XII Batanghari	Prosentase pelaksanaan kegiatan rutin di KPHP	100	%	300.000.000	100	112.244.092	100	39.442.047	92,41	39.411.136	192,41	151.655.228	192,41	50,55	
	Operasional rutin UPTD KPHP Unit XIII Muaro Jambi	Prosentase pelaksanaan kegiatan rutin di KPHP	100	%	300.000.000	100	122.667.200	100	49.811.153	97,13	49.467.400	197,13	172.134.600	197,13	57,38	
10	Operasional rutin UPTD KPHP Unit XIV Tanjung Jabung Timur	Prosentase pelaksanaan kegiatan rutin di KPHP	100	%	1.200.000.000	100	488.971.912	100	39.673.160	95,02	37.698.200	195,02	526.670.112	195,02	43,89	Dinas Kehutanan Prov. Jambi
11	Operasional rutin UPTD KPHP Unit XV,XVI dan XVII Tanjung Jabung Barat	Prosentase pelaksanaan kegiatan rutin di KPHP	100	%	220.000.000	100	108.946.000	100	44.695.807	98,89	44.199.441	198,89	153.145.441	198,89	69,61	Dinas Kehutanan Prov. Jambi
12	Operasional rutin UPTD TAHURA	Prosentase pelaksanaan kegiatan rutin di TAHURA	100	%	1.480.000.000	100	683.532.450	100	117.104.758	94,63	116.777.833	194,63	800.310.283	194,63	54,08	Dinas Kehutanan Prov. Jambi
									Rata-rata capaian kinerja (%)	85,56		185,56	#VALUE!			
									Predikat kinerja	T						
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				11.715.300.000		4.628.433.652		1.007.340.000	-	#VALUE!	-	#VALUE!	156,59	#VALUE!	
1	Kegiatan pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Pemenuhan kebutuhan kendaraan roda 4 dan roda 2	8	Unit	1.225.000.000	8	736.225.000	-	-	-	#VALUE!	8	#VALUE!	100	#VALUE!	Dinas Kehutanan Prov. Jambi
2	Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Presentase kebutuhan peralatan gedung kantor dengan baik	100	%	2.655.800.000	8	1.051.223.825	100	71.850.000	98,85	71.020.200	106,85	1.122.244.025	106,85	42,26	Dinas Kehutanan Prov. Jambi
3	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Presentase Perbaikan/ pemeliharaan gedung kantor dengan baik	100	%	2.250.000.000	100	479.680.000	100	195.490.000	99,53	194.574.633	199,53	674.254.633	199,53	29,97	Dinas Kehutanan Prov. Jambi
4	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Presentase Kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dengan baik	100	%	4.548.000.000	100	2.141.603.177	100	685.000.000	79,23	679.722.975	179,23	2.821.326.152	179,23	62,03	Dinas Kehutanan Prov. Jambi
5	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Presentase Perbaikan/ pemeliharaan peralatan gedung kantor ditempat kerja semakin baik	100	%	1.036.500.000	100	219.701.650	100	55.000.000	97,35	54.796.000	197,35	274.497.650	197,35	26,48	Dinas Kehutanan Prov. Jambi
									Rata-rata capaian kinerja (%)	74,99		138,19	#VALUE!			
									Predikat kinerja	S						

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				1.391.000.000		1.039.100.000		286.650.000	-	286.209.000	-	1.325.309.000	100	95,28	
1	Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Keseragaman dan kekompakan dalam pelaksanaan tugas	100	%	1.391.000.000	100	1.039.100.000	100	286.650.000	-	286.209.000	100	1.325.309.000	100	95,28	Dinas Kehutanan Prov. Jambi
									Rata-rata capaian kinerja (%)	43,09		108,89	#VALUE!			
									Predikat kinerja	SR						
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				1.044.500.000		299.965.602		106.261.160	89,82	119.864.236	89,82	419.829.838	183,06	54,75	
1	Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal	Kinerja Organisasi semakin baik	100	%	1.044.500.000	100	299.965.602	100	32.000.000	74,8	37.137.400	174,8	337.103.002	174,8	32,27	Dinas Kehutanan Prov. Jambi
2	Peningkatan Sumber daya pengelolaan penata keuangan dan aset	pengeloaan keuangan semakin baik	100	%	650.000.000	100	419.203.526	100	74.261.160	91,32	82.726.836	191,32	501.930.362	191,32	77,22	Dinas Kehutanan Prov. Jambi
									Rata-rata capaian kinerja (%)	83,06		183,06	419.516.682			
									Predikat kinerja	T						
V	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		100	%	3.394.041.544	100%	1.683.259.183	100%	258.035.000,00	99,81	257.555.309	100,81	1.940.814.492	75,45	56,34	Dinas Kehutanan Prov. Jambi
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja di dinas kehutanan	45	Dokumen	1.172.211.544	27	786.271.977	9	169.987.000	8	169522700	35	955.794.677	77,78	81,54	Dinas Kehutanan Prov. Jambi
2	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah dokumen perencanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan di dinas kehutanan	35	Dokumen	1.255.800.000	21	540.993.740	5	65.000.000	3	64.984.609	24	605.978.349	68,57	48,25	Dinas Kehutanan Prov. Jambi
3	Pemantapan dan Evaluasi Pelaporan Rencana Aksi Gas Rumah Kaca (PEP RAD-GRK)	Jumlah dokumen Laporan PEP RAD GRK bidang kehutanan Provinsi Jambi	5	Dokumen	966.030.000	3	355.993.466	1	23.048.000	1	23.048.000	4	379.041.466	80	39,24	Dinas Kehutanan Prov. Jambi
									Rata-rata capaian kinerja (%)	4		21	646.938.164			
									Predikat kinerja	SR						
VI	Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan		100	%	12.473.071.000	100%	5.374.936.971		777.209.000	80,37	643.804.462	81,37	6.018.741.433	112,04	56,91	Dinas Kehutanan Prov. Jambi
1	Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL)	JumlahPembangunan KPHP dan KPHL serta Cabang Dinas	11	KPHP/KPHL	750.000.000	11	439.804.001	0	-	-	-	11	439.804.001	100	58,64	Dinas Kehutanan Prov. Jambi
	Pengembangan Hutan Tanaman	Jumlah laporan pengawasan HPH, RE, HTR dan HKm	55	Lap	1.910.000.000	33	701.056.020	11	34.548.000	4	34.440.400	37	735.496.420	67,27	38,51	
	Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu	Jumlah wilayah yang memilki potensi hasil hutan bukan kayu	10	KPHP	1.704.400.000	6	507.932.440	2	26.048.000	2	25.841.506	8	533.773.946	80	31,32	
	Pendampingan kelompok usaha perhutanan sosial	Jumlah fasilitasi penataan batas Hutan Desa, HTR, HKM dan Hutan Adat	19	izin	1.808.000.000	13	785.720.160	10	209.712.000	10	209.687.000	23	995.407.160	121,05	55,06	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengembangan Industri dan Pemasaran Hasil Hutan	Jumlah Industri yang dimonitoring dan dievaluasi	12	IPHHK	1.374.171.000	5	555.051.120	1	29.848.000	4	29.848.000	9	584.899.120	75	42,56	
	Pengembangan Pengujian dan pengendalian Peredaran Hasil Hutan	Jumlah IUPHHK HT/HA dan hutan hak yang sudah mendapat sertifikasi legalitas kayu	40	IUPHHK HT/HA dan Hutan Hak	1.900.000.000	28	1.109.571.400	2	56.052.000	4	56.051.838	32	1.165.623.238	80	61,35	
	Pemanfaatan dan pengembangan potensi Hasil Hutan di KPHP Unit I Kerinci	Pembinaan kepada KTH/Kelompok masyarakat terhadap pemanfaatan dan pengembangan potensi hasil hutan	15	KTH	1.076.500.000	6	450.222.700	2	29.372.000	2	29.242.000	8	479.464.700	53,33	44,54	
	Pemanfaatan dan pengembangan potensi Hasil Hutan di KPHP UnitII dan III Bungo	Pembinaan kepada KTH/Kelompok masyarakat terhadap pemanfaatan dan pengembangan potensi hasil hutan	3	KTH	170.000.000	1	50.204.080	1	30.038.000	2	29.964.000	3	80.168.080	100	47,16	
	Pemanfaatan dan pengembangan potensi Hasil Hutan di KPHP Unit IV, V dan VI Merangin	Pembinaan kepada KTH/Kelompok masyarakat terhadap pemanfaatan dan pengembangan potensi hasil hutan	3	KTH	200.000.000	2	98.634.000	1	32.974.000	5	32.963.500	7	131.597.500	233,33	65,8	
	Pemanfaatan dan pengembangan potensi Hasil Hutan di KPHP Unit VII Hulu Sarolangun	Pembinaan kepada KTH/Kelompok masyarakat terhadap pemanfaatan dan pengembangan potensi hasil hutan	3	KTH	170.000.000	2	77.015.624	1	30.600.000	1	30.568.000	3	107.583.624	100	63,28	
	Pemanfaatan dan pengembangan potensi Hasil Hutan di KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	Pembinaan kepada KTH/Kelompok masyarakat terhadap pemanfaatan dan pengembangan potensi hasil hutan	4	KTH	180.000.000	2	84.700.000	2	49.449.000	8	49.298.250	10	133.998.250	250	74,44	
2	Pemanfaatan dan pengembangan potensi Hasil Hutan di KPHP Unit IX Tebo Barat	Pembinaan kepada KTH/Kelompok masyarakat terhadap pemanfaatan dan pengembangan potensi hasil hutan	3	KTH	100.000.000	1	34.253.350	1	15.600.000	4	14.972.108	5	49.225.458	166,67	49,23	Dinas Kehutanan Prov. Jambi
3	Pemanfaatan dan pengembangan potensi Hasil Hutan di KPHP Unit X Tebo Timur	Pembinaan kepada KTH/Kelompok masyarakat terhadap pemanfaatan dan pengembangan potensi hasil hutan	5	KTH	200.000.000	3	83.572.600	1	21.660.000	3	20.826.800	6	104.399.400	120	52,2	Dinas Kehutanan Prov. Jambi
4	Pemanfaatan dan pengembangan potensi Hasil Hutan di KPHP Unit XI dan XII Batanghari	Pembinaan kepada KTH/Kelompok masyarakat terhadap pemanfaatan dan pengembangan potensi hasil hutan	6	KTH	210.000.000	3	98.226.800	2	29.684.000	3	29.228.000	6	127.454.800	100	60,69	Dinas Kehutanan Prov. Jambi
	Pemanfaatan dan pengembangan potensi Hasil Hutan di KPHP Unit XIII Muaro Jambi	Pembinaan kepada KTH/Kelompok masyarakat terhadap pemanfaatan dan pengembangan potensi hasil hutan	5	KTH	200.000.000	2	88.138.500	3	70.534.000	5	70.488.468	7	158.626.968	140	79,31	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pemanfaatan dan pengembangan potensi Hasil Hutan di KPHP Unit XIV Tanjung Jabung Timur	Pembinaan kepada KTH/Kelompok masyarakat terhadap pemanfaatan dan pengembangan potensi hasil hutan	5	KTH	200.000.000	2	64.052.096	1	23.760.000	2	22.436.200	4	86.488.296	80	43,24	
5	Pemanfaatan dan pengembangan potensi Hasil Hutan di KPHP Unit XIV, XV dan XVI Tanjung Jabung Barat	Pembinaan kepada KTH/Kelompok masyarakat terhadap pemanfaatan dan pengembangan potensi hasil hutan	6	KTH	210.000.000	3	97.307.080	2	30.330.000	2	29.595.000	5	126.902.080	83,33	60,43	Dinas Kehutanan Prov. Jambi
6	Pemanfaatan dan pengembangan potensi Hasil Hutan di UPTD TAHURA	Pembinaan kepada KTH/Kelompok masyarakat terhadap pemanfaatan dan pengembangan potensi hasil hutan	3	KTH	110.000.000	1	49.475.000	2	57.000.000	1	56.826.000	2	106.301.000	66,67	96,64	Dinas Kehutanan Prov. Jambi
									Rata-rata capaian kinerja (%)	3,44		10,33	341.511.891			
									Predikat kinerja	SR						
VII	Program rehabilitasi hutan dan lahan		100%	%	200.815.000.000	100%	9.508.684.533		751.903.424	97,84	294.452.600	98,84	9.803.137.133	46,93	30,31	
1	Penanaman pohon pada kawasan hutan wisata	Luas penanaman Pohon pada KPH 8.500 Ha, Cabang Dinas 200 Ha, TAHURA 300 Ha	9000	Ha	155.610.000.000	90	1.264.095.112		-	-	-	90	1.264.095.112	1	0,81	Dinas Kehutanan Prov. Jambi
2	Pembuatan Bibit/benih Tanaman Kehutanan	Jumlah bibit / benih tanaman kehutanan untuk KPH, Taman Hutan Kenali dan TAHURA	250.000	Btg	500.000.000	50.000	147.352.000	70000	101.444.424	9.000,00	101.196.000	59.000	248.548.000	23,6	49,71	Dinas Kehutanan Prov. Jambi
3	Pemeliharaan pohon pada kawasan hutan wisata	luas THK dan KRBS yang di pelihara	445	Ha	3.005.000.000	180	1.814.447.000	0	-	-	-	180	1.814.447.000	40,45	60,38	Dinas Kehutanan Prov. Jambi
4	Pembinaan, Pengendalaian dan pengawasan gerakan RHL	Luas pemeliharaan arboretum dan tanaman unggulan lokal dan Hutan Adat	22	Ha	3.100.000.000	12	854.975.794	0	39.034.000	7	39.034.000	19	894.009.794	86,36	28,84	Dinas Kehutanan Prov. Jambi
5	Monitoring Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS	Meningkatnya pengelolaan DAS	11	Lokasi	300.000.000	6	181.548.534	2	32.584.000	10	32.584.000	16	214.132.534	145,45	71,38	UPTD.KPHP Unit I Kerinci
6	Penanaman pohon pada kawasan hutan industri dan Hutan wisata di KPHP Unit II dan III Bungo	Luas penanaman Pohon pada KPHP	100	ha	1.500.000.000	10	102.842.400	0	-	-	-	10	102.842.400	10	6,86	UPTD.KPHP Unit II dan III Bungo
7	Penanaman pohon pada kawasan hutan Industri dan hutan wisata di KPHP Unit IV, V dan VI Merangin	Luas penanaman Pohon pada KPHP	100	ha	1.500.000.000	10	133.914.100	0	-	-	-	10	133.914.100	10	8,93	UPTD. KPHP Unit IV, V dan VI Merangin
8	Penanaman pohon pada kawasan hutan Industri dan hutan wisata di KPHP Unit VIIIHilir Sarolangun	Luas penanaman Pohon pada KPHP	100	ha	1.500.000.000	10	79.270.800	0	-	-	-	10	79.270.800	10	5,28	UPTD. KPHP UnitVII Hulu Sarolangun
9	Rehabilitasi Kawasan Hutan di UPTD KPHP Kerinci Unit I	Luas penanaman Pohon pada KPHP	300	Ha	2.500.000.000	10	851.874.808	5	15.500.000	5	15.388.500	15	867.263.308	5	34,69	UPTD. KPHP UnitVIII Hilir Sarolangun

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
10	Rehabilitasi Kawasan Hutan di UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	Luas penanaman Pohon pada KPHP	30	Ha	900.000.000	10	261.172.000	5	15.500.000	5	15.190.000	15	276.362.000	50	30,71	UPTD. KPHP UnitIX Tebo Barat
11	Rehabilitasi Kawasan Hutan di UPTD KPHP Merangin Unit IV,V dan VI	Luas penanaman Pohon pada KPHP	20	Ha	800.000.000	10	343.399.000	5	15.500.000	2	15.500.000	12	358.899.000	60	44,86	UPTD.KPHP UnitX Tebo Timur
12	Rehabilitasi Kawasan Hutan di UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	Luas penanaman Pohon pada KPHP	20	Ha	600.000.000	10	182.755.625	5	15.500.000	2	15.500.000	12	198.255.625	60	33,04	UPTD. KPHP UnitXI dan XII Batanghari
13	Rehabilitasi Kawasan Hutan di UPTD KPHP Limau Unit VIII Hilir Sarolangun	Luas penanaman Pohon pada KPHP	20	Ha	500.000.000	10	358.733.000	10	30.500.000	5	29.295.600	15	388.028.600	75	77,61	UPTD. KPHP UnitXIII Muaro Jambi
14	Rehabilitasi Kawasan Hutan di UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	Luas penanaman Pohon pada KPHP	20	Ha	500.000.000	10	103.284.040	5	15.500.000	5	15.392.600	15	118.676.640	75	23,74	UPTD.KPHP UnitXIV Tanjung Jabung Timur
15	Rehabilitasi Kawasan Hutan di UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	Luas penanaman Pohon pada KPHP	20	Ha	500.000.000	10	99.750.000	5	15.500.000	5	15.371.900	15	115.121.900	75	23,02	UPTD. KPHP UnitXV, XVI dan XVII Tanjung Jabung Barat
	Rehabilitasi Kawasan Hutan di UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII	Luas penanaman Pohon pada KPHP	20	Ha	500.000.000	10	162.036.000	5	15.500.000			10	162.036.000	50	32,41	
	Rehabilitasi Kawasan Hutan di UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	Luas penanaman Pohon pada KPHP	20	Ha	500.000.000	10	136.438.000	5	15.500.000			10	136.438.000	50	27,29	
	Rehabilitasi Kawasan Hutan di UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV	Luas penanaman Pohon pada KPHP	20	Ha	500.000.000	10	223.000.000	5	15.500.000			10	223.000.000	50	44,6	
	Rehabilitasi Kawasan Hutan di UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV,XVI dan XVII	Luas penanaman Pohon pada KPHP	20	Ha	500.000.000	10	119.748.000	5	15.500.000			10	119.748.000	50	23,95	
	Rehabilitasi Kawasan Hutan di UPTD KPHP TAHURA	Luas penanaman Pohon pada TAHURA	20	Ha	500.000.000	10	-	5	393.341.000			10	-	50	-	
16	Peningkatan pengelolaan KPH, TAHURA, Hutan Kota, Hutan Rakyat dan Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif	Jumlah Kegaiatan yang dilaksanakan dengan mengunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kehutanan	140	unit dan KTH	25.000.000.000	12	2.088.048.320	0	-	-	-	12	2.088.048.320	8,57	8,35	Dinas Kehutanan Prov. Jambi
									Rata-rata capaian kinerja (%)	565,38		2.833,00	466.816.054			
									Predikat kinerja	FALSE						
VIII	Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan		11	Lokasi	22.484.100.000		11.330.536.406		2.411.889.943	-	2.388.907.137	-	13.719.443.543	#VALUE!	48,22	Dinas Kehutanan Prov. Jambi

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	Pengendalian dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	Jumlah Pelaksanaan Patroli dan Ground Chek dalam rangka Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	384	kali	4.050.000.000	269	2.921.120.884	30	30.200.000	#VALUE!	30.061.000	#VALUE!	2.951.181.884	#VALUE!	72,87	Dinas Kehutanan Prov. Jambi
2	Penyuluhan kesadaranmasyarakat mengenaidampak kerusakan hutan	Jumlah Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan	91	kali	1.900.000.000	60	926.012.316	20	257.904.000	#VALUE!	257.117.065	#VALUE!	1.183.129.381	#VALUE!	62,27	Dinas Kehutanan Prov. Jambi
3	Pengamanan dan peredaran hasil hutan	Jumlah Pelaksanaan Operasi pengamanan hutan dan peredaran hasil hutan	98	kali	2.485.000.000	55	1.707.650.584	16	394.779.403	11	394.729.400	66	2.102.379.984	67,35	84,6	Dinas Kehutanan Prov. Jambi
4	Evaluasi Izin Pinjam Pakai Kawasn Hutan di Provinsi Jambi	Jumlah IPPKH yang telah dievalusi	49	IPHHK	920.000.000	30	433.928.644	4	36.300.000	1	36.245.400	31	470.174.044	63,27	51,11	Dinas Kehutanan Prov. Jambi
5	Fasilitasi penanganan konflik dalam kawasan hutan	Jumlah Penanganan Konflik yang diselesaikan	32	Konflik	2.209.100.000	20	880.611.644	8	215.258.500	3	215.218.500	23	1.095.830.144	71,88	49,61	Dinas Kehutanan Prov. Jambi
6	Pemantapan kawasan hutan	Jumlah lokasi pelaksanaan sosialisasi tata batas kawasan hutan untuk terbangunnya pemahaman masyarakat terhadap batas kawasan hutan	66	Kec	900.000.000	20	337.538.200	2	47.638.000	6	47.189.300	26	384.727.500	39,39	42,75	Dinas Kehutanan Prov. Jambi
7	Konservasi kawasan esensial (bernilai ekosistem penting) dan keanekaragaman hayati	mengidentifikasi koservasi keanekaragaman hayati	60	kali	500.000.000	45	306.108.200	11	163.459.600	19	162.559.600	64	468.667.800	106,67	93,73	Dinas Kehutanan Prov. Jambi
8	Sosialisasi Pencegahan kebakaran hutan dan lahan	Jumlah Sosialisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	10	kali	460.000.000	4	230.570.712,00	5	389.581.000	#VALUE!	334.881.412	#VALUE!	565.452.124	#VALUE!	122,92	UPTD.KPHP Unit I Kerinci
9	Ground Chek HotSpot (Pengecekan titik panas) kebakaran hutan dan lahan	Jumlah pelaksanaan Ground Chek Hotspot (pengecekan titik panas) dalam rangka Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	10	kali	400.000.000	4	181.124.000,00	6	283.102.000	195	282.127.000	199	463.251.000	1.990,00	115,81	UPTD.KPHP Unit II dan III Bungo
10	Kampanye pencegahan kebakaran hutan dan lahan	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan penangulangan kebakaran hutan dan lahan	8	Media	810.000.000	4	383.627.000,00	2	202.615.000	4	191.645.220	8	575.272.220	100	71,02	UPTD. KPHP Unit IV, V dan VI Merangin
11	Pembentukan/Pembinaan Masyarakat Sadar Api (MPA)	Pembentukan/pembinaan Masyarakat Sadar Api (MPA)	26	Kel MPA	1.000.000.000	12	459.534.875,00	0	-	-	-	12	459.534.875	46,15	45,95	UPTD. KPHP UnitVII Hulu Sarolangun
12	Pelatihan ketehnikan untuk menunjang PLTB	Pelatihan teknik PLTB	25	kali	400.000.000	10	151.867.000,00	0	-	-	-	10	151.867.000	40	37,97	UPTD. KPHP UnitVIII Hilir Sarolangun

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
13	Patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan	Mengurangi jumlah hotspot Kebakaran Hutan dan Lahan	50	kali	1.500.000.000	25	760.021.600,00	0	-	-	-	25	760.021.600	50	50,67	UPTD. KPHP UnitIX Tebo Barat
14	Pemadaman kebakaran hutan dan lahan	Mengurangi Luas Kebakaran Hutan dan Lahan	50	kali	300.000.000	27	145.423.300,00	20	121.200.000	10	171.200.000	37	316.623.300	74	105,54	UPTD.KPHP UnitX Tebo Timur
15	Monev bekas kebakaran hutan dan lahan	Mendata areal bekas kebakaran di provinsi Jambi	50	kali	200.000.000	26	99.538.250,00		-	-	-	26	99.538.250	52	49,77	UPTD. KPHP UnitXI dan XII Batanghari
16	Sarana dan prasarana kebakaran hutan dan lahan	pengadaan sarana dan prasarana kebakaran hutan dan lahan	20	Unit	1.000.000.000	12	482.800.000,00	1	30.000.000	1	30.000.000	13	512.800.000	65	51,28	UPTD. KPHP UnitXIII Muaro Jambi
	Pengamanan hutan dan perlindungan hutan di UPTD KPHP Kerinci Unit I	Penyiapan sumber daya manusia prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan	60	kali	150.000.000	23	60.402.500,00	20	18.580.000	11	18.440.000	34	78.842.500	56,67	52,56	
	Pengamanan hutan dan perlindungan hutan di UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	Presentase penurunan luas kawasan dan lahan terbakar	60	kali	150.000.000	22	59.922.000,00	21	20.634.000	6	20.584.000	28	80.506.000	46,67	53,67	
	Pengamanan hutan dan perlindungan hutan di UPTD KPHP Merangin UnitIV, V dan VI	Presentase penurunan luas kawasan dan lahan terbakar	60	kali	150.000.000	22	58.333.123,00	15	20.000.000	11	20.000.000	33	78.333.123	55	52,22	
	Pengamanan hutan dan perlindungan hutan di UPTD KPHP Hulu Sarolangun Unit VII	Presentase penurunan luas kawasan dan lahan terbakar	60	kali	150.000.000	22	55.680.000,00	18	22.464.000	11	22.449.000	33	78.129.000	55	52,09	
	Pengamanan hutan dan perlindungan hutan di UPTD KPHP Hilir Sarolangun Unit VIII	Presentase penurunan luas kawasan dan lahan terbakar	60	kali	150.000.000	21	50.657.700,00	12	18.873.950	10	18.170.000	31	68.827.700	51,67	45,89	
	Pengamanan hutan dan perlindungan hutan di UPTD KPHP Tebo Barat UnitIX	Presentase penurunan luas kawasan dan lahan terbakar	60	kali	150.000.000	19	45.492.824,00	13	16.500.000	8	15.774.750	27	61.267.574	45	40,85	
	Pengamanan hutan dan perlindungan hutan di UPTD KPHP Tebo Timur UnitX	Presentase penurunan luas kawasan dan lahan terbakar	60	kali	150.000.000	18	42.707.200,00	11	15.434.000	10	15.403.500	28	58.110.700	46,67	38,74	
	Pengamanan hutan dan perlindungan hutan di UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII	Presentase penurunan luas kawasan dan lahan terbakar	60	kali	150.000.000	22	58.096.800,00	15	23.484.000	9	23.184.000	31	81.280.800	51,67	54,19	
	Pengamanan hutan dan perlindungan hutan di UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	Presentase penurunan luas kawasan dan lahan terbakar	60	kali	150.000.000	24	60.000.000,00	16	26.174.000	11	26.015.500	35	86.015.500	58,33	57,34	
	Pengamanan hutan dan perlindungan hutan di UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV	Presentase penurunan luas kawasan dan lahan terbakar	60	kali	150.000.000	21	51.432.000,00	19	18.800.000	10	17.214.000	31	68.646.000	51,67	45,76	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengamanan hutan dan perlindungan hutan di UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII	Presentase penurunan luas kawasan dan lahan terbakar	60	kali	150.000.000	23	56.399.550,00	16	15.728.490	10	15.518.490	33	71.918.040	55	47,95	
	Pengamanan hutan dan perlindungan hutan di UPTD TAHURA	Presentase penurunan luas kawasan dan lahan terbakar	60	kali	150.000.000	24	60.000.000,00	17	23.180.000	11	23.180.000	35	83.180.000	58,33	55,45	
	Penyuluhan kesadaranmasyarakat mengenaidampak kerusakan hutan di KPHP Unit I Kerinci	Jumlah Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan di tingkat tapak (KPHP)	9	keg	150.000.000	3	29.805.000	-	-	-	-	3	29.805.000	33,33	19,87	
	Penyuluhan kesadaranmasyarakat mengenaidampak kerusakan hutan di KPHP Unit II dan III Bungo	Jumlah Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan di tingkat tapak (KPHP)	9	keg	150.000.000	3	27.520.000	-	-	-	-	3	27.520.000	33,33	18,35	
	Penyuluhan kesadaranmasyarakat mengenaidampak kerusakan hutan di KPHP Unit IV, V dan VI Merangin	Jumlah Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan di tingkat tapak (KPHP)	9	keg	150.000.000	3	30.000.000	-	-	-	-	3	30.000.000	33,33	20	
	Penyuluhan kesadaranmasyarakat mengenaidampak kerusakan hutan di KPHP UnitVII Hulu Sarolangun	Jumlah Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan di tingkat tapak (KPHP)	9	keg	150.000.000	3	25.550.000	-	-	-	-	3	25.550.000	33,33	17,03	
	Penyuluhan kesadaranmasyarakat mengenaidampak kerusakan hutan di KPHP UnitVIII Hilir Sarolangun	Jumlah Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan di tingkat tapak (KPHP)	9	keg	150.000.000	3	26.860.000	-	-	-	-	3	26.860.000	33,33	17,91	
	Penyuluhan kesadaranmasyarakat mengenaidampak kerusakan hutan di KPHP UnitIX Tebo Barat	Jumlah Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan di tingkat tapak (KPHP)	9	keg	150.000.000	2	17.205.000	-	-	-	-	2	17.205.000	22,22	11,47	
	Penyuluhan kesadaranmasyarakat mengenaidampak kerusakan hutan di KPHP UnitX Tebo Timur	Jumlah Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan di tingkat tapak (KPHP)	9	keg	150.000.000	1	8.460.000	-	-	-	-	1	8.460.000	11,11	5,64	
	Penyuluhan kesadaranmasyarakat mengenaidampak kerusakan hutan di KPHP UnitXI dan XII Batanghari	Jumlah Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan di tingkat tapak (KPHP)	9	keg	150.000.000	2	19.276.500	-	-	-	-	2	19.276.500	22,22	12,85	
	Penyuluhan kesadaranmasyarakat mengenaidampak kerusakan hutan di KPHP UnitXIII Muaro Jambi	Jumlah Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan di tingkat tapak (KPHP)	9	keg	150.000.000	2	23.279.000	-	-	-	-	2	23.279.000	22,22	15,52	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
17	Penyuluhan kesadaranmasyarakat mengenaidampak kerusakan hutan di KPHP UnitXIV Tanjung Jabung Timur	Jumlah Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan di tingkat tapak (KPHP)	9	keg	150.000.000	3	29.105.000	-	-	-	-	3	29.105.000	33,33	19,4	UPTD.KPHP UnitXIV Tanjung Jabung Timur
18	Penyuluhan kesadaranmasyarakat mengenaidampak kerusakan hutan di KPHP UnitXV, XVI dan XVII Tanjung Jabung Barat	Jumlah Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan di tingkat tapak (KPHP)	9	keg	150.000.000	3	26.875.000	-	-	-	-	3	26.875.000	33,33	17,92	UPTD. KPHP UnitXV, XVI dan XVII Tanjung Jabung Barat
									Rata-rata capaian kinerja (%)				351.780.604			
									Predikat kinerja							
IX	Program perencanaan dan pengembangan hutan		100	%	9.070.000.000		2.779.885.442		789.036.260	91	772.632.214	1.294	3.552.517.656	2.104,41	60,13	Dinas Kehutanan Prov. Jambi
	Perencanaan KegiatanKesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL)	Jumlah Peta informasi kehutanan berbasis Geospasial digital sebagai bahan penyusunan rencana dan evaluasi pembangunan kehutanan	5	Peta	830.000.000	2	490.920.685	1	40.949.500	-	40.055.800	2	530.976.485	40	63,97	Dinas Kehutanan Prov. Jambi
	Penelitian Terpadu terhadap Usulan Perubahan Status dan Fungsi Kawasan Hutan	Jumlah Dokumen perubahan status dan fungsi kawasan hutan	8	Dok	3.950.000.000	1	447.199.773	-	-	-	-	1	447.199.773	12,5	11,32	
	Kegiatan akses layanan informasi pemasaran hasil hutan	Jumlah Pelaksanaan Pameran dan update data pembangunan kehutanan pada website	15	Pameran	1.635.000.000	6	605.596.000	2	121.512.240	16,92	120.364.022	22,92	725.960.022	152,8	44,4	
	Pengelolaan kawasan hutan di KPHP Unit I Kerinci	Meningkatnya tata kelola kehutanan di KPHP	3	Keg	150.000.000	2	76.229.900,00	1	39.159.500	174	38.846.500	176	115.076.400	5.866,67	76,72	
	Pengelolaan kawasan hutan di KPHP Unit II dan III Bungo	Meningkatnya tata kelola kehutanan di KPHP	3	Keg	150.000.000	2	73.679.440,00	1	28.786.500	85	28.600.000	87	102.279.440	2.900,00	68,19	
	Pengelolaan kawasan hutan di KPHP Unit IV,V dan VI Merangin	Meningkatnya tata kelola kehutanan di KPHP	4	Keg	200.000.000	2	94.450.000,00	1	17.930.000	100	17.920.000	102	112.370.000	2.550,00	56,19	
	Pengelolaan kawasan hutan di KPHP Unit VII Hulu Sarolangun	Meningkatnya tata kelola kehutanan di KPHP	2	Keg	120.000.000	1	36.570.000,00	1	24.336.880	90	24.313.500	91	60.883.500	4.550,00	50,74	
	Pengelolaan kawasan hutan di KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	Meningkatnya tata kelola kehutanan di KPHP	3	Keg	150.000.000	2	74.490.036,00	1	30.165.000	80	30.011.750	82	104.501.786	2.733,33	69,67	
	Pengelolaan kawasan hutan di KPHP Unit IX Tebo Barat	Meningkatnya tata kelola kehutanan di KPHP	5	Keg	250.000.000	3	122.119.488,00	1	23.184.000	100	22.097.192	103	144.216.680	2.060,00	57,69	
	Pengelolaan kawasan hutan di KPHP Unit X Tebo Timur	Meningkatnya tata kelola kehutanan di KPHP	3	Keg	150.000.000	1	66.757.100,00	1	19.024.000	80	19.024.000	81	85.781.100	2.700,00	57,19	
	Pengelolaan kawasan hutan di KPHP Unit XI dan XII Batanghari	Meningkatnya tata kelola kehutanan di KPHP	4	Keg	180.000.000	2	75.407.500,00	1	21.250.000	45	21.100.000	47	96.507.500	1.175,00	53,62	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengelolaan kawasan hutan di KPHP Unit XIII Muaro Jambi	Meningkatnya tata kelola kehutanan di KPHP	3	Keg	160.000.000	1	78.128.000,00	1	21.090.000	50	21.090.000	51	99.218.000	1.700,00	62,01	
	Pengelolaan kawasan hutan di KPHP UnitXIV Tanjung Jabung Timur	Meningkatnya tata kelola kehutanan di KPHP	3	Keg	170.000.000	1	45.427.500,00	1	38.807.000	60	28.241.000	61	73.668.500	2.033,33	43,33	
	Pengelolaan kawasan hutan di KPHP UnitXV,XVI dab XVII Tanjung Jabung Barat	Meningkatnya tata kelola kehutanan di KPHP	3	Keg	175.000.000	2	80.374.020,00	1	22.480.400	55	22.310.250	57	102.684.270	1.900,00	58,68	Dinas Kehutanan Prov. Jambi
	Pengelolaan kawasan hutan di KPHP TAHURA	Meningkatnya tata kelola kehutanan di TAHURA	10	Keg	500.000.000	5	262.536.000,00	5	202.188.000	231	202.188.000	236	464.724.000	2.360,00	92,94	
	Pengelolaan hutan kenali	Meningkatnya tata kelola kehutanan	10	Keg	300.000.000	6	150.000.000,00	6	138.173.240	87,7	136.470.200	93,7	286.470.200	936,99	95,49	Dinas Kehutanan Prov. Jambi
									Rata-rata capaian kinerja (%)	78,41		80,85	222.032.354			
									Predikat kinerja	S						

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Jambi																
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran			2.616.500.000		1.264.139.575		1.845.728.052		1.172.968.452		2.437.108.027	147	93	
1	Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat keluar pertahun (surat)	1.600	surat	6.500.000	1.500	6.917.500	12	7.400.712	15	7.142.001	1.515	14.059.501	94,69	216,3	Dinas ESDM
2	Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Periode Pembayaran Rekening (bulan)	12	bulan	270.000.000	12	140.771.536	12	185.440.480	15	107.905.282	27	248.676.818	225	92,1	Dinas ESDM
3	Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Periode Penggunaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor (bulan)	12	bulan	20.000.000	12	308.000	12	3.000.000	12	2.845.000	24	3.153.000	200	15,77	Dinas ESDM
4	Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan	Periode Pembayaran Jasa Administrasi Keuangan (bulan)	100	bulan	800.000.000	12	306.329.650	12	282.800.050	15	224.971.525	27	531.301.175	27	66,41	Dinas ESDM
5	Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor	Periode Pemakaian Jasa Kebersihan Kantor (bulan)	12	bulan	190.000.000	12	128.300.000	12	129.500.000	12	128.940.000	24	257.240.000	200	135,39	Dinas ESDM
6	Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis ATK (set)	78	set	190.000.000	69	119.986.900	61	119.999.740	61	99.042.795	130	219.029.695	166,67	115,28	Dinas ESDM
7	Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan (jenis)	20	jenis	95.000.000	16	49.282.227	3	68.990.000	12	29.100.000	28	78.382.227	140	82,51	Dinas ESDM
8	Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (jenis)	30	jenis	60.000.000	26	24.643.500	14	25.011.410	15	16.012.000	41	40.655.500	136,67	67,76	Dinas ESDM
9	Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Periode penyediaan bahan bacaan (bulan)	12	bulan	60.000.000	12	10.618.000	12	13.269.060	15	5.415.000	27	16.033.000	225	26,72	Dinas ESDM
10	Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah peserta rapat/tamu/dll (orang)	4.000	oramg	75.000.000	2.000	35.793.351	2.000	50.000.000	2.000	33.799.900	4.000,00	69.593.251	100	92,79	Dinas ESDM
11	Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	[	480	OH	850.000.000	350	441.188.911	130	960.316.600	143	517.794.949	493	958.983.860	102,71	112,82	Dinas ESDM
									Rata-rata capaian kinerja (%)	210,45		576	221.555.275			
									Predikat kinerja	FALSE						
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur			2.920.000.000		2.536.893.975		542.196.000		744.705.893		3.281.599.868	16.289	121	
1	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas (jenis)	3	jenis	1.170.000.000	2	1.017.186.000	-	-	-	-	2	1.017.186.000	66,67	86,94	Dinas ESDM
2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah jenis pengadaan sarana peralatan kantor (jenis)	11	jenis		11	183.251.800	-	-	-	-	11	183.251.800	100		Dinas ESDM
3	Pengadaan mebeleur	Jumlah jenis pengadaan mebeleur (set)	3	set	450.000.000	1	26.674.500	-	-	-	-	1	26.674.500	33,33	5,93	Dinas ESDM
4	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara (unit)	1	Unit	250.000.000	1	109.814.500	-	-	1.278	367.358.855	1.279,00	477.173.355	127.900	190,87	Dinas ESDM

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
5	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang terpelihara (unit)	58	Unit	350.000.000	34	329.669.118	-	-	38	345.707.538	72	675.376.656	124,14	192,96	
6	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlahperalatan gedung kantor yang terpelihara (jenis)	5	jenis	150.000.000	40	34.466.947	1.278	118.600.000	51	31.639.500	91	66.106.447	1.820,00	44,07	Dinas ESDM
	Rehab Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yg direhab (unit)	1	Unit	250.000.000	1	724.197.210	29	389.346.000	-	-	1	724.197.210	100	289,68	
7	Pengadaan Komputer	Jumlah pengadaan komputer/alat komputer (unit)	3	Unit	300.000.000	5	111.633.900	40	34.250.000	-	-	5	111.633.900	166,67	37,21	Dinas ESDM
									Rata-rata capaian kinerja (%)	170,88		182,75	410.199.984			
									Predikat kinerja	FALSE						
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase PNS yang disiplin			140.000.000		61.100.000		65.000.000		49.590.000		110.690.000	50	79	
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya (stel)	200	stel	140.000.000		61.100.000	100	65.000.000	100	49.590.000	100	110.690.000	50	79,06	Dinas ESDM
									Rata-rata capaian kinerja (%)	100		100	110.690.000			
									Predikat kinerja	ST						
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur			450.000.000		93.136.275		41.071.000		23.928.000		117.064.275	50	26	
1	Kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	Jumlah kegiatan yang diikuti (OP)	50	OP	450.000.000		93.136.275	20	41.071.000	25	23.928.000	25	117.064.275	50	26,01	Dinas ESDM
									Rata-rata capaian kinerja (%)	25		25	117.064.275			
									Predikat kinerja	SR						
V	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			700.000.000		506.454.144		260.021.710		277.632.870		784.087.014	31	107	
1	Kegiatan Penyusunan Program Tahunan	Jumlah laporan tahunan yang disusun (lap)	7	Laporan	300.000.000		221.120.592	5	126.833.600	5	124.402.475	5	345.523.067	71,43	115,17	Dinas ESDM
2	Monitoring dan Evaluasi	Jumlah Laporan Akhir Kegiatan yang disusun (Lap)	11	Laporan	160.000.000		39.669.400	1	47.763.500	1	66.785.500	1	106.454.900	9,09	66,53	Dinas ESDM
3	Inventarisasi Aset	Jumlah Laporan Akhir Kegiatan yang disusun (Lap)	9	Laporan	240.000.000		245.664.152	1	85.424.610	1	86.444.895	1	332.109.047	11,11	138,38	Dinas ESDM
									Rata-rata capaian kinerja (%)	2,33		2,33	261.362.338			
									Predikat kinerja	SR						
VI	Program Pengembangan Energi	Rasio Elektrifikasi			12.000.000.000		2.191.616.108		4.602.358.301		401.167.450		2.592.783.558	76	85	
1	Inventarisasi dan Koordinasi Kegiatan Usaha Hulu/Hilir Energi Tak Terbarukan	Jumlah Laporan Akhir Kegiatan yang disusun (Lap)	1	Laporan	170.000.000		184.908.485	1	105.290.072	1	80.289.200	1	265.197.685	100	156	Dinas ESDM
2	Konservasi Energi	Jumlah Laporan Akhir Kegiatan yang disusun (Lap)	1	Laporan	395.000.000		77.909.600	1	103.203.159	1	150.724.950	1	228.634.550	100	57,88	Dinas ESDM
3	Perencanaan dan Pengembangan EBT	Jumlah PLTS di Revitaliasi (unit)	34	Unit	10.985.000.000		1.464.824.750	15	4.341.656.000	18	128.190.000	18	1.593.014.750	52,94	14,5	Dinas ESDM

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
9	Koordinasi dan Pembinaan EBT	Jumlah dokumen kelembagaan pengelolaan EBT disusun (dok)	2	Dokumen	450.000.000		463.973.273	1	52.209.070	1	41.963.300	1	505.936.573	50	112,43	Dinas ESDM
									Rata-rata capaian kinerja (%)	5,25		5,25	648.195.890			
									Predikat kinerja	SR						
VII	Program Pembinaan kegiatan usahapertambangan mineral dan batubara	Persentase Perusahaan minerba yang menerapkan > 75% syarat good mining practise			2.100.000.000		2.065.098.377		601.732.710		751.663.700		2.816.762.077	16	119	
1	Pembinaan dan Pengawasan pengusahaan pertambangan mineral dan batubara	Jumlah Laporan Akhir Kegiatan yang disusun (Lap)	300	Laporan	950.000.000		1.489.656.413	1	284.087.020	1	394.325.100	1	1.883.981.513	0,33	198,31	Dinas ESDM
2	Peningkatan Pelayanan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara	Jumlah permohonan izin yang ditindaklanjuti (izin)	60	izin	650.000.000		397.796.970	20	210.341.040	20	205.671.100	20	603.468.070	33,33	92,84	Dinas ESDM
3	Peningkatan Pelayanan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Non Logam dan Batuan	Jumlah permohonan izin yang ditindaklanjuti (izin)	155	izin	500.000.000		177.644.994	20	107.304.650	20	151.667.500	20	329.312.494	12,9	65,86	Dinas ESDM
									Rata-rata capaian kinerja (%)	13,67		13,67	938.920.692			
									Predikat kinerja	SR						
VIII	Program Penyelidikan, Pembinaan, Mitigasi dan Pelayanan Geologi	Tingkat ketersediaan data Sumbedaya dan potensi bencana Geologi			5.900.000.000		639.275.509		303.308.020		173.948.400		813.223.909	20	20	
1	Pengembangan Geologi Lingkungan dan Pengelolaan Konservasi Air Tanah	Jumlah Laporan Akhir Kegiatan yang disusun (Lap)	4	Laporan	3.400.000.000		166.059.279	1	149.003.600	1	48.479.600	1	214.538.879	25	6,31	Dinas ESDM
2	Identifikasi Sumber Daya Geologi, Air Tanah dan Mitigasi Bencana Geologi	Jumlah Laporan Akhir Kegiatan yang disusun (Lap)	38	Laporan	1.950.000.000		351.487.430	1	75.004.332	1	74.972.600	1	426.460.030	2,63	21,87	Dinas ESDM
3	Identifikasi, Pembinaan dan Pengawasan Pengusahaan Air Tanah	Jumlah Laporan Akhir Kegiatan yang disusun (Lap)	3	Laporan	550.000.000		121.728.800	1	79.300.088	1	50.496.200	1	172.225.000	33,33	31,31	Dinas ESDM
									Rata-rata capaian kinerja (%)	1		1	271.074.636			
									Predikat kinerja	SR						
VIII	Program Peningkatan Mutu dan Keandalan Penyediaan Tenaga Listrik	Persentase Peningkatan Panjang Jaringan			2.500.000.000		1.055.796.639		514.855.138		519.399.450		1.575.196.089	15	93	
1	Pengembangan Sarana dan Prasarana Ketenagalistrikan	Jumlah paket jaringan dibangun (paket)	32	Paket	1.650.000.000		547.978.600	1	91.468.010	1	121.033.850	1	669.012.450	3,13	40,55	Dinas ESDM
2	Pengusahaan Ketenagalistrikan	Jumlah sosialisasi dilaksanakan (keg)	6	Kegiatan	250.000.000		173.147.016	3	200.409.268	2	200.387.900	2	373.534.916	33,33	149,41	Dinas ESDM
3	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Ketenagalistrikan	Jumlah instalasi penyediaan tenaga listrik ditangani (instalasi)	111	instalasi	600.000.000		334.671.023	20	222.977.860	10	197.977.700	10	532.648.723	9,01	88,77	Dinas ESDM
									Rata-rata capaian kinerja (%)	4,33		4,33	525.065.363			
									Predikat kinerja	SR						

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAMBI																
I	Program pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%		9.072.504.000	94,70%	1.881.101.300	100%	1.077.034.990		956.420.820	0,95	2.837.522.120	108,91	43,43	DISPERINDAG
1	Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat keluar pertahun	19.500	surat	438.910.000	3.100	72.300.000	2.000	54.596.000	85,15	54.594.000	3.185,15	126.894.000	16,33	28,91	
2	Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Periode pembayaran rekening listrik, tlp, PAM,Internet	72	bulan	1.893.600.000	12	324.252.000	12	326.250.000	58,54	248.398.560	70,54	572.650.560	97,98	30,24	
3	Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah tenaga administrasi keuangan	268	orang	1.190.260.000	45	207.288.000	21	133.762.800	88,47	133.310.800	133,47	340.598.800	49,8	28,62	
4	Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor	Periode jasa kebersihan kantor	72	bulan	653.087.000	12	119.602.600	12	105.888.420	89,64	116.305.650	101,64	235.908.250	141,17	36,12	
5	Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis Alat Tulis Kantor	316	jenis	655.555.000	53	94.216.500	39	84.387.400	104,44	90.043.300	157,44	184.259.800	49,82	28,11	
6	Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	27	item	232.250.000	2	35.750.000	81.350	25.591.250	98,33	25.375.950	100,33	61.125.950	371,59	26,32	
7	Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen Instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	86	jenis	277.942.000	13	65.792.200	17	16.397.630	60,81	15.094.600	73,81	80.886.800	85,83	29,1	
8	Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlahjenis peralatan dan perlengkapan kantor	23	item	227.000.000	3	-	3	-	38,54	4.600.000	41,54	4.600.000	180,63	2,03	
9	Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah surat kabar harian/ warta perundang-undangan	360	eks	159.400.000	420	21.900.000	2.160	11.934.240	97,52	16.097.500	517,52	37.997.500	143,76	23,84	
10	Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah konsumsi untuk pelaksanaan rapat/pertemuan	3760	ok	64.500.000	530	19.500.000	1.160	16.000.000	85,88	117.428.900	615,88	136.928.900	16,38	212,29	
11	Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	300	kali	3.280.000.000	90	920.500.000	40	302.227.250	44,29	135.171.560	134,29	1.055.671.560	44,76	32,19	
									Rata-rata capaian kinerja (%)	77,42		466,51	257.956.556			
									Predikat kinerja	S						
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan sarana dan prasarana yang memadai bagi aparatur	100	persen	4.076.612.000	95	1.642.972.230		416.669.950		410.174.740		2.053.146.970	657	65	
1	Kegiatan Pengadaan Kendaraan dinas / operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional	1	unit	464.000.000	1	400.000.000	-	-	0	-	1	400.000.000	100	86,21	
2	Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	43	item	485.706.000	9	253.855.710	8	-	0	-	9	253.855.710	20,93	52,27	
3	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan komputer	22	item	470.506.000	5	265.000.000	1	85.800.000	86,99	90.672.000	92	355.672.000	418,14	75,59	
4	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah perbaikan gedung kantor	12	item	702.000.000	336	274.016.520	25	275.869.950	67,94	263.044.740	404	537.061.260	3366,15	76,5	
5	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Gedung Kantor	Jumlah pemelihara-an kendaraan dinas	305	unit	1.539.400.000	64	79.000.000	58	55.000.000	29,3	56.458.000	93	135.458.000	30,59	8,8	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
6	Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah pemeliharaan peralatan elektronika	58	paket	415.000.000	4	371.100.000	-	-	0	-	4	371.100.000	6,9	89,42	
										Rata-rata capaian kinerja (%)		30,7		100,54	342.191.162			
										Predikat kinerja		SR						
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase peningkatan kinerja dan disiplin aparatur			573.280.000		97.200.000		107.250.000	-	-		97.200.000	16	17	
	Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas harian dan perlengkapannya	1004	stel	573.280.000	162	97.200.000	165	107.250.000	0	-	162	97.200.000	16,14	16,96	
										Rata-rata capaian kinerja (%)		-		162	97.200.000			
										Predikat kinerja		SR						
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitassumber daya aparatur yang berkualitas dibidangnya	100%		416.775.000	46%	180.894.280	80%	114.158.400	0	60.444.700		241.338.980	70	81	
	Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Dinas Perindag	Jumlah Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis yang diikuti	60	kali kegiatan	260.000.000	15	180.894.280,00	28	33.180.000	26,94	29.844.700	42	210.738.980	69,9	81,05	
	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Jumlah pelaksanaan senam dan pembinaan rohani	72	kali	156.775.000	0	-	12	80.978.400	108,01	30.600.000	108	30.600.000	150,01	19,52	
										Rata-rata capaian kinerja (%)		67,47		74,97	120.669.490			
										Predikat kinerja		R						
V	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD	100		3.039.739.000	67	669.304.210	80	332.714.000		264.332.380		933.636.590	673	29	
1	Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan dan Neraca Aset	Jumlah Laporan dan penunjang keg Keuangan dan Neraca Aset	4	dok	253.250.000	4	47.875.000	4	13.160.000	98,9	13.460.000	102,9	61.335.000	2.572,00	24,22	
2	Kegiatan Penyusunan Laporan Pengelolaan Kepegawaian	Jumlah Laporan dan penunjang kegPengelolaan Kepegawaian	28	dok	218.496.000	5	44.000.000	5	39.295.000	65,64	25.795.060	70,64	69.795.060	252,28	31,94	
3	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Jumlah Rencana Kerja SKPD dan Rakor Prog	36	dok	1.203.293.000	9	278.950.000	6	166.127.000	84,95	151.934.180	93,95	430.884.180	260,97	35,81	
4	Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD	Jumlah Lokasi Pelaksanaan Monev Prog dan keg SKPD	72	bulan	758.000.000	12	175.329.210	12	53.987.000	69,11	31.607.590	81,11	206.936.800	112,66	27,3	
5	Pengembangan Sarana Informasi yang dapat diakses Masyarakat		72	bulan	606.700.000	12	123.150.000	12	60.145.000	106,91	41.535.550	118,91	164.685.550	165,15	27,14	
										Rata-rata capaian kinerja (%)		85,1		93,5	186.727.318			
										Predikat kinerja		T						
VI	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap perlindungan konsumen	100		4.826.755.000	1	828.465.000	1	482.829.300		347.609.700		1.176.074.700	526	53	
1	Kegiatan Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan jasa	Jumlah produkBarang Ber-SNI Wajib dan Barang Strategis yang diawasi di Pasaran	54	produk	676.780.000	9	186.740.000	9	188.179.600	94,83	173.627.000	103,83	360.367.000	192,27	53,25	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2	Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen)	Fasilitasi penyelesaian sengketa konsumen	11	kab/kota	2.798.375.000	3	362.700.000	3	155.225.700	71,56	149.989.700	74,56	512.689.700	677,86	18,32	
		Jumlah lokasi pembinaan BPSK														
3	Kegiatan Monitoring Barang yang Kadaluarsa di Pasaran	Periode Pengawasan terhadap barang yang kadaluarsa di pasaran	14	kali	343.850.000	3	279.025.000	4	24.985.000	96,03	23.993.000	99,03	303.018.000	707,35	88,13	
4	Kegiatan Sosilisasi Kebijakan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Jumlah pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan Perlindungan Konsumen	2	kai	19.750.000	0	0	3	54.467.600	99,11	53.252.800	99,11	53.252.800	4.955,00	269,63	
5	Kegiatan Survey IKM Terhadap Perlindungan Konsumen	Skor hasil survey IKM perlindungan Konsumen, Jumlah responden yang diikuti dalam survey IKM terhadap perlindungan konsumen	76	persen	168.000.000	0	0	76	-	-	-	-	-	-	-	
6	Identifikasi Tertib Niaga	Periode identifikasi tertib niaga terhadap bapok dan brg yang diatur peredarannya	12	kali	820.000.000	0	0	1	59.971.400	4.004,00	94.932.900	4.004,00	94.932.900	33.372	11,58	
									Rata-rata capaian kinerja (%)	727,7		730,2	220.710.067			
									Predikat kinerja	FALSE						
VII	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Persentase peningkatan usaha IKM	0		12.506.382.000		2.249.528.500		1.365.369.600	1	1.550.959.790		3.800.488.290	88	65	
	Kegiatan Peningkatan Kapasitas PerajinIndustri Kecil dan Menengah	Jumlah perajin IKM yang mengikuti pelatihan peningkatan SDM	405	orang	1.106.020.000	2	178.000.000	-	-	-	-	2	178.000.000	0,49	16,09	
	Kegiatan Promosi Industri Kecil Regional dan Lokal	-Jumlah promosi Industri Kecil dan Kerajinan yang diikuti, Jumlah IKM yang difasilitasi mengikurti pameran	46	kai	3.484.900.000	11	780.745.000	8	737.230.800	85,07	616.966.090	96,07	1.397.711.090	208,85	40,11	
	Kegiatan Penguatan Kelembagaan Industri Kecil	Jumlah bantuan peralatan/ mesin yang diberikan kepadaindustri kecil	20	paket	905.475.000	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	
	Kegiatan Pengembangan Rumah Tenun Jambi	- Jumlah perajin tenun yang dibina dan dikembangkan, Periodefasilitasi sarana dan prasarana rumah tenun	108	orang	1.772.827.000	12	220.800.000	150	240.572.000	96,64	233.372.000	108,64	454.172.000	100,59	25,62	
	Kegiatan Pendataan IKM se Provinsi Jambi	Jumlah dokumen hasil pendataanIKM se Provinsi Jambi	6	dokumen	655.400.000	11	96.720.000	-		-	-	11	96.720.000	183,33	14,76	
	Kegiatan Pengembangan Perajin Unit Promosi Jambi	- Jumlah perajin unit promosi yang dibina dan dikembangkan, JumlahMUSDA Dewan Kerajinan, Jumlah Rakor Dewan Kerajinan	910	orang	2.744.530.000	-	-	150	387.566.800	99,06	385.898.800	99,06	385.898.800	10,89	14,06	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengembangan Desain Kerajinan Berbasis Budaya daerah	- Jumlah Lomba Desain Motif hasil kerajinan IKBatik danperagaanbusana batik Jambi,Kab/Kota	66	kali	1.117.327.000	1	652.720.000	1	-	99,03	148.732.900	100,03	801.452.900	151,56	71,73	
		Penyusunan katalogWarna Batikhasilkerajinan IKBatik danHAKI														
		Jumlah pemenang Desaincendramata														
	Kegiatan Peningkatan Kualitas Mutu anaka produk Industri Kecil	Jumlah IK yang mengikuti pelatihan peningkatan kualitas aneka produk IK - Jumlah produk IK yang ditingkatkan kwalitasnya	1	kali	658.200.000	1	98.500.000		-	-	165.990.000	1	264.490.000	100	40,18	
	Kegiatan Pengembangan Sentra Usaha IK	Jumlah sentra IK yang dibina	5	sentra	61.703.000	2	222.043.500	-	-	-	-	2	222.043.500	40	359,86	
									Rata-rata capaian kinerja (%)	42,2		46,64	422.276.477			
									Predikat kinerja	SR						
VIII	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Persentase peningkatan SDM IMB yang mendapat pelatihan teknologi industri	50	persen	376.100.000	-	-	-	214.382.500	93	202.244.910		202.244.910		54	
	Pelatihan peningkatan mutu produk industri berbasis teknologi	- Jumlah pelaku IMB yang mendapatkan pelatihan peningkatan mutu produk berbasis teknologi-Jumlah produk Industri berbasis teknologi yang ditingkatkan mutunya	45	orang	376.100.000	-	-	45	214.382.500	94,47	202.244.910	94,47	202.244.910	209,93	53,77	
									Rata-rata capaian kinerja (%)	94,47		94,47	202.244.910			
									Predikat kinerja	ST						
IX	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Persentase peningkatan unit usaha perdagangan dalam negeri	42		3.842.215.000	0	728.305.500	1	546.871.964	0,99	539.938.135		1.268.243.635			
1	Kegiatan Pengembangan Pasar Lelang Daerah dan Sistem Resi Gudang	- Jumlah fasilitasi pendampingan pelaksanaanlelang agro, Jumlahpeserta sosialisasi peraturan dan kebijakan bidang PDN, Jumlah peserta pelatihan pengawas/verifikator mutu bokar	12	kali	1.366.540.000	2	159.198.000	2	187.111.300	100,38	193.004.700	102,38	352.202.700	853,17	25,77	
	Kegiatan Promosi Penggunaan Produksi Dalam Negeri	- Jumlah PameranDalam Negeri.yang Diikuti, Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi mengikuti pameran, Jumlah Partisipasi Pada Pawai	13	kai	1.248.955.000	3	210.295.000	3	81.509.910	38,18	81.259.045	41,18	291.554.045	316,78	23,34	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Kendaraan Hias, Jumlah Sosialisasi Penggunaan ProdukDalam Negeri														
	Fasilitasi pasar murah	- Jumlah kebutuhan barang pokok yang disubsidi '- Jumlah asilitas pasarmurah	41.000	paket	696.870.000	-	-	11	120.016.034	-	109.437.140	-	109.437.140	-	15,7	
	Kegiatan Pendataan Sarana Perdagangan dan Pedagang Informal	Jumlah dokumen hasil pendataan Sarana Perdagangan dan pedagang informal Se Provinsi Jambi	12	dok	529.850.000	10	36.588.500	10 buku	67.060.850	98,14	65.569.750	108,14	102.158.250	901,17	19,28	
	Kegiatan Rantai pasok dan prognosa bahan kebutuhan pokok dan bahan penting lainnya			kab/kota	-	2	322.224.000	11	91.173.870	77,12	90.667.500	79,12	412.891.500			
									Rata-rata capaian kinerja (%)	62,76		66,16	253.648.727			
									Predikat kinerja	R						
X	Program Peningkatan Daya Saing Kewirausahaan Industri Kecil dan Menengah	Persentase Pengembangan wirausaha baru	100	persen	791.140.000	-	177.220.000	1	-		-		177.220.000			
1	Pengembangan dan Pembinaan Wira Usaha Baru Industri Kecil	Jumlah wirausaha baru yang dikembangkan dan dibina	150	WUB	791.140.000	2	177.220.000	8	-	-	-	2	177.220.000	1,33	22	
									Rata-rata capaian kinerja (%)	-		2	177.220.000			
									Predikat kinerja	SR						
XI	Program Pengembangan Industri Agro dan Kimia	Persentase peningkatan Industri Agro dan Kimia, Persentase peningkatan tenaga kerjaIndustri Agro dan Kimia	6 %,12 %		5.221.312.000	1	1.459.050.000	1	510.094.600	1	438.269.380		1.897.319.380			
	Kegiatan Pengawasan Teknis Pengembangan Industri Menengah dan Besar	Jumlah perusahaa Industri Menengah dan Besar yang diawasi perkembangannya	75	perusahaan	323.600.000	-	-	26	185.039.300	88,29	133.208.900	88,29	133.208.900	117,72	41,16	
	Kegiatan Penguatan Kelembagaan Industri Menengah dan Besar	Jumlah bantuan peralatan yang diberikan pelaku IMB	15	unit	2.861.650.000	1	600.000.000	3	311.408.000	98,74	259.814.380	99,74	859.814.380	664,93	30,05	
	Peningkatan SDM Industri Menengah dan Besar	Jumlah pelaku usaha IMB dan aparat yang mengikuti Diklat/Bimtek Industri	157	orang	635.447.000	-	-	20	13.647.300	169,84	45.246.100	169,84	45.246.100	108,18	7,12	
	Kegiatan Partisipasi Pada Pameran Industri Menengah dan Besar	- Jumlah Pameran Industri Menengah dan Besar yang diikuti, Jumlah pelaku usaha IMB yang difasilitasi mengikuti pameran	1	kai	541.565.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Kegiatan Peningkatan Usaha Industri Menengah dan Besar			orang	395.050.000	6	395.050.000	-	-	-	-	6	395.050.000			

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Kegiatan Peningkatan Mutu Industri Menengah dan Besar	- Jumlah Pameran Industri Menengah dan Besar yang diikuti, Jumlah pelaku usaha IMB yang difasilitasi mengikuti pameran	1	kai	464.000.000	1	464.000.000	-	-	-	-	1	464.000.000	100	100	
									Rata-rata capaian kinerja (%)	59,48		60,81	316.219.897			
									Predikat kinerja	R						
XII	Program Pengembangan Standarisasi Nasional	Persentasepeningkatan jasa pengujian mutu komoditi ekspor	60		5.658.369.000	92	3.850.504.000	10	447.379.050	1	305.764.710		4.156.268.710	114	53	
1	Pengembangan Infrastruktur Kelembagaan Standarisasi	Periode pemeliharaan dan penggantian suku cadang alat laboratorium	72	bullan	750.000.000	12	210.050.000	12	93.662.290	96,65	48.208.070	108,65	258.258.070	150,91	34,43	
2	Peningkatan Kapasitas Laboratorium Penguji Mutu Barang Ekspor dan Impor	Periode penambahan ruang lingkup Laboratorium	72	bullan	1.304.260.000	12	227.950.000	12	113.471.000	91,26	106.163.050	103,26	334.113.050	143,41	25,62	
3	Penambahan peralatan dan bahan uji serta perawatan Laboratorium	Jumlah pengadaan peralatan dan bahan uji serta perawatan laboratorium	228	jenis	3.604.109.000	24	3.412.504.000	13	240.245.760	86,98	151.393.590	110,98	3.563.897.590	48,68	98,88	
									Rata-rata capaian kinerja (%)	91,63		107,63	1.385.422.903			
									Predikat kinerja	ST						
XIII	Program peningkatan dan pengembangan perdagangan luar negeri	Persentase kenaikan Nilai Ekspor	100		349.350.000	0	715.719.980	0	111.759.500	1	82.163.400		797.883.380			
1	Kegiatan PamaeranPerdagangan Luar Negeri			kali	-	2	573.719.980	1	1.620.000	-	-	2	573.719.980			
2	Kegiatan Forum Koordinasi Peningkatan Kinerja Ekspor Daerah	Jumlah pelaku ekspor yang mengikuti forum	320	orang	349.350.000	100	142.000.000	100	110.139.500	83,69	82.163.400	183,69	224.163.400	57,4	64,17	
									Rata-rata capaian kinerja (%)	41,85		92,85	398.941.690			
									Predikat kinerja	SR						

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah																
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100	persen	45.159.652.900	100	-		3.150.000.000		1.599.598.800		1.599.598.800			
	Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran	12	bulan	20.312.036.478	12	-	12	2.912.999.105	12	1.407.952.000	24	1.407.952.000	200	6,93	Bappeda
	Kegiatan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Bulan Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Keuangan	12	bulan	1.248.962.826	12	-	12	237.000.895	12	191.646.800	24	191.646.800	200	15,34	Bappeda
	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Periode pembayaran rekening (bulan)	72	Bulan	2.907.241.848			-	-	-	-	-	-	-	-	Bappeda
	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Periode pemakaian jasa kebersihan kantor (bulan)	72	Bulan	1.504.543.950			-	-	-	-	-	-	-	-	Bappeda
	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	72	Bulan	556.782.464			-	-	-	-	-	-	-	-	Bappeda
	Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	78	Jenis	665.425.923			-	-	-	-	-	-	-	-	Bappeda
	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Penerangan Kantor	72	Bulan	263.549.806			-	-	-	-	-	-	-	-	Bappeda
	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Kebutuhan Peralatan kerja Kantor	42	Jenis	2.909.110.000			-	-	-	-	-	-	-	-	Bappeda
	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (jenis)	72	Bulan	4.982.287.836			-	-	-	-	-	-	-	-	Bappeda
	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Terselenggaranya Rapat-Rapat Koordinasi	72	Bulan	943.834.312			-	-	-	-	-	-	-	-	Bappeda
	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Keikutsertaan /terlaksananya koordinasi/konsolidasi/konfirmasi/konsultasi ke Pusat dan daerah lainnya	72	Bulan	8.865.877.457			-	-	-	-	-	-	-	-	Bappeda
									Rata-rata capaian kinerja (%)	12		24	799.799.400			
									Predikat kinerja	SR						
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	persen	23.861.830.549		-		1.350.000.000		529.134.000		529.134.000			
	Kegiatan PengadaanPerlengkapan Gedung Kantor	jumlah jenis perlengkapan kantor	18	Jenis	705.390.000					-	-	-	-	-	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Kegiatan PengadaanPeralatan Gedung Kantor	jumlah jenis perlengkapan kantor	36	Jenis	640.000.000					-	-	-	-	-	-	
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang direhab sedang/ berat	356	Jenis	2.340.000.000					-	-	-	-	-	-	
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	186	Jenis	990.000.000					-	-	-	-	-	-	
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	100	persen	980.000.000					-	-	-	-	-	-	
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Generator Listrik Kantor	Persentase Jam Kantor Tanpa Arus Listrik	1	persen	149.000.000					-	-	-	-	-	-	
	Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Terlaksananya Rehab Gedung dan Ruangan Kantor	1	Gedung	3.168.587.394					-	-	-	-	-	-	
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah pengadaan peralatan Gedung kantor	10	Jenis	331.000.000					-	-	-	-	-	-	
	Kegiatan Pengadaan kendaraan dinas	Jumlah Kendaraan Roda 2 dan Roda 4 Pendukung Operasional Tupoksi	17	Unit	15.000.000					-	-	-	-	-	-	
	Pengadaan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran dan gedung Kantor	Jumlah Bulan Ketersediaan peralatan dan perlengkapan perkantoran dan gedung kantor	12	bulan	4.254.500.000	12	-	12	790.000.000	12	434.400.000	24	434.400.000	200	10	
	Pengadaan Pemeliharaan dan Rehabilitasi Kendaraan jabatan/dinas/operasional	Jumlah bulan ketersediaan kendaraan jabatan/dinas	12	bulan	5.275.000.000	12	-	12	360.000.000	12	94.734.000	24	94.734.000	200	2	
	Pembangunan,Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung dan Untilitas Kantor	Jumlah bulan ketersediaan gedung kantor yang layak	12	bulan	5.013.353.155	12	-	12	200.000.000	12	-	24	-	200	-	
									Rata-rata capaian kinerja (%)	12		24	176.378.000			
									Predikat kinerja	SR						
3	Program peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase PNS yang disiplin			552.980.000		-		91.000.000		80.960.000		80.960.000			
	Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	792	Buah	552.980.000			108	91.000.000	-	80.960.000	-	80.960.000	-	15	
									Rata-rata capaian kinerja (%)	-		-	80.960.000,00			
									Predikat kinerja							
4	Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terwujudnya peningkatan manajemen program, SDM aparatur untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD			4.650.462.130				600.000.000	100	247.721.331		700.784.410	70	7,54	
	Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis	Jumlah PNS yang mengikuti Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis	216	Orang	3.644.130			-	-	-	-	-	-	-	-	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Kegiatan Peningkatan Kemampuan Aparatur Bappeda Provinsi Jambi	Jumlah PNS yang memahami penyusunan perencanaan	100	Orang	4.646.818.000	70	453.063.079	70	600.000.000	70	247.721.331	140	700.784.410	140	15,08	
		Jumlah Tenaga Fungsional perencana yang melakukan analisis dokumen perencanaan	84	Orang		24		24		24	-	48	-	57,14		
									Rata-rata capaian kinerja (%)	31,33		62,67	233.594.803			
									Predikat kinerja	SR						
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIPdan Pererseentase Nilai asset yang tercatat			5.131.428.970		427.930.000		1.220.565.600		642.671.277		1.070.601.277	42	22	
	Penyusunan Lap Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan Kegiatan SKPD	60	Jenis	3.204.986.910	10	427.930.000		320.565.600	10	174.721.441	20	602.651.441	33	19	
	Penataan Aset Bappeda Provinsi Jambi	Jumlah dokumenAssetBappeda Tahunan	10	Jenis	1.926.442.061	-	-	5	900.000.000	5	467.949.836	5	467.949.836	50	24	
									Rata-rata capaian kinerja (%)	7,5		12,5	535.300.639			
									Predikat kinerja	SR						
6	Program Pengembangan Data dan Informasi Pembangunan	Persentase Ketersediaan data dan informasi Pembangunan			3.930.869.138		1.048.440.000		-		-		1.048.440.000	20	32	
	Pelayanan Publikasi Pembangunan	Frekuensi Publikasi Data Pembangunan	24	Kali	2.171.529.398	4	349.480.000	-		-	-	4	349.480.000	17	16	
	Pengembangan Data dan Informasi serta Tersediaanya Sistem Data	Jumlah kelompok datadan Informasi perencanaan pembangunan	32	Jenis	820.830.000	3	349.480.000	-		-	-	3	349.480.000	9	43	
	Pengembangan Sistem dan Pemeliharaan Data dan Informasi	Jumlah Sistem dan Aplikasi yang dikembang dan dipelihara	18	Sistem	938.509.740	6	349.480.000	-		-	-	6	349.480.000	33	37	
									Rata-rata capaian kinerja (%)	-		4,33	349.480.000			
									Predikat kinerja	SR						
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian pencapaian sasaran jangka menengah daerahdengan realisasi tahunan			61.709.165.390		-		8.366.470.000	-	3.566.082.087	-	3.566.082.087	-	7,93	
		Persentase Pelaksanaan Perencanaan Tahunan Daerah														
	Kegiataan Pendanaan Evaluasi dan PelaporanPembangunan Daerah	Konsistensi Program RPJMD kedalam RPKD	100	persen	16.935.609.322	-	-	100	3.250.000.000	-	1.529.676.975	-	1.529.676.975	-	9,03	
	Kegiatan Perencanaan dan Koordinasi Pembangunan Ekonomi	Konsistensi Program RPJMD Bidang Ekonomi kedalam RPKD	100	persen	8.342.849.093	-	-	100	1.500.000.000	-	570.423.972	-	570.423.972	-	6,84	
	Kegiatan Perencanaan dan Koordinasi Pembangunan Sosial Budaya	Konsistensi Program RPJMD Bidang Sosial Budaya kedalam RPKD	100	persen	9.437.051.930	-	-	100	1.616.470.000	-	620.771.640	-	620.771.640	-	6,58	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Kegiatan Perencanaan dan Koordinasi PembangunanPengembangan Wilayah SDA dan LH	Konsistensi Program RPJMD Bidang PW, SDA dan LH kedalam RPKD	100	persen	11.858.505.837	-	-	100	2.000.000.000	-	845.209.500	-	845.209.500	-	7,13	
	Pemantapan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen Tahunan Perencanaan Pembangunan Daerah	46	Dokumen	6.372.909.507		-		-	-	-	-	-	-	-	
	Pemantapan dan Evaluasi Perencanaan Jangka Menengah dan Jangka Panjang	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah jangka Menengah dan Jangka Panjang	9	Dokumen	2.150.000.000		-		-	-	-	-	-	-	-	
	Penyusunan Laporan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Perencanaan Pembangunan Daerah	22	Dokumen	3.975.465.832		-		-	-	-	-	-	-	-	
	Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Pembangunan Daerah	20	Dokumen	2.636.773.869		-		-	-	-	-	-	-	-	
									Rata-rata capaian kinerja (%)	-		-	445.760.261			
									Predikat kinerja	SR						
	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Presentase KesesuaianPencapaian Sasaran Rencana Jangka Menengah dengan Realisasi Tahunan Bidang Ekonomi			7.641.849.093				-	-	-	-	-			
	Kegiatan Koordinasi dan Perencanaan Pertanian dan Ketahanan Pangan	Jumlah dokPerencanaan Pertanian dan Ketahanan Pangan	20	Dokumen	3.018.298.944		-		-	-	-	-	-	-	-	
	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pengembangan Industri, Perdagangan dan Dunia Usaha	Jumlah dokPerencanaan Pengembangan Industri, Perdagangan dan Dunia Usaha	17	Dokumen	2.595.473.249		-		-	-	-	-	-	-	-	
	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Perkebunan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Perkebunan, Kelautan dan Perikanan	13	Dokumen	2.028.076.900		-		-	-	-	-	-	-	-	
									Rata-rata capaian kinerja (%)	-		-	-			
									Predikat kinerja	SR						
	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Presentase KesesuaianPencapaian Sasaran Rencana Jangka Menengah dengan Realisasi Tahunan di Bidang Sosial Budaya			7.965.051.930				-	-	-	-	-			
	Kegiatan Perencanaan dan Koordinasi Bidang Pemerintahan	Jumlah dokumen Perencanaan Pemerintahan	9	Dokumen	2.421.683.310		-		-	-	-	-	-	-	-	
	Kegiatan Perencanaan dan Koordinasi Bidang Sosial dan Budaya	Jumlah dokumen Perencanaan Sosial dan Budaya	9	Dokumen	2.298.684.310		-		-	-	-	-	-	-	-	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Kegiatan Perencanaan dan Koordinasi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kependudukan	Jumlah dokumen Perencanaan Sumber Daya Manusia dan Kependudukan	14	Dokumen	3.244.684.310		-		-	-	-	-	-	-	-	
									Rata-rata capaian kinerja (%)	-		-	-			
									Predikat kinerja	SR						
	Perencanaan Sarana Prasarana, Tata Ruang dan Kerjasama Pembangunan	Presentase Kesesuaian Pencapaian Sasaran Rencana Jangka Menengah dengan Realisasi Tahunan di Bidang Sarana Prasarana			9.625.241.837		-		-	-	-	-	-			
	Kegiatan Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman	Jumlah dokumen Perencanaan dibidang Perumahan dan Pemukiman	12	Dokumen	2.087.340.627		-		-	-	-	-	-	-	-	
	Kegiatan Penyelenggaraan Tata Ruang, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Tata Ruang, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	12	Dokumen	3.607.431.407		-		-	-	-	-	-	-	-	
	Kegiatan Penyelenggaran Sarana dan Prasarana	Jumlah dokumen Perencanaan Sarana Prasarana	17	Dokumen	3.930.469.804		-		-	-	-	-	-	-	-	
									Rata-rata capaian kinerja (%)	-		-	-			
									Predikat kinerja	SR						

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Badan Kepegawaian Daerah																
1	Program Pelayanan administrasi perkantoran				6.759.711.824		4.420.383.737		1.451.048.864		1.061.755.367	-	5.482.139.104	79	81	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rentang Waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat	72	Bulan	27.137.000	48	17.826.650	12	2.962.000	12	8.229.512	60	26.056.162	83	96	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rentang Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	72	Bulan	1.945.991.000	48	880.048.039	12	391.800.000	12	334.548.071	60	1.214.596.110	83	62	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Rentang waktu Penyediaan Administrasi Keuangan	72	Bulan	1.154.797.850	48	678.818.500	12	202.554.204	12	155.279.302	60	834.097.802	83	72	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rentang Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	72	Bulan	558.810.735	48	381.689.700	12	109.305.000	12	109.305.000	60	490.994.700	83	88	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rentang Waktu Penyediaan Alat Tulis Kantor	72	Bulan	359.502.401	48	269.674.000	12	20.527.660	12	20.486.748	60	290.160.748	83	81	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rentang Waktu Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	72	Bulan	149.871.080	48	106.071.740	12	15.000.000	12	16.972.000	60	123.043.740	83	82	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rentang Waktu Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	72	Bulan	59.723.000	48	42.319.000	12	9.000.000	12	8.983.370	60	51.302.370	83	86	
	Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang-Undangan	Rentang Waktu Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang-Undangan	72	Bulan	124.470.500	48	78.836.000	12	12.000.000	12	11.780.000	60	90.616.000	83	73	
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Rentang Waktu Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat Tamu	72	Bulan	173.580.000	48	106.304.750	12	19.800.000	12	19.554.700	60	125.859.450	83	73	
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dan Dalam Daerah	Frekuensi Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	720	kali	2.205.828.258	128	1.858.795.358	92	668.100.000	132	376.616.664	260	2.235.412.022	36	101	
									Rata-rata capaian kinerja (%)	24		80	548.213.910			
									Predikat kinerja	SR						
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.				4.016.317.500		3.247.121.220		277.300.000		304.248.900		3.551.370.120	80,13	95,23	
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	24	Jenis	331.242.500	17	435.470.150	-	-	-	-	17	435.470.150	71	131	
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	24	Jenis	993.152.500	19	954.372.058	-	-	-	-	19	954.372.058	79	96	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Rentang Waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	72	Bulan	378.380.000	48	246.226.000	12	67.800.000	12	103.777.400	60	350.003.400	83	93	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Rentang Waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	72	Bulan	1.263.942.000	48	727.204.112	12	168.000.000	12	158.971.500	60	886.175.612	83	70	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	26	Jenis	247.900.500	16	194.495.000	5	41.500.000	5	41.500.000	21	235.995.000	81	95	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	6	Bulan	801.700.000	5	689.353.900	-	-	-	-	5	689.353.900	83	86	
									Rata-rata capaian kinerja (%)	4,83		30,33	591.895.020			
									Predikat kinerja	SR						
	Program Peningkatan kapasitas Sumber daya Aparatur		450		207.477.088		99.129.159		8.351.410		8.351.410		107.480.569	44	52	
	Rapat Koordinasi Tahunan KORPRI se-Provinsi Jambi	Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Tahunan KORPRI se-Provinsi Jambi	450	orang	207.477.088	200	99.129.159	75	8.351.410	-	8.351.410	200	107.480.569	44	52	
									Rata-rata capaian kinerja (%)	-		200	107.480.569			
									Predikat kinerja	SR						
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kineja dan Keuangan		30		268.933.022		167.735.600		57.213.597		57.015.188		224.750.788	84	83,65	
	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran,Penyusunan Rencana Kerja, Penetapan Kinerja, RKT, LAKIP, LKPJ dan LPPD BKD, serta Penyusunan dan Revisi RENSTRA SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Perencanaan	25	Dokumen	172.708.886	15	101.359.550	5	42.802.397	7	42.613.288	22	143.972.838	88	83	
	Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan Keuangan dan Barang Milik Daerah	5	Dokumen	96.224.136	3	66.376.050	1	14.411.200	1	14.401.900	4	80.777.950	80	84	
									Rata-rata capaian kinerja (%)	4		13	112.375.394			
									Predikat kinerja	SR						
	Program Penataan, Perencanaan, dan Rekruitmen SDM Aparatur Berbasis Kompetensi				1.809.419.392		1.263.089.146		711.100.390					58		
	Penyusunan Rencana Aksi Penataan dan Distribusi PNS	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Penataan dan Distribusi PNS/PPPK	5	Dokumen	218.926.635	3	127.020.186	1	20.794.840	1	19.055.702	4	146.075.888	80	67	
	Penyusunan Perencanaan Formasi PNS/PPPK Lima Tahunan dan Tahunan	Jumlah Dokumen Penyusunan Perencanaan Formasi PNS/PPPK Lima Tahunan dan Tahunan	6	Dokumen	230.267.650	4	206.133.130	1	40.631.011	1	61.468.096	5	267.601.226	83	116	
	Seleksi CPNS/PPPK Berbasis Sistem CAT (Computer Assisted Test)	Jumlah Peserta Seleksi CPNS/PPPK berbasis sistem CAT (Computer Assisted Test)	1.000	orang	427.177.919	250	375.342.239	250	562.136.228	-	#REF!	250	#REF!	25	#REF!	
	Seleksi Calon Praja IPDN Secara Terbuka	Jumlah Peserta Seleksi Calon Praja IPDN secara terbuka	150	orang	789.403.591	66	509.124.469	30	81.488.628	-	103.281.076	66	612.405.545	44	78	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penataan Pegawai Non PNS/PPPK/ Tenaga Kontrak	Jumlah Penataan Pegawai Non PNS/PPPK/ Tenaga Kontrak	5	Dokumen	143.643.598	2	45.469.122	1	6.049.683	1	27.388.750	3	72.857.872	60	51	
									Rata-rata capaian kinerja (%)	0,6		65,6				
									Predikat kinerja	SR						
	Program Promosi dan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka				7.018.687.405		3.962.470.535		588.654.390		595.336.856		4.557.807.391	87	93	
	Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi yang terisi melalui seleksi terbuka/mutasi	229	JPT Pratama	4.891.658.987	78	2.109.468.692	40	118.458.026	-	196.441.898	78	2.305.910.590	34	47	
	Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi yang terisi melalui seleksi terbuka	2	JPT Madya	498.516.700	1	354.379.989	1	400.000.000	1	307.906.900	2	662.286.889	100	133	
	Seleksi Pejabat Administrasi	Jumlah Pejabat Administrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi yang terisi melalui seleksi	1.790	Pejabat Administrasi	1.628.511.718	2.283	1.498.621.854	450	70.196.364	-	90.988.058	2.283	1.589.609.912	128	98	
									Rata-rata capaian kinerja (%)	0,33		787,67	1.519.269.130			
									Predikat kinerja	SR						
	Program Profesionalisasi PNS				9.797.336.475		5.798.225.622		670.823.085		663.555.688		6.461.781.310	102,51	59,06	
	Peningkatan Kemampuan ASN Melalui Pemberian Beasiswa Tugas Belajar dan Cost Sharing	Jumlah ASN Penerima Beasiswa Tugas Belajar dan Cost Sharing	139	orang	5.745.000.670	139	3.496.582.317	12	424.273.789	10	423.510.788	149	3.920.093.105	107	68	
	Peningkatan Kemampuan ASNMelalui Pengembangan Kompetensi, Diklat, Bimtek, Seminar, Kursus, Sosialisasi dan Workshop	Jumlah ASN yang terfasilitasi melalui Pengembangan Kompetensi, Diklat, Bimtek, Seminar, Kursus, Sosialisasi dan Workshop	30	orang	936.448.000	30	553.742.599	25	45.459.150	18	41.240.930	48	594.983.529	160	64	
	Penyelengaraan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikat Pangkat Penyesuaian Ijazah	Jumlah Peserta Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah	4.474	orang	883.619.295	4.474	432.115.619	600	52.764.824	600	52.764.824	5.074	484.880.443	113	55	
	Pelayanan Administrasi Jabatan Fungsional Tertentu	Jumlah Penerbitan SK Pelayanan Administrasi jabatan Fungsional Tertentu	812	orang	673.527.970	812	445.358.347	300	64.157.700	294	63.058.000	1.106	508.416.347	136	75	
	Pemantauan Disiplin PNS dan Non PNS/PPPK	Jumlah Laporan Kehadiran PNS Setiap SKPD di Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi	72	laporan	229.059.074	72	115.016.934	12	20.567.724	9	20.383.924		135.400.858	-	59	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS	Jumlah Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS/PPPK	104	laporan	970.262.013	104	645.745.756	20	63.599.898	6	62.597.222	110	708.342.978	106	73	
	Pelaporan Harta Kekayaan ASN (LHK ASN)	Jumlah PNS yang menyampaikan LHKASN dan LP2P	4.000	ASN	204.801.500	4.000	59.114.000	-	-	-	-	4.000	59.114.000	100	29	
	Penilaian Prestasi Kerja PNS dan Non PNS/PPPK	Jumlah Dokumen Penilaian Prestasi Kerja PNS dan Non PNS/PPPK	43	Dokumen	30.000.000	43	26.824.450	-	-	-	-	43	26.824.450	100	89	
	Pelaksanaan Sumpah/Janji PNS	Jumlah Pengambilan Sumpah/Janji PNS	6	kali	124.617.953	6	23.725.600	-	-	-	-	6	23.725.600	100	19	
									Rata-rata capaian kinerja (%)	104,11		1.317	717.975.701			
									Predikat Kinerja							
10.00	Program Peningkatan Kesejahteraan PNS dan Pemberian Penghargaan PNS				1.504.719.300		897.533.335		109.602.173		108.307.095		1.005.840.430	74	60	
	Penyusunan, Monitoring dan Evaluasi Pemberian Tunjangan Kinerja/Tunjangan Kesejahteraan Secara Bertahap	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pemberian Tunjangan Kinerja/Tunjangan Kesejahteraan Secara Bertahap	215	Dokumen	235.452.300	129	66.469.650	-	-	0	0	129	66.469.650	60	28	
	Pemberian Penghargaan dan Kesejateraan PNS	Jumlah PNS yang Mendapat Penghargaan SLKS	4.967	orang	899.904.500	2.839	603.422.185	950	49.602.173	600	48.307.095,00	3.439	651.729.280	69	72	
		Jumlah Penerima Penghargaan PNS Teladan Berprestasi Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi	25	orang		25		12		0		25		100		
		Jumlah Pemberian Pelayanan Izin Cuti PNS Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi	3.867	orang		2.297		450		465		2.762		71		
	Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	705	stel	369.362.500	401	227.641.500	100	60.000.000	100	60.000.000,00	501	287.641.500	71	78	
									Rata-rata capaian kinerja (%)	233		1.371,00	335.280.143			
									Predikat Kinerja							
	Program Pelayanan Publik di Bidang Kepegawaian				2.696.525.530		1.853.426.900		261.692.631		394.656.754		2.248.083.654	77,95	77,6	
	Pelayanan Administrasi Pendidikan Lanjutan Aparatur Sipil Negara	Jumlah SK Pelayanan Administrasi Pendidikan Lanjutan Aparatur Sipil Negara	1.287	orang	267.550.526	687	189.775.209	300	18.499.900	175	18.499.900	862	208.275.109	67	78	
	Pelayanan Pengangkatan CPNS, Kenaikan Pangkat dan Pensiun PNS	Jumlah SK CPNS yang terselesaikan	465	SK	1.071.311.420	51	701.394.957	200	85.177.200	200	159.551.474	251	860.946.431	54	80	
		Jumlah SK Kenaikan Pangkat yang terselesaikan	15.300	SK		10.754		3.000		1.694	-	12.448	-	81		
		Jumlah SK Pensiun yang terselesaikan	2.050	SK		1.275		300		284	-	1.559	-	76		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Jumlah SK Penyesuaian Masa Kerja	9	SK		5		2		2	-	7	-	78		
	Kegiatan Pelayanan Mutasi dan Kenaikan Gaji Berkala	Jumlah SK Mutasi	2.919	SK	532.669.710	1.419	342.187.190	420	56.464.200	172	120.146.134	1.591	462.333.324	55	87	
		Jumlah SK Kenaikan Gaji Berkala PNS Pemerintah Provinsi Jambi	29.757	SK		18.157		4.800		3.126		21.283	-	72		
	Pengelolaan, Pelayanan dan Fasilitas Penerbitan Kartu Pegawai (KARPEG), Kartu Pegawai Elektronik (KPE), kartu Istri (KARIS)/Kartu Suami (KARSU)	Jumlah Pengelolaan, Pelayanan dan Fasilitas Penerbitan Kartu Pegawai (KARPEG), Kartu Pegawai Elektronik (KPE), kartu Istri (KARIS)/Kartu Suami (KARSU)	2.490	Kartu	248.037.100	1.642	152.671.702	350	14.394.333	293	14.225.800	1.935	166.897.502	78	67	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Kepegawaian	Jumlah ASN yang terfasilitasi mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Kepegawaian di Lingkup Pemprov Jambi	500	ASN	516.956.774	300	435.497.842	100	87.156.998	100	82.233.446	400	517.731.288	80	100	
	Pelayanan Penerbitan / Rekomendasi dan Surat Pernyataan Hukuman Disiplin dan Izin Perceraian	Jumah Penerbitan / Rekomendasi dan Surat Pernyataan Hukuman Disiplin dan Izin Perceraian	800	Surat	60.000.000	1.117	31.900.000	-	-	-	-	1.117	31.900.000	140	53	
									Rata-rata capaian kinerja (%)	604,6		4.145	224.808.365			
									Predikat Kinerja							
12	Progran Penyusunan Kebijakan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi dan Pertimbangan Jabatan dan kepangkatan				1.422.812.577		650.527.019		57.327.784		56.319.193		706.846.212	63	46	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi/Rapat Kerja/Forum Kepala BKD se-Provinsi/FGD di Bidang Kepegawaian	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi/Rapat Kerja/Forum Kepala BKD se-Provinsi/FGD di Bidang Kepegawaian	5	Kali	374.461.287	3	142.753.736	-	-	-	-	3	142.753.736	60	38,12	
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan	6	Dokumen	1.048.351.290	4	507.773.283	1	57.327.784	-	56.319.193	4	564.092.476	66,67	53,81	
									Rata-rata capaian kinerja (%)	-		3,5	353.423.106			
									Predikat kinerja	SR						
	Program Peningkatan Kualitas Informasi Kepegawaian	Persentase data SIMPEG yang akurat			2.134.979.554		1.312.642.338		146.844.798		152.919.185		1.465.561.523	83,16	68,65	
	Penyusunan Buku Data Kepegawaian Pemerintah Provinsi Jambi dan SKPD	Jumlah Buku Data Kepegawaian dan Daftar Urutan	150	Buku	287.195.890	115	170.304.650	30	45.042.660	55	57.099.500	170	227.404.150	113,33	79,18	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Provinsi Jambi sertaDaftar Urutan Kepangkatan PNS	Kepangkatan PNS Provinsi Jambi														
	Pengelolaan, Pemeliharaan Data dan Informasi Kepegawaian	Jumlah Pengelolaan, Pemeliharaan Data dan Informasi Kepegawaian	58.000	Data Peg	853.158.816	36.000	558.576.924	11.000	47.883.936	7.500	44.048.786	43.500	602.625.710	75	70,63	
			600	Informasi		426		100		75	-	501	-	83,5		
	Pengelolaan dan Pemeliharaan Tata Naskah Dinas Kepegawaian Elektronik dan Arsip Fisik	Jumlah Pengelolaan dan Pemeliharaan Tata Naskah Dinas Kepegawaian Elektronik dan Arsip Fisik	6.100	Dokumen	557.608.158	4.100	340.111.048	1.000	31.703.122	470	31.357.799	4.570	371.468.847	74,92	66,62	
	Pengembangan Aplikasi Pelayanan Kepegawaian	Jumlah Pengembangan Aplikasi Pelayanan Kepegawaian	5	Aplikasi	405.033.890	3	222.258.616	1	22.215.080	1	20.413.100	4	242.671.716	80	59,91	
	Penyusunan Buku Profil Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas	Jumlah Penyusunan Buku Profil Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas	180	Buku	31.982.800	130	21.391.100	-	-	-	-	130	21.391.100	72,22	66,88	
									Rata-rata capaian kinerja (%)	1.350,00		8.145,00	244.260.254			
									Predikat kinerja	FALSE						
	Program Pembinaan Bakat dan Peningkatan Prestasi Anggota KORPRI di Bidang Olah Raga	Peringkat Prestasi Olah Raga Anggota KORPRI Provinsi Jambi di Tingkat Nasional			882.675.600		1.408.368.376		-		-		1.408.368.376	143,08	159,56	
	Pekan Olah Raga KORPRI Tingkat Nasional	Jumlah Peserta Pekan Olah RagaKORPRI Tingkat Nasional	65	orang	882.675.600	93	1.408.368.376	-	-	-	-	93	1.408.368.376	143,08	159,56	
									Rata-rata capaian kinerja (%)	-		93	1.408.368.376			
									Predikat kinerja	SR						
	Program Kerjasama Pembinaan Bakat dan Peningkatan Prestasi Anggota KORPRI di Bidang Keagamaan dan Kerohanian	Peringkat Prestasi Mental dan Rohani Anggota KORPRI Provinsi Jambi di Tingkat Nasional			889.823.245		243.538.052		30.045.050		27.726.801		271.264.853	54,58	31,47	
	Pembelajaran Seni Baca Al Qur'an	Jumlah Peserta Pembelajaran Seni Baca Al Qur'an	425	orang	139.823.245	275	43.756.800	75	2.257.050	0	2.257.050,00	275	46.013.850	64,71	32,91	
	MTQ KORPRI Tingkat Nasional	Jumlah Peserta yang mengikuti MTQ KORPRI Tingkat Nasional	27	orang	750.000.000	12	199.781.252	12	27.788.000	0	25.469.751,00	12	225.251.003	44,44	30,03	
									Rata-rata capaian kinerja (%)	-		143,5	135.632.427			
									Predikat kinerja	SR						
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	PersentasePeningkatan Disiplin Aparatur			69.809.600		41.059.200		-	-	-		41.059.200	66,67	58,82	
	Peningkatan Rasa Nasionalisme dan Kedisiplinan PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi	Rentang Waktu Pelaksanaan Upacara Peningkatan Rasa Nasionalisme dan Kedisiplinan PNS	36	Bulan	69.809.600	24	41.059.200	-	-	-	-	24	41.059.200	66,67	58,82	
									Rata-rata capaian kinerja (%)	-		24	41.059.200			
									Predikat kinerja	SR						

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Provinsi Jambi																
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (01)	Persentase Keterlaksanaan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%		23.157.301.000	92,3	2.933.519.538		2.251.547.368		2.259.476.368		5.192.995.906	82,64	21,02	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah kebutuhan benda pos materai, perangko dan benda pos guna pengelolaan surat-surat dinas	100		200.000.000	93,34	4.667.000	100	2.289.000	89,21	2.289.000	91,27	6.956.000	91,27	3,48	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah kebutuhan biaya untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet kantor guna mendukung kelancaran tugas	100		7.392.000.000	90,4	1.176.952.619	100	807.300.164	75,51	812.782.296	82,96	1.989.734.915	82,96	26,92	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya kegiatan penyediaan tenaga pemeliharaan/perawatan kantor untuk jasa kebersihan kantor guna kenyamanan lingkungan kantor	100		3.050.000.000	99,88	399.500.000	100	466.800.000	75	466.800.000	87,44	866.300.000	87,44	28,4	
	Penyediaan Alat tulis Kantor	Jenis alat tulis kantor yang tersedia guna mendukung kelancaran tugas	100		981.665.000	98,06	88.164.400	100	49.945.100	88,43	54.943.500	93,25	143.107.900	93,25	14,58	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis barang cetak dan penggandaan guna mendukung kelancaran tugas kedinasan	100		395.000.000	79,17	47.500.000	100	30.919.014	76,62	29.257.025	77,89	76.757.025	77,89	19,43	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen instalasi listrik/penerangan gedung dan halaman kantor guna mendukung kelancaran tugas kedinasan	100		750.055.000	100	72.640.000	100	17.035.950	45,94	23.335.950	72,97	95.975.950	72,97	12,8	
	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	% Jumlah surat kabar, majalah dan buku kepustakaan guna mendukung peningkatan pengetahuan pegawai dan peserta diklat	100		265.000.000	-	-	100	38.066.600					0	0	
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah kebutuhan makanan dan minuman rapat serta makanan dan minuman tamu kedinasan guna mendukung kelancaran tugas	100		1.281.000.000	114,59	98.165.000	100	70.050.000	82,46	64.738.444	98,52	162.903.444	98,52	12,72	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Tingkat pemenuhan honorarium panitia pelaksana kegiatan, pengelola keuangan SKPD	100		1.827.581.000	90,1	207.097.800	100	239.354.800	66,65	206.248.600	78,38	413.346.400	78,38	22,62	
	Keikutsertaan Rapat-Rapat Koordinasi/Konsultasi/ Pembinaan Kediklatan Dalam dan Luar Daerah	Tingkat keikutsertaan rapat-rapat koordinasi, konsultasi, pendampingan dan undangan di dalam dan luar daerah	100		5.850.000.000	132,9	531.582.719	100	290.958.700	73,89	354.331.553	103,39	885.914.272	103,39	15,14	
	Pelayanan Dokumentasi, Publikasi dan Arsip	Jenis dokumentasi dan publikasi kegiatan kantor	100		295.000.000	146,53	107.900.000	100	32.405.000	83,03	38.350.000	114,78	146.250.000	114,78	49,58	
	Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor	Jumlah kebutuhan dan honorarium tenaga keamanan kantor	100		870.000.000	98,01	199.350.000	100	206.423.040	83,74	206.400.000	90,88	405.750.000	90,88	46,64	
									Rata-rata capaian kinerja (%)	76,41		90,16	472.090.537			
									Predikat kinerja	S						
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor (02)	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor	100%		24.338.130.000		1.647.328.498		733.154.145		1.103.551.024		2.750.879.522			
	Pembangunan Gedung kantor	Jumlah kebutuhan Bangunan gedung kantor guna pelaksanaan kinerja	100		8.000.000.000	116	216.861.650	-	-	-	-	57,98	216.861.650	57,98	2,71	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah kebutuhan pengadaan kendaraan dinas/operasional berupa mobil dinas dan sepeda motor	100		1.300.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor	Terlaksananya pengadaan perlengkapangedung kantor	100		1.400.000.000	93	447.921.480	-	-	-	-	93,05	447.921.480	93,05	31,99	
	Pengadaan Peralatan Gedung kantor	Jumlah dan Jenis kebutuhan pengadaan peralatangedung kantor	100		1.200.000.000	75	115.597.700	100	40.911.848	100	384.131.834	87,39	499.729.534	87,39	41,64	
	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Jumlah bagian gedung kantor yang rusak terperbaiki dan jumlah bagian gedung kantor yang kotor terbersihkan	100		1.988.400.000	150	299.404.015	100	75.000.000	99	74.560.000	124,56	373.964.015	124,56	18,81	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jenis dan jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional guna mendukung kelancaran tugas kedinasan	100		1.929.280.000	109	224.834.894	100	191.857.797	81	200.980.097	95,09	425.814.991	95,09	22,07	
	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	Jenis peralatan kantor dan rumah tangga guna mendukung kelancaran tugas kedinasan	100		1.970.450.000	115	298.997.959	100	225.496.500	84	244.601.093	99,55	543.599.052	99,55	27,59	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung kantor	Terlaksananya rehabilitasigedung kantor untuk kelancaran kegiatan operasional pada Bandiklatda Provinsi Jambi	100		6.550.000.000	-	-	100	199.888.000	100	199.278.000	49,85	199.278.000	49,85	3,04	
	Penambahan/Revitalisasi jaringan instalasi listrik		-		-	10	19.965.800	-	-	-	-	4,99	19.965.800			
	Penyediaan sarana pengelolaan air bersih		-		-	12	23.745.000	-	-	-	-	5,94	23.745.000			
									Rata-rata capaian kinerja (%)	46,33		61,84	275.087.952			
									Predikat kinerja	SR						
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur (03)	Persentase Kehadiran Kerja Pegawai	100%		102.000.000	96	74.635.000		-	0,00%	-		74.635.000	47,84	73,17	
	Pengadaan Pakaian Dinas besera perlengkapannya	Jenis dan jumlah pakaian dinas yang dibutuhkan guna mendukung disiplin berpakaian pegawai	100		102.000.000	96	74.635.000	-	-	-	-	47,84	74.635.000	47,84	73,17	
									Rata-rata capaian kinerja (%)	-		47,84	74.635.000			
									Predikat kinerja	SR						
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (04)	Persentase Pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Internal	1		1.325.000.000	1	404.638.096	1	180.490.000	-	229.452.071		634.090.167	87	48	
	Kegiatan Bimbingan Teknis / Diklat Aparatur Internal	Terlatihnya Aparatur Internal	100	%	1.325.000.000	91	404.638.096	100	180.490.000	83,33	229.452.071	87,23	634.090.167	87	48	
									Rata-rata capaian kinerja (%)	83,33		87,23	634.090.167			
									Predikat kinerja	T						
	Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan keuangan (05)	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Program, Kegiatan, dan Pelaporan Keuangan			752.500.000		136.540.048		54.958.250		60.299.500		196.839.548	91,6	26,16	
	Penyusunan Renstra dan Renja dan Capaian kinerja	Tersedianya Dokumen Perencanaan Program, Kegiatan, dan Pelaporan Keuangan	100		752.500.000	100	136.540.048	100	54.958.250	83,19	60.299.500	91,6	196.839.548	91,6	26,16	
									Rata-rata capaian kinerja (%)	83,19		91,6	196.839.548			
									Predikat kinerja	T						
	Manajemen Pelayanan Kediklatan (06)	Persentase Keterlaksanaan Penyelenggaraan Diklat	100	persen	3.379.770.000		357.235.524		182.037.402	0,00%	302.105.202	0%	659.340.726	525,3	13,28	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Pengembangan SDM AparaturKediklatan	Terlaksananya Kegiatan rapat Koordinasi Kediklatan	100	persen	1.458.470.000	91	141.149.644	100	92.466.600	65	87.466.600	78	228.616.244	78	16	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kediklatan	Terhimpunnya Informasi Penyelenggaraan Diklat	100	persen	1.446.300.000	100	152.894.700	100	51.769.802	140	129.587.602	120	282.482.302	120	20	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penyelenggaraan seminar/workshop pengembangan program dan kegiatan BPSDM	Terhimpunnya Informasi Penyelenggaraan Diklat	100	persen	-	77	63.191.180	-	-	-	-	39	63.191.180	39	-	
	Pembuatan Buletin/Majalah/Jurnal Ilmiah Kediklatan	JumlahBuletin/Majalah/Jurnal Ilmiah Kediklatan	4	eks	475.000.000	-	-	176	37.801.000	149	85.051.000	75	85.051.000	1.865	18	
									Rata-rata capaian kinerja (%)	88,5		77,69	164.835.182			
									Predikat kinerja	T						
	Program Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan	Terlaksananya Diklat Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan	75	persen	6.807.662.800		1.018.267.053		831.823.156	-	480.225.620	-	1.498.492.673	14,64	97,25	
	Fokus Group Discussion LSP PDN	jumlah peserta yang mengikuti	100	persen	53.940.900	-	119.329.446	-	-	-	-	-	119.329.446	-	221,22	
	Studi Tiru LSP PDN	jumlah peserta yang mengikuti	100	persen	70.175.000	-	67.753.860	-	-	-	-	-	67.753.860	-	96,55	
	TOT Pimpemdagri	jumlah peserta yang mengikuti	100	persen	112.330.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Kabupaten/Kota	jumlah kabupaten/kota	100	persen	149.910.000	-	79.584.373	-	-	-	-	-	79.584.373	-	53,09	
	Pelaksanaan Akreditasi Lembaga	frekuensi akreditasi	100	persen	294.825.000	-	279.731.674	-	-	-	-	-	279.731.674	-	94,88	
	Diklat Analisis Kebutuhan Sistem Informasi bagi OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi (AKSI OPD)	jumlah peserta yang mengikuti	100	persen	259.500.000	-	246.925.740	-	-	-	-	-	246.925.740	-	95,15	
	Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi	frekuensi analisis pengembangan kompetensi	100	persen	71.275.000	-	65.265.200	-	-	-	-	-	65.265.200	-	91,57	
	Penyusunan Perangkat Pembelajaran Pemerintah Dalam Negeri/Kurikulum/Silabi/Modul	jumlah modul/kurikulum	100	persen	119.675.000	-	99.890.800	-	-	-	-	-	99.890.800	-	83,47	
	Monitoring Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan	frekuensi monitoring	100	persen	66.730.000	-	59.785.960	-	-	110	218.495.198,00	110	278.281.158	110	417,03	
	Sertifikasi Kompetensi	jumlah peserta yang mengikuti	203	orang	1.869.767.000	-	-	107	301.887.771	95,15	142.877.841,00	95,15	142.877.841	46,87	7,64	
	Pengelolaan dan tenaga pengembangan Kompetensi	jumlah peserta yang mengikuti	203	orang	1.869.767.000	-	-	107	102.848.689	21,37	47.430.106,00	21,37	47.430.106	10,53	2,54	
	Pengelolaan sumber belajar dan kerjasama	jumlah peserta yang mengikuti	203	orang	1.869.767.000	-	-	107	427.086.696	16,72	71.422.475,00	16,72	71.422.475	8,24	3,82	
									Rata-rata capaian kinerja (%)	44,41		20,27	124.874.389			
									Predikat kinerja	SR						
	Program Pengembangan Kompetensi Teknis Inti	Terlaksananya Diklat Pengembangan Kompetensi Teknis Inti	100		3.557.700.000		1.279.723.474	100	603.495.749	-	551.616.587	-	1.831.340.061	93,72	85,5	
	Diklat Teknis Inti Pengelolaan Keuangan Desa	jumlah peserta yang mengikuti	100		86.550.000	95	81.849.000	-	-	-	-	95	81.849.000	94,57	94,57	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Diklat Teknis Inti Kewirausahaan Purna Bakti Bagi ASN	jumlah peserta yang mengikuti	100		301.255.000	94	283.210.950	-	-	-	-	94	283.210.950	94,01	94,01	
	Diklat Teknis Inti Pengembangan Pariwisata	jumlah peserta yang mengikuti	100		320.155.000	90	289.193.804	-	-	-	-	90	289.193.804	90,33	90,33	
	Diklat Teknis Inti Dasar Manajemen Penanggulangan Bencana	jumlah peserta yang mengikuti	100		89.550.000	92	82.789.600	-	-	-	-	92	82.789.600	92,45	92,45	
	Diklat Teknis Inti Dasar Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender	jumlah peserta yang mengikuti	100		86.550.000	94	81.215.600	-	-	-	-	94	81.215.600	93,84	93,84	
	Pendataan Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Teknis Inti		100		15.835.000	100	15.765.650	-	-	-	-	100	15.765.650	99,56	99,56	
	Diklat Teknis Inti Pengelolaan Aset Daerah	jumlah peserta yang mengikuti	100		86.550.000	90	77.561.800	-	-	-	-	90	77.561.800	89,62	89,62	
	Diklat Teknis Inti Manajemen Kearsipan	jumlah peserta yang mengikuti	100		78.438.750	94	73.366.700	-	-	-	-	94	73.366.700	93,53	93,53	
	Diklat Teknis Inti Pemandu Wisata	jumlah peserta yang mengikuti	100		78.438.750	94	73.424.150	-	-	-	-	94	73.424.150	93,61	93,61	
	Diklat Teknis Inti Sanitasi Lingkungan	jumlah peserta yang mengikuti	100		78.438.750	95	74.178.220	-	-	-	-	95	74.178.220	94,57	94,57	
	Diklat Teknis Inti Penilaian Koperasi	jumlah peserta yang mengikuti	100		78.438.750	188	147.168.000	-	-	-	-	188	147.168.000	187,62	187,62	
	Pengembangan	jumlah peserta yang dinyatakan lulus	133	orang	752.500.000	-	-	57	69.543.434	85	58.998.314	85	58.998.314	63,79	7,84	
	Kompetensi inti jabatan adm urusan Konkuren wajib pelayanan dasar dan pilihan															
	Pengembangan	jumlah peserta yang dinyatakan lulus	133	orang	752.500.000	-	-	57	161.467.583	80	146.205.393	80	146.205.393	60,19	19,43	
	Kompetensi inti jabatan adm urusan Konkuren wajib non pelayanan dasar															
	Pengembangan	jumlah peserta yang dinyatakan lulus	133	orang	752.500.000	-	-	57	372.484.732	86	346.412.880	86	346.412.880	64,4	46,03	
	Kompetensi inti jabatan adm perangkat daerah penunjang															
									Rata-rata capaian kinerja (%)	83,51		98,16	130.810.004			
									Predikat kinerja	T						
	Kegiatan Pengembangan Teknis Umum dan Fungsional	Terlaksananya Diklat Pengembangan Teknis Umum dan Fungsional	100		5.942.213.500		1.375.388.480		773.293.700		1.522.626.896	-	2.898.015.376	65,19	79,04	
	Pelatihan Pengembangan Kompetensi Pengelola Perpustakaan bagi Guru SLTA	jumlah peserta yang mengikuti	100	persen	338.175.000	93	313.884.860	-	-	-	-	93	313.884.860	92,82	92,82	
	Pelatihan Peningkatan Kompetensi Penyuluh Pertanian	jumlah peserta yang mengikuti	100	persen	360.935.000	85	308.146.600	-	-	-	-	85	308.146.600	85,37	85,37	
	Pelatihan Pengembangan Revolusi Mental bagi Pejabat Eselon IV	jumlah peserta yang mengikuti	100	persen	95.375.000	96	91.373.000	-	-	-	-	96	91.373.000	95,8	95,8	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pelatihan Karya Tulis Ilmiah bagi Guru SMA dan SMK	jumlah peserta yang mengikuti	100	persen	105.450.000	100	196.609.500	-	-	-	-	100	196.609.500	100	186,45	
	Pelatihan Penyusunan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) bagi Guru SMA dan SMK	jumlah peserta yang mengikuti	100	persen	104.950.000	97	101.336.300	-	-	-	-	97	101.336.300	96,56	96,56	
	Pelatihan Pengembangan Budaya Organisasi/Budaya Lokal	jumlah peserta yang mengikuti	100	persen	95.375.000	97	92.411.300	-	-	-	-	97	92.411.300	96,89	96,89	
	Pelatihan Analis Jabatan bagi ASN Prov/Kab/Kota	jumlah peserta yang mengikuti	100	persen	99.725.000	93	182.171.900	-	-	-	-	93	182.171.900	93,46	182,67	
	Pelatihan Pengembangan Koompetensi Polisi Pamong Praja	jumlah peserta yang mengikuti	100	persen	101.250.000	88	89.455.020	-	-	-	-	88	89.455.020	88,35	88,35	
	Pelatihan Pengembangan Motivasi Kerja bagi ASN PRov/Kab/Kota	jumlah peserta yang mengikuti	100	persen	91.159.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pelatihan Pengembangan Perkotaan Berbasis Tata Ruang dan Ekosistem bagi ASN Prov/Kab/Kota	jumlah peserta yang mengikuti	100	persen	95.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pengembangan	jumlah peserta yang dinyatakan lulus	280	orang	1.484.873.000	-	-	160	95.660.175	94	79.668.700	94	79.668.700	33,53	5,37	
	Kompetensi umum jabatan administrasi															
	Pengembangan	jumlah peserta yang dinyatakan lulus	280	orang	1.484.873.000	-	-	160	191.254.600	88	812.782.296	88	812.782.296	31,37	54,74	
	Kompetensi pilihan jabatan administrasi															
	Pengembangan	jumlah peserta yang dinyatakan lulus	280	orang	1.484.873.000	-	-	160	486.378.925	93	630.175.900	93	630.175.900	33,26	42,44	
	Kompetensi Jabatan Fungsional															
									Rata-rata capaian kinerja (%)	91,62		78,78	222.924.260			
									Predikat kinerja	ST						
	Program Pengembangan Kompetensi Manajerial	Terlaksananya Diklat Pengembangan Kompetensi Manajerial	100		9.690.316.975	2475	4.881.106.050	100	1.221.065.230		1.052.313.590	2.475	5.933.419.640	61,75	78,91	
	Diklat Kepemimpinan Tk. III	jumlah peserta yang lulus	100	persen	1.224.396.975	89	1.092.025.600	-	-	-	-	89,19	1.092.025.600	89,19	89,19	
	Diklat Kepemimpinan Tk. IV	jumlah peserta yang lulus	100	persen	1.238.430.000	100	1.238.430.000	-	-	-	-	100	1.238.430.000	100	100	
	Latsar Calon Pegawai Negeri Sipil	jumlah peserta yang lulus	100	persen	1.833.885.000	100	1.833.885.000	-	-	-	-	100	1.833.885.000	100	100	
	Diklat Peningkatan Kapasitas Camat	jumlah peserta yang mengikuti	100	persen	338.515.000	90	306.090.600	-	-	-	-	90,42	306.090.600	90,42	90,42	
	Diklat Peningkatan Kapasitas Lurah	jumlah peserta yang mengikuti	100	persen	87.330.000	85	74.563.600	-	-	-	-	85,38	74.563.600	85,38	85,38	
	Diklat Komunikasi dan Public Speaking	jumlah peserta yang mengikuti	100	persen	88.385.000	100	175.715.000	-	-	-	-	100	175.715.000	100	198,81	
	Diklat Manajemen Kepemimpinan dan Kecerdasan Emosi Bagi Pejabat Eselon III/IV	jumlah peserta yang mengikuti	100	persen	74.617.500	100	160.396.250	-	-	-	-	100	160.396.250	100	214,96	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Diklat Manajemen Kinerja Bagi Pejabat Eselon III/IV	jumlah peserta yang mengikuti	100	persen	83.485.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Diklat Pembekalan Kepemimpinan Bagi Jabatan Pengawas	jumlah peserta yang mengikuti	100	persen	88.072.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pengembangan	jumlah peserta yang dinyatakan lulus	217	orang	1.544.400.000	-	-	103 orang	54.232.050	73	213.650.500	73	213.650.500	33,64	13,83	
	Kompetensi Pimpinan Daerah															
	Pengembangan	jumlah peserta yang dinyatakan lulus	217	orang	1.544.400.000	-	-	103 orang	47.865.700	50	74.392.150	50	74.392.150	23,04	4,82	
	Kompetensi Jabatan Struktural															
	Pengembangan	jumlah peserta yang dinyatakan lulus	217	orang	1.544.400.000	-	-	103 orang	1.118.967.480	42	764.270.940	41,84	764.270.940	19,28	49,49	
	Kompetensi Kepemimpinan dan Prajabatan															
									Rata-rata capaian kinerja (%)	54,95		69,15	494.451.637			
									Predikat kinerja	R						

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Inspektorat																
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kualitas pelayananan administrasi perkantoran	100		16.795.300.000		7.821.529.395		2.366.671.279		2.451.382.039		10.272.911.434	905,4	57,4	
	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis ATK (Set)	240	set	760.000.000	155	381.635.200	30	78.216.000	100	92.033.600	255	473.668.800	106,25	62,32	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Periode pembayaran rekening (bulan)	60	Bulan	1.300.000.000	48	710.391.640	12	281.137.170	67,03	188.436.640	115,03	898.828.280	191,72	69,14	
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor (Set)	60	set	26.200.000	54	16.039.896	18	8.066.000	92,22	7.438.800	146,22	23.478.696	243,7	89,61	
	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Periode pembayaran jasa jaminan barang milik daerah	5	tahun	631.000.000	3	133.394.400	-	-	-	-	3	133.394.400	60	21,14	
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara dandiperpanjang izinya (unit)	20	unit	2.800.000.000	37	1.144.425.648	17	342.746.600	96,27	292.352.814	133,27	1.436.778.462	666,35	51,31	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Keluar Per tahun (Lembar)	20	Surat	49.100.000	2.020	21.178.630	500	15.414.180	49,31	7.601.500	2.069,00	28.780.130	10.346	58,62	
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah tenaga administrasi keuangan (ob)	3.047	OB	981.000.000	2.070	506.678.797	531	186.388.800	98,9	184.343.900	2.168,00	691.022.697	71,18	70,44	
	Penyedian Jasa Kebersihan Kantor	Periode Pemakaian Jasa Kebersihan Kantor (bulan)	60	Bulan	190.000.000	4	106.162.800	12	93.324.379	99,92	99.103.000	103,92	205.265.800	173,2	108,03	
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	498	unit	788.000.000	233	-	-	-	-	-	233	-	46,79	-	
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Peserta Rapat/Tamu (orang)	5.382	orang	891.000.000	4.160	323.719.475	1.000	135.000.000	71,21	96.129.285	4.231,00	419.848.760	78,62	47,12	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	120	set	450.000.000	71	259.264.803	14	111.672.900	84,27	102.529.400	155,27	361.794.203	129,39	80,4	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (buah)	25	buah	386.000.000	75	106.304.500	15	89.837.650	26,46	26.254.800	101,46	132.559.300	405,84	34,34	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (eks)	1.625	eks	243.000.000	1.300	81.374.810	325	25.415.400	35,37	8.990.500	1.335,00	90.365.310	82,18	37,19	
	Rapat Koordinasi, Konsultasiike Luar Daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan (Oh)	6.750	OH	7.300.000.000	4.900	4.030.958.796	1.150	999.452.200	99,76	1.346.167.800	4.999,00	5.377.126.596	74,07	73,66	
									Rata-rata capaian kinerja (%)	65,77		1.146,00	733.779.388			
									Predikat kinerja	R						
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pelaksanaan kegiatan sarana dan prasarana aparatur	95%		11.497.000.000		4.514.060.267		1.134.893.250		1.194.154.150		5.708.214.417		53	
	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah penagadaan kendaraan dinas/operasional (unit)	12	unit	1.100.000.000	4	460.562.200	-	-	-	-	4	460.562.200	33	42	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah jenis pengadaan perlengkapan gedung kantor	36	jenis	1.400.000.000	22	360.171.000	-	-	-	-	22	360.171.000	61	26	
	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah jenis pengadaan peralatan gedung kantor	63	jenis	2.400.000.000	42	526.635.554	4	23.355.000	94,38	158.989.200	136	685.624.754	216	29	
	Pengadaan mebeleur	Jumlah pengadaan mebeleur	358	unit	806.000.000	144	173.158.103	-	-	-	-	144	173.158.103	40	21	
	Pengadaan komputer	Jumlah pengadaan komputer	59	unit	1.200.000.000	50	706.068.799	15	570.961.000	97	554.245.000	147	1.260.313.799	249	105	
	pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	1	gedung	2.500.000.000	1	1.191.743.665	1	64.800.000	21	36.450.000	22	1.228.193.665	2.173	49	
	Pemiliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	170	unit	1.100.000.000	177	262.896.250	75	89.000.000		58.557.950		321.454.200		29	
	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang di rehab sedang/berat	1	gedung	991.000.000	1	832.824.696	1	386.777.250		385.912.000		1.218.736.696		123	
									Rata-rata capaian kinerja (%)				713.526.802			
									Predikat kinerja							
	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	100%		300.000.000		232.373.375		84.500.000		161.987.000		394.360.375	95	131	
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	600	stel	300.000.000	470	232.373.375	110	84.500.000	100	161.987.000	569,68	394.360.375	94,95	131,45	
									Rata-rata capaian kinerja (%)	99,68		569,68	394.360.375			
									Predikat kinerja	ST						
	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase Standar akuntansi pemerintahan (SAP)	100%		80.630.000.000		25.755.423.390		6.111.804.511		15.241.029.982		40.996.453.372	300	43	
	Gelar Pengawasan dan rapat koordinasi daerah	Jumlah pelaksanaan Gelarwasda,	10	kali	6.000.000.000	8	1.832.901.257	2	480.328.812	102	808.660.008	110	2.641.561.265	1.100,00	44,03	Itprov
		Jumlah pelaksanaan Rakorwasda	20	kali		10		4		-	-	10	-	50		Itprov
	Inventarisasi temuan pengawasan	Jumlah buku katalog dan laporan hasil pemeriksaan	125	buku katalog	430.000.000	100	188.258.950	25	34.694.900	14,1	5.728.200	114,1	193.987.150	91,28	45,11	Itprov
	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	Persentase koordinasi pengawasan dengan Itjend terkait	100	persen	4.900.000.000	101	108.273.624	100	108.273.624	162,29	176.848.129	263,26	285.121.753	263,26	5,82	Itprov
	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	Persentase laporan keuangan SKPD seusai SAP,	100	persen	37.000.000.000	100	9.011.787.788	100	2.451.237.200	309	7.632.333.750	409	16.644.121.538	409	44,98	Itprov
		Persentase nilai temuan keuangan daerah yang ditindaklanjuti sesuai hasil pemeriksaan BPK RI atas LKPD Pemprov Jambi,	100	persen		2		100		253	-	254,74	-	254,74		Itprov
		Persentase peningkatanpenilaian SKPD yang berpredikat "tertib"	100	persen		0		100		188	-	188,32	-	188,32		Itprov

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	Persentase tingkat penyelesaian kasus dan klarifikasi kasus	100	persen	2.800.000.000	87	665.028.370	65	131.582.800	240,11	315.944.900	326,64	980.973.270	326,64	35,03	Itprov
	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase kategori hasil evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai "B"	70	persen	22.000.000.000	1	7.466.325.423	70	1.367.052.787	150	3.636.253.296	151	11.102.578.719	215,71	50,47	Itprov
		Persentase kategori hasil evaluasi SAKIP Kabupaten/Kota dengan nilai "B",	45	persen		2		45		115	-	117	-	260		Itprov
		Persentase hasil Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah	64	persen		2		64		179	-	181	-	282,81		Itprov
	Sapu bersih pungutan liar (SABER PUNGLI)		-	-	-	2	1.978.016.307	100	842.150.236	196,69	1.656.386.599	198,58	3.634.402.906			Itprov
	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Persentase tindak lanjut BPK yang selesai,	92	persen	7.500.000.000	2	4.471.678.663	92	522.072.938	243	1.004.879.100	244,76	5.476.557.763	266,04	73,02	Itprov
		Persentase tindak lanjut Itjen Kemendagri yang selesai,	100	persen		2		100		255	-	257	-	257		Itprov
		Persentase tindak lanjut Inspektorat Provinsi yang selesai	96	persen		2		96		223	-	224,92	-	234,29		Itprov
	Kegiatan Survei Penilaian Integritas			persen		24	33.153.008	100	125.255.000	-	-	24,47	33.153.008			Itprov
	Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Daerah			persen		-	-	100	49.156.214	102,71	3.996.000	102,71	3.996.000			Itprov
									Rata-rata capaian kinerja (%)	151,99		186,91	4.099.645.337			
									Predikat kinerja	FALSE						
	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Persentase peningkatan jumlah pemeriksa yang telah lulus mengikuti diklat sertifikasi	100	%	6.600.000.000		2.028.392.262		1.325.469.800		2.510.176.483		4.538.568.745	269	57	
	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Persentase tenaga pemeriksa yang berkualifikasi Auditor/Pejabat Pengawas Pemda	100	%	4.500.000.000	95,29	1.709.994.530	90	1.158.466.800,00	220,89	2.314.053.400,00	316,18	4.024.047.930,00	316,18	89,42	Itprov
	Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja	Persentase peningkatan jumlah APIP yang telah mengikuti diklat terkait bidang pengawasan	90	%	2.100.000.000	83,12	318.397.732	65	167.003.000,00	116	196.123.083,00	199,5	514.520.815,00	221,67	24,5	
									Rata-rata capaian kinerja (%)	168,64		257,84	2.269.284.373			
									Predikat kinerja	FALSE						
	Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Persentase tertatanya kelembagaan kebijakan, sistem dan prosedur pengawasan Inspektorat Provinsi Jambi	85	%	4.900.000.000		831.086.001		105.992.000		238.877.400		1.069.963.401	639	22	
	Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Persentase Jumlah Pergub, Rancangan manual pengawasan dan sistem perencanaan evaluasi yang efektif dan efisien	35	SK	4.900.000.000	26	831.086.001	26	105.992.000	198	238.877.400	224	1.069.963.401	639	22	
									Rata-rata capaian kinerja (%)	197,5		223,5	1.069.963.401			
									Predikat kinerja	FALSE						

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Balitbangda Prov. Jambi																
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				2.154.000.000		3.162.261.199		819.942.937		868.457.827		4.030.719.026	589	167	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		8.000	lbr	152.000.000	9.640	123.713.310	1.200	29.296.776	1200	29.296.000	10.840	153.009.310	135,5	100,66	Balitbangda Provinsi Jambi
2	Penyediaan jasa komunikasi Sumberdaya Air dan listrik		12	Bln	333.000.000	46	479.736.634	12	134.850.450	9,93	111.634.880	56	591.371.514	466,1	177,59	Balitbangda Provinsi Jambi
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		17	Bln	264.000.000	55	347.818.800	15	95.852.000	15	90.066.000	70	437.884.800	411,8	165,87	Balitbangda Provinsi Jambi
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		4	Pkt	235.000.000	9,83	405.153.800	4	147.773.141	4	199.770.000	13,83	604.923.800	345,7	257,41	Balitbangda Provinsi Jambi
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor		51	Jenis	156.000.000	200	259.929.520	38	71.589.590	38	71.586.110	238	331.515.630	466,7	212,5	Balitbangda Provinsi Jambi
6	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan		10	Jenis	49.000.000	32	93.012.500	9	27.148.940	9	28.567.700	41	121.580.200	410	248,1	Balitbangda Provinsi Jambi
7	Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		9	Pkt	23.000.000	18	21.612.500	7	4.799.740	7,42	7.745.600	25	29.358.100	282,5	127,6	Balitbangda Provinsi Jambi
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		3	Pkt	60.000.000	3	21.612.500	60	6.606.600	59,94	6.600.000	63	28.212.500	2.098,00	47	Balitbangda Provinsi Jambi
9	Penyediaan makanan dan minuman		500	Org	98.000.000	1.512	98.356.680	1.060	25.000.000	1059,26	32.177.500	2.571	130.534.180	514,3	133,2	Balitbangda Provinsi Jambi
10	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		35	Kali	784.000.000	200	1.311.314.955	65	277.025.700	65,24	291.014.037	265	1.602.328.992	757,8	204,4	Balitbangda Provinsi Jambi
									Rata-rata capaian kinerja (%)	246,78		1.418,00	403.071.903			
									Predikat kinerja	FALSE						
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				8.909.408.000		1.696.780.927		839.989.306		979.276.615		2.676.057.542	1.435	82	
1	Pengadaan kendaraan dinas operasional		1Unit R4		678.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Balitbangda Provinsi Jambi
			2 Unit R2													
2	Pengadaan PerlengkapanGedung Kantor		1	Pkt	264.000.000	2,99	99.181.400	1	20.000.000	-	97.896.000	2,99	197.077.400	299	74,65	Balitbangda Provinsi Jambi
3	Pengadaan peralatan gedung/kantor		1	Pkt	113.000.000	3	127.189.895	1	36.450.000	-	36.450.000	3	163.639.895	300	144,81	Balitbangda Provinsi Jambi
4	Pengadaan mebeleur		1	Pkt	88.000.000	5,99	80.970.000	7	29.723.408	7,97	34.882.960	13,96	115.852.960	1.395,00	131,65	Balitbangda Provinsi Jambi
5	Pengadaan Alat-alat Studio		1	Pkt	89.000.000		-	2	20.850.108	2,68	71.212.915	2,68	71.212.915	268	80,01	Balitbangda Provinsi Jambi
6	Pengadaan Komputer		1	Pkt	235.000.000	0	-	15	85.789.600	12,47	123.455.640	12,47	123.455.640	1.247,00	52,53	Balitbangda Provinsi Jambi

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7	Pemeliharaan rutin/berkala gedung /kantor		1	Pkt	490.000.000	4	312.741.000	1	137.813.490	1,1	137.790.000	5,1	450.531.000	510,2	91,95	Balitbangda Provinsi Jambi
8	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional		1	Thn	788.200.000	25,06	987.127.432	24	265.612.700	22,59	249.998.100	47,65	1.237.125.532	4.764,00	156,96	Balitbangda Provinsi Jambi
9	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		1	Thn	196.000.000	12,99	37.638.700	10	10.000.000	9,99	9.994.000	22,98	47.632.700	2.298,00	24,3	Balitbangda Provinsi Jambi
10	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan listrik dan elektronik		1	Thn	87.808.000	17,71	38.100.000	13	9.750.000	13	9.750.000	30,71	47.850.000	3.071,00	54,49	Balitbangda Provinsi Jambi
11	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor		1	Pkt	5.880.000.000	0,99	13.832.500	1	224.000.000	0,93	207.847.000	1,92	221.679.500	191,8	3,77	Balitbangda Provinsi Jambi
									Rata-rata capaian kinerja (%)	7,07		14,35	267.605.754			
									Predikat kinerja	SR						
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				78.000.000		163.240.000		46.150.000	85	46.150.000		209.390.000	464	268	
1	Pengadaaan Pakaian dinas		75	Org	78.000.000	263	163.240.000	85	46.150.000	85	46.150.000	348	209.390.000	464	268,45	Balitbangda Provinsi Jambi
									Rata-rata capaian kinerja (%)	85		348	209.390.000			
									Predikat kinerja	T						
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								104.644.200		21.522.800		188.301.055	413	48	
1	Pendidikan dan pelatihan formal		4	Org	392.000.000	15	166.778.255	8	104.644.200	1,09	21.522.800	16,52	188.301.055	412,936 584	48,04	Balitbangda Provinsi Jambi
									Rata-rata capaian kinerja (%)	1,09		16,52	188.301.055			
									Predikat kinerja	SR						
V	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								-		-		56.473.000	-	-	
1	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan dan Realisasi Kinerja Keuangan OPD		39	Buku	30.000.000	52	56.473.000	-	-	-	-	51,51	56.473.000			Balitbangda Provinsi Jambi
									Rata-rata capaian kinerja (%)	-		51,51	56.473.000			
									Predikat kinerja	SR						
VI	ProgramPenelitian dan Pengembangan				22.440.000.000		5.430.195.047		185.411.000		510.530.000		5.940.725.047	336	27	
1	Kegiatan Penelitian Mandiri		10	Rek	1.960.000.000	29,63	379.652.300	-	-	-	-	29,63	379.652.300	296,3	19,37	Balitbangda Provinsi Jambi
2	Kegiatan Analisis Kebijakan Secara Antisifatif dan Responshif		1	Rek	1.960.000.000	5,78	566.588.200	-	-	-	-	5,78	566.588.200	578	28,91	Balitbangda Provinsi Jambi
3	Kegiatan Penelitian Subbid Data dan Pengkajian Peraturan		1	Rek	1.960.000.000	2,78	492.497.907	-	-	-	-	2,78	492.497.907	278	25,13	Balitbangda Provinsi Jambi
4	Kegiatan Penelitian Subbid Pemerintahan Desa		1	Rek	1.960.000.000	2,88	499.284.644	-	-	-	-	2,88	499.284.644	288	25,47	Balitbangda Provinsi Jambi

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
5	Kegiatan Penelitian Subbid Penyelenggaraan Pemerintahan		1	Rek	1.960.000.000	2,88	448.529.900	-	-	-	-	2,88	448.529.900	288	22,88	Balitbangda Provinsi Jambi
6	Kegiatan Penelitian Subbid Ekonomi		1	Rek	1.960.000.000	3,95	726.968.204	1	185.411.000	1	184.829.000	6,91	1.306.223.710	691	66,64	Balitbangda Provinsi Jambi
7	Kegiatan Penelitian Subbid SDA dan Lingkungan Hidup		1	Rek	1.960.000.000	1,97	394.426.506	-	-							
8	Kegiatan Penelitian Subbid Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana		1	Rek	1.960.000.000	2,92	525.591.100	-	-	-	-	2,92	525.591.100	292	26,82	Balitbangda Provinsi Jambi
9	Kegiatan Penelitian Subbid Inovasi dan Pengembangan Teknologi		1	Rek	1.960.000.000	2,96	353.494.436	-	-	-	-	2,96	353.494.436	296	18,04	Balitbangda Provinsi Jambi
10	Kegiatan Penelitian Subbid Sosial dan Budaya		1	Rek	1.600.000.000	1,95	264.953.200	-	-	0	2.756.000	1,96	267.709.200	196	16,73	Balitbangda Provinsi Jambi
11	Kegiatan Penelitian Subbid Pemberdayaan Masyarakat		1	Rek	1.600.000.000	1,96	355.918.500	-	-	0	2.947.000	1,97	358.865.500	197	22,43	Balitbangda Provinsi Jambi
12	Kegiatan Penelitian Subbid Kependudukan		1	Rek	1.600.000.000	2,93	422.290.150	-	-	0	5.106.000	2,95	427.396.150	295	26,71	Balitbangda Provinsi Jambi
13	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Sub Bidang Inovasi Pelayanan Publik		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-			Balitbangda Provinsi Jambi
14	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Sub Bidang Sarana dan Prasarana Fisik dan Wilayah		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-			Balitbangda Provinsi Jambi
15	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Sub BidangTata Kelola Pemerintahan		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-			Balitbangda Provinsi Jambi
16	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Sub Bidang Inovasi Produk Daerah		-		-	-	-	-	-	1	222.817.000	0,87	222.817.000			Balitbangda Provinsi Jambi
17	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Sub Bidang Pemerintahan		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-			Balitbangda Provinsi Jambi
18	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Sub Bidang Sosial Budaya dan Kependudukan		-		-	-	-	-	-	1	92.075.000	0,96	92.075.000			Balitbangda Provinsi Jambi
19	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Subbid Pengkajian Peraturan dan Evaluasi Kebijakan		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-			Balitbangda Provinsi Jambi
									Rata-rata capaian kinerja (%)	0,16		3,64	330.040.280			
									Predikat kinerja	SR						
VII	Program Penguatan Kelembagaan Penelitian dan Pengembangan				4.573.000.000		3.737.111.538		585.141.797		568.190.619		4.305.302.157	336	97	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	Kegiatan Sosialisasi Sumber Daya Genetik (SDG) di Sekolah-Sekolah		1	Kali	300.000.000	4,76	402.658.654	50	136.188.700	48,4	134.616.869	53,16	537.275.523	53,16	179,09	Balitbangda Provinsi Jambi
2	Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Hasil-Hasil Kinerja Litbang		12	Buku	375.000.000	41,67	402.689.075	14	64.777.500	13,83	64.015.000	55,5	466.704.075	462,54	124,45	Balitbangda Provinsi Jambi
3	Kegiatan Dewan Riset Daerah Provinsi Jambi		4	Kali	882.000.000	6,84	1.044.093.629	4	211.531.197	3,98	210.509.750	10,82	1.254.603.379	2,71	142,25	Balitbangda Provinsi Jambi
4	Kegiatan Rakor dan Forum Kelitbangan		2	Kali	490.000.000	4	779.126.086	2	102.543.000	0,86	90.912.000	4	870.038.086	200	177,56	Balitbangda Provinsi Jambi
5	Kegiatan Penguatan Jaringan Penelitian (Jarlit) di Provinsi Jambi		1	Krjsm	784.000.000	3,84	302.927.760	1	-	0	-	3,84	302.927.760	384	38,64	Balitbangda Provinsi Jambi
6	Kegiatan Peningkatan Kompetensi Peneliti		5	Org	499.000.000	80,94	468.275.970	-	-	0	-	80,94	468.275.970	1618,8	93,84	Balitbangda Provinsi Jambi
7	Kegiatan Penerbitan Jurnal Litbang		3	Kali	392.000.000	8,77	236.636.114	-	-	0	-	8,77	236.636.114	292,33	60,37	Balitbangda Provinsi Jambi
8	Kegiatan Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Komunal maupun Indikasi Geografis		5	Dok	686.000.000	0	-	5	-	0	-	-	-	-	-	Balitbangda Provinsi Jambi
9	Kegiatan Analisis KebijakanAntisifatif dan Responshif		-	Kali	-	0	-	3	70.101.400	3	68.137.000	3	68.137.000			Balitbangda Provinsi Jambi
10	Kegiatan Seminar Nasional		10	Jdl	165.000.000	1	100.704.250		-	0	-	1	100.704.250	10	61,03	Balitbangda Provinsi Jambi
									Rata-rata capaian kinerja (%)	7,01		22,1	430.530.216			
									Predikat kinerja	SR						
VIII	Program Pengembangan Inovasi dan Teknologi Daerah				5.702.000.000		2.864.139.498		81.829.000		81.225.200		2.945.364.698			
1	Kegiatan Science Park di Provinsi Jambi		1	Fisik	5.292.000.000	3,98	917.795.348	1	1.166.000	0,01	1.166.000	3,99	918.961.348	398,7	17,37	Balitbangda Provinsi Jambi
2	Kegiatan Penguatan dan Penegmbangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)		1	Roadmap SIDa	300.000.000	2,9	527.156.150	-	-	-	-	2,9	527.156.150		175,72	Balitbangda Provinsi Jambi
3	Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Sentra Promosi dan Pemasaran Iptek		12	KTI	55.000.000	12,84	709.594.000	12	80.663.000	17,51	80.059.200	30,35	789.653.200	252,9	1.435,73	Balitbangda Provinsi Jambi
4	Kegiatan Pengembangan Teknologi Reklamasi Lahan		12	KTI	55.000.000	12,84	709.594.000	-	-	-	-	12,84	709.594.000		1.290,17	Balitbangda Provinsi Jambi
									Rata-rata capaian kinerja (%)	4,38		12,52	736.341.175			
									Predikat kinerja	SR						

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI JAMBI																
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	100		13.603.322.000	67	9.118.644.063	100	13.930.519.468	17	24.382.454.045	84	33.501.098.108	250	218	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat keluar per tahun	100		122.076.000	100	17.190.000	100	28.710.000	128,08	42.360.000	228,08	59.550.000	228,08	48,78	Sekwan
	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air / Listrik	Periode pembayaran rekening	100		1.629.030.000	100	1.268.374.385	100	1.473.836.000	176,54	2.736.462.307	276,54	4.004.836.692	276,54	245,84	Sekwan
	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Periode penggunaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100		15.058.000	100	37.415.000	100	16.400.000	89,02	14.600.000	189,02	52.015.000	189,02	345,43	Sekwan
	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan	Jumlah anggota DPRD yang dijamin kesehatannya	100		531.468.000	5	27.766.500	100	126.000.000	3,56	9.790.000		37.556.500	-	7,07	Sekwan
	Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah	Periode penjaminan barang milik daerah	100		759.677.000	100	408.244.532	100	523.684.406	168,01	983.180.766	268,01	1.391.425.298	268,01	183,16	Sekwan
	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang terpelihara dan diperpanjang izinnya	100		2.541.674.000	100	925.710.175	100	1.148.779.000	150,43	1.802.237.954	250,43	2.727.948.129	250,43	107,33	Sekwan
	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah tenaga administrasi keuangan	100		563.788.000	100	396.070.500	100	469.091.000	217,58	1.020.626.500	317,58	1.416.697.000	317,58	251,28	Sekwan
	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Periode pemakaian jasa kebersihan kantor	100		1.511.978.000	100	1.009.117.800	100	1.575.000.000	215,07	3.387.416.571	315,07	4.396.534.371	315,07	290,78	Sekwan
	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK	100		607.400.000	100	397.344.300	100	348.659.980	167,75	670.219.500	267,75	1.067.563.800	267,75	175,76	Sekwan
	Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	100		778.288.000	100	419.242.000	100	389.753.500	173,75	677.190.050	273,75	1.096.432.050	273,75	140,88	Sekwan
	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Kantor	jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	100		118.283.000	100	70.315.000	100	64.196.932	244,32	156.847.368	344,32	227.162.368	344,32	192,05	Sekwan
	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-UU	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100		834.172.000	100	525.056.950	100	422.514.650	169,49	977.789.500	269,49	1.502.846.450	269,49	180,16	Sekwan
	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah peserta rapat/tamu/dll	100		2.084.120.000	100	2.907.192.463	100	3.625.905.000	118,32	5.361.433.497	218,32	8.268.625.960	218,32	396,74	Sekwan
	Kegiatan Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Monitoring ke Luar Daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	100		1.506.310.000	100	709.604.458	100	3.717.989.000	175,96	6.542.300.032	275,96	7.251.904.490	275,96	481,44	Sekwan
									Rata-rata capaian kinerja (%)	156,99		268,79	2.392.935.579			
									Predikat kinerja	FALSE						
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE PENINGKATAN SARAN DAN PRASARANA APARATUR	100		4.932.203.000	118	5.841.283.600	100	3.382.834.149	286,45	9.689.991.410	405	15.531.275.010	255	305	Sekwan
	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/ operasional	100		-	100	2.513.000.000	100	-	-	-	100	2.513.000.000	100		Sekwan
	Kegiatan Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan	Jumlah jenis pengadaan peralatan rumah jabatan	100		2.105.072.000	100	73.649.500	100	406.643.456	369	1.500.556.000	469	1.574.205.500	469,01	74,78	Sekwan

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah jenis pengadaan peralatan gedung kantor	100		442.077.000	100	586.918.000	100	213.486.105	252	2.423.733.560	352	3.010.651.560	351,94	681,02	Sekwan
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Jabatan	Jumlah rumah jabatan yang terpelihara	100		310.264.000	100	348.342.000	100	282.400.000	218	616.514.150	318	964.856.150	318,31	310,98	Sekwan
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	100		413.740.000	100	195.496.000	100	183.600.000	222	406.883.000	322	602.379.000	321,61	145,59	Sekwan
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Rumah Jabatan	Jumlahperalatan rumah jabatan yang terpelihara	100		145.662.000	100	122.054.800	100	173.708.800	156	275.641.000	256	397.695.800	256,39	273,03	Sekwan
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlahperalatan gedung kantor yang terpelihara	100		1.515.388.000	100	1.319.282.300	100	2.122.995.788	182	3.884.559.700	282	5.203.842.000	281,98	343,4	Sekwan
	Kegiatan Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Jabatan	Jumlah rumah jabatan yang direhab sedang/ berat	100		-	100	-	100	-	-	68.249.000	100	68.249.000	100		Sekwan
	Kegiatan Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang direhab sedang/ berat	100		-	100	682.541.000	100	-	-	513.855.000	100	1.196.396.000	100		Sekwan
									Rata-rata capaian kinerja (%)	155,47		255,47	1.725.697.223			
									Predikat kinerja	FALSE						
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	PERSENTASE PNS YANG DISIPLIN	100		1.396.151.000	115	1.608.563.500	100	-		59.524.000	115	1.668.087.500	105	119	Sekwan
	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	100		1.396.151.000	100	1.608.563.500	-	-	5	59.524.000	105	1.668.087.500	105,13	119,48	Sekwan
									Rata-rata capaian kinerja (%)	5,13		105,13	1.668.087.500			
									Predikat kinerja	SR						
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	PERSENTASE PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR	100		391.353.000	34	133.356.200	100	140.010.000	49,47	69.259.200	84	202.615.400	145	52	Sekwan
	Kegiatan Kursus, Pelatihan dan Bimbingan Teknis	Jumlah pegawai yang mengikuti kursus, pelatihan dan bimbingan teknis	100		391.353.000	100	133.356.200	100	140.010.000	45,24	69.259.200	145	202.615.400	145,24	51,77	Sekwan
									Rata-rata capaian kinerja (%)	45,24		145,24	202.615.400			
									Predikat kinerja	SR						
5	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA DPRD	PERSETASE PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA DPRD	100		56.927.208.000	84	47.658.036.819	100	26.164.055.837	296	77.501.609.248	380	125.159.646.067	279	187	Sekwan
	Kegiatan Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Ranperda yang dibahas dan ditetapkan	100		19.768.559.000	100	8.787.981.875	100	4.588.186.000	114	12.725.494.319	214	21.513.476.194	214	109	Sekwan
	Kegiatan Reses	Jumlah Reses	100		7.518.826.000	100	3.810.460.000	100	3.379.200.000	220	9.232.440.000	320	13.042.900.000	320	173	Sekwan
	Kegiatan Kunjungan Kerja dan Peninjauan Lapangan Pimpinan dan Anggota DPRD ke Dalam Daerah	Jumlah Kunker dan Peninjauan Lapangan	100		2.099.460.000	100	1.162.541.000	100	253.900.000	381	966.494.524	481	2.129.035.524	481	101	Sekwan
	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah Bintek yang diikuti Anggota Dewan	100		21.697.241.000	100	29.920.762.756	100	14.757.892.937	226	44.735.052.657	326	74.655.815.413	326	344	Sekwan

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Kegiatan Pembahasan Ranperda Inisiatif	Jumlah Ranperda yang dibahas dan ditetapkan	100		3.588.797.000	100	2.491.024.330	100	1.983.359.500	173	6.894.596.748	273	9.385.621.078	273	262	Sekwan
	Kegiatan Publikasi Rapat-Rapat Paripurna DPRD	Jumlah Rapat Paripurna yang dipublikasikan	100		1.465.337.000	100	1.197.055.000	100	1.201.517.400	203	2.947.531.000	303	4.144.586.000	303	283	Sekwan
	Kegiatan Optimalisasi Pelayanan Keprotokolan, Informasi, Komunikasi, dan Kehumasan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah kegiatan pelayanan terhadap kegiatan DPRD	100		788.988.000	37	288.211.858	100	-	-	-	37	288.211.858	37	37	Sekwan
Rata-rata capaian kinerja (%)										188,17		279,1	17.879.949.438			
Predikat kinerja										FALSE						

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Biro Umum Setda Provinsi Jambi																
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya			96,16		20.446.178.036	100%	18.927.431.840		16.860.220.603	-	38.508.301.935			Biro Umum
	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk/keluar pertahun				68,62	63.184.000	100	63.184.000	80	47.115.800,00	149	110.299.800			Biro Umum
	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Persentase pembayaran komunikasi , sumberdaya air dan listrik yang difasilitasi				93,56	4.420.458.500	100	4.420.458.500	101	4.505.177.549,00	194	8.925.636.049			
	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang difalitasi				67,48	858.528.000	100	763.523.000	87	550.953.000,00	154	1.409.481.000			
	Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah Kendaraan dinas,gedung kantor/rumah dinas yang diasuransikan				95,4	786.573.000	100	636.573.000	123	821.121.014,00	219	1.607.694.014			
	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pegawai yang dibayar gajinya				95,07	2.590.195.000	100	2.464.322.500	97	2.395.498.875,00	192	4.985.693.875			
	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Scor IKM Kebersihan Kantor				98,58	1.400.000.000	100	1.927.479.521	97	1.855.589.000,00	195	3.255.589.000			
	Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase kebutuhan barang cetakan dan penggandaan yang difasilitasi				97,51	617.192.000	100	612.770.665	32	160.405.500,00	130	777.597.500			
	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yanga difalitasi				99,03	794.604.900	100	694.604.900	107	893.524.250,00	206	1.688.129.150			
	Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Bahan Logistik Kantor yanag difalitasi				90,73	1.071.910.600	100	842.566.600	108	946.640.100,00	198	2.018.550.700			BIRO UMUM
	Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah				98,68	5.003.505.000	100	4.557.301.800	83	3.044.490.268,00	182	8.047.995.268			BIRO UMUM
	Kegiatan Penataan Administrasi Tata Usaha Biro Provinsi Jambi	Jumlah Laporan yang di sampiakan				99,95	588.126.000	100	592.999.318	50	205.974.150,00	150	794.100.150			
	Kegiatan rapat, monitoring dan Evaluasi kedalam daerah KDH/WKDH	JumlahRapat, Monitoring dan Evaluasi ke dalam Daerah				98	2.251.901.036	100	1.351.648.036	95	1.433.731.097,00	193	3.685.632.133			
	Kegiatan Penyediaan jasa keamanan kantor					100	1.201.903.296	-	-	-	-	100	1.201.903.296			
										Rata-rata capaian kinerja (%)		81,56		174,07	2.962.177.072	
										Predikat kinerja		T				
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan sarana dan prasarana kerjaaparatur sesuai standar daerah			97,46%		8.071.811.672	100%	6.735.482.410		6.337.012.182	-	15.248.396.854			Biro Umum

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Kegiatan Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Persentase Perlengkapan Gedung Kantor yang difasilitasi				-	741.020.004	-	-	55	439.099.100,00	55	1.180.119.104,00			
	Kegiatan pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas	Persentase Perlengkapan Gedung Kantor yang difasilitas				93,32	1.198.099.750	100	874.144.310	66	670.595.500,00	159	1.868.695.250,00			
	Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah rumah dinas yang dipelihara				98,97	1.101.288.000	100	1.187.488.000	120	2.173.935.556,00	219	3.275.223.556,00			
	Kegiatan pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara				95,23	3.642.707.918	100	3.250.154.100	101	2.368.690.626,00	197	6.011.398.544,00			
	Kegiatan pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	Persentase peralatan gedung kantor yang difasilitasi				92,92	1.388.696.000	100	1.423.696.000	48	684.691.400,00	141	2.073.387.400,00			
	Kegiatan Pemeeliharaan rutin Taman Kantor Gubernur dan Lingkungannya	Persentase Pemeliharaan Taman Kantor Gubernur dan Lingkungannya				-	839.573.000	-	-	-	-	-	839.573.000,00			
									Rata-rata capaian kinerja (%)	65,12		128,53	2.541.399.476			
									Predikat kinerja	R						
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan						212.082.200	100%	178.912.000		128.852.000	-	487.119.034			Biro Umum
	Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan			-	99,98	358.267.034	100	178.912.000	93	128.852.000,00	193	487.119.034			
									Rata-rata capaian kinerja (%)	93,49		193,47	487.119.034			
									Predikat kinerja	ST						
	Program Penunjang Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	Persentase Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah			91,4		5.367.132.693	100%	3.454.868.000		2.665.433.272	-	8.032.565.965			Biro Umum
	Kegiatan Dialog / audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan / anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan	Jumlah Dialog / Audiensi dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat,Pimpinan / Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan yang difasilitasi				77,17	1.007.416.000	100	657.416.000	75	325.019.100,00	152	1.332.435.100,00			
	Kegiatan Penerimaan Kunjungan kerja pejabat negara / departemen / lembaga pemerintah non departemen / luar negeri	Jumlah Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara / Departemen / Lembaga Pemerintah Non Departemen / Luar Negeri yang difasilitasi				53,53	175.328.000	100	155.648.000	74	118.892.032,00	128	294.220.032,00			
	Kegiatan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya	Jumnlah Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya yang difasilitasi				93,18	1.248.584.693	100	-	86	2.221.522.140,00	179	3.470.106.833,00			
	Kegiatan Pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Persentase Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah yang difasilitasi				78,81	2.935.804.000	100	2.641.804.000	-	-	79	2.935.804.000,00			
									Rata-rata capaian kinerja (%)	58,85		134,52	2.008.141.491			
									Predikat kinerja	R						

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	Persentase Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah					361.563.750	100%	361.563.750		68.725.796	19,01%	430.289.546			Biro Umum
	Kegiatan Pengkajian Rekomndasi Staf Ahli Bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam menyelenggarakan tugas,wewenang dan kewajibanya					99,69	361.563.750	100	361.563.750	19	68.725.796,00	119	430.289.546,00			
Rata-rata capaian kinerja (%)										19,01		118,7	430.289.546			
Predikat kinerja										SR						

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Biro Pemerintahan Setda Provinsi Jambi																
4	Program Pembinaan, Fasilitasi, Pelayanan dan Tatakelola Pemerintahan serta Otonomi Daerah				989.924.535		2.834.382.650		661.477.689		661.477.689		3.495.860.339	125	355	
4	Kegiatan Pembinaan Tugas Umum Pemerintahan di Kecamatan, Rakor Camat dan Bimtek Pemekaran Kecamatan serta Penilaian Camat Teladan/ Berprestasi	Pelaksanaan penilaian Camat Teladan Tingkat Provinsi Jambi dan Pelaksanaan Rapat Koordinasi Camat Tingkat Provinsi Jambi	30	kec	213.172.000,00	42	980.057.000,00	2	104.980.562	-	104.980.562,00	42	1.085.037.562,00	140	509	Bag. OTDA
4	Kegiatan Fasilitasi Pengembangan dan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jambi	5	dok	355.024.350,00	1	1.018.981.150,00	1	258.974.125	1	258.974.125,00	2	1.277.955.275,00	40	360	
4	Kegiatan Koordinasi dan Pelayanan Urusan KDH/WKDH, DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota dan Hubungan Antar Lembaga di Bidang Otonomi Daerah	Persentase Koordinasi dan Pelayanan Urusan KDH/WKDH, DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota dan Hubungan Antar Lembaga di Bidang Otonomi Daerah	100	%	272.740.185,00	100	461.732.750,00	100	230.371.764	100	230.371.764,00	200	692.104.514,00	200	253,8	
4	Kegiatan Pemantauan penyelenggaraan pemerintah bawahan dan Rapat Koordinasi pemerintahan bawahan	Jumlah Rapat koordinasi pemerintahan bawahan di Kecamatan	30	kali	148.988.000,00	36	373.611.750,00	2	67.151.238	-	67.151.238,00	36	440.762.988,00	120	295,8	
									Rata-rata capaian kinerja (%)	25,25		70	873.965.085			
									Predikat kinerja	SR						
4	Program Penataan Batas dan WilayahAdministrasi				3.920.727,30		3.104.369,20		385.753.048		385.753.028,00		388.857.397,20	175	8.838,20	
4	Kegiatan Pembinaan dan Pembakuan Nama Rupabumi dan Pemetaan Wilayah	Jumlah Kabupaten/Kota yang dibina terkait tertib administrasi Pembakuan nama rupabumi	11	kab/kota	692.980,50	11	419.727,50	11	95.109.899	11	95.109.899,00	22	95.529.626,50	200	13.785,30	
4	Kegiatan Penyelesaian dan Penataan Batas antara Provinsi Jambi dengan Provinsi Tetangga	Jumlah Kabupaten/Kota yangdilaksanakan verifikasi batas daerah antara Provinsi Jambi dengan Provinsi tetangga	11	kab/kota	1.641.444,00	11	1.829.496,50	11	193.047.463	11	193.047.463,00	22	194.876.959,50	200	11.872,30	
4	Kegiatan Penyelesaian dan PenegasanBatas antara Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi.	Jumlah Kabupaten/Kota yangdilaksanakan verifikasi batas daerah antara Kab/Kota dalam Prov.Jambi	11	kab/kota	1.018.500,00	11	481.415,50	11	97.595.686	11	97.595.666,00	22	98.077.081,50	200	9.629,60	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4	Kegiatan Rapat koordinasi kerjasama dan pendataan potensi kerjasama di wilayah perbatasan	Jumlah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan pendataan dan inventarisasi data/potensi kerjasama wilayah perbatasan antara Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi.	11	kab/kota	567.802,80	11	373.729,70	11	-	-	-	11	373.729,70	100	65,8	
										Rata-rata capaian kinerja (%)		8,25		19,25	97.214.349			
										Predikat kinerja		SR						
4	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.				3.140.440		2.037.430,00		183.065.954		183.065.954		185.103.384,00	100	5.894,20	
4	Kegiatan Penataan Administrasi Tata Usaha Biro pemerintahan Setda Provinsi Jambi	persentase pelaksanaan urusan ketata usahaan dan pelayanan teknis dan administrasi di bidang kepegawaian, umum, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.	100	%	3.140.440	100	2.037.430,00	100	183.065.954	100	183.065.954	100	185.103.384,00	100	5.894,20	Bag. Batas Adm. Kewil /TU
										Rata-rata capaian kinerja (%)		100		100	185.103.384			
										Predikat kinerja		ST						
1	Program Penanganan permasalahan tanah dan pembinaan pengawasan trantib dan Dekonsentrasi Tugas Pembantuan				1.403.661		816.105		192.965.099		192.965.099,00		193.781.204,00	100	4.147,20	Bag. Adm. PUM
4	Kegiatan koordinasi penanganan permasalahan dan penyelenggaraan urusan pertanahan sebagai kewenangan pemerintah provinsi	Jumlah pengadaan tanah yang difasilitasi	5	pengadaan tanah	-	0	-	1	113.589.129	-	113.589.129,00	-	113.589.129,00	-	-	
4	Kegiatan Pembinaan, Pemantauan dan Pengawasan Penanganan Masalah Trantib	Jumlah Kabupaten/Kota yang dibina terkait Pemantauan dan Pengawasan Penanganan Masalah Trantib.	11	kab/kota	406.123,00	11	442.493,20	11	29.716.101	-	29.716.101,00	11	30.158.594,20	100	7.426,00	
4	Kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan di provinsi jambi	Jumlah laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan	1	dokumen	997.538,40	2	373.611,80	1	49.659.869	-	49.659.869,00	2	50.033.480,80	200	5.015,70	
										Rata-rata capaian kinerja (%)		-		4,33	64.593.735			
										Predikat kinerja		SR						

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Biro Pembangunan dan Kerjasama Setda Provinsi Jambi																
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase peningkatan layanan dan pemenuhan kebutuhan kantor (Laporan 6 Januari, LPPD Biro, LKPJ Biro)	100	persen	1.827.674.523		682.663.650		366.809.400		239.573.087		922.236.737	#VALUE!	50	
	Kegiatan Penataan Administrasi Tata Usaha Biro Provinsi Jambi	Jumlah dokumen perencanaan dan persentase pemenuhan kebutuhan kantor	15 dok		1.827.674.523		682.663.650		366.809.400	87	239.573.087	87	922.236.737	#VALUE!	50	
									Rata-rata capaian kinerja (%)	87,05		87,05	922.236.737			
									Predikat kinerja	T						
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase capaian kinerja perangkat daerah lingkup Prov. Jambi terhadap realisasi keuangan dan fisik			3.370.218.939		1.035.950.190		394.449.500		287.110.184		1.323.060.374	663	40	
	Kegiatan koordinasi penyusunan dan pengendalian program	Jumlah dokumen perencanaan dan koordinasi/sinkronisasi/pembinaan penyusunan dan pengendalian program	15	dok	2.087.719.439	9	572.375.190		218.973.000	89	166.913.100	98	739.288.290	656	35	Biro PKS
	Kegiatan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program APBD	Jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan APBD Prov. Jambi	15	dok	1.282.499.500	9	463.575.000		175.476.500	92	120.197.083	101	583.772.083	671	46	Biro PKS
									Rata-rata capaian kinerja (%)	90,49		99,49	661.530.187			
									Predikat kinerja	ST						
	Program pembinaan dan evaluasi pembangunan	Persentase realisasi keu, fisik dan penyerapan dana APBD	100		-		754.366.000		-		-		754.366.000			
	Kegiatan koordinasi penyusunan dan pemantauan program	Dokumen keg. pelaksanaan program prioritas pemb, prov jambi	100				363.691.000		-	-	0	0	363.691.000			Biro PKS
	Kegiatan evalusi dan pelaporan pelaksanaan program APBD	Jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan APBD Prov. Jambi	100				390.675.000		-	-	0	0	390.675.000			Biro PKS
									Rata-rata capaian kinerja (%)	-		-	377.183.000			
									Predikat kinerja	SR						
	Program pembinaan pelaksanaan pembangunan bidang PU, Perhubungan dan PBJ pemerintah	Persentase bahan rumusan kebijakan pembinaan dan fasilitasi pembangunan bidang PU, perhubungan menjadi kebijakan	100%		3.110.236.829		1.848.147.200	100%	2.158.530.801		1.445.834.886	0	3.293.982.086			
	Kegiatan Manajemen pengadaan dan informasi	Jumlah bahan rumusan kebijakan pelaksanaan pembangunan dibidang PBJ			`		807.139.250		1.615.581.685	86,7955986	1.132.664.321	86,8	1.939.803.571			Biro PKS

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Kegiatan Administrasi sanggah,pengaduan dan pengembangan SDM	Jumlah bahan rumusan kebijakan pelaksanaan pembangunan dibidang PBJ	100		1.607.256.829		486.007.950		198.792.500	92,57	119.985.403	92,57	605.993.353	92,57	38	Biro PKS
	Kegiatan koordinasi pelaksanaan pembangunan saranaprasarana fisik dan perhubungan	Jumlah bahan rumusan kebijakan pelaksanaan pembangunan dibidang pembangunan sarana prasarana fisik dan perhubungan	100		1.502.980.000		555.000.000		205.278.000	90,41	134.711.734	90,41	689.711.734	90,41	46	Biro PKS
	Kegiatan Layanan Pengadaan dan Pembinaan serta Kelembagaan LPSE	Jumlah pelaksanaan bintek dan jumlah SDM yang mengikuti	-	-		0			138.878.616	61,97	58.473.428	61,9688065	58.473.428			Biro PKS
									Rata-rata capaian kinerja (%)	82,94		82,94	823.495.522			
									Predikat kinerja	T						
	Program pembinaan pelaksanaan pembangunan bidang kerjasama	Persentase usulan perjanjian kerjasama yang difasilitasi	100%		3.492.623.092		1.291.461.250		582.088.915	-	408.765.958	0	1.700.227.208	702	48	Biro PKS
	Kegiatan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan kerjasama antar lembaga pemerintah/swasta	Jumlah laporan usulan Kerjasama antar Lembaga Pemerintah dan Swastayang difasilitasi	10	MoU/PKS	1.166.616.680		431.831.500		173.591.100	95	127.407.834	95	559.239.334	951	48	Biro PKS
	Kegiatan koordinasi dan pembinaan kerjasama dalam negeri dan luar negeri	Jumlah laporan usulan Kerjasama Dalamdan luar Negeri yang difasilitasi	15	usulan	1.300.819.965		509.575.250		286.730.815	88	201.277.669	88	710.852.919	589	55	Biro PKS
	Kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dibidang kerjasama	Jumlah laporan usulan Kerjasama yang dievaluasi dan difasilitasi	15	usulan	1.025.186.447		350.054.500		121.767.000	85	80.080.455	85	430.134.955	567	42	Biro PKS
									Rata-rata capaian kinerja (%)	89,53		89,53	566.742.403			
									Predikat kinerja	ST						

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Biro Hukum Setda Provinsi Jambi																
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD/Balai/UPT/UPTD dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksinya	80	persen	1.252.000.000	20	220.000.000	100	68.000.000	6300%	68.000.000	83	288.000.000	173	23	Biro Hukum
	Kegiatan Penataan Administrasi Tata Usaha Biro Hukum	Persentase pelayanan administrasi tata usaha Biro yang difasilitasi	80	persen	1.252.000.000	73	220.000.000	14	68.000.000	65	68.000.000	138	288.000.000	172,5	23	Biro Hukum
									Rata-rata capaian kinerja (%)	65		138	288.000.000			
									Predikat kinerja	R						
	Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP	46	≥B	877.000.000	20	-	5	100.367.880	20	100.367.000	40	100.367.000	57	9	Biro Hukum
	Kegiatan: Penyusunan Progran/Kegiatan,Monitoring dan Pelaporan Capaian Kinerja Biro Hukum	Jumlah Renja, LPPD,LKPJ, Lkj, dan Laporan 6 Januari	100	persen	327.000.000	33	-	-	-	-	-	33	-	33	-	Biro Hukum
	Kegiatan: Koordinasi, Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan Capaian Kinerja Biro Hukum dan Penyusunan Program/Kegiatan Biro	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Biro	100	persen	550.000.000	35	-	35	100.367.880	45	100.367.000	80	100.367.000	80	18,25	Biro Hukum
									Rata-rata capaian kinerja (%)	22,5		56,5	50.183.500			
									Predikat kinerja	SR						
1	Program Perencanaan dan Penataan Peraturan daerah provinsi	persentase Produk hukum Provinsi yang tidak bertentangan dg produk hukum yang lebih tinggi	7.096	Produk Hukum Provinsi	6.789.000.000	600	-	600	304.896.000	4800%	344.896.000	648	344.896.000	74	4,22	
	Kegiatan: Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	JumlahPerda dan pergub Provinsi jambi yangdikaji dandievaluasi	100	persen	1.396.000.000	67	-	17	28.900.000	1700%	28.900.000	84	28.900.000	84	2,07	Biro Hukum
	Kegiatan: Legeslasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen Prolegda Provinsi Jambi yang disusun	100	persen	690.000.000	66	-	16	35.000.000	1600%	35.000.000	82	35.000.000	82	5,07	
	Kegiatan: Penelitian/Pengkajian Draf Peraturan Gubernur	JumlahPeraturan Gubernur yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100	persen	470.000.000	40	-	0	-	0%	-	40	-	40	-	
	Kegitan: Penelitan / Pengkajian Terhadap Draf Keputusan Gubernur dan Intruksi Gubernur Jambi	Jumlah SK GUB dan Intruksi Gub. Jambi yang sesuai dengan Peraturan PerUndang-Undangan	100	persen	466.000.000	50	-	0	-	0%	-	50	-	50	-	
	Kegiatan: Penelitian/Pengkajian Draf Peraturan Gubernur, Keputusan gubernur dan Instruksi gubernur	JumlahPergub, SK Gubernur dan Instruksi Gubernur yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100	persen	650.000.000	70	-	15	165.896.000	2900%	75.100.000	99	75.100.000	99	11,55	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Kegiatan: Kajian Peraturan Perundang-Undangan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Baru, Lebih Tinggi dari Keserasian antara Peraturan Perundang-Undangan Daerah	Jumlah naskah peraturan daerah yang dikaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100	persen	3.117.000.000	62	-	17	75.100.000	2600%	205.896.000	88	205.896.000	88	6,61	
									Rata-rata capaian kinerja (%)	14,67		73,83	57.482.667			
									Predikat kinerja	SR						
1	Program pembinaan dan pengawasan produk hukum kab/kota di provinsi jambi	persentase Produk hukum Kab/kota yang tidak bertentangan dg produk hukum yang lebih tinggi	1.120	Produk hukum Kab/Kota	4.137.000.000	520	-		226.935.000	47	226.935.000	567	226.935.000	76	4,23	
	Kegiatan : Rakor Hukum Provinsi dan Kab/Kota	Jumlah RakorHukum antar kabupaten /kota dengan Pemerintah Provinsi Jambi	100	persen	293.000.000	60	-	-	-	-	-	60	-	60	-	Biro Hukum
	Kegiatan : Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pelaksanaan Bimbingan Teknis kepada Kabupaten /kota	100	persen	296.000.000	50	-	-	-	-	-	50	-	50	-	
	Kegiatan : Monitoring/Pemantauan terhadap tindak lanjut hasil klarifikasi dan Evaluasi Perda Kab/Kota dan Peraturan Bupati/ Walikota	Jumlahproduk hukum daerah kab/kota yang dimonitoring/ dipantau dari hasil evaluasi dan klarifikasi	100	persen	618.000.000	60	-	-	-	-	-	60	-	60	-	
	Kegiatan : Monitoring/Pemantauan terhadap tindak lanjut hasil klarifikasi dan Evaluasi Perda Kab/Kota dan Peraturan Bupati/ Walikota dan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlahproduk hukum daerah kab/kota yang dimonitoring/ dipantau dari hasil evaluasi dan klarifikasi dan bimtek peraturan perundang-undangan	100	persen	618.000.000	75	-	15	76.000.000	40	76.000.000	115	76.000.015	115	12	
	Kegitan : Evaluasi dan Fasilitasi Ranperda, Ranperbub/Ranperwako, Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten/Kota	Jumlah Ranperda/Rabperbub Kabupaten/Kota Rancangan Peraturan DPRD Kab/Kota yang dievaluasi	100	persen	1.156.000.000	65	-	-	-	-	-	65	-	65	-	
	Kegitan : Evaluasi dan Fasilitasi Ranperda, Ranperbub/Ranperwako, Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten/Kota dan Rakor Hukum Kab/Kota	Jumlah Ranperda/Rabperbub Kabupaten/Kota Rancangan Peraturan DPRD Kab/Kota yang dievaluasi dan pelaksanaan rakor hukum kab/kota	100	persen	1.156.000.000	75	-	15	150.935.000	28	150.935.000	103	150.935.015	103	13	
									Rata-rata capaian kinerja (%)	11,33		75,5	37.822.505			
									Predikat kinerja	SR						

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	Program Advokasi Hukum dan HAM	persentase kasus hukum dan HAM Provinsi Jambi yang difasilitasi	95	persen	8.559.000.000		-		348.909.000	8700%	348.908.000	87	348.908.000	84	3,77	
	Kegiatan: Peningkatkan Koordinasi dan Singkronisasi dangan Intansi di Luar Pemerintah Daerah dalam Pemberian dan Pelaksanaan Sosialisasi atau Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat	Jumlah Sosialisasi / Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat	100	persen	1.585.000.000	67	-	17	19.734.500	17	19.734.000	84	19.734.000	84	1	Biro Hukum
	Kegiatan: Bantuan Hukum dan Konsultasi Hukum Terhadap Permasaalahan dan Keluhan Hukum yang Timbul dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah kasus yang diberi bantuan /konsultasi hukum	100	persen	3.762.000.000	70	-	15	180.174.500	45	180.174.000	115	180.174.000	115	5	
	Kegiatan: Pengkajian dan Inventarisasi Kasus Pelanggaran HAMdi Provinsi Jambi	Jumlah kasus HAM yangdikaji/terinventarisir	100	persen	733.000.000	67	-	17	21.000.000	17	21.000.000	84	21.000.000	84	3	
	Kegiatan: Peningkatan dan Pemantapan Metode Pengembangan dan Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM di Provinsi Jambi	Jumlah Rakor HAM di Provinsi Jambi	100	persen	1.262.000.000	67	-	17	65.000.000	17	65.000.000	84	65.000.000	84	5	
	Kegiatan : Bantuan Hukum dan Konsultasi Hukum Bagi Masyarakat Miskin Secara Cuma-Cuma	Jumlah Batuan Hukum dan Konsultasi hukum	100	persen	457.000.000	65	-	-	-	-	-	65	-	65	-	
	Kegiatan : Inventarisasi dan Pengkajian Terhadap Konflik/ Sengketa Hukum yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemerintah	JumlahKonflik/ Sengketa Hukum yang dikaji	100	persen	250.000.000	50	-	-	-	-	-	50	-	50	-	
	Kegiatan : Pembinaan dan Penanganan Terhadap Konflik/Sengketa hukum yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemerintah	JumlahKonflik/ Sengketa Hukum yang dikaji	100	persen	510.000.000	65	-	15	63.000.000	39	63.000.000	104	63.000.000	104	12	
									Rata-rata capaian kinerja (%)	19,29		83,71	49.844.000			
									Predikat kinerja	SR						
2	Programdokumentasi dan informasi produk hukum	Persentase informasi produk hukum yang bisa diakses publik	100	persen	2.524.000.000		-		169.000.000	104	113.408.000	104	113.408.000	19	3	
	Kegiatan:Kegiatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	jumlah Data Perda Pergub Provinsi Jambi yang dicetak & diupload pada Website JDIH Biro Hukum	100	persen	612.000.000	50		-	-	-	-	-	-	-	-	Biro Hukum

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Kegiatan: Kegiatan Sosialisasi peraturan perundang-undangan.	Jumlah Perda/Pergub yang disosialisasikan	100	persen	450.000.000	70	-	15	22.000.000							
	Kegiatan:Publikasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Peraturan Perundang - Undangan Daerah Provinsi Jambi yang dipublikasi melaui Media Masa	100	persen	362.000.000	50		-	-	-	-	-	-	-	-	
	Kegiatan: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dan Publikasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Data Perda Pergub Provinsi Jambi yang dicetak & diupload pada Website JDIH Biro Hukum dan Peraturan Perundang -Undangan Daerah Provinsi Jambi yang dipublikasi melaui Media Masa	100	persen	1.100.000.000	75	-	15	147.000.000	54	113.408.000	57	113.408.000	57	10,31	
									Rata-rata capaian kinerja (%)	18		19	37.802.667			
									Predikat kinerja	SR						

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi																
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Sarana Prasarana Kantor Terpenuhi			708.088.250		595.775.513		320.541.294		318.819.754		914.595.267	173,08	121,42	
	Kegiatan Penataan Administrasi Tata Usaha Biro Provinsi Jambi	Tersedianya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Biro Organisasi	100	%	313.906.000	96,69	501.253.013	100	152.192.798	132	152.192.798	196	653.445.811	196	208	
	Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Setda Provinsi Jambi	Tersedianya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Lingkup Setda Provinsi Jambi	100	%	134.541.000	64,94	94.522.500	100	63.105.640	115	60.514.100	206	155.036.600	206	115	
	Kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah dan luar daerah	-	100	%	259.641.250	0	-	100	105.242.856	84	106.112.856	118	106.112.856	118	41	
									Rata-rata capaian kinerja (%)	110,58		173,08	304.865.089			
									Predikat kinerja	FALSE						
	Program peningkatan disiplin aparatur								-							
	Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Harian (PDH) yang diberikan	890	PNS	605.000.000	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	
		Meningkatanya Keseragaman Disiplin ASN Setda Provinsi Jambi dalam berpakaian Dinas	100	%												
									Rata-rata capaian kinerja (%)	-		-	-			
									Predikat kinerja	SR						
	Program Reformasi Birokrasi				3.688.139.500		1.643.318.078		951.276.090		950.950.079		2.594.268.157			
	Kegiatan Penataan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jambi	Jumlah Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Jambi yang tertata kelembagaannya	22	OPD	684.522.000	5	198.126.000	5	61.313.250	-	61.273.250	-	259.399.250	-	37,89	
		Persentase tertatanya Kelembagaan Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan perundang undangan yang berlaku	63	%	-	11		11		-	-	-	-	-		
		Jumlah Buku Gambaran Kelembagaan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jambi	1	Buku	-	1		1		-	-	-	-	-		
	Kegiatan PenataanPerangkat Daerah Kab/ Kota dan Evaluasi RaperdaOPD Kab/ KotaDalam Provinsi Jambi	Persentase Raperda/Perda Kabupaten/Kota yang dievaluasi	100	%	490.102.000	100	226.636.250	100	85.192.485	17	85.192.485	34	311.828.735	34,4	63,63	
		Jumlah kabupaten/kota yang dibina	11	Kab/Kota	-	4		2		2	-	4	-	36,36		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Jumlah pelaksanaan Rapat Koordinasi Perangkat Daerah kab/Kota	1	Kali	-	1		1		1	-	2	-	200		
	Kegiatan Evaluasi dan Penataan UPTD/B Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi	Jumlah UPTD/B lingkup Pemerintah Provinsi Jambi yang terevaluasi	49	UPTD	539.964.000	8	228.318.250	7	66.929.360	5	66.929.360	7	295.247.610	14,29	54,68	
	Kegiatan Koordinasi dan Pembinaan Pelayanan Publik Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan komponen standar Pelayanan Publik oleh OPD	78	%	379.412.000	25	224.065.500	16	149.375.100	16	149.311.100	21	373.376.600	27	98,41	
		Jumlah Inovasi Baru Pelayanan Publik Tahun 2019	6	Inovasi		6		2								
		Skor Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2019	86	Skor B		85,6		85,6								
	Kegiatan Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi Penataan Tatalaksana dan Reformasi Birokrasi di Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi dan Kab/Kota	Jumlah SOP Perangkat Daerah	43	OPD	398.000.000	20	226.099.625	20	144.721.824	20	144.721.300	40	370.820.925	93,02	93,17	
		Persentase ketaatan penarapan Pergub Pakaian Dinas	100	%		100		85		90	-	180	-	180		
		Persentase Penerapan Pergub Tata Naskah Dinas	100	%		100		93		20	-	39	-	39,12		
		Persentase Tindak Lanjut hasil rapat koordinasi ketatalaksanaan yang terakomodir	100	%		1		-		-	-	-	-	-		
		Frekwensi Monitoring pelaksanaan Reformasi Birokrasi	2	Kali		2		2		-	-	-	-	-		
		Pembinaan Penerapan Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kab/Kota	11	Kab/Kota		11		11		4	-	8	-	72,73		
		Monitoring Percepatan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten/Kota	11	Kab/Kota		11		11		4	-	8	-	72,73		
		Evaluasi Implementasi Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi	2	Kali		2		2		-	-	-	-	-		
	Kegiatan Peningkatan, Pelaksanaan, Pengembangan Budaya Kerja serta Monitoring dan Evaluasi Penerapan Budaya Kerja	Terlaksananya FGD Budaya Kerja OPD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi	1	Kali FGD	127.778.200	-	56.403.300	43	78.917.391	28	78.916.977	28	135.320.277	2.800		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Kegiatan Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja PNS	Tersusunnya Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja PNS Di Lingkungan Pemprov. Jambi	1	KepGub	330.000.000	1	242.422.840	5	96.766.373	5	96.766.373	10	339.189.213	1.000		
	Kegiatan Penilaian dan Pemberian Penghargaan Penataan Kelembagaan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan rapat inisiasi penilaian dan pemberian penghargaan penataan kelembagaan kab/kota	11	Kab/Kota	96.616.300	-	-	11	48.770.500	7	48.599.250	7	48.599.250	64		
		Formulasi mekanisme penilaian dan pemerian penghargaan penataan kelembagaan/kota	1	Dokumen	-	-	-	1		-	-	-	-	-		
	Kegiatan Evaluasi&Penilaian Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jambi	Jumlah Pelaksanaan Asistensi Penajaman Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jambi	43	OPD	110.880.000	-	-	10	55.280.923	10	55.234.100	15	55.234.100	35	50	
	Kegiatan Pembinaan, Peningkatan, Pengembangan, serta Penguatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Jambi dan Kab/Kota	Bimtek Penyusunan Komponen SAKIP Perangkat Daerah Provinsi Jambi, Asistensi Penguatan SAKIP Perangkat Daerah Provinsi Jambi, Monitoring Capaian Kinerja Perangkat Daerah Provinsi Jambi, Bimtek Penyusunan Komponen SAKIP Perangkat Daerah Provinsi Jambi	1	Kali	530.865.000,00	1	241.246.313,00	1	164.008.884	43	164.005.884	86	405.252.197	8.600	76	
		Asistensi Penguatan SAKIP Perangkat Daerah Provinsi Jambi	43	OPD		43		20		5	-	10	-	23		
		Monitoring Capaian Kinerja Perangkat Daerah Provinsi Jambi	43	OPD		43		20		10	-	20	-	47		
		Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Povinsi Jambi, Koordinasi/Asistensi/ Studi Pembelajaran Penguatan SAKIP Provinsi Jambi	172	OPD		172		43		43	-	86	-	50		
		Bimtek Penyusunan Komponen SAKIP Pemerintah Kab/Kota dan Pembinaan Penguatan SAKIP Pemerintah Kab/Kota	1	Kali		1		-		-	-	-	-	-		
									Rata-rata capaian kinerja (%)	15,12		24,84	259.426.816			
									Predikat kinerja	SR						

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur				178.429.900		155.245.200		20.950.616		13.732.638		168.977.838	125,95	98,71	
	Kegiatan Kursus, Diklat, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	Bantuan Kontribusi bagi PNS untuk mengikuti Kursus, Diklat, Pelatihan,Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis	17	PNS	125.854.300	11	107.448.800	1	4.500.000	10	4.500.000	21	111.948.800	123,46	88,95	
	Kegiatan Penataan Perpustakaan Setda Provinsi Jambi	Tersedianya buku bacaan yang dibutuhkan PNS di lingkungan Setda Provinsi Jambi	100	%	52.575.600	100	47.796.400	6	16.450.616	28	9.232.638	128	57.029.038	128,43	108,47	
Rata-rata capaian kinerja (%)										19,21		74,71	84.488.919			
Predikat kinerja										SR						

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Biro Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Setda Provinsi Jambi																
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat pemenuhan kebutuhan unit kerja biro dalam mendukung tugas dan fungsi	100		2.258.088.250	100	1.447.492.513	100	254.308.000	11,7	288.367.900	112	1.735.860.413	57,63	75,87	
	Kegiatan Penataan Administrasi Tata Usaha Biro Provinsi Jambi	Tersedianya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Biro Organisasi	100	%	313.906.000	96,69	501.253.013		-	-	-	97	501.253.013	96,69	159,68	Biro Kesramas
	Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Setda Provinsi Jambi	Tersedianya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Lingkup Setda Provinsi Jambi	100	%	134.541.000	64,94	94.522.500		-	-	-	65	94.522.500	64,94	70,26	Biro Kesramas
	Kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah dan luar daerah	-	100	%	259.641.250	-	-		-	-	-	-	-	-	-	Biro Kesramas
	Kegiatan Pelayanan Administrasi Kantor		600		1.550.000.000	300	851.717.000	100	254.308.000	113,39	288.367.900	413	1.140.084.900	68,9	73,55	Biro Kesramas
									Rata-rata capaian kinerja (%)	28,35		143,76	433.965.103			
									Predikat kinerja	SR						
	PROGRAM FASILITASI KEHIDUPAN UMAT BERAGAMA	Persentase rekomendasi yang menjadi kebijakan	500		44.372.240.000	89	28.548.566.868	89,15	4.959.974.000	-	2.329.242.916		30.877.809.784	6.426,83	85,24	
	Kegiatan MTQ Provinsi Jambi dan MTQ/ STQ Nasional	Jumlah Rekomendasi hasil rakor yang menjadi kebijakan	6		16.085.000.000	3	4.906.936.868	1	2.176.752.000	106,78	1.323.404.916	107,78	6.230.341.784	1.796,41	38,73	Biro Kesramas
	Kegiatan Pengelolaan Masjid Agung Al Falah, Al Dzikro, Al Khairot Jambi dan Safari Ramadhan	Jumlah Rekomendasi hasil rakor yang menjadi kebijakan	6		11.475.000.000	3	2.605.559.000	1	855.906.000	1.366,76	610.202.200	1.367,76	3.215.761.200	22.796,01	28,02	Biro Kesramas
	Kegiatan Koordinasi Haji Provinsi Jambi	Jumlah Rekomendasi hasil rakor yang menjadi kebijakan	6		8.430.000.000	3	3.316.917.000	1	1.063.683.000	260,52	103.830.950	261,52	3.420.747.950	4.358,65	40,58	Biro Kesramas
	Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Rumah Ibadah	Jumlah Rekomendasi hasil rakor yang menjadi kebijakan	6		1.077.240.000	3	345.873.000	1	93.328.000	13,41	12.511.900	14,41	358.384.900	240,11	33,27	Biro Kesramas
	Kegiatan Koordinasi Lintas Agama dan Persidangan Persekutuan Gereja Gereja Indonesia (PGI) Provinsi Jambi	Jumlah Rekomendasi hasil rakor yang menjadi kebijakan	6		2.375.000.000	2	559.923.000	1	183.055.000	14,28	26.124.900	15,28	586.047.900	254,59	24,68	Biro Kesramas
	Kegiatan Pengembangan Pendidikan Agama dan Keagamaan	Jumlah Rekomendasi hasil rakor yang menjadi kebijakan	6		4.930.000.000	3	16.813.358.000	1	587.250.000	545,91	253.168.050	546,91	17.066.526.050	9.115,22	346,18	Biro Kesramas
									Rata-rata capaian kinerja (%)	384,61		385,61	5.146.301.631			
									Predikat kinerja	FALSE						
III	PROGRAM FASILITASI BIDANG SOSIAL KEMASYARAKATAN, KETENAGAKERJAAN SERTA TRANSMIGRASI		100		3.465.000.000	100	6.260.730.000	100	1.585.113.000	-	686.784.453	100	6.947.514.453	13.506,47	209,92	
1	Kegiatan Koordinasi Pemantauan Ketransmigrasian dan Pembinaan Kota Terpadu Mandiri (KTM)	Jumlah Rekomendasi hasil rakor yang menjadi kebijakan	4		200.000.000	1	348.225.000	1	102.811.000	3,56	1.832.000	4,56	350.057.000	114,1	175,03	Biro Kesramas

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2	Kegiatan Koordinasi Komda Lansia Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Jambi	Jumlah Rekomendasi hasil rakor yang menjadi kebijakan	4		290.000.000	1	361.190.000	1	124.623.000	77,4	955.000	78,4	362.145.000	1.959,94	124,88	Biro Kesramas
3	Kegiatan Koordinasi Legiun Veteran dan Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) dalam Provinsi Jambi	Jumlah Rekomendasi hasil rakor yang menjadi kebijakan	4		300.000.000	1	974.678.000	1	28.019.000	1.453,88	212.814.608	1.454,88	1.187.492.608	36.371,99	395,83	Biro Kesramas
4	Kegiatan Koordinasi Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dalam Provinsi Jambi	Jumlah Rekomendasi hasil rakor yang menjadi kebijakan	4		280.000.000	1	240.155.000	1	90.593.000	57,96	5.286.000	58,96	245.441.000	1.474,08	87,66	Biro Kesramas
5	Kegiatan Koordinasi dan Pemantauan Ketenagakerjaan dan LKS Tripartit	Jumlah Rekomendasi hasil rakor yang menjadi kebijakan	4		400.000.000	1	323.396.000	1	92.061.000	2.094,78	74.092.550	2.095,78	397.488.550	52.394,53	99,37	Biro Kesramas
6	Kegiatan Koordinasi Peningkatan Semangat Perintisan Kepahlawanan dan Rasa Patriotisme	Jumlah Rekomendasi hasil rakor yang menjadi kebijakan	4		450.000.000	1	414.400.000	1	114.081.000	998,46	60.451.900	999,46	474.851.900	24.986,61	105,52	Biro Kesramas
7	Kegiatan Koordinasi Penanggulangan Dampak Sosial Penyakit HIV dan AIDS Provinsi Jambi	Jumlah Rekomendasi hasil rakor yang menjadi kebijakan	4		260.000.000	1	367.718.000	1	121.973.000	118,89	50.467.445	119,89	418.185.445	2.997,21	160,84	Biro Kesramas
8	Kegiatan Koordinasi Masalah Masalah Strategis Kemasyarakatan	Jumlah Rekomendasi hasil rakor yang menjadi kebijakan	4		285.000.000	1	278.469.000	1	90.603.000	997,37	34.850.650	998,37	313.319.650	24.959,27	109,94	Biro Kesramas
9	Kegiatan Koordinasi Program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	Jumlah Rekomendasi hasil rakor yang menjadi kebijakan	4		300.000.000	1	804.902.000	1	213.574.000	29,78	63.593.500	30,78	868.495.500	769,4	289,5	Biro Kesramas
10	Kegiatan Koordinasi Penyusunan Program Bidang Kesra dan Kemasyarakatan	Jumlah Rekomendasi hasil rakor yang menjadi kebijakan	4		300.000.000	1	1.953.624.000	1	182.869.000	99,76	182.440.800	100,76	2.136.064.800	2.519,09	712,02	Biro Kesramas
12	Kegiatan Koordinasi Pelestarian Serta Pengembangan Adat Melayu Jambi	Jumlah Rekomendasi hasil rakor yang menjadi kebijakan	4		400.000.000	1	193.973.000	1	423.906.000	-	-	1	193.973.000	25	48,49	Biro Kesramas
									Rata-rata capaian kinerja (%)	539,26		540,26	631.592.223			
									Predikat kinerja	FALSE						
IV	PROGRAM FASILITASI BIDANG PENDIDIKAN, KESEHATAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KELUARGA BERENCANA DAN KEPEMUDAAN		100		15.495.000.000	78	2.051.442.556	100	634.502.000	6.153,47	345.168.278	6.253	2.396.610.834	740,94	17,13	
1	Kegiatan Rapat Koordinasi Kesra Bidang Kesehatan	Jumlah Rekomendasi	12		3.475.000.000	2	156.559.000	2	31.415.000	135,38	42.529.434	137,38	199.088.434	1.144,85	5,73	Biro Kesramas

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2	Kegiatan Koordinasi Program Terkait Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah, Lomba Sekolah Sehat dan Pembinaan Kesekretariatan Tim Pembina UKS/M	Jumlah Rekomendasi	6		4.720.000.000	1	808.166.000	1	244.224.000	70,58	172.355.545	71,58	980.521.545	1.192,93	20,77	Biro Kesramas
3	Kegiatan Koordinasi dan Pembinaan Keluarga Berencana (KB) di Provinsi Jambi	Jumlah Rekomendasi	12		3.480.000.000	2	307.897.000	2	81.210.000	45,74	37.148.900	47,74	345.045.900	397,87	9,92	Biro Kesramas
4	Kegiatan Koordinasi Pembinaan Perempuan	Jumlah Rekomendasi	12		1.400.000.000	2	472.941.000	2	97.206.000	35,82	34.811.899	37,82	507.752.899	315,13	36,27	Biro Kesramas
5	Kegiatan Koordinasi Pembinaan Generasi Muda/Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah Rekomendasi	6		1.210.000.000	1	171.592.256	1	100.798.000	22,48	18.356.500	23,48	189.948.756	391,38	15,7	Biro Kesramas
6	Kegiatan Koordinasi Kebijakan Pendidikan	Jumlah Rekomendasi	6		1.210.000.000	1	134.287.300	1	79.649.000	59,21	39.966.000	60,21	174.253.300	1.003,48	14,4	Biro Kesramas
									Rata-rata capaian kinerja (%)	61,53		63,03	399.435.139			
									Predikat kinerja	R						

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Biro Perekonomian dan SDA Setda Provinsi Jambi																
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat pemenuhan kebutuhan unit kerja biro dalam mendukung tugas dan fungsi			578.592.900	100	485.476.484	100	482.160.750	13,13	273.378.010	113	758.854.494	440	131	
1	Kegiatan Peningkatan Pelayanan administrasi Pada Biro	Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan perlengkapan kantor yang difasilitasi	45	Org	578.592.900	97,39	485.476.484	100	482.160.750	98,03	273.378.010	198,03	758.854.494	440,07	131,16	
									Rata-rata capaian kinerja (%)	98,03		198,03	758.854.494			
									Predikat kinerja	ST						
II	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				35.238.775		32.250.000		32.035.250	96	31.901.250	96	64.151.250	969	182	
1	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah buku laporan yang tersedia dari pelaksanaan penyusunan dan ikhtisar kinerja	10	Lap	35.238.775	0,9825	32.250.000	1	32.035.250	95,91	31901250	96,91	64151250	969,1	182,05	
									Rata-rata capaian kinerja (%)	95,91		96,91	64.151.250			
									Predikat kinerja	ST						
III	Program Pembinaan Pembangunan Ekonomi di Bidang Penanaman Modal, BUMD/BUMN dan Pendapatan Keuangan				567.744.300		639.076.680		378.496.200	#VALUE!	212.720.750	#VALUE!	851.797.430	1.589	151	
1	Kegiatan Koordinasi dan Monitoring di Bidang Penanaman Modal dan pendapatan keuangan	Tersedianya bahan laporan untuk keperluan pembinaan dan koordinasi dalam rangka peningkatan dan pengembangan penanaman modal dan pendapatan keuangan di Provinsi Jambi	10	Kali	191.952.300	94,19	171.837.640	100	127.968.200	99,47	63643100	199,47	235480740	1.994,69	122,68	
2	Kegiatan Koordinasi dan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Bidang BUMN/BUMD	Persentase Capaian Kinerja BUMN/BUMD	16	Kali	180.334.500	98,5	274.750.590	100	120.223.000	99,84	60016950	199,84	334767540	1.249,01	185,64	
3	Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi dan Monitoring di bidang Pengendalian Inflasi	Tersedianya data Inflasi dan data harga bahan pokok dan barang penting lainnya	12	Kali	195.457.500	98,97	192.488.450	100	130.305.000	82,83	89060700	182,83	281549150	1.523,58	144,05	
									Rata-rata capaian kinerja (%)	94,05		194,05	283.932.477			
									Predikat kinerja	ST						
	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pembangunan Ekonomi Bidang Kebudayaan, Kepariwisataan dan Koperindag				199.415.450		291.914.013		122.293.500	-	125.675.734	-	417.589.747	677	206	
	Kegiatan Koordinasi Pengembangan Ekonomi di Bidang Kebudayaan, Kepariwisataan dan KOPERINDANG	Persentase penerimaan kenaikan pendapatan/ pembangunan	35	Kali	123.533.250	99,96	188113913	100	82355500	99	82277634	199	270391547	568,51	218,88	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Kegiatan Koordinasi keikutsertaan Pemerintah Provinsi Jambi Pada Event Promosi Potensi Daerah dan Produk Unggulan Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif	Koordinasi dan fasilitasi kegiatan event promosi potensi daerah, Pengembangan produk unggulan dan Pariwisata daerah	35	Kali	75.882.200	99,95	103800100	100	39938000	175	43398100	275	147198200	785,82	193,98	
										Rata-rata capaian kinerja (%)		137,01		237,01	208.794.874			
										Predikat kinerja		FALSE						
	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pembangunan di Bidang Sumber Daya Alam				391.241.325		345.185.497		249.180.050		155.046.881		500.232.378	1.787	126	
	Kegiatan Koordinasi Program CSR Perusahaan Pengelola Sumber Daya Alam (SDA) di Prov Jambi	Laporan Kegiatan Pembinaan Bidang CSR Perusahaan Pengelola Sumber Daya Alam di Provinsi Jambi	8	Kali	75.708.750	94	76.622.900	100	38.825.000	62,86	19.412.500	162,86	96.035.400	2.035,75	126,85	
	Kegiatan Koordinasi Pembinaan Pembangunan Bidang Lingkungan idup dan Kehutanan	Laporan Kegiatan Pembinaan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	12	Kali	126.216.075	99	104.009.700	100	84.144.050	74,84	41.592.025	174,84	145.601.725	1.457,00	115,36	
	Kegiatan Koordinasi Pembinaaan Pembangunan Bidang ESDM di Provinsi Jambi	Laporan Kegiatan Pembinaan Bidang ESDM, Pencegahan dan Penanggulangan Pertambangan Tanpa Izin Provinsi Jambi	9	Kali	189.316.500	94	164.552.897	100	126.211.000	68,26	94.042.356	168,26	258.595.253	1.869,52	136,59	
										Rata-rata capaian kinerja (%)		68,65		168,65	166.744.126			
										Predikat kinerja		R						
	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pembangunan di Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan				395.622.300		376.870.646		252.322.050		154.790.500		531.661.146	1.937	139	
	Kegiatan Koordinasi Pembangunan Bidang Pertanian, Perternakan dan Perkebunan	Laporan Kegiatan Pembinaan Bidang pertanian, Peternakan dan Perkebunan	22	Kali	102.835.350	98,83	117.321.946	100	57.130.750	100	45.621.500	200	162.943.446	909,11	158,45	
	Kegiatan Koordinasi Pembinaan Pembangunan Bidang Ketahanan Pangan, Penyuluhan dan Kelautan Perikanan	Laporan Kegiatan Pembinaan Bidang ketahanan pangan, penyuluhan dan Kelautan Perikanan	5	Kali	178.379.325	95,82	146.893.900	100	118.919.550	99,83	59.358.850	199,83	206.252.750	3.996,66	115,63	
	Kegiatan Koordinasi Evaluasi dan Pengawasan Penyaluran Pupuk Bersubsidi oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Prov Jambi	Laporan Kegiatan Pembinaan Bidang Pengawasan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Oleh KP3 Provinsi Jambi	22	Kali	114.407.625	96,44	112.654.800	100	76.271.750	99,46	49.810.150	199,46	162.464.950	906,64	142,01	
										Rata-rata capaian kinerja (%)		99,77		199,77	177.220.382			
										Predikat kinerja		ST						

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Jambi																
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Sarana Prasarana Kantor Terpenuhi			13.042.330.200		-		785.093.913	-	638.278.580	-	638.278.580	167	6	
		Persentase pemenuhan kompunen SAKIP														
		Persentase pemenuhan kelengkapan administratif TLHP dipenuhi														
		Rata-rata IKM pertriwulan														
	Kegiatan Penyediaan bahan bacaan	Jumlah Penyediaan bahan bacaan bagi aparatur	195.952	eks	8.906.000.000			429.352	403.621.340	47.708,00	259.682.234	477.060	259.682.234	243,46	2,92	Biro Humas
	Kegiatan Peningkatan Ketatausahaan	Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan kantor	100	persen	4.136.330.200			90	381.472.573	-	378.596.346	90	378.596.346	90	9,15	Biro Humas
		Jumlah Dokumen LKJ Biro	6	LKJ				1 LKJ (cc)								Biro Humas
		Jumlah Dokumen LPPD Biro	6	LPPD				1 LPPD								Biro Humas
		Jumlah RKA	6	dokumen				1 dokumen								Biro Humas
		Jumlah DPA	12	dokumen				1 dokumen								
		Jumlah RUP	6	dokumen				1 dokumen								Biro Humas
		Persentase pelayanan administrasi kepegawaian Biro	100	persen				1								Biro Humas
		Persentase pelayanan administrasi ketatausahaan Biro	100	persen				1								Biro Humas
		Jumlah Pelaksanaan Bimtek/sosialisasi kegiatan Pranata Humas	1	kegiatan				1								Biro Humas
									Rata-rata capaian kinerja (%)	23.854,0		238.575,	319.139.290			
									Predikat kinerja	FALSE						
	Program Peningkatan Pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	IKM Pelayanan Akomodasi dan Penerima Tamu			12.109.800.800		0		918.976.016	-	578.976.729	-	578.976.729	201	4	Biro Humas
		IKM Pelayanan Upacara dan Rapat-rapat														
		IKM Administrasi Keprotokolan														
	Kegiatan Pelayanan Tamu Kepala Daerah	Persentase pelayanan tamu Pemerintah Provinsi yang berkunjung di Provinsi Jambi	100		4.378.049.800			100	157.668.000	100	79.042.000	200	79.042.000	200	2	Biro Humas

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Kegiatan Pelayanan acara dan Keprotokolan	Persentase Pelayanan Administrasi Acara Kedinasan KDH/Wakil KDH/Sekretaris Daerah/Dinas Instansi	100		7.731.751.000			100	761.308.016	103	499.934.729	203	499.934.729	203	6	Biro Humas
		Persentase Pelayanan acara, upacara dan rapat-rapat kedinasan KDH/Wakil KDH/Sekretarsi Daerah/Dinas Instansi														
									Rata-rata capaian kinerja (%)	101,4		201,4	289.488.365			
									Predikat kinerja	FALSE						
	Program penghimpunan data dan penyebarluasan informasi pembangunan daerah provinsi jambi	persentase informasi pembangunan Provinsi Jambi yang disiarkan di media Cetak			77.204.354.500		-		8.645.177.835	-	5.563.242.256	-	1.778.208.001	-	-	Biro Humas
		persentase informasi pembangunan Provinsi Jambi yang disiarkan di media on line	100	persen												
		Persentase Peningkatan respon positif masyarakat melalui akun Pemerintah Provinsi Jambi (facebook dan instagram)	4.380	komentar												
		Persentase Informasi Pembangunan Provinsi Jambi yang disiarkan di Media Elektronik	36													
		Persentase penyebaran informasi pembangunan melalui bahan bacaan	36													
		Persentase Informasi Pembangunan Provinsi Jambi melalui Media Dalam dan Luar Ruang terpasang	72	kali												
		Persentase kabupaten kota yang menindaklanjuti rekomendasi Bakohumas Provinsi Jambi														
		Persentase fasilitas diseminasi informasi internet sehat dan pembangunan daerah Provinsi Jambi														
		IKM Layanan Dokumentasi														

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Kegiatan Pemberitaan dan Publikasi				28.442.579.000				4.203.044.153		3.785.034.255					
		Jumlah bahan informasi kepada masyarakat dalam bentuk tulisan di media cetak lokal	2520	tulisan				560		719	-	1.279	-			Biro Humas
		Jumlah Publikasi pembangunan Provinsi Jambi di media cetak Nasional	36	Kali				9		6	3.785.034.255	15	3.785.034.255			
		Jumlah bahan informasi kepada masyarakat dalam bentuk tulisan dimedia online	27000	adv				6.000		4.772	2.610.108.000	10.772	2.610.108.000			
		Jumlah respon positif masyarakat melalui Akun Pemerintah Provinsi Jambi (facebook dan instagram)	100% (6000 komentar)	%/komentar				100%			38.000.000					
		Persentase respon Masyarakat terhadap Pembangunan Daerah Provinsi Jambi melalui Aplikasi Gubernur Menjawab (pertanyaan, kritik dan saran)						0			1.136.926.255					
		Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Analisa Media Mitra Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Jambi melalui Intelligent Media Management (IMM)	3	Kali				3								
	Kegiatan Pelayanan Publikasi Publik dan Informasi Komunikasi Kehumasan				23.097.267.800				3.134.979.450	-	1.034.114.000	-	1.034.114.000			Biro Humas
		Output:Jumlah bahan informasi pembangunan Prov.Jambi dimedia elektronik (TV lokal)	7.245	Kali				1.600		253	662.000.000	1.853	662.000.000			
		jumlah informasi pembangunan provinsi jambi yang disiarkan di media elektronik Nasional	36	Kali				1.600		-	-	1.600	-			
		Jumlah bahan publikasidi radio	144	Kali				1.400		1.189	178.500.000	2.589	178.500.000			
		Jumlah siaran langsung di media elektronik (tv dan radio, video streaming)	6.000	Kali				1		-	-	1	-			

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		jumlah informasi pembangunan provinsi jambi yang disiarkan di TV On Line						1		1.270	172.500.000	1.271	172.500.000			
		Jumlah Pelaksanaan Pers Tours Biro Humas dan Protokol beserta mitra media	1	kali				1								
		Jumlah pelaksanaan belanja pakaian dinas dan atribut lainnya	1	kali						1	21.114.000	1	21.114.000			
		Jumlah Pelaksanaan Uji Kompetensi bagi Media	90	Kali				1								
	Kegiatan Publikasi melalui Media Dalam dan Luar Ruang	Output:Jumlah Baleho terpasang	100	persen	6.507.957.000				152.480.800	-	360.314.066	-	360.314.066			Biro Humas
		Jumlah Spanduk terpasang		pcs				26		11	-	37	-			
		Jumlah Backdrop terpasang		pcs				25		-	-	25	-			
		Jumlah Banner terpasang		pcs				4		-	-	4	-			
		Persentase Publikasi Acara Instansi / Lembaga yang difasilitasi														
	Kegiatan Pelayanan Informasi Kemasyarakatan				3.846.784.000				401.386.850	-	131.374.935	-	131.374.935			Biro Humas
		Output:Jumlah pelaksanaan Rakor Bakohumas Tingkat Provinsi Jambi	8	Kali						-	-	-	-			Biro Humas
		Jumlah Sosialisasi Program Gubernur Jambi	2	Kali				1		-	-	1	-			
		Jumlah pertemuan edukasi internet dikalangan pelajar						1		-	-	1	-			
		Persentase Fasilitas Cetak Foto Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah/Pejabat Eselon I beserta Istri	100	persen				25		75	-	100	-			
		Jumlah Transfer VCD Liputan Kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Pejabat Eselon I beserta Istri	68	Kali				18		88	-	106	-			
		Jumlah Pelaksanaan Pers Tours Biro Humas dan Protokol beserta mitra media						1		-	-	1	-			
		Jumlah Pelaksanaan Uji Kompetensi bagi Media	90	Kali				1		-	-	1	-			

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Kegiatan PenyebarluasanInformasi Pembangunan Daerah Provinsi Jambi				15.309.766.700				753.286.582	-	252.405.000	-	252.405.000			Biro Humas
		Output:Jumlah Tabloid Pemprov Jambi,	12000	eks				12000		3.000	-	15.000	-			Biro Humas
		Jumlah kliping pers,	1200	eks				1200		245	-	1.445	-			
		Jumlah buku Mozaik	1000	eks				1000		-	-	1.000	-			
		Jumlah Buku agenda kerja	1200	eks				1200		-	-	1.200	-			
		Jumlah kalender meja	2200	eks				2200		-	-	2.200	-			
		Jumlah kalender diding	5000	eks				5000		-	-	5.000	-			
		Jumlah sampul kliping pers	1200	lbr				1200		-	-	1.200	-			
		Jumlah poster informasi,	11000	lbr				11000		-	-	11.000	-			
		Jumlah leaflet	6000	lbr				6000		-	-	6.000	-			
		Jumlah paperbag,	2500	eks				2500		-	-	2.500	-			
		Jumlah Monitoring Media Cetak Lokal pada Kabupaten/Kota	11	kab/kota				11		-	-	11	-			
		Jumlah Media Cetak hari ini	3.000	buah				750		2.250	-	3.000	-			
									Rata-rata capaian kinerja (%)	143,8		255,8	355.641.600			
									Predikat kinerja	FALSE						

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Biro Pengelolaan Barang Milik Daerah																
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1.368.751.622				623.163.925	-	659.913.389	-	659.913.389			
	Monitoring dan Evaluasi Barang Milik Daerah	DokumenMonitoring & Evaluasi			486.262.800,00				216.918.132	-	194.752.161	-	194.752.161			Biro Pengelolaan Barang Milik Daerah
	Penataan Administrasi Tata Usaha Biro Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tertib dan Terlaksananya Administrasi Surat-Menyurat, Administrasi Kepegawaian, Keuangan, Urusaqn rumah Tangga Biro dan Urusan Umum	12	bulan	457.488.822,00				223.769.793	-	262.475.115	-	262.475.115			
	Kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah dan luar daerah	Tercapainya Pelayanan Rapat, Koordinasi dan Konsultasi dalam maupun Luar Daerah	12	bulan	425.000.000,00				182.476.000	-	202.686.113	-	202.686.113			
									Rata-rata capaian kinerja (%)	-		-	219.971.130			
									Predikat kinerja	SR						
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				20.894.414.248				5.760.448.965		13.351.513.705					
	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Roda 2 (Dua) maupun Roda 4 (Empat)			10.201.826.300				-	-	6.241.600.000	-	6.241.600.000			Biro Pengelolaan Barang Milik Daerah
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang di Fasilitasi			5.737.915.948				3.344.230.081	-	3.919.144.137	-	3.919.144.137			
	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	Jumlah Rehabilitasi Bangunan/ Rumah Dinas		bulan	4.954.672.000				2.416.218.884	-	3.190.769.568	-	3.190.769.568			
									Rata-rata capaian kinerja (%)	-		-	4.450.504.568			
									Predikat kinerja	SR						
6	Program Pengelolaan Kekayaan Daerah				8.330.289.219		-		4.127.034.093		4.261.865.334		4.261.865.334			
	Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah Provinsi Jambi	Laporan dan Dokumen Barang Milik Daerah Provinsi Jambi		bulan	940.000.000				433.038.204	-	453.325.671	-	453.325.671			Biro Pengelolaan Barang Milik Daerah
	Pengadaan dan Pengamanan Aset	Tersedianya Pengadaan dan Pengamanan Aset Provinsi Jambi		bulan	4.142.175.000				2.570.350.433	-	2.786.946.652	-	2.786.946.652			
	Penyusunan RKBMD dan Standarisasi Harga Barang/Jasa	Dokumen RKBMD, RKPBMD, dan Standarisasi Harga Barang Beserta Sistem Standar (SSH)		bulan	659.500.000				235.849.600	-	235.593.877	-	235.593.877			
	Pembinaan dan Pemberdayaan SDM	Peningkatan SDM Pengelolaan dan Pengurus Barang Milik Daerah Provinsi Jambi		bulan	805.200.000				285.407.644	-	273.626.400	-	273.626.400			

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pemanfaatan Aset Pemerintah Provinsi Jambi	Jumlah Kontribusi Pemanfaatan Barang Milik Daerah		bulan	625.010.752				207.649.408	-	180.219.419	-	180.219.419			
	Penghapusan dan Pemindahtanganan	Tersedianya Laporan dan Dokumen Penghapusan dan Pemindahtanganan BMD		bulan	577.495.493				211.279.836	-	159.539.154	-	159.539.154			
	Penilaian Aset	Tersedianya Dokumen Penilaian Aset Milik Pemerintah Provinsi Jambi		bulan	580.907.974				183.458.968	-	172.614.161	-	172.614.161			
Rata-rata capaian kinerja (%)										-		-	608.837.905			
Predikat kinerja										SR						

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Badan Keuangan Daerah																
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100	persen	-	100	7.328.220.683	100	7.251.964.159		7.086.319.111		14.414.539.794	182		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa pos dan benda-benda pos keperluan surat menyurat	60	bulan		96,23	87.565.000	12	90.822.960	12	85.129.500	108	172.694.500	180,38		Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	Pembayaran jasa telepon, air dan listrik pada ktr Dipenda dan 10 UPTD	60	bulan		91,21	2.631.793.765	12	2.778.680.381	12	2.652.071.663	103	5.283.865.428	172,02		
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jasa pengelolaan administrasi keuangan SKPD	60	bulan		97,7	678.012.300	12	576.823.872	12	574.308.688	110	1.252.320.988	182,83		
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jasa pengelolaan kebersihan pada kantor Dipenda Provinsi dan UPTD Kota Jambi	60	bulan		99,44	412.965.518	12	605.417.449	12	600.295.120	111	1.013.260.638	185,73		
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat tulis kantor	60	bulan		99,72	599.005.568	12	502.502.714	12	500.114.142	112	1.099.119.710	186,2		
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cetakan serta penggandaan	60	bulan		98,67	1.346.625.300	12	1.311.566.520	12	1.297.766.892	111	2.644.392.192	184,45		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen instalasi listrik / penerangan kantor	60	bulan		99,35	107.909.830	12	138.660.868	12	132.776.800	111	240.686.630	185,58		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinay kebutuhan bacaan	60	bulan		100	30.360.000	12	30.270.480	12	30.270.480	112	60.630.480	186,67		
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan minuman untuk rapat dan tamu	60	bulan		92,3	184.408.700	12	279.800.000	12	278.332.500	104	462.741.200	173,83		
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Perjalanan dinas kantor dalam dan luar daerah	60	bulan		99,97	1.249.574.702	12	937.418.916	12	935.253.326	112	2.184.828.028	186,62		
									Rata-rata capaian kinerja (%)	12		109,46	1.441.453.979			
									Predikat kinerja	SR						
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100	persen	-	100	10.281.688.923		6.828.653.720		6.593.774.504		11.888.616.525	#DIV/0!		
	Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional	Pembelian kendaraan dinas / operasional kantor				-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!		Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi
	Pembangunan Gedung Kantor	gedung kantor				7	217.888.000	12	417.298.000	-	416.638.000	7	634.526.000	#DIV/0!		
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Pengadaan Peralatan gedung kantor	60	bulan		93,52	6.053.740.235	12	1.814.460.780	-	1.708.542.998	94	7.762.283.233	155,87		
	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	60	bulan		86,75	945.749.000	12	1.174.068.142	3	1.081.176.197	90	2.026.925.197	149,58		
	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	60	bulan		88,95	1.076.489.458	12	407.800.000	3	388.392.637	92	1.464.882.095	153,25		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Rehabiltasi Sedang/Berat Gedung Kantor	60	bulan		99,2	1.987.822.230	12	3.015.026.798	3	2.999.024.672	102		170,33		
									Rata-rata capaian kinerja (%)	1,5		64	2.377.723.305			
									Predikat kinerja	SR						
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan peningkatan disiplin aparatur	100	persen	-	97,64	181.615.170	100	211.900.000	100	211.225.900		392.841.070	163		
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	pakaian dinas pegawai Dipenda Provinsi Jambi	60	stel		97,64	181.615.170		211.900.000	-	211.225.900	98	392.841.070	162,73		Badan Keuangan Daerah Prov. Jambi
									Rata-rata capaian kinerja (%)	-		97,64	392.841.070			
									Predikat kinerja	SR						
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100	persen	-	81,43	108.459.475		51.984.000	100	48.153.200		156.612.675	146		
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Diklat	60	bulan		81,43	108.459.475	12	51.984.000	6	48.153.200	87	156.612.675	145,72		Badan Keuangan Daerah Prov. Jambi
									Rata-rata capaian kinerja (%)	6		87,43	156.612.675			
									Predikat kinerja	SR						
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		100	persen	-	95,93	210.408.800		278.360.436	100	270.766.050		348.314.400	165		
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		60	bulan		95,93	210.408.800	12	144.505.632	3	137.905.600	99	348.314.400	164,88		Badan Keuangan Daerah Prov. Jambi
	Kegiatan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat		60	bulan				12	133.854.804	6	132.860.450	6	132.860.450	10		
									Rata-rata capaian kinerja (%)	4,5		52,47	240.587.425			
									Predikat kinerja	SR						
6	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Cakupan peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	100	persen	-		23.195.082.430		13.961.968.194		12.334.476.595		35.529.559.025	#DIV/0!		
	Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Peraturan Daerah tentang APBD	Peraturan Daerah tentang APBD	60	bulan		71,1	2.547.488.400	12	2.693.911.131	6	1.855.087.370	77	4.402.575.770	128,5		
	Penatausahaan belanja tidak langsung non Pegawai	Tertib Penatausahaaan Belanja Tidak Langsung	60	bulan		94,05	313.241.048	12	267.627.472	6	221.870.291	100	535.111.339	166,75		
	Penysunan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Perda Pertanggungjawaban Pelaksana APBD Provinsi Jambi	60	bulan		91,34	6.435.723.500	12	351.663.707	6	316.277.300	97	6.752.000.800	162,23		
	Pemeliharaan sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Terpeliharanya sistem informasi pengelolaan keuangan daerah melalui SIMDA	60	bulan		92,26	451.522.186	12	165.786.772	6	156.503.044	98	608.025.230	163,77		
	Peningkatan Manajemen Unit Akuntasi Wilayah	Tercapainya Laporan Pengelolaan Dana Dekon dan Tugas Pembantuan	60	bulan		87,31	124.656.000	12	113.557.506	6	106.077.506	93	230.733.506	155,52		Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengelolaan Administrasi TUKD Belanja Tidak Langsung	Tercapainya Administrasi TUKD Belanja Tidak Langsung Secara Baik dan Benar	60	bulan		93,78	452.012.758	12	276.907.927	6	263.412.221	100	715.424.979	166,3		
	Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah	Tertibnya Administrasi Perbendaharaan dan Kas Daerah	60	bulan		99,83	295.746.872	12	340.559.349	3	258.562.349	103	554.309.221	171,38		
	Pengelolaan Administrasi TUKD Belanja Langsung	Terlaksananya Administrasi TUKD Belanja Langsung yang Baik	60	bulan		99,29	350.920.970	12	307.191.454	6	300.583.124	105	651.504.094	175,48		
	Intensifikasi, Ektensifikasi Peningkatan Pajak Daerah dan Dana Perimbangan	Optimalnya realiasi penerimaan Pajak Daerah	60	bulan		92,15	6.184.832.992	12	4.499.650.369	6	4.086.133.002	98	10.270.965.994	163,58		
	Intensifikasi dan Ektensifikasi Retribusi Daerah	Optimalisasi realisasi penerimaan retribusi daerah	60	bulan		98,67	400.065.941	12	219.288.181	6	217.619.652	105	617.685.593	174,45		
	Monitoring, Evaluasi dan pelaporan DAK provinsi Jambi	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan DAK Provinsi Jambi	60	bulan		98,5	238.976.284	12	141.159.612	6	133.590.773	105	372.567.057	174,17		
	Administrasi TP-TGR		-	bulan		90,21	352.489.798	-	-	-	19.632.000	90	372.121.798	#DIV/0!		
	Pengelolaan Akuntansi Pendapatan	Terlaksananya Rekonsiliasi Akuntansi Pendapatan	60	bulan		92,38	89.775.493	12	66.169.941	3	68.593.670	95	158.369.163	158,97		
	Kegiatan Fasilitasi, Konsultasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pendapatan Lain-lain Daerah	Tersedianya target pendapatan lain lain, terlaksananya koordinasi dengan instansi terkait penerimaan lain lain	60	bulan		92,36	224.693.140	12	137.003.890	6	186.996.469	98	411.689.609	163,93		
	Kegiatan Penyusunan Data dan Informasi Retribusi Daerah	Tersedianya data dan informasi retribusi daerah dan pendapatan lain lain	60	bulan		70,74	250.129.866	12	132.741.577	6	184.110.397	77	434.240.263	127,9		
	Kegiatan Pemeliharaan Sistem Ke-Samsatan pada UPT Badan Keuangan Daerah	Tersedianya data dan informasi retribusi daerah dan pendapatan lain lain	60	bulan		99,52	555.126.094	12	472.215.491	6	218.014.451	106	773.140.545	175,87		
	Kegiatan Penyusunan Peraturan Bidang Penganggaran Daerah		60	bulan		71,4	151.342.486		-	3	278.057.715	74	429.400.201	124		
	Kegiatan Intensifikasi, Ekstensifikasi Peningkatan Pajak Daerah dan Ke-Samsatan UPTB Keuangan Daerah Provinsi Jambi Pada Kabupaten Tanjab Barat	Tercapainnya Target Pajak Daerah da Danadan terlaksananya peningkatan pelayanan pajak daerah dan pendapatan daerah	36	bulan		90,62	302.320.300	12	327.706.476	6	263.835.168	97	566.155.468	268,39		
	Kegiatan Intensifikasi, Ekstensifikasi Peningkatan Pajak Daerah dan Ke Samsatan UPTB Keuangan Daerah Provinsi Jambi Pada Kabupaten Tanjab Timur	Tercapainnya Target Pajak Daerah da Danadan terlaksananya peningkatan pelayanan pajak daerah dan pendapatan daerah	36	bulan		89,6	298.912.100	12	331.999.659	3	448.695.986	93	747.608.086	257,22		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Kegiatan Intensifikasi, Ekstensifikasi Peningkatan Pajak Daerah dan Ke Samsatan UPTB Keuangan Daerah Provinsi Jambi Pada Kabupaten Muaro Jambi	Tercapainnya Target Pajak Daerah da Danadan terlaksananya peningkatan pelayanan pajak daerah dan pendapatan daerah	36	bulan		92,85	309.025.000	12	332.403.147	3	281.253.347	96	590.278.347	266,25		
	Kegiatan Intensifikasi, Ekstensifikasi Peningkatan Pajak Daerah dan Ke Samsatan UPTB Keuangan Daerah Provinsi Jambi Pada Kabupaten Batanghari	Tercapainnya Target Pajak Daerah da Danadan terlaksananya peningkatan pelayanan pajak daerah dan pendapatan daerah	36	bulan		91,92	362.543.200	12	403.834.221	3	293.358.933	95	655.902.133	263,67		
	Kegiatan Intensifikasi, Ekstensifikasi Peningkatan Pajak Daerah dan Ke Samsatan UPTB Keuangan Daerah Provinsi Jambi Pada Kabupaten Tebo	Tercapainnya Target Pajak Daerah da Danadan terlaksananya peningkatan pelayanan pajak daerah dan pendapatan daerah	36	bulan		93,75	328.147.650	12	351.156.197	3	320.675.100	97	648.822.750	268,75		
	Kegiatan Intensifikasi, Ekstensifikasi Peningkatan Pajak Daerah dan Ke Samsatan UPTB Keuangan Daerah Provinsi Jambi Pada Kabupaten Bungo	Tercapainnya Target Pajak Daerah da Danadan terlaksananya peningkatan pelayanan pajak daerah dan pendapatan daerah	36	bulan		96,3	346.704.600	12	355.476.095	6	363.118.916	102	709.823.516	284,17		
	Kegiatan Intensifikasi, Ekstensifikasi Peningkatan Pajak Daerah dan Ke Samsatan UPTB Keuangan Daerah Provinsi Jambi Pada Kabupaten Merangin	Tercapainnya Target Pajak Daerah da Danadan terlaksananya peningkatan pelayanan pajak daerah dan pendapatan daerah	36	bulan		94,15	372.645.119	12	396.668.712	6	375.582.252	100	748.227.371	278,19		
	Kegiatan Intensifikasi, Ekstensifikasi Peningkatan Pajak Daerah dan Ke Samsatan UPTB Keuangan Daerah Provinsi Jambi Pada Kabupaten Sarolangun	Tercapainnya Target Pajak Daerah da Danadan terlaksananya peningkatan pelayanan pajak daerah dan pendapatan daerah	36	bulan		93,35	318.094.500	12	340.369.062	6	445.129.136	99	763.223.636	275,97		
	Kegiatan Intensifikasi, Ekstensifikasi Peningkatan Pajak Daerah dan Ke Samsatan UPTB Keuangan Daerah Provinsi Jambi Pada Kabupaten Kerinci	Tercapainnya Target Pajak Daerah da Danadan terlaksananya peningkatan pelayanan pajak daerah dan pendapatan daerah	36	bulan		90,75	314.418.100	12	339.069.325	6	278.763.193	97	593.181.293	268,75		
	Kegiatan Intensifikasi, Ekstensifikasi Peningkatan Pajak Daerah dan Ke Samsatan UPTB Pengelolaan Pendapatan Dearah Kota Jambi	Tercapainnya Target Pajak Daerah da Danadan terlaksananya peningkatan pelayanan pajak daerah dan pendapatan daerah	36	bulan		99,51	391.199.833	12	408.652.983	6	228.508.554	106	619.708.387	293,08		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Ppembinaan dan pengawasan pajak daerah	36	bulan		96,94	432.328.200	12	189.197.938	6	164.434.676	103	596.762.876			
									Rata-rata capaian kinerja (%)	5,04		96,63	1.268.912.822			
									Predikat kinerja	SR						
7	PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN/KOTA		100	persen	-	100	548.505.277		365.935.000	100	331.256.920		1.286.676.106			
	Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD Kabupaten/Kota		60	bulan		80,67	548.505.277		298.512.000	6	277.034.600	87	825.539.877	144,45		Badan Keuangan Daerah Prov. Jambi
	Pembinaan dan Evaluasi Perhitungan APBD Kabupaten/Kota		60	bulan		86,67	406.913.909		67.423.000	6	54.222.320	93	461.136.229	154,45		Badan Keuangan Daerah Prov. Jambi
									Rata-rata capaian kinerja (%)	6		89,67	643.338.053			
									Predikat kinerja	SR						

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi																
1	Program pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase			35.354.600.000	21,85	7.725.863.043	100	6.666.216.687		4.563.607.653		12.289.470.696	95,24	34,26	
		Pelayanan Administrasi Perkantoran														
1	Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	Persentase Jumlah pengiriman surat	100	persen	149.900.000	22,66	33.974.750	100	25.000.000	99,71	24.926.750	122,37	58.901.500	122,37	39,29	
2	Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	PersentasePenyediaan jasa komunikasi, sumber daya	100	persen	7.029.960.000	15,74	1.106.673.406	100	940.482.480	77,54	701.771.202	93,28	1.808.444.608	93,28	25,72	
3	Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Persentase Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100	persen	119.060.000	16,45	19.590.000	100	20.022.500	42,26	6.559.500	58,71	26.149.500	58,71	21,96	
4	Kegiatan Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Persentasepenyediaan jasa jaminan barang milik daerah	100	persen	990.000.000	18,22	180.424.932	100	190.083.931	95,62	68.649.273	113,84	249.074.205	113,84	25,16	
5	Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan	Persentasepenyediaan jasa adm keuangan	100	persen	1.351.510.000	18,19	245.899.450	100	212.754.100	85,16	172.808.400	103,35	418.707.850	103,35	30,98	
6	Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor	Persentasepenyediaan jasa kebersihan	100	persen	5.445.930.000	22,02	1.199.370.069	100	1.013.309.237	95,26	950.486.260	117,28	2.149.856.329	117,28	39,48	
7	Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor	Persentasepenyediaan alat tulis kantor	100	persen	551.920.000	22,65	125.021.400	100	78.697.839	33,16	26.093.500	55,81	151.114.900	55,81	27,38	
8	Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Persentasepenyediaan	100	persen	224.910.000	39,05	87.817.500	100	38.884.900	98,86	38.442.500	137,91	126.260.000	137,91	56,14	
		barang cetakan dan penggandaan														
9	Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Persentasepenyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100	persen	222.060.000	22,75	50.522.400	100	42.009.800	100,04	42.064.400	122,8	92.586.800	122,8	41,69	
10	Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Persentase Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100	persen	133.880.000	23,16	31.000.000	100	25.250.000	96,7	24.000.000	119,85	55.000.000	119,85	41,08	
11	Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman	PersentasePenyediaan makanan dan minuman	100	persen	4.197.500.000	25,3	1.061.785.525	100	952.341.900	47,24	392.373.813	72,54	1.454.159.338	72,54	34,64	
12	Kegiatan Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Persentase rapat koordinasi dan konsultasikeluar daerah yang diikuti	100	persen	4.017.350.000	44,45	1.785.853.611	100	1.214.820.000	71,96	753.142.055	116,41	2.538.995.666	116,41	63,2	
13	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Penunjang Administrasi/Teknis Pemerintah Daerah	Tenaga Penunjang Administrasi/Teknis Pemerintah Daerah (OB)	100	persen	1.296.000.000	-	-	100	-	0	-	-	-	-	0	
14	Kegiatan Transportasi, Akomodasi dan Konsumsi	Jumlah Transportasi Pegawai dan Pelayanan Umum	100	persen	9.624.620.000	18,68	1.797.930.000	100	1.912.560.000	80,54	1.362.290.000	99,22	3.160.220.000	99,22	32,83	
									Rata-rata capaian kinerja (%)	73,15		95,24	877.819.335			
									Predikat kinerja	S						
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase PeningkatanSarana dan Prasarana Aparatur	100%		50.265.797.000		4.547.404.362		1.550.271.426		1.537.825.605		6.085.229.967	94	248	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 dan Roda 2	Jumlah Kendaraan Dinas	100	persen	2.559.750.000	85,95	2.200.060.000	100	-	0	-	85,95	2.200.060.000	85,95	85,95	
1	Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Persentase Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	100	persen	2.421.117.000	21,06	509.836.862	100	190.752.226	97,5	489.456.900	18,56	999.293.762	118,56	41,27	
	Kegiatan Pengadaan 1 (satu) unit rumah singgah satu lantai dg luas 400 m2 di Kawasan Jakarta Pusat, bagi Masyarakat Jambi di Jakarta	Persentase Pengadaan 1 (satu) unit rumah singgah satu lantai dg luas 400 m2 di Kawasan Jakarta Pusat, bagi Masyarakat Jambi di Jakarta	1	unit	36.000.000.000	-	-		-	0	-	-	-	-	-	
	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Persentase Gedung yang dipelihara	100	persen	2.884.930.000	16,48	475.497.266	100	319.500.000	66,86	226.752.166	83,34	702.249.432	83,34	24,34	
3	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Persentase Kendaraan Roda 4 dan roda 2 yang dipelihara	44	unit	3.499.000.000	23,38	817.975.234	100	640.569.200	72,15	521.879.539	95,53	1.339.854.773	217,11	38,29	
4	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan gedung kantor	Persentase Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	100	persen	1.519.000.000	18,79	285.445.000	100	199.950.000	66,19	170.932.000	84,98	456.377.000	84,98	30,04	
5	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan listrik dan elektronik	PersentasePemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan Listrik dan Elektronik	100	persen	1.382.000.000	18,71	258.590.000	100	199.500.000	51,59	128.805.000	70,3	387.395.000	70,3	28,03	
									Rata-rata capaian kinerja (%)	50,61		76,95	869.318.567			
									Predikat kinerja	R						
4	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	100		400.000.000		60.625.000		-		-		60.625.000	15	15	
1	Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Persentase Pegawai yang terpenuhi pakaian dinasnya	100		400.000.000	15,16	60.625.000	0	-	0	-	15	60.625.000	15,16	15,16	
									Rata-rata capaian kinerja (%)	-		15,16	60.625.000			
									Predikat kinerja	SR						
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase	100		152.800.000		24.800.000		9.900.000		-		24.800.000	16	16	
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur														
1	Kegiatan Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	Persentase Kegiatan Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	100	persen	152.800.000	16,23	24.800.000	100	9.900.000	0	-	16,23	24.800.000	16,23	16,23	
									Rata-rata capaian kinerja (%)	-		16,23	24.800.000			
									Predikat kinerja	SR						
6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP			360.000.000		-		-		-		-	-	-	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP			360.000.000		-		-	0	-	-	-	-	-	
										Rata-rata capaian kinerja (%)		-		-		
										Predikat kinerja		SR				
7	Program Penunjang Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Persentase Fasilitasi kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah di Jakarta	100		214.000.000		53.000.000		30.004.800		27.000.000		80.000.000	119	37	
1	Kegiatan Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	Persentase Jumlah koordinasi	100	persen	214.000.000	24,77	53.000.000	100	30.004.800	94,0583006	27.000.000	119	80.000.000	118,82	37,38	
										Rata-rata capaian kinerja (%)		94,06		118,82	80.000.000	
										Predikat kinerja		ST				
	Program Penghimpunan Data dan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Provinsi Jambi	Persentase Jumlah Informasi	100%		420.000.000											
	Program Penghimpunan Data dan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Provinsi Jambi	Persentase Jumlah Informasi Pembangunan Daerah Provinsi Jambi yang disiarkan di media cetak (majalah, leaflet dan kalender) serta media elektronik (website BPDP Jambi.com dan spmPronews.com)	100%		420.000.000		-		-	0	-	-	-	-	-	
										Rata-rata capaian kinerja (%)		-		-		
										Predikat kinerja		SR				
	Program Fasilitasi Hubungan Daerah, Lembaga dan Kemasyarakatan	Persentase Fasilitasi Hubungan Daerah, Lembaga & Ke-masyarakatan	100		4.092.120.000		118.804.000		100.780.150		54.005.000		172.809.000	21	30	
	Kegiatan Hibah Jasa ke Masyarakat	Persentase hibah yang diberikan ke masyarakat	100	persen	378.920.000	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
	Kegiatan Sosialisasi Program dan Hasil Pembangunan Daerah Jambi	Persentase Sosialisasi yang difasilitasi	100	persen	593.480.000	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
	Kegiatan Sarasehan masyarakat Jambi di Jakarta	Persentase Pelaksanaan Sarasehan	100	persen	569.720.000	20,85	118.804.000	100	100.780.150	-	54.005.000	20,85	172.809.000	20,85	30,33	
	Kegiatan Rakor Paguyuban Masyarakat Jambi	Persentase Rakor yang difasilitasi	100	persen	450.000.000	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
	Kegiatan Penyusunan Data BaseMasyarakat Jambi se-Jabodetabek	Data Base Masyarakat Jambi se-Jabodetabek	100	persen	450.000.000	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
	Kegiatan Jambi Invesment Information (JII)	Nilai Transaksi	100	persen	750.000.000	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
	Kegiatan Temu Daerah Perempuan Jambi	Persentase Temu Daerah yang difasilitasi	100	persen	450.000.000	-	-		-	-	-	-	-	-	-	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2016-2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun 2019		Target Kinerja Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (2020) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2020 %		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Kegiatan Workshop Pemuda Jambi	Persentase Workshop yang difasilitasi	100	persen	450.000.000	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-		2,61	21.601.125			
										Predikat kinerja	SR						
	Program Peningkatan kerjasama antar Pemerintah daerah	Presentase Fasilitasi kabupaten/kota provinsi jambi	78		4.967.000.000		967.265.900		593.666.296		176.195.000		1.143.460.900	91	23	
	Kegiatan Peningkatan Seni Budaya Daerah Promosi dan Informasi	Presentase Jumlah Promosi	78	persen	4.967.000.000	19,47	967.265.900	100	593.666.296	51,2	176.195.000	70,67	1.143.460.900	90,6	23,02	
										Rata-rata capaian kinerja (%)	51,2		70,67	1.143.460.900			
										Predikat kinerja	R						
	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Jambi di Jakarta	Persentase Pelayanan Masyarakat Jambi yang tidak mampu di Jakarta	1		1.100.000.000											
	Kegiatan Penyediaan makanan dan Minuman di Rumah Singgah	Persentase Penyediaan makanan dan minuman di Rumah Singgah	100		1.100.000.000		-		-	0	-	-	-	-	-	
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-		-	-			
										Predikat kinerja	SR						

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan "*gap expectation*" antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan kondisi riil saat perencanaan sedang dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal dan kelemahan yang tidak diatasi. Oleh karena itu identifikasi permasalahan ini sangat dibutuhkan dalam rangka memperkecil "*gap expectatition*" yang mungkin akan timbul.

2.3.1 Permasalahan daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran pembangunan Daerah

a. Perlambatan ekonomi yang disebabkan oleh :
   - Situasi perekonomian global dan nasional yang tidak stabil, ditambah pandemi Covid-19 yang melanda dunia pada tahun 2020;
   - Belum optimalnya peningkatan iklim investasi;
   - Turunnya harga komoditas unggulan daerah;
   - Pembatasan-pembatasan aktivitas ekonomi akibat Covid-19 pada tahun 2020 berdampak pada perlunya upaya-upaya khusus pemulihan ekonomi pada tahun 2021;
   - Belum meratanya infrastruktur serta penurunan kualitas infrastruktur pada beberapa wilayah.

b. Belum optimalnya kualitas sumber daya manusia yang disebabkan oleh :
   - Disparitas IPM antar wilayah;
   - Partisipasi perempuan dalam pengambilan kebijakan masih rendah;
   - Kualitas pendidikan belum merata;
   - Kualitas pelayanan kesehatan belum merata.

c. Daya tahan terhadap bencana yang belum tangguh disebabkan oleh :
   - Belum optimalnya pengendalian bencana alam dan non alam;
   - Menurunnya daya dukung lingkungan akibat aktivitas masyarakat;
   - Ketersediaan sarana prasarana kesehatan belum memadai.

d. Layanan Publik belum optimal yang disebabkan oleh :
   - Penerapan e-government belum optimal;
   - Kapasitas SDM ASN belum optimal.

2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

a. Urusan Pendidikan
    1. Kuantitas dan kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan belum merata;
    2. Kapasitas pendidikan, infrastruktur, sarana dan prasarana pendidikan baik daring ataupun luring belum merata sehingga kualitas pendidikan juga tidak merata;
    3. Komposisi pendidikan masih didominasi oleh pendidikan umum (SMA) sedangkan pendidikan kejuruan masih pada porsi yang minimal.
b. Urusan Kesehatan
    1. Angka kematian ibu dan bayi masih tinggi terutama di pedesaan;
    2. Jumlah tenaga dokter spesialis yang terbatas;
    3. Kompetensi tenaga medis masih memerlukan perhatian;
    4. Layanan kesehatan pada rumah sakit umum daerah dan puskesmas belum semuanya memenuhi standar pelayanan minimum untuk kesehatan;
c. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
    1. Sarana prasarana irigasi belum mampu melayani kebutuhan air untuk aktivitas pertanian tanaman pangan;
    2. Belum optimalnya pengelolaan sumberdaya air secara terpadu;
    3. Konektivitas di daerah tertinggal dan antar kawasan masih terbatas;
    4. Akses penduduk terhadap layanan dasar belum mencapai target 100%;
    5. Belum optimalnya penataan ruang sebagai alat keterpaduan pembangunan wilayah;
    6. Pengembangan kawasan strategis masih lambat;
d. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
    1. Masih terdapat penduduk yang bertempat tinggal di hunian tidak layak;
    2. Masih terjadi backlog perumahan.
e. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

1. Unjuk rasa berakhir anarkis masih terjadi

f. Urusan Sosial
   1. Belum optimalnya penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
   2. Masih tingginya ketimpangan penduduk miskin di perkotaan dan perdesaan;

g. Urusan Ketenagakerjaan
   1. Meningkatnya Tingkat Pengangguran Terbuka ;
   2. Masih tingginya angka pengangguran terdidik;
   3. Masih rendahnya kualitas tenaga kerja

h. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
   1. Belum optimal perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan;
   2. Belum optimal peran perempuan dalam pemberdayaan ekonomi.

i. Urusan Pangan
   1. Alih fungsi lahan tanaman pangan;
   2. Masih terdapat desa rawan pangan di Provinsi Jambi;
   3. Pola konsumsi masih banyak tergantung dengan padi-padian (beras).
   4. Belum optimalnya nilai Pola Pangan Harapan (PPH).

j. Urusan Pertanahan
   1. Sertifikasi hak atas tanah masih rendah

k. Urusan Lingkungan Hidup
   1. Kualitas air dan udara mengalami penurunan;

l. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
   1. Cakupan kepemilikan akte kelahiran masih rendah

m. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
   1. Belum optimalnya kapasitas dan peran kelembagaan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan desa;
   2. Masih kurangnya kompetensi sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pemerintahan desa

n. Urusan Perhubungan
   1. Perubahan preferensi masyarakat dalam pemilihan moda transportasi harus diiringi dengan peningkatan sarana prasarana perhubungan.

o. Urusan Komunikasi dan Informatika

1. Kurangnya integrasi berbagai interface pelayanan publik.

p. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
   1. Belum optimalnya kontribusi UKM dalam perekonomian daerah;
   2. Rendahnya daya saing koperasi dibanding pelaku usaha non koperasi;

q. Urusan Penanaman Modal
   1. Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri menurun;
   2. Tingkat kesenjangan antara realisasi investasi dan persetujuan investasi masih relatif tinggi.

r. Urusan Kepemudaan dan Olahraga
   1. Terbatasnya sarana olah raga berskala nasional;
   2. Masih rendahnya kreativitas dan produktivitas pemuda dalam pembangunan.

s. Urusan Statistik
   1. Ketersediaan data statistik yang tidak tepat waktu;
   2. Ketersediaa data sektoral masih minim.

t. Urusan Kebudayaan
   1. Rendahnya apresiasi dan perlindungan terhadap budaya daerah
   2. Terbatasnya pemanfaatan nilai budaya daerah

u. Urusan Kearsipan
   1. Penyelenggaraan kearsipan dan pemanfaatan arsip yang belum optimal.

v. Urusan Kelautan dan Perikanan
   1. Relatif masih rendahnya tingkat kesejahteraan dan cukup tingginya angka kemiskinan nelayan.
   2. Menyempitnya areal wilayah tangkapan yang dikuasasi nelayan tradisional, karena peralatan/kapal dan teknologi yang dimiliki tertinggal jauh dengan nelayan asing yang masuk ke perairan Jambi.
   3. Pengelolaan sumberdaya perikanan belum optimal dilakukan dibanding potensi lestarinya.
   4. produksi budidaya belum memenuhi standar ekspor dari segi kualitas, kuantitas dan kontinuitas.
   5. Pengembangan usaha budidaya sebagian masih berpencar, belum menerapkan konsep usaha kawasan sehingga sangat menyulitkan dalam pembinaan dan pengawasan.

w. Urusan Pariwisata

1. Berbagai potensi wisata budaya dan keindahan alam belum digali dan dikembangkan secara optimal.
2. Kurangnya promosi pariwisata sehingga potensi pariwisata yang ada belum dikenal masyarakat secara luas dan global
3. Pemberdayaan masyarakat dalam mendukung upaya pembangunan bidang pariwisata belum optimal

x. Urusan Pertanian

1. Tingkat kesejahteraan petani tanaman pangan rendah;
2. Produktivitas lahan pertanian belum optimal;
3. Infrastruktur transportasi antar kawasan sentra produksi dan daerah pemasaran masih belum lancar.

y. Urusan Kehutanan

1. Tingginya potensi kebakaran hutan dan lahan serta perambahan kawasan;

z. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

1. Eksplorasi bahan tambang dan galian yang dilakukan di Provinsi Jambi belum berkontribusi positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat disekitar lokasi eksplorasi
2. Potensi energi baru terbarukan belum tereksplorasi optimal untuk pemenuhan kebutuhan energi masyarakat

aa. Urusan Perdagangan

1. Masih rendahnya nilai ekspor.

bb. Urusan Perindustrian

1. Kurangnya daya saing produk hasil industri;
2. Keterbatasan kemampuan SDM dan teknologi produksi;-
3. Pengembangan agroindustri belum optimal;

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAERAH
DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Perkembangan perekonomian suatu daerah tidak dapat dilepaskan dari interaksi aktivitas ekonomi baik dalam skala lokal, regional, nasional dan aktivitas ekonomi internasional yang saling tarik menarik dan memiliki korelasi antar satu dengan yang lainnya. Aktivitas ekonomi yang semakin terbuka dewasa ini, pada akhirnya juga dipengaruhi oleh kondisi perekonomian baik secara nasional maupun internasional, baik itu menyangkut kebijakan pemerintah di sektor moneter maupun sektor riil, maupun pengaruh perekonomian global seperti naik turunnya harga minyak dunia dan nilai tukar mata uang asing, pengaruh kondisi keuangan global, maupun pandemi sebagaimana pandemi Covid-19 yang terjadi sejak tahun 2020 lalu. Hal-hal tersebut diyakini akan berdampak pada berbagai aktivitas dan sektor ekonomi di daerah.

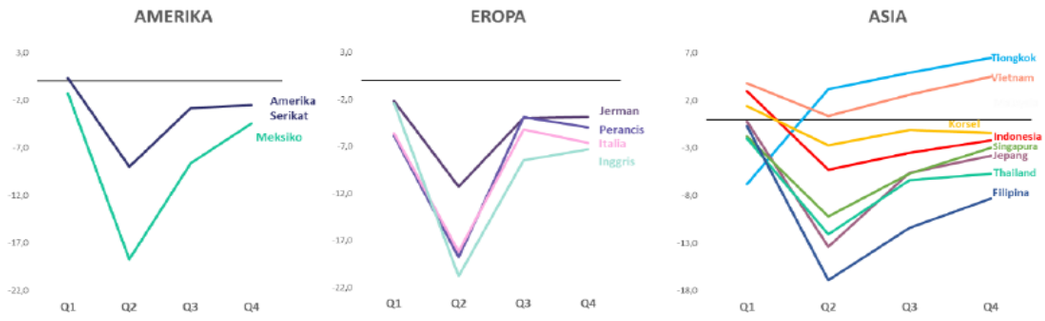
3.1.1 Kondisi Perekonomian Global

Kinerja perekonomian global tertekan pada semester I 2020 akibat Covid-19 dan mulai membaik memasuki semester II 2020. Pertumbuhan ekonomi terkontraksi dalam, baik di negara maju maupun berkembang pada semester I 2020. Kondisi tersebut berimbas pada penurunan volume perdagangan dunia dan harga komoditas. Kekhawatiran terhadap dampak Covid-19 terutama pada periode awal pandemi, telah memicu kepanikan dan meningkatkan ketidakpastian pasar keuangan global. Kondisi tersebut mengakibatkan aliran modal global beralih ke aset keuangan yang lebih aman dan kemudian menekan nilai tukar negara berkembang, tingkat voltilitas naik ke level tertinggi sepanjang sejarah, serta kontraksi PMI manufaktur dan jasa berada di titik terendah sejak GFC.

Dampak pandemi Covid-19 secara umum tercermin di setiap komponen pertumbuhan ekonomi berdasarkan pengeluaran. Misalnya di Tiongkok, Vietnam, Perancis, dan Spanyol, tingkat konsumsi jatuh ke evel negatif (kecuali Vietnam karena pengendalian pandemi yang sangat

baik) akibat menurunnya mobilitas masyarakat dan aktivitas produksi di berbagai tempat usaha. Ketidakpastian pandemi juga mempengaruhi *confidence* dan penundaan keputusan investasi. Aktivitas perdagangan internasional terhambat di tengah tren lockdown dan terganggunya rantai pasok. Dalam situasi ini konsumsi pemerintah justru menjadi satu-satunya komponen yang tumbuh di banyak negara.

Di sisi produksi, kinerja berbagai sektor yang bervariasi juga mencerminkan pola pemulihan yang tidak merata. Setiap negara mengalami dampak dalam derajat yang berbeda di berbagai sektor ekonominya. Sinyal pemulihan ekonomi mulai terlihat sejak kuartal III 2020 hingga sekarang, setelah mengalami dampak terparah di kuartal II 2020. Peningkatan *confidence* ekonomi global didorong oleh vaksinasi yang mulai berjalan di lebih banyak negara serta kasus Covid-19 yang sempat menurun secara tajam. Kebijakan retriksi terus disesuaikan dengan kondisi pandemi. Kenormalan baru diperkenalkan pada berbagai aspek, mencoba menciptakan keseimbangan antara bergeraknya aktivitas sosial ekonomi yang disesuaikan dengan protokol kesehatan untuk mencegah penularan Covid-19. Disamping itu, kebijakan akomodatif juga terus diimplementasikan oleh berbagai negara untuk mendukung pemulihan dan *jump-start* perekonomian.



Sumber: Bloomberg, 2021

Gambar 3-1 Pertumbuhan ekonomi kuartalan global (persen yoy)

Berbagai indikator ekonomi menunjukan bahwa aktivitas ekonomi termasuk aktivitas produksi terus berangsur membaik. Indeks manufaktur global (Purchasing Manager Index/ PMI Manufaktur) telah berada di level ekspansif 9di atas 50) sejak Juli 2020, bahkan capaian PMI masufaktur global pada April 2021 memecahkan rekor level

tertinggi sejak April 2010. Penguatan PMI terjadi secara luas khususnya di negara maju dan manufaktur besar seperti AS, jerman, dan Inggris. Pembukaan kembali aktivitas industri yangmendorong kenaikan output, perbaikan permintaan domestik, maupun pemulihan perdagangan internasional menjadi faktor-faktor yang berkontribusi. Meski secara umum tren PMI masufaktur global cukup positif, namun konsistensinya tidak terlalu merata khususnya di negara berkembang.

Pemulihan ekonomi global juga tercermin dari perbaikan harga-harga komoditas. Secara umum harga-harga komoditas sudah kembali pada level sebelum pandemi, termasuk komoditas yang menjadi unggulan Indonesia seperti batubara, karet dan kelapa sawit. Mulai kembalinya aktivitas produksi mendukung perbaikan permintaan terhadap komoditas-komoditas barang input. Harga minyak mentah yang sempat jatuh ke teritori negatif juga terus menunjukan penguatan meskipun terdapat kontribusi dari faktor supply di dalamnya. Seiring dengan terus pulihnya aktivitas ekonomi berbagai negara termasuk pada peningkatan kegiatan perdagangan global, harga-harga komoditas juga diperkirakan akan terus membaik serta memberi dukungan pada perekonomian negara-negara penghasil.

3.1.2 Kondisi Perekonomian Nasional dan Daerah

Pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 2,07 persen. Lapangan usaha yang mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam diantaranya transportasi dan pergudangan sebesar 15,04 persen; penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 10,22 persen; jasa perusahaan sebesar 5,44 persen; jasa lainnya sebesar 4,10 persen; dan perdagangan besar dan eceran, reparasi modil dan sepeda motor sebesar 3,72 persen. Sebaliknya, beberapa lapangan usaha masih mengalami pertumbuhan positif, diantaranya jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 11,60 persen; informasi dan komunikasi sebesar 10,58 persen; pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang sebesar 4,94 persen; real estat sebesar 2,32 persen; dan pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 1,75 persen. Struktur PDB Indonesia menurut lapangan usaha atas harga berlaku tahun 2020 tidak menunjukan perubahan berarti. Perekonomian Indonesia masih didominasi oleh industri pengolahan

sebesar 19,88 persen; diikuti oleh pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 13,70 persen; perdagangan besar-eceran, reparasi mobil-sepeda motor sebesar 12,93 persen dan konstruksi sebesar 10,71 persen; serta pertambangan dan penggalian sebesar 6,44 persen. Peranan kelima lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Indonesia mencapai 63,66 persen.

Tabel 3-1 Pertumbuhan PDB Sisi Lapangan Usaha Tahun 2016-2020 (%)

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,36	3,92	3,88	3,61	1,75
Pertambangan dan penggalian	0,95	0,66	2,16	1,22	-1,95
Industri pengolahan	4,26	4,29	4,27	3,8	-2,93
Pengadaan listrik dan gas	5,39	1,54	5,47	4,04	-2,34
Pengadaan air, pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,6	4,59	5,56	6,83	4,94
Konstruksi	5,22	6,8	6,09	5,76	-3,26
Perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor	4,03	4,46	4,97	4,6	-3,72
Transportasi dan pergudangan	7,45	8,49	7,05	6,39	-15,04
Penyediaan akomodasi dan makan minum	5,17	5,41	5,68	5,79	-10,22
Informasi dan komunikasi	8,88	9,63	7,02	9,42	10,58
Jasa keuangan	8,9	5,47	4,17	6,61	3,25
Real estate	4,69	3,6	3,48	5,76	2,32
Jasa perusahaan	7,36	8,44	8,64	10,25	-5,44
Administrasi pemerintahan dan jaminan sosial wajib	3,19	2,05	6,97	4,65	-0,03
Jasa pendidikan	3,8	3,72	5,36	6,3	2,63
Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	5,15	6,84	7,15	8,69	11,6
Jasa lainnya	8,02	8,73	8,95	10,57	-4,1
Produk Domestik Bruto	**5,03**	**5,07**	**5,17**	**5,02**	**-2,07**

Sumber : BPS, 2021

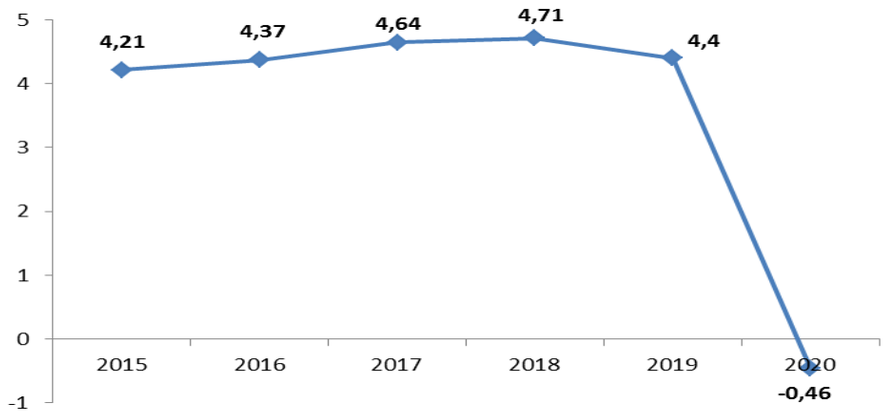
Dari sisi pengeluaran, kontraksi terjadi pada hampir semua komponen, kecuali komponen PK-P yang tumbuh sebesar 1,94 persen. Kontraksi terdalam terjadi pada komponen ekspor barang dan jasa sebesar 7,70 persen, diikuti komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), pengeluaran konsumsi lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (PK-LNPRT), dan komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga (PK-RT) yang masing-masing sebesar 4,95 persen; 4,29

persen; dan 2,63 persen. Sementara itu, kompoonen impor barang dan jasa mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 14,71 persen.

Tabel 3-2 Pertumbuhan PDB Sisi pengeluaran Tahun 2016-2020 (%)

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Pertumbuhan PDB	**5,03**	**5,07**	**5,17**	**5,02**	**-2,07**
Konsumsi RT	5,01	4,94	5,05	5,04	-2,63
Konsumsi LPNRT	6,64	6,93	9,08	10,62	-4,29
Konsumsi Pemerintah	-0,14	2,13	4,8	3,25	1,94
PMTB	4,47	6,15	6,67	4,45	-4,95
Perubahan Inventori	0,23	-0,07	0,71	-	-
Ekspor barang dan jasa	-1,66	8,91	6,48	-0,87	-7,7
Impor Barang dan jasa	-2,41	8,06	12,04	-7,69	-14,71

Sumber : BPS, 2021



Sumber: BPS Provinsi Provinsi Jambi, 2021

Gambar 3-2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi (%) Tahun 2015-2020

Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi selama periode 2016-2020 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2016 pertumbuhan ekonomi mencapai 4,37% kemudian mengalami peningkatan selama 2 tahun berturut-turut namun melambat kembali pada Tahun 2019 menjadi 4,4% dan terkontraksi pada tahun 2020 sebesar 0,46%. Kontraksi dialami oleh sebagian besar lapangan usaha, dengan kontraksi terdalam dialami oleh lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar 14,43 persen; diikuti penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 6,83 persen. Sedangkan pertumbuhan tertinggi disumbang oleh

lapangan usaha informasi dan komunikasi sebesar 8,48 persen. Pandemi Covid-19 yang terjadi hampir di sepanjang tahun 2020 menyebabkan pembatasan kegiatan seperti sekolah dan bekerja. Kegiatan yang dilakukan dari rumah saja dan dilakukan secara daring, meningkatkan aktivitas informasi dan komunikasi. Demikian juga sebaliknya, pembatasan kegiatan dan mobilitas mengakibatkan turunnya aktivitas transportasi terutama angkutan udara. Bahkan Bandara Depati Parbo Kerinci dan Bandara Muaro Bungo beberapa bulan di tahun 2020 sempat tidak ada aktivitas penerbangan komersial sama sekali.

Tabel 3-3 Pertumbuhan PDRB Provinsi Jambi Sisi Produksi Tahun 2016-2020 (%)

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	6,36	5,43	2,48	2,16	1,53
Pertambangan dan penggalian	0,44	3,77	6,86	5,17	-0,53
Industri pengolahan	2,29	3,02	3,55	2,9	0,02
Pengadaan listrik dan Gas, dan air bersih	6,16	1,7	5,61	5,82	0
Pengadaan air	5,02	2,6	4,24	4	0
Konstruksi	3,54	7,22	5,22	6,9	0,07
Perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor	6,27	4,33	6,17	7,31	-0,35
Transportasi dan pergudangan	8,29	5,91	4,7	3,69	-0,47
Penyedia akomodasi dan makan minum	7,65	7,95	6,69	5	-0,08
Informasi dan komunikasi	8,51	6,6	7,74	6	0,32
Jasa keuangan	10,38	3,06	-0,14	1,92	0,15
Real estate	4,31	4,61	5,04	6,91	-0,01
Jasa perusahaan	5,24	4,32	4,67	3,96	-0,06
Administrasi pemerintahan dan jaminan sosial wajib	3,01	2,52	4,8	4,89	-0,08
Jasa pendidikan	6,04	4,24	4,99	5,75	0,11
Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	6,64	5,49	5,54	7,12	0,08
Jasa lainnya	6,59	4,54	5,17	4,14	-0,04

Sumber : BPS, 2021

Berdasarkan sumber pertumbuhan ekonomi Provinsi jambi Tahun 2020, sumber pertumbuhan tertinggi berasal dari lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 0,40 persen, diikuti informasi dan komunikasi sebesar 0,35 persen, serta jasa keuangan dan asuransi sebesar 0,15 persen. Sedangkan andil sumber pertumbuhan minus terdalam berasal dari lapangan usaha

pertambangan dan penggalian sebesar -0,53 persen, transportasi dan pergudangan sebesar -0,47 persen.

Struktur PDRB Provinsi Jambi menurut lapangan usaha atas dasar berlaku pada tahun 2020 tidak menunjukan perubahan yang berarti. Perekonomian Provinsi Jambi masih didominasi oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan (30,85 persen); perdagangan besar-eceran, reparasi mobil-sepeda motor (12,63 persen); pertambangan dan penggalian (12,21 persen); serta industri pengolahan (10,83 persen). Berubahnya posisi pertambangan dan penggalian dari peringkat dua menjadi peringkat tiga struktur perekonomian tertinggi di Provinsi Jambi disebabkan oleh turunnya harga dan produksi pertambangan pada tahun 2020.

Tabel 3-4 Struktur PDRB Provinsi Jambi Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (%) Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	30,05	29,68	27,85	27,88	30,85
Pertambangan dan penggalian	16,64	17,77	19,84	18,44	12,21
Industri pengolahan	10,54	10,34	9,94	9,83	10,83
Pengadaan listrik dan Gas, dan air bersih	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07
Pengadaan air	0,14	0,14	0,14	0,14	0,15
Konstruksi	7,05	7,01	7,09	7,43	7,94
Perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor	11,84	11,62	11,77	12,14	12,63
Transportasi dan pergudangan	3,36	3,28	3,22	3,23	2,71
Penyedian akomodasi dan makan minum	1,19	1,21	1,19	1,21	1,18
Informasi dan komunikasi	3,65	3,74	3,79	3,9	4,42
Jasa keuangan	2,53	2,46	2,33	2,32	2,61
Real estate	1,59	1,56	1,55	1,63	1,72
Jasa perusahaan	1,21	1,21	1,2	1,23	1,25
Administrasi pemerintahan dan jaminan sosial wajib	4,72	4,51	4,59	4,89	5,25
Jasa pendidikan	3,36	3,32	3,37	3,51	3,83
Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	1,1	1,1	1,12	1,18	1,35
Jasa lainnya	0,97	0,97	0,96	0,97	0,99

Sumber : BPS, 2021

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi tahun 2020 terkontraksi sedalam 0,46 persen. Kontraksi terdalam terutama didorong oleh komponen ekspor sedalam 10,14 persen, diikuti kontraksi komponen pengeluaran konsumsi pemerintah (PK-P) sedalam 5,14 persen; pengeluaran konsumsi LNPRT sedalam 0,75 persen; serta pengeluaran konsumsi rumah tangga sedalam 0,44 persen. Hanya komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang mengalami pertumbuhan yaitu sebesar 1,04 persen.

Berdasarkan sumber pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi Tahun 2020 pada sisi pengeluaran, komponen PMTB menjadi sumber pertumbuhan tertinggi yakni sebesar 0,22 persen. Sementara sumber pertumbuhan komponen lainnya bernilai minus yaitu pengeluaran konsumsi LNPRT (-0,004 persen); pengeluaran konsumsi rumah tangga (-0,19 persen); pengeluaran konsumsi pemerintah (-0,40 persen); serta ekspor (-7,63 persen) dan impor (-7,81 persen).

Struktur PDRB Provinsi Jambi menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku tahun 2020 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Perekonomian Provinsi Jambi masih didominasi oleh komponen ekspor sebesar 63,28 persen; diikuti pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 47,21 persen; komponen PMTB sebesar 22,40 persen; pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 8,63 persen. Sedangkan komponen lainnya memiliki peran yang lebih kecil yaitu, komponen perubahan inventori sebesar 0,89 persen; dan pengeluaran konsumsi LNPRT sebesar 0,62 persen.

Tabel 3-5 Pertumbuhan PDRB Sisi Permintaan Tahun 2016-2020 (%)

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Pertumbuhan PDRB	4,43	4,64	4,71	4,4	**-0,46**
Konsumsi RT	2,35	4,44	4,13	4,3	-0,19
Konsumsi LPNRT	-4,01	2,64	14,47	7,61	0
Konsumsi Pemerintah	5,37	3,28	4,47	10,69	-0,4
Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	-3,26	7,61	2,12	3,62	0,22
Ekspor barang dan jasa	2,29	8,79	7,02	3,06	-7,63
Impor Barang dan jasa	1,43	11,21	6,7	4,63	-7,81

Sumber : BPS, 2021

Tabel 3-6 Nilai PDRB dan Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku di Provinsi Jambi Tahun 2016 – 2020

No	Sektor	2016		2017		2018		2019		2020	
		(Rp miliar)	%	(Rp miliar)	%	(Rp miliar)	%	(Rp miliar)	%	(Rp miliar)	%
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	51.145,95	29,8	56.199,42	29,4	57.452,80	27,6	59.964,58	27,2	63.817,00	30,9
2	Pertambangan & penggalian	28.493,82	16,6	33.741,82	17,7	42.030,60	20,2	40.843,22	17,9	25.258,10	12,2
3	Industri pengolahan	17.986,47	10,5	19.638,55	10,3	20.780,60	9,97	21.392,37	9,94	22.392,40	10,8
4	Pengadaan Listrik dan gas	103,55	0,06	121,09	0,06	133,1	0,06	145,52	0,07	153,1	0,07
5	Pengaadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	247,08	0,14	265,03	0,14	282,9	0,14	303,8	0,14	311,5	0,15
6	Konstruksi	12.065,94	7,03	13.307,99	6,96	14.732,80	7,07	16.128,77	7,8	16.423,40	7,94
7	Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor	20.871,36	12,2	23.164,52	12,1	24.516,90	11,8	26.756,55	12,7	26.126,10	12,6
8	Transportasi dan pergudangan	5.769,17	3,36	6.231,19	3,26	6.648,30	3,19	6.992,13	3,03	5.615,50	2,71
9	Penyediaan akomodasi dan makan minum	2.033,12	1,18	2.293,92	1,2	2.483,40	1,19	2.628,85	1,23	2.440,70	1,18
10	Informasi dan komunikasi	6.450,83	3,76	7.394,25	3,87	7.889,60	3,79	8.472,43	4	9.136,90	4,42
11	Jasa keuangan dan asuransi	4.349,69	2,53	4.676,21	2,45	4.834,50	2,32	5.046,14	2,37	5.395,10	2,61
12	Real estate	2.729,98	1,59	2.968,97	1,55	3.223,10	1,55	3.533,85	1,63	3.557,00	1,72
13	Jasa perusahaan	2.072,80	1,21	2.296,95	1,2	2.489,70	1,19	2.668,87	1,26	2.584,00	1,25
14	administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	8.085,25	4,71	8.563,09	4,48	9.588,20	4,6	10.551,17	5	10.853,60	5,25
15	jasa pendidikan	5.758,53	3,35	6.309,03	3,3	6.975,10	3,35	7.615,44	3,55	7.927,10	3,83
16	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	1.888,74	1,1	2.091,76	1,09	2.321,70	1,11	2.568,25	1,19	2.798,60	1,35
17	jasa lainnya	1.659,14	0,97	1.834,91	0,96	1.995,10	0,96	2.099,84	0,94	2.056,20	0,99
18	PDRB	171.711,45	100	191.098,71	100	208.378,60	100	217.711,78	100	206.846,30	100

Sumber : Jambi Dalam Angka 2021, 2021

Tabel 3-7 Nilai PDRB dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 di Provinsi Jambi Tahun 2016 – 2020

No	Sektor	2016		2017		2018		2019		2020	
		(Rp miliar)	%	(Rp miliar)	%	(Rp miliar)	%	(Rp miliar)	%	(Rp miliar)	%
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	34.932,19	26,8	36.829,09	27	37.742,40	26,4	38.798,78	26	39.757,90	26,8
2	Pertambangan & penggalian	31.016,89	23,8	32.187,04	23,6	34.395,20	24,1	35.976,66	24,1	34.928,50	23,5
3	Industri pengolahan	14.267,74	10,9	14.698,67	10,8	15.220,40	10,6	15.576,06	10,4	15.564,70	10,5
4	Pengadaan Listrik dan gas	68,26	0,05	69,42	0,05	73,3	0,05	77,58	0,05	81,1	0,05
5	Pengaadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	178,69	0,14	183,33	0,13	191,1	0,13	198,74	0,13	202,7	0,14
6	Konstruksi	9.156,96	7,02	9.818,05	7,19	10.330,50	7,22	11.043,41	7,4	11.140,60	7,5
7	Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor	12.579,06	9,64	13.123,44	9,61	13.932,90	9,74	14.951,42	10	14.203,50	9,57
8	Transportasi dan pergudangan	4.235,23	3,25	4.485,55	3,28	4.696,30	3,28	4.871,84	3,26	4.185,80	2,82
9	Penyediaan akomodasi dan makan minum	1.406,11	1,08	1.517,93	1,11	1.619,50	1,13	1.700,44	1,14	1.584,30	1,07
10	Informasi dan komunikasi	4.619,68	3,54	4.924,70	3,61	5.305,70	3,71	5.624,30	3,77	6.101,00	4,11
11	Jasa keuangan dan asuransi	3.108,02	2,38	3.203,09	2,35	3.198,50	2,24	3.259,02	2,18	3.487,30	2,35
12	Real estate	1.883,13	1,44	1.969,92	1,44	2.069,30	1,45	2.212,37	1,48	2.201,90	1,48
13	Jasa perusahaan	1.376,79	1,06	1.436,30	1,05	1.503,50	1,05	1.562,91	1,05	1.473,40	0,99
14	administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	4.555,65	3,49	4.670,56	3,42	4.894,80	3,42	5.113,34	3,43	5.019,70	3,38
15	jasa pendidikan	4.277,11	3,28	4.458,49	3,26	4.680,90	3,27	4.971,05	3,33	5.127,70	3,45
16	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	1.490,99	1,14	1.572,87	1,15	1.660,00	1,16	1.778,23	1,19	1.898,50	1,28
17	jasa lainnya	1.347,12	1,03	1.408,25	1,03	1.481,00	1,03	1.547,59	1,04	1.491,40	1
	PDRB	130.499,63	100	136.556,71	100	142.995,30	100	149.264,62	100	148.449,90	100

Sumber : Jambi Dalam Angka 2021, 2021

Selain pertumbuhan ekomomi, inflasi juga mempengaruhi ekonomi daerah. Secara kumulatif inflasi di Provinsi Jambi berdasarkan tahun kalender 2020 tercatat sebesar 3,01 (ytd), meningkat dibanding inflasi tahun 2019, terutama disebabkan oleh peningkatan inflasi triwulan IV 2020. Sejalan dengan perkembangan inflasi pada kuartal empat 2020, inflasi tahun 2020 terutama disumbangkan oleh kelompok makanan, minuman dan tembakau. Peningkatan tekanan inflasi disebabkan gangguan pasokan komoditas hortikultura akibat La Nina yang berlangsung sejak Oktober 2020 dan penyesuaian tarif cukai rokok sebesar 23 persen yang diberlakukan sejak 1 Januari 2020.

Inflasi Provinsi Jambi merupakan komposit dari inflasi Kota Jambi dan Kota Muara Bungo. Secara keseluruhan tahun 2020, inflasi Kota Jambi meningkat dibandingkan tahun 2019 terutama disumbangkan oleh inflasi kelompok makanan, minuman dan tembakau. Dampak gangguan cuaca terhadap produktivitas dan distribusi bahan pangan khususnya komoditas hortikultura menjadi faktor utama pendorong inflasi tahun 2020. Hal yang sama terjadi di Kota Muara Bungo, dimana menurut kelompoknya inflasi juga bersumber dari kelompok makanan, minuman dan tembakau.

3.1.3 Sasaran dan Arah Kebijakan Perekonomian Nasional dan Daerah.

3.1.3.1 Nasional

Mulai awal tahun 2020 ekonomi Indonesia dihadapkan pada pandemi Covid-19 yang memberikan dampak besar terhadap pencapaian sasaran RPJMN maupun RPJMD. Sasaran ekonomi terkoreksi tajam di tahun 2020 dan akan berpengaruh pada tahun 2021 dan 2022. Agenda pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19 menjadi tantangan penting yang harus dihadapi nasional maupun daerah.

Resiko terbesar yang dihadapi dalam upaya pemulihan ekonomi pada tahun 2022 adalah ketidakpastian penyelesaian dan dampak wabah Covid-19, baik di tingkat global maupun domestik. Proses pemulihan ekonomi pada tahun 2022 akan menjadi lebih baik jika wabah Covid-19 dapat ditangani pada tahun 2021 melalui upaya pemulihan yang tepat.

Tantangan lain yang harus diantisipasi berkaitan dengan perubahan pola perilaku dan struktur perekonomian, baik global maupun

domestik pascapandemi covid-19. Adapun beberapa perubahan yang diidentifikasi antara lain (1) perubahan bentuk rantai pasok global; (2) perubahan perspektif investor dan sektor prioritas investasi; (3) perubahan tata kerja perusahaan dan pola perilaku masyarakat; dan (4) percepatan transformasi investasi ke padat modal dan teknologi.

Upaya pemulihan ekonomi juga akan dihadapkan kondisi dunia usaha yang belum kembali normal pascapandemi Covid-19. Dunia usaha akan dihadapkan pada tekanan finansial dan membutuhkan modal investasi yang besar untuk dapat bangkit kembali. Sementara itu sisi permintaan akan naik secara bertahap yang akan berdampak pada penerimaan dunia usaha. Pelaku usaha juga akan kesulitan untuk mengembalikan posisi tenaga kerja setara pada posisi sebelum Covid-19 terjadi. Pada saat bersamaan, dunia usaha dihadapkan pada kemungkinan perubahan *comparative/competitive advantage* dan kondisi sektor keuangan yang belum stabil. Untuk itu upaya pemulihan ekonomi harus diarahkan pada antisipasi berbagai kondisi dan potensi perubahan yang ada pascapandemi Covid-19.

Upaya pemulihan ekonomi nasional diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 5,4 – 6,0 persen pada tahun 2022, dengan rincian sasaran sebagai berikut:

Tabel 3-8 Sasaran Ekonomi RKP 2022

Uraian	Sasaran Ekonomi RKP 2022
Perkiraan besaran-besaran pokok	
Pertumbuhan PDB (% yoy)	5,4 – 6,0
Laju inflasi, IHK (% yoy): akhir periode	2,0 – 4,0
Neraca pembayaran	
Pertumbuhan ekspor (% yoy)	6,5 – 7,1
Cadangan devisa (USD miliar)	138,2 – 141,4
Defisit neraca transaksi berjalan (%PDB)	(1,6) – (1,7)
Keuangan Negara	
Penerimaan perpajakan (% PDB)	8,3 – 8,4
Keseimbangan Primer (% PDB)	(2,5) – (3,2)
Surplus/defisit APBN (% PDB)	(4,8) – (5,5)
Rasio utang pemerintah (% PDB)	46,0 – 46,7

Sumber: Ranwal RKP 2022

Stabilitas makroekonomi akan tetap dijaga untuk mendukung proses pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19. Tingkat inflasi

diperkirakan stabil pada rentang sasaran 2,0 – 4,0 persen dan nilai tukar rupiah diperkirakan menguat menuju Rp13.900,- – Rp15.000,- per dolar US$.

Adapun arah kebijakan yang diambil adalah:

1. Penguatan sektor kesehatan melalui peningkatan upaya promotif dan preventif melalui Germas, kapasitas health security terutama surveilans, jejaring dan kapasitas laboratorium dan sistem informasi, serta pemenuhan sumber daya kesehatan seperti fasilitas, farmasi, alat kesehatan, serta SDM kesehatan.
2. Perluasan program perlindungan sosial, termasuk perluasan basis data mencakup pekerja sektor informal.
3. Pembangunan infrastruktur, yang diarahkan dalam bentuk infrastruktur padat karya yang mendukung kawasan industri dan pariwisata
4. Pembangunan SDM, yang diarahkan pada upaya peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja.
5. Akselerasi investasi melalui percepatan integrasi *Online Single Submission* (OSS), relaksasi aturan upah minimum sementara untuk menyerap tenaga kerja, melakukan *aftercare service* untuk mempertahankan investasi yang ada agar tidak berpindah ke negara lain, serta perluasan *positive-list* investasi.
6. Pemulihan industri dan perdagangan melalui optimalisasi competitive advantage sektor-sektor industri unggulan; optimalisasi pengadaan barang dan jasa pemerintah dan BUMN yang menggunakan produk industri dalam negeri; akselerasi pengembangan produk substitusi impor khususnya makanan, minuman dan farmasi; peningkatan fasilitasi ekspor; fasilitasi impor bahan baku; peningkatan standar produk; optimalisasi *Preferential Trade Agreement* (PTA), *Free Trade Agreement* (FTA), *Comprehensive Economic Pratnership Agreement* (CEPA) untuk perluasan ekspor; dan peningkatan efisiensi logistik.
7. Pembangunan pariwisata melalui peningkatan frekuensi dan jalur penerbangan; peningkatan pemasaran wisata ke originasi yang sudah pulih; peningkatan event olahraga, seni budaya dan MICE; penyediaan insentif untuk paket wisata khusus di destinasi prioritas; peningkatan infrastruktur dan standar layanan; dan pengaturan cuti dan libur bersama untuk wisatawan domestik.

8. Pendalaman sektor keuangan domestik dengan memperkuat struktur, ketahanan, dan stabilitas sektor keuangan.

3.1.3.2 Provinsi Jambi

Sama halnya dengan nasional, Pandemi Covid-19 juga sangat berpengaruh terhadap perekonomian Provinsi Jambi tidak hanya pada tahun 2020 namun juga akan berdampak pada tahun 2021. Sasaran Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi tahun 2022 diperkirakan akan berada pada kisaran 4,3 – 4,90 persen (yoy), dengan asumsi vaksinasi dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan dampak sesuai harapan. Selain itu, asumsi pertumbuhan ekonomi tersebut ditopang oleh asumsi permintaan eksternal terhadap komoditas energi primer dan menguatnya permintaan domestik terhadap komoditas unggulan provinsi Jambi yang diikuti oleh perbaikan harga komoditas dunia.

Kinerja perekonomian Provinsi Jambi dari sisi produksi diharapkan telah mampu pulih dari dampak pandemi Covid-19 dan meletakkan pondasi yang baik dalam menopang keberlanjutan pembangunan perekonomian di Provinsi Jambi. Namun demikian, antisipasi terhadap adanya kinerja sektor produksi yang masih lamban sebagai akibat pembatasan aktivitas juga diperlukan. Untuk itu diperlukan upaya pemulihan kinerja sektor produksi menghadapi situasi kebangkrutan dan pengurangan pekerja. Salah satu sektor penting yang diharapkan pulih dan mampu berkinerja baik adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Setelah mengalami tekanan yang cukup berat di tahun 2020 dan 2021 sebagai akibat Covid-19, perekonomian global tahun 2022 diperkirakan akan mengalami perbaikan yang berdampak pada perkiraan laju pertumbuhan volume perdagangan global dan peningkatan harga komoditas. Kondisi ini memberikan peluang pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan untuk mengambil peran dalam pertumbuhan volume perdagangan tersebut, mengingat produk unggulan ekspor Provinsi Jambi merupakan produk sektor tersebut. Pertumbuhan sektor ini diharapkan juga diikuti oleh sektor industri pengolahan sebagai implementasi dari berbagai kebijakan dukungan pemulihan dan upaya revitalisasi sektor ini oleh pemerintah. Pemulihan sektor ini akan memberikan dampak pengganda baik daya serap (*backward linkage*)

maupun maupun daya sebar (*forward linkage*) yang mendorong perekonomian pada tahun 2022.

Sektor-sektor tersier juga diprediksi akan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi tahun 2022, seperti sektor informasi dan komunikasi, serta jasa keuangan. Hal ini sebagai dampak perubahan paradigma ekonomi saat berlangsung pandemi yang mendorong penggunaan teknologi informasi yang lebih intensif. Pola bekerja, belajar dan belanja dari rumah diperkirakan menjadi gaya hidup baru yang akan terus berkembang didukung oleh struktur penduduk yang didominasi kaum milenial.

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi tahun 2022 sumbangan pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga dan LNPRT masih diprediksi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi seiring peningkatan kinerja sektor pertanian, perikanan dan kehutanan serta sektor pertambangan dan penggalian yang memperkuat daya beli masyarakat, serta komitmen pemerintah untuk terus menjaga tingkat inflasi, terutama harga kebutuhan pokok didukung dengan penguatan program perlindungan sosial yang komprehensif dan lebih tepat sasaran.

Dengan basis tahun 2020 yang lebih rendah dari tahun sebelumnya, maka konsumsi pemerintah pada tahun 2022 diperkirakan tumbuh 3,66 persen dengan asumsi beberapa rencana pembangunan infrastruktur yang tertunda pada tahun 2020 dan 2021 akan dilaksanakan pada tahun 2022 ditambah dengan rencana tahun 2022. Sementara pemberian fasilitasi kemudahan usaha dan investasi serta pembangunan infrastruktur diharapkan mampu mendongkrak pertumbuhan investasi di Provinsi Jambi sebesar 2,53 persen. Demikian pula pada sisi perdagangan, kinerja ekspor juga diperkirakan mengalami perbaikan yang bersumber dari peningkatan sektor Pertambangan dan penggalian, serta sektor Pertanian, Kehutanan dan perikanan.

Adapun sasaran pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi Tahun 2022 secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3-9 Sasaran Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi Tahun 2022

Uraian	Sasaran 2022	
	RPJPD	RKPD
Pertumbuhan Ekonomi	**7,0 – 8,0**	**4,30**
Pertumbuhan menurut Lapangan Usaha:		
Pertanian kehutanan dan Perikanan	-	3,55
Pertambangan dan Penggalian	-	3,39
Industri Pengolahan	-	1,94
Pengadaan Listrik dan Gas	-	6,71
Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	-	4,03
Konstruksi	-	5,34
Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor	-	4,03
Transportasi dan pergudangan	-	4,25
Penyediaan akomodasi dan makan minum	-	13,88
Informasi dan komunikasi	-	8,06
Jasa keuangan dan asuransi	-	16,03
Real estate	-	3,37
Jasa perusahaan	-	1,18
Administrasi pemerintahan pertahanan dan jaminan sosial wajib	-	3,3
Jasa pendidikan	-	4,02
Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	-	7,69
Jasa lainnya	-	5,89
Pertumbuhan menurut Pengeluaran		
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	-	3,65
Pengeluaran konsumsi LNPRT	-	3,39
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	-	3,66
Pembentukan Modal Tetap Bruto	-	2,53
Ekspor	-	3,58
Impor	-	1,51

Sumber: RPJPD dan Hasil Analisis, 2021

Dalam upaya mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi tersebut, kebijakan ekonomi daerah pada tahun 2022 diarahkan pada hal-hal berikut :

1. Penguatan sektor kesehatan melalui peningkatan upaya promotif dan preventif melalui Germas, kapasitas *health security* terutama surveilans, jejaring dan kapasitas laboratorium dan sistem informasi, serta pemenuhan sumber daya kesehatan seperti fasilitas, farmasi, alat kesehatan, serta SDM kesehatan.
2. Pembangunan infrastruktur, yang diarahkan dalam bentuk infrastruktur padat karya yang mendukung sektor ekonomi, kesehatan, ketahanan pangan dan kominfo.

3. Pembangunan SDM, yang diarahkan pada upaya pemenuhan sarana-prasarana pendidikan menengah dan luar biasa secara daring dan luring; peningkatan pemerataan layanan pendidikan dan kesehatan; pembangunan gender; serta peningkatan daya saing tenaga kerja.
4. Meningkatkan investasi sektor riil padat karya.
5. Peningkatan nilai tambah industri pengolahan
6. Meningkatkan nilai tambah pertanian, perikanan tangkap dan kehutanan sekaligus salah satu upaya pemulihan ekonomi pasca Covid-19 melalui:
   - intensifikasi sektor pertanian dalam rangka meningkatkan hasil produksi, dengan menerapkan teknologi pertanian yang mendukung dalam proses penyiapan lahan, tata cara budidaya, cara panen dan pengolahan pasca panen termasuk mendorong pelaksanaan peremajaan karet dan kelapa sawit
   - mendorong sustainabilitas perkebunan kelapa sawit melalui penyusunan skema peremajaan kelapa sawit yang berbasis pada kemandirian petani
   - Perbaikan tata niaga dan distribusi pasca produksi yang diimplementasikan dengan :
     - Membangun jaringan kelembagaan petani dengan industri pengolahan untuk mengurangi rantai perdagangan yang tidak sehat serta mendorong terciptanya *corporate farming*.
     - Sosialisasi dan penguatan kelembagaan pasar komoditas (pasar lelang *spot* dan *forward* untuk tanaman perkebunan dan pasar agribisnis untuk tanaman hortikultura)
     - Membangun pusat informasi harga karet dan komoditas utama lainnya yang mudah diakses sampai ke level petani
   - Mendorong pengembangan hilirisasi industri karet yang terintegrasi meliputi industri inti dan penunjang lainnya melalui kemudahan perizinan, pembiayaan, dan pengembangan serta didukung dengan :
     - Memprioritaskan penyelesaian kendala kritikal terkait penyediaan infrastruktur daerah dengan pertimbangan

jangkauan, kapasitas, dan kualitas yang mendukung pengembangan ekonomi daerah.

- Pengembangan industri berskala kecil dan menengah di sekitar area perkebunan sebagai solusi intern sebelum industri hilir skala besar terbentuk. Disamping untuk penciptaan nilai tambah, pengembangan tersebut juga dapat menahan pelemahan harga komoditas pada saat *supply* melimpah.

7. Mendorong percepatan realisasi belanja modal pemerintah, terutama terkait dengan pembangunan infrastruktur dalam rangka peningkatan konektivitas dan perdagangan antar daerah.
8. Mendorong investasi dan penciptaan sumber pertumbuhan baru non SDA, melalui :
    - Peningkatan kegiatan promosi investasi terhadap sektor ekonomi yang dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru, misalnya pengembangan industri pariwisata serta industri kreatif;
    - Meminimalisir hambatan investasi (peraturan/perizinan, pajak/retribusi, infrastruktur);
    - Memberikan insentif bagi investor dan pelaku usaha, antara lain dengan relaksasi pajak/retribusi, penyediaan kawasan, bantuan promosi, termasuk penyediaan SDM yang sesuai kebutuhan industri melalui kerjasama dengan SMK dan perguruan tinggi;
    - Insentif khusus bagi calon investor yang membangun industri hilir penunjang komoditas unggulan di Jambi.
9. Untuk menyikapi pengendalian inflasi, pemerintah daerah perlu memperhatikan proyeksi kenaikan inflasi mendatang serta potensi resiko yang perlu diwaspadai dengan :
    - Memastikan ketersediaan stok pangan selama periode hari besar keagamaan dan menjaga kelancaran distribusi bahan pangan ke wilayah Jambi dengan memprioritaskan aktivitas pengangkutan komoditas bahan pokok.
    - Menjaga ekspektasi inflasi melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar bijak berkonsumsi, termasuk alternatif

konsumsi daging beku serta diseminasi informasi kecukupan stok selama periode hari raya.

- Mendorong sinergi TPID dan Satgas Pangan dalam melakukan pengawasan terhadap perkembangan dan kewajaran harga bahan pangan.
- Memastikan ketersediaan bahan bakar minyak dan gas untuk mengantisipasi kebutuhan selama libur
- Memantau ketaatan maskapai penerbangan terhadap penerapan tarif batas atas terutama ditengah tingginya permintaan angkutan udara.
- Mendorong pelaksanaan dan efektivitas operasi pasar/pasar murah, antara lain dengan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dengan melibatkan Perangkat Daerah dan instansi terkait di tingkat Provinsi maupun kabupaten/kota
- Melakukan manajemen persediaan untuk menghadapi lonjakan harga pada hari besar keagamaan dengan pemanfaatan teknologi pasca panen seperti teknologi ozon, penyediaan mesin pengawet dan/atau *cold storage*.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Keuangan Daerah memegang peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Oleh karena itu, kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara efektif dan efisien agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik. Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunannya tidak bisa dilepaskan dari faktor pengeolaan keuangan daerah yang dikelola dengan manajemen yang baik pula, karena kemampuan keuangan ini merupakan salah satu indikator penting guna mengukur tingkat ekonomi suatu daerah.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah secara proporsional untuk melakukan peran yang lebih aktif dalam bidang keuangan daerah. Adapun tujuan dari pemberian kewenangan tersebut adalah guna meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan sosial,

demokrasi dan penghormatan tehadap budaya lokal, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari penerimaan fiskal daerah. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal telah menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang amat potensial untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah. Selain pendanaan melalui APBD, terdapat sumber pendanaan lainnya di luar APBD, antara lain pendanaan melalui APBN, PHLN, Obligasi daerah, dana kemitraan dunia usaha, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan dan Program Kemitraan serta bina lingkungan di Provinsi Jambi yang semuanya merupakan potensi sumber penerimaan guna menunjang beban belanja pembangunan daerah.

Kebijakan keuangan Provinsi Jambi Tahun 2022 disusun dalam rangka mewujudkan arah kebijakan pembangunan, dan tidak terlepas dari kemampuan keuangan daerah sebagai salah satu faktor yang penting dalam pelaksanaan pembangunan Provinsi Jambi.

3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Daerah merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun terkait. Berdasarkan ketentuan tersebut, dijelaskan bahwa sumber pendapatan daerah Provinsi terdiri atas: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; 2) Dana Perimbangan yang meliputi: dana alokasi umum, dana alokasi khusus dana bagi hasil, dan; 3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah, meliputi: hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak dari pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan dana otonomi khusus, dana bantuan keuangan dari provinsi/kabupaten/kota lainnya, lain-lain penerimaan, dana transfer pusat dan dana insentif daerah. Sementara penerimaan pembiayaan bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran daerah tahun sebelumnya (SiLPA), penerimaan pinjaman daerah, Dana

Cadangan Daerah (DCD), dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pendapatan daerah perhitungannya tidak terlepas dari asumsi-asumsi yang ditetapkan pada saat penyusunan rencana target pendapatan daerah, diantaranya : kondisi dan perkembangan ekonomi makro secara nasional, kebijakan fiskal nasional yang turut mempengaruhi penerimaan pendapatan daerah antara lain alokasi dana transfer ke daerah dan kebijakan harga *administered price*, potensi yang dimiliki serta realisasi pendapatan daerah tahun sebelumnya, upaya intensifikasi dan ekstensifikasi PAD, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyusunan APBD. Kondisi dan perkembangan ekonomi daerah yang membaik dari tahun 2016-2019 memperlihatkan realisasi pendapatan daerah yang tumbuh positif pada rentang tahun tersebut sesuai asumsi yang disusun. Hal sebaliknya terjadi pada tahun 2020 akibat Pandemi Covid-19.

Tabel 3-10 Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016-2020

URAIAN	Realisasi				
	2016	2017	2018	2019	2020
PENDAPATAN	**3.394.214.337.551,10**	**4.279.267.024.229,36**	**4.028.944.287.603,00**	**4.553.023.437.278,63**	**4.370.169.365.801,00**
PENDAPATAN ASLI DAERAH	**1.233.133.129.097,10**	**1.554.347.975.279,36**	**1.533.417.987.521,00**	**1.644.614.031.295,63**	**1.500.140.286.294,91**
Pendapatan Pajak Daerah	966.519.347.102,57	1.316.162.467.485,16	1.305.066.263.649,47	1.345.100.747.780,21	1.292.727.515.514,00
Hasil Retribusi Daerah	19.036.490.425,00	12.893.467.528,00	19.426.452.105,00	19.080.182.890,00	8.341.316.803,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	27.000.011.616,41	29.054.470.466,63	31.498.794.021,83	29.212.590.404,00	30.155.526.586,82
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	220.577.279.953,12	196.237.569.799,57	177.426.477.745,30	251.220.510.220,43	168.915.927.391,09
DANA PERIMBANGAN	**1.547.888.628.151,00**	**2.723.260.588.950,00**	**2.484.982.300.082,00**	**2.881.060.306.983,00**	**2.857.605.177.329,00**
Dana Alokasi Umum	1.466.243.775.693,00	1.788.432.915.714,00	1.694.386.929.136,00	1.829.745.432.347,00	1.742.390.497.748,00
Dana Alokasi Khusus	81.644.852.458,00	934.827.673.236,00	790.595.370.946,00	1.051.314.874.636,00	1.115.214.679.581,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**613.192.580.303,00**	**1.658.460.000,00**	**10.544.000.000,00**	**27.349.099.000,00**	**12.423.902.177,12**
Pendapatan Hibah	1.401.600.000,00	1.658.460.000,00	1.419.000.000,00	1.608.000.000,00	2.656.718.177,12
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	611.790.980.303,00	0	9.125.000.000,00	25.741.099.000,00	9.767.184.000,00
Bantuan Keuangan dari Prov/Pemerintah	0	0	0	0	0
Tunjangan Pendidikan	0	0	0	0	0

Sumber : Badan Keuangan Daerah, 2021

Laju pertumbuhan pendapatan daerah tahun 2016-2020 adalah sebesar 0,05 persen, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan pendapatan daerah rentang tahun 2016-2019 yang sebesar 0,07 persen, akibat adanya penurunan seluruh komponen pendapatan pada tahun 2020, termasuk dana perimbangan sebagai pemberi kontribusi terbesar dalam pendapatan daerah (65,39 persen pada tahun 2020). Laju pertumbuhan dana perimbangan tahun 2016-2020 adalah sebesar 0,13 persen, sedangkan laju pertumbuhan pendapatan asli daerah pada periode yang sama adalah sebesar 0,03 persen atau dengan kata lain Pemerintah Provinsi Jambi masih sangat menggantungkan pendapatannya terhadap dana perimbangan.

Peningkatan pendapatan daerah memberikan kesempatan pada daerah untuk membelanjakannya untuk pembangunan daerah sehingga target –target pembangunan daerah dapat tercapai. Laju pertumbuhan belanja daerah pada rentang tahun 2016-2020 adalah sebesar 0,06 persen atau 0,01 persen diatas laju pertumbuhan pendapatan. Untuk menutupi defisit belanja yang laju pertumbuhannya lebih cepat dari pendapatan tersebut digunakan melalui pembiayaan.

Tabel 3-11 Realisasi Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016-2020

URAIAN	REALISASI (Rp. Juta)				
	2016	2017	2018	2019	2020
BELANJA	**3.294.484,97**	**4.132.941,88**	**4.198.255,72**	**4.826.193,92**	**4.337.307,24**
BELANJA TIDAK LANGSUNG	**1.702.748,35**	**2.389.823,67**	**2.471.765,10**	**2.890.857,19**	**2.967.964,53**
Belanja Pegawai	623.561,73	1.127.581,14	1.303.794,99	1.382.612,32	1.334.073,80
Belanja Subsidi	0,00	0,00	500,00	500,00	550,00
Belanja Hibah	678.057,20	586.336,32	487.359,69	627.469,28	769.215,93
Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	118,20	283,20	328,50
Belanja Bagi Hasil kpd Daerah	399.535,72	517.348,20	579.768,15	710.641,70	631.105,36
Belanja Bantuan Keuangan	1.500,25	158.499,66	100.127,39	169.259,49	99.800,42
Belanja Tidak Terduga	93,46	58,35	96,68	91,19	132.890,53
BELANJA LANGSUNG	**1.591.736,62**	**1.743.118,21**	**1.726.490,61**	**1.935.336,73**	**1.369.342,70**
Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	179.125,84
Belanja Barang & Jasa	646.197,61	847.470,20	941.766,71	1.068.835,92	568.483,65
Belanja Modal	945.539,01	895.648,01	784.723,91	866.500,81	621.733,22

Sumber : Badan Keuangan Daerah,2021

Berdasarkan hasil proyeksi Pendapatan daerah Provinsi Jambi pada tahun 2022 diprediksi sebesar Rp4.456.440.131.380,00 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1.614.109.530.000,00, pendapatan transfer sebesar Rp2.800.000.000.000,00 dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp42.330.601.380,00. Sumber pendapatan utama PAD Provinsi Jambi berasal dari pajak Daerah yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak bahan Bakar Kendaraan bermotor. Secara rinci perkembangan realisasi pendapatan daerah Provinsi Jambi Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 3-9. Sebagai tahun pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19, maka proyeksi tahun 2022 belum pulih seoptimis tahun-tahun sebelum pandemi Covid-19 melanda dunia, dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi tahun 2020 sampai dengan tahun 2021. Adapun hasil perhitungan tersebut dapat dilihat pada tabel 3.10

Tabel 3-12 Proyeksi Pendapatan Tahun 2022

URAIAN	APBD TA. 2021	Proyeksi RKPD Tahun 2022
PENDAPATAN	4.122.362.724.139,62	**4.456.440.131.380,00**
PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.507.203.796.320,00	**1.614.109.530.000,00**
Pendapatan Pajak Daerah	1.238.517.224.547,00	1.279.109.530.000,00
Hasil Retribusi Daerah	21.580.633.733,00	25.000.000.000,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	29.179.073.384,00	35.000.000.000,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	217.926.864.656,00	275.000.000.000,00
PENDAPATAN TRANSFER	**2.785.847.932.488,00**	**2.800.000.000.000,00**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.785.847.932.488,00	2.800.000.000.000,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**1.623.600.000,00**	**42.330.601.380,00**
Pendapatan Hibah	1.623.600.000,00	34.330.601.380,00
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0	8.000.000.000,00
Bantuan Keuangan dari Prov/Pemerintah	0	0
Tunjangan Pendidikan	0	0

Sumber: Hasil Analisis (angka sangat sementara), 2021

3.2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan daerah secara garis besar akan tercermin pada kebijakan pendapatan, belanja serta pembiayaan yang harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan

bertanggungjawab serta taat pada peraturan perundang-undangan. Dalam rangka meningkatkan kinerja pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah, maka kebijakan yang diambil adalah sebagai berikut :

3.2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah, maka ditetapkan kebijakan umum dalam pengelolaan pendapatan daerah tahun 2022 meliputi :

a. Peningkatan penerimaan pajak daerah, optimalisasi retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain – lain PAD yang sah.
b. Optimalisasi pemanfaatan pengelolaan asset daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
c. Meningkatkan kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan mengoptimalkan pengelolaan BUMD.
d. Peningkatan dana perimbangan dari Dana Alokasi Umum dan bagi hasil Pajak, bukan pajak dan pembaharuan data.
e. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasana serta sumberdaya manusia yang ada guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
f. Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan DBH Pajak/Bukan Pajak.
g. Meningkatkan kerjasama Pemerintah dan Swasta.

Dalam rangka meningkatkan pencapaian target-target pendapatan dilakukan melalui penajaman potensi riil sumber-sumber pendapatan dan peningkatan kualitas pelayanan publik secara akuntabel, menginventarisir dan mengoptimalkan pendayagunaan asset-aset agar dapat memberi kontribusi pada PAD, peningkatan pelayanan perpajakan, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain.

3.2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah diklasifikasikan menjadi belanja operasi,

belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Sementara belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa.

Dalam rangka mewujudkan target-target rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2022, serta kontribusi terhadap capaian RPJMN, maka kebijakan Belanja Daerah diarahkan untuk :

a. Pemenuhan pembiayaan belanja yang bersifat wajib dan mengikat untuk menjamin pelayanan dasar masyarakat, termasuk belanja BLUD, DBHCHT dan pendampingan DAK.
b. Pemenuhan Dana bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota
c. Mempertahankan alokasi belanja sebesar 20% untuk fungsi pendidikan.
d. Mengalokasikan belanja fungsi kesehatan sebesar 10%
e. Membiayai program dan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2022.
f. Mendukung Program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah serta memiliki skala pelayanan nasional dan regional.
g. Mendorong pertumbuhan ekonomi hijau
h. Mendukung upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19, antara lain melalui:
    - Bantuan modal usaha bagi usaha kreatif milenial, usaha kreatif mak-mak dan UMKM.
    - Revitalisasi dan fasilitasi objek wisata unggulan daerah, serta penyelenggaraan event berskala nasional guna membangkitkan kembali sektor pariwisata dan kebudayaan
    - Pengembangan kawasan pangan terpadu

- Peningkatan produktivitas komoditas unggulan sektor pertanian serta pangan dan pengolahan pasca panen.
- Peningkatan daya saing tenaga kerja
- Peningkatan kualitas infrastruktur transportasi dan ketahanan pangan.

Kebijakan belanja daerah ini disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja dan memperhatikan priortas pembangunan sesuai permasalahan serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun mendatang dan dilakukan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan.

Guna membiayai implementasi rencana pembangunan daerah tahun 2022, maka proyeksi kebutuhan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp4,757 Trilyun.

Tabel 3-13 Proyeksi Belanja Tahun 2022

URAIAN	APBD TA. 2021	Proyeksi RKPD 2022
BELANJA	**4.516.148.844.342,00**	**4.757.056.433.000,00**
Belanja Operasi	3.283.056.790.666,00	2.857.469.585.989,00
Belanja Modal	261.411.152.679,00	696.713.662.679,00
Belanja Tidak Terduga	260.345.822.301,00	8.451.066.332,00
Belanja Transfer	711.335.078.696,00-	1.194.422.118.000,00

Sumber: Hasil Analisis Bappeda (angka sangat sementara), 2021

3.2.2.3 Arah kebijakan Pembiayaan Daerah.

Pembiayaan daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun – tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan di masa yang akan datang dalam rangka perhitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.

Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), transfer dari dana cadangan (DCD), hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah. Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah timbul karena ada surplus/kelebihan anggaran. Pengeluaran pembiayaan daerah diantaranya diperuntukan bagi pembentukan dana

cadangan, investasi (penyertaan modal dan pembelian surat berharga/saham), pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman daerah, dan sisa lebih perhitungan.

Pembiayaan daerah secara umum adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, dan pada hakekatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Penerimaan pembiayaan daerah Provinsi Jambi dari tahun 2016-2020 sebagian besar bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya dengan jumlah SiLPA cenderung fluktuatif. Sedangkan Pengeluaran pembiayaan daerah untuk pembentukan dana cadangan cadangan dan penyertaan modal.

Kebijakan Pembiayaan daerah terdiri dari kebijakan penerimaan Pembiayaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah diarahkan untuk :

a. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2021 sebagai sumber penerimaan pada APBD Tahun anggaran 2022, didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional.
b. Penyertaan Modal dalam rangka pemenuhan kewajiban dalam prinsip kehati-hatian *(prudential)*.
c. SiLPA diupayakan menurun seiring dengan semakin efektifnya penggunaan anggaran.
d. Membentuk dana cadangan.

Selengkapnya realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2017-2020 dan proyeksi Tahun 2021-2022 dapat dilihat pada Tabel.

Tabel 3-14 Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2017-2020 dan Proyeksi Tahun 2021-2022

URAIAN	Realisasi				Proyeksi	
	2017	2018	2019	2020	2021*	2022**
SURPLUS/(DEFISIT)	**-516.884.901.104,99**	**-94.661.290.182,01**	**-9.369.483.962.003,72**	**32.862.127.504,88**	**-221.473.515.534,00**	**-300.616.301.620,00**
PEMBIAYAAN DAERAH	**516.884.901.104,99**	**457.071.970.882,36**	**671.280.817.888,32**	**420.323.429.670,45**	**221.473.515.534,00**	**300.616.301.620,00**
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	**516.884.901.104,99**	**457.071.970.882,36**	**671.280.817.888,32**	**420.323.429.670,45**	**239.473.515.534,00**	**360.616.301.620,00**
SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya	516.884.901.104,99	457.071.970.882,36	671.280.817.888,32	420.323.429.670,45	239.473.515.534,00	360.616.301.620,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	0	0	0	0	0
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.000.000.000,00**	**60.000.000.000,00**
Penyertaan Modal (Investasi) Pemda	0	0	0	0	18.000.000.000,00	60.000.000.000,00
Pembayaran Pokok Utang	0	0	0	0	0	0
PEMBIAYAAN NETTO	**516.884.901.104,99**	**457.071.970.882,36**	**671.280.817.888,32**	**453.185.557.175,33**	**221.473.515.534,00**	**360.616.301.620,00**
SISA LEBIH PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sumber : Badan Keuangan Daerah
Keterangan : * APBD TA. 2021
**hasil Analisis, (angka sangat sementara), 2021

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2022

Prioritas pembangunan merupakan sekumpulan program yang secara khusus didesain untuk mencapai sasaran pembangunan daerah. Prioritas pembangunan ini didasarkan pada isu strategis di Provinsi Jambi pada tahun berkenaan dengan memperhatikan urgensi, efisiensi, efektivitas, dan daya ungkit bagi kinerja pembangunan daerah. Dalam pelaksanaannya, penentuan prioritas pembangunan Provinsi Jambi juga mempertimbangkan kebijakan nasional untuk keselarasan dan sinergitas antara pembangunan pusat dan daerah. Hal ini dilakukan demi terciptanya harmonisasi dan sinkronisasi pencapaian sasaran pembangunan untuk semua dan dapat memberikan *multiplier effect* terhadap perekonomian di daerah, yang pada gilirannya akan mendorong pembangunan perekonomian secara nasional. Selain itu, perumusan prioritas pembangunan juga dilakukan dengan mengevaluasi capaian kinerja pembangunan dan analisa lebih lanjut terhadap permasalahan pembangunan daerah.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

RKPD Provinsi Jambi Tahun 2022 ini merupakan RKPD transisi dimana RPJMD periode sebelumnya yaitu 2016-2021 telah berakhir namun RPJMD Tahun 2021-2026 belum disusun dan ditetapkan karena proses pemilihan kepala daerah yang belum selesai. Oleh karena itu sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pasal 147 ayat (1) bahwa untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Provinsi, penyusunan RKPD berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD provinsi periode berkenaan serta arah kebijakan dan isu strategis RKP, serta

mengacu pada RPJMN untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah provinsi dengan pembangunan nasional.

Tujuan dan sasaran pembangunan dirumuskan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan daerah dan keterkaitan antara misi dan program pembangunan. Tujuan dan sasaran pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jambi tahun 2022 berpedoman pada Visi dan Misi pembangunan pada RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2005-2025. Adapun Visi Pembangunan yang ditetapkan yaitu : **"*TERWUJUDNYA JAMBI YANG MAJU, MANDIRI, ADIL DAN SEJAHTERA***, dengan 6 (enam) Misi Pembangunan, yaitu :

1. **Mewujudkan daerah yang memiliki keunggulan kompetitif** melalui; perkuatan perekonomian daerah yang berbasis keunggulan komperatif masing-masing daerah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi dan pelayanan. Kemudian, perkuatan ekonomi kerakyatan yang berbasis agribisnis; mengedepankan pembangunan sumberdaya manusia berkualitas dan berdayasaing; pendayagunaan iptek; dan pembangunan infrastruktur yang baik dan mampu mendukung kegiatan perekonomian dan pengembangan daerah secara terintregasi.
2. **Mewujudkan masyarakat ber-IMTAQ, berbudaya dan berdaya saing** melalui; perkuatan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kerukunan umat beragama, interaksi antar budaya, pengembangan nilai-nilai luhur budaya dan kearifan lokal serta peningkatan daya saing sumber daya manusia.
3. **Mewujudkan masyarakat demokratis dan tata kelola pemerintahan yang baik** melalui; peningkatan kelembagaan dan budaya demokrasi; perkuatan peran masyarakat sipil; otonomi daerah; jaminan kebebasan media dalam mengkomunikasikan kepentingan masyarakat; serta peningkatan mutu tata kelola pemerintahan yang baik.
4. **Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan taat hukum** melalui; peningkatan kemampuan dan profesionalisme Polri agar mampu melindungi dan mengayomi masyarakat, mencegah tindak kejahatan, dan menuntaskan tindak kriminalitas. Disamping itu juga dilakukan peningkatan partisipasi masyarakat melalui sistem

keamanan swakarsa, pembenahan struktur hukum dan taat hukum serta penegakan hukum secara adil dan konsekuen.

5. **Mewujudkan pembangunan yang adil dan merata** melalui; pengurangan kesejangan sosial ekonomi, keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan daerah tertinggal, kemiskinan secara bertahap, penyediaan akses yang sama bagi masyarakat dalam pelayanan sosial dan ekonomi, serta menghapuskan diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan.
6. **Mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan** melalui; Pemanfaatan dan menjaga keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, dengan menjaga fungsi, daya dukung dan kenyamanan dalam kehidupan sekarang dan mendatang. Kemudian, melalui pemanfaatan ruang yang serasi untuk permukiman, kegiatan sosial dan ekonomi, dan konservasi. Disamping itu, pemanfaatan ekonomi sumberdaya alam dan lingkungan harus berkesinambungan; pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup harus mendukung peningkatan kualitas kehidupan, memberikan keindahan dan kenyamanan kehidupan; serta pendayagunaan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan daerah.

Terdapat beberapa sasaran pokok dan arah kebijakan yang ingin dicapai pada tahap keempat RPJPD Provinsi Jambi, yang kemudian dihubungkan dengan isu strategis Provinsi saat ini sehingga dihasilkan tabel sinkronisasi dibawah ini.

Tabel 4-1 Persandingan Sasaran Pokok RPJPD dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022

No	RPJPD		RKPD 2022	
	Sasaran Pokok	**Arah Kebijakan**	**Prioritas Pembangunan Daerah**	**Arah kebijakan**
1	2	3	4	5
1.	Mengembangkan ekonomi unggulan dan sumberdaya yang berdaya saing	1. Pembangunan ekonomi diprioritaskan pada penguatan sektor industri yang telah berhasil dengan cara memperluas akses komoditas hasil industri pengolahan hasil produk unggulan ke pasar regional,nasional dan pasar internasional dan mengembangkan potensi sumber daya manusia dengan bertumpu pada keunggulan daerah. 2. Pembangunan industri diprioritaskan pada penguatan industri yang berkelanjutan melalui pengembangan dan pengelolaan sumber daya alam secara optimal dan memanfaatkan bahan baku terbaharukan, penanganan industri ramah lingkungan dan penguatan jaringan industri. 3. Pembangunan perdagangan diprioritaskan pada penguatan kerjasama perdagangan dalam dan luar negri, pemberdayaan produk dalam negri dan penguatan sistem dan jaringan distribusi barang.	1. Pembangunan ekonomi	1. Meningkatkan nilai tambah pertanian, perikanan dan kehutanan melalui peningkatan produktivitas, kualitas serta kelembagaan dan sarana prasarana 2. Peningkatan nilai tambah industri pengolahan 3. Meningkatkan investasi sektor riil padat karya

No	RPJPD		RKPD 2022	
	Sasaran Pokok	**Arah Kebijakan**	**Prioritas Pembangunan Daerah**	**Arah kebijakan**
1	2	3	4	5
		4. Pembangunan pertanian diprioritaskan untuk peningkatan nilai tambah produk-produk pertanian yang sehat dan berdaya saing di pasaran. 5. Pembangunan perikanan diprioritaskan pada pengembangan perikanan komersial di Pantai Timur potensi perairan Sungai Batanghari, pengembangan perikanan rekreasi, pengembangan usaha pembuatan kapal penangkapikan, pengembangan usaha pengolahan hasil,pengembangan usaha berbahan baku dari produk sampingan, pengembangan usaha permodalan, pengembangan usaha informasi kelautan, pengembangan budaya kelautan, pengembangan wisata kelautan. 6. Pembangunan parawisata diprioritaskan pada upaya pengkayaan obyek wisata, atraksi dan budaya yang menjunjung kekhasan daerah, pengembangan paket wisata terpadu dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan promosi kegiatan pariwisata berbasis tehnologi informasi dan komunikasi.		

No	RPJPD		RKPD 2022	
	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan	Prioritas Pembangunan Daerah	Arah kebijakan
1	2	3	4	5
		7. Pengembangan Koperasi dan UMKM diprioritaskan pada pengembangan jaringan kelembagaan Koperasi dan UMKM untuk mengatasi persaingan global.Pengembangan jaringan kelembagaan ini dilakukan melalui pola kemitraan yang tersinergi, kebersamaan, kesetiakawanan yangharus dilakukan oleh semua komponen yang terkait dalam pengembangan Koperasi dan UMKM.		
		8. Pembangunan investasi daerah diprioritaskan pada penciptaan dan pencitraan Jambi sebagai salah satu daerah tujuan utama investasi tingkat nasional.		
2.	Meningkatkan pendayagunaan IPTEK	1. Pembangunan IPTEK diprioritaskan pada pemantapan kerjasama dengan lembaga penelitian dan pengembangan nilai guna ekonomi atas hasil penerapan teknologi dalam kehidupan masyarakat dan aktifitas ekonomi.		

No	RPJPD		RKPD 2022	
	Sasaran Pokok	**Arah Kebijakan**	**Prioritas Pembangunan Daerah**	**Arah kebijakan**
1	2	3	4	5
3.	Meningkatnya pembangunan kawasan strategis, daerah tertinggal serta kota kecil dan menengah yang berkelanjutan	1. Penataan ruang diprioritaskan pemerataan pembangunan antarwilayah, sehingga tidak didapati lagi daerah tertinggal. Seluruh masyarakat telah menikmati sarana dan prasarana dasar yang berkualitas baik di perkotaan maupun perdesaan. Penataan Ruang telah dilaksanakan melalui koordinasi yang mantap dan sistematis baik dalam pengaturan, pembinaan, pelaksanaan ,dan pengawasan penataan ruang, didukung dengan infrastruktur data spasial yang mutakhir. Kemudian, pembangunan kawasan andalan terus didorong sehingga mampu menghasilkan produk-produk yang memiliki keunggulan. Pemerintah berkewajiban untuk mendorong keterlibatan kelompok usaha mikro, kecil dan menengah dalam proses pemanfaatan sumberdaya kawasan. Pembangunan kawasan andalan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang semakin berkualitas, yaitu pertumbuhan yang mengedepankan pemerataan kesejahteraan dan tanpa mengurangi daya dukung lingkungan hidup.	3. Pembangunan infrastruktur wilayah dan pelayanan dasar serta komunikasi dan informatika	1. Penguatan konektivitas dan jaringan logistik daerah yang mendukung sektor unggulan 2. Memperluas akses terhadap air minum dan sanitasi layak 3. Mengoptimalkan infrastruktur penunjang ketahanan pangan 4. Meningkatkan infrastruktur kominfo

No	RPJPD		RKPD 2022	
	Sasaran Pokok	**Arah Kebijakan**	**Prioritas Pembangunan Daerah**	**Arah kebijakan**
1	2	3	4	5
4.	Meningkatkan Daya Saing Sumberdaya Manusia	1. Pembangunan kesehatan diprioritaskan pada peningkatan fasilitas pelayanan, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan hak dasar masyarakat dengan standar pelayanan prima dan peningkatan kualitas, pemerataan pelayanan kesehatan, dan akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan. 2. Pembangunan pendidikan diprioritaskan pada peningkatan daya saing melalui: a. Mengembangkan sekolah yang memiliki keunggulan melalui pengembangan kualitas dan kurikulum pendidikan. b. Membudayakan gerakan peduli pendidikan melalui pengembangan lingkungan sosial yang mendukungprinsip “pendidikan sepanjang hayat dan pendidikan untuk semua”. c. Memantapkan Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun dengan memasuki tahap tuntas paripurna, yang disertai dengan peningkatan kualitas siswa, guru, dan sarana prasarana.	2. Peningkatan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya	1. Pemenuhan sarana prasarana pendidikan menengah dan Luar Biasa secara daring dan luring 2. Meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat 3. Meningkatkanpembangunan gender 4. Meningkatkan daya saing tenaga kerja

No	RPJPD		RKPD 2022	
	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan	Prioritas Pembangunan Daerah	Arah kebijakan
1	2	3	4	5
		d. Merintis Program Wajib Belajar lima belas tahun dengan memasuki tahap akselerasi dan pemantapan,melalui upaya peningkatan akses pelayanan pendidikan menengah di daerah- daerah terpencil, bantuan beasiswa bagi siswa yang berasal dari keluarga miskin dan peningkatan angka partisipasi pendidikan tinggi, melalui peningkatan bantuan beasiswa bagi lulusanSMA/SMK yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi. e. Pengembangan Lembaga PAUD bagi semua anak usia 0 –6 tahun pada lembaga PAUD serta meningkatnya kualitas penyelenggaranPAUD melalui pemantapan lembaga PAUD. f. Mengembangkan pendidikan menengah kejuruan melalui pengembangan sekolah kejuruan berbasis industri jasa berskala nasional,yangmemiliki keunggulan kompetitif. g. Membangun pendidikan tinggi melalui peningkatan kuantitas dan kualita simplementasi hasil penelitian dan pengembangan perguruan tinggi yang selaras dengan potensi dan keunggulan daerah.		

No	RPJPD		RKPD 2022	
	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan	Prioritas Pembangunan Daerah	Arah kebijakan
1	2	3	4	5
		h. Menyediakan fasilitas internet untuk *e-learning* untuk mendorong peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan pada tataran pendidikan tinggi. 3. Pembangunan kesehatan diprioritaskan pada upaya peningkatan kepedulian dan keaktifan masyarakat dalam menjaga kesehatan sanitasi lingkungan rumah tangga, kesehatan tempat pelayanan dan ruang publik, serta responsive terhadap penyakit. 4. Pembangunan ketenagakerjaan diprioritaskan pada pamantapan akses ketenagakerjaan terhadap peluang-peluang usaha yang semakin beragam dan modern, melalui peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Selanjutnya, pembudayaan pelaksanaan hubungan industrial ditujukan untuk menciptakan peningkatan produktivitas, kualitas, dan kesejahteraan pekerja. 5. Pembangunan pemuda diprioritaskan pada upaya mencapai kemandirian pemuda sehingga mampu mensejahterakan dirinya dan mampu berkontribusi secara nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan olahraga diprioritaskan untuk mempertahankan keunggulan olahraga di tingkat nasional dan internasional, serta mewujudkan olahraga sebagai bagian dari budaya masyarakat.		

No	RPJPD		RKPD 2022	
	Sasaran Pokok	**Arah Kebijakan**	**Prioritas Pembangunan Daerah**	**Arah kebijakan**
1	2	3	4	5
		6. Pembangunan kependudukan diprioritaskan pada upaya peningkatan kemandirian keluarga kecil yang sehat dan sejahtera, serta peningkatan kualitas layanan adinistrasi kependudukan melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.		
5.	Meningkatkan pengentasan kemiskinan, pemenuhan pangan dan perumahan serta peran perempuan	1. Pemberdayaan perempuan diprioritaskan terwujudnya kultur kesetaraan gender di masyarakat; kemandirian wanita untuk mengatasi persoalannya, mensejahterakan dirinya dan kemampuannya berperan nyata dalam lingkungan masyarakatnya. Selain itu, diprioritaskan pula upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak melalui pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.		
		2. Pembangunan sosial diprioritaskan pada pembentukan sikap dan budaya masyarakat yang memasuki tahapan masyarakat yang semakin responsif terhadap masalah kesejahteraan sosial di lingkungannya, tanggap dini terhadap setiap gejala yang mengganggu kesejahteraan masyarakat, mampu mengelola sumberdaya dan fasilitas.		

No	RPJPD		RKPD 2022	
	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan	Prioritas Pembangunan Daerah	Arah kebijakan
1	2	3	4	5
6.	Meningkatkan kesadaran dan harmonisasi kehidupan beragama dan berbudaya	1. Pembangunan keagamaan diprioritaskan pada upaya pemantapan Kerukunan Hidup Umat Beragama dengan mengoptimalkan fungsi dan peran Forum Kerukunan Umat Beragama sebagai wadah kerukunan hidup baik interumat beragama maupun antarumat beragama. Selain itu, pembangunan keagamaan diprioritaskan juga pada upaya untuk mewujudkan semakin mantapnya sikap hidup toleransi dan tenggang rasa yang harmonis sebagai modal dasar pembangunan serta upaya untuk memantapkan implementasi dan aktualisasi pemahaman dan pengamalan agama dalam berbagai aspek kehidupan, baik kehidupan bermasyarakat maupun bernegara.		
		2. Pembangunan kebudayaan diprioritaskan pada usaha mempertahankan keberlanjutan perkembangan budaya yang terjadi dalam masyarakat serta memberikan perlindungan dan pelestarian budaya. Serta upaya perlindungan dan pelestarian Kawasan Budaya dan Benda cagar Budaya yang berkelanjutan yang berbasis partisipasi masyarakat.		

No	RPJPD		RKPD 2022	
	Sasaran Pokok	**Arah Kebijakan**	**Prioritas Pembangunan Daerah**	**Arah kebijakan**
1	2	3	4	5
7.	pembangunan infrastruktur yang berkualitas	1. Pengembangan infrastruktur wilayah diprioritaskan untuk pemantapan kemampuan pengelolaan infrastruktur wilayah,dan peningkatan kualitas kemitraan antara pemerintah dengan swasta dan masyarakat melalui: a. Membangun infrastruktur wilayah strategis dengan membangun jalan dan jembatan yang berkualitas melalui terealisasinya pembangunan jalan dan jembatan Batanghari III. b. Pengembangan Pelabuhan Muara Sabak, Pelabuhan Kuala Tungkal, PelabuhanTalang Duku dan pembangunan Pelabuhan Samudera Ujung Jabung sudah terealisir. Sedangkan, infrastruktur transportasi udara, diprioritaskan pengembangan Bandar Udara Sulthan Taha Jambi menjadi Bandar Udara internasional dan pengembangan Bandar Udara Muaro Bungo dan Bandar Udara Depati Parbo menjadi Bandar Nasional yang berkualitas. c. Pembangunan sumberdaya air diprioritaskan pada upaya peningkatan konversasi sumberdaya airmelalui upaya peningkatan kesadaran lingkungan masyarakat untuk melestarikan hutan.	3. Pembangunan infrastruktur wilayah dan pelayanan dasar serta komunikasi dan informatika	1. Penguatan konektivitas dan jaringan logistik daerah yang mendukung sektor unggulan 2. Memperluas akses terhadap air minum dan sanitasi layak 3. Mengoptimalkan infrastruktur penunjang ketahanan pangan 4. Meningkatkan infrastruktur kominfo

No	RPJPD		RKPD 2022	
	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan	Prioritas Pembangunan Daerah	Arah kebijakan
1	2	3	4	5
		d. Pengembangan infrastruktur wilayah lainnya, diprioritaskan melalui pelaksanaan konsep Desa Punya Internet, pelaksanaan konsep Jambi Cyber Province, peningkatan ketersediaan air bersih,dan sanitasi lingkungan yang berkualitas. e. Pembangunan pusat logistik nasional untuk penanganan bencana wilayah Jambi Barat yang berpusat di Kota Muara Bungo.		
		Pembangunan energy diprioritaskan pada pemantapan desa mandiri energi, melalui efisiensi energi, konservasi dan hemat energi. Kemudian, pengembangan infrastruktur energi, melalui investasi swasta bagi pengembangan energi alternatif, pemenuhan kebutuhan energi bagi masyarakat perdesaan, dan peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan energi yang berkelanjutan.		

No	RPJPD		RKPD 2022	
	Sasaran Pokok	**Arah Kebijakan**	**Prioritas Pembangunan Daerah**	**Arah kebijakan**
1	2	3	4	5
8.	Meningkatkan pengembangan SDA khusus yang berwawasan lingkungan	1. Pembangunan sumberdaya alam dan lingkungan hidup diprioritaskan pada pemantapan daya dukung lingkungan, untukmelestarikan lingkungan, serta perbaikan mutu pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Kemantapan daya dukung lingkungan harus tetap terjaga secara konsisten bagi pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.Upaya untuk melestarikan kualitas dan fungsi lingkungan agar lebih asri dan lestari tetap dilanjutkan melalui peningkatan mutu pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta mendorong perilaku dan budaya ramah lingkungan di masyarakat.	4. Pengelolaan Sumberdaya Alam berkelanjutan, Lingkungan Hidup dan ketahanan bencana	1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup 2. Pencegahan dan pengendalian karhutlah 3. Pemenuhan sarana prasarana pendukung ketahanan bencana alam dan bencana non alam
9	Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan dan keterbukaan informasi publik	1. Peningkatan kualitas kelembagaan pemerintah diprioritaskan untuk menghasilkan kelembagaan pemerintah yang tanggap terhadap tantangan yang semakin beragam dan semakin kompleks dengan pelayanan publik yang prima dan berdaya guna.	5 Peningkatan tata kelola pemerintahan dan trantibum	1. Meningkatkan tata kelola layanan publik

No	RPJPD		RKPD 2022	
	Sasaran Pokok	**Arah Kebijakan**	**Prioritas Pembangunan Daerah**	**Arah kebijakan**
1	2	3	4	5
		2. Pembangunan aparatur pemerintah diprioritaskan pada penguatan aparatur dalam fasilitasi dan regulasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam interaksi antara pemerintah dengan masyarakat dan pelaku usaha, pemantapan birokrasi pemerintahan dan budaya organiasasi, penataan standarisasi kualitas pelayanan, peningkatan harmonisasi hubungan antar tingkat pemerintahan dan dengan pemangku kepentingan lainnya serta pemantapan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik yang bermutu dan akuntabel. Dalam pembangunan desa, upaya pemerintah diprioritaskan kepada pengembangan kelembagaan masyarakat desa agar mampu menemukenali dan menyelesaikan masalahnya secara mandiri, dan pembangunan sarana dan prasarana desa. 3. Pembangunan Keuangan Daerah diprioritaskan pada pemantapan peranan sektor swasta diharapkan semakin besar kontribusinya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Pembangunan Bidang Keuangan Daerah diprioritaskan pula pada penguatan kapasitas aparatur, sistem pengelolaan keuangan, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas publik.		2. Meningkatkan akuntabilitas 3. Meningkatkan kemampuan ASN

No	RPJPD		RKPD 2022	
	Sasaran Pokok	**Arah Kebijakan**	**Prioritas Pembangunan Daerah**	**Arah kebijakan**
1	2	3	4	5
10.	Meningkatnya kemandirian masyarakat, budaya politik yang demokratis	1. Pembangunan politik diprioritaskan pada konsolidasi demokrasi, penataan dan penguatan daerah otonom serta kerjasama antarpemangku kepentingan dalam mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik. Diprioritaskan pula terbentuknya kelembagaan sosial-politik yang mengedepankan kepentingan daerah sehingga melahirkan kondisi lingkungan sosial-politik yang kondusif dan mampu mendorong terciptanya pemerintahan daerah yang kuat, bersih dan berwibawa. 2. Pembangunan Hukum diprioritaskan pada perwujudan fungsi hukum dalam melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan supremasi hukum dalam setiap aspek kehidupan dan perlindungan hak asasi manusia, perwujudan dan harmonisasi produk hukum daerah yang memihak kepentingan masyarakat serta memantapkan budaya hukum.		4. Meningkatkan kamtibmas

No	RPJPD		RKPD 2022	
	Sasaran Pokok	**Arah Kebijakan**	**Prioritas Pembangunan Daerah**	**Arah kebijakan**
1	2	3	4	5
11.	Meningkatkan rasa aman dan tertib melalui peningkatan kualitas aparatur keamanan	1. Pembangunan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat diprioritaskan untuk memantapkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat agar mampu melindungi seluruh warga masyarakat dalam aktivitasnya sehari-hari serta penguatan tata kelola perlindungan masyarakat berlandaskan hak asasi manusia.		

Sasaran pembangunan nasional yang akan dicapai menjadi acuan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan pada tahun 2022, antara lain:

Tabel 4-2 Sasaran Ekonomi Makro Indonesia Tahun 2022 yang Menjadi Acuan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembangunan

Indikator	RKP 2022
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,4 – 6,0
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,5 – 6,2
Tingkat Kemiskinan (%)	8,5 – 9,0
Gini Ratio (indeks)	0,376 – 0,378
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,44 – 73,48

Sumber : Ranwal RKP Tahun 2022, Kementerian PPN/Bappenas, 2021

Sementara Sasaran Pembangunan Provinsi Jambi yang akan dicapai pada tahun 2022, antara lain :

Tabel 4-3 Sasaran Pembangunan Provinsi Jambi yang akan dicapai pada tahun 2022

Indikator	Skenario 2022
Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,30
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,11
Tingkat Kemiskinan (%)	7,10
Gini Ratio (indeks)	0,321
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,57

Sumber : Hasil Analisis Bappeda, 2021

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2022

Pada dasarnya tujuan Pembangunan adalah menempatkan masyarakat sebagai pusat pembangunan. Oleh karena itu antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah beserta *stakeholders* harus bersinergi dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan perencanaan pembangunan yang berkelanjutan. Pada tahun 2022, telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Provinsi Jambi, yang mengacu pada Prioritas Nasional serta selaras arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Provinsi Jambi, yaitu :

1. Pembangunan ekonomi;
2. Peningkatan sumberdaya manusia, sosial dan budaya;
3. Pembangunan infrastruktur wilayah dan pelayanan dasar serta komunikasi dan informasi;

4. Pengelolaan sumberdaya alam, lingkungan hidup serta ketahanan bencana;
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan serta ketenteraman dan ketertiban umum.

Sinergitas antara program Prioritas Pembangunan Nasional dan Daerah mutlak diperlukan untuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan. Pada tabel 4.4 di bawah ini dapat dilihat sinkronisasi antara Prioritas Pembangunan Nasional yang tercantum dalam RKP Tahun 2022 dengan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2022.

Tabel 4-4 Sinkronisasi antara Prioritas Pembangunan Nasional dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2022

Tema RKP Tahun 2022: "**Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural**"		**Tema RKPD Provinsi Jambi Tahun 2022**: **"Pemulihan Ekonomi dan Peningkatan Resiliensi**"	
Prioritas RKP Tahun 2022		**Prioritas RKPD Tahun 2022**	
Prioritas Pembangunan Nasional	**Arah Kebijakan**	**Prioritas Pembangunan Daerah**	**Arah Kebijakan**
1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan inovasi dan kualitas investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui: a) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan	1) Pembangunan ekonomi	1) Meningkatkan nilai tambah pertanian, perikanan dan kehutanan melalui peningkatan produktivitas, kualitas serta kelembagaan dan sarana prasarana 2) Peningkatan nilai tambah industri pengolahan 3) Meningkatkan investasi sektor riil padat karya

Tema RKP Tahun 2022: "**Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural**"		**Tema RKPD Provinsi Jambi Tahun 2022**: **"Pemulihan Ekonomi dan Peningkatan Resiliensi**"	
Prioritas RKP Tahun 2022		**Prioritas RKPD Tahun 2022**	
Prioritas Pembangunan Nasional	**Arah Kebijakan**	**Prioritas Pembangunan Daerah**	**Arah Kebijakan**
	b) Akselerasi peningkatan nilai tambah *agrofishery industry*, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.		
2) Mengembangkan wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui: a) Pengembangan sektor/ komoditas/ kegiatan unggulan daerah b) Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang	3) Pembangunan infrastruktur wilayah dan pelayanan dasar serta komunikasi dan informatika	1) Penguatan konektivitas dan jaringan logistik daerah yang mendukung sektor unggulan 2) Memperluas akses terhadap air minum dan sanitasi layak 3) Mengoptimalkan infrastruktur penunjang ketahanan pangan 4) Meningkatkan infrastruktur kominfo

Tema RKP Tahun 2022: "**Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural**"		**Tema RKPD Provinsi Jambi Tahun 2022**: **"Pemulihan Ekonomi dan Peningkatan Resiliensi**"	
Prioritas RKP Tahun 2022		**Prioritas RKPD Tahun 2022**	
Prioritas Pembangunan Nasional	**Arah Kebijakan**	**Prioritas Pembangunan Daerah**	**Arah Kebijakan**
	c) Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif d) Memperkuat kemampuan SDM dan IPTEK berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah, serta e) Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata		
3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui: a) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;	2) Peningkatan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya	1) Pemenuhan sarana prasarana pendidikan menengah dan Luar Biasa secara daring dan luring 2) Meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat 3) Meningkatkanpembangunan gender 4) Meningkatkan daya saing tenaga kerja

Tema RKP Tahun 2022: "**Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural**"		**Tema RKPD Provinsi Jambi Tahun 2022**: **"Pemulihan Ekonomi dan Peningkatan Resiliensi**"	
Prioritas RKP Tahun 2022		**Prioritas RKPD Tahun 2022**	
Prioritas Pembangunan Nasional	**Arah Kebijakan**	**Prioritas Pembangunan Daerah**	**Arah Kebijakan**
	b) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial; c) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta; d) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas e) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda; f) Pengentasan kemiskinan; dan g) Peningkatan produktivitas dan daya saing.		
4) Revolusi Mental dan Pembangunan kebudayaan	Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Revolusi mental dilaksanakan secara terpadu yang bertumpu pada:	2) Peningkatan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya	1) Pemenuhan sarana prasarana pendidikan menengah dan Luar Biasa secara daring dan luring 2) Meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat 3) Meningkatkanpembangunan gender

Tema RKP Tahun 2022: "**Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural**"		**Tema RKPD Provinsi Jambi Tahun 2022**: **"Pemulihan Ekonomi dan Peningkatan Resiliensi**"	
Prioritas RKP Tahun 2022		**Prioritas RKPD Tahun 2022**	
Prioritas Pembangunan Nasional	**Arah Kebijakan**	**Prioritas Pembangunan Daerah**	**Arah Kebijakan**
	a) Revolusi mental dalam sistem pendidikan b) Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan; dan c) Revolusi mental dalam sistem sosial. Selain itu revolusi mental juga diperkuat melalui upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan, memperkuat moderasi beragama; dan meningkatkan budaya literasi, inovasi dan kreativitas.	5) Peningkatan tata kelola pemerintahan dan Trantibum	4) Meningkatkan daya saing tenaga kerja 1) Meningkatkan tata kelola layanan publik 2) Meningkatkan akuntabilitas 3) Meningkatkan kemampuan ASN 4) Meningkatkan kamtibmas
5) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui: a) Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah;	3) Pembangunan infrastruktur wilayah dan pelayanan dasar serta komunikasi dan informatika	1) Penguatan konektivitas dan jaringan logistik daerah yang mendukung sektor unggulan 2) Memperluas akses terhadap air minum dan sanitasi layak 3) Mengoptimalkan infrastruktur penunjang ketahanan pangan

Tema RKP Tahun 2022: "**Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural**"		**Tema RKPD Provinsi Jambi Tahun 2022**: **"Pemulihan Ekonomi dan Peningkatan Resiliensi**"	
Prioritas RKP Tahun 2022		**Prioritas RKPD Tahun 2022**	
Prioritas Pembangunan Nasional	**Arah Kebijakan**	**Prioritas Pembangunan Daerah**	**Arah Kebijakan**
	b) Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan c) Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK d) Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; dan e) Mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.		4) Meningkatkan infrastruktur kominfo
6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan: a) Peningkatan kualitas lingkungan hidup b) Peningkatan ketahanan bencana dan iklim; serta c) Pembangunan rendah karbon	4) Pengelolaan Sumberdaya Alam berkelanjutan, Lingkungan Hidup dan ketahanan bencana	1) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup 2) Pencegahan dan pengendalian karhutlah 3) Pemenuhan sarana prasarana pendukung ketahanan bencana alam dan bencana non alam

Tema RKP Tahun 2022: "**Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural**"		**Tema RKPD Provinsi Jambi Tahun 2022**: **"Pemulihan Ekonomi dan Peningkatan Resiliensi**"	
Prioritas RKP Tahun 2022		**Prioritas RKPD Tahun 2022**	
Prioritas Pembangunan Nasional	**Arah Kebijakan**	**Prioritas Pembangunan Daerah**	**Arah Kebijakan**
7) Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan (Polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik	Negara wajib hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui: a) Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas; b) Meningkatkan hak-hak politik dan kebebasan sipil; c) Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber; d) Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; dan e) Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri.	5) Peningkatan tata kelola pemerintahan dan trantibum	1) Meningkatkan tata kelola layanan publik 2) Meningkatkan akuntabilitas 3) Meningkatkan kemampuan ASN 4) Meningkatkan kamtibmas

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Jambi, tentunya akan tetap memperhatikan keterkaitan prioritas nasional tahun 2022 serta sasaran pokok jangka panjang yang tertuang di dalam RPJPD Provinsi Jambi. Keterkaitan hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.5 s.d 4.9 di bawah ini.

Tabel 4-5 Keterkaitan Prioritas Nasional dengan Prioritas I Provinsi Jambi Tahun 2022

NO	PRIORITAS DAERAH/ ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2022	INDIKATOR PEMBANGUNAN DAERAH	TARGET CAPAIAN TAHUN 2022	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN
1.	Pembangunan Ekonomi, dengan arah kebijakan : 1) Meningkatkan nilai tambah pertanian, perikanan tangkap dan kehutanan melalui peningkatan produktivitas, kualitas serta kelembagaan dan sarana prasarana 2) Peningkatan nilai tambah industri pengolahan 3) Meningkatkan investasi sektor riil padat karya	PN 1 : Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	• Pengelolaan ruang laut oleh masyarakat pesisir maupun pengusaha sesuai PERDA RZWP3K • Produksi perikanan budidaya • produksi perikanan tangkap • konsumsi ikan perkapita • Persentase penyelesaian perizinan usaha simpan pinjam • Persentase peningkatan koperasi aktif • Persentase usaha kecil menjadi wirausaha • Persentase SDM aparatur, pelaku usaha koperasi dan UKM yang mendapatkan pelatihan setiap tahun	• 2 izin • 57.168 ton • 54.480,9 ton • 40,60 kg/kapita/tahun • 100% • 60% • 3,38% • 5%	• Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau kecil • Program pengelolaan perikanan budidaya • Program pengelolaan perikanan tangkap • Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan • Program pelayanan izin usaha simpan pinjam • Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi • Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro (UMKM) • Program pendidikan dan latihan perkoperasian • Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi • Program pengembangan UMKM • Program Penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi • Program penanganan kerawanan pangan

NO	PRIORITAS DAERAH/ ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2022	INDIKATOR PEMBANGUNAN DAERAH	TARGET CAPAIAN TAHUN 2022	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN
			• Persentase koperasi berkinerja baik • Persentase UMKM yang dipromosikan • Persentase koperasi sehat/ cukup sehat • Persentase penurunan kerawanan pangan • Persentase peningkatan keamanan pangan • Persentase peningkatan pemanfaatan sumberdaya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan masyarakat • Persentase peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat • Persentase peningkatan pemasaran pariwisata • Persentase peningkatan kualitas dan nilai tambah sektor ekonomi kreatif	• 40% • 36% • 43% • 0% • 0% • 100% • 0% • 17% • 16%	• Program pengawasan keamanan pangan • Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan • Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat • Program pemasaran pariwisata • Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual • Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif • Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata • Program penyelenggaraan penataan ruang • Program pelayanan penanaman modal • Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal • Program pengembangan iklim penanaman modal

NO	PRIORITAS DAERAH/ ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2022	INDIKATOR PEMBANGUNAN DAERAH	TARGET CAPAIAN TAHUN 2022	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN
			• Persentase peningkatan kualitas SDm ekraf • Persentase peningkatan kualitas destinasi dan industri pariwisata • Persentase penyelenggaraan penataan ruang • Indeks kepuasan masyarakat • Digitalisasi data pengelolaan dan informasi penanaman modal • Akurasi data potensi investasi dan rencana umum penanaman modal serta pembinaan • Persentase pelaku usaha yang sesuai ketentuan perundang-undangan • Persentase peningkatan rencana investasi • Persentase peningkatan nilai ekspor	• 16% • 15% • 100% • A • 100% • 100% • 3% • 1% • 10%	• Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal • Program promosi penanaman modal • Program pengembangan ekspor • Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri • Program peningkatan sarana distribusi perdagangan • Program perizinan dan pendaftaran perusahaan • Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting • Program standardisasi dan perlindungan konsumen • Program pengelolaan pelayaran • Program pengelolaan perkeretaapian • Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) • Program pengelolaan sistem industri nasional • Program pengendalian izin usaha industri

NO	PRIORITAS DAERAH/ ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2022	INDIKATOR PEMBANGUNAN DAERAH	TARGET CAPAIAN TAHUN 2022	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN
			• Persentase peningkatan unit usaha perdagangan dalam negeri • Persentase peningkatan sarana perdagangan (pasar rakyat dan toko modern) • Persentase penyelesaian perizinan dan pendaftaran tepat waktu • Persentase perizinan yang sesuai dengan peruntukannya • Persentase peningkatan unit usaha perdagangan dalam negeri • IKM pelayanan pengujian dan sertifikasi mutu barang • Nilai indeks keberdayaan konsumen • Persentase peningkatan jasa pengujian dan kalibrasi	• 3% • 8% • 100% • 100% • 0% • A • 32 • 10% •	• Program perencanaan dan pembangunan industri • Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian • Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner • Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian • Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian • Program penyuluhan pertanian • Program perizinan usaha pertanian • Program pembangunan kawasan transmigrasi • Program pengembangan kawasan transmigrasi • Program perencanaan kawasan transmigrasi

NO	PRIORITAS DAERAH/ ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2022	INDIKATOR PEMBANGUNAN DAERAH	TARGET CAPAIAN TAHUN 2022	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN
			• Persentase produk barang berSNI wajib dan barang strategis yang diawasi • Persentase pengelolaan pelayaran • Persentase pengelolaan perkeretaapian • Persentase penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan • Persentase data dan informasi industri yang dapat diakses publik • Persentase izin usaha industri yang diselesaikan tepat waktu • Persentase pengembangan jumlah unit industri • Persentase peningkatan unit usaha industri agro dan kimia (industri besar) • Persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	• 0% • 15% • 60% • • 70% • 5% • 100% • 1% • 1% • 100%	

NO	PRIORITAS DAERAH/ ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2022	INDIKATOR PEMBANGUNAN DAERAH	TARGET CAPAIAN TAHUN 2022	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN
			• Persentase keterjaminan keamanan pangan komoditas peternakan strategis	• 100%	
			• Persentase ketersediaan prasarana pertanian yang sesuai peruntukan di kab/kota	• 100%	
			• Persentase ketersediaan sarana pertanian yang sesuai peruntukan di kab/kota	• 100%	
			• Persentase sumberdaya manusia dan kelembagaan pertanian berkualitas	• 100%	
			• Persentase kegiatan usaha pertanian yang berdaya saing	• 100%	
			• Persentase ketersediaan permukiman transmigrasi yang berkualitas	• 8%	
			• Persentase permukiman dan kawasan serta masyarakat transmigrasi yang sejahtera	• 55%	

NO	PRIORITAS DAERAH/ ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2022	INDIKATOR PEMBANGUNAN DAERAH	TARGET CAPAIAN TAHUN 2022	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN
			• Peningkatan penempatan transmigrasi sesuai calon lokasi penempatan	• 8%	

Tabel 4-6 Keterkaitan Prioritas Nasional dengan Prioritas II Provinsi Jambi Tahun 2022

No	PRIORITAS DAERAH/ ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2022	INDIKATOR PEMBANGUNAN DAERAH	TARGET CAPAIAN TAHUN 2022	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN
2.	Peningkatan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya, dengan arah kebijakan : 1) Pemenuhan sarana prasarana pendidikan menengah dan Luar Biasa secara daring dan luring 2) Meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat 3) Meningkatkanpembangunan gender 4) Meningkatkan daya saing tenaga kerja	1. PN 3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing 2. PN 4: Revolusi Mental dan Pembangunan kebudayaan	• Peringkat POPNAS dan PEPARNAS • Persentase peningkatan penumbuhan kewirausahaan pemuda • Persentase peningkatan peran serta kepemudaan • Persentase kegiatan kepramukaan yang terfasilitasi • Persentase kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan gerakan masyarakat hidup sehat • Jumlah kepesertaan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Jambi • Jumlah kasus kematian bayi • kasus kematian ibu • Persentase parameter pelayanan laboratorium terakreditasi (Labkes)	• Peringkat 8 • 35,71% • 45,62% • 100% • 36,36% • 79764 jiwa • 300 kasus • 80 kasus • 100%	• Program pengembangan daya saing keolahragaan • Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan • Program pengembangan kapasitas kepramukaan • Program pemberdayaan bidang kesehatan • Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat • Program pemenuhan hak anak (PHA) • Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan • Program pengelolaan sistem data gender dan anak • Program peningkatan kualitas keluarga • Program perlindungan khusus anak • Program perlindungan Anak • Program pendidik dan tenaga kependidikan

No	PRIORITAS DAERAH/ ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2022	INDIKATOR PEMBANGUNAN DAERAH	TARGET CAPAIAN TAHUN 2022	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN
			• Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan masyarakat • Persentase pemenuhan uapay kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat yang terpenuhi • Prevalensi stunting • Prevalensi wasting • Persentase kabupaten/kota layak anak • Indeks Pembangunan Gender (IPG) • Indeks pemberdayaan gender (IDG) • Persentase Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak • Persentase kesetaraan dan keadilan gender • Persentase kekerasan terhadap anak • Persentase kekerasan terhadap perempuan	• 100% • 98% • 26 • 19 • 54,54% • 91,50% • 70% • 100% • 0,85% • 62,5% • 16%	• Program pengelolaan pendidikan • Program pengembangan bahasa dan sastra • Program pengembangan kurikulum • Program pengendalian perizinan pendidikan • Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS) • Program pembinaan Keluarga Berencana (KB) • Program Pengendalian Penduduk • Program Pembinaan Perpustakaan • Program pemberdayaan sosial • Program penanganan warga negara migran korban kekerasan • Program perlindungan dan jaminan sosial • Program rehabilitasi sosial • Program hubungan industrial • Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja

No	PRIORITAS DAERAH/ ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2022	INDIKATOR PEMBANGUNAN DAERAH	TARGET CAPAIAN TAHUN 2022	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN
			• Persentase SLB yang memenuhi standar jumlah dan kaulitas pendidik dan tenaga pendidik • Persentase SMA yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan • Persentase SMK yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan • APK SMA/SMK/SLB • APM SMA/SMK • Peserta lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan • Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (literasi) memenuhi kompetensi minimum • Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (numerasi) memenuhi kompetensi minimum	• 10% • 9,93% • 9,93% • 75,64% • 60,90% • 41% • 52% • 22%	• Program penempatan tenaga kerja • Program pengawasan ketenagakerjaan • Program perencanaan tenaga kerja • Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya • Program pembinaan sejarah • Program pengelolaan permuseuman • Program pengembangan kebudayaan • Program Pengembangan kesenian tradisional

No	PRIORITAS DAERAH/ ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2022	INDIKATOR PEMBANGUNAN DAERAH	TARGET CAPAIAN TAHUN 2022	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN
			• Persentase siswa SMA yang melanjutkan Perguruan Tinggi akreditasi B	• 37,5%	
			• Persentase sekolah yang mengajarkan bahasa daerah	• 20%	
			• Persentase sekolah yang mengutamakan Bahasa Indonesia di satuan pendidikan	• 60%	
			• Sekolah menerapkan kurikulum muatan lokal	• 388 sekolah	
			• Persentase satuan pendidikan yang memperoleh izin operasional	• 100%	
			• Persentase peningkatan dan pemberdayaan keluarga sejahtera	• 51,11%	
			• Persentase penggunaan alat kontrasepsi keluarga berencana	• 64,64%	
			• Laju pertumbuhan penduduk	• 1,72%	
			• Nilai SKM Perpustakaan	• 84,8%	

No	PRIORITAS DAERAH/ ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2022	INDIKATOR PEMBANGUNAN DAERAH	TARGET CAPAIAN TAHUN 2022	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN
			• Persentase peningkatan kualitas pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraan program kessos • Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang difasilitasi • Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial • Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang mendapatkan rehabilitasi sosial • Penurunan pelanggaran norma-norma tenaga kerja • Persentase peningkatan tenaga kerja yang dilatih dan bersertifikat	• 5% • 25% • 2,5% • 0,5% • 76% • 5,1%	

No	PRIORITAS DAERAH/ ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2022	INDIKATOR PEMBANGUNAN DAERAH	TARGET CAPAIAN TAHUN 2022	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN
			• Persentase peningkatan tenaga kerja terdaftar yang ditempatkan	• 30%	
			• Persentase layanan RTKD	• 100%	
			• Persentase peningkatan pelestarian pengelolaan dan pengembangan cagar budaya	• 18%	
			• Persentase peningkatan pelestarian sejarah lokal provinsi	• 20%	
			• Persentase peningkatan kunjungan ke museum	• 16%	
			• Persentase peningkatan pengelolaan, pelestarian dan pemanfaatan kebudayaan	• 17,18%	
			• Persentase peningkatan pengelolaan, pelestarian dan pemanfaatan kesenian tradisional	• 10%	

Tabel 4-7 Keterkaitan Prioritas Nasional dengan Prioritas III Provinsi Jambi Tahun 2022

No	PRIORITAS DAERAH/ ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2022	INDIKATOR PEMBANGUNAN DAERAH	TARGET CAPAIAN TAHUN 2022	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN
3.	Pembangunan infrastruktur wilayah dan pelayanan dasar serta komunikasi dan informatika, dengan arah kebijakan : 1) Penguatan konektivitas dan jaringan logistik daerah yang mendukung sektor unggulan 2) Memperluas akses terhadap air minum dan sanitasi layak 3) Mengoptimalkan infrastruktur penunjang ketahanan pangan 4) Meningkatkan infrastruktur kominfo	PN 2 : Mengembangkan wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan PN 5 : Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	• Pelaksanaan perizinan sektor energi terbarukan kewenangan provinsi • Penurunan penggunaan energi tak terbarukan • Persentase rumah tangga berlistrik yang berkeselamatan • Persentase perangkat daerah yang dapat menggunakan sistem aplikasi dan terkoneksi ke jaringan internet pemerintah • Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur pada tahun berkenaan • Persentase pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah • Proporsi Rumah Tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	• 100% • 100% • 100% • 70% • 60% • 40% • 60%	• Program Pengelolaan Energi terbarukan • Program pengelolaan ketenagalistrikan • Program pengelolaan aplikasi informatika • Program penataan gedung • Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah • Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum • Program pengelolaan sumber daya air (SDA) • Program pengembangan jasa konstruksi • Program pengembangan permukiman • Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional • Program penyelenggaraan jalan

No	PRIORITAS DAERAH/ ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2022	INDIKATOR PEMBANGUNAN DAERAH	TARGET CAPAIAN TAHUN 2022	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN
			• Persentase tercapainya kualitas pengelolaan SDA terpadu pada tahun berkenaan • Persentase angkatan kerja bidang konstruksi yang disertifikasi profesi • Persentase pengembangan permukiman • Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak • Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	• 60% • 6% • 55% • 55% • 70	

Tabel 4-8 Keterkaitan Prioritas Nasional dengan Prioritas IV Provinsi Jambi Tahun 2022

NO	PRIORITAS DAERAH/ ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2022	INDIKATOR PEMBANGUNAN DAERAH	TARGET CAPAIAN TAHUN 2022	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN
4.	Pengelolaan Sumberdaya Alam berkelanjutan, Lingkungan Hidup dan ketahanan bencana, dengan arah kebijakan: 1) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup 2) Pencegahan dan pengendalian karhutlah 3) Pemenuhan sarana prasarana pendukung ketahanan bencana alam dan bencana non alam	PN 6 : Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	• Persentase usaha pertambangan yang menerapkan pertambangan yang baik dan benar (*good mining practice)* • Persentase pemulihan dan perlindungan SDA hayati dan ekosistemnya • Persentase peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan secara optimal dan lestari • Persentase DAS kritis diluar kawasan yang direhabilitasi bersama masyarakat • Persentase pengelolaan hutan secara efisien dan lestari • Persentase unit usaha perikanan yang taat terhadap peraturan perundang-undangan • Persentase fasilitas kesehatan dengan tenaga kesehatan sesuai standar • Persentase fasilitas kesehatan dengan tenaga kesehatan sesuai standar (BAPELKES)	• 80% • 11% • 10% • 7% • 45% • 60% • 30% • 30%	• Program Pengelolaan Mineral dan Batubara • Program konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya • Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan • Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) • Program Pengelolaan Hutan • Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan • Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan • Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman • Program penanggulangan bencana • Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran

NO	PRIORITAS DAERAH/ ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2022	INDIKATOR PEMBANGUNAN DAERAH	TARGET CAPAIAN TAHUN 2022	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN
			• Persentase kabupaten/kota dengan ketersediaan obat esensial • Jumlah penurunan indeks resiko bencana • Pemenuhan tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran • Jumlah usaha/ kegiatan yang taat terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup • Persentase pengelolaan pengaduan kasus lingkungan hidup dan penerapan sanksi administratif • Persentase peningkatan pengakuan MHA dan kearifan lokal di Provinsi Jambi • Persentase Penyelesaian penyusunan rencana pengelolaan keanekaragaman hayati Provinsi Jambi • Persentase penanganan pengurangan timbulan sampah di Provinsi Jambi	• 100% • 0 • 100% • 25 Perusahaan • 100% • 100% • 100% • 26%	• Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) • Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup • Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH • Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) • Program Pengelolaan Persampahan • Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan limbah Bahan Berbahaya dan beracun (Limbah B3) • Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup • Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat

NO	PRIORITAS DAERAH/ ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2022	INDIKATOR PEMBANGUNAN DAERAH	TARGET CAPAIAN TAHUN 2022	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN
			• Tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap penanganan pengelolaan B3 dan limbah B3 • kualitas air dan udara (IKLH) • Persentase peningkatan pemberian penghargaan LH untuk masyarakat • Persentase peningkatan SDm (komunitas/masyarakat) tentang lingkungan hidup • Peningkatan kualitas perencanaan lingkungan hidup sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan • Persentase pemenuhan kebutuhan korban bencana sesuai SPM	• 80% • 64,09 • 100% • 50% • 100% • 31,70%	• Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat • Program perencanaan lingkungan hidup • Program penanganan bencana

Tabel 4-9 Keterkaitan Prioritas Nasional dengan Prioritas V Provinsi Jambi Tahun 2022

NO	PRIORITAS DAERAH/ ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2022	INDIKATOR PEMBANGUNAN DAERAH	TARGET CAPAIAN TAHUN 2022	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN
5.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan trantibum, dengan arah kebijakan : 1) Meningkatkan tata kelola layanan publik 2) Meningkatkan akuntabilitas 3) Meningkatkan kemampuan ASN 4) Meningkatkan kamtibmas	PN 4: Revolusi Mental dan Pembangunan kebudayaan PN 7 : Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan (Polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik	• Persentase laporan keuangan SKPD sesuai SAP • Persentase penilaian SKPD yang berpredikat "tertib" • Indeks Penerapan Sistem Merit ASN • Indeks Profesionalitas ASN • Persentase pengamanan barang milik daerah • Opini BPK • Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah • Indeks Kepuasan Masyarakat • Nilai SAKIP • Persentase kelulusan peserta sertifikasi/uji kompetensi dan peserta pengembangan kompetensi • Persentase penyelenggaraan pengembangan SDM aparatur	• 67% • 80% • 250 • 70 • 79,50% • WTP • 5,25% • 77,90 • B • 72% • 93%	• Program penyelenggaraan pengawasan • Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi • Program kepegawaian daerah • Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan • Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya • Program Pengelolaan barang Milik Daerah • Program Pengelolaan Keuangan Daerah • Program Pengelolaan Pendapatan Daerah • Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi • Program pengembangan Sumber Daya Manusia • Program penelitian dan pengembangan daerah

NO	PRIORITAS DAERAH/ ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2022	INDIKATOR PEMBANGUNAN DAERAH	TARGET CAPAIAN TAHUN 2022	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN
			• Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan perangkat daerah atau pihak lainnya • Persentase pelayanan penghubung yang optimal • Persentase kesesuaian pencapaian sasaran RPJMD dengan realisasi tahunan pembangunan sektor ekonomi dan SDA • Persentase kesesuaian pencapaian sasaran RPJMD dengan realisasi tahunan pembangunan sektor infrastruktur dan kewilayahan • Persentase kesesuaian pencapaian sasaran RPJMD dengan realisasi tahunan pembangunan sektor pemerintahan dan pembangunan manusia • Konsistensi program RPJMD kedalam RKPD • Konsistensi program RKPD dalam APBD	• 50% • 100% • 98% • 95% • 96% • 98% • 95%	• Program pelayanan penghubung • Program koordinasi dan sikronisasi perencanaan pembangunan daerah • Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah • Program fasilitasi dan koordinasi hukum • Program kebijakan administrasi pembangunan • Program kebijakan dan pelayanan pengadaan barang dan jasa • Program kesejahteraan rakyat • Program pemerintahan dan otonomi daerah • Program penataan organisasi • Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD • Program Pencatatan sipil • Program pendaftaran penduduk

NO	PRIORITAS DAERAH/ ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2022	INDIKATOR PEMBANGUNAN DAERAH	TARGET CAPAIAN TAHUN 2022	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN
			• Persentase penyelesaian produk hukum daerah • Persentase bahan rumusan kebijakan administrasi pembangunan yang dilaksanakan • Persentase rumusan kebijakan dan pelayanan pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan • Persentase rekomendasi kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan • Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) • Skor PMPRB • Persentase penyelesaian tugas dan fungsi DPRD • Persentase pemenuhan pelayanan pendaftaran penduduk • Persentase pengelolaan administrasi kependudukan	• 100% • 100% • 100% • 100% • >2600 • 63,5 • 100% • 99% • 80%	• Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan • Program pengelolaan arsip • Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum • Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik • Program administrasi pemerintahan desa • Program Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat • Program penataan desa • Program peningkatan kerjasama desa • Program Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi • Program pengelolaan taman makam pahlawan • Program penyelenggaraan statistik sektoral

NO	PRIORITAS DAERAH/ ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2022	INDIKATOR PEMBANGUNAN DAERAH	TARGET CAPAIAN TAHUN 2022	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN
			• Persentase pengeluaran profil kependudukan	• 100%	
			• Nilai Pengawasan kearsipan	• 65%	
			• Cakupan petugas satlinmas	• 17150 org	
			• Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	• 100%	
			• Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	• 100%	
			• Peningkatan kualitas komunikasi publik melalui pengelolaan opini/aspirasi publik, penguatan kapasitas sumberdaya dan kemitraan komunikasi publik	• 75%	
			• Persentase fasilitas pengelola administrasi pemerintahan desa	• 100%	
			• Persentase pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa dan masyarakat hukum adat	• 100%	
			• Persentase fasilitasi penataan desa	• 100%	

NO	PRIORITAS DAERAH/ ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2022	INDIKATOR PEMBANGUNAN DAERAH	TARGET CAPAIAN TAHUN 2022	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN
			• Persentase peningkatan pelaksanaan kerjasama desa • Indeks kematangan keamanan informasi • Persentase perwujudan nilai-nilai kepahlawanan • Ketersediaan data statistik sektoral Provinsi Jambi	• 50% • Level 3 • 50% • 50%	

4.3 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Bidang Urusan

Untuk menjamin sinergisitas program pembangunan nasional dan daerah, penyusunan RKPD Tahun 2022 didasari pada arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional yang tertuang dalam kebijakan pembangunan bidang urusan sebagai berikut :

Tabel 4-10 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Bidang Urusan Tahun 2022

NO	KINERJA URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	TARGET PUSAT	TARGET DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. URUSAN PENDIDIKAN				
1	Tercapainya penerapan kebijakan merdeka belajar di daerah	Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum	47,24%	59,20%
		Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum	25,56%	28,30%
2	Terpenuhinya kebutuhan dasar SPM bidang pendidikan	Jumlah sekolah lanjutan tingkat atas/ SLTA negeri terakreditasi	99,07%	99,63%
		Jumlah satuan pendidikan khusus yang terakreditasi	98,17%	100%
		Tingkat Partisipasi warga negara usia 16-18 tahun dalam pendidikan menengah	100%	100%
		Tingkat Partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas dalam pendidikan khusus	100%	100%
3	Terwujudnya lulusan SMK yang berkualitas dan berdaya saing	Jumlah SMK yang terevitalisasi	900 unit	50 unit
2. URUSAN KESEHATAN				
1	meningkatnya kualitas tata kelola Rumah Sakit Rujukan	Persentase Rumah Sakit Rujukan Provinsi yang terakreditasi	90%	100%
2	Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	100%	100%
		Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi Kejadian Luar Biasa (KLB)	100%	100%

NO	KINERJA URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	TARGET PUSAT	TARGET DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup	205/100.000	45 jumlah kematian
		penurunan jumlah kematian ibu (AKI) per tahun	15%	27,625
		Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	91%	91%
		Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	18,40%	16%
		Prevalensi wasting (kurus dan sangta kurus) pada balita (persen)	7,5	19
		Insidensi Tuberkulosis per 100.000 penduduk	90%	44%
		Insidensi HIV per 1.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV	0,19	-
		Temuan menggunakan indikator SPM 100% (terduga TB)	90%	100%
		Treatment coverage pada pasien TB	90%	100%
		Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 12-23 bulan	71%	90%
		Persentase kabupaten/ kota dengan puskesmas yang 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	59%	59%
		Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	365 kab/kota	9 kab/kota
		Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun	8,90%	8,90%
		Jumlah kabupaten/ kota dengan ≥40% FKTP yang menyelenggarakan layanan upaya berhenti merokok (UBM)	40%	40%
		Jumlah kabupaten/kota yang menerapkan kawasan tanpa rokok	90%	100%
		Jumlah Griya Sehat di Kab/ Kota	60 kab/kota	-
4	meningkatnya efektivitas dan cakupan pengawasan perizinan berusaha pedagang besar farmasi (PBF) cabang dan usaha kecil obat tradisional (UKOT)	Persentase pedagang besar farmasi (PBF) yang memenuhi ketentuan perizinan	80%	100%

NO	KINERJA URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	TARGET PUSAT	TARGET DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Persentase usaha kecil obat tradisional (UKOT) yang memenuhi ketentuan perizinan	90%	100%
		Jumlah kabupaten/ kota yang melaksanakan pengawasan perizinan sarana pelayanan kefarmasian (apotek dan toko obat) dab usaha mikro obat tradisional sesuai standar	49%	100%
5	meningkatnya kualitas tata kelola Rumah Sakit Rujukan	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	1:1000 rasio penduduk	1,42:1000 rasio penduduk
3. URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
1	Terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur sumber daya air	Persentase luas sawah beririgasi	76,89%	78%
		Luas jaringan irigasi permukaan kewenangan daerah yang dibangun	34.125 Ha	-
		Luas jaringan daerah irigasi permukaan kewenangan daerah yang direhabilitasi	143.826,2 Ha	10.351 Ha
		Panjang infrastruktur pengendali banjir wilayah sungai kewenangan daerah yang dibangun	25 Km	-
2	Tersedianya akses masyarakat terhadap air minum dan sanitasi yang layak dan aman	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak	95,90%	90,41%
		persentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan	27,10%	24,56% (238.000 SR)
		Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum aman	10%	9,09%
		Persentase PDAM dengan kinerja sehat	83,60%	90%
		persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	82,07%	76%

NO	KINERJA URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	TARGET PUSAT	TARGET DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Persentase angka BABS di tempat terbuka	2,98%	8,00%
		persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik di perkotaan	75,28% penanganan; 9,13% pengurangan	-
3	Terwujudnya konektivitas jalan	persentase kondisi mantap jalan provinsi	72%/62%	76,8%
4	Terpenuhinya penyelesaian rencana tata ruang dan rencana detail tata ruang	Penyelesaian materi teknis dari bantuan teknis RDTR	394	6
		Pelaksanaan dan pendampingan persetujuan substansi teknis RTR	1122	3
		Penyelesaian materi teknis dari bimbingan teknis RTRW	125	3
		Penyelesaian materi teknis dari bimbingan teknis RDTR	1153	6
5	Terciptanya pengendalian pemanfaatan ruang di DAS pada wilayah sungai	Jumlah objek penyusunan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan sekitar Situ, Danau, Embung, Waduk (SDEW) (DAS di luar kawasan hutan)	2 DAS	-
		Pelaksanaan fasilitasi penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang di kawasan sekitar SDEW (DAS di luar kawasan hutan)	2 DAS	-
4. URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
1	Terpenuhinya pelayanan dasar bidang perumahan rakyat	persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	100%
		persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	100%
2	Meningkatnya luasan kawasan kumuh yang ditangani	luas kawasan permukiman kumuh 10-15 Ha yang ditangani	5779 Ha	-
3	meningkatnya penyediaan FSU perumahan dan kawasan permukiman	Persentase permukiman yang sudah dilengkapi	100%	45%

NO	KINERJA URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	TARGET PUSAT	TARGET DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5. URUSAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
1	Meningkatnya pelayanan trantibum yang sesuai standar	persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	100%	100%
		persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	75%	100%
2	meningkatnya pelayanan pemadam kebakaran yang sesuai standar	Persentase pendampingan pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran	100%	100%
		Persentase pendampingan pembentukan relawan pemadam kebakaran di desa/ kelurahan	50%	100%
		Pembentukan pendampingan pembentukan pos pemadam kebakaran di kecamatan	50%	100%
3	Meningkatnya manajemen bencana yang terintegrasi pada fase pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana	Persentase penanganan pra bencana	100%	100%
		Persentase pendampingan penanganan tanggap darurat bencana	100%	100%
		Persentase pendampingan penanganan pasca bencana	100%	8%
		Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/ legal	100%	80%
6. URUSAN SOSIAL				
1	Tersedianya data fakir miskin	Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	60%	100%
		Peningkatan kapasitas bagi pekerja sosial masyarakat (PSM)	3000 orang	750 orang
		peningkatan kapasitas bagi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK)	7230 orang	170 orang
		Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	100%	100%

NO	KINERJA URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	TARGET PUSAT	TARGET DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial	Penguatan Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	150 badan	5 badan
		bantuan Sosial Ekonomi Produktif bagi fakir miskin	7000 KPM	110 KPM
		keluarga yang mendapat bantuan sosial bersyarat	10.000.000 KPM	
		Peningkatan kapasitas pendamping PKH	150 orang	
		Peningkatan kualitas pelayanan lembaga di bidang kesos	4000 lembaga	5 lembaga
		Peningkatan kompetensi dan profesionalisme SDM kesos	18.000 orang	270 orang
3	terpenuhinya kebutuhan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial	Jumlah Korban Bencana alam yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar	350.000 jiwa	655 jiwa
		Jumlah warga masyarakat rawan bencana alam yang mendapatkan kesiapsiagaan dan mitigasi	250.000 jiwa	9000 jiwa
		jumlah kelompok masyarakat di lokasi rawan bencana yang mendapatkan pencegahan konflik sosial	375	10
		jumlah korban bencana sosial yang mendapatkan bantuan perlindungan sosial	120.000 orang	800 orang
		Jumlah tenaga pelopor perdamaian yang siap ditugaskan	1.200 orang	25 orang
		persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	3,60%	1,80%
		Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	24%	24%
		persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	0,53%	0,36%

NO	KINERJA URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	TARGET PUSAT	TARGET DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	20,51%	15,60%
7. URUSAN TENAGA KERJA				
1	meningkatnya harmonisasi hubungan industrial dan kualitas jaminan sosial tenaga kerja	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS, bipartit, Struktur skala upah, dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan)	19-20%	30%
2	Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang ditempatkan dan diberdayakan	jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri	17.800 orang	5000 orang
3	meningkatnya kompetensi dan daya saing tenaga kerja	Jumlah pekerja yang meningkat produktivitasnya	1.189.550 orang	985 orang
		Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan pemagangan dalam negeri	12.000 orang	64 orang
4	meningkatnya kualitas perlindungan tenaga kerja dan pengusaha yang menerapkan norma ketenagakerjaan dan keselamatan dan kesehatan kerja	Persentase perusahaan yang diawasi dari jumlah perusahaan dalam WLKP online	60%	62%
8. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
1	Meningkatnya kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	meningkat 25% dari kondisi 2020	75%
		Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	85%	100%
		Indeks Pemberdayaan Gender	meningkat minimal 2 poin dari kondisi 2020	69,75
2	Meningkatnya pemenuhan hak dan perlindungan anak	Indeks perlindungan anak (IPA)	meningkat minimal 3% dari kondisi 2020	66,26
		Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	70%	50%
9. URUSAN PANGAN				

NO	KINERJA URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	TARGET PUSAT	TARGET DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri	Persentase cadangan pangan masyarakat	10%	10%
		persentase daerah rentan rawan pangan	14%	7,50%
		Skor PPH	92,80%	88,5%
2	Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional	persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	85%	85%
10. URUSAN PERTANAHAN				
1	terpenuhinya nventarisasi subyek dan obyek redistribusi tanah	jumlah kepala keluarga penerima akses reforma agraria	129.523 KK	1.775 KK
		Jumlah bidang tanah yang diredistribusi	423.421 bidang	4.650 bidang
2	Tersedianya tanah untuk kepentingan umum	realisasi luas tanah yang disediakan bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan kepentingan lainnya	42.422 Ha	108,34 Ha
11. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP				
1	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	69,22 poin	72,07 poin
2	meningkatnya penanggung jawab usaha yang taat terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan izin PUU LH yang diterbitkan	ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan	1700 lembaga	70 %
12. URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
1	Meningkatnya kualitas pelayanan adminduk	Penyajian data kependudukan skala provinsi dalam 1 tahun	100%	100%
		Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun	97%	97%
		Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	100%	100%
		Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	100%	100%
		Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraiannya dilaporkan	100%	100%
		Pemanfaatan data kependudukan	80%	80%

NO	KINERJA URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	TARGET PUSAT	TARGET DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
13. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA				
1	meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang efektif dan efisien	Jumlah aparatur/pengurus kelembagaan yang memiliki kompetensi dalam tatakelola pemdes	13.494 orang	90%
		Jumlah kelembagaan desa yang telah ditata sesuai standar	2500 lembaga	90%
		Jumlah sistem pelayanan administrasi kelembagaan desa yang ditata sesuai standar	2500 sistem pelayanan	90%
2	berkembangnya status pembangunan desa	Jumlah desa mandiri	3944 desa	115 desa
		Jumlah desa berkembang	56791 desa	1240 desa
		Jumlah desa tertinggal	14402 desa	57 desa
3	terevitalisasinya Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) berkembang	7500 Bumdes	100 Bumdes
14. URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				
1	Meningkatnya indeks pembangunan keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (Bangga)	57	60,32
2	terkendalinya laju pertumbuhan penduduk dengan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana	Angka prevalensi kontrasepsi modern (mCPR)	62,54%	65,44%
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	8%	10%
15. URUSAN PERHUBUNGAN				
1	Meningkatnya kinerja pelayanan perhubungan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik sektor transportasi	85	75%
		on time performance layanan transportasi	78,44%	85%
2	terwujudnya konektivitas nasional	Rasio konektivitas nasional	0,695	0,64
3	Meningkatnya keselamatan transportasi	rasio kejadian kecelakaan transportasi per 100 ribu keberangkatan	28,85	1,531
16. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI				
1	tersedianya infrastruktur digitas	persentase OPD yang memiliki akses internet dan terhubung dengan jaringan intra pemerintah	80%	80%
2	terlaksananya layanan pemerintah secara digital	persentase layanan publik (G2B) yang diselenggarakan secara online dan terhubung dengan sistem penghubung layanan	65%	100%

NO	KINERJA URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	TARGET PUSAT	TARGET DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Persentase layanan administrasi pemerintahan (G2G) yang diimplementasikan	65%	65%
3	meningkatnya pemanfaatan teknologi digital untuk pertumbuhan ekonomi	Persentase UPT (bidang pendidikan, bidang kesehatan, pasar) dan UMKM yang difasilitasi untuk implementasi adopsi teknologi digital	30%	30%
		Persentase (%) perangkat daerah yang mengimplementasikan / replikasi inovasi yang mendukung smart city sesuai dengan masterplan	100%	60%
4	Terwujudnya peningkatan kompetensi masyarakat di bidang digital	jumlah ASN yang mengikuti kegiatan literasi digital atau program pelatihan bidang digital yang difasilitasi oleh pemerintah daerah	200 orang	55 orang
		jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan literasi digital atau program pelatihan bidang digital yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah	200 orang	200 orang
5	meningkatnya penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik (IKP) di daerah	persentase (%) konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah daerah, termasuk program prioritas nasional yang termasuk isu strategis pemerintah daerah (tema: protokol kesehatan, vaksin, stunting) yang didiseminasikan sesuai strategi komunikasi	70%	60%
		Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik Pemerintah Daerah	70%	60%
		Persentase informasi publik yang disediakan dan diumumkan oleh dinas provinsi dan kab/kota sesuai amanat UU No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	70%	86%

NO	KINERJA URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	TARGET PUSAT	TARGET DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		persentase mitra strategis pemda (media komunitas seperti KIM dll) termasuk media lokal yang melaksanakan diseminasi informasi kebijakan dan program prioritas nasional dan prioritas daerah	75%	75%
17. URUSAN KOPERASI DAN UKM				
1	terwujudnya koperasi yang modern	meningkatnya koperasi yang berkualitas	50%	45%
2	terwujudnya UMKM yang mampu bersaing di pasar domestik dan global	meningkatnya usaha kecil yang menjadi wirausaha	50%	3,38%
18. URUSAN PENANAMAN MODAL				
1	tercapainya realisasi penanaman modal	realisasi penanaman modal	Rp968,4 Trilyun	Rp4,95 Trilyun
19. URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				
1	meningkatnya partisipasi organisasi kepemudaan dan organisasi sosial	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	6,69%	7,30%
2	Meningkatnya pemuda yang berwirausaha	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0,55%	0,38%
3	Meningkatnya prestasi olahraga nasional dan internasional	Peningkatan prestasi olahraga	12 medali emas	12 medali emas
20. URUSAN STATISTIK				
1	Tersedianya data statistik dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100%	60%
		Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100%	60%
21. URUSAN PERSANDIAN				
1	menguatnya keamanan siber lingkungan pemerintah daerah	jumlah lulusan peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan siber untuk K/L/D	100 orang	2 orang
		Jumlah CSIRT yang dibentuk di sektor pemerintah daerah	5 daerah	-
		Jumlah lulusan sertifikasi yang mengikuti peningkata kompetensi SDM pengelola keamanan Sistem pemerintah berbasis Elektronik (SPBE)	100 orang	2 orang

NO	KINERJA URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	TARGET PUSAT	TARGET DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
22. URUSAN KEBUDAYAAN				
1	terwujudnya kelestarian cagar budaya	Persentase penduduk usa 10 tahun keatas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	36%	0,15%
		Jumlah cagar budaya dan warisan budaya yang dilindungi	4156 unit	4 unit
		Persentase penduduk usia 10 tahun keatas yang menonton secara langsung pertunjukan seni	36%	40%
		Jumlah cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang ditetapkan	460 unit	7 unit
		Persentase penduduk usia 10 tahun keatas yang mengunjungi peninggalan sejarah	12%	17%
		Register cagar budaya (pendaftaran, pengisian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	400 unit	15 unit
		Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum (DAK)	113 unit	3 unit
		Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	50 orang	15 orang
		Pembentukan tim ahli cagar budaya provinsi	50 orang	7 orang
		Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap penduduk usia 15 tahun keatas)	0,31%	0,36%
		Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	22,33%	17%
23. URUSAN PERPUSTAKAAN				
1	literasi masyarakat meningkat	indeks pembangunan literasi masyarakat	13	21,5
2	Tingkat kegemaran membaca masyarakat bertambah	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	63,3	63,3
24. URUSAN KEARSIPAN				

NO	KINERJA URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	TARGET PUSAT	TARGET DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	terwujudnya revitalisasi arsip da aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal	jumlah arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya yang dipreservasi	148.880 arsip	250
		jumlah pengguna pelayanan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa	170.362 orang	350
25. URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN				
1	meningkatnya pengelolaan wilayah pegelolaan perikanan (WPP) dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir serta pengelolaan ruang laut	Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (kumulatif)	17.500.000 Ha	10.687,49 Ha
		jumlah dokumen monev/kajian PK/peraturan turunan Perda RZWP3K	34 dokumen	1 dokumen
2	terwujudnya industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing	Produksi perikanan tangkap	8.320.000 ton	54.480,9 ton
		produksi perikanan budidaya	20.540.000 ton	57.168 ton
		Produksi garam	3.200 000 ton	-
		Konsumsi ikan	59,53 kg/kap/th	40,6 kg/kap/th
3	terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan integratif	Penanganan kasus pelanggaran bidang kelautan dan perikanan	93%	50%
		Operasi kapal pengawas/ speedboat	180 hari operasi	33 hari
26. URUSAN PARIWISATA				
1	Meningkatnya kontribusi pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ketahanan ekonomi nasional	Nilai tambah ekonomi kreatif	1.398.000.000.000	13.000.000.000
		jumlah pergerakan wisatawan nusantara	260.000.000 - 280.000.000	950.000
		kontribusi PDB pariwisata	4,30%	1,19%
27. URUSAN PERTANIAN				
1	meningkatnya produktivitas pertanian	persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan (padi dan jagung)	2%	2,50%
		Persentase peningkatan produktivitas tanaman hortikultura (cabai dan bawang merah)	1,20%	2%
2	meningkatnya produktivitas pertanian	Persentase peningkatan produktivitas perkebunan	3,28%	2,15%
		Persentase peningkatan produktivitas peternakan	1,20%	-

NO	KINERJA URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	TARGET PUSAT	TARGET DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	terkendalinya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman serta penyakit pada hewan	Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT	Tanaman Pangan: 95% hortikultura: 90 - 95% Perkebunan: 80%	10%
		persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	80,50%	1,20%
28. URUSAN KEHUTANAN				
1	meningkatnya luas hutan dan lahan yang direhabilitasi dalam rangka konservasi sumber daya air	Luas lahan kritis yang direhabilitasi	100000 Ha	695 Ha
2	meningkatnya luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat melalui perhutanan sosial	250000 Ha	26.793 Ha
29. URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL				
1	meningkatnya jumlah desa yang teraliri listrik	Persentase desa teraliri listrik (rasio desa berlistrik)	100%	100%
2	meningkatnya penggunaan energi yang bersumber dari energi baru terbarukan	Porsi EBT dalam bauran energi	15,70%	12,32%
3	Meningkatnya rumah tangga yang teraliri listrik	Rasio Elektrifikasi	100%	100%
30. URUSAN PERDAGANGAN				
1	meningkatnya pertumbuhan ekspor bernilai tambah tinggi	Pertumbuhan nilai ekspor non migas	5,96% - 7,86%	6%
2	terwujudnya iklim usaha yang kondusif	tertib usaha	55% - 75%	60%
3	meningkatnya keberdayaan dan kepercayaan konsumen	Persentase barang beredar yang diawasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	42%	40%
		Persentase penanganan pengaduan konsumen	91%	90%
4	Meningkatnya kepastian penyaluran pupuk/ pestisida bersubsidi sesuai ketentuan jenis, jumlah, waktu, harga, mutu dan tempat	Persentase kinerja realisasi pupuk	90%	90%
5	Meningkatnya jaminan mutu komoditas potensial daerah	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	50-75%	60%
6	terwujudnya kecukupan bahan pangan untuk masyarakat	persentase stabilitas dan jumah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	5,90%	5,90%

NO	KINERJA URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	TARGET PUSAT	TARGET DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7	terwujudnya stabilisasi harga dan etersediaan pasokan	inflasi pangan bergejolak	3% - 5%	3%
31. URUSAN PERINDUSTRIAN				
1	tercapainya peningkatan pertumbuhan sektor industri pengolahan non migas	Persentase pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan non migas	6,80%	3%
2	meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan non migas terhadap PDB	Persentase kontribusi sektor industri pengolahan non migas terhadap PDRB	18,30%	9,65%
3	tercapainya pertumbuhan nilai ekspor produk industri pengolahan non migas	Nilai ekspor produk industri pengolahan non migas (USD Miliar)	151,9	0,96
4	Meningkatnya tenaga kerja di sektor industri pengolahan non migas	Jumlah tenaga kerja sektor industri pengolahan non migas	20,6 juta orang	92000 orang
5	Terwujudnya pertumbuhan nilai investasi sektor industri pengolahan non migas	Nilai investasi sektor industri pengolahan non migas (Rp.triliun)	425,3 Triliun	0,527 triliun
32. URUSAN TRANSMIGRASI				
1	meningkatnya status perkembangan kawasan transmigrasi yang direvitalisasi	Nilai rata-rata Indeks perkembangan 52 kawasan transmigrasi prioritas yang direvitalisasi	53,12	33,82
		Nilai rata-rata Indeks perkembangan 100 kawasan transmigrasi prioritas kementerian yang direvitalisasi	42,03	40,89

BAB V

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

Arah kebijakan pembangunan Provinsi Jambi lebih diprioritaskan pada sinergitas antara kebijakan nasional dan Provinsi Jambi serta kabupaten/kota dengan lebih mengutamakan penanganan pada permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis daerah, dengan mengintegrasikan kebijakan pembangunan kewilayahan dengan kebijakan sektoral. Arah kebijakan spasial Pemerintah Provinsi Jambi antara lain mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi tahun 2013-2033 dan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi tahun 2016-2021. Demikian juga, Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi 2005 – 2025 menjadi rujukan untuk mewujudkan pembangunan daerah yang merata dan berkeadilan dengan mengurangi kesenjangan sosial ekonomi dan keberpihakan kepada daerah tertinggal dan penduduk miskin. Untuk itu, dalam menyelenggarakan pembangunan daerah di Provinsi Jambi lebih diarahkan pada :

1. Pembangunan ekonomi daerah yang berkualitas didasarkan kepada pengembangan agribisnis dan agroindustri unggulan yang ditumbuhkembangkan sesuai potensi sumberdaya daerah yang dimiliki.
2. Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata difokuskan pada upaya mempererat keterkaitan ruang antar kawasan, percepatan pembangunan kawasan ekonomi strategis cepat tumbuh dan pemerataan ketersediaan infrastruktur dasar berkualitas di setiap daerah.
3. Peningkatan sumberdaya manusia yang berkualitas difokuskan pada pembangunan pendidikan yang berorientasi pada peningkatan kompetensi yang sesuai kebutuhan dan pembangunan kesehatan yang berorientasi pada penyiapan manusia Jambi yang sehat dan dapat hidup layak.

4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih yang dapat memberikan pelayanan publik yang prima dan memberi jaminan kepastian hukum.
5. Peningkatan pengelolaan sumberdaya alam yang berkualitas sehingga menjamin ketersediaan sumberdaya alam dan kelestarian lingkungan hidup sekarang dan mendatang.

5.1 Gambaran Umum Kondisi Kabupaten/Kota

Pengembangan wilayah merupakan upaya untuk memantapkan pertumbuhan pembangunan yang berkeadilan dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial, politik, serta budaya dengan mempertimbangkan potensi dan keragaman daya dukung serta daya tampung lingkungan. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi didukung oleh masing-masing kabupaten/kota, perkembangan pertumbuhan ekonomi tersebut dapat dilihat pada tabel 5.1 di bawah ini.

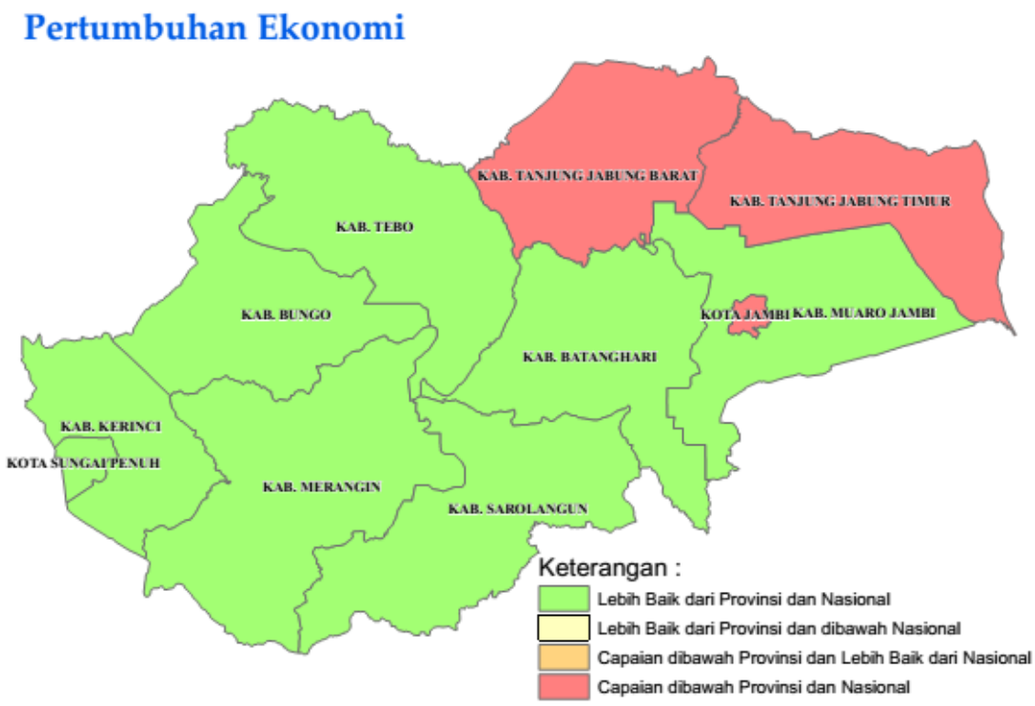
Tabel 5-1 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Tahun 2016-2020

KABUPATEN/KOTA	PERTUMBUHAN EKONOMI				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kerinci	6,70	6,03	5,10	5,02	3,69
Merangin	6,21	5,55	5,17	4,82	0,78
Sarolangun	4,26	4,69	4,72	5,08	-0,26
Batanghari	4,56	4,82	4,96	4,99	-0,27
Muaro Jambi	5,43	5,06	5,27	5,06	0,27
Tanjung Jabung Timur	2,70	3,13	3,13	4,25	-3,87
Tanjung Jabung Barat	3,14	4,25	6,89	5,15	-0,64
Tebo	5,38	5,60	5,02	4,78	-0,04
Bungo	5,20	5,67	4,72	4,35	-0,40
Kota Jambi	6,81	4,68	5,48	5,33	-3,28
Kota Sungai Penuh	6,51	6,24	5,54	5,12	-0,14

Sumber : Jambi Dalam Angka 2021, 2021

Bila dilihat dari data *time serries* pada tabel diatas, pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota berfluktuatif, dan akibat pandemi Covid-19 pada tahun 2020 hampir keseluruhan kabupaten/ kota mengalami kontraksi. Kabupaten/ Kota yang tidak mengalami kontraksi pada tahun 2020 adalah Kabupaten Kerinci, Kabupaten Merangin, dan Kabupaten Muaro Jambi. Sedangkan Kabupaten/ kota lainnya mengalami kontraksi dengan kontraksi terdalam terjadi pada Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kota Jambi. Sementara untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi tertinggi tahun 2020 adalah Kabupaten Kerinci. Persebaran

perbandingan capaian pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota dengan Provinsi dan Nasional tahun 2020 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 5-1 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/ Kota se-Provinsi Jambi dibanding Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi dan Nasional Tahun 2020

Bila dilihat dari kontribusi Kabupaten/kota terhadap PDRB Provinsi Jambi (Tabel 5-2), yang memiliki kontribusi terbesar adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kontribusi dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat tersebut terutama berasal dari sektor Pertambangan dan Penggalian yaitu dari subkategori pertambangan migas yang menjadi unggulan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Selanjutnya, kontributor terbesar kedua adalah Kota Jambi yang merupakan Ibu Kota Provinsi, Sementara untuk kontributor terkecil adalah Kota Sungai Penuh, meskipun berfluktuatif namun cenderung meningkat.

Tabel 5-2 Perkembangan Kontribusi Kabupaten/Kota terhadap PDRB Provinsi Jambi Tahun 2016-2020

KABUPATEN/KOTA	KONTRIBUSI PDRB KAB/KOTA THD PDRB PROVINSI JAMBI				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kerinci	4,7	4,67	4,49	4,52	5,03
Merangin	7,08	7,11	6,9	6,97	7,55
Sarolangun	7,15	7,07	6,92	6,92	6,98
Batanghari	7,8	7,72	7,48	7,49	7,91
Muaro Jambi	11,18	11,21	10,96	11,08	11,8
Tanjung Jabung Timur	10,93	11,06	11,51	11,24	9,39
Tanjung Jabung Barat	18,36	18,75	19,79	19,61	17,88
Tebo	6,79	6,82	6,61	6,65	7,1
Bungo	8,39	8,42	8,26	8,16	8,36
Kota Jambi	14,25	13,82	13,75	13,96	14,35
Kota Sungai Penuh	3,35	3,35	3,32	3,41	3,64

Sumber : Jambi Dalam angka 2021,2021

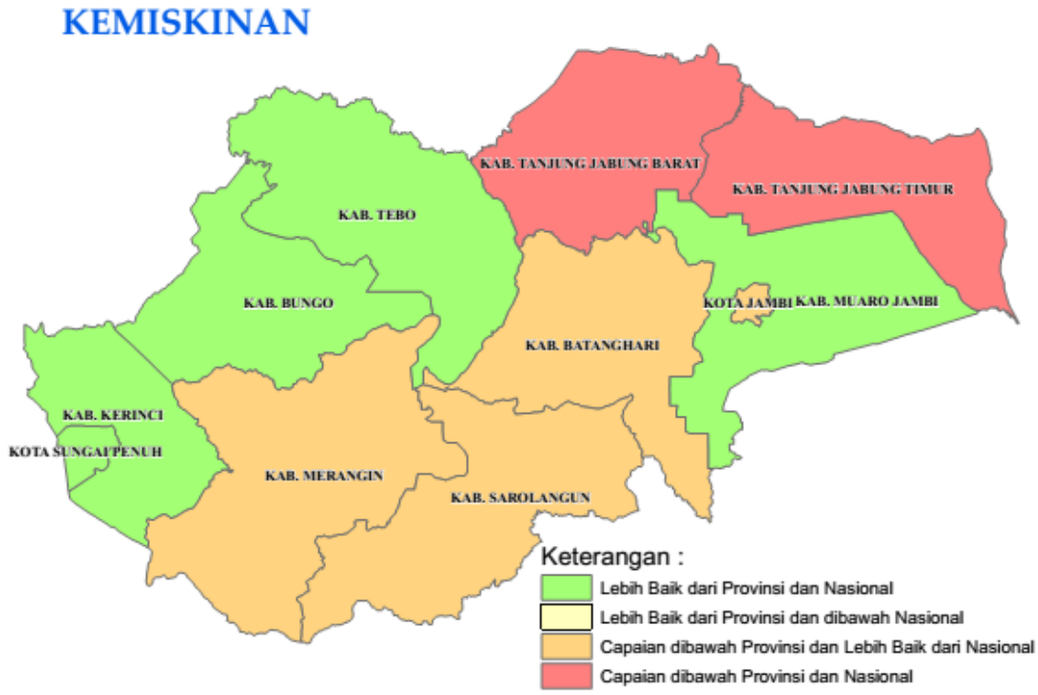
Tabel 5-3 Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2016-2020

KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENDUDUK MISKIN				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kerinci	7,48	7,45	7,07	7,13	7,30
Merangin	9,95	9,43	8,88	8,48	8,63
Sarolangun	9,33	8,87	8,73	8,45	8,42
Batanghari	10,79	10,33	10,23	9,75	9,65
Muaro Jambi	4,30	4,37	4,05	3,83	3,83
Tanjung Jabung Timur	12,76	12,58	12,38	11,54	10,95
Tanjung Jabung Barat	11,81	11,32	11,10	10,56	10,29
Tebo	6,87	6,79	6,58	6,47	6,26
Bungo	5,99	5,82	5,78	5,6	5,8
Kota Jambi	8,87	8,84	8,49	8,12	8,27
Kota Sungai Penuh	3,13	2,78	2,76	2,81	3,03

Sumber : Jambi Dalam Angka 2021, 2021

Bila dilihat dari persentase penduduk miskin kabupaten/kota dari tahun 2016 – 2020 pada tabel diatas, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki persentase penduduk miskin yang paling besar, namun memiliki kecenderungan menurun setiap tahun meskipun pandemi Covid-19 pada tahun 2020. Untuk persentase penduduk miskin yang paling kecil adalah Kota Sungai

Penuh yaitu sebesar 3,03 persen di tahun 2020, namun persentase ini meningkat bila dibandingkan tahun 2019.



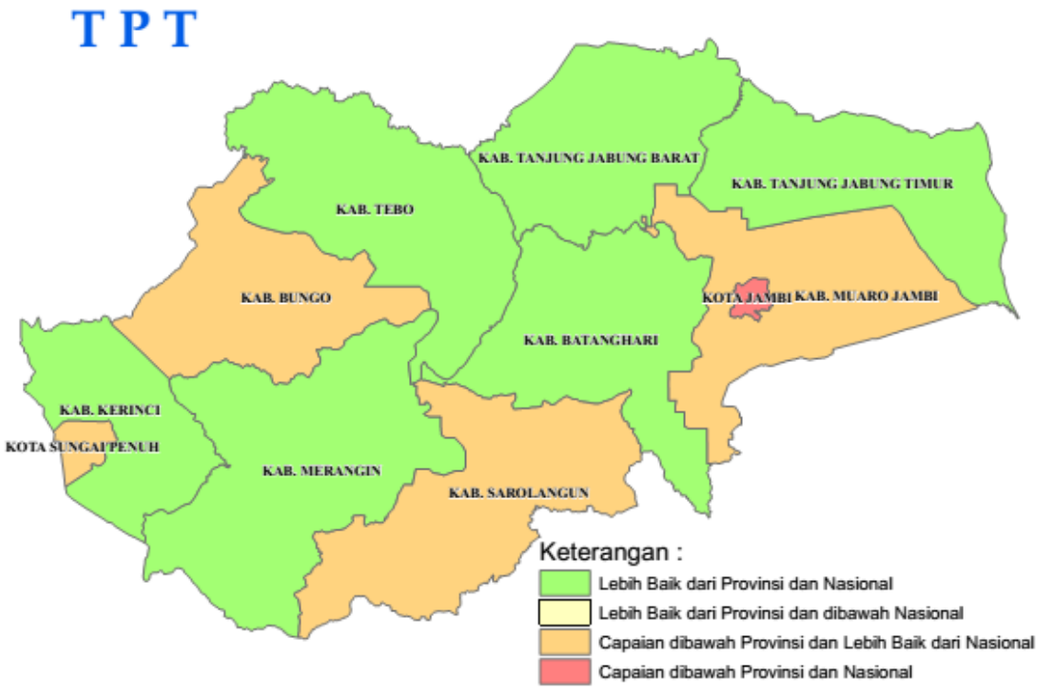
Gambar 5-2 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/ Kota se-Provinsi Jambi dibanding Provinsi Jambi dan Nasional Tahun 2020

Bila dilihat dari Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dari 11 Kabupaten/kota di Provinsi Jambi, Kota Jambi memiliki TPT tertinggi sebesar 10,49 persen, disusul Kabupaten Bungo dengan TPT sebesar 5,94 persen. Kedua kabupaten/kota tersebut didominasi oleh sektor jasa, dimana pembatasan aktivitas pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19 sangat berdampak pada sektor ini. Untuk lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 5.4 di bawah ini.

Tabel 5-4 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2016-2020

KABUPATEN/KOTA	TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (%)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kerinci	tad	3,26	2,74	2,62	2,43
Merangin	tad	4,10	3,47	3,68	4,86
Sarolangun	tad	2,25	4,06	4,09	5,71
Batanghari	tad	3,57	3,87	4,56	4,42
Muaro Jambi	tad	5,39	4,52	5,20	5,43
Tanjung Jabung Timur	tad	2,36	1,80	1,63	1,41
Tanjung Jabung Barat	tad	3,07	2,38	2,57	2,16
Tebo	tad	1,98	2,00	2,90	2,95
Bungo	tad	4,89	3,03	3,82	5,94
Kota Jambi	tad	5,55	6,41	6,53	10,49
Kota Sungai Penuh	tad	4,14	5,13	4,00	5,56

Sumber : Jambi Dalam Angka 2021, 2021



Gambar 5-3 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/ Kota se-Provinsi Jambi dibanding Provinsi Jambi dan Nasional Tahun 2020

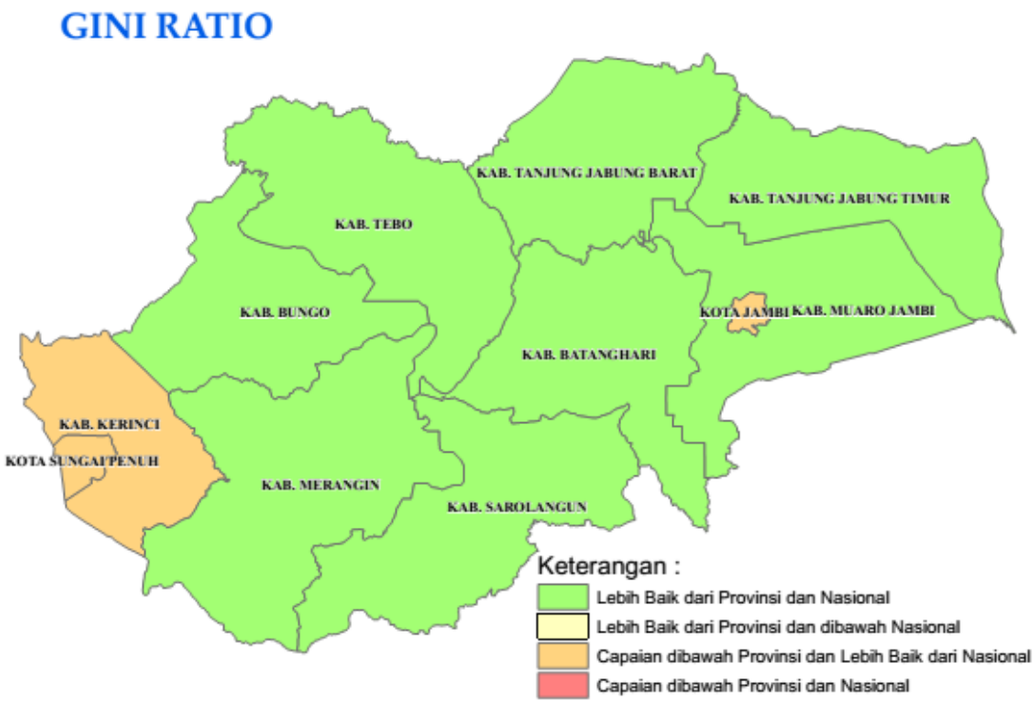
Tabel 5-5 Perkembangan Gini Rasio Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2015-2019

KABUPATEN/KOTA	GINI RASIO				
	2015	2016	2017	2018	2019
Kerinci	0,32	0,28	0,28	0,32	0,32
Merangin	0,36	0,33	0,30	0,35	0,29
Sarolangun	0,39	0,34	0,36	0,29	0,29
Batanghari	0,26	0,30	0,25	0,30	0,31
Muaro Jambi	0,34	0,34	0,32	0,31	0,27
Tanjung Jabung Timur	0,29	0,26	0,28	0,29	0,29
Tanjung Jabung Barat	0,36	0,33	0,29	0,36	0,29
Tebo	0,37	0,32	0,27	0,31	0,28
Bungo	0,35	0,34	0,34	0,32	0,26
Kota Jambi	0,39	0,38	0,39	0,33	0,33
Kota Sungai Penuh	0,33	0,33	0,32	0,30	0,34

Sumber : BPS, 2021

Koefisien Gini (Gini Rasio) menggambarkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh di suatu wilayah. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan Koefisien Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa. Dengan kata lain, Koefisien Gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk.

Perkembangan Gini Rasio di setiap kabupaten/kota masih terjaga pada angka yang relatif rendah, terutama Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Bungo dimana Gini Rasionya merupakan yang paling rendah dibanding kabupaten/kota lain di Provinsi Jambi (lihat Tabel 5-5). Rata-rata Gini Ratio Kabupaten/ kota menunjukan perbaikan, kecuali Kabupaten Batanghari dan Kota Sei. Penuh yang justru mengalami peningkatan gini ratio atau mengalami peningkatan ketimpangan pendapatan.



Gambar 5-4 Rasio Gini Kabupaten/ Kota se-Provinsi Jambi dibanding Provinsi Jambi dan Nasional Tahun 2020

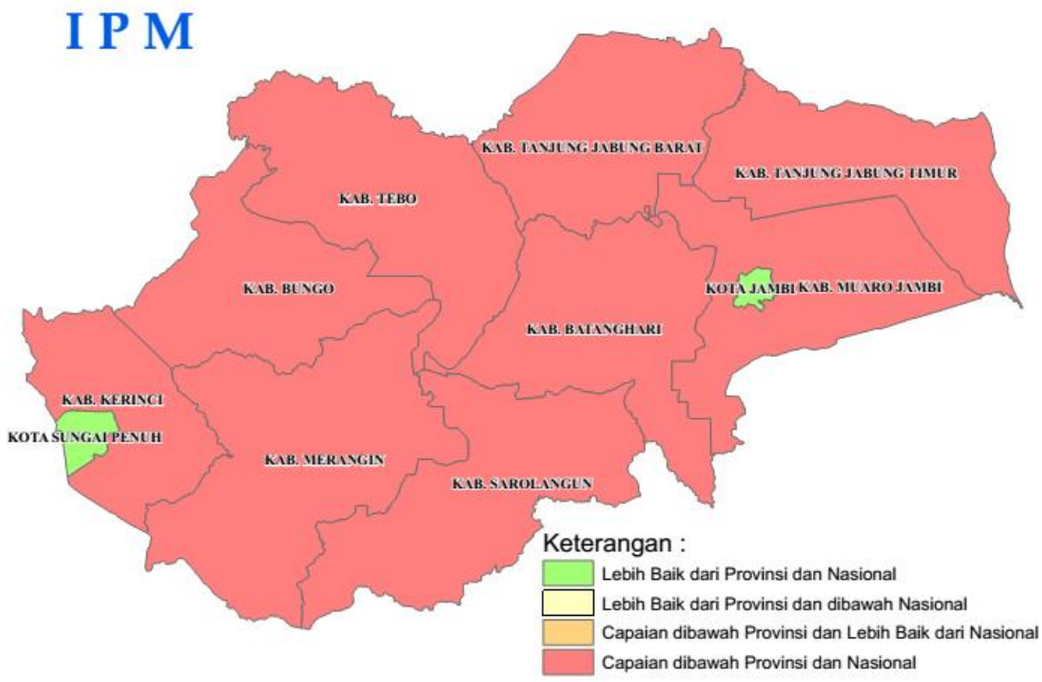
Tabel 5-6 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2016-2020

KABUPATEN/KOTA	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kerinci	69,68	70,03	70,59	70,95	71,21
Merangin	67,86	68,3	68,81	69,07	69,19
Sarolangun	68,73	69,03	69,41	69,72	69,86
Batanghari	68,7	68,92	69,33	69,67	69,84
Muaro Jambi	67,55	67,86	68,34	69,01	69,18
Tanjung Jabung Timur	61,88	62,61	63,32	63,92	64,43
Tanjung Jabung Barat	65,91	66,15	67,13	67,54	67,54
Tebo	68,05	68,16	68,67	69,02	69,14
Bungo	68,77	69,04	69,42	69,86	69,92
Kota Jambi	76,14	76,74	77,41	78,26	78,37
Kota Sungai Penuh	73,35	73,75	74,67	75,36	75,42

Sumber : BPS Provinsi Jambi 2021,2021

Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/ Kota se-Provinsi Jambi terus memperlihatkan perbaikan. Tiga diantara kabupaten/ kota tersebut, yaitu Kota Jambi, Kota Sei. Penuh dan Kabupaten Kerinci termasuk dalam kategori IPM tingkat tinggi, sedangkan

kabupaten lainnya termasuk dalam kategori IPM sedang dan IPM terendah berada pada Kabupaten Tanjung Jabung Timur.



Gambar 5-5 IPM Kabupaten/ Kota se-Provinsi Jambi dibanding Provinsi Jambi dan Nasional Tahun 2020

5.2 Sasaran dan Arah Pengembangan Wilayah

Pembangunan di Provinsi Jambi juga diarahkan sesuai dengan potensi dan fungsi ruangnya. Oleh karena itu, sebagaimana telah diarahkan dalam **RTRW Provinsi Jambi Tahun 2013 – 2033, penyelenggaraan pembangunan kewilayahan di Provinsi Jambi lebih diarahkan** pada : 1) Mengalokasikan penggunaan ruang di Provinsi Jambi (pola ruang) dengan menyerasikan kegiatan antar sektor dengan kebutuhan ruang dan potensi sumberdaya alam yang berasaskan kelestarian lingkungan menuju pembangunan yang berkelanjutan; 2) Pengembangan sarana prasarana yang diarahkan pada upaya mempererat keterkaitan spasial antar kawasan (struktur ruang); 3) Mengakselerasi pertumbuhan wilayah yang potensial untuk tumbuh, menjaga pertumbuhan pada kawasan strategis dan cepat tumbuh dengan tetap memperhatikan aspek keseimbangan pertumbuhan wilayah dalam satuan ruang; dan 4) Mendorong pengembangan wilayah untuk setiap kabupaten/kota di Provinsi berdasarkan pertimbangan

sektor andalan, sektor potensial/unggulan dan kendala pengembangan yang ada.

Adapun Kebijakan pembangunan kabupaten/kota sebagaimana tertuang di dalam RTRW Provinsi Jambi tahun 2013-2033, meliputi:

1 Pengurangan kesenjangan pembangunan dan perkembangan wilayah Barat-Tengah dan Timur Provinsi Jambi, melalui:
   a. Pengembangan interaksi kawasan untuk peningkatan perkembangan ekonomi kawasan dengan pengembangan jalan arteri primer, kereta api dan sarana pendukungnya dengan tidak mengganggu kawasan lindung dan fungsi lingkungan.Pengembangan sarana prasarana transportasi yang akan dikembangkan dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi di pusat-pusat pertumbuhan dalam wilayah Provinsi Jambi harus dilakukan dengan mengacu pada studi kelayakan dan kajian dampak lingkungan sehingga pembangunannya tetap mampu menciptakan keseimbangan.
   b. Peningkatan akses kawasan budi daya (sektor unggulan) ke sistem jaringan transportasi melalui peningkatan jalan kolektor primer.
   c. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung untuk menunjang pengembangan pusat-pusat pelayanan berupa pengembangan fasilitas bongkar muat dan sarana pelabuhan perikanan di PKN, PKW dan PKL.
   d. Peningkatan pemanfaatan potensi sumberdaya alam di wilayah Barat, Tengah dan Timur melalui pengolahan produk perkebunan, pertambangan dan perikanan.
2 Pengembangan ekonomi sektor primer, sekunder dan tersier sesuai daya dukung wilayah, melalui:
   a. Peningkatan kegiatan pertanian, kehutanan dan perkebunan melalui pola intensifikasi dan ekstensifikasi dengan tetap mempertahankan ekosistem lingkungan.
   b. Peningkatan dan pengembangan kawasan agropolitan dengan melengkapi fasilitas perdagangan pusat koleksi distribusi dan jasa pendukung komoditas pertanian kawasan.
   c. Peningkatan dan pengembangan industri berbasis pertanian berupa perlengkapan saprodi dan sarana pendukungnya.

b. Peningkatan dan pengembangan kegiatan jasa perdagangan untuk mendukung kegiatan primer dan sekunder, serta menciptakan lapangan kerja perkotaan.
c. Peningkatan dan pengembangan kegiatan sektor unggulan pada kawasam strategis antara lain pertanian, perkebunan, pertambangan, industri, perikanan dan pariwisata.

3 Optimalisasi pemanfaatan kawasan budi daya untuk mendukung pengembangan ekonomi daerah, melalui:
a. Pengembangan sektor unggulan di masing-masing kabupaten/kota sesuai dengan potensi yang ada.
b. Mengembangkan dan melestarikan kawasan budi daya pertanian pangan untuk mendukung perwujudan ketahanan pangan.
c. Mengembangkan pulau-pulau kecil dengan pendekatan gugus pulau untuk meningkatkan daya saing dan mewujudkan usaha ekonomi produktif.
d. Pemanfaatan kawasan budi daya sesuai dengan kapasitas daya dukung lingkungan.
e. Pengembangan kegiatan sektor unggulan pada kawasan strategis antara lain pertanian, perkebunan, pertambangan, industri, perikanan dan pariwisata.

4 Penetapan pusat-pusat kegiatan perkotaan untuk mendukung pelayanan sosial/ekonomi dan pengembangan wilayah, melalui:
a. Pemantapan PKN Kota Jambi sebagai pusat orientasi wilayah menuju Metropolitan Jambi sesuai criteria dan peraturan perundangan yang berlaku.
b. Pemantapan PKW yang terdiri dari Perkotaan Kuala Tungkal, Perkotaan Muara Bungo, Perkotaan Sarolangun dan Perkotaan Muara Bulian sesuai arahan RTRWN.
c. Peningkatan dan Penetapan Kota Sungai Penuh, Perkotaan Bangko, Perkotaan Muara Sabak, Perkotaan Muara Tebo, Perkotaan Sengeti menjadi Pusat Kegiatan Wilayah yang dipromosikan provinsi (PKW) untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
d. Penetapan Sanggaran Agung, Siulak Mukai, Muara Tembesi, Pelabuhan Dagang, Nipah Panjang, Wiroto Agung, Rantau Ikil, Pelawan, Teluk Nilau, Sungai Abang, Batang Sangir, Sungai Okan,

Limbur Tembesi, Pauh, Teluk Serdang, Rantau Panjang, Pamenang, dan Tempino menjadi Pusat Kegiatan Lokal (PKL) untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.

e. Peningkatan dan penetapan fungsi pusat-pusat kegiatan lainnya di 9 (sembilan) kabupaten dan 2 (dua) Kota dalam Provinsi Jambi yang memenuhi kriteria pusat pelayanan.

5 Penetapan kawasan lindung untuk menjaga kelestarian sumberdaya alam secara terpadu dengan provinsi yang berbatasan, melalui:

a. Pemantapan fungsi kawasan lindung Kabupaten Kerinci, Bungo, Tebo, Merangin, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Batanghari, Muaro Jambi, Kota Jambi dan Sarolangun.
b. Mempertahankan kawasan lindung seluas minimum 30% dari luas wilayah Provinsi Jambi.
c. Sinkronisasi fungsi kawasan lindung dengan provinsi yang berbatasan di Kabupaten Kerinci, Bungo, Tebo, Merangin, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, dan Sarolangun.

Arahan pengembangan wilayah untuk setiap kabupaten/kota di Provinsi Jambi sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi, yang didasarkan pertimbangan sektor andalan, sektor potensial/unggulan dan kendala pengembangan yang ada maka di arahkan sebagai berikut :

1. KABUPATEN KERINCI

Kabupaten Kerinci didominasi oleh sektor Pertanian dan Pariwisata, sehingga Kerinci diarahkan untuk memantapkan peran dan fungsinya pada sektor pertanian terutama tanaman bahan makanan, perkebunan; peternakan dan perikanan. Demikian juga sektor pariwisata dan kawasan Konservasi, mengingat Kerinci memiliki beberapa potensi destinasi wisata untuk dikembangkan. Sementara untuk prioritas pembangunan Provinsi Jambi, pada Tahun 2022 Kerinci termasuk ke dalam fokus seluruh Prioritas.

Tabel 5-7 Arahan Target Pembangunan untuk Kabupaten Kerinci Tahun 2022

Uraian	Target Tahun 2022
Pertumbuhan Ekonomi	4,61
Tingkat Kemiskinan	7,25
Tingkat Pengangguran	2,40
Gini Ratio	0,32
IPM	71,50

2. KABUPATEN MERANGIN

Kabupaten Merangin didominasi oleh sektor Pertanian dan pariwisata, sehingga Merangin diarahkan untuk memantapkan peran dan fungsinya pada sektor pertanian terutama tanaman bahan makanan dan perkebunan; peternakan dan perikanan. Demikian juga sektor pariwisata dan kawasan Konservasi, mengingat Merangin memiliki beberapa potensi destinasi wisata untuk dikembangkan, seperti Geopark Merangin.

Sementara untuk prioritas pembangunan Provinsi Jambi, pada Tahun 2022 Merangin termasuk ke dalam fokus Prioritas 1 Pembangunan Ekonomi,; Prioritas 2 Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya; Prioritas 3 Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Pelayanan Dasar serta Komunikasi dan Informasi; serta prioritas 5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan.

Tabel 5-8 Arahan Target Pembangunan untuk Kabupaten Merangin Tahun 2022

Uraian	Target Tahun 2022
Pertumbuhan Ekonomi	4,42
Tingkat Kemiskinan	8,53
Tingkat Pengangguran	4,70
Gini Ratio	0,31
IPM	69,25

3. KABUPATEN SAROLANGUN

Sama dengan dua Kabupaten sebelumnya, Kabupaten Sarolangun juga didominasi oleh sektor Pertanian. Untuk itu, Kabupaten Sarolangun diarahkan untuk memantapkan peran dan

fungsinya pada sektor pertanian terutama tanaman bahan makanan dan perkebunan; peternakan dan perikanan.

Sementara untuk prioritas pembangunan Provinsi Jambi, pada Tahun 2022 Kabupaten Sarolangun termasuk ke dalam seluruh fokus Prioritas pembangunan.

Tabel 5-9 Arahan Target Pembangunan untuk Kabupaten Sarolangun Tahun 2022

Uraian	Target Tahun 2022
Pertumbuhan Ekonomi	4,46
Tingkat Kemiskinan	8,40
Tingkat Pengangguran	5,50
Gini Ratio	0,31
IPM	69,90

4. KABUPATEN BATANG HARI

Kabupaten Batang Hari didominasi oleh sektor Pertanian, sehingga diarahkan untuk memantapkan peran dan fungsinya pada sektor pertanian terutama tanaman bahan makanan dan perkebunan; peternakan dan perikanan. Sementara untuk prioritas pembangunan Provinsi Jambi, pada Tahun 2022 Kabupaten Batang Hari termasuk ke dalam seluruh fokus prioritas daerah.

Tabel 5-10 Arahan Target Pembangunan untuk Kabupaten Batang Hari Tahun 2022

Uraian	Target Tahun 2022
Pertumbuhan Ekonomi	4,12
Tingkat Kemiskinan	9,50
Tingkat Pengangguran	4,30
Gini Ratio	0,31
IPM	69,90

5. KABUPATEN MUARO JAMBI

Sektor basis Kabupaten Muaro Jambi adalah Industri pengolahan, disamping sektor Pertanian, sehingga Kabupaten Muaro Jambi diarahkan untuk memantapkan peran dan fungsinya pada sektor pertanian terutama tanaman bahan makanan dan perkebunan; peternakan dan perikanan dengan terus meningkatkan kontribusi sektor industri pengolahan di wilayahnya. Sementara

untuk prioritas pembangunan Provinsi Jambi, pada Tahun 2022 Kabupaten Muaro Jambi termasuk ke seluruh prioritas.

Tabel 5-11 Arahan Target Pembangunan untuk Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2022

Uraian	Target Tahun 2022
Pertumbuhan Ekonomi	4,88
Tingkat Kemiskinan	3,80
Tingkat Pengangguran	5,35
Gini Ratio	0,27
IPM	69,22

6. KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Kabupaten Kabupaten Tanjung Jabung Timur didominasi oleh sektor Pertanian sebagai sektor basisnya, untuk itu, Kabupaten Kabupaten Tanjung Jabung Timur diarahkan untuk memantapkan peran dan fungsinya pada sektor pertanian terutama tanaman bahan makanan dan perkebunan; peternakan dan perikanan. Sementara untuk prioritas pembangunan Provinsi Jambi, pada Tahun 2022 Kabupaten Tanjung Jabung Timur termasuk ke dalam seluruh prioritas pembangunan.

Tabel 5-12 Arahan Target Pembangunan untuk Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022

Uraian	Target Tahun 2022
Pertumbuhan Ekonomi	4,70
Tingkat Kemiskinan	10,80
Tingkat Pengangguran	1,40
Gini Ratio	0,29
IPM	64,50

7. KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Kabupaten Tanjung Jabung Barat didominasi oleh sektor Pertambangan dan Penggalian serta Sektor pertanian, perkebunan dan kehutanan. Produksi minyak dan gas yang melimpah menjadikan kabupaten ini memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap PDRB Provinsi. Selain itu, sektor industri pengolahan juga menjadi basis kabupaten ini, sehingga dalam upaya menumbuhkan perekonomian di Provinsi Jambi sektor basis ini termasuk sektor yang akan digenjot pada tahun 2022. Sehingga pada prioritas pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2022, Tanjung Jabung Barat termasuk ke dalam fokus seluruh Prioritas.

Tabel 5-13 Arahan Target Pembangunan untuk Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022

Uraian	Target Tahun 2022
Pertumbuhan Ekonomi	2,73
Tingkat Kemiskinan	10,25
Tingkat Pengangguran	2,05
Gini Ratio	0,29
IPM	67,55

8. KABUPATEN TEBO

Kabupaten Tebo lebih didominasi oleh sektor Pertanian, sehingga diarahkan untuk memantapkan peran dan fungsinya pada sektor pertanian terutama tanaman bahan makanan dan perkebunan; peternakan dan perikanan. Sementara untuk prioritas pembangunan Provinsi Jambi, pada Tahun 2022 Kabupaten Tebo termasuk ke dalam seluruh fokus Prioritas.

Tabel 5-14 Arahan Target Pembangunan untuk Kabupaten Tebo Tahun 2022

Uraian	Target Tahun 2022
Pertumbuhan Ekonomi	4,59
Tingkat Kemiskinan	6,15
Tingkat Pengangguran	2,90
Gini Ratio	0,28
IPM	69,20

9. KABUPATEN BUNGO

Sektor basis Kabupaten Bungo didominasi oleh sektor jasa. Untuk itu berdasarkan prioritas pembangunan Provinsi Jambi, pada Tahun 2022 Kabupaten Bungo dimasukan ke dalam seluruh fokus Prioritas.

Tabel 5-15 Arahan Target Pembangunan untuk Kabupaten Bungo Tahun 2022

Uraian	Target Tahun 2022
Pertumbuhan Ekonomi	4,28
Tingkat Kemiskinan	5,70
Tingkat Pengangguran	5,90
Gini Ratio	0,26
IPM	69,95

10. KOTA JAMBI

Struktur perekonomian Kota Jambi didominasi oleh sektor jasa. Sebagai ibukota provinsi dan dalam rangka pemulihan ekonomi pada tahun 2022, maka prioritas pembangunan Provinsi Jambi pada Tahun 2022 di Kota Jambi adalah Prioritas 1 Pembangunan ekonomi; prioritas 4 Pengelolaan Sumberdaya Alam berkelanjutan, lingkungan hidup serta ketahanan bencana, khususnya ketahanan bencana; serta prioritas 5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan.

Tabel 5-16 Arahan Target Pembangunan untuk Kota Jambi Tahun 2022

Uraian	Target Tahun 2022
Pertumbuhan Ekonomi	4,88
Tingkat Kemiskinan	8,15
Tingkat Pengangguran	10,35
Gini Ratio	0,325
IPM	78,40

11. KOTA SUNGAI PENUH

Sebagai wilayah perkotaan, struktur perekonomian Kota Sungai Penuh didominasi oleh sektor jasa. Untuk itu, pada prioritas pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2022, Kota Sungai Penuh termasuk ke dalam fokus Prioritas 1 Pembangunan ekonomi; Prioritas 3 Pembangunan infrastruktur wilayah dan pelayanan dasar serta komunikasi dan informasi; prioritas 4 Pengelolaan Sumberdaya Alam berkelanjutan, lingkungan hidup serta ketahanan bencana; serta prioritas 5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan.

Tabel 5-17 Arahan Target Pembangunan untuk Kota Sungai Penuh Tahun 2022

Uraian	Target Tahun 2022
Pertumbuhan Ekonomi	4,76
Tingkat Kemiskinan	3,00
Tingkat Pengangguran	5,50
Gini Ratio	0,34
IPM	75,50

BAB VI
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

6.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

RKPD Provinsi Jambi Tahun 2022 merupakan dokumen rencana tahunan yang memuat program dan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun dengan memperhatikan evaluasi dan capaian kinerja pembangunan tahun sebelumnya, target-target kinerja yang direncanakan dalam RPJPD, isu-isu strategis yang berkembang serta aspirasi masyarakat dan pokok-pokok pikiran DPRD. Rencana proram dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2022 dijabarkan dalam 6 urusan wajib pelayanan dasar, 15 urusan wajib non pelayanan dasar, 8 urusan pilihan, dan 5 fungsi penunjang urusan pemerintahan.

Program dan kegiatan perangkat daerah pada Tahun 2022 ini juga sudah melalui penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa Pokok-pokok pikiran DPRD memuat pandangan dan pertimbangan DPRD mengenai arah prioritas pembangunan serta rumusan usulan kebutuhan program/kegiatan yang bersumber dari hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD sebagai masukan dalam perumusan kebutuhan program dan kegiatan pada tahun rencana berdasarkan prioritas pembangunan daerah. Dalam penyusunan RKPD pokok-pokok pikiran DPRD diselaraskan dengan prioritas dan sasaran pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran dan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

Tabel 6-1 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Jambi
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**								**1,899,082,045,140**					**2,092,820,130,836**
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**733,468,600,000**					**751,423,600,000**
1	**01**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**1,405,000,000**					**1,540,000,000**
1	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	69	3 dokumen	8 dokumen	750,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai AKIP	69	850,000,000
1	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Nilai AKIP	Jumlah dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	69	1 dokumen	8 dokumen	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai AKIP	69	65,000,000
1	01	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai AKIP	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	69	1 dokumen	8 dokumen	30,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai AKIP	69	35,000,000
1	01	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai AKIP	Jumlah dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	69	1 dokumen	8 dokumen	25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai AKIP	69	30,000,000
1	01	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Nilai AKIP	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	69	1 dokumen	8 dokumen	25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai AKIP	69	30,000,000
1	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai AKIP	Jumlah dokumen lapoaran capaian kinerja	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	69	2 dokumen	8 dokumen	25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai AKIP	69	30,000,000
1	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	69	1 dokumen	8 dokumen	500,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai AKIP	69	500,000,000
1	**01**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**722,290,000,000**					**740,685,000,000**
1	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks kepuasan masyarakat Nilai AKIP	Jumlah periode pembayaran gaji dan tunjangan ASN	jumlah laporan keuangan	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	77,90 69	12 bulan	1 Laporan	721,610,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks kepuasan masyarakat Nilai AKIP	77,90 69	740,000,000,000
1	01	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Indeks kepuasan masyarakat Nilai AKIP	Jumlah periode pembayaran honorarium penatausahaan dan penguji/ verifikasi keuangan SKPD	jumlah laporan keuangan	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	77,90 69	12 bulan	1 Laporan	430,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks kepuasan masyarakat Nilai AKIP	77,90 69	435,000,000
1	01	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Indeks kepuasan masyarakat Nilai AKIP	Jumlah kegiatan koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	jumlah laporan keuangan	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	77,90 69	1 kegiatan	1 Laporan	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks kepuasan masyarakat Nilai AKIP	77,90 69	100,000,000
1	01	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Indeks kepuasan masyarakat Nilai AKIP	Jumlah dokumen penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	jumlah laporan keuangan	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77,90 69	1 dokumen	1 Laporan	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks kepuasan masyarakat Nilai AKIP	77,90 69	50,000,000
1	01	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Indeks kepuasan masyarakat Nilai AKIP	Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan	jumlah laporan keuangan	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	77,90 69	1 dokumen	1 Laporan	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks kepuasan masyarakat Nilai AKIP	77,90 69	50,000,000
1	01	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Indeks kepuasan masyarakat Nilai AKIP	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulan/	jumlah laporan keuangan	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77,90 69	18 Dokumen	1 Laporan	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks kepuasan masyarakat Nilai AKIP	77,90 69	50,000,000
1	**01**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**810,000,000**					**725,000,000**
1	01	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Nilai AKIP	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan BMD SKPD	Jumlah Laporan Aset	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	69	1 Dokumen	1 laporan	80,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai AKIP	69	90,000,000

1	01	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai AKIP	Jumlah Dokumen Hasil Realisasi BMD	Jumlah Laporan Aset	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	69	1 Dokumen	1 laporan	495,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai AKIP	69	395,000,000
1	01	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai AKIP	Jumlah Dokumen penatausahaan barang milik daerah	Jumlah Laporan Aset	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	69	9 Dokumen	1 laporan	235,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai AKIP	69	240,000,000
1	**01**	**01**	**1.04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**								**125,000,000**					**125,000,000**
1	01	01	1.04	01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Nilai AKIP	Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan retribusi daerah	Jumlah laporan pendapatan SKPD		69	1 dokumen	1 laporan	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai AKIP	69	50,000,000
1	01	01	1.04	04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Nilai AKIP	Jumlah dokumen pendataan dan pendaftaran objek retribusi daerah	Jumlah laporan pendapatan SKPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	69	1 dokumen	1 laporan	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai AKIP	69	50,000,000
1	01	01	1.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Nilai AKIP	Jumlah dokumen laporan pengelolaan retribusi daerah	Jumlah laporan pendapatan SKPD	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	69	1 Dokumen	1 laporan	25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai AKIP	69	25,000,000
1	**01**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**920,000,000**					**920,000,000**
1	01	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Indeks kepuasan masyarakat Nilai AKIP	Jumlah paket pengadaan sarana dan prasarana disiplin pegawai	persentase adminstrasi kepegawaian yang terpenuhi	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77,90 69	1 paket	100 persen	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks kepuasan masyarakat Nilai AKIP	77,90 69	100,000,000
1	01	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Indeks kepuasan masyarakat Nilai AKIP	Jumlah paket pengadaan pakaian dinas	persentase adminstrasi kepegawaian yang terpenuhi	Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kelurahan	77,90 69	1 paket	100 persen	175,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks kepuasan masyarakat Nilai AKIP	77,90 69	175,000,000
1	01	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Indeks kepuasan masyarakat Nilai AKIP	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	persentase adminstrasi kepegawaian yang terpenuhi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77,90 69	1 Dokumen	100 persen	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks kepuasan masyarakat Nilai AKIP	77,90 69	100,000,000
1	01	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Indeks kepuasan masyarakat Nilai AKIP	Jumlah kegiatan koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	persentase adminstrasi kepegawaian yang terpenuhi	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	77,90 69	1 kegiatan	100 persen	195,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks kepuasan masyarakat Nilai AKIP	77,90 69	195,000,000
1	01	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Indeks kepuasan masyarakat Nilai AKIP	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawi	persentase adminstrasi kepegawaian yang terpenuhi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77,90 69	1 Dokumen	100 persen	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks kepuasan masyarakat Nilai AKIP	77,90 69	100,000,000
1	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Indeks kepuasan masyarakat Nilai AKIP	Jumlah pegawai mengikuti diklat berdasarkan tugas dan fungsi	persentase adminstrasi kepegawaian yang terpenuhi	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	77,90 69	10 pegawai	100 persen	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks kepuasan masyarakat Nilai AKIP	77,90 69	100,000,000
1	01	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Indeks kepuasan masyarakat Nilai AKIP	Jumlah kegiatan sosialisasi perundang-undangan	persentase adminstrasi kepegawaian yang terpenuhi	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	77,90 69	1 kegiatan	100 persen	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks kepuasan masyarakat Nilai AKIP	77,90 69	150,000,000
1	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**2,778,600,000**					**2,868,600,000**
1	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indeks kepuasan masyarakat	Jumlah paket pengadaan sarpras dinas pendidikan	Persentase administrasi umum yang terpenuhi	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	77,90	1 Paket	100 persen	139,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks kepuasan masyarakat	77,90	149,000,000
1	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks kepuasan masyarakat	Jumlah Paket pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Persentase administrasi umum yang terpenuhi	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	77,90	2 Paket	100 persen	175,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks kepuasan masyarakat	77,90	180,000,000
1	01	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Indeks kepuasan masyarakat	Jumlah paket pengadaan peralatan rumah tangga kantor	Persentase administrasi umum yang terpenuhi	Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kelurahan	77,90	1 Paket	100 persen	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks kepuasan masyarakat	77,90	20,000,000
1	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indeks kepuasan masyarakat	Jumlah periode tersedianya makan minum rapat	Persentase administrasi umum yang terpenuhi	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	77,90	12 bulan	100 persen	360,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks kepuasan masyarakat	77,90	370,000,000
1	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Indeks kepuasan masyarakat	Jumlah paket pengadaan barang cetakan dan penggandaan	Persentase administrasi umum yang terpenuhi	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	77,90	2 Paket	100 persen	589,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks kepuasan masyarakat	77,90	594,600,000
1	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Indeks kepuasan masyarakat	Jumlah paket pengadaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Persentase administrasi umum yang terpenuhi	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	77,90	1 paket	100 persen	15,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks kepuasan masyarakat	77,90	15,000,000
1	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Indeks kepuasan masyarakat	Jumlah paket pengadaan alat tulis kantor	Persentase administrasi umum yang terpenuhi	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	77,90	1 paket	100 persen	570,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks kepuasan masyarakat	77,90	570,000,000
1	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks kepuasan masyarakat	Jumlah periode terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi	Persentase administrasi umum yang terpenuhi	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77,90	12 bulan	100 persen	750,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks kepuasan masyarakat	77,90	800,000,000
1	01	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Indeks kepuasan masyarakat	Jumlah kegiatan penatausahaan arsip dinamis SKPD	Persentase administrasi umum yang terpenuhi	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	77,90	1 kegiatan	100 persen	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks kepuasan masyarakat	77,90	100,000,000

1	01	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Indeks kepuasan masyarakat	Jumlah paket pengadaan sistem pemerintahan berbasis elektronik	Persentase administrasi umum yang terpenuhi	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	77,90	1 paket	100 persen	60,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks kepuasan masyarakat	77,90	70,000,000
1	**01**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**1,125,000,000**					**425,000,000**
1	01	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0 Indeks kepuasan masyarakat Nilai AKIP Nilai SAKIP persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Jumlah unit pengadaan kendaraan dinas	Persentase pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhiang urusan pemerintah daerah	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	77,90 77,90 69 70 persen 100	6 unit	100 persen	700,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Indeks kepuasan masyarakat Nilai AKIP Nilai SAKIP persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	77,90 77,90 69 70 persen 100	0
1	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0 Indeks kepuasan masyarakat Nilai AKIP Nilai SAKIP persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Jumlah paket pengadaan peralatan dan mesin kantor	Persentase pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhiang urusan pemerintah daerah	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	77,90 77,90 69 70 persen 100	1 paket	100 persen	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Indeks kepuasan masyarakat Nilai AKIP Nilai SAKIP persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	77,90 77,90 69 70 persen 100	200,000,000
1	01	01	1.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	0 Indeks kepuasan masyarakat Nilai AKIP Nilai SAKIP persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Jumlah paket pengadaan aset tetap lainnya	Persentase pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhiang urusan pemerintah daerah	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	77,90 77,90 69 70 persen 100	1 paket	100 persen	25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Indeks kepuasan masyarakat Nilai AKIP Nilai SAKIP persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	77,90 77,90 69 70 persen 100	25,000,000
1	01	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0 Indeks kepuasan masyarakat Nilai AKIP Nilai SAKIP persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Jumlah paket pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Persentase pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhiang urusan pemerintah daerah	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	77,90 77,90 69 70 persen 100	1 paket	100 persen	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Indeks kepuasan masyarakat Nilai AKIP Nilai SAKIP persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	77,90 77,90 69 70 persen 100	200,000,000
1	**01**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**2,885,000,000**					**3,000,000,000**
1	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	indeks kepuasan masyarakat Nilai AKIP	Jumlah periode tersedianya jasa surat menyurat	persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	77,90 69	12 bulan	100 persen	15,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		indeks kepuasan masyarakat Nilai AKIP	77,90 69	20,000,000
1	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	indeks kepuasan masyarakat Nilai AKIP	Jumlah periode tersedianya air, laistrik kantor dan jaringan komunikasi	persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	77,90 69	12 bulan	100 persen	1,900,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		indeks kepuasan masyarakat Nilai AKIP	77,90 69	2,000,000,000
1	01	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	indeks kepuasan masyarakat Nilai AKIP	Jumlah paket tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	77,90 69	1 paket	100 persen	60,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		indeks kepuasan masyarakat Nilai AKIP	77,90 69	70,000,000
1	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	indeks kepuasan masyarakat Nilai AKIP	Jumlah periode pembayaran honorarium penanggung jawab pengelola keuangan	persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	77,90 69	12 bulan	100 persen	910,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		indeks kepuasan masyarakat Nilai AKIP	77,90 69	910,000,000
1	**01**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**1,130,000,000**					**1,135,000,000**
1	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indeks kepuasan masyarakat Nilai AKIP	Jumlah periode pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas	persentase pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	77,90 69	12 bulan	100 persen	250,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks kepuasan masyarakat Nilai AKIP	77,90 69	250,000,000
1	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indeks kepuasan masyarakat Nilai AKIP	Jumlah kendaraan dinas oprasional atau lapangan	persentase pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	77,90 69	12 bulan	100 persen	450,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks kepuasan masyarakat Nilai AKIP	77,90 69	450,000,000

1	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks kepuasan masyarakat Nilai AKIP	Jumlah paket pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	persentase pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	77,90 69	1 paket	100 persen	30,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks kepuasan masyarakat Nilai AKIP	77,90 69	35,000,000
1	01	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indeks kepuasan masyarakat Nilai AKIP	Jumlah paket pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan	persentase pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	77,90 69	2 paket	100 persen	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks kepuasan masyarakat Nilai AKIP	77,90 69	200,000,000
1	01	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indeks kepuasan masyarakat Nilai AKIP	Jumlah paket pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan	persentase pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	77,90 69	2 paket	100 persen	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks kepuasan masyarakat Nilai AKIP	77,90 69	200,000,000
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**								**1,106,798,951,150**					**1,271,685,391,150**
1	**01**	**02**	**1.01**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**								**442,993,488,805**					**446,764,318,805**
1	01	02	1.01	01	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	Jumlah pembangunan Unit Sekolah Baru	Persentase Pengelolaan Satuan Pendidikan SMA yang terpenuhi	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Muaro Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22	3 Unit	100%	5,000,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi	22	3,000,000,000
1	01	02	1.01	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	Jumlah penambahan Ruang Kelas Baru	Persentase Pengelolaan Satuan Pendidikan SMA yang terpenuhi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22	20 Ruang	100%	4,000,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	22	4,000,000,000
1	01	02	1.01	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	Jumlah pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Persentase Pengelolaan Satuan Pendidikan SMA yang terpenuhi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22	15 Ruang	100%	6,000,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	22	6,000,000,000
1	01	02	1.01	04	Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi	Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	Jumlah pembangunan Laboratorium Biologi	Persentase Pengelolaan Satuan Pendidikan SMA yang terpenuhi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22	15 Ruang	100%	5,250,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	22	5,250,000,000
1	01	02	1.01	05	Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika	Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	Jumlah pembangunan Ruang Laboratorium Fisika	Persentase Pengelolaan Satuan Pendidikan SMA yang terpenuhi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22	15 Ruang	100%	5,250,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	22	5,250,000,000
1	01	02	1.01	06	Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia	Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	Jumlah pembangunan ruang Laboratorium Kimia	Persentase Pengelolaan Satuan Pendidikan SMA yang terpenuhi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22	15 Ruang	100%	5,250,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	22	5,250,000,000
1	01	02	1.01	07	Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	Jumlah pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	Persentase Pengelolaan Satuan Pendidikan SMA yang terpenuhi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22	20 Ruang	100%	4,000,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	22	4,000,000,000
1	01	02	1.01	08	Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa	Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	Jumlah pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa	Persentase Pengelolaan Satuan Pendidikan SMA yang terpenuhi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22	15 Ruang	100%	3,000,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	22	3,000,000,000
1	01	02	1.01	09	Pembangunan Ruang Laboratorium IPA	Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	Jumlah pembangunan Ruang Laboratorium IPA	Persentase Pengelolaan Satuan Pendidikan SMA yang terpenuhi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22	15 Ruang	100%	3,600,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	22	3,600,000,000

1	01	02	1.01	10	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	Jumlah pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Persentase Pengelolaan Satuan Pendidikan SMA yang terpenuhi	Kab. Batanghari, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bungo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Merangin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Muaro Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Sungai Penuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22	10 Ruang	100%	2,000,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	22	2,000,000,000
1	01	02	1.01	11	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	Jumlah Pembangunan Ruang Perpustakaan Sekolah	Persentase Pengelolaan Satuan Pendidikan SMA yang terpenuhi	Kab. Batanghari, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bungo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Merangin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Muaro Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tanjung Jabung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22	10 Ruang	100%	2,000,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	22	2,000,000,000
1	01	02	1.01	12	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	Jumlah Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Persentase Pengelolaan Satuan Pendidikan SMA yang terpenuhi	Kab. Bungo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Merangin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Sungai Penuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22	5 Ruang	100%	2,500,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	22	2,500,000,000
1	01	02	1.01	13	Pembangunan Asrama Sekolah	Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	Jumlah pembangunan Ruang Asrama Sekolah	Persentase Pengelolaan Satuan Pendidikan SMA yang terpenuhi	Kab. Bungo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Muaro Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22	6 Ruang	100%	1,200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi	22	1,200,000,000
1	01	02	1.01	14	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	Jumlah Paket pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Persentase Pengelolaan Satuan Pendidikan SMA yang terpenuhi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22	20 Paket	100%	5,000,000,000			Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	22	5,000,000,000

1	01	02	1.01	15	Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	Jumlah Paket Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase Pengelolaan Satuan Pendidikan SMA yang terpenuhi	Kab. Bungo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Merangin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Muaro Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tanjung Jabung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Sungai Penuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22	10 Paket	100%	1,000,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	22	1,000,000,000
1	01	02	1.01	16	Pembangunan Kantin Sekolah	Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	Jumlah pembangunan unit Kantin Sekolah	Persentase Pengelolaan Satuan Pendidikan SMA yang terpenuhi	Kab. Batanghari, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bungo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Merangin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Muaro Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22	6 Unit	100%	600,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	22	600,000,000
1	01	02	1.01	17	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	Jumlah pembangunan unit Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Persentase Pengelolaan Satuan Pendidikan SMA yang terpenuhi	Kab. Batanghari, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bungo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Merangin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Muaro Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tanjung Jabung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Sungai Penuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22	10 Unit	100%	2,000,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	22	2,000,000,000
1	01	02	1.01	19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (Numerasi) memenuhi	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang direhabilitasi sedang/berat	Persentase Pengelolaan Satuan Pendidikan SMA yang terpenuhi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22	50 Ruang	100%	6,500,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (Numerasi)	22	6,500,000,000
1	01	02	1.01	20	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang direhabilitasi sedang/berat	Persentase Pengelolaan Satuan Pendidikan SMA yang terpenuhi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22	15 Ruang	100%	2,400,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	22	2,400,000,000

1	01	02	1.01	21	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi	Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	Jumlah Ruang Laboratorium Biologi yang direhabilitasi sedang/berat	Persentase Pengelolaan Satuan Pendidikan SMA yang terpenuhi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22	15 Ruang	100%	2,400,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	22	2,400,000,000
1	01	02	1.01	22	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika	Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	Jumlah Ruang Laboratorium Fisika yang direhabilitasi sedang/berat	Persentase Pengelolaan Satuan Pendidikan SMA yang terpenuhi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22	15 Ruang	100%	2,400,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	22	2,400,000,000
1	01	02	1.01	23	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia	Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	Jumlah Ruang Laboratorium Kimia yang direhabilitasi sedang/berat	Persentase Pengelolaan Satuan Pendidikan SMA yang terpenuhi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22	15 Ruang	100%	2,400,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	22	2,400,000,000
1	01	02	1.01	24	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer	Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	Jumlah Ruang Ruang Laboratorium Komputer yang direhabilitasi sedang/berat	Persentase Pengelolaan Satuan Pendidikan SMA yang terpenuhi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22	20 Ruang	100%	2,175,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	22	2,175,000,000
1	01	02	1.01	25	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa	Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	Jumlah Ruang Laboratorium Bahasa yang direhabilitasi sedang/berat	Persentase Pengelolaan Satuan Pendidikan SMA yang terpenuhi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22	15 Ruang	100%	2,400,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	22	2,400,000,000
1	01	02	1.01	26	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium IPA	Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	Jumlah Ruang Laboratorium IPA yang di rehabilitasi sedang/berat	Persentase Pengelolaan Satuan Pendidikan SMA yang terpenuhi	Kab. Batanghari, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bungo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Merangin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tanjung Jabung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Sungai Penuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22	8 Ruang	100%	1,165,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	22	1,165,000,000
1	01	02	1.01	27	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang direhabilitasi sedang/berat	Persentase Pengelolaan Satuan Pendidikan SMA yang terpenuhi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22	15 Ruang	100%	2,400,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	22	2,400,000,000
1	01	02	1.01	28	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	Jumlah Ruang Perpustakaan Sekolah yang direhabilitasi sedang/berat	Persentase Pengelolaan Satuan Pendidikan SMA yang terpenuhi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22	15 Ruang	100%	2,400,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	22	2,400,000,000

1	01	02	1.01	29	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang direhabilitasi sedang/berat	Persentase Pengelolaan Satuan Pendidikan SMA yang terpenuhi	Kab. Batanghari, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Merangin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Muaro Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tanjung Jabung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22	6 Ruang	100%	990,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	22	990,000,000
1	01	02	1.01	30	Rehabilitasi Asrama Sekolah	Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	Jumlah ruang Asrama Sekolah yang direhabilitasi	Persentase Pengelolaan Satuan Pendidikan SMA yang terpenuhi	Kab. Bungo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Muaro Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22	4 Ruang	100%	580,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi	22	580,000,000
1	01	02	1.01	31	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	Jumlah paket Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang direhabilitasi	Persentase Pengelolaan Satuan Pendidikan SMA yang terpenuhi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22	20 paket	100%	3,000,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	22	3,000,000,000
1	01	02	1.01	32	Rehabilitasi Fasilitas Parkir	Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	Jumlah Unit Rehab Fasilitas Parkir yang direhabilitasi	Persentase Pengelolaan Satuan Pendidikan SMA yang terpenuhi	Kab. Bungo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Merangin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Muaro Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Sungai Penuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22	5 Unit	100%	250,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	22	250,000,000
1	01	02	1.01	33	Rehabilitasi Kantin Sekolah	Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	Jumlah Unit Kantin Sekolah yang direhabilitasi	Persentase Pengelolaan Satuan Pendidikan SMA yang terpenuhi	Kab. Batanghari, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Merangin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Sungai Penuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22	5 Unit	100%	650,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	22	650,000,000
1	01	02	1.01	34	Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	Jumlah Unit Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang direhabilitasi	Persentase Pengelolaan Satuan Pendidikan SMA yang terpenuhi	Kab. Batanghari, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bungo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Merangin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Muaro Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tanjung Jabung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22	10 Unit	100%	1,450,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	22	1,450,000,000

1	01	02	1.01	36	Pengadaan Mebel Sekolah	Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	Jumlah Paket pengadaan Mebel Sekolah	Persentase Pengelolaan Satuan Pendidikan SMA yang terpenuhi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22	80 Paket	100%	2,400,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	22	2,400,000,000
1	01	02	1.01	37	Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	Jumlah Paket pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Persentase Pengelolaan Satuan Pendidikan SMA yang terpenuhi	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22	5 Unit	100%	500,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	22	500,000,000
1	01	02	1.01	38	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	Jumlah Paket pengadaan Perlengkapan Sekolah	Persentase Pengelolaan Satuan Pendidikan SMA yang terpenuhi	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22	5 Paket	100%	500,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	22	500,000,000
1	01	02	1.01	39	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	Jumlah Paket pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Persentase Pengelolaan Satuan Pendidikan SMA yang terpenuhi	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22	5 Paket	100%	500,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	22	500,000,000
1	01	02	1.01	40	Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah	Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	Jumlah Paket pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah	Persentase Pengelolaan Satuan Pendidikan SMA yang terpenuhi	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22	5 Paket	100%	500,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	22	500,000,000
1	01	02	1.01	41	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	Jumlah Paket pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Persentase Pengelolaan Satuan Pendidikan SMA yang terpenuhi	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22	5 Paket	100%	500,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	22	500,000,000
1	01	02	1.01	42	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah	Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	Jumlah Bangunan gedung dan Ruang Sekolah yang Terpelihara Secara Rutin	Persentase Pengelolaan Satuan Pendidikan SMA yang terpenuhi	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22	2 Ruang	100%	600,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	22	600,000,000
1	01	02	1.01	43	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	Jumlah Paket Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang terpelihara	Persentase Pengelolaan Satuan Pendidikan SMA yang terpenuhi	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22	3 Paket	100%	600,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	22	600,000,000
1	01	02	1.01	44	Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	Jumlah unit Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang terpelihara	Persentase Pengelolaan Satuan Pendidikan SMA yang terpenuhi	Kab. Merangin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22	2 Unit	100%	600,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	22	600,000,000
1	01	02	1.01	45	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	Jumlah periode penyediaan biaya personil peserta didik sekolah berasrama jumlah siswa SMA penerima beasiswa	Persentase Pengelolaan Satuan Pendidikan SMA yang terpenuhi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22	12 Bulan 1100 siswa	100%	9,750,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	22	10,000,000,000
1	01	02	1.01	46	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum		Persentase Pengelolaan Satuan Pendidikan SMA yang terpenuhi		22		100%	0			Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	22	0

1	01	02	1.01	47	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan proses belajar dan ujian bagi peserta didik	Persentase Pengelolaan Satuan Pendidikan SMA yang terpenuhi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22	234 SMA	100%	2,300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	22	2,300,000,000
1	01	02	1.01	48	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	Jumlah Satuan Pedididkan Menengah Atas yang menyiapkan Dokumen Tindak Lanjut Evaluasi	Persentase Pengelolaan Satuan Pendidikan SMA yang terpenuhi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22	235 Sekolah	100%	1,000,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	22	1,000,000,000
1	01	02	1.01	49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	Jumlah Event Pendidikan Menengah Atas yang dilaksanakan	Persentase Pengelolaan Satuan Pendidikan SMA yang terpenuhi	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22	9 Event	100%	5,945,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	22	7,095,000,000
1	01	02	1.01	50	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	Jumlah satuan pendidikan yang terpenuhinya pendidik dan tenaga kependidikan	Persentase Pengelolaan Satuan Pendidikan SMA yang terpenuhi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22	235 sekolah	100%	25,000,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	22	25,000,000,000
1	01	02	1.01	51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	Jumlah Satuan Pendidikan yang mengikuti Kegiatan Dokumen Rencana Proses Pembelajaran (RPP), angka kredit guru, kompetensi guru per mata pelajaran, perlindungan profesi guru, guru penggerak dan SMA penggerak	Persentase Pengelolaan Satuan Pendidikan SMA yang terpenuhi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22	235 Sekolah	100%	41,845,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	22	43,139,460,000
1	01	02	1.01	52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	Jumlah satuan pendidikan SMA yang terbina kelembagaan dan manajemen sekolah menagah atas	Persentase Pengelolaan Satuan Pendidikan SMA yang terpenuhi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22	235 sekolah	100%	819,858,805	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	22	819,858,805
1	01	02	1.01	53	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	Jumlah satuan pendidikan SMA penerima dana BOS	Persentase Pengelolaan Satuan Pendidikan SMA yang terpenuhi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22	235 sekolah	100%	256,923,630,000	Dana Transfer Khusus Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	22	260,000,000,000
1	01	02	1.01	54	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	Jumlah SMA penerima dana BOS di dibina	Persentase Pengelolaan Satuan Pendidikan SMA yang terpenuhi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22	235 Satuan Pendidikan	100%	1,500,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	22	1,500,000,000
1	**01**	**02**	**1.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**								**616,756,020,000**					**786,790,000,000**
1	01	02	1.02	01	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (literasi) memenuhi kompetensi minimum	Jumlah Pembangunan Unit Sekolah Baru	persentase pengelolaan satuan pendidikan SMK yang terpenuhi	Kab. Merangin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	52	2 Unit	100%	5,000,000,000	Dana Insentif Daerah		Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (literasi) memenuhi kompetensi	52	10,000,000,000
1	01	02	1.02	02	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (literasi) memenuhi kompetensi minimum	Jumlah pembangunan Ruang Kelas Baru	persentase pengelolaan satuan pendidikan SMK yang terpenuhi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	52	22 Ruang	100%	6,600,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (literasi) memenuhi kompetensi minimum	52	13,200,000,000

1	01	02	1.02	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (literasi) memenuhi kompetensi minimum	Jumlah Pembangunan Ruang Guru/ Kepala Sekolah/ TU	persentase pengelolaan satuan pendidikan SMK yang terpenuhi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	52	10 Ruang	100%	3,500,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (literasi) memenuhi kompetensi minimum	52	7,000,000,000
1	01	02	1.02	04	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (literasi) memenuhi kompetensi minimum	Jumlah Pembangunan Ruang Praktik Siswa	persentase pengelolaan satuan pendidikan SMK yang terpenuhi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	52	19 Ruang	100%	22,800,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (literasi) memenuhi kompetensi minimum	52	45,600,000,000
1	01	02	1.02	05	Pembangunan Ruang Laboratorium	Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (literasi) memenuhi kompetensi minimum	Jumlah Pembangunan Ruang Laboratorium	persentase pengelolaan satuan pendidikan SMK yang terpenuhi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	52	13 Ruang	100%	5,200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (literasi) memenuhi kompetensi minimum	52	10,400,000,000
1	01	02	1.02	06	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (literasi) memenuhi kompetensi minimum	Jumlah Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	persentase pengelolaan satuan pendidikan SMK yang terpenuhi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	52	16 Ruang	100%	2,400,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (literasi) memenuhi kompetensi minimum	52	4,800,000,000
1	01	02	1.02	07	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (literasi) memenuhi kompetensi minimum	Jumlah Pembangunan Ruang Perpustakaan Sekolah	persentase pengelolaan satuan pendidikan SMK yang terpenuhi	Kab. Batanghari, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Muaro Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	52	4 Ruang	100%	1,500,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (literasi) memenuhi kompetensi minimum	52	2,625,000,000
1	01	02	1.02	08	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (literasi) memenuhi kompetensi minimum	Jumlah Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	persentase pengelolaan satuan pendidikan SMK yang terpenuhi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	52	10 Ruang	100%	7,500,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (literasi) memenuhi kompetensi minimum	52	15,000,000,000
1	01	02	1.02	09	Pembangunan Asrama Sekolah	Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (literasi) memenuhi kompetensi minimum	Jumlah Pembangunan Ruang Asrama Sekolah	persentase pengelolaan satuan pendidikan SMK yang terpenuhi	Kab. Batanghari, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	52	6 Ruang	100%	3,900,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (literasi) memenuhi kompetensi minimum	52	7,800,000,000
1	01	02	1.02	10	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (literasi) memenuhi kompetensi minimum	Jumlah Paket pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	persentase pengelolaan satuan pendidikan SMK yang terpenuhi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	52	10 Paket	100%	7,000,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (literasi) memenuhi kompetensi minimum	52	14,000,000,000
1	01	02	1.02	11	Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (literasi) memenuhi kompetensi minimum	Jumlah Paket pembangunan Fasilitas Parkir	persentase pengelolaan satuan pendidikan SMK yang terpenuhi	Kab. Batanghari, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Muaro Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	52	3 Paket	100%	825,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (literasi) memenuhi kompetensi minimum	52	1,650,000,000
1	01	02	1.02	12	Pembangunan Kantin Sekolah	Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (literasi) memenuhi kompetensi minimum	Jumlah Paket Pembangunan Kantin Sekolah	persentase pengelolaan satuan pendidikan SMK yang terpenuhi	Kab. Batanghari, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Muaro Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	52	5 Paket	100%	1,500,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (literasi) memenuhi kompetensi minimum	52	3,000,000,000
1	01	02	1.02	13	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (literasi) memenuhi kompetensi minimum	Jumlah Paket Pembangunan Unit Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	persentase pengelolaan satuan pendidikan SMK yang terpenuhi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	52	19 Paket	100%	6,650,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (literasi) memenuhi kompetensi minimum	52	12,950,000,000
1	01	02	1.02	14	Pembangunan Ruang/Sudut Baca	Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (literasi) memenuhi kompetensi minimum	Jumlah Paket Pemabngunan Ruang/ Sudut	persentase pengelolaan satuan pendidikan SMK yang terpenuhi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	52	16 Paket	100%	1,200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (literasi) memenuhi kompetensi minimum	52	2,400,000,000

1	01	02	1.02	15	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (literasi) memenuhi kompetensi minimum	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang direhabilitasi	persentase pengelolaan satuan pendidikan SMK yang terpenuhi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	52	168 Ruang	100%	25,200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (literasi) memenuhi kompetensi minimum	52	50,400,000,000
1	01	02	1.02	16	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (literasi) memenuhi kompetensi minimum	Jumlah Ruang Ruang Guru/ Kepala Sekolah/ TU yang direhabilitasi	persentase pengelolaan satuan pendidikan SMK yang terpenuhi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	52	18 Ruang	100%	2,250,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (literasi) memenuhi kompetensi minimum	52	4,500,000,000
1	01	02	1.02	17	Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa	Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (literasi) memenuhi kompetensi minimum	Jumlah Ruang Praktik Siswa yang direhabilitasi	persentase pengelolaan satuan pendidikan SMK yang terpenuhi	Kab. Batanghari, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Muaro Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	52	5 Ruang	100%	1,000,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (literasi) memenuhi kompetensi minimum	52	2,000,000,000
1	01	02	1.02	18	Rehabilitasi Ruang Laboratorium	Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (literasi) memenuhi kompetensi minimum	Jumlah Ruang Laboratorium yang direhabilitasi	persentase pengelolaan satuan pendidikan SMK yang terpenuhi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	52	11 Ruang	100%	2,035,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (literasi) memenuhi kompetensi minimum	52	4,070,000,000
1	01	02	1.02	19	Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (literasi) memenuhi kompetensi minimum	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang direhabilitasi	persentase pengelolaan satuan pendidikan SMK yang terpenuhi	Kab. Batanghari, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Muaro Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	52	5 Ruang	100%	250,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (literasi) memenuhi kompetensi minimum	52	500,000,000
1	01	02	1.02	20	Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah	Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (literasi) memenuhi kompetensi minimum	Jumlah Ruang Perpustakaan Sekolah yang direhabilitasi	persentase pengelolaan satuan pendidikan SMK yang terpenuhi	Kab. Batanghari, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Muaro Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	52	3 Ruang	100%	450,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (literasi) memenuhi kompetensi minimum	52	900,000,000
1	01	02	1.02	21	Rehabilitasi Ruang Serba Guna/Aula	Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (literasi) memenuhi kompetensi minimum	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang direhabilitasi	persentase pengelolaan satuan pendidikan SMK yang terpenuhi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	52	12 Ruang	100%	1,800,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (literasi) memenuhi kompetensi minimum	52	3,600,000,000
1	01	02	1.02	22	Rehabilitasi Asrama Sekolah	Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (literasi) memenuhi kompetensi minimum	Jumlah Paket rehabilitasi asrama Sekolah	persentase pengelolaan satuan pendidikan SMK yang terpenuhi	Kab. Muaro Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	52	1 Paket	100%	700,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (literasi) memenuhi kompetensi minimum	52	1,400,000,000
1	01	02	1.02	23	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (literasi) memenuhi kompetensi minimum	Jumlah Paket Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	persentase pengelolaan satuan pendidikan SMK yang terpenuhi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	52	18 Paket	100%	6,300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (literasi) memenuhi kompetensi minimum	52	12,600,000,000
1	01	02	1.02	24	Rehabilitasi Fasilitas Parkir	Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (literasi) memenuhi kompetensi minimum	Jumlah unit Fasilitas Parkir yang direhabilitasi	persentase pengelolaan satuan pendidikan SMK yang terpenuhi	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	52	2 unit	100%	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (literasi) memenuhi kompetensi minimum	52	300,000,000
1	01	02	1.02	25	Rehabilitasi Kantin Sekolah	Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (literasi) memenuhi kompetensi minimum	Jumlah unit Kantin Sekolah yang direhabilitasi	persentase pengelolaan satuan pendidikan SMK yang terpenuhi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	52	18 unit	100%	2,700,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (literasi) memenuhi kompetensi minimum	52	5,400,000,000
1	01	02	1.02	26	Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (literasi) memenuhi kompetensi minimum	Jumlah Paket Rehab Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	persentase pengelolaan satuan pendidikan SMK yang terpenuhi	Kab. Batanghari, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Muaro Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	52	3 Paket	100%	450,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (literasi) memenuhi kompetensi minimum	52	900,000,000

1	01	02	1.02	28	Pengadaan Mebel Sekolah	Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (literasi) memenuhi kompetensi minimum	Jumlah Paket pengadaan Mebel Sekolah	persentase pengelolaan satuan pendidikan SMK yang terpenuhi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	52	24 Paket	100%	1,200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (literasi) memenuhi kompetensi minimum	52	2,400,000,000
1	01	02	1.02	29	Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (literasi) memenuhi kompetensi minimum	Jumlah Paket pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	persentase pengelolaan satuan pendidikan SMK yang terpenuhi	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	52	1 Paket	100%	500,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (literasi) memenuhi kompetensi minimum	52	1,000,000,000
1	01	02	1.02	30	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (literasi) memenuhi kompetensi minimum	Jumlah Paket Pengadaan Perlengkapan Sekolah	persentase pengelolaan satuan pendidikan SMK yang terpenuhi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	52	10 Paket	100%	2,000,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (literasi) memenuhi kompetensi minimum	52	4,000,000,000
1	01	02	1.02	33	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (literasi) memenuhi kompetensi minimum	Jumlah Paket pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	persentase pengelolaan satuan pendidikan SMK yang terpenuhi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	52	15 Paket	100%	30,000,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (literasi) memenuhi kompetensi minimum	52	60,000,000,000
1	01	02	1.02	37	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (literasi) memenuhi kompetensi minimum	Jumlah periode Pembiayaan Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan jumlah siswa penerima beasiswa	persentase pengelolaan satuan pendidikan SMK yang terpenuhi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	52	12 Bulan 550 siswa	100%	8,750,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (literasi) memenuhi kompetensi minimum	52	12,450,000,000
1	01	02	1.02	39	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (literasi) memenuhi kompetensi minimum	Jumlah Satuan pendidikan yang menyelenggarakan proses belajar dan ujian bagi peserta didik	persentase pengelolaan satuan pendidikan SMK yang terpenuhi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	52	180 Sekolah	100%	500,000,000			Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (literasi) memenuhi kompetensi minimum	52	1,350,000,000
1	01	02	1.02	40	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (literasi) memenuhi kompetensi minimum	Jumlah Satuan Pendidik Menyiapkan Tindak lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	persentase pengelolaan satuan pendidikan SMK yang terpenuhi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	52	75 SMK	100%	300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (literasi) memenuhi kompetensi minimum	52	780,000,000
1	01	02	1.02	41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (literasi) memenuhi kompetensi minimum	Jumlah Even Pendidikan Menengah Kejuruan	persentase pengelolaan satuan pendidikan SMK yang terpenuhi	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	52	3 Event	100%	6,000,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (literasi) memenuhi kompetensi minimum	52	12,000,000,000
1	01	02	1.02	42	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (literasi) memenuhi kompetensi minimum	Jumlah satuan pendidikan SMK terpenuhinya Pendidik dan Tenaga Kependidikan	persentase pengelolaan satuan pendidikan SMK yang terpenuhi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	52	75 Sekolah	100%	500,000,000			Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (literasi) memenuhi kompetensi minimum	52	1,100,000,000
1	01	02	1.02	43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (literasi) memenuhi kompetensi minimum	Jumlah Peserta yang diikuti dalam Kegiatan Peningkatan Kompetensi GTK pada SMK	persentase pengelolaan satuan pendidikan SMK yang terpenuhi		52	1000 Peserta	100%	15,565,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (literasi) memenuhi kompetensi minimum	52	17,065,000,000
1	01	02	1.02	45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (literasi) memenuhi kompetensi minimum	Jumlah peserta manajemen berasis sekolah pada satuan pendidikan	persentase pengelolaan satuan pendidikan SMK yang terpenuhi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	52	180 SMK	100%	850,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (literasi) memenuhi kompetensi minimum	52	1,850,000,000
1	01	02	1.02	46	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (literasi) memenuhi kompetensi minimum	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan Penerima Dana BOS	persentase pengelolaan satuan pendidikan SMK yang terpenuhi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	52	180 SMK	100%	431,431,020,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (literasi) memenuhi kompetensi minimum	52	435,000,000,000
1	01	02	1.02	47	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (literasi) memenuhi kompetensi minimum	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan Penerima Dana BOS yang dibina	persentase pengelolaan satuan pendidikan SMK yang terpenuhi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	52	180 SMK	100%	300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (literasi) memenuhi kompetensi minimum	52	800,000,000

1	**01**	**02**	**1.03**		**Pengelolaan Pendidikan Khusus**								**47,049,442,345**					**38,131,072,345**
1	01	02	1.03	01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	APK SMA/SMK/SLB	Jumlah Pembangunan Unit Sekolah Baru	Persentase Pengelolaan Satuan Pendidikan Khusus yang terpenuhi	Kab. Muaro Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75,64 %	1 USB	100%	2,500,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		APK SMA/SMK/SLB	75,64 %	0
1	01	02	1.03	02	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	APK SMA/SMK/SLB	Jumlah Pembangunan Ruang Kelas Baru	Persentase Pengelolaan Satuan Pendidikan Khusus yang terpenuhi	Kab. Batanghari, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Merangin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75,64 %	7 ruang	100%	1,319,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		APK SMA/SMK/SLB	75,64 %	1,320,000,000
1	01	02	1.03	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	APK SMA/SMK/SLB	Jumlah Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Persentase Pengelolaan Satuan Pendidikan Khusus yang terpenuhi	Kab. Bungo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75,64 %	1 ruang	100%	155,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		APK SMA/SMK/SLB	75,64 %	155,000,000
1	01	02	1.03	05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	APK SMA/SMK/SLB	jumlah pembangunan ruang perpustakaan sekolah	Persentase Pengelolaan Satuan Pendidikan Khusus yang terpenuhi	Kab. Bungo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75,64 %	2 ruang	100%	505,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		APK SMA/SMK/SLB	75,64 %	252,000,000
1	01	02	1.03	06	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	APK SMA/SMK/SLB	Jumlah pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Persentase Pengelolaan Satuan Pendidikan Khusus yang terpenuhi	Kab. Bungo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75,64 %	1 ruang	100%	750,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		APK SMA/SMK/SLB	75,64 %	750,000,000
1	01	02	1.03	07	Pembangunan Asrama Sekolah	APK SMA/SMK/SLB	jumlah pembangunan ruang asrama sekolah	Persentase Pengelolaan Satuan Pendidikan Khusus yang terpenuhi	Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75,64 %	2 ruang	100%	600,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		APK SMA/SMK/SLB	75,64 %	600,000,000
1	01	02	1.03	08	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	APK SMA/SMK/SLB	Jumlah paket pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Persentase Pengelolaan Satuan Pendidikan Khusus yang terpenuhi	Kab. Batanghari, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bungo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Merangin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Muaro Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tanjung Jabung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Sungai Penuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75,64 %	10 paket	100%	1,800,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		APK SMA/SMK/SLB	75,64 %	90,000,000
1	01	02	1.03	11	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	APK SMA/SMK/SLB	Jumlah paket pembangunan Ruang Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Persentase Pengelolaan Satuan Pendidikan Khusus yang terpenuhi	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75,64 %	1 paket	100%	180,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		APK SMA/SMK/SLB	75,64 %	185,000,000

1	01	02	1.03	14	Pembangunan Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)	APK SMA/SMK/SLB	Jumlah paket pembangunan Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)	Persentase Pengelolaan Satuan Pendidikan Khusus yang terpenuhi	Kab. Batanghari, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bungo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Merangin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Muaro Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Sungai Penuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75,64 %	7 paket	100%	1,388,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		APK SMA/SMK/SLB	75,64 %	1,400,000,000
1	01	02	1.03	15	Pembangunan Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)	APK SMA/SMK/SLB	Jumlah paket Pembangunan Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)	Persentase Pengelolaan Satuan Pendidikan Khusus yang terpenuhi	Kab. Bungo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Merangin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Muaro Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tanjung Jabung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75,64 %	7 paket	100%	1,388,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		APK SMA/SMK/SLB	75,64 %	1,388,400,000
1	01	02	1.03	16	Pembangunan Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)	APK SMA/SMK/SLB	Jumlah paket pembangunan Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)	Persentase Pengelolaan Satuan Pendidikan Khusus yang terpenuhi	Kab. Batanghari, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bungo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Merangin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Muaro Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Sungai Penuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75,64 %	7 paket	100%	1,388,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		APK SMA/SMK/SLB	75,64 %	1,388,400,000
1	01	02	1.03	17	Pembangunan Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)	APK SMA/SMK/SLB	Jumlah paket pembangunan Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)	Persentase Pengelolaan Satuan Pendidikan Khusus yang terpenuhi	Kab. Batanghari, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bungo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Muaro Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tanjung Jabung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sungai Penuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75,64 %	7 paket	100%	1,388,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		APK SMA/SMK/SLB	75,64 %	1,388,400,000

1	01	02	1.03	18	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	APK SMA/SMK/SLB	Jumlah ruang kelas sekolah yang direhabilitasi	Persentase Pengelolaan Satuan Pendidikan Khusus yang terpenuhi	Kab. Batanghari, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Muaro Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75,64 %	10 ruang	100%	1,500,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		APK SMA/SMK/SLB	75,64 %	1,550,000,000
1	01	02	1.03	19	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	APK SMA/SMK/SLB	Jumlah ruang guru/ kepala sekoalh/ TU yang direhabilitasi	Persentase Pengelolaan Satuan Pendidikan Khusus yang terpenuhi	Kab. Batanghari, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tanjung Jabung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75,64 %	4 ruang	100%	600,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		APK SMA/SMK/SLB	75,64 %	300,000,000
1	01	02	1.03	21	Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah	APK SMA/SMK/SLB	Jumlah ruang perpustakaan yang direhabilitasi	Persentase Pengelolaan Satuan Pendidikan Khusus yang terpenuhi	Kab. Bungo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75,64 %	2 ruang	100%	300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		APK SMA/SMK/SLB	75,64 %	350,000,000
1	01	02	1.03	23	Rehabilitasi Asrama Sekolah	APK SMA/SMK/SLB	Jumlah ruang asrama sekolah yang direhabilitasi	Persentase Pengelolaan Satuan Pendidikan Khusus yang terpenuhi	Kab. Bungo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75,64 %	2 paket	100%	500,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		APK SMA/SMK/SLB	75,64 %	500,000,000
1	01	02	1.03	24	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	APK SMA/SMK/SLB	Jumlah paket rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Persentase Pengelolaan Satuan Pendidikan Khusus yang terpenuhi	Kab. Batanghari, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bungo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Merangin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Muaro Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tanjung Jabung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Sungai Penuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75,64 %	10 paket	100%	1,500,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		APK SMA/SMK/SLB	75,64 %	1,500,000,000
1	01	02	1.03	27	Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	APK SMA/SMK/SLB	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang direhabilitasi	Persentase Pengelolaan Satuan Pendidikan Khusus yang terpenuhi	Kab. Bungo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75,64 %	3 Ruang	100%	450,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		APK SMA/SMK/SLB	75,64 %	300,000,000
1	01	02	1.03	29	Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	APK SMA/SMK/SLB	Jumlah ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang direhabilitasi	Persentase Pengelolaan Satuan Pendidikan Khusus yang terpenuhi	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75,64 %	1 Ruang	100%	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		APK SMA/SMK/SLB	75,64 %	200,000,000
1	01	02	1.03	35	Pengadaan Mebel Sekolah	APK SMA/SMK/SLB	Jumlah paket pengadaan mebel sekolah	Persentase Pengelolaan Satuan Pendidikan Khusus yang terpenuhi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75,64 %	25 paket	100%	1,250,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		APK SMA/SMK/SLB	75,64 %	1,250,000,000
1	01	02	1.03	36	Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah	APK SMA/SMK/SLB	Jumlah paket pengadaan rumah tangga sekolah	Persentase Pengelolaan Satuan Pendidikan Khusus yang terpenuhi	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75,64 %	1 paket	100%	75,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		APK SMA/SMK/SLB	75,64 %	90,000,000
1	01	02	1.03	37	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	APK SMA/SMK/SLB	Jumlah paket pengadaan perlengkapan sekolah	Persentase Pengelolaan Satuan Pendidikan Khusus yang terpenuhi	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75,64 %	1 paket	100%	5,000,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		APK SMA/SMK/SLB	75,64 %	70,000,000
1	01	02	1.03	40	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	APK SMA/SMK/SLB	Jumlah paket pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Persentase Pengelolaan Satuan Pendidikan Khusus yang terpenuhi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75,64 %	35 paket	100%	6,127,643,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		APK SMA/SMK/SLB	75,64 %	6,127,643,000

1	01	02	1.03	44	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	APK SMA/SMK/SLB	Jumlah periode penyediaan biaya personil peserta didik pendidikan khusus	Persentase Pengelolaan Satuan Pendidikan Khusus yang terpenuhi	Kab. Batanghari, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bungo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Merangin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tanjung Jabung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75,64 %	8 SLB	100%	3,377,805,345	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		APK SMA/SMK/SLB	75,64 %	3,477,805,345
1	01	02	1.03	46	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	APK SMA/SMK/SLB	Jumlah satuan pendidikan khusus yang menyelenggaran proses belajar dan ujian bagi peserta didik	Persentase Pengelolaan Satuan Pendidikan Khusus yang terpenuhi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75,64 %	18 SLB	100%	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		APK SMA/SMK/SLB	75,64 %	50,000,000
1	01	02	1.03	47	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus	APK SMA/SMK/SLB	Jumlah satuan pendidikan khusus yang menyiapkan dokumen tindak lanjut evaluasi	Persentase Pengelolaan Satuan Pendidikan Khusus yang terpenuhi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75,64 %	13 SLB	100%	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		APK SMA/SMK/SLB	75,64 %	200,000,000
1	01	02	1.03	48	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	APK SMA/SMK/SLB	Jumlah event pendidikan khusus	Persentase Pengelolaan Satuan Pendidikan Khusus yang terpenuhi	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75,64 %	5 event	100%	1,627,960,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		APK SMA/SMK/SLB	75,64 %	2,150,060,000
1	01	02	1.03	49	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	APK SMA/SMK/SLB	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang terpenuhi pada satuan pendidikan	Persentase Pengelolaan Satuan Pendidikan Khusus yang terpenuhi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75,64 %	100 PTK	100%	1,650,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		APK SMA/SMK/SLB	75,64 %	1,650,000,000
1	01	02	1.03	50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	APK SMA/SMK/SLB	Jumlah satuan pendidikan khusus yang mengikuti diklat peningkatan kompetensi	Persentase Pengelolaan Satuan Pendidikan Khusus yang terpenuhi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75,64 %	13 SLB	100%	250,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		APK SMA/SMK/SLB	75,64 %	250,000,000
1	01	02	1.03	51	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	APK SMA/SMK/SLB	Jumlah satuan pendidikan khusus yang dibina kelembagaan dan manajemen sekolah	Persentase Pengelolaan Satuan Pendidikan Khusus yang terpenuhi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75,64 %	13 SLB	100%	1,548,364,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		APK SMA/SMK/SLB	75,64 %	1,648,364,000
1	01	02	1.03	52	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	APK SMA/SMK/SLB	Jumlah satuan pendidikan khusus penerima dana BOS	Persentase Pengelolaan Satuan Pendidikan Khusus yang terpenuhi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75,64 %	18 SLB	100%	7,030,070,000	Dana Transfer Khusus Dana Alokasi Khusus Non Fisik		APK SMA/SMK/SLB	75,64 %	7,100,000,000
1	01	02	1.03	53	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	APK SMA/SMK/SLB	Jumlah satuan pendidikan khusus penerima dana BOS yang dibina	Persentase Pengelolaan Satuan Pendidikan Khusus yang terpenuhi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75,64 %	18 SLB	100%	450,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		APK SMA/SMK/SLB	75,64 %	450,000,000
1	**01**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**								**3,925,000,000**					**3,925,000,000**
1	**01**	**03**	**1.01**		**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah**								**3,200,000,000**					**3,200,000,000**
1	01	03	1.01	01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Sekolah menerapkan kurikulum muatan lokal	Jumlah sekolah menerapkan kompetensi dasar muatan lokal	persentase penerapan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	388 sekolah	388 guru	100%	1,000,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Sekolah menerapkan kurikulum muatan lokal	388 sekolah	1,000,000,000
1	01	03	1.01	02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Sekolah menerapkan kurikulum muatan lokal	Jumlah silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah	persentase penerapan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	388 sekolah	388 guru	100%	1,000,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Sekolah menerapkan kurikulum muatan lokal	388 sekolah	1,000,000,000
1	01	03	1.01	03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Sekolah menerapkan kurikulum muatan lokal	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah	persentase penerapan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	388 sekolah	4000 eksemplar	100%	600,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Sekolah menerapkan kurikulum muatan lokal	388 sekolah	600,000,000
1	01	03	1.01	04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Sekolah menerapkan kurikulum muatan lokal	terlaksananya Diklat kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	persentase penerapan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	388 sekolah	235 guru	100%	600,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Sekolah menerapkan kurikulum muatan lokal	388 sekolah	600,000,000

1	**01**	**03**	**1.02**		**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus**								**725,000,000**						**725,000,000**
1	01	03	1.02	01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Sekolah menerapkan kurikulum muatan lokal	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang disusun	persentase penerapan kurikulum muatan lokal pendidikan khusus	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	388 sekolah	4 Kompetensi Dasar	100%	225,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Sekolah menerapkan kurikulum muatan lokal	388 sekolah	225,000,000
1	01	03	1.02	02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Sekolah menerapkan kurikulum muatan lokal	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus	persentase penerapan kurikulum muatan lokal pendidikan khusus	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	388 sekolah	4 Silabus	100%	225,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Sekolah menerapkan kurikulum muatan lokal	388 sekolah	225,000,000
1	01	03	1.02	03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Sekolah menerapkan kurikulum muatan lokal	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus	persentase penerapan kurikulum muatan lokal pendidikan khusus	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	388 sekolah	500 eksemplar	100%	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Sekolah menerapkan kurikulum muatan lokal	388 sekolah	50,000,000
1	01	03	1.02	04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Sekolah menerapkan kurikulum muatan lokal	Jumlah peserta pelatihan penyusunan kurikulum muatan lokal pendidikan khusus	persentase penerapan kurikulum muatan lokal pendidikan khusus	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	388 sekolah	150 peserta	100%	225,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Sekolah menerapkan kurikulum muatan lokal	388 sekolah	225,000,000
1	**01**	**04**			**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**								**51,594,493,990**						**62,016,139,686**
1	**01**	**04**	**1.01**		**Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi**								**51,594,493,990**						**62,016,139,686**
1	01	04	1.01	01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Persentase SMA yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga pendidikan	persentase pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang dipetakan	Persentase Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota di provinsi jambi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,93 %	55%	31%	998,668,990	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase SMA yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga pendidikan	9,93 %	1,298,269,686
1	01	04	1.01	02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Persentase SMA yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga pendidikan	persentase pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus dalam rangka penataan pendidik dan tenaga kependidikan	Persentase Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota di provinsi jambi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,93 %	55%	31%	50,595,825,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD		Persentase SMA yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga pendidikan	9,93 %	60,717,870,000
1	**01**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN**								**320,000,000**						**320,000,000**
1	**01**	**05**	**1.01**		**Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat**								**210,000,000**						**210,000,000**
1	01	05	1.01	01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase satuan pendidikan yang memperoleh izin operasional	Jumlah usulan perizinan oprasional sekolah yang terlayani	Pesrsentase penerbitan izizn pendidikan menengah yang disenggarakan oleh masyarakat	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	100%	3 lembaga	100%	60,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase satuan pendidikan yang memperoleh izin operasional	100%	60,000,000
1	01	05	1.01	02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase satuan pendidikan yang memperoleh izin operasional	Jumlah kegaiatan Pengendalian dan Pengawasan terhadap perizinan satuan pendidikan	Pesrsentase penerbitan izizn pendidikan menengah yang disenggarakan oleh masyarakat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	5 kegiatan	100%	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase satuan pendidikan yang memperoleh izin operasional	100%	150,000,000
1	**01**	**05**	**1.02**		**Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat**								**110,000,000**						**110,000,000**
1	01	05	1.02	01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase satuan pendidikan yang memperoleh izin operasional	Jumlah usulan perizinan oprasional sekolah yang terlayani	Persentase penerbitan izin pendidikan khusus yang disenggarakan masyarakat	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	5 lembaga	100%	60,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase satuan pendidikan yang memperoleh izin operasional	100%	60,000,000
1	01	05	1.02	03	Pembinaan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase satuan pendidikan yang memperoleh izin operasional	Jumlah satuan pendidikan khusus baru yang dibina	Persentase penerbitan izin pendidikan khusus yang disenggarakan masyarakat	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	5 lembaga	100%	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase satuan pendidikan yang memperoleh izin operasional	100%	50,000,000
1	**01**	**06**			**PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA**								**2,975,000,000**						**3,450,000,000**
1	**01**	**06**	**1.01**		**Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**								**2,975,000,000**						**3,450,000,000**
1	01	06	1.01	01	Koordinasi Penyusunan Kamus Bahasa Daerah Provinsi	Persentase sekolah yang mengutamakan bahasa Indonesia di satuan pendidikan	jumlah peserta rapat koordinasi penyusunan Kamus Bahasa Daerah Provinsi	persentase pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota di provinsi jambi	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	60%	300 peserta	100%	1,200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sekolah yang mengutamakan bahasa Indonesia di satuan pendidikan	60%	1,200,000,000
1	01	06	1.01	02	Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi	Persentase sekolah yang mengutamakan bahasa Indonesia di satuan pendidikan	Jumlah sekolah menerapkan Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah jambi dalam kurikulum muatan lokal	persentase pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota di provinsi jambi	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	60%	6 sekolah	100%	850,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sekolah yang mengutamakan bahasa Indonesia di satuan pendidikan	60%	750,000,000

1	01	06	1.01	06	Peningkatan Apresiasi Siswa terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi	Persentase sekolah yang mengutamakan bahasa Indonesia di satuan pendidikan	jumlah siswa peserta kegiatan apresiasi siswa terhadap bahasa dan sastra daerah Jambi	persentase pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota di provinsi jambi	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	60%	150 siswa	100%	300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sekolah yang mengutamakan bahasa Indonesia di satuan pendidikan	60%	300,000,000
1	01	06	1.01	07	Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Provinsi	Persentase sekolah yang mengutamakan bahasa Indonesia di satuan pendidikan	Jumlah modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Jambi	persentase pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota di provinsi jambi	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	60%	300 eksemplar	100%	625,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sekolah yang mengutamakan bahasa Indonesia di satuan pendidikan	60%	1,200,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Jambi
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**								**306,675,070,000**					**166,566,243,000**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**63,717,682,000**					**68,818,440,000**
1	**02**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**1,009,800,000**					**1,110,780,000**
1	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase capaian nilai SAKIP	Jumlah Dokumen Hasil Rakerkesda	Dokumen Perencanaan, Evaluasi, Informasi Kesehatan	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	73%	1 Dok	100%	495,000,000	Dana Perimbangan		Persentase capaian nilai SAKIP	73%	544,500,000
							Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran				4 Dok							
							Jumlah Kabupaten Kota yang dimonitoring pelaksanaan kegiatan Bidang Kesehatan				11 Kab/Kota							
							Jumlah Kabupaten Kota yang menyelenggarakan District Health Account (DHA)				11 Kab/Kota							
1	02	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase capaian nilai SAKIP	Jumlah dokumen perencanaan	Dokumen Perencanaan, Evaluasi, Informasi Kesehatan	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	73%	1 Dok	100%	24,200,000	Dana Perimbangan		Persentase capaian nilai SAKIP	73%	26,620,000
1	02	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase capaian nilai SAKIP	Jumlah dokumen perencanaan	Dokumen Perencanaan, Evaluasi, Informasi Kesehatan	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	73%	1 Dok	100%	12,100,000	Dana Perimbangan		Persentase capaian nilai SAKIP	73%	13,310,000
1	02	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase capaian nilai SAKIP	Jumlah dokumen perencanaan	Dokumen Perencanaan, Evaluasi, Informasi Kesehatan	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	73%	1 Dok	100%	27,500,000	Dana Perimbangan		Persentase capaian nilai SAKIP	73%	30,250,000
1	02	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Persentase capaian nilai SAKIP	Jumlah dokumen perencanaan	Dokumen Perencanaan, Evaluasi, Informasi Kesehatan	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	73%	1 Dok	100%	16,500,000	Dana Perimbangan		Persentase capaian nilai SAKIP	73%	18,150,000
1	02	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase capaian nilai SAKIP	Jumlah dokumen SAKIP	Dokumen Perencanaan, Evaluasi, Informasi Kesehatan	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	73%	3 Dok	100%	165,000,000	Dana Perimbangan		Persentase capaian nilai SAKIP	73%	181,500,000
1	02	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian nilai SAKIP	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen Perencanaan, Evaluasi, Informasi Kesehatan	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	73%	9 Laporan	100%	269,500,000	Dana Perimbangan		Persentase capaian nilai SAKIP	73%	296,450,000
1	**02**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**43,649,500,000**					**48,042,300,000**
1	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase capaian nilai SAKIP	Jumlah periode Pemenuhan Gaji Dinas	Persentase ketepatan waktu penyampaian rekonsiliasi keuangan	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	73%	14 Bulan	100%	42,900,000,000	Dana Perimbangan		Persentase capaian nilai SAKIP	73%	47,190,000,000
1	02	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase capaian nilai SAKIP	Jumlah tenaga administrasi keuangan	Persentase ketepatan waktu penyampaian rekonsiliasi keuangan	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	73%	21 Orang	100%	420,000,000	Dana Perimbangan		Persentase capaian nilai SAKIP	73%	504,000,000
1	02	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase capaian nilai SAKIP	Jumlah Dokumen Nilai Asset tetap yang telah mendapatkan Penetapan Status Pengguna (PSP) sesuai ketentuan	Persentase ketepatan waktu penyampaian rekonsiliasi keuangan	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	73%	3 Dok	100%	174,000,000	Dana Perimbangan		Persentase capaian nilai SAKIP	73%	175,450,000
1	02	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase capaian nilai SAKIP	Jumlah Dokumen LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan)	Persentase ketepatan waktu penyampaian rekonsiliasi keuangan	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	73%	2 Dokumen	100%	12,000,000	Dana Perimbangan		Persentase capaian nilai SAKIP	73%	14,400,000
1	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase capaian nilai SAKIP	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	Persentase ketepatan waktu penyampaian rekonsiliasi keuangan	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	73%	1 Dokumen	100%	6,000,000	Dana Perimbangan		Persentase capaian nilai SAKIP	73%	7,200,000
1	02	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase capaian nilai SAKIP	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran	Persentase ketepatan waktu penyampaian rekonsiliasi keuangan	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	73%	2 Laporan	100%	137,500,000	Dana Perimbangan		Persentase capaian nilai SAKIP	73%	151,250,000

1	**02**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**198,000,000**						**237,600,000**
1	02	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase capaian nilai SAKIP	Jumlah Dokumen Kebutuhan BMD	Persentase Dokumen Administrasi BMD	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	73%	1 Dokumen	100%	12,000,000	Dana Perimbangan		Persentase capaian nilai SAKIP	73%	14,400,000
1	02	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase capaian nilai SAKIP	Jumlah Laporan Pengaman BMD	Persentase Dokumen Administrasi BMD	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	73%	2 Laporan	100%	6,000,000	Dana Perimbangan		Persentase capaian nilai SAKIP	73%	7,200,000
1	02	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Persentase capaian nilai SAKIP	Jumlah Laporan Penilaian BMD	Persentase Dokumen Administrasi BMD	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	73%	1 Laporan	100%	12,000,000	Dana Perimbangan		Persentase capaian nilai SAKIP	73%	14,400,000
1	02	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase capaian nilai SAKIP	Jumlah Laporan Aset BMD	Persentase Dokumen Administrasi BMD	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	73%	2 Laporan	100%	150,000,000	Dana Perimbangan		Persentase capaian nilai SAKIP	73%	180,000,000
1	02	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase capaian nilai SAKIP	Jumlah Laporan Rekonsiliasi BMD	Persentase Dokumen Administrasi BMD	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	73%	6 Laporan	100%	6,000,000	Dana Perimbangan		Persentase capaian nilai SAKIP	73%	7,200,000
1	02	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase capaian nilai SAKIP	Jumlah Laporan Aset BMD pada SKPD	Persentase Dokumen Administrasi BMD	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	73%	2 Laporan	100%	6,000,000	Dana Perimbangan		Persentase capaian nilai SAKIP	73%	7,200,000
1	02	01	1.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase capaian nilai SAKIP	Jumlah Dokumen Aset BMD	Persentase Dokumen Administrasi BMD	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	73%	1 Dokumen	100%	6,000,000	Dana Perimbangan		Persentase capaian nilai SAKIP	73%	7,200,000
1	**02**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**834,000,000**						**916,400,000**
1	02	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Persentase capaian nilai SAKIP	Tingkat kepuasan terhadap layanan kepegawaian	Persentase Indeks Kepuasan masyarakat	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	73%	2 Peraturan	74%	150,000,000	Dana Perimbangan		Persentase capaian nilai SAKIP	73%	165,000,000
1	02	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase capaian nilai SAKIP	Jumlah peraturan perundang-undangan yang tersosialisasi	Persentase Indeks Kepuasan masyarakat	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	73%	400 Orang	74%	240,000,000	Dana Perimbangan		Persentase capaian nilai SAKIP	73%	264,000,000
1	02	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase capaian nilai SAKIP	Jumlah petugas penyusun ANJAB dan ABK yang Paham tatacara penyusunan sesuai peraturan perundang-undangan	Persentase Indeks Kepuasan masyarakat	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	73%	60%	74%	100,000,000	Dana Perimbangan		Persentase capaian nilai SAKIP	73%	110,000,000
1	02	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase capaian nilai SAKIP	Jumlah pejabat eselon yang mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan II,III dan IV	Persentase Indeks Kepuasan masyarakat	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	73%	3 Orang	74%	70,000,000	Dana Perimbangan		Persentase capaian nilai SAKIP	73%	76,000,000
1	02	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase capaian nilai SAKIP	Jumlah peraturan perundang-undangan yang tersosialisasi	Persentase Indeks Kepuasan masyarakat	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	73%	2 Peraturan	74%	124,000,000	Dana Perimbangan		Persentase capaian nilai SAKIP	73%	136,400,000
1	02	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase capaian nilai SAKIP	Jumlah ASN di kab/kota yang dibina untuk menjadi pengelola Dupak Jabfung Kesehatan	Persentase Indeks Kepuasan masyarakat	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	73%	25 Orang	74%	150,000,000	Dana Perimbangan		Persentase capaian nilai SAKIP	73%	165,000,000
1	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**1,171,819,000**						**1,271,341,000**
1	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase capaian nilai SAKIP	jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor (buah)	Persentase ketersediaan administrasi perangkat daerah	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	73%	5 Buah	90%	21,259,000	Dana Perimbangan		Persentase capaian nilai SAKIP	73%	23,384,000
1	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase capaian nilai SAKIP	Jumlah peserta rapat/tamu/dll (orang)	Persentase ketersediaan administrasi perangkat daerah	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	73%	500 Orang	90%	70,862,000	Dana Perimbangan		Persentase capaian nilai SAKIP	73%	77,948,000
1	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase capaian nilai SAKIP	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Persentase ketersediaan administrasi perangkat daerah	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	73%	15 Cetakan	90%	21,259,000	Dana Perimbangan		Persentase capaian nilai SAKIP	73%	23,384,000
1	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase capaian nilai SAKIP	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (eks)	Persentase ketersediaan administrasi perangkat daerah	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	73%	10 Eks	90%	70,862,000	Dana Perimbangan		Persentase capaian nilai SAKIP	73%	77,948,000
1	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase capaian nilai SAKIP	Persentase peningkatan nilai IKM (Indeks kepuasan Masyarakat)	Persentase ketersediaan administrasi perangkat daerah	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	73%	70%	90%	176,580,000	Dana Perimbangan		Persentase capaian nilai SAKIP	73%	182,580,000
1	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase capaian nilai SAKIP	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan (OH)	Persentase ketersediaan administrasi perangkat daerah	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	73%	30 OH	90%	690,997,000	Dana Perimbangan		Persentase capaian nilai SAKIP	73%	760,097,000
1	02	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase capaian nilai SAKIP	Persentase Arsip Dinamis yang dikelola sesuai standar ANRI (Arsip Nasional Republik Indonesia)	Persentase ketersediaan administrasi perangkat daerah	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	73%	100%	90%	120,000,000	Dana Perimbangan		Persentase capaian nilai SAKIP	73%	126,000,000

1	**02**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**14,199,828,000**						**14,289,810,000**
1	02	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase capaian nilai SAKIP	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang terpenuhi dan layak	Persentase capaian realisasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	73%	2 Unit	93%	600,000,000	Dana Perimbangan		Persentase capaian nilai SAKIP	73%	600,000,000
1	02	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase capaian nilai SAKIP	Jumlah jenis pengadaan perlengkapan gedung kantor	Persentase capaian realisasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	73%	1 Unit	93%	700,000,000	Dana Perimbangan		Persentase capaian nilai SAKIP	73%	700,000,000
1	02	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase capaian nilai SAKIP	Jumlah mebel kantor terpenuhi dan layak	Persentase capaian realisasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	73%	5 Paket	93%	350,000,000	Dana Perimbangan		Persentase capaian nilai SAKIP	73%	385,000,000
1	02	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase capaian nilai SAKIP	Jumlah Gedung kantor terpenuhi dan layak	Persentase capaian realisasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	73%	1 Gedung	93%	12,000,000,000	Dana Perimbangan		Persentase capaian nilai SAKIP	73%	12,000,000,000
1	02	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase capaian nilai SAKIP	Jumlah jenis pengadaan perlengkapan gedung kantor	Persentase capaian realisasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa		73%	5 Jenis	93%	341,713,000	Dana Perimbangan		Persentase capaian nilai SAKIP	73%	375,884,000
1	02	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase capaian nilai SAKIP	Jumlah jenis pengadaan peralatan gedung kantor	Persentase capaian realisasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	73%	11 Jenis	93%	208,115,000	Dana Perimbangan		Persentase capaian nilai SAKIP	73%	228,926,000
1	**02**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**807,496,000**						**888,247,000**
1	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase capaian nilai SAKIP	Jumlah surat keluar per tahun	Persentase Perlengkapan Kantor	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	73%	4000 Surat	80%	15,413,000	Dana Perimbangan		Persentase capaian nilai SAKIP	73%	16,955,000
1	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase capaian nilai SAKIP	Periode pembayaran rekening (bulan)	Persentase Perlengkapan Kantor	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	73%	12 Bulan	80%	559,280,000	Dana Perimbangan		Persentase capaian nilai SAKIP	73%	615,208,000
1	02	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase capaian nilai SAKIP	Jumlah jenis ATK (set)	Persentase Perlengkapan Kantor	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	73%	141 Item	80%	42,270,000	Dana Perimbangan		Persentase capaian nilai SAKIP	73%	46,497,000
1	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase capaian nilai SAKIP	Jumlah Jasa Kebersihan	Persentase Perlengkapan Kantor	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	73%	6 Orang	80%	190,533,000	Dana Perimbangan		Persentase capaian nilai SAKIP	73%	209,587,000
1	**02**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**1,847,239,000**						**2,061,962,000**
1	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase capaian nilai SAKIP	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	Persentase nilai Barang Milik Daerah (BMD) yang telah mendapatkan Surat Keputusan Penetapan Status Penggunaan (SK PSP) sesuai ketentuan	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	73%	15 Kendaraan	100%	675,780,000	Dana Perimbangan		Persentase capaian nilai SAKIP	73%	743,357,000
1	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase capaian nilai SAKIP	Jumlah pemeliharaan gedung kantor secara berkala Jumlah Perlatan Gedung Kantor yang terpelihara	Persentase nilai Barang Milik Daerah (BMD) yang telah mendapatkan Surat Keputusan Penetapan Status Penggunaan (SK PSP)	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	73%	1 Gedung 1 Paket	100%	1,127,170,000	Dana Perimbangan		Persentase capaian nilai SAKIP	73%	1,269,887,000
1	02	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase capaian nilai SAKIP	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	Persentase nilai Barang Milik Daerah (BMD) yang telah mendapatkan Surat Keputusan Penetapan Status Penggunaan (SK PSP) sesuai ketentuan	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	73%	7 Jenis	100%	44,289,000	Dana Perimbangan		Persentase capaian nilai SAKIP	73%	48,718,000
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**								**238,593,386,000**						**92,549,944,000**
1	**02**	**02**	**1.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**								**155,082,758,000**						**6,162,165,000**
1	02	02	1.01	06	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	Prevalensi Wasting	Jumlah Pelayanan Kesehatan Bergerak (PKB) yang dilakukan di daerah terpencil dan sangat terpencil sesuai standar	Persentase Ketersediaan Obat Buffer Stock di Provinsi Jambi	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	26 kasus	4 Lokasi	95%	400,000,000	Dana Perimbangan		Prevalensi Wasting	26 kasus	420,000,000
1	02	02	1.01	07	Pengembangan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	Prevalensi Wasting	Jumlah unit pemeliharaan fasilitas kesehatan regional/ regional maintenance center yang dikembangkan dinas kesehatan propinsi/ kabupaten/ kotaRegional (RMC)	Persentase Ketersediaan Obat Buffer Stock di Provinsi Jambi	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	26 kasus	1 Unit	95%	200,000,000	Dana Perimbangan		Prevalensi Wasting	26 kasus	220,000,000

1	02	02	1.01	12	Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Prevalensi Wasting	Penyediaan sarana dan prasarana instalasi farmasi Persentase Prasarana di Instalasi Farmasi Provinsi sesuai standar	Persentase Ketersediaan Obat Buffer Stock di Provinsi Jambi	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	26 kasus	1 Paket 65%	95%	752,187,000	Dana Perimbangan		Prevalensi Wasting	26 kasus	829,115,000
1	02	02	1.01	13	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Prevalensi Wasting	Jumlah alat kesehatan di Instalasi Farmasi Provinsi yang di kalibrasi	Persentase Ketersediaan Obat Buffer Stock di Provinsi Jambi	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	26 kasus	1 Paket	95%	300,000,000	Dana Perimbangan		Prevalensi Wasting	26 kasus	320,000,000
1	02	02	1.01	17	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Prevalensi Wasting	Jumlah RS yang menyelenggarakan SPA sesuai standar	Persentase Ketersediaan Obat Buffer Stock di Provinsi Jambi	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	26 kasus	10 RS	95%	500,000,000	Dana Perimbangan		Prevalensi Wasting	26 kasus	550,000,000
1	02	02	1.01	18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Prevalensi Wasting	Persentase Pemeliharaan sarana di Instalasi Farmasi Provinsi	Persentase Ketersediaan Obat Buffer Stock di Provinsi Jambi	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	26 kasus	65%	95%	15,000,000	Dana Perimbangan		Prevalensi Wasting	26 kasus	20,000,000
1	02	02	1.01	19	Pemeliharaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Prevalensi Wasting	Persentase Prasarana di Instalasi Farmasi Provinsi sesuai standar	Persentase Ketersediaan Obat Buffer Stock di Provinsi Jambi	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	26 kasus	65%	95%	102,000,000	Dana Perimbangan		Prevalensi Wasting	26 kasus	350,000,000
1	02	02	1.01	20	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Prevalensi Wasting	Persentase Kab/Kota yang menyelenggarakan Telemedicine	Persentase Ketersediaan Obat Buffer Stock di Provinsi Jambi	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	26 kasus	20%	95%	400,000,000	Dana Perimbangan		Prevalensi Wasting	26 kasus	440,000,000
1	02	02	1.01	21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Prevalensi Wasting	Persentase Obat Buffer Stock yang didistribusikan ke Kab/Kota	Persentase Ketersediaan Obat Buffer Stock di Provinsi Jambi	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	26 kasus	70%	95%	149,843,358,000	Dana Perimbangan		Prevalensi Wasting	26 kasus	314,326,000
1	02	02	1.01	22	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Prevalensi Wasting	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan ketersediaan obat essensial	Persentase Ketersediaan Obat Buffer Stock di Provinsi Jambi	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	26 kasus	85%	95%	2,570,213,000	Dana Perimbangan		Prevalensi Wasting	26 kasus	2,698,724,000
1	**02**	**02**	**1.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**								**81,295,628,000**					**84,101,279,000**
1	02	02	1.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Prevalensi wasting	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk berdampak krisis kesehatan akibat bencana	Persentase persalinan di fasilitas pelayaan kesehatan (PF)	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	19	100%	80%	5,000,000,000	Dana Perimbangan		Prevalensi wasting	19	5,500,000,000
1	02	02	1.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Prevalensi wasting	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Provinsi	Persentase persalinan di fasilitas pelayaan kesehatan (PF)	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	19	100%	80%	2,500,000,000	Dana Perimbangan		Prevalensi wasting	19	2,750,000,000
1	02	02	1.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Prevalensi wasting	Persentase persalinan di Faskes	Persentase persalinan di fasilitas pelayaan kesehatan (PF)	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	19	85%	80%	1,860,000,000	Dana Perimbangan		Prevalensi wasting	19	2,046,000,000
1	02	02	1.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Prevalensi wasting	Persentase kabupaten kota menyelenggarakan pelayanan kesehatan usia reproduksi	Persentase persalinan di fasilitas pelayaan kesehatan (PF)	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	19	36%	80%	850,000,000	Dana Perimbangan		Prevalensi wasting	19	935,000,000
1	02	02	1.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Prevalensi wasting	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pelayanan kesehatan lansia	Persentase persalinan di fasilitas pelayaan kesehatan (PF)	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	19	45%	80%	1,600,000,000	Dana Perimbangan		Prevalensi wasting	19	1,760,000,000
1	02	02	1.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Prevalensi wasting	Persentase Kab/Kota melaksanakan surveilans gizi	Persentase persalinan di fasilitas pelayaan kesehatan (PF)	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	19	60%	80%	1,100,000,000	Dana Perimbangan		Prevalensi wasting	19	1,118,182,000
1	02	02	1.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Prevalensi wasting	Jumlah Kabupaten Kota Melaksanakan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Persentase persalinan di fasilitas pelayaan kesehatan (PF)	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	19	8 Kab/kota	80%	600,000,000	Dana Perimbangan		Prevalensi wasting	19	660,000,000
1	02	02	1.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Prevalensi wasting	Persentase kab/kota yang memenuhi kualitas lingkungan	Persentase persalinan di fasilitas pelayaan kesehatan (PF)	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	19	45%	80%	1,200,000,000	Dana Perimbangan		Prevalensi wasting	19	1,320,000,000
1	02	02	1.02	09	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Prevalensi wasting	Persentase Kab/Kota yang menerapkan kebijakan Germas	Persentase persalinan di fasilitas pelayaan kesehatan (PF)	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	19	4%	80%	400,000,000	Dana Perimbangan		Prevalensi wasting	19	600,000,000
1	02	02	1.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Prevalensi wasting	Jumlah Puskesmas yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan tradisional	Persentase persalinan di fasilitas pelayaan kesehatan (PF)	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	19	84 PKM	80%	250,000,000	Dana Perimbangan		Prevalensi wasting	19	270,000,000

1	02	02	1.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Prevalensi wasting	Jumlah Kab/Kota endemis Filaria dan kecacingan menurun	Persentase persalinan di fasilitas pelayaan kesehatan (PF)	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	19	6 Kab/Kota	80%	2,800,000,000	Dana Perimbangan		Prevalensi wasting	19	3,080,000,000
							Jumlah Kab/Kota yang memiliki ≥ 20% Puskesmas rujukan Rabies Center				9%							
							Jumlah presentase kab/kota yang dapat menurunkan angka kesakitan dan kematian melalui program pencegahan dan penanggulangan penyakit yang diakibatkan oleh penyakit menular dan tidak menular				81.82%							
							Persentase angka keberhasilan pengobatan TBC (TBC Success Rate)				90%							
							Persentase Kab/Kota yang 50% PKM-nya melakukan pemeriksaan dan tatalaksana Pneumonia melalui MTBS				72.72%							
							Persentase Kab/kota yang 80 % Puskesmasnya melaksanakan tatalaksana diare sesuai standar				58%							
							Persentase Kab/kota yang 90 % Puskesmasnya melaksanakan pengobatan standar				90%							
							Persentase Kab/kota yang melaksanakan Deteksi dini Hepatitis B dan atau Hepatitis C pada populasi beresiko				90%							
							Persentase Kab/Kota yang mempunyai IR DBD kurang dari 49/100.000 penduduk				73%							
							persentase orang dengan HIV AIDS yang menjalani Terapi ARV (ODHA on ARV)				45%							
							Proporsi kasus kusta baru tanpa cacat				88%							
1	02	02	1.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Prevalensi wasting	Persentase pemeriksaan kesehatan jamaah haji	Persentase persalinan di fasilitas pelayaan kesehatan (PF)	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	19	100%	80%	715,400,000	Dana Perimbangan		Prevalensi wasting	19	786,940,000
1	02	02	1.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Prevalensi wasting	Persentase ODGJ Berat yang mendapatkan layanan sebesar 100%	Persentase persalinan di fasilitas pelayaan kesehatan (PF)	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	19	90%	80%	300,000,000	Dana Perimbangan		Prevalensi wasting	19	330,000,000
1	02	02	1.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	Prevalensi wasting	Persentase penyalahgunaan napza yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi medis sebanyak 100%	Persentase persalinan di fasilitas pelayaan kesehatan (PF)	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	19	100%	80%	200,000,000	Dana Perimbangan		Prevalensi wasting	19	220,000,000

1	02	02	1.02	16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Prevalensi wasting	Jumlah Kepesertaan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) bagi Masyarakat Miskin dan Tidak Mampu yang Ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Jambi	Persentase persalinan di fasilitas pelayaan kesehatan (PF)	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	19	76586 Jiwa	80%	58,381,269,000	Dana Perimbangan		Prevalensi wasting	19	58,927,269,000
1	02	02	1.02	17	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Prevalensi wasting	IR kasus suspek campak per 100.000 populasi Persentase bayi pada usia 0-11 bulan yang mendapat IDL Persentase Kabupaten/Kota yang mencapai 80% IDL pada Bayi dan baduta Persentase sinyal kewaspadaan dini di respon	Persentase persalinan di fasilitas pelayaan kesehatan (PF)	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	19	10 ≥ 95% 95% 90%	80%	181,733,000	Dana Perimbangan		Prevalensi wasting	19	199,907,000
1	02	02	1.02	18	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Prevalensi wasting	Persentase Kab/Kota yang menerapkan SPM bidang kesehatan	Persentase persalinan di fasilitas pelayaan kesehatan (PF)	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	19	100%	80%	850,000,000	Dana Perimbangan		Prevalensi wasting	19	900,000,000
1	02	02	1.02	19	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Prevalensi wasting	Persentase Puskesmas dalam setiap Kabupaten/Kota melaksanakan Intervensi PIS-PK	Persentase persalinan di fasilitas pelayaan kesehatan (PF)	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	19	25%	80%	250,000,000	Dana Perimbangan		Prevalensi wasting	19	270,000,000
1	02	02	1.02	20	Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	Prevalensi wasting	- Persentase FKTP yang memenuhi Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) sesuai standar	Persentase persalinan di fasilitas pelayaan kesehatan (PF)	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	19	25%	80%	250,000,000	Dana Perimbangan		Prevalensi wasting	19	270,000,000
1	02	02	1.02	23	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Prevalensi wasting	Persentase RS yang menyelenggarakan SPGDT sesuai standar	Persentase persalinan di fasilitas pelayaan kesehatan (PF)	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	19	65%	80%	500,000,000	Dana Perimbangan		Prevalensi wasting	19	500,000,000
1	02	02	1.02	24	Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik	Prevalensi wasting	Persentase Puskesmas sebagai percontohan dan telah menerapkan Sistem Rujukan Terpadu (SISRUTE) Persentase RS yang menyelenggarakan SIMRS sesuai standar	Persentase persalinan di fasilitas pelayaan kesehatan (PF)	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	19	45% 65%	80%	700,000,000	Dana Perimbangan		Prevalensi wasting	19	770,000,000
1	02	02	1.02	26	Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	Prevalensi wasting	Persentasi krisis kesehatan yang diferifikasi dan ditanggulangi	Persentase persalinan di fasilitas pelayaan kesehatan (PF)	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	19	100%	80%	107,226,000	Dana Perimbangan		Prevalensi wasting	19	117,981,000
1	02	02	1.02	27	Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Prevalensi wasting	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang memenuhi persyaratan survei akreditasi Jumlah rumah sakit yang dilakukan pembinaan,pengawasan Oleh BPRS	Persentase persalinan di fasilitas pelayaan kesehatan (PF)	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	19	210 FKTP 10 RS	80%	700,000,000	Dana Perimbangan		Prevalensi wasting	19	770,000,000
1	**02**	**02**	**1.03**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi**								**715,000,000**					**786,500,000**
1	02	02	1.03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Prevalensi wasting	Persentase RS yang menyelenggarakan SIMRS sesuai standar	Persentase indikator pembangunan kesehatan yang diukur dengan data rutin	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	19	65%	50%	440,000,000	Dana Perimbangan		Prevalensi wasting	19	484,000,000
1	02	02	1.03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Prevalensi wasting	Persentase RS yang menyelenggarakan SIMRS sesuai standar	Persentase indikator pembangunan kesehatan yang diukur dengan data rutin	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	19	50%	50%	275,000,000	Dana Perimbangan		Prevalensi wasting	19	302,500,000

1	**02**	**02**	**1.04**		**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**								**1,500,000,000**						**1,500,000,000**
1	02	02	1.04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Prevalensi Wasting	Jumlah RS yang terakreditasi sesuai standar nasional	Jumlah RS yang terakreditasi sesuai standar nasional	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	26 kasus	4 RS	4 RS	500,000,000	Dana Perimbangan		Prevalensi Wasting	26 kasus	500,000,000
1	02	02	1.04	02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	Prevalensi Wasting	Jumlah RS yang terakreditasisesuai Standar Nasional	Jumlah RS yang terakreditasi sesuai standar nasional	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	26 kasus	36 RS	4 RS	500,000,000	Dana Perimbangan		Prevalensi Wasting	26 kasus	500,000,000
1	02	02	1.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Prevalensi Wasting	Persentase RS Rujukan Provinsi yang terakreditasi	Jumlah RS yang terakreditasi sesuai standar nasional	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	26 kasus	65%	4 RS	500,000,000	Dana Perimbangan		Prevalensi Wasting	26 kasus	500,000,000
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**								**1,292,052,000**						**1,456,306,000**
1	**02**	**03**	**1.01**		**Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi**								**350,489,000**						**420,587,000**
1	02	03	1.01	01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase fasilitas kesehatan dengan tenaga kesehatan sesuai standar	Persentase Puskesmas Dengan Tenaga Kesehatan Sesuai Standar Persentase RSUD Kabupaten/Kota Kelas C yang memiliki4 Dokter Spesialis dasar dan 3 Dokter Spesialis Penunjang	Persentase Prov/kab/Kota yang membuat Dokumen Rencana Kebutuhan SDMK	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	30%	50% 91%	100%	350,489,000	Dana Perimbangan		Persentase fasilitas kesehatan dengan tenaga kesehatan sesuai standar	30%	420,587,000
1	**02**	**03**	**1.02**		**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**								**941,563,000**						**1,035,719,000**
1	02	03	1.02	02	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase fasilitas kesehatan dengan tenaga kesehatan sesuai standar	Persentase tenaga kesehatan sesuai standar kompetensi	Persentase tenaga kesehatan sesuai standar	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	30%	100%	100%	941,563,000	Dana Perimbangan		Persentase fasilitas kesehatan dengan tenaga kesehatan sesuai standar	30%	1,035,719,000
1	**02**	**04**			**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**								**1,771,950,000**						**2,041,553,000**
1	**02**	**04**	**1.01**		**Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)**								**1,175,450,000**						**1,355,578,000**
1	02	04	1.01	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	Persentase kabupaten/lota dengan ketersediaan obat esensial	Persentase Sarana PBF Cabang, Cabang PAK yang diawasi	Persentase Sarana PBF Cabang, Cabang PAK yang memenuhi syarat	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	100%	60%	100%	517,877,000	Dana Perimbangan		Persentase kabupaten/lota dengan ketersediaan obat esensial	100%	592,915,000
1	02	04	1.01	02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK Berbasis Elektronik	Persentase kabupaten/lota dengan ketersediaan obat esensial	Persentase Sarana PBF Cabang, Cabang PAK yang melaksanakan pengelolaan data perizinan pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK berbasis elektronik	Persentase Sarana PBF Cabang, Cabang PAK yang memenuhi syarat	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	100%	60%	100%	657,573,000	Dana Perimbangan		Persentase kabupaten/lota dengan ketersediaan obat esensial	100%	762,663,000
1	**02**	**04**	**1.02**		**Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)**								**596,500,000**						**685,975,000**
1	02	04	1.02	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Persentase kabupaten/lota dengan ketersediaan obat esensial	Persentase sarana produksi UKOT yang diawasi	Persentase Rekomendasi Produksi UKOT yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jambi	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	100%	60%	100%	494,000,000	Dana Perimbangan		Persentase kabupaten/lota dengan ketersediaan obat esensial	100%	568,100,000
1	02	04	1.02	02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin UKOT Berbasis Elektronik	Persentase kabupaten/lota dengan ketersediaan obat esensial	Persentase Sarana Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) yang melaksanakan pengelolaan data perizinan dan tindaklanjut pengawasan izin UKOT berbasis Elektronik	Persentase Rekomendasi Produksi UKOT yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jambi	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	100%	70%	100%	102,500,000	Dana Perimbangan		Persentase kabupaten/lota dengan ketersediaan obat esensial	100%	117,875,000
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**								**1,300,000,000**						**1,700,000,000**
1	**02**	**05**	**1.01**		**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi**								**450,000,000**						**600,000,000**
1	02	05	1.01	01	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Persentase kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan gerakan masyarakat hidup sehat	Persentase Kab/Kota melaksanakan pembinaan posyandu aktif	Persentase Kab/Kota melaksanakan pembinaan posyandu aktif	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	4 kab/kota	4 Kab	4 Kab	450,000,000	Dana Perimbangan		Persentase kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan gerakan masyarakat hidup sehat	4 kab/kota	600,000,000

1	**02**	**05**	**1.02**		**Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi**								**400,000,000**					**450,000,000**
1	02	05	1.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Persentase kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan gerakan masyarakat hidup sehat	Jumlah Tema Pesan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) program kesehatan	Jumlah Tema Pesan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) program kesehatan	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	4 kab/kota	10%	10%	400,000,000	Dana Perimbangan		Persentase kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan gerakan masyarakat hidup sehat	4 kab/kota	450,000,000
1	**02**	**05**	**1.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi**								**450,000,000**					**650,000,000**
1	02	05	1.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Persentase kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan gerakan masyarakat hidup sehat	Persentase Kab/Kota melaksanakan pembinaan posyandu aktif	Persentase Kab/Kota dengan minimal 80% posyandu aktif	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	4 kab/kota	2 Kab	18.18%	450,000,000	Dana Perimbangan		Persentase kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan gerakan masyarakat hidup sehat	4 kab/kota	650,000,000
												TOTAL	**157,131,070,000**					**166,566,243,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Jambi
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0001 Balai Pelatihan Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**								**3,756,464,000**					**4,132,110,000**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**2,081,464,000**					**2,289,610,000**
1	**02**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**84,744,000**					**93,218,000**
1	02	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase capaian nilai SAKIP (BAPELKES)	Jumlah tenaga pengelola keuangan yang di bayar honorariumnya	Persentase ketepatan waktu penyampaian rekonsiliasi keuangan	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	73%	6 OH	100%	84,744,000	Dana Perimbangan		Persentase capaian nilai SAKIP (BAPELKES)	73%	93,218,000
1	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**248,050,000**					**272,855,000**
1	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase capaian nilai SAKIP (BAPELKES)	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketersediaan administrasi perangkat daerah	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	73%	2618 Buah	90%	33,000,000	Dana Perimbangan		Persentase capaian nilai SAKIP (BAPELKES)	73%	36,300,000
1	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase capaian nilai SAKIP (BAPELKES)	angunan KantJumlah ATK peralatan dan perlengkapan kantoror	Persentase ketersediaan administrasi perangkat daerah	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	73%	41 Item	90%	12,650,000	Dana Perimbangan		Persentase capaian nilai SAKIP (BAPELKES)	73%	13,915,000
1	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase capaian nilai SAKIP (BAPELKES)	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase ketersediaan administrasi perangkat daerah	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	73%	6 Cetakan	90%	31,900,000	Dana Perimbangan		Persentase capaian nilai SAKIP (BAPELKES)	73%	35,090,000
1	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase capaian nilai SAKIP (BAPELKES)	Jumlah Rapat Koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	Persentase ketersediaan administrasi perangkat daerah	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	73%	70 OH	90%	170,500,000	Dana Perimbangan		Persentase capaian nilai SAKIP (BAPELKES)	73%	187,550,000
1	**02**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**768,900,000**					**845,790,000**
1	02	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase capaian nilai SAKIP (BAPELKES)	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Persentase capaian realisasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	73%	3 Jenis	90%	213,400,000	Dana Perimbangan		Persentase capaian nilai SAKIP (BAPELKES)	73%	234,740,000
1	02	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase capaian nilai SAKIP (BAPELKES)	Jumlah Pengadaan Prasarana Gedung Kantor	Persentase capaian realisasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	73%	17 Jenis	90%	555,500,000	Dana Perimbangan		Persentase capaian nilai SAKIP (BAPELKES)	73%	611,050,000
1	**02**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**589,270,000**					**648,197,000**
1	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase capaian nilai SAKIP (BAPELKES)	Jumlah Surat Keluar Bapelkes	Persentase Perlengkapan Kantor	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	73%	400 Surat	80%	2,970,000	Dana Perimbangan		Persentase capaian nilai SAKIP (BAPELKES)	73%	3,267,000
1	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase capaian nilai SAKIP (BAPELKES)	Jumlah periode pemabayaran rekening	Persentase Perlengkapan Kantor	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	73%	12 Bulan	80%	374,000,000	Dana Perimbangan		Persentase capaian nilai SAKIP (BAPELKES)	73%	411,400,000
1	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase capaian nilai SAKIP (BAPELKES)	Jumlah jasa dan tenaga kebersihan kantor	Persentase Perlengkapan Kantor	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	73%	12 Orang	80%	212,300,000	Pendapatan dari BLUD		Persentase capaian nilai SAKIP (BAPELKES)	73%	233,530,000
1	**02**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**390,500,000**					**429,550,000**
1	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase capaian nilai SAKIP (BAPELKES)	Jumlah pemelihraan kendaraan operasional kantor	Persentase nilai Barang Milik Daerah (BMD) yang telah mendapatkan Surat Keputusan Penetapan Status Penggunaan (SK PSP) sesuai ketentuan	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	73%	3 Unit	100%	68,200,000	Dana Perimbangan		Persentase capaian nilai SAKIP (BAPELKES)	73%	75,020,000
1	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase capaian nilai SAKIP (BAPELKES)	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	Persentase nilai Barang Milik Daerah (BMD) yang telah mendapatkan Surat Keputusan Penetapan Status Penggunaan (SK PSP) sesuai ketentuan	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	73%	1 Gedung	100%	223,300,000	Dana Perimbangan		Persentase capaian nilai SAKIP (BAPELKES)	73%	245,630,000

1	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase capaian nilai SAKIP (BAPELKES)	Jumlah Pemelihraan Peralatan gedung kantor	Persentase nilai Barang Milik Daerah (BMD) yang telah mendapatkan Surat Keputusan Penetapan Status Penggunaan (SK PSP) sesuai ketentuan	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	73%	12 Bulan	100%	99,000,000	Dana Perimbangan		Persentase capaian nilai SAKIP (BAPELKES)	73%	108,900,000
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**								**1,675,000,000**					**1,842,500,000**
1	**02**	**03**	**1.02**		**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**								**1,675,000,000**					**1,842,500,000**
1	02	03	1.02	01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase fasilitas kesehatan dengan tenaga kesehatan sesuai standar (BAPELKES)	Jumlah tenaga kesehatan yang dilatih dalam bidang kesehatan	Persentase kab kota yang melakukan pembinaan dan pengawasn SDMK	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	30%	300 Orang	100%	1,675,000,000	Dana Perimbangan		Persentase fasilitas kesehatan dengan tenaga kesehatan sesuai standar (BAPELKES)	30%	1,842,500,000
											TOTAL		**3,756,464,000**					**4,132,110,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Jambi
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0002 Balai Laboratorium Kesehatan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**								**16,102,027,000**					**16,878,675,000**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**6,314,824,000**					**4,628,891,000**
1	**02**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**91,560,000**					**91,560,000**
1	02	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase capaian nilai SAKIP (LABKES)	Jumlah tenaga Pengelola Keuangan yang di bayar Honorarium	Jumlah tenaga pengelola keuangan yang di bayar honorariumnya	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	73%	12 Orang	6 orang	91,560,000	Dana Perimbangan		Persentase capaian nilai SAKIP (LABKES)	73%	91,560,000
1	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**1,383,900,000**					**1,514,457,000**
1	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase capaian nilai SAKIP (LABKES)	Jumlah Komponen instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketersediaan administrasi perangkat daerah	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	73%	10 Buah	90%	55,000,000	Dana Perimbangan		Persentase capaian nilai SAKIP (LABKES)	73%	82,000,000
1	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase capaian nilai SAKIP (LABKES)	Jumlah Jenis ATK	Persentase ketersediaan administrasi perangkat daerah	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	73%	40 Item	90%	109,435,000	Dana Perimbangan		Persentase capaian nilai SAKIP (LABKES)	73%	151,548,000
1	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase capaian nilai SAKIP (LABKES)	Jumlah Peserta Rapat/Tamu/Orang	Persentase ketersediaan administrasi perangkat daerah	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	73%	75 Orang	90%	233,860,000	Dana Perimbangan		Persentase capaian nilai SAKIP (LABKES)	73%	280,000,000
1	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase capaian nilai SAKIP (LABKES)	Jumlah Barang cetakan dan penggandaan	Persentase ketersediaan administrasi perangkat daerah	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	73%	25 Cetakan	90%	57,696,000	Dana Perimbangan		Persentase capaian nilai SAKIP (LABKES)	73%	75,000,000
1	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase capaian nilai SAKIP (LABKES)	Jumlah rapat Koordinasi dan konsultasi ynng di laksanakan(OH)	Persentase ketersediaan administrasi perangkat daerah	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	73%	130 OH	90%	927,909,000	Dana Perimbangan		Persentase capaian nilai SAKIP (LABKES)	73%	925,909,000
1	**02**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**2,238,500,000**					**100,000,000**
1	02	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase capaian nilai SAKIP (LABKES)	Jumlah jenis pengadaan peralatan gedung Kantor	Persentase capaian realisasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	73%	40 Jenis	93%	2,238,500,000	Dana Perimbangan		Persentase capaian nilai SAKIP (LABKES)	73%	100,000,000
1	**02**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**573,236,000**					**710,246,000**
1	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase capaian nilai SAKIP (LABKES)	Periode pembayaran rekening	Persentase Perlengkapan Kantor	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	73%	12 Bulan	80%	462,990,000	Dana Perimbangan		Persentase capaian nilai SAKIP (LABKES)	73%	600,000,000
1	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase capaian nilai SAKIP (LABKES)	Jumlah jasa Kebersihan dan Jumlah surat keluar per tahun	Persentase Perlengkapan Kantor	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	73%	4 Orang	80%	110,246,000	Dana Perimbangan		Persentase capaian nilai SAKIP (LABKES)	73%	110,246,000
1	**02**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**527,628,000**					**562,628,000**
1	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase capaian nilai SAKIP (LABKES)	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional yang terpelihara.	Persentase nilai Barang Milik Daerah (BMD) yang telah mendapatkan Surat Keputusan Penetapan Status Penggunaan (SK PSP) sesuai ketentuan	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	73%	5 Kendaraan	100%	94,028,000	Dana Perimbangan		Persentase capaian nilai SAKIP (LABKES)	73%	94,028,000
1	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase capaian nilai SAKIP (LABKES)	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang terpelihara	Persentase nilai Barang Milik Daerah (BMD) yang telah mendapatkan Surat Keputusan Penetapan Status Penggunaan (SK PSP) sesuai ketentuan	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	73%	10 Jenis	100%	220,000,000	Dana Perimbangan		Persentase capaian nilai SAKIP (LABKES)	73%	250,000,000
1	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase capaian nilai SAKIP (LABKES)	Jumlah Perlatan Gedung Kantor yang terpelihara	Persentase nilai Barang Milik Daerah (BMD) yang telah mendapatkan Surat Keputusan Penetapan Status Penggunaan (SK PSP) sesuai ketentuan	Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kelurahan	73%	7 Jenis	100%	48,600,000	Dana Perimbangan		Persentase capaian nilai SAKIP (LABKES)	73%	48,600,000

1	02	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase capaian nilai SAKIP (LABKES)	Jumlah jenis pengadaan perlengkapan gedung Kantor	Persentase nilai Barang Milik Daerah (BMD) yang telah mendapatkan Surat Keputusan Penetapan Status Penggunaan (SK PSP) sesuai ketentuan	Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kelurahan	73%	5 Jenis	100%	165,000,000	Dana Perimbangan		Persentase capaian nilai SAKIP (LABKES)	73%	170,000,000
1	**02**	**01**	**1.1**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**								**1,500,000,000**					**1,650,000,000**
1	02	01	1.1	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase capaian nilai SAKIP (LABKES)	Persentase Ketersediaan Kegiatan Operasional Balai Laboratorium Kesehatan	Persentase Ketersediaan Kegiatan Operasional Balai Laboratorium Kesehatan	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	73%	100%	100%	1,500,000,000	Dana Perimbangan		Persentase capaian nilai SAKIP (LABKES)	73%	1,650,000,000
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**								**9,787,203,000**					**12,249,784,000**
1	**02**	**02**	**1.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**								**9,387,203,000**					**11,799,784,000**
1	02	02	1.01	04	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase parameter pelayanan laboratorium terakreditasi (LABKES)	Jumlah Pemutahiran metode dan atau penambahan parameter uji bidang pelayanan laboratorium Pembangunan Gedung LaboratoriumKesehatan Daerah Pengadaan Alat Kesehatan	Persentase Parameter Pelayanan Laboratorium Terakreditasi	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	100%	4% 1 Gedung 6 Paket	100%	9,387,203,000	Dana Perimbangan		Persentase parameter pelayanan laboratorium terakreditasi (LABKES)	100%	11,799,784,000
1	**02**	**02**	**1.04**		**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**								**400,000,000**					**450,000,000**
1	02	02	1.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Penurunan kasus kematian ibu	Jumlah Parameter Pemeriksaan Laboratorium yang terakreditasi	Jumlah RS yang terakreditasi sesuai standar nasional	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	80 kasus	70%	3 RS	400,000,000	Dana Perimbangan		Penurunan kasus kematian ibu	80 kasus	450,000,000
												TOTAL	**16,102,027,000**					**16,878,675,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Jambi
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 RSUD Rd. Mattaher
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 RSUD Rd. Mattaher

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**								**352,018,645,907**					**368,515,598,887**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**285,699,833,945**					**299,085,118,798**
1	**02**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**385,406,518**					**403,801,845**
1	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase capaian nilai SAKIP	Jumlah dokumen Perencanaan dan Program anggaran yang disusun	Dokumen Perencanaan	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	100%	6 Dokumen	100%	121,582,062	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase capaian nilai SAKIP	100%	127,661,165
1	02	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase capaian nilai SAKIP	Jumlah Dokumen yang disusun Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan	Dokumen Perencanaan	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	100%	1 Dokumen 2 Kali	100%	137,552,856	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase capaian nilai SAKIP	100%	144,430,499
1	02	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase capaian nilai SAKIP	Jumlah Dokumen yang disusun Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan	Dokumen Perencanaan	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	100%	1 Dokumen 4 Kali	100%	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase capaian nilai SAKIP	100%	10,000,000
1	02	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase capaian nilai SAKIP	Jumlah Dokumen yang disusun Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan	Dokumen Perencanaan	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	100%	1 Dokumen 2 Kali	100%	5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase capaian nilai SAKIP	100%	5,000,000
1	02	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Persentase capaian nilai SAKIP	Jumlah Dokumen yang disusun Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan	Dokumen Perencanaan	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	100%	1 Dokumen 1 Kali	100%	2,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase capaian nilai SAKIP	100%	2,500,000
1	02	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase capaian nilai SAKIP	Jumlah Dokumen yang disusun Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan	Dokumen Perencanaan	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	100%	1 Dokumen 6 Kali	100%	43,336,650	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase capaian nilai SAKIP	100%	45,503,483
1	02	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian nilai SAKIP	Jumlah Dokumen yang disusun Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan	Dokumen Perencanaan	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	100%	1 Dokumen 6 Kali	100%	65,434,950	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase capaian nilai SAKIP	100%	68,706,698
1	**02**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**123,369,469,886**					**129,537,218,381**
1	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase capaian nilai SAKIP	Periode Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Dokumen Laporan Keuangan	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	100%	14 Bulan	100%	122,452,773,136	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase capaian nilai SAKIP	100%	128,575,411,793
1	02	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase capaian nilai SAKIP	Jumlah tenaga Administrasi	Dokumen Laporan Keuangan	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	100%	12 Bulan	100%	902,196,750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase capaian nilai SAKIP	100%	947,306,588
1	02	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase capaian nilai SAKIP	Jumlah Laporan yang dibuat	Dokumen Laporan Keuangan	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	100%	1 Laporan	100%	500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase capaian nilai SAKIP	100%	500,000
1	02	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase capaian nilai SAKIP	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Jumlah Laporan yang disusun	Dokumen Laporan Keuangan	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	100%	2 Kali 1 Laporan	100%	2,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase capaian nilai SAKIP	100%	2,000,000
1	02	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase capaian nilai SAKIP	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Jumlah Laporan yang disusun	Dokumen Laporan Keuangan	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	100%	2 Kali 1 Laporan	100%	2,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase capaian nilai SAKIP	100%	2,000,000
1	02	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase capaian nilai SAKIP	Jumlah Laporan yang dibuat	Dokumen Laporan Keuangan	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	100%	1 Laporan	100%	2,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase capaian nilai SAKIP	100%	2,000,000
1	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase capaian nilai SAKIP	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Jumlah Laporan yang dibuat	Dokumen Laporan Keuangan	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	100%	6 Kali 6 Laporan	100%	6,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase capaian nilai SAKIP	100%	6,000,000
1	02	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase capaian nilai SAKIP	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Jumlah Laporan yang dibuat	Dokumen Laporan Keuangan	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	100%	2 Kali 1 Laporan	100%	2,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase capaian nilai SAKIP	100%	2,000,000

1	**02**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**6,000,000**						**6,000,000**
1	02	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase capaian nilai SAKIP	Jumlah dokumen yang disusun	Dokumen Barang Milik Daerah	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	100%	1 Dokumen	100%	1,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase capaian nilai SAKIP	100%	1,000,000
1	02	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Persentase capaian nilai SAKIP	Jumlah dokumen yang disusun Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan	Dokumen Barang Milik Daerah	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	100%	1 Dokumen 2 Kali	100%	2,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase capaian nilai SAKIP	100%	2,000,000
1	02	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase capaian nilai SAKIP	Jumlah Laporan yang dibuat	Dokumen Barang Milik Daerah	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	100%	1 Laporan	100%	1,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase capaian nilai SAKIP	100%	1,000,000
1	02	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase capaian nilai SAKIP	Jumlah Laporan yang dibuat	Dokumen Barang Milik Daerah	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	100%	1 Laporan	100%	1,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase capaian nilai SAKIP	100%	1,000,000
1	02	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase capaian nilai SAKIP	Laporan Barang Milik Daerah	Dokumen Barang Milik Daerah	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	100%	1 Laporan	100%	1,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase capaian nilai SAKIP	100%	1,000,000
1	**02**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**1,688,730,900**						**1,736,192,445**
1	02	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Persentase capaian nilai SAKIP	Jumlah dokumen yang disusun	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	100%	6 Unit	100%	120,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase capaian nilai SAKIP	100%	120,000,000
1	02	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase capaian nilai SAKIP	Jumlah Pakaian yang diadakan	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	100%	940 stel	100%	634,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase capaian nilai SAKIP	100%	641,250,000
1	02	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase capaian nilai SAKIP	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Jumlah Laporan yang disusun	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	100%	2 Kali 1 Laporan	100%	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase capaian nilai SAKIP	100%	10,000,000
1	02	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase capaian nilai SAKIP	Jumlah Laporan yang dibuat	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	100%	2 Laporan	100%	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase capaian nilai SAKIP	100%	10,000,000
1	02	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase capaian nilai SAKIP	Jumlah orang yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	100%	200 Orang	100%	814,230,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase capaian nilai SAKIP	100%	854,942,445
1	02	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase capaian nilai SAKIP	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	100%	1000 Orang	100%	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase capaian nilai SAKIP	100%	100,000,000
1	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**2,487,631,204**						**2,602,012,765**
1	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase capaian nilai SAKIP	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	100%	75 Jenis	100%	1,454,930,808	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase capaian nilai SAKIP	100%	1,527,677,349
1	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase capaian nilai SAKIP	Jumlah peserta, pasien yang terlayani	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	100%	120 Orang	100%	74,340,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase capaian nilai SAKIP	100%	78,057,000
1	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase capaian nilai SAKIP	Jumlah barang dan penggandaan	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	100%	91 Item	100%	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase capaian nilai SAKIP	100%	200,000,000
1	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase capaian nilai SAKIP	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	100%	240 Kali	100%	758,360,396	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase capaian nilai SAKIP	100%	796,278,416
1	**02**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**3,150,000,000**						**3,150,000,000**
1	02	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase capaian nilai SAKIP	Jumlah kendaraan yang diadakan	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	100%	3 Unit	100%	550,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase capaian nilai SAKIP	100%	550,000,000
1	02	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase capaian nilai SAKIP	Jumlah kendaraan yang diadakan	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	100%	3 Unit	100%	1,000,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase capaian nilai SAKIP	100%	1,000,000,000
1	02	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase capaian nilai SAKIP	Jumlah Mebel yang diadakan	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	100%	3 Unit	100%	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase capaian nilai SAKIP	100%	100,000,000
1	02	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase capaian nilai SAKIP	Jumlah Peralatan dan mesin yang diadakan	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	100%	20 Unit	100%	1,000,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase capaian nilai SAKIP	100%	1,000,000,000
1	02	01	1.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Persentase capaian nilai SAKIP	Jumlah Aset tetap lainnya yang diadakan	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	100%	5 Unit	100%	500,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase capaian nilai SAKIP	100%	500,000,000
1	**02**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**11,381,212,937**						**11,381,212,937**
1	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase capaian nilai SAKIP	Periode pembayaran rekening (bulan)	Persentase penyediaan jasa listrik, air, telepon dan kebersihan	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	100%	12 Bulan	100%	6,198,391,080	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase capaian nilai SAKIP	100%	6,198,391,080
1	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase capaian nilai SAKIP	Periode pemakaian jasa kebersihan kantor	Persentase penyediaan jasa listrik, air, telepon dan kebersihan	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	100%	12 Bulan	100%	5,182,821,857	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase capaian nilai SAKIP	100%	5,182,821,857
1	**02**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**2,611,182,500**						**2,617,470,425**
1	02	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase capaian nilai SAKIP	Jumlah Kendaraan dinas /operasional yang terpelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	Kota Jambi, Telanaipura, Penyengat Rendah	100 0%	46 Unit	100%	125,758,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase capaian nilai SAKIP	100 0%	132,046,425

1	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase capaian nilai SAKIP	Jumlah Perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	100 0%	169 Item	100%	1,849,464,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase capaian nilai SAKIP	100 0%	1,849,464,000
1	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase capaian nilai SAKIP	Jumlah Gedung/kantor yang terpelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	100 0%	21 Unit	100%	635,960,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase capaian nilai SAKIP	100 0%	635,960,000
1	**02**	**01**	**1.1**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**								**140,620,200,000**					**147,651,210,000**
1	02	01	1.1	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat	1. Indeks Kepuasan Masyarakat 2. jumlah pelayanan kes.penduduk miskin yg tidak mempunyai jaminan kesehatan	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	100%	85 Nilai	100%	140,620,200,000	Pendapatan dari BLUD		Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat	100%	147,651,210,000
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**								**66,318,811,962**					**69,430,480,089**
1	**02**	**02**	**1.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**								**61,752,021,734**					**64,635,350,296**
1	02	02	1.01	01	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Jumlah Gedung yang dibangun	Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana dan Alat Kesehatan	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	100 0%	6 Gedung	100%	3,398,620,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 0%	3,398,620,000
1	02	02	1.01	09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara	Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana dan Alat Kesehatan	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	100 0%	40 Jenis (Paket)	100%	686,830,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 0%	686,830,500
1	02	02	1.01	10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Jumlah Alat Kesehatan	Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana dan Alat Kesehatan	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	100 0%	148 unit	100%	35,000,000,000	Dana Transfer Khusus Dana Alokasi Khusus Fisik		Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 0%	36,750,000,000
1	02	02	1.01	22	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Jumlah obat dan BHP	Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana dan Alat Kesehatan	Kota Jambi, Telanaipura, Simpang IV Sipin	100 0%	1500 jenis	100%	22,666,571,234	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 0%	23,799,899,796
1	**02**	**02**	**1.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**								**4,566,790,228**					**4,795,129,793**
1	02	02	1.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	jumlah Kebutuhan makanan dan minuman pasien yang disediakan	Persentase Pemenuhan makanan dan minuman pasien	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	100%	120000 Pasien	100%	4,566,790,228	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100%	4,795,129,793
												TOTAL	**352,018,645,907**					**368,515,598,887**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Jambi
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.03.0000 Rumah Sakit Jiwa
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.03.0000 Rumah Sakit Jiwa

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**								**101,374,870,641**					**119,668,159,291**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**63,614,000,000**					**68,402,400,000**
1	**02**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**290,000,000**					**290,000,000**
1	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan dan program anggaran yang disusun		Kota Jambi, Alam Barajo, Kenali Besar		4 dokumen		115,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				115,000,000
1	02	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								135,000,000					135,000,000
1	02	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah dokumen realisasi kinerja yang disusun		Kota Jambi, Alam Barajo, Kenali Besar		2 dokumen		40,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				40,000,000
1	**02**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**39,150,000,000**					**43,065,000,000**
1	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Periode pembayaran gaji dan tunjangan ASN		Kota Jambi, Alam Barajo, Kenali Besar		14 bulan		39,150,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				43,065,000,000
1	**02**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**570,000,000**					**603,000,000**
1	02	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya		Kota Jambi, Alam Barajo, Kenali Besar		500 stell		300,000,000	Pendapatan dari Pengembalian				306,000,000
1	02	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah pegawai yang mengikuti diklat		Kota Jambi, Alam Barajo, Kenali Besar		40 orang		270,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				297,000,000
1	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**850,000,000**					**935,000,000**
1	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah peralatan & perlengkapan kantor (set)				92 set		250,000,000					275,000,000
1	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah barang cetakan & penggandaan yang diadakan				33 set		300,000,000					330,000,000
1	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								300,000,000					330,000,000
1	**02**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**1,200,000,000**					**1,500,000,000**
1	02	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional yang diadakan		Kota Jambi, Alam Barajo, Kenali Besar		2 unit		1,200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,500,000,000
1	**02**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**3,104,000,000**					**3,414,400,000**
1	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								4,000,000					4,400,000
1	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Periode pembayaran rekening (bulan)		Kota Jambi, Alam Barajo, Kenali Besar		12 bulan		1,200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,320,000,000
1	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Periode penyediaan jasa kebersihan kantor & loundry,Periode pembayaran jasa administrasi keuangan		Kota Jambi, Alam Barajo, Kenali Besar		12 bulan		1,900,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2,090,000,000
1	**02**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**1,450,000,000**					**1,595,000,000**
1	02	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								400,000,000					440,000,000
1	02	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								1,050,000,000					1,155,000,000
1	**02**	**01**	**1.1**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**								**17,000,000,000**					**17,000,000,000**
1	02	01	1.1	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap RSJ		Kota Jambi, Alam Barajo, Kenali Besar		80%		17,000,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				17,000,000,000

1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**								**37,760,870,641**					**51,265,759,291**
1	**02**	**02**	**1.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**								**32,040,145,641**					**44,912,581,491**
1	02	02	1.01	01	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya		Jumlah Gedung beserta Sarana Prasarana Pendukungnya yang dibangun		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 unit		4,694,026,305	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				13,612,872,265
1	02	02	1.01	09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit		Jumlah Gedung bertaJumlah Gedung Rumah sakit Yang direhab dan failitas kesehatan lain yang dipelihara		Kota Jambi, Alam Barajo, Kenali Besar		2 unit		1,834,585,092	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				271,535,706
1	02	02	1.01	10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan		Jumlah Alat Kedokteran / kesehatan yang diadakan		Kota Jambi, Alam Barajo, Kenali Besar		30 unit		20,000,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				25,000,000,000
1	02	02	1.01	12	Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan		Jumlah prasarana layanan kesehatan yang diadakan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		140 buah		250,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				220,000,000
1	02	02	1.01	14	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)		Jumlah bahan habis pakai RS yang diadakan		Kota Jambi, Alam Barajo, Kenali Besar		13.375 buah		361,534,244	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				418,173,520
1	02	02	1.01	17	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan		Jumlah pemeliharaan alat kesehatan,pemeriksaan sampel air limbah, air bersih & pemusnahan sampah medis		Kota Jambi, Alam Barajo, Kenali Besar		4 paket		200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				220,000,000
1	02	02	1.01	22	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya		Jumlah jenis obat yang dibutuhkan pasien rsj dan bahan medis habis pakai (BMHP) yang dibutuhkan pasien RSJ		Kota Jambi, Alam Barajo, Kenali Besar		70 item		4,700,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5,170,000,000
1	**02**	**02**	**1.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**								**5,720,725,000**					**6,353,177,800**
1	02	02	1.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Jumlah periode bahan kebutuhan makanan & minuman pasien yang disediakan		Kota Jambi, Alam Barajo, Kenali Besar		150 orang		2,870,725,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3,238,177,800
1	02	02	1.02	09	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Jumlah Kegiatan promosi yang dilaksanakan		Kota Jambi, Alam Barajo, Kenali Besar		4 kali		200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				200,000,000
1	02	02	1.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)		Jumlah pelaksanaan pelayanan kesehatan orang dengan masalah kesehatan jiwa		Kota Jambi, Alam Barajo, Kenali Besar		53 kali		150,000,000	Pendapatan dari Pengembalian				165,000,000
1	02	02	1.02	16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		Jumlah pembiayaan pelayanan kesehatan jiwa bagi penderita yang		Kota Jambi, Alam Barajo, Kenali Besar		250 orang		2,500,000,000	Pendapatan dari Pengembalian				2,750,000,000
												TOTAL	**101,374,870,641**					**119,668,159,291**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Jambi
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.03.1.04.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**03**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**								**1,898,071,400,171**					**2,319,301,308,184**
1	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**49,449,816,919**					**68,014,939,583**
1	**03**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**1,850,690,298**					**11,415,659,781**
1	03	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Yang Di Keluarkan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 dokumen		710,386,643	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				7,603,866,434
1	03	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Yang Di Keluarkan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 dokumen		128,571,735	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				796,444,158
1	03	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Yang Di Keluarkan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 dokumen		714,959,576	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,382,831,999
1	03	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Yang Di Keluarkan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 dokumen		157,156,161	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				825,028,584
1	03	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Yang Di Keluarkan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 dokumen		139,616,183	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				807,488,606
1	**03**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**32,850,600,501**					**33,850,600,501**
1	03	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah tenaga Administrasi Keuangan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		131 orang		31,704,480,215	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				32,204,480,215
1	03	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah tenaga Administrasi Keuangan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		131 orang		1,146,120,286	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,646,120,286
1	**03**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**650,960,200**					**1,650,960,200**
1	03	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Administrasi Barang Milik Daerah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		125 unit		256,731,675	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				756,731,675
1	03	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Administrasi Barang Milik Daerah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		125 unit		394,228,525	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				894,228,525
1	**03**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**450,350,200**					**950,350,200**
1	03	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat jabatan fungsinal terkini		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		18 orang		450,350,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				950,350,200
1	**03**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**2,559,600,501**					**5,059,838,001**
1	03	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Administrasi Umum Prangkat Daerah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		18 dokumen		702,030,163	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,202,030,163
1	03	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Administrasi Umum Prangkat Daerah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		18 dokumen		181,376,663	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				681,376,663
1	03	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Administrasi Umum Prangkat Daerah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		18 dokumen		1,116,976,209	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,616,976,209
1	03	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Administrasi Umum Prangkat Daerah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		18 dokumen		306,139,163	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				806,376,663
1	03	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Administrasi Umum Prangkat Daerah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		18 dokumen		253,078,303	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				753,078,303
1	**03**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**3,500,084,319**					**4,000,000,000**
1	03	01	1.07	05	Pengadaan Mebel		Jumlah jenis pengadaan peralatan gedung kantor		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		20 unit		418,700,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				500,000,000
1	03	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah jenis pengadaan peralatan gedung kantor		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		20 unit		3,081,384,319	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3,500,000,000
1	03	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								0					0
1	**03**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**4,087,250,601**					**6,087,250,601**
1	03	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah terwujudnya penunjang urusan pemerintah daerah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 unit		84,760,681	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				584,760,681

1	03	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah terwujudnya penunjang urusan pemerintah daerah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 unit		1,175,388,049	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,675,388,049
1	03	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah terwujudnya penunjang urusan pemerintah daerah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 unit		229,136,965	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				729,136,965
1	03	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah terwujudnya penunjang urusan pemerintah daerah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 unit		2,597,964,906	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3,097,964,906
1	**03**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**3,500,280,299**					**5,000,280,299**
1	03	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah barang milik daerah yang di pelihara		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		90 unit		1,007,223,399	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,507,223,399
1	03	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah barang milik daerah yang di pelihara		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		90 unit		471,920,150	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				971,920,150
1	03	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah barang milik daerah yang di pelihara		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		90 unit		2,021,136,750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2,521,136,750
1	**03**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**								**94,956,250,600**					**82,037,061,500**
1	**03**	**02**	**1.01**		**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota**								**57,703,250,600**					**61,585,172,200**
1	03	02	1.01	02	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku		Jumlah Dokumen Yang Di Keluarkan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 Dok		853,696,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				900,963,500
1	03	02	1.01	03	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai		Jumlah Dokumen Yang Di Keluarkan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		8 Dok		2,359,632,255	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2,500,653,200
1	03	02	1.01	04	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi		Jumlah Dokumen Yang Di Keluarkan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Dok		2,658,620,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2,869,850,000
1	03	02	1.01	06	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya		Terbangunnya Penampung air baku		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1000000000 m3		2,500,000,000	Pendapatan Pajak Daerah				2,500,000,000
1	03	02	1.01	07	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku		Terbangunya jumlah sumur air tanah untuk air baku		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 l/det		9,250,365,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				9,895,623,000
1	03	02	1.01	08	Pembangunan Unit Air Baku								0					0
1	03	02	1.01	09	Pembangunan Tanggul Sungai								0					0
1	03	02	1.01	10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing		Panjang/Jumlah Sarpas Yang dibangun		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		15 Keg		25,365,236,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				26,253,600,000
1	03	02	1.01	11	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir								0					0
1	03	02	1.01	18	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya								0					0
1	03	02	1.01	22	Rehabilitasi Sumur Air Tanah untuk Air Baku		Terjaganya Sumur Air Tanah untuk Air Beku		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 Lokasi		500,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				600,000,000
1	03	02	1.01	24	Rehabilitasi Tanggul Sungai								0					0
1	03	02	1.01	35	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing								0					0
1	03	02	1.01	46	Normalisasi/Restorasi Sungai		Jumlah Sungai yang dinormalisasi/direstorasi/ dipelihara		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 Unit		8,250,350,202	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				9,250,350,000
1	03	02	1.01	49	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya		Jumlah waduk/embung/situ serta bangunan penampung lainnya yang optimal terpelihara		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 Unit		3,614,718,543	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4,250,632,500
1	03	02	1.01	63	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi		Jumlah Dokumen Yang Di Keluarkan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Lap		2,350,632,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2,563,500,000
1	**03**	**02**	**1.02**		**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota**								**37,253,000,000**					**20,451,889,300**
1	03	02	1.02	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa		Jumlah dokumen yang dikeluarkan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		15 Dok		4,256,890,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5,152,365,000

1	03	02	1.02	02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan		Panjang/Luas Jaringan Irigasi yang di Bangun				10 Hektar		1,000,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,500,000,000
1	03	02	1.02	04	Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa		Panjang/Luas Jaringan Rawa yang di bangun				5 Hektar		1,000,000,000					1,500,000,000
1	03	02	1.02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan		Panjang/Luas Jaringan DI yang direhab		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		250 Hektar		23,992,491,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4,256,852,000
1	03	02	1.02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan		Panjang/Luas Jaringan DI yang telah dibangun terpelihara		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		200 Hektar		3,256,983,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3,856,960,000
1	03	02	1.02	23	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa		Panjang/luas jaringan DR yang berfungsi optimal yang terpelihara		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		200 Hektar		2,895,670,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3,285,360,000
1	03	02	1.02	29	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemeliharaan Kawasan Rawa		Jumlah Dokumen /laporan yang dikeluarkan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Dok		850,965,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				900,352,300
1	**03**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**								**2,350,690,500**					**2,850,690,500**
1	**03**	**03**	**1.01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota**								**2,350,690,500**					**2,850,690,500**
1	03	03	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM		Persentase peningkatan rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		50%		2,350,690,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2,850,690,500
1	**03**	**04**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**								**4,030,600,000**					**3,030,600,000**
1	**03**	**04**	**1.01**		**Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional**								**4,030,600,000**					**3,030,600,000**
1	03	04	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi		Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 Dok		4,030,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3,030,600,000
1	03	04	1.01	06	Penyediaan Sarana Dan Prasarana Persampahan								0					0
1	**03**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**								**2,113,682,001**					**3,113,682,001**
1	**03**	**05**	**1.01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional**								**2,113,682,001**					**3,113,682,001**
1	03	05	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik		Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun (IPA/air limba dan TPA regional di PKKN, PKNp		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 dokumen		1,298,716,834	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,798,716,834
1	03	05	1.01	02	Pemicuan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Pembinaan Penyediaan Prasarana Cubluk		Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun (IPA/air limba dan TPA regional di PKKN, PKNp		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 dokumen		814,965,167	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,314,965,167
1	**03**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**								**0**					**0**
1	**03**	**06**	**1.01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi**								**0**					**0**
1	03	06	1.01	02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan								0					0
1	03	06	1.01	04	Penyediaan Sistem Drainase Perkotaan								0					0
1	**03**	**07**			**PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**								**88,679,643,000**					**184,179,643,000**
1	**03**	**07**	**1.01**		**Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi**								**88,679,643,000**					**184,179,643,000**
1	03	07	1.01	01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi		Terbangunnya Bangunan nfrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		13 unit		88,679,643,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				184,179,643,000
1	**03**	**08**			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**								**75,792,230,000**					**78,850,200,000**
1	**03**	**08**	**1.01**		**Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi**								**75,792,230,000**					**78,850,200,000**
1	03	08	1.01	01	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi		Jumlah gedung yang terbangun dan terpelihara		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		17 unit		38,340,146,489	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				32,465,146,489

1	03	08	1.01	02	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi		Jumlah gedung yang terbangun dan terpelihara		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10 unit		37,452,083,511	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				46,385,053,511
1	**03**	**09**			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**								**26,000,000,000**					**20,000,000,000**
1	**03**	**09**	**1.01**		**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**								**26,000,000,000**					**20,000,000,000**
1	03	09	1.01	03	Penataan Bangunan dan Lingkungan		Jumlah Bangunan dan Gedung yang di Bangun				3 Unit		26,000,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				20,000,000,000
1	**03**	**10**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**								**1,541,685,697,000**					**1,863,797,915,000**
1	**03**	**10**	**1.01**		**Penyelenggaraan Jalan Provinsi**								**1,541,685,697,000**					**1,863,797,915,000**
1	03	10	1.01	02	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan		Jumlah lokasi yang dibebaskan untuk Jalan dan Jembatan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 Lokasi		35,000,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				40,000,000,000
1	03	10	1.01	04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan		Jumlah Dok/Lap yang di keluarkan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		8 Dok		25,350,206,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				26,506,230,000
1	03	10	1.01	05	Pembangunan Jalan		Panjang jalan yang dibangun		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		25 Km		200,000,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				220,000,000,000
1	03	10	1.01	06	Pelebaran Jalan Menuju Standar		Panjang Jalan yang di lebarkan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		32 Km		244,800,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				198,000,000,000
1	03	10	1.01	08	Rekonstruksi Jalan		Panjang Jalan yang dibangun		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		45 Km		315,000,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				229,249,400,000
1	03	10	1.01	09	Rehabilitasi Jalan		Panjang Jalan yang Rehabilitasi		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		27 Km		96,512,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				98,250,650,000
1	03	10	1.01	10	Pemeliharaan Berkala Jalan		Panjang Jalan yang diperlihara		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		40 Km		132,000,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				126,000,000,000
1	03	10	1.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan		Panjang Jalan yang diperlihara		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		25 Km		90,850,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				245,185,000,000
1	03	10	1.01	12	Pembangunan Jembatan		Panjang Jembatan Yang di Bangun		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		360 Meter		205,200,000,000	Pendapatan Pajak Daerah				540,000,000,000
1	03	10	1.01	19	Pemeliharaan Rutin Jembatan		Jumlah jembatan yang direhab/pelihara		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		852 Meter		50,972,391,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				60,350,600,000
1	03	10	1.01	23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan		Jumlah Dok/Lap yang di keluarkan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		15 Dok		146,000,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				80,256,035,000
1	**03**	**11**			**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**								**5,852,941,251**					**6,495,026,600**
1	**03**	**11**	**1.01**		**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi**								**3,502,850,000**					**3,858,326,000**
1	03	11	1.01	02	Penyiapan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan		Jumlah Orang yang Terlatih		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		35 Orang		856,982,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				900,857,000
1	03	11	1.01	04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi		jumlah SDM pelaku jasa konstruksi Tingkat Ahli yang berkompetensi		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		500 Orang		2,000,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2,256,900,000
1	03	11	1.01	07	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi		Jumlah Dok/lap yang dikeluarkan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Lap		645,867,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				700,569,000
1	**03**	**11**	**1.02**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi**								**2,350,091,251**					**2,636,700,600**
1	03	11	1.02	01	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi		Jumlah Laporan Kegiatan SIPJAKI		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Lap		850,895,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				900,250,600
1	03	11	1.02	03	Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI		Jumlah SDM Pelaku Administrator SIPJAKI Yang Berkompeten dan Berkualitas		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		60 Orang		500,985,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				585,600,000
1	03	11	1.02	04	Penyusunan Data dan Informasi Proyek Bidang PUPR yang dapat Dilaksanakan dengan Skema KPDBU		jumlah SDM KPBU Berkualitas		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		45 Orang		400,671,951	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				500,850,000
1	03	11	1.02	05	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi		Tersedianya Data Informasi Jasa Konstruksi		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 Jenis		597,538,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				650,000,000
1	**03**	**12**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**								**7,159,848,900**					**6,931,550,000**
1	**03**	**12**	**1.01**		**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi**								**3,473,988,450**					**2,900,000,000**
1	03	12	1.01	01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi		Jumlah dokumen yang dikeluarkan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 Dok		1,773,988,450	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				850,000,000
1	03	12	1.01	03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang		Jumlah dokumen yang dikeluarkan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Dok		700,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				800,000,000
1	03	12	1.01	04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang		Jumlah dokumen yang dikeluarkan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Dok		1,000,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,250,000,000

1	**03**	**12**	**1.02**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang**								**500,250,300**						**581,250,000**
1	03	12	1.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Provinsi		Jumlah dokumen yang dikeluarkan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Dok		300,256,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					350,600,000
1	03	12	1.02	04	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang		Jumlah dokumen yang dikeluarkan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Dok		199,994,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					230,650,000
1	**03**	**12**	**1.03**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi**								**2,555,090,150**						**2,750,300,000**
1	03	12	1.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah		Jumlah dokumen yang dikeluarkan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 Dok		1,954,555,150	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2,000,000,000
1	03	12	1.03	02	Sistem Informasi Penataan Ruang		Jumlah dokumen yang dikeluarkan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Dok		600,535,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					750,300,000
1	**03**	**12**	**1.04**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi**								**630,520,000**						**700,000,000**
1	03	12	1.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang		Jumlah dokumen yang dikeluarkan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 Dok		350,250,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					400,000,000
1	03	12	1.04	03	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang		Jumlah PNS yang menjadi PPNS Bidang Penataan Ruang		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10 Orang		280,270,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					300,000,000
1	**04**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**								**27,299,024,500**						**30,151,350,200**
1	**04**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**								**1,778,524,500**						**2,400,750,200**
1	**04**	**02**	**1.01**		**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi**								**628,024,500**						**900,250,200**
1	04	02	1.01	01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi		Jumlah dokumen/laporan yang dikeluarkan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Dok		528,024,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					650,250,200
1	04	02	1.01	04	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana		Jumlah dokumen/laporan yang dikeluarkan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Dok		100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					250,000,000
1	**04**	**02**	**1.02**		**Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi**								**500,000,000**						**650,000,000**
1	04	02	1.02	01	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana		Jumlah dokumen/laporan yang dikeluarkan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 Dok		500,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					650,000,000
1	**04**	**02**	**1.03**		**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi**								**650,500,000**						**850,500,000**
1	04	02	1.03	04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana		Jumlah rumah khusus yang dibangun		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Unit		650,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					850,500,000
1	04	02	1.03	05	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi								0						0
1	**04**	**05**			**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**								**25,520,500,000**						**27,750,600,000**
1	**04**	**05**	**1.01**		**Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman**								**25,520,500,000**						**27,750,600,000**
1	04	05	1.01	01	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman		Jumlah dokumen/laporan yang dikeluarkan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6 Dok		3,250,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4,500,000,000
1	04	05	1.01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman		Jumlah PSU permukiman yang terbangun		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		11 Kab/Kota		22,270,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					23,250,600,000
												TOTAL	**1,925,370,424,671**						**2,349,452,658,384**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Jambi
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.03.1.04.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.0.00.01.0001 UPTD workshop dan Peralatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**03**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**								**41,011,285,828**					**43,147,365,250**
1	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**10,201,765,828**					**11,391,065,250**
1	**03**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**450,300,200**					**550,300,850**
1	03	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Orang		450,300,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				550,300,850
1	**03**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**5,111,647,133**					**5,780,860,500**
1	03	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Komponen dan Instalasi listrik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Tahun		60,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				65,000,000
1	03	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				4,671,224,333	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5,250,360,000
1	03	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Tersedianya barang cetak dan penggadaan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		55,172,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				65,250,500
1	03	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Rapat Konsultansi dan Koordinasi yang di laksanakan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		150 Orang		325,250,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				400,250,000
1	**03**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**450,250,442**					**558,753,600**
1	03	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Materai 6000 dan 3000 Pertahun		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Tahun		6,250,350	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				7,850,500
1	03	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Periode Pembayaran Rekening, Telepon dan Internet		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Tahun		193,364,592	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				250,652,500
1	03	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah JUnit Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		25 Unit		250,635,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				300,250,600
1	**03**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**4,189,568,053**					**4,501,150,300**
1	03	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		PJumlah Alat Berat dan Alat Pendukung Lainnya		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		57 Unit		200,250,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				250,500,000
1	03	01	1.09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar		Jumlah Barang Milik Daerah yang di Pelihara		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		57 Unit		3,989,317,753	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4,250,650,300
1	**03**	**10**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**								**30,809,520,000**					**31,756,300,000**
1	**03**	**10**	**1.01**		**Penyelenggaraan Jalan Provinsi**								**30,809,520,000**					**31,756,300,000**
1	03	10	1.01	04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan		Panjang Jalan Provinsi yang dipelihara		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		400 Km		29,559,170,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				30,256,000,000
1	03	10	1.01	09	Rehabilitasi Jalan		Terpeliharaannya Jalan Provinsi		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		400 Km		1,250,350,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,500,300,000
												TOTAL	**41,011,285,828**					**43,147,365,250**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Jambi
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.03.1.04.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.0.00.01.0002 UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**03**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**								**7,089,494,447**					**8,277,300,900**
1	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**7,089,494,447**					**8,277,300,900**
1	**03**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**650,000,000**					**700,000,000**
1	03	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Panjang Jalan Provinsi yang dipeliharaJumlah Pegawai yang mengikuti Diklat Laboratorium		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		25 Orang		650,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				700,000,000
1	**03**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**350,200,000**					**376,250,300**
1	03	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah jenis ATK yang diadakan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		30 Jenis/set		194,499,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				200,500,000
1	03	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Tersediannya Barang Cetak dan Penggandaan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Bulan		75,350,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				85,250,300
1	03	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Tersedianya makan minum		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Tahun		80,350,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				90,500,000
1	**03**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**5,339,094,147**					**6,350,200,000**
1	03	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		jumlah jenis pengadaan peralatan Mesin dan alat Laboratorium		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		7 Unit		5,339,094,147	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				6,350,200,000
1	**03**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**750,200,300**					**850,850,600**
1	03	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Barang Laboratorium yang di Pelihara		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10 Unit		750,200,300					850,850,600
												TOTAL	**7,089,494,447**					**8,277,300,900**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Jambi
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Dinas Satuan Polisi Pamong Praja

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
										Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**05**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**								**35,974,405,245**					**38,093,386,286**
1	**05**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**27,499,757,051**					**33,777,141,650**
1	**05**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**198,808,550**					**263,745,150**
1	05	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Jumlah dokumen perencanaan	Pemenuhan komponen SAKIP	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	70 persen	1 dokumen	88 Baik	17,547,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP	70 persen	55,029,300
1	05	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Nilai SAKIP	Jumlah dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA)	Pemenuhan komponen SAKIP	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	70 persen	1 dokumen	88 Baik	3,850,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP	70 persen	4,493,250
1	05	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai SAKIP	Jumlah dokumen Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA Perubahan))	Pemenuhan komponen SAKIP	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	70 persen	1 dokumen	88 Baik	3,733,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP	70 persen	4,293,250
1	05	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai SAKIP	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)	Pemenuhan komponen SAKIP	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	70 persen	1 dokumen	88 Baik	5,340,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP	70 persen	6,341,900
1	05	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Nilai SAKIP	Jumlah Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPA)	Pemenuhan komponen SAKIP	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	70 persen	1 dokumen	88 Baik	5,040,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP	70 persen	5,796,500
1	05	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai SAKIP	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja	Pemenuhan komponen SAKIP	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	70 persen	1 kegiatan	88 Baik	11,151,450	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP	70 persen	12,824,200
1	05	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Evaluasi kinerja	Pemenuhan komponen SAKIP	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 persen	3 laporan	88 Baik	152,145,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP	70 persen	174,966,750
1	**05**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**24,666,042,726**					**28,365,483,050**
1	05	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Jumlah gaji dan tunjangan ASN	Persentase pelayanan administrasi keuangan	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	100	14 bulan	100%	24,435,352,046	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	28,100,654,900
1	05	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Persentase pelayanan administrasi keuangan	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	100	12 bulan	100%	181,744,530	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	209,006,250
1	05	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Pelaksanaan akuntansi SKPD	Persentase pelayanan administrasi keuangan	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	100	12 bulan	100%	8,335,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	9,586,000
1	05	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Laporan keuangan akhir tahun SKPD	Persentase pelayanan administrasi keuangan	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	100	1 laporan	100%	10,824,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	12,448,100
1	05	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Persentase pelayanan administrasi keuangan	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	100	1 kegiatan	100%	8,927,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	10,318,600

1	05	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Laporan keuangan semesteran SKPD	Persentase pelayanan administrasi keuangan	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	100	2 laporan	100%	10,835,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	11,943,600
1	05	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Pelaporan dan analis prognosis realisasi anggaran	Persentase pelayanan administrasi keuangan	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	100	1 laporan	100%	10,022,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	11,525,600
1	**05**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**342,124,450**					**393,362,100**
1	05	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	100	175 stel	100%	198,540,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	228,240,000
1	05	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Jumlah pengolahan data administrasi pegawai	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	100	175 dokumen	100%	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	28,750,000
1	05	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Periode pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	100	12 bulan	100%	35,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	40,250,000
1	05	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Jumlah monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	100	175 dokumen	100%	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	28,750,000
1	05	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Jumlah diklat pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	100	1 paket	100%	34,655,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	39,853,500
1	05	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	100	2 kegiatan	100%	23,929,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	27,518,600
1	**05**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**728,944,925**					**843,909,000**
1	05	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Persentase pelayanan umum kantor	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	100	4 jenis	100%	23,623,625	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	29,529,500
1	05	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Persentase pelayanan umum kantor	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	100	1 paket	100%	53,676,050	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	61,727,450
1	05	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Jumlah peralatan rumah tangga	Persentase pelayanan umum kantor	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	100	1 paket	100%	27,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	35,000,000
1	05	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Jumlah bahan logistik kantor	Persentase pelayanan umum kantor	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	100	1 paket	100%	48,760,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	56,074,000
1	05	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Persentase pelayanan umum kantor	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	100	1 paket	100%	49,546,950	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	56,979,000

1	05	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Periode koordinasi dan konsultasi SKPD	Persentase pelayanan umum kantor	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	12 bulan	100%	479,738,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	551,699,050
1	05	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Periode penatausahaan arsip dinamis SKPD	Persentase pelayanan umum kantor	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	100	12 bulan	100%	21,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	24,150,000
1	05	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik	Persentase pelayanan umum kantor	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	100	1 paket	100%	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	28,750,000
1	**05**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**530,000,000**					**2,875,000,000**
1	05	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Jumlah pengadaan mebel	Periode pengadaan barang milik daerah	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	100	1 paket	12 bulan	190,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	175,000,000
1	05	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Periode pengadaan barang milik daerah	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	100	1 paket	12 bulan	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	200,000,000
1	05	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Jumlah pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Periode pengadaan barang milik daerah	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	100	1 paket	12 bulan	190,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	2,500,000,000
1	**05**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**328,268,425**					**377,508,750**
1	05	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Periode penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Periode pemenuhan jasa kantor	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	100	12 bulan	12 bulan	170,082,725	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	195,595,200
1	05	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Periode penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Periode pemenuhan jasa kantor	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	100	12 bulan	12 bulan	158,185,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	181,913,550
1	**05**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**705,567,975**					**658,133,600**
1	05	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Periode penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Periode pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	100	12 bulan	12 bulan	469,228,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	539,613,000
1	05	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Periode pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	100	1 paket	12 bulan	37,235,275	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	42,820,600
1	05	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Periode pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	100	1 paket	12 bulan	199,104,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	75,700,000

1	**05**	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**								**6,965,441,100**						**2,566,485,711**
1	**05**	**02**	**1.01**		**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**								**6,065,171,100**						**1,535,945,711**
1	05	02	1.01	01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah deteksi dini dan cegah dini Jumlah patroli Jumlah pembinaan dan penyuluhan Jumlah pengamanan Jumlah pengawalan	Penangangan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100% 100% 100% 100% 100%	100%	4,543,562,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	100%	4,982,261
1	05	02	1.01	02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah antisipasi aksi demonstrasi Jumlah penertiban	Penangangan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100% 100%	100%	305,609,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	100%	375,962,750
1	05	02	1.01	03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah rapat koordinasi trantibumlinmas	Penangangan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	2 kegiatan	100%	70,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	100%	95,000,000
1	05	02	1.01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah Satlinmas yang dilantik dan dikukuhkan	Penangangan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1530 orang	100%	300,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	100%	300,000,000
1	05	02	1.01	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	Pelantikan dan pengukuhan Satlinmas	Penangangan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	5 kegiatan	100%	300,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	100%	300,000,000
1	05	02	1.01	06	Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	Kerjasama kemitraan dalam teknik pencegahan kejahatan	Penangangan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	3 kegiatan	100%	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	100%	200,000,000
1	05	02	1.01	07	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan	Penangangan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	100%	1 paket	100%	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	100%	0
1	05	02	1.01	08	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	Penyusunan SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta gangguan trantibum	Penangangan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	100%	1 kegiatan	100%	96,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	100%	85,000,700
1	05	02	1.01	09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah layanan dalam rangka dampak penegakan Perda dan Perkada	Penangangan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	100%	100%	100%	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	100%	175,000,000
1	**05**	**02**	**1.02**		**Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur**								**450,270,000**						**550,540,000**
1	05	02	1.02	01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Sosialisasi penegakan peraturan daerah dan peraturan gubernur	Persentase pelanggaran Perda dan Perkada yang diselesaikan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	2 kegiatan	100%	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100%	125,000,000
1	05	02	1.02	02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan gubernur yang memuat sanksi	Persentase pelanggaran Perda dan Perkada yang diselesaikan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	22 perda dan pergub	100%	150,270,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100%	175,270,000
1	05	02	1.02	03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Penindakan pelanggaran peraturan daerah dan peraturan gubernur yang ditindak	Persentase pelanggaran Perda dan Perkada yang diselesaikan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100%	250,270,000
1	**05**	**02**	**1.03**		**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi**								**450,000,000**						**480,000,000**
1	05	02	1.03	01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah fasilitasi pengembangan kapasitas dan karier PPNS	Fasilitasi dan legalitas PPNS Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	3 kegiatan	100%	250,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100%	275,000,000
1	05	02	1.03	02	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Pemberkasan administrasi penyidikan oleh PPNS penegak Perda, dukungan pelaksanaan sidang ditempat, penguatan sekretariat bersama PPNS	Fasilitasi dan legalitas PPNS Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 paket	100%	200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100%	205,000,000

1	**05**	**04**			**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**								**1,509,207,094**						**1,749,758,925**
1	**05**	**04**	**1.01**		**Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran**								**1,509,207,094**						**1,749,758,925**
1	05	04	1.01	01	Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	Pemenuhan tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran	Jumlah data dan informasi	Penyediaan data dan informasi rawan kebakaran	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 dokumen	11 kab/kota	104,704,844	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemenuhan tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran	100%	130,881,100
1	05	04	1.01	02	Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	Pemenuhan tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran	Pemutakhiran dan penyusunan rencana induk sistem proteksi kebakaran	Penyediaan data dan informasi rawan kebakaran	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 kegiatan	11 kab/kota	90,332,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemenuhan tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran	100%	122,915,625
1	05	04	1.01	03	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Pemenuhan tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran	Jumlah pembinaan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Penyediaan data dan informasi rawan kebakaran	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	2 kegiatan	11 kab/kota	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemenuhan tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran	100%	150,000,000
1	05	04	1.01	04	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Pemenuhan tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran	Jumlah kerjasama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Penyediaan data dan informasi rawan kebakaran	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 kegiatan	11 kab/kota	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemenuhan tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran	100%	175,000,000
1	05	04	1.01	05	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Pemenuhan tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri	Penyediaan data dan informasi rawan kebakaran	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	100%	1 paket	11 kab/kota	170,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemenuhan tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran	100%	215,000,000
1	05	04	1.01	06	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Pemenuhan tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran	Jumlah standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri yang disusun	Penyediaan data dan informasi rawan kebakaran	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	100%	1 pedoman	11 kab/kota	165,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemenuhan tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran	100%	0
1	05	04	1.01	08	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Pemenuhan tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Penyediaan data dan informasi rawan kebakaran	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	100%	1 paket	11 kab/kota	250,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemenuhan tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran	100%	300,000,000
1	05	04	1.01	09	Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	Pemenuhan tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran	Jumlah bimtek terkait pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	Penyediaan data dan informasi rawan kebakaran	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	2 kegiatan	11 kab/kota	84,169,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemenuhan tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran	100%	105,212,200
1	05	04	1.01	10	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Pemenuhan tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran	Jumlah sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat terkait pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Penyediaan data dan informasi rawan kebakaran	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	2 kegiatan	11 kab/kota	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemenuhan tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran	100%	150,750,000

1	05	04	1.01	11	Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Pelaporan Kebakaran dan Penyelamatan Secara Terintegrasi	Pemenuhan tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran	Periode penyelenggaraan sistem informasi dan pelaporan kebakaran dan penyelamatan secara terintegrasi	Penyediaan data dan informasi rawan kebakaran	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	100%	12 bulan	11 kab/kota	200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemenuhan tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran	100%	250,000,000
1	05	04	1.01	12	Penyajian Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan	Pemenuhan tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran	Jumlah data kejadian dan dampak kebakaran serta penyelamatan yang disajikan	Penyediaan data dan informasi rawan kebakaran	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	100%	1 laporan	11 kab/kota	95,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemenuhan tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran	100%	150,000,000
												TOTAL	**35,974,405,245**					**38,093,386,286**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Jambi
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
										Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**05**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**								**18,399,143,113**					**21,048,662,014**
1	**05**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**10,593,897,883**					**11,517,677,460**
1	**05**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**300,000,000**					**400,000,000**
1	05	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai SAKIP	Jumlah tersedianya Laporan BPBD Prov Jambi	Tersusunnya laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		70 persen	9 dokumen	100%	300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	70 persen	400,000,000
1	**05**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**6,403,897,883**					**7,732,677,460**
1	05	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Periode penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Terlaksananya Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah		100	14 Bulan	1 Tahun	6,273,897,883	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	7,582,677,460
1	05	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Jumlah tenaga administrasi keuangan	Terlaksananya Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah		100	20 orang	1 Tahun	130,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	150,000,000
1	**05**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**130,000,000**					**150,000,000**
1	05	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	persentase peningkatansarana dan prasarana aparatur pada tahun berkenaan	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya fasilitasi administrasi kepegawaian perangkat daerah		60	60 stel	100%	65,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase peningkatansarana dan prasarana aparatur pada tahun berkenaan	60	75,000,000
1	05	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	persentase peningkatansarana dan prasarana aparatur pada tahun berkenaan	Jumlah SDM yang terlatih	Tersedianya fasilitasi administrasi kepegawaian perangkat daerah		60	66 orang	100%	65,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase peningkatansarana dan prasarana aparatur pada tahun berkenaan	60	75,000,000
1	**05**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**705,000,000**					**820,000,000**
1	05	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Jumlah komponen instalasi listrik yang dipasang	Terlaksananya Kegiatan administrasi umum perangkat daerah		100	4 item	1 Tahun	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	70,000,000
1	05	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Jumlah makanan dan minuman sesuai kebutuhan	Terlaksananya Kegiatan administrasi umum perangkat daerah		100	1 tahun	1 Tahun	60,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	75,000,000
1	05	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya Kegiatan administrasi umum perangkat daerah		100	10 dokumen/buku	1 Tahun	80,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	125,000,000
1	05	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	Terlaksananya Kegiatan administrasi umum perangkat daerah		100	500 eksamplar	1 Tahun	30,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	50,000,000

1	05	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Jumlah Perjalanan Dinas serta Tersusunnya program kegiatan penanggulangan bencana di Provinsi Jambi	Terlaksananya Kegiatan administrasi umum perangkat daerah		100	1 kegiatan	1 Tahun	485,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	500,000,000
1	**05**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**1,120,000,000**					**150,000,000**
1	05	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Tersedianya kendaraan dinas perorangan dan kendaraan dinas jabatan				1 tahun		450,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
1	05	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Tersedianya kendaraan dinas operasional atau lapangan				1 tahun		550,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
1	05	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan gedung kantor dan peralatan yang diadakan				1 tahun		120,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				150,000,000
1	**05**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**385,000,000**					**465,000,000**
1	05	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Jumlah surat yang dikirim	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100	1 tahun	1 Tahun	8,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	10,000,000
1	05	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Jumlah tagihan yang dibayar	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100	4 tagihan	1 Tahun	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	240,000,000
1	05	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Jumlah alat tulis kantor yang dibeli	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100	1 tahun	1 Tahun	117,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	135,000,000
1	05	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Jumlah Alat dan Bahan Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100	1 tahun	1 Tahun	60,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	80,000,000
1	**05**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**1,550,000,000**					**1,800,000,000**
1	05	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Jumlah peralatan kendaraan dinas jabatan yang terpelihara/diperbaiki	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100	1 tahun	1 Tahun	600,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	700,000,000
1	05	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Jumlah peralatan kendaraan dinas operasional yang terpelihara/diperbaiki	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100	1 tahun	1 Tahun	720,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	800,000,000
1	05	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100	1 gedung	1 Tahun	230,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	300,000,000
1	**05**	**03**			**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**								**7,805,245,230**					**9,530,984,554**
1	**05**	**03**	**1.01**		**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi**								**500,000,000**					**700,000,000**
1	05	03	1.01	01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	Julmlah Penurunan Indeks Resiko Bencana	Tersusunnya laporan tentang kajian resiko bencana	Terlaksananya pelayanan informasi rawan bencana Provinsi		0	1 tahun	1 Tahun	250,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Julmlah Penurunan Indeks Resiko Bencana	0	300,000,000
1	05	03	1.01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Julmlah Penurunan Indeks Resiko Bencana	Tersosialisasinya informasi rawan bencana provinsi	Terlaksananya pelayanan informasi rawan bencana Provinsi		0	1 tahun	1 Tahun	250,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Julmlah Penurunan Indeks Resiko Bencana	0	400,000,000
1	**05**	**03**	**1.02**		**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana**								**3,146,380,976**					**3,885,322,155**
1	05	03	1.02	01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	Julmlah Penurunan Indeks Resiko Bencana	Terlaksananya kegiatan penanggulangan bencana	Meningkatnya Kesiapsiagaan Masyarakat terhadap Bencana		0	1 tahun	1 Tahun	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Julmlah Penurunan Indeks Resiko Bencana	0	170,000,000

1	05	03	1.02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Julmlah Penurunan Indeks Resiko Bencana	Terlatihnya tenaga relawan dalam penanggulangan bencana	Meningkatnya Kesiapsiagaan Masyarakat terhadap Bencana		0	80 orang	1 Tahun	170,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Julmlah Penurunan Indeks Resiko Bencana	0	200,000,000
1	05	03	1.02	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Julmlah Penurunan Indeks Resiko Bencana	Lancarnya kegiatan aktifitas pada posko PB	Meningkatnya Kesiapsiagaan Masyarakat terhadap Bencana		0	2 kegiatan	1 Tahun	185,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Julmlah Penurunan Indeks Resiko Bencana	0	200,000,000
1	05	03	1.02	04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Julmlah Penurunan Indeks Resiko Bencana	Jumlah jenis peralatan kebencanaan yang dipersiapkan	Meningkatnya Kesiapsiagaan Masyarakat terhadap Bencana		0	1 unit	1 Tahun	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Julmlah Penurunan Indeks Resiko Bencana	0	170,000,000
1	05	03	1.02	05	Pengelolaan Risiko Bencana	Julmlah Penurunan Indeks Resiko Bencana	Meningkatnya identifikasi resiko bencana	Meningkatnya Kesiapsiagaan Masyarakat terhadap Bencana		0	1 tahun	1 Tahun	130,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Julmlah Penurunan Indeks Resiko Bencana	0	150,000,000
1	05	03	1.02	06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Julmlah Penurunan Indeks Resiko Bencana	Terbentuknya desa tangguh bencana	Meningkatnya Kesiapsiagaan Masyarakat terhadap Bencana		0	4 desa	1 Tahun	700,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Julmlah Penurunan Indeks Resiko Bencana	0	820,000,000
1	05	03	1.02	07	Penanganan Pascabencana Provinsi	Julmlah Penurunan Indeks Resiko Bencana	Jumlah rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas dan insfrastruktur publik	Meningkatnya Kesiapsiagaan Masyarakat terhadap Bencana		0	11 kab/kota	1 Tahun	605,180,096	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Julmlah Penurunan Indeks Resiko Bencana	0	995,322,155
1	05	03	1.02	08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Julmlah Penurunan Indeks Resiko Bencana	Kompetensi dan keahlian SDM TRC BPBD dalam penanganan kebencanaan dan penggunaan peralatan bencana sebanyak 500 orang	Meningkatnya Kesiapsiagaan Masyarakat terhadap Bencana		0	90 orang	1 Tahun	506,200,880	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Julmlah Penurunan Indeks Resiko Bencana	0	500,000,000
1	05	03	1.02	09	Penyusunan Rencana Kontijensi	Julmlah Penurunan Indeks Resiko Bencana	Tersusunnya rencana kontijensi	Meningkatnya Kesiapsiagaan Masyarakat terhadap Bencana		0	1 tahun	1 Tahun	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Julmlah Penurunan Indeks Resiko Bencana	0	250,000,000
1	05	03	1.02	10	Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Julmlah Penurunan Indeks Resiko Bencana	Terlaksananya apel kesiapsiagaan penanggulangan bencana	Meningkatnya Kesiapsiagaan Masyarakat terhadap Bencana		0	2 kali	1 Tahun	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Julmlah Penurunan Indeks Resiko Bencana	0	250,000,000
1	05	03	1.02	11	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Julmlah Penurunan Indeks Resiko Bencana	Tersusunnya laporan penanggulangan kedaruratan bencana	Meningkatnya Kesiapsiagaan Masyarakat terhadap Bencana		0	1 tahun	1 Tahun	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Julmlah Penurunan Indeks Resiko Bencana	0	180,000,000
1	**05**	**03**	**1.03**		**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**								**3,184,747,054**					**3,838,221,759**
1	05	03	1.03	01	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Julmlah Penurunan Indeks Resiko Bencana	Menurunnya kasus wabah penyakit	Terselenggaranya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		0	1 tahun	100%	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Julmlah Penurunan Indeks Resiko Bencana	0	170,000,000
1	05	03	1.03	02	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Julmlah Penurunan Indeks Resiko Bencana	Terujudnya pengerahan personil ke lokasi bencana	Terselenggaranya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		0	11 kab/kota	100%	1,909,537,596	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Julmlah Penurunan Indeks Resiko Bencana	0	2,100,491,355
1	05	03	1.03	03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Julmlah Penurunan Indeks Resiko Bencana	Terwujudnya sinergi dalam proses penanggulangan bencana di setiap tingkatan	Terselenggaranya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		0	11 kab/kota	100%	125,209,458	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Julmlah Penurunan Indeks Resiko Bencana	0	137,730,404
1	05	03	1.03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Julmlah Penurunan Indeks Resiko Bencana	Jumlah jenis logistik kebencanaan yang dipersiapkan	Terselenggaranya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		0	25 jenis	100%	600,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Julmlah Penurunan Indeks Resiko Bencana	0	960,000,000
1	05	03	1.03	05	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Julmlah Penurunan Indeks Resiko Bencana	Terlaksananya kegiatan penanggulangan bencana	Terselenggaranya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		0	1 tahun	100%	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Julmlah Penurunan Indeks Resiko Bencana	0	220,000,000

1	05	03	1.03	06	Respon Cepat Bencana Non ALam Epidemi/Wabah Penyakit	Julmlah Penurunan Indeks Resiko Bencana	Menurunnya angka kasus wabah penyakit	Terselenggaranya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		0	1 tahun	100%	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Julmlah Penurunan Indeks Resiko Bencana	0	250,000,000
1	**05**	**03**	**1.04**		**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**								**974,117,200**					**1,107,440,640**
1	05	03	1.04	01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah	Julmlah Penurunan Indeks Resiko Bencana	Tersusunnya penanggulangan bencana daerah	Meningkatnya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		0	1 tahun	100%	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Julmlah Penurunan Indeks Resiko Bencana	0	180,000,000
1	05	03	1.04	02	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	Julmlah Penurunan Indeks Resiko Bencana	Terlaksananya Kegiatan Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah Penanggulangan Bencana secara cepat dan tepat	Meningkatnya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		0	1 tahun	100%	320,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Julmlah Penurunan Indeks Resiko Bencana	0	350,000,000
1	05	03	1.04	03	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Julmlah Penurunan Indeks Resiko Bencana	Terlaksananya kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana	Meningkatnya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		0	1 tahun	100%	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Julmlah Penurunan Indeks Resiko Bencana	0	180,000,000
1	05	03	1.04	04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Julmlah Penurunan Indeks Resiko Bencana	Terwujudnya pemantauan bencana dan tersedianya informasi bencana secara update	Meningkatnya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		0	11 kab/kota	100%	275,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Julmlah Penurunan Indeks Resiko Bencana	0	302,500,000
1	05	03	1.04	05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi	Julmlah Penurunan Indeks Resiko Bencana	Terselenggaranya penataan sistem penanggulangan bencana darurat	Meningkatnya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		0	11 kab/kota	100%	79,117,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Julmlah Penurunan Indeks Resiko Bencana	0	94,940,640
												TOTAL	**18,399,143,113**					**21,048,662,014**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Jambi
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.06.2.12.0.00.01.0000 Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 1.06.2.12.0.00.01.0000 Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
										Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**06**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**								**67,311,571,800**					**96,588,000,000**
1	**06**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**31,010,871,800**					**47,970,000,000**
1	**06**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**500,000,000**					**850,000,000**
1	06	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Jumlah laporan	Jumlah perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja dinas dan uptd	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	B indeks	1 Tahun	1 tahun	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	B indeks	75,000,000
1	06	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Nilai SAKIP	Jumlah laporan	Jumlah perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja dinas dan uptd	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	B indeks	1 Tahun	1 tahun	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	B indeks	50,000,000
1	06	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai SAKIP	Jumlah laporan	Jumlah perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja dinas dan uptd	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	B indeks	1 Tahun	1 tahun	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	B indeks	75,000,000
1	06	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai SAKIP	Jumlah laporan	Jumlah perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja dinas dan uptd	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	B indeks	1 Tahun	1 tahun	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	B indeks	75,000,000
1	06	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Nilai SAKIP	Jumlah laporan	Jumlah perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja dinas dan uptd	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	B indeks	1 Tahun	1 tahun	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	B indeks	75,000,000
1	06	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai SAKIP	Jumlah pelaporan selama 1 tahun	Jumlah perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja dinas dan uptd	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	B indeks	12 bulan	1 tahun	250,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP	B indeks	500,000,000
1	**06**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**25,350,000,000**					**40,550,000,000**
1	06	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai SAKIP	Periode Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Periode Jasa Administrasi keuangan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	B indeks	14 bulan	12 bulan	25,000,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP	B indeks	40,000,000,000
1	06	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Nilai SAKIP	Jumlah koordinasi dan penyusunan laporan keuangan	Periode Jasa Administrasi keuangan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	B indeks	12 bulan	12 bulan	350,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP	B indeks	550,000,000
1	**06**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**150,000,000**					**175,000,000**
1	06	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Nilai SAKIP	Jumlah Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah pelaksanaan administrasi barang milik daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	B indeks	1 Tahun	1 tahun	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	B indeks	175,000,000
1	**06**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**750,000,000**					**950,000,000**
1	06	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Nilai SAKIP	Jumlah Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Pelaksanaan administrasi kepegawaian dinas dan UPTD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	B indeks	250 Steel	1 tahun	350,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	B indeks	400,000,000
1	06	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Nilai SAKIP	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai yang terlaksana	Jumlah Pelaksanaan administrasi kepegawaian dinas dan UPTD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	B indeks	20 kali	1 tahun	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	B indeks	150,000,000
1	06	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai SAKIP	Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Pelaksanaan administrasi kepegawaian dinas dan UPTD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	B indeks	30 orang	1 tahun	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	B indeks	250,000,000

1	06	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai SAKIP	Jumlah Peserta bimbingan teknis implementasi Peraturan perundang-undangan	Jumlah Pelaksanaan administrasi kepegawaian dinas dan UPTD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	B indeks	20 orang	1 tahun	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	B indeks	150,000,000
1	**06**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**1,070,000,000**					**1,445,000,000**
1	06	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP	Periode pemenuhan kebutuhan instalasi listrik dan penerangan gedung kantor	Jumlah pelayanan administrasi Umum	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	B indeks	12 bulan	12 bulan	65,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP	B indeks	80,000,000
1	06	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP	Jumlah perlengkapan gedung kantor dan atk yang terpenuhi	Jumlah pelayanan administrasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	B indeks	20 jenis	12 bulan	350,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP	B indeks	450,000,000
1	06	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP	Periode Penyediaan makan dan minum	Jumlah pelayanan administrasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	B indeks	12 bulan	12 bulan	70,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP	B indeks	90,000,000
1	06	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai SAKIP	Jumlah Barang cetak dan penggandaan	Jumlah pelayanan administrasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	B indeks	12 paket	12 bulan	35,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP	B indeks	75,000,000
1	06	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP	Jumlah Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah pelayanan administrasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	B indeks	50 kali	12 bulan	550,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP	B indeks	750,000,000
1	**06**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**685,000,000**					**650,000,000**
1	06	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP	Jumlah Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	B indeks	1 unit	1 paket	600,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP	B indeks	500,000,000
1	06	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Nilai SAKIP	Jumlah pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	B indeks	1 paket	1 paket	85,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP	B indeks	150,000,000
1	**06**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**730,600,000**					**900,000,000**
1	06	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP	Periode Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pemenuhan jasa kantor	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	B indeks	12 bulan	12 bulan	480,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP	B indeks	550,000,000
1	06	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP	Periode penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah pemenuhan jasa kantor	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	B indeks	12 bulan	12 bulan	250,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP	B indeks	350,000,000
1	**06**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**1,775,271,800**					**2,450,000,000**
1	06	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan yang terpelihara	Jumlah kebutuhan perbaikan kendaraan dinas	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	B indeks	28 unit	12 bulan	571,485,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP	B indeks	650,000,000
1	06	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP	Periode Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Jumlah kebutuhan perbaikan kendaraan dinas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	B indeks	12 bulan	12 bulan	753,786,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP	B indeks	1,200,000,000
1	06	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP	Terpeliharanya peralatan dan mesin kantor	Jumlah kebutuhan perbaikan kendaraan dinas	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	B indeks	12 bulan	12 bulan	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP	B indeks	250,000,000
1	06	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP	Terpenuhinya pemeliharaan/rehabilitasi sarana pra saran kantor	Jumlah kebutuhan perbaikan kendaraan dinas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	B indeks	1 Tahun	12 bulan	300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	B indeks	350,000,000
1	**06**	**02**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**								**3,000,000,000**					**3,900,000,000**
1	**06**	**02**	**1.01**		**Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**								**150,000,000**					**250,000,000**
1	06	02	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Persentase peningkatan Kualitas Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial dalam Penyelenggaraan Program	Jumlah Koordinasi singkronisasi UGB dan PUB	Persentase Penerbitan izin pengumpulan sumbangan lintas daerah kabupaten/kota	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.00%	11 kabupaten/kota	50 Perizinan	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase peningkatan Kualitas Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial	5.00%	250,000,000

1	**06**	**02**	**1.02**		**Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi**								**2,850,000,000**						**3,650,000,000**
1	06	02	1.02	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Persentase peningkatan Kualitas Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial dalam Penyelenggaraan Program	Jumlah Potensi Pekerja Sosial yang ditingkatkan potensinya	Terpenuhnya Potensi Pekerja Sosial yang ditingkatkan potensinya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.00%	40 PSM	141 TKSK	350,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase peningkatan Kualitas Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial	5.00%	500,000,000
1	06	02	1.02	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	Persentase peningkatan Kualitas Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial dalam Penyelenggaraan Program Kessos	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang ditingkatkan potensinya	Terpenuhnya Potensi Pekerja Sosial yang ditingkatkan potensinya	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.00%	141 TKSK	141 TKSK	500,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase peningkatan Kualitas Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial dalam Penyelenggaraan Program Kessos	5.00%	650,000,000
1	06	02	1.02	03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	Persentase peningkatan Kualitas Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial dalam Penyelenggaraan Program Kessos	Jumlah Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Keluarga yang ditingkatkan potensinya	Terpenuhnya Potensi Pekerja Sosial yang ditingkatkan potensinya	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.00%	641 SDM	141 TKSK	1,500,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase peningkatan Kualitas Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial dalam Penyelenggaraan Program Kessos	5.00%	1,750,000,000
1	06	02	1.02	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Persentase peningkatan Kualitas Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial dalam	Jumlah Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Kelembagaan masyarakat yang	Terpenuhnya Potensi Pekerja Sosial yang ditingkatkan potensinya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.00%	5 lembaga	141 TKSK	500,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase peningkatan Kualitas Pemberdayaan Potensi dan Sumber	5.00%	750,000,000
1	**06**	**03**			**PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**								**250,000,000**						**300,000,000**
1	**06**	**03**	**1.01**		**Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal**								**250,000,000**						**300,000,000**
1	06	03	1.01	01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasana yang di fasilitasi	Jumlah Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Korban Tindak Kekerasan dari titik debarkasi di Provinsi untuk dipulankan	Jumlah Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25%	600 orang	600 orang	250,000,000	Pendapatan dari Pengembalian Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasana yang di fasilitasi	25%	300,000,000
1	**06**	**04**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**								**8,456,000,000**						**13,018,000,000**
1	**06**	**04**	**1.01**		**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti**								**3,365,000,000**						**4,960,000,000**
1	06	04	1.01	01	Penyediaan Permakanan	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	Jumlah Permakanan yang disediakan bagi warga Binaan Sosial	Jumlah koordinasi, sinkronisasi dan pembinaan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dasar Disabilitas Terlantar dalam panti	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.50%	150 orang	1 paket	1,700,000,000	Pendapatan dari Pengembalian Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan	0.50%	1,950,000,000
1	06	04	1.01	02	Penyediaan Sandang	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	Jumlah Sandang yang disediakan bagi Warga Binaan Sosial	Jumlah koordinasi, sinkronisasi dan pembinaan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dasar Disabilitas Terlantar dalam panti	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.50%	150 orang	1 paket	300,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	0.50%	550,000,000
1	06	04	1.01	03	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	Jumlah Fasilitas yang mudah diakses	Jumlah koordinasi, sinkronisasi dan pembinaan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dasar Disabilitas Terlantar dalam panti	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.50%	4 unit	1 paket	400,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	0.50%	650,000,000
1	06	04	1.01	04	Penyediaan Alat Bantu	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	Jumlah Alat Bantu yang disediakan bagi warga Binaan Sosial	Jumlah koordinasi, sinkronisasi dan pembinaan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dasar Disabilitas Terlantar dalam panti	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.50%	10 alat bantu	1 paket	75,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	0.50%	100,000,000
1	06	04	1.01	05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	Jumlah Paket Kesehatan yang diadakan	Jumlah koordinasi, sinkronisasi dan pembinaan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dasar Disabilitas Terlantar dalam panti	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.50%	1 paket	1 paket	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	0.50%	45,000,000

1	06	04	1.01	06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	Jumlah Bimbingan fisik mental spiritual dan sosial yang dilaksanakan	Jumlah koordinasi, sinkronisasi dan pembinaan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dasar Disabilitas Terlantar dalam panti	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.50%	1 paket	1 paket	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	0.50%	250,000,000
1	06	04	1.01	07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	Jumlah Ketrampilan yang diberikan	Jumlah koordinasi, sinkronisasi dan pembinaan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dasar Disabilitas Terlantar dalam panti	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.50%	1 paket	1 paket	200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	0.50%	500,000,000
1	06	04	1.01	08	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	Jumlah Warga Binaan Sosial terlantar yang memiliki nomor induk kependudukan	Jumlah koordinasi, sinkronisasi dan pembinaan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dasar Disabilitas Terlantar dalam panti	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.50%	1 paket	1 paket	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	0.50%	15,000,000
1	06	04	1.01	09	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	Jumlah Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Jumlah koordinasi, sinkronisasi dan pembinaan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dasar Disabilitas Terlantar dalam panti	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.50%	1 kab/kota	1 paket	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	0.50%	250,000,000
1	06	04	1.01	10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	Jumlah Keluarga yang di telusuri	Jumlah koordinasi, sinkronisasi dan pembinaan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dasar Disabilitas Terlantar dalam panti	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.50%	1 paket	1 paket	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	0.50%	250,000,000
1	06	04	1.01	11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	Jumlah Reunifikasi Keluarga	Jumlah koordinasi, sinkronisasi dan pembinaan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dasar Disabilitas Terlantar dalam panti	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.50%	1 paket	1 paket	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	0.50%	250,000,000
1	06	04	1.01	12	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	Jumlah koordinasi, sinkronisasi dan pembinaan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dasar Disabilitas Terlantar dalam panti	Jumlah koordinasi, sinkronisasi dan pembinaan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dasar Disabilitas Terlantar dalam panti	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.50%	1 paket	1 paket	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	0.50%	150,000,000
1	**06**	**04**	**1.02**		**Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti**								**1,600,000,000**					**3,045,000,000**
1	06	04	1.02	01	Pengasuhan	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	Jumlah Anak Asuh	Jumlah Sandang yang disediakan bagi Anak Terlantar di Dalam Panti	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.50%	25 anak	25 anak	75,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	0.50%	200,000,000
1	06	04	1.02	02	Penyediaan Makanan	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	Jumlah Permakanan yang disediakan bagi Anak Terlantar di Dalam Panti	Jumlah Sandang yang disediakan bagi Anak Terlantar di Dalam Panti	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.50%	25 anak	25 anak	550,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	0.50%	950,000,000
1	06	04	1.02	03	Penyediaan Sandang	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	Jumlah Sandang yang disediakan bagi Anak Terlantar di Dalam Panti	Jumlah Sandang yang disediakan bagi Anak Terlantar di Dalam Panti	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.50%	25 anak	25 anak	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	0.50%	550,000,000
1	06	04	1.02	04	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	Jumlah Fasilitas yang mudah diakses	Jumlah Sandang yang disediakan bagi Anak Terlantar di Dalam Panti	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.50%	5 unit	25 anak	200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	0.50%	350,000,000

1	06	04	1.02	05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	Jumlah Paket Kesehatan yang diadakan	Jumlah Sandang yang disediakan bagi Anak Terlantar di Dalam Panti	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.50%	1 paket	25 anak	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	0.50%	20,000,000
1	06	04	1.02	06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	Jumlah Bimbingan yang dilaksanakan	Jumlah Sandang yang disediakan bagi Anak Terlantar di Dalam Panti	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.50%	1 paket	25 anak	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	0.50%	250,000,000
1	06	04	1.02	07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	Jumlah Ketrampilan yang diberikan	Jumlah Sandang yang disediakan bagi Anak Terlantar di Dalam Panti	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.50%	1 paket	25 anak	200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	0.50%	300,000,000
1	06	04	1.02	08	Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	Jumlah Dokumentasi Kependudukan Anak Asuh	Jumlah Sandang yang disediakan bagi Anak Terlantar di Dalam Panti	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.50%	1 paket	25 anak	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	0.50%	15,000,000
1	06	04	1.02	09	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	Jumlah Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Jumlah Sandang yang disediakan bagi Anak Terlantar di Dalam Panti	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.50%	1 paket	25 anak	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	0.50%	35,000,000
1	06	04	1.02	10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	Jumlah Keluarga yang di telusuri	Jumlah Sandang yang disediakan bagi Anak Terlantar di Dalam Panti	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.50%	1 paket	25 anak	60,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	0.50%	100,000,000
1	06	04	1.02	11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	Jumlah Reunifikasi Keluarga	Jumlah Sandang yang disediakan bagi Anak Terlantar di Dalam Panti	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.50%	1 paket	25 anak	60,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	0.50%	100,000,000
1	06	04	1.02	12	Akses Layanan Pengasuhan Kepada Keluarga Penganti	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	Jumlah Keluarga Pengganti dan anak yang diadopsi	Jumlah Sandang yang disediakan bagi Anak Terlantar di Dalam Panti	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.50%	1 paket	25 anak	60,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	0.50%	100,000,000
1	06	04	1.02	13	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	Jumlah koordinasi, sinkronisasi dan pembinaan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dasar Anak Terlantar dalam panti	Jumlah Sandang yang disediakan bagi Anak Terlantar di Dalam Panti	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.50%	1 paket	25 anak	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	0.50%	75,000,000
1	**06**	**04**	**1.03**		**Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti**								**1,700,000,000**					**2,340,000,000**
1	06	04	1.03	01	Penyediaan Permakanan	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	Jumlah Permakanan yang disediakan bagi Lansia Terlantar di Dalam Panti	Jumlah Permakanan yang disediakan bagi Lansia Terlantar di Dalam Panti	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.50%	70 lansia	70 lansia	700,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	0.50%	850,000,000
1	06	04	1.03	02	Penyediaan Sandang	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	Jumlah Sandang yang disediakan bagi Lansia Terlantar di Dalam Panti	Jumlah Permakanan yang disediakan bagi Lansia Terlantar di Dalam Panti	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.50%	70 lansia	70 lansia	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	0.50%	250,000,000

1	06	04	1.03	03	Penyediaan Asrama yang mudah Diakses	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	Jumlah Fasilitas yang mudah diakses	Jumlah Permakanan yang disediakan bagi Lansia Terlantar di Dalam Panti	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.50%	5 unit	70 lansia	450,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	0.50%	600,000,000
1	06	04	1.03	04	Penyediaan Alat Bantu	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	Jumlah Alat Bantu yang disediakan	Jumlah Permakanan yang disediakan bagi Lansia Terlantar di Dalam Panti	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.50%	1 paket	70 lansia	55,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	0.50%	75,000,000
1	06	04	1.03	05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	Jumlah Paket Kesehatan yang diadakan	Jumlah Permakanan yang disediakan bagi Lansia Terlantar di Dalam Panti	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.50%	1 paket	70 lansia	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	0.50%	15,000,000
1	06	04	1.03	06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	Jumlah Bimbingan yang dilaksanakan	Jumlah Permakanan yang disediakan bagi Lansia Terlantar di Dalam Panti	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.50%	1 paket	70 lansia	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	0.50%	50,000,000
1	06	04	1.03	07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	Jumlah Ketrampilan yang diberikan	Jumlah Permakanan yang disediakan bagi Lansia Terlantar di Dalam Panti	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.50%	1 paket	70 lansia	70,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	0.50%	85,000,000
1	06	04	1.03	08	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	Jumlah Dokumentasi Kependudukan bagi Lansia Terlantar di Dalam Panti	Jumlah Permakanan yang disediakan bagi Lansia Terlantar di Dalam Panti	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.50%	1 paket	70 lansia	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	0.50%	15,000,000
1	06	04	1.03	09	Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	Jumlah Layanan Pendidikan dan Kesehatanan	Jumlah Permakanan yang disediakan bagi Lansia Terlantar di Dalam Panti	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.50%	1 paket	70 lansia	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	0.50%	25,000,000
1	06	04	1.03	10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	Jumlah Keluarga yang di telusuri	Jumlah Permakanan yang disediakan bagi Lansia Terlantar di Dalam Panti	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.50%	1 paket	70 lansia	60,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	0.50%	100,000,000
1	06	04	1.03	11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	Jumlah Reunifikasi Keluarga	Jumlah Permakanan yang disediakan bagi Lansia Terlantar di Dalam Panti	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.50%	1 paket	70 lansia	60,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	0.50%	100,000,000
1	06	04	1.03	12	Pemulasaraan	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	Jumlah Pemulasaran	Jumlah Permakanan yang disediakan bagi Lansia Terlantar di Dalam Panti	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.50%	20 paket	70 lansia	45,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	0.50%	75,000,000
1	06	04	1.03	13	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	Jumlah koordinasi, sinkronisasi dan pembinaan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dasar Lansia Terlantar dalam panti	Jumlah Permakanan yang disediakan bagi Lansia Terlantar di Dalam Panti	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.50%	1 paket	70 lansia	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	0.50%	100,000,000

1	**06**	**04**	**1.04**		**Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti**								**828,000,000**						**1,338,000,000**
1	06	04	1.04	01	Penyediaan Permakanan	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	Jumlah Permakanan yang disediakan bagi Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti	Jumlah koordinasi, sinkronisasi dan pembinaan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dasar Gelandangan dan Pengemis dalam panti	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.50%	12 orang	1 paket	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	0.50%	200,000,000
1	06	04	1.04	02	Penyediaan Sandang	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	Jumlah Sandang yang disediakan bagi Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti	Jumlah koordinasi, sinkronisasi dan pembinaan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dasar Gelandangan dan Pengemis dalam panti	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.50%	12 orang	1 paket	85,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	0.50%	100,000,000
1	06	04	1.04	03	Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	Jumlah Fasilitas yang mudah diakses	Jumlah koordinasi, sinkronisasi dan pembinaan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dasar Gelandangan dan Pengemis dalam panti	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.50%	2 unit	1 paket	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	0.50%	100,000,000
1	06	04	1.04	04	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	Jumlah Alat Bantu yang disediakan	Jumlah koordinasi, sinkronisasi dan pembinaan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dasar Gelandangan dan Pengemis dalam panti	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.50%	1 paket	1 paket	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	0.50%	8,000,000
1	06	04	1.04	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	Jumlah Paket Kesehatan yang diadakan	Jumlah koordinasi, sinkronisasi dan pembinaan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dasar Gelandangan dan Pengemis dalam panti	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.50%	1 paket	1 paket	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	0.50%	30,000,000
1	06	04	1.04	06	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	Jumlah Bimbingan yang dilaksanakan	Jumlah koordinasi, sinkronisasi dan pembinaan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dasar Gelandangan dan Pengemis dalam panti	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.50%	1 paket	1 paket	35,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	0.50%	150,000,000
1	06	04	1.04	07	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	Jumlah Ketrampilan yang diberikan	Jumlah koordinasi, sinkronisasi dan pembinaan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dasar Gelandangan dan Pengemis dalam panti	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.50%	1 paket	1 paket	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	0.50%	200,000,000
1	06	04	1.04	08	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	Jumlah Dokumentasi Kependudukan Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti	Jumlah koordinasi, sinkronisasi dan pembinaan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dasar Gelandangan dan Pengemis dalam panti	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.50%	1 paket	1 paket	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	0.50%	15,000,000
1	06	04	1.04	09	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	Jumlah Layanan Pendidikan dan Kesehatanan	Jumlah koordinasi, sinkronisasi dan pembinaan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dasar Gelandangan dan Pengemis dalam panti	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.50%	1 paket	1 paket	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	0.50%	35,000,000
1	06	04	1.04	10	Pemulangan ke Daerah Asal	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	Jumlah Keluarga yang di telusuri	Jumlah koordinasi, sinkronisasi dan pembinaan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dasar Gelandangan dan Pengemis dalam panti	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.50%	1 paket	1 paket	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	0.50%	250,000,000
1	06	04	1.04	11	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	Jumlah koordinasi, sinkronisasi dan pembinaan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dasar Gelandangan dan Pengemis dalam panti	Jumlah koordinasi, sinkronisasi dan pembinaan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dasar Gelandangan dan Pengemis dalam panti	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.50%	1 paket	1 paket	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	0.50%	250,000,000

1	**06**	**04**	**1.05**		**Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti**								**963,000,000**						**1,335,000,000**
1	06	04	1.05	01	Penyediaan Permakanan	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	Jumlah Permakanan yang disediakan bagi Tuna Sosial	Jumlah Dokumentasi Kependudukan bagi Tuna Sosial	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.50%	15 orang	1 paket	175,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	0.50%	200,000,000
1	06	04	1.05	02	Penyediaan Sandang	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	Jumlah Sandang yang disediakan bagi Tuna Sosial	Jumlah Dokumentasi Kependudukan bagi Tuna Sosial	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.50%	15 orang	1 paket	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	0.50%	100,000,000
1	06	04	1.05	03	Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	Jumlah Fasilitas yang mudah diakses	Jumlah Dokumentasi Kependudukan bagi Tuna Sosial	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.50%	1 unit	1 paket	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	0.50%	150,000,000
1	06	04	1.05	04	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	Jumlah Perbekalan Kesehatan	Jumlah Dokumentasi Kependudukan bagi Tuna Sosial	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.50%	1 paket	1 paket	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	0.50%	5,000,000
1	06	04	1.05	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	Jumlah Bimbingan yang dilaksanakan	Jumlah Dokumentasi Kependudukan bagi Tuna Sosial	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.50%	1 paket	1 paket	65,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	0.50%	100,000,000
1	06	04	1.05	06	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	Jumlah Ketrampilan yang diberikan	Jumlah Dokumentasi Kependudukan bagi Tuna Sosial	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.50%	1 paket	1 paket	200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	0.50%	250,000,000
1	06	04	1.05	07	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	Jumlah Ketrampilan yang diberikan kepada Tuna Sosial	Jumlah Dokumentasi Kependudukan bagi Tuna Sosial	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.50%	1 paket	1 paket	250,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	0.50%	250,000,000
1	06	04	1.05	08	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	Jumlah Dokumentasi Kependudukan bagi Tuna Sosial	Jumlah Dokumentasi Kependudukan bagi Tuna Sosial	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.50%	1 paket	1 paket	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	0.50%	15,000,000
1	06	04	1.05	09	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	Jumlah Layanan Pendidikan dan Kesehatanan	Jumlah Dokumentasi Kependudukan bagi Tuna Sosial	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.50%	1 paket	1 paket	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	0.50%	15,000,000
1	06	04	1.05	10	Pemulangan ke Daerah Asal	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	Jumlah Tuna Sosial yang dipulangkan ke daerah asal	Jumlah Dokumentasi Kependudukan bagi Tuna Sosial	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.50%	1 paket	1 paket	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	0.50%	100,000,000
1	06	04	1.05	11	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	Jumlah koordinasi, sinkronisasi dan pembinaan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dasar Lansia Terlantar dalam panti	Jumlah Dokumentasi Kependudukan bagi Tuna Sosial	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.50%	1 paket	1 paket	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	0.50%	150,000,000

1	**06**	**05**			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**								**22,994,700,000**						**29,400,000,000**
1	**06**	**05**	**1.01**		**Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal**								**300,000,000**						**350,000,000**
1	06	05	1.01	01	Pengangkatan Anak antar WNI	Nilai SAKIP	Jumlah Sidang Pertimbangan Ijin Pengangkatan Anak (PIPA) antar WNI	Jumlah Sidang Pertimbangan Ijin Pengangkatan Anak (PIPA) antar WNI	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	B indeks	2 paket	2 paket	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP	B indeks	175,000,000
1	06	05	1.01	02	Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Nilai SAKIP	Jumlah Sidang Pertimbangan Ijin Pengangkatan Anak (PIPA) oleh Orangtua Tunggal	Jumlah Sidang Pertimbangan Ijin Pengangkatan Anak (PIPA) antar WNI	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	B indeks	2 paket	2 paket	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP	B indeks	175,000,000
1	**06**	**05**	**1.02**		**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi**								**22,694,700,000**						**29,050,000,000**
1	06	05	1.02	01	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan perlindungan dan Jaminan Sosial	Jumlah KK dibawah garis kemiskinan graduasi PKH yang mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan keluarga	Jumlah KK dibawah garis kemiskinan graduasi PKH yang mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan keluarga	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.50%	1000 kk	1000 kk	450,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan perlindungan dan Jaminan Sosial	2.50%	750,000,000
1	06	05	1.02	02	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase kab/kota yang update DTKS	Jumlah KK dibawah garis kemiskinan graduasi PKH yang mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan keluarga	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.50%	11 kab/kota	1000 kk	21,744,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan perlindungan dan Jaminan Sosial	2.50%	27,550,000,000
1	06	05	1.02	03	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan perlindungan dan Jaminan Sosial	Jumlah KK Keluarga Miskin yang diberikan pemberdayaan dan fasilitasi usaha	Jumlah KK dibawah garis kemiskinan graduasi PKH yang mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan keluarga	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.50%	1000 kk	1000 kk	500,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan perlindungan dan Jaminan Sosial	2.50%	750,000,000
1	**06**	**06**			**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**								**850,000,000**						**1,000,000,000**
1	**06**	**06**	**1.01**		**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi**								**850,000,000**						**1,000,000,000**
1	06	06	1.01	01	Penyediaan Permakanan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Korban Bencana Sesuai SPM	Jumlah porsi permakanan yang disediakan	Jumlah sandang yang di sediakan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	31.70%	300 paket	300 paket	250,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Korban Bencana Sesuai SPM	31.70%	300,000,000
1	06	06	1.01	02	Penyediaan Sandang	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Korban Bencana Sesuai SPM	Jumlah sandang yang di sediakan	Jumlah sandang yang di sediakan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	31.70%	300 paket	300 paket	200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Korban Bencana Sesuai SPM	31.70%	200,000,000
1	06	06	1.01	03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Korban Bencana Sesuai SPM	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang disediakan	Jumlah sandang yang di sediakan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	31.70%	3 unit	300 paket	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Korban Bencana Sesuai SPM	31.70%	100,000,000
1	06	06	1.01	04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Korban Bencana Sesuai SPM	Jumlah kelompok rentan yang mendapatkan penanganan khusus	Jumlah sandang yang di sediakan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	31.70%	1 paket	300 paket	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Korban Bencana Sesuai SPM	31.70%	150,000,000
1	06	06	1.01	05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Korban Bencana Sesuai SPM	Jumlah dukungan psikososial yang diselenggarakan	Jumlah sandang yang di sediakan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	31.70%	1 paket	300 paket	200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Korban Bencana Sesuai SPM	31.70%	250,000,000
1	**06**	**07**			**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**								**750,000,000**						**1,000,000,000**
1	**06**	**07**	**1.01**		**Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi**								**750,000,000**						**1,000,000,000**
1	06	07	1.01	01	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Persentase pewujudan Nilai-nilai Kepahlawanan	Jumlah sarana prasarana TMPN Provinsi yang di rehab	Jumlah Penyelamatan Asset Taman Makam Pahlawan dan nilai nilai kepahlawanan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50%	3 lokasi	50 persen	300,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pewujudan Nilai-nilai Kepahlawanan	50%	400,000,000
1	06	07	1.01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Persentase pewujudan Nilai-nilai Kepahlawanan	Jumlah sarana prasarana TMPNProvinsi yang di pelihara	Jumlah Penyelamatan Asset Taman Makam Pahlawan dan nilai nilai kepahlawanan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50%	3 lokasi	50 persen	250,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pewujudan Nilai-nilai Kepahlawanan	50%	350,000,000

1	06	07	1.01	03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Persentase pewujudan Nilai-nilai Kepahlawanan	Jumlah sarana prasarana TMPNProvinsi yang di amankan	Jumlah Penyelamatan Asset Taman Makam Pahlawan dan nilai nilai kepahlawanan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50%	3 lokasi	50 persen	200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pewujudan Nilai-nilai Kepahlawanan	50%	250,000,000
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
2	**12**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**								**6,519,983,269**					**7,975,000,000**
2	**12**	**02**			**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**								**1,800,000,000**					**2,225,000,000**
2	**12**	**02**	**1.01**		**Pelayanan Pendaftaran Kependudukan**								**750,000,000**					**1,000,000,000**
2	12	02	1.01	01	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional	Persentase pemenuhan pelayanan pendaftaran penduduk	Jumlah Kebijakan teknis bidang dafduk	Jumlah pendataan penduduk non permanen dan rentan adminduk lintas kab/ kota salam satu provinsi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99 persen	1 kebijakan	2 kali	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan pelayanan pendaftaran penduduk	99 persen	200,000,000
2	12	02	1.01	02	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	Persentase pemenuhan pelayanan pendaftaran penduduk	Persen pendataan penduduk non permanen dan rentan adminduk lintas kab/ kota salam satu provinsi	Jumlah pendataan penduduk non permanen dan rentan adminduk lintas kab/ kota salam satu provinsi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99 persen	1 kali	2 kali	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan pelayanan pendaftaran penduduk	99 persen	200,000,000
2	12	02	1.01	03	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	Persentase pemenuhan pelayanan pendaftaran penduduk	jumlah pelaksanaan tata kelola dafduk	Jumlah pendataan penduduk non permanen dan rentan adminduk lintas kab/ kota salam satu provinsi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99 persen	2 kali	2 kali	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan pelayanan pendaftaran penduduk	99 persen	200,000,000
2	12	02	1.01	04	Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan	Persentase pemenuhan pelayanan pendaftaran penduduk	Jumlah pemanfaatan data peristiwa kependudukan	Jumlah pendataan penduduk non permanen dan rentan adminduk lintas kab/ kota salam satu provinsi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99 persen	1 kali	2 kali	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan pelayanan pendaftaran penduduk	99 persen	200,000,000
2	12	02	1.01	05	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk	Persentase pemenuhan pelayanan pendaftaran penduduk	Jumlah Laporan hasil pelayanan Pendaftaran penduduk dari Kabupaten/ Kota	Jumlah pendataan penduduk non permanen dan rentan adminduk lintas kab/ kota salam satu provinsi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99 persen	11 kab/kota	2 kali	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan pelayanan pendaftaran penduduk	99 persen	200,000,000
2	**12**	**02**	**1.02**		**Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan**								**750,000,000**					**875,000,000**
2	12	02	1.02	01	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Persentase pemenuhan pelayanan pendaftaran penduduk	jumlah pelaporan	jumlah pelaporan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99 persen	12 Laporan	11 laporan	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan pelayanan pendaftaran penduduk	99 persen	175,000,000
2	12	02	1.02	02	Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Persentase pemenuhan pelayanan pendaftaran penduduk	jumlah pelaporan	jumlah pelaporan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99 persen	11 Laporan	11 laporan	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan pelayanan pendaftaran penduduk	99 persen	175,000,000
2	12	02	1.02	03	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pendaftaran Penduduk	Persentase pemenuhan pelayanan pendaftaran penduduk	jumlah pelaporan	jumlah pelaporan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99 persen	11 Laporan	11 laporan	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan pelayanan pendaftaran penduduk	99 persen	175,000,000
2	12	02	1.02	04	Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pendaftaran Penduduk	Persentase pemenuhan pelayanan pendaftaran penduduk	jumlah pelaporan	jumlah pelaporan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99 persen	11 Laporan	11 laporan	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan pelayanan pendaftaran penduduk	99 persen	175,000,000
2	12	02	1.02	05	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase pemenuhan pelayanan pendaftaran penduduk	jumlah pelaporan	jumlah pelaporan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99 persen	11 Laporan	11 laporan	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan pelayanan pendaftaran penduduk	99 persen	175,000,000
2	**12**	**02**	**1.03**		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan**								**300,000,000**					**350,000,000**
2	12	02	1.03	01	Pembinaan dan Pengawasaan terkait Pendaftaran Penduduk	Persentase pemenuhan pelayanan pendaftaran penduduk	jumlah laporan	Jumlah laporan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99 persen	11 kabupaten/kota	11 kabupaten/kota	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan pelayanan pendaftaran penduduk	99 persen	175,000,000

2	12	02	1.03	02	Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	Persentase pemenuhan pelayanan pendaftaran penduduk	Jumlah laporan	Jumlah laporan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99 persen	11 kabupaten/kota	11 kabupaten/kota	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan pelayanan pendaftaran penduduk	99 persen	175,000,000
2	**12**	**03**			**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**								**2,400,000,000**					**2,800,000,000**
2	**12**	**03**	**1.01**		**Pelayanan Pencatatan Sipil**								**750,000,000**					**1,000,000,000**
2	12	03	1.01	01	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil	Persentase Pemenuhan Pencatatan Sipil	Jumlah kebijakan teknis bidang capil	Jumlah fasilitasi layanan bidang capil kab/kota	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	94%	11 kabupaten/kota	11 kabupaten/kota	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Pencatatan Sipil	94%	200,000,000
2	12	03	1.01	02	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi	Persentase Pemenuhan Pencatatan Sipil	Jumlah tata tata kelola pelaksanaan capil	Jumlah fasilitasi layanan bidang capil kab/kota	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	94%	2 kali	11 kabupaten/kota	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Pencatatan Sipil	94%	200,000,000
2	12	03	1.01	03	Pemanfaatan Data atas Peristiwa Penting	Persentase Pemenuhan Pencatatan Sipil	Jumlah pemanfaatan data peristiwa kependudukan	Jumlah fasilitasi layanan bidang capil kab/kota	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	94%	1 kali	11 kabupaten/kota	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Pencatatan Sipil	94%	200,000,000
2	12	03	1.01	04	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Pencatatan Sipil	jumlah fasilitasi layanan bidang capil kab/kota	Jumlah fasilitasi layanan bidang capil kab/kota	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	94%	11 kabupaten/kota	11 kabupaten/kota	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Pencatatan Sipil	94%	200,000,000
2	12	03	1.01	05	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pencatatan Sipil	Persentase Pemenuhan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan hasil pelayanan Pencatatan Sipil dari Kabupaten/ Kota	Jumlah fasilitasi layanan bidang capil kab/kota	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	94%	11 kab/kota	11 kabupaten/kota	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Pencatatan Sipil	94%	200,000,000
2	**12**	**03**	**1.02**		**Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi**								**1,050,000,000**					**1,150,000,000**
2	12	03	1.02	01	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Persentase Pemenuhan Pencatatan Sipil	jumlah fasilitasi layanan bidang capil kab/kota	Jumlah konsultasi yang diberikan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	94%	11 kab/kota	11 kab/kota	200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Pencatatan Sipil	94%	250,000,000
2	12	03	1.02	02	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Persentase Pemenuhan Pencatatan Sipil	Jumlah sosialisasi layanan bidang pencatatan sipil	Jumlah konsultasi yang diberikan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	94%	2 kali	11 kab/kota	250,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Pencatatan Sipil	94%	250,000,000
2	12	03	1.02	03	Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil	Persentase Pemenuhan Pencatatan Sipil	jumlah sosialisasi kebijakan pelayanan pencatatan sipil	Jumlah konsultasi yang diberikan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	94%	1 kali	11 kab/kota	200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Pencatatan Sipil	94%	250,000,000
2	12	03	1.02	04	Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil	Persentase Pemenuhan Pencatatan Sipil	Jumlah kordinasi antar lembaga pemerintah dan non pemerintah yang dilaksanakan	Jumlah konsultasi yang diberikan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	94%	1 kali	11 kab/kota	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Pencatatan Sipil	94%	200,000,000
2	12	03	1.02	05	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Pemenuhan Pencatatan Sipil	Jumlah konsultasi yang diberikan	Jumlah konsultasi yang diberikan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	94%	11 kab/kota	11 kab/kota	250,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Pencatatan Sipil	94%	200,000,000
2	**12**	**03**	**1.03**		**Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**								**600,000,000**					**650,000,000**
2	12	03	1.03	01	Pembinaan dan Pengawasaan terkait Pencatatan Sipil	Persentase Pemenuhan Pencatatan Sipil	Jumlah pembinaan yang dilakukan	Jumlah pelaksanaan Bimtek	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	94%	11 kab/kota	11 kab/kota	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Pencatatan Sipil	94%	200,000,000
2	12	03	1.03	02	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	Persentase Pemenuhan Pencatatan Sipil	Jumlah pelaksanaan Bimtek	Jumlah pelaksanaan Bimtek	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	94%	2 kali	11 kab/kota	450,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Pencatatan Sipil	94%	450,000,000
2	**12**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**								**2,149,983,269**					**2,750,000,000**
2	**12**	**04**	**1.01**		**Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**								**300,000,000**					**400,000,000**
2	12	04	1.01	01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pengelolaan Administrasi Kependudukan	Jumlah sosialisasi penyelenggaraan urusan adminduk	Jumlah sosialisasi penyelenggaraan urusan adminduk	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80%	11 kab/kota	11 kab/kota	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pengelolaan Administrasi Kependudukan	80%	200,000,000
2	12	04	1.01	02	Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Administrasi Kependudukan	Jumlah sosialisasi penyelenggaraan urusan adminduk	Jumlah sosialisasi penyelenggaraan urusan adminduk	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80%	2 kali	11 kab/kota	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pengelolaan Administrasi Kependudukan	80%	200,000,000
2	**12**	**04**	**1.02**		**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi**								**1,050,000,000**					**1,400,000,000**
2	12	04	1.02	01	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pengelolaan Administrasi Kependudukan	Jumlah fasilitasi terkait pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Sosialisasi terkait pengelolaan informasi adminduk	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80%	11 kab/kota	1 kali	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pengelolaan Administrasi Kependudukan	80%	200,000,000

2	12	04	1.02	02	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pengelolaan Administrasi Kependudukan	Jumlah Sosialisasi terkait pengelolaan informasi adminduk	Jumlah Sosialisasi terkait pengelolaan informasi adminduk	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80%	1 kali	1 kali	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pengelolaan Administrasi Kependudukan	80%	200,000,000
2	12	04	1.02	03	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Persentase Pengelolaan Administrasi Kependudukan	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	Jumlah Sosialisasi terkait pengelolaan informasi adminduk	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80%	1 kali	1 kali	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pengelolaan Administrasi Kependudukan	80%	200,000,000
2	12	04	1.02	04	Koordinasi Berkala antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga NonPemerintah Kewenangan Provinsi	Persentase Pengelolaan Administrasi Kependudukan	Jumlah koordinasi berkala antar lembaga pemerintah dan non pemerintah	Jumlah Sosialisasi terkait pengelolaan informasi adminduk	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80%	2 kali	1 kali	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pengelolaan Administrasi Kependudukan	80%	200,000,000
2	12	04	1.02	05	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase Pengelolaan Administrasi Kependudukan	Jumlah pemanfaatan data kependudukan yang dilaksanakan	Jumlah Sosialisasi terkait pengelolaan informasi adminduk	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80%	8 instansi/lembaga	1 kali	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pengelolaan Administrasi Kependudukan	80%	200,000,000
2	12	04	1.02	06	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Persentase Pengelolaan Administrasi Kependudukan	Jumlah kerjasama yang dilaksanakan	Jumlah Sosialisasi terkait pengelolaan informasi adminduk	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80%	1 lembaga	1 kali	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pengelolaan Administrasi Kependudukan	80%	200,000,000
2	12	04	1.02	07	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pengelolaan Administrasi Kependudukan	Jumlah konsultasi terkait pengelolaan informasi adminduk yang dilaksanakan	Jumlah Sosialisasi terkait pengelolaan informasi adminduk	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80%	11 kab/kota	1 kali	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pengelolaan Administrasi Kependudukan	80%	200,000,000
2	**12**	**04**	**1.03**		**Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi**								**799,983,269**					**950,000,000**
2	12	04	1.03	01	Pembinaan dan Pengawasan tekait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pengelolaan Administrasi Kependudukan	jumlah Bimbingan Teknis yang dilaksanakan	jumlah Bimbingan Teknis yang dilaksanakan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80%	11 kab/kota	11 kab/kota	469,983,269	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pengelolaan Administrasi Kependudukan	80%	550,000,000
2	12	04	1.03	02	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Persentase Pengelolaan Administrasi Kependudukan	jumlah Bimbingan Teknis yang dilaksanakan	jumlah Bimbingan Teknis yang dilaksanakan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80%	2 kali	11 kab/kota	330,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pengelolaan Administrasi Kependudukan	80%	400,000,000
2	**12**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**								**170,000,000**					**200,000,000**
2	**12**	**05**	**1.01**		**Penyediaan Profil Kependudukan**								**170,000,000**					**200,000,000**
2	12	05	1.01	01	Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	Persentase Pengeluaran Profil kependudukan	jumlah data kependudukan provinsi yang disediakan	jumlah data kependudukan provinsi yang disediakan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 paket	1 paket	85,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pengeluaran Profil kependudukan	100%	100,000,000
2	12	05	1.01	02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Persentase Pengeluaran Profil kependudukan	jumlah profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan yang dibuat	jumlah data kependudukan provinsi yang disediakan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 paket	1 paket	85,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pengeluaran Profil kependudukan	100%	100,000,000
												TOTAL	**73,831,555,069**					**104,563,000,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Jambi
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
										Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
2	**07**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**								**32,132,904,953**					**32,732,904,953**
2	**07**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**24,960,000,000**					**25,460,000,000**
2	**07**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**300,000,000**					**300,000,000**
2	07	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Rapat Koordinasi Penyusunan dokumen Perencanaan	Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaaran dan Evaluasi Kinerja PD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	B Indeks	1 Tahun	1 Tahun	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	B Indeks	100,000,000
2	07	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai SAKIP	Penyusunan Laporan capaian kinerja dan Monev kegiatan	Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaaran dan Evaluasi Kinerja PD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	B Indeks	1 Tahun	1 Tahun	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	B Indeks	200,000,000
2	**07**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**21,000,000,000**					**21,500,000,000**
2	07	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Gaji ASN, Tunjangan dan TPP	Tersedianya Gaji ASN, Tunjagan dan TPP	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	1 Tahun	1 Tahun	21,000,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	21,500,000,000
2	**07**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**50,000,000**					**50,000,000**
2	07	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	ASN yang mengitu Pelatihan	Terlasaksanaanya Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	1 Tahun	1 Tahun	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	50,000,000
2	**07**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**500,000,000**					**500,000,000**
2	07	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Tersedianya Komponem Listrik	Terlaksananya Urusan ADM Umum Perangkat Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	1 Tahun	1 Tahun	30,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	30,000,000
2	07	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Penyediaaan peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Urusan ADM Umum Perangkat Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	1 Tahun	1 Tahun	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	100,000,000
2	07	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	tersedianya Makan minum rapat dan Tamu Kantor	Terlaksananya Urusan ADM Umum Perangkat Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	1 Tahun	1 Tahun	40,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	40,000,000
2	07	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Penyediaan Barang cetakan dan Pengandaan Kantor	Terlaksananya Urusan ADM Umum Perangkat Daerah		100	1 Tahun	1 Tahun	80,000,000			persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	80,000,000
2	07	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	terlaksananya rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Urusan ADM Umum Perangkat Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	1 Tahun	1 Tahun	250,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	250,000,000
2	**07**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**600,000,000**					**600,000,000**
2	07	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Tersedianya Mebel Kantor	Terpenuhinya kebutuhan barang iventaris kantor	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	1 Tahun	1 Tahun	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	200,000,000

2	07	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Tersedianya peralatan dan Meisin Kantor	Terpenuhinya kebutuhan barang iventaris kantor	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	1 Tahun	1 Tahun	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	200,000,000
2	07	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Tersedianya perlengkapan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan barang iventaris kantor	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	1 Tahun	1 Tahun	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	200,000,000
2	**07**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**810,000,000**					**810,000,000**
2	07	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Pelaksanaan Pengelolaan Surat Menyurat	Terpenuhinya belanja Jasa Penunjang Perangkat Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	1 Tahun	1 Tahun	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	10,000,000
2	07	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Terlaksananya Pembayaran Listrik, Air,dan Telekomunikasi	Terpenuhinya belanja Jasa Penunjang Perangkat Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	1 Tahun	1 Tahun	400,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	400,000,000
2	07	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Tersedianya Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya belanja Jasa Penunjang Perangkat Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	1 Tahun	1 Tahun	400,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	400,000,000
2	**07**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**1,700,000,000**					**1,700,000,000**
2	07	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Terlaksananya Perawatan Kendaraan Dinas Kantor	Terpenuhinya Pemeliharaan Aset Perangkat Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	1 Tahun	1 Tahun	300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	300,000,000
2	07	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Terlaksananya Perawatan Peralatan dan Mesin Kantor	Terpenuhinya Pemeliharaan Aset Perangkat Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	1 Tahun	1 Tahun	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	50,000,000
2	07	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Terlaksananya Rehabiltasi Gedung Kantor	Terpenuhinya Pemeliharaan Aset Perangkat Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	1 Tahun	1 Tahun	1,000,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	1,000,000,000
2	07	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Terlaksananya pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	Terpenuhinya Pemeliharaan Aset Perangkat Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	1 Tahun	1 Tahun	350,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	350,000,000
2	**07**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**								**90,000,000**					**90,000,000**
2	**07**	**02**	**1.01**		**Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)**								**90,000,000**					**90,000,000**
2	07	02	1.01	02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Persentase Layanan RTKD	Tersusunnya Dokumen RTKD Mikro	Terlaksana Penyusunan Dokumen RTKD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Tahun	1 Tahun	90,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan RTKD	100%	90,000,000
2	**07**	**03**			**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**								**1,800,000,000**					**1,900,000,000**
2	**07**	**03**	**1.01**		**Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi**								**1,400,000,000**					**1,500,000,000**
2	07	03	1.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase peningkatan tenaga kerja yang dilatih dan bersertifikat	Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pencari kerja klaster kompetensi	terlaksananya latihan kerja klaster kompetensi dan koordinasi lintas lembaga	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.10%	1 Tahun	1 Tahun	1,000,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase peningkatan tenaga kerja yang dilatih dan bersertifikat	5.10%	1,100,000,000
2	07	03	1.01	02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Persentase peningkatan tenaga kerja yang dilatih dan bersertifikat	Pelaksanaan koordinasi lintas lembaga dan Kerjasama dalam penyediaan instruktur pelatihan kerja	terlaksananya latihan kerja klaster kompetensi dan koordinasi lintas lembaga	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.10%	1 tahun	1 Tahun	400,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase peningkatan tenaga kerja yang dilatih dan bersertifikat	5.10%	400,000,000

2	**07**	**03**	**1.04**		**Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi**								**400,000,000**						**400,000,000**
2	07	03	1.04	01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase peningkatan tenaga kerja yang dilatih dan bersertifikat	Jumlah Pengukuran kompetensi dan produktifitas	terlaksananya pengukuran dan produktifitas tenaga kerja	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.10%	1100 orang	1 Tahun	400,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase peningkatan tenaga kerja yang dilatih dan bersertifikat	5.10%	400,000,000
2	**07**	**04**			**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**								**3,850,000,000**						**3,850,000,000**
2	**07**	**04**	**1.01**		**Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota**								**2,400,000,000**						**2,400,000,000**
2	07	04	1.01	01	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	Persentase peningkatan tenaga kerja terdaftar yang ditempatkan	Penyediaan Pelayanan sumber daya pelayanan antar kerja	terlaksanaanya pelayanan antar kerja lintas daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30%	3 Kegiatan	1 Tahun	500,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase peningkatan tenaga kerja terdaftar yang ditempatkan	30%	500,000,000
2	07	04	1.01	02	Pelayanan Antar Kerja	Persentase peningkatan tenaga kerja terdaftar yang ditempatkan	Jumlah Pelayanan Layanan antar kerja	terlaksanaanya pelayanan antar kerja lintas daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30%	1 Kegiatan	1 Tahun	400,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase peningkatan tenaga kerja terdaftar yang ditempatkan	30%	400,000,000
2	07	04	1.01	05	Perluasan Kesempatan Kerja	Persentase peningkatan tenaga kerja terdaftar yang ditempatkan	Jumlah penempatan Tenaga Kerja	terlaksanaanya pelayanan antar kerja lintas daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30%	5000 Orang	1 Tahun	1,500,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase peningkatan tenaga kerja terdaftar yang ditempatkan	30%	1,500,000,000
2	**07**	**04**	**1.03**		**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**								**650,000,000**						**650,000,000**
2	07	04	1.03	02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Persentase peningkatan tenaga kerja terdaftar yang ditempatkan	Tersedianya Pelayanan informasi pasar kerja	Pelayanan informasi pasar kerja online	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30%	2 Kegiatan	1 Tahun	650,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase peningkatan tenaga kerja terdaftar yang ditempatkan	30%	650,000,000
2	**07**	**04**	**1.04**		**Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi**								**550,000,000**						**550,000,000**
2	07	04	1.04	01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Persentase peningkatan tenaga kerja terdaftar yang ditempatkan	Jumlah calon PMI/PMI yang terlindungi	Perlindungan pada Calon PMI/PMI	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30%	50 Orang	50 orang	550,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase peningkatan tenaga kerja terdaftar yang ditempatkan	30%	550,000,000
2	**07**	**04**	**1.06**		**Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**								**250,000,000**						**250,000,000**
2	07	04	1.06	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase peningkatan tenaga kerja terdaftar yang ditempatkan	Pelayanan IMTA	Terlaksananya Proses Pelayanan IMTA	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30%	1 Kegiatan	1 Tahun	250,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase peningkatan tenaga kerja terdaftar yang ditempatkan	30%	250,000,000
2	**07**	**05**			**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**								**555,579,260**						**555,579,260**
2	**07**	**05**	**1.02**		**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi**								**246,484,790**						**246,484,790**
2	07	05	1.02	04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Provinsi	Penurunan Pelanggaran Norma-Norma tenaga kerja	Jumlah kerjasama Tripartit	Terlaksananya penyelesaian hubungan industri di Perusahaan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	76%	1 Kegiatan	1 Tahun	246,484,790	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penurunan Pelanggaran Norma-Norma tenaga kerja	76%	246,484,790
2	**07**	**05**	**1.03**		**Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)**								**309,094,470**						**309,094,470**
2	07	05	1.03	01	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Penurunan Pelanggaran Norma-Norma tenaga kerja	Penetapan UMP	terlaksananya Penetapan Upah Minuimum Provinsi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	76%	1 Kegiatan	1 Tahun	309,094,470	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penurunan Pelanggaran Norma-Norma tenaga kerja	76%	309,094,470
2	**07**	**06**			**PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN**								**877,325,693**						**877,325,693**
2	**07**	**06**	**1.01**		**Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan**								**877,325,693**						**877,325,693**
2	07	06	1.01	01	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Penurunan Pelanggaran Norma-Norma Tenaga Kerja	Jumlah Pengawasan pelaksanaan norma kerja diperusahaan	Terlaksananya Pengawasan Ketenagakerjaan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	76%	1 Kegiatan	1 Tahun	300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penurunan Pelanggaran Norma-Norma Tenaga Kerja	76%	300,000,000
2	07	06	1.01	02	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Penurunan Pelanggaran Norma-Norma Tenaga Kerja	turunya pelanggaran kasus Norma Ketenagakerjaan	Terlaksananya Pengawasan Ketenagakerjaan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	76%	2 Kegiatan	1 Tahun	277,325,693	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penurunan Pelanggaran Norma-Norma Tenaga Kerja	76%	277,325,693
2	07	06	1.01	03	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Penurunan Pelanggaran Norma-Norma Tenaga Kerja	Jumlah Layanan kesehatan dan keselamatan kerja di perusahaan	Terlaksananya Pengawasan Ketenagakerjaan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	76%	3 Kegiatan	1 Tahun	300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penurunan Pelanggaran Norma-Norma Tenaga Kerja	76%	300,000,000
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**														
3	**32**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**								**1,650,000,000**						**1,650,000,000**
3	**32**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI**								**650,000,000**						**650,000,000**
3	**32**	**02**	**1.01**		**Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi**								**650,000,000**						**650,000,000**
3	32	02	1.01	04	Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Peningkatan Penempatan Transmigrasi Sesuai Calon Lokasi Penempatan	Jumlah Tanah yang dicadangkan	Tersedianya lahan untuk calon transmigrasi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8%	1 Kegiatan	1 Tahun	650,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Penempatan Transmigrasi Sesuai Calon Lokasi Penempatan	8%	650,000,000

3	**32**	**03**			**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**								**250,000,000**					**250,000,000**
3	**32**	**03**	**1.01**		**Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**								**250,000,000**					**250,000,000**
3	32	03	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase ketersediaan Permukiman Transmigrasi Yang Berkualitas	Jumlah koordinasi dan Singkronisasi Kersama Pembangunan Transmigrasi antar daerah.	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi kerjasama pembangunan transmigrasi antar daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8%	1 Kegiatan	1 Tahun	250,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ketersediaan Permukiman Transmigrasi Yang Berkualitas	8%	250,000,000
3	**32**	**04**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI**								**750,000,000**					**750,000,000**
3	**32**	**04**	**1.01**		**Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan**								**750,000,000**					**750,000,000**
3	32	04	1.01	02	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	Persentase Pemukiman dan Kawasan Serta Masyarakat Transmigrasi Yang Sejahtera	Jumlah Penguatan Infrastruktut sosial, ekonomi dan Kelembagaan.	Tercapainya Penguatan infrastruktur sosial,ekonomi dan kelembagaan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55%	3 Kegiatan	1 Tahun	750,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemukiman dan Kawasan Serta Masyarakat Transmigrasi Yang Sejahtera	55%	750,000,000
												TOTAL	**33,782,904,953**					**34,382,904,953**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Jambi
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0001 UPTD Balai Latihan Kerja dan Produktivitas Jambi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
2	**07**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**								**6,800,000,000**					**6,800,000,000**
2	**07**	**03**			**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**								**6,800,000,000**					**6,800,000,000**
2	**07**	**03**	**1.01**		**Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi**								**6,800,000,000**					**6,800,000,000**
2	07	03	1.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase Peningkatan tenaga kerja yang dilatih dan bersertifikasi	Pelaksanaan Pelatihan Kerja Klaster Kompetensi	terlaksananya Pelatihan berbasis komptensi (PBK) dan Mobile Training Unit (MTU)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,1 persen	1 Tahun	1 Tahun	6,800,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Peningkatan tenaga kerja yang dilatih dan bersertifikasi	5,1 persen	6,800,000,000
												TOTAL	**6,800,000,000**					**6,800,000,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Jambi
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.08.2.13.2.14.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.13.2.14.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
2	**08**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**								**15,175,000,000**					**14,205,000,000**
2	**08**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**3,525,000,000**					**2,805,000,000**
2	**08**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**170,000,000**					**135,000,000**
2	08	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Nilai SAKIP persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 persen A Indeks 100	12 Bulan	12 Bulan	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP Nilai SAKIP persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	70 persen A Indeks 100	30,000,000
2	08	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Nilai SAKIP Nilai SAKIP persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	jumlah Dokumen RKASKPD yang dikoordinasikan dan disusun	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 persen A Indeks 100	1 Dokumen	12 Bulan	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP Nilai SAKIP persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	70 persen A Indeks 100	10,000,000
2	08	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai SAKIP Nilai SAKIP persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang dikoordinasikan dan disusun	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 persen A Indeks 100	1 Dokumen	12 Bulan	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP Nilai SAKIP persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	70 persen A Indeks 100	10,000,000
2	08	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai SAKIP Nilai SAKIP persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Jumlah DPA-SKPD yang dikoordinasikan dan disusun	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 persen A Indeks 100	1 Dokumen	12 Bulan	15,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP Nilai SAKIP persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	70 persen A Indeks 100	15,000,000
2	08	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Nilai SAKIP Nilai SAKIP persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Jumlah Perubahan DPASKPD yang dikoordinasikan dan disusun	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 persen A Indeks 100	1 Dokumen	12 Bulan	15,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP Nilai SAKIP persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	70 persen A Indeks 100	0
2	08	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai SAKIP Nilai SAKIP persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang dikoordinasikan dan disusun	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 persen A Indeks 100	4 Dokumen	12 Bulan	70,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP Nilai SAKIP persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	70 persen A Indeks 100	70,000,000
2	**08**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**40,000,000**					**40,000,000**
2	08	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Periode pelaksanaan administrasi Keuangan SKPD	Adminiastrasi Keuangan yang baik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 Bulan	100%	30,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100%	30,000,000

2	08	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Jumlah frekuansi Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Adminiastrasi Keuangan yang baik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 Bulan	100%	5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100%	5,000,000
2	08	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang disusun	Adminiastrasi Keuangan yang baik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Dokumen	100%	5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100%	5,000,000
2	**08**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**30,000,000**					**30,000,000**
2	08	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Periode pembinaan, pengawasan dan pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian Barang Milik Daerah secara rutin	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 Bulan	12 Bulan	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100%	20,000,000
2	08	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Jumlah Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilakukan penatausahaan	Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian Barang Milik Daerah secara rutin	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Paket	12 Bulan	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100%	10,000,000
2	**08**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**465,000,000**					**465,000,000**
2	08	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang disediakan	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang disediakan	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang disediakan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Orang	100 Orang	100 Orang	65,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang disediakan	100 Orang	65,000,000
2	08	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang disediakan	Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat sesuai fungsi dan tugas	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang disediakan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Orang	20 Orang	100 Orang	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang disediakan	100 Orang	100,000,000
2	08	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang disediakan	Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan yang diikuti	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang disediakan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Orang	20 Orang	100 Orang	200,000,000			Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang disediakan	100 Orang	200,000,000
2	08	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang disediakan	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek implementasi perundang-undangan	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang disediakan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Orang	20 Orang	100 Orang	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang disediakan	100 Orang	100,000,000
2	**08**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**364,000,000**					**364,000,000**
2	08	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang tersedia	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang tersedia	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	3 jENIS	3 Jenis	14,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100%	14,000,000
2	08	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitasi	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang tersedia	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 bULAN	3 Jenis	25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100%	25,000,000
2	08	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang tersedia	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 bULAN	3 Jenis	300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100%	300,000,000
2	08	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Jumlah Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD yang dilaksanakan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang tersedia	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 Bulan	3 Jenis	25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100%	25,000,000
2	**08**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**1,550,000,000**					**850,000,000**
2	08	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Unit	100%	400,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100%	0

2	08	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Paket	100%	600,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100%	600,000,000
2	08	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Mebel	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Paket	100%	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100%	100,000,000
2	08	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Paket	100%	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100%	150,000,000
2	08	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dibangun	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Paket	100%	300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100%	0
2	**08**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**289,000,000**					**304,000,000**
2	08	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Periode Pemakaian Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Surat Menyurat yang tersedia	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	800 Lembar	800 Lembar	4,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Periode Pemakaian Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	4,000,000
2	08	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Periode Pemakaian Jasa Pelayanan Umum Kantor	Periode Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik yang tersedia	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 Bulan	800 Lembar	120,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Periode Pemakaian Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	120,000,000
2	08	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Periode Pemakaian Jasa Pelayanan Umum Kantor	Periode Pemakaian Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 Bulan	800 Lembar	165,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Periode Pemakaian Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	180,000,000
2	**08**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**617,000,000**					**617,000,000**
2	08	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan yang terpelihara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan yang terpelihara	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Unit	100%	270,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100%	270,000,000
2	08	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang terpelihara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan yang terpelihara	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	10 Unit	100%	197,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100%	197,000,000
2	08	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Jumlah Mebel yang dipelihara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan yang terpelihara	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Paket	100%	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100%	50,000,000
2	08	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan yang terpelihara	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Paket	100%	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100%	100,000,000

2	**08**	**02**			**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**								**2,750,000,000**						**2,750,000,000**
2	**08**	**02**	**1.01**		**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi**								**600,000,000**						**600,000,000**
2	08	02	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG) DAN INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER (IDG)	Jumlah kKabupaten/kota yang dilakukan koordinasi dan sinkronisasi tentang Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pelaksanaan PUG Kewenangan provinsi di Kab/Kota	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	67,68 Indeks	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG) DAN INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER (IDG)	67,68 Indeks	150,000,000
						Persentase lembaga pemerintah kewenangan provinsi yang melaksanakan pengarusutamaan gender (PUD) yang harusditingkatkan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%				PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase lembaga pemerintah kewenangan provinsi yang melaksanakan pengarusutamaan gender (PUD) yang harusditingkatkan	100%	
								Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
2	08	02	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG) DAN INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER (IDG)	Jumlah Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi yang dikoordinasikan dan disinkronisasikan	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pelaksanaan PUG Kewenangan provinsi di Kab/Kota	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	67,68 Indeks	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG) DAN INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER (IDG)	67,68 Indeks	150,000,000
						Persentase lembaga pemerintah kewenangan provinsi yang melaksanakan pengarusutamaan gender (PUD) yang harusditingkatkan			100%						Persentase lembaga pemerintah kewenangan provinsi yang melaksanakan pengarusutamaan gender (PUD) yang harusditingkatkan	100%	
2	08	02	1.01	03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG) DAN INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER (IDG)	Jumlah Kabupaten/Kota yang dilakukan pendampingan terhadap kebijakan pelaksanaan PUG	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pelaksanaan PUG Kewenangan provinsi di Kab/Kota	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	67,68 Indeks	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG) DAN INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER (IDG)	67,68 Indeks	150,000,000
						Persentase lembaga pemerintah kewenangan provinsi yang melaksanakan pengarusutamaan gender (PUD) yang harusditingkatkan			100%						Persentase lembaga pemerintah kewenangan provinsi yang melaksanakan pengarusutamaan gender (PUD) yang harusditingkatkan	100%	
2	08	02	1.01	04	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG) DAN INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER (IDG)	Jumlah Kabupaten/Kota yang dilakukan sosialisasi tentang Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pelaksanaan PUG Kewenangan provinsi di Kab/Kota	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	67,68 Indeks	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG) DAN INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER (IDG)	67,68 Indeks	150,000,000
						Persentase lembaga pemerintah kewenangan provinsi yang melaksanakan pengarusutamaan gender (PUD) yang harusditingkatkan			100%						Persentase lembaga pemerintah kewenangan provinsi yang melaksanakan pengarusutamaan gender (PUD) yang harusditingkatkan	100%	
2	**08**	**02**	**1.02**		**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi**								**1,100,000,000**						**1,100,000,000**
2	08	02	1.02	01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi		Jumlah Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi yang dilaksanakan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		550 Orang		550,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				550,000,000

2	08	02	1.02	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi		Jumlah Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi yang dilaksanakan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		550 Orang		550,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				550,000,000
2	**08**	**02**	**1.03**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi**								**1,050,000,000**					**1,050,000,000**
2	08	02	1.03	02	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi		Jumlah Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang ditingkatkan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Lembaga		750,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				750,000,000
2	08	02	1.03	03	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi		Jumlah Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang dikembangkan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		11 Kab/Kota		300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				300,000,000
2	**08**	**03**			**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**								**1,125,000,000**					**1,125,000,000**
2	**08**	**03**	**1.01**		**Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**								**250,000,000**					**250,000,000**
2	08	03	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi		Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Kali		150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				150,000,000
2	08	03	1.01	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi		Jumlah Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi yang dilaksanakan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Kali		100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				100,000,000
2	**08**	**03**	**1.02**		**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**								**400,000,000**					**400,000,000**
2	08	03	1.02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	PERSENTASE KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN	Jumlah Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang tersedia dan dilaksanakan	Terlayaninya perempuan korban kekerasan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	2 Layanan	100%	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERSENTASE KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN	100%	100,000,000
2	08	03	1.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	PERSENTASE KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang dikoordinasikan dan disinkronisasikan	Terlayaninya perempuan korban kekerasan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	5 Layanan	100%	300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERSENTASE KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN	100%	300,000,000
2	**08**	**03**	**1.03**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi**								**475,000,000**					**475,000,000**
2	08	03	1.03	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi		Jumlah Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang dilaksankan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Kali		100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				100,000,000

2	08	03	1.03	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi		Jumlah Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang ditingkatkan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Lembaga		175,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				175,000,000
2	08	03	1.03	03	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi		Jumlah Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi yang disediakan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Paket		100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				100,000,000
2	08	03	1.03	04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang diperkuat		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Lembaga		100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				100,000,000
2	**08**	**04**			**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**								**2,475,000,000**					**2,475,000,000**
2	**08**	**04**	**1.01**		**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi**								**1,225,000,000**					**1,225,000,000**
2	08	04	1.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	INDEKS KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER	Jumlah Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	Terlaksananya advokasi kebijakan dan pendampingan keluarga untuk mewujudkan KG dan perlindungan anak	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,879 Indeks	1 Kali	11 Kab/Kota	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		INDEKS KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER	0,879 Indeks	150,000,000
2	08	04	1.01	02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi	INDEKS KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi yang dilaksanakan	Terlaksananya advokasi kebijakan dan pendampingan keluarga untuk mewujudkan KG dan perlindungan anak	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,879 Indeks	2 Kali	11 Kab/Kota	250,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		INDEKS KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER	0,879 Indeks	250,000,000
2	08	04	1.01	03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	INDEKS KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER	Jumlah Kabupaten/Kota yang dikembangkan peningkatan kualitas keluarga kewenangan provinsi melalui kegiatan masyarakat	Terlaksananya advokasi kebijakan dan pendampingan keluarga untuk mewujudkan KG dan perlindungan anak	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,879 Indeks	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota	825,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		INDEKS KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER	0,879 Indeks	825,000,000
2	**08**	**04**	**1.02**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi**								**950,000,000**					**950,000,000**
2	08	04	1.02	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi		Jumlah Kabupaten/Kota yang dtingkatkan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan kualitas keluarga kewenangan provinsi		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		11 Kab/Kota		825,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				825,000,000
2	08	04	1.02	03	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi		Jumlah Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi diperkuat		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Lembaga		125,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				125,000,000
2	**08**	**04**	**1.03**		**Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota**								**300,000,000**					**300,000,000**
2	08	04	1.03	01	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	INDEKS KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan dan tersedia	Terlaksananya layanan komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan perlindungan anak	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,879 Indeks	200 KK	100%	300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		INDEKS KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER	0,879 Indeks	300,000,000

2	**08**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**								**600,000,000**						**200,000,000**
2	**08**	**05**	**1.01**		**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi**								**600,000,000**						**200,000,000**
2	08	05	1.01	01	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Jumlah Data Gender dan Anak Provinsi yang tersedia	Jumlah Data Gender dan Anak Provinsi yang tersedia	Tersedianya Data Gender dan Anak	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	200 Buku	11 Kab/Kota	400,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Data Gender dan Anak Provinsi yang tersedia	100%	0
2	08	05	1.01	02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Jumlah Data Gender dan Anak Provinsi yang tersedia	Jumlah Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi yang tersaji dan dimanfaatkan	Tersedianya Data Gender dan Anak	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Dokumen	11 Kab/Kota	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Data Gender dan Anak Provinsi yang tersedia	100%	200,000,000
2	**08**	**06**			**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**								**3,000,000,000**						**3,150,000,000**
2	**08**	**06**	**1.01**		**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi**								**700,000,000**						**850,000,000**
2	08	06	1.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	PERSENTASE KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK	"Jumlah Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi yang dilaksanakan"	Terlaksananya advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	120 Orang	11 Kab/Kota	350,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERSENTASE KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK	100%	350,000,000
2	08	06	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	PERSENTASE KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK	Jumlah Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi yang dikoordinasikan dan disnkronisasikan	Terlaksananya advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	5 Kab/Kota	11 Kab/Kota	350,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERSENTASE KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK	100%	500,000,000
2	**08**	**06**	**1.02**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi**								**2,300,000,000**						**2,300,000,000**
2	08	06	1.02	01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	PERSENTASE KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN	Jumlah Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi yang tersedia	Terlaksananya advokasi dan pendampingan terhadap perempuan korban kekerasan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	150 Orang	100%	800,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERSENTASE KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN	100%	800,000,000
2	08	06	1.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	PERSENTASE KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN	Jumlah Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi yang tersedia	Terlaksananya advokasi dan pendampingan terhadap perempuan korban kekerasan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	40 Orang	100%	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERSENTASE KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN	100%	150,000,000
2	08	06	1.02	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	PERSENTASE KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi yang dikembangkan	Terlaksananya advokasi dan pendampingan terhadap perempuan korban kekerasan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	40 Orang	100%	300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERSENTASE KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN	100%	300,000,000
2	08	06	1.02	04	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	PERSENTASE KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN	Jumlah kabupaten/kota yang diperkuat tentang pelaksanaan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya advokasi dan pendampingan terhadap perempuan korban kekerasan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	11 Kab/Kota	100%	1,050,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERSENTASE KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN	100%	1,050,000,000
2	**08**	**07**			**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**								**1,700,000,000**						**1,700,000,000**
2	**08**	**07**	**1.01**		**Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**								**500,000,000**						**500,000,000**
2	08	07	1.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	PERSENTASE KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN	Jumlah kabupaten/kota yang dilakukan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi perlaksanaan kebijakan program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	11 Kab/Kota	100%	250,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERSENTASE KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN	100%	250,000,000

2	08	07	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	PERSENTASE KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN	Jumlah kabuarten/kota yang dikoordinasikan dan disinkronisasikan dalam upaya Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi perlaksanaan kebijakan program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	11 Kab/Kota	100%	250,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERSENTASE KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN	100%	250,000,000
2	**08**	**07**	**1.02**		**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi**								**750,000,000**					**750,000,000**
2	08	07	1.02	01	Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	PERSENTASE KEKERASAN TERHADAP ANAK	Jumlah Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Tersedianya layanan anak yang memerlukan perlindungan khsus	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Lembaga	11 Kab/Kota	300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERSENTASE KEKERASAN TERHADAP ANAK	100%	300,000,000
2	08	07	1.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	PERSENTASE KEKERASAN TERHADAP ANAK	Jumlah Jumlah Kabupaten/kota yang dilaksanakan pendampingan tentang Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Tersedianya layanan anak yang memerlukan perlindungan khsus	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota	250,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERSENTASE KEKERASAN TERHADAP ANAK	100%	250,000,000
2	08	07	1.02	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	PERSENTASE KEKERASAN TERHADAP ANAK	Jumlah kabupaten/kota yang memerlukan pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Tersedianya layanan anak yang memerlukan perlindungan khsus	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERSENTASE KEKERASAN TERHADAP ANAK	100%	150,000,000
2	08	07	1.02	04	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	PERSENTASE KEKERASAN TERHADAP ANAK	Jumlah kabupaten/kota yang diperkuat Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Tersedianya layanan anak yang memerlukan perlindungan khsus	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERSENTASE KEKERASAN TERHADAP ANAK	100%	50,000,000
2	**08**	**07**	**1.03**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**								**450,000,000**					**450,000,000**
2	08	07	1.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi		Jumlah Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi yang dikoordinasikan dan kosinkronisasikan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Paket		200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				200,000,000
2	08	07	1.03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi		Jumlah kabupaten/kota yang diperkuat Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		11 Kab/Kota		250,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				250,000,000
2	**13**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**								**47,550,000,001**					**33,150,000,000**
2	**13**	**02**			**PROGRAM PENATAAN DESA**								**3,500,000,000**					**3,500,000,000**
2	**13**	**02**	**1.01**		**Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat**								**3,500,000,000**					**3,500,000,000**
2	13	02	1.01	01	Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi	PERSENTASE FASILITASI PENATAAN DESA	Jumlah Kabupaten/kota yang dilaksanakan inventarisasi masyarakat hukum adat	Terlaksananya Inventarisasi Penataan Desa	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	10 Kab/Kota	100%	700,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERSENTASE FASILITASI PENATAAN DESA	100%	700,000,000
2	13	02	1.01	02	Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat	PERSENTASE FASILITASI PENATAAN DESA	Jumlah kabupaten/kota yang difasilitasi tentang Kelembagaan Desa dan Desa Adat	Terlaksananya Inventarisasi Penataan Desa	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	10 Kab/Kota	100%	1,150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERSENTASE FASILITASI PENATAAN DESA	100%	1,150,000,000
2	13	02	1.01	03	Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	PERSENTASE FASILITASI PENATAAN DESA	Jumlah Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa yang difasilitasi	Terlaksananya Inventarisasi Penataan Desa	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	10 Kab/Kota	100%	1,150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERSENTASE FASILITASI PENATAAN DESA	100%	1,150,000,000

2	13	02	1.01	04	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa	PERSENTASE FASILITASI PENATAAN DESA	jumlah Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa yang diadakan	Terlaksananya Inventarisasi Penataan Desa	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	10 Paket	100%	500,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERSENTASE FASILITASI PENATAAN DESA	100%	500,000,000
2	**13**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA**								**1,500,000,000**					**1,500,000,000**
2	**13**	**03**	**1.01**		**Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi**								**1,500,000,000**					**1,500,000,000**
2	13	03	1.01	01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	PERSENTASE PENINGKATAN PELAKSANAAN KERJASAMA DESA	jumlah Prasarana dan SarJumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi kerjasama antar desa	Terlaksananya fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	10 Kab/Kota	100%	500,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERSENTASE PENINGKATAN PELAKSANAAN KERJASAMA DESA	100%	500,000,000
2	13	03	1.01	02	Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	PERSENTASE PENINGKATAN PELAKSANAAN KERJASAMA DESA	Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi tentang Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Terlaksananya fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	10 Kab/Kota	100%	500,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERSENTASE PENINGKATAN PELAKSANAAN KERJASAMA DESA	100%	500,000,000
2	13	03	1.01	03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	PERSENTASE PENINGKATAN PELAKSANAAN KERJASAMA DESA	Jumlah Pembangunan Kawasan Perdesaan yang difasilitasi	Terlaksananya fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Kawasan Pedesaan	100%	500,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERSENTASE PENINGKATAN PELAKSANAAN KERJASAMA DESA	100%	500,000,000
2	**13**	**04**			**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**								**32,550,000,001**					**18,150,000,000**
2	**13**	**04**	**1.01**		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**								**32,550,000,001**					**18,150,000,000**
2	13	04	1.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa	PERSENTASE FASILITAS PENGELOLAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota yang Mengatur Desa yang difasilitasi	Terlaksananya Fasilitasi Peraturan Bupati/Walikota yang mengatur Desa	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	10 Kab/Kota	10 Kab/Kota	500,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERSENTASE FASILITAS PENGELOLAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	100%	500,000,000
2	13	04	1.01	02	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	PERSENTASE FASILITAS PENGELOLAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Pemerintahan Desa yang dilakukan pembinaan managemennya	Terlaksananya Fasilitasi Peraturan Bupati/Walikota yang mengatur Desa	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	300 Orang	10 Kab/Kota	750,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERSENTASE FASILITAS PENGELOLAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	100%	750,000,000
2	13	04	1.01	03	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	PERSENTASE FASILITAS PENGELOLAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi penyusunan produk hukum desa	Terlaksananya Fasilitasi Peraturan Bupati/Walikota yang mengatur Desa	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	10 Kab/Kota	10 Kab/Kota	750,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERSENTASE FASILITAS PENGELOLAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	100%	750,000,000
2	13	04	1.01	04	Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	PERSENTASE FASILITAS PENGELOLAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan desa yang difasilitasi	Terlaksananya Fasilitasi Peraturan Bupati/Walikota yang mengatur Desa	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	400 Orang	10 Kab/Kota	650,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERSENTASE FASILITAS PENGELOLAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	100%	650,000,000
2	13	04	1.01	05	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	PERSENTASE FASILITAS PENGELOLAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Desa yang difasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Peraturan Bupati/Walikota yang mengatur Desa	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	400 Orang	10 Kab/Kota	650,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERSENTASE FASILITAS PENGELOLAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	100%	650,000,000
2	13	04	1.01	06	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	PERSENTASE FASILITAS PENGELOLAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Desa yang difasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Terlaksananya Fasilitasi Peraturan Bupati/Walikota yang mengatur Desa	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	400 Orang	10 Kab/Kota	650,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERSENTASE FASILITAS PENGELOLAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	100%	650,000,000
2	13	04	1.01	07	Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	PERSENTASE FASILITAS PENGELOLAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Jumlah kabupaten/kota yang difasilitasi dalam pelaksanaan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Terlaksananya Fasilitasi Peraturan Bupati/Walikota yang mengatur Desa	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	10 Kab/Kota	10 Kab/Kota	500,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERSENTASE FASILITAS PENGELOLAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	100%	500,000,000
2	13	04	1.01	08	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	PERSENTASE FASILITAS PENGELOLAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Jumlah kabupaten/kota yang difasilitasi dalam pelaksanaan Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Terlaksananya Fasilitasi Peraturan Bupati/Walikota yang mengatur Desa	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	11 Kab/Kota	10 Kab/Kota	1,000,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERSENTASE FASILITAS PENGELOLAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	100%	1,000,000,000
2	13	04	1.01	09	Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	PERSENTASE FASILITAS PENGELOLAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Jumlah kabupaten/kota yang difasilitasi dalam Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	Terlaksananya Fasilitasi Peraturan Bupati/Walikota yang mengatur Desa	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	11 Kab/Kota	10 Kab/Kota	1,000,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERSENTASE FASILITAS PENGELOLAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	100%	1,000,000,000

2	13	04	1.01	10	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	PERSENTASE FASILITAS PENGELOLAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang dibina	Terlaksananya Fasilitasi Peraturan Bupati/Walikota yang mengatur Desa	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	400 Orang	10 Kab/Kota	650,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERSENTASE FASILITAS PENGELOLAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	100%	650,000,000
2	13	04	1.01	11	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	PERSENTASE FASILITAS PENGELOLAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Anggota BPD yang ditingkatkan kualitasnya	Terlaksananya Fasilitasi Peraturan Bupati/Walikota yang mengatur Desa	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	400 Orang	10 Kab/Kota	650,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERSENTASE FASILITAS PENGELOLAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	100%	650,000,000
2	13	04	1.01	12	Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis	PERSENTASE FASILITAS PENGELOLAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Jumlah kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan dalam percepatan pembangunan melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan dan bantuan teknis	Terlaksananya Fasilitasi Peraturan Bupati/Walikota yang mengatur Desa	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	11 Kab/Kota	10 Kab/Kota	16,000,000,001	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERSENTASE FASILITAS PENGELOLAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	100%	1,600,000,000
2	13	04	1.01	13	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Desa	PERSENTASE FASILITAS PENGELOLAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Desa yang melaksanakan Penugasan Urusan/Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Fasilitasi Peraturan Bupati/Walikota yang mengatur Desa	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1399 Desa	10 Kab/Kota	650,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERSENTASE FASILITAS PENGELOLAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	100%	650,000,000
2	13	04	1.01	14	Pembinaan dan Pengawasan atas Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembiayaan Desa	PERSENTASE FASILITAS PENGELOLAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Jumlah kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan dan pengawasan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembiayaan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Peraturan Bupati/Walikota yang mengatur Desa	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	10 Kab/Kota	10 Kab/Kota	500,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERSENTASE FASILITAS PENGELOLAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	100%	500,000,000
2	13	04	1.01	15	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama antar Desa	PERSENTASE FASILITAS PENGELOLAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Jumlah kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan dan pengawasan dalam Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama antar Desa	Terlaksananya Fasilitasi Peraturan Bupati/Walikota yang mengatur Desa	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	210 BumDes	10 Kab/Kota	2,400,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERSENTASE FASILITAS PENGELOLAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	100%	2,400,000,000
2	13	04	1.01	16	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	PERSENTASE FASILITAS PENGELOLAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Jumlah kabupaten/kota yang difasilitasi dalam Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Terlaksananya Fasilitasi Peraturan Bupati/Walikota yang mengatur Desa	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	10 Kab/Kota	10 Kab/Kota	650,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERSENTASE FASILITAS PENGELOLAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	100%	650,000,000
2	13	04	1.01	17	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	PERSENTASE FASILITAS PENGELOLAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Jumlah kepala desa yang difasilitasi dalam penyusunan laporan	Terlaksananya Fasilitasi Peraturan Bupati/Walikota yang mengatur Desa	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	330 Kades	10 Kab/Kota	750,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERSENTASE FASILITAS PENGELOLAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	100%	750,000,000
2	13	04	1.01	18	Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota	PERSENTASE FASILITAS PENGELOLAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Aparatur Pemdes yang difasilitasi dalam Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota	Terlaksananya Fasilitasi Peraturan Bupati/Walikota yang mengatur Desa	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	400 Orang	10 Kab/Kota	950,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERSENTASE FASILITAS PENGELOLAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	100%	950,000,000
2	13	04	1.01	19	Fasilitasi Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	PERSENTASE FASILITAS PENGELOLAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Jumlah anggota BPD yang difasilitasi mengenai peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Peraturan Bupati/Walikota yang mengatur Desa	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	10 Kab/Kota	10 Kab/Kota	950,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERSENTASE FASILITAS PENGELOLAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	100%	950,000,000
2	13	04	1.01	20	Fasilitasi Pengembangan Inovasi Desa	PERSENTASE FASILITAS PENGELOLAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Jumlah kabupaten/kota yang difasilitasi dalam pengembangan Inovasi Desa	Terlaksananya Fasilitasi Peraturan Bupati/Walikota yang mengatur Desa	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	10 Kab/Kota	10 Kab/Kota	950,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERSENTASE FASILITAS PENGELOLAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	100%	950,000,000
2	13	04	1.01	21	Fasilitasi Pekan Inovasi Perkembangan Desa	PERSENTASE FASILITAS PENGELOLAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Jumlah kabupaten/kota yang difasilitasi dalam pelaksanaan Pekan Inovasi Perkembangan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Peraturan Bupati/Walikota yang mengatur Desa	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	10 Kab/Kota	10 Kab/Kota	500,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERSENTASE FASILITAS PENGELOLAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	100%	500,000,000

2	13	04	1.01	22	Fasilitasi Penetapan Kewenangan Desa dan Desa Adat di Kabupaten/Kota	PERSENTASE FASILITAS PENGELOLAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Jumlah kabupaten/kota yang difasilitasi dalam Penetapan Kewenangan Desa dan Desa Adat di Kabupaten/Kota	Terlaksananya Fasilitasi Peraturan Bupati/Walikota yang mengatur Desa	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	10 Kab/Kota	10 Kab/Kota	500,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERSENTASE FASILITAS PENGELOLAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	100%	500,000,000
2	**13**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**								**10,000,000,000**					**10,000,000,000**
2	**13**	**05**	**1.01**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota**								**10,000,000,000**					**10,000,000,000**
2	13	05	1.01	01	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	PERSENTASE PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Jumlah kabuapten/kota yang difasilitasi dalam identifiksi Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi	Terlaksananya Fasilitasi dalam Identifikasi Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	10 Kab/Kota	100%	1,150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERSENTASE PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	100%	1,150,000,000
2	13	05	1.01	02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	PERSENTASE PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan fungsi, tugas dan perannya dalam fasilitasi, penataan pemberdayaan dan pemdayagunaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Terlaksananya Fasilitasi dalam Identifikasi Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	11 Kab/Kota	100%	850,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERSENTASE PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	100%	850,000,000
2	13	05	1.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	PERSENTASE PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Jumlah kabupaten/kota yang difasilitasi dalam peningkatan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Terlaksananya Fasilitasi dalam Identifikasi Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100 Kader	100%	1,800,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERSENTASE PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	100%	1,800,000,000
2	13	05	1.01	04	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	PERSENTASE PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Jumlah Pokja Posyandu yang difasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Terlaksananya Fasilitasi dalam Identifikasi Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100 Pokja Posyandu	100%	300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERSENTASE PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	100%	300,000,000
2	13	05	1.01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	PERSENTASE PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Jumlah Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa yang difasilitasi (BUMDesa Expo, bimtek penegmebangan pasar Desa, rakor Pamsimas, bimtek Pengembangan usaha Desa Wisata Desa Digital dan perhutanan Sosial)	Terlaksananya Fasilitasi dalam Identifikasi Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	50 Pasar Desa	100%	1,900,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERSENTASE PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	100%	1,900,000,000
2	13	05	1.01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	PERSENTASE PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Jumlah Pemerintah Desa yang difasilitasi dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Terlaksananya Fasilitasi dalam Identifikasi Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100 Desa	100%	500,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERSENTASE PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	100%	500,000,000

2	13	05	1.01	07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	PERSENTASE PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Jumlah kabupaten/kota yang difasilitasi pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Terlaksananya Fasilitasi dalam Identifikasi Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	11 Kab/Kota	100%	1,000,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERSENTASE PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	100%	1,000,000,000
2	13	05	1.01	08	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	PERSENTASE PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Jumlah kabupaten/kota yang difasilitasi dalam Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Terlaksananya Fasilitasi dalam Identifikasi Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	11 Kab/Kota	100%	800,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERSENTASE PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	100%	800,000,000
2	13	05	1.01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	PERSENTASE PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Jumlah Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga yang difasilitasi	Terlaksananya Fasilitasi dalam Identifikasi Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100 Orang	100%	1,700,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERSENTASE PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	100%	1,700,000,000
2	**14**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**								**6,575,000,000**					**5,475,000,000**
2	**14**	**02**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**								**1,150,000,000**					**1,150,000,000**
2	**14**	**02**	**1.01**		**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**								**750,000,000**					**550,000,000**
2	14	02	1.01	01	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)	LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK	Jumlah Kabupaten/Kota yang dilakukan penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)	Terwujudnya Penyerasian Kebijakan Pembanguann Daerah Provinsi terhadap KKBPK	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK	11 Kab/Kota	200,000,000
						LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK				1,72 %						LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK	1,72 %	
2	14	02	1.01	02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK	Jumlah Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi yang disusun dan dimanfaatkan	Terwujudnya Penyerasian Kebijakan Pembanguann Daerah Provinsi terhadap KKBPK	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11 Kab/Kota	1 Dokumen	11 Kab/Kota	300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK	11 Kab/Kota	0
						LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK				1,72 %						LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK	1,72 %	
2	14	02	1.01	04	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal	LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK	Jumlah Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal yang diperkuat	Terwujudnya Penyerasian Kebijakan Pembanguann Daerah Provinsi terhadap KKBPK	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11 Kab/Kota	11 PKS	11 Kab/Kota	250,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK	11 Kab/Kota	350,000,000
						LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK				1,72 %						LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK	1,72 %	
2	**14**	**02**	**1.02**		**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi**								**400,000,000**					**600,000,000**
2	14	02	1.02	01	Pelaksanaan Survey/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) dan Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK	Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) dan Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan yang dilaksanakan	Terwujudnya Penyerasian Kebijakan Pembanguann Daerah Provinsi terhadap KKBPK	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,72 %	1 Kegiatan	11 Kab/Kota	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK	1,72 %	300,000,000
2	14	02	1.02	02	Koordinasi, Penyediaan, dan Pengolahan Data Kependudukan Berbasis Keluarga	LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK	Jumlah Data Kependudukan Berbasis Keluarga yang dikoordinasikan, disediakan dan diolah	Terwujudnya Penyerasian Kebijakan Pembanguann Daerah Provinsi terhadap KKBPK	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,72 %	1 Dokumen	11 Kab/Kota	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK	1,72 %	300,000,000
2	**14**	**03**			**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**								**1,650,000,000**					**1,650,000,000**
2	**14**	**03**	**1.01**		**Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal**								**1,050,000,000**					**1,050,000,000**
2	14	03	1.01	01	Pengembangan Strategi Operasional Advokasi, Promosi Sesuai Kearifan Lokal		Jumlah Strategi Operasional Advokasi, Promosi Sesuai Kearifan Lokal yang dikembangkan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Modul		150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				150,000,000

2	14	03	1.01	02	Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal		Jumlah Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal yang tersedia dann dikembangkan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Materi		150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				150,000,000
2	14	03	1.01	03	Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal		Jumlah Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan Kie Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal yang digunakan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Paket		250,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				250,000,000
2	14	03	1.01	05	Penguatan Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program KKBPK		Jumlah Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program KKBPK yang diperkuat		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Kegiatan		200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				200,000,000
2	14	03	1.01	06	Pengembangan Strategi Operasional Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal		Jumlah Strategi Operasional Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal yang dikembangkan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Kegiatan		150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				150,000,000
2	14	03	1.01	07	Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal		Jumlah Strategi Operasional Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal yang dikembangkan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Kegiatan		150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				150,000,000
2	**14**	**03**	**1.02**		**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**								**600,000,000**					**600,000,000**
2	14	03	1.02	01	Pengembangan Strategi Operasional dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		Jumlah kabupaten/kota yang dilakukan fasilitasi dalam pengembangan Strategi Operasional dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		11 Kab/Kota		200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				200,000,000
2	14	03	1.02	02	Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		Jumlah Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB yang diberdayakan dan ditingkatkan partisipasinya		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		11 Ormas		200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				200,000,000
2	14	03	1.02	03	Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program KKBPK		Jumlah Kabupaten/kota yang diperkuat Program KKBPK melalui jejaring kemitraan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		11 Kab/Kota		200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				200,000,000

2	**14**	**04**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**								**3,775,000,000**					**2,675,000,000**
2	**14**	**04**	**1.01**		**Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**								**2,450,000,000**					**1,350,000,000**
2	14	04	1.01	01	Penyediaan Kebijakan Daerah bagi Pengembangan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	PERSENTASE PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI KELUARGA BERENCANA PERSENTASE PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI KELUARGA BERENCANA	Jumlah kabupaten/kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga melalui penyediaan kebijakan daerah	Meningkatnya Strategi Operasional Advokasi,Promosi sesuai Kearifan Lokal	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100% 64,64 %	11 Kab/Kota	100%	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERSENTASE PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI KELUARGA BERENCANA PERSENTASE PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI KELUARGA BERENCANA	100% 64,64 %	150,000,000
2	14	04	1.01	02	Pengembangan Prototype Materi Pembangunan Keluarga Sesuai dengan Kearifan Lokal	PERSENTASE PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI KELUARGA BERENCANA PERSENTASE PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI KELUARGA BERENCANA	Jumlah Prototype Materi Pembangunan Keluarga Sesuai dengan Kearifan Lokal yang dikembangkan	Meningkatnya Strategi Operasional Advokasi,Promosi sesuai Kearifan Lokal	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100% 64,64 %	1 Modul	100%	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERSENTASE PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI KELUARGA BERENCANA PERSENTASE PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI KELUARGA BERENCANA	100% 64,64 %	0
2	14	04	1.01	03	Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	PERSENTASE PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI KELUARGA BERENCANA PERSENTASE PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI KELUARGA BERENCANA	Jumlah kaupaten/kota yang dibina dalam pelaksanaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Meningkatnya Strategi Operasional Advokasi,Promosi sesuai Kearifan Lokal	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100% 64,64 %	11 Kab/Kota	100%	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERSENTASE PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI KELUARGA BERENCANA PERSENTASE PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI KELUARGA BERENCANA	100% 64,64 %	150,000,000
2	14	04	1.01	04	Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	PERSENTASE PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI KELUARGA BERENCANA PERSENTASE PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI KELUARGA BERENCANA	Jumlah peserta Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	Meningkatnya Strategi Operasional Advokasi,Promosi sesuai Kearifan Lokal	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100% 64,64 %	220 Orang	100%	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERSENTASE PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI KELUARGA BERENCANA PERSENTASE PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI KELUARGA BERENCANA	100% 64,64 %	150,000,000
2	14	04	1.01	05	Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	PERSENTASE PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI KELUARGA BERENCANA PERSENTASE PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI KELUARGA BERENCANA	Jumlah peserta Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	Meningkatnya Strategi Operasional Advokasi,Promosi sesuai Kearifan Lokal	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100% 64,64 %	220 Orang	100%	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERSENTASE PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI KELUARGA BERENCANA PERSENTASE PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI KELUARGA BERENCANA	100% 64,64 %	150,000,000
2	14	04	1.01	06	Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)	PERSENTASE PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI KELUARGA BERENCANA PERSENTASE PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI KELUARGA BERENCANA	Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)	Meningkatnya Strategi Operasional Advokasi,Promosi sesuai Kearifan Lokal	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100% 64,64 %	11 Kab/Kota	100%	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERSENTASE PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI KELUARGA BERENCANA PERSENTASE PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI KELUARGA BERENCANA	100% 64,64 %	150,000,000

2	14	04	1.01	07	Pengembangan dan Perbanyakan Materi Substansi Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R), Media Promosi, Alat Permainan Edukatif Remaja, dan Sarana Prasarana Lainnya yang Dibutuhkan	PERSENTASE PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI KELUARGA BERENCANA	Jumlah Materi Substansi Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R), Media Promosi, Alat Permainan Edukatif Remaja, dan Sarana Prasarana Lainnya yang Dibutuhkan yang dikembangkan	Meningkatnya Strategi Operasional Advokasi,Promosi sesuai Kearifan Lokal	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Modul	100%	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERSENTASE PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI KELUARGA BERENCANA	100%	0
						PERSENTASE PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI KELUARGA BERENCANA				64,64 %						PERSENTASE PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI KELUARGA BERENCANA	64,64 %	
2	14	04	1.01	08	Fasilitasi Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB	PERSENTASE PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI KELUARGA BERENCANA	Jumlah kabupaten/kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB	Meningkatnya Strategi Operasional Advokasi,Promosi sesuai Kearifan Lokal	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	11 Kab/Kota	100%	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERSENTASE PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI KELUARGA BERENCANA	100%	0
						PERSENTASE PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI KELUARGA BERENCANA				64,64 %						PERSENTASE PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI KELUARGA BERENCANA	64,64 %	
2	14	04	1.01	09	Penyediaan Kebijakan dalam rangka Penyiapan Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kelahiran (HPK)	PERSENTASE PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI KELUARGA BERENCANA	Jumlah Kebijakan dalam rangka Penyiapan Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kelahiran (HPK) yang tersedia	Meningkatnya Strategi Operasional Advokasi,Promosi sesuai Kearifan Lokal	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Pedum	100%	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERSENTASE PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI KELUARGA BERENCANA	100%	150,000,000
						PERSENTASE PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI KELUARGA BERENCANA				64,64 %						PERSENTASE PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI KELUARGA BERENCANA	64,64 %	
2	14	04	1.01	10	Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK	PERSENTASE PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI KELUARGA BERENCANA	Jumlah kabupaten/kota yang difasilitasi dalam upaya penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK	Meningkatnya Strategi Operasional Advokasi,Promosi sesuai Kearifan Lokal	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	11 Kab/Kota	100%	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERSENTASE PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI KELUARGA BERENCANA	100%	150,000,000
						PERSENTASE PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI KELUARGA BERENCANA				64,64 %						PERSENTASE PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI KELUARGA BERENCANA	64,64 %	
2	14	04	1.01	11	Penyediaan dan Pengembangan Materi IPK	PERSENTASE PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI KELUARGA BERENCANA	Jumlah Materi IPK yang tersedia dan dikembabangkan	Meningkatnya Strategi Operasional Advokasi,Promosi sesuai Kearifan Lokal	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Modul	100%	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERSENTASE PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI KELUARGA BERENCANA	100%	0
						PERSENTASE PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI KELUARGA BERENCANA				64,64 %						PERSENTASE PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI KELUARGA BERENCANA	64,64 %	
2	14	04	1.01	12	Advokasi, Sosialisasi dan Promosi IPK	PERSENTASE PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI KELUARGA BERENCANA	Jumlah peserta Advokasi, Sosialisasi dan Promosi IPK	Meningkatnya Strategi Operasional Advokasi,Promosi sesuai Kearifan Lokal	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	220 Orang	100%	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERSENTASE PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI KELUARGA BERENCANA	100%	150,000,000
						PERSENTASE PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI KELUARGA BERENCANA				64,64 %						PERSENTASE PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI KELUARGA BERENCANA	64,64 %	

2	14	04	1.01	13	Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian IPK	PERSENTASE PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI KELUARGA BERENCANA PERSENTASE PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI KELUARGA BERENCANA	Jumlah kabupaten/kota yang dikooridnasikan evaluasi pencapaian IPK	Meningkatnya Strategi Operasional Advokasi,Promosi sesuai Kearifan Lokal	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100% 64,64 %	11 Kab/Kota	100%	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERSENTASE PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI KELUARGA BERENCANA PERSENTASE PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI KELUARGA BERENCANA	100% 64,64 %	0
2	14	04	1.01	14	Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	PERSENTASE PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI KELUARGA BERENCANA PERSENTASE PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI KELUARGA BERENCANA	Jumlah kabupaten/kota yang dilaksanakan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Meningkatnya Strategi Operasional Advokasi,Promosi sesuai Kearifan Lokal	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100% 64,64 %	11 Kab/Kota	100%	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERSENTASE PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI KELUARGA BERENCANA PERSENTASE PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI KELUARGA BERENCANA	100% 64,64 %	150,000,000
2	14	04	1.01	15	Penyediaan Sarana Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	PERSENTASE PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI KELUARGA BERENCANA PERSENTASE PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI KELUARGA BERENCANA	Jumlah kabupaten/kota yang disiapkan Sarana Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Meningkatnya Strategi Operasional Advokasi,Promosi sesuai Kearifan Lokal	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100% 64,64 %	11 Kab/Kota	100%	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERSENTASE PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI KELUARGA BERENCANA PERSENTASE PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI KELUARGA BERENCANA	100% 64,64 %	0
2	**14**	**04**	**1.02**		**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**								**1,325,000,000**						**1,325,000,000**
2	14	04	1.02	01	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	PERSENTASE PENINGKATKAN DAN PEMEBRDAYAAN KELAURGA SEJAHTERA (KS)	Jumlah kabupaten/kota yang difasilitasi dalam pelaksanaan pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Terlaksananya Fasiliatsi dalam pengembangan Strategi Operasional dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	51%	11 Kab/Kota	100%	250,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERSENTASE PENINGKATKAN DAN PEMEBRDAYAAN KELAURGA SEJAHTERA (KS)	51%	250,000,000
2	14	04	1.02	02	Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	PERSENTASE PENINGKATKAN DAN PEMEBRDAYAAN KELAURGA SEJAHTERA (KS)	Jumlah Keluarga yang diperkuat dan diberdayakan ekonominya	Terlaksananya Fasiliatsi dalam pengembangan Strategi Operasional dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	51%	55 KK	100%	275,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERSENTASE PENINGKATKAN DAN PEMEBRDAYAAN KELAURGA SEJAHTERA (KS)	51%	275,000,000
2	14	04	1.02	03	Sosialisasi dan Promosi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Pengelolaan Keuangan Keluarga	PERSENTASE PENINGKATKAN DAN PEMEBRDAYAAN KELAURGA SEJAHTERA (KS)	Jumlah peserta Sosialisasi dan Promosi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Pengelolaan Keuangan Keluarga	Terlaksananya Fasiliatsi dalam pengembangan Strategi Operasional dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	51%	330 Orang	100%	250,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERSENTASE PENINGKATKAN DAN PEMEBRDAYAAN KELAURGA SEJAHTERA (KS)	51%	250,000,000

2	14	04	1.02	04	Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	PERSENTASE PENINGKATKAN DAN PEMEBRDAYAAN KELAURGA SEJAHTERA (KS)	Jumlah Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga yang ditingkatkan kapasitasnya	Terlaksananya Fasiliatsi dalam pengembangan Strategi Operasional dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	51%	60 Orang	100%	300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERSENTASE PENINGKATKAN DAN PEMEBRDAYAAN KELAURGA SEJAHTERA (KS)	51%	300,000,000
2	14	04	1.02	05	Fasilitasi Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung KB	PERSENTASE PENINGKATKAN DAN PEMEBRDAYAAN KELAURGA SEJAHTERA (KS)	Jumlah kabupaten/kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung KB	Terlaksananya Fasiliatsi dalam pengembangan Strategi Operasional dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	51%	11 Kab/Kota	100%	250,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERSENTASE PENINGKATKAN DAN PEMEBRDAYAAN KELAURGA SEJAHTERA (KS)	51%	250,000,000
												TOTAL	**69,300,000,001**					**52,830,000,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Jambi
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan
Sub Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
2	**09**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**								**23,103,408,503**					**26,568,919,766**
2	**09**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**14,574,344,098**					**16,760,495,710**
2	**09**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**643,991,678**					**740,590,429**
2	09	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Terlaksananya Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja, Terseusunnya Renstra dan Renja Perangkat Daerah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 dokumen		117,240,580					134,826,666
2	09	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Tersusunnya Program dan Kegiatan Perangkat Daerah ke dalam Dokumen Perencanaan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		11 Kab/Kota		153,168,569					176,143,854
2	09	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Terlaksananya Koordinasi Ketahanan Pangan dan Laporan Kerja Ketahanan Pangan, Tersusunnya Dokumen Perencanaan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Laporan		150,295,800					172,840,170
2	09	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Periode Laporan Kinerja yang dibuat		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 bulan		61,974,504					71,270,680
2	09	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Diketahuinya Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan dan Permasalahan serta Alternatif terhadap Permasalahan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		11 Kab/Kota		161,312,225					185,509,059
2	**09**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**12,576,951,513**					**14,463,494,240**
2	09	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Periode Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 bulan		11,864,406,213					13,644,067,145
2	09	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Periode Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 bulan		50,000,000					57,500,000
2	09	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Peningkatan Administrasi Keuangan Pertahun		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 bulan		327,545,300					376,677,095
2	09	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 bulan		80,000,000					92,000,000
2	09	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 dokumen		75,000,000					86,250,000
2	09	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Jumlah Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 dokumen		60,000,000					69,000,000
2	09	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		18 Laporan		70,000,000					80,500,000
2	09	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Laporan		50,000,000					57,500,000
2	**09**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**9,487,500**					**10,910,625**
2	09	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Periode Pegawai yang mngikuti Diklat		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 bulan		9,487,500					10,910,625

2	**09**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**598,757,344**						**688,570,946**
2	09	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 tahun		5,343,360						6,144,864
2	09	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Terlaksanan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 tahun		94,272,216						108,413,048
2	09	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik untuk peserta rapat/tamu/dll		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 tahun		74,566,000						85,750,900
2	09	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Periode Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 bulan		49,638,025						57,083,729
2	09	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Periode Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 bulan		23,188,393						26,666,652
2	09	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 tahun		351,749,350						404,511,753
2	**09**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**53,543,399**						**61,574,908**
2	09	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 tahun		53,543,399						61,574,908
2	**09**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**314,050,644**						**361,158,239**
2	09	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Periode Surat Keluar Pertahun		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 bulan		40,760,591						46,874,679
2	09	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Periode Pembayaran Rekening Pertahun		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 bulan		127,042,800						146,099,220
2	09	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		60 jenis		76,863,153						88,392,625
2	09	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Terlaksananya Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung Kantor		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 tahun		69,384,100						79,791,715
2	**09**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**377,562,020**						**434,196,323**
2	09	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Terlaksananya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 tahun		230,000,000						264,500,000
2	09	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 tahun		53,475,000						61,496,250
2	09	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 tahun		27,094,000						31,158,100
2	09	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 tahun		66,993,020						77,041,973
2	**09**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN**								**3,616,078,969**						**4,158,490,814**
2	**09**	**02**	**1.01**		**Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi**								**3,616,078,969**						**4,158,490,814**
2	09	02	1.01	01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan		Jumlah Infrastruktur Lumbung Pangan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 unit		1,663,452,897						1,912,970,832
2	09	02	1.01	02	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur		Bertambahnya Jumlah Pengembangan Infrastruktur Lantai Jemur		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 unit		436,446,850						501,913,878

2	09	02	1.01	03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya		Koorporasi Usahatani dan PDRP/PK		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 unit		1,413,548,490					1,625,580,764
2	09	02	1.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		11 Kab/Kota		56,622,279					65,115,620
2	09	02	1.01	05	Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan		Terlaksananya Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		11 Kab/Kota		46,008,453					52,909,720
2	**09**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**								**4,093,054,298**					**4,707,012,443**
2	**09**	**03**	**1.01**		**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**								**487,105,079**					**560,170,840**
2	09	03	1.01	01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan		Tersedianya Informasi Harga, Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan Pokok dan Pangan Lainnya		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		11 Kab/Kota		81,290,338					93,483,888
2	09	03	1.01	02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		Jumlah Kelompok Pemanfaatan Pekarangan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		22 KWT		99,050,437					113,908,003
2	09	03	1.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya		Terlaksananya Pertemuan Lembaga Usaha Pangan Masyarakat		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		11 Kab/Kota		181,268,463					208,458,732
2	09	03	1.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan		Tersedianya Bahan dan Informasi Harga Pangan Pokok dan Strategis		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		11 Kab/Kota		79,705,350					91,661,153
2	09	03	1.01	05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan		Jumlah Lembaga Distribusi Pangan yang di Kembangkan dan Jaringan Distribusi Pangan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 Lembaga		45,790,491					52,659,064
2	**09**	**03**	**1.02**		**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi**								**1,673,138,519**					**1,924,109,297**
2	09	03	1.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Cadangan Pangan Pemerintah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		11 Kab/Kota		55,153,540					63,426,571
2	09	03	1.02	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal		Tersedianya Data Rencana Kebutuhan Pangan Lokal di Kab/Kota		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		11 Kab/Kota		100,008,439					115,009,705
2	09	03	1.02	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		11 Kab/Kota		80,476,540					92,548,021
2	09	03	1.02	04	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi		Jumlah Beras CPPD Provinsi		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		61 Ton Beras		1,437,500,000					1,653,125,000
2	**09**	**03**	**1.03**		**Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat**								**100,720,450**					**115,828,518**
2	09	03	1.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dan Pengendalian serta Pengawasan Bahan Pangan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		11 Kab/Kota		100,720,450					115,828,518
2	**09**	**03**	**1.04**		**Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi**								**1,832,090,250**					**2,106,903,788**
2	09	03	1.04	01	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		Terlaksananya Promosi Pangan Lokal, Pameran Pangan Lokal, UMKM Pangan Lokal (8 UMKM)		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Kali		137,427,532					158,041,662

2	09	03	1.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)		Terlaksananya Lomba Cipta Menu Tk. Nasional dan Provinsi, Penganekaragaman Pangan B2SA berbasis sumber daya lokal, Penumbuhan dan Pengembangan Pekarangan Pangan Lestari (P2L)		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		22 KWT		1,609,018,285					1,850,371,028
2	09	03	1.04	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun		Tersedianya Hasil Analisis Pola Konsumsi Pangan Masyarakat, Ekspose Hasil Analisa Pola Konsumsi Pangan Masyarakat		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		11 Kab/Kota		85,644,433					98,491,098
2	**09**	**04**			**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**								**275,787,006**					**317,155,047**
2	**09**	**04**	**1.01**		**Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi**								**101,365,692**					**116,570,546**
2	09	04	1.01	01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota		Diketahuinya Indeks Ketahanan Pangan dan Daerah Rentan Rawan Pangan Kecamatan dan Desa se Provinsi Jambi		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1583 desa		101,365,692					116,570,546
2	**09**	**04**	**1.02**		**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi**								**174,421,314**					**200,584,501**
2	09	04	1.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi, Kab/Kota melalui Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		11 Kab/Kota		101,234,739					116,419,940
2	09	04	1.02	02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) dan Penyaluran Jumlah Penanganan Pasca Bencana Provinsi		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		11 Kab/Kota		73,186,575					84,164,561
2	**09**	**05**			**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**								**544,144,132**					**625,765,752**
2	**09**	**05**	**1.01**		**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota**								**544,144,132**					**625,765,752**
2	09	05	1.01	01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi		Terlaksananya Penguatan Kelembagaan Keamanan PSAT		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		11 Kab/Kota		133,321,007					153,319,157
2	09	05	1.01	02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Sertifikat Prima 3		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		22 Sertifikat		127,134,069					146,204,179
2	09	05	1.01	03	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Registrasi PD (Produk Dalam Negeri)		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Registrasi		134,287,427					154,430,542
2	09	05	1.01	04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Rekomendasi Keamanan PSAT		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Rekomendasi		67,660,112					77,809,129
2	09	05	1.01	05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan		Meningkatnya Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu Keamanan PSAT		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10% 1 paket		81,741,517					94,002,745
												TOTAL	**23,103,408,503**					**26,568,919,766**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Jambi
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
2	**11**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**								**30,251,386,000**					**31,898,936,000**
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**19,046,150,000**					**20,375,700,000**
2	**11**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**682,000,000**					**737,000,000**
2	11	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Jumlah buku Renstra dan Renja DLH Prov. Jambi Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi/Forum OPD perencanaan bidang LH Jumlah pelaksanaan sinkronisasi program/kegiatan bidang LH	Kualitas Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kelurahan	70 persen	2 buku 2 kali 2 kali	100%	400,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	70 persen	425,000,000
2	11	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Nilai SAKIP	Jumlah Dokumen RKA DLH Prov. Jambi	Kualitas Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kelurahan	70 persen	1 buku	100%	3,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	70 persen	3,000,000
2	11	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai SAKIP	Jumlah Dokumen Perubahan RKA DLH Prov. Jambi	Kualitas Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kelurahan	70 persen	1 buku	100%	3,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	70 persen	3,000,000
2	11	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai SAKIP	Jumlah Dokumen DPA DLH Prov. Jambi	Kualitas Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kelurahan	70 persen	1 buku	100%	3,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	70 persen	3,000,000
2	11	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Nilai SAKIP	Jumlah Dokumen Perubahan DPA DLH Prov. Jambi	Kualitas Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kelurahan	70 persen	1 buku	100%	3,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	70 persen	3,000,000
2	11	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai SAKIP	Jumlah buku laporan capaian kinerja (LKPJ, LKj, LPPD dan Lap. Monev) dan ikhtisar realisasi kinerja DLH Prov. Jambi	Kualitas Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kelurahan	70 persen	5 buku	100%	70,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	70 persen	100,000,000
2	11	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Jumlah pelaksanaan monev kegiatan bidang lingkungan hidup tingkat Provinsi Jambi Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi/FGD untuk evaluasi kinerja bidang LH	Kualitas Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kelurahan	70 persen	2 kali 1 kali	100%	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	70 persen	200,000,000

2	**11**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**15,017,500,000**						**16,017,500,000**
2	11	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai SAKIP	Jumlah ketersediaan gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan	Kualitas pengelolaan keuangan	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kelurahan	70 persen	14 bulan	100%	15,000,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	70 persen	16,000,000,000
2	11	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai SAKIP	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	Kualitas pengelolaan keuangan	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kelurahan	70 persen	1 laporan	100%	5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	70 persen	5,000,000
2	11	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Nilai SAKIP	Jumlah pelaksanaan pengelolaan dan penyiapan tanggapan pemeriksaan	Kualitas pengelolaan keuangan	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kelurahan	70 persen	5 kali	100%	5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	70 persen	5,000,000
2	11	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Nilai SAKIP	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/ semesteran	Kualitas pengelolaan keuangan	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kelurahan	70 persen	14 dokumen	100%	7,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	70 persen	7,500,000
2	**11**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**21,150,000**						**25,200,000**
2	11	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Jumlah kursus dan diklat yang diikuti aparatur	Tercapainya Indeks Kepuasan Masyarakat	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kelurahan	100	30 OH	83.25 skor	9,900,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	13,200,000
2	11	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Jumlah pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan	Tercapainya Indeks Kepuasan Masyarakat	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kelurahan	100	2 kali	83.25 skor	3,750,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	4,500,000
2	11	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Jumlah harian untuk mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Tercapainya Indeks Kepuasan Masyarakat	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kelurahan	100	50 oh	83.25 skor	7,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	7,500,000
2	**11**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**848,500,000**						**939,000,000**
2	11	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Jumlah komponen listrik yang dibutuhkan untuk penerangan bangunan kantor	Tercapainya Indeks Kepuasan Masyarakat	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kelurahan	100	10 item	83.25 skor	15,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	15,000,000
2	11	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Jumlah alat tulis kantor yang dibutuhkan dan ketersediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Tercapainya Indeks Kepuasan Masyarakat	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kelurahan	100	35 item	83.25 skor	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	170,000,000
2	11	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Jumlah makanan dan minuman rapat dan tamu	Tercapainya Indeks Kepuasan Masyarakat	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kelurahan	100	900 orang	83.25 skor	65,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	70,000,000
2	11	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Tercapainya Indeks Kepuasan Masyarakat	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kelurahan	100	12 bulan	83.25 skor	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	60,000,000
2	11	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Jumlah ketersediaan bahan bacaan dan informasi	Tercapainya Indeks Kepuasan Masyarakat	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kelurahan	100	12 bulan	83.25 skor	3,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	4,000,000

2	11	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi ke kab/kota dan ke luar Provinsi Jambi	Tercapainya Indeks Kepuasan Masyarakat	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kelurahan	100	400 oh	83.25 skor	350,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	400,000,000
2	11	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Jumlah laporan penatausahaan arsip dinamis pada Dinas LH Prov. Jambi	Tercapainya Indeks Kepuasan Masyarakat	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kelurahan	100	2 laporan	83.25 skor	15,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	20,000,000
2	11	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Jumlah pembuatan dan pemeliharaan website	Tercapainya Indeks Kepuasan Masyarakat	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kelurahan	100	1 kali	83.25 skor	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	200,000,000
2	**11**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**1,020,000,000**					**975,000,000**
2	11	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas yang terealisasi	Tingkat penyelesaian pengadaan barang milik daerah	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kelurahan	100	3 unit	100%	90,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	340,000,000
2	11	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Jumlah pengadaan Mebel yang terealisasi	Tingkat penyelesaian pengadaan barang milik daerah	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kelurahan	100	19 unit	100%	300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	300,000,000
2	11	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Jumlah pengadaan komputer dan kelengkapannya	Tingkat penyelesaian pengadaan barang milik daerah	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kelurahan	100	4 unit	100%	30,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	35,000,000
2	11	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Jumlah pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Tingkat penyelesaian pengadaan barang milik daerah	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kelurahan	100	2 paket	100%	600,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	300,000,000
2	**11**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**553,000,000**					**628,000,000**
2	11	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Jumlah surat yang terkirim	Tercapainya Indeks Kepuasan Masyarakat	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kelurahan	100	250 surat	83.25 indeks	3,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	3,000,000
2	11	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Ketersediaan sarana listrik, telepon dan air	Tercapainya Indeks Kepuasan Masyarakat	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kelurahan	100	12 bulan	83.25 indeks	300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	350,000,000
2	11	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Jumlah pembayaran honorarium aparatur yang melayani administrasi keuangan	Tercapainya Indeks Kepuasan Masyarakat	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kelurahan	100	12 bulan	83.25 indeks	250,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	275,000,000

2	**11**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**904,000,000**						**1,054,000,000**
2	11	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Jumlah kendaraan perorangan dinas/ kendaraan dinas jabatan yang berkala dipelihara	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kelurahan	100	18 unit	100%	390,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	450,000,000
2	11	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Jumlah kendaraan peroJumlah kendaraan dinas operasional/ lapangan yang rutin berkala dipelihara dan melakukan pembayaran izin/pajakrangan dinas/ kendaraan dinas jabatan yang berkala dipelihara	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kelurahan	100	18 unit	100%	390,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	450,000,000
2	11	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kelurahan	100	77 unit	100%	61,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	70,000,000
2	11	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Jumlah luas pemeliharaan gedung kantor, musholla dan laboratorium	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kelurahan	100	150 m2/tahun	100%	63,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	84,000,000
2	**11**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**								**2,450,000,000**						**2,550,000,000**
2	**11**	**02**	**1.01**		**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi**								**1,250,000,000**						**1,350,000,000**
2	11	02	1.01	01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi	Peningkatan Kualitas Perencaan Lingkungan Hidup Sesuai Dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	1. Jumlah dokumen RPPLH Provinsi Jambi 2. Jumlah DIKPLHD Provinsi Jambi yang disusun	Tersusunnya dokumen RPPLH dan DIKPLHD Provinsi Jambi dan pengendalian pelaksanaan RPPLH Provinsi Jambi	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	100%	1 dokumen 1 dokumen	2 dokumen	1,250,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Perencaan Lingkungan Hidup Sesuai Dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	100%	1,350,000,000
2	**11**	**02**	**1.02**		**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi**								**1,200,000,000**						**1,200,000,000**
2	11	02	1.02	01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Peningkatan Kualitas Perencaan Lingkungan Hidup Sesuai Dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Jumlah dokumen KLHS Rencana Tata Ruang yang disusun	Tersusunnya dokumen KLHS Provinsi Jambi	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kelurahan	100%	1 dokumen	2 dokumen	500,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Perencaan Lingkungan Hidup Sesuai Dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	100%	500,000,000
2	11	02	1.02	04	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Peningkatan Kualitas Perencaan Lingkungan Hidup Sesuai Dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	1. Jumlah kabupaten/ kota yang dilakukan pembinaan penyusunan dokumen KLHS (11 kab/kota) 2. Jumlah dokumen KLHS untuk KRP yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko LH	Tersusunnya dokumen KLHS Provinsi Jambi	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kelurahan	100%	2 kali 11 dokumen	2 dokumen	700,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Perencaan Lingkungan Hidup Sesuai Dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	100%	700,000,000

2	**11**	**03**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**								**4,740,236,000**					**4,213,236,000**
2	**11**	**03**	**1.01**		**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup**								**4,305,236,000**					**3,755,236,000**
2	11	03	1.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Peningkatan Kualitas Air dan udara (IKLH)	1. Jumlah pemantauan kualitas air sungai lintas kab/kota dalam wilayah Provinsi Jambi (7 kab/kota) 2. Jumlah pemantauan kualitas air danau (2 kab/kota) 3. Jumlah pemantauan kualitas air laut (2 kab/kota) 4. Jumlah pemantauan kualitas udara ambien di wil. Prov. Jambi (11 kab/kota) 5. Jumlah data/informasi sumber cemaran di sungai, danau, laut dan udara yang disusun 6. Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi/ sosialisasi/ rapat pemantauan kualitas lingkungan	Terlaksananya pemantauan untuk pencegahan dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kelurahan	64.09 Indeks	2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 1 peta 2 kali	76 titik	655,236,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Air dan udara (IKLH)	64.09 Indeks	655,236,000
2	11	03	1.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Air dan udara (IKLH)	1. Jumlah pelaksanaan pembinaan kegiatan Proklim dan Penurunan Emisi Berbasis Masyarakat 2. Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon Daerah (PPRKD)	Terlaksananya pemantauan untuk pencegahan dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kelurahan	64.09 Indeks	11 kab/kota 1 dokumen	76 titik	1,150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Air dan udara (IKLH)	64.09 Indeks	400,000,000
2	11	03	1.01	03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Peningkatan Kualitas Air dan udara (IKLH)	1. Besaran Target PAD per tahun 2. Jumlah sampel hasil kegiatan pelayanan kepada pelanggan 3. Peningkatan Kinerja UPTD Laboratorium Lingkungan Daerah Provinsi Jambi (100% in house training)	Terlaksananya pemantauan untuk pencegahan dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kelurahan	64.09 Indeks	3800000000 Rupiah 350 sampel/bulan 2 kali	76 titik	2,500,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Air dan udara (IKLH)	64.09 Indeks	2,700,000,000
2	**11**	**03**	**1.03**		**Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**								**435,000,000**					**458,000,000**
2	11	03	1.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Peningkatan Kualitas Air dan udara (IKLH)	1. Jumlah pelaksanaan inventarisasi dan pembinaan pemulihan lahan bekas terbakar di Provinsi Jambi (milik perusahaan dan non perusahaan) 2. Jumlah rapat koordinasi/FGD/sosialisasi pengendalian kebakaran lahan dan hutan 3. Jumlah koordinasi inventarisasi lahan gambut di Provinsi Jambi 4. Jumlah koordinasi inventarisasi pemulihan lahan bekas terbakar di Provinsi Jambi	Terlaksananya pemulihan lokasi lahan akibat pencemaran dan/atau kerusakan LH	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kelurahan	64.09 Indeks	0 0 2 kali 5 lokasi 5 lokasi	10 lokasi	230,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Air dan udara (IKLH)	64.09 Indeks	253,000,000

2	11	03	1.03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Peningkatan Kualitas Air dan udara (IKLH)	1. Jumlah pelaksanaan koordinasi / inventarisasi eksisting LAT, Karst dan Mangrove	Terlaksananya pemulihan lokasi lahan akibat pencemaran dan/atau kerusakan LH	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kelurahan	64.09 Indeks	1 lokasi	10 lokasi	205,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Air dan udara (IKLH)	64.09 Indeks	205,000,000
							2. Jumlah peserta rapat koordinasi/ FGD Lahan Akses Terbuka, Karst, dan Mangrove				2 kali							
							3. Jumlah pelaksanaan uopdate data pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan				1 kali							
2	**11**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**								**350,000,000**					**400,000,000**
2	**11**	**04**	**1.01**		**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi**								**350,000,000**					**400,000,000**
2	11	04	1.01	01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persentase Penyelesaian Penyusunan Rencana Pengelolaan Kenakeragaman Hayati Provinsi Jambi	Jumlah inventarisasi data untuk penyusunan dan penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Tersusunnya dokumen Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi Jambi"	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kelurahan	100%	11 kab/kota	1 dokumen	350,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penyelesaian Penyusunan Rencana Pengelolaan Kenakeragaman Hayati Provinsi Jambi	100%	400,000,000
2	**11**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**								**165,000,000**					**165,000,000**
2	**11**	**05**	**1.01**		**Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**								**165,000,000**					**165,000,000**
2	11	05	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap penanganan pengelolaan B3 dan Limbah B3	1. Jumlah dunia usaha/ kegiatan yang dibina terkait pengelolaan B3 dan LB3	Terinventarisasinya pelaku usaha yang taat dalam penanganan pengelolaan B3 dan limbah B3 lintas daerah kab/kota	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kelurahan	80%	5 perusahaan	4 perusahaan	165,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap penanganan pengelolaan B3 dan Limbah B3	80%	165,000,000
							2. Jumlah koordinasi/ pembinaan PETI yang menggunakan B3 terhadap kab/kota				5 kab/kota							
2	**11**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**								**940,000,000**					**1,095,000,000**
2	**11**	**06**	**1.01**		**Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi**								**940,000,000**					**1,095,000,000**
2	11	06	1.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	tingkat ketaatan Usaha/kegiatan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	1. Jumlah binwas kinerja KPA dan instansi LH serta verifikasi lisensi KPA	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kelurahan	25 Perusahaan	11 kab/kota	50 perusahaan	250,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		tingkat ketaatan Usaha/kegiatan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	25 Perusahaan	275,000,000
							2. Jumlah pemantauan kondisi rencana usaha/ kegiatan				8 perusahaan							
							3. Jumlah pembinaan dan pemantauan izin lingkungan / RKL-RPL perusahaan se-Provinsi Jambi				5 perusahaan							
							4. Jumlah perusahaan yang difasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPLH				20 perusahaan							

2	11	06	1.01	02	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	tingkat ketaatan Usaha/kegiatan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Jumlah pelaksanaan peningkatan kapasitas SDM pengelola lingkungan hidup bagi pelaku usaha/kegiatan	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kelurahan	25 Perusahaan	1 kali	50 perusahaan	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		tingkat ketaatan Usaha/kegiatan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	25 Perusahaan	100,000,000
2	11	06	1.01	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	tingkat ketaatan Usaha/kegiatan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Jumlah pengawasan langsung terhadap izin lingkungan, izin perlindungan pengelolaan lingkungan hidup (air, udara, tanah, LB3 dan kerusakan lingkungan) Jumlah pengawasan tidak langsung terhadap izin lingkungan, izin perlindungan pengelolaan lingkungan hidup (air, udara, tanah, LB3 dan kerusakan lingkungan)	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kelurahan	25 Perusahaan	50 perusahaan 80 perusahaan	50 perusahaan	490,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		tingkat ketaatan Usaha/kegiatan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	25 Perusahaan	540,000,000
2	11	06	1.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	tingkat ketaatan Usaha/kegiatan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Jumlah Data Sanksi administratif yang dikeluarkan oleh Kab/Kota Dalam Provinsi Jambi. Jumlah pendampingan Tim penegakan Hukum Lingkungan Provinsi terhadap kasus lingkungan Kab/kota	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kelurahan	25 Perusahaan	11 kab/kota 8 perusahaan	50 perusahaan	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		tingkat ketaatan Usaha/kegiatan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	25 Perusahaan	180,000,000
2	**11**	**07**			**PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH**								**400,000,000**					**400,000,000**
2	**11**	**07**	**1.01**		**Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH**								**250,000,000**					**250,000,000**
2	11	07	1.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Persentase Peningkatan Pengakuan MHA dan kearifan lokal di provinsi Jambi	Jumlah pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi data keberadaan MHA dan kearifan lokal di kab/kota	Terlaksananya fasilitasi pengakuan MHA dan kearifan lokal di Provinsi Jambi	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kelurahan	100%	11 kab/kota	11 kab/kota	250,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Peningkatan Pengakuan MHA dan kearifan lokal di provinsi Jambi	100%	250,000,000

2	**11**	**07**	**1.02**		**Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH**								**150,000,000**						**150,000,000**
2	11	07	1.02	01	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Persentase Peningkatan Pengakuan MHA dan kearifan lokal di provinsi Jambi	Jumlah pelaksanaan pemberdayaan, Kemitraan, pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH (11 kab/kota)	Terfasilitasinya pemberdayaan, Kemitraan, pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kelurahan	100%	2 kali	1 MHA	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Peningkatan Pengakuan MHA dan kearifan lokal di provinsi Jambi	100%	150,000,000
2	**11**	**08**			**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**								**450,000,000**						**450,000,000**
2	**11**	**08**	**1.01**		**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi**								**450,000,000**						**450,000,000**
2	11	08	1.01	02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Persentae Peningkatan SDM (Komunitas/masyarakat) tentang lingkungan hidup	Jumlah pelaksanaan pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup di Provinsi Jambi (11 kab/kota)	Terselenggaranya pendidikan, pelatihan dan penyuluhan LH untuk lembaga kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kelurahan	50%	2 kali	3 kali	350,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentae Peningkatan SDM (Komunitas/masyarakat) tentang lingkungan hidup	50%	350,000,000
2	11	08	1.01	03	Penyelengaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Persentae Peningkatan SDM (Komunitas/masyarakat) tentang lingkungan hidup	Jumlah pelaksanaan penyuluhan/ kampanye dan sosialisasi pengelolaan persampahan terhadap komunitas / masyarakat (11 kab/kota)	Terselenggaranya pendidikan, pelatihan dan penyuluhan LH untuk lembaga kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kelurahan	50%	1 kali	3 kali	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentae Peningkatan SDM (Komunitas/masyarakat) tentang lingkungan hidup	50%	100,000,000
2	**11**	**09**			**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**								**550,000,000**						**650,000,000**
2	**11**	**09**	**1.01**		**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi**								**550,000,000**						**650,000,000**
2	11	09	1.01	01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase Peningkatan Pemberian Penghargaan LH untuk Masyarakat	1. Jumlah DIKPLHD 2. Jumlah penilaian sekolah adiwiyata di Provinsi Jambi yang dibina (11 kab/kota) 3. Jumlah penilaian kalpataru di Provinsi Jambi 4. Jumlah penilaian proklim di Provinsi Jambi 5. Jumlah penilaian Adipura di Provinsi Jambi 6. Jumlah Penilaian PROPER 7. Jumlah penilaian OPD berbudaya lingkungan (eco office) 8. Jumlah event/peringatan Hari Lingkungan Hidup	Terlaksananya pemberian penghargaan LH Tingkat Daerah Provinsi	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kelurahan	100%	0 0 10 sekolah 11 kab/kota 11 kab/kota 11 kab/kota 2 perusahaan 40 OPD 1 kali	6 kategori	550,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Peningkatan Pemberian Penghargaan LH untuk Masyarakat	100%	650,000,000

2	**11**	**10**			**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**								**860,000,000**						**1,000,000,000**
2	**11**	**10**	**1.01**		**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi**								**860,000,000**						**1,000,000,000**
2	11	10	1.01	01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	Persentase Pengelolaan Pengaduan Kasus Lingkungan Hidup dan penerapan Sanksi Administratif	1. Pembinaan dan pembentukan pos pengaduan kab/kota	Terlaksananya tindak lanjut hasil pengaduan lingkungan hidup dan Terlaksananya penerapan sanksi administrasi terhadap kasus lingkungan hidup	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kelurahan	100%	11 kab/kota	15 kasus	300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pengelolaan Pengaduan Kasus Lingkungan Hidup dan penerapan Sanksi Administratif	100%	350,000,000
							2. Penanganan pengaduan lingkungan hidup				15 kasus								
							3. Jumlah FGD/ Sosialisasi/ Rapat Koordinasi penanganan pengaduan kasus lingkungan				2 kali								
							4. Jumlah rapat tindak lanjut hasil penyelesaian kasus pengaduan lingkungan				8 kali								
2	11	10	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Persentase Pengelolaan Pengaduan Kasus Lingkungan Hidup dan penerapan Sanksi Administratif	1. Jumlah rapat tindak lanjut hasil pengawasan dan penyelesaian kasus lingkungan (penegakan hukum)	Terlaksananya tindak lanjut hasil pengaduan lingkungan hidup dan Terlaksananya penerapan sanksi administrasi terhadap kasus lingkungan hidup	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kelurahan	100%	15 kali	15 kasus	560,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pengelolaan Pengaduan Kasus Lingkungan Hidup dan penerapan Sanksi Administratif	100%	650,000,000
							2. Jumlah verifikasi terhadap tindak lanjut hasil pengawasan LH dan pengaduan LH (penegakan hukum)				20 perusahaan								
							3.Persentase pengawasan pemenuhan sanksi administrasi terhadap kegiatan dan/atau usaha				100%								
							4. Penanganan kasus tindak pidana lingkungan dan gugatan perdata pencemaran dan kerusakan				2 kasus								
							5. Jumlah verifikasi sengketa lingkungan hidup dan rapat tindak lanjut hasil pengaduan LH				3 kasus								
2	**11**	**11**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**								**300,000,000**						**600,000,000**
2	**11**	**11**	**1.01**		**Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional**								**300,000,000**						**600,000,000**
2	11	11	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	Persentase Penanganan Pengurangan Timbulan Sampah di Provinsi Jambi	1. Jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan dan pemantauan implementasi Jakstrada Sampah di Provinsi Jambi	Terlaksananya penanganan pengurangan sampah secara regional	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kelurahan	26%	11 kab/kota	183.739 ton/tahun	300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penanganan Pengurangan Timbulan Sampah di Provinsi Jambi	26%	600,000,000
							2. Jumlah lokasi untuk penambahan Bank Sampah dan TPS3R, pembinaan serta pemberian penghargaan/ reward				10 lokasi								
							3. Jumlah penyusunan FS dan DED (Detail Engineering Design) TPA Regional				0 0								
							4. Jumlah pelaksanaan studi komperansi terhadap pengolahan sampah regional 1				1 kali								
												TOTAL	**30,251,386,000**						**31,898,936,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Jambi
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
2	**15**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**								**71,590,000,000**					**73,580,000,005**
2	**15**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**25,890,000,000**					**26,440,000,000**
2	**15**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**10,400,000,000**					**10,400,000,000**
2	15	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji Aparatur	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	87 orang	14 Bulan	9,900,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	9,900,000,000
2	15	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya Gaji Aparatur	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	80%	14 Bulan	500,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	500,000,000
2	**15**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**1,200,000,000**					**1,200,000,000**
2	15	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Nilai SAKIP	Tersedianya Pakaian Dinas dan Atributnya	Baju Dinas yang tesedia Jumlahpagawai yang ikut Diklat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 persen	80%	1 Paket	800,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	70 persen	800,000,000
2	15	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Nilai SAKIP	Tersedianya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Baju Dinas yang tesedia Jumlahpagawai yang ikut Diklat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 persen	80%	1 Paket	400,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	70 persen	400,000,000
2	**15**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**1,300,000,000**					**1,500,000,000**
2	15	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Perlengkapan kantor	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 persen	80%	12 Bulan	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	70 persen	50,000,000
2	15	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Perlengkapan kantor	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 persen	80%	12 Bulan	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	70 persen	200,000,000
2	15	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai SAKIP	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Perlengkapan kantor	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 persen	80%	12 Bulan	250,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	70 persen	250,000,000
2	15	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai SAKIP	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Perlengkapan kantor	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 persen	80%	12 Bulan	30,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	70 persen	50,000,000
2	15	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai SAKIP	Terfasilitasinya Kunjungan Tamu	Tersedianya Perlengkapan kantor	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 persen	80%	12 Bulan	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	70 persen	150,000,000
2	15	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Perlengkapan kantor	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 persen	80%	12 Bulan	620,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	70 persen	800,000,000
2	**15**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**12,500,000,000**					**12,820,000,000**
2	15	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP	Tersedianya Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedia dan Terpeliharanya Mobil Dinasda Peralatan Mesin Lainnya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 persen	80%	1 Paket	800,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	70 persen	800,000,000
2	15	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedia dan Terpeliharanya Mobil Dinasda Peralatan Mesin Lainnya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 persen	80%	1 Paket	900,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	70 persen	1,200,000,000
2	15	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedia dan Terpeliharanya Mobil Dinasda Peralatan Mesin Lainnya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 persen	80%	1 Paket	300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	70 persen	300,000,000

2	15	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedia dan Terpeliharanya Mobil Dinasda Peralatan Mesin Lainnya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 persen	80%	1 Paket	10,000,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	70 persen	10,000,000,000
2	15	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung	Tersedia dan Terpeliharanya Mobil Dinasda Peralatan Mesin Lainnya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 persen	80%	1 Paket	300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	70 persen	320,000,000
2	15	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung	Tersedia dan Terpeliharanya Mobil Dinasda Peralatan Mesin Lainnya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 persen	80%	1 Paket	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	70 persen	200,000,000
2	**15**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**490,000,000**					**520,000,000**
2	15	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Pelayanan Administrasi		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		80%		50,000,000					60,000,000
2	15	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Pelayanan Administrasi		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		80%		300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				310,000,000
2	15	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Pelayanan Administrasi		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		90%		140,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				150,000,000
2	**15**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**								**35,750,000,000**					**40,070,000,005**
2	**15**	**02**	**1.01**		**Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi**								**3,500,000,000**					**4,100,000,000**
2	15	02	1.01	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	persentase terlaksananya penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan	Terlaksananya penyusunan rencana induk jaringan LLAJ Provinsi	Tersedianya Dokumen Perencanan Dinas Perhubungan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70	70 Persen	80%	2,500,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase terlaksananya penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan	70	3,000,000,000
2	15	02	1.01	02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	persentase terlaksananya penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan	Terlaksananya kebijakan dan sosialisasi rencana induk jaringan LLAJ Provinsi	Tersedianya Dokumen Perencanan Dinas Perhubungan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70	70 Persen	80%	500,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase terlaksananya penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan	70	550,000,000
2	15	02	1.01	03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	persentase terlaksananya penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan	Tercapainya pelaksanaan rencana induk jaringan LLAJ Provinsi	Tersedianya Dokumen Perencanan Dinas Perhubungan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70	70 Persen	80%	500,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase terlaksananya penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan	70	550,000,000
2	**15**	**02**	**1.02**		**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi**								**10,500,000,000**					**12,950,000,000**
2	15	02	1.02	01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Provinsi	persentase terlaksananya penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan	Terbangunnya Prasarana jalan di Jalan Provinsi Jambi	Terpasang dan Terpeliharanya Fasilitas Perlengkapan Jalan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70	70%	1 Paket	1,000,000,000			persentase terlaksananya penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan	70	1,200,000,000
2	15	02	1.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	persentase terlaksananya penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan	Tersedianya Fasillitas Perlengkapan jalan di Jalan Provinsi Jambi	Terpasang dan Terpeliharanya Fasilitas Perlengkapan Jalan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70	1 Paket	1 Paket	8,000,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase terlaksananya penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan	70	10,000,000,000
2	15	02	1.02	03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	persentase terlaksananya penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan	Terpeliharanya Prasarana jalan di Jalan Provinsi Jambi	Terpasang dan Terpeliharanya Fasilitas Perlengkapan Jalan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70	80%	1 Paket	1,000,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase terlaksananya penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan	70	1,200,000,000
2	15	02	1.02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	persentase terlaksananya penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan	Terpeliharanya Perlengkapan jalan di Jalan Provinsi Jambi	Terpasang dan Terpeliharanya Fasilitas Perlengkapan Jalan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70	80%	1 Paket	500,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase terlaksananya penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan	70	550,000,000
2	**15**	**02**	**1.03**		**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B**								**5,800,000,000**					**5,810,000,005**
2	15	02	1.03	01	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	persentase terlaksananya penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan	Tersusunya Kajian Rencana Pembangunan Terminal Tipe B	Terbangunnya dan Terpeliharanya 3 Terminla Tipe B di Provinsi Jambi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70	1 Dokumen	70%	800,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase terlaksananya penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan	70	810,000,000
2	15	02	1.03	02	Pembangunan Gedung Terminal	persentase terlaksananya penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan	Terbangunnya Terminal Tipe B	Terbangunnya dan Terpeliharanya 3 Terminla Tipe B di Provinsi Jambi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70	1 Lokasi	70%	2,500,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase terlaksananya penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan	70	2,000,000,005
2	15	02	1.03	03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	persentase terlaksananya penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Terminal Tipe B	Terbangunnya dan Terpeliharanya 3 Terminla Tipe B di Provinsi Jambi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70	60%	70%	500,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase terlaksananya penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan	70	600,000,000
2	15	02	1.03	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	persentase terlaksananya penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan	TErpeliharanya Fasiltas Terminal Tipe B	Terbangunnya dan Terpeliharanya 3 Terminla Tipe B di Provinsi Jambi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70	70%	70%	1,000,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase terlaksananya penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan	70	1,200,000,000

2	15	02	1.03	05	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe B	persentase terlaksananya penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan	Peningkatan Kemampuan Pengelola Terminal Tipe B	Terbangunnya dan Terpeliharanya 3 Terminla Tipe B di Provinsi Jambi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70	50%	70%	1,000,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase terlaksananya penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan	70	1,200,000,000
2	**15**	**02**	**1.05**		**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi**								**4,500,000,000**					**5,040,000,000**
2	15	02	1.05	01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	persentase terlaksananya penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan	Terlaksananya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Terlaksana dan Terawasinya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70	50%	1 Paket	1,000,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase terlaksananya penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan	70	1,200,000,000
2	15	02	1.05	02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	persentase terlaksananya penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan	Terliharanya Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Terlaksana dan Terawasinya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70	50%	1 Paket	2,950,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase terlaksananya penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan	70	3,200,000,000
2	15	02	1.05	03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	persentase terlaksananya penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan	Tersosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Terlaksana dan Terawasinya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70	30%	1 Paket	300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase terlaksananya penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan	70	320,000,000
2	15	02	1.05	04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	persentase terlaksananya penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan	Terawasinya Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Terlaksana dan Terawasinya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70	30%	1 Paket	250,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase terlaksananya penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan	70	320,000,000
2	**15**	**02**	**1.06**		**Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi**								**2,000,000,000**					**2,200,000,000**
2	15	02	1.06	04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	persentase terlaksananya penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan	Terlaksanaya Pengawasan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Persetujuan ANDALALIN yang terawasi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70	70%	50%	2,000,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase terlaksananya penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan	70	2,200,000,000
2	**15**	**02**	**1.07**		**Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**								**300,000,000**					**320,000,000**
2	15	02	1.07	04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi		Terlasananya nspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		90%		300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				320,000,000
2	**15**	**02**	**1.08**		**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**								**4,000,000,000**					**4,500,000,000**
2	15	02	1.08	01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	persentase terlaksananya penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan	Tersedianya angkutan Umum yang aman Nyaman dan Murah	Terpenuhinya Angkutan Umum aman nyaman dan Murah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70	50%	5 Koridor	3,500,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase terlaksananya penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan	70	4,000,000,000
2	15	02	1.08	02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	persentase terlaksananya penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan	Terlasnannya Pengawasan angkutan Umum	Terpenuhinya Angkutan Umum aman nyaman dan Murah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70	50%	5 Koridor	500,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase terlaksananya penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan	70	500,000,000
2	**15**	**02**	**1.09**		**Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**								**250,000,000**					**250,000,000**
2	15	02	1.09	02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi		Terrlaksanannya Sosialisasi di Provinsi Jambi		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		70%		250,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				250,000,000
2	**15**	**02**	**1.1**		**Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**								**4,500,000,000**					**4,500,000,000**
2	15	02	1.1	01	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi		TTersususnnya Rencana Umum Jaringan Trayek		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen		4,250,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4,250,000,000
2	15	02	1.1	02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi		Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 Kali		250,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				250,000,000
2	**15**	**02**	**1.13**		**Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**								**400,000,000**					**400,000,000**
2	15	02	1.13	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Terpenuhinya Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		50%		200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				200,000,000

2	15	02	1.13	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi		TErlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		50%		200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				200,000,000
2	**15**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**								**8,500,000,000**					**5,620,000,000**
2	**15**	**03**	**1.01**		**Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi**								**200,000,000**					**200,000,000**
2	15	03	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi		Trlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		50%		200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				200,000,000
2	**15**	**03**	**1.05**		**Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**								**200,000,000**					**200,000,000**
2	15	03	1.05	02	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi		Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		50%		200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				200,000,000
2	**15**	**03**	**1.06**		**Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan**								**200,000,000**					**200,000,000**
2	15	03	1.06	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas		Terlaksananya PKoordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		50%		200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				200,000,000
2	**15**	**03**	**1.08**		**Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional**								**1,000,000,000**					**1,000,000,000**
2	15	03	1.08	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional		Tersedianya Dokumen DLKR		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		50%		800,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				800,000,000
2	15	03	1.08	03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional		Terlaksannya Pengendalian DLKR		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		50%		200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				200,000,000
2	**15**	**03**	**1.09**		**Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional**								**3,500,000,000**					**620,000,000**
2	15	03	1.09	02	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional		Terbangunnya Pelabuahn Pengumpan Regional		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		35%		3,200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				320,000,000
2	15	03	1.09	04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional		Terawasinya Operasional Pelabuhan Pengumpan Regional		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		50%		300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				300,000,000
2	**15**	**03**	**1.1**		**Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**								**2,600,000,000**					**2,600,000,000**
2	15	03	1.1	02	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Terbangunnya Dermaga Penyeberangan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		50%		2,100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2,100,000,000
2	15	03	1.1	03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Beroperasinya Dermaga Penyeberangan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		50%		500,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				500,000,000
2	**15**	**03**	**1.11**		**Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional**								**250,000,000**					**250,000,000**
2	15	03	1.11	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional		Terawasinya Dermaga Penyeberangan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		50%		250,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				250,000,000
2	**15**	**03**	**1.14**		**Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional**								**150,000,000**					**150,000,000**
2	15	03	1.14	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional		Terawasinya Kegiatan Pengerukan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		50%		150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				150,000,000
2	**15**	**03**	**1.15**		**Penerbitan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional**								**250,000,000**					**250,000,000**

2	15	03	1.15	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional		Terawasinya Kegiatan Reklamasi		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		50%		250,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				250,000,000
2	**15**	**03**	**1.16**		**Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional**								**150,000,000**					**150,000,000**
2	15	03	1.16	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional		Terawasinya TUKS		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		50%		150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				150,000,000
2	**15**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN**								**1,450,000,000**					**1,450,000,000**
2	**15**	**05**	**1.01**		**Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian**								**1,200,000,000**					**1,200,000,000**
2	15	05	1.01	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian		Tersusunnya RIPN		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		50%		1,200,000,000	Pendapatan Pajak Daerah				1,200,000,000
2	**15**	**05**	**1.03**		**Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Melebihi Wilayah 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**								**250,000,000**					**250,000,000**
2	15	05	1.03	01	Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Provinsi		Tersusunnya Kebijakan Terkait Perkeretaapian		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		50%		250,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				250,000,000
												TOTAL	**71,590,000,000**					**73,580,000,005**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Jambi
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
										Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
2	**16**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**								**67,465,353,345**					**61,178,255,680**
2	**16**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**15,259,423,345**					**16,021,860,680**
2	**16**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**241,000,000**					**265,100,000**
2	16	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat daerah	Meningkatnya kualitas Perencanaan Perangkat Daerah		70 persen	2 Dokumen	90%	35,000,000			Nilai SAKIP	70 persen	38,500,000
2	16	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Nilai SAKIP	Jumlah dokumen RKA-SKPD	Meningkatnya kualitas Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 persen	2 Dokumen	90%	18,000,000			Nilai SAKIP	70 persen	19,800,000
2	16	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai SAKIP	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	Meningkatnya kualitas Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 persen	2 Dokumen	90%	8,000,000			Nilai SAKIP	70 persen	8,800,000
2	16	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai SAKIP	Jumlah Rapat Koordinasi	Meningkatnya kualitas Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 persen	2 Kegiatan	90%	180,000,000			Nilai SAKIP	70 persen	198,000,000
2	**16**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**10,265,000,000**					**10,305,500,000**
2	16	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai SAKIP	Tersedianya Gaji dan tunjangan ASN	Meningkatnya kualitas Laporan Keuangan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 persen	14 Bulan	97%	10,000,000,000			Nilai SAKIP	70 persen	10,000,000,000
2	16	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Nilai SAKIP	Jumlah Dokumen penatausahaan Keuangan SKPD	Meningkatnya kualitas Laporan Keuangan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 persen	12 Bulan	97%	260,000,000			Nilai SAKIP	70 persen	300,000,000
2	16	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai SAKIP	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun	Meningkatnya kualitas Laporan Keuangan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 persen	1 Dokumen	97%	5,000,000			Nilai SAKIP	70 persen	5,500,000
2	**16**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**80,000,000**					**100,000,000**
2	16	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Nilai SAKIP	Jumlah ASN yang mengikuti diklat/bimtek	Meningkatnya kualitas SDM Dinas Kominfo	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 persen	15 Orang	30%	80,000,000			Nilai SAKIP	70 persen	100,000,000
2	**16**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**591,350,000**					**660,150,000**
2	16	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP Persentase Kecukupan sarana dan prasarana persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Terpenuhinya perlengkapan kantor	Meningkatnya layanan internal OPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 persen 85% 100	1 Tahun	90%	94,000,000			Nilai SAKIP Persentase Kecukupan sarana dan prasarana persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	70 persen 85% 100	104,000,000
2	16	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP Persentase Kecukupan sarana dan prasarana persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	Meningkatnya layanan internal OPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 persen 85% 100	1 Tahun	90%	60,000,000			Nilai SAKIP Persentase Kecukupan sarana dan prasarana persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	70 persen 85% 100	70,000,000
2	16	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai SAKIP Persentase Kecukupan sarana dan prasarana persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Meningkatnya layanan internal OPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 persen 85% 100	8 Cetakan	90%	50,000,000			Nilai SAKIP Persentase Kecukupan sarana dan prasarana persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	70 persen 85% 100	60,000,000

2	16	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai SAKIP Persentase Kecukupan sarana dan prasarana persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Jumlah bahan bacaan	Meningkatnya layanan internal OPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 persen 85% 100	5 Jenis	90%	49,500,000			Nilai SAKIP Persentase Kecukupan sarana dan prasarana persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	70 persen 85% 100	54,500,000
2	16	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP Persentase Kecukupan sarana dan prasarana persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Terpenuhinya Rapat Koordinasi dan konsultasi OPD	Meningkatnya layanan internal OPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 persen 85% 100	1 Tahun	90%	337,850,000			Nilai SAKIP Persentase Kecukupan sarana dan prasarana persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	70 persen 85% 100	371,650,000
2	**16**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**712,000,000**						**984,000,000**
2	16	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	persentase peningkatansarana dan prasarana aparatur pada tahun berkenaan	Jumlah Pengadaan Kendaraan roda 2 (dua)	Tersedianya sarana untuk meningkatkan Kinerja Pelayanan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60	6 Unit	80%	180,000,000			persentase peningkatansarana dan prasarana aparatur pada tahun berkenaan	60	390,000,000
2	16	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	persentase peningkatansarana dan prasarana aparatur pada tahun berkenaan	Jumlah pengadaan mebel	Tersedianya sarana untuk meningkatkan Kinerja Pelayanan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60	24 Unit	80%	112,000,000			persentase peningkatansarana dan prasarana aparatur pada tahun berkenaan	60	94,000,000
2	16	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	persentase peningkatansarana dan prasarana aparatur pada tahun berkenaan	Jumlah pengadaan peralatan kantor/operasional	Tersedianya sarana untuk meningkatkan Kinerja Pelayanan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60	60 Unit	80%	420,000,000			persentase peningkatansarana dan prasarana aparatur pada tahun berkenaan	60	500,000,000
2	**16**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**2,839,973,345**						**3,124,010,680**
2	16	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Kecukupan sarana dan prasarana	Terpenuhinya layanan jasa surat menyurat	Meningkatnya Kenyamanan penggunaan pelayanan Internet	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85%	100%	1 GB	1,980,000			Persentase Kecukupan sarana dan prasarana	85%	2,178,000
2	16	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Kecukupan sarana dan prasarana	Terpenuhinya jasa bandwith OPD	Meningkatnya Kenyamanan penggunaan pelayanan Internet	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85%	1 Gigabyte	1 GB	2,831,393,345			Persentase Kecukupan sarana dan prasarana	85%	3,114,532,680
2	16	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Kecukupan sarana dan prasarana	Jasa Pelayanan/Kebersihan Kantor	Meningkatnya Kenyamanan penggunaan pelayanan Internet	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85%	100%	1 GB	6,600,000			Persentase Kecukupan sarana dan prasarana	85%	7,300,000
2	**16**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**530,100,000**						**583,100,000**
2	16	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Meningkatnya Kenyamanan kerja	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 persen	24 Unit	80%	310,000,000			Nilai SAKIP	70 persen	341,000,000
2	16	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP	Jumlah Rehabilitasi gedung/kantor	Meningkatnya Kenyamanan kerja	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 persen	100%	80%	165,000,000			Nilai SAKIP	70 persen	181,500,000
2	16	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP	Jumlah pemeliharaan sarana/prasarana gedung/kantor	Meningkatnya Kenyamanan kerja	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 persen	100%	80%	55,100,000			Nilai SAKIP	70 persen	60,600,000
2	**16**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**								**14,839,870,000**						**18,349,350,000**
2	**16**	**02**	**1.01**		**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi**								**14,839,870,000**						**18,349,350,000**
2	16	02	1.01	02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Meningkatnya kualitas komunikasi publik melalui pengelolaan Opini/Aspirasi publik, penguatan kapasitas sumberdaya dan kemitraan komunikasi publik	Persentase hasil monitoring opini dan aspirasi publik dari media	Meningkatnya Kualitas pengelolaan Informasi dan media informasi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75%	70%	70%	469,000,000			Meningkatnya kualitas komunikasi publik melalui pengelolaan Opini/Aspirasi publik, penguatan kapasitas sumberdaya dan kemitraan komunikasi publik	75%	586,000,000

2	16	02	1.01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Meningkatnya kualitas komunikasi publik melalui pengelolaan Opini/Aspirasi publik, penguatan kapasitas sumberdaya dan kemitraan komunikasi publik	Persentase Informasi dan Komunikasi publik melalui media	Meningkatnya Kualitas pengelolaan Informasi dan media informasi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75%	76%	70%	7,993,650,000			Meningkatnya kualitas komunikasi publik melalui pengelolaan Opini/Aspirasi publik, penguatan kapasitas sumberdaya dan kemitraan komunikasi publik	75%	9,992,100,000
2	16	02	1.01	06	Pelayanan Informasi Publik	Meningkatnya kualitas komunikasi publik melalui pengelolaan Opini/Aspirasi publik, penguatan kapasitas sumberdaya dan kemitraan komunikasi publik	Persentase Keterbukaan informasi publik pada 34 OPD dan 11 Kab/Kota di Provinsi Jambi	Meningkatnya Kualitas pengelolaan Informasi dan media informasi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75%	75%	70%	700,000,000			Meningkatnya kualitas komunikasi publik melalui pengelolaan Opini/Aspirasi publik, penguatan kapasitas sumberdaya dan kemitraan komunikasi publik	75%	1,000,000,000
2	16	02	1.01	08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Meningkatnya kualitas komunikasi publik melalui pengelolaan Opini/Aspirasi publik, penguatan kapasitas sumberdaya dan kemitraan komunikasi publik	Persentase kerjasama kemitraan pengelolaan informasi yang baik kemasyarakat/komunitas dan organisasi Pemerintah Provinsi Jambi	Meningkatnya Kualitas pengelolaan Informasi dan media informasi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75%	98%	70%	4,086,520,000			Meningkatnya kualitas komunikasi publik melalui pengelolaan Opini/Aspirasi publik, penguatan kapasitas sumberdaya dan kemitraan komunikasi publik	75%	4,862,400,000
2	16	02	1.01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Meningkatnya kualitas komunikasi publik melalui pengelolaan Opini/Aspirasi publik, penguatan kapasitas sumberdaya dan kemitraan komunikasi publik	Jumlah pemberdayaan SDM pengelola Informasi dan Pengelolaan penunjang operasional media informasi	Meningkatnya Kualitas pengelolaan Informasi dan media informasi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75%	70 Orang	70%	340,700,000			Meningkatnya kualitas komunikasi publik melalui pengelolaan Opini/Aspirasi publik, penguatan kapasitas sumberdaya dan kemitraan komunikasi publik	75%	408,850,000
2	16	02	1.01	11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Meningkatnya kualitas komunikasi publik melalui pengelolaan Opini/Aspirasi publik, penguatan kapasitas sumberdaya dan kemitraan komunikasi publik	Jumlah Terselesaikannya Sengketa informasi publik sesuai UU KIP	Meningkatnya Kualitas pengelolaan Informasi dan media informasi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75%	98%	70%	1,250,000,000			Meningkatnya kualitas komunikasi publik melalui pengelolaan Opini/Aspirasi publik, penguatan kapasitas sumberdaya dan kemitraan komunikasi publik	75%	1,500,000,000
2	**16**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**								**37,366,060,000**					**26,807,045,000**
2	**16**	**03**	**1.01**		**Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi**								**255,000,000**					**320,000,000**
2	16	03	1.01	02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase perangkat daerah yang dapat menggunakan sistem aplikasi dan terkoneksi ke jaringan internet pemerintah	Persentasi pelaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Meningkatnya OPD yang menggunakan Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70%	65%	65%	255,000,000			Persentase perangkat daerah yang dapat menggunakan sistem aplikasi dan terkoneksi ke jaringan internet pemerintah	70%	320,000,000
2	**16**	**03**	**1.02**		**Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi**								**37,111,060,000**					**26,487,045,000**
2	16	03	1.02	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase perangkat daerah yang dapat menggunakan sistem aplikasi dan terkoneksi ke jaringan internet pemerintah	persentase Pelaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Meningkatnya Penyelenggaraan E-Goverment dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70%	45%	45%	350,000,000			Persentase perangkat daerah yang dapat menggunakan sistem aplikasi dan terkoneksi ke jaringan internet pemerintah	70%	450,000,000

2	16	03	1.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase perangkat daerah yang dapat menggunakan sistem aplikasi dan terkoneksi ke jaringan internet pemerintah	Persentasi Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Meningkatnya Penyelenggaraan E-Goverment dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70%	45%	45%	545,000,000			Persentase perangkat daerah yang dapat menggunakan sistem aplikasi dan terkoneksi ke jaringan internet pemerintah	70%	750,000,000
2	16	03	1.02	09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas	Persentase perangkat daerah yang dapat menggunakan sistem aplikasi dan terkoneksi ke jaringan internet pemerintah	Jumlah pembangunan akses jaringan internet	Meningkatnya Penyelenggaraan E-Goverment dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi		70%	250 unit	45%	7,500,000,000			Persentase perangkat daerah yang dapat menggunakan sistem aplikasi dan terkoneksi ke jaringan internet pemerintah	70%	5,000,000,000
2	16	03	1.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Persentase perangkat daerah yang dapat menggunakan sistem aplikasi dan terkoneksi ke jaringan internet	Pembangunan Command center Persentase perluasan infrastruktur jaringan internet dan intranet	Meningkatnya Penyelenggaraan E-Goverment dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70%	1 Paket 20%	45%	13,716,060,000			Persentase perangkat daerah yang dapat menggunakan sistem aplikasi dan terkoneksi ke jaringan internet	70%	10,287,045,000
2	16	03	1.02	11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Persentase perangkat daerah yang dapat menggunakan sistem aplikasi dan terkoneksi ke jaringan internet pemerintah	Terbangunnya Command center Provinsi Jambi	Meningkatnya Penyelenggaraan E-Goverment dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70%	1 Paket	45%	15,000,000,000			Persentase perangkat daerah yang dapat menggunakan sistem aplikasi dan terkoneksi ke jaringan internet pemerintah	70%	10,000,000,000
2	**20**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**								**683,739,000**					**725,000,000**
2	**20**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**								**683,739,000**					**725,000,000**
2	**20**	**02**	**1.01**		**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi**								**683,739,000**					**725,000,000**
2	20	02	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Tersedianya data statistik sektoral Provinsi Jambi	 Jumlah Dokumen data Statistik sektoral yang telah diolah dan dianalisis melalui forum data	Meningkatnya kualitas data Statistik sektoral yang telah diolah dan dianalisis	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50%	11 Kab./Kota 43 OPD	50%	210,000,000			Tersedianya data statistik sektoral Provinsi Jambi	50%	240,000,000
2	20	02	1.01	02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Tersedianya data statistik sektoral Provinsi Jambi	Jumlah aparatur yang berkualitas dan profesional di bidang Statistik sektoral	Meningkatnya kualitas data Statistik sektoral yang telah diolah dan dianalisis	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50%	130 Orang	50%	253,739,000			Tersedianya data statistik sektoral Provinsi Jambi	50%	265,000,000
2	20	02	1.01	03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Tersedianya data statistik sektoral Provinsi Jambi	 Terbangunnya meta data Statistik sektoral di Provinsi Jambi	Meningkatnya kualitas data Statistik sektoral yang telah diolah dan dianalisis	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50%	11 Kab./Kota 43 OPD	50%	220,000,000			Tersedianya data statistik sektoral Provinsi Jambi	50%	220,000,000
2	**21**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**								**2,400,000,000**					**1,900,000,000**
2	**21**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**								**2,400,000,000**					**1,900,000,000**
2	**21**	**02**	**1.01**		**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi**								**2,400,000,000**					**1,900,000,000**
2	21	02	1.01	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Indeks kematangan keamanan informasi	Jumlah Dokumen Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Entitas Jaring Komunikasi Sandi	Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi yang Berbasis Elektronik dan Non Elektronik di Provinsi Jambi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Level 3 level	1 Dokumen	7%	300,000,000			Indeks kematangan keamanan informasi	Level 3 level	300,000,000
2	21	02	1.01	02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Indeks kematangan keamanan informasi	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi terkait Kebijakan Keamanan Informasi Urusan Siber Terlaksananya Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi yang Berbasis Elektronik dan Non Elektronik di Provinsi Jambi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Level 3 level	2 Kegiatan 46%	7%	300,000,000			Indeks kematangan keamanan informasi	Level 3 level	300,000,000

2	21	02	1.01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Indeks kematangan keamanan informasi	Jumlah Kabupaten/Kota yang dibina dalam pelaksanaan kemanan informasi Pemerintah Daerah berbasis elektronik/non elektronik	Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi yang Berbasis Elektronik dan Non Elektronik di Provinsi Jambi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Level 3 level	11 Kabupaten/Kota	7%	300,000,000			Indeks kematangan keamanan informasi	Level 3 level	300,000,000
							Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi yang Berbasis Elektronik dan Non Elektronik di Provinsi Jambi				12%							
2	21	02	1.01	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Indeks kematangan keamanan informasi	Jumlah peningkatan kompetensi kapabilitas SDM urusan siber di Provinsi JAmbi	Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi yang Berbasis Elektronik dan Non Elektronik di Provinsi Jambi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Level 3 level	3 orang	7%	1,500,000,000			Indeks kematangan keamanan informasi	Level 3 level	1,000,000,000
							Tersedianya Layanan dan pengembangan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah di Provinsi Jambi				30%							
												TOTAL	**70,549,092,345**					**63,803,255,680**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Jambi
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Sub Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
										Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
2	**17**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**								**63,654,083,625**					**65,238,652,357**
2	**17**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**16,872,138,805**					**17,415,459,625**
2	**17**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**165,000,000**					**189,750,000**
2	17	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	persentase pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah dokumen perencanaan	Terlaksana Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan Koordinasi penyusun kinerja	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	100 persen	2 dokumen	100 persen	55,000,000			persentase pelayanan administrasi perkantoran	100 persen	63,250,000
2	17	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	persentase pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi	Terlaksana Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan Koordinasi penyusun kinerja	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	100 persen	2 kali	100 persen	110,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase pelayanan administrasi perkantoran	100 persen	126,500,000
2	**17**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**9,530,631,494**					**10,960,226,218**
2	17	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	100 persen	14 bulan	100 persen	9,530,631,494	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase pelayanan administrasi perkantoran	100 persen	10,960,226,218
2	**17**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**166,000,000**					**190,900,000**
2	17	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	persentase pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	terlaksananya pengadaan pakaian dinas ASN dan pendidikan pelatihan pegawai ASN	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	100 persen	135 orang	100 persen	91,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase pelayanan administrasi perkantoran	100 persen	104,650,000
2	17	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	persentase pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	terlaksananya pengadaan pakaian dinas ASN dan pendidikan pelatihan pegawai ASN	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	100 persen	12 bulan	100 persen	75,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase pelayanan administrasi perkantoran	100 persen	86,250,000
2	**17**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**848,463,311**					**975,732,807**
2	17	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	persentase pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah jenis komponen intalasi listrik	Terlaksanannya komponen listrik, ATK dan peralatan kebersihan, peserta rapat (setahun), cetakan dan penggandaan, bahan bacaan dan rapat koordinasi dalam luar daerah	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	100 persen	10 jenis	100 persen	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase pelayanan administrasi perkantoran	100 persen	57,500,000
2	17	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah jenis ATK dan peralatan kebersihan	Terlaksanannya komponen listrik, ATK dan peralatan kebersihan, peserta rapat (setahun), cetakan dan penggandaan, bahan bacaan dan rapat koordinasi dalam luar daerah	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	100 persen	65 jenis	100 persen	200,427,311	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase pelayanan administrasi perkantoran	100 persen	230,491,407
2	17	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	persentase pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah peserta rapat setahun	Terlaksanannya komponen listrik, ATK dan peralatan kebersihan, peserta rapat (setahun), cetakan dan penggandaan, bahan bacaan dan rapat koordinasi dalam luar daerah	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	100 persen	400 orang	100 persen	41,536,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase pelayanan administrasi perkantoran	100 persen	47,766,400

2	17	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	persentase pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Terlaksanannya komponen listrik, ATK dan peralatan kebersihan, peserta rapat (setahun), cetakan dan penggandaan, bahan bacaan dan rapat koordinasi dalam luar daerah	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	100 persen	15 jenis	100 persen	105,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase pelayanan administrasi perkantoran	100 persen	120,750,000
2	17	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	persentase pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah bahan bacaan	Terlaksanannya komponen listrik, ATK dan peralatan kebersihan, peserta rapat (setahun), cetakan dan penggandaan, bahan bacaan dan rapat koordinasi dalam luar daerah	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	100 persen	90 orang	100 persen	1,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase pelayanan administrasi perkantoran	100 persen	1,725,000
2	17	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	persentase pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah yang diikuti	Terlaksanannya komponen listrik, ATK dan peralatan kebersihan, peserta rapat (setahun), cetakan dan penggandaan, bahan bacaan dan rapat koordinasi dalam luar daerah	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	100 persen	12 bulan	100 persen	450,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase pelayanan administrasi perkantoran	100 persen	517,500,000
2	**17**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**4,400,000,000**					**3,117,500,000**
2	17	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	persentase pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah pengadaan kendaraan dinas	Terlaksananya perbaikan operasional dinas perorangan dan lapangan, mesin dan sarana dan prasarana gedung kantor	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	100 persen	2 unit	100 persen	850,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase pelayanan administrasi perkantoran	100 persen	500,000,000
2	17	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	persentase pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah pengadaan kendaraan dinas	Terlaksananya perbaikan operasional dinas perorangan dan lapangan, mesin dan sarana dan prasarana gedung kantor	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	100 persen	0	100 persen	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase pelayanan administrasi perkantoran	100 persen	700,000,000
2	17	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	persentase pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah pengadaan mebel	Terlaksananya perbaikan operasional dinas perorangan dan lapangan, mesin dan sarana dan prasarana gedung kantor	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	100 persen	5 item	100 persen	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase pelayanan administrasi perkantoran	100 persen	230,000,000
2	17	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	persentase pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah pengadaan peralatan mesin	Terlaksananya perbaikan operasional dinas perorangan dan lapangan, mesin dan sarana dan prasarana gedung kantor	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	100 persen	8 item	100 persen	250,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase pelayanan administrasi perkantoran	100 persen	287,500,000
2	17	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah gedung kantor	Terlaksananya perbaikan operasional dinas perorangan dan lapangan, mesin dan sarana dan prasarana gedung kantor	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	100 persen	1 paket	100 persen	2,500,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase pelayanan administrasi perkantoran	100 persen	0
2	17	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor	Terlaksananya perbaikan operasional dinas perorangan dan lapangan, mesin dan sarana dan prasarana gedung kantor	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	100 persen	1 paket	100 persen	500,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase pelayanan administrasi perkantoran	100 persen	0

2	17	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan	Terlaksananya perbaikan operasional dinas perorangan dan lapangan, mesin dan sarana dan prasarana gedung kantor	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	100 persen	1 paket	100 persen	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase pelayanan administrasi perkantoran	100 persen	1,400,000,000
2	**17**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**743,200,000**					**854,680,000**
2	17	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	persentase pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah surat keluar pertahun	Terlaksananya surat keluar pertahun, pembayaran rekening, tabung gas, dan tenaga administrasi keuangan	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	100 persen	3750 lembar	100 persen	120,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase pelayanan administrasi perkantoran	100 persen	138,000,000
2	17	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	persentase pelayanan administrasi perkantoran	Periode pembayaran rekening	Terlaksananya surat keluar pertahun, pembayaran rekening, tabung gas, dan tenaga administrasi keuangan	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	100 persen	12 bulan	100 persen	300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase pelayanan administrasi perkantoran	100 persen	345,000,000
2	17	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase pelayanan administrasi perkantoran	Tersedianya tabung gas	Terlaksananya surat keluar pertahun, pembayaran rekening, tabung gas, dan tenaga administrasi keuangan	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	100 persen	12 tabung	100 persen	3,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase pelayanan administrasi perkantoran	100 persen	3,680,000
2	17	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	persentase pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah tenaga administrasi keuangan	Terlaksananya surat keluar pertahun, pembayaran rekening, tabung gas, dan tenaga administrasi keuangan	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	100 persen	30 orang	100 persen	320,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase pelayanan administrasi perkantoran	100 persen	368,000,000
2	**17**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**1,018,844,000**					**1,126,670,600**
2	17	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	persentase pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah kendaraan dinas yang di pelihara	Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	100 persen	32 unit	100 persen	490,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase pelayanan administrasi perkantoran	100 persen	563,500,000
2	17	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	persentase pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah mebel yang di perbaiki	Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	100 persen	1 paket	100 persen	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase pelayanan administrasi perkantoran	100 persen	100,000,000
2	17	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	persentase pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	100 persen	70 unit	100 persen	111,004,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase pelayanan administrasi perkantoran	100 persen	127,654,600
2	17	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	persentase pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah gedung kantor yang di pelihara	Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	100 persen	1 paket	100 persen	117,840,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase pelayanan administrasi perkantoran	100 persen	135,516,000
2	17	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	100 persen	1 paket	100 persen	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase pelayanan administrasi perkantoran	100 persen	100,000,000
2	17	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase pelayanan administrasi perkantoran		Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana kantor		100 persen		100 persen	0			persentase pelayanan administrasi perkantoran	100 persen	100,000,000

2	**17**	**02**			**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**								**383,545,680**						**441,077,532**
2	**17**	**02**	**1.01**		**Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**								**383,545,680**						**441,077,532**
2	17	02	1.01	01	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	persentase penyelesaian perizinan usaha simpan pinjam	Jumlah dokumen data koperasi dan UMKM	Terfasilitasinya koperasi yang mengurus izin usaha simpan pinjam yang wilayah keanggotaanya lintas kab/kota dalam 1 Daerah Provinsi	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	100%	1 dokumen	100 persen	383,545,680	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase penyelesaian perizinan usaha simpan pinjam	100%	441,077,532
							Jumlah koperasi yang mengikuti bimtek tentang akuntansi Koperasi				22 koperasi							
							Jumlah koperasi yang mengikuti bimtek tentang izin usaha simpan pinjam koperasi				22 koperasi							
							Jumlah KSP/USP yang difasilitasi izin usaha simpan pinjam				5 KSP/USP							
							Presentase USP/KSP yang di fasilitasi penerbitan izin usaha				100 persen							
2	**17**	**03**			**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**								**479,316,200**						**575,169,840**
2	**17**	**03**	**1.01**		**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**								**479,316,200**						**575,169,840**
2	17	03	1.01	01	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	persentase koperasi berkinerja baik	Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi	Terlaksana pemeriksaan dan pengawasan Koperasi yang wilayah kab/kota dalam 1 Daerah Provinsi	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	40%	20 koperasi	100 persen	236,168,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase koperasi berkinerja baik	40%	283,392,000
2	17	03	1.01	02	Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	persentase koperasi berkinerja baik	Jumlah koperasi yang dinilai kepatuhannya	Terlaksana pemeriksaan dan pengawasan Koperasi yang wilayah kab/kota dalam 1 Daerah Provinsi	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	40%	20 koperasi	100 persen	243,148,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase koperasi berkinerja baik	40%	291,777,840
2	**17**	**04**			**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**								**277,724,800**						**319,383,500**
2	**17**	**04**	**1.01**		**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**								**277,724,800**						**319,383,500**
2	17	04	1.01	01	Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi	persentase koperasi sehat/cukup sehat	Jumlah koperasi yang dinilai kesehatannya	Terlaksananya penilaian kesehatan Koperasi KSP/USP	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	43%	20 koperasi	100 persen	277,724,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase koperasi sehat/cukup sehat	43%	319,383,500
2	**17**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**								**2,500,000,000**						**2,875,000,000**
2	**17**	**05**	**1.01**		**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**								**2,500,000,000**						**2,875,000,000**
2	17	05	1.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Persentase SDM Aparatur, Pelaku Usaha Koperasi dan UKM yang mendapatkan pelatihan setiap tahun	Jumlah peserta pelatihan keterampilan teknis	Terlaksananya Pendidikan dan latihan perkoperasian	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	5%	150 orang	100 persen	2,500,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase SDM Aparatur, Pelaku Usaha Koperasi dan UKM yang mendapatkan pelatihan setiap tahun	5%	2,875,000,000
							Jumlah peserta pelatihan kewirausahaan				150 orang							
							Jumlah peserta pelatihan kompetensi				84 orang							
							Jumlah peserta pelatihan manajerial				150 orang							
							Jumlah peserta pelatihan perkoperasian				150 orang							
							Jumlah peserta pelatihan teknologi informasi				100 orang							
							Jumlah peserta pembekalan tenaga pendamping				19 orang							
2	**17**	**05**	**1.02**		**Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**								**0**						**0**
2	17	05	1.02	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM								0						0

2	**17**	**06**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**								**1,356,000,000**					**1,559,400,000**
2	**17**	**06**	**1.01**		**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**								**1,356,000,000**					**1,559,400,000**
2	17	06	1.01	01	Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Persentase peningkatan volume usaha koperasi	Jumlah pelaksanaan FGD perlindungan dan penguatan usaha koperasi lintas daerah kabupaten kota	Terlaksananya pemberdayaan dan perlindungan Koperasi	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	0.30%	1 kali	100 persen	540,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase peningkatan volume usaha koperasi	0.30%	621,000,000
							Jumlah pelaksanaan kegiatan fasilitasi pemasaran usaha koperasi lintas daerah kabupaten kota				1 kali							
							Jumlah pelaksanaan kegiatan fasilitasi pembiayaan usaha koperasi lintas daerah kabupaten kota				1 kali							
							Jumlah pelaksanaan kegiatan fasilitasi pendampingan usaha koperasi lintas daerah kabupaten kota				1 kali							
							Jumlah pelaksanaan kegiatan pengembangan kemitraan usaha koperasi				1 kali							
							Jumlah pelaksanaan rakor evaluasi perkembangan LPDB				1 kali							
							Jumlah penerima bantuan untuk permodalan/peralatan untuk meningkatkan produktivitas koperasi				10 koperasi							
2	17	06	1.01	02	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Persentase peningkatan volume usaha koperasi	Jumlah bimtek manajemen perkoperasian bagi PPKL	Terlaksananya pemberdayaan dan perlindungan Koperasi	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	0.30%	1 kali	100 persen	816,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase peningkatan volume usaha koperasi	0.30%	938,400,000
							Jumlah kegiatan peningkatan kualitas kelembagaan koperasi bagi koperasi berkualitas				1 kali							
							Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi kelembagaan				1 kali							
							jumlah penerima bantuan permodalan/peralatan untuk meningkatkan produktivitas koperasi				5 koperasi							
							Jumlah rakor sinkronisasi data KUMKM se provinsi jambi				1 kali							
							Jumlah sosialisasi/penyuluhan tentang perkoperasian bagi masyarakat				5 kali							

2	**17**	**07**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**								**41,210,358,140**					**41,391,911,860**
2	**17**	**07**	**1.01**		**Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan**								**41,210,358,140**					**41,391,911,860**
2	17	07	1.01	01	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	persentase peningkatan UMKM Binaan	Jumlah pelaksanaan kegiatan akses permodalan, peningkatan standar produk, desiminasi perizinan BPOM, dll	Terlaksananya Pemberdayaan UMKM	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	6%	1 kali	100 persen	41,210,358,140	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase peningkatan UMKM Binaan	6%	41,391,911,860
							Jumlah pelaksanaan kegiatan HKI bagi UMK				1 kali							
							Jumlah pelaksanaan pelaksanaan rakor SKIP				1 kali							
							Jumlah pelaksanaan rakor SHAT bagi UMKM				1 kali							
							Jumlah pelaku UMKM yang mendapatkan pelatihan peningkatan mutu produk/pemasaran berbasis teknologi				1 kali							
							Jumlah pelaku UMKM yang mengikuti pelatihan peningkatan kualitas aneka produk UMKM				100 orang							
							Jumlah penerima bantuan untuk permodalan/alat untuk meningkatan produktivitas UMKM				100 orang							
							Jumlah UMK yang mendapatkan bantuan permodalan				3300 UMK							
2	**17**	**08**			**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**								**575,000,000**					**661,250,000**
2	**17**	**08**	**1.01**		**Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah**								**575,000,000**					**661,250,000**
2	17	08	1.01	01	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Persentase pertumbuhan omset UMKM Binaan	Jumlah fasiliti gelar produk bagi UMKM	Terlaksananya Pengembangan UMKM	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	7%	2 kali	100 persen	575,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pertumbuhan omset UMKM Binaan	7%	661,250,000
							Jumlah promosi/pameran yang diikuti				3 kali							
							Jumlah UKM yang di fasilitasi mengikuti pameran				200 umkm							
												TOTAL	**63,654,083,625**					**65,238,652,357**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Jambi
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
2	**18**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**								**16,237,000,000**					**16,830,000,000**
2	**18**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**12,897,000,000**					**13,062,000,000**
2	**18**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**195,000,000**					**205,000,000**
2	18	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Sakip	Jumlah laporan dokumen perencanaan yang disusun	Tersedianya dokumen	Provinsi Jambi	Nilai Sakip	10 Dokumen	Tersedianya dokumen	35,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				40,000,000
2	18	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Sakip	Jumlah Rapat Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja	Terlaksananya Rapat koordinasi	Provinsi Jambi	Nilai Sakip	1 kali	Terlaksananya Rapat koordinasi	160,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				165,000,000
2	**18**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**10,270,000,000**					**10,275,000,000**
2	18	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Sakip	Periode pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan	Provinsi Jambi	Nilai Sakip	14 bulan	Tersedianya gaji dan tunjangan	10,000,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				10,000,000,000
2	18	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai Sakip	Periode pembayaran administrasi pelaksanaan tugas ASN	Tersedianya administrasi tugas ASN	Provinsi Jambi	Nilai Sakip	12 bulan	Tersedianya administrasi tugas ASN	270,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				275,000,000
2	**18**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**140,000,000**					**150,000,000**
2	18	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Nilai Sakip	Jumlah pengadaan pakaian dinas	Tersedianya pakaian dinas	Provinsi Jambi	Nilai Sakip	100 stel	Tersedianya pakaian dinas	70,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				75,000,000
2	18	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Nilai Sakip	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan	Provinsi Jambi	Nilai Sakip	50 orang	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan	70,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				75,000,000
2	**18**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**827,000,000**					**872,000,000**
2	18	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai Sakip	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik	Tersedianya komponen instalasi listrik	Provinsi Jambi	Nilai Sakip	8 item	Tersedianya komponen instalasi listrik	70,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				75,000,000
2	18	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Sakip	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Provinsi Jambi	Nilai Sakip	10 item	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	350,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				360,000,000
2	18	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai Sakip	Periode penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	Provinsi Jambi	Nilai Sakip	12 bulan	Tersedianya bahan logistik kantor	77,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				80,000,000
2	18	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai Sakip	Jumlah persediaan barang cetak dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Provinsi Jambi	Nilai Sakip	5 item	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	30,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				32,000,000
2	18	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Sakip	Periode penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi	Provinsi Jambi	Nilai Sakip	12 bulan	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi	300,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				325,000,000

2	**18**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**425,000,000**					**435,000,000**
2	18	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai Sakip	Periode pembayaran rekening listrik, telpon, PDAM dan Internet	Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik	Provinsi Jambi	Nilai Sakip	12 bulan	Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik	250,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				255,000,000
2	18	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai Sakip	Periode pelayanan umum kebersihan kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Provinsi Jambi	Nilai Sakip	12 bulan	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	175,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				180,000,000
2	**18**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**1,040,000,000**					**1,125,000,000**
2	18	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Sakip	Jumlah pemeliharaan kendaraan	Tersedianya jasa pemeliharaan pajak kendaraan	Provinsi Jambi	Nilai Sakip	24 unit	Tersedianya jasa pemeliharaan pajak kendaraan	350,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				380,000,000
2	18	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai Sakip	Jumlah pemeliharaan peralatan	Terpeliharanya peralatan dan mesin	Provinsi Jambi	Nilai Sakip	60 unit	Terpeliharanya peralatan dan mesin	90,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				95,000,000
2	18	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Sakip	Jumlah paket pemeliharaan gedung kantor	Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor	Provinsi Jambi	Nilai Sakip	3 paket	Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor	600,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				650,000,000
2	**18**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**								**420,000,000**					**440,000,000**
2	**18**	**02**	**1.02**		**Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi**								**420,000,000**					**440,000,000**
2	18	02	1.02	01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Akurasi data potensi investasi dan rencana umum penanaman modal serta pembinaan	Tersusunnya rencana umum penanaman modal beserta pembinaannya	Tersusunnya rencana umum penanaman modal	Provinsi Jambi	Akurasi data potensi investasi dan rencana umum penanaman modal serta pembinaan	5 kab/kota	Tersusunnya rencana umum penanaman modal	220,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				230,000,000
2	18	02	1.02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	Akurasi data potensi investasi dan rencana umum penanaman modal serta pembinaan	Tersedianya peta potensi investasi	Tersedianya peta potensi dan peluang usaha	Provinsi Jambi	Akurasi data potensi investasi dan rencana umum penanaman modal serta pembinaan	1 peta	Tersedianya peta potensi dan peluang usaha	200,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				210,000,000
2	**18**	**03**			**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**								**500,000,000**					**700,000,000**
2	**18**	**03**	**1.01**		**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**								**500,000,000**					**700,000,000**
2	18	03	1.01	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Persentase peningkatan rencana investasi	Jumlah perlengkapan promosi digital	Tersusunnya strategi promosi	Provinsi Jambi	Persentase peningkatan rencana investasi	1 paket	Tersusunnya strategi promosi	100,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				200,000,000
2	18	03	1.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Persentase peningkatan rencana investasi	Jumlah pelaksanaan pameran dan temu bisnis	Terlaksananya kegiatan promosi	Provinsi Jambi	Persentase peningkatan rencana investasi	4 kali	Terlaksananya kegiatan promosi	400,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				500,000,000
2	**18**	**04**			**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**								**1,100,000,000**					**1,140,000,000**
2	**18**	**04**	**1.01**		**Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota**								**380,000,000**					**390,000,000**
2	18	04	1.01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah pelayanan dan pengaduan yang diterima	Tersedianya layanan konsultasi dan pengaduan	Provinsi Jambi	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	100 izin	Tersedianya layanan konsultasi dan pengaduan	380,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				390,000,000

2	**18**	**04**	**1.02**		**Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**								**720,000,000**					**750,000,000**
2	18	04	1.02	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah perizinan yang diterbitkan secara elektronik	Tersedianya layanan terpadu perizinan dan non perizinan	Provinsi Jambi	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	560 izin	Tersedianya layanan terpadu perizinan dan non perizinan	100,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				110,000,000
2	18	04	1.02	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah izin dan non izin yang diterbitkan	Terlaksanya pemantauan pemenuhan komitmen	Provinsi Jambi	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	110 orang	Terlaksanya pemantauan pemenuhan komitmen	620,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				640,000,000
2	**18**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**								**1,220,000,000**					**1,388,000,000**
2	**18**	**05**	**1.01**		**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**								**1,220,000,000**					**1,388,000,000**
2	18	05	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase pelaku usaha yang sesuai ketentuan perundang undangan	Jumlah pelaku usaha yang dibina	Terlaksananya pemantauan penanaman modal	Provinsi Jambi	Persentase pelaku usaha yang sesuai ketentuan perundang undangan	300 pelaku usaha	Terlaksananya pemantauan penanaman modal	180,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil - Dana Alokasi Khusus				190,000,000
2	18	05	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase pelaku usaha yang sesuai ketentuan perundang undangan	jumlah perusahaan PMDN yang diawasi	Terlaksananya pembinaan penanaman modal	Provinsi Jambi	Persentase pelaku usaha yang sesuai ketentuan perundang undangan	60 PMDN	Terlaksananya pembinaan penanaman modal	500,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil - Dana Alokasi Khusus				526,000,000
2	18	05	1.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase pelaku usaha yang sesuai ketentuan perundang undangan	Jumlah buku yang berisi data perkembangan dan realisasi investasi penanaman modal provinsi jambi	Terlaksananya pengawasan penanaman modal	Provinsi Jambi	Persentase pelaku usaha yang sesuai ketentuan perundang undangan	100 buku	Terlaksananya pengawasan penanaman modal	540,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil - Dana Alokasi Khusus				672,000,000
2	**18**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**								**100,000,000**					**100,000,000**
2	**18**	**06**	**1.01**		**Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi**								**100,000,000**					**100,000,000**
2	18	06	1.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Digitalisasi data pengelolaan dan informasi penanaman modal	Tersedianya data perizinan dan non perizinan secara elektronik	Tersedianya atau tersajikannya data	Provinsi Jambi	Digitalisasi data pengelolaan dan informasi penanaman modal	1 dokumen	Tersedianya atau tersajikannya data	100,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				100,000,000
												TOTAL	**16,237,000,000**					**16,830,000,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Jambi
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olah Raga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
2	**19**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**								**81,423,265,000**					**81,482,907,000**
2	**19**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**22,943,950,000**					**24,737,793,000**
2	**19**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**1,122,500,000**					**1,290,875,000**
2	19	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Jumlah dokumen perencanaan Jumlah Peserta Rakor Program kepemudaan dan keolahragaan	Persentase penyusunan dokumen perencanaan yang terlaksana	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	B Indeks	3 dokumen 60 orang	100%	414,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP	B Indeks	476,100,000
2	19	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Nilai SAKIP	Jumlah dokumen RKA-SKPD	Persentase penyusunan dokumen perencanaan yang terlaksana	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	B Indeks	1 dokumen	100%	75,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP	B Indeks	86,250,000
2	19	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai SAKIP	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase penyusunan dokumen perencanaan yang terlaksana	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	B Indeks	1 dokumen	100%	75,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP	B Indeks	86,250,000
2	19	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai SAKIP	Jumlah dokumen DPA-SKPD	Persentase penyusunan dokumen perencanaan yang terlaksana	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	B Indeks	1 dokumen	100%	75,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP	B Indeks	86,250,000
2	19	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Nilai SAKIP	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD	Persentase penyusunan dokumen perencanaan yang terlaksana	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	B Indeks	1 dokumen	100%	75,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP	B Indeks	86,250,000
2	19	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai SAKIP	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase penyusunan dokumen perencanaan yang terlaksana	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	B Indeks	1 laporan	100%	75,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP	B Indeks	86,250,000
2	19	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Jumlah dokumen laporan monitoring dan evaluasi	Persentase penyusunan dokumen perencanaan yang terlaksana	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	B Indeks	1 dokumen	100%	333,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP	B Indeks	383,525,000
2	**19**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**14,228,545,000**					**16,345,577,000**
2	19	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai SAKIP	Periode penyediaan gaji asn	Persentase administrasi keuangan yang tersusun	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	B Indeks	12 bulan	100%	13,897,023,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP	B Indeks	15,981,576,500
2	19	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai SAKIP	Jumlah tenaga administrasi keuangan	Persentase administrasi keuangan yang tersusun	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	B Indeks	45 orang	100%	216,522,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP	B Indeks	249,000,500
2	19	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Nilai SAKIP	jumlah tenaga verifikasi keuangan SKPD	Persentase administrasi keuangan yang tersusun	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	B Indeks	20 orang	100%	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP	B Indeks	50,000,000
2	19	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Nilai SAKIP	Jumlah frekuensi koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Persentase administrasi keuangan yang tersusun	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	B Indeks	4 kali	100%	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP	B Indeks	25,000,000
2	19	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai SAKIP	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	Persentase administrasi keuangan yang tersusun	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	B Indeks	1 laporan	100%	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP	B Indeks	10,000,000
2	19	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Nilai SAKIP	Jumlah bahan tanggapan pemeriksaan	Persentase administrasi keuangan yang tersusun	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	B Indeks	2 bahan	100%	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP	B Indeks	10,000,000
2	19	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Nilai SAKIP	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase administrasi keuangan yang tersusun	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	B Indeks	4 laporan	100%	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP	B Indeks	20,000,000
2	**19**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**40,000,000**					**40,000,000**
2	19	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai SAKIP	Frekuensi Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase administrasi barang milik daerah yang tersusun	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	B Indeks	4 kali	100%	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP	B Indeks	20,000,000

2	19	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai SAKIP	Frekuensi Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase administrasi barang milik daerah yang tersusun	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	B Indeks	4 kali	100%	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP	B Indeks	20,000,000
2	**19**	**01**	**1.04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**								**20,000,000**					**20,000,000**
2	19	01	1.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Nilai SAKIP	Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah	Persentase administrasi pendapatan daerah yang tersusun	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	B Indeks	1 laporan	100%	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP	B Indeks	20,000,000
2	**19**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**178,055,000**					**201,764,000**
2	19	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Nilai SAKIP	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase peningkatan disiplin dan kapasitas sumberdaya aparatur yang terlaksana	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	B Indeks	152 orang	100%	112,125,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP	B Indeks	128,944,000
2	19	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Nilai SAKIP	Frekuensi Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase peningkatan disiplin dan kapasitas sumberdaya aparatur yang terlaksana	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	B Indeks	4 kali	100%	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP	B Indeks	20,000,000
2	19	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai SAKIP	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek implementasi peraturan perundang-undangan	Persentase peningkatan disiplin dan kapasitas sumberdaya aparatur yang terlaksana	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	B Indeks	24 orang	100%	45,930,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP	B Indeks	52,820,000
2	**19**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**741,781,000**					**853,048,000**
2	19	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP	jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Persentase Administrasi umum yang terlaksana	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	B Indeks	2 jenis	100%	47,150,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP	B Indeks	54,222,500
2	19	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP	Jumlah jenis ATK	Persentase Administrasi umum yang terlaksana	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	B Indeks	5 set	100%	162,257,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP	B Indeks	186,596,000
2	19	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP	Jumlah peserta rapat/tamu/dll	Persentase Administrasi umum yang terlaksana	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	B Indeks	300 orang	100%	41,165,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP	B Indeks	47,340,000
2	19	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai SAKIP	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Persentase Administrasi umum yang terlaksana	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	B Indeks	7 jenis	100%	107,817,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP	B Indeks	123,990,000
2	19	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai SAKIP	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Persentase Administrasi umum yang terlaksana	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	B Indeks	1728 eksemplar	100%	6,018,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP	B Indeks	6,921,000
2	19	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	Persentase Administrasi umum yang terlaksana	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	B Indeks	504 OH	100%	377,373,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP	B Indeks	433,978,500
2	**19**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**883,686,000**					**972,739,000**
2	19	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP	Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pengadaan barang milik daerah yang terlaksana	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	B Indeks	3 unit	100%	310,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP	B Indeks	356,500,000
2	19	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Nilai SAKIP	Jumlah jenis pengadaan mebel	Persentase pengadaan barang milik daerah yang terlaksana	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	B Indeks	2 jenis	100%	210,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP	B Indeks	220,500,000
2	19	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP	Jumlah jenis pengadaan peralatan gedung kantor	Persentase pengadaan barang milik daerah yang terlaksana	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	B Indeks	5 jenis	100%	213,686,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP	B Indeks	245,739,000
2	19	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Persentase pengadaan barang milik daerah yang terlaksana	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	B Indeks	5 jenis	100%	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP	B Indeks	150,000,000
2	**19**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**2,134,531,000**					**2,454,710,000**
2	19	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP	Periode pembayaran rekening	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang terlaksana	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	B Indeks	12 bulan	100%	1,033,855,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP	B Indeks	1,188,933,000
2	19	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP	Periode pemakaian jasa kebersihan kantor	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang terlaksana	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	B Indeks	12 bulan	100%	1,100,676,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP	B Indeks	1,265,777,000

2	**19**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**3,594,852,000**						**2,559,080,000**
2	19	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP	jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	Persentase pemeliharaan barang milik daerah yang terlaksana	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	B Indeks	48 unit	100%	609,880,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP	B Indeks	701,362,000
2	19	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP	jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	Persentase pemeliharaan barang milik daerah yang terlaksana	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	B Indeks	83 unit	100%	114,925,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP	B Indeks	132,164,000
2	19	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP	jumlah gedung kantor yang terpelihara	Persentase pemeliharaan barang milik daerah yang terlaksana	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	B Indeks	14 gedung	100%	370,047,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP	B Indeks	425,554,000
2	19	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP	jumlah gedung yang direhab berat	Persentase pemeliharaan barang milik daerah yang terlaksana	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	B Indeks	1 venue	100%	1,500,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP	B Indeks	550,000,000
2	19	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP	jumlah gedung yang direhab sedang	Persentase pemeliharaan barang milik daerah yang terlaksana	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	B Indeks	9 venue	100%	1,000,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP	B Indeks	750,000,000
2	**19**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**								**7,688,606,000**						**8,252,072,000**
2	**19**	**02**	**1.01**		**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi**								**7,295,500,000**						**7,800,000,000**
2	19	02	1.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi	persentase peningkatan peran serta kepemudaan	jumlah pemuda yang difasilitasi dalam pengembangan kepemudaan	Persentase pemberdayaan dan pengembangan pemuda yang terlaksana	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45,62 %	125 orang	100%	1,030,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase peningkatan peran serta kepemudaan	45,62 %	1,500,000,000
2	19	02	1.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi	persentase peningkatan peran serta kepemudaan	jumlah kelompok pemuda terbaik yang difasilitasi melalui KWP dalam rangka pemberdayaan pemuda	Persentase pemberdayaan dan pengembangan pemuda yang terlaksana	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45,62 %	20 kelompok	100%	800,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase peningkatan peran serta kepemudaan	45,62 %	800,000,000
2	19	02	1.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	persentase peningkatan peran serta kepemudaan	jumlah pemuda kader terbaik yang difasilitasi melalui program KPN dalam rangka pengembangan pemuda jumlah pemuda kader terbaik yang difasilitasi melalui program PPAN dalam rangka pengembangan pemuda	Persentase pemberdayaan dan pengembangan pemuda yang terlaksana	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45,62 %	3 orang 3 orang	100%	965,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase peningkatan peran serta kepemudaan	45,62 %	1,000,000,000
2	19	02	1.01	04	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	persentase peningkatan peran serta kepemudaan	jumlah peserta paskibraka yang memenuhi kriteria, berkualitas dan memiliki kompetensi	Persentase pemberdayaan dan pengembangan pemuda yang terlaksana	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45,62 %	56 orang	100%	4,500,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase peningkatan peran serta kepemudaan	45,62 %	4,500,000,000
2	**19**	**02**	**1.02**		**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi**								**393,106,000**						**452,072,000**
2	19	02	1.02	02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi	persentase peningkatan peran serta kepemudaan	jumlah peserta pemberdayaan organisasi kepemudaan	Persentase pemberdayaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi yang terlaksana	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45,62 %	80 orang	100%	393,106,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase peningkatan peran serta kepemudaan	45,62 %	452,072,000
2	**19**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**								**46,993,067,000**						**44,190,754,000**
2	**19**	**03**	**1.01**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**								**10,044,585,000**						**2,600,000,000**
2	19	03	1.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi	peringkat POPNAS dan PEPARNAS	jumlah cabor yang diberikan bantuan peralatan dan perlengkapan olahraga jumlah sarana dan prasarana baru yang dibangun jumlah venue yang direhab	Persentase pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi yang terlaksana	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8 Peringkat	5 cabor 4 unit 3 venue	100%	10,044,585,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		peringkat POPNAS dan PEPARNAS	8 Peringkat	2,600,000,000
2	**19**	**03**	**1.02**		**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga**								**31,707,028,000**						**35,783,082,000**
2	19	03	1.02	01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi	peringkat POPNAS dan PEPARNAS	jumlah penyelenggaraan kejuaraan multievent dan single event tingkat provinsi	Persentase penyelenggaraan kejuaraan olahraga yang terlaksana	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8 Peringkat	5 event	100%	6,000,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		peringkat POPNAS dan PEPARNAS	8 Peringkat	6,300,000,000

2	19	03	1.02	02	Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi	peringkat POPNAS dan PEPARNAS	persentase atlet paralimpik pelajar provinsi yang lolos ke tingkat nasional persentase atlet paralimpik provinsi yang lolos ke tingkat nasional	Persentase penyelenggaraan kejuaraan olahraga yang terlaksana	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8 Peringkat	80% 80%	100%	1,200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		peringkat POPNAS dan PEPARNAS	8 Peringkat	1,300,000,000
2	19	03	1.02	03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event	peringkat POPNAS dan PEPARNAS	jumlah keikutsertaan dalam penyelenggaraan kejuaraan multi event dan single event peringkat pada event nasional PEPARNAS peringkat pada event nasional PEPARPENAS peringkat pada event nasional PON peringkat pada event nasional POPNAS peringkat pada event POPWIL peringkat pada event PORWIL	Persentase penyelenggaraan kejuaraan olahraga yang terlaksana	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8 Peringkat	10 event 19 peringkat 11 peringkat 12 peringkat 8 peringkat 5 peringkat 7 peringkat	100%	24,507,028,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		peringkat POPNAS dan PEPARNAS	8 Peringkat	28,183,082,000
2	**19**	**03**	**1.03**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional**								**5,041,454,000**					**5,597,672,000**
2	19	03	1.03	02	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	peringkat POPNAS dan PEPARNAS	jumlah atlet pelajar berprestasi PPLP dalam rangkat pembinaan olahraga	Persentase pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi yang terlaksana	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8 Peringkat	50 orang	100%	3,041,454,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		peringkat POPNAS dan PEPARNAS	8 Peringkat	3,497,672,000
2	19	03	1.03	04	Pemberian Penghargaan Olahraga Provinsi	peringkat POPNAS dan PEPARNAS	jumlah atlet/pelatih/asisten pelatih keolahragaan berprestasi yang diberi penghargaan jumlah organisasi keolahragaan berprestasi yang diberi penghargaan	Persentase pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi yang terlaksana	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8 Peringkat	150 orang 30 organisasi	100%	2,000,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		peringkat POPNAS dan PEPARNAS	8 Peringkat	2,100,000,000
2	**19**	**03**	**1.04**		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**								**200,000,000**					**210,000,000**
2	19	03	1.04	02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	peringkat POPNAS dan PEPARNAS	jumlah organisasi keolahragaan yang dikembangkan	Persentase Pembinaan organisasi olahraga yang terlaksana	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8 Peringkat	30 organisasi	100%	200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		peringkat POPNAS dan PEPARNAS	8 Peringkat	210,000,000
2	**19**	**04**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**								**3,797,642,000**					**4,302,288,000**
2	**19**	**04**	**1.01**		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**								**3,797,642,000**					**4,302,288,000**
2	19	04	1.01	03	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Provinsi	persentase kegiatan kepramukaan yang terfasilitasi	jumlah peserta pengembangan kapasitas SDM Kepramukaan Provinsi	Persentase Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan kegiatan kepramukaan yang terlaksana	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	30 orang	100%	250,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase kegiatan kepramukaan yang terfasilitasi	100%	262,500,000
2	19	04	1.01	05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi	persentase kegiatan kepramukaan yang terfasilitasi	jumlah peserta pembinaan kepramukaan	Persentase Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan kegiatan kepramukaan yang terlaksana	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	60 orang	100%	3,147,642,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase kegiatan kepramukaan yang terfasilitasi	100%	3,619,788,000
2	19	04	1.01	06	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Provinsi	persentase kegiatan kepramukaan yang terfasilitasi	jumlah penyediaan sarana dan prasarana kepramukaan provinsi	Persentase Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan kegiatan kepramukaan yang terlaksana	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	3 jenis	100%	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase kegiatan kepramukaan yang terfasilitasi	100%	157,500,000
2	19	04	1.01	08	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	persentase kegiatan kepramukaan yang terfasilitasi	jumlah peserta yang berpartisipasi dalam kegiatan kepramukaan	Persentase Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan kegiatan kepramukaan yang terlaksana	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	30 orang	100%	250,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase kegiatan kepramukaan yang terfasilitasi	100%	262,500,000
												TOTAL	**81,423,265,000**					**81,482,907,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Jambi
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Sub Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
2	**22**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**								**15,011,520,382**					**21,333,000,000**
2	**22**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**5,704,000,000**					**5,736,000,000**
2	**22**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**800,000,000**					**800,000,000**
2	22	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah laporan		Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima		19 Laporan		250,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				250,000,000
2	22	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah laporan		Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima		19 Laporan		350,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				350,000,000
2	22	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah peserta		Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima		120 orang		200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				200,000,000
2	**22**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**35,000,000**					**40,000,000**
2	22	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah peserta		Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima		12 bulan		35,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				40,000,000
2	**22**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**1,072,000,000**					**1,087,000,000**
2	22	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Komponen Instalasi Listrik		Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima		18 buah		105,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				107,000,000
2	22	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah ATK		Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima		12 bulan		170,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				172,000,000
2	22	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Gedung		Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima		18 buah		350,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				353,000,000
2	22	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Kegiatan		Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima		12 bulan		62,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				65,000,000
2	22	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Barang Cetak		Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima		12 bulan		170,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				173,000,000
2	22	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Rapat dan Konsultasi		Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima		12 bulan		215,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				217,000,000
2	**22**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**100,000,000**					**110,000,000**
2	22	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		50 buah		100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				110,000,000
2	**22**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**1,185,000,000**					**1,185,000,000**
2	22	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Surat		Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima		200 buah		5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5,000,000
2	22	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Rekening		Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima		23 Rekening		910,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				910,000,000
2	22	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Jasa Keuangan		Kota Jambi, Paal Merah, Paal Merah		12 bulan		270,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				270,000,000
2	**22**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**2,512,000,000**					**2,514,000,000**
2	22	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Dinas		Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima		52 buah		385,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				386,000,000
2	22	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung		Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima		4 buah		2,000,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2,000,000,000
2	22	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Peralatan Gedung Kantor		Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima		130 buah		127,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				128,000,000

2	**22**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**								**2,379,000,000**					**2,742,000,000**
2	**22**	**02**	**1.01**		**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**								**1,734,000,000**					**1,989,000,000**
2	22	02	1.01	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Persentase Peningkatan Pengelolaan, Pelestarian, dan Pemanfaatan Kebudayaan	Jumlah Bujang dan Gadis Provinsi Jambi	persentase peningkatan kebudayaan yang dikelola kab/kota	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	17.18%	30 Orang	16.89%	1,255,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Peningkatan Pengelolaan, Pelestarian, dan Pemanfaatan Kebudayaan	17.18%	1,465,000,000
							Jumlah Partisipasi pada Festival seni Budaya di Dalam dan Luar Daerah				4 Kegiatan							
							Jumlah pelaku/Organisasi seni yang difasilitasi melalui pertunjukan/festival/event seni budaya di dalam dan luar negeri				8 kali							
							Jumlah perwakilan Peserta Gita Bahana Nusantara				4 orang							
							Jumlah Tampilan Misi Kesenian di Dalam dan Luar Negeri				40 kali							
							Persentase penduduk usia 10 tahun keatas yang menonton secara langsung pertunjukan seni				40%							
							Terpilihnya peserta perwakilan provinsi Jambi dalam ajang kebudayaan tingkat nasional dan internasional				5 orang							
2	22	02	1.01	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Persentase Peningkatan Pengelolaan, Pelestarian, dan Pemanfaatan Kebudayaan	Jumlah Dokumen/ peraturan/ produk hukum bidang kebudayaan yang disusun/ direview/ direvisi	persentase peningkatan kebudayaan yang dikelola kab/kota	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17.18%	1 dokumen	16.89%	479,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Peningkatan Pengelolaan, Pelestarian, dan Pemanfaatan Kebudayaan	17.18%	524,000,000
							Jumlah fasilitasi legalitas organisasi seni budaya				22 kelompok							
							Jumlah organisasi seni budaya pada pelatihan/workshop pengelolaan organisasi seni budaya				15 kelompok							
							Jumlah organisasi seni yang menerima bantuan pemerintah bidang kebudayaan				5 kelompok							
							Jumlah peserta pada Rembug Budaya Jambi				50 orang							
							Jumlah publikasi seni budaya daerah Jambi melalui media cetak/media elektronik dan media lainnya				3 kali							

2	**22**	**02**	**1.02**		**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi**								**645,000,000**						**753,000,000**
2	22	02	1.02	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Persentase Peningkatan Pengelolaan, Pelestarian, dan Pemanfaatan Kebudayaan	jumlah fasilitasi pendaftaran karya seni ke HKI jumlah fasillitasi pendaftaran karya seni budaya Jambi menjadi WBTB Nasional Jumlah karya seni budaya Tradisi Jambi yang didokumentasikan Jumlah objek pemajuan tradisi budaya dalam pelaksanaan festival/lomba/pertunjukan seni budaya tradisi Jumlah pelaku/organisasi seni budaya yang difasilitasi melalui pertunjukan/festival/event budaya tradisi didalam negeri	persentase peningkatan kesenian tradisional yang dilestarikan di kab/kota	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	17.18%	22 karya 5 karya 1 karya 3 objek 6 kali	16.67%	545,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Peningkatan Pengelolaan, Pelestarian, dan Pemanfaatan Kebudayaan	17.18%	613,000,000
2	22	02	1.02	03	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Persentase Peningkatan Pengelolaan, Pelestarian, dan Pemanfaatan Kebudayaan	Jumlah penghargaan yang diberikan kepada seniman, budayawan, dan organisasi seni budaya Jumlah seniman berprestasi tingkat nasional dan internasional yang karyanya didokumentasikan	persentase peningkatan kesenian tradisional yang dilestarikan di kab/kota	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17.18%	3 kali 1 orang	16.67%	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Peningkatan Pengelolaan, Pelestarian, dan Pemanfaatan Kebudayaan	17.18%	140,000,000
2	**22**	**02**	**1.03**		**Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**								**0**						**0**
2	22	02	1.03	03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Persentase Peningkatan Pengelolaan, Pelestarian, dan Pemanfaatan Kebudayaan	Jumlah fasilitasi kegiatan/ sarana prasarana terhadap Lembaga Adat Melayu Provinsi Jambi	persentase peningkatan pembinaan kelembagaan di kab/kota	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17.18%	12 bulan	20%	0			Persentase Peningkatan Pengelolaan, Pelestarian, dan Pemanfaatan Kebudayaan	17.18%	0
2	**22**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**								**1,800,000,000**						**1,915,000,000**
2	**22**	**03**	**1.01**		**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota**								**1,800,000,000**						**1,915,000,000**
2	22	03	1.01	01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Persentase Peningkatan Pengelolaan, Pelestarian dan Pemanfaatan Kesenian Tradisional	Jumlah peserta	jumlah sanggar	Kota Jambi, Telanaipura, Simpang IV Sipin	10%	150 orang	500 sanggar	750,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Peningkatan Pengelolaan, Pelestarian dan Pemanfaatan Kesenian Tradisional	10%	800,000,000
2	22	03	1.01	03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Persentase Peningkatan Pengelolaan, Pelestarian dan Pemanfaatan Kesenian Tradisional	Pameran Seni Rupa Paloamjambe Temu Budaya se-Sumatera/PPSS Temu Karya Taman Budaya se-Indonesia Temu Teater se-Sumatera	jumlah sanggar	Kota Jambi, Telanaipura, Simpang IV Sipin	10%	2 kali 24 kali 22 kali 3 kali	500 sanggar	1,050,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Peningkatan Pengelolaan, Pelestarian dan Pemanfaatan Kesenian Tradisional	10%	1,115,000,000
2	**22**	**04**			**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**								**600,000,000**						**1,500,000,000**
2	**22**	**04**	**1.01**		**Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi**								**600,000,000**						**1,500,000,000**
2	22	04	1.01	01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi	Persentase peningkatan pelestarian sejarah lokal provinsi	Jumlah buku tentang sejarah lokal Jumlah peserta workshop pengembangan SDM dan Permuseuman Jumlah Peserta workshop penulisan sejarah lokal	Presentase tercapainya pemahaman masyarakat terhadap SDM dan sejarah lokal	Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20%	1 paket 40 orang 40 orang	25%	600,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase peningkatan pelestarian sejarah lokal provinsi	20%	1,500,000,000

2	**22**	**05**			**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**								**1,000,000,000**					**4,340,000,000**
2	**22**	**05**	**1.01**		**Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi**								**700,000,000**					**3,340,000,000**
2	22	05	1.01	01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Persentase peningkatan pelestarian pengelolaan dan pengembangan cagar budaya	Register cagar budaya (pendaftaran, pengisian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	Presentase tercapainya ODCB menjadi CB tingkat provinsi	Kab. Bungo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Merangin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18%	100 buah	25%	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase peningkatan pelestarian pengelolaan dan pengembangan cagar budaya	18%	1,840,000,000
2	22	05	1.01	02	Penetapan Cagar Budaya	Persentase peningkatan pelestarian pengelolaan dan pengembangan cagar budaya	penetapan cagar budaya tingkat Provinsi	Presentase tercapainya ODCB menjadi CB tingkat provinsi	Kab. Bungo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18%	15 buah	25%	500,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase peningkatan pelestarian pengelolaan dan pengembangan cagar budaya	18%	1,500,000,000
2	**22**	**05**	**1.02**		**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi**								**300,000,000**					**1,000,000,000**
2	22	05	1.02	04	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya	Persentase peningkatan pelestarian pengelolaan dan pengembangan cagar budaya	Meningkatnya jumlah SDM tenaga Pelestari Cagar Budaya di Kab/Kota	Tercapainya Pemahaman masyarakat terhadap CB	Kab. Batanghari, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Muaro Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18%	80 orang	30 orang	300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase peningkatan pelestarian pengelolaan dan pengembangan cagar budaya	18%	1,000,000,000
2	**22**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**								**3,528,520,382**					**5,100,000,000**
2	**22**	**06**	**1.01**		**Pengelolaan Museum Provinsi**								**3,528,520,382**					**5,100,000,000**
2	22	06	1.01	01	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	Persentase peningkatan kunjungan ke museum	Jumlah Museum yang dikelola Perawatan 10 jenis koleksi museum Siginjei Perawatan koleksi realia, diorama dan tata pameran tetap MPRJ Re-registrasi dan Re-reinventarisasi koleksi MPRJ Re-registrasi dan Re-reinventarisasi koleksi Museum Siginjei Seminar Hasil Kajian Koleksi MPRJ Seminar Hasil Kajian Koleksi Museum Siginjei Survey Data Sejarah MPRJ Survey Penguatan Data Benda Cagar Budaya Museum Siginjei	Jumlah pengunjung museum	Kab. Batanghari, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Merangin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	16%	3 buah 1500 koleksi 487 koleksi 1 paket 2 paket 3 kali 4 kali 3 kabupaten 4 kabupaten	37500 orang	1,040,043,154	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik - BOP Museum dan Taman Budaya - Museum		Persentase peningkatan kunjungan ke museum	16%	1,200,000,000
2	22	06	1.01	02	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Persentase peningkatan kunjungan ke museum	Jumlah ASN	Jumlah pengunjung museum	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	16%	12 bulan	37500 orang	327,781,920	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase peningkatan kunjungan ke museum	16%	500,000,000

2	22	06	1.01	03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Persentase peningkatan kunjungan ke museum	Belajar Bersama di MPRJ	Jumlah pengunjung museum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16%	4 kali	37500 orang	1,832,077,226	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase peningkatan kunjungan ke museum	16%	2,100,000,000
							Belajar Bersama di Museum Siginjei		Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura		4 kali			DAK Non Fisik - BOP Museum dan Taman Budaya - Museum				
							Dialog Budaya Museum Siginjei				4 kali							
							Dialog Sejarah Kebudayaan Islam Gentala Arasy				2 kali							
							Lomba Kreatifitas Siswa Kegiatan MPRJ				14 kali							
							Lomba-lomba Gentala Arasy				6 kali							
							Lomba-lomba Museum Siginjei				13 kali							
							Mendongeng				5 kali							
							Museum Keliling MPRJ				1 kabupaten							
							Pameran Bersama Museum Negeri se-Indonesia				2 kali							
							Pameran Bersama Museum Negeri se-Sumatera				1 kali							
							Pameran Khusus/Temporer MPRJ				3 kali							
							Pameran Khusus/Temporer Museum Siginjei				2 kali							
							Pameran Museum Keliling Museum Siginjei				2 kabupaten							
							Pekan Gentala Arasy				1 kali							
							Sosialisasi Museum Perjuangan Rakyat Jambi				1 kali							
2	22	06	1.01	04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Persentase peningkatan kunjungan ke museum	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Koleksi Museum Siginjei, MPRJ dan Gentala Arasy	Jumlah pengunjung museum	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	16%	3 museum	37500 orang	328,618,082	DAK Non Fisik - BOP Museum dan Taman Budaya - Museum		Persentase peningkatan kunjungan ke museum	16%	1,300,000,000
							Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum Siginjei, MPRJ dan Gentala Arasy				3 museum							
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**													
3	**26**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**								**18,507,000,000**					**21,035,000,000**
3	**26**	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**								**13,900,000,000**					**15,210,000,000**
3	**26**	**02**	**1.01**		**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi**								**600,000,000**					**610,000,000**
3	26	02	1.01	01	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Persentase peningkatan kualitas destinasi dan industri pariwisata	jumlah DTW baru yang teridentifikasi	Jumlah DTW unggulan provinsi yang ditetapkan	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15%	2 DTW	2 DTW	250,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase peningkatan kualitas destinasi dan industri pariwisata	15%	260,000,000
							jumlah DTW unggulan provinsi yang di tetapkan		Kab. Merangin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 DTW							
3	26	02	1.01	02	Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Persentase peningkatan kualitas destinasi dan industri pariwisata	jumlah dokumen perencanaan pengembangan DTW unggulan provinsi	Jumlah DTW unggulan provinsi yang ditetapkan	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15%	1 dokumen	2 DTW	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase peningkatan kualitas destinasi dan industri pariwisata	15%	150,000,000
3	26	02	1.01	03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Persentase peningkatan kualitas destinasi dan industri pariwisata	jumlah peserta pelatihan SDM objek wisata provinsi	Jumlah DTW unggulan provinsi yang ditetapkan	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15%	30 peserta	2 DTW	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase peningkatan kualitas destinasi dan industri pariwisata	15%	200,000,000
3	**26**	**02**	**1.02**		**Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi**								**5,950,000,000**					**7,000,000,000**
3	26	02	1.02	01	Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Persentase peningkatan kualitas destinasi dan industri pariwisata	jumlah desa wisata yang ditetapkan	Jumlah Peningkatan sarana dan prasarana di kasawan pariwisata	Kab. Tanjung Jabung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15%	2 desa	11 kab/kota	300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase peningkatan kualitas destinasi dan industri pariwisata	15%	300,000,000
									Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan									

3	26	02	1.02	04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Persentase peningkatan kualitas destinasi dan industri pariwisata	jumlah sarana dan prasarana	Jumlah Peningkatan sarana dan prasarana di kasawan pariwisata	Kab. Kerinci, Kayu Aro, Pelompek Kab. Merangin, Renah Pembarap, Guguk Kab. Muaro Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Tungkal I Kab. Tebo, Sumay, Muara Sekalo	15%	5 paket	11 kab/kota	5,300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase peningkatan kualitas destinasi dan industri pariwisata	15%	6,350,000,000
3	26	02	1.02	05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Persentase peningkatan kualitas destinasi dan industri pariwisata	jumlah laporan Jumlah pergerakan wisatawan nusantara	Jumlah Peningkatan sarana dan prasarana di kasawan pariwisata	Kab. Tanjung Jabung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15%	2 laporan 950000 orang	11 kab/kota	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase peningkatan kualitas destinasi dan industri pariwisata	15%	150,000,000
3	26	02	1.02	06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Persentase peningkatan kualitas destinasi dan industri pariwisata	jumlah peserta pelatihan pemberdayaan masyarakat di kawasan strategis pariwisata	Jumlah Peningkatan sarana dan prasarana di kasawan pariwisata	Kab. Tanjung Jabung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15%	30 peserta	11 kab/kota	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase peningkatan kualitas destinasi dan industri pariwisata	15%	200,000,000
3	**26**	**02**	**1.03**		**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi**								**6,550,000,000**					**6,750,000,000**
3	26	02	1.03	04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Persentase peningkatan kualitas destinasi dan industri pariwisata	jumlah sarana dan prasarana	Jumlah peningkatan SDM dalam pengelolaan destinasi pariwisata	Kab. Batanghari, Muara Bulian, Muara Bulian Kab. Bungo, Pasar Muaro Bungo, Bungo Barat Kab. Sarolangun, Batang Asai, Lubuk Bangkar Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Talang Babat Kab. Tanjung Jabung Timur, Kuala Jambi, Semua Kelurahan Kota Jambi, Jambi Selatan, Pasir Putih Kota Sungai Penuh, Pondok Tinggi, Sungai Jernih	15%	6 kabupaten	60 orang	6,000,000,000			Persentase peningkatan kualitas destinasi dan industri pariwisata	15%	6,200,000,000
3	26	02	1.03	05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Persentase peningkatan kualitas destinasi dan industri pariwisata	jumlah laporan pengelolaan destinasi pariwisata	Jumlah peningkatan SDM dalam pengelolaan destinasi pariwisata	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Merangin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15%	2 laporan	60 orang	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase peningkatan kualitas destinasi dan industri pariwisata	15%	150,000,000
3	26	02	1.03	06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Persentase peningkatan kualitas destinasi dan industri pariwisata	jumlah peserta workshop tata kelola destinasi pariwisata	Jumlah peningkatan SDM dalam pengelolaan destinasi pariwisata	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Merangin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15%	60 peserta	60 orang	400,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase peningkatan kualitas destinasi dan industri pariwisata	15%	400,000,000
3	**26**	**02**	**1.04**		**Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**								**800,000,000**					**850,000,000**
3	26	02	1.04	01	Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase peningkatan kualitas destinasi dan industri pariwisata	jumlah industri pariwisata yang terdaftar dalam TDUP	Jumlah peningkatan industri pariwisata yang terdaftar dalam TDUP	Kab. Tanjung Jabung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15%	90 usaha	90 usaha pariwisata	250,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase peningkatan kualitas destinasi dan industri pariwisata	15%	300,000,000
3	26	02	1.04	03	Pengelolaan Investasi Pariwisata	Persentase peningkatan kualitas destinasi dan industri pariwisata	jumlah dokumen profil peluang investasi industri pariwisata	Jumlah peningkatan industri pariwisata yang terdaftar dalam TDUP	Kab. Tanjung Jabung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15%	1 dokumen	90 usaha pariwisata	250,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase peningkatan kualitas destinasi dan industri pariwisata	15%	250,000,000
3	26	02	1.04	04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Persentase peningkatan kualitas destinasi dan industri pariwisata	jumlah peserta pembinaan dalam pengawasan usaha pariwisata di kab/kota	Jumlah peningkatan industri pariwisata yang terdaftar dalam TDUP	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15%	25 orang	90 usaha pariwisata	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase peningkatan kualitas destinasi dan industri pariwisata	15%	150,000,000
3	26	02	1.04	05	Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	Persentase peningkatan kualitas destinasi dan industri pariwisata	jumlah peserta sosilisasi peningkatan ekonomi dalam pengembangan industri pariwisata yang berstandarisasi	Jumlah peningkatan industri pariwisata yang terdaftar dalam TDUP	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15%	30 orang	90 usaha pariwisata	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase peningkatan kualitas destinasi dan industri pariwisata	15%	150,000,000

3	**26**	**03**			**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**									**2,470,000,000**						**2,990,000,000**
3	**26**	**03**	**1.01**		**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi**									**2,470,000,000**						**2,990,000,000**
3	26	03	1.01	01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Persentase peningkatan pemasaran pariwisata	jumlah pelaksanaan event, partisipasi, suppporting pada event dalam daerah jumlah promosi,sosialisasi dan Publikasi Pariwisata pada media Informasi	Presentase tercapainya pelaksanaan event dan promosi pariwisata provinsi	Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kelurahan Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	17%	6 event 6 media	17%	1,700,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase peningkatan pemasaran pariwisata	17%	2,050,000,000
3	26	03	1.01	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Persentase peningkatan pemasaran pariwisata	jumlah keikutsertaan pada event promosi pariwisata di dalam dan luar negeri	Presentase tercapainya pelaksanaan event dan promosi pariwisata provinsi	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	17%	2 keg	17%	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase peningkatan pemasaran pariwisata	17%	225,000,000
3	26	03	1.01	03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	Persentase peningkatan pemasaran pariwisata	jumlah dokumen analisa pasar jumlah dokumen statistik Kepariwisataan jumlah peserta pelatihan sistem informasi pariwisata	Presentase tercapainya pelaksanaan event dan promosi pariwisata provinsi	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	17%	1 dokumen 2 dokumen 25 orang	17%	380,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase peningkatan pemasaran pariwisata	17%	435,000,000
3	26	03	1.01	04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Persentase peningkatan pemasaran pariwisata	jumlah peserta pelatihan Parmuwisata jumlah stakeholder kepariwisataan	Presentase tercapainya pelaksanaan event dan promosi pariwisata provinsi	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	17%	25 orang 45 stakeholder	17%	240,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase peningkatan pemasaran pariwisata	17%	280,000,000
3	**26**	**04**			**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**									**1,187,000,000**						**1,685,000,000**
3	**26**	**04**	**1.01**		**Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif**									**357,000,000**						**395,000,000**
3	26	04	1.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan	persentase peningkatan kualitas dan nilai tambah	jumlah data ruang kreatif jumlah komunitas ekraf	Jumlah dokumen pendukungan kota kreatif	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	16%	1 dokumen 1 dokumen	5 dokumen	185,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase peningkatan kualitas	16%	205,000,000
3	26	04	1.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	persentase peningkatan kualitas dan nilai tambah sektor ekonomi kreatif	jumlah data komunitas kreatif pemula jumlah data pelaku kreatif pemula jumlah data unit usaha kreatif pemula	Jumlah dokumen pendukungan kota kreatif	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	16%	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	5 dokumen	172,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase peningkatan kualitas dan nilai tambah sektor ekonomi kreatif	16%	190,000,000
3	**26**	**04**	**1.02**		**Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif**									**830,000,000**						**1,290,000,000**
3	26	04	1.02	03	Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan	persentase peningkatan kualitas dan nilai tambah sektor ekonomi kreatif	jumlah fasilitasi dan suporting pemasaran ekonomi kreatif Nilai tambah ekonomi kreatif	Jumlah dokumen analisa ekraf	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	16%	2 kegiatan 350 juta	1 dokumen	490,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase peningkatan kualitas dan nilai tambah sektor ekonomi kreatif	16%	870,000,000
3	26	04	1.02	07	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	persentase peningkatan kualitas dan nilai tambah sektor ekonomi kreatif	Jumlah fasilitasi HKI di bidang ekraf Jumlah pelaku ekraf yang mengikuti sosialisasi HKI	Jumlah dokumen analisa ekraf	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	16%	10 produk 80 orang	1 dokumen	340,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase peningkatan kualitas dan nilai tambah sektor ekonomi kreatif	16%	420,000,000
3	**26**	**05**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**									**950,000,000**						**1,150,000,000**
3	**26**	**05**	**1.01**		**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan**									**300,000,000**						**450,000,000**
3	26	05	1.01	08	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Persentase peningkatan kualitas SDM ekraf		Jumlah fasilitasi standarisasi kompetensi profesi		16%		10 0rang	0			Persentase peningkatan kualitas SDM ekraf	16%	0
3	26	05	1.01	09	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Persentase peningkatan kualitas SDM ekraf	Jumlah fasilitasi sertifikasi pelaku ekraf Jumlah produk kreatif dan inovatif	Jumlah fasilitasi standarisasi kompetensi profesi	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	16%	25 orang 10 produk	10 0rang	300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase peningkatan kualitas SDM ekraf	16%	450,000,000
3	**26**	**05**	**1.02**		**Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif**									**650,000,000**						**700,000,000**
3	26	05	1.02	01	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif		Jumlah peserta bimtek ekraf Jumlah peserta pendampingan ekraf		Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima		40 orang 40 orang		650,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				700,000,000
												TOTAL	**33,518,520,382**						**42,368,000,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Jambi
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
2	**23**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**								**17,415,953,240**					**17,727,743,740**
2	**23**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**16,053,000,000**					**16,217,000,000**
2	**23**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**65,000,000**					**68,000,000**
2	23	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Jumlah laporan monev	Persentase peningkatan laporan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	B Indeks	1 buah	100%	65,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	B Indeks	68,000,000
2	**23**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**13,415,000,000**					**13,549,000,000**
2	23	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai SAKIP	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Persentase terlaksananya administrasi perkantoran	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	B Indeks	14 bulan	100%	13,130,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	B Indeks	13,261,000,000
2	23	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai SAKIP	Jumlah tenaga administrasi keuangan	Persentase terlaksananya administrasi perkantoran	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	B Indeks	33 orang	100%	285,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	B Indeks	288,000,000
2	**23**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**521,000,000**					**538,000,000**
2	23	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Persentase terlaksananya administrasi perkantoran	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	B Indeks	493 buah	100%	24,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	B Indeks	24,000,000
2	23	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP	Jumlah jenis ATK	Persentase terlaksananya administrasi perkantoran	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	B Indeks	36 jenis	100%	82,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	B Indeks	83,000,000
2	23	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP	Jumlah peserta rapat/ tamu, dan lain-lain	Persentase terlaksananya administrasi perkantoran	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	B Indeks	1000 orang	100%	45,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	B Indeks	46,000,000
2	23	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai SAKIP	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Persentase terlaksananya administrasi perkantoran	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	B Indeks	21 jenis	100%	76,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	B Indeks	77,000,000
2	23	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai SAKIP	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Persentase terlaksananya administrasi perkantoran	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	B Indeks	14 eksemplar	100%	13,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	B Indeks	13,000,000
2	23	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	Persentase terlaksananya administrasi perkantoran	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	B Indeks	638 orang/hari	100%	281,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	B Indeks	295,000,000
2	**23**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**1,000,000,000**					**1,000,000,000**
2	23	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP	Jumlah jenis pengadaan peralatan gedung kantor	Persentase peningkatan jumlah sarana dan prasarana aparatur	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	B Indeks	20 jenis	100%	1,000,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	B Indeks	1,000,000,000
2	**23**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**362,000,000**					**365,000,000**
2	23	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP	Periode pembayaran rekening	Persentase terlaksananya administrasi perkantoran	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	B Indeks	12 bulan	100%	253,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	B Indeks	255,000,000
2	23	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP	Periode pemakaian jasa kebersihan kantor	Persentase terlaksananya administrasi perkantoran	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	B Indeks	12 bulan	100%	109,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	B Indeks	110,000,000
2	**23**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**690,000,000**					**697,000,000**
2	23	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang terpelihara	Persentase peningkatan jumlah sarana dan prasarana aparatur	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	B Indeks	1 unit	100%	40,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	B Indeks	41,000,000
2	23	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	Persentase peningkatan jumlah sarana dan prasarana aparatur	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	B Indeks	52 unit	100%	310,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	B Indeks	313,000,000
2	23	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	Persentase peningkatan jumlah sarana dan prasarana aparatur	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	B Indeks	354 unit	100%	85,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	B Indeks	86,000,000
2	23	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	Persentase peningkatan jumlah sarana dan prasarana aparatur	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	B Indeks	1 gedung	100%	255,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	B Indeks	257,000,000
2	**23**	**02**			**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**								**1,362,953,240**					**1,510,743,740**
2	**23**	**02**	**1.01**		**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi**								**839,811,000**					**902,041,500**
2	23	02	1.01	01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Nilai SKM Perpustakaan	Jumlah buku yang telah diperbaiki	Persentase peningkatan kepuasan masyarakat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84,8 %	500 eksemplar	100%	37,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SKM Perpustakaan	84,8 %	39,000,000

2	23	02	1.01	04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Nilai SKM Perpustakaan	Jumlah perpustakaan SMA sederajat yang telah dibina	Persentase peningkatan kepuasan masyarakat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84,8 %	22 perpustakaan	100%	52,646,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SKM Perpustakaan	84,8 %	57,910,000
2	23	02	1.01	06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Nilai SKM Perpustakaan	Jumlah tenaga perpustakaan yang dibina	Persentase peningkatan kepuasan masyarakat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84,8 %	50 orang	100%	192,665,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SKM Perpustakaan	84,8 %	211,931,500
2	23	02	1.01	07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Nilai SKM Perpustakaan	Jumlah pengunjung perpustakaan	Persentase peningkatan kepuasan masyarakat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84,8 %	180000 orang	100%	267,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SKM Perpustakaan	84,8 %	281,000,000
2	23	02	1.01	09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Nilai SKM Perpustakaan	Jumlah koleksi buku	Persentase peningkatan kepuasan masyarakat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84,8 %	1150 eksemplar	100%	165,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SKM Perpustakaan	84,8 %	182,000,000
2	23	02	1.01	10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Nilai SKM Perpustakaan	Jumlah data perpustakaan, tenaga perpustakaan dan pustakawan	Persentase peningkatan kepuasan masyarakat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84,8 %	100 data	100%	125,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SKM Perpustakaan	84,8 %	130,200,000
2	**23**	**02**	**1.02**		**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi**								**523,142,240**					**608,702,240**
2	23	02	1.02	01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Nilai SKM Perpustakaan	Jumlah kegiatan sosialisasi budaya baca dan literasi	Persentase pengembangan perpustakaan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84,8 %	4 kegiatan	100%	211,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SKM Perpustakaan	84,8 %	221,760,000
2	23	02	1.02	03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Nilai SKM Perpustakaan	Jumlah pemberian penghargaan gerakan budaya gemar membaca	Persentase pengembangan perpustakaan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84,8 %	24 orang	100%	92,942,240	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SKM Perpustakaan	84,8 %	94,942,240
2	23	02	1.02	04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Nilai SKM Perpustakaan	Jumlah perpustakaan sebagai pusat pemberdayaan masyarakat	Persentase pengembangan perpustakaan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84,8 %	30 perpustakaan	100%	219,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SKM Perpustakaan	84,8 %	292,000,000
2	**24**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**								**831,000,000**					**831,000,000**
2	**24**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**								**831,000,000**					**831,000,000**
2	**24**	**02**	**1.01**		**Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi**								**250,000,000**					**250,000,000**
2	24	02	1.01	01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Nilai Pengawasan Kearsipan	Terciptanya pengelolaan arsip dinamis di setiap OPD di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi	Persentase peningkatan jumlah instansi yang memiliki SDM kearsipan yang baik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	65%	4 OPD	100%	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Pengawasan Kearsipan	65%	200,000,000
2	24	02	1.01	02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Nilai Pengawasan Kearsipan	Jumlah pelaksanaan pelestarian arsip	Persentase peningkatan jumlah instansi yang memiliki SDM kearsipan yang baik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	65%	2 depo	100%	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Pengawasan Kearsipan	65%	50,000,000
2	**24**	**02**	**1.02**		**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi**								**251,000,000**					**251,000,000**
2	24	02	1.02	02	Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Nilai Pengawasan Kearsipan	Jumlah daftar pencarian arsip	Persentase peningkatan jumlah pengelolaan dan penataan arsip sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	65%	2 dpa	100%	251,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Pengawasan Kearsipan	65%	251,000,000
2	**24**	**02**	**1.03**		**Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi**								**330,000,000**					**330,000,000**
2	24	02	1.03	01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Nilai Pengawasan Kearsipan	Jumlah informasi, akses dan layanan kearsipan nasional tingkat provinsi yang tersedia	Persentase peningkatan jumlah pengelolaan dan penataan arsip sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	65%	25 berkas	100%	80,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Pengawasan Kearsipan	65%	80,000,000
2	24	02	1.03	02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Nilai Pengawasan Kearsipan	Jumlah sosialisasi peraturan penyelenggaraan kearsipan	Persentase peningkatan jumlah pengelolaan dan penataan arsip sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	65%	10 instansi	100%	250,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Pengawasan Kearsipan	65%	250,000,000
												TOTAL	**18,246,953,240**					**18,558,743,740**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Jambi
Tahun 2022

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
										Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**													
3	**25**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**								**59,166,418,253**					**55,775,178,078**
3	**25**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**27,729,898,253**					**30,072,138,078**
3	**25**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**815,000,000**					**905,000,000**
3	25	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Jumlah pertemuan rakortek Jumlah pertemuan sinkronisasi penyusunan DAK	Meningkatnya kinerja dalam pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Indeks	1 Kali 1 Kali	1 Tahun	220,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	BB Indeks	240,000,000
3	25	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Nilai SAKIP	Jumlah dokumen penyusunan anggaran	Meningkatnya kinerja dalam pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Indeks	2 Dokumen	1 Tahun	45,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	BB Indeks	55,000,000
3	25	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai SAKIP	Jumlah dokumen capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Meningkatnya kinerja dalam pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Indeks	10 Dokumen	1 Tahun	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	BB Indeks	170,000,000
3	25	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Jumlah dokumen statistik kelautan dan perikanan	Meningkatnya kinerja dalam pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Indeks	1 Dokumen	1 Tahun	400,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	BB Indeks	440,000,000
3	**25**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**20,552,398,253**					**22,604,638,078**
3	25	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai SAKIP	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Meningkatnya kinerja Aparatur Sipil Negara	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Indeks	1 Tahun	12 Bulan	20,072,398,253	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	BB Indeks	22,079,638,078
3	25	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai SAKIP	Jumlah tenaga administrasi keuangan	Meningkatnya kinerja Aparatur Sipil Negara	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Indeks	22 Orang	12 Bulan	480,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	BB Indeks	525,000,000
3	**25**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**200,000,000**					**200,000,000**
3	25	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Nilai SAKIP	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Tertatanya pengelolaan Barang Milik Daerah di Dinas Kelautan dan Perikanan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Indeks	1 Dokumen	1 Tahun	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	BB Indeks	50,000,000
3	25	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai SAKIP	Jumlah laporan keuangan yang disusun	Tertatanya pengelolaan Barang Milik Daerah di Dinas Kelautan dan Perikanan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Indeks	2 Dokumen	1 Tahun	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	BB Indeks	150,000,000
3	**25**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**500,000,000**					**520,000,000**
3	25	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Nilai SAKIP	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Meningkatnya kinerja ASN Dinas Kelautan dan Perikanan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Indeks	325 Stel	1 Tahun	250,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	BB Indeks	250,000,000
3	25	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Nilai SAKIP		Meningkatnya kinerja ASN Dinas Kelautan dan Perikanan		BB Indeks		1 Tahun	100,000,000			Nilai SAKIP	BB Indeks	100,000,000
3	25	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai SAKIP	Jumlah pertemuan penatausahaan kepegawaian	Meningkatnya kinerja ASN Dinas Kelautan dan Perikanan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Indeks	1 Kali	1 Tahun	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	BB Indeks	170,000,000
3	**25**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**1,042,500,000**					**1,047,500,000**
3	25	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP	Jumlah komponen listrik/penerangan bangunan kantor	Meningkatnya kinerja Aparatur Sipil Negara	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Indeks	1 Tahun	1 Tahun	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	BB Indeks	15,000,000
3	25	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Meningkatnya kinerja Aparatur Sipil Negara	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Indeks	1 Tahun	1 Tahun	300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	BB Indeks	300,000,000
3	25	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai SAKIP	Jumlah peralatan rumah tangga	Meningkatnya kinerja Aparatur Sipil Negara	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Indeks	1 Tahun	1 Tahun	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	BB Indeks	50,000,000

3	25	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP	Jumlah pelayanan makan dan minum	Meningkatnya kinerja Aparatur Sipil Negara	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Indeks	1 Tahun	1 Tahun	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	BB Indeks	50,000,000
3	25	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai SAKIP	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Meningkatnya kinerja Aparatur Sipil Negara	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Indeks	1 Tahun	1 Tahun	75,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	BB Indeks	75,000,000
3	25	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai SAKIP	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Meningkatnya kinerja Aparatur Sipil Negara	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Indeks	1 Tahun	1 Tahun	7,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	BB Indeks	7,500,000
3	25	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP	Pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi	Meningkatnya kinerja Aparatur Sipil Negara	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Indeks	1 Tahun	1 Tahun	400,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	BB Indeks	400,000,000
3	25	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Nilai SAKIP	Jumlah laporan kearsipan	Meningkatnya kinerja Aparatur Sipil Negara	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Indeks	1 Laporan	1 Tahun	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	BB Indeks	150,000,000
3	**25**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**2,765,000,000**					**2,940,000,000**
3	25	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP	Jumlah kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas jabatan	Meningkatnya prasarana penunjang Aparatur Sipil Negara	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Indeks	11 Unit	1 Tahun	865,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	BB Indeks	865,000,000
3	25	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan	Meningkatnya prasarana penunjang Aparatur Sipil Negara	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Indeks	1 Unit	1 Tahun	700,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	BB Indeks	700,000,000
3	25	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Nilai SAKIP	Jumlah pengadaan mebeleur	Meningkatnya prasarana penunjang Aparatur Sipil Negara	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Indeks	1 Tahun	1 Tahun	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	BB Indeks	175,000,000
3	25	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP	Jumlah pengadaan peralatan dan pengadaan kantor	Meningkatnya prasarana penunjang Aparatur Sipil Negara	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Indeks	1 Tahun	1 Tahun	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	BB Indeks	200,000,000
3	25	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP	Jumlah pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Meningkatnya prasarana penunjang Aparatur Sipil Negara	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Indeks	1 Paket	1 Tahun	500,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	BB Indeks	700,000,000
3	25	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP	Jumlah peralatan gedung kantor	Meningkatnya prasarana penunjang Aparatur Sipil Negara	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Indeks	1 Tahun	1 Tahun	300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	BB Indeks	300,000,000
3	**25**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**655,000,000**					**655,000,000**
3	25	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP	Jumlah surat keluar masuk	Meningkatnya pengelolaan administrasi umum pada Dinas Kelautan dan Perikanan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Indeks	1 Tahun	1 Tahun	5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	BB Indeks	5,000,000
3	25	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP	Jumlah rekening yang dibayarkan	Meningkatnya pengelolaan administrasi umum pada Dinas Kelautan dan Perikanan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Indeks	1 Tahun	1 Tahun	650,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	BB Indeks	650,000,000
3	**25**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**1,200,000,000**					**1,200,000,000**
3	25	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	Meningkatnya kinerja Aparatur Sipil Negara	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Indeks	1 Tahun	1 Tahun	500,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	BB Indeks	500,000,000
3	25	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	Meningkatnya kinerja Aparatur Sipil Negara	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Indeks	1 Tahun	1 Tahun	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	BB Indeks	100,000,000
3	25	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP	Jumlah gedung kantor yang direhab dan terpelihara	Meningkatnya kinerja Aparatur Sipil Negara	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Indeks	1 Tahun	1 Tahun	500,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	BB Indeks	500,000,000
3	25	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	Meningkatnya kinerja Aparatur Sipil Negara	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Indeks	1 Tahun	1 Tahun	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	BB Indeks	100,000,000
3	**25**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**								**2,564,500,000**					**2,810,000,000**
3	**25**	**02**	**1.01**		**Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi**								**2,140,000,000**					**2,415,000,000**
3	25	02	1.01	01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Pengelolaan Ruang Laut Oleh Masyarakat Pesisir Maupun Pengusaha Sesuai PERDA RZWP3K	Tersedianya dokumen reviu dan perizinan	Terkelolanya 0 sampai dengan 12 mil laut provinsi jambi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Izin	1 Dokumen	50%	430,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengelolaan Ruang Laut Oleh Masyarakat Pesisir Maupun Pengusaha Sesuai PERDA RZWP3K	2 Izin	405,000,000

3	25	02	1.01	02	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Pengelolaan Ruang Laut Oleh Masyarakat Pesisir Maupun Pengusaha Sesuai PERDA RZWP3K	Peningkatan jumlah kawasan konservasi yang dikelola	Terkelolanya 0 sampai dengan 12 mil laut provinsi jambi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Izin	1 Kawasan	50%	760,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengelolaan Ruang Laut Oleh Masyarakat Pesisir Maupun Pengusaha Sesuai PERDA RZWP3K	2 Izin	920,000,000
3	25	02	1.01	03	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Pengelolaan Ruang Laut Oleh Masyarakat Pesisir Maupun Pengusaha Sesuai PERDA RZWP3K	Persentase jumlah wilayah perairan yang direhabilitasi	Terkelolanya 0 sampai dengan 12 mil laut provinsi jambi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Izin	20%	50%	950,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengelolaan Ruang Laut Oleh Masyarakat Pesisir Maupun Pengusaha Sesuai PERDA RZWP3K	2 Izin	1,090,000,000
3	**25**	**02**	**1.02**		**Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi**								**344,500,000**					**295,000,000**
3	25	02	1.02	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Pengelolaan Ruang Laut Oleh Masyarakat Pesisir Maupun Pengusaha Sesuai PERDA RZWP3K	Tersedianya SOP perizinan lokasi dan pengelolaan	Meningkatnya kepatuhan pengelolaan ruang laut	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Izin	1 Dokumen	50%	124,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengelolaan Ruang Laut Oleh Masyarakat Pesisir Maupun Pengusaha Sesuai PERDA RZWP3K	2 Izin	0
3	25	02	1.02	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Pengelolaan Ruang Laut Oleh Masyarakat Pesisir Maupun Pengusaha Sesuai PERDA RZWP3K	Jumlah rekomendasi yang diterbitkan	Meningkatnya kepatuhan pengelolaan ruang laut	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Izin	2 Izin	50%	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengelolaan Ruang Laut Oleh Masyarakat Pesisir Maupun Pengusaha Sesuai PERDA RZWP3K	2 Izin	100,000,000
3	25	02	1.02	03	Pelaksanaan Fasilitasi Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional	Pengelolaan Ruang Laut Oleh Masyarakat Pesisir Maupun Pengusaha Sesuai PERDA RZWP3K	Jumlah kelompok masyarakat yang terbina	Meningkatnya kepatuhan pengelolaan ruang laut	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Izin	2 Kelompok	50%	40,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengelolaan Ruang Laut Oleh Masyarakat Pesisir Maupun Pengusaha Sesuai PERDA RZWP3K	2 Izin	115,000,000
3	25	02	1.02	05	Pencatatan dan Pengadministrasian Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut	Pengelolaan Ruang Laut Oleh Masyarakat Pesisir Maupun Pengusaha Sesuai PERDA RZWP3K	Tercatatnya izin lokasi yang menggunakan sistem kadaster	Meningkatnya kepatuhan pengelolaan ruang laut	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Izin	2 Dokumen	50%	80,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengelolaan Ruang Laut Oleh Masyarakat Pesisir Maupun Pengusaha Sesuai PERDA RZWP3K	2 Izin	80,000,000
3	**25**	**02**	**1.03**		**Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**								**80,000,000**					**100,000,000**
3	25	02	1.03	04	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Pengelolaan Ruang Laut Oleh Masyarakat Pesisir Maupun Pengusaha Sesuai PERDA RZWP3K	Peningkatan kompetensi masyarakat pesisir	Meningkatnya pengetahuan dan kompetensi masyarakat pesisir dan nelayan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Izin	20 Orang	20 Orang	80,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengelolaan Ruang Laut Oleh Masyarakat Pesisir Maupun Pengusaha Sesuai PERDA RZWP3K	2 Izin	100,000,000
3	**25**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**								**13,417,920,000**					**9,171,740,000**
3	**25**	**03**	**1.01**		**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil**								**3,130,000,000**					**3,370,000,000**
3	25	03	1.01	01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Tersedianya data dan informasi SDI di laut	Meningkatnya kesejahteraan nelayan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	54480.9 ton	1 Dokumen	50%	160,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	54480.9 ton	180,000,000
3	25	03	1.01	02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Tersedianya prasarana usaha perikanan tangkap di laut	Meningkatnya kesejahteraan nelayan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	54480.9 ton	7 Jenis	50%	2,850,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	54480.9 ton	3,060,000,000
3	25	03	1.01	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Terjaminnya ketersediaan sarana usaha perikanan tangkap	Meningkatnya kesejahteraan nelayan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	54480.9 ton	2 Dokumen	50%	120,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	54480.9 ton	130,000,000
3	**25**	**03**	**1.02**		**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**								**1,617,920,000**					**1,476,740,000**
3	25	03	1.02	01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Tersedianya data dan informasi SDI di PUD	Meninangkatnya kesejahteraan nelayan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	54480.9 ton	1 Dokumen	30%	717,920,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	54480.9 ton	451,740,000
3	25	03	1.02	02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Tersedianya prasarana usaha perikanan tangkap di PUD	Meninangkatnya kesejahteraan nelayan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	54480.9 ton	4 Jenis	30%	780,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	54480.9 ton	895,000,000
3	25	03	1.02	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Terjaminnya ketersediaan sarana usaha perikanan tangkap	Meninangkatnya kesejahteraan nelayan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	54480.9 ton	2 Dokumen	30%	120,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	54480.9 ton	130,000,000

3	**25**	**03**	**1.03**		**Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT**								**500,000,000**						**510,000,000**
3	25	03	1.03	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Tersedianya prosedur penerbitan izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran diatas 10 GT sampai dengan 30 GT	Meningkatnya kepatuhan terhadap peraturan dan undang-undang yang berlaku	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	54480.9 ton	1 Dokumen	50%	340,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	54480.9 ton	345,000,000
3	25	03	1.03	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Tersedianya rekomendasi izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Meningkatnya kepatuhan terhadap peraturan dan undang-undang yang berlaku	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	54480.9 ton	30 Izin	50%	140,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	54480.9 ton	145,000,000
3	25	03	1.03	03	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Tersedianya data dan informasi usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Meningkatnya kepatuhan terhadap peraturan dan undang-undang yang berlaku	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	54480.9 ton	1 Laporan	50%	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	54480.9 ton	20,000,000
3	**25**	**03**	**1.04**		**Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan dimiliki oleh Nelayan Kecil**								**315,000,000**						**320,000,000**
3	25	03	1.04	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan dimiliki oleh Nelayan Kecil	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Tersedianya prosedur penerbitan izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT yang bukan dimiliki oleh nelayan kecil	Meningkatnya kesadaran pengusaha dan nelayan dalam mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	54480.9 ton	1 Dokumen	100%	175,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	54480.9 ton	175,000,000
3	25	03	1.04	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan dimiliki oleh Nelayan Kecil	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Tersedianya rekomendasi izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT yang bukan dimiliki oleh nelayan kecil	Meningkatnya kesadaran pengusaha dan nelayan dalam mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	54480.9 ton	15 Izin	100%	140,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	54480.9 ton	145,000,000
3	**25**	**03**	**1.05**		**Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu)**								**175,000,000**						**180,000,000**
3	25	03	1.05	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Jumah persyaratan dan prosedur tanda daftar kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT	Meningkatnya jumlah kapal yang didaftarkan dalam sistem tanda daftar kapal perikanan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	54480.9 ton	1 Dokumen	100%	110,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	54480.9 ton	110,000,000
3	25	03	1.05	02	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Terbitnya tanda daftar kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT	Meningkatnya jumlah kapal yang didaftarkan dalam sistem tanda daftar kapal perikanan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	54480.9 ton	10 Kapal	100%	65,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	54480.9 ton	70,000,000
3	**25**	**03**	**1.06**		**Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi**								**7,160,000,000**						**2,860,000,000**
3	25	03	1.06	02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Tersedianya sarana dan prasarana pelabuhan perikanan	Meningkatnya pengelolaan pelabuhan perikanan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	54480.9 ton	1 Tahun	1 Tahun	6,125,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	54480.9 ton	1,970,000,000
3	25	03	1.06	03	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Terlaksananya fungsi pemerintahan dan pengusahaan pelabuhan perikanan	Meningkatnya pengelolaan pelabuhan perikanan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	54480.9 ton	1 Tahun	1 Tahun	1,035,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	54480.9 ton	890,000,000
3	**25**	**03**	**1.07**		**Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT**								**195,000,000**						**195,000,000**
3	25	03	1.07	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Tersedianya prosedur kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah rekomendasi pengadaan kapal baru	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	54480.9 ton	1 Dokumen	100%	135,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	54480.9 ton	135,000,000
3	25	03	1.07	02	Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Tersedianya persetujuan pengadaan kapal penangkap ikan dan pengangkut ikan dengan ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah rekomendasi pengadaan kapal baru	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	54480.9 ton	2 Kapal	100%	60,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	54480.9 ton	60,000,000

3	**25**	**03**	**1.08**		**Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan**								**185,000,000**						**185,000,000**
3	25	03	1.08	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Tersedianya prosedur pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah rekomendasi izin pengadaan kapal baru	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	54480.9 ton	1 Dokumen	100%	125,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	54480.9 ton	125,000,000
3	25	03	1.08	02	Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Tersedianya persetujuan pengadaan kapal penangkap ikan dan pengangkut ikan dengan ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah rekomendasi izin pengadaan kapal baru	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	54480.9 ton	5 Kapal	100%	60,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	54480.9 ton	60,000,000
3	**25**	**03**	**1.09**		**Pendaftaran Kapal Perikanan di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT**								**140,000,000**						**75,000,000**
3	25	03	1.09	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Tersedianya prosedur pendaftaran kapal perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Meningkatnya jumlah pendaftaran kapal di sistem aplikasi tanda daftar kapal perikanan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	54480.9 ton	1 Dokumen	100%	110,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	54480.9 ton	35,000,000
3	25	03	1.09	02	Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Terbitnya pendaftaran kapal perikanan dengan ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Meningkatnya jumlah pendaftaran kapal di sistem aplikasi tanda daftar kapal perikanan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	54480.9 ton	10 Kapal	100%	30,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	54480.9 ton	40,000,000
3	**25**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**								**7,258,000,000**						**7,808,500,000**
3	**25**	**04**	**1.01**		**Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**								**60,000,000**						**77,000,000**
3	25	04	1.01	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Tersusunnya SOP penerbitan izin usaha perikanan	Meningkatnya usaha pembudidayaan ikan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	57168 ton	1 Dokumen	1 Tahun	25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	57168 ton	30,000,000
3	25	04	1.01	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Terbitnya rekomendasi izin usaha perikanan	Meningkatnya usaha pembudidayaan ikan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	57168 ton	1 Dokumen	1 Tahun	15,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	57168 ton	20,000,000
3	25	04	1.01	03	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Tersedianya data dan informasi usaha perikanan	Meningkatnya usaha pembudidayaan ikan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	57168 ton	1 Dokumen	1 Tahun	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	57168 ton	27,000,000
3	**25**	**04**	**1.02**		**Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing**								**40,000,000**						**50,000,000**
3	25	04	1.02	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Tersusunnya SOP penerbitan izin usaha perikanan	Meningkatnya usaha pembudidayaan ikan di laut	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	57168 ton	1 Dokumen	1 Tahun	25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	57168 ton	30,000,000
3	25	04	1.02	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Terbitnya rekomendasi izin usaha perikanan	Meningkatnya usaha pembudidayaan ikan di laut	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	57168 ton	1 Dokumen	1 Tahun	15,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	57168 ton	20,000,000
3	**25**	**04**	**1.03**		**Penerbitan Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT yang Beroperasi di Wilayah Administrasinya, serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja**								**310,000,000**						**395,000,000**
3	25	04	1.03	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Tersusunnya SOP dan prosedur kapal pengangkut hasil pembudidayaan ikan berukuran sampai dengan 30 GT	Tersedianya rekomendasi izin kapal pengangkut hasil pembudidayaan ikan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	57168 ton	2 Dokumen	1 Tahun	110,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	57168 ton	145,000,000
3	25	04	1.03	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah rekomendasi izin kapal pengangkut hasil pembudidayaan ikan berukuran sampai dengan 30 GT	Tersedianya rekomendasi izin kapal pengangkut hasil pembudidayaan ikan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	57168 ton	2 Izin	1 Tahun	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	57168 ton	250,000,000
3	**25**	**04**	**1.04**		**Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**								**250,000,000**						**320,000,000**
3	25	04	1.04	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Tersusunnya SOP dan prosedur penerbitan tanda daftar bagi pembudidaya ikan kecil (TDPIK)	Terkelolanya jumlah usaha unit budidaya yang terdaftar	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	57168 ton	1 Dokumen	1 Tahun	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	57168 ton	120,000,000
3	25	04	1.04	02	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah tanda daftar bagi pembudidaya ikan kecil (TDPIK) yang terbit	Terkelolanya jumlah usaha unit budidaya yang terdaftar	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	57168 ton	5 Kelompok	1 Tahun	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	57168 ton	200,000,000

3	**25**	**04**	**1.05**		**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut**								**6,598,000,000**						**6,966,500,000**
3	25	04	1.05	01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Tersedianya data dan informasi usaha perikanan	Terkelolanya usaha pembudidayaan ikan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	57168 ton	1 Dokumen	1 Tahun	30,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	57168 ton	40,000,000
3	25	04	1.05	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Tersedianya prasarana pembudidayaan ikan di laut	Terkelolanya usaha pembudidayaan ikan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	57168 ton	1 Paket	1 Tahun	160,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	57168 ton	160,000,000
3	25	04	1.05	03	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Tersedianya prasarana pembudidayaan ikan di air payau dan air tawar yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi dan/atau manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota	Terkelolanya usaha pembudidayaan ikan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	57168 ton	7 Jenis	1 Tahun	5,030,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	57168 ton	5,320,000,000
3	25	04	1.05	04	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Tersedianya sarana pembudidayaan ikan di laut	Terkelolanya usaha pembudidayaan ikan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	57168 ton	1 Paket	1 Tahun	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	57168 ton	100,000,000
3	25	04	1.05	05	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Tersedianya sarana pembudidayaan ikan di air payau dan air tawar yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi dan/atau manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota	Terkelolanya usaha pembudidayaan ikan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	57168 ton	6 Jenis	1 Tahun	553,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	57168 ton	561,500,000
3	25	04	1.05	06	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Terselenggaranya pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan di kawasan budidaya ikan	Terkelolanya usaha pembudidayaan ikan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	57168 ton	4 Kawasan	1 Tahun	445,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	57168 ton	500,000,000
3	25	04	1.05	07	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Terkendalinya kegiatan pembudidayaan ikan	Terkelolanya usaha pembudidayaan ikan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	57168 ton	2 Kabupaten	1 Tahun	70,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	57168 ton	75,000,000
3	25	04	1.05	08	Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Tersedianya data potensi dan pemanfaatan lahan pembudidayaan ikan	Terkelolanya usaha pembudidayaan ikan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	57168 ton	1 Dokumen	1 Tahun	110,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	57168 ton	110,000,000
3	25	04	1.05	09	Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Tersedianya data pemanfaatan air untuk pembudidayaan ikan	Terkelolanya usaha pembudidayaan ikan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	57168 ton	1 Dokumen	1 Tahun	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	57168 ton	100,000,000
3	**25**	**05**			**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**								**2,437,000,000**						**1,263,000,000**
3	**25**	**05**	**1.01**		**Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil**								**1,976,000,000**						**756,000,000**
3	25	05	1.01	01	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Persentase Unit Usaha Perikanan Yang Taat Terhadap Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah hari operasional pengawasan pemanfaatan ruang laut sampai dengan 12 mil	Meningkatnya sumber daya kelautan dan perikanan yang terawasi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60%	15 Hari	1 Tahun	130,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Unit Usaha Perikanan Yang Taat Terhadap Peraturan Perundang-Undangan	60%	130,000,000
3	25	05	1.01	02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Persentase Unit Usaha Perikanan Yang Taat Terhadap Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah hari operasional pengawasan perikanan tangkap	Meningkatnya sumber daya kelautan dan perikanan yang terawasi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60%	18 Hari	1 Tahun	1,810,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Unit Usaha Perikanan Yang Taat Terhadap Peraturan Perundang-Undangan	60%	590,000,000

3	25	05	1.01	03	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	Persentase Unit Usaha Perikanan Yang Taat Terhadap Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah unit usaha perikanan bidang budidaya yang terawasi	Meningkatnya sumber daya kelautan dan perikanan yang terawasi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60%	2 Unit	1 Tahun	36,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Unit Usaha Perikanan Yang Taat Terhadap Peraturan Perundang-Undangan	60%	36,000,000
3	**25**	**05**	**1.02**		**Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**								**461,000,000**					**507,000,000**
3	25	05	1.02	01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya	Persentase Unit Usaha Perikanan Yang Taat Terhadap Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah wilayah pengawasan perikanan tangkap	Meningkatnya sumber daya ikan di wilayah perairan umum dan daratan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60%	11 Kab/Kota	1 Tahun	288,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Unit Usaha Perikanan Yang Taat Terhadap Peraturan Perundang-Undangan	60%	310,000,000
3	25	05	1.02	02	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan Kewenangannya	Persentase Unit Usaha Perikanan Yang Taat Terhadap Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya pengawasan usaha perikanan budidaya	Meningkatnya sumber daya ikan di wilayah perairan umum dan daratan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60%	11 Kab/Kota	1 Tahun	99,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Unit Usaha Perikanan Yang Taat Terhadap Peraturan Perundang-Undangan	60%	112,000,000
3	25	05	1.02	03	Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Unit Usaha Perikanan Yang Taat Terhadap Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah wilayah unit usaha pemasaran dan pengolahan yang terawasi	Meningkatnya sumber daya ikan di wilayah perairan umum dan daratan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60%	11 Kab/Kota	1 Tahun	74,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Unit Usaha Perikanan Yang Taat Terhadap Peraturan Perundang-Undangan	60%	85,000,000
3	**25**	**06**			**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**								**5,759,100,000**					**4,649,800,000**
3	**25**	**06**	**1.01**		**Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**								**2,391,000,000**					**2,609,000,000**
3	25	06	1.01	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Peningkatan Angka Konsumsi Ikan	Tersusunnya SOP	Meningkatnya pelaku usaha yang memiliki izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40.60 kg/kapita/tahun	3 Dokumen	4 Izin	461,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Angka Konsumsi Ikan	40.60 kg/kapita/tahun	516,000,000
3	25	06	1.01	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Peningkatan Angka Konsumsi Ikan	Terbitnya rekomendasi izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan	Meningkatnya pelaku usaha yang memiliki izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40.60 kg/kapita/tahun	4 Buah	4 Izin	350,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Angka Konsumsi Ikan	40.60 kg/kapita/tahun	360,000,000
3	25	06	1.01	03	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Peningkatan Angka Konsumsi Ikan	Tersedianya data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan	Meningkatnya pelaku usaha yang memiliki izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40.60 kg/kapita/tahun	3 Doumen	4 Izin	1,580,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Angka Konsumsi Ikan	40.60 kg/kapita/tahun	1,733,000,000
3	**25**	**06**	**1.02**		**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar**								**2,533,100,000**					**1,155,800,000**
3	25	06	1.02	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Peningkatan Angka Konsumsi Ikan	Terlaksananya bimbingan dan penerapan persyaratan usaha pengolahan dan pemasaran	Meningkatnya jumlah Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40.60 kg/kapita/tahun	13 Kali	3 Kelompok	791,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Angka Konsumsi Ikan	40.60 kg/kapita/tahun	886,200,000
3	25	06	1.02	02	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Peningkatan Angka Konsumsi Ikan	Jumlah produk hasil perikanan yang teruji	Meningkatnya jumlah Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40.60 kg/kapita/tahun	25 Produk	3 Kelompok	1,741,900,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Angka Konsumsi Ikan	40.60 kg/kapita/tahun	269,600,000

3	**25**	**06**	**1.03**		**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**								**835,000,000**						**885,000,000**
3	25	06	1.03	01	Pemetaaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Peningkatan Angka Konsumsi Ikan	Tersusunnya peta logistik bahan baku pengolahan perikanan	Meningkatnya akses informasi dalam penentuan kebijakan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40.60 kg/kapita/tahun	1 Dokumen	1 Tahun	65,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Angka Konsumsi Ikan	40.60 kg/kapita/tahun	65,000,000
3	25	06	1.03	02	Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Peningkatan Angka Konsumsi Ikan	Jumlah fasilitasi bagi pelaku usaha perikanan	Meningkatnya akses informasi dalam penentuan kebijakan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40.60 kg/kapita/tahun	10 Kelompok	1 Tahun	470,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Angka Konsumsi Ikan	40.60 kg/kapita/tahun	485,000,000
3	25	06	1.03	03	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Peningkatan Angka Konsumsi Ikan	Tersedianya informasi manajemen logistik ikan	Meningkatnya akses informasi dalam penentuan kebijakan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40.60 kg/kapita/tahun	1 Dokumen	1 Tahun	300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Angka Konsumsi Ikan	40.60 kg/kapita/tahun	335,000,000
												TOTAL	**59,166,418,253**					**55,775,178,078**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Jambi
Tahun 2022

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**													
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**								**105,080,000,001**					**116,509,999,999**
3	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**69,080,000,000**					**72,100,000,000**
3	**27**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**1,200,000,000**					**1,300,000,000**
3	27	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	TERSEDIANYA DOKUMEN DATA STATISTIK TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN (Dokumen)	TERSEDIANYA DOKUMEN PRENCANAAN DAN EVALUASI	Kota Jambi, Alam Barajo, Mayang Mangurai	70 persen	3 Dokumen	11 Dokumen	500,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP	70 persen	550,000,000
							TERSEDIANYA DOKUMEN PERENCANAAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN				8 Dokumen							
							TERSEDIANYA DOKUMEN PERENCANAAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN (Dokumen)				8 Dokumen							
							TERSELENGARANYA KEGIATAN PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA STATISTIK (Kali)				4 Kali							
							TERSELENGARANYA PERTEMUAN MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN (Kali)				2 Kali							
3	27	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai SAKIP	TERSEDIANYA DOKUMEN DATA STATISTIK TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	TERSEDIANYA DOKUMEN PRENCANAAN DAN EVALUASI	Kota Jambi, Alam Barajo, Mayang Mangurai	70 persen	3 Dokumen	11 Dokumen	400,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP	70 persen	425,000,000
							TERSELENGARANYA KEGIATAN PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA STATISTIK				4 Kali							
3	27	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	TERSELENGARANYA PERTEMUAN MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN	TERSEDIANYA DOKUMEN PRENCANAAN DAN EVALUASI	Kota Jambi, Alam Barajo, Mayang Mangurai	70 persen	2 Kali	11 Dokumen	300,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP	70 persen	325,000,000
3	**27**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**42,000,000,000**					**43,000,000,000**
3	27	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai SAKIP	Terlaksananya Kegiatan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya penyediaan Administrasi Keuangan	Kota Jambi, Alam Barajo, Mayang Mangurai	70 persen	12 Bulan	12 Bulan	40,500,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	70 persen	41,000,000,000

3	27	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai SAKIP	Terlaksananya Pembayaran Honorarium Petugas Pengelola Laporan Kegiatan	Terlaksananya penyediaan Administrasi Keuangan	Kota Jambi, Alam Barajo, Mayang Mangurai	70 persen	12 Bulan	12 Bulan	1,500,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP	70 persen	2,000,000,000
							Terlaksananya Pembayaran Honorarium Petugas Pengelola Laporan Keuangan				12 Bulan							
							Terlaksananya Pembayaran Honorarium Petugas Pengurus/ Pengelola Barang				12 Bulan							
							Terlaksananya Pembayaran Horarium Petugas Administrasi Pengelola Keuangan				12 Bulan							
							Tersedianya Bahan Administrasi untuk Pelaksanaan Tugas ASN				12 Bulan							
3	**27**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**80,000,000**					**100,000,000**
3	27	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai SAKIP	Terlaksananya pembinaan , pengawasan dan pengendalian barang milik daerah pada OPD	Terlaksananya pembinaan , pengawasan dan pengendalian barang milik daerah pada OPD (Semester)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 persen	2 Semester	2 Semester	80,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP	70 persen	100,000,000
3	**27**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**1,000,000,000**					**1,200,000,000**
3	27	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Nilai SAKIP	Terlaksanaanya pengadaan pakaian Dinas beserta atribut kelngkapannya	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang Tepat, Cepat dan Akurat (Tahun)	Kota Jambi, Alam Barajo, Mayang Mangurai	70 persen	500 Stell	1 Tahun	400,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP	70 persen	450,000,000
3	27	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Nilai SAKIP	Terlaksananya pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang Tepat, Cepat dan Akurat (Tahun)	Kota Jambi, Alam Barajo, Mayang Mangurai	70 persen	4 Dokumen	1 Tahun	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP	70 persen	150,000,000
3	27	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Nilai SAKIP	terlaksanaanya kegiatan apresiasi penatausahaan kepegawaian	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang Tepat, Cepat dan Akurat (Tahun)	Kota Jambi, Alam Barajo, Mayang Mangurai	70 persen	12 Bulan	1 Tahun	300,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP	70 persen	350,000,000
3	27	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Nilai SAKIP	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan pegawai	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang Tepat, Cepat dan Akurat (Tahun)	Kota Jambi, Alam Barajo, Mayang Mangurai	70 persen	50 Orang	1 Tahun	200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP	70 persen	250,000,000
3	**27**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**700,000,000**					**800,000,000**
3	27	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya sarana dan prasarana administrasi perkantoran (Bulan)	Kota Jambi, Alam Barajo, Mayang Mangurai	70 persen	200 Pcs	12 Bulan	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP	70 persen	60,000,000
3	27	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP	Lamanya Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya sarana dan prasarana administrasi perkantoran (Bulan)	Kota Jambi, Alam Barajo, Mayang Mangurai	70 persen	12 Bulan	12 Bulan	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP	70 persen	170,000,000
							Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor				30 Unit							
3	27	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai SAKIP	Tersedianya peralatan rumah tangga Dinas	Tersedianya sarana dan prasarana administrasi perkantoran (Bulan)	Kota Jambi, Alam Barajo, Mayang Mangurai	70 persen	20 Unit	12 Bulan	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP	70 persen	60,000,000
3	27	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP	"Tersedianya Makanan dan Minuman Penunjang Seluruh Kegiatan Operasional, Rapat Terbatas dan Rapat Koordinasi "	Tersedianya sarana dan prasarana administrasi perkantoran (Bulan)	Kota Jambi, Alam Barajo, Mayang Mangurai	70 persen	12 Bulan	12 Bulan	200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP	70 persen	220,000,000
3	27	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai SAKIP	Lamanya Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	Tersedianya sarana dan prasarana administrasi perkantoran (Bulan)	Kota Jambi, Alam Barajo, Mayang Mangurai	70 persen	12 Bulan	12 Bulan	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP	70 persen	55,000,000
3	27	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai SAKIP	Terpenuhinya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan di Kantor	Tersedianya sarana dan prasarana administrasi perkantoran (Bulan)	Kota Jambi, Alam Barajo, Mayang Mangurai	70 persen	2 Jenis	12 Bulan	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP	70 persen	55,000,000

3	27	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP	Tersedianya Biaya Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana administrasi perkantoran (Bulan)	Kota Jambi, Alam Barajo, Mayang Mangurai	70 persen	1 Tahun	12 Bulan	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP	70 persen	180,000,000
3	**27**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**8,000,000,000**					**8,000,000,000**
3	27	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Nilai SAKIP	Terlaksananya pengadaan Maubeleur Kantor	Terlaksananya pengadaan kendaraan Dinas (Unit)	Kota Jambi, Alam Barajo, Mayang Mangurai	70 persen	20 Unit	20 Unit	500,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP	70 persen	500,000,000
3	27	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP	Terlaksananya pengadaan gedung kantor/bangunan lainnya	Terlaksananya pengadaan kendaraan Dinas (Unit)	Kota Jambi, Alam Barajo, Mayang Mangurai	70 persen	3 Paket	20 Unit	5,500,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP	70 persen	5,500,000,000
3	27	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP	Terlaksanya pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya	Terlaksananya pengadaan kendaraan Dinas (Unit)	Kota Jambi, Alam Barajo, Mayang Mangurai	70 persen	5 Unit	20 Unit	2,000,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP	70 persen	2,000,000,000
3	**27**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**1,100,000,000**					**1,200,000,000**
3	27	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP	Lamanya Penyediaan Surat-Menyurat	Tersedianya Jasa untuk Mendukung Pelaksanaan Tugas Pokok Urusan Pemerintah Daerah (Bulan)	Kota Jambi, Alam Barajo, Mayang Mangurai	70 persen	12 Bulan	12 Bulan	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP	70 persen	60,000,000
3	27	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa untuk Mendukung Pelaksanaan Tugas Pokok Urusan Pemerintah Daerah (Bulan)	Kota Jambi, Alam Barajo, Mayang Mangurai	70 persen	12 Bulan	12 Bulan	900,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP	70 persen	970,000,000
3	27	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor untuk Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Jasa untuk Mendukung Pelaksanaan Tugas Pokok Urusan Pemerintah Daerah (Bulan)	Kota Jambi, Alam Barajo, Mayang Mangurai	70 persen	22 Unit	12 Bulan	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP	70 persen	60,000,000
3	27	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP	"Lamanya Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor "	Tersedianya Jasa untuk Mendukung Pelaksanaan Tugas Pokok Urusan Pemerintah Daerah (Bulan)	Kota Jambi, Alam Barajo, Mayang Mangurai	70 persen	12 Bulan	12 Bulan	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP	70 persen	110,000,000
3	**27**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**15,000,000,000**					**16,500,000,000**
3	27	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP	Lamanya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terwujudnya Tata Kelola Barang Milik Daerah yang Efektif, Efisien dan Akuntabel (Tahun)	Kota Jambi, Alam Barajo, Mayang Mangurai	70 persen	310 Unit	1 Tahun	9,000,000,000			Nilai SAKIP	70 persen	9,700,000,000
3	27	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	Nilai SAKIP	Terlakksananya pemeliharaan maubeleur kantor	Terwujudnya Tata Kelola Barang Milik Daerah yang Efektif, Efisien dan Akuntabel (Tahun)	Kota Jambi, Alam Barajo, Mayang Mangurai	70 persen	1 Tahun	1 Tahun	500,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP	70 persen	700,000,000
3	27	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP	Terlakksananya pemeliharaan peralatan dan mesin kantor	Terwujudnya Tata Kelola Barang Milik Daerah yang Efektif, Efisien dan Akuntabel (Tahun)	Kota Jambi, Alam Barajo, Mayang Mangurai	70 persen	1 Tahun	1 Tahun	500,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP	70 persen	700,000,000
3	27	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP	Terlaksanaanya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Terwujudnya Tata Kelola Barang Milik Daerah yang Efektif, Efisien dan Akuntabel (Tahun)	Kota Jambi, Alam Barajo, Mayang Mangurai	70 persen	10 Paket	1 Tahun	5,000,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP	70 persen	5,400,000,000
3	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**								**23,400,000,000**					**28,850,000,000**
3	**27**	**02**	**1.01**		**Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian**								**1,500,000,000**					**1,700,000,000**
3	27	02	1.01	01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Persentase Ketersediaan Sarana Pertanian yang Sesuai Peruntukkan di Kab/Kota	Jumlah kabupaten/ kota pengawasan sebaran serapan pupuk bersubsidi dan pestisida di provinsi jambi	Jumlah Kabupaten/Kota Pemanfaatan Sarana Pertanian di Kawasan Pertanian sesuai Kebutuhan Peningkatan Produktivitas Pangan dan Hortikultura Strategis		100 persen	11 kab/kota	11 Kab/Kota	750,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Ketersediaan Sarana Pertanian yang Sesuai Peruntukkan di Kab/Kota	100 persen	850,000,000
						Persentase Ketersediaan	Frekuensi Pelaksanaan Pertemuan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Alsintan	Jumlah Kabupaten/Kota Pemanfaatan Sarana Pertanian di Kawasan			1 kali				Persentase Ketersediaan Sarana		

3	27	02	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Sarana Pertanian yang Sesuai Peruntukkan di Kab/Kota	"Jumlah Bantuan Alsintan Mendukung Ketahanan Pangan "Jumlah Pembinaan Kelembagaan Alsintan/ UPJA	Pertanian sesuai Kebutuhan Peningkatan Produktivitas Pangan dan Hortikultura Strategis	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	25 unit 1 Tahun	11 Kab/Kota	750,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pertanian yang Sesuai Peruntukkan di Kab/Kota	100 persen	850,000,000
3	**27**	**02**	**1.02**		**Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman**								**1,500,000,000**					**1,650,000,000**
3	27	02	1.02	01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Persentase Ketersediaan Sarana Pertanian yang Sesuai Peruntukkan di Kab/Kota	Jumlah Kab/Kota Sertifikasi Benih/ Bibit Tanaman Pangan dan Hortikultura di Provinsi Jambi	Persentase Ketersediaan Sarana Pertanian yang Sesuai Peruntukkan di Kab/Kota	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	11 Kab/Kota	100%	500,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Ketersediaan Sarana Pertanian yang Sesuai Peruntukkan di Kab/Kota	100 persen	550,000,000
3	27	02	1.02	02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Persentase Ketersediaan Sarana Pertanian yang Sesuai Peruntukkan di Kab/Kota	Terlaksananya Pembinaan, pendampingan dan pengawalan pada BBI/BBU Hortikultura Terlaksananya Pembinaan, pendampingan dan pengawalan pada BBI/BBU Hortikultura	Persentase Ketersediaan Sarana Pertanian yang Sesuai Peruntukkan di Kab/Kota	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	4 Kali 20 Kali	100%	500,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Ketersediaan Sarana Pertanian yang Sesuai Peruntukkan di Kab/Kota	100 persen	550,000,000
3	27	02	1.02	03	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Persentase Ketersediaan Sarana Pertanian yang Sesuai Peruntukkan di Kab/Kota	Terlaksananya Pembinaan, Pendampingan dan Pengawalan pada BBI Padi dan BBI Palawija Tersedianya benih sumber kacang tanah Tersedianya benih sumber kedelai Tersedianya benih sumber padi	Persentase Ketersediaan Sarana Pertanian yang Sesuai Peruntukkan di Kab/Kota	Kab. Batanghari, Pemayung, Lubuk Ruso Kab. Muaro Jambi, Mestong, Sebapo	100 persen	20 Kali 3 Ha 10 Ha 10 Ha	100%	500,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Ketersediaan Sarana Pertanian yang Sesuai Peruntukkan di Kab/Kota	100 persen	550,000,000
3	**27**	**02**	**1.04**		**Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi**								**20,000,000,000**					**25,000,000,000**
3	27	02	1.04	01	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Persentase Ketersediaan Sarana Pertanian yang Sesuai Peruntukkan di Kab/Kota	Jumlah bibit ternak Ayam yang diajukan Jumlah bibit ternak itik yang diajukan Jumlah bibit ternak Kambing yang diajukan Jumlah bibit ternak Sapi yang diajukan Jumlah Kab/Kota yang dilakukan Pembinaan, Pendampingan, Monitoring, Evaluasi dan Identifikasi Jumlah Populasi Ternak Ayam Buras Jumlah Populasi Ternak Ayam ras Pedaging Jumlah Populasi Ternak Ayam Ras Petelur Jumlah Populasi Ternak Itik Jumlah Populasi Ternak kambing Jumlah Populasi Ternak kerbau Jumlah Populasi Ternak Sapi	Jumlah bibit ternak dan populasi ternak sesuai kebutuhan produksi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	6000 ekor 3000 ekor 2000 ekor 200 ekor 11 Kabupaten/Kota 13555142 ekor 37679484 ekor 1480184 ekor 945032 ekor 455457 ekor 46611 ekor 167894 ekor	11 Kabupaten/ Kota	16,000,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Ketersediaan Sarana Pertanian yang Sesuai Peruntukkan di Kab/Kota	100 persen	19,000,000,000
							Meningkatnya produksi daging kambing untuk memenuhi kebutuhan protein provinsi (Ton)				600 Ton				Persentase			

3	27	02	1.04	02	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Persentase Ketersediaan Sarana Pertanian yang Sesuai Peruntukkan di Kab/Kota	Meningkatnya produksi daging sapi untuk memenuhi kebutuhan protein provinsi Meningkatnya produksi daging unggas untuk memenuhi kebutuhan protein provinsi	Jumlah bibit ternak dan populasi ternak sesuai kebutuhan produksi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	1200 Ton 12000 Ton	11 Kabupaten/ Kota	2,000,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Ketersediaan Sarana Pertanian yang Sesuai Peruntukkan di Kab/Kota	100 persen	3,000,000,000
3	27	02	1.04	03	Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Persentase Ketersediaan Sarana Pertanian yang Sesuai Peruntukkan di Kab/Kota	Meningkatnya mutu produk peternakan (%) Terjaminnya keamanan dan mutu pangan asal ternak Terjaminnya keamanan dan mutu pangan asal ternak	Jumlah bibit ternak dan populasi ternak sesuai kebutuhan produksi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	80 persen 5 jenis 11 Kabupaten/Kota	11 Kabupaten/ Kota	2,000,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Ketersediaan Sarana Pertanian yang Sesuai Peruntukkan di Kab/Kota	100 persen	3,000,000,000
3	**27**	**02**	**1.05**		**Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi**								**0**					**0**
3	27	02	1.05	01	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak								0					0
3	**27**	**02**	**1.07**		**Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain**								**400,000,000**					**500,000,000**
3	27	02	1.07	01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Persentase Ketersediaan Sarana Pertanian yang Sesuai Peruntukkan di Kab/Kota	Terbentuknya kelembagaan ekonomi peternakan Terbentuknya Kelembagaan Ekonomi Peternakan Terlaksananya promosi produk peternakan Terlaksananya Promosi Produk Peternakan Tersedianya sarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan Tersedianya Sarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	Jumlah bibit ternak dan pakan ternak yang diajukan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	11 Kabupaten/Kota 10 kelompok 11 Kabupaten/Kota 4 Kali 11 Kabupaten/Kota 10 kelompok	11 Kabupaten/ Kota	200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Ketersediaan Sarana Pertanian yang Sesuai Peruntukkan di Kab/Kota	100 persen	250,000,000
3	27	02	1.07	02	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Persentase Ketersediaan Sarana Pertanian yang Sesuai Peruntukkan di Kab/Kota	Terlaksananya pembinaan pendampingan, monitoring dan evaluasi Terpenuhinya Pakan Ternak Sesuai Kebutuhan Terpenuhinya Pakan Ternak Sesuai Kebutuhan	Jumlah bibit ternak dan pakan ternak yang diajukan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	11 Kabupaten/Kota 11 Kabupaten/Kota 100 Ton	11 Kabupaten/ Kota	200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Ketersediaan Sarana Pertanian yang Sesuai Peruntukkan di Kab/Kota	100 persen	250,000,000

3	**27**	**03**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**								**10,000,000,000**						**12,500,000,000**
3	**27**	**03**	**1.01**		**Penataan Prasarana Pertanian**								**10,000,000,000**						**12,500,000,000**
3	27	03	1.01	01	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian yang Sesuai Peruntukkan di Kab/ Kota	Terlaksananya Pembinaan Pengembangan Hortikultura Terlaksananya Pengembangan Kawasan Jagung Terlaksananya Pengembangan Kawasan Padi Terlaksananya Pengembangan Kawasan Sentra Sayuran Organik Tanaman Obat dan Florikultura	Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian yang Sesuai Peruntukkan di Kab/ Kota	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	10000 Batang 250 Ha 1500 Ha 50 Ha	100%	2,500,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian yang Sesuai Peruntukkan di Kab/ Kota	100 persen	3,125,000,000
3	27	03	1.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian yang Sesuai Peruntukkan di Kab/ Kota	Meningkatnya Jumlah Jalan Usaha Tani	Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian yang Sesuai Peruntukkan di Kab/ Kota	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	5 Paket	100%	2,500,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian yang Sesuai Peruntukkan di Kab/ Kota	100 persen	3,125,000,000
3	27	03	1.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian yang Sesuai Peruntukkan di Kab/ Kota	Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Irigasi Pertanian dalam Mendistribusikan Air ke Seluruh Lahan Pertanian	Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian yang Sesuai Peruntukkan di Kab/ Kota	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	11 kab/kota	100%	2,500,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian yang Sesuai Peruntukkan di Kab/ Kota	100 persen	3,125,000,000
3	27	03	1.01	09	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian yang Sesuai Peruntukkan di Kab/ Kota	Jumlah Pasar Tani yang terlaksana Jumlah peningkatan pengunjung tempat pelestarian satwa (orang)	Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian yang Sesuai Peruntukkan di Kab/ Kota		100 persen	10 Kali 260000 orang	100%	2,500,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian yang Sesuai Peruntukkan di Kab/ Kota	100 persen	3,125,000,000
3	**27**	**04**			**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**								**1,000,000,000**						**1,250,000,000**
3	**27**	**04**	**1.01**		**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**								**350,000,000**						**400,000,000**
3	27	04	1.01	01	Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Persentase Meningkatnya kesehatan hewan komoditas strategis dan Terjaminnya keamanan pangan komoditas peternakan strategis di	Meningkatnya status kesehatan hewan Terlaksananya peningkatan pelayanan kesehatan hewan	Terjaminnya keamanan pangan asal ternak komoditas strategis		100 persen	11 Kabupaten/Kota 5000 ekor	100 persen	350,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Meningkatnya kesehatan hewan komoditas strategis dan Terjaminnya keamanan pangan	100 persen	400,000,000
3	**27**	**04**	**1.02**		**Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi**								**200,000,000**						**300,000,000**
3	27	04	1.02	01	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Persentase Meningkatnya kesehatan hewan komoditas strategis dan Terjaminnya keamanan pangan komoditas peternakan strategis di	meningkatnya jumlah unit usaha yang memiliki sertifikat NKV Terlaksananya pengawasan terhadap peredaran produk hewan	Meningkatnya jumlah unit usaha yang memiliki sertifikat NKV	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	11 unit 200 sampel	11 Kabupaten/ Kota	200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Meningkatnya kesehatan hewan komoditas strategis dan Terjaminnya keamanan pangan	100 persen	300,000,000
3	**27**	**04**	**1.03**		**Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan**								**450,000,000**						**550,000,000**
3	27	04	1.03	03	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Meningkatnya kesehatan hewan komoditas strategis dan Terjaminnya keamanan	Peningkatan akreditasi Laboratorium Peningkatan pengujian sampel terakreditasi	Peningkatan Akreditasi Laboratorium	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	7500 sampel 1 sertifikat	1 sertifikat	450,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Meningkatnya kesehatan hewan komoditas strategis	100 persen	550,000,000
3	**27**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**								**400,000,000**						**450,000,000**
3	**27**	**05**	**1.01**		**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi**								**400,000,000**						**450,000,000**
3	27	05	1.01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Persentase Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan OPT dan DPI terhadap luas tanam tanaman pangan dan hortikultura di Kab/Kota	Penurunan luas areal tanam dari gangguan OPT	Persentase Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan OPT dan DPI terhadap luas tanam tanaman pangan dan hortikultura di Kab/Kota	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	200 Ha	100%	200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan OPT dan DPI terhadap luas tanam tanaman pangan dan hortikultura di Kab/Kota	100 persen	225,000,000

3	27	05	1.01	02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Persentase Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan OPT dan DPI terhadap luas tanam tanaman pangan dan hortikultura di Kab/Kota	Jumlah Kab/Kota yang dapat Ditangani Dampak Perubahan Iklim (DPI) pada Tanaman Pangan dan Hortikultura di Provinsi Jambi	Persentase Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan OPT dan DPI terhadap luas tanam tanaman pangan dan hortikultura di Kab/Kota	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	11 Kab/Kota	100%	200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan OPT dan DPI terhadap luas tanam tanaman pangan dan hortikultura di Kab/Kota	100 persen	225,000,000
3	**27**	**06**			**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**								**250,000,000**					**300,000,000**
3	**27**	**06**	**1.01**		**Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**								**250,000,000**					**300,000,000**
3	27	06	1.01	03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Persentase Kegiatan Usaha Tani yang Berdaya saing di Kab/Kota	Jumlah Survailen Sertifikasi Organik (kelompok tani)	Persentase Terwujudnya Kegiatan Usaha Tani yang Berdaya saing di Kab/Kota	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	10 Kelompok Tani	100%	250,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kegiatan Usaha Tani yang Berdaya saing di Kab/Kota	100 persen	300,000,000
3	**27**	**07**			**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**								**950,000,001**					**1,059,999,999**
3	**27**	**07**	**1.02**		**Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian**								**633,333,334**					**706,666,666**
3	27	07	1.02	01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Persentase peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kelembagaan pertanian di Provinsi Jambi	"Jumlah informasi teknologi, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian yang terdiseminasi	Jumlah kab/Kota Peningkatan Kapasitas Kelompok Tani dan Penyuluh Pertanian di Provinsi Jambi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota	316,666,667	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kelembagaan pertanian di Provinsi Jambi	100 persen	353,333,333
3	27	07	1.02	02	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Persentase peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kelembagaan pertanian di Provinsi Jambi	Jumlah penyuluh dan petani yang diberdayakan	Jumlah kab/Kota Peningkatan Kapasitas Kelompok Tani dan Penyuluh Pertanian di Provinsi Jambi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	200 orang	11 Kab/Kota	316,666,667	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kelembagaan pertanian di Provinsi Jambi	100 persen	353,333,333
3	**27**	**07**	**1.03**		**Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan**								**316,666,667**					**353,333,333**
3	27	07	1.03	04	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani	Persentase peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kelembagaan pertanian di Provinsi Jambi	"Jumlah kelompok tani yang difasilitasi penyelengaraan sekolah lapang (Poktan)	Persentase Kelembagaan Petani yang Meningkat Kapasitasnya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	30 Poktan	100%	316,666,667	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kelembagaan pertanian di Provinsi Jambi	100 persen	353,333,333
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**													
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**								**0**					**0**
4	**01**	**04**			**PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT**								**0**					**0**
4	**01**	**04**	**1.02**		**Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar**								**0**					**0**
4	01	04	1.02	03	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial								0					0
												TOTAL	**105,080,000,001**					**116,509,999,999**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Jambi
Tahun 2022

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Perkebunan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Perkebunan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**													
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**								**52,163,028,661**					**56,424,190,928**
3	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**21,100,118,075**					**21,126,123,480**
3	**27**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**509,687,900**					**535,172,295**
3	27	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun		Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura		6 Dokumen		259,687,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				272,672,295
3	27	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Evaluasi yang disusun		Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura		3 Dokumen		250,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				262,500,000
3	**27**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**16,508,077,844**					**17,333,481,737**
3	27	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Periode Penyediaan Gaju dan Tunjangan ASN		Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura		14 Bulan		16,117,639,281	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				16,923,521,246
3	27	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Layanan Administrasi Pengelola Keuangan		Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura		50 Orang		280,844,288	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				294,886,502
3	27	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen Pengajian Laporan Akuntansi dan Keuangan yang disusun		Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura		3 Dokumen		109,594,275	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				115,073,989
3	**27**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**624,450,000**					**655,672,000**
3	27	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Pakaian Dinas		Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura		165 Stel		98,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				102,900,000
3	27	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah ASN di Latih		Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura		950 orang		526,450,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				552,772,000
3	**27**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**871,423,350**					**914,994,518**
3	27	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Komponen Instalasi Listrik		Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura		6 Jenis		26,100,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				27,405,000
3	27	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Jenis ATK		Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura		48 Jenis		219,253,750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				230,216,438
3	27	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah ART		Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura		24 Jenis		83,033,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				87,184,860
3	27	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Bahan Bacaan Dan Perundang - Undangan		Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura		3900 eks		21,120,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				22,176,000
3	27	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Rapat dan Konsultasi		Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura		925 Orang Kali		521,916,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				548,012,220
3	**27**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**1,412,637,581**					**454,269,460**
3	27	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas roda 4 dan roda 2		Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura		25 Unit		980,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
3	27	01	1.07	05	Pengadaan Mebel		Jumlah Meubeleur		Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura		6 Jenis		180,607,581	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				189,637,960
3	27	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Software dan Hardware		Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura		20 Unit		252,030,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				264,631,500
3	**27**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**507,155,400**					**532,513,170**
3	27	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Surat Keluar		Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura		500 Surat		41,315,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				43,381,170
3	27	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Tagihan Rekening		Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura		3 Jenis		465,840,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				489,132,000
3	**27**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**666,686,000**					**700,020,300**
3	27	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas roda 4 dan roda 2		Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura		61 Unit		255,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				267,750,000
3	27	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin		Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura		27 Unit		91,686,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				96,270,300

3	27	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung yang direhab		Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura		8 Unit		320,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				336,000,000
3	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**								**16,766,490,724**					**18,157,326,594**
3	**27**	**02**	**1.01**		**Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian**								**310,500,000**					**326,025,000**
3	27	02	1.01	01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian		Jumlah Sebaran Peredaran Sarana Pertanian/Perkebunan		Kab. Batanghari, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Batanghari, Mersam, Sengkati Kecil Kab. Bungo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Merangin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Muaro Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tanjung Jabung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Sungai Penuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		11 Kab/Kota		195,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				204,750,000
3	27	02	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian		Jumlah Pelaku Perbenihan Tanaman Perkebunan		Kab. Batanghari, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bungo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Merangin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Muaro Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tanjung Jabung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Sungai Penuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		40 Penangkar		115,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				121,275,000

3	**27**	**02**	**1.02**		**Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman**								**15,643,810,776**					**16,629,001,314**
3	27	02	1.02	04	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan		Jumlah Komoditi Unggulan Lokal Perkebunan bersertifikat		Kab. Batanghari, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bungo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Merangin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Muaro Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tanjung Jabung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Sungai Penuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6 Komoditi		15,643,810,776	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				16,629,001,314
3	**27**	**02**	**1.03**		**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi**								**812,179,948**					**1,202,300,280**
3	27	02	1.03	04	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme		Tersedianya Kultivar SDG		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		9 Kab/Kota		812,179,948	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,202,300,280
3	**27**	**02**	**1.05**		**Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi**								**0**					**0**
3	27	02	1.05	01	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak								0					0
3	**27**	**03**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**								**1,852,137,447**					**1,929,744,319**
3	**27**	**03**	**1.01**		**Penataan Prasarana Pertanian**								**1,852,137,447**					**1,929,744,319**
3	27	03	1.01	01	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian		Jumlah dokumen Perencanaan Pengembangan Prasarana Perkebunan Provinsi.		Kab. Tanjung Jabung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Dokumen		300,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				300,000,000
3	27	03	1.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani		Jumlah Pengelolaan Jalan Usaha Tani		Kab. Batanghari, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bungo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Merangin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Muaro Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tanjung Jabung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Sungai Penuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		11 Kab/Kota		200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				210,000,000
3	27	03	1.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani		Jumlah Pengelolaan Pembangunan Jaringan Irigari Tata Air Mikro		Kab. Tanjung Jabung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		11 Kab/Kota		150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				157,500,000

3	27	03	1.01	09	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya		Promosi dan Peluang Pasar serta Penataan Prasarana Pendukung Pertanian lainnya.		Kab. Batanghari, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bungo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Merangin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Muaro Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tanjung Jabung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Sungai Penuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 Kegiatan		1,202,137,447	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1,262,244,319
3	**27**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**								**1,803,694,679**					**1,893,879,413**
3	**27**	**05**	**1.01**		**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi**								**1,803,694,679**					**1,893,879,413**
3	27	05	1.01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan				Kab. Batanghari, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bungo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Merangin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Muaro Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tanjung Jabung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1,152,194,679	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				1,209,804,413
3	27	05	1.01	03	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan		Cakupan wilayah Pembinaan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, Bencana alam, Dampak Lingkungan		Kab. Batanghari, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bungo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Merangin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Muaro Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tanjung Jabung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Sungai Penuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		11 Kab/Kota		651,500,000	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				684,075,000

3	**27**	**06**			**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**								**350,000,000**					**262,500,000**
3	**27**	**06**	**1.01**		**Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**								**350,000,000**					**262,500,000**
3	27	06	1.01	03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian		Jumlah Perusahaan Perkebunan Yang Memenuhi Standar Operasional/Ketentuan yang berlaku		Kab. Batanghari, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bungo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Merangin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Muaro Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tanjung Jabung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		18 Perusahaan		350,000,000	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				262,500,000
3	**27**	**07**			**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**								**10,290,587,736**					**13,054,617,122**
3	**27**	**07**	**1.02**		**Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian**								**7,661,824,036**					**9,390,915,237**
3	27	07	1.02	01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian		Persentase peningkatan SDM Petugas Penyuluh Perkebunan dan SDM Pekebun.		Kab. Batanghari, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bungo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Merangin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Muaro Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tanjung Jabung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Sungai Penuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 orang		7,661,824,036	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				9,390,915,237
3	**27**	**07**	**1.03**		**Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan**								**2,628,763,700**					**3,663,701,885**
3	27	07	1.03	01	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani				Kab. Batanghari, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bungo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Merangin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Muaro Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tanjung Jabung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				2,628,763,700	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				3,663,701,885
												TOTAL	**52,163,028,661**					**56,424,190,928**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Jambi
Tahun 2022

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**													
3	**28**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**								**155,346,119,643**					**153,805,995,278**
3	**28**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**138,662,247,100**					**138,518,943,413**
3	**28**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**341,500,000**					**358,562,500**
3	28	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai SAKIP	Jumlah laporan capaian RAD-GRK Persentase kelengkapan dokumen perencanaan	Persentase pemenuhan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran perangkat daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 persen	1 Laporan 100%	100%	236,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP	70 persen	248,062,500
3	28	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Jumlah laporan capaian RAD-GRK Persentase pelaporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase pemenuhan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran perangkat daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 persen	1 Laporan 100%	100%	105,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP	70 persen	110,500,000
3	**28**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**124,370,007,071**					**124,602,262,834**
3	28	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Persentase pemenuhan pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Persentase pertanggung jawaban pengelolaan keuangan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	100%	100%	123,492,988,662	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	123,492,988,662
3	28	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Persentase pertanggungjawaban pengelolaan keuangan	Persentase pertanggung jawaban pengelolaan keuangan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	100%	100%	711,637,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	934,024,218
3	28	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan		Persentase pertanggung jawaban pengelolaan keuangan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100		100%	8,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	10,000,000
3	28	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Persentase pemenuhan bahan tanggapan pemeriksaan APIP	Persentase pertanggung jawaban pengelolaan keuangan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	100%	100%	157,380,909	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	165,249,954
3	**28**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**558,886,500**					**666,108,125**
3	28	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Nilai SAKIP	Persentase pemeliharaan, pengawasan dan pemanfaatan BMD Persentase penyiapan administrasi perencanaan dan pertanggungjawaban BMD	Persentase pengelolaan dan pertanggungjawaban Barang Milik Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 persen	90% 100%	70%	130,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP	70 persen	130,000,000
3	28	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Nilai SAKIP	Persentase barang milik daerah yang diamankan	Persentase pengelolaan dan pertanggungjawaban Barang Milik Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 persen	70%	70%	75,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP	70 persen	93,750,000
3	28	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai SAKIP	Frekwensi pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah yang dilaksanakan	Persentase pengelolaan dan pertanggungjawaban Barang Milik Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 persen	22 Kali	70%	154,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP	70 persen	192,500,000
3	28	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai SAKIP	Jumlah rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah yang dilaksanakan	Persentase pengelolaan dan pertanggungjawaban Barang Milik Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 persen	24 Kali	70%	149,886,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP	70 persen	187,358,125

3	28	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai SAKIP	Persentase peningkatan mutu penatausahaan barang milik daerah	Persentase pengelolaan dan pertanggungjawaban Barang Milik Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 persen	100%	70%	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP	70 persen	62,500,000
3	**28**	**01**	**1.04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**								**125,000,000**					**160,000,000**
3	28	01	1.04	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Jumlah sosialisasi dan promosi objek retribusi	Persentase pengelolaan dan pertanggungjawaban pendapatan dari retribusi daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	1 Kali	100%	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	125,000,000
3	28	01	1.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Persentase pengelolaan retribusi yang dilaporkan	Persentase pengelolaan dan pertanggungjawaban pendapatan dari retribusi daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	100%	100%	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	35,000,000
3	**28**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**635,850,000**					**671,850,000**
3	28	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Persentase pengadaan dan kelengkapan pakaian dinas	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	100%	90%	315,350,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	346,850,000
3	28	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Persentase pengelolaan administrasi pegawai	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	100%	90%	13,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	15,000,000
3	28	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Persentase pelaksanaan sistem informasi pegawai	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	100%	90%	13,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	15,000,000
3	28	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Persentase pelaksanaan penilaian kinerja pegawai	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	100%	90%	13,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	15,000,000
3	28	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Frekwensi Sosialisasi dan Monev Kinerja ASN Persentase fasilitasi ASN mengikuti diklat formal Persentase pemenuhan sarana prasarana ASN	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	22 Kali 70% 100%	90%	280,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	280,000,000
3	**28**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**2,128,650,000**					**1,396,410,000**
3	28	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Persentase pemenuhan operasional rutin kantor dinas	Persentase pemenuhan penyediaan kelengkapan administrasi operasional perkantoran	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	100%	100%	15,650,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	17,210,000
3	28	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Persentase pemenuhan operasional rutin kantor dinas	Persentase pemenuhan penyediaan kelengkapan administrasi operasional perkantoran	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	100%	100%	1,552,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	799,000,000
3	28	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Persentase pemenuhan operasional rutin kantor dinas	Persentase pemenuhan penyediaan kelengkapan administrasi operasional perkantoran	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	100%	100%	7,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	7,700,000
3	28	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Persentase pemenuhan operasional rutin kantor dinas	Persentase pemenuhan penyediaan kelengkapan administrasi operasional perkantoran	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	100%	100%	74,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	81,500,000
3	28	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Persentase pemenuhan operasional rutin kantor dinas	Persentase pemenuhan penyediaan kelengkapan administrasi operasional perkantoran	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	100%	100%	14,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	15,500,000

3	28	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Persentase pemenuhan operasional rutin kantor dinas	Persentase pemenuhan penyediaan kelengkapan administrasi operasional perkantoran	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	100%	100%	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	15,500,000
3	28	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Persentase pemenuhan operasional rutin kantor dinas	Persentase pemenuhan penyediaan kelengkapan administrasi operasional perkantoran	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	100%	100%	430,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	435,000,000
3	28	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Persentase pemenuhan operasional rutin kantor dinas	Persentase pemenuhan penyediaan kelengkapan administrasi operasional perkantoran	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	100%	100%	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	25,000,000
3	**28**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**6,101,150,000**					**5,930,775,000**
3	28	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Jumlah kendaraan dinas perorangan atau kendaraan dinas jabatan yang diadakan	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana kantor	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	3 Unit	75%	1,500,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	1,800,000,000
3	28	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Jumlah kendaraan dinas operasional lapangan yang diadakan (roda 2, 3 dan roda 4)	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana kantor	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	20 Unit	75%	2,173,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	1,770,900,000
3	28	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Terpenuhinya meubeler Dinas dan UPTD	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana kantor	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	3 Unit	75%	705,000,000			persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	731,250,000
3	28	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Jumlah peralatan mesin lainnya yang diadakan	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana kantor	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	19 Unit	75%	728,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	385,000,000
3	28	01	1.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	terpenuhinya pengadaan aset tak berwujud	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana kantor	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	2 Unit	75%	1,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	1,875,000
3	28	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Jumlah gedung kantor yang diadakan/bangun	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana kantor	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	2 Unit	75%	750,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	937,500,000
3	28	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Terpenuhinya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana kantor	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	20 Unit	75%	220,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	275,000,000
3	28	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang gedung kantor atau bangunan lainnya	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana kantor	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	260 Meter	75%	23,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	29,250,000

3	**28**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**2,133,999,000**					**1,997,500,000**
3	28	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Persentase pemenuhan sarana untuk operasional kantor dinas	Persentase pemenuhan sarana untuk operasioanal kantor	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	100%	100%	38,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	42,500,000
3	28	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Persentase pemenuhan sarana untuk operasional kantor dinas	Persentase pemenuhan sarana untuk operasioanal kantor	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	100%	100%	525,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	600,000,000
3	28	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Jumlah kendaraan operasional yang disewa Persentase pemenuhan sarana untuk operasional kantor dinas	Persentase pemenuhan sarana untuk operasioanal kantor	Kab. Bungo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Merangin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tanjung Jabung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	7 Unit 100%	100%	909,999,000			persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	695,000,000
3	28	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Persentase pemenuhan sarana untuk operasional kantor dinas	Persentase pemenuhan sarana untuk operasioanal kantor	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	100%	100%	660,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	660,000,000
3	**28**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**2,267,204,529**					**2,735,474,954**
3	28	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah kendaraan yang dipelihara dan dibayar pajaknya		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		117 Unit		1,404,303,393	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1,755,379,241
3	28	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Meubel yang diperbaiki		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Unit		250,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				250,000,000
3	28	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan mesin dan lainnya yang dipelihara		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		150 Unit		295,733,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				337,136,418
3	28	01	1.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		40 Unit		20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				21,500,000
3	28	01	1.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud		Jumlah aset tetep lainnya yang dipelihara		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Persen		6,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				7,812,500
3	28	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah unit pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 Unit		263,417,436	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				329,271,795
3	28	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 Unit		27,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				34,375,000

3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**								**12,140,113,163**					**11,022,956,925**
3	**28**	**03**	**1.02**		**Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**								**1,217,956,930**					**459,827,920**
3	28	03	1.02	01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan		Jumlah rencana kehutanan tingkat provinsi Jambi Pembangunan KPHP/KPHL berjalan sesuai dengan dokumen perencanaan pembangunan hutan lestari Pembangunan KPHP/KPHL. berjalan sesuai dengan dokumen perencanaan pembangunan hutan lestari dan tersusunnya Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) Provinsi		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen RKTP 11 UPTD KPHP 3 KPHP/L		1,217,956,930					459,827,920
3	**28**	**03**	**1.03**		**Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**								**3,570,250,070**					**3,868,433,690**
3	28	03	1.03	01	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi		Jumlah Data dan Informasi Sumber daya Hutan, Jumlah penyediaan data dan informasi, koordinasi dan penilaian pengelolaan kawasan hutan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		11 UPTD KPHP 2 Kali		573,263,620					590,000,000
3	28	03	1.03	02	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung		Jumlah penyediaan data dan penilaian pengelolaan kawasan hutan		Kab. Tanjung Jabung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 Kelompok		150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				150,000,000
3	28	03	1.03	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi		Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengendalian kerjasama Pemanfaatan Hutan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		11 UPTD KPHP		243,224,000					247,885,200
3	28	03	1.03	06	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi		Jumlah pelaksanaan penilaian rencana pengelolaan di kawasan hutan produksi		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 Izin		747,765,000					752,663,250
3	28	03	1.03	08	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH								1,605,997,450					1,877,199,520
3	28	03	1.03	09	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan		Jumlah penerimaan negara bukan pajak dan penyelesaian piutang macet		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		9 Kabupaten		250,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				250,685,720
3	**28**	**03**	**1.04**		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**								**788,750,000**					**730,000,000**
3	28	03	1.04	01	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)		Jumlah buku RTnRL yang dibuat		Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Buku		150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				155,000,000
3	28	03	1.04	04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara		Jumlah penghijauan lingkungan yang dimonitor		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		11 UPTD KPHP		200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				220,000,000
3	28	03	1.04	06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan		Jumlah Pembuatan Kebun Bibit Permanen		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Unit		188,750,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				100,000,000
3	28	03	1.04	08	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan		Jumlah pelaksanaan perlindungan dikawasan hutan Jumlah Pengawasan dan Pembinaan Rehabilitasi Lahan				7 UPTD KPHP 11 UPTD KPHP		250,000,000					255,000,000

3	**28**	**03**	**1.05**		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**								**6,014,322,463**					**5,357,646,795**
3	28	03	1.05	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan		Jumlah pelaksanaan patroli pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		38 kali		3,937,043,150					1,937,112,808
3	28	03	1.05	02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan		Jumlah pelaksanaan patroli pencegahan dan pembatasan kerusakan kawasan hutan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		34 kali		279,816,075	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				293,806,879
3	28	03	1.05	03	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan		Jumlah pelaksanaan pengumpulan bahan dan keterangan (PULBAKET) pencegahan dan pembatasan kerusakan hasil hutan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		32 kali		262,327,590	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				275,443,970
3	28	03	1.05	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan		Jumlah rapat koordinasi (RAKOR) Polisi Kehutanan dan pelatihan menembak		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 kali		230,513,850	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				242,039,543
3	28	03	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan		Jumlah kampanye pencegahan karhutla disekolah-sekolah		Kab. Muaro Jambi, Kumpeh, Seponjen		20 kali		1,304,621,798	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2,609,243,595
							Jumlah konsultasi, koordinasi, rapat, seminar, sosialisasi dan pelatihan		Kab. Muaro Jambi, Sungai Gelam, Sungai Gelam		21 kali							
							Jumlah monev pasca karhutla		Kab. Tanjung Jabung Barat, Bram Itam, Bram Itam Kanan		5 kali							
							Jumlah monev sarpras dalkarhutla dan koordinasi serta sinkronisasi pada stakeholder terkait		Kab. Tanjung Jabung Timur, Berbak, Simpang		40 kali							
							Jumlah patroli gabungan bersama satgas karhutla berbasis posko		Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6 kali							
							Jumlah patroli gabungan pencegahan karhutla bersama MPA				7 kali							
							Jumlah pelatihan pembukaan lahan tanpa bakar				7 kali							
							Jumlah pemadaman karhutla				20 kali							
							Jumlah pembinaan dan pemberdayaan MPA				3 kali							
							Jumlah pengadaan papan larangan				8 unit							
							Jumlah penyampaian bahan kampanye pencegahan karhutla				20 kali							
							Jumlah publikasi dan iklan kampanye pencegahan karhutla				4 media							
							Jumlah rakor pengendalian karhutla				1 kali							
							Jumlah sosialisasi pencegahan karhutla				8 kali							

3	**28**	**03**	**1.06**		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**								**52,148,000**						**57,362,800**
3	28	03	1.06	04	Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu		Jumlah pemanfaatan pengolahan HHBK		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 UPTD KPHP		52,148,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					57,362,800
3	**28**	**03**	**1.07**		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun**								**242,685,700**						**250,685,720**
3	28	03	1.07	02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun		Jumlah monitoring dan evaluasi dalam rangka tertib peredaran hasil hutan pada pemegang izin		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 Kabupten		242,685,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					250,685,720
3	**28**	**03**	**1.09**		**Perbenihan Tanaman Hutan**								**254,000,000**						**299,000,000**
3	28	03	1.09	01	Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar		Fasilitasi Izin dengan Sistem OSS		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Izin		44,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					55,000,000
							Monitoring dan Evaluasi				6 Izin								
3	28	03	1.09	02	Sertifikasi Sumber Benih		Jumlah fasilitasi izin dengan komersial SSB		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Izin		38,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					49,500,000
							Jumlah monitoring dan evaluasi				5 Izin								
3	28	03	1.09	03	Sertifikasi Mutu Benih		Jumlah fasilitasi uji mutu bibit		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Pemohon		11,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					11,000,000
							Jumlah peningkatan SDM				1 Orang								
3	28	03	1.09	04	Sertifikasi Mutu Bibit		Jumlah Fasilitasi Uji Mutu Bibit		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Pemohon		11,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					11,000,000
3	28	03	1.09	05	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit		Jumlah pengawasan peredaran benih/bibit di UPTD KPHP		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		11 UPTD KPHP		149,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					172,500,000
							Jumlah pengawasan perusahaan				15 Izin/Lokasi								
3	**28**	**04**			**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**								**2,106,534,380**						**2,081,827,440**
3	**28**	**04**	**1.02**		**Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan**								**250,000,000**						**250,000,000**
3	28	04	1.02	01	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES		Jumlah pelaksanaan monitoring pengawasan dalam pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		11 Lokasi		250,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					250,000,000
3	**28**	**04**	**1.03**		**Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam**								**1,856,534,380**						**1,831,827,440**
3	28	04	1.03	04	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah		Jumlah peningkatan pengelolaan kawasan lindung/konservasi		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		7 UPTD KPHP		1,336,534,380	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi dalam Negeri/Luar Negeri					1,311,827,440
3	28	04	1.03	05	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi		Jumlah peningkatan kualitas masyarakat disekitar kawasan ekosistem essensial		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Lokasi		220,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					220,000,000
3	28	04	1.03	06	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi		Pelaksanaan peningkatan pengelolaan kawasan daerah penyangga		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Lokasi		300,000,000						300,000,000
3	**28**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**								**2,240,425,000**						**2,003,867,500**
3	**28**	**05**	**1.01**		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**								**2,240,425,000**						**2,003,867,500**
3	28	05	1.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan		Jumlah penghargaan yang diraih oleh penyuluh kehutanan dan binaannya		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 kategori lomba WL		350,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					385,000,000
3	28	05	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan		Jumlah hutan adat yang terkelola dengan baik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 RPHA		534,425,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					587,867,500
3	28	05	1.01	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial		Jumlah KUPS yang meningkat kelasnya		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 KUPS		1,356,000,000						1,031,000,000
							Jumlah peningkatan pemberdayaan masyarakat				7 UPTD KPHP								

3	**28**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)**								**196,800,000**					**178,400,000**
3	**28**	**06**	**1.01**		**Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**								**196,800,000**					**178,400,000**
3	28	06	1.01	01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS		Jumlah data lahan kritis di luar kawasan dan kesiapan kelembagaan pengelolaan DAS				4 UPTD KPHP		51,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				40,100,000
3	28	06	1.01	04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS		Jumlah pembinaan kelompok masyarakat dalam kegiatan pengelolaan DAS dan jumlah sosialisasi pengelolaan DAS				4 Kelompok		110,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				105,500,000
3	28	06	1.01	05	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS		Jumlah Kelembagaan Pengelolaan DAS				4 Kelompok		35,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				32,800,000
												TOTAL	**155,346,119,643**					**153,805,995,278**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Jambi
Tahun 2022

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0001 UPTD KPHP Kerinci Unit I

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**													
3	**28**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**								**2,565,483,865**					**2,247,933,865**
3	**28**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**212,100,000**					**238,500,000**
3	**28**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**212,100,000**					**238,500,000**
3	28	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Persentase Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Persen		3,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				3,500,000
3	28	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Persentase Penyediaan Peralatan Kantor		Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Persen		18,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				20,000,000
3	28	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Persentase Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Persen		27,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				30,000,000
3	28	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Persentase Penyediaan Peralatan Kantor		Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Persen		3,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				5,000,000
3	28	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Persentase Penyediaan Fasilitas Kunjungan Tamu		Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Persen		10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				10,000,000
3	28	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Persentase Fasilitasi Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi		Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Persen		150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				170,000,000
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**								**2,260,420,000**					**1,916,470,000**
3	**28**	**03**	**1.01**		**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**								**555,000,000**					**405,000,000**
3	28	03	1.01	02	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan		Jumlah rasionalisasi blok/petak wilayah KPHP		Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		15 Petak		345,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				345,000,000
3	28	03	1.01	03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH		Jumlah penyediaan sarana dan prasarana survey dan pemetaan		Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		15 Unit		150,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				0
3	28	03	1.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan		Jumlah koordinasi dan sinkronisasi usulan perubahan fungsi dan peruntukan hutan		Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 Kali		60,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				60,000,000
3	**28**	**03**	**1.02**		**Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**								**45,000,000**					**50,000,000**
3	28	03	1.02	01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan		Jumlah RPHJPd yang disusun		Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Unit		45,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				50,000,000
3	**28**	**03**	**1.03**		**Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**								**384,500,000**					**456,150,000**
3	28	03	1.03	01	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi		Jumlah lokasi penyediaan data dan informasi wilayah usaha di kawasan hutan produksi		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 Lokasi		60,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				75,000,000
3	28	03	1.03	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi		Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengendalian izin usaha atau kerjasama pemanfaatan di kawasan hutan produksi		Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 Kali		48,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				72,000,000
3	28	03	1.03	08	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH		Luas rehabilitasi dalam kawasan hutan		Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 Ha		126,500,000	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)				139,150,000
3	28	03	1.03	09	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan		Jumlah pengembangan ekowisata		Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 lokasi		150,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				170,000,000

3	**28**	**03**	**1.04**		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**								**889,120,000**							**581,840,000**
3	28	03	1.04	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara		Luas Rehabilitasi dalam Kawasan Hutan		Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		80 Ha		689,120,000	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)						481,840,000
3	28	03	1.04	06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan		Jumlah Pembangunan kebun bibit semi permanen		Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Unit		200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						100,000,000
3	**28**	**03**	**1.05**		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**								**261,800,000**							**285,980,000**
3	28	03	1.05	02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan		Jumlah Patroli Pengamanan dan Pemantauan Kebakaran		Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		48 Kali		261,800,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil						285,980,000
3	**28**	**03**	**1.06**		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**								**125,000,000**							**137,500,000**
3	28	03	1.06	01	Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati		Jumlah kelompok yang dibina dalam pengolahan dan pemasaran HHBK		Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6 KTH		125,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil						137,500,000
3	**28**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**								**92,963,865**							**92,963,865**
3	**28**	**05**	**1.01**		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**								**92,963,865**							**92,963,865**
3	28	05	1.01	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial		Jumlah Peningkatan KUPS yang dibina untuk peningkatan Kelas		Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 KUPS		92,963,865	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil						92,963,865
												TOTAL	**2,565,483,865**							**2,247,933,865**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Jambi
Tahun 2022

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0002 UPTD KPHP Bungo Unit II dan III

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
										Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**													
3	**28**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**								**3,257,211,080**					**2,960,085,400**
3	**28**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**154,500,000**					**157,500,000**
3	**28**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**154,500,000**					**157,500,000**
3	28	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Persentase Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Kab. Bungo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 per		3,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				3,500,000
3	28	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Persentase Penyediaan Peralatan Kantor		Kab. Bungo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Persen		20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				20,000,000
3	28	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Persentase Fasilitasi Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi		Kab. Bungo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Persen		27,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				30,000,000
3	28	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Persentase pemenuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Kab. Bungo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Persen		1,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1,500,000
3	28	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Persentase pemenuhan pelayanan kunjungan tamu		Kab. Bungo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Persen		2,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2,500,000
3	28	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Persentase Fasilitasi Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi		Kab. Bungo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Persen		100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				100,000,000
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**								**2,459,081,080**					**2,163,499,400**
3	**28**	**03**	**1.02**		**Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**								**20,000,000**					**40,000,000**
3	28	03	1.02	01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan		Jumlah penyusunan RPHJPd dan reviu RPHJP		Kab. Bungo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Unit		20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				40,000,000
3	**28**	**03**	**1.03**		**Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**								**641,834,600**					**623,852,600**
3	28	03	1.03	01	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi		Jumlah dokumen informasi wilayah usaha di kawasan hutan produksi		Kab. Bungo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Dokumen		379,634,600					415,936,600
3	28	03	1.03	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi		Jumlah Pelaksanaan pengendalian izin usaha dan kerjasama pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi Persentase Tertib Usaha Pemanfaatan Hutan dan Perlindungan Pengawasan berkala kepada pemegang izin terhadap implementasi perlindungan areal HCV (High Conservation Value dan HCS (High Conservation Stock)(UPTD KPHP Bungo Unit II dan III)		Kab. Bungo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		7 Izin 40%		262,200,000					207,916,000
3	**28**	**03**	**1.04**		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**								**952,650,000**					**777,960,000**
3	28	03	1.04	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara		Jumlah Luas Rehabilitasi di Kawasan Hutan		Kab. Bungo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		25 Ha		388,270,000					371,790,000
3	28	03	1.04	04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara								360,630,000					266,170,000

3	28	03	1.04	06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan		Jumlah pembangunan kebun bibit permanen		Kab. Bungo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Unit		188,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				120,000,000
3	28	03	1.04	08	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan								15,000,000					20,000,000
3	**28**	**03**	**1.05**		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**								**818,196,480**					**708,486,800**
3	28	03	1.05	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan		Jumlah kegiatan Patroli reguler dan Community Patrol		Kab. Bungo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		19 Kali		731,321,480					642,886,800
							Jumlah kegiatan sosialisasi mengenai pengamanan hutan dan karhutla				11 Kali							
							Jumlah patroli pengamanan hutan dan peredaran hasil hutan				24 Kali							
							Jumlah Pelatihan untuk kelompok MPA (Masyarakat Peduli Api)				2 Paket							
							Jumlah penegakan hukum dibidang kehutanan dan terjalinnya sinergi penegakan hukum di bidang kehutanan dengan instansi terkait				1 Paket							
							Jumlah Penulusuran bukti-bukti dan fakta secara kompresif dilapangan terhadap konflik yang terjadi antara masyarakat dengan pemerintah, masyarakat dengan perusahaan				1 Tim							
							jumlah peralatan pemadam kebakaran hutan dan lahan				1 Paket							
							Jumlah Pertemuan dan musyawarah dalam mencari solusi terhadap para pihak yang sedang berkonflik				1 Kegiatan							
							Jumlah pos penjagaan hutan dan peredaran hasil hutan				1 Paket							
3	28	03	1.05	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan								86,875,000					65,600,000
3	**28**	**03**	**1.06**		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**								**26,400,000**					**13,200,000**
3	28	03	1.06	04	Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu		Jumlah monitoring peredaran bahan baku industri hasil hutan kayu dan bukan kayu		Kab. Bungo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		8 Kali		26,400,000	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi dalam Negeri/Luar Negeri				13,200,000
							Jumlah pemenuhan komitmen izin usaha industri primer hasil hutan kayu dan bukan kayu				2 Izin							
3	**28**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**								**643,630,000**					**639,086,000**
3	**28**	**05**	**1.01**		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**								**643,630,000**					**639,086,000**
3	28	05	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan								184,430,000	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi dalam Negeri/Luar Negeri				44,430,000
3	28	05	1.01	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial				Kab. Bungo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				459,200,000					594,656,000
												TOTAL	**3,257,211,080**					**2,960,085,400**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Jambi
Tahun 2022

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0003 UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**													
3	**28**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**								**8,257,221,925**					**7,555,653,900**
3	**28**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**272,500,000**					**272,500,000**
3	**28**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**272,500,000**					**272,500,000**
3	28	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Persentase penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		Kab. Merangin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Persen		5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				5,000,000
3	28	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Persentase penyediaan peralatan perlengkapan kantor		Kab. Merangin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Persen		25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				25,000,000
3	28	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Persentase penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Kab. Merangin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Persen		35,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				35,000,000
3	28	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Persentase penyediaan bahan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Kab. Merangin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Persen		2,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2,500,000
3	28	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Persentase pemenuhan pelayanan kunjungan tamu		Kab. Merangin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Persen		5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				5,000,000
3	28	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Persentase fasilitasi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi		Kab. Merangin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Persen		200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				200,000,000
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**								**5,386,573,925**					**5,185,931,900**
3	**28**	**03**	**1.01**		**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**								**126,000,000**					**126,000,000**
3	28	03	1.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan		Jumlah koordinasi dan sinkronisasi usulan perubahan fungsi dan peruntukan hutan		Kab. Merangin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		20 Kali		126,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				126,000,000
3	**28**	**03**	**1.02**		**Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**								**90,000,000**					**90,000,000**
3	28	03	1.02	01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan		Jumlah rencana pengelolaan hutan jangka pendek (RPHJPd)		Kab. Merangin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 Unit		90,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				90,000,000
3	**28**	**03**	**1.03**		**Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**								**2,922,000,000**					**2,869,000,000**
3	28	03	1.03	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi		Jumlah koordinasi dan sinkronsasi pengendalian izin usaha atau kerjasama pemanfaatan di kawasan hutan produksi		Kab. Merangin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		21 izin		268,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi dalam Negeri/Luar Negeri				258,000,000
3	28	03	1.03	08	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH		Jumlah fasilitasi penyusunan dan penilaian serta pengesahan RKU dan RKT IUIPHHK-HTR		Kab. Merangin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		9 Izin		1,905,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri				2,191,000,000

3	28	03	1.03	09	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan		- Jumlah Pengembangan Ekowisata/Jasling		Kab. Merangin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 Kegiatan		749,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi dalam Negeri/Luar Negeri				420,000,000
3	**28**	**03**	**1.04**		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**								**873,573,925**					**893,931,900**
3	28	03	1.04	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara		Jumlah luas rehabilitasi kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat		Kab. Merangin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		60 ha		578,573,925	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)				771,431,900
3	28	03	1.04	06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan		Jumlah Pembuatan Kebun Bibit Permanen Jumlah pemeliharaan Tanaman Kegiatan Mengembangkan Pengembangan Bisnis Model Community untuk mata pencaharian alternatif		Kab. Merangin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Unit 3 Unit		250,000,000					100,000,000
3	28	03	1.04	08	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan		Jumlah Monitoring & evaluasi kegiatan rehabilitasi Jumlah Pelatihan untuk kelompok MPA (Fire Concerned Community) Jumlah Pelatihan untuk MMP		Kab. Merangin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10 Kali 3 Kali 4 Kali		45,000,000					22,500,000
3	**28**	**03**	**1.05**		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**								**842,000,000**					**887,000,000**
3	28	03	1.05	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan		Jumlah pelatihan untuk kelompok MPA		Kab. Merangin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 Kali		45,000,000	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi dalam Negeri/Luar Negeri				30,000,000
3	28	03	1.05	02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan		Jumlah patroli pengamanan hutan		Kab. Merangin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		24 Kali		427,000,000					477,000,000
3	28	03	1.05	03	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan		Jumlah penyelenggaraan patroli peredaran hasil hutan		Kab. Merangin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 Unit		30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				30,000,000
3	28	03	1.05	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan		Jumlah pelaksanaan assesment konflik untuk pembalakan lia, perambahan hutan, dan konflik sosial kegiatan pemantauan SDA, penegakan hukum dan resolusi konflik Jumlah pelaksanaan fasilitasi mediasi konflik Jumlah penurunan (terminimalisirnya) laju kerusakan hutan dari perambahan dan illegal logging		Kab. Merangin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Tim 2 Kali 3 Unit		40,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				40,000,000
3	28	03	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan		Jumlah pengendalian kebakaran hutan dan lahan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 Unit		300,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				310,000,000
3	**28**	**03**	**1.06**		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**								**45,000,000**					**45,000,000**
3	28	03	1.06	04	Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu		Jumlah pembinaan dan monitoring HHBK		Kab. Merangin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 Izin		45,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				45,000,000

3	**28**	**03**	**1.07**		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun**								**140,000,000**					**140,000,000**
3	28	03	1.07	02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun		Jumlah pembinaan dan monitoring pengolahan hasil hutan kayu dengan kapsitas produksi < 6000m3/tahun		Kab. Merangin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		7 Izin		140,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				140,000,000
3	**28**	**03**	**1.09**		**Perbenihan Tanaman Hutan**								**348,000,000**					**135,000,000**
3	28	03	1.09	01	Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar		Jumlah Pengadaan dan penanaman bibit kayu untuk naungan		Kab. Merangin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 Unit		348,000,000					135,000,000
							Jumlah pengada dan pengedar benih yang terdaftar				2 Izin							
							Jumlah Pengembangan Pembibitan Hutan				10 Unit							
3	**28**	**04**			**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**								**30,000,000**					**30,000,000**
3	**28**	**04**	**1.02**		**Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan**								**30,000,000**					**30,000,000**
3	28	04	1.02	01	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES		Jumlah penyelenggaraan pengawasan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi		Kab. Merangin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 Kegiatan		30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				30,000,000
3	**28**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**								**2,568,148,000**					**2,067,222,000**
3	**28**	**05**	**1.01**		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**								**2,568,148,000**					**2,067,222,000**
3	28	05	1.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan								90,000,000	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri				110,000,000
3	28	05	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan		Jumlah KTH yang dibina peningkatan kelasnya		Kab. Merangin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 KTH		60,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				60,000,000
3	28	05	1.01	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial		Jumlah peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui Perhutanan Sosial		Kab. Merangin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 KUPS		2,418,148,000					1,897,222,000
												TOTAL	**8,257,221,925**					**7,555,653,900**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Jambi
Tahun 2022

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0004 UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**													
3	**28**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**								**1,195,400,000**					**1,127,920,000**
3	**28**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**145,300,000**					**145,300,000**
3	**28**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**145,300,000**					**145,300,000**
3	28	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Persentase Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Persen		3,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				3,500,000
3	28	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Persentase Penyediaan Peralatan Kantor		Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Persen		20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				20,000,000
3	28	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Persentase Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100%		15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				15,000,000
3	28	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Persentase fasilitasi bahan bacaan dan referensi		Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100%		1,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1,800,000
3	28	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Persentase pemenuhan pelayanan kunjungan tamu		Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100%		5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				5,000,000
3	28	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Persentase Fasilitasi Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi		Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Persen		100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				100,000,000
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**								**900,100,000**					**832,620,000**
3	**28**	**03**	**1.03**		**Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**								**112,000,000**					**112,000,000**
3	28	03	1.03	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi		Jumlah koordinasi, pembinaan dan monitoring serta sosialisasi ke pemegang izin dan masyarakat		Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 Kali		112,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				112,000,000
3	**28**	**03**	**1.04**		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**								**250,000,000**					**150,000,000**
3	28	03	1.04	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara		Jumlah rehabilitasi di luar kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat		Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 Ha		50,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				50,000,000
3	28	03	1.04	06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan		Jumlah pembangunan kebun bibit permanen		Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Unit		200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				100,000,000
3	**28**	**03**	**1.05**		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**								**380,100,000**					**405,620,000**
3	28	03	1.05	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan		Jumlah patroli pengamanan hutan dan peredaran hasil hutan		Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		20 Kali		127,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				153,120,000
3	28	03	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan		Jumlah hari pengendalian/penanggulangan karhutla		Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		45 Hari		252,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				252,500,000
							Jumlah koordinasi, sinkronisasi ke instansi stakeholder terkait				6 Kali							
							Jumlah training dan pembentukan MPA				1 Kali							

3	**28**	**03**	**1.06**		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**								**158,000,000**							**165,000,000**
3	28	03	1.06	01	Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati								105,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						105,000,000
3	28	03	1.06	02	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHBK) melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Jumlah pemenuhan penerbitan izin usaha serta sistem pelayanan secara elektronik		Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Izin		53,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						60,000,000
3	**28**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**								**150,000,000**							**150,000,000**
3	**28**	**05**	**1.01**		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**								**150,000,000**							**150,000,000**
3	28	05	1.01	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial		Jumlah KUPS yang di tingkatkan kelasnya		Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 KUPS		150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						150,000,000
												TOTAL	**1,195,400,000**							**1,127,920,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Jambi
Tahun 2022

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0005 UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**													
3	**28**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**								**2,922,642,260**					**2,598,189,960**
3	**28**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**154,500,000**					**157,500,000**
3	**28**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**154,500,000**					**157,500,000**
3	28	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				3,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				3,500,000
3	28	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				20,000,000
3	28	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				27,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				30,000,000
3	28	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1,500,000
3	28	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Persentase pemenuhan pelayanan kunjungan tamu		Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Persen		2,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2,500,000
3	28	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Persentase Fasilitasi Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi		Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Persen		100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				100,000,000
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**								**2,545,075,060**					**2,258,210,560**
3	**28**	**03**	**1.03**		**Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**								**714,208,720**					**926,228,720**
3	28	03	1.03	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi		Jumlah pengendalian kerjasama izin pemanfaatan dikawasan hutan		Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Izin		89,568,720	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil				98,998,720
3	28	03	1.03	08	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH		Jumlah fasilitasi desa/pertemuan kelompok Jumlah fasilitasi pengembangan bisnis Jumlah fasilitasi penguatan kelembagaan Jumlah luas penanaman Jumlah monitoring dan evaluasi RHL Jumlah pemeliharaan Tahun 1 Jumlah penyusunan rancangan teknis RHL				1 paket 1 Paket 1 Paket 40 Ha 2 Paket 10 Ha 40 Ha		624,640,000	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi dalam Negeri/Luar Negeri				827,230,000
3	**28**	**03**	**1.04**		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**								**619,450,000**					**530,700,000**
3	28	03	1.04	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara		Jumlah pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan yang di kelola oleh masyarakat		Kab. Sarolangun, Pelawan, Lubuk Sepuh Kab. Sarolangun, Pelawan, Pematang Kulim Kab. Sarolangun, Pelawan, Mekarsari Kab. Sarolangun, Singkut, Payo Lebar		50 Ha		430,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil				430,700,000
3	28	03	1.04	06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan		Jumlah pembangunan kebun bibit permanen		Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Unit		188,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				100,000,000

3	**28**	**03**	**1.05**		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**								**1,128,312,000**						**709,387,500**
3	28	03	1.05	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan		Frekuensi terjaganya luasan hutan		Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Lokasi		84,397,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					84,397,000
3	28	03	1.05	02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan		Jumlah fasilitasi mediasi konflik		Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Kali		192,000,000	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri					139,650,000
							Jumlah monitoring izin industri primer				2 Kali								
							Jumlah monitoring peredaran bahan baku				2 Kali								
							Jumlah pemetaan konflik				1 Kali								
							Jumlah pemetaan partisipatif				1 Kali								
							Jumlah penilaian konflik				1 Kali								
							Jumlah verifikasi teknis				1 Kali								
3	28	03	1.05	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan		Jumlah fasilitasi pertemuan untuk mempersiapkan rencana bisinis		Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Kali		198,700,000	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri					132,000,000
							Jumlah fasilitasi untuk membangun kerjasama kelompok PS dengan BUMDES dan pelaku usaha lainnya				1 Kali								
							Jumlah pembuatan pembibitan tanaman hutan				1 Unit								
							Jumlah pengadaan dan penanaman bibit kayu untuk naungan				40 Ha								
3	28	03	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan		Jumlah lokasi pengamanan kawasan hutan termasuk manajemen karhutla		Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 Kecamatan		653,215,000						353,340,500
							Jumlah pelaksanaan perlindungan dikawasan hutan				24 Kali								
3	**28**	**03**	**1.07**		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun**								**83,104,340**						**91,894,340**
3	28	03	1.07	03	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Jumlah pelaksanaan pembinaan pengolahan hasil hutan kayu		Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Izin		83,104,340	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					91,894,340
3	**28**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**								**223,067,200**						**182,479,400**
3	**28**	**05**	**1.01**		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**								**223,067,200**						**182,479,400**
3	28	05	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan								136,480,000						86,892,000
3	28	05	1.01	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial		Jumlah peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui PS		Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Izin PS		86,587,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					95,587,400
												TOTAL	**2,922,642,260**						**2,598,189,960**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Jambi
Tahun 2022

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0006 UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**													
3	**28**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**								**1,289,480,250**					**1,173,320,000**
3	**28**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**152,420,250**					**157,500,000**
3	**28**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**152,420,250**					**157,500,000**
3	28	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Persentase Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100%		1,420,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				3,500,000
3	28	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Persentase Penyediaan Peralatan Kantor		Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100%		20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				20,000,000
3	28	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Persentase Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100%		27,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				30,000,000
3	28	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Persentase pemenuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100%		1,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1,500,000
3	28	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Persentase pemenuhan pelayanan kunjungan tamu		Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100%		2,500,000					2,500,000
3	28	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Persentase Fasilitasi Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi		Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Persen		100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				100,000,000
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**								**952,060,000**					**825,820,000**
3	**28**	**03**	**1.02**		**Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**								**144,000,000**					**152,000,000**
3	28	03	1.02	01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan		Jumlah Data Luasan Garapan Masyarakat dalam Kawasan Hutan Jumlah Legalitasi Perhutanan Sosial Jumlah Tata Batas terluar pada Areal Perhutanan Sosial		Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		150 Ha 7 Izin 4 Izin		144,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil				152,000,000
3	**28**	**03**	**1.03**		**Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**								**81,000,000**					**101,000,000**
3	28	03	1.03	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi		Jumlah Pemantauan dan Pembinaan Pemenuhan Kewajiban Pembayaran PNBP Jumlah Pembinaan dan Pemantauan Pemanfaatan Hutan pada Penggunaan Kawasan Hutan di Areal yang berIzin		Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 Izin 7 Izin		81,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil				101,000,000
3	**28**	**03**	**1.04**		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**								**425,000,000**					**313,500,000**
3	28	03	1.04	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara		Pelaksanaan Rehabilitasi diluar Kawasan Hutan yang dikelola oleh Masyarakat		Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 Ha		125,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil				125,000,000
3	28	03	1.04	06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan		Jumlah Pembangunan Kebun Bibit Permanen		Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Unit		300,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				188,500,000

3	**28**	**03**	**1.05**		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**								**302,060,000**					**259,320,000**
3	28	03	1.05	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan		Jumlah Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi dan Patroli Perlindungan Hutan		Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		33 Kali		85,140,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				77,400,000
3	28	03	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan		Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi ke Instransi Stakeholder Terkait		Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		7 Kali		216,920,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				181,920,000
							Jumlah Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi dan Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan				24 Kali							
							Jumlah Training dan Pembentukan MPA				2 Kali							
							Jumlah Training Masyarakat Peduli Api (MPA) yang telah terbentuk)				1 Kali							
3	**28**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**								**185,000,000**					**190,000,000**
3	**28**	**05**	**1.01**		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**								**185,000,000**					**190,000,000**
3	28	05	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan		Jumlah Kelompok yang didampingi untuk peningkatan Kapasitas KTH		Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 KTH		105,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				110,000,000
3	28	05	1.01	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial		Jumlah Pembentukan KUPS pada Kelompok Tani Hutan		Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 KTH/KUPS		80,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				80,000,000
												TOTAL	**1,289,480,250**					**1,173,320,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Jambi
Tahun 2022

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0007 UPTD KPHP Tebo Timur Unit X

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**													
3	**28**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**								**1,042,282,200**					**951,143,425**
3	**28**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**154,500,000**					**157,500,000**
3	**28**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**154,500,000**					**157,500,000**
3	28	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Persentase Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Persen		3,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				3,500,000
3	28	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Persentase Penyediaan Peralatan Kantor		Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100%		20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				20,000,000
3	28	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Persentase Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Persen		27,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				30,000,000
3	28	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Persentase Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100%		1,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1,500,000
3	28	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Persentase pemenuhan pelayanan kunjungan tamu		Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100%		2,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2,500,000
3	28	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Persentase Fasilitasi Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi		Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Persen		100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				100,000,000
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**								**834,838,500**					**732,758,170**
3	**28**	**03**	**1.03**		**Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**								**60,643,000**					**69,793,450**
3	28	03	1.03	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi		Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengendalian izin usaha atau kerjasama pemanfaatan di kawasan hutan produksi		Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		14 Kali		60,643,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil				69,793,450
3	**28**	**03**	**1.04**		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**								**465,350,000**					**315,350,000**
3	28	03	1.04	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara		Pelaksanaan Rehabilitasi diluar Kawasan Hutan yang dikelola oleh Masyarakat		Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		25 Ha		215,350,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil				215,350,000
3	28	03	1.04	06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan		Jumlah Pembuatan Kebun Bibit Permanen		Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Unit		250,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				100,000,000
3	**28**	**03**	**1.05**		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**								**268,845,500**					**302,614,720**
3	28	03	1.05	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan		Jumlah pengamanan dan patroli peredaran hasil hutan		Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		24 Kali		118,845,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				142,614,720
3	28	03	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan		Jumlah koordinasi dan sinergitas dengan instansi dan pemangku kepentingan		Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Paket		150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				160,000,000

3	**28**	**03**	**1.07**		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun**								**40,000,000**						**45,000,000**
3	28	03	1.07	02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun		Jumlah pembinaan dan monitoring hasil hutan kayu		Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 Izin		40,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					45,000,000
3	**28**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**								**52,943,700**						**60,885,255**
3	**28**	**05**	**1.01**		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**								**52,943,700**						**60,885,255**
3	28	05	1.01	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial		Jumlah penguatan kelembagaan pemberdayaan masyarakat		Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 KTH		52,943,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					60,885,255
												TOTAL	**1,042,282,200**						**951,143,425**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Jambi
Tahun 2022

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0008 UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
										Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**													
3	**28**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**								**1,131,209,500**					**1,059,708,500**
3	**28**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**155,200,000**					**155,200,000**
3	**28**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**155,200,000**					**155,200,000**
3	28	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Persentase penyediaan komponen listrik untuk penerangan	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana kantor	Kab. Batanghari, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	100 Persen	75%	3,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	3,500,000
3	28	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Persentase penyediaan pemenuhan alat tulis kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana kantor	Kab. Batanghari, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	100%	75%	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	20,000,000
3	28	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Persentase penyediaan barang cetakan	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana kantor	Kab. Batanghari, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	100 Persen	75%	27,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	27,000,000
3	28	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Persentase fasilitasi bahan bacaan dan referensi	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana kantor	Kab. Batanghari, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	100%	75%	2,200,000			persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	2,200,000
3	28	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Persentase pemenuhan komsumsi tamu	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana kantor	Kab. Batanghari, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	100%	75%	2,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	2,500,000
3	28	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Persentase Fasilitasi Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana kantor	Kab. Batanghari, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	100 Persen	75%	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	100,000,000
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**								**916,009,500**					**832,508,500**
3	**28**	**03**	**1.01**		**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**								**121,521,500**					**131,520,500**
3	28	03	1.01	01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan		Jumlah terhimpunnya data potensi wilayah tertetu dan areal Perhutanan Sosial		Kab. Batanghari, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 Lokasi		121,521,500	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				131,520,500
							Jumlah tersusunnya perencanaan rancang bangun tata hutan				2 Dokumen							
3	**28**	**03**	**1.03**		**Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**								**62,033,000**					**67,033,000**
3	28	03	1.03	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi		Jumlah pelaksanaan fasilitasi PNBP dan kerjasama/kemitraan kehutanan		Kab. Batanghari, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 Pemgang Izin		62,033,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				67,033,000
							Jumlah pelaksanaan monitoring dan pemantauan perizinan pada kawasan hutan				15 Kali							
							Jumlah pengendalian izin usaha dan kerjasama pemanfaatan kawasan hutan				4 Izin							

3	**28**	**03**	**1.04**		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**								**400,000,000**						**272,500,000**
3	28	03	1.04	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara		Luas Pengembangan Hutan Rakyat		Kab. Batanghari, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10 Ha		150,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					172,500,000
3	28	03	1.04	06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan		Jumlah Pembangunan Kebun Bibit Permanen		Kab. Batanghari, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Unit		250,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					100,000,000
3	**28**	**03**	**1.05**		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**								**280,000,000**						**300,000,000**
3	28	03	1.05	02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan		Dukungan Penyelesaian Konflik Tenurial		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10 Konflik		180,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					200,000,000
							Patroli Groundcheck/Hotspot				12 Kali								
							Patroli Pengamanan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan				20 Kali								
							Sosialisasi Karhutla				3 Kali								
3	28	03	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan		Dukungan Penyelesaian Konflik Tenurial		Kab. Batanghari, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10 Konflik		100,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					100,000,000
							Patroli Groundcheck/Hotspot				12 Kali								
							Sosialisasi karhutla				2 Kali								
							Sosialisasi Karhutla				3 Kali								
3	**28**	**03**	**1.07**		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun**								**52,455,000**						**61,455,000**
3	28	03	1.07	02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun		Jumlah Inventarisasi dan Updating data terkini IUIPHHK kapasitas < 6000 m3/tahun		Kab. Batanghari, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 Kali		52,455,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					61,455,000
							Jumlah monitoring dan pemantauan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan dengan Kapasitas Produksi kurang 6000 m3 tahun				12 Kali								
							Persentase peningkatan IPHH mematuhi tata usaha kayu / peredaran hasil hutan				45%								
3	**28**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**								**60,000,000**						**72,000,000**
3	**28**	**05**	**1.01**		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**								**60,000,000**						**72,000,000**
3	28	05	1.01	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial		Jumlah Peningkatan Kelas KTH dan KUPS		Kab. Batanghari, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 KTH/KUPS		60,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					72,000,000
												TOTAL	**1,131,209,500**						**1,059,708,500**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Jambi
Tahun 2022

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0009 UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**													
3	**28**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**								**2,955,100,000**					**3,168,250,000**
3	**28**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**155,100,000**					**158,250,000**
3	**28**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**155,100,000**					**158,250,000**
3	28	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Persentase penyediaan komponen listrik untuk penerangan		Kab. Muaro Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Persen		4,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				4,250,000
3	28	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Persentase penyediaan pemenuhan alat tulis kantor		Kab. Muaro Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100%		20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				20,000,000
3	28	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Persentase penyediaan barang cetakan		Kab. Muaro Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100%		27,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				30,000,000
3	28	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Persentase fasilitasi bahan bacaan dan referensi		Kab. Muaro Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Persen		1,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1,500,000
3	28	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Persentase pemenuhan komsumsi tamu		Kab. Muaro Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Persen		2,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2,500,000
3	28	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Persentase fasilitasi rapat dan koordinasi		Kab. Muaro Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Persen		100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				100,000,000
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**								**2,550,000,000**					**2,710,000,000**
3	**28**	**03**	**1.01**		**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**								**400,000,000**					**450,000,000**
3	28	03	1.01	02	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan		Jumlah Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan KPH		Kab. Muaro Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Lokasi		400,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				450,000,000
3	**28**	**03**	**1.03**		**Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**								**400,000,000**					**450,000,000**
3	28	03	1.03	08	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH		Jumlah peningkatan rehabilitasi hutan dalam kawasan hutan Jumlah peningkatan rehabilitasi hutan dalam kawasan hutan		Kab. Muaro Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Lokasi 10 Ha		400,000,000	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)				450,000,000
3	**28**	**03**	**1.04**		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**								**550,000,000**					**450,000,000**
3	28	03	1.04	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara		Jumlah peningkatan rehabilitasi diluar kawasan hutan yang berada di lahan masyarakat		Kab. Muaro Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Lokasi		300,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				350,000,000
3	28	03	1.04	06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan		Jumlah Pembangunan Kebun Bibit Permanen		Kab. Muaro Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Unit		250,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				100,000,000
3	**28**	**03**	**1.05**		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**								**900,000,000**					**960,000,000**
3	28	03	1.05	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan		Frekuensi Patroli dalam rangka Perlindungan Hutan		Kab. Muaro Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		75 Kali		200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				250,000,000
3	28	03	1.05	02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan		Frekuensi Patroli dalam rangka Perlindungan Hutan		Kab. Muaro Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		50 Kali		150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				150,000,000
3	28	03	1.05	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan		Jumlah pelaksanaan koordinasi bersama stakeholder terkait		Kab. Muaro Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 Kali		100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				100,000,000

3	28	03	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan		Frekuensi pembinaan masyarakat peduli api		Kab. Muaro Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Kali		450,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				460,000,000
3	**28**	**03**	**1.07**		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun**								**300,000,000**					**400,000,000**
3	28	03	1.07	01	Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun		Persentase sistem penerbitan pelayanan perizinan dalam pengolahan hasil hutan kayu		Kab. Muaro Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10 Industri		300,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				400,000,000
3	**28**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**								**250,000,000**					**300,000,000**
3	**28**	**05**	**1.01**		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**								**250,000,000**					**300,000,000**
3	28	05	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan		Jumlah Kelompok yang didampingi untuk peningkatan kapasitas		Kab. Muaro Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 KTH		100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				150,000,000
3	28	05	1.01	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial		Jumlah Peningkatan Kelas KUPS		Kab. Muaro Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 KUPS		150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				150,000,000
												TOTAL	**2,955,100,000**					**3,168,250,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Jambi
Tahun 2022

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0010 UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
										Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**													
3	**28**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**								**1,264,344,420**					**1,170,067,162**
3	**28**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**155,200,000**					**155,200,000**
3	**28**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**155,200,000**					**155,200,000**
3	28	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Persentase Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase fasilitasi penyelenggaraan administrasi perkantoran	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	100 Persen	100 Persen	3,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	3,500,000
3	28	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Persentase Penyediaan Peralatan Kantor	Persentase fasilitasi penyelenggaraan administrasi perkantoran	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	100 Persen	100 Persen	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	20,000,000
3	28	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Persentase Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase fasilitasi penyelenggaraan administrasi perkantoran	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	100 Persen	100 Persen	27,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	27,000,000
3	28	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Persentase Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase fasilitasi penyelenggaraan administrasi perkantoran	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	100 Persen	100 Persen	2,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	2,200,000
3	28	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Persentase pemenuhan pelayanan kunjungan tamu	Persentase fasilitasi penyelenggaraan administrasi perkantoran	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	100 Persen	100 Persen	2,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	2,500,000
3	28	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Persentase Fasilitasi Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Persentase fasilitasi penyelenggaraan administrasi perkantoran	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	100 Persen	100 Persen	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	100,000,000
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**								**1,036,984,420**					**927,384,162**
3	**28**	**03**	**1.02**		**Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**								**110,678,700**					**121,746,570**
3	28	03	1.02	01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Persentase Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan secara Optimal dan Lestari	Jumlah Penyusunan Pengelolaan Hutan	Persentase lokasi penataan batas partisipatif lokasi PS	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10%	1 Unit	45%	110,678,700	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan secara Optimal dan Lestari	10%	121,746,570
3	**28**	**03**	**1.03**		**Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**								**89,568,720**					**98,525,592**
3	28	03	1.03	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Persentase Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan secara Optimal dan Lestari	Frekuensi sistem penerbitan pelayanan perizinan dalam pengolahan HHBK	Frekuensi sistem penerbitan pelayanan perizinan dalam pengolahan HHBK	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10%	5 Kali	45%	89,568,720	Pendapatan dari Pengembalian		Persentase Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan secara Optimal dan Lestari	10%	98,525,592
3	**28**	**03**	**1.04**		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**								**500,000,000**					**350,000,000**
3	28	03	1.04	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Persentase Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan secara Optimal dan Lestari	Jumlah rehabilitasi di luar kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	Persentase sumber benih untuk rehabilitasi di UPTD KPHP	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10%	5 Ha	40%	250,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan secara Optimal dan Lestari	10%	250,000,000

3	28	03	1.04	06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Persentase Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan secara Optimal dan Lestari	Jumlah pembangunan kebun bibit permanen	Persentase sumber benih untuk rehabilitasi di UPTD KPHP	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10%	1 Unit	40%	250,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan secara Optimal dan Lestari	10%	100,000,000
3	**28**	**03**	**1.05**		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**								**336,737,000**					**357,112,000**
3	28	03	1.05	02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Persentase Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan secara Optimal dan Lestari	Jumlah pelaksanaan dukungan penyelesaian konflik tenurial dan penegakan hukum	Persentase perlindungan pada kawasan hutan	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10%	12 Kali	40%	186,737,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan secara Optimal dan Lestari	10%	197,112,000
							Jumlah pelaksanaan patroli pencegahan karhutla				10 Kali							
							Jumlah pelaksanaan patroli pengamanan hutan dan peredaran hasil hutan				15 Kali							
							Jumlah pelaksanaan sosialisasi/penyuluhan dampak kerusakan hutan				3 Kali							
							Pembatasan kerusakan hutan melalui perlindungan hutan dan penanggulangan karhutla				1 Kegiatan							
3	28	03	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Persentase Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan secara Optimal dan Lestari	Jumlah koordinasi bersama stakeholder terkait	Persentase perlindungan pada kawasan hutan	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10%	4 Kali	40%	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan secara Optimal dan Lestari	10%	160,000,000
							Jumlah pelaksanaan dukungan penyelesaian konflik tenurial dan penegakan hukum				12 Kali							
							Jumlah pelaksanaan patroli pencegahan karhutla				10 Kali							
							Jumlah pelaksanaan pelatihan pembentukan MPA				2 Kali							
							Jumlah pelaksanaan sosialisasi/penyuluhan dampak kerusakan hutan				3 Kali							
3	**28**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**								**72,160,000**					**87,483,000**
3	**28**	**05**	**1.01**		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**								**72,160,000**					**87,483,000**
3	28	05	1.01	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Persentase Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan secara Optimal dan Lestari	Jumlah pelaksanaan fasilitasi peningkatan kelas KUPS	Persentase penguatan kelembagaan pemberdayaan masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10%	2 KUPS	35%	72,160,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan secara Optimal dan Lestari	10%	87,483,000
							Jumlah pelaksanaan sosialisasi pengembangan usaha kelompok PS				2 Kali							
							Jumlah pendampingan KTH/PS melalui peningkatan kelas KTH dan atau KUPS				1 Kali							
												TOTAL	**1,264,344,420**					**1,170,067,162**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Jambi
Tahun 2022

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0011 UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
										Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**													
3	**28**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**								**3,964,326,340**					**3,378,425,160**
3	**28**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**176,500,000**					**176,500,000**
3	**28**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**176,500,000**					**176,500,000**
3	28	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Persentase Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Kab. Tanjung Jabung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Persen		3,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				3,500,000
3	28	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Persentase Penyediaan Peralatan Kantor		Kab. Tanjung Jabung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Persen		20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				20,000,000
3	28	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Persentase Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Kab. Tanjung Jabung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Persen		27,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				27,000,000
3	28	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Persentase Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Kab. Tanjung Jabung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Persen		1,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1,500,000
3	28	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Persentase pemenuhan pelayanan kunjungan tamu		Kab. Tanjung Jabung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Persen		4,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				4,500,000
3	28	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Persentase Fasilitasi Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi		Kab. Tanjung Jabung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Persen		120,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				120,000,000
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**								**3,677,826,340**					**2,941,925,160**
3	**28**	**03**	**1.02**		**Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**								**90,000,000**					**90,000,000**
3	28	03	1.02	01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan		Jumlah RPHJPd yang disusun		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 Unit		90,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				90,000,000
3	**28**	**03**	**1.03**		**Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**								**2,359,326,340**					**1,597,455,160**
3	28	03	1.03	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Persentase Pengelolaan hutan Secara Efisien dan Lestari	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengendalian izin usaha atau kerjasama	Jumlah peningkatan koordinasi dan sinkronisasi dalam pengendalian izin	Kab. Tanjung Jabung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45%	16 kali	16 kali	70,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase Pengelolaan hutan Secara Efisien dan Lestari	45%	80,500,000
3	28	03	1.03	08	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	Persentase Pengelolaan hutan Secara Efisien dan Lestari	Jumlah luas kawasan hutan yang direhabilitasi	Jumlah peningkatan koordinasi dan sinkronisasi dalam pengendalian izin		45%	133 Ha	16 kali	2,289,326,340			Persentase Pengelolaan hutan Secara Efisien dan Lestari	45%	1,516,955,160
3	**28**	**03**	**1.04**		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**								**500,000,000**					**350,000,000**
3	28	03	1.04	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara		Jumlah rehabilitasi diluar kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat		Kab. Tanjung Jabung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 Ha		250,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil				250,000,000
3	28	03	1.04	06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan		Jumlah pembangunan kebun bibit permanen		Kab. Tanjung Jabung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Unit		250,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				100,000,000
3	**28**	**03**	**1.05**		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**								**598,500,000**					**718,720,000**
3	28	03	1.05	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan		Frekuensi patroli dalam rangka perlindungan hutan		Kab. Tanjung Jabung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		25 Kali		241,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				309,320,000
							Jumlah sosialisasi dampak kerusakan hutan dan karhutla				5 Kali			Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi dalam Negeri/Luar Negeri				

3	28	03	1.05	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan		Jumlah koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan perlindungan hutan dan fasilitasi mediasi serta assesment konflik		Kab. Tanjung Jabung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6 Kali		50,000,000	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi dalam Negeri/Luar Negeri				102,000,000
3	28	03	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan								307,400,000					307,400,000
3	**28**	**03**	**1.06**		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**								**130,000,000**					**185,750,000**
3	28	03	1.06	01	Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati		Jumlah kelompok masyarakat yang difasilitasi dalam pemasaran HHBK				1 Paket		130,000,000					185,750,000
							Jumlah pengolahan bahan baku hasil hutan, Fasilitasi kelompok tani hutan / Kelompok Perhutanan Sosial dalam melakukan pemasaran HHBK				3 Kelompok							
3	**28**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**								**110,000,000**					**260,000,000**
3	**28**	**05**	**1.01**		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**								**110,000,000**					**260,000,000**
3	28	05	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan								35,000,000					110,000,000
3	28	05	1.01	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial		Jumlah KUPS yang ditingkatkan kelasnya		Kab. Tanjung Jabung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 KUPS		75,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				150,000,000
												TOTAL	**3,964,326,340**					**3,378,425,160**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Jambi
Tahun 2022

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0012 UPTD Tahura

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**													
3	**28**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**								**2,997,500,000**					**3,367,000,000**
3	**28**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**217,500,000**					**282,000,000**
3	**28**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**217,500,000**					**282,000,000**
3	28	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Persentase Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Persen		5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				5,000,000
3	28	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Persentase Penyediaan Peralatan Kantor		Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Persen		30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				40,000,000
3	28	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Persentase Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Persen		27,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				30,000,000
3	28	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Persentase penyediaan bacaan peraturan perundang-undangan		Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Persen		2,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				3,500,000
3	28	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Persentase pemenuhan pelayanan kunjungan tamu		Kab. Muaro Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Persen		3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				3,500,000
3	28	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Persentase Fasilitasi Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi		Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Persen		150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				200,000,000
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**								**700,000,000**					**700,000,000**
3	**28**	**03**	**1.04**		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**								**700,000,000**					**700,000,000**
3	28	03	1.04	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara		Jumlah luas rehabilitasi di kawasan hutan		Kab. Muaro Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		50 Ha		700,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				700,000,000
3	**28**	**04**			**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**								**2,080,000,000**					**2,385,000,000**
3	**28**	**04**	**1.01**		**Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi**								**2,080,000,000**					**2,385,000,000**
3	28	04	1.01	01	Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA		Jumlah identifikasi dan monitoring calon kemitraan konservasi di kawasan sekitar TAHURA Provinsi Jumlah patroli pengamanan di UPTD Tahura Jumlah sosialisasi pengamanan kawasan hutan		Kab. Muaro Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		15 Kali 40 Kali 5 kali		530,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				615,000,000
3	28	04	1.01	05	Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi		Jumlah luas rehabilitasi TAHURA		Kab. Muaro Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		50 Ha		1,300,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1,500,000,000
3	28	04	1.01	08	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi		Jumlah pembinaan kelompok pemberdayaan masyarakat di sekitar TAHURA		Kab. Muaro Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 Kelompok		250,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				270,000,000
												TOTAL	**2,997,500,000**					**3,367,000,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Jambi
Tahun 2022

Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
										Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**													
3	**29**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**								**85,564,957,781**					**71,798,992,110**
3	**29**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**17,829,863,291**					**19,188,897,620**
3	**29**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**321,000,000**					**353,000,000**
3	29	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Sakip	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		BB Indeks	2 Dokumen	10 Dokumen	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Sakip	BB Indeks	110,000,000
3	29	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Nilai Sakip	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kelurahan	BB Indeks	1 Dokumen	10 Dokumen	5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Sakip	BB Indeks	5,500,000
3	29	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai Sakip	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Indeks	1 Dokumen	10 Dokumen	5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Sakip	BB Indeks	5,500,000
3	29	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai Sakip	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kelurahan	BB Indeks	1 Dokumen	10 Dokumen	5,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Sakip	BB Indeks	6,000,000
3	29	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Nilai Sakip	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kelurahan	BB Indeks	1 Dokumen	10 Dokumen	5,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Sakip	BB Indeks	6,000,000
3	29	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Sakip	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Okhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Indeks	2 Dokumen	10 Dokumen	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Sakip	BB Indeks	55,000,000
3	29	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Indeks	2 Dokumen	10 Dokumen	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan dari Pengembalian Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Sakip	BB Indeks	165,000,000
3	**29**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**12,305,343,291**					**13,475,877,620**
3	29	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Sakip	tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Tertata dan tersedianya administrasi keuangan PD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Indeks	14 bulan	100 persen	11,705,343,291	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Sakip	BB Indeks	12,875,877,620
3	29	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Nilai Sakip	jumlah dokumen keuangan yang diveriikasi SKPD	Tertata dan tersedianya administrasi keuangan PD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Indeks	1 Laporan	100 persen	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Sakip	BB Indeks	100,000,000
3	29	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Nilai Sakip	Jumlah koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tertata dan tersedianya administrasi keuangan PD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Indeks	1 Laporan	100 persen	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Sakip	BB Indeks	100,000,000
3	29	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai Sakip	Jumlah koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tertata dan tersedianya administrasi keuangan PD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Indeks	1 Laporan	100 persen	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Sakip	BB Indeks	100,000,000

3	29	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Nilai Sakip	Jumlah Dokumen/bahan tanggapan pemeriksaan	Tertata dan tersedianya administrasi keuangan PD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Indeks	1 Laporan	100 persen	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Sakip	BB Indeks	100,000,000
3	29	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Nilai Sakip	Jumlah koordinasi dan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Tertata dan tersedianya administrasi keuangan PD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Indeks	1 Laporan	100 persen	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Sakip	BB Indeks	100,000,000
3	29	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Nilai Sakip	Jumlah laporan realisasi anggaran	Tertata dan tersedianya administrasi keuangan PD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Indeks	1 Laporan	100 persen	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Sakip	BB Indeks	100,000,000
3	**29**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**850,000,000**					**920,000,000**
3	29	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Nilai Sakip	Jumlah dokumen perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tertatanya administrasi Barang Milik Daerah pada PD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Indeks	1 Dokumen	100 persen	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Sakip	BB Indeks	100,000,000
3	29	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Nilai Sakip	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah SKPD yang diamankan	Tertatanya administrasi Barang Milik Daerah pada PD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Indeks	1 Dokumen	100 persen	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Sakip	BB Indeks	100,000,000
3	29	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Nilai Sakip	Jumlah koordinasi dan Barang Milik Daerah SKPD yang dinilai	Tertatanya administrasi Barang Milik Daerah pada PD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Indeks	4 Kali	100 persen	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Sakip	BB Indeks	100,000,000
3	29	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai Sakip	Jumlah Laporan BMD yang dilakukan pembinaan,pengawasan dan pengendalian	Tertatanya administrasi Barang Milik Daerah pada PD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Indeks	1 Dokumen	100 persen	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Sakip	BB Indeks	230,000,000
3	29	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai Sakip	Periode Rekonsiliasi BMD SKPD	Tertatanya administrasi Barang Milik Daerah pada PD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Indeks	4 Kali	100 persen	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Sakip	BB Indeks	110,000,000
3	29	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai Sakip	Jumlah laporan BMD SKPD yang tertata	Tertatanya administrasi Barang Milik Daerah pada PD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Indeks	1 Dokumen	100 persen	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Sakip	BB Indeks	160,000,000
3	29	01	1.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Nilai Sakip	Jumlah laporan pemanfaatan BMD SKPD	Tertatanya administrasi Barang Milik Daerah pada PD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Indeks	1 Dokumen	100 persen	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Sakip	BB Indeks	120,000,000
3	**29**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**771,500,000**					**808,000,000**
3	29	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Nilai Sakip	Jumlah sarana dan prasarana disiplin pegawai yang tersedia	Tertatanya administrasi kepegawaian PD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Indeks	1 Paket	100 persen	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Sakip	BB Indeks	60,000,000
3	29	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Nilai Sakip	Jumlah Pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang tersedia	Tertatanya administrasi kepegawaian PD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Indeks	110 Orang	100 persen	71,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Sakip	BB Indeks	78,000,000
3	29	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Nilai Sakip	Jumlah data administrasi kepegawaian	Tertatanya administrasi kepegawaian PD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Indeks	1 Dokumen	100 persen	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Sakip	BB Indeks	50,000,000
3	29	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Nilai Sakip	Jumlah kegiatan koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	Tertatanya administrasi kepegawaian PD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Indeks	1 Laporan	100 persen	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Sakip	BB Indeks	50,000,000
3	29	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Nilai Sakip	Periode monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Tertatanya administrasi kepegawaian PD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Indeks	12 bulan	100 persen	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Sakip	BB Indeks	50,000,000
3	29	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Nilai Sakip	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	Tertatanya administrasi kepegawaian PD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Indeks	20 Orang	100 persen	100,000,000			Nilai Sakip	BB Indeks	120,000,000
3	29	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai Sakip	Jumlah sosialisasi peraturan perundangan-undangan yang dilaksanakan	Tertatanya administrasi kepegawaian PD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Indeks	1 Kali	100 persen	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Sakip	BB Indeks	200,000,000
3	29	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai Sakip	Jumlah bimbinan teknis implementasi peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan	Tertatanya administrasi kepegawaian PD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Indeks	1 Kali	100 persen	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Sakip	BB Indeks	200,000,000

3	**29**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**1,195,000,000**						**1,225,000,000**
3	29	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai Sakip	Periode penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	tertata dan tersedinya administrasi umum PD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Indeks	12 bulan	100 persen	30,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Sakip	BB Indeks	30,000,000
3	29	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Sakip	Periode penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	tertata dan tersedinya administrasi umum PD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Indeks	12 bulan	100 persen	120,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Sakip	BB Indeks	120,000,000
3	29	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai Sakip	Periode penyediaan peralatan rumah tangga	tertata dan tersedinya administrasi umum PD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Indeks	12 bulan	100 persen	25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Sakip	BB Indeks	35,000,000
3	29	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai Sakip	Periode penyediaan makanan dan minum rapat	tertata dan tersedinya administrasi umum PD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Indeks	12 bulan	100 persen	65,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Sakip	BB Indeks	70,000,000
3	29	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai Sakip	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	tertata dan tersedinya administrasi umum PD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Indeks	12 bulan	100 persen	60,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Sakip	BB Indeks	65,000,000
3	29	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai Sakip	Periode penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	tertata dan tersedinya administrasi umum PD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Indeks	12 bulan	100 persen	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Sakip	BB Indeks	25,000,000
3	29	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai Sakip	Periode penyediaan fasilitas kunjungan tamu	tertata dan tersedinya administrasi umum PD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Indeks	12 bulan	100 persen	25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Sakip	BB Indeks	30,000,000
3	29	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Sakip	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi skpd yang dilaksanakan (luar dan dalam daerah)	tertata dan tersedinya administrasi umum PD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Indeks	1 Dokumen	100 persen	700,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Sakip	BB Indeks	700,000,000
3	29	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Nilai Sakip	Jumlah arsip dinamis pada skpd yang tertata	tertata dan tersedinya administrasi umum PD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Indeks	1 Dokumen	100 persen	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Sakip	BB Indeks	50,000,000
3	29	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Nilai Sakip	Jumlah sistem pemerintahan berbasis elektronik pada skpd yang terlaksana	tertata dan tersedinya administrasi umum PD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Indeks	1 Paket	100 persen	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Sakip	BB Indeks	100,000,000
3	**29**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**490,000,000**						**490,000,000**
3	29	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai Sakip	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang tersedia	Tersedianya barang milik penunjang urusan pemerintah daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Indeks	2 Unit	4 unit/paket	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Sakip	BB Indeks	100,000,000
3	29	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Nilai Sakip	Jumlah Mebel yang tersedia	Tersedianya barang milik penunjang urusan pemerintah daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Indeks	1 Paket	4 unit/paket	190,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Sakip	BB Indeks	190,000,000
3	29	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai Sakip	Jumlah peralatan dan mesin yang tersedia	Tersedianya barang milik penunjang urusan pemerintah daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Indeks	1 Paket	4 unit/paket	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Sakip	BB Indeks	200,000,000
3	**29**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**580,000,000**						**595,000,000**
3	29	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai Sakip	Periode penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Indeks	12 bulan	12 bulan	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Sakip	BB Indeks	15,000,000
3	29	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai Sakip	Jumlah pembayaran jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Indeks	12 bulan	12 bulan	160,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Sakip	BB Indeks	170,000,000
3	29	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Sakip	Periode pelayanan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Indeks	12 bulan	12 bulan	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Sakip	BB Indeks	10,000,000
3	29	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai Sakip	Periode jasa pengelola administrasi keuangan	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Indeks	12 bulan	12 bulan	400,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Sakip	BB Indeks	400,000,000

3	**29**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**1,317,020,000**						**1,322,020,000**
3	29	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Sakip	jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang diasuransikan	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Indeks	6 Unit	100 persen	412,320,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Sakip	BB Indeks	412,320,000
							jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dibayar pajaknya				6 Unit						
							Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara				8 Unit						
							periode pembayaran gaji non PNS (Supir)				12 bulan						
3	29	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai Sakip	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara (Roda 2)	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Indeks	18 unit	100 persen	357,420,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Sakip	BB Indeks	357,420,000
							Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara (Roda 4)				6 Unit						
							Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas operasional yang dibayar pajaknya (Roda 2)				18 Unit						
							Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas operasional yang dibayar pajaknya (Roda 4)				12 unit						
3	29	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai Sakip	Periode pemeliharaan perelatan dan mesin lainnya	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Indeks	12 bulan	100 persen	60,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Sakip	BB Indeks	65,000,000
3	29	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Sakip	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Indeks	1170 m2	100 persen	287,280,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Sakip	BB Indeks	287,280,000
							Periode pembayaran gaji non PNS (Penjaga Kantor)				12 bulan						
3	29	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Sakip	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Indeks	1 Paket	100 persen	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Sakip	BB Indeks	100,000,000
3	29	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Sakip	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Indeks	1 Paket	100 persen	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Sakip	BB Indeks	100,000,000
3	**29**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN**								**900,000,000**					**700,000,000**
3	**29**	**02**	**1.01**		**Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**								**300,000,000**					**400,000,000**
3	29	02	1.01	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Terjaganya kualitas dan kuantitas air tanah, Pengusahaan AT baik, benar, berkelanjutan, Pemasukan pajak air tanah, tersedianya data sumberdaya air tanah	Jumlah data zona konservasi air tanah pada CAT	Tersedianya data dan informasi zona konservasi air tanah pada CAT		20%	4 Kab	4 Kabupaten	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terjaganya kualitas dan kuantitas air tanah, Pengusahaan AT baik, benar, berkelanjutan, Pemasukan pajak air tanah, tersedianya data sumberdaya air tanah	20%	300,000,000

3	29	02	1.01	03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Terjaganya kualitas dan kuantitas air tanah, Pengusahaan AT baik, benar, berkelanjutan, Pemasukan pajak air tanah, tersedianya data sumberdaya air tanah	Jumlah pengendalian dan pengawasan pemanfaatan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah	Tersedianya data dan informasi zona konservasi air tanah pada CAT	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20%	4 Kab	4 Kabupaten	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terjaganya kualitas dan kuantitas air tanah, Pengusahaan AT baik, benar, berkelanjutan, Pemasukan pajak air tanah, tersedianya data sumberdaya air tanah	20%	100,000,000
3	**29**	**02**	**1.02**		**Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**								**400,000,000**					**100,000,000**
3	29	02	1.02	01	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah	Terjaganya kualitas dan kuantitas air tanah, Pengusahaan AT baik, benar, berkelanjutan, Pemasukan pajak air tanah, tersedianya data sumberdaya air tanah	Jumlah SOP Perizinan dan Persyaratan izin pengobaran,Izin Penggalian, Izin Pemakaian dan izin pengusahaan air tanah	Tersedinya Pedoman izin dan terkendalinya pelaksanaan pemanfaatan air tanah		20%	1 Pergub	1 Pergub	250,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terjaganya kualitas dan kuantitas air tanah, Pengusahaan AT baik, benar, berkelanjutan, Pemasukan pajak air tanah, tersedianya data sumberdaya air tanah	20%	0
3	29	02	1.02	02	Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah	Terjaganya kualitas dan kuantitas air tanah, Pengusahaan AT baik, benar, berkelanjutan, Pemasukan pajak air tanah, tersedianya data sumberdaya air tanah	Jumlah layanan perizinan dan informasi izin pengeboran,izin penggalian,izin pemakaian dan izin pengusahan air tanah	Tersedinya Pedoman izin dan terkendalinya pelaksanaan pemanfaatan air tanah		20%	1 kegiatan	1 Pergub	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terjaganya kualitas dan kuantitas air tanah, Pengusahaan AT baik, benar, berkelanjutan, Pemasukan pajak air tanah, tersedianya data sumberdaya air tanah	20%	50,000,000
3	29	02	1.02	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah	Terjaganya kualitas dan kuantitas air tanah, Pengusahaan AT baik, benar, berkelanjutan, Pemasukan pajak air tanah, tersedianya data sumberdaya air tanah	Jumlah pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan pengeboran,pengendalian,pemakaian dan pengusahaan air tanah	Tersedinya Pedoman izin dan terkendalinya pelaksanaan pemanfaatan air tanah		20%	4 Kab	1 Pergub	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terjaganya kualitas dan kuantitas air tanah, Pengusahaan AT baik, benar, berkelanjutan, Pemasukan pajak air tanah, tersedianya data sumberdaya air tanah	20%	50,000,000
3	**29**	**02**	**1.03**		**Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**								**200,000,000**					**200,000,000**
3	29	02	1.03	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah	Terjaganya kualitas dan kuantitas air tanah, Pengusahaan AT baik, benar, berkelanjutan, Pemasukan pajak air tanah, tersedianya data sumberdaya air tanah	Jumlah data dan informasi nilai perolehan air tanah	Tersedianya data, Revisi Pergub NPA, pemanfaatan air tanah yang baik, benar dan berkelanjutan		20%	1 Dokumen	4 Dokumen/Kabupaten	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terjaganya kualitas dan kuantitas air tanah, Pengusahaan AT baik, benar, berkelanjutan, Pemasukan pajak air tanah, tersedianya data sumberdaya air tanah	20%	100,000,000
3	29	02	1.03	03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	Terjaganya kualitas dan kuantitas air tanah, Pengusahaan AT baik, benar, berkelanjutan, Pemasukan pajak air tanah, tersedianya data sumberdaya air tanah	Jumlah pengendalian dan pengawasan pemanfaatan air tanah	Tersedianya data, Revisi Pergub NPA, pemanfaatan air tanah yang baik, benar dan berkelanjutan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20%	4 Kab	4 Dokumen/Kabupaten	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terjaganya kualitas dan kuantitas air tanah, Pengusahaan AT baik, benar, berkelanjutan, Pemasukan pajak air tanah, tersedianya data sumberdaya air tanah	20%	100,000,000

3	**29**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN**								**61,210,000,000**							**46,675,000,000**
3	**29**	**05**	**1.01**		**Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (dua belas) Mil Diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Perairan Kepulauan**								**255,000,000**							**275,000,000**
3	29	05	1.01	01	Penetapan Prosedur dan Pesyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (dua belas) Mil diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Perairan Kepulauan	pelaksanaan perizinan sektor energi terbarukan kewenangan provinsi	Jumlah dokumen prosedur (Pedoman Teknis) dan persyaratan izin pemanfaatan langsung panas bumi lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 daerah provinsi dan wilayah laut paling jauh 12 mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan	Tersedianya dokumen penatausahaan izin pemanfaatan langsung panas bumi lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi dan wilayah laut paling jauh 12 Mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	1 Dokumen	3 Dokumen	75,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		pelaksanaan perizinan sektor energi terbarukan kewenangan provinsi	100	75,000,000
3	29	05	1.01	02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (dua belas) Mil diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Perairan Kepulauan	pelaksanaan perizinan sektor energi terbarukan kewenangan provinsi	Jumlah dokumen rekomendasi izin dan informasi izin pemanfaatan langsung panas bumi lintas daerah kab/kota dalam 1 daerah provinsi dan wilayah laut paling jauh 12 mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan	Tersedianya dokumen penatausahaan izin pemanfaatan langsung panas bumi lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi dan wilayah laut paling jauh 12 Mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	1 Dokumen	3 Dokumen	80,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		pelaksanaan perizinan sektor energi terbarukan kewenangan provinsi	100	100,000,000
3	29	05	1.01	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (dua belas) Mil diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Perairan Kepulauan	pelaksanaan perizinan sektor energi terbarukan kewenangan provinsi	Jumlah dokumen pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan pemanfaatan langsung panas bumi lintas daerah kab/kota dalam 1 satu daerah provinsi dan wilayah laut paling jauh 12 mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan	Tersedianya dokumen penatausahaan izin pemanfaatan langsung panas bumi lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi dan wilayah laut paling jauh 12 Mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	1 Dokumen	3 Dokumen	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		pelaksanaan perizinan sektor energi terbarukan kewenangan provinsi	100	100,000,000
3	**29**	**05**	**1.02**		**Penatausahaan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**								**255,000,000**							**275,000,000**
3	29	05	1.02	01	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	pelaksanaan perizinan sektor energi terbarukan kewenangan provinsi	Jumlah dokumen prosedur penetapan prosedur dan persyaratan surat keterangan terdaftar usaha jasa penunjang yang kegiatan usahanya dala 1 daerah provinsi	Tersedianya dokumen penatausahaan surat keterangan terdaftar usaha jasa penunjang yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) daerah provinsi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	1 Dokumen	3 Dokumen	75,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		pelaksanaan perizinan sektor energi terbarukan kewenangan provinsi	100	75,000,000
3	29	05	1.02	02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	pelaksanaan perizinan sektor energi terbarukan kewenangan provinsi	Jumlah dokumen penyusunan rekomendasi perizinan dan informasi surat keterangan terdaftar usaha jasa penunjang yang kegiatan usahanya dalam 1 daerah provinsi	Tersedianya dokumen penatausahaan surat keterangan terdaftar usaha jasa penunjang yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) daerah provinsi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	1 Dokumen	3 Dokumen	80,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		pelaksanaan perizinan sektor energi terbarukan kewenangan provinsi	100	100,000,000
3	29	05	1.02	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	pelaksanaan perizinan sektor energi terbarukan kewenangan provinsi	Jumlah dokumen pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan surat keterangan terdaftar usaha jasa penunjang yang kegiatan usahannya dalam 1 daerah provinsi	Tersedianya dokumen penatausahaan surat keterangan terdaftar usaha jasa penunjang yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) daerah provinsi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	1 Dokumen	3 Dokumen	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		pelaksanaan perizinan sektor energi terbarukan kewenangan provinsi	100	100,000,000

3	**29**	**05**	**1.03**		**Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun**								**455,000,000**						**475,000,000**
3	29	05	1.03	01	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	pelaksanaan perizinan sektor energi terbarukan kewenangan provinsi	Jumlah Dokumen penetapan prosedur dan persyaratan izin usaha niaga bahan bakar nabati sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 ton per tahun	Tersedianya dokumen penatausahaan izin pembinaan dan pengawasan usah niaga bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	1 Dokumen	3 Dokumen	75,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		pelaksanaan perizinan sektor energi terbarukan kewenangan provinsi	100	75,000,000
3	29	05	1.03	02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	pelaksanaan perizinan sektor energi terbarukan kewenangan provinsi	Jumlah dokumen penyusunan rekomendasi perizinan dan informasi izin usaha niaga bahan bakar nabati sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 ton per tahun	Tersedianya dokumen penatausahaan izin pembinaan dan pengawasan usah niaga bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	1 Dokumen	3 Dokumen	80,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		pelaksanaan perizinan sektor energi terbarukan kewenangan provinsi	100	100,000,000
3	29	05	1.03	03	Pembinaan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	pelaksanaan perizinan sektor energi terbarukan kewenangan provinsi	Jumlah pembinaan usaha niaga bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 ton per tahun	Tersedianya dokumen penatausahaan izin pembinaan dan pengawasan usah niaga bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	1 kegiatan	3 Dokumen	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		pelaksanaan perizinan sektor energi terbarukan kewenangan provinsi	100	200,000,000
3	29	05	1.03	04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	pelaksanaan perizinan sektor energi terbarukan kewenangan provinsi	Jumlah dokumen pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan usaha niaga bahan bakar nabati sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 ton per tahun	Tersedianya dokumen penatausahaan izin pembinaan dan pengawasan usah niaga bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	1 Dokumen	3 Dokumen	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		pelaksanaan perizinan sektor energi terbarukan kewenangan provinsi	100	100,000,000
3	**29**	**05**	**1.04**		**Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi**								**60,245,000,000**						**45,650,000,000**
3	29	05	1.04	01	Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi	Penurunan Penggunaan Energi Tak terbarukan	Dokumen Mitigasi perubahan iklim sektor energi Jumlah kebijakan startegi dan program konservasi energi yang ditetapkan Jumlah rapat komite energi daerah	Penurunan penggunaan energi tak terbarukan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	0 Dokumen 1 Pergub 4 Rapat	14648 SBM	550,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penurunan Penggunaan Energi Tak terbarukan	100%	1,050,000,000
3	29	05	1.04	02	Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Pelaksanaan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Penurunan Penggunaan Energi Tak terbarukan	Peningkatan kapasitas SDM dalam pelaksanaan konservasi energi	Penurunan penggunaan energi tak terbarukan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Orang	14648 SBM	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penurunan Penggunaan Energi Tak terbarukan	100%	200,000,000
3	29	05	1.04	03	Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi	Penurunan Penggunaan Energi Tak terbarukan	Jumlah kampanye dan edukasi konservasi dan effiseinsi Energi Jumlah sosialisasi effesiensi dan Konservasi Energi	Penurunan penggunaan energi tak terbarukan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Kali 1 Kali	14648 SBM	350,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penurunan Penggunaan Energi Tak terbarukan	100%	200,000,000

3	29	05	1.04	04	Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi	Penurunan Penggunaan Energi Tak terbarukan	Jumlah dokumen perencanaan infrastruktur konservasi energi	Penurunan penggunaan energi tak terbarukan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Dokumen	14648 SBM	54,945,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penurunan Penggunaan Energi Tak terbarukan	100%	40,000,000,000
							Pemeliharaan infrastruktur konservasi energi				0.05 MWp			Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				
							Peningkatan efisiensi energi bahan bakar memasak di masyarakat (Biogas)				400 m3			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
							peningkatan efisiensi energi di bangunan pemerintah (PLTS Atap)				1.25 MWp							
							Peningkatan efisiensi energi penerangan fasilitas umum dan fasilitas pemerintah provinsi jambi				10 kWp							
3	29	05	1.04	05	Pemberian Insentif dan/atau Disinsentif Konservasi Energi	Penurunan Penggunaan Energi Tak terbarukan	Peningkatan subsidi energi masyarakat berpenghasilan rendah/MBR (PLTS Atap)	Penurunan penggunaan energi tak terbarukan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100 Rumah tangga	14648 SBM	3,000,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penurunan Penggunaan Energi Tak terbarukan	100%	3,000,000,000
3	29	05	1.04	06	Bimbingan Teknis Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Penurunan Penggunaan Energi Tak terbarukan	Jumlah Bimbingan Teknis konservasi Energi	Penurunan penggunaan energi tak terbarukan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Kali	14648 SBM	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penurunan Penggunaan Energi Tak terbarukan	100%	200,000,000
3	29	05	1.04	07	Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Penurunan Penggunaan Energi Tak terbarukan	Frekuensi pembinaan dan pengawasan konservasi pada bangunan gedung pemerintah berbasis teknologi (IOT)	Penurunan penggunaan energi tak terbarukan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Kali	14648 SBM	1,000,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penurunan Penggunaan Energi Tak terbarukan	100%	1,000,000,000
3	**29**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN**								**5,625,094,490**					**5,235,094,490**
3	**29**	**06**	**1.01**		**Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi**								**355,000,000**					**375,000,000**
3	29	06	1.01	01	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	persentase rumah tangga berlistrik yang berkeselamatan	Jumlah dokumen prosedur dan persyaratan IUPTL Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga listrik serta Penyewaan jaringan kepada penyedia tenaga listrik	Tertatanya izin usaha penyediaan tenaga listrik non badan usaha milik negara dan penjualan tenaga listrik serta penyewaan jaringan kepada penyedia tenaga listrik dalam daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	1 Dokumen	100 persen	75,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase rumah tangga berlistrik yang berkeselamatan	100	75,000,000
3	29	06	1.01	02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	persentase rumah tangga berlistrik yang berkeselamatan	Jumlah dokumen rekomendasi perizinan IUPTL Non badan usaha milik negara dan penjualan tenaga listrik serta penyewaan jariangan kepada penyedia tenaga listrik	Tertatanya izin usaha penyediaan tenaga listrik non badan usaha milik negara dan penjualan tenaga listrik serta penyewaan jaringan kepada penyedia tenaga listrik dalam daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	1 Dokumen	100 persen	80,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase rumah tangga berlistrik yang berkeselamatan	100	100,000,000
3	29	06	1.01	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia	persentase rumah tangga berlistrik yang berkeselamatan	Jumlah pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik (IUPTL) non BUMN yang dilakukan pembinaan dan pengawasan keselamatan ketenagalistrikan (K2)	Tertatanya izin usaha penyediaan tenaga listrik non badan usaha milik negara dan penjualan tenaga listrik serta penyewaan jaringan kepada	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	1 Izin	100 persen	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase rumah tangga berlistrik yang berkeselamatan	100	200,000,000
							Jumlah pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik(IUPTL) Non BUMN yang taat peraturan				1 izin							

					Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi		Jumlah Penyusunan Pedoman Teknis dan laporan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan usaha penyediaan tenaga listrik	penyedia tenaga listrik dalam daerah			1 izin								
3	**29**	**06**	**1.02**		**Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi**								**740,469,490**						**760,469,490**
3	29	06	1.02	01	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	persentase rumah tangga berlistrik yang berkeselamatan	Jumlah Dokumen Prosedur dan persyaratan izin operasi	Tertatanya usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri yang memenuhi Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	1 Dokumen	100 persen	75,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase rumah tangga berlistrik yang berkeselamatan	100	75,000,000
3	29	06	1.02	02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	persentase rumah tangga berlistrik yang berkeselamatan	Jumlah dokumen rekomendasi perizinan perizinan izin operasi	Tertatanya usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri yang memenuhi Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	1 Laporan	100 persen	245,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase rumah tangga berlistrik yang berkeselamatan	100	265,000,000
3	29	06	1.02	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	persentase rumah tangga berlistrik yang berkeselamatan	Jumlah pemegang izin operasi yang dilakukan pembinaan dan pengawasan K2 Jumlah pemegang izin operasi yang taat peraturan Jumlah peyusunan pedoman teknis dan laporan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan operasi	Tertatanya usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri yang memenuhi Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	25 Badan usaha 40 badan usaha 1 Dokumen	100 persen	420,469,490	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase rumah tangga berlistrik yang berkeselamatan	100	420,469,490
3	**29**	**06**	**1.03**		**Penetapan Tarif Tenaga Listrik untuk Konsumen dan Penatausahaan Izin Pemanfaatan Jaringan untuk Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi**								**150,000,000**						**150,000,000**
3	29	06	1.03	06	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Jaringan untuk Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi	Persentase Rumah Tangga Berlistrik yang berkeselamatan	Jumlah pemegang izin pemanfaatan jaringan untuk telematika yang dilakukan pembinaan dan pengawasan K2 Jumlah pemegang izin pemanfaatan jaringan untuk telematika yang taat peraturan Jumlah penyusunan pedoman teknis dan laporan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan pemanfaatan jaringan untuk telematika	Terlaksananya penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dan tertatanya usaha pemanfaatan jaringan listrik untuk telematika yang memenuhi Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 izin 1 izin 1 Dokumen	100 persen	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Rumah Tangga Berlistrik yang berkeselamatan	100%	150,000,000
3	**29**	**06**	**1.04**		**Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi**								**410,000,000**						**420,000,000**
3	29	06	1.04	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi	Persentase Rumah Tangga Berlistrik yang berkeselamatan	Jumlah data dan informasi harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik,rencana usaha penyediaan tenaga listrik ,penjualan kelebihan tenaga listrik dan pemegang izin yang ditetapkan oleh daerah	Terlaksananya persetujuan harga jual tenaga listrik, sewa jaringan tenaga listrik, rencana usaha penyediaan tenaga listrik, penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin yang ditetapkan daerah dan Rencana Aksi RUKD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Dokumen	100 persen	135,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Rumah Tangga Berlistrik yang berkeselamatan	100%	140,000,000

3	29	06	1.04	02	Penentuan dan Penetapan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi	Persentase Rumah Tangga Berlistrik yang berkeselamatan	Jumlah penentuan dan penetapan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, rencana usaha penyediaan tenaga listrik,penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin yang ditetapkan oleh daerah	Terlaksananya persetujuan harga jual tenaga listrik, sewa jaringan tenaga listrik, rencana usaha penyediaan tenaga listrik, penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin yang ditetapkan daerah dan Rencana Aksi RUKD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Laporan	100 persen	125,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Rumah Tangga Berlistrik yang berkeselamatan	100%	130,000,000
3	29	06	1.04	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi	Persentase Rumah Tangga Berlistrik yang berkeselamatan	Jumlah kegiatan pengedalian dan pengawasan harga jual dan sewa jaringan tenaga listrik	Terlaksananya persetujuan harga jual tenaga listrik, sewa jaringan tenaga listrik, rencana usaha penyediaan tenaga listrik, penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin yang ditetapkan daerah dan Rencana Aksi RUKD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 kegiatan	100 persen	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Rumah Tangga Berlistrik yang berkeselamatan	100%	150,000,000
							Jumlah kegiatan pengendalian dan pengawasan penjualan kelebihan tenaga listrik				1 kegiatan							
							Jumlah kegiatan pengendalian dan pengawasan rencana usaha penyediaan tenaga listrik				1 Kegiatan							
3	**29**	**06**	**1.05**		**Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri**								**619,625,000**					**679,625,000**
3	29	06	1.05	01	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Persentase Rumah Tangga Berlistrik yang berkeselamatan	Jumlah dokumen prosedur dan persyaratan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik	Tertatanya usaha jasa penunjang tenaga listrik yang memenuhi Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) sesuai kewenangan Gubernur	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Dokumen	100 persen	75,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Rumah Tangga Berlistrik yang berkeselamatan	100%	75,000,000
3	29	06	1.05	02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Persentase Rumah Tangga Berlistrik yang berkeselamatan	Jumlah dokumen Rekomendasi perizinan dan informasi izin usaha jasa penunjang tenaga listrik	Tertatanya usaha jasa penunjang tenaga listrik yang memenuhi Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) sesuai kewenangan Gubernur	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Laporan	100 persen	155,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Rumah Tangga Berlistrik yang berkeselamatan	100%	165,000,000
3	29	06	1.05	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Persentase Rumah Tangga Berlistrik yang berkeselamatan	Jumlah kegiatan uji laik operasi instalasi tenaga listrik yang diawasi	Tertatanya usaha jasa penunjang tenaga listrik yang memenuhi Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) sesuai kewenangan Gubernur	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	25 Kegiatan	100 persen	389,625,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Rumah Tangga Berlistrik yang berkeselamatan	100%	439,625,000
							Jumlah pemegang izin usaha jasa penunjang tenaga listrik yang taat peraturan				5 badan usaha							
							Jumlah penyusunan pedoman teknis dan laporan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan usaha jasa penunjung tenaga listrik				1 Dokumen							
							Jumlah tenaga teknik ketenagalistrikan di lingkungan pemerintah provinsi jambi yang bersertifikat kompetensi				15 Orang							
3	**29**	**06**	**1.06**		**Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan**								**3,350,000,000**					**2,850,000,000**

3	29	06	1.06	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Persentase Rumah Tangga Berlistrik yang berkeselamatan	Jumlah dokumen hasil survey dan verifikasi data rumah tangga tidak mampu	Terlaksananya penganggaran untuk kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan pedesaan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Dokumen	100 persen	300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Rumah Tangga Berlistrik yang berkeselamatan	100%	300,000,000
3	29	06	1.06	02	Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Persentase Rumah Tangga Berlistrik yang berkeselamatan	Jumlah surat keputusan penetapan calon penerimaan manfaat sambungan listrik rumah tangga tidak mampu	Terlaksananya penganggaran untuk kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan pedesaan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 SK Gubernur	100 persen	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Rumah Tangga Berlistrik yang berkeselamatan	100%	50,000,000
3	29	06	1.06	03	Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Persentase Rumah Tangga Berlistrik yang berkeselamatan	Jumlah pengawasan penerimaan manfaat bantuan listrik untuk Rumah Tangga Tidak mampu	Terlaksananya penganggaran untuk kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan pedesaan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	200 Rumah Tangga Miskin	100 persen	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Rumah Tangga Berlistrik yang berkeselamatan	100%	150,000,000
3	29	06	1.06	04	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Persentase Rumah Tangga Berlistrik yang berkeselamatan	Jumlah dokumen hasil survey desa belum berlistrik Penyusunan RUKD Provinsi jambi	Terlaksananya penganggaran untuk kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Dokumen 1 Peraturan Gubernur	100 persen	800,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Rumah Tangga Berlistrik yang berkeselamatan	100%	300,000,000
3	29	06	1.06	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Persentase Rumah Tangga Berlistrik yang berkeselamatan	Jumlah laporan kebutuhan proyeksi tenaga listrik	Terlaksananya penganggaran untuk kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan pedesaan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	3 Laporan	100 persen	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Rumah Tangga Berlistrik yang berkeselamatan	100%	100,000,000
3	29	06	1.06	06	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Persentase Rumah Tangga Berlistrik yang berkeselamatan	jumlah pengadaan LTSHE Jumlah rumah tangga tidak mampu yang tersambung listrik	Terlaksananya penganggaran untuk kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	120 Unit 200 Rumah tangga miskin	100 persen	1,800,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Rumah Tangga Berlistrik yang berkeselamatan	100%	1,800,000,000
3	29	06	1.06	07	Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Persentase Rumah Tangga Berlistrik yang berkeselamatan	Jumlah pengawasan pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik	Terlaksananya penganggaran untuk kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan pedesaan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	120 Unit	100 persen	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Rumah Tangga Berlistrik yang berkeselamatan	100%	150,000,000
												TOTAL	**85,564,957,781**					**71,798,992,110**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Jambi
Tahun 2022

Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**													
3	**30**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**								**6,139,327,569**					**6,749,793,167**
3	**30**	**02**			**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**								**875,300,000**					**900,000,000**
3	**30**	**02**	**1.01**		**Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor**								**200,000,000**					**170,000,000**
3	30	02	1.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Rekomendasi SIUP-MB Bagi Distributor melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		jumlah dokumen SIUP MB Toko bebas jumlah sosialisasi kebijakan permendag tentang SIUP MB		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 Dokumen 1 kali		200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				170,000,000
3	**30**	**02**	**1.02**		**Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di**								**440,000,000**					**440,000,000**
3	30	02	1.02	01	Fasilitasi Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Jumlah perusahaan yang difasilitasi perizinannya melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 Dokumen		120,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				120,000,000
3	30	02	1.02	02	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Jumlah Rekomendasi komitmen SIUP B2 Pengecer Terdaftar melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik jumlah sosialisasi kebijakan permendag tentang SIUP B2		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 Dokumen 1 kali		200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				200,000,000
3	30	02	1.02	03	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Jumlah pemeriksaan sarana Distribusi bahan bebahaya		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6 kali		120,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				120,000,000
3	**30**	**02**	**1.03**		**Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar**								**44,500,000**					**49,000,000**
3	30	02	1.03	02	Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya		Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 gudang		44,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				49,000,000
3	**30**	**02**	**1.04**		**Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)**								**190,800,000**					**241,000,000**
3	30	02	1.04	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA		Jumlah Kesepakatan forum koordinasi Ekspor Jumlah perusahaan yang diberikan pelayanan SKA Jumlah Peserta Forum Koordinasi Ekspor		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 dokumen 100 perusahaan 100 orang		180,000,000					216,000,000
3	30	02	1.04	02	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan API melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Jumlah fasilitas penertiban API		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 kali		10,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				25,000,000
3	**30**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**								**34,472,900**					**37,920,190**
3	**30**	**03**	**1.01**		**Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas**								**34,472,900**					**37,920,190**
3	30	03	1.01	03	Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas		Jumlah fasilitasi pendampingan pelaksanaan lelang agro Jumlah peserta pelatihan pengawasan verifikator mutu		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 kali 30 orang		34,472,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				37,920,190

3	**30**	**04**			**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**								**1,288,500,000**					**1,301,100,000**
3	**30**	**04**	**1.01**		**Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi**								**280,000,000**					**280,000,000**
3	30	04	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor		Jumlah peserta pelatihan pengawasan verifikator mutu Jumlah sosialisasi pelaku usaha terhadap ketersediaan barang pokok di tingkat Distributor dan sub distributor		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		11 Kab/Kota 100 orang		150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				150,000,000
3	30	04	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor		Jumlah pemantauan ketersediaan barang penting ditingkat distributor dan sub distributor Jumlah sosialisasi pelaku usaha terhadap ketersediaan barang penting di tingkat Distributor dan sub distributor		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6 kali 50 orang		130,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				130,000,000
3	**30**	**04**	**1.02**		**Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi**								**780,000,000**					**780,000,000**
3	30	04	1.02	01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota				Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
3	30	04	1.02	02	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1		jumlah operasi pasar jumlah pendistribusian semako pasar murah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		11 kali 11000 paket		780,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				780,000,000
3	**30**	**04**	**1.03**		**Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya**								**228,500,000**					**241,100,000**
3	30	04	1.03	01	Pemeriksaan Dokumen Perizinan Kegiatan Distribusi		jumlah izin perdagangan pupuk dan pestisida yang disupervisi		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6 perusahaan		82,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				90,200,000
3	30	04	1.03	03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi		jumalh pengawasan,penyaluran,dan penggunaan pupuk bersubsidi		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		11 kali		100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				100,000,000
3	30	04	1.03	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida		jumlah distributor yang diawasi		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 distributor		46,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				50,900,000
3	**30**	**05**			**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**								**1,070,000,000**					**1,284,000,000**
3	**30**	**05**	**1.01**		**Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi**								**1,070,000,000**					**1,284,000,000**
3	30	05	1.01	01	Pameran Dagang Internasional/Nasional		jumlah pameran dagang yang diikuti jumlah produk ekspor/IKM yang mengikuti pameran dagang		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 kali 6 produk		500,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				600,000,000
3	30	05	1.01	02	Pameran Dagang Lokal		jumlah pameran dagang dalam provinsi jumlah produk ekspor/IKM yang mengikuti pameran dagang lokal		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 kali 3 produk		180,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				216,000,000
3	30	05	1.01	03	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan		jumlah MOU misi dagang		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0 0		0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
3	30	05	1.01	04	Peningkatan Citra Produk Ekspor		jumlah kegiatan peningkatan citra produk ekspor		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 kegiatan		180,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				216,000,000
3	30	05	1.01	05	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor		jumlah pelaku usaha ekspor jumlah pelatihan ekspor		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 orang 2 kali		210,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				252,000,000

3	**30**	**06**			**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**								**2,406,964,456**						**2,512,124,508**
3	**30**	**06**	**1.01**		**Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota**								**831,000,000**						**847,084,990**
3	30	06	1.01	01	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen		jumlah BPSK yang dibentuk jumlah sosialisasi kebijakan perlindungan konsumen		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 BPSK 3 kali		356,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					336,000,000
3	30	06	1.01	02	Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen		jumlah kesepakatan dengan lembaga perlindungan konsumen		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 kali		100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					110,000,000
3	30	06	1.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen		jumlah fasilitasi penyelesaian sengketa konsumen		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		40 sidang		375,000,000						401,084,990
3	**30**	**06**	**1.02**		**Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota**								**1,318,105,756**						**1,381,394,948**
3	30	06	1.02	01	Verifikasi Mutu Produk		jumlah verifikasi mutu produk		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		44 produk		136,791,368	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					157,310,074
3	30	06	1.02	02	Pengembangan Layanan Pengujian		jumlah jasa layanan pengujian		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2509 parameter		753,609,528	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					753,609,528
3	30	06	1.02	03	Pengembangan Layanan Sertifikasi		jumlah bimbingan atau pendampingan pembentukan lembaga sertifikasi produk(LSPro)		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 tahapan		107,337,780	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					118,071,558
3	30	06	1.02	04	Pengembangan Layanan Kalibrasi		jumlah alat standar lab.kalibrasi yang terkalibrasi jumlah jasa pelayanan kalibrasi alat jumlah sosialiasi lab.kalibrasi UPTD BPSMB		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		15 jenis 509 alat 11 kab/kota		320,367,080	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					352,403,788
3	**30**	**06**	**1.03**		**Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota**								**257,858,700**						**283,644,570**
3	30	06	1.03	01	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen		jumlah barang dan jasa yang diawasi jumlah sample produk yang diuji		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		9 produk 9 sampel		257,858,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					283,644,570
3	**30**	**07**			**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**								**464,090,213**						**714,648,469**
3	**30**	**07**	**1.01**		**Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri**								**320,590,213**						**556,798,469**
3	30	07	1.01	01	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi		jumlah misi dagang dan temu usaha UMKM dalam negeri jumlah pameran dalam negeri yang diikuti jumlah partisipasi pawai kendaraan hias jumlah pelaku usaha yang difasilitasi mengikuti pameran jumlah peserta sosialisasi penggunaan produk dalam negeri		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		9 orang 2 kali 1 kali 6 oran 100 orang		320,590,213	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					556,798,469
3	**30**	**07**	**1.02**		**Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri**								**85,000,000**						**93,500,000**
3	30	07	1.02	01	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi		jumlah dokumen MOU jumlah kunjungan ke perusahaan jumlah temu usaha kemitraan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10 MOU 5 perusahaan 1 kali		85,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					93,500,000
3	**30**	**07**	**1.03**		**Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**								**58,500,000**						**64,350,000**
3	30	07	1.03	03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan		jumlah dokumen produk ungulan daerah jumlah kab/kota yang dikunjungi		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 dokumen 11 kab/kota		58,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					64,350,000
3	**31**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**								**26,743,150,336**						**27,541,115,823**
3	**31**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**19,136,974,226**						**19,644,322,102**
3	**31**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**265,000,000**						**291,500,000**
3	31	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6 dokumen		210,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					231,000,000

3	31	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		jumlah dokumen kinerja perangkat daerah periode evaluasi kinerja perangkat daerah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 dokumen 12 bulan		55,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				60,500,000
3	**31**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**15,493,771,402**					**15,897,164,495**
3	31	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		periode penyediaan gaji dan tunjangan ASN		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		14 bulan		15,279,787,302	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				15,661,781,985
3	31	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		periode penyediaan jasa administrasi keuangan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 bulan		165,187,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				181,705,700
3	31	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		jumlah laporan keuangan dan bulanan/semesteran		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 dokumen		48,797,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				53,676,810
3	**31**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**30,000,000**					**35,000,000**
3	31	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		jumlah laporan barang milik daerah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 dokumen		30,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				35,000,000
3	**31**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**269,642,700**					**292,381,850**
3	31	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		jumlah pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		165 stell		107,250,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				113,750,000
3	31	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian		jumlah laporan kepegawaian		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 dokumen		50,259,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				55,285,750
3	31	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		jumlah kursus,pelatihan,sosialisasi, dan bimbingan teknis yang diikuti		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		30 orang/kali		112,132,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				123,346,100
3	**31**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**1,007,265,650**					**1,090,866,150**
3	31	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		jumlah komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		20 jenis		57,480,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				66,103,000
3	31	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		periode penyediaan alat tugas kantor		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 bulan		126,863,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				139,549,800
3	31	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		jumlah barang cetakan dan penggandaan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 item		55,588,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				61,147,100
3	31	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		jumlah bahan bacaan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		60 eksemplar		13,322,950	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				14,655,250
3	31	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		jumlah peserta rapat jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah yang diikuti		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		580 orang 168 orang/kali		554,010,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				609,411,000
3	31	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		jumlah sistem pemerintahan berbasis elektronik yang didukung periode penyampaian informasi melalui website dan sosial media		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 aplikasi 12 bulan		200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				200,000,000
3	**31**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**563,425,000**					**160,000,000**
3	31	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		jumlah kendaraan dinas perorangan atau kendaraan dinas jabatan roda 4/2		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 unit		435,300,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
3	31	01	1.07	05	Pengadaan Mebel		jumlah mebel		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 unit		7,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5,000,000
3	31	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		jumlah pengadaan peralatan gedung kantor		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 item		20,625,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				55,000,000
3	31	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		jumlah pengadaan rehab sarana dan prasarana gedung kantor		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 paket		100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				100,000,000
3	**31**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**557,081,200**					**612,788,000**
3	31	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		jumlah surat keluar pertahun		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3500 surat		80,968,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				89,065,000
3	31	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		periode pembayaran rekening listrik,telepon danPDAM		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 bulan		348,097,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				382,906,000
3	31	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		periode pemakaian jasa kebersihan kantor		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 bulan		128,016,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				140,817,000
3	**31**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**950,788,274**					**1,264,621,607**

3	31	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		jumlah pemeliharaan kendaraan/operasional roda 4 dan roda 2		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		25 unit		348,187,560	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				348,187,560
3	31	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		jumlah pemeliharaan kendaraan/operasional roda 4 dan roda 2		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 unit		69,637,510	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				69,637,510
3	31	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel		jumlah pemeliharaan mebel		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 unit		25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				25,000,000
3	31	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		jumlah pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		20 unit		100,463,204	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				100,463,204
3	31	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 paket		281,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				468,333,333
3	31	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 paket		126,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				253,000,000
3	**31**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**								**6,706,176,110**					**7,036,793,721**
3	**31**	**02**	**1.01**		**Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi**								**6,706,176,110**					**7,036,793,721**
3	31	02	1.01	01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi		jumlah revisi RPIP		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 dokumen		400,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				150,000,000
3	31	02	1.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri		jumlah pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 kali		250,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				275,000,000
3	31	02	1.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		jumlah pelaku usaha yang dilatih		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		20 orang		700,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				720,000,000
							jumlah pelatihan/bantuan alat bagi industri menengah besar				3 pelatihan							
3	31	02	1.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		jumlah pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 kali		250,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				275,000,000
3	31	02	1.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		jumlah bantuan mesin/peralatan bagi IKM		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 paket		4,906,176,110	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5,396,793,721
							jumlah bimbingan teknis pengolahan limbah industri				3 kali							
							jumlah IKM yang diasilitasi mengikuti pameran				15 IKM							
							jumlah lomba kegiatan pengembangan desain berbasis budaya				1 kali							
							jumlah promosi IKM yang diikuti				6 kali							
							jumlah rapat koordinasi dewan kerajinan nasional daerah				1 kali							
							jumlah studi tiru kegiatan pengembangan desain berbasis budaya daerah				2 kali							
							periode fasilitasi pengembangan unit promosi				12 bulan							
3	31	02	1.01	06	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri		jumlah evaluasi RPIK yang dilaksanakan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		11 kab/kota		200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				220,000,000
							jumlah laporan evaluasi				11 laporan							

3	**31**	**03**			**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**								**250,000,000**						**270,000,000**
3	**31**	**03**	**1.01**		**Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi**								**250,000,000**						**270,000,000**
3	31	03	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi		jumlah perusahaan yang diawasi jumlah rekomendasi teknis yang diterbitkan/dikeluarkan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		30 perusahaan 2 rekomendasi		250,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					270,000,000
3	**31**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**								**650,000,000**						**590,000,000**
3	**31**	**04**	**1.01**		**Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)**								**650,000,000**						**590,000,000**
3	31	04	1.01	01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		jumlah dokumen hasil pendataan IKM		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 dokumen		275,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					300,000,000
3	31	04	1.01	02	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas		jumlah diseminasi dan publikasi		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 kali		125,000,000						15,000,000
3	31	04	1.01	03	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas		jumlah pemantauan kepatuhan perusahaan industri		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 kali		250,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					275,000,000
												TOTAL	**32,882,477,905**						**34,290,908,990**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Jambi
Tahun 2022

Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.01.0001 UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**													
3	**30**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**								**1,318,105,756**					**1,381,394,948**
3	**30**	**06**			**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**								**1,318,105,756**					**1,381,394,948**
3	**30**	**06**	**1.02**		**Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota**								**1,318,105,756**					**1,381,394,948**
3	30	06	1.02	01	Verifikasi Mutu Produk								136,791,368	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				157,310,074
3	30	06	1.02	02	Pengembangan Layanan Pengujian								753,609,528					753,609,528
3	30	06	1.02	03	Pengembangan Layanan Sertifikasi								107,337,780					118,071,558
3	30	06	1.02	04	Pengembangan Layanan Kalibrasi								320,367,080					352,403,788
3	**31**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**								**861,500,000**					**903,700,000**
3	**31**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**861,500,000**					**903,700,000**
3	**31**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**156,000,000**					**170,000,000**
3	31	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								156,000,000					170,000,000
3	**31**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**126,000,000**					**130,000,000**
3	31	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								126,000,000					130,000,000
3	**31**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**100,000,000**					**105,000,000**
3	31	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								5,000,000					5,000,000
3	31	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								30,000,000					30,000,000
3	31	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								5,000,000					5,000,000
3	31	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								5,000,000					5,000,000
3	31	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								55,000,000					60,000,000
3	**31**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**6,000,000**					**20,000,000**
3	31	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								6,000,000					20,000,000
3	**31**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**123,500,000**					**128,700,000**
3	31	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								3,500,000					3,700,000
3	31	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								70,000,000					75,000,000
3	31	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								50,000,000					50,000,000
3	**31**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**350,000,000**					**350,000,000**
3	31	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								25,000,000					25,000,000
3	31	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								25,000,000					25,000,000
3	31	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								50,000,000					50,000,000
3	31	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								250,000,000					250,000,000
												TOTAL	**2,179,605,756**					**2,285,094,948**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Jambi
Tahun 2022

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0001 Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
										Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
4	01				SEKRETARIAT DAERAH								2,344,993,100					2,579,492,410
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								258,224,403					284,046,843
4	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**258,224,403**					**284,046,843**
4	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP	jumlah jenis alat kantor yang tersedia	jumlah bulan terlaksananya pelayanan internal perangkat daerah		70 persen	100 Persen	12 bulan	94,503,449	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	80 persen	103,953,794
4	01	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai SAKIP	jumlah jenis penyediaan peralatan rumah tangga	jumlah bulan terlaksananya pelayanan internal perangkat daerah		70 persen	12 bulan	12 bulan	8,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	80 persen	9,350,000
4	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP	jumlah peserta rapat tamu dan lain lain	jumlah bulan terlaksananya pelayanan internal perangkat daerah		70 persen	100 orang	12 bulan	5,900,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	80 persen	6,490,000
4	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai SAKIP	jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	jumlah bulan terlaksananya pelayanan internal perangkat daerah		70 persen	100 Persen	12 bulan	43,163,254	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	80 persen	47,479,579
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	jumlah bulan terlaksananya pelayanan internal perangkat daerah		70 persen	100 Persen	12 bulan	106,157,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	80 persen	116,773,470
4	01	03			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH								2,086,768,697					2,295,445,567
4	**01**	**03**	**1.01**		**Pelaksanaan Tugas Pemerintahan**								**968,414,669**					**1,065,256,136**
4	01	03	1.01	01	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) >2,900	Laporan kebijakan teknis adm. Pertanahan	Persentase penyelesaian batas antar Kabupaten/ Kota dalam Provinsi Jambi		>2,600 nilai	1 laporan	14 permendagri	412,343,341	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) >2,900	>2,700 nilai	453,577,675
4	01	03	1.01	02	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) >2,900	Laporan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Kabupaten/Kota dalam Penerapan SPM	Persentase penyelesaian batas antar Kabupaten/ Kota dalam Provinsi Jambi		>2,600 nilai	1 laporan	14 permendagri	170,152,767	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) >2,900	>2,700 nilai	187,168,044
4	01	03	1.01	03	Fasilitasi Penataan Wilayah	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) >2,900	Persentase penyelesaian batas antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi	Persentase penyelesaian batas antar Kabupaten/ Kota dalam Provinsi Jambi		>2,600 nilai	13 Permendagri	14 permendagri	385,918,561	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) >2,900	>2,700 nilai	424,510,417
4	**01**	**03**	**1.02**		**Pelaksanaan Otonomi Daerah**								**788,359,473**					**867,195,420**
4	01	03	1.02	01	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) >2,900	Pelayanan administrasi pemerintahan KDH/ WKDH, DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota			>2,600 nilai	100 Persen		218,846,001	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) >2,900	>2,700 nilai	240,730,601
4	01	03	1.02	02	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) >2,900	Laporan koordinasi pengembangan otda dan penataan urusan			>2,600 nilai	1 laporan		238,444,558	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) >2,900	>2,700 nilai	262,289,014
4	01	03	1.02	03	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) >2,900	Nilai LPPD Provinsi Jambi > 2,900			>2,600 nilai	1 laporan		331,068,914	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) >2,900	>2,700 nilai	364,175,805

4	**01**	**03**	**1.03**		**Fasilitasi Kerjasama Daerah**								**329,994,555**					**362,994,011**
4	01	03	1.03	01	Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) >2,900	Jumlah bahan perumusan kebijakan untuk forum-forum kerjasama yang difasilitasi, tersusunnya data potensi daerah dalam rangka kerjasama luar negeri skala provinsi, jumlah izin asn pemerintah provinsi dan kepala daerah/ wakil serta pimpinan dan anggota DPRD ke luar negeri yang difasilitasi	Meningkatnya kerjasama lintas sektoral dengan Provinsi Jambi		>2,600 nilai	5 naskah	100 persen	153,999,835	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) >2,900	>2,700 nilai	169,399,819
4	01	03	1.03	02	Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) >2,900	jumlah bahan perumusan kebijakan untuk forum forum kerjasama dengan badan usaha yang difasilitasi	Meningkatnya kerjasama lintas sektoral dengan Provinsi Jambi		>2,600 nilai	9 kali	100 persen	88,005,280	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) >2,900	>2,700 nilai	96,805,808
4	01	03	1.03	03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) >2,900	jumlah dokumen evaluasi, pemantauan dan pelaporan pelaksanaan kerjasama antar pemerintah, badan usaha dan swasta	Meningkatnya kerjasama lintas sektoral dengan Provinsi Jambi		>2,600 nilai	3 laporan	100 persen	87,989,440	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) >2,900	>2,700 nilai	96,788,384
TOTAL													**2,344,993,100**					**2,579,492,410**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Jambi
Tahun 2022

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0002 Biro Kesejahteraan Rakyat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
4	01				SEKRETARIAT DAERAH								65,321,341,145					68,683,314,968
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								593,479,998					652,827,998
4	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**571,132,368**					**628,245,605**
4	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran		BB indeks	40 Jenis	100 Persen	65,590,873	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	BB indeks	72,149,960
4	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP	Jumlah Peserta Rapat	Persentase Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran		BB indeks	480 Peserta	100 Persen	33,264,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	BB indeks	36,590,400
4	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai SAKIP	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran		BB indeks	4 Jenis	100 Persen	55,542,575	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	BB indeks	61,096,833
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke Kementerian/Lembaga Terkait	Persentase Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran		BB indeks	4 Kementerian/ Lembaga	100 Persen	416,734,920	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	BB indeks	458,408,412
							Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan ke kabupaten/kota				11 Kab/kota							
							Jumlah Rakor				2 Kali							
4	**01**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**22,347,630**					**24,582,393**
4	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP	Jumlah Surat	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran		BB indeks	822 Surat	100 Persen	22,347,630	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	BB indeks	24,582,393
4	01	04			PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT								64,727,861,147					68,030,486,970
4	**01**	**04**	**1.01**		**Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual**								**61,581,803,375**					**64,569,823,421**
4	01	04	1.01	01	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Persentase rekomendasi kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke Kementerian/Lembaga Terkait	Jumlah Rekomendasi		100 persen	5 Kementerian/ Lembaga	11 Rekomendasi	35,639,783,554	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase rekomendasi kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan	100 persen	36,033,601,618
							Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan ke kabupaten/kota				11 Kab/Kota							
							Jumlah Rapat Koordinasi				2 Kali							
4	01	04	1.01	02	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Persentase rekomendasi kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke Kementerian/Lembaga Terkait	Jumlah Rekomendasi		100 persen	5 Kementerian/ Lembaga	11 Rekomendasi	25,942,019,821	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase rekomendasi kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan	100 persen	28,536,221,803
							Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan ke kabupaten/kota				11 Kab/Kota							
							Jumlah Rapat Koordinasi				3 kali							
4	**01**	**04**	**1.02**		**Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar**								**2,168,525,766**					**2,385,378,342**
4	01	04	1.02	01	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Persentase rekomendasi kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan	Jumlah konsultasi ke Kementerian/Lembaga terkait	Jumlah Rekomendasi		100 persen	4 Kementerian/ Lembaga	13 Rekomendasi	273,063,054	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase rekomendasi kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan	100 persen	300,369,359
							Jumlah monitoring, evaluasi dan pembinaan bidang pendidikan di kabupaten/kota				11 kab/kota							
							Jumlah rapat koordinasi bidang pendidikan				1 Kali							

4	01	04	1.02	02	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Persentase rekomendasi kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan	Jumlah koordinasi/konsultasi ke kementerian/lembaga terkait	Jumlah Rekomendasi		100 persen	5 Kementerian/lembaga	13 Rekomendasi	615,979,430	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase rekomendasi kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan	100 persen	677,577,373
							Jumlah monitoring, evaluasi dan pembinaan bidang kesehatan di kabupaten/kota				11 kab/kota							
							Jumlah rapat koordinasi bidang kesehatan				4 Kali							
4	01	04	1.02	03	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Persentase rekomendasi kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke Kementerian/Lembaga Terkait	Jumlah Rekomendasi		100 persen	5 Kementerian/ Lembaga	13 Rekomendasi	1,279,483,282	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase rekomendasi kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan	100 persen	1,407,431,610
							Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan bidang sosial ke kabupaten/kota				11 Kab/Kota							
							Jumlah rapat koordinasi bidang sosial				4 Kali							
4	**01**	**04**	**1.03**		**Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar**								**977,532,006**					**1,075,285,207**
4	01	04	1.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Persentase rekomendasi kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke Kementerian/Lembaga Terkait	Jumlah Rekomendasi		100 persen	5 Kementerian/ Lembaga	11 Rekomendasi	212,188,416	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase rekomendasi kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan	100 persen	233,407,258
							Jumlah Monitoring Evaluasi dan Pembinaan Bidang Kesra terkait Non Pelayanan Dasar I				11 Kab/Kota							
							Jumlah Olahraga Bersama				4 Kali							
							Jumlah Rapat Koordinasi Bidang Kesra terkait Non Pelayanan Dasar I				1 kali							
4	01	04	1.03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Persentase rekomendasi kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke Kementerian/Lembaga Terkait	Jumlah Rekomendasi		100 persen	6 Kementerian/ Lembaga	11 Rekomendasi	611,329,884	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase rekomendasi kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan	100 persen	672,462,872
							Jumlah Monitoring Evaluasi dan Pembinaan Bidang Kesra terkait Non Pelayanan Dasar II				11 Kab/Kota							
							Jumlah Rapat Koordinasi Bidang Kesra terkait Non Pelayanan Dasar II				4 Kali							
4	01	04	1.03	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Persentase rekomendasi kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke Kementerian/Lembaga Terkait	Jumlah Rekomendasi		100 persen	5 Kementerian/ Lembaga	11 Rekomendasi	154,013,706	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase rekomendasi kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan	100 persen	169,415,077
							Jumlah Monitoring Evaluasi dan Pembinaan Bidang Kesra terkait Non Pelayanan Dasar III				11 Kab/kota							
							Jumlah Rapat Koordinasi Bidang Kesra terkait Non Pelayanan Dasar III				1 Kali							
TOTAL													**65,321,341,145**					**68,683,314,968**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Jambi
Tahun 2022

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0003 Biro Perekonomian

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
4	01				SEKRETARIAT DAERAH								1,829,729,570					72,100,000
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								460,308,730					72,100,000
4	**01**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**79,482,250**					**72,100,000**
4	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP		laporan		70 persen		30 dokumen	52,403,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP	80 persen	72,100,000
4	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai SAKIP	jumlah laporan capaian kinerja dan iktisar	laporan		70 persen	10 dokumen	30 dokumen	19,150,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP	80 persen	0
4	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	evaluasi kinerja perangkat daerah	laporan		70 persen	10 dokumen	30 dokumen	7,929,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP	80 persen	0
4	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**322,783,740**					**0**
4	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan				100			38,030,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	0
4	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan				100			58,042,740	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	0
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi			100	75 dokumen		226,711,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	0
4	**01**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**58,042,740**					**0**
4	01	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan				100			58,042,740	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	0
4	01	06			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN								1,369,420,840					0
4	**01**	**06**	**1.01**		**Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian**								**273,046,750**					**0**
4	01	06	1.01	01	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro								126,980,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
4	01	06	1.01	02	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro								146,066,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
4	**01**	**06**	**1.02**		**Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam**								**402,933,500**					**0**
4	01	06	1.02	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan								146,066,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
4	01	06	1.02	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup								146,066,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
4	01	06	1.02	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air								110,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0

4	**01**	**06**	**1.03**		**Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD**								**693,440,590**							**0**
4	01	06	1.03	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha								155,840,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						0
4	01	06	1.03	02	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi								426,800,590	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						0
4	01	06	1.03	04	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah		Jumlah laporan/rekomendasi Bidang BLUD				10 dokumen		110,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						0
TOTAL													**1,829,729,570**							**72,100,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Jambi
Tahun 2022

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0004 Biro Administrasi Pembangunan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
4	01				SEKRETARIAT DAERAH								2,311,265,910					2,543,272,485
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								655,599,600					721,159,560
4	**01**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**101,316,116**					**111,447,728**
4	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	jumlah periode pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Tersedianya laporan rencana kerja biro		Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	100	12 bulan 2 laporan		28,083,660	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	30,892,026
4	01	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	periode koordinasi dan penyusunan DPA Tersedianya DPA		Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	100	12 bulan 2 dokumen		11,726,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada	100	12,898,600
4	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	jumlah laporan realisasi capaian kinerja biro		Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	100	12 laporan		27,499,956	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	30,249,952
4	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Jumlah laporan evaluasi renja periode pelaksanaan rapat evaluasi, pemantauan dan pelaporan realisasi capaian kinerja biro		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	4 laporan 12 bulan		34,006,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	37,407,150
4	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**512,243,684**					**563,468,052**
4	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Periode penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor		Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	100	12 bulan 20 jenis		78,089,206	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	85,898,126
4	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Periode penyediaan bahan logistik kantor Tersedianya makanan dan minumam rapat		Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	100	12 bulan 200 kotak		10,873,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	11,960,850
4	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Jumlah / jenis barang cetakan jumlah penggandaan		Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	100	7 jenis 80000 lembar		43,999,879	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	48,399,867
4	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan		Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	100	70 buku		10,781,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	11,859,210
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	60 orang / kali		368,499,999	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	405,349,999
4	**01**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**42,039,800**					**46,243,780**
4	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	jumlah surat yang keluar / masuk		Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	100	1000 surat		9,061,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	9,967,980

4	01	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara		Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	100	30 unit		32,978,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	36,275,800
4	01	08			PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN								1,655,666,310					1,822,112,925
4	**01**	**08**	**1.01**		**Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah**								**1,031,000,000**					**1,134,980,000**
4	01	08	1.01	01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD		Jumlah laporan pengendalian pelaksanaan pembangunan sumber dana APBD		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 dokumen		275,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				302,500,000
							jumlah rekomendasi / rumusan kebijakan yang dihasilkan				5 rekomendasi							
							jumlah rekomendasi / rumusan kebijakan yang ditindaklanjuti				3 rekomendasi							
4	01	08	1.01	02	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN		Jumlah laporan pengendalian pelaksanaan pembangunan sumber dana APBN		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 dokumen		176,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				193,600,000
							jumlah rekomendasi / rumusan kebijakan yang dihasilkan				5 rekomendasi							
							jumlah rekomendasi / rumusan kebijakan yang ditindaklanjuti				3 rekomendasi							
4	01	08	1.01	03	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah		Jumlah laporan pengendalian pelaksanaan pembangunan wilayah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 dokumen		580,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				638,880,000
							jumlah rekomendasi / rumusan kebijakan yang dihasilkan				5 rekomendasi							
							jumlah rekomendasi / rumusan kebijakan yang ditindaklanjuti				3 rekomendasi							
4	**01**	**08**	**1.02**		**Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah**								**624,666,310**					**687,132,925**
4	01	08	1.02	01	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah		Jumlah laporan analisis capaian kinerja pembangunan daerah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 laporan		220,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				242,000,000
							jumlah rekomendasi / rumusan kebijakan yang dihasilkan				5 rekomendasi							
							jumlah rekomendasi / rumusan kebijakan yang ditindaklanjuti				3 rekomendasi							
4	01	08	1.02	02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah		Jumlah dokumen hasil evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 dokumen		208,866,460	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				229,753,106
4	01	08	1.02	03	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah		Jumlah rumusan kebijakan yang difasilitasi		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 rumusan kebijakan		195,799,850	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				215,379,819
TOTAL													**2,311,265,910**					**2,543,272,485**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Jambi
Tahun 2022

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0005 Biro Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
										Target Capaian Kinerja					Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
4	01				SEKRETARIAT DAERAH								111,222,143,747					119,107,113,309
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								111,222,143,747					119,107,113,309
4	**01**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**100,000,000**					**150,000,000**
4	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan				100			50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	75,000,000
4	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan				100			50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	75,000,000
4	**01**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**62,198,236,637**					**65,308,148,470**
4	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan				100			61,946,424,712	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	65,043,745,948
4	01	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan				100			144,893,175	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	152,137,834
4	01	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan				100			36,036,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	37,837,800
4	01	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan				100			70,882,750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	74,426,888
4	**01**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**1,017,492,038**					**1,231,799,056**
4	01	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan				100			64,303,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	70,734,180
4	01	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan				100			125,064,238	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	250,128,476
4	01	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan				100			828,124,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	910,936,400
4	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**8,761,776,345**					**9,717,953,980**

4	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan				100			438,413,008	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	482,254,309
4	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan				100			4,456,895,067	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	4,902,584,573
4	01	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan				100			200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	300,000,000
4	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan				100			842,022,492	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	926,224,742
4	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan				100			446,386,321	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	491,024,953
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan				100			2,309,682,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	2,540,650,310
4	01	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Persentase Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD yang di fasilitasi			100	100 Persen		68,377,357	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	75,215,093
4	**01**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**7,197,815,877**					**7,557,706,671**
4	01	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan				100			7,197,815,877	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	7,557,706,671
4	**01**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**10,294,273,681**					**11,323,701,048**
4	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan				100			74,647,029	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	82,111,731
4	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan				100			4,643,777,543	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	5,108,155,297
4	01	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan				100			1,105,155,134	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	1,215,670,647
4	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan				100			4,470,693,975	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	4,917,763,373
4	**01**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**8,781,173,585**					**9,659,290,943**

4	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan				100			4,133,834,540	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	4,547,217,994
4	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan				100			1,143,843,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	1,258,228,180
4	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan				100			114,774,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	126,251,400
4	01	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan				100			1,219,827,829			persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	1,341,810,612
4	01	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan				100			2,168,893,416	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	2,385,782,757
4	**01**	**01**	**1.11**		**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**								**3,300,648,294**					**3,630,713,123**
4	01	01	1.11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan				100			2,955,211,334	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	3,250,732,467
4	01	01	1.11	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan				100			345,436,960	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	379,980,656
4	**01**	**01**	**1.12**		**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**								**9,570,727,290**					**10,527,800,018**
4	01	01	1.12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan				100			5,940,463,888	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	6,534,510,276
4	01	01	1.12	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan				100			1,404,226,952	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	1,544,649,647
4	01	01	1.12	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan				100			2,226,036,450	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	2,448,640,095
TOTAL													**111,222,143,747**					**119,107,113,309**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Jambi
Tahun 2022

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0006 Biro Administrasi Pimpinan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
4	01				SEKRETARIAT DAERAH								6,159,214,618					8,348,414,816
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								6,159,214,618					8,348,414,816
4	**01**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**446,143,450**					**553,721,000**
4	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Jumlah dokumen perencanaan		Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	100	6 dokumen		183,334,450	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	238,334,000
							Persentase dokumen perangkat daerah yang disusun				100 persen							
4	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja, Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Laporan Evaluasi Kinerja		Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	100	3 dokumen		262,809,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	315,387,000
							Persentase monitoring dan evaluasi kinerja Setda				100 persen							
4	**01**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**555,798,430**					**692,141,459**
4	01	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Jumlah laporan Pendataan Administrasi Kepegawaian Lingkup Setda Provinsi Jambi		Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	100	9 dokumen		256,208,680	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	333,071,284
							Persentase pengolahan data Administrasi Kepegawaian				100 persen							
4	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan dan pendidikan		Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	100	20 orang		299,589,750			persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	359,070,175
4	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**912,817,702**					**1,186,663,013**
4	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang tersedia		Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	100	60 jenis		196,589,083	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	255,565,808
4	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	jumlah barang cetakan dan pengandaan		Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	100	8 jenis		31,328,737	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	40,727,358
4	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Jumlah jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	100	10 media		200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	260,000,000
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan		Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	100	12 kali		484,899,882	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	630,369,847
4	**01**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**38,940,000**					**50,622,000**
4	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara		Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	100	48 unit		38,940,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	50,622,000

4	**01**	**01**	**1.13**		**Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan**								**1,961,957,200**						**2,499,930,590**
4	01	01	1.13	01	Penyiapan Materi Pimpinan	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Jumlah materi rapat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang disiapkan		Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	100	240 dokumen		502,045,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	602,045,900
							Persentase penyusunan dokumentasi dan pelaporan				100 persen							
4	01	01	1.13	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Jumlah dokumen yang berisi maukan kepada Gubernur/Wagub terkait info tertentu		Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	100	12 dokumen		370,080,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	481,104,000
							Jumlah penjelasan kepada pihak-pihak terkaity sesuai dengan kebutuhan Gubernur dan Wagub				12 dokumen							
							Jumlha dokumen kumpulan pidato KDH dan WKDH yang disusun				700 pidato/sambutan							
4	01	01	1.13	03	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Jumlah periode Layanan Dokumentasi terhadap Kepala Daerah		Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	100	12 bulan		1,089,831,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	1,416,780,690
4	**01**	**01**	**1.14**		**Fasilitasi Keprotokolan**								**2,243,557,836**						**3,365,336,754**
4	01	01	1.14	01	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara		Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	100	650 kali		1,701,649,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	2,552,473,800
4	01	01	1.14	02	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	100	200 kali		314,575,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	471,863,250
4	01	01	1.14	03	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Jumlah Koordinasi Hubungan Keprotokolan se-Provinsi Jambi		Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	100	1 kali		227,333,136	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	340,999,704
TOTAL													**6,159,214,618**						**8,348,414,816**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Jambi
Tahun 2022

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0007 Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
4	01				SEKRETARIAT DAERAH								8,086,815,500					9,704,178,600
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								2,928,467,580					3,514,161,096
4	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**2,287,983,230**					**2,745,579,876**
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan				100			2,287,983,230			persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	2,745,579,876
4	**01**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**640,484,350**					**768,581,220**
4	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	penataan administrasi umum			100	12 bulan		640,484,350	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	768,581,220
4	01	07			PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA								5,158,347,920					6,190,017,504
4	**01**	**07**	**1.01**		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**								**3,066,467,920**					**3,679,761,504**
4	01	07	1.01	01	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa		jumlah inventarisasi paket pengadaan yang				300 paket		331,890,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				398,268,000
4	01	07	1.01	02	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa								1,657,920,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,989,504,000
4	01	07	1.01	03	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa		pemantauan dan evaluasi PBJ				12 bulan		1,076,657,920	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,291,989,504
4	**01**	**07**	**1.02**		**Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik**								**1,425,130,000**					**1,710,156,000**
4	01	07	1.02	01	Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik		pengelolaan SPSE				12 bulan		582,710,000					699,252,000
4	01	07	1.02	02	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa								482,710,000					579,252,000
4	01	07	1.02	03	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa								359,710,000					431,652,000
4	**01**	**07**	**1.03**		**Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa**								**666,750,000**					**800,100,000**
4	01	07	1.03	02	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa								309,240,000					371,088,000
4	01	07	1.03	03	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa								357,510,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				429,012,000
TOTAL													**8,086,815,500**					**9,704,178,600**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Jambi
Tahun 2022

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0008 Biro Hukum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
										Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
4	01				SEKRETARIAT DAERAH								2,327,000,000					2,074,500,000
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								417,000,000					449,500,000
4	**01**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**117,000,000**					**117,500,000**
4	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Jumlah dokumen RKA Biro Hukum yang disusun		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	2 dokumen		25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	25,000,000
4	01	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Jumlah dokumen RKA Perubahan Biro Hukum yang disusun		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	2 dokumen		25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	25,000,000
4	01	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Jumlah dokumen DPA Biro Hukum yang disusun		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	2 dokumen		30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	30,000,000
4	01	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Jumlah dokumen DPA Perubahan Biro Hukum yang disusun		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	2 dokumen		30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	30,000,000
4	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Jumlah laporan realisasi capaian dan realisasi kinerja biro hukum		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	5 dokumen		7,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	7,500,000
4	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**290,000,000**					**321,000,000**
4	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Persentase alat tulis kantor yang tersedia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	100 persen		90,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	99,000,000
4	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Persentase barang cetakan dan pengadaan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	100 persen		20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	22,000,000
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Persentase rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	100 persen		180,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	200,000,000
4	**01**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**10,000,000**					**11,000,000**
4	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Jumlah Surat pertahun		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	3000 surat		10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	11,000,000
4	01	05			PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM								1,910,000,000					1,625,000,000
4	**01**	**05**	**1.01**		**Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan**								**1,160,000,000**					**800,000,000**

4	01	05	1.01	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Persentase penyelesaian produk hukum daerah	Jumlah produk hukum pengaturan yang disusun	Persentase produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	10 produk hukum	100 persen	320,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelesaian produk hukum daerah	100 persen	340,000,000
4	01	05	1.01	02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Persentase penyelesaian produk hukum daerah	Jumlah produk hukum penetapan yang ditetapkan	Persentase produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	800 SK	100 persen	180,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelesaian produk hukum daerah	100 persen	190,000,000
4	01	05	1.01	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Persentase penyelesaian produk hukum daerah	Jumlah produk hukum dan naskah hukum yang terdokumentasi	Persentase produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	700 produk hukum	100 persen	260,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelesaian produk hukum daerah	100 persen	270,000,000
4	01	05	1.01	04	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian produk hukum daerah		Persentase produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen		100 persen	400,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelesaian produk hukum daerah	100 persen	0
4	**01**	**05**	**1.02**		**Fasilitasi Bantuan Hukum**								**750,000,000**					**825,000,000**
4	01	05	1.02	01	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum		Jumlah penyelesaian permasalahan hukum litigasi yang difasilitasi		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10 perkara		500,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				550,000,000
4	01	05	1.02	02	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM		Jumlah laporan aksi HAM Provinsi Jambi Jumlah laporan kabupaten/kota peduli HAM Jumlah telaahan permasalahan hukum secara non litigasi yang difasilitasi		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 dokumen 11 laporan 10 telaahan		250,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				275,000,000
TOTAL													**2,327,000,000**					**2,074,500,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Jambi
Tahun 2022

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0009 Biro Organisasi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
										Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
4	01				SEKRETARIAT DAERAH								2,789,000,000					3,000,000,000
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								655,000,000					751,000,000
4	**01**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**160,000,000**					**181,000,000**
4	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Jumlah Dokumen Renja/Renstra tersusun		Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	100	1 dokumen		100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	110,000,000
4	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Jumlah Dokumen RKA Biro tersusun		Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	100	1 dokumen		10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	12,000,000
4	01	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Jumlah Dokumen DPA Biro tersusun		Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	100	1 dokumen		15,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	20,000,000
4	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Jumlah Dokumen LKJ Tersusun		Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	100	2 dokumen		25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	27,000,000
4	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Frekuensi Rapat Internal Evaluasi Kinerja Biro Jumlah Dokumen Evaluasi Biro Tersusun Monitoring dan Evaluasi Kinerja Sub Kegiatan		Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	100	4 kali 1 dokumen 18 Sub Kegiatan		10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	12,000,000
4	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**430,000,000**					**500,000,000**
4	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	sub kegiatan penyediaan dan perelengkapan kantor		Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	100	100%		130,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	140,000,000
4	01	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Persentase peralatan rumah tangga kantor yang disediakan sub kegiatan penyediaan dan Peralatan Rumah Tangga		Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	100	100% 43 Orang		40,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	45,000,000
4	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	sub kegiatan penyediaan barang cetak dan penggandaan		Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	100	100%		60,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	65,000,000
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	100	100%		200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	250,000,000
4	**01**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**65,000,000**					**70,000,000**

4	01	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara dengan baik		Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	100	106 Unit		65,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	70,000,000
4	01	02			PROGRAM PENATAAN ORGANISASI								2,134,000,000					2,249,000,000
4	**01**	**02**	**1.01**		**Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan**								**884,000,000**					**924,000,000**
4	01	02	1.01	01	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi		Jumlah buku gambaran kelembagaan PD Pemprov Jambi		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 buku		354,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				364,000,000
							Jumlah PD Pemprov Jambi yang tertata kelembagaannya				8 Perangkat Daerah							
							Jumlah pelaksanaan rakor penyederhanaan birokrasi				1 kali							
							Jumlah rakor penataan UPTD berdasarkan Permendagri No. 99 Tahun 2018				1 kali							
							Jumlah UPTD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi yang terevaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku				8 UPTD							
4	01	02	1.01	02	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota		Hasil Penilaian dan pemberian penghargaan penataan kelembagaan kab/kota		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 dokumen		280,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				300,000,000
							Jumlah Kab/kota yang dibina				11 Kab/Kota							
							Jumlah Pelaksanaan Rakor kelembagaan daerah kab/kota				1 kali							
							Jumlah Pelaksanaan Workshop kelembagaan UPTD bidang pertanian kab/kota				1 kali							
							Jumlah Pelaksanaan workshop penilaian penghargaan penataan ketembagaan kab/kota				1 kali							
							Jumlah pemberian Penghargaan Penataan Kelembagaan kab/kota				1 kali							
							Persentase Fasilitasi Raperbub/Raperwal/Perbub /Perwali yang dievaluasi				100%							
							Persentase raperda yang dievaluasi				100%							

4	01	02	1.01	03	Penataan Analisis Jabatan		Frekuensi pelaksanaan monev penyusunan Anjab, ABK dan Evjab Pemerintah Kab/Kota		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		11 Kab/Kota		250,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				260,000,000
							Frekwenai Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Anjab, ABK, Evjab dan SKJ				3 kali							
							Indeks Tingkat Efisiensi Unit (EU) dan Prestasi Unit (PU) Pemerintah Provinsi Jambi				1.2 Indeks							
							Jumlah Dokumen Anjab dan ABK Hasil Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jambi				13 dokumen							
							Jumlah dokumen Evjab hasil penataan kelembagaan Perangkat Daerah Pemprov Jambi				1 dokumen							
							Jumlah fasilitasi penyusunan Anjab, ABK dan Evjab hasil penataan kelembagaan PD Pemprov Jambi				13 Perangkat Daerah							
							Jumlah Fasilitasi Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Administrator Pemerintah Provinsi Jambi				241 Jabatan							
4	**01**	**02**	**1.02**		**Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja**								**1,250,000,000**					**1,325,000,000**
4	01	02	1.02	01	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		Frekwensi Pelaksanaan Koordinasi/Konsultasi/Study RB Pemprov Jambi		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6 kali		250,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				270,000,000
							Jumlah Monitoring Percepatan RB Pemprov Jambi				2 kali							
							Jumlah Pembinaan dan Monitoring Penguatan RB Pemerintah Kab/Kota				11 Kab/Kota							
							Persentase Kab/Kota yang mendapat predikat "B"				22%							

4	01	02	1.02	02	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja		Frekwensi Monev Capaian Kinerja Perangkat Daerah Pertriwulan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 kali		350,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				360,000,000
							Frekwensi Pelaksanaan Koordinasi/konsultasi/asistensi/ Study Penguatan SAKIP Pemprov Jambi				6 kali							
							Jumlah Fasilitas Pelaksanaan Evaluasi SAKIP Pemprov Jambi dan Kab/Kota oleh Kementrian PAN RB				1 kali							
							Jumlah Kab/Kota yang dibina dalam Penguatan SAKIP				11 Kab/Kota							
							Jumlah Laporan Kinerja Pemrov Jambi				1 Lap							
							Jumlah Pelaksanaan Coaching Penguatan SAKIP Pemerintah Kab/Kota				1 kali							
							Jumlah Pelaksanaan Coaching Penguatan SAKIP Perangkat daerah Pemprov jambi				1 kali							
							Nilai SAKIP Pemprov jambi				70.02 Nilai							
							Persentase Kab/Kota dengan Predikakat AKIP "BB"				27%							
							Persentase Perangkat Daerah Pemprov Jambi dengan Predikat AKIP "B"				25%							
4	01	02	1.02	03	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja		coaching Clinic Penyusunan Nilai dan Perilaku Budaya Kerja lingkup Pemprov jambi		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		43 Perangkat Daerah		175,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				195,000,000
							Jumlaj Perangkat daerah Provinsi jambi yang menerapkan Budaya Kerja				5 Perangkat Daerah							
							Pelaksanaan FGD Budaya Kerja				1 kali							
							Sosialisasi Pembentukan Agen Perubahan Budaya Kerja Lingkup pemerintah Prov Jambi				43 Perangkat Daerah							
4	01	02	1.02	04	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan		Jumlah Perangkat daerah yang memiliki peta proses bisnis		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 Perangkat Daerah		175,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				190,000,000
							Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki SOP				8 Perangkat Daerah							

4	01	02	1.02	05	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik		Frekwensi Monev Capaian Kinerja Peningkatan Kwalitas Pelayanan Publik Perangkat daerah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 kali		300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				310,000,000
							Jumlah Kab/Kota yang dibina dalam Peningkatan Kwalitas Pelayanan Publik				11 Kab/Kota							
							Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Inovasi pelayanan Publik				1 kali							
							Jumlah Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat				1 kali							
							Jumlah Pembinaan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Perangkat daerah				43 kali							
							Jumlah Proposal Inovasi Pelayanan Publik				15 laporan							
							jumlah rakor Teknis Pemenuhan Komponen Standar Pelayanan Publik SOP Perangkat Daerah				1 kali							
TOTAL													**2,789,000,000**					**3,000,000,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Jambi
Tahun 2022

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**													
4	**02**				**SEKRETARIAT DPRD**								**182,166,327,001**					**178,926,935,282**
4	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**89,824,902,646**					**79,549,556,587**
4	**02**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**7,640,000**					**7,640,000**
4	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Jumlah Dokumen Perencanaan	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	70 persen	2 dokumen	4 dokumen	3,820,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	70 persen	3,820,000
4	02	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai SAKIP	Jumlah Dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	70 persen	2 dokumen	4 dokumen	3,820,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	70 persen	3,820,000
4	**02**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**44,622,686,902**					**45,960,833,195**
4	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai SAKIP	Periode Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	terlaksananya kesejahteraan ASN serta Laporan Keuangan	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	70 persen	14 bulan	100 persen	43,760,635,872	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	70 persen	45,073,454,949
4	02	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai SAKIP	Periode Pembayaran Honorarium Penatausahaan Keuangan	terlaksananya kesejahteraan ASN serta Laporan Keuangan	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	70 persen	12 bulan	100 persen	844,240,530	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	70 persen	869,567,746
4	02	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai SAKIP	Jumlah Dokumen	terlaksananya kesejahteraan ASN serta Laporan Keuangan	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	70 persen	1 Dokumen	100 persen	4,082,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	70 persen	4,082,500
4	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Nilai SAKIP	Jumlah Jenis Laporan	terlaksananya kesejahteraan ASN serta Laporan Keuangan	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	70 persen	12 Dokumen	100 persen	13,728,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	70 persen	13,728,000
4	**02**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**535,585,050**					**562,364,303**
4	02	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Nilai SAKIP	Jumlah Jenis BMD yang diasuransikan Jumlah Jenis BMD yang diasuransikan Jumlah Jenis BMD yang diasuransikan	Barang milik daerah yang dilaksanakan administrasinya	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	70 persen	1 Gedung 4 Rumah Dinas 43 Kendaraan Dinas	100 persen	535,585,050	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	70 persen	562,364,303
4	**02**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**1,210,328,000**					**1,269,752,400**
4	02	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Nilai SAKIP	Jumlah Stel Pakaian Dinas	Jumlah peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur Sipil Daerah	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	70 persen	196 stel	100 persen	107,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	70 persen	110,495,000
4	02	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai SAKIP	Jumlah ASN yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan	Jumlah peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur Sipil Daerah	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	70 persen	22 orang	100 persen	795,100,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	70 persen	821,086,600
4	02	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai SAKIP	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek Implementasi Perturan perundang - udangan Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek Implementasi Perturan perundang - udangan	Jumlah peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur Sipil Daerah	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	70 persen	2 kali 15 orang	100 persen	307,428,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	70 persen	338,170,800
4	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**5,327,201,800**					**5,726,218,641**
4	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terwujudnya administrasi umum perngkat daerah	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	70 persen	28 jenis	100 persen	63,952,556	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	70 persen	65,551,370

4	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP	Jumlah Jenis Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Terwujudnya administrasi umum perngkat daerah	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	70 persen	75 jenis	100 persen	723,526,120	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	70 persen	745,231,904
4	02	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai SAKIP	Jumlah Jenis Perlatan Rumah Tangga	Terwujudnya administrasi umum perngkat daerah	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	70 persen	10 jenis	100 persen	701,313,699	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	70 persen	771,445,069
4	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP	Jumlah Peserta Rapat/tamu dll	Terwujudnya administrasi umum perngkat daerah	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	70 persen	46321 orang/kegiatan	100 persen	1,565,201,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	70 persen	1,643,461,470
4	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai SAKIP	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	Terwujudnya administrasi umum perngkat daerah	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	70 persen	11 Jenis penggandaan 75 Jenis cetak	100 persen	448,110,905	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	70 persen	492,921,996
4	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai SAKIP	Jumlah Jenis Bahan Bacaan	Terwujudnya administrasi umum perngkat daerah	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	70 persen	80.772 eksemplar	100 persen	886,088,280	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	70 persen	974,697,108
4	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan	Terwujudnya administrasi umum perngkat daerah	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	70 persen	3 kali	100 persen	939,008,840	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	70 persen	1,032,909,724
4	**02**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**3,440,110,952**					**3,784,122,048**
4	02	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	70 persen	1 unit	100 persen	218,574,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	70 persen	240,431,840
4	02	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP	Jumlah Jenis Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Terpenuhinya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	70 persen	13 jenis peralatan	100 persen	3,221,536,552	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	70 persen	3,543,690,208
4	**02**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**1,585,979,274**					**1,744,577,201**
4	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP	Jumlah Surat Keluar per tahun	Terpenuhinya kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	70 persen	1700 lembar	100 persen	37,839,274	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	70 persen	41,623,201
4	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP	Periode Pembayaran Rekening Periode Pembayaran Rekening	Terpenuhinya kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	70 persen	1 Unit Gedung Kantor 4 Unit Rumah Dinas	100 persen	1,548,140,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	70 persen	1,702,954,000
4	**02**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**22,347,131,140**					**9,517,292,086**
4	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara(unit) Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara(unit)	Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	70 persen	40 Unit Motor 43 Unit Mobil	6 jenis	1,622,627,776	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	70 persen	1,784,890,554
4	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhab Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhab	Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	70 persen	1 unit gedung kantor 4 unit rumah jabatan	6 jenis	17,694,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	70 persen	4,550,373,000
4	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Gedung kantor dan Bangunan Lainya yang dipelihara/direhab Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Gedung kantor dan Bangunan Lainya yang dipelihara/direhab	Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	70 persen	8 Jenis Rumah Dinas 16 Jenis Gedung Kantor	6 jenis	3,030,503,364	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	70 persen	3,182,028,532
4	**02**	**01**	**1.15**		**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**								**7,892,239,528**					**8,120,756,713**
4	02	01	1.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Nilai SAKIP	Periode Pembayaran Gaji dan Tunjangan DPRD	Terwujudnya layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	70 persen	14 bulan	3 jenis	6,569,889,982	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	70 persen	6,766,986,681

4	02	01	1.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Nilai SAKIP	Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Terwujudnya layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	70 persen	340 stel	3 jenis	1,047,349,546	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	70 persen	1,078,770,032
4	02	01	1.15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Nilai SAKIP	Jumlah yang MelaksanakanMedical Check Up	Terwujudnya layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	70 persen	55 orang	3 jenis	275,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	70 persen	275,000,000
4	**02**	**01**	**1.16**		**Layanan Adminstrasi DPRD**								**2,856,000,000**					**2,856,000,000**
4	02	01	1.16	04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Nilai SAKIP	Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan DPRD yang terpenuhi	terwujudnya hasil layanan administrasi DPRD	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	70 persen	12 bulan	1 kegiatan	2,856,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	70 persen	2,856,000,000
4	**02**	**02**			**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**								**92,341,424,355**					**99,377,378,695**
4	**02**	**02**	**1.01**		**Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD**								**13,773,459,600**					**15,133,354,560**
4	02	02	1.01	02	Pembahasan Rancangan Perda	Persentase penyelesaian tugas dan fungsi DPRD	Jumlah renperda yang dibahas	Tersedianya perda dan peraturan DPRD	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	100 persen	15 ranperda	100 Persen	13,424,439,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penyelesaian tugas dan fungsi DPRD	100 persen	14,766,883,560
4	02	02	1.01	04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Persentase penyelesaian tugas dan fungsi DPRD	Jumlah Penjelasan/keterangan dan /atau Naskah Akademik yang disusun	Tersedianya perda dan peraturan DPRD	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	100 persen	4 naskah akademik	100 Persen	349,020,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penyelesaian tugas dan fungsi DPRD	100 persen	366,471,000
4	**02**	**02**	**1.04**		**Peningkatan Kapasitas DPRD**								**25,199,065,655**					**25,538,235,125**
4	02	02	1.04	02	Bimbingan Teknis DPRD	Persentase penyelesaian tugas dan fungsi DPRD	Jumlah Peserta Bimtek	Terwujudnya peningkatan kapsitas DPRD	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	100 persen	55 orang	100 persen	2,798,408,360	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penyelesaian tugas dan fungsi DPRD	100 persen	3,078,249,196
4	02	02	1.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Persentase penyelesaian tugas dan fungsi DPRD	Jumlah Jenis Publikasi dan Dokumentasi Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Gedung kantor dan Bangunan Lainya yang dipelihara/direhab	Terwujudnya peningkatan kapsitas DPRD	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	100 persen	4 Rapat Paripurna 1 Kegiatan	100 persen	20,168,657,295	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penyelesaian tugas dan fungsi DPRD	100 persen	20,227,985,929
4	02	02	1.04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Persentase penyelesaian tugas dan fungsi DPRD	Jumlah Kelompok	Terwujudnya peningkatan kapsitas DPRD	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	100 persen	22 orang	100 persen	1,584,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penyelesaian tugas dan fungsi DPRD	100 persen	1,584,000,000
4	02	02	1.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Persentase penyelesaian tugas dan fungsi DPRD	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Terwujudnya peningkatan kapsitas DPRD	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	100 persen	9 orang	100 persen	648,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penyelesaian tugas dan fungsi DPRD	100 persen	648,000,000
4	**02**	**02**	**1.05**		**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**								**22,459,790,540**					**24,705,769,594**
4	02	02	1.05	01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Persentase penyelesaian tugas dan fungsi DPRD	Jumlah Kunker Jumlah Peninjauan Lapangan	Terwujudnya penyerapan dan penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	100 persen	1 Kali 3 Kali	100 persen	6,362,671,040	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penyelesaian tugas dan fungsi DPRD	100 persen	6,998,938,144
4	02	02	1.05	03	Pelaksanaan Reses	Persentase penyelesaian tugas dan fungsi DPRD	Jumlah Reses	Terwujudnya penyerapan dan penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	100 persen	3 Kali	100 persen	16,097,119,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penyelesaian tugas dan fungsi DPRD	100 persen	17,706,831,450
4	**02**	**02**	**1.08**		**Fasilitasi Tugas DPRD**								**30,909,108,560**					**34,000,019,416**
4	02	02	1.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Persentase penyelesaian tugas dan fungsi DPRD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi	terwujudnya fasilitasi tugas DPRD	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	100 persen	12 Kali	100 persen	23,585,777,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penyelesaian tugas dan fungsi DPRD	100 persen	25,944,355,360
4	02	02	1.08	04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Persentase penyelesaian tugas dan fungsi DPRD	Jumlah Fasilitasi Pimpinan DPRD	terwujudnya fasilitasi tugas DPRD	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	100 persen	12 Kali	100 persen	7,323,330,960	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penyelesaian tugas dan fungsi DPRD	100 persen	8,055,664,056
												TOTAL	**182,166,327,001**					**178,926,935,282**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Jambi
Tahun 2022

Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**													
5	**01**				**PERENCANAAN**								**29,479,823,647**					**31,262,099,862**
5	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**19,342,451,263**					**20,650,359,063**
5	**01**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**507,971,644**					**529,771,455**
5	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Jumlah dokumen perencanaan SKPD Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah		B indeks	3 dokumen 7 Dokumen	100 persen	183,750,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	B indeks	192,937,500
5	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Nilai SAKIP		Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah		B indeks		100 persen	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	B indeks	11,000,000
5	01	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai SAKIP		Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah		B indeks		100 persen	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	B indeks	11,000,000
5	01	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai SAKIP	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan SKPD	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	B indeks	1 Tahun	100 persen	23,621,587	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP	B indeks	24,621,587
5	01	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Nilai SAKIP	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan SKPD perubahan	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah		B indeks	1 Tahun	100 persen	23,621,587	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	B indeks	24,621,587
5	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai SAKIP	Jumlah laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capain Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah		B indeks	12 Laporan	100 persen	104,732,250	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	B indeks	105,732,250
5	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Jumlah Dokumen evaluasi SKPD	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah		B indeks	2 Dokumen	100 persen	152,246,220	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	B indeks	159,858,531
5	**01**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**14,219,234,255**					**15,031,303,666**
5	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai SAKIP	Jumlah Bulan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Periode penyelenggaraan administrasi keuangan		B indeks	14 Bulan	12 bulan	13,814,803,465	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	B indeks	14,505,543,638
5	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai SAKIP		Periode penyelenggaraan administrasi keuangan		B indeks		12 bulan	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	B indeks	0
5	01	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Nilai SAKIP	Jumlah bahan verifikasi yang disiapkan	Periode penyelenggaraan administrasi keuangan		B indeks	24 Item	12 bulan	56,316,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	B indeks	73,210,800
5	01	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Nilai SAKIP	Jumlah Laporan Akuntansi Keuangan SKPD	Periode penyelenggaraan administrasi keuangan		B indeks	6 Laporan	12 bulan	114,793,380	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	B indeks	149,231,394
5	01	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai SAKIP	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Periode penyelenggaraan administrasi keuangan		B indeks	1 Laporan	12 bulan	51,325,820	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	B indeks	66,723,566
5	01	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Nilai SAKIP	Jumlah Bahan Tanggapan yang disiapkan	Periode penyelenggaraan administrasi keuangan		B indeks	6 Laporan	12 bulan	90,997,795	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	B indeks	118,297,134

5	01	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Nilai SAKIP	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Periode penyelenggaraan administrasi keuangan		B indeks	14 Laporan	12 bulan	90,997,795	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	B indeks	118,297,134
5	**01**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**225,472,658**					**236,746,291**
5	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Nilai SAKIP	Jumlah ASN Yang Mengikuti Diklat Formal	Periode Pelayanan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		B indeks	12 Bulan	12 bulan	146,751,260	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	B indeks	154,088,823
5	01	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai SAKIP	Jumlah Pegawai Yang mengikuti Bimtek Implementasi peraturan perundangan	Periode Pelayanan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		B indeks	12 Bulan	12 bulan	78,721,398	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	B indeks	82,657,468
5	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**919,068,605**					**1,194,789,187**
5	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Jumlah Bulan Ketersediaan Peralatan Listrik/Penerangan Gedung kantor	Persentase pemenuhan pelayanan andministrasi umum perangkat daerah		100	12 Bulan	100 persen	25,888,720	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	33,655,336
5	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Jumlah bulan ketersediaan ATK Jumlah bulan ketersediaan peraltan dan perlengkapan perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan andministrasi umum perangkat daerah		100	12 Bulan 12 Bulan	100 persen	24,242,790	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	31,515,627
5	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Jumlah Bahan Cetak dan Penggandaan	Persentase pemenuhan pelayanan andministrasi umum perangkat daerah		100	12 Bulan	100 persen	38,866,295	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	50,526,184
5	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Jumlah Bulan Ketersediaan Makanan dan Minuman	Persentase pemenuhan pelayanan andministrasi umum perangkat daerah		100	12 Bulan	100 persen	64,545,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	83,908,500
5	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Jumlah bulan pelaksanaan Koordinasi	Persentase pemenuhan pelayanan andministrasi umum perangkat daerah		100	12 Bulan	100 persen	765,525,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	995,183,540
5	**01**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**1,259,919,917**					**1,322,915,912**
5	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP	Jumlah bulan pengadaan peralatan gedung kantor	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		B indeks	12 Bulan	100 persen	104,919,917	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	B indeks	110,165,912
5	01	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		B indeks	1 Unit	100 persen	1,155,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	B indeks	1,212,750,000
5	**01**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**1,146,208,000**					**1,189,383,750**
5	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Jumlah bulan pembayarn tagihan komunikasi sumberdaya air dan listrik	Persentase pelaksanaan jasa penunjang urusan pemda		100	12 Bulan	100 persen	340,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	357,981,750
5	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Jumlah bulan pel;aksanaan jasa kebersihan kantor	Persentase pelaksanaan jasa penunjang urusan pemda		100	12 Bulan	100 persen	806,208,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	831,402,000
5	**01**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**1,064,576,184**					**1,145,448,802**
5	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP	Jumlah bulan pemeliharaan kendaraan dinas/jabatan	Persentase pemeliharaan barang milik daerah		B indeks	12 Bulan	100 persen	244,750,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	B indeks	254,750,000

5	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP	jumlah bulan pemeliharaan kendaraan dinas operasional	Persentase pemeliharaan barang milik daerah		B indeks	12 Bulan	100 persen	211,100,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	B indeks	221,100,000
5	01	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	Nilai SAKIP	Jumlah mebeleur yang dipelihara	Persentase pemeliharaan barang milik daerah		B indeks	4 Set	100 persen	187,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	B indeks	205,700,000
5	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP	Jumlah bulan pemeliharaan dan mesin	Persentase pemeliharaan barang milik daerah		B indeks	12 Bulan	100 persen	21,890,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	B indeks	24,079,000
5	01	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP	Jumlah bulan pemeliharaan gedung kantor	Persentase pemeliharaan barang milik daerah		B indeks	12 Bulan	100 persen	16,364,700	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Nilai SAKIP	B indeks	18,001,170
5	01	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP	Jumlah bulan pemeliharaan sarpras kantor	Persentase pemeliharaan barang milik daerah		B indeks	12 Bulan	100 persen	284,516,364	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Nilai SAKIP	B indeks	312,968,000
5	01	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP	Jumlah bulan pemeliharaan sarpras pendukung gedung kantor	Persentase pemeliharaan barang milik daerah		B indeks	12 Bulan	100 persen	98,955,120	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	B indeks	108,850,632
5	**01**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**								**3,992,642,395**					**4,141,990,811**
5	**01**	**02**	**1.01**		**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**								**1,784,373,240**					**2,018,415,052**
5	01	02	1.01	01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Persentase capaian tahunan RPJMD terhadap target tahunan RPJMD	Jumlah Laporan Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan pembangunan daerah		90 persen	1 Laporan	100 persen	63,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase capaian tahunan RPJMD terhadap target tahunan RPJMD	90 persen	66,150,000
5	01	02	1.01	02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Persentase capaian tahunan RPJMD terhadap target tahunan RPJMD	Jumlah Dokumen Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan lainnya	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan pembangunan daerah		90 persen	1 Dokumen	100 persen	293,772,440	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase capaian tahunan RPJMD terhadap target tahunan RPJMD	90 persen	381,904,172
5	01	02	1.01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Persentase capaian tahunan RPJMD terhadap target tahunan RPJMD	Berita Acara konsultasi Publik	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan pembangunan daerah		90 persen	2 Berita Acara	100 persen	85,175,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase capaian tahunan RPJMD terhadap target tahunan RPJMD	90 persen	93,692,500
5	01	02	1.01	04	Koordinasi Pelaksanaaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Persentase capaian tahunan RPJMD terhadap target tahunan RPJMD	Berita Acara Kesepakatan	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan pembangunan daerah		90 persen	1 Berita Acara	100 persen	197,425,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase capaian tahunan RPJMD terhadap target tahunan RPJMD	90 persen	217,168,380
5	01	02	1.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Persentase capaian tahunan RPJMD terhadap target tahunan RPJMD	Berita Acara Musrenbang Indikator antara 1	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan pembangunan daerah		90 persen	2 Berita Acara 2 Kali	100 persen	625,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase capaian tahunan RPJMD terhadap target	90 persen	687,500,000
5	01	02	1.01	06	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Persentase capaian tahunan RPJMD terhadap target tahunan RPJMD	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Laporan Peraturan Gubernur	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan pembangunan daerah		90 persen	2 Dokumen 1 Laporan 2 Pergub	100 persen	520,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase capaian tahunan RPJMD terhadap target tahunan RPJMD	90 persen	572,000,000
5	**01**	**02**	**1.02**		**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**								**1,310,000,000**					**1,185,000,000**
5	01	02	1.02	01	Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase capaian tahunan RPJMD terhadap target tahunan	Jumlah Laporan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya data capaian pembangunan daerah		90 persen	1 Laporan	90 persen	500,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase capaian tahunan RPJMD terhadap target tahunan	90 persen	510,000,000
5	01	02	1.02	02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Persentase capaian tahunan RPJMD terhadap target tahunan	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Tersedianya data capaian pembangunan daerah	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	90 persen	1 Laporan	90 persen	450,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase capaian tahunan RPJMD terhadap target tahunan	90 persen	300,000,000
5	01	02	1.02	03	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian tahunan RPJMD terhadap target tahunan	Jumlah Kabupaten/Kota	Tersedianya data capaian pembangunan daerah		90 persen	11 Kabupaten/Kota	90 persen	210,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase capaian tahunan RPJMD terhadap target tahunan	90 persen	225,000,000
5	01	02	1.02	04	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Persentase capaian tahunan RPJMD terhadap target tahunan	Jumlah Dokumen Profil	Tersedianya data capaian pembangunan daerah		90 persen	1 Dokumen	90 persen	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase capaian tahunan RPJMD terhadap target tahunan	90 persen	150,000,000

5	**01**	**02**	**1.03**		**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**								**898,269,155**						**938,575,759**
5	01	02	1.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase capaian tahunan RPJMD terhadap target tahunan RPJMD	Jumlah laporan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan laporan evaluasi pembangunan daerah		90 persen	6 Laporan	100 persen	652,570,275	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase capaian tahunan RPJMD terhadap target tahunan RPJMD	90 persen	685,198,789
5	01	02	1.03	04	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian tahunan RPJMD terhadap target tahunan RPJMD	Jumlah SK	Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan laporan evaluasi pembangunan daerah		90 persen	5 SK	100 persen	245,698,880	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase capaian tahunan RPJMD terhadap target tahunan RPJMD	90 persen	253,376,970
5	**01**	**03**			**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**								**6,144,729,989**						**6,469,749,988**
5	**01**	**03**	**1.01**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**								**1,264,729,989**						**1,454,749,988**
5	01	03	1.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase kesesuaian pencapaian sasaran RPJMD dengan realisasi tahunan pembangunan sektor pemerintahan dan pembangunan manusia	Jumlah Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Presentase capaian perencanaan tahunan pembangunan bidang kesejahteraan masyarakat, bidang pembangunan manusia dan bidang pemerintahan		96 persen	1 Laporan	100 persen	119,080,660	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kesesuaian pencapaian sasaran RPJMD dengan realisasi tahunan pembangunan sektor pemerintahan dan pembangunan manusia	96 persen	136,942,759
5	01	03	1.01	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Persentase kesesuaian pencapaian sasaran RPJMD dengan realisasi tahunan pembangunan sektor pemerintahan dan pembangunan manusia	Jumlah Dokumen Asistensi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Presentase capaian perencanaan tahunan pembangunan bidang kesejahteraan masyarakat, bidang pembangunan manusia dan bidang pemerintahan		96 persen	1 Dokumen	100 persen	200,494,945	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kesesuaian pencapaian sasaran RPJMD dengan realisasi tahunan pembangunan sektor pemerintahan dan pembangunan manusia	96 persen	230,569,186
5	01	03	1.01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Persentase kesesuaian pencapaian sasaran RPJMD dengan realisasi tahunan pembangunan sektor pemerintahan dan pembangunan manusia	Jumlah laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Presentase capaian perencanaan tahunan pembangunan bidang kesejahteraan masyarakat, bidang pembangunan manusia dan bidang pemerintahan		96 persen	1 Laporan	100 persen	195,012,170	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kesesuaian pencapaian sasaran RPJMD dengan realisasi tahunan pembangunan sektor pemerintahan dan pembangunan manusia	96 persen	224,263,996
5	01	03	1.01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase kesesuaian pencapaian sasaran RPJMD dengan realisasi tahunan pembangunan sektor pemerintahan dan pembangunan manusia	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Presentase capaian perencanaan tahunan pembangunan bidang kesejahteraan masyarakat, bidang pembangunan manusia dan bidang pemerintahan		96 persen	1 Laporan	100 persen	211,094,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kesesuaian pencapaian sasaran RPJMD dengan realisasi tahunan pembangunan sektor pemerintahan dan pembangunan manusia	96 persen	242,758,100
5	01	03	1.01	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase kesesuaian pencapaian sasaran RPJMD dengan realisasi tahunan pembangunan sektor pemerintahan dan pembangunan manusia	Jumlah Dokumen Asistensi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Presentase capaian perencanaan tahunan pembangunan bidang kesejahteraan masyarakat, bidang pembangunan manusia dan bidang pemerintahan		96 persen	2 Dokumen	100 persen	344,036,044	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kesesuaian pencapaian sasaran RPJMD dengan realisasi tahunan pembangunan sektor pemerintahan dan pembangunan manusia	96 persen	395,951,951
5	01	03	1.01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase kesesuaian pencapaian sasaran RPJMD dengan realisasi tahunan pembangunan sektor pemerintahan dan pembangunan manusia	Jumlah laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Presentase capaian perencanaan tahunan pembangunan bidang kesejahteraan masyarakat, bidang pembangunan manusia dan bidang pemerintahan		96 persen	1 Laporan	100 persen	195,012,170	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kesesuaian pencapaian sasaran RPJMD dengan realisasi tahunan pembangunan sektor pemerintahan dan pembangunan manusia	96 persen	224,263,996

5	**01**	**03**	**1.02**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**								**1,580,000,000**						**1,715,000,000**
5	01	03	1.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase kesesuaian pencapaian sasaran RPJMD dengan realisasi tahunan pembangunan sektor ekonomi dan SDA	Jumlah Laporan Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	Presentase capaian perencanaan tahunan pembangunan bidang ekonomi kreatif, bidang perekonomian dan bidang Sumber Daya Alam		98 persen	2 Laporan	100 persen	250,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kesesuaian pencapaian sasaran RPJMD dengan realisasi tahunan pembangunan sektor ekonomi dan SDA	98 persen	270,000,000
5	01	03	1.02	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Persentase kesesuaian pencapaian sasaran RPJMD dengan realisasi tahunan pembangunan sektor ekonomi dan SDA	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	Presentase capaian perencanaan tahunan pembangunan bidang ekonomi kreatif, bidang perekonomian dan bidang Sumber Daya Alam		98 persen	2 Dokumen	100 persen	220,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kesesuaian pencapaian sasaran RPJMD dengan realisasi tahunan pembangunan sektor ekonomi dan SDA	98 persen	250,000,000
5	01	03	1.02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Persentase kesesuaian pencapaian sasaran RPJMD dengan realisasi tahunan pembangunan sektor ekonomi dan SDA	Jumlah Laporan Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	Presentase capaian perencanaan tahunan pembangunan bidang ekonomi kreatif, bidang perekonomian dan bidang Sumber Daya Alam		98 persen	2 Laporan	100 persen	300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kesesuaian pencapaian sasaran RPJMD dengan realisasi tahunan pembangunan sektor ekonomi dan SDA	98 persen	315,000,000
5	01	03	1.02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Persentase kesesuaian pencapaian sasaran RPJMD dengan realisasi tahunan pembangunan sektor ekonomi dan SDA	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	Presentase capaian perencanaan tahunan pembangunan bidang ekonomi kreatif, bidang perekonomian dan bidang Sumber Daya Alam		98 persen	2 Dokumen	100 persen	65,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kesesuaian pencapaian sasaran RPJMD dengan realisasi tahunan pembangunan sektor ekonomi dan SDA	98 persen	75,000,000
5	01	03	1.02	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase kesesuaian pencapaian sasaran RPJMD dengan realisasi tahunan pembangunan sektor ekonomi dan SDA	Jumlah Laporan Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	Presentase capaian perencanaan tahunan pembangunan bidang ekonomi kreatif, bidang perekonomian dan bidang Sumber Daya Alam		98 persen	1 Laporan	100 persen	390,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kesesuaian pencapaian sasaran RPJMD dengan realisasi tahunan pembangunan sektor ekonomi dan SDA	98 persen	420,000,000
5	01	03	1.02	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Persentase kesesuaian pencapaian sasaran RPJMD dengan realisasi tahunan pembangunan sektor ekonomi dan SDA	Jumlah Laporan Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	Presentase capaian perencanaan tahunan pembangunan bidang ekonomi kreatif, bidang perekonomian dan bidang Sumber Daya Alam		98 persen	1 Laporan	100 persen	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kesesuaian pencapaian sasaran RPJMD dengan realisasi tahunan pembangunan sektor ekonomi dan SDA	98 persen	160,000,000
5	01	03	1.02	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Persentase kesesuaian pencapaian sasaran RPJMD dengan realisasi tahunan pembangunan sektor ekonomi dan SDA	Jumlah Laporan Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	Presentase capaian perencanaan tahunan pembangunan bidang ekonomi kreatif, bidang perekonomian dan bidang Sumber Daya Alam		98 persen	1 Laporan	100 persen	140,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kesesuaian pencapaian sasaran RPJMD dengan realisasi tahunan pembangunan sektor ekonomi dan SDA	98 persen	150,000,000
5	01	03	1.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Persentase kesesuaian pencapaian sasaran RPJMD dengan realisasi tahunan pembangunan sektor ekonomi dan SDA	Jumlah Laporan Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	Presentase capaian perencanaan tahunan pembangunan bidang ekonomi kreatif, bidang perekonomian dan bidang Sumber Daya Alam		98 persen	1 Laporan	100 persen	65,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kesesuaian pencapaian sasaran RPJMD dengan realisasi tahunan pembangunan sektor ekonomi dan SDA	98 persen	75,000,000
5	**01**	**03**	**1.03**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**								**3,300,000,000**						**3,300,000,000**
5	01	03	1.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase kesesuaian pencapaian sasaran RPJMD dengan realisasi tahunan pembangunan sektor infrastruktur dan kewilayahan	Jumlah Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	Presentase capaian perencanaan tahunan pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		95 persen	2 Dokumen	100 persen	300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kesesuaian pencapaian sasaran RPJMD dengan realisasi tahunan pembangunan sektor infrastruktur dan kewilayahan	95 persen	300,000,000

5	01	03	1.03	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase kesesuaian pencapaian sasaran RPJMD dengan realisasi tahunan pembangunan sektor infrastruktur dan kewilayahan	Jumlah Laporan Asistensi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Presentase capaian perencanaan tahunan pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		95 persen	1 Dokumen	100 persen	300,000,000			Persentase kesesuaian pencapaian sasaran RPJMD dengan realisasi tahunan pembangunan sektor infrastruktur dan kewilayahan	95 persen	300,000,000
5	01	03	1.03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase kesesuaian pencapaian sasaran RPJMD dengan realisasi tahunan pembangunan sektor infrastruktur dan kewilayahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Presentase capaian perencanaan tahunan pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		95 persen	1 Laporan	100 persen	450,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kesesuaian pencapaian sasaran RPJMD dengan realisasi tahunan pembangunan sektor infrastruktur dan kewilayahan	95 persen	450,000,000
5	01	03	1.03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase kesesuaian pencapaian sasaran RPJMD dengan realisasi tahunan pembangunan sektor infrastruktur dan kewilayahan	Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinegritas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Presentase capaian perencanaan tahunan pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		95 persen	1 Laporan	100 persen	600,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kesesuaian pencapaian sasaran RPJMD dengan realisasi tahunan pembangunan sektor infrastruktur dan kewilayahan	95 persen	600,000,000
5	01	03	1.03	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase kesesuaian pencapaian sasaran RPJMD dengan realisasi tahunan pembangunan sektor infrastruktur dan kewilayahan	Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Presentase capaian perencanaan tahunan pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		95 persen	1 Dokumen	100 persen	300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kesesuaian pencapaian sasaran RPJMD dengan realisasi tahunan pembangunan sektor infrastruktur dan kewilayahan	95 persen	300,000,000
5	01	03	1.03	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Persentase kesesuaian pencapaian sasaran RPJMD dengan realisasi tahunan pembangunan sektor infrastruktur dan kewilayahan	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Presentase capaian perencanaan tahunan pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		95 persen	1 Laporan	100 persen	300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kesesuaian pencapaian sasaran RPJMD dengan realisasi tahunan pembangunan sektor infrastruktur dan kewilayahan	95 persen	300,000,000
5	01	03	1.03	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Persentase kesesuaian pencapaian sasaran RPJMD dengan realisasi tahunan pembangunan sektor infrastruktur dan kewilayahan	Jumlah laporan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Presentase capaian perencanaan tahunan pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		95 persen	1 Laporan	100 persen	450,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kesesuaian pencapaian sasaran RPJMD dengan realisasi tahunan pembangunan sektor infrastruktur dan kewilayahan	95 persen	450,000,000
5	01	03	1.03	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Persentase kesesuaian pencapaian sasaran RPJMD dengan realisasi tahunan pembangunan sektor infrastruktur dan kewilayahan	Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinegritas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Presentase capaian perencanaan tahunan pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		95 persen	1 Laporan	100 persen	600,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kesesuaian pencapaian sasaran RPJMD dengan realisasi tahunan pembangunan sektor infrastruktur dan kewilayahan	95 persen	600,000,000
												TOTAL	**29,479,823,647**					**31,262,099,862**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Jambi
Tahun 2022

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Keuangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Keuangan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
										Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**													
5	**02**				**KEUANGAN**								**1,163,521,856,771**					**1,251,433,020,809**
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**140,795,432,361**					**156,443,611,308**
5	**02**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**888,767,411**					**1,071,179,263**
5	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Nilai SAKIP persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Jumlah dokumen Perencanaan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja		70 persen 74 nilai 100	5 Dokumen	72 Nilai	278,562,370	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP Nilai SAKIP persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	70 persen 74 nilai 100	348,202,962
5	02	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai SAKIP Nilai SAKIP persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Jumlah laporan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja		70 persen 74 nilai 100	5 Dokumen	72 Nilai	345,005,041	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP Nilai SAKIP persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	70 persen 74 nilai 100	431,256,301
5	02	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Nilai SAKIP persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Jumlah Evaluasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja		70 persen 74 nilai 100	4 Kali	72 Nilai	265,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP Nilai SAKIP persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	70 persen 74 nilai 100	291,720,000
5	**02**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**103,154,615,200**					**113,470,076,900**
5	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai SAKIP Nilai SAKIP persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Jumlah Periode Penyediaan Gaji	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja		70 persen 74 nilai 100	14 Bulan	72 Nilai	102,230,889,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP Nilai SAKIP persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	70 persen 74 nilai 100	112,453,978,300
5	02	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai SAKIP Nilai SAKIP persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Periode pembayaran honorarium penatausahaan keuangan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja		70 persen 74 nilai 100	12 Bulan	72 Nilai	829,530,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP Nilai SAKIP persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	70 persen 74 nilai 100	912,483,400
5	02	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai SAKIP Nilai SAKIP persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Jumlah laporan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja		70 persen 74 nilai 100	2 Dokumen	72 Nilai	94,195,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP Nilai SAKIP persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	70 persen 74 nilai 100	103,615,200
5	**02**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**1,013,440,494**					**1,114,784,545**
5	02	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Nilai SAKIP Nilai SAKIP persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Jumlah Dokumen	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja		70 persen 74 nilai 100	6 Dokumen	72 Nilai	110,000,136	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP Nilai SAKIP persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	70 persen 74 nilai 100	121,000,150
						Nilai SAKIP				70 persen						Nilai SAKIP	70 persen	

5	02	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Nilai SAKIP persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Jumlah jenis BMD yang diasuransikan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja		74 nilai 100	10 BMD	72 Nilai	414,443,313	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	74 nilai 100	455,887,645
5	02	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Nilai SAKIP Nilai SAKIP persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Jumlah Dokumen Penilaian Aset Milik Pemerintah Provinsi Jambi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja		70 persen 74 nilai 100	1 Dokumen	72 Nilai	128,997,890	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP Nilai SAKIP persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	70 persen 74 nilai 100	141,897,679
5	02	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai SAKIP Nilai SAKIP persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Jumlah OPD yang dibina	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja		70 persen 74 nilai 100	43 OPD	72 Nilai	179,999,878	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP Nilai SAKIP persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	70 persen 74 nilai 100	197,999,866
5	02	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai SAKIP Nilai SAKIP persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Jumlah laporan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja		70 persen 74 nilai 100	4 Dokumen	72 Nilai	179,999,277	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP Nilai SAKIP persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	70 persen 74 nilai 100	197,999,205
5	**02**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**1,254,000,000**					**4,829,500,000**
5	02	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Nilai SAKIP Nilai SAKIP persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Persentase Sarana dan Prasarana	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja		70 persen 74 nilai 100	100 Persen	72 Nilai	250,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP Nilai SAKIP persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	70 persen 74 nilai 100	275,000,000
5	02	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Nilai SAKIP Nilai SAKIP persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Jumlah stel pakaian dinas	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja		70 persen 74 nilai 100	540 Stel	72 Nilai	351,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP Nilai SAKIP persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	70 persen 74 nilai 100	3,861,000,000
5	02	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Nilai SAKIP Nilai SAKIP persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Jumlah Evaluasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja		70 persen 74 nilai 100	4 Kali	72 Nilai	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP Nilai SAKIP persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	70 persen 74 nilai 100	165,000,000
5	02	01	1.05	08	Pemindahan Tugas ASN	Nilai SAKIP Nilai SAKIP persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Jumlah ASN yang dimutasikan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja		70 persen 74 nilai 100	20 ASN	72 Nilai	80,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP Nilai SAKIP persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	70 persen 74 nilai 100	88,000,000
5	02	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Nilai SAKIP Nilai SAKIP persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja		70 persen 74 nilai 100	10 ASN	72 Nilai	248,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP Nilai SAKIP persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	70 persen 74 nilai 100	248,000,000

5	02	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai SAKIP Nilai SAKIP persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja		70 persen 74 nilai 100	4 Kali	72 Nilai	175,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP Nilai SAKIP persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	70 persen 74 nilai 100	192,500,000
5	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**5,127,818,728**						**5,640,600,800**
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP Nilai SAKIP persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja		70 persen 74 nilai 100	683 Komponen	72 Nilai	255,640,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP Nilai SAKIP persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	70 persen 74 nilai 100	281,204,000
5	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP Nilai SAKIP persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Jumlah Jenis Pengadaan peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja		70 persen 74 nilai 100	209 Unit	72 Nilai	1,805,659,628	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP Nilai SAKIP persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	70 persen 74 nilai 100	1,986,225,600
5	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP Nilai SAKIP persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Jumlah Peserta Rapat/Tamu dll	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja		70 persen 74 nilai 100	600 Tamu	72 Nilai	851,406,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP Nilai SAKIP persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	70 persen 74 nilai 100	936,547,100
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai SAKIP Nilai SAKIP persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja		70 persen 74 nilai 100	5 Dokumen	72 Nilai	1,445,335,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP Nilai SAKIP persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	70 persen 74 nilai 100	1,589,869,500
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai SAKIP Nilai SAKIP persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja		70 persen 74 nilai 100	6 Bahan Bacaan	72 Nilai	147,169,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP Nilai SAKIP persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	70 persen 74 nilai 100	161,886,100
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai SAKIP Nilai SAKIP persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Jumlah tamu	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja		70 persen 74 nilai 100	100 Tamu	72 Nilai	159,060,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP Nilai SAKIP persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	70 persen 74 nilai 100	174,966,000
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP Nilai SAKIP persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang Dilaksanakan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja		70 persen 74 nilai 100	12 Kali	72 Nilai	463,547,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP Nilai SAKIP persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	70 persen 74 nilai 100	509,902,500
5	**02**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**21,255,659,628**						**21,406,225,600**
5	02	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP Nilai SAKIP persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Jumlah pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja		70 persen 74 nilai 100	18 Unit	72 Nilai	9,000,000,000			Nilai SAKIP Nilai SAKIP persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	70 persen 74 nilai 100	9,000,000,000

5	02	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP Nilai SAKIP persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Jumlah pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja		70 persen 74 nilai 100	15 Mobil 25 Motor	72 Nilai	10,750,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP Nilai SAKIP persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	70 persen 74 nilai 100	10,750,000,000
5	02	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP Nilai SAKIP persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Jumlah jenis pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja		70 persen 74 nilai 100	110 Unit	72 Nilai	1,505,659,628	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP Nilai SAKIP persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	70 persen 74 nilai 100	1,656,225,600
5	**02**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**2,525,262,800**					**2,777,789,200**
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP Nilai SAKIP persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Jumlah surat menyurat kantor	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja		70 persen 74 nilai 100	1000 Surat	72 Nilai	74,408,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP Nilai SAKIP persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	70 persen 74 nilai 100	81,849,200
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP Nilai SAKIP persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Periode Pembayaran Rekening	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja		70 persen 74 nilai 100	12 Bulan	72 Nilai	1,442,948,500			Nilai SAKIP Nilai SAKIP persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	70 persen 74 nilai 100	1,587,243,400
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP Nilai SAKIP persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Periode pembayaran jasa pelayanan umum kantor	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja		70 persen 74 nilai 100	12 Bulan	72 Nilai	1,007,906,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP Nilai SAKIP persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	70 persen 74 nilai 100	1,108,696,600
5	**02**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**5,575,868,100**					**6,133,455,000**
5	02	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP Nilai SAKIP persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan(unit)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja		70 persen 74 nilai 100	55 Unit	72 Nilai	1,635,964,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP Nilai SAKIP persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	70 persen 74 nilai 100	1,799,560,400
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP Nilai SAKIP persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara (unit)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja		70 persen 74 nilai 100	300 Unit	72 Nilai	1,635,964,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP Nilai SAKIP persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	70 persen 74 nilai 100	1,799,560,400
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP Nilai SAKIP persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Jumlah jenis peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja		70 persen 74 nilai 100	100 Unit	72 Nilai	369,677,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP Nilai SAKIP persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	70 persen 74 nilai 100	406,644,700

5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP Nilai SAKIP persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	"Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhab"	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja		70 persen 74 nilai 100	11 Gedung	72 Nilai	1,934,263,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP Nilai SAKIP persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	70 persen 74 nilai 100	2,127,689,500
5	**02**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**								**997,186,782,905**					**1,066,788,276,869**
5	**02**	**02**	**1.01**		**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**								**2,943,059,653**					**3,141,334,329**
5	02	02	1.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Opini BPK	Jumlah Dokumen	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja dan Pengelolaan Keuangan Daerah		WTP nilai	4 Dokumen	100%	311,327,363	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Opini BPK	WTP nilai	326,893,730
5	02	02	1.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Opini BPK	Jumlah Perda APBD dan Perkada Penjabaran APBD Jumlah Perda APBD dan Perkada Penjabaran APBD	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja dan Pengelolaan Keuangan Daerah		WTP nilai	2 Pergub 2 Perkada	100%	1,609,298,408	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Opini BPK	WTP nilai	1,689,763,328
5	02	02	1.01	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Opini BPK	Jumlah Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran yang disusun	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja dan Pengelolaan Keuangan Daerah		WTP nilai	1 Regulasi	100%	263,988,740	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Opini BPK	WTP nilai	290,387,614
5	02	02	1.01	10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Opini BPK	Jumlah Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja dan Pengelolaan Keuangan Daerah		WTP nilai	11 Koordinasi	100%	210,283,572	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Opini BPK	WTP nilai	231,311,930
5	02	02	1.01	11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Opini BPK	Jumlah Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja dan Pengelolaan Keuangan Daerah		WTP nilai	11 Koordinasi	100%	321,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Opini BPK	WTP nilai	353,320,000
5	02	02	1.01	13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	Opini BPK	Jumlah OPD yang dibina	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja dan Pengelolaan Keuangan Daerah		WTP nilai	43 OPD	100%	226,961,570	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Opini BPK	WTP nilai	249,657,727
5	**02**	**02**	**1.02**		**Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota**								**1,159,505,465**					**1,258,692,419**
5	02	02	1.02	02	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Opini BPK	Jumlah Keputusan Gubernur Jambi tentang Hasil Evaluasi APBD Kab/Kota	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja dan Pengelolaan Keuangan Daerah		WTP nilai	11 SK	100%	313,774,393	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Opini BPK	WTP nilai	345,151,832
5	02	02	1.02	03	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Opini BPK	Jumlah Keputusan Gubernur Jambi tentang Hasil Evaluasi Perubahan APBD Kab/Kota	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja dan Pengelolaan Keuangan Daerah		WTP nilai	11 SK	100%	259,005,309	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Opini BPK	WTP nilai	284,905,840
5	02	02	1.02	04	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Opini BPK	Jumlah Evaluasi	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja dan Pengelolaan Keuangan Daerah		WTP nilai	11 Evaluasi	100%	310,547,868	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Opini BPK	WTP nilai	332,729,859
5	02	02	1.02	11	Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Opini BPK	Jumlah LKPD dan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja dan Pengelolaan Keuangan Daerah		WTP nilai	11 LKPD	100%	276,177,895	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Opini BPK	WTP nilai	295,904,888

5	**02**	**02**	**1.03**		**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**								**1,743,929,064**							**1,978,558,478**
5	02	02	1.03	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Opini BPK	Jumlah Koordinasi	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja dan Pengelolaan Keuangan Daerah		WTP nilai	43 OPD	100%	315,218,114	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Opini BPK	WTP nilai	409,783,548
5	02	02	1.03	03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Opini BPK	Jumlah Anggaran Kas dan SPD yang diterbitkan	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja dan Pengelolaan Keuangan Daerah		WTP nilai	5000 SPD	100%	460,560,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Opini BPK	WTP nilai	490,429,000
5	02	02	1.03	04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Opini BPK	Jumlah Koordinasi	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja dan Pengelolaan Keuangan Daerah		WTP nilai	4 Kali	100%	602,700,950	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Opini BPK	WTP nilai	682,700,930
5	02	02	1.03	05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Opini BPK	Jumlah Laporan	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja dan Pengelolaan Keuangan Daerah		WTP nilai	2 Dokumen	100%	365,450,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Opini BPK	WTP nilai	395,645,000
5	**02**	**02**	**1.04**		**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**								**810,403,955**							**951,114,598**
5	02	02	1.04	02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Opini BPK	Jumlah Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan beban yang dilaksanakan	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja dan Pengelolaan Keuangan Daerah		WTP nilai	43 OPD	100%	176,255,210	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Opini BPK	WTP nilai	220,319,013
5	02	02	1.04	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Opini BPK	Jumlah perda dan perkada penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jumlah perda dan perkada penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja dan Pengelolaan Keuangan Daerah		WTP nilai	1 Perda 1 Perkada	100%	332,319,660	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Opini BPK	WTP nilai	398,783,592
5	02	02	1.04	06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Opini BPK	Jumlah dokumen TLHP BPK	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja dan Pengelolaan Keuangan Daerah		WTP nilai	1 Dokumen	100%	113,823,529	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Opini BPK	WTP nilai	125,205,881
5	02	02	1.04	07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Opini BPK	Jumlah dokumen	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja dan Pengelolaan Keuangan Daerah		WTP nilai	2 Dokumen	100%	60,552,910	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Opini BPK	WTP nilai	66,608,201
5	02	02	1.04	09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Opini BPK	Jumlah jenis Kebijakan dan Panduan Teknis yang disusun	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja dan Pengelolaan Keuangan Daerah		WTP nilai	1 Kebijakan	100%	127,452,646	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Opini BPK	WTP nilai	140,197,911
5	**02**	**02**	**1.05**		**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**								**990,094,870,899**							**1,058,964,243,102**
5	02	02	1.05	04	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Opini BPK	Jumlah dokumen	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja dan Pengelolaan Keuangan Daerah		WTP nilai	1 Dokumen	100%	147,102,079	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Opini BPK	WTP nilai	147,102,079
5	02	02	1.05	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Opini BPK	Jumlah dokumen	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja dan Pengelolaan Keuangan Daerah		WTP nilai	1 Dokumen	100%	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Opini BPK	WTP nilai	0

5	02	02	1.05	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Opini BPK	Persentase Dana Darurat dan Mendesak yang disalurkan	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja dan Pengelolaan Keuangan Daerah		WTP nilai	100 Persen	100%	310,571,182,254	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Opini BPK	WTP nilai	311,502,895,801
5	02	02	1.05	10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi	Opini BPK	Persentase Penyaluran Dana Bagi hasil Provinsi Jambi	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja dan Pengelolaan Keuangan Daerah		WTP nilai	43 OPD	100%	679,376,586,566	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Opini BPK	WTP nilai	747,314,245,222
5	**02**	**02**	**1.06**		**Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**								**435,013,869**					**494,333,943**
5	02	02	1.06	03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi	Opini BPK	Jumlah PD yang dibina	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja dan Pengelolaan Keuangan Daerah		WTP nilai	43 OPD	100%	435,013,869	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Opini BPK	WTP nilai	494,333,943
5	**02**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**								**7,488,476,815**					**9,056,137,474**
5	**02**	**03**	**1.01**		**Pengelolaan Barang Milik Daerah**								**7,488,476,815**					**9,056,137,474**
5	02	03	1.01	01	Penyusunan Standar Harga	Opini BPK	Jumlah Periode Standar Satuan Harga Pemerintah Provinsi Jambi	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja dan Pengelolaan Keuangan Daerah		WTP Nilai	1 Tahun	100%	427,956,961	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Opini BPK	WTP Nilai	513,548,353
5	02	03	1.01	02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Opini BPK	Jumlah Periode Standar BMD dan Standar Kebutuhan BMD Pemerintah Provinsi Jambi	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja dan Pengelolaan Keuangan Daerah		WTP Nilai	1 Tahun	100%	527,956,961	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Opini BPK	WTP Nilai	633,548,353
5	02	03	1.01	03	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Opini BPK	Jumlah Perioe RKBMD Pemerintah Provinsi Jambi	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja dan Pengelolaan Keuangan Daerah		WTP Nilai	1 Tahun	100%	360,976,933	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Opini BPK	WTP Nilai	433,172,320
5	02	03	1.01	04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Opini BPK	Jumlah Kebijakan	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja dan Pengelolaan Keuangan Daerah		WTP Nilai	1 Dokumen	100%	277,956,961	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Opini BPK	WTP Nilai	333,548,353
5	02	03	1.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Opini BPK	Jumlah Penatausahaan BMD OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja dan Pengelolaan Keuangan Daerah		WTP Nilai	43 OPD	100%	727,956,961	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Opini BPK	WTP Nilai	873,548,353
5	02	03	1.01	06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Opini BPK	Jumlah Inventarisasi BMD OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja dan Pengelolaan Keuangan Daerah		WTP Nilai	43 OPD	100%	622,692,358	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Opini BPK	WTP Nilai	747,230,830
5	02	03	1.01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Opini BPK	Jumlah Pengamanan BMD Pemerintah Provinsi Jambi	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja dan Pengelolaan Keuangan Daerah		WTP Nilai	43 OPD	100%	2,150,173,517	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Opini BPK	WTP Nilai	2,650,173,517
5	02	03	1.01	08	Penilaian Barang Milik Daerah	Opini BPK	Jumlah Hasil Penilaian BMD Pemerintah Provinsi Jambi	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja dan Pengelolaan Keuangan Daerah		WTP Nilai	43 OPD	100%	289,578,993	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Opini BPK	WTP Nilai	347,494,792
5	02	03	1.01	09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Opini BPK	Jumlah Monitoring dan Evaluasi BMD Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja dan Pengelolaan Keuangan Daerah		WTP Nilai	43 OPD	100%	311,776,985	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Opini BPK	WTP Nilai	374,132,382

5	02	03	1.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Opini BPK	Jumlah Penetapan Status Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja dan Pengelolaan Keuangan Daerah		WTP Nilai	43 OPD	100%	539,076,637	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Opini BPK	WTP Nilai	646,891,964
5	02	03	1.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Opini BPK	Jumlah Pelaksanaan Rekonsiliasi BMD OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja dan Pengelolaan Keuangan Daerah		WTP Nilai	43 OPD	100%	277,956,961	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Opini BPK	WTP Nilai	333,548,353
5	02	03	1.01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Opini BPK	Jumlah Laporan BMD Pemerintah Provinsi Jambi	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja dan Pengelolaan Keuangan Daerah		WTP Nilai	43 OPD	100%	527,956,961	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Opini BPK	WTP Nilai	633,548,353
5	02	03	1.01	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Opini BPK	Jumlah Pembinaan, Sosilaisasi/Rakor/Bimtek Pengelolaan BMD Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kab/Kota Dalam Provinsi Jambi Jumlah Pembinaan, Sosilaisasi/Rakor/Bimtek Pengelolaan BMD Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kab/Kota Dalam Provinsi Jambi	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja dan Pengelolaan Keuangan Daerah		WTP Nilai	1 Pemprov 11 PemKab/Kota	100%	446,459,626	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Opini BPK	WTP Nilai	535,751,551
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**								**18,051,164,690**					**19,144,995,158**
5	**02**	**04**	**1.01**		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**								**18,051,164,690**					**19,144,995,158**
5	02	04	1.01	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Jumlah laporan	Meningkatnya Pendapatan Daerah		5,25 persen	12 Laporan	5%	1,045,719,219	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	5,25 persen	1,098,005,180
5	02	04	1.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Meningkatnya Pendapatan Daerah		5,25 persen	12 Kali	5%	6,805,983,948	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	5,25 persen	7,078,223,306
5	02	04	1.01	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Jumlah jenis penyediaan Sarana dan Prasarana pada UPTD PPD	Meningkatnya Pendapatan Daerah		5,25 persen	11 Kab/Kota	5%	4,858,527,664	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	5,25 persen	5,101,464,047
5	02	04	1.01	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Kab/kota dengan Sistem Kesamsatan yang dipelihara	Meningkatnya Pendapatan Daerah		5,25 persen	11 Kab/Kota	5%	3,574,139,435	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	5,25 persen	4,110,260,351
5	02	04	1.01	08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Jumlah pelayaan penerimaan PBBKB, PAP dan Pajak Rokok	Meningkatnya Pendapatan Daerah		5,25 persen	12 Kali	5%	624,671,768	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	5,25 persen	563,676,317
5	02	04	1.01	12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Laporan	Meningkatnya Pendapatan Daerah		5,25 persen	4 Kali	5%	512,433,016	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	5,25 persen	563,676,317
5	02	04	1.01	13	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Jumlah PD Pengelolaan Retribusi Daerah yang dibina dan diawasi	Meningkatnya Pendapatan Daerah		5,25 persen	18 OPD	5%	629,689,640	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	5,25 persen	629,689,640
												TOTAL	**1,163,521,856,771**					**1,251,433,020,809**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Jambi
Tahun 2022

Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
										Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**													
5	**03**				**KEPEGAWAIAN**								**27,107,716,387**					**43,750,936,735**
5	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**21,146,765,544**					**37,202,272,528**
5	**03**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**310,000,000**					**310,000,000**
5	03	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terealiasasinya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	70 persen	2 Dokumen	100 Persen	25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	70 persen	25,000,000
5	03	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai SAKIP	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terealiasasinya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	70 persen	1 Dokumen	100 Persen	250,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	70 persen	250,000,000
5	03	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terealiasasinya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	70 persen	3 Dokumen	100 Persen	35,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	70 persen	35,000,000
5	**03**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**17,237,000,000**					**17,370,000,000**
5	03	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai SAKIP	Periode Pembayaran Gaji dan Tunjangan	Terealisasinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	70 persen	14 Bulan	100 Persen	17,000,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	70 persen	17,100,000,000
5	03	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Nilai SAKIP	Periode Penyediaan Administrasi Keuangan	Terealisasinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	70 persen	12 Bulan	100 Persen	220,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	70 persen	250,000,000
5	03	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai SAKIP	Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terealisasinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	70 persen	1 Dokumen	100 Persen	17,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	70 persen	20,000,000
5	**03**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**260,000,000**					**281,000,000**
5	03	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Nilai SAKIP	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terealisasinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	70 persen	100 Stel	100 Persen	60,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	70 persen	63,000,000
5	03	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai SAKIP	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi/Rapat Kerja/Forum Kepala BKD se-Provinsi/FGD di Bidang Kepegawaian	Terealisasinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	70 persen	1 Kali	100 Persen	120,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	70 persen	126,000,000
5	03	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai SAKIP	Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terealisasinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 persen	15 Orang	100 Persen	80,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	70 persen	92,000,000
5	**03**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**831,900,000**					**893,690,000**
5	03	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP	Periode Penyediaan Komponen Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Terealisasinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	70 persen	12 Bulan	100 Persen	24,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	70 persen	24,000,000
5	03	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terealisasinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	70 persen	20 Unit	100 Persen	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	70 persen	200,000,000
5	03	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai SAKIP	Jumlah Barang Cetakan Jumlah Penggandaan	Terealisasinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	70 persen	3 Jenis 7500 Lembar	100 Persen	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	70 persen	22,000,000

5	03	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai SAKIP	Periode Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang-Undangan	Terealisasinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	70 persen	12 Bulan	100 Persen	18,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	70 persen	20,000,000
5	03	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai SAKIP	Periode Penyediaan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terealisasinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	70 persen	12 Bulan	100 Persen	12,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	70 persen	14,000,000
5	03	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP	Jumlah Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Terealisasinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 persen	80 Kali	100 Persen	437,900,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	70 persen	481,690,000
5	03	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Nilai SAKIP	Jumlah data arsip hasil pindaian yang dikumpulkan, ditelaah dan diklasifikasi	Terealisasinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	70 persen	1500 Dokumen Arsip	100 Persen	120,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	70 persen	132,000,000
5	**03**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**720,000,000**					**981,000,000**
5	03	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas	Terealisasinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	70 persen	2 Unit	100 Persen	500,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	70 persen	750,000,000
5	03	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Nilai SAKIP	Jumlah Pengadaan Mebel	Terealisasinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	70 persen	20 Set	100 Persen	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	70 persen	105,000,000
5	03	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung	Terealisasinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	70 persen	1 Paket	100 Persen	120,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	70 persen	126,000,000
5	**03**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**758,781,070**					**771,043,831**
5	03	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP	Periode Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terealisasinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	70 persen	12 Bulan	100 Persen	3,882,120	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	70 persen	4,270,332
5	03	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP	Periode Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terealisasinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	70 persen	12 Bulan	100 Persen	499,714,856	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	70 persen	524,700,598
5	03	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP	Periode Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terealisasinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	70 persen	12 Bulan	100 Persen	255,184,094	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	70 persen	242,072,901
5	**03**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**1,029,084,474**					**16,595,538,697**
5	03	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan dan Operasional Yang Terpelihara	Terealisasinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	70 persen	25 Unit	100 Persen	256,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	70 persen	269,010,000
5	03	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP	Jumlah Peralatan Kantor Yang Terpelihara	Terealisasinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	70 persen	5 Jenis	100 Persen	52,884,474	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	70 persen	55,528,697
5	03	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terealisasinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	70 persen	1 Gedung	100 Persen	700,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	70 persen	16,250,000,000
5	03	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terealisasinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	70 persen	1 Paket	100 Persen	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	70 persen	21,000,000

5	**03**	**02**			**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**								**5,960,950,843**						**6,548,664,207**
5	**03**	**02**	**1.01**		**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**								**1,485,000,000**						**1,770,000,000**
5	03	02	1.01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Indeks Profesionalitas ASN	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Jumlah formasi yang terisi atas Pelaksanaan Pengadaan ASN	Terealisasinya Pelayanan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	70 Indeks	1 Dokumen 310 Orang	100 Persen	700,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Profesionalitas ASN	70 Indeks	900,000,000
5	03	02	1.01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Indeks Profesionalitas ASN	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Terealisasinya Pelayanan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	70 Indeks	400 SK	100 Persen	60,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Profesionalitas ASN	70 Indeks	70,000,000
5	03	02	1.01	08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Indeks Profesionalitas ASN	Jumlah PNS / Anggota KORPRI yang difasilitasi	Terealisasinya Pelayanan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 Indeks	130 Orang	100 Persen	450,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Profesionalitas ASN	70 Indeks	500,000,000
5	03	02	1.01	12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Indeks Profesionalitas ASN	Jumlah Pengelolaan, Pemeliharaan Data Informasi Kepegawaian	Terealisasinya Pelayanan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	70 Indeks	100 Data Informasi	100 Persen	275,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Profesionalitas ASN	70 Indeks	300,000,000
5	**03**	**02**	**1.02**		**Mutasi dan Promosi ASN**								**1,169,999,915**						**1,329,999,915**
5	03	02	1.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Indeks Penerapan Sistem Merit ASN	Jumlah SK Jabatan Pelaksana Jumlah SK Kenaikan Gaji Berkala PNS Pemerintah Provinsi Jambi Jumlah SK Mutasi	Terealisasinya Pelayanan Mutasi dan Promosi ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	250 Indeks	5500 SK 4800 SK 250 SK	100 Persen	149,999,915	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Penerapan Sistem Merit ASN	250 Indeks	149,999,915
5	03	02	1.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Indeks Penerapan Sistem Merit ASN	Jumlah SK Kenaikan Pangkat yang terselesaikan Jumlah SK Penyesuaian Masa Kerja	Terealisasinya Pelayanan Mutasi dan Promosi ASN	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	250 Indeks	2850 SK 3 SK	100 Persen	220,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Penerapan Sistem Merit ASN	250 Indeks	230,000,000
5	03	02	1.02	03	Pengelolaan Promosi ASN	Indeks Penerapan Sistem Merit ASN	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi yang terisi melalui seleksi terbuka/mutasi Jumlah Pejabat Administrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi yang terisi melalui seleksi	Terealisasinya Pelayanan Mutasi dan Promosi ASN	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	250 Indeks	20 JPT 300 Pejabat Administrasi	100 Persen	800,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Penerapan Sistem Merit ASN	250 Indeks	950,000,000
5	**03**	**02**	**1.03**		**Pengembangan Kompetensi ASN**								**2,842,289,200**						**2,890,289,200**
5	03	02	1.03	01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Indeks Profesionalitas ASN	Jumlah yang terfasilitasi dalam Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Terealisasinya Pelayanan Pengembangan Kompetensi ASN	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	70 Indeks	1200 Orang	100 Persen	126,659,850	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Profesionalitas ASN	70 Indeks	126,659,850
5	03	02	1.03	03	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Indeks Profesionalitas ASN	Jumlah ASN yang terfasilitasi melalui Diklat Teknis	Terealisasinya Pelayanan Pengembangan Kompetensi ASN	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	70 Indeks	50 Orang	100 Persen	800,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Profesionalitas ASN	70 Indeks	800,000,000
5	03	02	1.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Indeks Profesionalitas ASN	Jumlah ASN Penerima Beasiswa Tugas Belajar dan Cost Sharing Jumlah SK Pelayanan Administrasi Pendidikan Lanjutan Aparatur Sipil Negara	Terealisasinya Pelayanan Pengembangan Kompetensi ASN	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	70 Indeks	30 Orang 300 SK	100 Persen	1,100,629,350	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Profesionalitas ASN	70 Indeks	1,100,629,350
5	03	02	1.03	09	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Indeks Profesionalitas ASN	Jumlah ASN yang terfasilitasi melalui Diklat Jabatan Fungsional	Terealisasinya Pelayanan Pengembangan Kompetensi ASN	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	70 Indeks	75 Orang	100 Persen	575,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Profesionalitas ASN	70 Indeks	575,000,000

5	03	02	1.03	14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Indeks Profesionalitas ASN	Jumlah Penerbitan SK Pelayanan Administrasi Jabatan Fungsional	Terealisasinya Pelayanan Pengembangan Kompetensi ASN	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	70 Indeks	250 SK	100 Persen	240,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Profesionalitas ASN	70 Indeks	288,000,000
5	**03**	**02**	**1.04**		**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**								**463,661,728**					**558,375,092**
5	03	02	1.04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Indeks Profesionalitas ASN	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Terealisasinya Pelayanan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	70 Indeks	12 Dokumen	100 Persen	130,726,728	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Profesionalitas ASN	70 Indeks	196,090,092
							Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				150 ASN							
5	03	02	1.04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Indeks Profesionalitas ASN	Jumlah Pemberian Pelayanan Izin Cuti PNS Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi	Terealisasinya Pelayanan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	70 Indeks	450 Orang	100 Persen	129,285,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Profesionalitas ASN	70 Indeks	140,285,000
							Jumlah Penerima Penghargaan PNS Teladan Berprestasi Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi				12 Orang							
							Jumlah PNS yang Mendapat Penghargaan SLKS				950 Orang							
5	03	02	1.04	07	Pembinaan Disiplin ASN	Indeks Profesionalitas ASN	Jumlah Laporan Pembinaan Disiplin ASN	Terealisasinya Pelayanan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	70 Indeks	12 Laporan	100 Persen	50,650,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Profesionalitas ASN	70 Indeks	67,000,000
5	03	02	1.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Indeks Profesionalitas ASN	Jumlah Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Terealisasinya Pelayanan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	70 Indeks	20 Laporan	100 Persen	153,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Profesionalitas ASN	70 Indeks	155,000,000
												TOTAL	**27,107,716,387**					**43,750,936,735**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Jambi
Tahun 2022

Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**													
5	**04**				**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**								**46,748,743,053**					**55,375,000,000**
5	**04**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**29,575,000,000**					**36,975,000,000**
5	**04**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**895,000,000**					**925,000,000**
5	04	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	jumlah study tiru persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengembangan SDM Aparatur	Persentase akuntabilitas perkantoran	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Indeks	1 kali 100 persen	100%	250,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	A Indeks	250,000,000
5	04	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Nilai SAKIP	pesentase penyusunan dokumen RKA-SKPD	Persentase akuntabilitas perkantoran	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	A Indeks	100 persen	100%	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	A Indeks	100,000,000
5	04	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai SAKIP	persentase penyusunan perubahan DPA-SKPD	Persentase akuntabilitas perkantoran	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	A Indeks	100 persen	100%	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	A Indeks	50,000,000
5	04	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai SAKIP	persentase penyusunan DPA SKPD	Persentase akuntabilitas perkantoran	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	A Indeks	100 persen	100%	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	A Indeks	100,000,000
5	04	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Nilai SAKIP	persentase penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Persentase akuntabilitas perkantoran	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	A Indeks	100 persen	100%	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	A Indeks	50,000,000
5	04	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai SAKIP	Persentase Penyusunan Buletin/Majalah/Jurnal Ilmiah Kediklatan dan laporan kinerja	Persentase akuntabilitas perkantoran	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	A Indeks	100 persen	100%	60,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	A Indeks	75,000,000
5	04	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Ppersentase evaluasi kinerja daerah (Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pengembangan SDM Aparatur) dan penelitian karya tulis ilmiah	Persentase akuntabilitas perkantoran	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Indeks	100 persen	100%	285,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	A Indeks	300,000,000

5	**04**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**16,350,000,000**						**20,400,000,000**
5	04	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai SAKIP	jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN	persentase akuntabilitas perkantoran	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	A Indeks	14 bulan	100%	16,000,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	A Indeks	20,000,000,000
5	04	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai SAKIP	% Tingkat pemenuhan honorarium panitia pelaksana kegiatan pengelola keuangan SKPD	persentase akuntabilitas perkantoran	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	A Indeks	100 persen	100%	350,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	A Indeks	400,000,000
							% Tingkat pemenuhan honorarium Pejabat Pembuat Komitmen, pejabat pengadaan barang/jasa, panitia pemeriksa hasil pekerjaan, pengurus dan penyimpan barang SKPD, PPTK, staf PPTK, Staf PPKom, stat pajabat pengadaan				100 persen						
							% Tingkat pemenuhan honorarium penyusun jurnal prajaiswara				100 persen							
							% Tingkat pemenuhan honorarium Tim Angka Kredit, Tim penjamin mutu SKPD				100 persen							
							% tingkat pemenuhan honorarium tim pengelola website				100 persen							
5	**04**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**180,000,000**						**200,000,000**
5	04	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Nilai SAKIP	persentase penyusunan perencanaan kebutuhan BMD SKPD	persentase pelayanan publik kantor	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	70 persen	100 persen	100 persen	45,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	70 persen	50,000,000
5	04	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Nilai SAKIP	jumlah Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	persentase pelayanan publik kantor	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	70 persen	2 kali	100 persen	45,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	70 persen	50,000,000
5	04	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai SAKIP	jumlah Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	persentase pelayanan publik kantor	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	70 persen	2 kali	100 persen	45,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	70 persen	50,000,000
5	04	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai SAKIP	persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	persentase pelayanan publik kantor	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	70 persen	100 persen	100 persen	45,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	70 persen	50,000,000
5	**04**	**01**	**1.04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**								**150,000,000**						**1,750,000,000**
5	04	01	1.04	05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Nilai SAKIP	persentase Pengolahan Data Retribusi Daerah	persentase pelayanan publik kantor	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	70 persen	100 persen	100 persen	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	70 persen	1,750,000,000
5	**04**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**1,260,000,000**						**1,430,000,000**
5	04	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Persentase pelayanan publik perkantoran	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	100	100 persen	100 persen	360,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	400,000,000
5	04	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	persentase Pejumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase pelayanan publik perkantoran	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	100	100 orang	100 persen	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	200,000,000
5	04	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	persentase PPendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase pelayanan publik perkantoran	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	100	100 persen	100 persen	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	60,000,000

5	04	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	jumlah study tiru persentase Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase pelayanan publik perkantoran	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	100	1 kali 100 persen	100 persen	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	160,000,000
5	04	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Persentase Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase pelayanan publik perkantoran	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	100	100 persen	100 persen	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	60,000,000
5	04	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	persentase pengembangan kapasitas aparatur internal	Persentase pelayanan publik perkantoran	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	100	100 persen	100 persen	350,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	400,000,000
5	04	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	persentase Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase pelayanan publik perkantoran	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	100	100 persen	100 persen	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	75,000,000
5	04	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase pelayanan publik perkantoran	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	100	1 kali	100 persen	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	75,000,000
5	**04**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**1,460,000,000**					**1,860,000,000**
5	04	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP	persentase Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pelayanan Publik Kantor	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	A Indeks	100 persen	100 persen	160,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	A Indeks	170,000,000
5	04	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP	persentase Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pelayanan Publik Kantor	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	A Indeks	3 jenis	100 persen	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	A Indeks	300,000,000
5	04	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP	persentase Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pelayanan Publik Kantor	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	A Indeks	100 persen	100 persen	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	A Indeks	260,000,000
5	04	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai SAKIP	persentase Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pelayanan Publik Kantor	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	A Indeks	100 persen	100 persen	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	A Indeks	150,000,000
5	04	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai SAKIP	persentase Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pelayanan Publik Kantor	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	A Indeks	100 persen	100 persen	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	A Indeks	150,000,000
5	04	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Nilai SAKIP	persentase Penyediaan Bahan/Material	Persentase Pelayanan Publik Kantor	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	A Indeks	100 persen	100 persen	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	A Indeks	100,000,000
5	04	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai SAKIP	jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Pelayanan Publik Kantor	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Indeks	30 orang	100 persen	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	A Indeks	60,000,000
5	04	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP	persentase Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelayanan Publik Kantor	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	A Indeks	100 persen	100 persen	400,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	A Indeks	450,000,000
5	04	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Nilai SAKIP	persentase Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase Pelayanan Publik Kantor	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	A Indeks	100 persen	100 persen	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	A Indeks	150,000,000
5	04	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Nilai SAKIP	persentase Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase Pelayanan Publik Kantor	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	A Indeks	100 persen	100 persen	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	A Indeks	70,000,000
5	**04**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**2,350,000,000**					**3,330,000,000**
5	04	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP	Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	persentase pelayanan publik kantor	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	70 persen	1 unit	100 persen	450,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	70 persen	820,000,000
5	04	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP	jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	persentase pelayanan publik kantor	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	70 persen	1 unit	100 persen	450,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	70 persen	460,000,000

5	04	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Nilai SAKIP	Jumlah jenis Pengadaan Mebel	persentase pelayanan publik kantor	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	70 persen	4 jenis	100 persen	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	70 persen	300,000,000
5	04	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP	persentase Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (AC, Laptop, Printer, Komputer, dll)	persentase pelayanan publik kantor	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	70 persen	100 persen	100 persen	550,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	70 persen	500,000,000
5	04	01	1.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Nilai SAKIP	persentase Pengadaan Aset Tetap Lainnya	persentase pelayanan publik kantor	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	70 persen	100 persen	100 persen	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	70 persen	150,000,000
5	04	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase pelayanan publik kantor	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	70 persen	100 persen	100 persen	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	70 persen	500,000,000
5	04	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP	Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase pelayanan publik kantor	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	70 persen	100 persen	100 persen	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	70 persen	300,000,000
5	04	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP	Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase pelayanan publik kantor	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	70 persen	100 persen	100 persen	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	70 persen	300,000,000
5	**04**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**1,760,000,000**					**1,960,000,000**
5	04	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP	Persentase Penyediaan Jasa Surat Menyurat	persentase pelayanan publik kantor	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	70 persen	100 persen	100 persen	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	70 persen	10,000,000
5	04	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP	Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	persentase pelayanan publik kantor	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	70 persen	100 persen	100 persen	800,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	70 persen	900,000,000
5	04	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP	Persentase Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase pelayanan publik kantor	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	70 persen	100 persen	100 persen	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	70 persen	150,000,000
5	04	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP	Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	persentase pelayanan publik kantor	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	70 persen	100 persen	100 persen	850,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	70 persen	900,000,000
5	**04**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**5,170,000,000**					**5,120,000,000**
5	04	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP	Persentase Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	persentase pelayanan publik kantor	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	70 persen	100 persen	100 persen	300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	70 persen	350,000,000
5	04	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP	Persentase Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	persentase pelayanan publik kantor	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	70 persen	100 persen	100 persen	60,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	70 persen	80,000,000
5	04	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	Nilai SAKIP	Persentase Pemeliharaan Mebel	persentase pelayanan publik kantor	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	70 persen	100 persen	100 persen	60,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	70 persen	70,000,000
5	04	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP	persenstase Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (komputer, printer, AC, dll)	persentase pelayanan publik kantor	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	70 persen	100 persen	100 persen	300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	70 persen	350,000,000
5	04	01	1.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Nilai SAKIP	persentase Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	persentase pelayanan publik kantor	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	70 persen	100 persen	100 persen	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	70 persen	70,000,000
5	04	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP	Persentase Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (rung kelas, gedung kantor, asrama, rumah dinas, dll)	persentase pelayanan publik kantor	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	70 persen	100 persen	100 persen	1,800,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	70 persen	2,000,000,000
5	04	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP	persentase Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (meja komputer, access point, jaringan internet, aplikasi SIKILAT, dll)	persentase pelayanan publik kantor	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	70 persen	100 persen	100 persen	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	70 persen	200,000,000

5	04	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP	persentase Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (drainase, jalan, lampu taman, lampu jalan, dll)	persentase pelayanan publik kantor	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	70 persen	100 persen	100 persen	2,400,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	70 persen	2,000,000,000
5	**04**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**								**17,173,743,053**					**18,400,000,000**
5	**04**	**02**	**1.01**		**Pengembangan Kompetensi Teknis**								**6,400,000,000**					**6,700,000,000**
5	04	02	1.01	01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan pegembangan SDM aparatur	jumlah kebijakan teknis pusat yang disosialisasikan (PERLAN tentang Pengembangan Kompetensi Teknis)	persentase peningkatan kualitas SDM	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	93%	100 persen	100 persen	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penyelenggaraan pegembangan SDM aparatur	93%	250,000,000
5	04	02	1.01	02	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan pegembangan SDM aparatur	jumlah penyusunan standar perangkat pembelajaran (penyusunan modul pembelajaran)	persentase peningkatan kualitas SDM	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	93%	20 buku	100 persen	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penyelenggaraan pegembangan SDM aparatur	93%	200,000,000
5	04	02	1.01	03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan pegembangan SDM aparatur	jumlah peserta yang mengikuti pengembangan Kompetensi teknis, umum, inti dan pilihan	persentase peningkatan kualitas SDM	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	93%	600 orang	100 persen	6,000,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penyelenggaraan pegembangan SDM aparatur	93%	6,000,000,000
5	04	02	1.01	04	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan pegembangan SDM aparatur	Frekuensi pembinaan Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan	persentase peningkatan kualitas SDM	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	93%	2 kali	100 persen	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penyelenggaraan pegembangan SDM aparatur	93%	250,000,000
5	**04**	**02**	**1.02**		**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**								**10,773,743,053**					**11,700,000,000**
5	04	02	1.02	01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional	Persentase kelulusan peserta setifikasi/uji kompetensi dan peserta pengembangan kompetensi	jumlah koordinasi dan sosialisasi kebijakan Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional	persentase kompetensi ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	72%	1 kegiatan	100 persen	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kelulusan peserta setifikasi/uji kompetensi dan peserta pengembangan kompetensi	72%	150,000,000
5	04	02	1.02	02	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	Persentase kelulusan peserta setifikasi/uji kompetensi dan peserta pengembangan kompetensi	Jumlah pembinaan pengelola LSP, dan penguatan tenaga asesorl	persentase kompetensi ASN	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	72%	1 kegiatan	100 persen	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kelulusan peserta setifikasi/uji kompetensi dan peserta pengembangan kompetensi	72%	150,000,000
5	04	02	1.02	03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Persentase kelulusan peserta setifikasi/uji kompetensi dan peserta pengembangan kompetensi	jumlah Peserta Uji Kompetensi dan Sertifikasi	persentase kompetensi ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	72%	500 orang	100 persen	1,500,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kelulusan peserta setifikasi/uji kompetensi dan peserta pengembangan kompetensi	72%	1,500,000,000

5	04	02	1.02	04	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Persentase kelulusan peserta setifikasi/uji kompetensi dan peserta pengembangan kompetensi	jumlah peserta pelatihan kapasitas tenaga pengembang jumlah peserta workshop penguatan tenaga asesor PELAKSANAAN AKREDITASI LEMBAGA pelaksanaan study tiru dan Monitoring Evaluasi Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi ASN	persentase kompetensi ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	72%	30 orang 30 orang 1 kali 1 kali	100 persen	750,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kelulusan peserta setifikasi/uji kompetensi dan peserta pengembangan kompetensi	72%	950,000,000
5	04	02	1.02	05	Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga	Persentase kelulusan peserta setifikasi/uji kompetensi dan peserta pengembangan kompetensi	Jumlah Monitoring Evaluasi Pelaksanaan kerjasama Kabupaten/kota Jumlah peserta pelatihan, workshop, bimtek, sosialisasi jumlah study tiru	persentase kompetensi ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	72%	1 kali 100 orang 1 kali	100 persen	373,743,053	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kelulusan peserta setifikasi/uji kompetensi dan peserta pengembangan kompetensi	72%	450,000,000
5	04	02	1.02	06	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional	Persentase kelulusan peserta setifikasi/uji kompetensi dan peserta pengembangan kompetensi	jumlah penyusunan standar perangkat pembelajaran pemerintah dalam negeri bagi pimpinan daerah, JPT dan jafung (penyusunan modul)	persentase kompetensi ASN	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	72%	10 dokumen	100 persen	250,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kelulusan peserta setifikasi/uji kompetensi dan peserta pengembangan kompetensi	72%	250,000,000
5	04	02	1.02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Persentase kelulusan peserta setifikasi/uji kompetensi dan peserta pengembangan kompetensi	Jumlah peserta yang mengikuti pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan dan fungsional	persentase kompetensi ASN	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	72%	550 orang	100 persen	7,500,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kelulusan peserta setifikasi/uji kompetensi dan peserta pengembangan kompetensi	72%	8,000,000,000
5	04	02	1.02	08	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Persentase kelulusan peserta setifikasi/uji kompetensi dan peserta pengembangan kompetensi	Frekuensi pembinaan Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	persentase kompetensi ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	72%	1 kali	100 persen	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kelulusan peserta setifikasi/uji kompetensi dan peserta pengembangan kompetensi	72%	250,000,000
												TOTAL	**46,748,743,053**					**55,375,000,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Jambi
Tahun 2022

Unit Organisasi : 5.05.0.00.0.00.01.0000 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.05.0.00.0.00.01.0000 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**													
5	**05**				**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**								**18,356,910,592**					**19,509,236,710**
5	**05**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**12,054,630,000**					**12,260,500,000**
5	**05**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**495,000,000**					**555,000,000**
5	05	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Jumlah Dokumen Rencana Induk Kelitbangan (RIK) Jumlah Dokumen Renja Jumlah Dokumen Renstra Jumlah Pelaksanaan Rakorlitbangda, Forum OPD dan Forum Diskusi Aktual (FDA)	Persentase tersusunnya Dokumen Perencanaan, Pengganggaran dan Evaluasi Kinerja Balitbangda	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	BB indeks	1 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 3 Kali	100%	325,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	BB indeks	340,000,000
5	05	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Nilai SAKIP	Jumlah Dokumen RKA SKPD	Persentase tersusunnya Dokumen Perencanaan, Pengganggaran dan Evaluasi Kinerja Balitbangda	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	BB indeks	1 Dokumen	100%	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	BB indeks	30,000,000
5	05	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai SAKIP	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	Persentase tersusunnya Dokumen Perencanaan, Pengganggaran dan Evaluasi Kinerja Balitbangda	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	BB indeks	1 Dokumen	100%	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	BB indeks	30,000,000
5	05	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai SAKIP	Jumlah Dokumen DPA SKPD	Persentase tersusunnya Dokumen Perencanaan, Pengganggaran dan Evaluasi Kinerja Balitbangda	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	BB indeks	1 Dokumen	100%	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	BB indeks	30,000,000
5	05	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Nilai SAKIP	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	Persentase tersusunnya Dokumen Perencanaan, Pengganggaran dan Evaluasi Kinerja Balitbangda	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	BB indeks	1 Dokumen	100%	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	BB indeks	30,000,000
5	05	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai SAKIP	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah (LKj, LPPD, LPPK, Laporan Tahunan/6 Januari, Executive Summary dan Cascading Kinerja) Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Hasil Kelitbangan	Persentase tersusunnya Dokumen Perencanaan, Pengganggaran dan Evaluasi Kinerja Balitbangda	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	BB indeks	7 Dokumen 1 Laporan	100%	90,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	BB indeks	95,000,000
5	**05**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**8,985,000,000**					**9,290,000,000**
5	05	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai SAKIP	Periode Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	BB indeks	14 bulan	100%	8,900,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	BB indeks	9,200,000,000
5	05	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Nilai SAKIP	Periode Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	BB indeks	12 bulan	100%	85,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	BB indeks	90,000,000
5	**05**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**76,000,000**					**80,000,000**
5	05	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai SAKIP	Periode Penatausahaan Barang Milik Daerah yang terinventarisasi	Persentase Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	BB indeks	12 bulan	100%	76,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	BB indeks	80,000,000
5	**05**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**162,250,000**					**185,500,000**
5	05	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Nilai SAKIP	Jumlah Pengadaan Pakaian DInas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sipil Daerah	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	BB indeks	65 Stel	100%	42,250,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	BB indeks	45,500,000

5	05	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Nilai SAKIP	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat Formal/Workshop	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sipil Daerah	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	BB indeks	12 orang	100%	120,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	BB indeks	140,000,000
5	**05**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**785,000,000**					**855,000,000**
5	05	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP	Jumlah Komponen Instalasi Listri/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Penyelesaian Pelayanan Administrasi Umum	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	BB indeks	7 jenis	100%	15,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	BB indeks	20,000,000
5	05	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP	Jumlah Jenis ATK Jumlah Jenis Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Persentase Penyelesaian Pelayanan Administrasi Umum	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	BB indeks	40 jenis 5 jenis	100%	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	BB indeks	175,000,000
5	05	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai SAKIP	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	Persentase Penyelesaian Pelayanan Administrasi Umum	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	BB indeks	5 jenis	100%	15,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	BB indeks	20,000,000
5	05	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP	Jumlah Peserta Rapat/Tamu dll	Persentase Penyelesaian Pelayanan Administrasi Umum	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	BB indeks	500 orang	100%	30,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	BB indeks	35,000,000
5	05	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai SAKIP	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Penyelesaian Pelayanan Administrasi Umum	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	BB indeks	4 jenis	100%	45,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	BB indeks	50,000,000
5	05	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai SAKIP	Jumlah Bahan Bacaan	Persentase Penyelesaian Pelayanan Administrasi Umum	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	BB indeks	2000 Eksemplar	100%	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	BB indeks	15,000,000
5	05	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang Dilaksanakan	Persentase Penyelesaian Pelayanan Administrasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB indeks	65 Kali	100%	420,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	BB indeks	440,000,000
5	05	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Nilai SAKIP	Jumlah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dibangun	Persentase Penyelesaian Pelayanan Administrasi Umum	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	BB indeks	1 Aplikasi	100%	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	BB indeks	100,000,000
5	**05**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**525,000,000**					**130,000,000**
5	05	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP	Jumlah Kendaraan Roda Dua Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Roda Empat Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	BB indeks	2 unit 1 unit	100%	400,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	BB indeks	0
5	05	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Nilai SAKIP	Jumlah Pengadaan Mebel	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	BB indeks	3 jenis	100%	30,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	BB indeks	35,000,000
5	05	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	BB indeks	1 unit	100%	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	BB indeks	50,000,000
5	05	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	BB indeks	3 Jenis	100%	45,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	BB indeks	45,000,000
5	**05**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**410,000,000**					**485,000,000**
5	05	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP	Jumlah Surat Keluar per Tahun	Persentase Penyelesaian Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	BB indeks	1200 Lembar	100%	40,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	BB indeks	45,000,000
5	05	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP	Periode Pembayaran Rekening	Persentase Penyelesaian Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	BB indeks	12 Bulan	100%	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	BB indeks	200,000,000
5	05	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan Priode Pemakian Jasa Kebersihan Kantor	Persentase Penyelesaian Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	BB indeks	7 Orang 12 Bulan	100%	220,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	BB indeks	240,000,000
5	**05**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**616,380,000**					**680,000,000**
5	05	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Terperlihara	Persentase Penyelesaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	BB indeks	20 unit	100%	305,380,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	BB indeks	310,000,000

5	05	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Persentase Penyelesaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	BB indeks	4 Unit	100%	136,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	BB indeks	140,000,000
5	05	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP	Jumlah Pemeliharaan Peralatan Gedung KAntor	Persentase Penyelesaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	BB indeks	30 Unit	100%	25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	BB indeks	30,000,000
5	05	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP	Jumlah Unit Ruangan yang Terpilihara	Persentase Penyelesaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	BB indeks	1 Unit	100%	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	BB indeks	200,000,000
5	**05**	**02**			**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**								**6,302,280,592**					**7,248,736,710**
5	**05**	**02**	**1.01**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**								**1,450,000,000**					**1,850,000,000**
5	05	02	1.01	01	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan perangkat daerah atau pihak lainnya	Jumlah Laporan Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Persentase Rekomendasi Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Diaplikasikan Perangkat Daerah atau Pihak Lainnya pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 persen	1 Laporan	50%	320,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan perangkat daerah atau pihak lainnya	50 persen	365,000,000
5	05	02	1.01	02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan perangkat daerah atau pihak lainnya	Jumlah Laporan Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Persentase Rekomendasi Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Diaplikasikan Perangkat Daerah atau Pihak Lainnya pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 persen	1 Laporan	50%	220,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan perangkat daerah atau pihak lainnya	50 persen	240,000,000
5	05	02	1.01	04	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan perangkat daerah atau pihak lainnya	Jumlah Laporan Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Persentase Rekomendasi Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Diaplikasikan Perangkat Daerah atau Pihak Lainnya pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 persen	1 Laporan	50%	220,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan perangkat daerah atau pihak lainnya	50 persen	240,000,000
5	05	02	1.01	06	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan perangkat daerah atau pihak lainnya	Jumlah Laporan Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Rekomendasi Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Diaplikasikan Perangkat Daerah atau Pihak Lainnya pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 persen	1 Laporan	50%	220,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan perangkat daerah atau pihak lainnya	50 persen	240,000,000
5	05	02	1.01	11	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan perangkat daerah atau pihak lainnya	Jumlah Laporan Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	Persentase Rekomendasi Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Diaplikasikan Perangkat Daerah atau Pihak Lainnya pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 persen	1 Laporan	50%	220,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan perangkat daerah atau pihak lainnya	50 persen	240,000,000
5	05	02	1.01	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan perangkat daerah atau pihak lainnya	Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan	Persentase Rekomendasi Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Diaplikasikan Perangkat Daerah atau Pihak Lainnya pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	50 persen	8 Dokumen	50%	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan perangkat daerah atau pihak lainnya	50 persen	65,000,000

5	05	02	1.01	13	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan perangkat daerah atau pihak lainnya	Jumlah Laporan/Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	Persentase Rekomendasi Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Diaplikasikan Perangkat Daerah atau Pihak Lainnya pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	50 persen	0 Laporan	50%	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan perangkat daerah atau pihak lainnya	50 persen	240,000,000
5	05	02	1.01	14	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan perangkat daerah atau pihak lainnya	Jumlah laporan Fasilitas dan evaluasi pelaksanaan kegiatan data dan pengkajian peraturan Jumlah Sosialisasi Peraturan Daerah /Peraturan Gubernur Tentang Penyelenggaraan Inovasi Di Daerah	Persentase Rekomendasi Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Diaplikasikan Perangkat Daerah atau Pihak Lainnya pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	50 persen	1 Laporan 1 Kali	50%	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan perangkat daerah atau pihak lainnya	50 persen	220,000,000
5	**05**	**02**	**1.02**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**								**1,320,000,000**					**1,440,000,000**
5	05	02	1.02	01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan perangkat daerah atau pihak lainnya	Jumlah Laporan Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Persenatse Rekomendasi Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Diaplikasikan Parangkat Daerah dan Pihak Lainnya pada Bidang Sosial dan Kependudukan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 persen	1 Laporan	50%	220,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan perangkat daerah atau pihak lainnya	50 persen	240,000,000
5	05	02	1.02	03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan perangkat daerah atau pihak lainnya	Jumlah Laporan Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	Persenatse Rekomendasi Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Diaplikasikan Parangkat Daerah dan Pihak Lainnya pada Bidang Sosial dan Kependudukan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 persen	1 Laporan	50%	220,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan perangkat daerah atau pihak lainnya	50 persen	240,000,000
5	05	02	1.02	05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan perangkat daerah atau pihak lainnya	Jumlah Laporan Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Pariwisata	Persenatse Rekomendasi Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Diaplikasikan Parangkat Daerah dan Pihak Lainnya pada Bidang Sosial dan Kependudukan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 persen	1 Laporan	50%	220,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan perangkat daerah atau pihak lainnya	50 persen	240,000,000
5	05	02	1.02	07	Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan perangkat daerah atau pihak lainnya	Jumlah Laporan Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Persenatse Rekomendasi Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Diaplikasikan Parangkat Daerah dan Pihak Lainnya pada Bidang Sosial dan Kependudukan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 persen	1 Laporan	50%	220,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan perangkat daerah atau pihak lainnya	50 persen	240,000,000
5	05	02	1.02	09	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan perangkat daerah atau pihak lainnya	Jumlah Laporan Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Tenaga Kerja	Persenatse Rekomendasi Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Diaplikasikan Parangkat Daerah dan Pihak Lainnya pada Bidang Sosial dan Kependudukan	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	50 persen	1 Laporan	50%	220,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan perangkat daerah atau pihak lainnya	50 persen	240,000,000
5	05	02	1.02	11	Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan perangkat daerah atau pihak lainnya	Jumlah Laporan Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Transmigrasi	Persenatse Rekomendasi Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Diaplikasikan Parangkat Daerah dan Pihak Lainnya pada Bidang Sosial dan Kependudukan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 persen	1 Laporan	50%	220,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan perangkat daerah atau pihak lainnya	50 persen	240,000,000

5	**05**	**02**	**1.03**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**								**1,500,000,000**						**1,800,000,000**
5	05	02	1.03	02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan perangkat daerah atau pihak lainnya	Jumlah Laporan Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Persentase Rekomendasi Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Diaplikasikan Perangkat DAerah atau Pihak Lainnya pada Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 persen	1 Laporan	50%	250,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan perangkat daerah atau pihak lainnya	50 persen	300,000,000
5	05	02	1.03	04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan perangkat daerah atau pihak lainnya	Jumlah Laporan Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Persentase Rekomendasi Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Diaplikasikan Perangkat DAerah atau Pihak Lainnya pada Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 persen	1 Laporan	50%	250,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan perangkat daerah atau pihak lainnya	50 persen	300,000,000
5	05	02	1.03	06	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan perangkat daerah atau pihak lainnya	Jumlah Laporan Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	Persentase Rekomendasi Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Diaplikasikan Perangkat DAerah atau Pihak Lainnya pada Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 persen	1 Laporan	50%	250,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan perangkat daerah atau pihak lainnya	50 persen	300,000,000
5	05	02	1.03	08	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan perangkat daerah atau pihak lainnya	Jumlah Laporan Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Kehutanan	Persentase Rekomendasi Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Diaplikasikan Perangkat DAerah atau Pihak Lainnya pada Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 persen	1 Laporan	50%	250,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan perangkat daerah atau pihak lainnya	50 persen	300,000,000
5	05	02	1.03	10	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan perangkat daerah atau pihak lainnya	Jumlah Laporan Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Perhubungan	Persentase Rekomendasi Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Diaplikasikan Perangkat DAerah atau Pihak Lainnya pada Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 persen	1 Laporan	50%	250,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan perangkat daerah atau pihak lainnya	50 persen	300,000,000
5	05	02	1.03	12	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan perangkat daerah atau pihak lainnya	Jumlah Laporan Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan	Persentase Rekomendasi Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Diaplikasikan Perangkat DAerah atau Pihak Lainnya pada Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 persen	1 Laporan	50%	250,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan perangkat daerah atau pihak lainnya	50 persen	300,000,000
5	**05**	**02**	**1.04**		**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**								**2,032,280,592**						**2,158,736,710**
5	05	02	1.04	01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan perangkat daerah atau pihak lainnya	Jumlah Laporan Hasil Penelitian dan Pengembangan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Persentase Rekomendasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi yang Diaplikasikan perangkat Daerah dan Pihak Lainnya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 persen	1 Laporan	50%	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan perangkat daerah atau pihak lainnya	50 persen	500,000,000
5	05	02	1.04	02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan perangkat daerah atau pihak lainnya	Jumlah Dokumen Inovasi Produk Daerah Jumlah Klaster Inovasi Produk Daerah Melalui Pilot Project Pengembangan Klaster Industri Produk Daerah Jumlah Pelatihan Difusi Inovasi Produk Daerah Jumlah Penerapan Teknologi	Persentase Rekomendasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi yang Diaplikasikan perangkat Daerah dan Pihak Lainnya	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	50 persen	3 Dokumen 2 Buah 10 Kali 1 Teknologi	50%	732,280,592	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan perangkat daerah atau pihak lainnya	50 persen	458,736,710

5	05	02	1.04	03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan perangkat daerah atau pihak lainnya	Jumlah Inovasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase Rekomendasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi yang Diaplikasikan perangkat Daerah dan Pihak Lainnya	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	50 persen	1 Inovasi	50%	300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan perangkat daerah atau pihak lainnya	50 persen	350,000,000
5	05	02	1.04	04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan perangkat daerah atau pihak lainnya	Jumlah Sosialisasi dan Diseminasi Hasil Kelitbangan	Persentase Rekomendasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi yang Diaplikasikan perangkat Daerah dan Pihak Lainnya	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	50 persen	3 Jenis	50%	400,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan perangkat daerah atau pihak lainnya	50 persen	400,000,000
5	05	02	1.04	05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan perangkat daerah atau pihak lainnya	Jumlah Buku Sumber Daya Genetik (SDG) Jumlah Dokumen yang siap Didaftarkan HKI	Persentase Rekomendasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi yang	Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kelurahan	50 persen	1 Buku 10 Dokumen	50%	400,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan	50 persen	450,000,000
												TOTAL	**18,356,910,592**					**19,509,236,710**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Jambi
Tahun 2022

Unit Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
										Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**													
5	**07**				**PENGELOLAAN PENGHUBUNG**								**22,417,953,582**					**23,763,236,942**
5	**07**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**20,387,296,690**					**21,555,650,360**
5	**07**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**126,500,000**					**139,150,000**
5	07	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Jumlah dokumen perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 persen	11 Dokumen	15 Dokumen	82,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	70 persen	90,750,000
5	07	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Jumlah dokumen pelaporan	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 persen	4 Dokumen	15 Dokumen	44,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	70 persen	48,400,000
5	**07**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**9,027,088,088**					**9,929,796,897**
5	07	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai SAKIP	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan (bulan)	Persentase terlaksananya administrasi keuangan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 persen	14 Bulan	100%	8,601,863,211	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	70 persen	9,462,049,532
5	07	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai SAKIP	Jumlah honorarium Penanggungjawab Pengelola keuangan dan Pengadaan Barang/Jasa	Persentase terlaksananya administrasi keuangan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 persen	12 Bulan	100%	425,224,877	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	70 persen	467,747,365
5	**07**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**418,489,040**					**240,337,944**
5	07	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Nilai SAKIP	Periode Pembayaran Polis Asuransi Kendaraan dan Gedung	Persentase terlaksananya administrasi Barang Milik Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 persen	2 Kali	100%	218,489,040	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	70 persen	240,337,944
5	07	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai SAKIP	Pembayaran Pengurusan IMB Gedung	Persentase terlaksananya administrasi Barang Milik Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 persen	1 Kali	100%	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	70 persen	0
5	**07**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**87,989,000**					**96,787,900**
5	07	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Nilai SAKIP	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur sipil daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 persen	110 Stel	100%	66,495,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	70 persen	73,144,500
5	07	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Nilai SAKIP	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur sipil daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 persen	10 Orang	100%	21,494,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	70 persen	23,643,400
5	**07**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**3,013,515,386**					**3,314,866,925**
5	07	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP	Jumlah Jenis Komponen Instansi listrik/Penerangan Kantor	Persentase penyelesaian pelayanan administrasi umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 persen	13 Jenis	100%	58,042,710	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	70 persen	63,846,981
5	07	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP	Jumlah Alat Tulis Kantor	Persentase penyelesaian pelayanan administrasi umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 persen	44 Jenis	100%	370,897,901	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	70 persen	407,987,691
5	07	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP	Jumlah Peserta Rapat/Tamu	Persentase penyelesaian pelayanan administrasi umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 persen	30000 Orang/Tamu	100%	1,293,675,633	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	70 persen	1,423,043,197
5	07	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai SAKIP	Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase penyelesaian pelayanan administrasi umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 persen	25 Jenis	100%	60,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	70 persen	66,000,000
5	07	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai SAKIP	Jumlah Jenis Bahan Bacaan	Persentase penyelesaian pelayanan administrasi umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 persen	2 Jenis	100%	49,492,542	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	70 persen	54,441,796
5	07	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai SAKIP	Jumlah Tamu	Persentase penyelesaian pelayanan administrasi umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 persen	1000 Orang/Tamu	100%	55,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	70 persen	60,500,000
5	07	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Persentase penyelesaian pelayanan administrasi umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 persen	950 Kali	100%	1,126,406,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	70 persen	1,239,047,260

5	**07**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**1,743,500,000**						**1,302,850,000**
5	07	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 persen	3 Unit	100%	1,650,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	70 persen	1,200,000,000
5	07	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Nilai SAKIP	Jumlah Jenis Pengadaan Mebel	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 persen	4 Jenis	100%	33,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	70 persen	36,300,000
5	07	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP	Jumlah Jenis Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 persen	4 Jenis	100%	60,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	70 persen	66,550,000
5	**07**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**3,052,344,976**						**3,322,203,474**
5	07	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP	Pengiriman Surat dan Barang ke luar Daerah	Persentase penyelesaian jasa penunjang urusan perangkat daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 persen	21 Kali	100%	48,889,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	70 persen	53,778,450
5	07	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP	Periode Pembayaran rekening	Persentase penyelesaian jasa penunjang urusan perangkat daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 persen	12 Bulan	100%	1,449,201,237	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	70 persen	1,594,121,361
5	07	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP	Pengisian tabung gas	Persentase penyelesaian jasa penunjang urusan perangkat daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 persen	7 Kali	100%	111,534,509	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	70 persen	122,687,960
5	07	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP	Periode Pemakaian Jasa Kebersihan Kantor	Persentase penyelesaian jasa penunjang urusan perangkat daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 persen	12 Bulan	100%	1,442,719,730	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	70 persen	1,551,615,703
5	**07**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**2,917,870,200**						**3,209,657,220**
5	07	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	Persentase penyelesaian pemeliharaan barang milik daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 persen	23 Unit	100%	1,067,826,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	70 persen	1,174,609,480
5	07	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	Persentase penyelesaian pemeliharaan barang milik daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 persen	23 Unit	100%	1,067,826,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	70 persen	1,174,609,480
5	07	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP	Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara	Persentase penyelesaian pemeliharaan barang milik daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 persen	5 Unit	100%	192,689,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	70 persen	211,958,120
5	07	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara	Persentase penyelesaian pemeliharaan barang milik daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 persen	4 Unit	100%	589,527,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	70 persen	648,480,140
5	**07**	**02**			**PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG**								**2,030,656,892**						**2,207,586,582**
5	**07**	**02**	**1.01**		**Pelaksanaan Pelayanan Penghubung**								**2,030,656,892**						**2,207,586,582**
5	07	02	1.01	01	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	Persentase pelayanan penghubung yang optimal	Jumlah periode kegiatan pelayanan publik bagi aparatur dan masyarakat	Jumlah pelayanan yang dilaksanakan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	1 Tahun	25 Kali	55,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan penghubung yang optimal	100 persen	60,500,000
5	07	02	1.01	02	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Persentase pelayanan penghubung yang optimal	Jumlah kegiatan Sarasehan dan Sosialisasi yang dilaksanakan	Jumlah pelayanan yang dilaksanakan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	2 Kali	25 Kali	99,873,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan penghubung yang optimal	100 persen	109,860,740
5	07	02	1.01	03	Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Persentase pelayanan penghubung yang optimal	Jumlah fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Seni Budaya (event)	Jumlah pelayanan yang dilaksanakan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	20 Kali	25 Kali	625,783,492	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan penghubung yang optimal	100 persen	662,225,842
5	07	02	1.01	04	Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan pelestarian Seni Budaya	Persentase pelayanan penghubung yang optimal	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jumlah pelayanan yang dilaksanakan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	2 Kali	25 Kali	1,200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan penghubung yang optimal	100 persen	1,320,000,000
5	07	02	1.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Persentase pelayanan penghubung yang optimal	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pelayanan penghubung	Jumlah pelayanan yang dilaksanakan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	1 Kali	25 Kali	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan penghubung yang optimal	100 persen	55,000,000
												TOTAL	**22,417,953,582**						**23,763,236,942**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Jambi
Tahun 2022

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah Provinsi
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah Provinsi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
										Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
6					**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**													
6	**01**				**INSPEKTORAT DAERAH**								**39,856,080,952**					**43,931,754,059**
6	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**28,167,017,218**					**31,073,673,948**
6	**01**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**267,408,429**					**294,149,281**
6	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Jumlah Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan		70 persen	3 Dokumen	20 Dokumen	118,908,599	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	70 persen	130,799,458
6	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai SAKIP		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan		70 persen		20 Dokumen	148,499,830	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP	70 persen	163,349,823
6	**01**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**17,057,603,023**					**18,763,363,325**
6	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								17,057,603,023	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				18,763,363,325
6	**01**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**3,849,983,095**					**4,324,981,405**
6	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								3,849,983,095	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4,324,981,405
6	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**2,085,670,272**					**2,294,192,298**
6	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								34,996,550	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				38,496,204
6	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								97,324,830	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				107,057,313
6	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								190,250,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				209,275,550
6	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								137,126,440	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				150,839,084
6	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								28,520,712	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				31,327,783
6	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								1,597,451,240	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,757,196,364
6	**01**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**2,705,451,506**					**2,975,996,656**
6	01	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								32,153,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				35,368,300
6	01	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								2,673,298,506	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2,940,628,356
6	**01**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**950,626,813**					**1,045,689,495**
6	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								72,089,402	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				79,298,342
6	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								293,463,687	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				322,810,056
6	01	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								19,932,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				21,925,200
6	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								565,141,724	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				621,655,897
6	**01**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**1,250,274,080**					**1,375,301,488**
6	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								333,586,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				366,944,600
6	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								169,081,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				185,989,100
6	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								193,306,080	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				212,636,688
6	01	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								554,301,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				609,731,100

6	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**								**8,394,895,812**						**9,234,385,395**
6	**01**	**02**	**1.01**		**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**								**7,176,842,303**						**7,894,526,534**
6	01	02	1.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah								2,241,086,826	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2,465,195,509
6	01	02	1.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah								981,187,966	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1,079,306,763
6	01	02	1.01	03	Reviu Laporan Kinerja								410,729,279	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					451,802,206
6	01	02	1.01	04	Reviu Laporan Keuangan								619,499,276	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					681,449,204
6	01	02	1.01	05	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota								1,143,874,776	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1,258,262,254
6	01	02	1.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP								1,780,464,180						1,958,510,598
6	**01**	**02**	**1.02**		**Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu**								**1,218,053,509**						**1,339,858,861**
6	01	02	1.02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah								89,534,896	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					98,488,386
6	01	02	1.02	02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu								1,128,518,613	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1,241,370,475
6	**01**	**03**			**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**								**3,294,167,922**						**3,623,694,716**
6	**01**	**03**	**1.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**								**631,790,632**						**694,969,696**
6	01	03	1.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan								331,809,566	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					364,990,523
6	01	03	1.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan								299,981,066	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					329,979,173
6	**01**	**03**	**1.02**		**Pendampingan dan Asistensi**								**2,662,377,290**						**2,928,725,020**
6	01	03	1.02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah								1,538,840,226	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1,692,724,249
6	01	03	1.02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi								198,334,026	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					218,167,429
6	01	03	1.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi								752,284,072	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					827,622,479
6	01	03	1.02	04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas								172,918,966	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					190,210,863
												TOTAL	**39,856,080,952**						**43,931,754,059**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Jambi
Tahun 2022

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
										Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
8					**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**													
8	**01**				**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**								**18,351,850,000**					**20,317,850,000**
8	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**10,563,350,000**					**11,679,350,000**
8	**01**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**285,000,000**					**308,000,000**
8	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah yang disusun	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	100	11 dokumen	12 Dokumen	80,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	80,000,000
8	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	persentase pelayanan administrasi perkantoran	Terlaksananya Komunikasi dan Capaian kinerja dan	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah yang disusun	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	100	1 Tahun	12 Dokumen	180,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase pelayanan administrasi	100	200,000,000
8	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Terlaksananya Tugas pokok perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah yang disusun	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	100	1 tahun	12 Dokumen	25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	28,000,000
8	**01**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**8,760,000,000**					**8,775,000,000**
8	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN Badan Kesbangpol Provinsi Jambi	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	100	1 tahun	100%	8,500,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	8,500,000,000
8	01	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Tersusunnya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	100	12 bulan	100%	260,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	275,000,000
8	**01**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**73,750,000**					**76,250,000**
8	01	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Tersedianya pakaian dinas harian pegawai	Tertatanya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	100	68 stel	100%	48,750,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	48,750,000
8	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Terpenuhinya kebutuhan pegawai mengikutui diklat/ kursus	Tertatanya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	100	1 tahun	100%	25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	27,500,000
8	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**473,000,000**					**505,400,000**
8	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Terpenuhinya komponen listrik kantor	Terlaksana Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	100	1 tahun	95%	27,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	30,000,000
8	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Terselenggaranya kegiatan rapat rapat	Terlaksana Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	100	1 tahun	95%	52,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	55,000,000
8	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksana Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	100	12 tahun	95%	55,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	60,000,000

8	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Terakomodirnya informasi secara akurat	Terlaksana Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	100	10 media cetak	95%	18,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	20,400,000
8	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Terdukungnya koordinasi kedalam dan luar daerah	Terlaksana Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	100	1 tahun	95%	320,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	340,000,000
8	**01**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**172,000,000**					**1,160,000,000**
8	01	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Terlaksana Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Terlaksana Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terakomodir Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	100	1 mobil 2 motor	100%	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	500,000,000
8	01	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Terlaksana Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Terlaksana Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terakomodir Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	100	1 mobil 2 motor	100%	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	450,000,000
8	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Terpenuhinya peralatan gedung kantor	Terakomodir Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	100	21 unit	100%	172,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	210,000,000
8	**01**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**207,500,000**					**217,500,000**
8	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Jumlah surat keluar masuk	Terlaksananya tertib administrasi surat keluar masuk	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	100	1 tahun	1 Tahun	20,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	20,500,000
8	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Tersedianya biaya komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	Terlaksananya tertib administrasi surat keluar masuk	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	100	1 tahun	1 Tahun	133,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	140,000,000
8	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Terpenuhinya kebutuhan ATK	Terlaksananya tertib administrasi surat keluar masuk	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	100	1 tahun	1 Tahun	54,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	57,000,000
8	**01**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**592,100,000**					**637,200,000**
8	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas operasional	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	100	1 tahun	100%	295,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	300,000,000
8	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Terlaksanaya Pemeliharaanya peralatan kerja	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	100	1 tahun	100%	87,100,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	87,200,000
8	01	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	100	12 bulan	100%	210,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	100	250,000,000

8	**01**	**02**			**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**								**1,055,000,000**						**1,200,000,000**
8	**01**	**02**	**1.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**								**1,055,000,000**						**1,200,000,000**
8	01	02	1.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Tersusunnya program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Tersusunya Teknis Program dan Pemantapan pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Terwujudnya penguatan ideologi pancasila dan karakter kabangsaan	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	76%	5 program kerja	100%	60,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tersusunnya program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	76%	200,000,000
8	01	02	1.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Tersusunnya program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Terlaksananya Penguatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan bagi tenaga pendidik dan tokoh Masyarakat	Terwujudnya penguatan ideologi pancasila dan karakter kabangsaan	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	76%	4 dokumen	100%	80,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tersusunnya program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	76%	100,000,000
8	01	02	1.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Tersusunnya program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Terlaksananya Penguatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan bagi tenaga pendidik dan tokoh Masyarakat	Terwujudnya penguatan ideologi pancasila dan karakter kabangsaan	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	76%	4 kab/kota	100%	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tersusunnya program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	76%	220,000,000
8	01	02	1.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Tersusunnya program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Meningkatnya pemahaman masyarakat ttg Ideologi Pancasila dan karakter bangsa	Terwujudnya penguatan ideologi pancasila dan karakter kabangsaan	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	76%	210 Peserta	100%	565,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tersusunnya program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	76%	320,000,000
8	01	02	1.01	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Tersusunnya program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Terlaksananya pembinaan FPK kab/kota yang sudah terbentuk di Provinsi Jambi.	Terwujudnya penguatan ideologi pancasila dan karakter kabangsaan	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	76%	9 kab/kota	100%	350,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tersusunnya program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	76%	360,000,000
8	**01**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**								**2,970,000,000**						**3,200,000,000**
8	**01**	**03**	**1.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik,**								**2,970,000,000**						**3,200,000,000**
8	01	03	1.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Tersusunnya program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Tersusunnya Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Tumbuhnya kesadaran berpolitik peserta sosialisasi dan dapat berpartisipasi aktif dlm Pemilu	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	77%	6 Program Kerja	100%	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tersusunnya program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	77%	200,000,000
8	01	03	1.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Tersusunnya program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Terlaksananya Dokumentasi Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui pendidikan Politik serta Budaya Politik	Tumbuhnya kesadaran berpolitik peserta sosialisasi dan dapat berpartisipasi aktif dlm Pemilu	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	77%	11 Kabupaten/Kota	100%	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tersusunnya program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	77%	0
8	01	03	1.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Tersusunnya program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Terrealisasinya Bantuan Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD Provinsi Jambi	Tumbuhnya kesadaran berpolitik peserta sosialisasi dan dapat berpartisipasi aktif dlm Pemilu	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	77%	11 Partai Politik	100%	2,500,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tersusunnya program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	77%	2,500,000,000

8	01	03	1.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Tersusunnya program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Terselenggaranya rakor bidang politik 2021 dan terpantaunya situasi politik daerah di Provinsi Jambi Jumlah pelaksanaan Rapat Koordinasi Bidang Politik	Tumbuhnya kesadaran berpolitik peserta sosialisasi dan dapat berpartisipasi aktif dlm Pemilu	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	77%	80 Peserta	100%	315,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tersusunnya program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	77%	335,000,000
8	01	03	1.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Tersusunnya program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Terlaksananya pemantauan dan sosialiasi Peratran Bantuan Parpol di Provinsi Jambi.	Tumbuhnya kesadaran berpolitik peserta sosialisasi dan dapat berpartisipasi aktif dlm Pemilu	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	77%	6 Kabupaten/Kota	100%	155,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tersusunnya program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	77%	165,000,000
8	**01**	**04**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**								**1,273,500,000**					**1,421,000,000**
8	**01**	**04**	**1.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**								**1,273,500,000**					**1,421,000,000**
8	01	04	1.01	01	Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Tersusunnya program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Terbentuknya Database pendataan Ormasy, Sengketa Ormas dan Ormas Asing di Daerah Provinsi Jambi	Meningkatnya pembinaan, pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	90%	168 Ormas	168 ormas	207,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tersusunnya program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	90%	250,000,000
8	01	04	1.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Tersusunnya program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Meningkatnya pembinaan, pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	90%	55 SKT	168 ormas	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tersusunnya program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	90%	0
8	01	04	1.01	03	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Tersusunnya program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Terjalinnya Kerja sama Pemerinta Kesbangpol dalam dengan Organisasi Kemasyarakatan di Provinsi Jambi	Meningkatnya pembinaan, pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	90%	60 Ormas	168 ormas	931,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tersusunnya program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	90%	1,000,000,000
8	01	04	1.01	04	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Tersusunnya program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Terlaksannya Koordinasi, Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing Di Daerah	Meningkatnya pembinaan, pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	90%	11 kab/kota	168 ormas	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tersusunnya program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	90%	0
8	01	04	1.01	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Tersusunnya program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Termonitornya eksistensi/keberadaan serta permasalahan ormas, Provinsi Jambi.	Meningkatnya pembinaan, pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	90%	53 Ormas	168 ormas	135,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tersusunnya program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	90%	171,000,000

8	**01**	**05**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**								**650,000,000**						**840,000,000**
8	**01**	**05**	**1.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**								**650,000,000**						**840,000,000**
8	01	05	1.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Terbentuknya Database Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura		8 Program Kerja		110,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					120,000,000
8	01	05	1.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Terbentuknya Database Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.		Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura		9 Dokumen		0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0
8	01	05	1.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi kerukunan umat beragama dan Penghayat Kepercayaan di Provinsi Jambi		Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura		12 Dokumen		482,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					500,000,000
8	01	05	1.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi antar Tim Pencegahan Narkotika, Forum Kerukuanan Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Provinsi Jambi		Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura		11 Kabupaten/Kota		58,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					70,000,000
8	01	05	1.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Terlaksana Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura		11 Kabupaten/Kota		0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					150,000,000
8	**01**	**06**			**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**								**1,840,000,000**						**1,977,500,000**
8	**01**	**06**	**1.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**								**1,840,000,000**						**1,977,500,000**
8	01	06	1.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Tersusunnya program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Terwujudnya peningkatan kewaspadaan dini, pemantauan orang asing/TKA/Lembaga asing serta penangan konflik didaerah	Tersusunnya dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	78%	6 Program Kerja	10 dokumen	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tersusunnya program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	78%	0
8	01	06	1.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Tersusunnya program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Tersusunnya Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Tersusunnya dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	78%	12 Dokumen	10 dokumen	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tersusunnya program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	78%	0

8	01	06	1.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Tersusunnya program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Terlaksananya Koordinasi Tim Terpadu Penanganan konflik sosial Daerah dan Pusat dalam melaksanakan Rencana Aksi Daerah, pemantauan orang Asing/TKA. Serta Koordinasi antar Pimpinan Daerah.	Tersusunnya dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	78%	11 Dokumen	10 dokumen	500,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tersusunnya program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	78%	520,000,000
8	01	06	1.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Tersusunnya program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Terkoordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Tersusunnya dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	78%	11 Kabupaten/Kota	10 dokumen	75,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tersusunnya program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	78%	82,500,000
8	01	06	1.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Tersusunnya program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Tersusunnya dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	78%	8 Kasus	10 dokumen	15,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tersusunnya program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	78%	25,000,000
8	01	06	1.01	06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Tersusunnya program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Terlaksananya Komunikasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Jambi	Tersusunnya dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	78%	96%	10 dokumen	1,250,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tersusunnya program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	78%	1,350,000,000
												TOTAL	**18,351,850,000**					**20,317,850,000**

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan rakyat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing. Penetapan indikator kinerja daerah merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kinerja tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Namun karena Provinsi Jambi belum menyusun RPJMD Tahun 2021-2026, sehingga pada penyusunan RKPD Tahun 2022 ini didasarkan pada RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2005-2025.

Indikator kinerja daerah adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program/kegiatan. Indikator kinerja program adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Pengukuran indikator hasil lebih utama menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan semua pihak. Indikator kinerja dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang kinerja di masa mendatang.

Indikator kinerja daerah pada dasarnya terlihat pada tingkat capaian sasaran dan tingkat efisiensi dan keefektifan pencapaian sasaran tersebut. Indikator kinerja yang diharapkan dapat memperlihatkan tingkat pencapaian kinerja pemerintah daerah. Oleh karena itu, penetapan indikator kinerja haruslah ditetapkan secara benar dan sesuai dengan kondisi nyata. Indikator kinerja pemerintah daerah tersebut digunakan untuk mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah. Untuk itu, diperlukan penetapan indikator kinerja daerah dalam bentuk penetapan indikator kinerja program pembangunan daerah sebagai indikator kinerja utama. Guna mengukur kinerja suatu organisasi, maka indikator kinerja program pembangunan daerah ditetapkan dengan memenuhi kriteria, berikut ini : a) Terkait

dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah, b) Menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan daerah yang diharapkan, c) Memfokuskan pada prioritas program pembangunan daerah, d) Terkait dengan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan daerah.

7.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama

Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2022 berdasarkan RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2006-2025, sebagai berikut :

Tabel 7-1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Provinsi Jambi Tahun 2022

Indikator	Target RPJPD	Target RKPD Tahun 2022
Pertumbuhan Ekonomi (%)	7,0 – 8,0	4,3
Persentase Sektor Sekunder (%)	19	18,19%
Nilai Investasi PMA (US$.Milyar)	2000	0,03
Total Factor Productivity (TFP)	2	1,0
Jalan Provinsi dalam kondisi mantap (%)	80	76,8
Rasio Elektrifikasi (%)	98	100
Indeks Pembangunan Manusia	75	72,57
Indeks Demokrasi Indonesia	73,2	71,0
Indeks Williamson	0,34	0,37
Indeks Gini	<0,34	0,321
Angka Kemiskinan	9,5	7,10
Skor PPH	82	88,5
IDG	67,01	69,75
Penurunan Emisi Karbon (%)	20	20

7.2 Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Dalam rangka pencapaian sasaran pokok RPJPD maka ditetapkan indikator kinerja pembangunan daerah Provinsi Jambi Tahun 2022 sebagaimana tergambar pada tabel di bawah ini.

Tabel 7-2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Provinsi Jambi terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2020)	Target Tahun 2022
1	2	3	4	5
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT				
1.1	Pertumbuhan PDRB	%	-0,46	4,30
1.2	Laju Inflasi	%	3,01	3,00
1.3	PDRB Perkapita ADHK 2010	Rp. juta	41,84	44,61
1.4	Indeks Gini	-	0,316	0,321
1.5	Indeks Ketimpangan Williamson	-	0,38	0,37
1.6	Persentase penduduk di atas garis kemiskinan	%	92,03	92,9
1.7	Rasio kesenjangan kemiskinan			
1.8	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	%	75	72,57
1.9	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		83,090	85,50
1.10	Persentase PAD terhadap pendapatan	%	32,59	36,22
1.11	Opini BPK		WTP	WTP
1.12	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	71,16	71,5
1.13	Angka kematian ibu (AKI)	Jumlah kematian	62	45
1.14	Angka kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup	Per 1000 kelahiran hidup	34	24
1.15	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	21,03	16
1.16	Prevalensi wasting pada balita	%		19
1.17	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	%	134	44
1.18	Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun	%	5,4*	8,9
1.19	Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 12-23 bulan	%	63,5	90
1.20	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	Kab/kota	7	9
1.21	Persentase usaha kecil obat tradisional (UKOT) yang memenuhi ketentuan perizinan	%	100	100
1.22	Persentase pedagang besar farmasi (PBF) yang memenuhi ketentuan perizinan	%	100	100
1.26	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,13	5,11
ASPEK DAYA SAING DAERAH				
2.1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	Rp.juta	27,523	29,487
2,2	Nilai Tukar Petani		107,604*	108,0
2.3	Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	%	25,36*	25,40
2.4	Produktivitas total daerah	Rp.juta	112,845	114,350
2.5	Rasio ekspor+impor terhadap PDRB (rasio keterbukaan ekonomi)		43,03	43,72

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2020)	Target Tahun 2022
1	2	3	4	5
2.6	Rasio ketergantungan		44,60	44,50
ASPEK PELAYANAN UMUM				
Fokus Pelayanan Urusan Wajib				
1	*Kesehatan*			
1.1	Persentase RS Rujukan Provinsi yang terakreditasi	%	100	100
1.2	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	%	100	100
1.3	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi Kejadian Luar Biasa (KLB)	%	100	100
1.4	Persentase puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	%	38,35	59
2	*Pendidikan*			
2.1	Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum	%	NA	59,20
2.2	Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum	%	NA	28,30
2.3	Persentase sekolah lanjutan tingkat atas/ SLTA negeri terakreditasi	%	98,87	99,63
2.4	Persentase satuan pendidikan khusus yang terakreditasi	%	100	100
2.5	Tingkat Partisipasi warga negara usia 16-18 tahun dalam pendidikan menengah	%	61,38	100
2.6	Tingkat Partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas dalam pendidikan khusus	%	NA	100
2.7	Jumlah SMK yang terevitalisasi	unit	2	50
3	*Sosial*			
3.1	Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	%	63,63	100
3.2	Peningkatan kapasitas bagi pekerja sosial masyarakat (PSM)	orang	707	750
3.3	peningkatan kapasitas bagi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK)	orang	141	170
3.4	layanan data dan pengaduan yang dimiliki	%	50	100
3.5	Penguatan Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	badan	3	5
3.6	bantuan Sosial Ekonomi Produktif bagi fakir miskin	KPM	NA	110
3.7	keluarga yang mendapat bantuan sosial bersyarat	KPM	10400	-

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2020)	Target Tahun 2022
1	2	3	4	5
3.8	Peningkatan kapasitas pendamping PKH	orang	595	-
3.9	Peningkatan kualitas pelayanan lembaga di bidang kesos	lembaga	3	5
3.10	Peningkatan kompetensi dan profesionalisme SDM kesos	orang	246	270
3.11	Jumlah Korban Bencana alam yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar	jiwa	652	655
3.12	Jumlah warga masyarakat rawan bencana alam yang mendapatkan kesiapsiagaan dan mitigasi	jiwa	9000	9000
3.13	jumlah kelompok masyarakat di lokasi rawan bencana yang mendapatkan pencegahan konflik sosial	kelompok	20	10
3.14	jumlah korban bencana sosial yang mendapatkan bantuan perlindungan sosial	orang	100000	800
3.15	Jumlah tenaga pelopor perdamaian yang siap ditugaskan	0rang	15	25
3.16	persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	NA	1,80
3.17	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	0,22	24
3.18	persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	0,35	0,36
3.19	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	NA	15,60
4	*Trantibum dan Perlindungan Masyarakat*			
4.1	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	88,8	100
4.2	Persentase PERDA dan PERKADA yang ditegakkan	%	59,1	100
4.3	Persentase penanganan pra bencana	%	79,0	100
4.4	Persentase pendampingan penanganan tanggap darurat bencana	%	80	100
4.5	Persentase pendampingan penanganan pasca bencana	%	80	100
5	*PU dan Penataan Ruang*			
5.1	Persentase luas sawah beririgasi	%	76,89	78
5.2	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	%	76,8	76,8

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2020)	Target Tahun 2022
1	2	3	4	5
5.3	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak	%	70,71	90,41
5.4	Jumlah rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan	Sambungan rumah (SR)	186.281	238.000
5.5	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak	%	78,06	90,41
5.6	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak	%	77,82	76
6	*Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman*			
6.1	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	0,13	100
6.2	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	NA	100
7	*Tenaga Kerja*			
7.1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	65,96	73,5
7.2	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,13	5,11
7.3	Persentase peningkatan kepesertaan BPJS naker	%	13,45	58,45
7.4	Persentase peningkatan kelembagaan ketenagakerjaan	%	5,00	24,50
7.5	Jumlah pekerja yang meningkat produktivitasnya	orang	605	985
7.6	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri	orang	1872	5000
7.7	Persentase perusahaan yang diawasi dari jumlah perusahaan dalam WLKP online	%	48,6	62
7.8	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS, bipartit, Struktur skala upah, dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan)	%	87,72	30
8	*Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*			
8.1	Persentase ARG pada belanja APBD	%	70,0	75,0
8.2	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	69,75	69,75
8.3	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	%	100	100
8.4	Indeks perlindungan anak (IPA)	%	66,26	67
9	Pangan			
9.1	Aspek Konsumsi dan Keamanan Pangan:			
	Skor PPH	-	84,81	88,5

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2020)	Target Tahun 2022
1	2	3	4	5
	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	%	85	85
	Persentase pangan segar asal hewan yang memenuhi syarat mutu dan keamanan pangan	%	85	85
9.2	Aspek Ketersediaan dan Kerawanan Pangan:			
	Persentase penduduk beresiko rawan pangan	%	9,5	9,5
	Desa Mandiri Pangan	Desa	21	17
	Persentase cadangan pangan pemerintah daerah	%	13,57	52,89
	Persentase daerah rentan rawan pangan	%	9,50	7,50
9.3	Aspek Distribusi dan stabilitas Harga pangan:			
	Pengembangan Distribusi Pangan	Kab/kota	11	11
	Stabilitas Harga Pangan:			
	Pangan Pokok	CV %	CV<6%	CV<10%
	Pangan Strategis	CV %	CV<58%	CV<30%
10	*Lingkungan Hidup*			
10.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	poin	70,87	72,07
10.2	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan	%	21,25	70%
11	*Administrasi Kependudukan dan Capil*			
11.1	Penyajian data kependudukan skala provinsi dalam 1 tahun	%	100	100
11.2	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun	%	94	97
11.3	Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	%	100	100
11.4	Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	%	100	100
11.5	Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraiannya dilaporkan	%	100	100
	Pemanfaatan data kependudukan	%	19	80
12	*Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*			
12.1	Persentase aparatur/pengurus kelembagaan yang memiliki kompetensi dalam tatakelola pemdes	%	90	90

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2020)	Target Tahun 2022
1	2	3	4	5
12.2	Persentase kabupaten/kota yang desanya telah ditata kelembagaan desanya sesuai standar	%	90	90
12.3	Persentase kabupaten/kota yang desanya telah ditata sistem pelayanan administrasi kelembagaan desa sesuai standar	%	90	90
12.4	Jumlah desa mandiri	Desa	102	115
12.5	Jumlah desa berkembang	Desa	1228	1240
12.6	Jumlah desa tertinggal	Desa	69	57
12.7	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) berkembang	Desa	80	100
13	*Pengendalian Penduduk dan KB*			
13.1	Indeks Pembangunan Keluarga (Bangga)	indeks	55,11	60,32
13.2	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific fertility rate/ASFR 15-19)	Kelahiran per 1000WUS 15-19 tahun	47,8	35,0
13.3	Angka kelahiran total (TFR 15-49 tahun)	Rata-rata anak per wanita	2,49	2,31
13.4	Angka prevalensi kontrasepsi modern (mCPR)	%	60,3	65,44
13.5	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terenuhi (unmet need)	%	14	10
14	*Perhubungan*			
14.1	On time Performance Layanan transportasi	%	80,2	85
14.2	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik sektor transportasi	nilai	57,14	75
14.3	Rasio kejadian kecelakaan transportasi per 1 juta keberangatan	Rasio	11,7	15,31
15	*Komunikasi dan Informasi*			
15.1	Persentase perangkat daerah yang saling terkoneksi di jaringan intra pemerintah daerah	%	60	80
15.2	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan infrastruktur pusat data pemerintah daerah (NOC,ruang server) dan/atau pusat data pemerintah pusat (pusat data nasional sementara)	%	NA	60
15.3	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online	%	68	100
15.4	Persentase layanan publik yang terintegrasi dengan sistem	%	70	100

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2020)	Target Tahun 2022
1	2	3	4	5
	penghubung layanan pemerintah daerah			
15.5	Persentase layanan administrasi pemerintahan yang diselenggarakan secara online	%	35	65
15.6	Persentase layanan administrasi pemerintahan yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah daerah	%	10	40
15.7	Persentase ASN pengelola infrastruktur TIK Pemerintah Daerah yang mengikuti pelatihan dan pembinaan	%	35	55
15.8	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah daerah, termasuk program nasional yang termasuk isu strategis pemerintah daerah yang didesiminasikan sesuai strategi komunikasi	%	40	60
15.9	Persentase narasi negatif, hoax, dan informasi misleading yang beredar di wilayah pemerintah daerah	%	5	50
15.10	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik pemerintah daerah	%	NA	60
15.11	Persentase informasi publik yang disediakan dan diumumkan oleh Dinas Provinsi dan Kab/kota sesuai amanat UU No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	%	70	86
16	*Koperasi dan UKM*			
16.1	Persentase koperasi yang berkualitas	%	44,38	45
16.2	Persentase Usaha kecil menjadi wirausaha	%	3,29	3,38
17	*Penanaman Modal*			
17.1	Realisasi PMDN	Rp. Trilyun	3,5	3,85
17.2	Realisasi PMA	US $. juta	400	440
18	*Kepemudaan dan Olahraga*			
18.1	Prestasi olahraga	Medali emas	13	14
18.2	Peringkat POPNAS dan PEPARNAS	Peringkat	8	8
18.3	Persentase kegiatan kepramukaan yang terfasilitasi	organisasi	100	100
18.4	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	0,000086	0,38

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2020)	Target Tahun 2022
1	2	3	4	5
18.5	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	0,000065	7,3
19	*Statistik*			
19.1	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan	%	40	60
19.2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	40	60
20	*Persandian*			
20.1	Jumlah lulusan peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan siber untuk K/L/D	Orang	1	2
20.2	Jumlah lulusan sertifikasi yang mengikuti peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) dan CSIRT	Orang	-	2
21	*Kebudayaan*			
21.1	Persentase penduduk usia 10 tahun keatas yang menonton secara langsung pertunjukan seni	%	NA	40
21.2	Persentase penduduk usia 10 tahun keatas yang mengunjungi peninggalan sejarah	%	7,8	17
21.3	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap penduduk usia 15 tahun keatas)	%	0,018	0,36
21.4	Persentase penduduk usa 10 tahun keatas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	%	0,037	1,65
21.5	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	%	1,02	17
21.6	Jumlah cagar budaya dan warisan budaya yang dilindungi	unit	0	4
21.7	Jumlah cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang ditetapkan	unit	2	7
21.8	Register cagar budaya (pendaftaran, pengisian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	unit	NA	15
21.9	Jumlah museum yang dikelola	unit	3	3
21.10	Jumlah cagarbudaya dan warisan budaya yang dilindungi	unit	NA	2
22	*Perpustakaan*			
22.1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	52,78	63,3
22.2	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Indeks	20,89	21,5

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2020)	Target Tahun 2022
1	2	3	4	5
23	*Kearsipan*			
23.1	Jumlah pengguna pelayanan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa	orang	267	350
23.2	Jumlah arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya yang dipreservasi	Arsip	15	250
	Fokus Urusan Pilihan			
1	*Kelautan dan Perikanan*			
1.1	kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (kumulatif)	Ha	0	10.687,49
1.2	Produksi perikanan budidaya	Ton	52.067,0	57.168,0
1.3	Produksi perikanan tangkap	Ton	53.833,0	54.480,9
1.4	Konsumsi ikan	kg/kap/thn	39,15	40,6
1.5	Penanganan kasus pelanggaran bidang kelautan dan perikanan	%	50	50
2	*Pariwisata*			
2.1	Nilai tambah ekonomi kreatif	Rp. juta	NA	13.000,-
2.2	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	%	1,07	1,19
2.3	Jumlah pergerakan wisatawan nusantara	orang	895.528	950.000
3	*Pertanian*			
3.1	Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan (padi dan jagung)	%	52,8	2,5
3.2	Persentase peningkatan produktivitas tanaman hortikultura (cabai dan bawang merah	%	1,2	2,0
3.3	Persentase peningkatan produktivitas perkebunan	%	29	2,15
3.4	Persentase peningkatan produktivitas peternakan	%	-	-
3.5	Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT	%	125	10
3.6	Produksi Padi	Ton GKG	386.413	416.223
3.7	Produksi Jagung	Ton pipil kering (PK)	66.627	73.012
3.8	Produksi Daging			
	sapi	Ribu ton	5,54	5,68
	kambing	Ribu ton	0,98	1,06
	Unggas	Ribu ton	52,09	70,08
4	*Kehutanan*			
4.1	Luas lahan kritis yang direhabilitasi	Ha	25	695
4.2	Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat melalui perhutanan sosial	Ha	250	26.793
5	*ESDM*			
5.1	Rasio Elektrifikasi	%	99,9	100
5.2	Porsi EBT dalam bauran energi	%	12,06	12,32

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2020)	Target Tahun 2022
1	2	3	4	5
5.3	Persentase desa teraliri listrik (rasio desa berlistrik)	%	99,49	100
6	*Perdagangan*			
6.1	Pertumbuhan nilai ekspor non migas	%	-21,96	6,0
6.2	Persentase penanganan pengaduan konsumen	%	82,5	90
6.3	Persentase barang beredar yang diawasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	%	12,09	40
6.4	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	%	NA	60,0
6.5	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	98	90
7	*Perindustrian*			
7.1	Persentase pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan non migas	%	0,47	3
7.2	Persentase kontribusi sektor industri pengolahan non migas terhadap PDRB	%	10,83	9,65
7.3	Nilai ekspor produk industri pengolahan non migas	USD Miliar	0,8	0,96
7.4	Jumlah tenaga kerja sektor industri pengolahan non migas	orang	NA	92.000
7.5	Nilai investasi sektor industri pengolahan non migas	Rp. Trilyun	NA	0,527
8	*Transmigrasi*			
8.1	Nilai rata-rata Indeks perkembangan kawasan transmigrasi yang direvitalisasi	indeks	NA	33,82
8.2	Indeks perkembangan kawasan transmigrasi yang direvitalisasi	indeks	Na	40,89
Fokus Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan				
1	*Perencanaan*			
1.1	Konsistensi program RPJMD kedalam RKPD	%	100	100
1.2	Konsistensi program RKPD dalam APBD	%	100	100
2	*Keuangan*			
2.2	Opini BPK	-	WTP	WTP
2.3	Persentase SilPA terhadap LRA	%	7,8	6,7
2.4	Persentase SiLPA terhadap APBD	%	7,52	6,5
2.5	Persentase belanja pendidikan	%	25,78	20
2.6	Persentase belanja kesehatan	%	9,29	10
3	*Kepegawaian dan Diklat*			
3.1	Persentase tingkat pendidikan aparatur Pemprov yang berpendidikan S1-S2-S3	%	77,13	78,00
4	*Penelitian dan Pengembangan*			
4.1	Persentase implementasi rencana kelitbangan	%	0	100
4.2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	%	12,5	50

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2020)	Target Tahun 2022
1	2	3	4	5
4.3	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi	%	0	10
5	*Pengawasan*			
5.1	Persentase tindak lanjut temuan	%	97	100
5.2	Jumlah temuan BPK	%		

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2022 merupakan RKPD Transisi dimana RPJMD periode sebelumnya yaitu 2016-2021 telah berakhir namun RPJMD periode Tahun 2021-2026 belum disusun dan ditetapkan karena kepala daerah definitif belum dilantik sehingga Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2022 merupakan formulasi kebijakan yang merupakan penjabaran dari RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2005 – 2025 dan mengacu pada arah kebijakan RKP, serta mengacu kepada RPJMN untuk keselarasan program dna kegiatan pembangunan daerah provinsi dengan pembangunan Nasional. RKPD Provinsi Jambi Tahun 2022 menjadi pedoman dasar bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, pendoman penyusunan KUA PPAS, Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022, evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, penyelarasan prioritas pembangunan dan sinergitas perencanaan pembangunan antar sektor, antar wilayah, dan antar tingkat pemerintah serta sebagai dasar penyusunan Rencana kerja Pemerintah DaerahKabupaten/ Kota di Provinsi Jambi.

Dukungan berupa pemberian masukan dan keterlibatan monitoring dan pengendalian program/kegiatan pembangunan tahun 2022 adalah tugas yang harus dilaksanakan bersama demi mencapai tujuan dan hasil pembangunan yang optimal, sehingga seluruh capaian hasil pembangunan akan dapat menghantarkan penduduk dan masyarakat Provinsi Jambi ke tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi.

Oleh karena itu, dukungan pendanaan juga menjadi salah satu penentu terhadap kelancaran seluruh pekerjaan dimasa depan. Lebih dari itu, dukungan politik dari Dewan Perwakilan Rakyat menjadi syarat mutlak pelaksanaan RKPD Tahun 2022. Walaupun tantangan pembangunan pada tahun 2022 diperkirakan cukup banyak terutama Pandemi Covid-19 yang belum menunjukan tanda-tanda akan berakhir,

namun percepatan pelaksanaan pembangunan harus dilaksanakan sedemikian rupa sehingga dapat diperoleh hasil nyata dari pembangunan itu sendiri.

GUBERNUR JAMBI,

dto

H. AL HARIS